PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2027





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2026

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, terarah, efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran tahunan Pembangunan Jangka Menengah yang harus disusun selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta responsif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan bupati sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang–Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi yang terintegrasi di Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Rakortekbang adalah rapat koordinasi teknis antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahun 2027 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
    a. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi pembangunan daerah;
    b. menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2027;
    c. menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
    d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian; dan
    e. mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di Daerah.

Pasal 3

(1) RKPD tahun 2027 ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
    b. prioritas pembangunan Daerah;
    c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
    d. arah kebijakan pembangunan nasional;
    e. pembangunan nasional;
    f. program strategis nasional; dan
    g. kesepakatan Rakortekbang tahun 2026.
(3) RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika:
    a. bab i : pendahuluan;
    b. bab ii : gambaran umum kondisi Daerah;
    c. bab iii : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    d. bab iv : sasaran dan Prioritas pembangunan Daerah;
    e. bab v : rencana kerja dan pendanaan;
    f. bab vi : kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan
    g. bab vii : penutup.

(4) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 5

RKPD tahun 2027 digunakan sebagai:

a. dasar penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027;
b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027;
c. bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun Anggaran 2027; dan
d. bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah hinga Triwulan II tahun 2027.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 Juli 2026
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 6 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ANDI RAHMAT SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026 NOMOR 26

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 dapat diselesaikan.

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang berisi Kerangka Ekonomi Daerah, Arah Prioritas Pembangunan, serta Rencana Kerja dan Pendanaan. Dokumen ini menjadi penjabaran tahun ketiga dari RPJMD 2025–2029, dengan penyusunan yang berlandaskan asas rasionalitas, menyeimbangkan tujuan pembangunan dengan kapasitas riil keuangan daerah.

Mengusung tema Pembangunan **"Akselerasi Pembangunan Ekonomi, Swasembada Pangan dan SDM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan"**, diwujudkan melalui program prioritas yang terukur dan berorientasi hasil *(result-oriented)*, dengan fokus pada peningkatan produktivitas sektor unggulan, pengembangan industri pengolahan, penguatan UMKM dan investasi, percepatan swasembada pangan melalui peningkatan produksi serta perbaikan distribusi, dan akselerasi kualitas SDM lewat pendidikan, kesehatan, keterampilan tenaga kerja, serta penurunan kemiskinan dan stunting, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Upaya ini sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan, membangun fondasi ekonomi berbasis keunggulan lokal, serta memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga menjamin pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, arah kebijakan daerah sejalan dengan misi nasional dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kualitas SDM, serta menjamin keberlanjutan pembangunan yang menjaga kelestarian lahan pertanian, efisiensi sumber daya alam, dan keberlangsungan kesejahteraan generasi mendatang

Rampungnya dokumen ini merupakan hasil dari sinergi perencanaan yang terintegrasi. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang, seluruh jajaran Perangkat Daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah mengawal proses perencanaan ini secara kritis dan konstruktif, guna memastikan setiap program yang diusulkan memiliki fondasi kelayakan dan dampak yang terukur.

Kami meyakini bahwa dokumen perencanaan yang berkualitas adalah dokumen yang dapat dilaksanakan menjadi aksi nyata dan membawa perubahan. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 ditetapkan sebagai instrumen tata kelola sekaligus pedoman kerja yang mengikat bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan sepanjang tahun. Mari bersama-sama mengawal implementasi rencana ini, menyingkirkan hambatan pelaksanaan, dan mengubah setiap target menjadi pencapaian nyata demi mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang secara berkelanjutan.

Sidenreng Rappang, 30 Juni 2026

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAHARUDDIN ALRIF

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH SIDENRENG RAPPANG NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAERAH TAHUN 2026

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR GRAFIK vi
DAFTAR TABEL xviii

BAB I PENDAHULUN	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	7
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	8
	1.4. Maksud dan Tujuan	11
	1.5. Sistimatika Penyusunan Dokumen RKPD	11
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	1
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	57
	2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah	92
	2.1.4. Aspek Pelayanan Umum	118
	2.1.5. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah	130
	2.1.6. Standar Pelayanan Minimal	232
	2.1.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Suistaninable Development Goals* (TPB/SDG's)	255
	2.2. Indikator Pembangunan Daerah	266
	2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025	266
	2.2.2. Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025	271
	2.2.3. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	295
	2.2.4. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	307
	2.2.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Suistainable Development Goals* (TPB/SDG's)	311
	2.3. Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai Dengan Tahun 2025	327
	2.3.1. Penjabaran Program RPJMD	327
	2.3.2. Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD	332
	2.3.3. Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD	334
	2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah	337
	2.4.1. Urusan Wajib	346
	2.4.2. Layanan Urusan Pilihan	351
	2.4.3. Penunjang Urusan	353

	2.5. Isu Strategis	354
	2.5.1. Isu Strategis Global	354
	2.5.2. Isu Strategis Nasional	357
	2.5.3. Isu Strategis Daerah	363
	2.6. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	380
	2.7. Inovasi Daerah	384
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	1
	3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah	2
	3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2027	21
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	25
	3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	26
	3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2028	28
	3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah	38
	3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	49
	3.2.5. Pendanaan Pembangunan Lainnya	53
	3.2.6. Perhitungan Kerangka Pendanaan	57
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	2
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027	15
	4.2.1. Prioritas, Sasaran dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2027	15
	4.2.2. Prioritas, Sasaran dan Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027	19
	4.2.3. Prioritas, Sasaran dan Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027	21
	4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2027	44
	4.4. Keselarasan Perencanaan Pembangunan	67
	4.4.1. Keselarasan dengan RPJMD	67
	4.4.2. Keselarasan dengan Provinsi dan Nasional	76
	4.5. Dukungan Daerah Terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN)	86
	4.6. Dukungan Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	102
	4.7. Kesepakatan Hasil Rakortekbang Tahun 2027	118
	4.8. *Highlight* Intervensi Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan	189
	4.9. Sinkronisasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	198
	4.10. Pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) dalam Dokumen Perencanaan	297
	4.11. Kebijakan Manajemen Resiko Pembangunan Daerah	252
	4.12. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang	253
	4.13. Aspirasi Masyarakat (Musrenbang)	258

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAN DAERAH	5.1. Kerjangka Pendanaan Tahun 2027	1
	5.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027	6
	5.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah	350
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	6.1. Indikator Makro Pembangunan	1
	6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	3
	6.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)	4
	6.3.1. Indikator Kinerja Kunci	11
	6.4. Indikator Utama Pembangunan (IUP)	21
	6.5. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)	27
	6.6. Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Suistainable Development Goals* (TPB/SGD's)	54
BAB VII PENUTUP	7.1. Kaidah Pelaksanaan	1
	7.2. Kesimpulan	2

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Darah (RKPD) 5
Gambar 1.2 Hubungan Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah..... 9
Gambar 1.3 Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 10

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Gambar 2.1 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang..... 10
Gambar 2.2 Ketersediaan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 23
Gambar 2.3 Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang 24
Gambar 2.4 Peta Proyeksi Kebutuhan di Kabupaten Sidenreng Rappang 24
Gambar 2.5 Status Daya Dukung Air Kabupaten Sidenreng Rappang 25
Gambar 2.6 Peta Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang..... 29
Gambar 2.7 Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang 29
Gambar 2.8 Peta Proyeksi Ketersediaan di Kabupaten Sidenreng Rappang..... 30
Gambar 2.9 Status D3TLH Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2043 30
Gambar 2.10 Proporsi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024..... 54

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Gambar 3.1 Target Pertumbuhan Provinsi 2027..... 25

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

Gambar 4.1 Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang..... 3
Gambar 4.2 Kerangka Pikir RKP 2027 16
Gambar 4.3 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027 17
Gambar 4.4 Keselarasan Tema RPJMD dengan Tema RKPD 72
Gambar 4.5 Keselarasan Tema Pemabangunan RKP, RKPD Provinsi Sulsel dan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang..... 85

DAFTAR GRAFIK

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Grafik 2.1 Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan Tahun 2023, 2033 dan 2043 19
Grafik 2.2 Ketersediaan Air Tahun 2023, Nilai Ambang Batas Tahun 2043 dan Kebutuhan Air Tahun 2043 Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan 21
Grafik 2.3 Daya Dukung Air 22
Grafik 2.4 Daya Dukung Pangan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2043 28
Grafik 2.5 Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024 31
Grafik 2.6 Daya Terpasang Listrik di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2025 31
Grafik 2.7 Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2025 37
Grafik 2.8 Akses Air Minum Aman Rumah Tangga Hasil SKAMRT Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 37
Grafik 2.9 Prevalensi of Undernourishment (PoU) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025 38
Grafik 2.10 Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025 39
Grafik 2.11 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025 39
Grafik 2.12 Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 40
Grafik 2.13 Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 41
Grafik 2.14 Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 .. 42
Grafik 2.15 Produksi Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2021-2025 42
Grafik 2.16 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 43
Grafik 2.17 Akses Sanitasi Aman Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 44
Grafik 2.18 Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 46
Grafik 2.19 Timbulan Sampah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 47
Grafik 2.20 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 .. 50
Grafik 2.21 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2024 51
Grafik 2.22 Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 52
Grafik 2.23 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 52
Grafik 2.24 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2025 53
Grafik 2.25 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 54

Grafik 2.26 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 55
Grafik 2.27 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2021–2025 57
Grafik 2.28 Pertumbuhan Ekonomi dan empat Lapangan Usaha Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025 59
Grafik 2.29 Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025 60
Grafik 2.30 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2021–2024 61
Grafik 2.31 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 62
Grafik 2.32 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 63
Grafik 2.33 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2025 63
Grafik 2.34 Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 64
Grafik 2.35 PDRB Per Kapita Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2021-2025 65
Grafik 2.36 PDRB Per Kapita Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 66
Grafik 2.37 TPT Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2021–2025 68
Grafik 2.38 Indeks Gini Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 70
Grafik 2.39 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 71
Grafik 2.40 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 73
Grafik 2.41 Angka Harapan Hidup Per Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 73
Grafik 2.42 Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 74
Grafik 2.43 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang 75
Grafik 2.44 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 76
Grafik 2.45 Prevalensi Stunting Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 77
Grafik 2.46 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis *(Treatment Coverage)* 77
Grafik 2.47 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis 78
Grafik 2.48 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 79
Grafik 2.49 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 80
Grafik 2.50 Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 81
Grafik 2.51 Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 81

Grafik 2.52 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 82
Grafik 2.53 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 82
Grafik 2.54 Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 83
Grafik 2.55 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dengan Kualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 84
Grafik 2.56 Penduduk Usia 15 Tahun keAtas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 85
Grafik 2.57 IPLM Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota Kawasan Parepare Tahun 2024 85
Grafik 2.58 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 86
Grafik 2.59 Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Dan Situs Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi 88
Grafik 2.60 Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 89
Grafik 2.61 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 90
Grafik 2.62 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 90
Grafik 2.63 Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 91
Grafik 2.64 Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif 92
Grafik 2.65 Rasio Ketergantungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 ... 93
Grafik 2.66 Piramida Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 94
Grafik 2.67 Pilar keterampilan IDSD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2025 95
Grafik 2.68 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 95
Grafik 2.69 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 96
Grafik 2.70 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 96
Grafik 2.71 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tujuan Tahun 2025 97
Grafik 2.72 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 98
Grafik 2.73 Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 99
Grafik 2.74 Perkembangan Rasio Kewirausahaan Daerah Ajatappareng Tahun 2017-2023 99
Grafik 2.75 Perkembangan Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025 100
Grafik 2.76 RoA BUMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2021-2025 101
Grafik 2.77 TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2021–2025 102

Grafik 2.78 TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 102
Grafik 2.79 TPAK Perempuan dan Laki-Laki Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2021–2025 103
Grafik 2.80 Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022–2025 103
Grafik 2.81 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 104
Grafik 2.82 Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 106
Grafik 2.83 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 107
Grafik 2.84 Jumlah Lokasi Blank Spot Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%) 107
Grafik 2.85 Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 109
Grafik 2.86 Nilai dan Volume Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025 109
Grafik 2.87 Kontribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap PDRB Provinsi Tahun 2021-2025..... 110
Grafik 2.88 Persentase Rumah Tangga Terhadap Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 110
Grafik 2.89 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitasi Rumah Tangga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 112
Grafik 2.90 Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 113
Grafik 2.91 Jumlah BumDes di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 114
Grafik 2.92 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 116
Grafik 2.93 Laju Inflasi Tahunan (Y-On-Y) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025. 117
Grafik 2.94 Pertumbuhan Investasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025. 118
Grafik 2.95 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025..... 118
Grafik 2.96 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 120
Grafik 2.97 Indeks Pelayanan Publik Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 121
Grafik 2.98 Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2025 122
Grafik 2.99 Nilai MCP KPK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 122
Grafik 2.100 Nilai MCP KPK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 123
Grafik 2.101 Indeks Maturitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 124
Grafik 2.102 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 125
Grafik 2.103 Persentase Tindak Pidana yang Diselesaikan dan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 125
Grafik 2.104 Angka Kriminalitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 126
Grafik 2.105 Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 126

Grafik 2.106 Perda Yang Merupakan Inisiatif DPRD di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 127
Grafik 2.107 Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 128
Grafik 2.108 Persentase Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 129
Grafik 2.109 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 130
Grafik 2.110 Angka Partisipasi Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) 131
Grafik 2.111 Angka Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (per 1000 penduduk usia sekolah) 132
Grafik 2.112 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 133
Grafik 2.113 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 134
Grafik 2.114 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang 135
Grafik 2.115 Persentase Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) Tahun 2021-2025 136
Grafik 2.116 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 137
Grafik 2.117 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%) 137
Grafik 2.118 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 138
Grafik 2.119 Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 139
Grafik 2.120 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 140
Grafik 2.121 Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 141
Grafik 2.122 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 141
Grafik 2.123 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%) 142
Grafik 2.124 Persentase Pemukiman yang Tertata di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 142
Grafik 2.125 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 143
Grafik 2.126 Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 143
Grafik 2.127 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 144
Grafik 2.128 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 145
Grafik 2.129 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%) 145

Grafik 2.130 Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 146
Grafik 2.131 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%) 147
Grafik 2.132 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%) 148
Grafik 2.133 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 150
Grafik 2.134 Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 151
Grafik 2.135 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 151
Grafik 2.136 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 153
Grafik 2.137 Persentase Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 155
Grafik 2.138 Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 156
Grafik 2.139 Besaran Pemeriksaan Perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 157
Grafik 2.140 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2025 158
Grafik 2.141 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 159
Grafik 2.142 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 159
Grafik 2.143 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 160
Grafik 2.144 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2021-2025 (%) . 161
Grafik 2.145 Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 161
Grafik 2.146 Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT Rumah Sakit di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 163
Grafik 2.147 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Kg) 165
Grafik 2.148 Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Kkal/Hari) 166
Grafik 2.149 Ketersediaan Protein di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Gram/Hari) 166
Grafik 2.150 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 168
Grafik 2.151 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 169

Grafik 2.152 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 170
Grafik 2.153 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 171
Grafik 2.154 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Adipura) dan Adiwiyata Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 172
Grafik 2.155 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 173
Grafik 2.156 Timbulan Sampah yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 173
Grafik 2.157 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 174
Grafik 2.158 Cakupan Area Pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 174
Grafik 2.159 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 175
Grafik 2.160 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 175
Grafik 2.161 Persentase Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 176
Grafik 2.162 Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2021-2025 177
Grafik 2.163 Total Fertility Rate Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%) .. 179
Grafik 2.164 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, NonFormal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan KependudukanKabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Kelompok) 180
Grafik 2.165 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 180
Grafik 2.166 Ratio Akseptor KB di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 181
Grafik 2.167 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%) 181
Grafik 2.168 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 182
Grafik 2.169 Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 182
Grafik 2.170 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 183
Grafik 2.171 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 184
Grafik 2.172 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 184
Grafik 2.173 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 185
Grafik 2.174 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 185
Grafik 2.175 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 186

Grafik 2.176 Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (IPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 186
Grafik 2.177 Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 187
Grafik 2.178 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 187
Grafik 2.179 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 188
Grafik 2.180 Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 188
Grafik 2.181 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Kendaraan) 189
Grafik 2.182 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 190
Grafik 2.183 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021 – 2025 191
Grafik 2.184 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 192
Grafik 2.185 Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 192
Grafik 2.186 Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 193
Grafik 2.187 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 194
Grafik 2.188 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%) 195
Grafik 2.189 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 196
Grafik 2.190 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 196
Grafik 2.191 Persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 197
Grafik 2.192 Persentase BPR/LKM Aktif di Kabupaten Sidenrang Rappang Tahun 2021-2025 198
Grafik 2.193 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 199
Grafik 2.194 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025 (Miliar Rp) 200
Grafik 2.195 Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 200
Grafik 2.196 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 201
Grafik 2.197 Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 201
Grafik 2.198 Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 202

Grafik 2.199 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 202
Grafik 2.200 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 203
Grafik 2.201 Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 203
Grafik 2.202 Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Orang) 204
Grafik 2.203 Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Ada/Tidak Ada) 204
Grafik 2.204 Buku Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2021-2025 205
Grafik 2.205 Buku PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 205
Grafik 2.206 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 206
Grafik 2.207 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 207
Grafik 2.208 Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 208
Grafik 2.209 Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 208
Grafik 2.210 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 209
Grafik 2.211 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 209
Grafik 2.212 Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 210
Grafik 2.213 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Orang) 211
Grafik 2.214 Jumlah Koleksi Judul Buku di Perputakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 211
Grafik 2.215 Jumlah Tenaga Perpustakaan, Pustakawan di Perputakaan Kabupaten Rappang Tahun 2021-2025 212
Grafik 2.216 Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2021 – 2025 213
Grafik 2.217 Jumlah Pengelola Arsip yang Mengikuti Peningkatan SDM di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 213
Grafik 2.218 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 214
Grafik 2.219 Kontribusi Kelompok Nelayan terhadap Total Tangkapan Ikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 214
Grafik 2.220 Jumlah Kunjungan Wistawan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Orang) 215
Grafik 2.221 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (Ton/Ha) 216
Grafik 2.222 Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%) 217
Grafik 2.223 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 218
Grafik 2.224 Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 218

Grafik 2.225 Ketersediaan Dokumen RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Ada/Tidak Ada) 219
Grafik 2.226 Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Ada/Tidak Ada) 219
Grafik 2.227 Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Ada/Tidak Ada) 220
Grafik 2.228 Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Ada/Tidak Ada) 221
Grafik 2.229 Persentase SILPA Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 223
Grafik 2.230 Persentase Belanja Pendidikan (20%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 224
Grafik 2.231 Persentase Belanja Kesehatan (10%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 225
Grafik 2.232 Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 226
Grafik 2.233 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (JP/Tahun) 226
Grafik 2.234 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 227
Grafik 2.235 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 228
Grafik 2.236 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 228
Grafik 2.237 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 229
Grafik 2.238 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 229
Grafik 2.239 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 232
Grafik 2.240 Jumlah Temuan BPK di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025. 232
Grafik 2.241 Jumlah Warga Negara yang Berpartisipasi Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 233
Grafik 2.242 Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2025 234
Grafik 2.243 Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SMP Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2025 234
Grafik 2.244 Jumlah Warga Negara Yang Berpartisipasi Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023-2025 236
Grafik 2.245 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 236
Grafik 2.246 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%) 237
Grafik 2.247 Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2021-2025 ... 238
Grafik 2.248 Jumlah Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2021-2025 239
Grafik 2.249 Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2021-2025 239

Grafik 2.250 Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2021-2025. 240
Grafik 2.251 Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2021-2025 241
Grafik 2.252 Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2021-2025 241
Grafik 2.253 Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2021-2025 242
Grafik 2.254 Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2021-2025 243
Grafik 2.255 Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Meilitus 2021-2025 243
Grafik 2.256 Jumlah Warga Negara Penderita Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2021-2025 244
Grafik 2.257 Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan 245
Grafik 2.258 Jumlah Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 2021-2025 246
Grafik 2.259 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2021-2025..... 246
Grafik 2.260 Jumlah Warga Negara Korban Bencana Alam Yang Memperoleh Rumah Layak Huni Tahun 2021-2025 247
Grafik 2.261 Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Tahun 2021-2025 248
Grafik 2.262 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada Tahun 2021-2025 248
Grafik 2.263 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2021-2025 249
Grafik 2.264 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2021-2025 250
Grafik 2.265 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2021-2025 251
Grafik 2.266 Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2021-2025 251
Grafik 2.267 Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Tahun 2021-2025..... 252
Grafik 2.268 Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Tahun 2021-2025..... 253
Grafik 2.269 Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Tahun 2021-2025..... 253
Grafik 2.270 Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti Tahun 2021-2025..... 254
Grafik 2.271 Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tahun 2021-2025 255
Grafik 2.272 Konsistensi Program Pada Dokumen Perencanaan 328
Grafik 2.273 Program Yang Tidak Sama Pada Dokumen Perencanaan Tahun 2025..... 328
Grafik 2.274 Konsistensi Sub Kegiatan Rkpd Tahun 2025..... 334

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026 dan Target Tahun 2027 (Persen) 12

Grafik 3.2 PDRB Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026 dan Target Tahun 2027 (Persen) 14

Grafik 3.3 Inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026 dan Target Tahun 2027 (Persen) 16

Grafik 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026 dan Target Tahun 2027 (Persen) 17

Grafik 3.5 Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026 dan Target Tahun 2027 (Persen) 18

Grafik 3.6 Rasio Gini Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026 dan Target Tahun 2027 (Persen) 20

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026 dan Target Tahun 2027 (Persen) 12

DAFTAR TABEL

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2025 1
Tabel 2.2 Ibukota Kecamatan dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten Tahun 2025 2
Tabel 2.3 Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 4
Tabel 2.4 Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 6
Tabel 2.5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang 8
Tabel 2.6 Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Sidenreng Rappang 13
Tabel 2.7 Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025 16
Tabel 2.8 Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang 17
Tabel 2.9 Kelas Kemampuan Lahan di Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang 18
Tabel 2.10 Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan Tahun 2023, 2033 dan 2043 (M3) 19
Tabel 2.11 Ketersediaan Air Tahun 2023, Nilai Ambang Batas Tahun 2043 dan Kebutuhan Air Tahun 2043 Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan 20
Tabel 2.12 Daya Dukung Air Kabupaten Sidenreng Rappang 22
Tabel 2.13 Daya Dukung Air Kabupaten Sidenreng Rappang 23
Tabel 2.14 Distribusi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dan Ketersediaan Pangan Pada Tahun 2023 (KKal) 26
Tabel 2.15 Perkembangan Ketersediaan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023-2043 (KKal) 27
Tabel 2.16 Daya Dukung Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang (KKal) 28
Tabel 2.17 Sumber Air Baku di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 32
Tabel 2.18 Kapasitas Air Baku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 33
Tabel 2.19 Kapasitas Air Baku di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 (m3/tahun) 34
Tabel 2.20 Air Minum Perpipaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 35
Tabel 2.21 Air Minum Perpipaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 35
Tabel 2.22 Perkembangan Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2025 43
Tabel 2.23 Persentase Akses Sanitasi Layak dan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 45
Tabel 2.24 Jumlah Rumah tangga yang terlayani peneyedotan Lumpur Tinja 45
Tabel 2.25 Jumlah Rumah tangga yang Terlayani SPALD-T 45
Tabel 2.26 Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 48
Tabel 2.27 Luas dan Sebaran Lokasi Resiko Banjir di Kabupaten Sidenreng Rappang . 49

Tabel 2.28 Penyebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dan 2025 56
Tabel 2.29 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2030..... 56
Tabel 2.30 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dan Daerah Ajatappareng Tahun 2024-2025..... 58
Tabel 2.31 Kontribusi Lapangan Usaha Utama terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 58
Tabel 2.32 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Daerah Ajatappareng..... 62
Tabel 2.33 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2024-2025 Kabupaten Sidenreng Rappang dan wilayah Ajatappareng 67
Tabel 2.34 TPT Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota Wilayah Ajatappareng..... 68
Tabel 2.35 Perbandingan Jumlah Pengangguran Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 69
Tabel 2.36 Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2021–2025..... 69
Tabel 2.37 Perbandingan Perubahan Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Daerah Ajatappareng Tahun 2025..... 70
Tabel 2.38 Perbandingan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 72
Tabel 2.39 Indeks Ekonomi Hijau dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023..... 105
Tabel 2.40 Indeks Ekonomi Biru dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023..... 105
Tabel 2.41 Capaian Akses Rumah Layak Huni Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 111
Tabel 2.42 Indeks Infrastruktur Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 113
Tabel 2.43 Presentase Penanganan Terhadap Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 – 2025..... 115
Tabel 2.44 Persentase Masyarakat yang Terlibat Dalam Kegiatan Keagamaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 – 2025..... 116
Tabel 2.45 Indeks Reformasi Hukum dan variabel pengukuran 2023-2024..... 119
Tabel 2.46 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2025 120
Tabel 2.47 Nilai SAKIP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2025..... 124
Tabel 2.48 Nilai Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wilayah Lainnya Tahun 2025 129
Tabel 2.49 Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Tahun 2021 – 2025 156
Tabel 2.50 Rasio KDRT Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025..... 162
Tabel 2.51 Data Populasi Ternak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 166
Tabel 2.52 Data Produksi Peternakan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023..... 167
Tabel 2.53 Presentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran 177
Tabel 2.54 Capaian Target TPB/SDG's Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 – 2025..... 258

Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 267
Tabel 2.56 Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 272
Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2024-2025 296
Tabel 2.58 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024-2025 300
Tabel 2.59 Capaian Indikator SPM Tahun 2023-2025 308
Tabel 2.60 Capaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Suistainable Development Goals (TPB/SDG's) 313
Tabel 2.61 Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD 326
Tabel 2.62 Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD 330
Tabel 2.63 Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD 333
Tabel 2.64 Keterkaitan Hasil Evaluasi RKPD 2025 Dengan Permasalahan Dan Isu Strategis 374
Tabel 2.65 Rekapitulasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 378
Tabel 2.66 Rekapitulasi Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berdasarkan Urusan 379
Tabel 2.67 Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 384

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023-2025 (persen) 12
Tabel 3.2 Target Indikator Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 21
Tabel 3.3 Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2027 Sisi Pengeluaran (Persen) 22
Tabel 3.4 Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2027 Sisi Lapangan Usaha (Persen) 23
Tabel 3.5 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2028 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 33
Tabel 3.6 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2028 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 46
Tabel 3.7 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2028 52
Tabel 3.8 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026-2028 . 57
Tabel 3.9 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026-2028 60

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029 4
Tabel 4.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target Kinerja RPJMD Tahun 2025-2029 6
Tabel 4.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target RKPD Tahun 2027 11
Tabel 4.4 17 Program Prioritas Nasional dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat 18
Tabel 4.5 Prioritas Pembangunan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta Indikator dan Target Tahun 2027 24
Tabel 4.6 Keterkaitan Permaslaahan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah 28

Tabel 4.7	Hubungan antara Prioritas Pembangunan dengan Tujuan dan Sasaran serta Program Perangkat Daerah	30
Tabel 4.8	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2027	50
Tabel 4.9	Keterkaitan Permasalahan, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2027	61
Tabel 4.10	Sinkronisasi RPJMD dengan RKPD Tahun 2027	69
Tabel 4.11	Tema RKPD 2027 bersumber dari Arah Kebijakan RPJMD	73
Tabel 4.12	Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah	75
Tabel 4.13	Keselarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah	77
Tabel 4.14	Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dengan Prioritas Nasional Asta Cita	79
Tabel 4.15	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	81
Tabel 4.16	Keselarasan Sasaran Utama Pembangunan Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027	82
Tabel 4.17	Sinkronisasi Target Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027	84
Tabel 4.18	Dukungan Program dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2027 yang mendukung Program Strategis Nasional (ProSN)	87
Tabel 4.19	Dukungan RKPD 2027 Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU)	103
Tabel 4.20	Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2027 Berdasarkan Bidang Urusan Dengan RKPD Tahun 2027	119
Tabel 4.21	Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tematik Tahun 2026 Dengan RKPD Tahun 2027	159
Tabel 4.22	Dukungan Daerah Terhadap Highlight Intervensi Wilayah Sulawesi	190
Tabel 4.23	Dukungan RKPD Tahun 2027 terhadap Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	249
Tabel 4.24	Matriks keterpaduan pendekatan THIS	249
Tabel 4.25	Rekapitulasi Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2027	254
Tabel 4.26	Rekapitulasi Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan Urusan	255
Tabel 4.27	Keselarasan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Pembangunan	256
Tabel 4.28	Rekapitulasi Usulan Aspirasi Masyarakat (Musrenbang) Tahun 2027	259
Tabel 4.29	Keselarasan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Pembangunan	259

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tabel 5.1	Kerangka Pendanaan Tahun 2027 dan Proyeksi Tahun 2028	2
Tabel 5.2	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2027	8
Tabel 5.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Program Unggulan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027	530

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel 6.1	Penetapan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027	2
Tabel 6.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027	4

Tabel 6.3 Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 5
Tabel 6.4 Penetapan target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 11
Tabel 6.5 Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 22
Tabel 6.6 Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 28
Tabel 6.7 Kebutuhan Barang dan Jasa Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 32
Tabel 6.8 Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistainable Development Goals (TGG/SDGs) 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 yang diwarnai dengan perencanaan jangka panjang yang tertuang pada RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045. Penahapan RPJMD pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yaitu **"Akselerasi Pembangunan Ekonomi, Swasembada Pangan dan SDM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan"**, merupakan tahapan strategis dalam pelaksanaan RPJMD yang diarahkan untuk memperkokoh fondasi transformasi ekonomi daerah berbasis potensi unggulan, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Tahapan pembangunan ini menjadi fase konsolidasi hasil pembangunan pada periode sebelumnya sekaligus percepatan pencapaian sasaran RPJMD melalui penguatan sektor-sektor prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, Kabupaten Sidenreng Rappang menegaskan perannya sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kontribusi strategis terhadap penyediaan pangan, khususnya komoditas padi, jagung, dan komoditas pertanian unggulan lainnya. Posisi strategis tersebut menjadi modal utama dalam mendukung agenda nasional menuju swasembada pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan regional. Oleh karena itu, arah pembangunan Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian, efisiensi sistem produksi, penguatan infrastruktur pertanian, hilirisasi komoditas unggulan, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan daya saing produk pertanian melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi.

Berdasarkan capaian indikator makro pembangunan tahun 2025, Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan perkembangan yang baik. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, kualitas pembangunan manusia mengalami peningkatan, tingkat kemiskinan cenderung menurun meskipun tingkat pengangguran mengalami sedikit peningkatan, serta stabilitas ekonomi daerah masih dapat dipertahankan. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi kontributor utama terhadap perekonomian daerah, didukung oleh sektor perdagangan, jasa, dan

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Meskipun demikian, capaian tersebut masih memerlukan penguatan agar mampu menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.

Analisis terhadap kondisi aktual menunjukkan bahwa terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam mendukung tema pembangunan Tahun 2027. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, perdagangan, maupun penggunaan nonpertanian lainnya. Kondisi ini berpotensi mengurangi luas lahan baku sawah, menurunkan kapasitas produksi pangan, serta mengancam keberlanjutan fungsi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lumbung pangan di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, optimalisasi lahan potensial, serta peningkatan produktivitas melalui intensifikasi pertanian berbasis teknologi.

Di sisi lain, fluktuasi harga komoditas pertanian masih menjadi tantangan yang mempengaruhi stabilitas pendapatan petani dan daya beli masyarakat. Ketidakstabilan harga dipengaruhi oleh dinamika produksi, perubahan iklim, biaya input pertanian, distribusi, serta kondisi pasar domestik maupun global. Untuk mengurangi dampak tersebut, diperlukan penguatan sistem agribisnis melalui peningkatan kapasitas pascapanen, penyediaan fasilitas penyimpanan, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, penguatan kemitraan usaha, perluasan akses pasar, serta pengembangan sistem informasi harga berbasis digital sehingga petani memperoleh informasi pasar secara lebih cepat dan akurat.

Selain tantangan pada sektor pertanian, pengembangan sumber daya manusia masih menghadapi kesenjangan kompetensi yang perlu menjadi perhatian utama. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan tren yang meningkat, kualitas SDM belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan transformasi ekonomi, khususnya dalam penguasaan teknologi pertanian modern, mekanisasi pertanian, pemanfaatan *Internet of Things* (IoT), pertanian presisi (*precision agriculture*), penggunaan data dan informasi berbasis digital, serta adaptasi terhadap inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Kondisi ini menyebabkan adopsi inovasi di tingkat petani belum berlangsung secara optimal, terutama pada petani skala kecil dan generasi petani yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi, pembiayaan, maupun pendampingan.

Kesenjangan kompetensi juga terlihat pada pelaku UMKM yang masih menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengembangan usaha. Sebagian besar UMKM masih terkonsentrasi pada pemasaran konvensional, memiliki kapasitas yang terbatas dalam penggunaan *platform* perdagangan elektronik, pemasaran digital, sistem pembayaran elekronik, pencatatan keuangan digital, maupun pemanfaatan teknologi untuk

meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas akses pasar. Kondisi tersebut mengakibatkan daya saing UMKM belum berkembang secara optimal di tengah meningkatnya transformasi ekonomi digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan sumber daya manusia pada Tahun 2027 diarahkan tidak hanya pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelayanan kesehatan, tetapi juga pada penguatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Prioritas pembangunan SDM meliputi peningkatan kapasitas petani melalui pendidikan dan pelatihan pertanian modern, penguatan penyuluhan berbasis teknologi, pengembangan kewirausahaan, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri, serta percepatan digitalisasi UMKM melalui pendampingan, akses pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan demikian, tema RKPD Tahun 2027 mencerminkan integrasi antara penguatan ekonomi daerah, percepatan swasembada pangan, dan pembangunan SDM sebagai tiga pilar utama pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang. Penguatan sektor pertanian didukung oleh perlindungan lahan produktif, stabilisasi sistem agribisnis, pemanfaatan teknologi modern, serta peningkatan kapasitas SDM yang adaptif terhadap perkembangan digital. Melalui strategi tersebut, Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai tahapan RPJMD.

Rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 mengacu dan memperhatikan: (1) Target Indikator Makro Tahun 2027 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029; (2) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029; (3) RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032; (4) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 Triwulan I; (5) Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027; (6) Rancangan Kerangka Ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2027; serta (7) Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

Metode pelaksanaan penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027, yaitu:

1. Kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui implementasi pendekatan *pentahelix*, meliputi unsur perguruan tinggi dan peneliti yang berperan sebagai konseptor dengan melakukan identifikasi potensi daerah dan keterampilan sumber daya manusia yang mendukung peningkatan potensi pembangunan daerah. *Akademisi*, dalam hal

ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, serta teori-teori terbaru dan relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. *Business*, meliputi unsur pengusaha/swasta yang berperan sebagai *enabler*. Sektor swasta merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Sektor swasta dapat berperan sebagai *enabler* yang menghadirkan infrastruktur teknologi dan modal. Dengan adanya perubahan ke era digital maka dapat membantu pengembangan pembangunan daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. *Community*, meliputi unsur masyarakat yang berperan sebagai akselerator dan penerima manfaat. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, seluruh lapisan masyarakat dilibatkan, tidak terkecuali kaum wanita, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, komunitas juga berperan sebagai akselerator seiring dengan modal sosial yang dimiliki untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Komunitas juga bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam keseluruhan proses dan memperlancar adopsi proses ekonomi. Selain itu, komunitas juga memiliki peran untuk mempromosikan produk atau layanan yang dimiliki suatu wilayah. *Government* atau pemerintah berperan sebagai regulator yang memiliki peran dalam menetapkan kebijakan dan peraturan serta melakukan pengawasan. Dalam hal ini, melibatkan semua jenis kegiatan, seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, undang-undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi, dan kemitraan publik-swasta. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengoordinasikan para pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pengembangan potensi suatu wilayah. *Media* bertindak sebagai *expander* yang berperan untuk mendukung publikasi dan promosi serta membuat *brand image*. Dalam menjalankan perannya media juga berfungsi sebagai perantara diseminasi informasi diantara pemangku kepentingan dan konsep pentahelix;

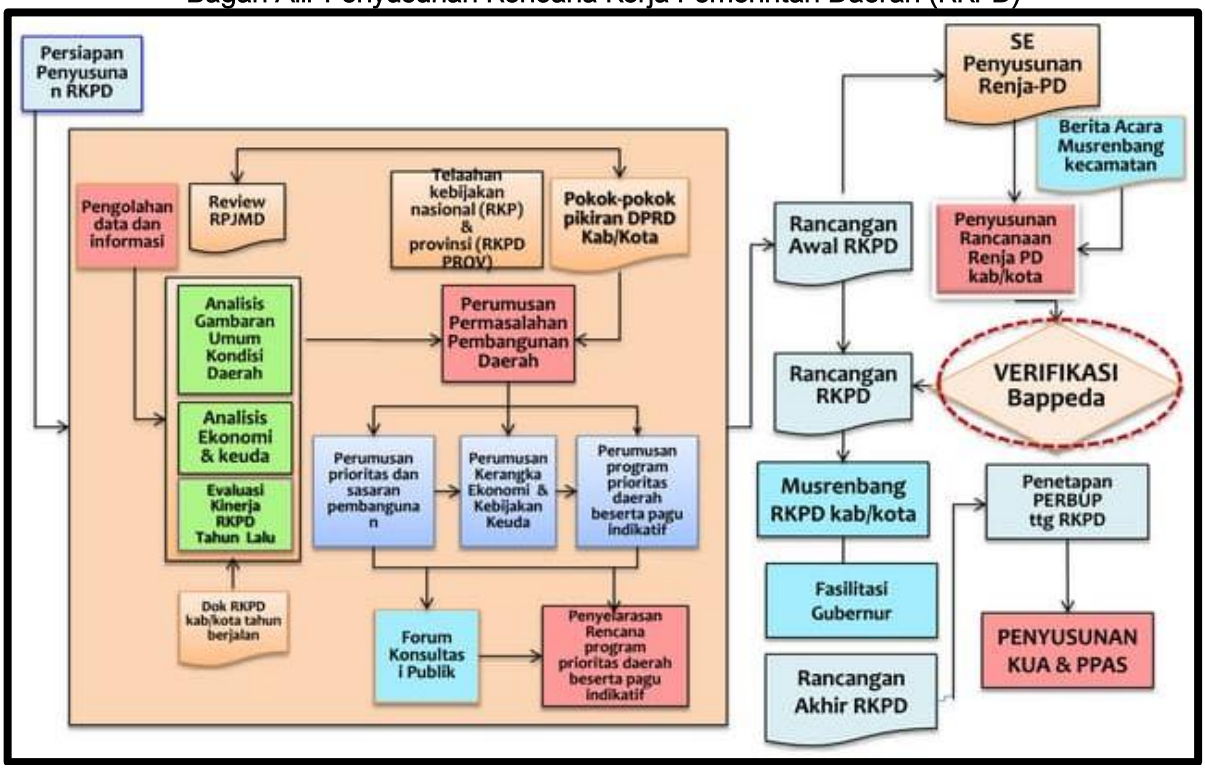
2. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antara lain pendanaan kabupaten (APBD kabupaten), APBD Provinsi, APBN, obligasi daerah, dana masyarakat/umat, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk membiayai belanja setiap perangkat daerah; serta melibatkan secara aktif *stakeholder* di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial dalam penjabaran prioritas pembangunan daerah;
3. Penerapan *Dynamic Governance* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Pendekatan spasial dan a-spasial dalam wilayah pengembangan;
5. Sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Satu Data Pembangunan Sidenreng Rappang;



6. Digitalisasi sistem perencanaan meliputi sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (3), bahwa penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis *e-planning*.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan menerapkan konsep holistik yang komprehensif dari hulu sampai hilir pada setiap proses penyusunannya, sebagaimana Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas, tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027 diawali dengan *Kick Off Meeting* perencanaan tahun 2027 yang dilaksanakan pada Bulan Desember tahun 2025, dilanjutkan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027 yang bertujuan untuk menjaring masukan dan saran penyempurnaan yang berasal dari berbagai *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta rencana anggarannya dengan tetap dapat menjaring masukan dan saran penyempurnaan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2027. Rangkaian ini kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten sebagai forum pertemuan antar pihak-pihak yang secara

langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dalam rangka membahas dokumen rancangan RKPD Tahun 2027. Pasca pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, Provinsi dan Nasional maka dilanjutkan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2027 untuk penajaman dan penetapan daftar rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Sidenreng Rappang. Rancangan akhir RKPD Tahun 2027 yang telah disusun dilanjutkan dengan proses penetapan RKPD Tahun 2027 melalui Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 berpedoman pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 yaitu **"Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera"**. Visi tersebut diuraikan menjadi:

Maju merujuk pada upaya untuk memajukan pembangunan daerah melalui berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Sidenreng Rappang baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

Sejahtera menggambarkan cita-cita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang secara menyeluruh melalui terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan kesehatan serta terciptanya rasa aman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak. Pencapaian kesejahteraan masyarakat diimplementasikan dengan prinsip keberlanjutan yang memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan, serta mempertahankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi.

Untuk mencapai Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2029, maka ditetapkan 7 (tujuh) Misi pembangunan jangka menengah, sebagai berikut:

1. Membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif;
3. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua;
4. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

5. Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradat, dan religius;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital; dan
7. Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

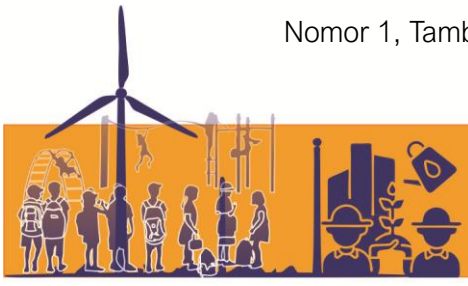
Dokumen RKPD Tahun 2027 disusun dengan lebih implementatif melalui proses teknokratik, proses *bottom-up*, proses politik dan proses *top-down* yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Adapun capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 yaitu Pertumbuhan Ekonomi 7,71 persen; PDRB Perkapita 65,15 Juta Rupiah; Tingkat Kemiskinan 4,91 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 3,36 persen; Gini Rasio 0,325 poin; Indeks Pembangunan Manusia 75,49; dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 3,04 persen (2024).

Secara umum, dokumen RKPD tahun 2027 mempunyai nilai penting, antara lain: merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029; acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027; dan menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 merujuk pada Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 7153);



4. Undang–Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
5. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 91.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan

masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lebih lanjut berdasarkan jangka waktu, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yakni 20 (dua puluh) tahun, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun. Adapun berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

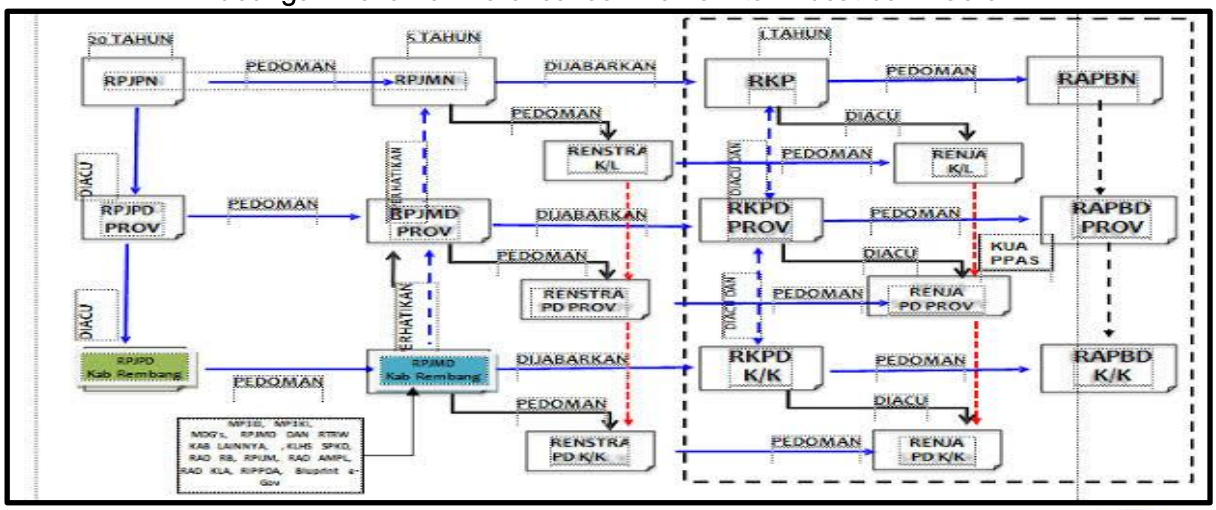
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2027.

Sejalan dengan perencanaan di tingkat pusat tersebut, maka dokumen perencanaan daerah meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027; dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027.

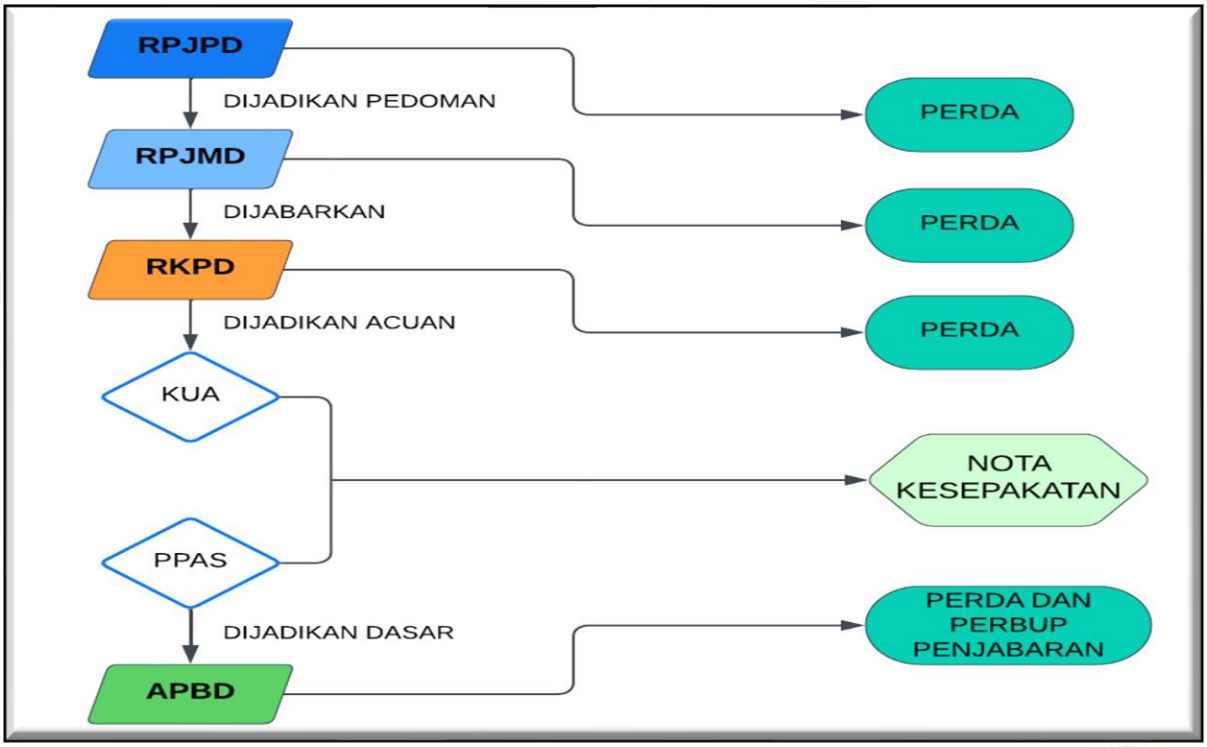
Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan hubungan dokumen perencanaan pusat dan dokumen perencanaan daerah sebagaimana Gambar 1.2

Gambar 1.2
Hubungan Dokumen Perencanaan Pemerintah Pusat dan Daerah


20 TAHUN
RPJPN
PEDOMAN
5 TAHUN
RPJMN
DIJABARKAN
1 TAHUN
RKP
PEDOMAN
RAPBN
PEDOMAN
RENSTRA K/L
DIACU
PEDOMAN
RENJA K/L
DIACU
RPJPD PROV
PEDOMAN
RPJMD PROV
DIJABARKAN
RKPD PROV
PEDOMAN
RAPBD PROV
PEDOMAN
RENSTRA PD PROV
DIACU
KUA PPAS
PEDOMAN
RENJA PD PROV
RPJPD Kab Rembang
PEDOMAN
RPJMD Kab Rembang
DIJABARKAN
RKPD K/K
PEDOMAN
RAPBD K/K
PEDOMAN
RENSTRA PD K/K
DIACU
PEDOMAN
RENJA PD K/K
DIACU
DIACU
DIACU

Berdasarkan gambar di atas, RPJMN dan RPJMD merupakan 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menengah yang saling berhubungan dan bersinergi. RPJMD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RKPD kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan program pembangunan daerah yang berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032. RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap perangkat daerah untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2027 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Selain itu, RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 memiliki kaitan yang erat dengan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). KLHS digunakan sebagai dasar untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah, termasuk RKPD, mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. KLHS membantu mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari rencana pembangunan dan merekomendasikan langkah-langkah mitigasi, sehingga RKPD dapat dirancang dengan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Adapun hubungan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1.3
Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Diolah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahun 2027 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, dengan tujuan:

1. Pedoman perumusan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027;
2. Evaluasi pelaksanaan capaian di tahun 2025 dan sebagai acuan rencana di tahun 2027;
3. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027.

Adapun tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2027 Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2027;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan pengendalian;
5. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi



daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menguraikan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun sebelumnya dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Pangkajene yang berjarak sekitar 183 Km dari Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, ke arah utara. Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di antara $3^0$43' – $4^0$09' Lintang Selatan dan $119^0$41' – $120^0$10' Bujur Timur. Secara geografis, letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

1. Wilayah Administrasi

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas 1.935,326 Km^2 atau 4,27 persen dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas 11 kecamatan dan 106 desa/kelurahan (38 kelurahan dan 68 desa). Selama 15 tahun terakhir, hanya terjadi penambahan satu desa di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu di Kecamatan Dua Pitue. Wilayah terluas adalah Kecamatan Pitu Riase yang mencapai 844,77 Km^2 atau hampir 45 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Wilayah tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang yang hanya memiliki luas 34,02 Km^2 atau kurang dari dua persen dari total luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan
dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Proporsi (%)	Jumlah Desa/Kelurahan	
				Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	8,17	3	7
2	Tellu Limpoe	10.320	5,48	6	3
3	Watang Pulu	15.131	8,03	5	5
4	Baranti	5.389	2,86	5	4
5	Panca Rijang	3.402	1,81	4	4
6	Kulo	7.500	3,98	-	6
7	Maritengngae	6.590	3,50	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	6,41	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	11,17	2	10

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Proporsi (%)	Jumlah Desa/Kelurahan	
				Kelurahan	Desa
10	Dua Pitue	6.999	3,72	2	8
11	Pitu Riase	84.477	44,86	1	11
Jumlah		188.325	100,00	38	68

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2026

Tabel 2.2
Ibukota Kecamatan dan Jarak Ke Ibukota Kabupaten Tahun 2025

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (Km)
1	Panca Lautang	Bilokka	15
2	Tellu Limpoe	Amparita	8
3	Watang Pulu	Uluale	7
4	Baranti	Baranti	15
5	Panca Rijang	Rappang	10
6	Kulo	Kulo	18
7	Maritengngae	Pangkajene	0
8	Watang Sidenreng	Empagae	5,4
9	Pitu Riawa	Otting	20
10	Dua Pitue	Tanru Tedong	25
11	Pitu Riase	Barukku	50

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2026

2. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi yakni wilayah daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), dan dataran terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, berbukit, dan terakhir adalah rawa danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae, dan Dua Pitue, kondisi topografi 100 persen tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu Limpoe, Watang Pulu, dan Pitu Riase didominasi tanah bergunung.

Secara umum, kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh dataran rendah, selebihnya adalah perbukitan dan pegunungan (dataran tinggi). Secara rinci, kondisi kelerengan dapat dibagi ke dalam empat kategori, yaitu:

- Kondisi kelerengan 0-2% meliputi 42,80 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha. Kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan. Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 persen dari total luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%).
- Kondisi kelerengan 2-15% meliputi 4,6 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau

sekitar 8.790 Ha. Kelerengan ini hanya tersebar pada lima kecamatan, yang dimanfaatkan untuk persawahan, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan. Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha (26,23%), Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80%), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%), dan Tellu Limpoe seluas 715 Ha (8,13%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng, dan Dua pitue tidak terdapat jenis kelerengan ini.

- Kondisi kelerengan 15-40% meliputi 16,68 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31.414 Ha. Kelerengan ini hanya tersebar pada lima kecamatan, yang dimanfaatkan untuk perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan. Kecamatan yang mempunyai lereng 15-40% paling luas adalah Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha (11,37%), Pitu Riawa seluas 3.456 Ha (11,00%), Tellu Limpoe seluas 2.244 Ha (7,14%), dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, Maritengngae, Watang Sidenreng, dan Dua Pitue tidak terdapat jenis kelerengan ini.
- Kondisi kelerengan >40% meliputi 34,31 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Kelerengan ini merupakan wilayah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. Kelerengan ini hanya tersebar pada lima kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, serta sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis). Kecamatan yang mempunyai lereng di atas 40 persen paling luas adalah Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu Limpoe seluas 2.524 Ha (3,91 %), Panca Lautang seluas 2.138 Ha (3,31%), dan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04 %).

a. Kondisi Tanah dan Batuan

Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Bogor Tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas alluvial, regosol, grumusol, mediteran dan pedsolit. Jenis tanah alluvial meliputi 21,08% dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana yang paling luas terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110 Ha dan yang paling sempit pada Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu: Kecamatan Kulo dan Watang Pulu. Bentuk fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur pasir halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan.

Jenis tanah regosol seluas 19,74% atau 37.174 Ha dari luas wilayah Kabupaten

Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Watang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari luas areal yang berjenis tanah regusol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan Panca Rijang seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu Riawa, Dua Pitue dan Pitu Riase. Jenis tanah Regusol kadang–kadang terdiri dari lapisan cadas terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak mudah kena erosi. Tanah regusol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah grumosol seluas 1,20% atau 2.251 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana yang terluas di Kecamatan Maritengngae yaitu 1.334 Ha atau sekitar 50,37% dari luas areal yang berjenis tanah grumusol, kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha (35,94%) dan Kecamatan Tellu Limpoe seluas 308 Ha atau sekitar 13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Jenis tanah mediteran seluas 11.416 Ha atau 6,06% dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana yang terluas di Kecamatan Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 3.116 Ha atau sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu Limpoe seluas 1.677 Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa seluas 1.502 Ha (13,69%), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis tanah mediteran tersebut terdiri dari komplek mediteran coklat kekelabuan dan regosol komplek mediteran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah podsolit seluas 94.891 Ha atau 50,39% dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas 76.934 Ha (81,07%) dari luas areal yang berjenis tanah podsolit, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70%), Kecamatan Watang Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14%) dan Kecamatan Panca Rijang seluas 2.141 Ha (2,26%), sedangkan kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Tabel 2.3
Jenis Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

No	Kecamatan	Jenis Tanah
1	Panca Lautang	▪ Kompleks Mediteran Coklat regosal dan Retosol ▪ Regosol Coklat ▪ Alluvial Kekelabuan ▪ Alluvial Hidromorf
2	Tellu Limpoe	▪ Alluvial Kelabu Tua ▪ Alluvial Hidromorf ▪ Alluvial Colkat Kelabu ▪ Regosol Coklat

No	Kecamatan	Jenis Tanah
3	Watang Pulu	▪ Regosol Coklat Kelabu ▪ Grumesol Kelabu tua ▪ Regosol Coklat
4	Baranti	▪ Alluvial Kelabu Tua ▪ Regosol Kekelabuan ▪ Alluvial Hidromorf
5	Panca Rijang	▪ Alluvial Kelabu ▪ Padsolit Coklat ▪ Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & Regosol
6	Kulo	▪ Regosol coklat kekelabuan ▪ Podsolik merah kekuningan
7	Maritengngae	▪ Alluvial Kelabu Tua ▪ Alluvial Coklat Kelabu ▪ Grumesol Kelabu Tua ▪ Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & regosol ▪ Regosol Coklat Kelabuan
8	Watang Sidenreng	▪ Regosol Coklat Kelabuan ▪ Podsolik merah kekuningan ▪ Alluvial Coklat Kelabu
9	Pitu Riawa	▪ Alluvial Coklat Kelabu ▪ Alluvial Hidromorf
10	Dua Pitue	▪ Alluvial coklat kelabu ▪ Alluvial Hirdomorf ▪ Padsolit Merah kekuningan ▪ Kompleks padsolit coklat Kekuningan & regosol
11	Pitu Riase	▪ Kompleks Mediteran Coklat kekelabuan & regusol ▪ Podsolik coklat ▪ Padsolit Merah kekuningan

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2026

Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan tahun 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah Alluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 persen dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gn Api besifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha.

b. Kondisi Sungai

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 sungai yang melintasi berbagai kecamatan. Sungai terpanjang tercatat ada tiga sungai, yaitu Sungai Bilokka dengan panjang sekitar

20.000 meter, disusul Sungai Bila dengan panjang sekitar 15.100 meter dan Sungai Rappang dengan panjang sekitar 15.000 meter. Kecamatan Watang Pulu dan Dua Pitue memiliki jumlah aliran sungai terbanyak, yaitu delapan aliran sungai. Terdapat enam aliran sungai di Kecamatan Panca Lautang dengan panjang total 33.750 meter, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang total 18.000 meter, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang total 39.000 meter, Kecamatan Baranti dengan panjang total 15.000 meter, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang total 19.550 meter, Kecamatan Kulo dengan panjang total 25.700 meter, Kecamatan Maritengngae dengan panjang total 5.000 meter, Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang total 7.500 meter, dan Kecamatan Dua Pitue dengan panjang total 68.460 meter, yang merupakan kecamatan dengan aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.4
Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (M)	Lebar (M)	Kedalaman (M)
1.	Panca Lautang	- Bilokka	20.000	22	9
		- Lokabatu	2.000	6	3
		- Pape	2.000	2	3
		- Cakkarella	1.500	2	2
		- Bengkulu	5.000	6	2.5
		- Sessanriu	3.250	13	2.5
2.	Tellu Limpoe	- La Toling	5.000	5	2
		- Pemantingan	7.000	7	2.5
		- Watang Lowa	6.000	3	1.5
3.	Watang Pulu	- BangkaE	5.000	10	8
		- CakkaloloE	5.000	10	5
		- AlekarajaE	11.000	8	3
		- Lompengan	5.000	8	2.5
		- DataE	3.000	6	2.5
		- Pabbaresseng	4.000	5	2.5
		- Polojiwa	3.000	4	2.5
		- Batu Pute	3.000	3	3
4.	Baranti	- Rappang	15.000	30	5
5.	Panca Rijang	- Rappang	10.000	25	8
		- Poka	2.500	5	7
		- Tellang	2.550	5	7
		- Taccipi	4.500	6	5
6.	Kulo	- Pangkiri	4.200	10	8
		- Kulo	7.500	7	5
		- AnrelliE	2.000	7	6
		- Anyuara	4.200	8	5
		- Cinra Angin	7.500	8	5
7.	Maritengngae	- Takkalasi	5.000	8	3

No	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (M)	Lebar (M)	Kedalaman (M)
8.	Dua Pitue	- Bila	15.100	70	4
		- Baramasih	11.750	50	5
		- Betao	10.085	50	3
		- Tanru Tedong	4.250	100	5
		- Kalempang	6.375	80	4
		- Lancirang	8.150	10	3
		- Samallangi	2.500	8	2
		- Loka	10.250	25	3
9.	Pitu Riawa	- AnabannaE	5.000	7	3
		- Banjara	2.500	6	2.5

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2026

3. Iklim

Berdasarkan klasifikasi Shcmidt dan Fergusson, terdapat tiga macam iklim di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe Pertama adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah dimana jumlah bulan kering rata-rata kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Bulan basah adalah jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm. Bulan kering pada umumnya terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus, sedangkan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Wilayah yang termasuk iklim ini terletak sebelah utara bagian timur mendekati Pegunungan Lantimojong di Kecamatan Pitu Riase.

Tipe Kedua adalah iklim tipe D, artinya bersifat sedang dimana jumlah bulan kering rata-rata 3-4 bulan dan berlangsung pada Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Daerah yang termasuk iklim ini terletak di sebelah timur dan bagian tengah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, Maritengngae, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian barat) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian barat sebelah utara).

Tipe Ketiga adalah iklim tipe E, artinya yang bersifat agak kering, dimana jumlah bulan kering rata-rata 4-6 bulan. Bulan-bulan kering terjadi pada Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah barat dan sebagian sebelah selatan Kabupaten Sidenreng Rappang. Kecamatan yang termasuk di dalam iklim ini adalah Kecamatan Baranti, Tellu Limpoe, Panca Lautang, sebagian Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, Maritengngae, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian timur) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian barat sebelah timur).

Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat tujuh (7) Station Penakar Hujan (SPH) untuk menakar curah hujan antara lain di Tanru Tedong, Rappang, Amparita, Bilokka, Baranti, Lawawoi, Pangkajene BPP Sereang. Penyebaran curah hujan yang berbeda menyebabkan pola penyebaran tipe iklim yang berbeda pula. Pada daerah yang mempunyai iklim C, rata-rata curah hujan setiap tahun lebih dari 2.500 mm dan hari hujan bulanan lebih dari 10 hari. Curah hujan tertinggi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama dijumpai pada Bulan Desember, Januari,

Februari dan kemudian menurun mencapai nilai minimun sekitar bulan Agustus dan September.

Pada daerah yang mempunyai iklim D, jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.000 mm dengan jumlah curah hujan bulanan berkisar 8-16 hari. Pada daerah yang mempunyai iklim tipe E, jumlah curah hujan dapat bervariasi. Curah hujan tersebut mencapai kurang dari 1.600 mm dan jumlah curah hujan berkisar antara 5-8 hari setiap bulan.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas Sawah, Pemukiman, Kebun Campur, Ladang, Kolam/Tambak/Rawa, Danau/Sungai, Perkebunan Rakyat, Hutan, Lapangan Olahraga, Semak/Belukar.

Penggunaan lahan didominasi oleh Kawasan Hutan dengan luas 82.669,05 Ha atau mencapai 43,89% dari total luas wilayah Kabupaten sebesar 188.325 Ha, dan Persawahan dengan luas 38.989,58 Ha atau sebesar 20,70% dari luas kabupaten. Khusus untuk kawasan permukiman dengan luas 5.989,95 (3,18%) dengan luas permukiman yang paling besar berada di Kecamatan Maritengngae dengan luas 1.154,57 Ha dan yang paling kecil Kecamatan Baranti dengan luas 282,58 Ha. Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Peruntukan Kawasan Budidaya	Luas lahan (Ha)
1	Sawah	38.989,58
2	Permukiman	5.989,95
3	Kebun Campur	22.403,32
4	Ladang/Tegalan	2.487,02
5	Kolam/Tambak/Rawa	265,10
6	Danau/Sungai	5.867,86
7	Perkebunan Rakyat	9.323,65
8	Hutan	82.669,05
9	Lapangan Olahraga	5,83
10	Semak/Belukar	20.323,64
Total		188.325,00

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), sistem pusat-pusat permukiman (termasuk

didalamnya permukiman skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat luas. Selain itu perlu dipertimbangkan kondisi pasar atau trend yang lagi berkembang di masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri penataan ruang banyak dibentuk oleh kondisi pasar.

Secara fungsional pola pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan yang dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan jenis kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan ke depan pada kawasan pusat-pusat kegiatan.

Penetapan sistem perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti 1) Kebijakan pengembangan sistem perkotaan nasional dan regional, 2) kondisi eksisting sistem perkotaan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ada saat ini, 3) sistem jaringan prasarana wilayah yang ada yang melayani pergerakan antar intra dan inter wilayah, dan 4) interaksi fungsional antar pusat-pusat kegiatan dengan daerah pelayanannya.

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

   Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Sidenreng Rappang di arahkan di Kecamatan Maritengngae.

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

   Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Sidenreng Rappang Meliputi:

   1 PPK Baranti di Kecamatan Baranti
   2 PPK Tanru Tedong di Kecamatan Duapitue
   3 PPK Kulo di Kecamatan Kulo
   4 PPK Bilokka di Kecamatan Panca Lautang
   5 PPK Rappang di Kecamatan Panca Rijang
   6 PPK Barukku di Kecamatan Pitu Riase

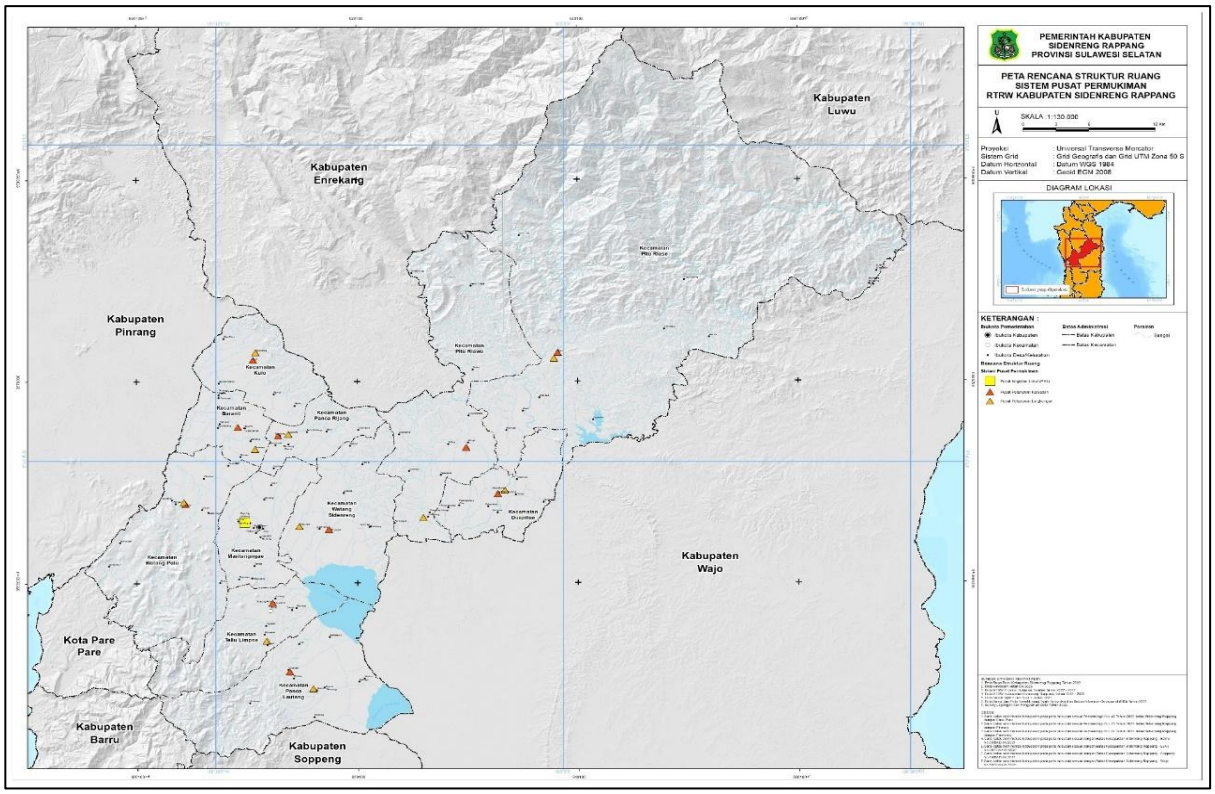
7 PPK Otting di Kecamatan Pitu Riawa

8 PPK Amparita di Kecamatan Tellu Limpoe

9 PPK Lawawoi di Kecamatan Watang Pulu

10 PPK Empagae di Kecamatan Watang Sidenreng.

Gambar 2.1
Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: Data diolah Tim, 2026

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Sidenreng Rappang di arahkan di :

1. Kecamatan Baranti
2. Kecamatan Duapitue
3. Kecamatan Kulo
4. Kecamatan Panca Lautang
5. Kecamatan Panca Rijang
6. Kecamatan Pitu Riase
7. Kecamatan Pitu Riawa
8. Kecamatan Tellu Limpoe
9. Kecamatan Watang Pulu
10. Kecamatan Watang Sidenreng

4. Kawasan Peruntukan Pertanian

a. Kawasan Tanaman Pangan (P-1)

Kawasan tanaman pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan data dokumen RTRW Tahun 2024-2044 totalnya tercatat seluas **71.635,29 Ha.**

b. Kawasan Holtikultura (P-2)

Kawasan Holtukultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Kawasan Holtikultura di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan data dokumen RTRW Tahun 2024-2044 totalnya tercatat seluas **7.894,34 Ha.**

c. Kawasan Perkebunan (P-3)

Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan tidak lagi sekedar memberikan bantuan untuk perbaikan tanaman melalui kegiatan perluasan, peremajaan dan intensifikasi. Namun untuk sebuah tujuan yang jelas yakni pengembangan kawasan perkebunan terpadu yang bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kawasan Perkebunan di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan data dokumen RTRW Tahun 2024-2044 totalnya tercatat seluas **17.059,07 Ha.**

d. Kawasan Peternakan (P-4)

Kawasan peternakan adalah Kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir. Kawasan peternakan pada saat ini relatif semakin sulit dijumpai di tingkat kabupaten, karena kompetisi penggunaan lahan semakin tinggi dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas. Di lain pihak, kebutuhan dan konsumsi daging semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan usia serta kesejahteraan penduduk yang semakin baik. Pada saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 2 juta ha luas lahan padang penggembalaan dan hijauan makan ternak sebagai sumber kawasan budidaya peternakan yang dapat dijadikan dan ditingkatkan menjadi kawasan peruntukan peternakan.

Klasifikasi Kawasan Peruntukan Perternakan dapat dibedakan berdasarkan: (1) Komoditas yang terdiri atas kawasan sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam buras, itik, babi dan ayam ras petelur dan pedaging. (2) Sistem Usaha Peternakan yang

meliputi sistem ekstensifikasi (kawasan pastura/padang penggembalaan) dan Sistem Intensifikasi (kawasan usaha peternakan).

Kawasan pastura terdiri atas kawasan pengembalaan umum dan kawasan rand. Kawasan ranci sebagai kawasan peternakan yang sama dengan kawasan umum hanya pada umumnya dimiliki oleh sebuah badan usaha, sudah memanfaatkan teknologi sistem pembenian pakan yang balk dan pemagaran kawasan. Sistem intensifikasi (kawasan usaha peternakan). Sistem intensifikasi adalah kawasari peternakan dalam suatu hamparan lahan dan umumnya meliputi satu jenis ternak yang dimiliki oleh perorangan, kelompok atau badan usaha peternakan (KUNAK) dan yang sudah mengarah kepada indüstrialisasi disebut kawasan industni peternakan (KINAK). Kawasan Peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan data dokumen RTRW Tahun 2024-2044 totalnya tercatat seluas **7.150,47 Ha.**

5. Kawasan Perikanan
   a. Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2)

      Kawasan perikanan budi daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada. Kawasan Perikanan budi daya di Kabupaten Sidenreng Rappang di rencanakan di Kecamatan Maritengngae seluas **1.287 Ha**.

6. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)
   a. Kawasan Pertambangan Mineral (MN)
      1) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT)

      Kawasan pertambangan batuan adalah Bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan. Kawasan Perikanan budi daya di Kabupaten Sidenreng Rappang di rencanakan di Kecamatan Maritengngae seluas **107 Ha**.

      2) Kawasan Pembangkitan tenaga listrik (PTL)

      Kawasan Pembangkitan tenaga listrik adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik. Kawasan pembangkitan tenaga listrik di Kabupaten Sidenreng Rappang di rencanakan di Kecamatan Watang Pulu seluas **355,20 Ha.**

7. Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

   Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk lebih jelasnya terkait kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Kecamatan Baranti	9,56
2	Kecamatan Duapitue	4,27
3	Kecamatan Kulo	0,46
4	Kecamatan Maritengngae	11,06
5	Kecamatan Panca Lautang	18,65
6	Kecamatan Panca Rijang	5,69
7	Kecamatan Pitu Riase	3,54
8	Kecamatan Pitu Riawa	29,00
9	Kecamatan Tellu Limpoe	3,67
10	Kecamatan Watang Pulu	3,71
11	Kecamatan Watang Sidenreng	20,31
Total		109,92

Sumber : Dokumen RTRW, Tahun 2022

8. Kawasan Pariwisata (W)

   Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. Pentingnya sektor pariwisata dalam perekonomian suatu daerah harus disertai dengan upaya agar sektor ini tetap tumbuh dan berkembang, dimana dalam hal ini tidak terlepas dari peran penting sektor transportasi. Transportasi memiliki peran yang penting dalam pariwisata, karena membawa wisatawan dari tempat asal menuju tempat wisata, dan membawa kembali wisatawan ke tempat asal mereka. Kawasan Pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan data dokumen RTRW Tahun 2025-2044 totalnya tercatat seluas **65.496 Ha.**

Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki beberapa kawasan strategis yang tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut. Untuk lebih jelasnya terkait penetapan kawasan strategis di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana pada pembahasan berikut:

1. **Penetapan Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi**

   Penetapan kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi Penetapan kawasan strategis ini dimaksudkan untuk mengakomodir segala potensi sumber daya alam dan buatan di masing-masing kawasan yang dapat dijadikan sebagai sektor unggulan dan mampu mendukung serta mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan secara keseluruhan sehingga tidak ada kawasan yang mengalami pertumbuhan ekonomi lambat atau stagnan (tertinggal). Kawasan strategis ini bertujuan sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kabupaten. Dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, penetapan kawasan strategis dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi direncanakan:

a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa Kawasan pengembangan peternakan Sidenreng Rappang-Pinrang-Enrekang;
b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Agribisnis Terpadu Duapitue, Pitu Riawa dan Pitu Riase.
c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Agribisnis Terpadu Maritengngae, Watang Sidenreng, Panca Rijang, Baranti, Kulo dan Watang Pulu.
d. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Cepat Tumbuh Baranti
e. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Pariwisata Buatan Watang Pulu.

2. Penetapan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial-Budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya Penetapan kawasan strategis ini dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman budaya sebagai hasil karya cipta budaya sosial masyarakat lokal yang menunjukkan jati diri/penanda budaya kabupaten sekaligus untuk menghargai peninggalan budaya yang diwariskan oleh peradaban masa lalu. Kawasan ini meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten dengan sudut kepentingan sosial budaya daerah. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Pariwisata Budaya Maritengngae, Panca Rijang dan Watang Pulu.

3. Penetapan Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan Strategis Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, Penetapan kawasan strategis ini dimaksudkan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem flora/fauna sebagai potensi keanekaragaman hayati, perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro dan tata guna air yang mampu mencegah bencana alam akibat kerusakan lingkungan. Kawasan tersebut meliputi kawasan yang memiliki nilai strategis kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis ini diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan aksi masyarakat akan kualitas lingkungan hidup.

Penetapan kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu :

a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Danau Sidenreng di Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Watang Sidenreng.
b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Panca Lautang.
c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Watang Pulu.
d. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berupa Kawasan Tertinggal Pitu Riase di Kecamatan Pitu Riase.

4. **Penetapan Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi**

   Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang berupa Kawasan Eksploitasi Panas Bumi Tellu Limpoe di Kecamatan Tellu Limpoe.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuan nya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Dalam menentukan daya dukung kawasan perlu melibatkan banyak aspek, karena sangat bersifat kompleks yang melibatkan banyak faktor dalam menggambarkan interaksi antara kegiatan dengan ekosistem. Misalnya intensitas penyebaran dalam ruang dan waktu serta tujuan. Dengan kata lain dalam penentuan daya dukung suatu kawasan harus mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Pengertian daya dukung dan daya tampung lingkungan menurut UU 23/1997. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Pada laporan ini, kajian daya dukung Kabupaten Sidenreng Rappang akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sementara untuk jasa ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air di wilayah Kabupaten dengan pendekatan jasa ekosistem. Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat per akaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa Unit.

Tabel 2.7
Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan
di Kabupaten Sidenreng Rappang, 2025

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi(hanya Psd)
4	IV	Pt, semua jenis pengembalaan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis pengembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semuajenis hutan
6	VI	Pgsd, Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan.
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber: Klingbiel dan Montgomery (1961, diringkas) dan FenTon (2014)
Keterangan: Psi: Pertanian sangat intensif; Pi: Pertanian intensif; Psd: Pertanian intensif sedang; Pt: Pertanian terbatas; Pgi: Pengembalaan intensif; Pgsd: Pengembalaan sedang; Pgt: Pengembalaan terbatas.

Penjelasan kelas kemampuan lahan sebagai berikut: Kelas I, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki resiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan responsive terhadap pemupukan.

Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat mengurangi pilihan penggunaan nya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi Tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran – saluran air.

Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharaan nya. Faktor – faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktifitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki.

Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan / jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap erosi, drainase nya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah.

Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu basah / tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan.

Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/ telah mengalami erosi yang sangat berat/ mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen.

Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen.

Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/ batuan singkapan/ tanah nda pasir pantai. Karena itu tanah pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi).

Tabel 2.8
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

Kelas	Luas (Ha)	Presentase (%)
II	15.464,31	7,96
IV	29.700,45	15,29
V	60.625,94	31,21
VI	88.451,08	45,54

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasilnya sebesar 45,54% luas lahan kelas VI, 31,21% luas lahan kelas V, 15,29% luas lahan kelas IV, dan 7,96 % luas lahan kelas II. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih sesuai untuk vegetasi permanen, terletak pada lereng yang cukup curam, sehingga sangat peka terhadap erosi, drainase nya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah, penggembalaan terbatas dan semua jenis hutan, selain itu juga didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya terlalu banyak batu di atas permukaan tanah dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami. Oleh sebab itu, tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan

memperbaiki hubungan air udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran–saluran air.

Tabel 2.9
Kelas Kemampuan Lahan di Tiap Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

Kecamatan	Kelas			
	II	IV	V	VI
Baranti			4.645, 95	
Duapitue		1.187,39	6.918,59	
Kulo	2.307,71	1.415,38	4.407,63	
Maritengngae	7,99		6.635,06	
Panca Lautang	739,52	1.310,63	7.085,73	5.928,66
Panca Rijang	2.334,44		2.168,60	
Pitu Risae	972,60	16.078,40	4.990,94	67.571,25
Pitu Riawa	2.207,91	5.962,28	6.766,69	6.256,82
Tellulimpoe	1.765,08	175,90	3.297,25	4.112,82
Watang Pulu	1.242,62	3.570,47	7.331,23	4.581,53
Watang Sidenreng	3.886,44		6.378,27	
Total	15.464,31	29.700,45	60.625,94	88.451,08

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023

Daerah pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Watang Sidenreng (3.886,44 ha), Kecamatan Pancarijang (2.334,44 ha), Kecamatan Kulo (2.307,71 ha) dan Kecamatan Pituriawa (2.207,91 Ha). Sedangkan untuk sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak sesuai dijadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen. Beberapa wilayah kecamatan juga diarahkan untuk peruntukan cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi seperti Kecamatan Pituriase dan sebagian di Kecamatan Pituriawa.

Pada tahap perhitungan ketersediaan air, data yang digunakan adalah Nilai Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data potensi ketersediaan air untuk satu kesatuan Wilayah. Satuan Wilayah untuk identifikasi potensi air pada penghitungan daya dukung nasional dan pulau adalah Wilayah Sungai. Untuk dapat menghitung potensi ketersediaan air Kabupaten perlu diidentifikasi terlebih dahulu Wilayah Sungai yang tercakup didalam wilayah administrasinya. Ketersediaan air pada suatu kawasan perkotaan dapat dihitung menggunakan rumus:

Ketersediaan Air = Debit Andalan Sungai + Debit Air Pasokan dari Luar Wilayah + Potensi Air Tanah + Debit Sumber Air Lainnya

Keterangan:
- Satuan dalam m3 /detik;
- Potensi air tanah adalah laju resapan air hujan pada area tersebut (m3 /detik);
- Potensi air tanah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Potensi Air Tanah} = \Sigma A_i \times C_i \times I$$

Keterangan:
- Satuan dalam m3 /detik

Ai = Luas lahan untuk jenis penggunaan lahan i (m²)
Ci = Koefisien resapan air untuk jenis penggunaan lahan i
I = Intensitas hujan (m/detik)

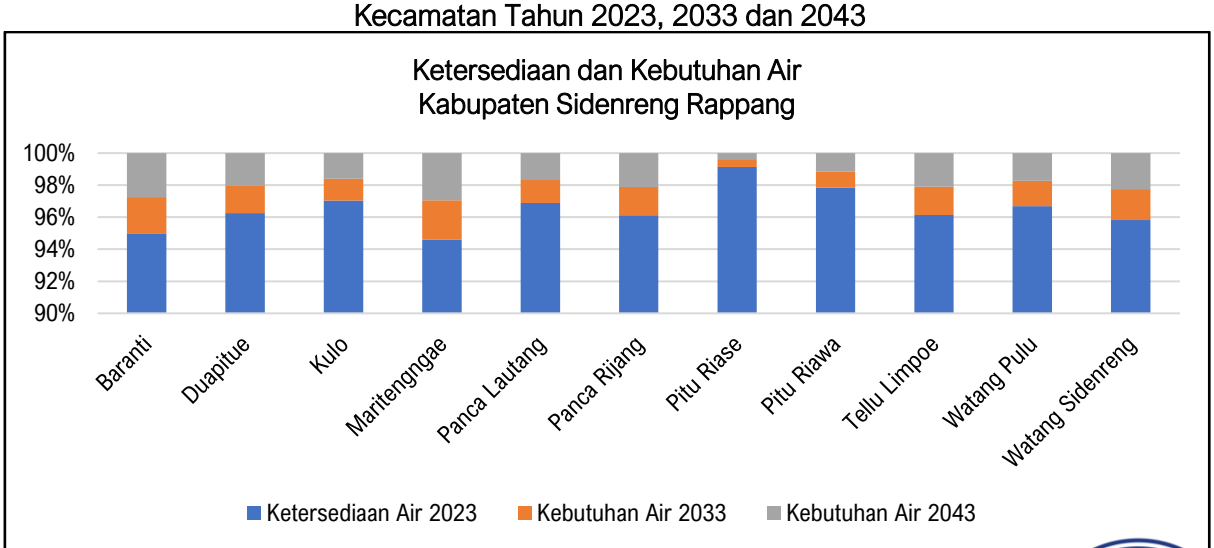
Tabel 2.10
Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan Tahun 2023, 2033 dan 2043 (M3)

Kecamatan	Status Air Tahun 2024 (Juta M3/tahun)		
	Ketesediaan 2023	Kebutuhan 2033	Kebutuhan 2043
Baranti	37.990.316	921.110	1.095.422
Dua Pitue	72.528.919	1.279.109	1.537.315
Kulo	71.278.380	999.259	1.173.874
Maritengngae	63.435.353	1.642.594	1.976.098
Panca Lautan	109.376.899	1.610.107	1.904.688
Panca Rijang	41.637.139	765.504	915.754
Pitu Raise	603.731.745	2.613.946	2.627.770
Pitu Riawa	199.048.658	2.037.485	2.375.611
Tellu Limpoe	61.631.280	1.132.229	1.340.798
Watang Pulu	132.421.804	2.159.093	2.373.365
Watang Sidenreng	101.724.964	2.050.013	2.381.314
Total	1.494.805.455	17.210.448	19.702.008

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappan Tahun 2023

Berdasarkan hasil kajian tim KLHS menunjukan bahwa ketersediaan air Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2023 masih sangat tinggi, dan hasil proyeksi kebutuhan air Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2043 mencapai 19.702.008 m^3.

Grafik 2.1
Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan Tahun 2023, 2033 dan 2043



Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan ketersediaan air tersebut diperoleh ketersediaan air tiap Kecamatan pada tahun 2023 menunjukan data ketersediaan yang sangat tinggi mencapai 1.494.805.455 M^3. Sedangkan kebutuhan air pada masing-masing kecamatan pada tahun 2033 dan tahun 2043 mencapai 17.210.448 m^3 dan 19.702.008 M^3. Selanjutnya nilai potensi air tersebut terdistribusikan dalam system grid berdasarkan indeks jasa lingkungan penyedia air Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan asumsi bahwa semakin tinggi nilai indeks di wilayah tersebut, maka semakin besar sebaran potensi ketersediaan air di wilayah tersebut.

Nilai ambang batas ketersediaan air Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2043 mencapai 1.494.349.390 M^3. Maka dapat di pastikan bahwa ketersediaan air Kabupaten Sidenreng Rpang sampai 20 tahun kedepan akn bernilai surplus. Lebih detailnya dapat diuraikan secara jelas pada tabel berikut ini:

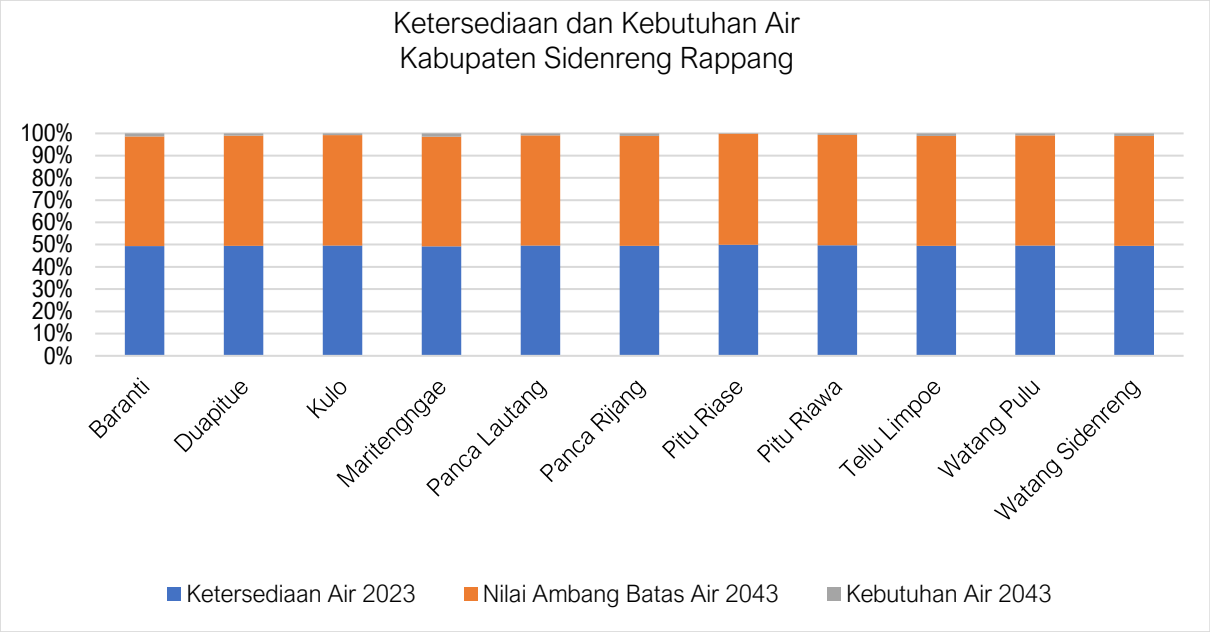
Tabel 2.11
Ketersediaan Air Tahun 2023, Nilai Ambang Batas Tahun 2043 dan Kebutuhan Air Tahun 2043 Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan

Kecamatan	Ketersediaan Air 2023	Nilai Ambang Batas Air 2043	Kebutuhan Air 2043
Baranti	37.990.316	37.964.959	1.095.422
Duapitue	72.528.919	72.493.333	1.537.315
Kulo	71.278.380	71.251.207	1.173.874
Maritengngae	63.435.353	63.389.610	1.976.098
Panca Lautang	109.376.899	109.332.809	1.904.688
Panca Rijang	41.637.139	41.615.941	915.754
Pitu Riase	603.731.745	603.670.917	2.627.770
Pitu Riawa	199.048.658	198.993.667	2.375.611
Tellu Limpoe	61.631.280	61.600.243	1.340.798
Watang Pulu	132.421.804	132.366.865	2.373.365
Watang Sidenreng	101.724.964	101.669.841	2.381.314
Total	1.494.805.455	1.494.349.390	19.702.008

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2023

Hasil proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) Kecamatan yang diperkirakan kebutuhan airnya sudah melebihi ketersediaan airnya, dan Kecamatan Pitu Riase yang diperkirakan belum terlampaui ketersediaan airnya.

Grafik 2.2
Ketersediaan Air Tahun 2023, Nilai Ambang Batas Tahun 2043 dan Kebutuhan Air Tahun 2043
Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masing-Masing Kecamatan



Sumber: Data diolah Tim, 2025

Daya dukung sumber daya air dapat dievaluasi dengan membandingkan ketersediaan air (S) dengan kebutuhan air (D).

Jika S ≥ D, maka daya dukung air belum terlampaui. Sebaliknya,

jika S < D, maka daya dukung air sudah terlampaui.

Hasil analisis proyeksi daya dukung air dari tahun 2023 hingga 2043 menunjukkan nilai ambang batas ketersediaan air di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2043 sekitar 1.494.349.390 meter kubik, sementara kebutuhan air pada tahun 2043 sekitar 19.702.008 meter kubik. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat selisih sekitar 1.474.647.382 meter kubik per tahun, yang berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Artinya, ketersediaan air akan mencukupi hingga tahun 2043.

Dengan belum terlampauiannya daya dukung air, Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memastikan agar ketersediaan air tetap terjaga. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mempertahankan daya dukung air termasuk:

1. Menjaga dan meningkatkan areal hutan yang berkontribusi terhadap pengaturan air dan penyediaan air.
2. Memperbaiki kualitas air sungai agar dapat digunakan sebagai sumber air baku dengan mengurangi polutan dari industri, rumah tangga, dan pertanian, serta memulihkan daerah aliran sungai (DAS) yang membutuhkan pemulihan.
3. Mengurangi alih fungsi lahan di daerah tangkapan air.
4. Membangun embung dan waduk untuk meningkatkan penangkapan air.

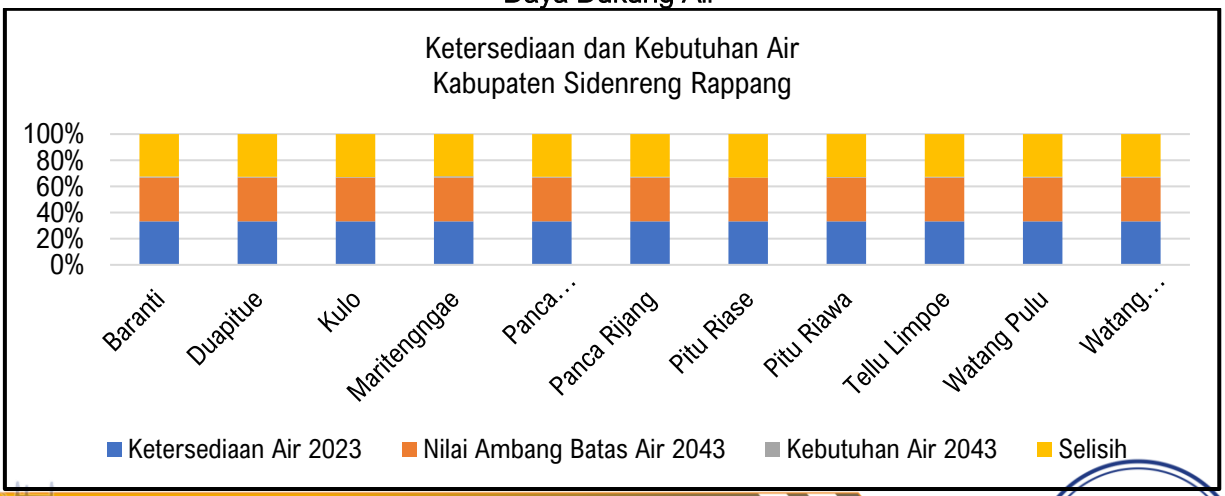
5. Melindungi mata air melalui upaya konservasi dan pengelolaan oleh pemerintah, termasuk pembebasan lahan di sekitar mata air.
6. Mendorong industri untuk menerapkan sistem produksi bersih guna menghemat penggunaan air.
7. Memberikan insentif bagi kegiatan produksi, baik di sektor pertanian maupun industri, yang dapat mengurangi penggunaan air.
8. Meningkatkan instalasi air dari sumber air ke lokasi-lokasi yang mengalami kelebihan daya dukung.
9. Melindungi sumber-sumber air dan cadangan air di kawasan karst untuk memastikan aliran sungai bawah tanah dan mata air tetap terjaga.
10. Menerapkan sistem pengumpulan air hujan di berbagai wilayah seperti perkantoran dan pemukiman.

Tabel 2.12
Daya Dukung Air Kabupaten Sidenreng Rappang

Kecamatan	Nilai_Ambang Batas Air 2043	Kebutuhan Air 2043	Selisih	Status DDDTTL Air
Baranti	37.964.959	1.095.422	36.869.537	Surplus
Duapitue	72.493.333	1.537.315	70.956.018	Surplus
Kulo	71.251.207	1.173.874	70.077.333	Surplus
Maritengngae	63.389.610	1.976.098	61.413.512	Surplus
Panca Lautang	109.332.809	1.904.688	107.428.121	Surplus
Panca Rijang	41.615.941	915.754	40.700.187	Surplus
Pitu Riase	603.670.917	2.627.770	601.043.147	Surplus
Pitu Riawa	198.993.667	2.375.611	196.618.055	Surplus
Tellu Limpoe	61.600.243	1.340.798	60.259.445	Surplus
Watang Pulu	132.366.865	2.373.365	129.993.500	Surplus
Watang Sidenreng	101.669.841	2.381.314	99.288.527	Surplus
Total	1.494.349.390	19.702.008	1.474.647.382	Surplus

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Grafik 2.3
Daya Dukung Air



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

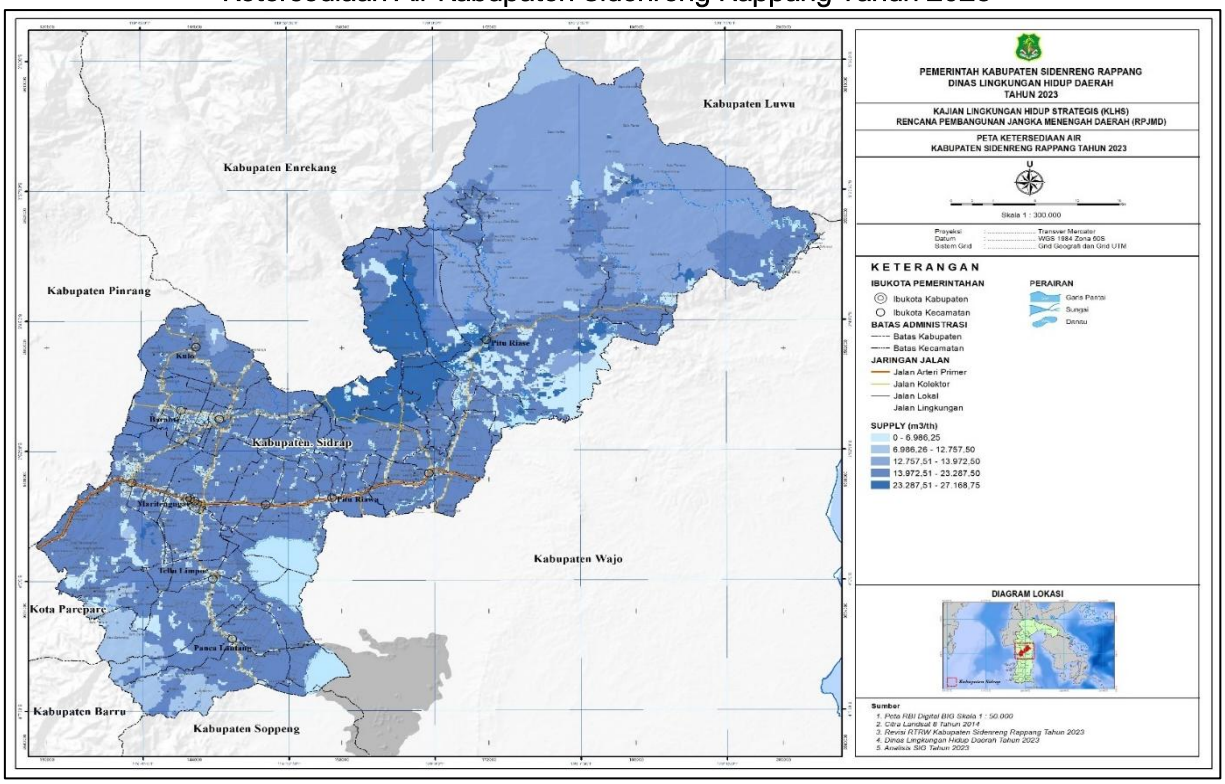
Status daya dukung air Kabupaten Sidenreng Rappang sampai tahun 2043 menunjukan tingkat ketersediaan yang masih sangat tinggi, sehingga dapat di simpulkan bahwa daya dukung air Kabupaten Sidenreng Rappang **Belum Melampaui Ambang Batas** pada tahun 2043. Lebih rincinya akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Daya Dukung Air Kabupaten Sidenreng Rappang

Kecamatan	Status Daya Dukung Air 2043	Nilai_Ambang Batas Air 2043
Kecamatan Baranti	Belum Melampaui Ambang Batas	37.965.022
Kecamatan Duapitue	Belum Melampaui Ambang Batas	72.493.375
Kecamatan Kulo	Belum Melampaui Ambang Batas	71.251.312
Kecamatan Maritengngae	Belum Melampaui Ambang Batas	63.389.610
Kecamatan Panca Lautang	Belum Melampaui Ambang Batas	109.332.907
Kecamatan Panca Rijang	Belum Melampaui Ambang Batas	41.616.004
Kecamatan Pitu Riase	Belum Melampaui Ambang Batas	603.673.430
Kecamatan Pitu Riawa	Belum Melampaui Ambang Batas	198.993.828
Kecamatan Tellu Limpoe	Belum Melampaui Ambang Batas	61.600.551
Kecamatan Watang Pulu	Belum Melampaui Ambang Batas	132.367.635
Kecamatan Watang Sidenreng	Belum Melampaui Ambang Batas	101.669.974

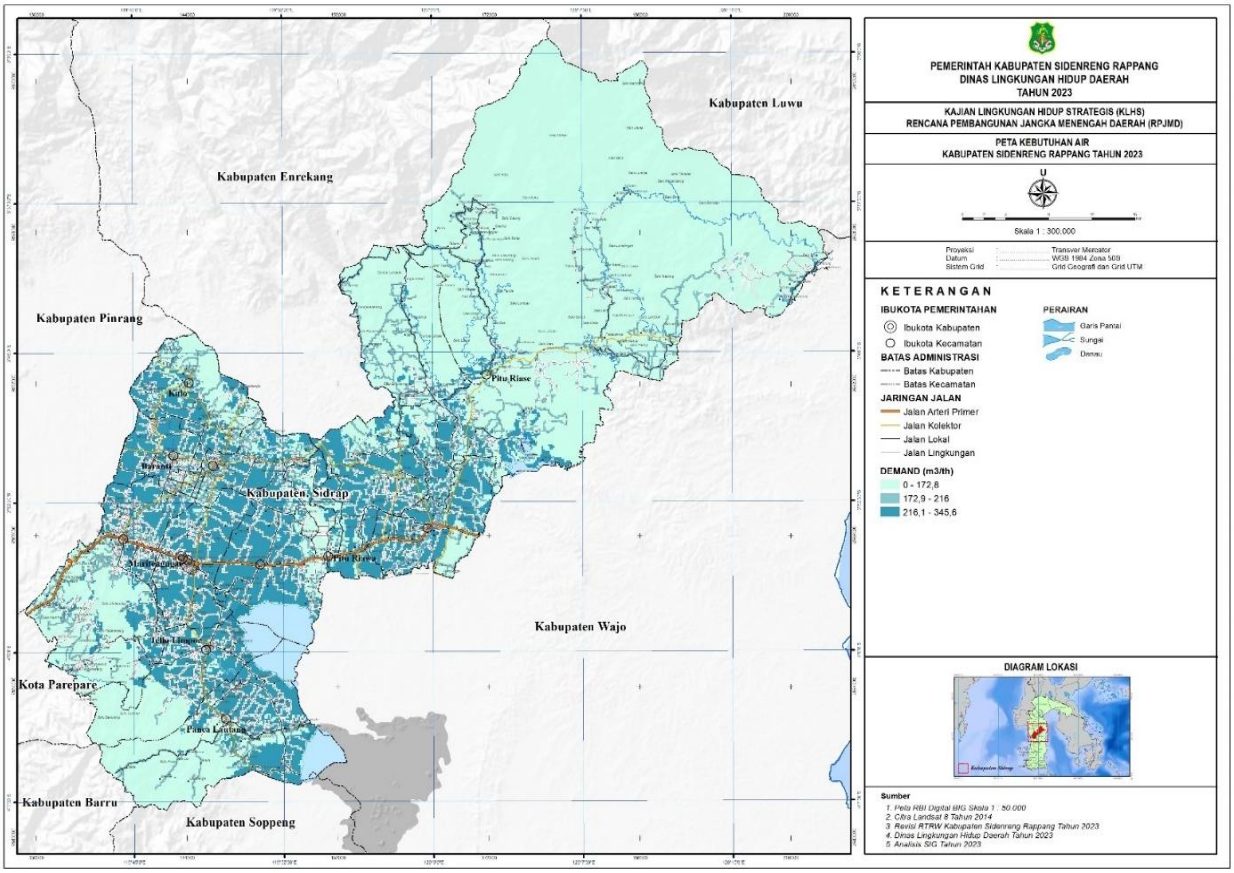
Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Gambar 2.2
Ketersediaan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023



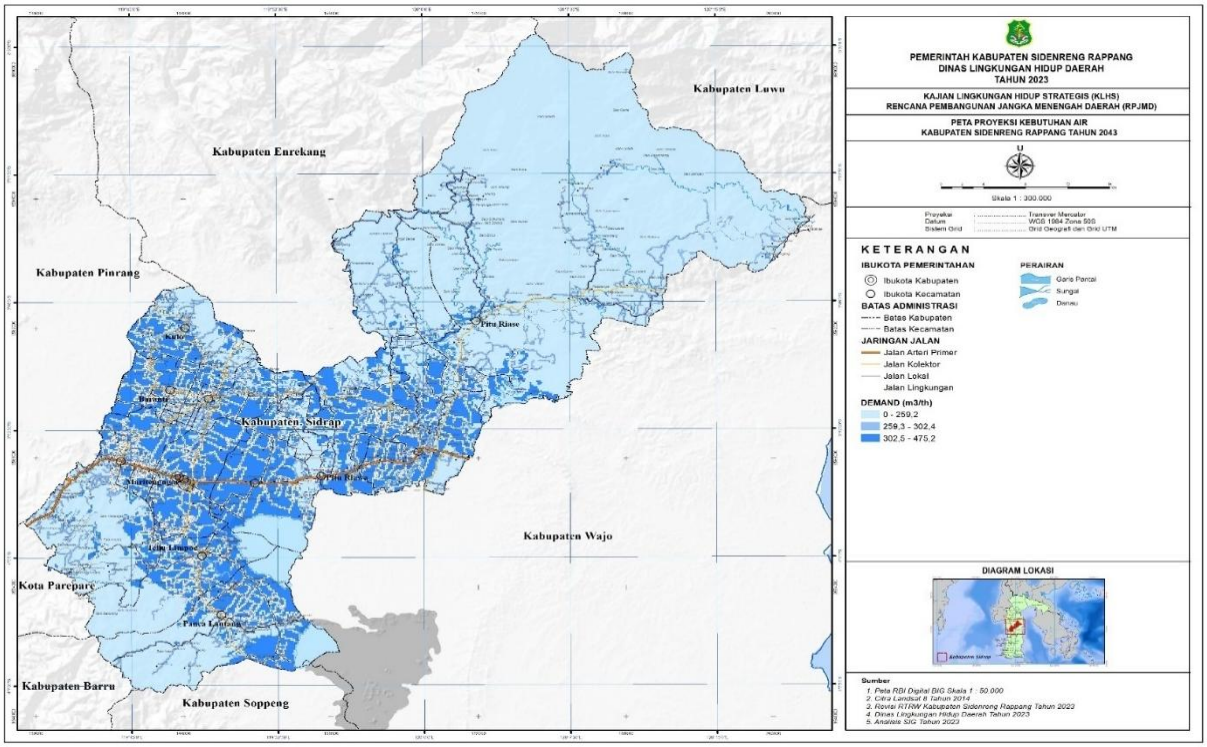
Sumber: Data diolah Tim, 2025

Gambar 2.3
Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Sidenreng Rappang



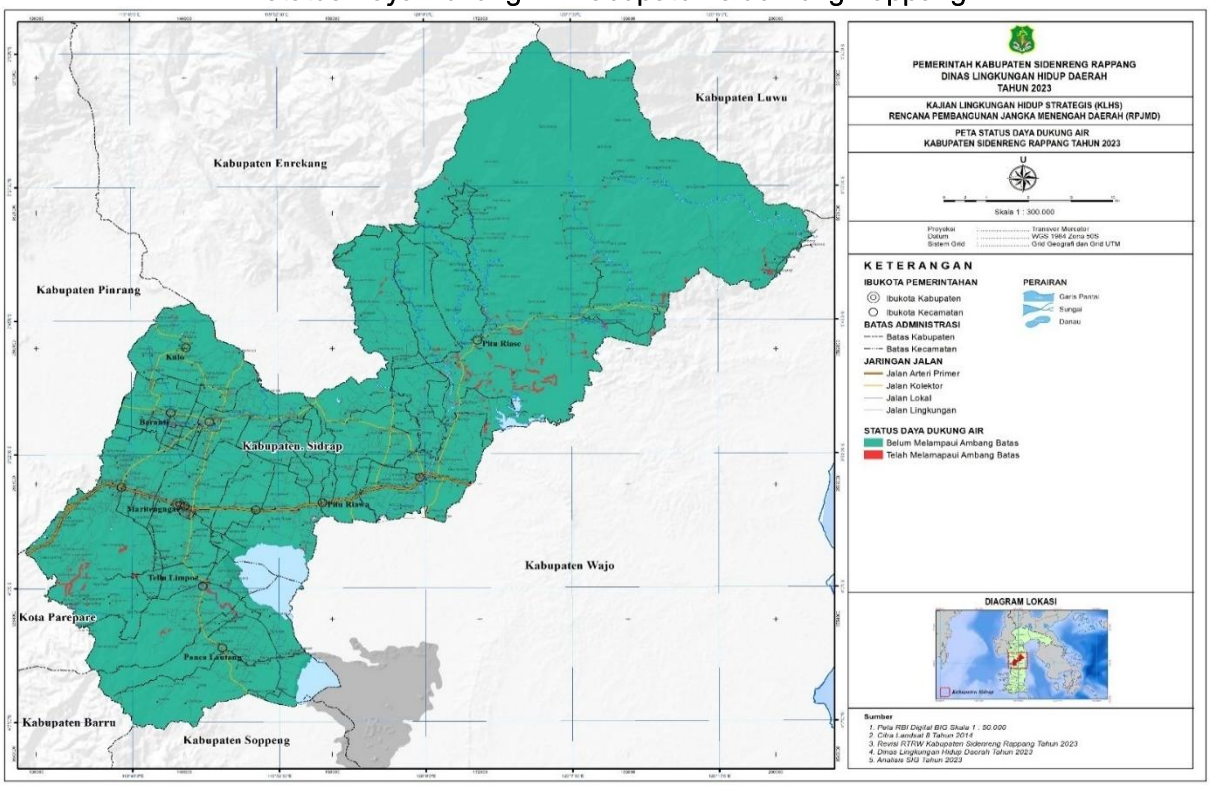
Sumber: Data diolah Tim, 2025

Gambar 2.4
Peta Proyeksi Kebutuhan di Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: Data diolah Tim, 2025

Gambar 2.5
Status Daya Dukung Air Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: Data diolah Tim, 2025

Dalam konteks proyeksi penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2023 hingga 2043, terlihat adanya tren peningkatan kebutuhan akan beras sebagai sumber pangan utama. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang daya dukung pangan di wilayah ini. Dalam mempertimbangkan solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat, pertimbangan terhadap ketersediaan air dan potensi ekspansi lahan sawah menjadi faktor krusial.

Asumsi bahwa peningkatan ketersediaan air akan mendukung pertumbuhan produksi beras, dan langkah konkret untuk mencapai hal ini adalah dengan meningkatkan pencetakan lahan sawah. Namun, sebelum mengambil tindakan dalam hal ini, penting untuk menilai status daya dukung pangan secara komprehensif.

Rumus sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur daya dukung pangan adalah dengan mengurangi total produksi beras dari total permintaan beras. Hasil dari perhitungan ini akan memberikan gambaran jelas tentang sejauh mana kapasitas wilayah ini dalam memenuhi kebutuhan pangan, diukur dalam ton per tahun.

Analisis seperti ini akan memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan pertanian dan keamanan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan memahami tren proyeksi penduduk dan mempertimbangkan strategi seperti peningkatan ketersediaan air dan ekspansi lahan pertanian, wilayah ini dapat lebih siap menghadapi tantangan peningkatan kebutuhan pangan di masa mendatang.

Tabel 2.14
Distribusi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dan Ketersediaan Pangan
Pada Tahun 2023 (KKal)

No	Kecamatan	Distribusi Penduduk 2023	Ketersediaan Pangan (KKal)	Kebutuhan Pangan 2023
1	Baranti	18.006	17.558.489.551	14.130.208.500
2	Duapitue	25.197	27.316.268.673	19.773.345.750
3	Kulo	19.635	21.031.597.374	15.408.566.250
4	Maritengngae	32.304	35.006.721.710	25.350.564.000
5	Panca Lautang	31.682	36.178.206.491	24.862.449.500
6	Panca Rijang	14.974	14.154.292.597	11.750.846.500
7	Pitu Riase	50.214	21.527.755.634	39.405.436.500
8	Pitu Riawa	40.147	41.001.967.357	31.505.358.250
9	Tellu Limpoe	22.107	23.098.923.459	17.348.468.250
10	Watang Pulu	41.885	31.630.089.104	32.869.253.750
11	Watang Sidenreng	40.444	45.756.817.353	31.738.429.000
Sidenreng Rappang		336.595	314.261.129.302	264.142.926.250

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Data tahun 2023, Kecamatan Pitu Riase dan Panca Rijang memiliki ketersediaan pangan lebih rendag dibandingkan kebutuhan pangannya. Di Pitu Riase, hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar sementara lahan pertanian produktif terbatas karena Sebagian wilayahnya erupakan Kawasan hutan dan perbukitan. Sedangkan di Panca Rijang, keterbatasan lahan pertanian serta kondisi tanah regosol yang kurang subur menyebabkan produksi pangan rendah sehingga tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil kajian tim KLHS, potensi ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rapang menunjukan ketersediaan pangan yang sangat cukup sehingga dapat dipastikan ketersediaan pangan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat tercukupi pada tahun 2023.

Tabel 2.15
Perkembangan Ketersediaan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023-2043 (KKal)

Kecamatan	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan 2023	Kebutuhan Pangan 2028	Kebutuhan Pangan 2033	Kebutuhan Pangan 2038	Kebutuhan Pangan 2043
Baranti	17.558.489.551	14.130.208.500	15.603.184.250	16.732.439.500	18.205.415.250	19.898.905.750
Duapitue	27.316.268.673	19.773.345.750	21.963.583.000	23.235.662.750	25.454.935.750	27.926.113.500
Kulo	21.031.597.374	15.408.566.250	17.180.531.750	18.152.052.250	19.924.017.750	21.324.011.750
Maritengngae	35.006.721.710	25.350.564.000	27.961.427.250	29.838.549.250	32.449.412.500	35.896.819.250
Panca Lautang	36.178.206.491	24.862.449.500	27.587.886.250	29.248.417.250	31.973.854.000	34.599.627.500
Panca Rijang	14.154.292.597	11.750.846.500	13.066.872.250	13.905.770.000	15.221.795.750	16.635.130.500
Pitu Riase	21.527.755.634	39.405.436.500	43.337.818.750	47.483.653.000	51.416.035.250	47.734.773.000
Pitu Riawa	41.001.967.357	31.505.358.250	35.239.983.500	37.011.949.000	40.748.143.750	43.154.187.250
Tellu Limpoe	23.098.923.459	17.348.468.250	19.023.124.750	20.567.512.750	22.242.169.250	24.356.285.750
Watang Pulu	31.630.089.104	32.869.253.750	36.136.952.750	39.221.020.250	42.569.548.500	43.113.380.250
Watang Sidenreng	45.756.817.353	31.738.429.000	35.036.733.250	37.239.526.500	40.541.754.500	43.257.774.250
Total	314.261.129.302	264.142.926.250	292.138.097.750	312.636.552.500	340.747.082.250	357.897.008.750

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Berdasarkan hasil kajian kebutuhan pangan Kabupaten Sidenreng rappang pada tahun 2023 menunjukan bahwa, setiap 5 (lima) tahun perkembangan pertumbuhan kebutuhan pangan tiap kecamatan semakin meningkat. Seperti yang terjadi pada Kecamatan Watang Sidenreng pada tahun 2023 membutuhkan pangan sebesar 31.738.429.000 KKal, sedangkan pada tahun 2043 meningkat menjadi 43.257.774.250 KKal.

Begitu juga dengan Kecamatan Pitu Riase pada tahun 2023 membutuhkan pangan sebesar 39.405.436.500 KKal. Sampai pada tahun 2043 mebutuhkan pangan sebanyak 47.734.773.000 KKal.

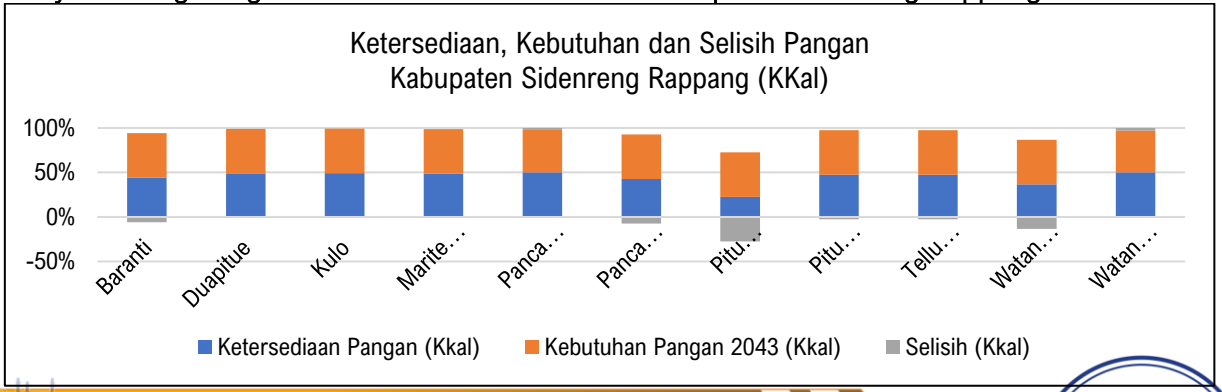
Tabel 2.16
Daya Dukung Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang (KKal)

Kecamatan	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan 2043	Selisih
Baranti	17.558.489.551	19.898.905.750	- 2.340.416.199
Duapitue	27.316.268.673	27.926.113.500	- 609.844.827
Kulo	21.031.597.374	21.324.011.750	- 292.414.376
Maritengngae	35.006.721.710	35.896.819.250	-890.097.540
Panca Lautang	36.178.206.491	34.599.627.500	1.578.578.991
Panca Rijang	14.154.292.597	16.635.130.500	-2.480.837.903
Pitu Riase	21.527.755.634	47.734.773.000	-26.207.017.366
Pitu Riawa	41.001.967.357	43.154.187.250	- 2.152.219.893
Tellu Limpoe	23.098.923.459	24.356.285.750	- 1.257.362.291
Watang Pulu	31.630.089.104	43.113.380.250	- 11.483.291.146
Watang Sidenreng	45.756.817.353	43.257.774.250	2.499.043.103
Total	314.261.129.302	357.897.008.750	- 43.635.879.448

Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Berdasarkan hasil kajian tim KLHS, kebutuhan pangan Kabupaten Sidenreng Rapang pada tahun 2023 menunjukan tren yang meningkat sehingga apabila di bandingkan dengan ketersediaan pangan pada saat ini, akan terdapat selisih yang cukup tinggi dan mengarah pada defisit pangan 20 tahun kedepan. Hanya di Kecamatan Panca Lautang yang menunjukan nilai positif atau surplus sebesar 1.578.578.991 KKal dan Kecamatan Watang Sidenreng sebesar 2.499.043.103 KKal.

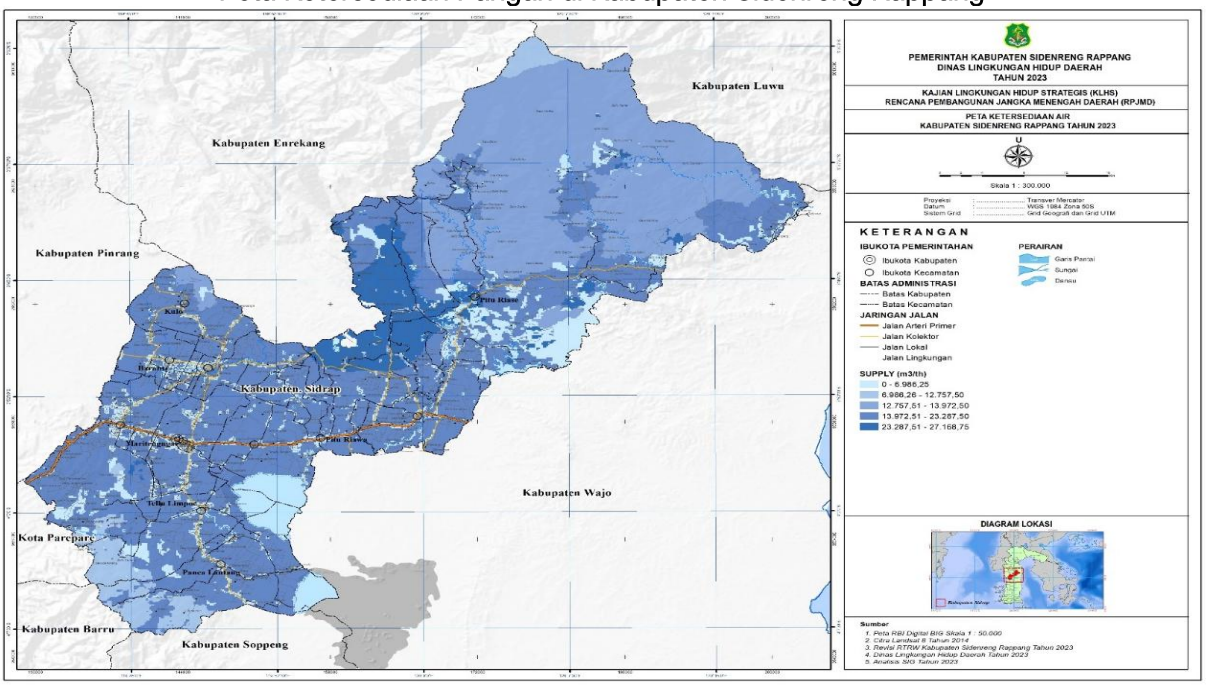
Grafik 2.4
Daya Dukung Pangan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2043



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

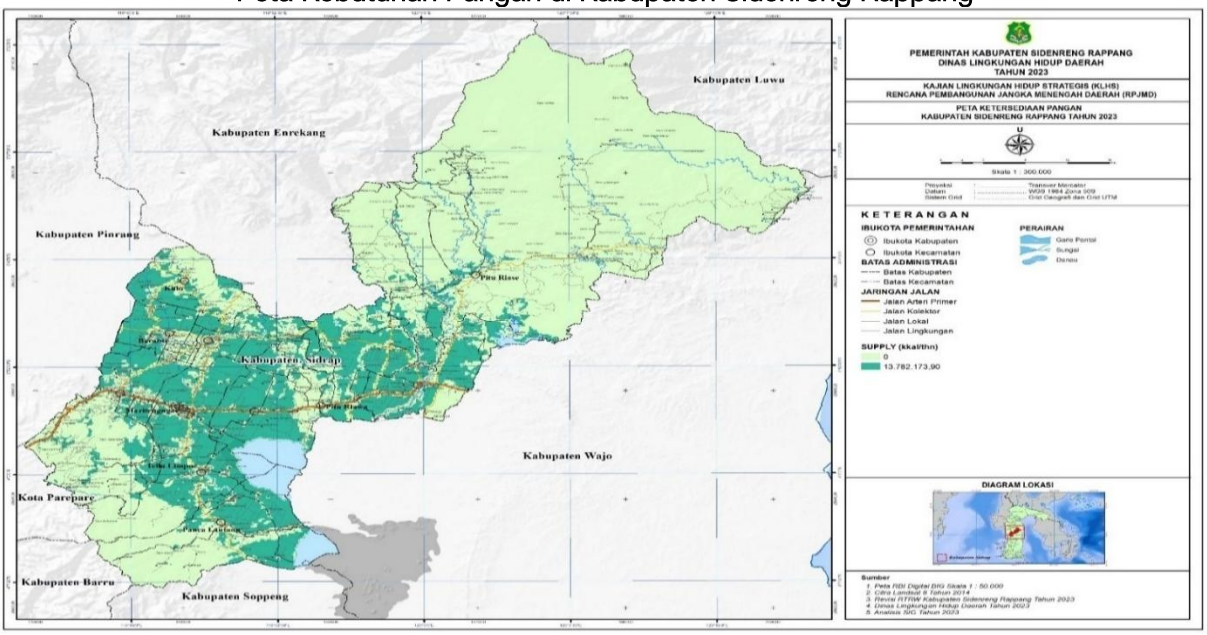
Berdasarkan hasil kajian tim KLHS, kebutuhan pangan Kabupaten Sidenreng Rapang pada tahun 2023 menunjukan tren yang meningkat sehingga apabila di bandingkan dengan ketersediaan pangan pada saat ini, akan terdapat selisih yang cukup tinggi dan mengarah pada defisit pangan 20 tahun kedepan. Hanya di Kecamatan Panca Lautang yang menunjukan nilai positif atau surplus sebesar 1.578.578.991 KKal dan Kecamatan Watang Sidenreng sebesar 2.499.043.103 KKal.

Gambar 2.6
Peta Ketersediaan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang



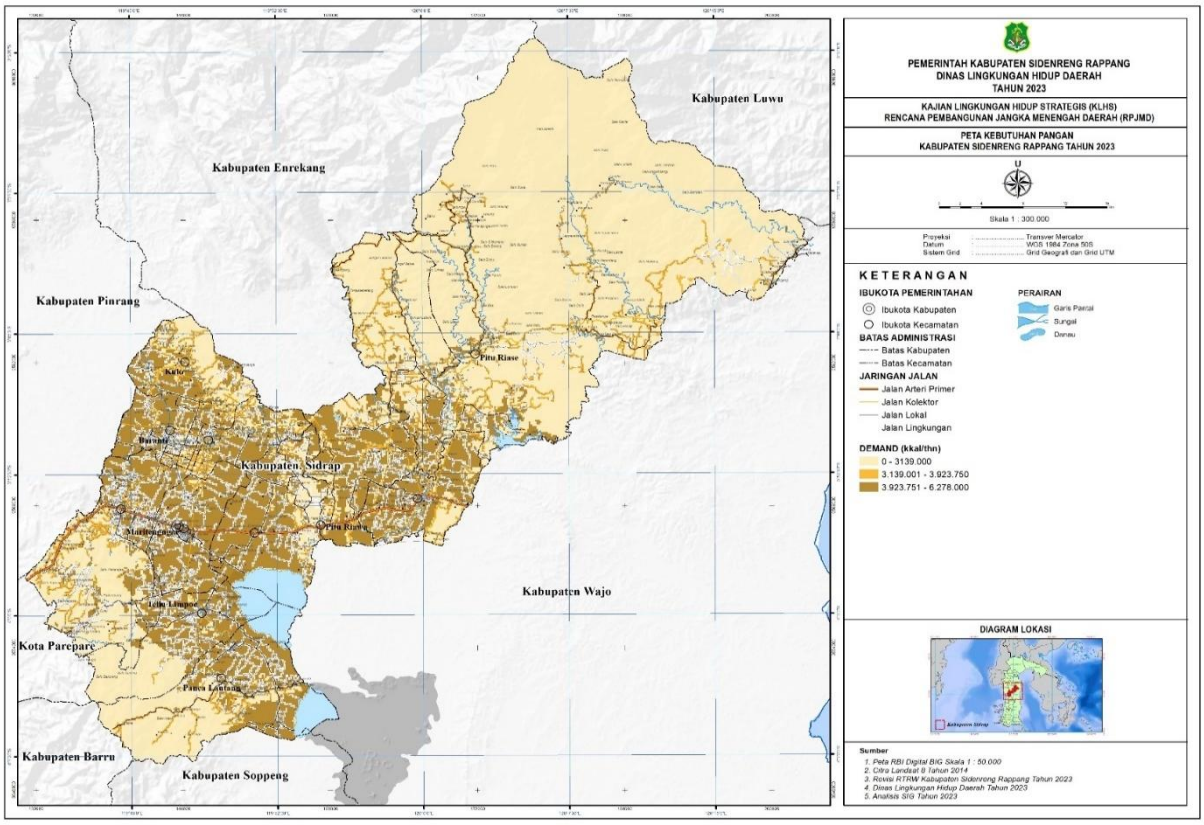
Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Gambar 2.7
Peta Kebutuhan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang



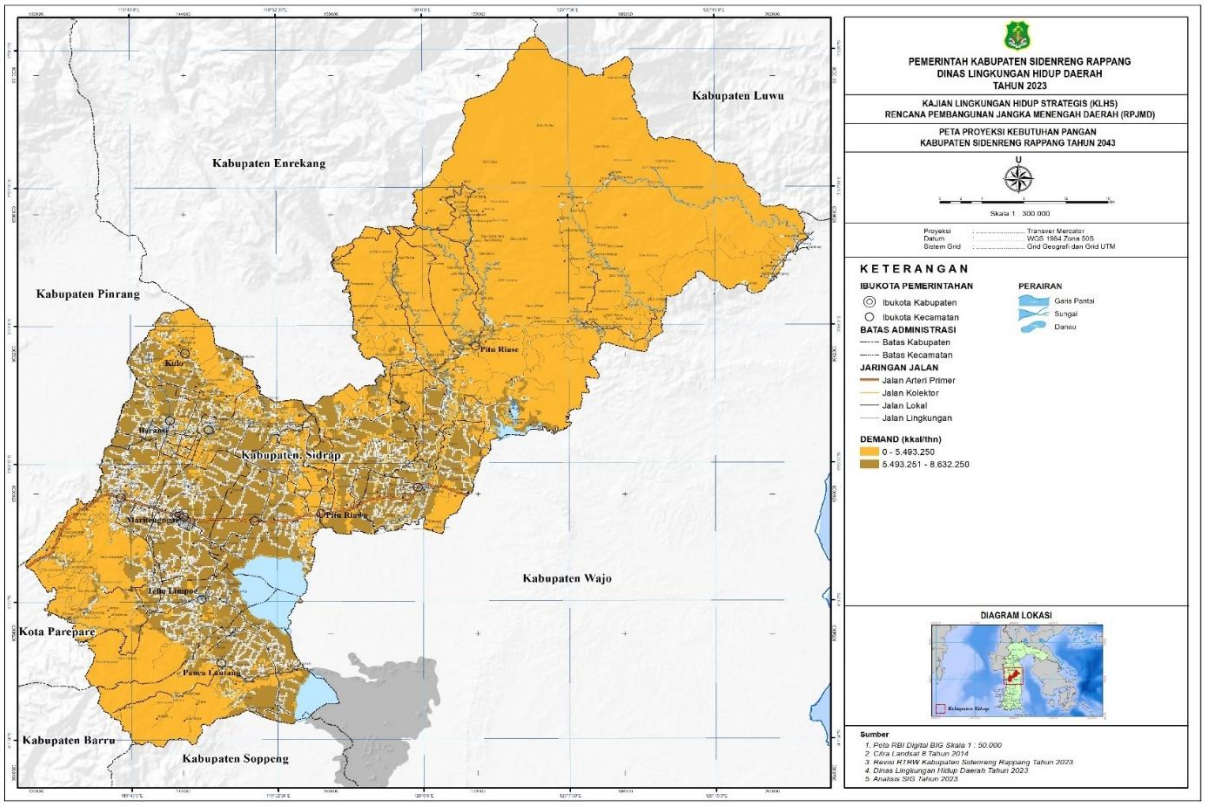
Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Gambar 2.8
Peta Proyeksi Ketersediaan di Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

Gambar 2.9
Status D3TLH Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2043



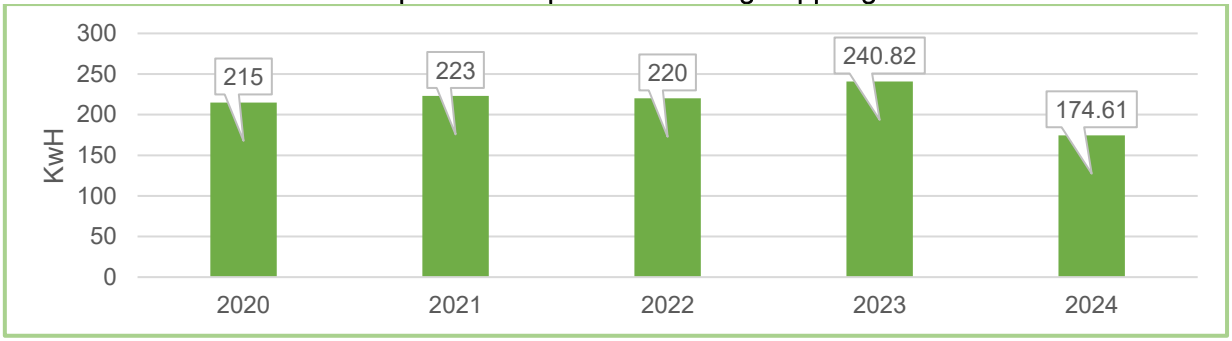
Sumber : Dokumen KLHS RPJMD, Tahun 2023

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air, Dan Kemandirian Pangan

1. Ketahanan Energi

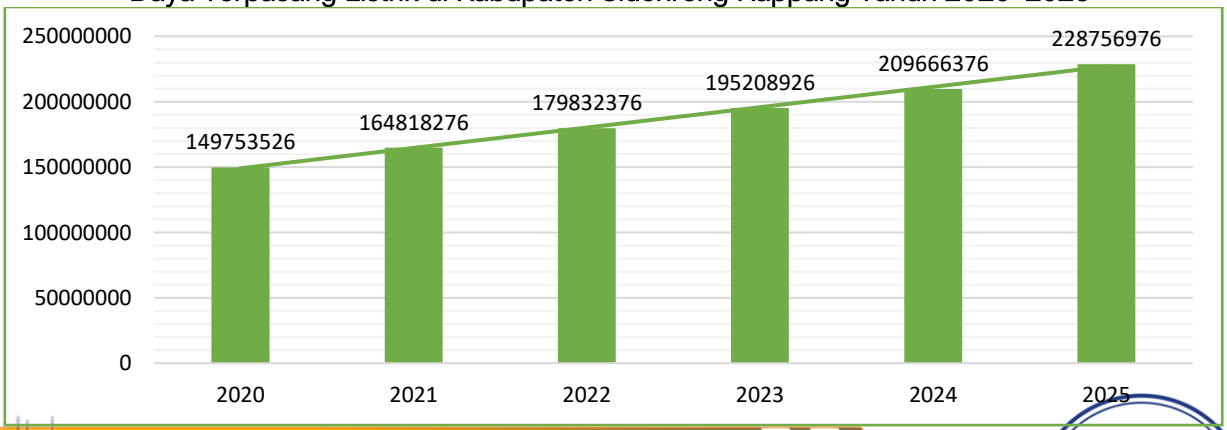
Energi merupakan salah satu penyokong kehidupan manusia sekaligus menjadi salah satu lokomotif pembangunan. Salah satu energi yang penting dan terkait dengan hajat hidup seluruh penduduk adalah listrik. Semakin besar konsumsi listrik juga mengindikasikan semakin maju-nya suatu masyarakat. Hal ini karena listrik, bukan hanya dipakai untuk kegiatan konsumsi, tapi juga untuk produksi dan layanan publik. Pada tahun 2024, sebanyak 100 persen rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang telah terhubung dengan listrik. Sementara itu, konsumsi listrik per kapita yang merupakan hasil bagi antara jumlah listrik terjual dengan jumlah penduduk. Jika dilihat dari kondisi konsumsi listrik di kabupaten Sidenreng rappang mengalami penurunan drastis di tahun 2024, penurunan ini bisa saja dipengaruhi oleh harga listrik yang naik sehingga masyarakat membatasi pengeluarannya. Angka konsumsi listrik tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif 215 kwh per kapita di tahun 2020 dan mengalami penurunan hingga ke angka 174,61 Kwh per kapita pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk yang besar tidak diikuti dengan peningkatan konsumsi listrik oleh masyarakat, masyarakat cenderung mempertahankan besaran konsumsi listrik meskipun jumlah anggota keluarga bertambah sehingga data tahun 2024 menunjukkan penurunan konsumsi listrik per kapira di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.5
Konsumsi Listrik Per Kapita di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

Grafik 2.6
Daya Terpasang Listrik di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020–2025



Sumber: PLN, diolah Tahun 2026

Lebih lanjut, kondisi ketersediaan daya listrik di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami peningkatan pada daya terpasang. Pada tahun 2020, daya terpasang listrik sebesar 149.753.526 VA, lalu meningkat menjadi 228.756.3976 VA di tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan listrik di Kabupaten Sidenreng Rappang relatif terjamin.

2. Ketahanan Air

a. Kapasitas Air Baku (L/detik)

Kapasitas air baku mengacu pada total volume air yang tersedia dalam suatu wilayah atau sistem yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti konsumsi manusia, pertanian, industri, dan keperluan lingkungan lainnya. Sumber-sumber air baku bisa berupa sungai, danau, reservoir, air tanah, dan air hujan yang dapat diambil dan dimanfaatkan. Ketersediaan air baku perlu dimonitor untuk memastikan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Sumber air baku utama di Kabupaten Sidenreng Rappang terutama berasal dari air danau dan air sungai. Terdapat Danau Sidenreng yang berada di tiga kecamatan, yaitu Watang Sidenreng, Tellu Limpoe, dan Panca Lautang. Air dari danau digunakan oleh masyarakat untuk irigasi persawahan, air bersih untuk keperluan rumah tangga, dan dijadikan sebagai tempat penangkapan serta budidaya ikan air tawar. Adapun air baku dari sungai tersebar di 167 sungai yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.17
Sumber Air Baku di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

No	Nama	Air Baku Induk	Jenis	Kapasitas (L/Det)	Kapasitas Terpakai (L/Det)
1	Sungai Camming	-	Sungai	200	200
2	Sungai Cenrana	-	Sungai	200	50
3	Sungai Alebbong	-	Sungai	200	50

Sumber: SIMSPAM Kementrian Pekerjaan Umum; diolah tahun 2025

Sementara itu, air bersih adalah air yang telah melalui proses pengolahan untuk menghilangkan kontaminan, zat terlarut, partikel, dan mikroorganisme yang dapat membuatnya tidak aman untuk dikonsumsi atau digunakan untuk aplikasi tertentu. Proses pengolahan air biasanya melibatkan langkah-langkah seperti penyaringan, pengendapan, pemurnian kimia, dan desinfeksi untuk memastikan air memenuhi standar kualitas air yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan dan lingkungan. Air bersih ini kemudian dapat digunakan untuk minum, memasak, mandi, dan keperluan lainnya tanpa risiko kesehatan.

Tabel 2.18
Kapasitas Air Baku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Unit SPAM	Jumlah Air Baku	Kapasitas Air Baku (Liter/Detik)	Kapasitas Yang Sudah Digunakan (Liter/Detik)	Kapasitas Masih Dapat Dimanfaatkan (Liter/Detik)
1	Kepulauan Selayar	77	7	334	100	234
2	Bulukumba	133	8	245	180	65
3	Bantaeng	54	11	2.130	380	1.750
4	Jeneponto	83	9	8.200	160	8.040
5	Takalar	59	1	280	190	90
6	Gowa	103	12	2.600	2.300	300
7	Sinjai	70	4	2.050	237	1.813
8	Maros	71	3	4.654	400	4.254
9	Pangkep	55	8	321	203	118
10	Barru	45	8	2.507	247	2.260
11	Bone	125	18	1.046	228	818
12	Soppeng	48	5	385	365	20
13	Wajo	127	5	1.273.604	355	1.273.249
14	**Sidenreng Rappang**	**87**	**3**	**600**	**300**	**300**
15	Pinrang	84	8	5.099	150	4.949
16	Enrekang	92	11	500	265	235
17	Luwu	99	9	2.110	310	1.800
18	Tana Toraja	125	22	219	219	0
19	Luwu Utara	107	6	4.130	172	3.958
20	Luwu Timur	45	11	900	285	615
21	Toraja Utara	102	10	2.630	161	2.469
22	Makassar	83	3	1.850	1.840	10
23	Parepare	1	1	800	130	670
24	Palopo	22	5	1.040	370	670
–	**Sulawesi Selatan**	**1.937**	**188**	**1.318.234**	**9.622**	**1.308.687**

Sumber: SIMPSPAM Kementerian Pekerjaan Umum; diolah Tahun 2026

Kapasitas air baku Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 600 liter/detik yang bersumber dari 3 sumber air baku. Dari kapasitas tersebut, sekitar 300 liter/detik atau 50% telah dimanfaatkan, sementara 300 liter/detik masih tersedia untuk dimanfaatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sidrap masih memiliki potensi sumber air baku yang cukup untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum. Namun, dengan masih rendahnya cakupan akses air minum aman, optimalisasi kapasitas yang tersedia perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas pengolahan dan jaringan SPAM agar potensi air baku tersebut dapat diterjemahkan menjadi peningkatan akses layanan bagi masyarakat.

Tabel 2.19
Kapasitas Air Baku di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 (m3/tahun)

Kecamatan	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Baranti	99,54	186,31	- 86,77
Dua Pitue	133,43	344,71	- 211,28
Kulo	161,48	281,95	- 120,47
Maritengngae	134,67	360,06	- 225,39
Panca Lautang	268,63	416,26	- 147,63
Panca Rijang	96,33	175,10	- 78,77
Pitu Riase	1.029,66	428,14	601,52
Pitu Riawa	316,12	421,94	- 105,82
Tellu Limpoe	189,78	279,68	- 89,90
Watang Pulu	350,12	496,82	- 146,70
Watang Sidenreng	199,40	378,67	- 179,27
Total	2.979,16	3.769,64	- 790,48

Sumber: Dokumen KHLS RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2045

Data menunjukkan jumlah ketersediaan air di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 2.979,16 m3/tahun pada tahun 2024. Adapun kebutuhan terhadap air sebesar 3.769,64 m3/tahun, sehingga terdapat kekurangan sebesar -790,48 m3/tahun, hal ini berarti ambang batas terhadap daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Pitu Riase (601,52 m3/tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Sebaliknya, pada kecamatan-kecamatan lainnya, ketersediaan air tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan yang ada, ini disebabkan oleh rendahnya tutupan lahan dan berkurangnya vegetasi penahan air yang mengakibatkan kemampuan daerah dalam menyerap dan menyimpan air menjadi terbatas. Selain itu, meningkatnya kebutuhan air seiring pertumbuhan penduduk, perluasan lahan pertanian, dan penggunaan sektor non-pertanian menyebabkan ketidakseimbangan ketersediaan dengan kebutuhan air. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi kondisi tersebut, antara lain meningkatkan tutupan lahan dan konservasi sumber daya air, membangun serta mengoptimalkan infrastruktur penampungan dan jaringan irigasi, mendorong efisiensi penggunaan air di berbagai sektor, memanfaatkan sumber air alternatif seperti hujan, serta mengendalikan alih fungsi lahan.

b. Akses Rumah tangga terhadap Air Minum Perpipaan

1) Akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan mengacu pada kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan air minum yang aman dan bersih melalui sistem

perpipaan. Rumah tangga yang dicakup dalam kategor ini adalah rumah tangga yang terhubung ke jaringan distribusi air bersih yang memenuhi standar kualitas air minum yang ditetapkan. Ukuran ini penting untuk memastikan agar rumah tangga dapat mengakses air minum yang aman dan terpercaya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kebersihan. Rumah tangga dengan akses terhadap air siap minum perpipaan cenderung memiliki risiko terhadap penyakit yang ditularkan melalui air yang relatif rendah.

2) Pada tahun 2025, dari 80.614 rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat sebanyak 16.897 rumah tangga atau 20,96 persen rumah tangga yang sumber air minumnya menggunakan jaringan perpipaan, terdiri dari 6.856 rumah tangga yang menggunakan jaringan perpipaan PDAM/BPSPAM dan 10.243 rumah tangga dengan jaringan perpipaan non-PDAM. Kondisi ini menunjukkan masih relatif rendanya persentase rumah tangga yang menggunakan jaringan perpipaan sebagai sumber air minum di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.20
Air Minum Perpipaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga dengan Perpipaan PDAM/BPSPAM	Jumlah Rumah Tangga dengan Perpipaan Non-PDAM
Panca Lautang	5.259	432	367
Tellu Limpoe	6.120	1.284	68
Watang Pulu	7.480	436	1.610
Maritengngae	12.289	2.608	730
Watang Sidenreng	5.573	0	471
Panca Rijang	8.403	1.582	512
Baranti	9.109	0	441
Kulo	3.505	0	432
Pitu Riawa	7.648	0	1.406
Dua Pitue	8.518	749	838
Pitu Riase	6.710	0	3.368
Jumlah	**80.614**	**7.091**	**10.243**

Sumber: PDAM & BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2026

Tabel 2.21
Air Minum Perpipaan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

Kabupaten/Kota	RT Akses Air Minum Perpipaan (%)	RT Akses Air Minum Aman Perpipaan (%)	Penduduk Perkotaan	Rumah Tangga Perkotaan	SR Aman Perkotaan	Akses RT Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
Kep. Selayar	42,16	21,45	33.459	8.365	3.457	41,33
Bulukumba	17,73	1,38	153.738	38.435	56	0,15
Bantaeng	57,3	57,07	93.543	23.386	18.170	77,7
Jeneponto	22,28	18,02	107.040	26.760	7.800	29,15

Kabupaten/Kota	RT Akses Air Minum Perpipaan (%)	RT Akses Air Minum Aman Perpipaan (%)	Penduduk Perkotaan	Rumah Tangga Perkotaan	SR Aman Perkotaan	Akses RT Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
Takalar	23,71	21,11	157.121	39.280	9.715	24,73
Gowa	30,33	4,89	551.304	137.826	6.276	4,55
Sinjai	35,99	15,41	96.535	24.134	4.818	19,96
Maros	29,55	27,73	239.064	59.766	21.790	36,44
Pangkep	31,52	8,55	146.231	36.558	1.535	4,2
Barru	34,6	–	94.467	23.617	–	–
Bone	18,24	3,41	205.136	51.284	681	1,33
Soppeng	30,67	4,89	89.233	22.308	403	1,81
Wajo	32,6	28,98	119.936	29.984	18.340	61,17
Sidenreng Rappang	**19,98**	**19,35**	**159.398**	**39.850**	**6.345**	**15,92**
Pinrang	10,91	3,64	135.254	33.814	130	0,38
Enrekang	43,74	24,69	47.957	11.989	6.403	53,41
Luwu	23,23	19,77	108.792	27.198	7.874	28,95
Tana Toraja	47,71	25,16	43.701	10.925	3.003	27,49
Luwu Utara	25,23	18,71	60.623	15.156	6.199	40,9
Luwu Timur	34,27	18,99	155.963	38.991	8.971	22,88
Toraja Utara	45,29	42,62	60.156	15.039	11.446	76,11
Makassar	62,36	34,91	1.489.266	372.312	130.096	34,94
Parepare	68,33	68,33	162.692	40.673	28.140	69,19
Palopo	94,1	92,62	161.303	40.326	39.397	97,7
Sulawesi Selatan	**36,76**	**24,24**	**4.671.890**	**1.167.973**	**340.985**	**32,1**

Sumber: SIMPSPAM Kementerian Pekerjaan Umum; diolah Tahun 2026

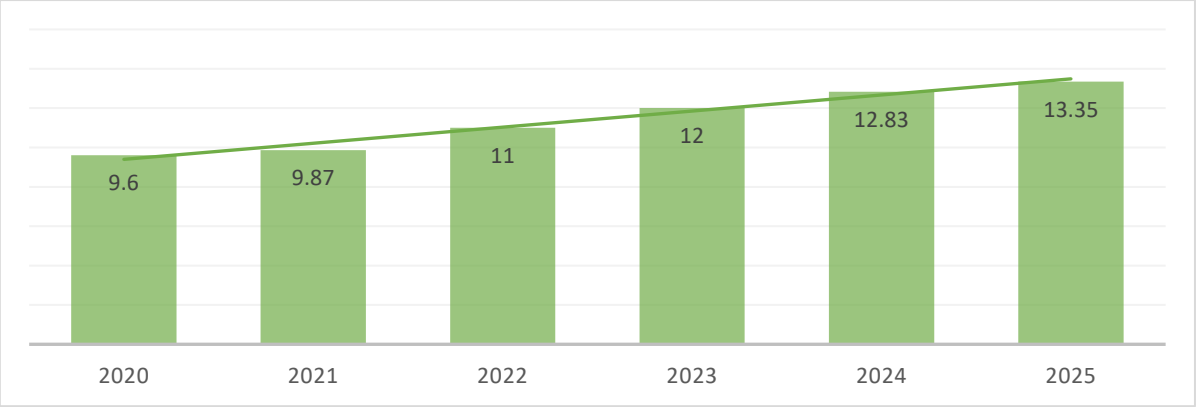
Pelayanan air minum perpipaan di Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh 87 unit SPAM dengan total 16.898 sambungan rumah. Cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan tercatat sebesar 19,98%, sedangkan akses rumah tangga terhadap air minum aman melalui perpipaan sebesar 19,35%. Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing sebesar 36,76% dan 24,24%, yang menunjukkan bahwa cakupan pelayanan perpipaan di Sidrap masih relatif terbatas. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan dan perluasan jaringan SPAM, peningkatan jumlah sambungan rumah, serta optimalisasi kapasitas air baku yang tersedia agar peningkatan cakupan pelayanan dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.

c. Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman (%)

Akses rumah tangga terhadap air minum aman di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren positif dalam lima tahun terakhir. Tahun 2020, proporsi tercatat 9,60 persen, terus mengalami peningkatan yang menjadi 13,35 pada tahun 2025. Realisasi tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menyediakan akses air minum yang aman

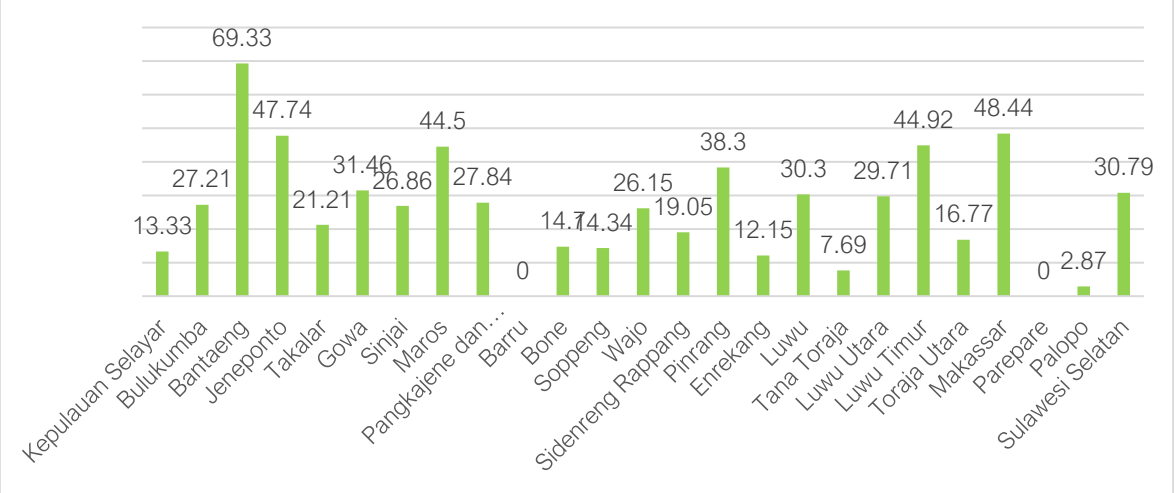
melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, dan program penyediaan air bersih.

Grafik 2.7
Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Aman di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

Grafik 2.8
Akses Air Minum Aman Rumah Tangga Hasil SKAMRT Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber: Hasil Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT)

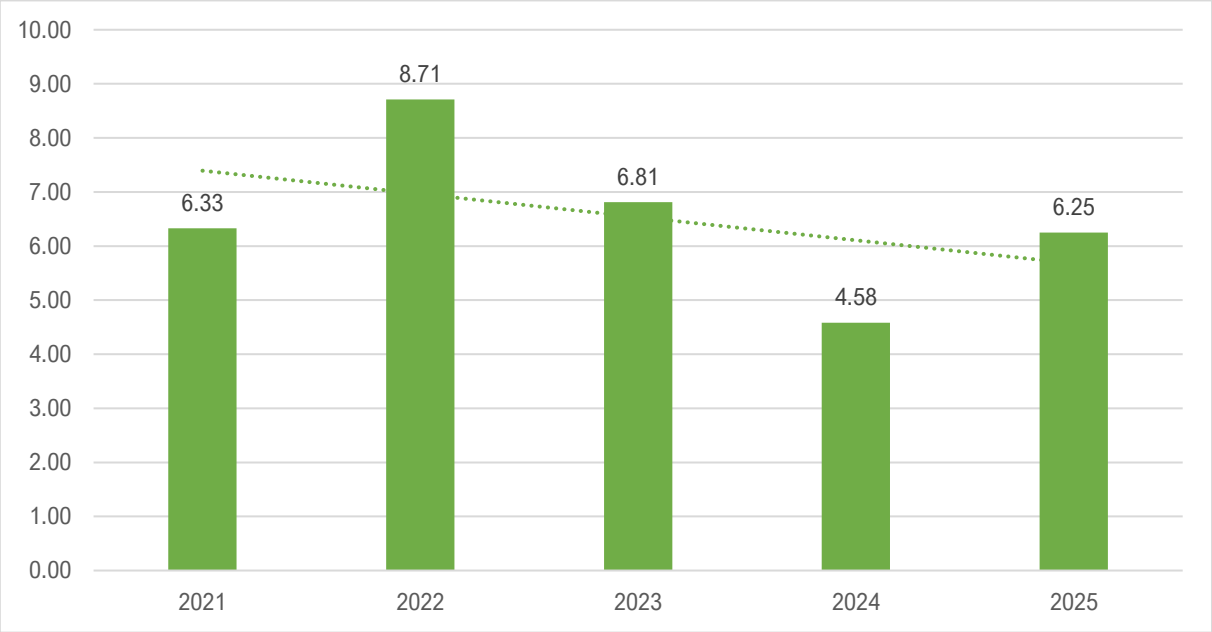
Berdasarkan hasil Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT), akses rumah tangga terhadap air minum aman di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menunjukkan tantangan dibandingkan beberapa kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan. Pada grafik, Sidrap tercatat memiliki akses air minum aman sebesar 19,05%, sementara rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 30,79%, sehingga terdapat kesenjangan sekitar 11,74 poin persentase. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan akses air minum belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas dan keamanan air yang dikonsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan kualitas layanan SPAM, pengawasan kualitas air, serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber air minum yang memenuhi standar keamanan menjadi penting dalam perencanaan pembangunan ke depan.

3. Ketahanan Pangan

a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengacu pada persentase penduduk yang mengalami kekurangan pangan atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi dan cukup. Data menunjukkan fluktuasi prevalensi ketidakcukupan konsumsi makanan dari peningkatan signifikan dari 6.33 persen di tahun 2021 menjadi 8.71 persen di tahun 2022 lalu terjadi penurunan hingga 4.58 persen di tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 6.25 persen di tahun 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan, daya beli masyarakat yang menurun, serta akses pangan yang belum merata, sehingga memerlukan penguatan intervensi ketahanan pangan.

Grafik 2.9
Prevalensi of Undernourishment (PoU) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025

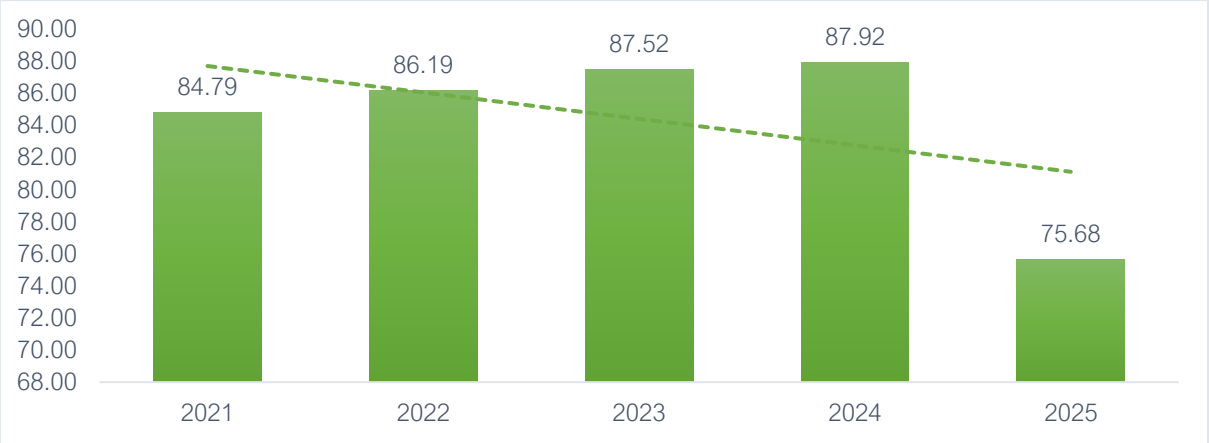


Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

b. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif sercara berkelanjutan. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, nilai IKP Kabupaten Sidenreng Rappang meningkat bertahap mulai tahun 2021 dengan nilai 84.79 persen hingga 87.92 persen pada tahun 2024. Namun terjadi penurunan nilai yang signifikan pada tahun 2025 dengan nilai 75.68 persen. Penurunan Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2025 disebabkan oleh adanya perubahan dan penambahan indikator penilaian yang berdampak pada hasil pengukuran Indeks Ketahanan Pangan.

Grafik 2.10
Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025

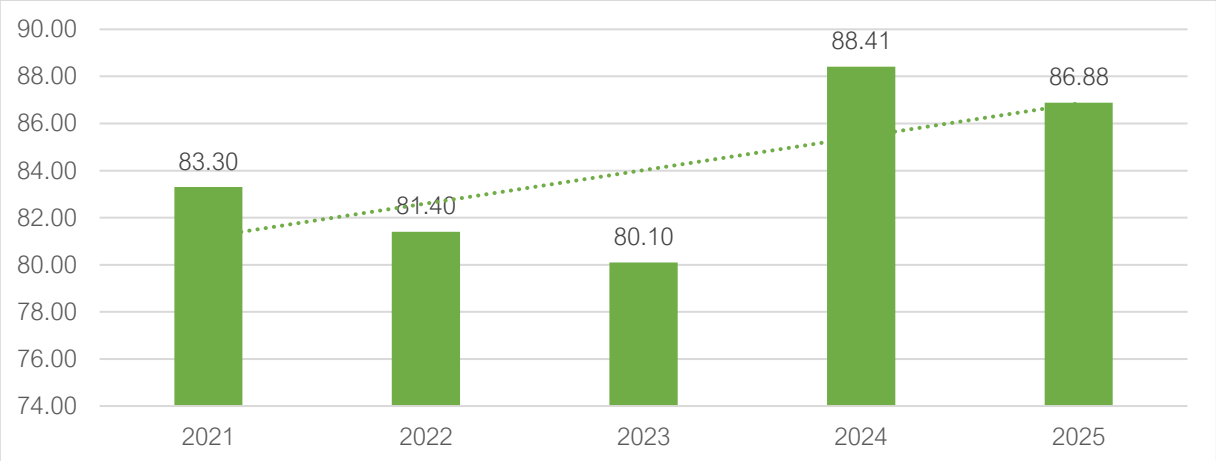


Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

c. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pola makan suatu penduduk. Skor ini menggambarkan sejauh mana pola makan individu atau kelompok individu memenuhi standar gizi yang disarankan atau diharapkan untuk menjaga kesehatan. Skor PPH yang tinggi menunjukkan bahwa pola makan penduduk di suatu wilayah cenderung memenuhi kebutuhan gizi yang direkomendasikan. Proses perhitungan skor PPH melibatkan evaluasi asupan makanan dari berbagai kelompok pangan, seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein hewani, protein nabati, dan lemak. Setiap kelompok pangan diberi nilai berdasarkan seberapa sering atau seberapa banyak dikonsumsi, serta seberapa sehat masing-masing kelompok pangan tersebut dalam konteks gizi dan kesehatan. Terjadi fluktuasi ngka skor PPH Kabupaten Sidenreng Rappang dari nilai 83.30 pada tahun 2021 lalu menurun hingga 80.10 pada tahun 2023. Angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2024 menjadi 88.41 poin lalu kembali terjadi penurunan pada tahun 2025 menjadi 86.88.

Grafik 2.11
Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025



Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

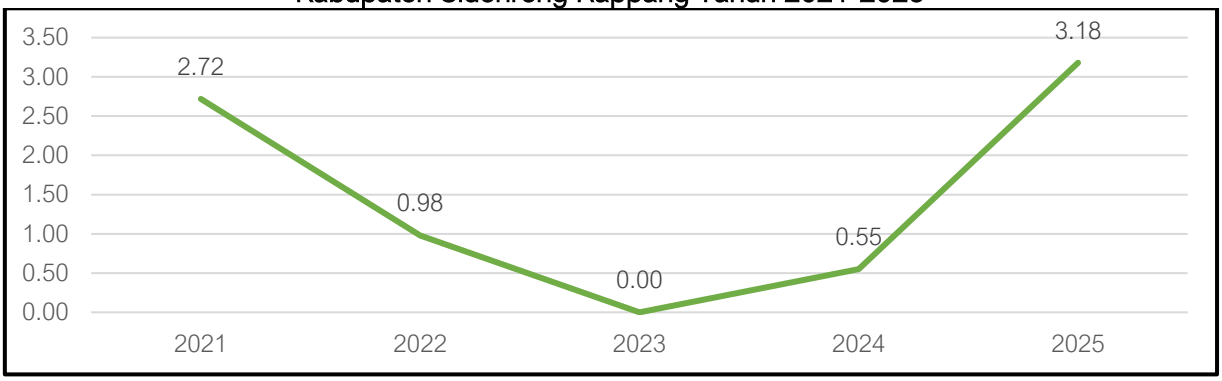
2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kondisi geografis seperti iklim dan topografi dapat berdampak signifikan terhadap kualitas lingkungan. Pemahaman yang baik tentang kondisi geografis suatu wilayah dapat membantu pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih efektif dan relevan. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup diantaranya ditunjukkan dengan indicator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPKD), Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Pengelolaan Sampah, Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dan Sampah yang Terdaur Ulang, dan Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah.

1. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia

Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia merupakan indikator penting dalam menggambarkan keberlanjutan praktik pertanian. Penggunaan pupuk organik yang lebih tinggi dibandingkan pupuk kimia mencerminkan perhatian terhadap kesehatan tanah, kualitas hasil pertanian, serta upaya mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan bahan kimia.

Grafik 2.12
Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



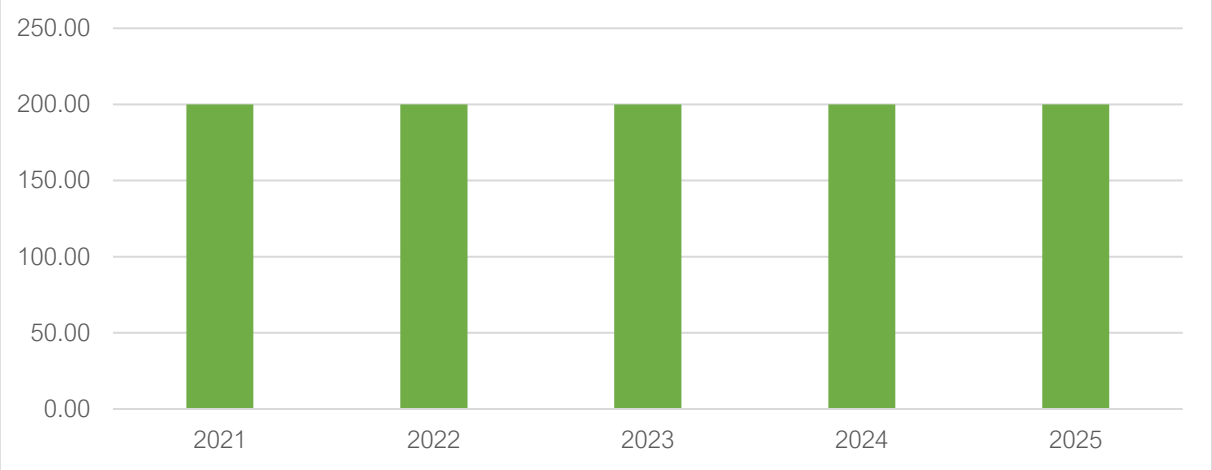
Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia mengalami penurunan signifikan selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, proporsi ini mencapai menjadi 2,72 persen. Namun, pada tahun 2022, proporsi ini menurun tajam menjadi hanya 0,98 persen, dan pada tahun 2023 tidak tercatat adanya penyaluran pupuk organik sama sekali (0,00 persen). Tidak adanya penyaluran subsidi untuk pupuk organik pada tahun 2023 disebabkan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2022 yang menetapkan bahwa subsidi pupuk pada tahun tersebut hanya diberikan untuk dua jenis pupuk, yaitu Urea dan NPK. Namun pada tahun 2024, pemerintah kembali menyalurkan pupuk organik sebesar 0,55 persen dan meningkat signifikan pada tahun 2025 menjadi 3,18 persen, tertinggi selama 5 tahun terakhir.

2. Indeks Pertanaman (IP) Padi

Indeks pertanaman (IP) padi merupakan rata-rata masa tanam dan panen dalam 1 (satu) tahun pada lahan yang sama. Potensi peningkatan IP di setiap wilayah dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, iklim, tanah, dan unsur hara secara terpadu serta melalui perbaikan pola tanam baik pada padi maupun tanaman pangan lainnya. Optimalisasi lahan sawah tadah hujan di musim kemarau dapat memanfaatkan potensi sumber daya air yang ada baik berupa air permukaan (sungai dan mata air) maupun air tanah.

Grafik 2.13
Indeks Pertanaman (IP) Padi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah tahun 2026

Indeks Pertanaman (IP) Padi di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2021-2025 berada di angka 200, atau lahan pertanian di daerah secara konsisten dapat mendukung dua kali masa tanam dan panen padi dalam setahun. Belum maksimalnya pelaksanaan IP300 atau 3x masa tanam. Tahun 2025 masih 1:2 karena 81,18% petani masih melakukan 2x masa tanam pada lahan yang dikelola. 13,56% 1x Tanam dan untuk IP300 5,25% atau 2.701 ha dari total lahan sawah 51.415 ha.

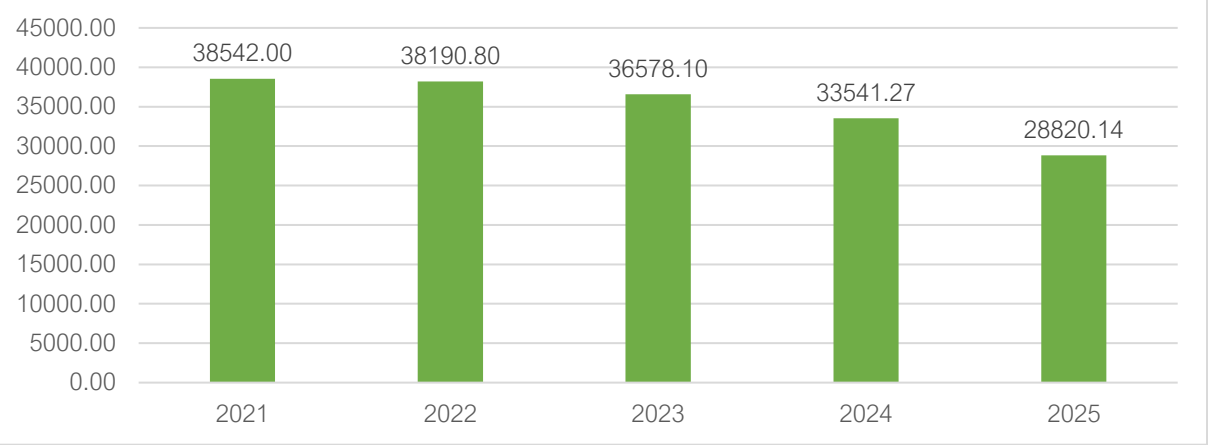
3. Proporsi Sawah Irigasi

Sawah irigasi merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah, karena sistem irigasi yang baik mampu menjamin ketersediaan air untuk pertanian sepanjang tahun. Keberadaan sawah irigasi tidak hanya meningkatkan produktivitas hasil pertanian, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah agraris.

Proporsi sawah irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, luas sawah irigasi tercatat sebesar 38.542 hektar, namun secara bertahap mengalami penurunan menjadi 28.820,14 hektar pada tahun 2025. Berkurangnya proporsi sawah irigasi disebabkan karena berkurangnya debit air dari hulu, yang

dipengaruhi penggundulan hutan sehingga volume debit air yang ditampung juga ikut berkurang. Sawah irigasi yang kekurangan air berubah menjadi pompanisasi dan tadah hujan.

Grafik 2.14
Proporsi Sawah Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



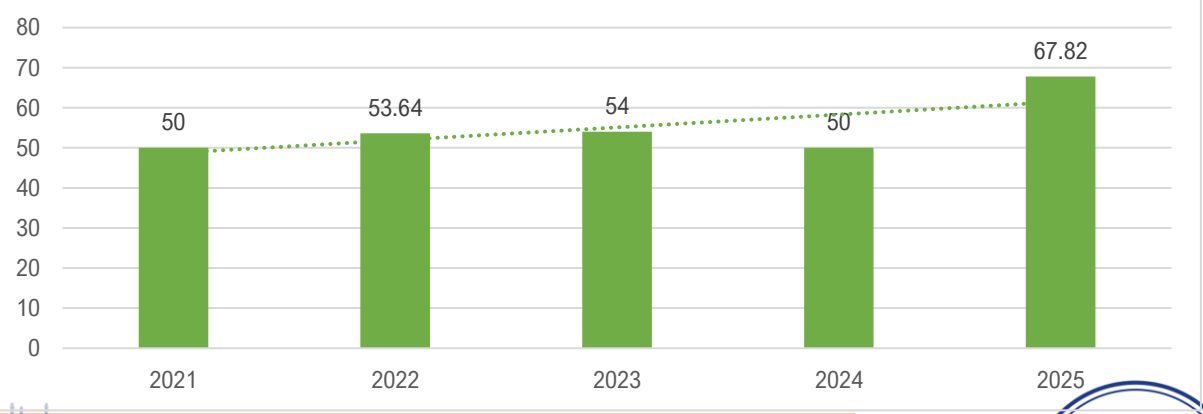
Sumber: Dinas TPHPKP Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2026

4. Produksi Perikanan

Secara geografis, Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah di Sulawesi Selatan yang wilayahnya tidak memiliki laut. Secara umum kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan. Meski begitu, daerah ini mampu menghasilkan produksi komoditas perikanan relatif besar, namun tidak selalu mencapai target.

Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Sidenreng Rappang selam 5 tahun cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2025. Setelah mengalami penurunan di tahun 2023 tren kembali meningkat dari tahun 2024-2025. Faktor alam seperti cuaca dan iklim yang mempengaruhi fluktuasi produksi ikan seperti kekeringan yang menghambat pembudidaya ikan, begitupun dengan hujan yang terus menerus membuat nelayan tidak dapat melakukan penangkapan ikan tapi seiring waktu produksi perikanan mulai membaik walau belum meningkat signifikan.

Grafik 2.15
Produksi Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2021-2025



Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

5. Angka Konsumsi Ikan

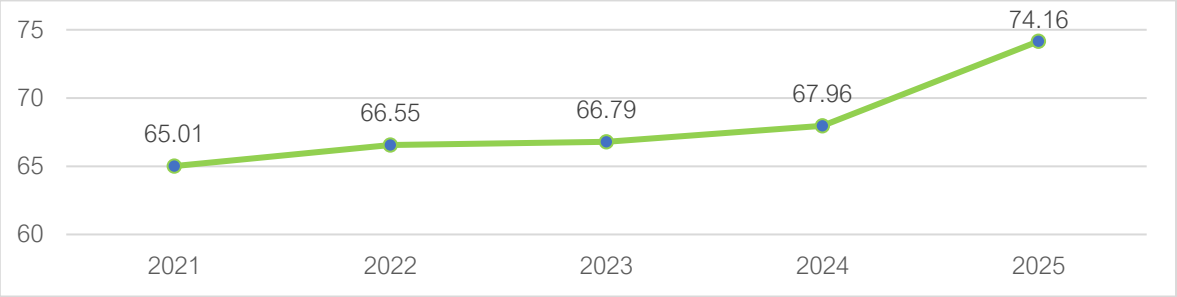
Konsumsi ikan termasuk salah satu komponen pengeluaran bulanan rumah tangga paling besar di Kabupaten Sidenreng Rappang setelah makanan/minuman jadi dan rokok. Data BPS Sulawesi Selatan mencatat bahwa pengeluaran bulanan rumah tangga di Sidenreng Rappang dihabiskan untuk konsumsi ikan. Meskipun begitu, angka capaian konsumsi ikan masih belum pernah mencapai atau melampaui target yang ditentukan pemerintah daerah. Pada tahun 2020 konsumsi ikan sebanyak 38 kg/kapita. Tahun 2023, konsumsi ikan meningkat mencapai 54,79 kg/kapita. Sementara itu untuk data 2024 angka konsumsi ikan belum ada data. Konsumsi ikan cenderung berfluktuasi dikarenakan berbagai faktor seperti ketersediaan ikan yang disukai oleh masyarakat, harga ikan yang juga berfluktuasi, dan masih banyak masyarakat yang belum sadar akan manfaat ikan.

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Ketahanan ekologi diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pelibatan individu, masyarakat serta industri dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dilakukan untuk memperkuat sinergi dan interaksi ketahanan sosial ekonomi dan ekologi. Pada akhirnya, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif serta kelestarian lingkungan.

Kabupaten Sidenreng Rappang masih perlu memberi perhatian serius terhadap kualitas lingkungan hidup. Selama periode 2021 hingga 2025, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung berfluktuasi tapi dapat dilihat terjadi peningkatan pada tahun 2025. Pada tahun 2021, IKLH mencatatkan nilai 65,01 poin lalu trennya naik dan meningkat signifikan menjadi 73,92 poin di tahun 2025.

Grafik 2.16
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

Tabel 2.22
Perkembangan Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2025

No	Indikator Komponen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Air (IKA)2	58,40	50,00	53,64	54,00	50,00	67,82

No	Indikator Komponen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	Indeks Kualitas Udara(IKU)	87,55	87,81	87,90	85,59	94,22	82,29
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	49,19	48,63	48,63	49,44	50,23	70,00
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		62.68	65,01	66,55	66,79	67,96	74,16

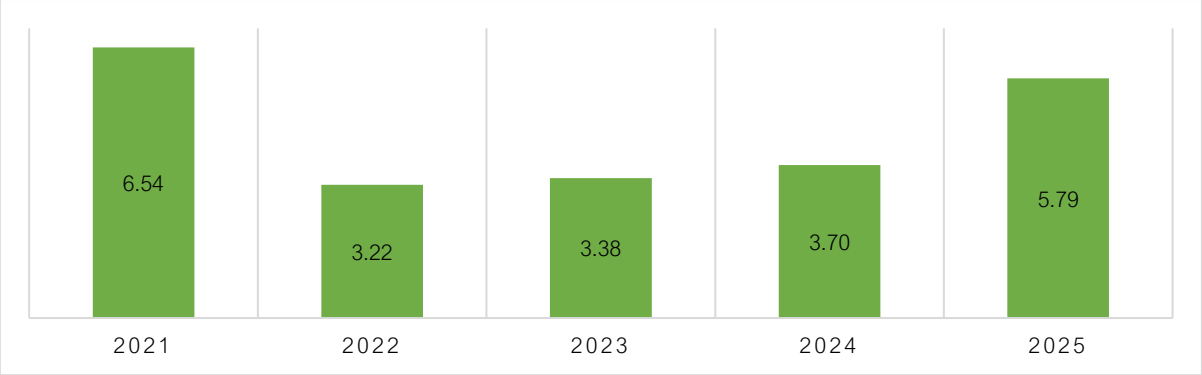
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

Selama periode 2020–2025, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 62,68 pada tahun 2020 menjadi 74,16 pada tahun 2025, yang mencerminkan perbaikan kondisi lingkungan secara umum. Peningkatan ini terjadi meskipun masing-masing komponen penyusun IKLH menunjukkan dinamika yang berbeda. Indeks Kualitas Air (IKA) sempat mengalami penurunan pada 2021 dan stagnasi hingga 2024, namun meningkat tajam pada 2025 menjadi 67,82, mengindikasikan perbaikan signifikan dalam pengelolaan kualitas air. Indeks Kualitas Udara (IKU) relatif tinggi dan stabil sepanjang periode pengamatan, meskipun terjadi fluktuasi dengan nilai tertinggi pada 2024 (94,22) dan penurunan pada 2025 (82,29), namun secara umum tetap berada pada kategori baik. Sementara itu, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) cenderung rendah dan stagnan pada 2020–2024, sebelum mengalami lonjakan signifikan pada 2025 hingga 70,00, yang menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam pengelolaan dan perlindungan tutupan lahan. Secara keseluruhan, peningkatan IKLH Kabupaten Sidenreng Rappang pada periode ini terutama didorong oleh perbaikan signifikan pada kualitas air dan tutupan lahan pada tahun 2025, dengan kualitas udara tetap menjadi komponen yang memberikan kontribusi positif terbesar secara konsisten.

7. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Selama Selama lima tahun terakhir, persentase akses sanitasi aman di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2021, sebesar 6,54 persen. Angka ini kemudian mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 3,22 persen. Tahun 2023 dan 2024, perlahan naik kembali masing-masing di angka 3,38 persen dan 3,70 persen hingga tahun 2025 mencapai angka 5,79 persen.

Grafik 2.17
Akses Sanitasi Aman Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2026

Rendahnya sanitasi aman jika dibandingkan dengan akses sanitasi layak sebanyak 91.65 persen, disebabkan pasokan air bersih yang masih terbatas dibeberapa wilayah begitupun dengan kesadaran masyarakat tentang pentingya sanitasi aman masih rendah, sehingga tidak ada kepedalian untuk mewujudkan lingkungan bersih.

Tabel 2.23
Persentase Akses Sanitasi Layak dan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

No	Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
1	Akses Sanitasi Layak (%)	85,04	85,74	93,9	93,9	91,65
2	Akses Sanitasi Aman (%)	6,54	3,22	3,38	3,70	5,79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

Akses sanitasi yang aman juga dapat dilihat dari jumlah peneyedotan lumpur tinja yang dilakukan oleh Dinas Biciptapera Sidenreng Rappang pertahunnya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.24
Jumlah Rumah tangga yang terlayani peneyedotan Lumpur Tinja

No.	Tolak Ukur	Jumlah Penyedotan Per Tahun (Rumah Tangga)			
		2021	2022	2023	2024
1	Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	0	0	0	0
2	Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3)	1540	263	172	161

Sumber: Dinas Bina Marga, cipta karya, pertanahan dan perumahan rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Jumlah penyedotan lumpur tinja untuk terjadwal tidak ada, namun untuk peneyedotan lumpur tinja yang tidak terjadwal mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga menjadi 161 Rumah tangga di tahun 2024. Target penyedotan dari 250 rumah tangga hanya tecapai 161 rumah tangga, hal ini karena beberapa faktor teknis di lapangan sehingga tidak dapat dilakukan peneydotan.

Selain itu untuk melihat capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman dapat dilihat dari kondisi rumah tangga yang terlayani SPALD-T baik itu skala komunal, kawasan dan perkotaan.

Tabel 2.25
Jumlah Rumah tangga yang Terlayani SPALD-T

No.	Jenis SPALD-T	Jumlah Sambungan Rumah							
		Jumlah Kapasitas Desain (SR)				Jumlah Kapasitas Terpakai (SR)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	IPAL Skala Permukiman	475	475	475	475	340	340	340	340
2	IPAL Skala Kawasan	150	150	150	150	150	150	150	150
3	IPAL Skala Kota	-	-	-	-	-	-	-	-

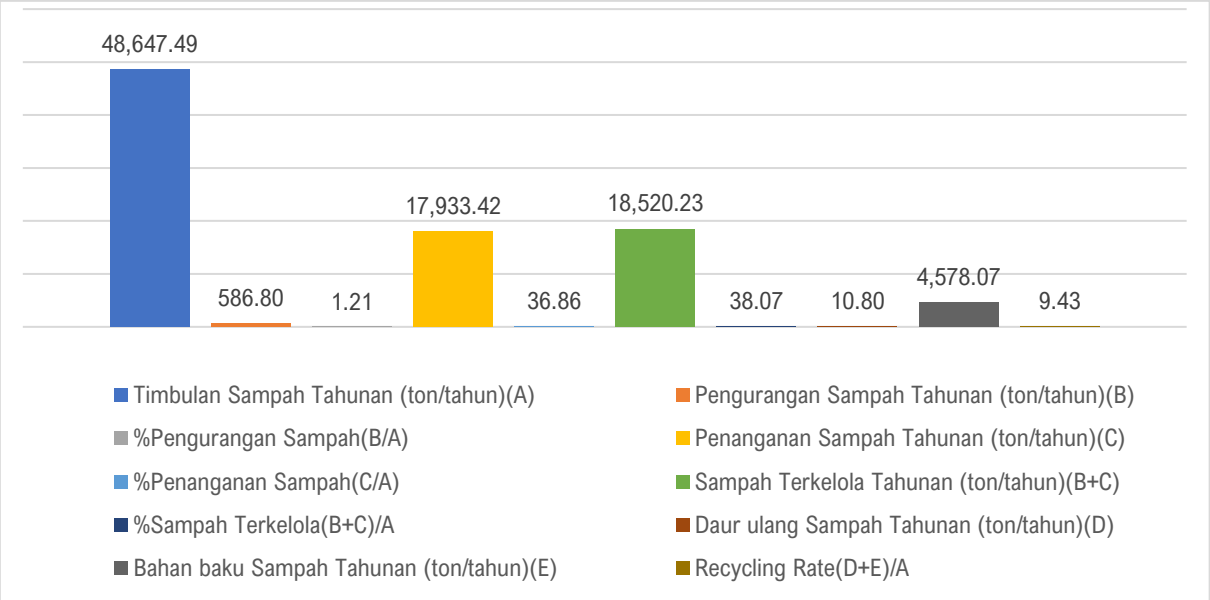
Sumber: Data diolah, 2026

Jumlah sambungan rumah untuk IPAL Skala permukiman mengalami angka statis tiap tahunnya yakni di angka 475 SR untuk kapasitas desain dan 340 SR untuk kapasitas terpakai hingga pada tahun 2024, begitupun untuk IPAL Skala Kawasan yang statis di angka 150 SR untuk kapasitas desain dan 150 SR untuk kapasitas terpakai hingga pada tahun 2024. Adapun untuk IPAL skala Kota tidak ada pemasangan.

8. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan hal krusial untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Indikator untuk mengukur sejauh mana pengelolaan sampah diantaranya adalah persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Indikator ini diperoleh dari jumlah sampah terkelola (penanganan dan pengurangan) dikurangi jumlah sampah yang didaur ulang dibagi jumlah timbulan sampah. Pada tahun 2024, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 48.288,33 Ton per tahun, dimana sebanyak 26.400,92 Ton sampah telah dikelola. Dengan demikian, persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah sebesar 54,67 persen. Ini mengindikasikan perlunya peningkatan sarana dan prasarana, optimalisasi penerapan program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), serta pengembangan teknologi dan keterampilan sumber daya manusia di bidang pengelolaan sampah.

Grafik 2.18
Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025



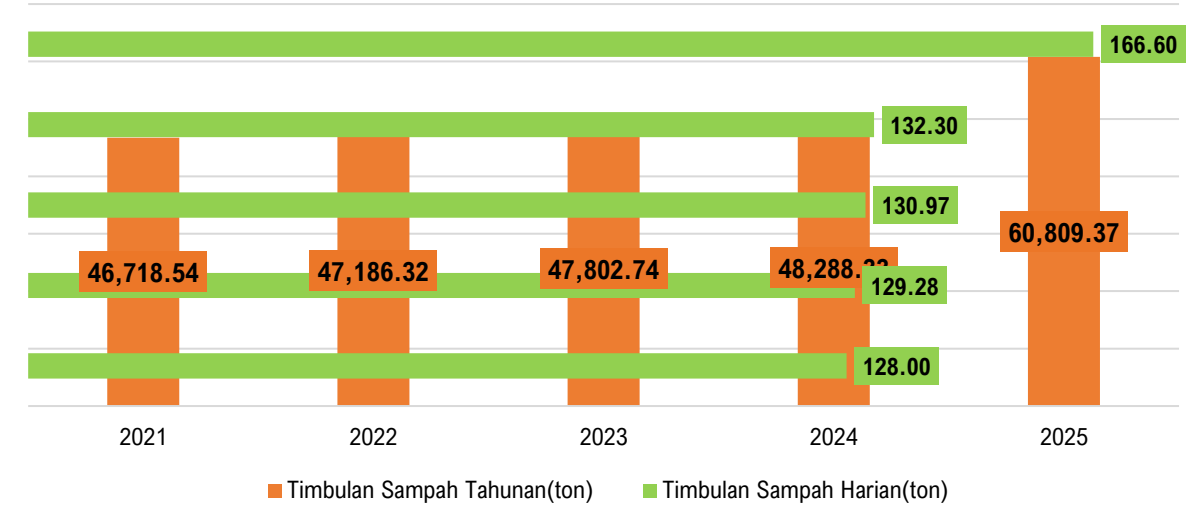
Sumber: SIPSN-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diolah Tahun 2026

9. Timbulan Sampah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

Berdasarkan data yang tersedia di SIPSN, Timbulan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2021–2025. Timbulan sampah tahunan meningkat dari 46.718,54 ton pada tahun 2021 menjadi 47.186,32 ton pada tahun 2022, 47.802,74 ton pada tahun 2023, 48.288,33 ton pada tahun 2024, dan melonjak menjadi 60.809,37 ton pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, timbulan sampah harian juga meningkat dari

128,00 ton per hari pada tahun 2021 menjadi 166,60 ton per hari pada tahun 2025. Peningkatan timbulan sampah ini mengindikasikan semakin besarnya tekanan terhadap sistem pengelolaan persampahan, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan pola konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut memerlukan penguatan kapasitas pengelolaan sampah melalui peningkatan layanan pengumpulan dan pengolahan, pengurangan sampah dari sumbernya, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).

Grafik 2.19
Timbulan Sampah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: SIPSN-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diolah Tahun 2026

10. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengelolaan sampah rumah tangga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pengelolaan sampah suatu daerah. Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya menyediakan layanan penuh pengumpulan sampah untuk rumah tangga melalui metode pengumpulan dari pintu ke pintu secara rutin atau penyediaan tempat pembuangan sampah komunal yang berjarak maksimal 200 meter yang dikumpulkan untuk pemisahan sampah berdasarkan kategori, yaitu fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilah sampah. Tahun 2024 rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 10,40 persen atau 8.643 rumah tangga terlayani, tertinggi kedua untuk Kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebesar 11,69 persen atau 10.575 rumah tangga terlayani. Sedangkan layanan pengumpulan sampah terendah di Kabupaten Tana Toraja hanya mencapai 0,08 persen atau 52 rumah tangga dan Kabupaten Toraja Utara hanya mencapai 0,09 persen atau hanya 50 rumah tangga terlayani. Pengukuran rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah tahun 2024 disajikan pada table berikut.

Tabel 2.26
Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kep. Selayar	1.060	2,96
Bulukumba	2.707	2,25
Bantaeng	3.168	5,83
Jeneponto	4.539	4,29
Takalar	1.745	2,10
Gowa	1.059	0,51
Sinjai	3.411	3,98
Kab. Maros	5.350	6,46
Pangkep	10.575	11,69
Barru	1.042	2,13
Bone	10.100	4,88
Soppeng	1.243	2,10
Wajo	430	0,43
Sidrap	8.643	10,40
Pinrang	5.671	5,36
Enrekang	422	0,72
Luwu	151	0,20
Tana Toraja	52	0,08
Luwu Utara	2.770	3,42
Luwu Timur	2.405	2,97
Toraja Utara	50	0,09
Kota Makassar	11.664	3,15
Kota Parepare	823	2,02
Kota Palopo	210	0,37
Prov. Sulsel	79.290	3,27

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan; diolah tahun 2025

2.1.1.6. Resilensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

Salah satu kajian risiko yang dihadirkan pada dokumen ini adalah kajian risiko bencana. Kajian ini didasarkan pada laporan kajian resiko bencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengkajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan di suatu daerah sehingga dapat dianalisis kemungkinan timbulnya potensi bencana di daerah tersebut. Setelah diketahui kemungkinan potensi bencana, dapat ditentukan langkah-langkah sistematis terhadap upaya penanggulangan bencana untuk pengurangan risiko masing-masing bencana yang berpotensi. Secara umum, pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas.

Pengkajian tersebut didasarkan pada indeks masing-masing bencana terhadap bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Metodologi yang digunakan untuk menerjemahkan indeks tersebut, menghasilkan tingkat risiko untuk setiap bencana di suatu daerah. Penyempurnaan terhadap

metodologi yang digunakan akan berpengaruh terhadap proses pengkajian risiko dan hasil kajian. Pengaruh tersebut terkait dengan komponen-komponen yang digunakan dalam pengkajian, yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko.

Hasil kajian resiko bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) jenis bahaya (rendah-tinggi) yang berisiko terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, likuefaksi, dan tanah longsor. Dari kedelapan bencana tersebut, bencana banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi dan kekeringan, patut diwaspadai. Hal ini dikarenakan keempat bencana tersebut berisiko dapat terjadi di setengah wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, risiko banjir dan kekeringan akan berdampak buruk terhadap produktifitas sumber mata pencaharian masyarakat yang dominan berupa lahan sawah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Banjir merupakan salah satu bencana alam di mana daratan tergenang oleh aliran air yang berlebihan. Bencana ini sering terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan, bahkan di beberapa tempat banjir sudah menjadi agenda tahunan. Banjir di lokasi berbeda juga tentunya akan menimbulkan dampak yang berbeda. Banjir di perkotaan sebagian besar akan menimbulkan kerusakan pada sarana dan prasarana pemukiman warga. Lain halnya jika bencana ini terjadi di pedesaan yang pada umumnya akan menyebabkan terendamnya lahan pertanian dan ladang milik masyarakat.

Tabel 2.27
Luas dan Sebaran Lokasi Resiko Banjir di Kabupaten Sidenreng Rappang

Kecamatan	Luas Bencana Banjir (Ha)			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
Baranti	165,34	2.000,58	1.267,38	3.433,31
Dua Pitue	242,11	2.838,63	3.613,02	6.693,76
Kulo	73,04	1.975,77	863,43	2.912,24
Maritengngae	81,86	3.591,79	2.058,59	5.732,24
Panca Lautang	5,98	2.335,26	1.606,62	3.947,85
Panca Rijang	2,99	955,42	515,75	1.474,16
Pitu Riase	22,94	2.564,94	1.921,58	4.509,46
Pitu Riawa	151,75	4.505,59	3.625,19	8.282,53
Tellu Limpoe	67,67	1.552,26	771,12	2.391,06
Watang Pulu	39,82	2.127,02	1.284,26	3.451,09
Watang Sidenreng	110,67	3.951,28	2.195,52	6.257,46
Total	964,17	28.398,55	19.722,45	49.085,18
Total (%)	1,96	57,86	40,18	100,00

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2025

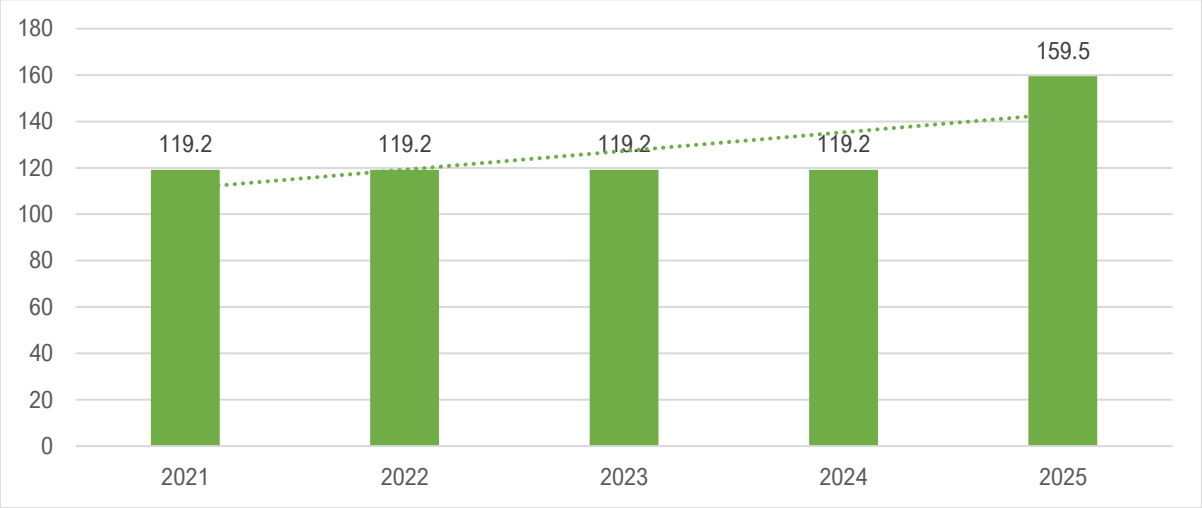
Berdasarkan batas administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang potensi terjadinya resiko banjir terbesar terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa, Dua Pitue, Maritengngae, Watang Sidenreng, dan Panca Lautang. Hal ini dikarenakan kelima kecamatan tersebut sebagian besar wilayahnya memiliki topografi yang datar dan sebagian landai. Selain itu, tingginya curah hujan

dan kurang nya resapan air juga mempengaruhi risiko terjadi nya banjir. Adanya informasi mengenai kejadian banjir akan sangat membantu masyarakat dan pemerintah dalam menentukan berbagai keputusan sehingga mampu meminimalisir akibat atau dampak dari bencana alam ini.

1. Indeks Risiko Bencana

Pengkajian terhadap risiko bencana di suatu wilayah dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap beberapa komponen, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di wilayah tersebut. Komponen bahaya merupakan fenomena alam yang dapat menyebabkan gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan terdiri kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Terakhir, komponen kapasitas merupakan unsur ketahanan daerah, seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat, dan kapasitas pemulihan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang konsisten di angka 119.20 dengan kategori sedang terhadap bahaya, kerentanan dan kapasitas.

Grafik 2.20
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

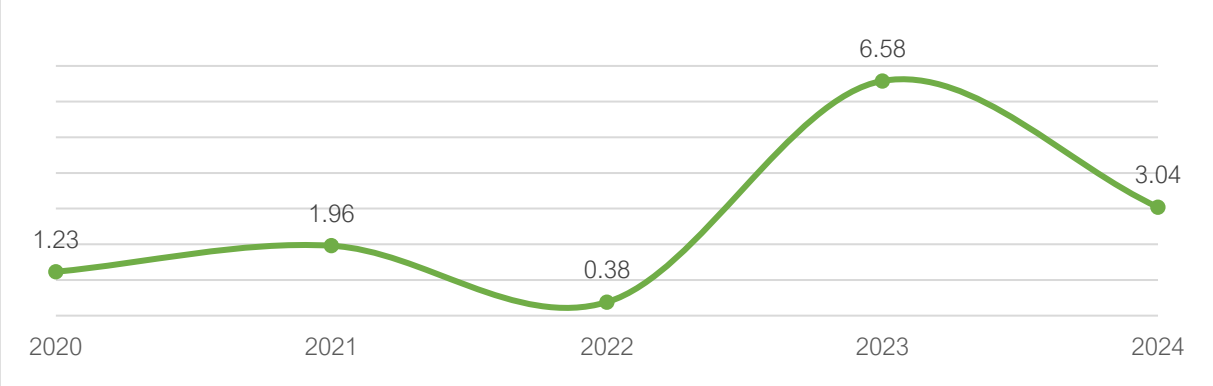
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan nilai yang relatif stagnan pada 2021–2024 sebesar 119,2, kemudian mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2025 menjadi 159,5. Kondisi stagnan pada empat tahun awal mengindikasikan bahwa tingkat risiko bencana berada pada level yang sama tanpa perubahan berarti, baik dari sisi ancaman, kerentanan, maupun kapasitas daerah. Namun, lonjakan nilai indeks pada 2025 menunjukkan adanya peningkatan risiko bencana yang cukup tajam, yang dapat disebabkan oleh meningkatnya intensitas ancaman bencana, bertambahnya tingkat kerentanan wilayah, atau belum optimalnya kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan. Secara keseluruhan, tren ini mengindikasikan bahwa meskipun risiko bencana relatif terkendali pada

periode 2021–2024, tahun 2025 menjadi titik perhatian penting yang memerlukan penguatan upaya pengurangan risiko bencana secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Persentase penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan perubahan persentase dalam jumlah emisi gas rumah kaca dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Indikator ini bertujuan untuk mengukur seberapa cepat upaya penurunan GRK di suatu wilayah. GRK merupakan gas-gas seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), nitrogen oksida (N2O), dan berbagai jenis gas lainnya yang bisa menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Informasi yang diperoleh dari Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa potensi penurunan emisi di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 3,04 persen pada tahun 2024. Potensi Penurunan intensitas emisi GRK diukur berdasarkan aksi pembangunan rendah karbon daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi aksi mitigasi, untuk tahun 2024 menurunnya potensi penurunan intensitas emisi GRK karena pada sektor pertanian yang berkontribusi besar pada tahun sebelumnya sebagai aksi mitigasi emisi GRK melalui penggunaan bibit rendah emisi tidak lagi dilakukan begitupun pada sektor lainnya.

Grafik 2.21
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 - 2024



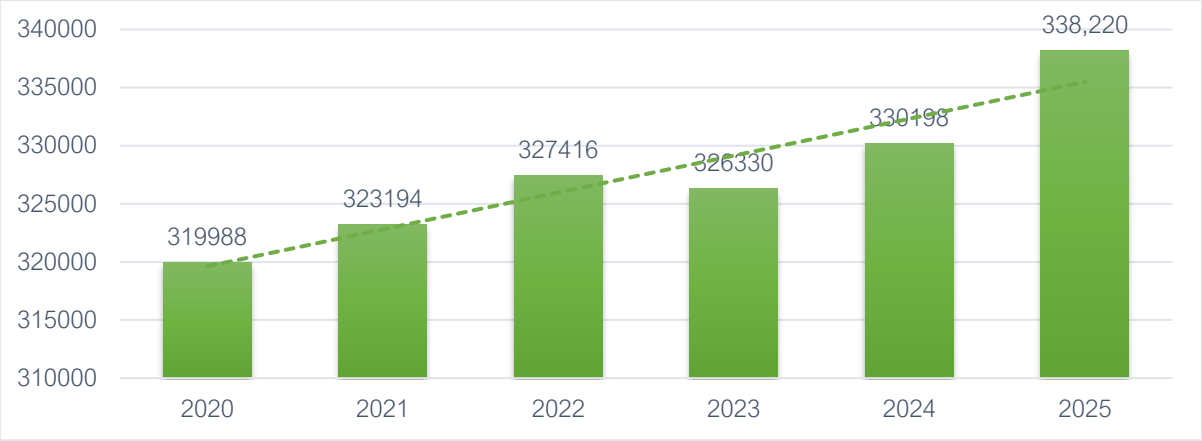
Sumber: AKSARA, Bappenas, diolah Tahun 2025

2.1.1.7. Demografi

1. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang menetap dan tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, baik sebagai warga negara maupun pendatang, dan diakui secara hukum sebagai bagian dari wilayah tersebut. Indonesia saat ini berada dalam fase bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 281,6 juta jiwa, dan sekitar 68–70% di antaranya berada dalam kelompok usia produktif. Kondisi penduduk indonesia juga tercerminkan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

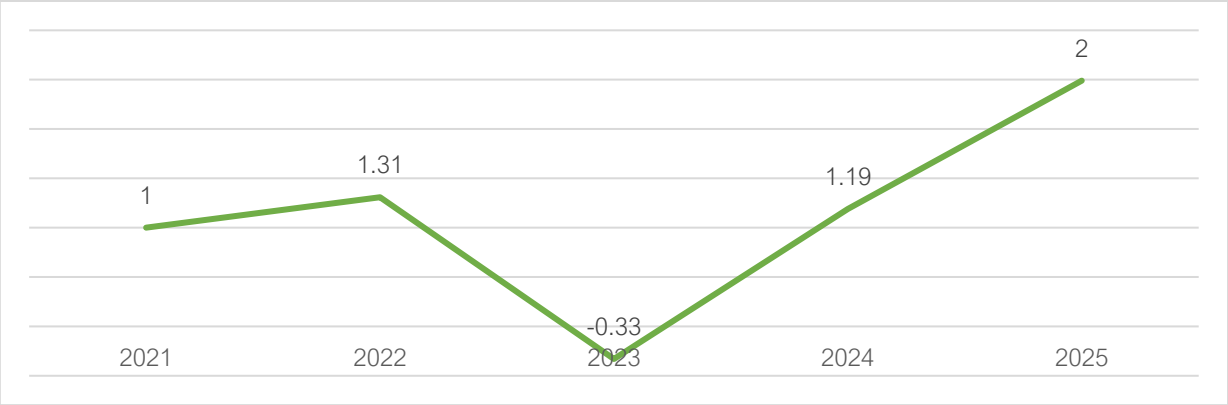
Grafik 2.22
Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diolah Tahun 2026

Pada tahun 2021, tercatat ada sebesar 323.194 populasi, kemudian meningkat menjadi 326.330 jiwa pada tahun 2023, sebelum mencapai angka terbaru di tahun 2024 yang mencapai 330.198 jiwa lalu mencapai angka terbaru di tahun 2025 yang mencapai 338.220 jiwa. Meskipun terjadi penambahan per tahun, tapi nampaknya masih bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah

Grafik 2.23
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diolah Tahun 2026

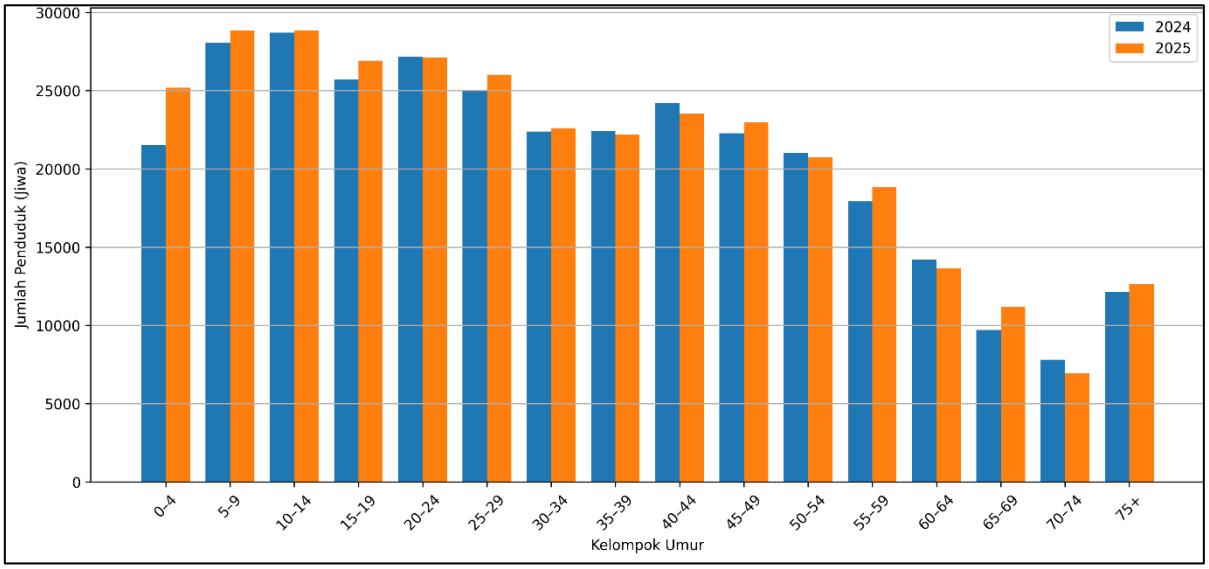
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang terkendali, mencerminkan keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dan kebijakan pemerintah daerah. Pada tahun 2021, jumlah penduduk sebesar 323.194 jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,00 persen. Pada tahun 2023, jumlah penduduk menurun dan kembali meningkat 338.220 jiwa pada tahun 2025, dengan laju pertumbuhan mencapai 2 persen. Pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi fondasi penting untuk memanfaatkan bonus demografi secara optimal, dengan memastikan peningkatan kualitas hidup penduduk usia produktif.

2. Komposisi penduduk

Komposisi penduduk adalah pembagian atau pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, dan lainnya.

Komposisi ini penting untuk mengetahui struktur penduduk suatu wilayah serta digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Adapaun Komposisi berdasarkan usia penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.24
Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024-2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diolah Tahun 2026

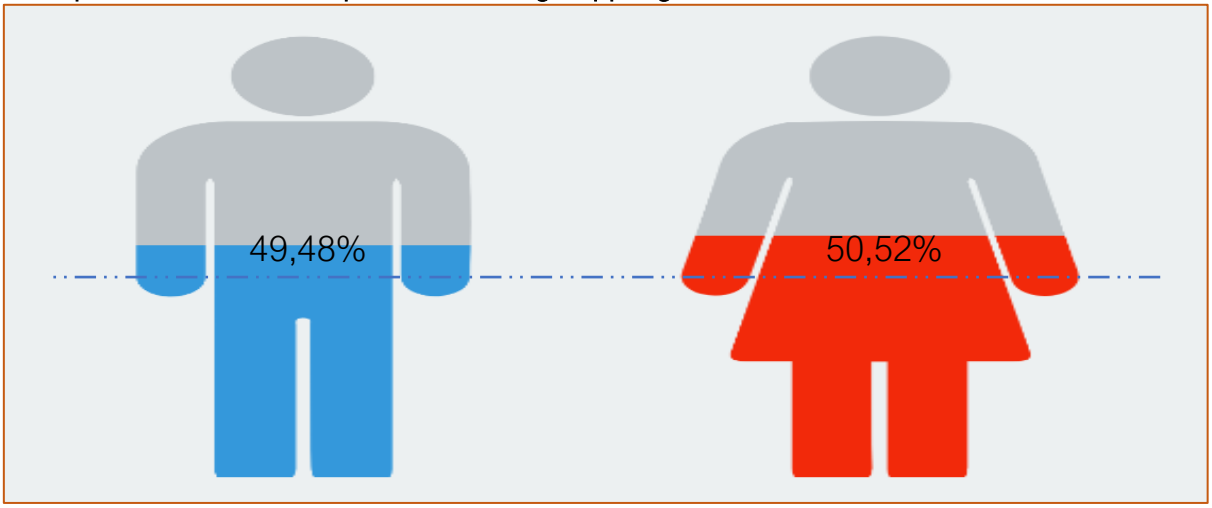
Struktur umur yang masih didominasi kelompok usia muda–produktif, dengan konsentrasi terbesar berada pada rentang 5–14 tahun dan tetap tinggi hingga usia 20–29 tahun, mengindikasikan keberlanjutan bonus demografi dalam jangka menengah. Pada 2025 terjadi peningkatan absolut hampir di seluruh cohort muda, paling terlihat pada usia 0–4 tahun yang naik signifikan dibanding 2024, menandakan adanya dorongan kelahiran atau perbaikan pencatatan administrasi. Sementara itu, kelompok usia menengah seperti 30–44 tahun relatif stabil dengan fluktuasi kecil, mencerminkan transisi alami kohort tanpa lonjakan migrasi besar. Di sisi lain, populasi lanjut usia, khususnya 65 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan tren meningkat meskipun volumenya masih jauh di bawah usia produktif, yang mengindikasikan mulai menguatnya proses penuaan penduduk namun belum menjadi beban demografis utama. Secara keseluruhan, struktur ini memperlihatkan piramida penduduk yang masih ekspansif-moderat: basis muda tetap lebar, usia kerja dominan, dan lansia bertambah gradual, sehingga implikasi kebijakannya berfokus pada penyiapan lapangan kerja, layanan pendidikan, serta antisipasi awal kebutuhan jaminan sosial lansia.

3. Rasio Penduduk

Selain menunjukkan dominasi penduduk usia produktif, piramida penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang juga sekaligus menggambarkan proporsi penduduk perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki. Secara keseluruhan, tahun 2024 ada sebesar 50,65 persen penduduk perempuan dari total populasi dan 49,35 persen penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin 98

atau di bawah 100. Dari 11 kecamatan, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Pitu Riawa menjadi dua wilayah yang mencatat penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

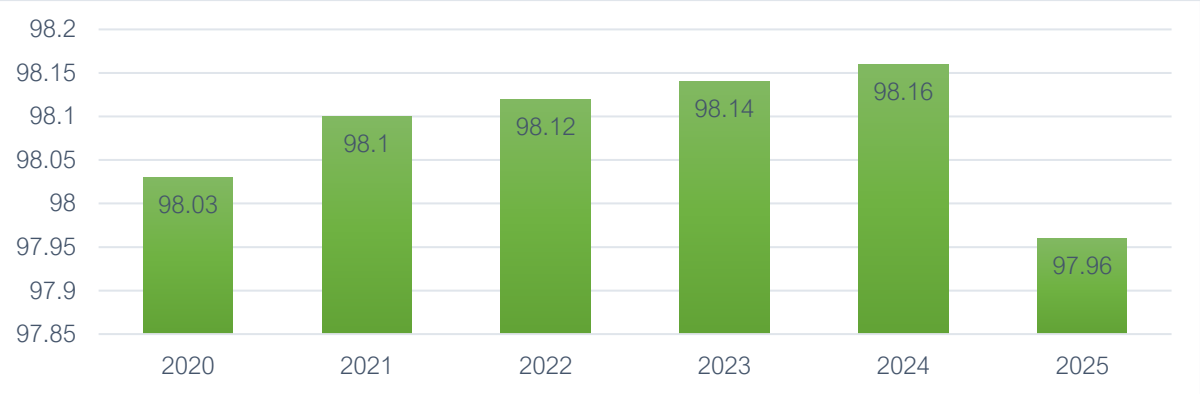
Gambar 2.10
Proporsi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah; 2025

Struktur yang hampir berimbang ini mengindikasikan tidak adanya ketimpangan gender yang signifikan dalam dinamika demografi daerah, sekaligus mencerminkan pola mortalitas, migrasi, dan kelahiran yang masih dalam batas normal. Dalam konteks perencanaan pembangunan, komposisi tersebut penting terutama untuk perumusan kebijakan responsif gender, baik pada sektor ketenagakerjaan, kesehatan reproduksi, maupun pemberdayaan perempuan, mengingat proporsi perempuan yang sedikit lebih tinggi berpotensi memengaruhi kebutuhan layanan sosial dasar dan perlindungan tenaga kerja.

Grafik 2.25
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diolah Tahun 2026

4. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk menunjukkan banyaknya penduduk per satuan luas wilayah (km^2). Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk juga mengindikasikan adanya pertambahan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung meningkat

dari 170 orang per km^2 di tahun 2020 menjadi 179.6 orang per km^2 di tahun 2025. Peningkatan kepadatan penduduk ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk yang positif.

Jika diamati penyebaran penduduk menurut wilayah kecamatan pada tahun 2023, penduduk terbanyak bermukim di Kecamatan Maritengngae, yaitu sebanyak 55.130 jiwa atau 16,70 persen dari total penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang. Kecamatan Watangpulu dan Baranti masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga, yaitu 38.991 jiwa (11,81%) dan 33.621 jiwa (10,18%). Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kulo, yaitu hanya 14.394 jiwa atau 4,36 persen dari total penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang. Jika dikomparasi dengan tahun 2020, pola penyebaran penduduk menurut kecamatan tidak banyak mengalami perubahan. Proporsi penduduk terbesar tetap berada di wilayah Kecamatan Maritenggange, Baranti, dan Watangpulu. Sedangkan proporsi penduduk terkecil tetap berada di wilayah Kecamatan Kulo, Panca Lautang, dan Watang Sidenreng.

Meskipun Kecamatan Maritengngae mencatat jumlah penduduk paling besar, namun tingkat kepadatan penduduk tertinggi justru tercatat di Kecamatan Panca Rijang, yaitu 964,40 jiwa per Km^2. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Maritengngae sedikit lebih rendah, yaitu 836,57 jiwa per Km^2 dan menempati posisi kedua tertinggi. Sedangkan Kecamatan Putu Riase mencatat tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu hanya 28,80 jiwa per Km^2. Kecamatan Pitu Riase merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sidenreng Rappang (mencapai hampir 45% dari total luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang) sementara jumlah penduduk yang bermukim di wilayah ini relatif kecil (hanya 7,36% dari total penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang). Fakta ini menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat tidak merata dan terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

Grafik 2.26
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diolah Tahun 2026

Tabel 2.28
Penyebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024 dan 2025

No	Kecamatan	2023		2024	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Panca Lautang	19.653	5,95	19,234	5,68
2	Tellu Limpoe	26.552	8,04	26,907	7,96
3	Watang Pulu	38.991	11,81	40,202	11,89
4	Baranti	33.621	10,18	33,922	10,03
5	Panca Rijang	32.809	9,94	33,847	10,01
6	Kulo	14.394	4,36	14,616	4,32
7	Maritengngae	55.130	16,70	57,048	16,87
8	Watang Sidenreng	21.051	6,38	21,366	6,32
9	Dua Pitue	32.581	9,87	33,717	9,97
10	Pitu Riawa	31.084	9,41	32,334	9,56
11	Pitu Riase	24.332	7,37	25,027	7,40

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diolah Tahun 2026

5. Proyeksi Demografi Tahun 2025 – 2030

Proyeksi demografi memberikan ukuran dan struktur umur penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang di masa depan. Pemerintah telah melakukan proyeksi jumlah penduduk dengan menggunakan skenario tren dan skenario kebijakan. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan BPS, terdapat perhitungan parameter penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.29
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2030

Parameter	2020	2025	2030
Penduduk			
Laki-Laki (000)	158,07	165,21	171,59
Perempuan (000)	161,18	168,32	174,91
Total (000)	319,25	333,52	346,51
Sex Ratio (%)	98,07	98,15	98,10
Komposisi Umur (%)			
0-14	24,34	22,95	22,52
15-64	67,82	68,40	67,53
65+	7,84	8,65	9,95
Depedency Ratio (%)	47,45	46,20	48,07
Fertilitas			
Total Fertility Rate (TFR)	2,12	2,07	2,03
Mortalitas			
Infant Mortality Rate (IMR)	15,03	14,61	13,14

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang, Bps Tahun 2025

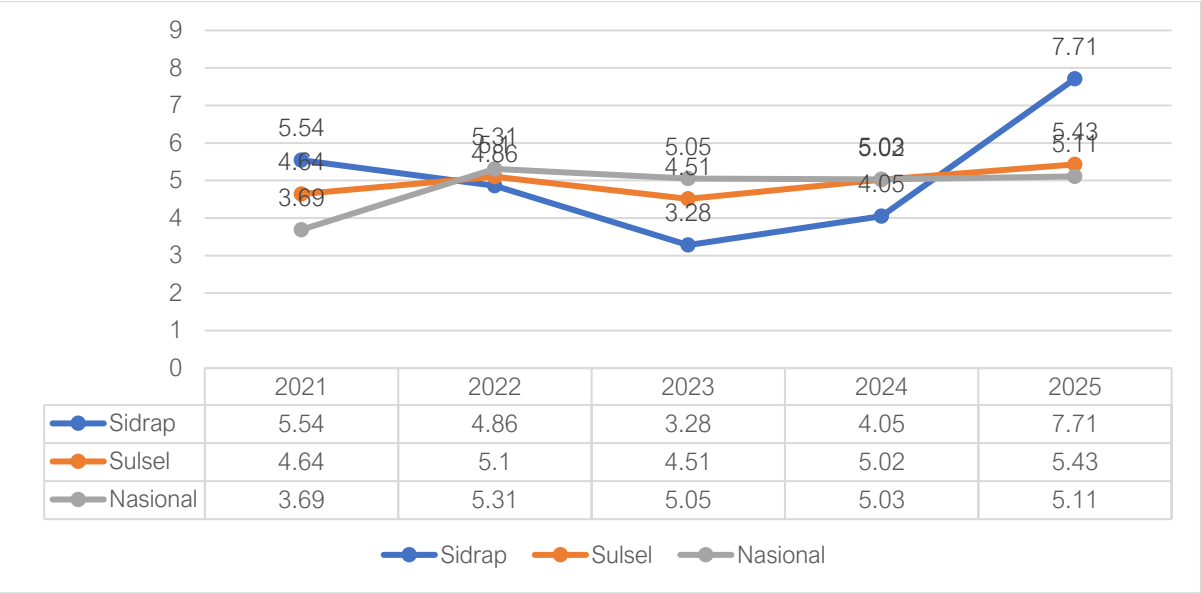
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Nilai PDRB dapat dihitung dengan menggunakan harga berlaku dan harga tahun dasar (konstan). Perubahan PDRB harga konstan dari tahun ke tahun mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang meningkat signifikan di tahun 2025 yakni sedikit mengalami percepatan sebesar 7,71 persen dimana sebelumnya di angka 4,05 persen di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, yang berada di angka 5,43 persen untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan 5,11 persen untuk Nasional di tahun 2025. Hal ini tentu menjadi dorongan serta tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada.

Grafik 2.27
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2021–2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Sidrap	5.54	4.86	3.28	4.05	7.71
Sulsel	4.64	5.1	4.51	5.02	5.43
Nasional	3.69	5.31	5.05	5.03	5.11

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran kondisi perekonomian daerah pada masa waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi indikator pembangunan ekonomi yang mengukur kenaikan pendapatan suatu wilayah nasional. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah dari aktivitas ekonomi yang dilakukan pada suatu daerah pada suatu waktu tertentu.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2025 mengalami percepatan signifikan di tahun sebelumnya. Sektor lapangan usaha pertanian, Perkebunan dan perikanan mengalami peningkatan signifikan di tahun sebelumnya dan mencapai 10,7 persen. Pada sektor konstruksi sedikit melambat di tahun 2025 hanya mencapai 3,18 persen. Sementara industri pengolahan mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu 11,58 persen, dan perdagangan besar dan eceran sedikit melambat dari tahun sebelumnya yakni 5,97 persen.

Sementara itu bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tetangga di Ajatappareng yang senilai 5,353 persen, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi ajatappareng.

Tabel 2.30
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dan Daerah Ajatappareng
Tahun 2024-2025

No	Kab/ Kota	PDRB ADHK 2024 (Milyar Rupiah)	PDRB ADHK 2025 (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi	Rata-Rata pertumbuhan Ekonomi Daerah Ajatappareng
1	Pangkep	20.197,59	21.206,55	5	5,353
2	Barru	5.788,38	6.086,9	5,16	
3	Pinrang	15.210,21	16.043,55	5,48	
4	Enrekang	5.423,7	5.677,13	4,67	
5	Parepare	5.969,77	6.214,61	4,1	
6	Sidrap	9.990,29	10.760,17	7,71	

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

Tabel 2.31
Kontribusi Lapangan Usaha Utama terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025

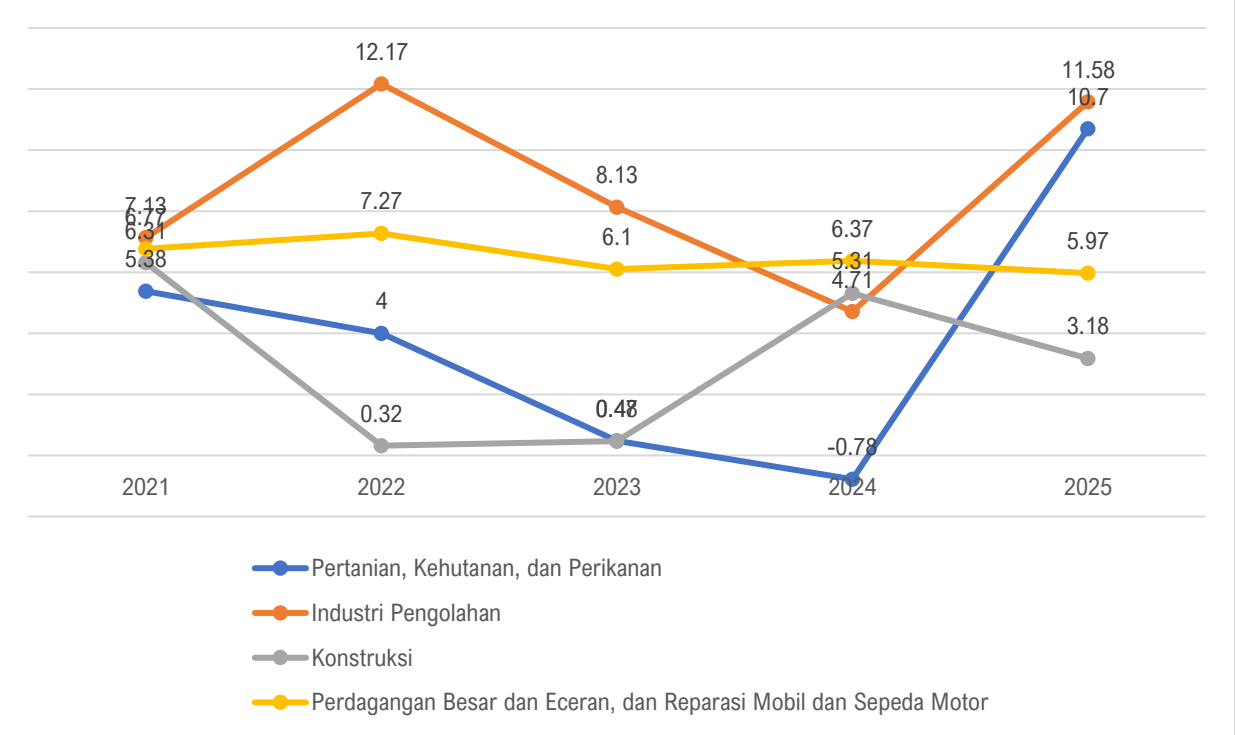
Lapangan Usaha PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,75	28,52	28,81	28,76	30,21
Pertambangan dan Penggalian	5,13	5,12	5,41	5,33	5,03
Industri Pengolahan	13,61	14,52	15,01	15,09	15,56
Pengadaan Listrik, Gas	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	18,24	17,72	16,87	16,6	15,63
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,12	10,46	10,71	10,75	10,44
Transportasi dan Pergudangan	2,09	2,29	2,55	2,59	2,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,74	0,79	0,82	0,81	0,85
Informasi dan Komunikasi	2,88	2,84	2,77	2,79	2,77
Jasa Keuangan	3,14	3,1	2,82	2,72	2,64
Real Estate	3,95	3,86	3,88	3,89	3,83

Lapangan Usaha PDRB	2021	2022	2023	2024	2025
Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,13	0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,52	4,16	3,83	3,97	3,88
Jasa Pendidikan	3,81	3,73	3,65	3,69	3,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,74	1,62	1,56	1,62	1,56
Jasa lainnya	1,04	1,06	1,08	1,15	1,18

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Struktur ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih memiliki pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana sektor pertanian masih mendominasi dan meningkat signifikan di tahun 2025. Tingginya kontribusi pertanian sebagai sektor andalan menyebabkan ketergantungan besar terhadap sektor ini. Artinya, jika sektor pertanian tumbuh pesat, ekonomi daerah juga ikut berkembang, sebaliknya, jika nilai tambah dari sektor pertanian melambat, maka akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Grafik 2.28
Pertumbuhan Ekonomi dan empat Lapangan Usaha Utama Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021–2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

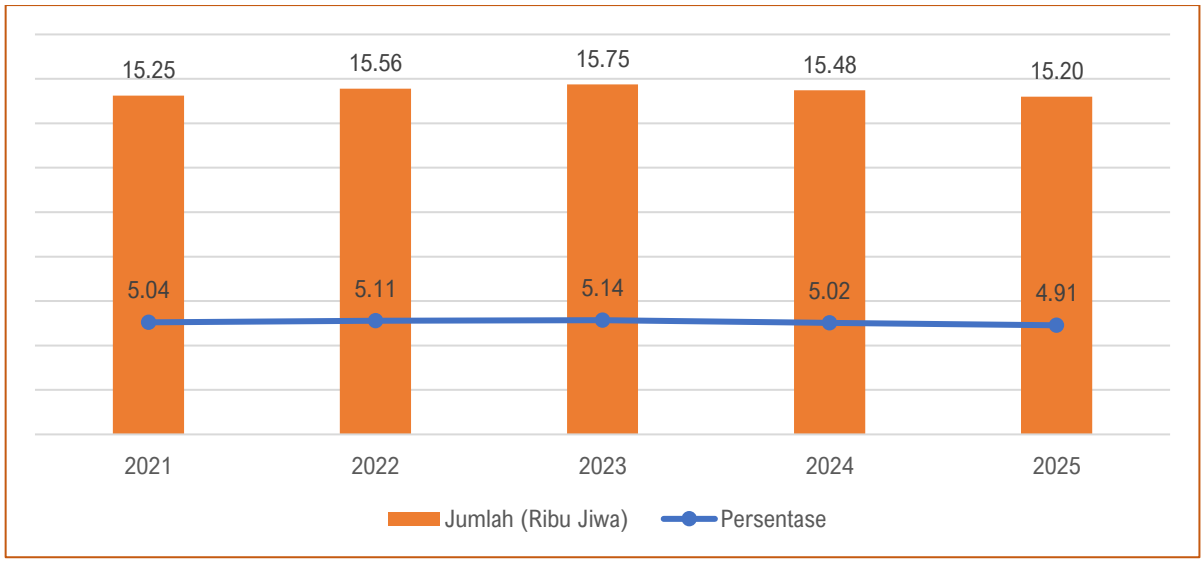
Faktor yang mendukung percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah peningkatan produksi 4 sektor besar, jika produksi pertanian meningkat ,akan berdampak pada sektor industri pengolahan khususnya pengolahan beras, dan selanjutnya

berdampak pada perdagangan besar khususnya perdagangan beras. Disuatu sisi peningkatan sektor konstruksi khususnya konstruksi pemerintah yang menggunakan dana APBN atau APBD misalkan rehabilitasi jalan dan infrastruktur lainnya dapat meningkatkan laju pertumbuhan di sektor ini, semakin banyak anggaran yang dikucurkan untuk infrastruktur maka laju pertumbuhan ekonomi pun semakin baik. Adapun faktor yang menghambat peningkatan laju pertumbuhan ekonomi adalah jika salah satu dari 4 sektor besar ini mengalami penurunan , maka akan berdampak pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng rappang secara akumulasi.

2. Tingkat Kemiskinan

Salah satu persoalan sosial ekonomi utama di dalam suatu wilayah adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Suatu rumah tangga dikategorikan miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Salah satu indikator kemiskinan adalah tingkat kemiskinan, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total jumlah penduduk.

Grafik 2.29
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021–2025



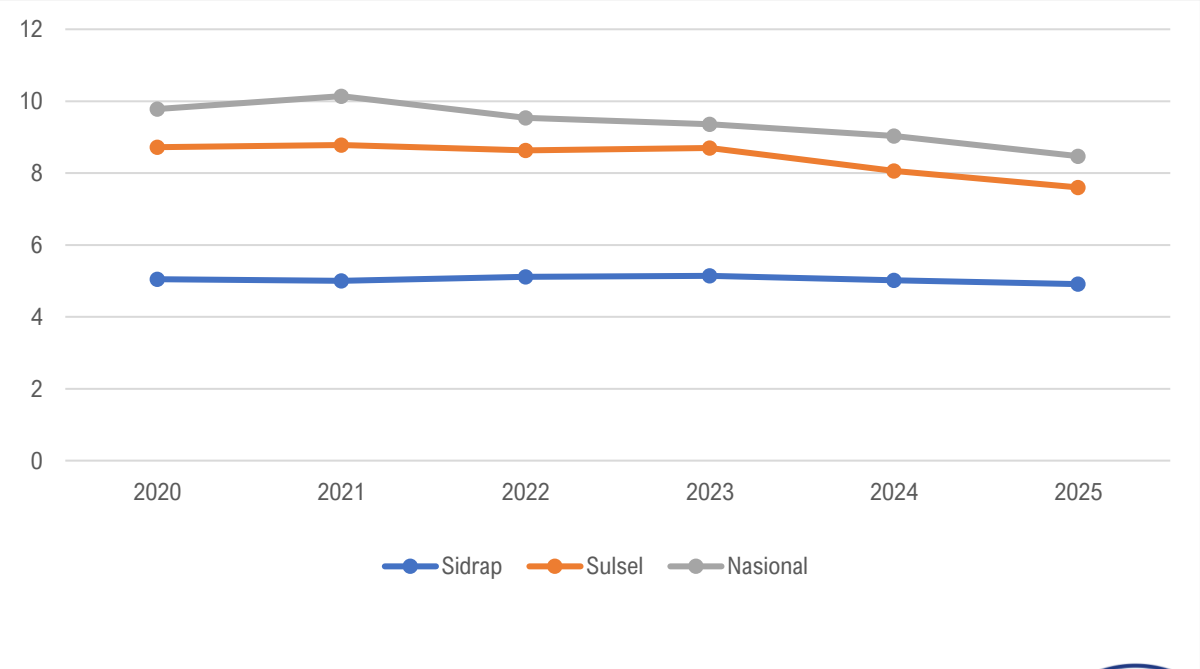
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

Data BPS menunjukkan Kabupaten Sidenreng Rappang telah memprioritaskan pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan publik. Tahun 2021 angka kemiskinan mencapai 5,04 persen, di tahun 2022 mengalami peningkatan yakni di angka 5,11 persen dan lanjut di tahun 2023 meningkat menjadi 5,14 persen . Selanjutnya di tahun 2024 mengalami penurunan di angka 5,02 persen sampai pada tahun 2025 menurun di angka 4,91 persen. Pencapaian kemiskinan tahun 2025 terbaik di 5 tahun terakhir, namun capaiannya masih belum mencapai target RPJMD tahun 2025 yang diproyeksikan sebesar 4,6-4,01 persen.

Sementara itu, tingkat kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang juga secara relatif lebih rendah dibanding dengan tingkat kemiskinan di level Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia masing-masing sebesar 8,78 persen dan 10,14 persen, sedangkan di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya sebesar 5,04 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2025, dimana tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia masing-masing sebesar 7.6 persen dan 8,47 persen, sedangkan di Kabupaten Sidenreng Rappang hanya sebesar 4,91 persen.

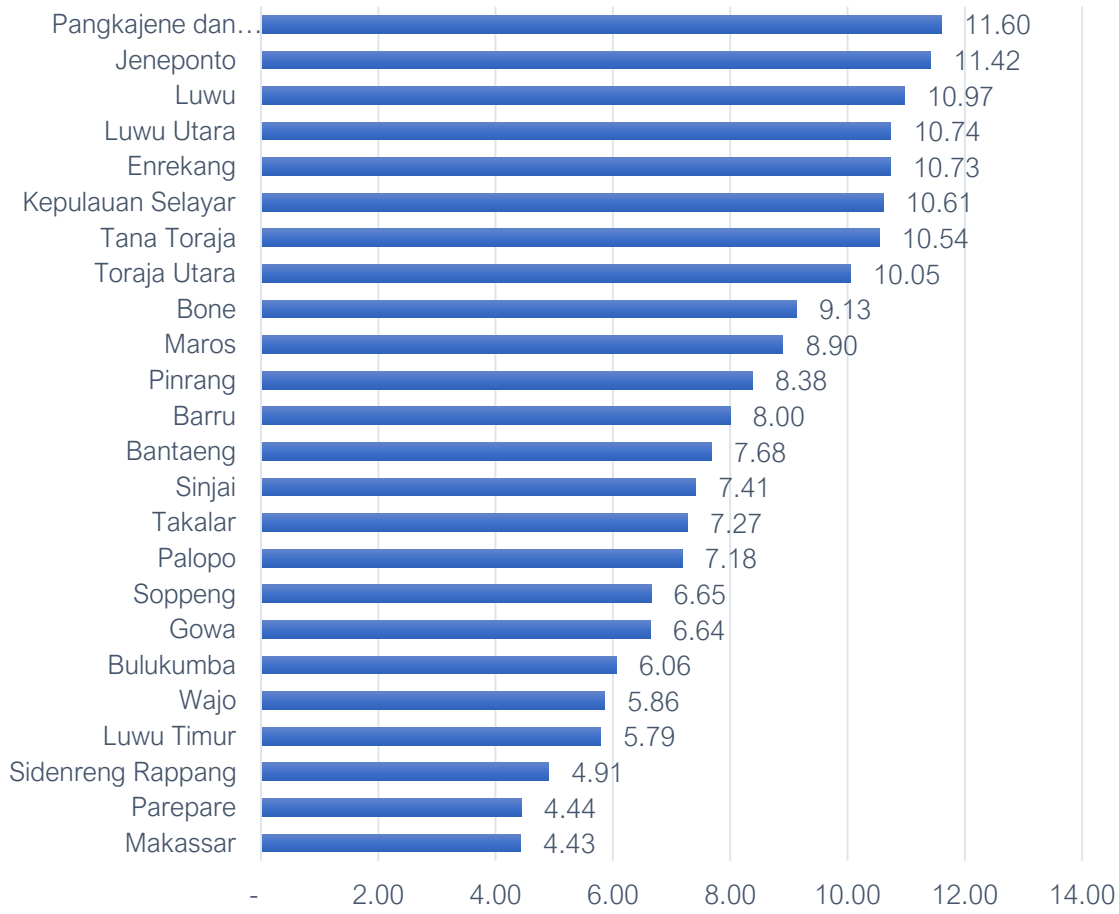
Indikator tingkat kemiskinan diperoleh dari hasil bagi antara jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Semakin banyak jumlah penduduk miskin relatif terhadap jumlah penduduk, maka tingkat kemiskinan juga akan semakin tinggi. Sementara itu, penduduk dikatakan miskin apabila pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan pengeluaran minimum yang dibutukan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan yang sesuai dengan standar hidup layak. Besaran garis kemiskinan ini akan disesuaikan secara berkala dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, diantaranya karena faktor inflasi dan standar hidup layak yang semakin meningkat. Hal ini terlihat dari garis kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengalami peningkatan dari Rp349.452 per kapita per bulan di tahun 2020 menjadi Rp458.509 per kapita per bulan di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan angka kemiskinan dan/atau jumlah penduduk miskin bisa juga disebabkan oleh peningkatan garis kemiskinan.

Grafik 2.30
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia
Tahun 2021–2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

Grafik 2.31
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

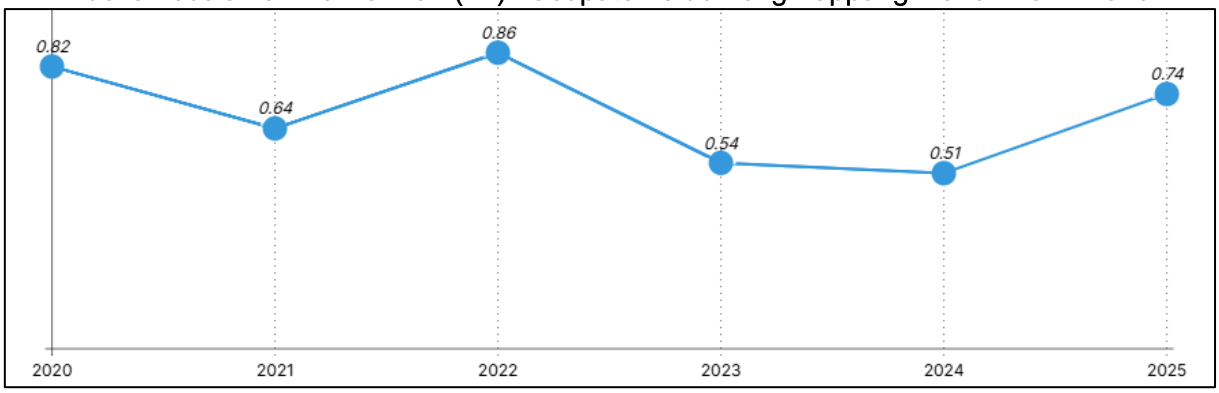
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, posisi tingkat kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang tergolong rendah, yakni berada di urutan ketiga terendah setelah Kota Makassar (4,43%) dan pare-pare (4,44%). Berdasarkan rata-rata perubahan tingkat kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang (-0,11) masih lebih rendah dibandingkan rata-rata perubahan daerah Ajatappareng -0,45

Tabel 2.32
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan
Daerah Ajatappareng

Kab/Kota	2024	2025	Perubahan	Rata-rata Perubahan Daerah Ajatappareng
Sidrap	5,02	4,91	-0,11	-0,458
Barru	8,31	8	-0,31	
Enrekang	11,25	10,73	-0,52	
Pinrang	8,55	8,38	-0,17	
Parepare	5,27	4,44	-0,83	
Pangkep	12,41	11,6	-0,81	

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

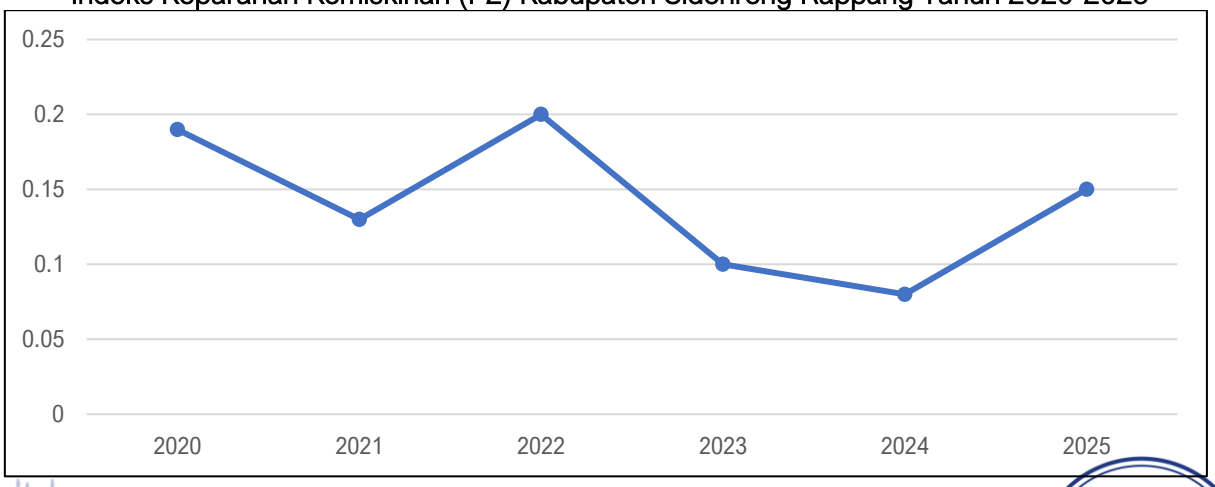
Grafik 2.32
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Sidenreng Rappang telah menunjukkan kecenderungan positif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Tren indeks kedalaman kemiskinan cenderung turun dan cukup rendah. Walaupun begitu trend indeks kedalaman kesmiskinan tahun 2021 hingga 2025 mengalami fluktuatif. indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang selalu dibawah 1, menunjukkan bahwa jarak antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan tidak begitu jauh. Angka ini mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 0,86, dan Kembali turun di tahun 2023 dan 2024 yakni masing-masing 0,54 dan 0,51, sampai akhirnya pada tahun 2025 kembali naik menjadi 0,74. Inflasi yang tidak terkendali dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi indeks kedalam kemiskinan. Inflasi yang tidak bisa dikendalikan menyebabkan harga barang dan jasa naik, sehingga daya beli masyarakat menurun. Ketika harga-harga meningkat tetapi pendapatan tetap, maka kemampuan untuk membeli barang kebutuhan pokok menjadi sulit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Garis kemiskinan, yang merupakan batas pendapatan minimum untuk mencapai kebutuhan dasar menjadi sulit, ini menyebabkan ketimpangan antara pendapatan penduduk miskin dan garis kemiskinan semakin besar, sehingga indeks kedalaman kemiskinan naik.

Grafik 2.33
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2025

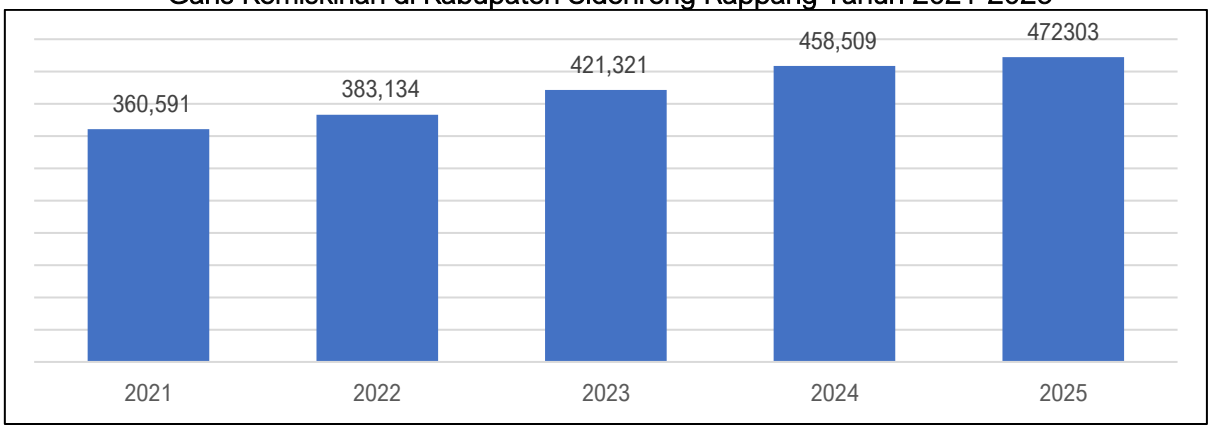


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan; 2026

Indeks keparahan kemiskinan (P-2) menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan di antara masyarakat miskin semakin merata. Untuk keparahan kemiskinan, capaian Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren fluktuatif dari tahun 2021 sampai di tahun 2025. Di tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan yakni di angka 0,080 dan di tahun 2025 kembali naik di angka 0,15.

Lebih lanjut, garis kemiskinan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya juga bisa berbeda karena adanya perbedaan harga barang/jasa, baik makanan maupun non-makanan, yang berdampak pada biaya hidup yang juga berbeda. Pada tahun 2025, garis kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp472.303 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum memiliki biaya hidup yang lebih rendah dibanding sebagian besar kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi.

Grafik 2.34
Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

Dengan pendekatan di atas, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup layak yang tercermin pada besarnya pengeluaran per kapita yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun, beberapa tahun terakhir berkembang pandangan yang menilai isu kemiskinan bukan semata persoalan ekonomi. Kemiskinan justru dipandang sebagai persoalan multi-dimensi, dimana terdapat sejumlah aspek yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai status miskin, yaitu pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, dan ekonomi. Dalam literatur, juga dikembangkan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yang dipelopori oleh *Oxford Poverty and Human Development Initiative* dan *United Nation Development Program*. IKM ini bisa menunjukkan deprivasi penduduk miskin terhadap pendidikan, akses layanan kesehatan, dan standar hidup. Indikator yang digunakan dalam IKM bisa berbeda-beda antara wilayah, tergantung pada ketersediaan data.

Faktor yang mendukung yang dapat penurunan jumlah masyarakat miskin Kabupaten Sidenreng Rappang banyaknya masyarakat yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan

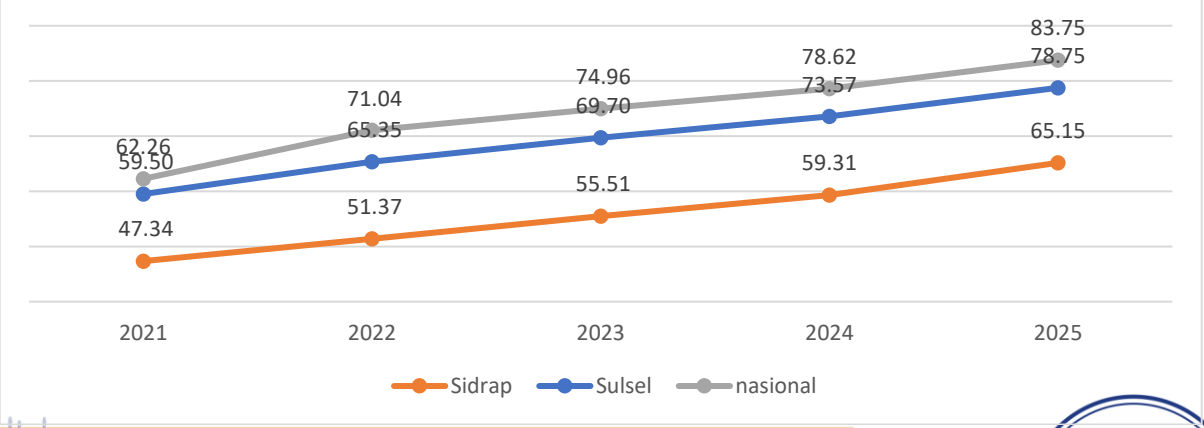
Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani, bekerja di sektor formal, dan juga dukungan pemerintah melalui bantuan bantuan dapat menjadi faktor yang dapat menurunkan jumlah kemiskinan di Kapuaten Sidenreng Rappang. Selain itu yang menjadi penghambat adalah produksi pertanian yang fluktuatif, bantuan pemerintah yang bergantung kepada APBD atau APBN, serta terbatasnya lapangan kerja formal menjadi hambatan yang dapat menambah jumlah kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut yang bertujuan menggambarkan kinerja perekonomian daerah selama periode tertentu. Capaian PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan peningkatan selama 17 tahun terakhir. Hal ini juga terjadi pada capaian PDRB per kapita, yang mengukur besarnya PDRB harga nominal per satuan penduduk. Suatu wilayah bisa tinggi PDRB-nya dibanding wilayah lainnya karena jumlah penduduknya lebih banyak. Hal ini karena jumlah penduduk dapat berkontribusi pada PDRB melalui sisi produksi dan konsumsi. Dari sisi produksi, penduduk bisa menjadi faktor produksi sehingga semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula produksi barang dan jasa. Sementara dari sisi pengeluaran, jumlah penduduk bisa mendorong peningkatan permintaan agregat melalui besarnya konsumsi yang dilakukan.

PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan pola peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2021 masyarakat menikmati standar hidup yang relatif tinggi dengan rata-rata penduduk memperoleh kue ekonomi sebesar Rp 47,34 juta, kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar Rp 51,37 juta. peningkatan masih berlanjut yakni di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 55,51 Juta dan Rp 59,31 Juta, hingga akhirnya pada tahun 2025 meningkat lagi menjadi Rp 65,15 juta atau jika dkonversi ke dalam satuan bulanan, pendapatan warga sidenreng rappang berkisar Rp 5,4 juta/Bulan.

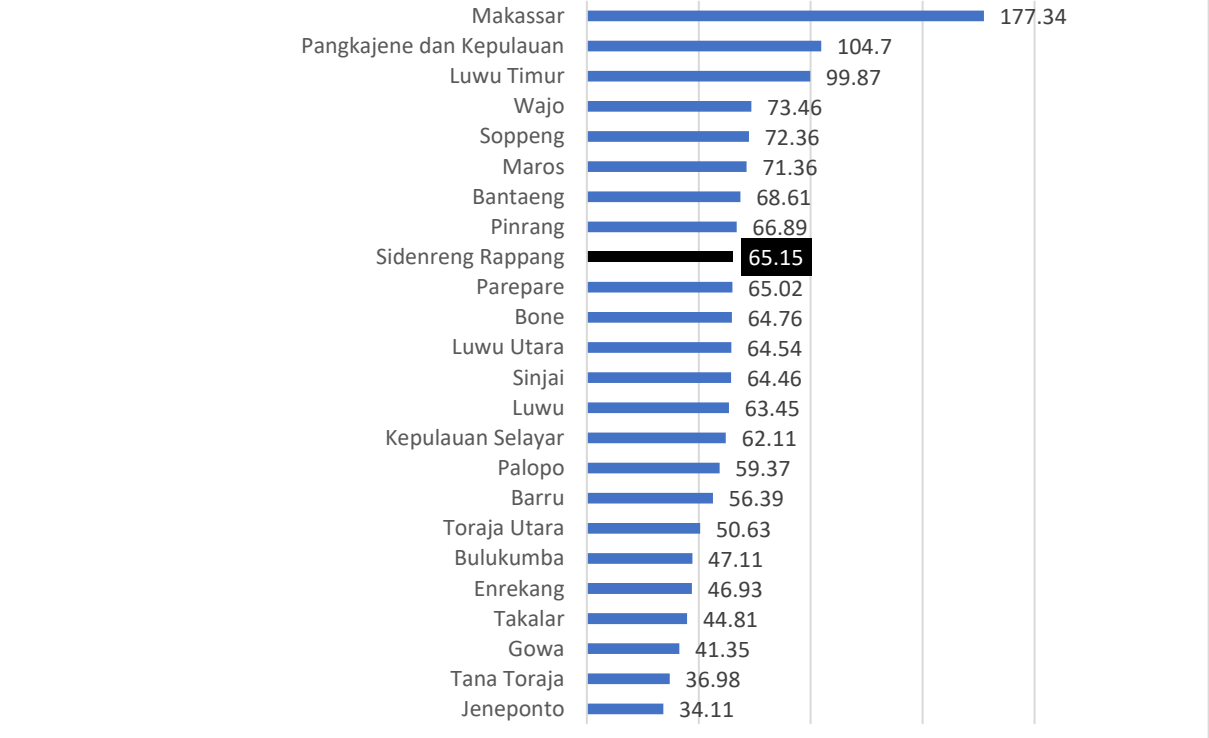
Grafik 2.35
PDRB Per Kapita Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang yang senilai 65,15 juta rupiah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih relatif lebih rendah,

Grafik 2.36
PDRB Per Kapita Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

Di Provinsi Sulawesi Selatan, daerah dengan PDRB per kapita tertinggi pada tahun 2025 dicapai oleh Kota Makassar (Rp 177,34 juta), Pangkajene dan Kepulauan (Rp 104,7 juta), dan Kabupaten Luwu Timur (Rp 99,87 juta). Perekonomian di ketiga wilayah ini disumbang oleh sektor-sektor utama, yakni perdagangan di Kota Makassar, industri pengolahan di Kabupaten Pangkep dan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu, PDRB per kapita terendah di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Jeneponto (Rp34,11 juta). Jika dibandingkan dengan Kota Makassar, posisi PDRB per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang hampir tiga kali lipat lebih rendah, sedangkan jika dibandingkan dengan Kabupaten Jeneponto, posisi Kabupaten Sidenreng Rappang justru dua kali lipat lebih tinggi. Keadaan ini menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang berada di kelompok menengah dalam hal capaian PDRB per kapita kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang yang senilai 65,15 juta rupiah bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih relatif lebih rendah, namun capaian PDRB per kapita Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai target.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Sidenreng Rappang (9,85%) lebih baik dibanding rata-rata pertumbuhan daerah tetangga di Ajatappareng yang senilai 7,44 persen.

Tabel 2.33
Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2024-2025 Kabupaten Sidenreng Rappang dan wilayah Ajatappareng

No.	Kabupaten/ Kota	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan PDRB Per Kapita (%)	Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Per Kapita Daerah Setara
		2024	2025		
1	Pangkep	96,36	104,7	8,66	7,44
2	Barru	52,27	56,39	7,88	
3	Pinrang	62,77	66,89	6,56	
4	Enrekang	43,96	46,93	6,76	
5	Parepare	61,97	65,02	4,92	
6	Sidrap	59,31	65,15	9,85	

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, diolah; 2025

Faktor yang mendukung peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang adalah besar Nilai PDRB yang diukur dari produksi setiap sektor lapangan usaha, penduduk bisa menjadi faktor pendukung juga menjadi faktor penghambat. Jumlah penduduk dapat meningkatkan produksi, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula produksi barang dan jasa. Namun semakin banyak jumlah penduduk sebagai pembagi maka semakin kecil pula nilai PDRB perkapita yang dihasilkan dan menghambat nilai PDRBN per Kapita.

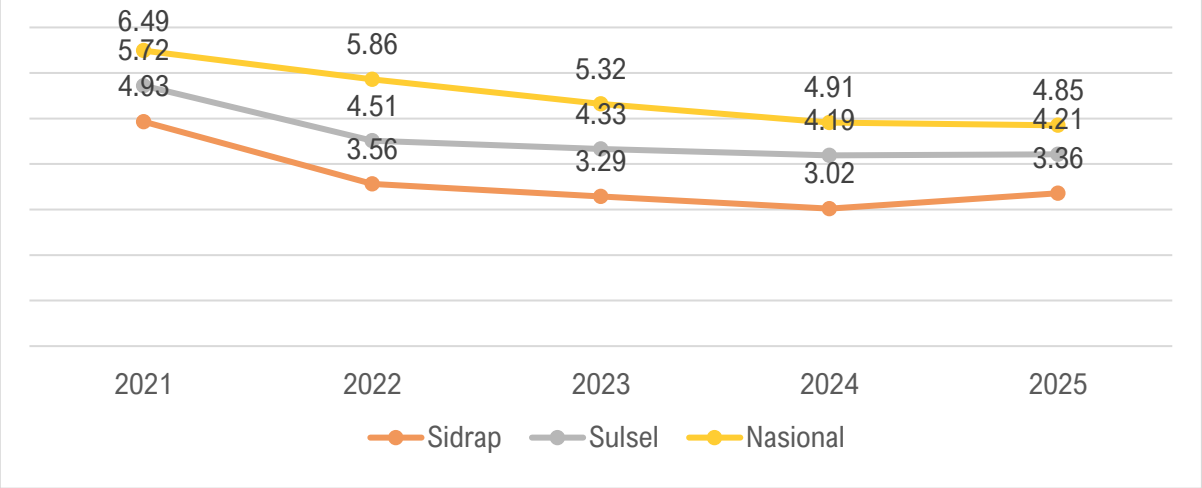
4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu isu makroekonomi yang perlu mendapatkan penanganan secara cepat. Secara konseptual, pengangguran adalah bagian dari angkatan yang kerja yang ingin bekerja, tetapi tidak bisa bekerja. Semakin banyak jumlah penduduk yang tergolong sebagai pengangguran, maka semakin banyak pula bagian dari penduduk produktif yang tidak berkontribusi secara optimal dalam perekonomian. Indikator untuk mengukur seberapa besar pengangguran di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini diperoleh dari hasil bagi antara jumlah angkatan kerja yang menganggur dibagi dengan total angkatan kerja. Data menunjukkan TPT Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan dari 4,93 persen di tahun 2021 menjadi 3,36 persen di tahun 2025 atau berkurang sebesar 46,7 persen selama 5 tahun terakhir.

TPT Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 tidak lebih tinggi dibanding TPT Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia yang masing-masing sebesar 4,21 persen dan 4,85 persen. Sampai tahun 2024, capaian TPT Kabupaten Sidenreng Rappang tetap lebih rendah, dimana Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,19 persen dan Indonesia sebesar 4,91 persen. Penurunan TPT yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang ini sejalan dengan peningkatan PDRB, terutama pada sektor-sektor yang padat karya, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor industri pengolahan.

Salah satu penyebab terjadinya pengangguran adalah kurangnya kesempatan kerja dibanding pencari kerja. Besar kecilnya kesempatan kerja ini juga erat kaitannya kondisi makroekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan, maka kesempatan kerja akan semakin terbuka seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi. Namun intervensi terhadap masalah pengangguran tidak hanya berkutat pada perluasan tenaga kerja, tapi juga penyediaan sumber daya manusia yang memang kompeten dan diperlukan keterampilannya di dunia kerja. Untuk itu, dibutuhkan peranan dari dunia pendidikan dan pelatihan untuk membekali calon-calon pekerja agar bisa bersaing di pasar tenaga kerja.

Grafik 2.37
TPT Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia
Tahun 2021–2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang 5 tahun terakhir selalu lebih baik bila dibandingkan capaian provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional. Walaupun demikian angka penurunan TPT Sidenreng Rappang masih lebih rendah dibandingkan rata-rata penurunan capaian TPT daerah Ajatappareng sebesar 0,091

Tabel 2.34
TPT Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota Wilayah Ajatappareng
Tahun 2024-2025

No	Kab/Kota	2024	2025	Perubahan	Rata-Rata Perubahan TPT
1	Pangkep	3,99	3,9	-0,09	0,091
2	Barru	6,42	5,07	-1,35	
3	Sidrap	3,02	3,36	0,34	
4	Pinrang	3,12	3,65	0,53	
5	Enrekang	1,51	1,78	0,27	
6	Parepare	5,23	4,98	-0,25	

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

Jumlah pengangguran di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 sebesar 6.813 orang, mengalami penurunan signifikan di tahun 2025 menjadi 5.029 orang.

Tabel 2.35
Perbandingan Jumlah Pengangguran Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan,
dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

Jumlah Pengangguran	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	9.102,05	8.425,93	7.855,08	7.465.599	7.461.510
Povinsi Sul-Sel	252.349	205.725	203.50	204.760	208.950
Kabupaten Sidrap	6.813	4.877	4.596	4.713	5.029

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

5. Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan, terjadi kenaikan aktivitas produksi dan konsumsi yang diharapkan mencakup seluruh kalangan masyarakat. Namun efek positif dari pertumbuhan belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh kalangan masyarakat. Perbedaan kepemilikan aset, kualitas manusia, dan kondisi geografis merupakan sejumlah faktor yang bisa berpengaruh terhadap besar kecilnya manfaat yang dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat dari suatu pertumbuhan. Sementara itu, Bank Dunia menyebutkan empat faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya ketimpangan di Indonesia, yaitu ketimpangan peluang, ketimpangan pasar tenaga kerja, konsentrasi kekayaan, dan ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Jika terjadi ketimpangan tersebut, maka tentunya akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan. Ukuran ketimpangan pendapatan menggunakan Indeks Gini.

Tabel 2.36
Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia
Tahun 2021–2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Sidenreng Rappang	Poin	0.358	0.354	0.345	0.319	0,325
Sulawesi Selatan	Poin	0.382	0.377	0.377	0.363	0,363
Nasional	Poin	0.381	0.381	0.388	0.379	0,375

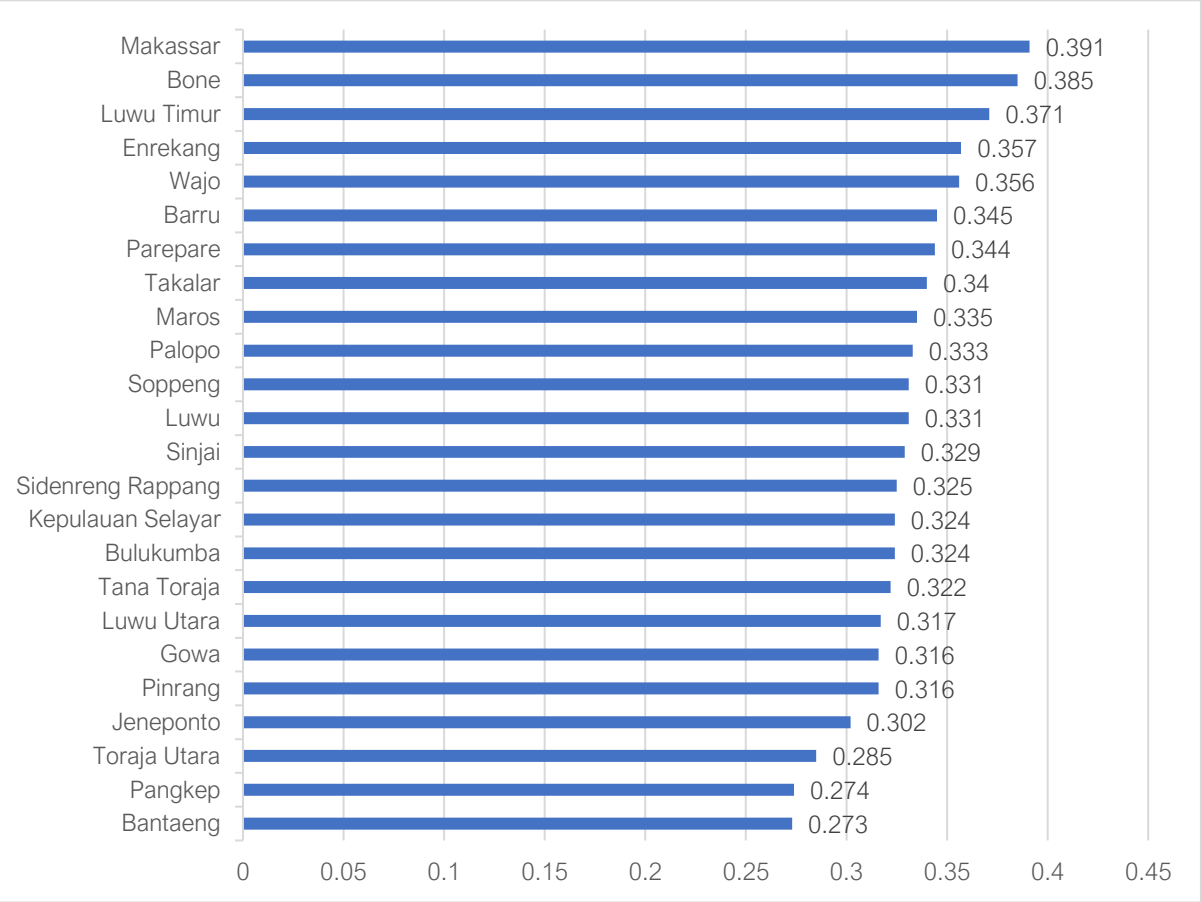
Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 yang menunjukkan kesetaraan sempurna hingga angka 1 yang menunjukkan ketimpangan sempurna. Jadi, nilai yang semakin kecil menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah, atau sebaliknya. Tingkat ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun terakhir mengalami tren peningkatan. Indeks gini di tahun 2021 sebesar 0,358 sebelum meningkat di tahun 2022 menjadi 0,354 di tahun 2022. Angka ini mengalami sedikit perbaikan menjadi 0,345 di tahun 2023 dan 0,319 di tahun 2024, namun sedikit meningkat di tahun 2025 menjadi 0,325. Bila dibandingkan dengan angka ketimpangan di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 0,363 dan Nasional yang berada pada angka 0,375 poin, ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih baik.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, capaian Indeks Gini di Kabupaten Sidenreng Rappang tergolong rendah, yaitu berada di urutan ke-11

terbawah. Indeks Gini terendah dicapai oleh Bantaeng (0,273) dan Pangkajene Kepulauan (0,274). Hal ini menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih rendah dibanding sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.38
Indeks Gini Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

Bila dibandingan dengan capaian daerah wilayah Ajatappareng, perubahan gini rasio di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak lebih baik. Sidrap mengalami perubahan atau kenaikan poin sebesar 0,006 sementara rata-rata kabupaten/kota di wilayah Ajatappareng mengalami penurunan sebesar 0,0003 poin.

Tabel 2.37
Perbandingan Perubahan Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Daerah Ajatappareng Tahun 2025

Kab/Kota	2024	2025	Perubahan	Rata-rata Perubahan Gini Rasio
Sidrap	0.319	0.325	**0,006**	-0.0003
Barru	0.310	0.345	**0,035**	
Enrekang	0.342	0.357	**0,015**	
Pinrang	0.299	0.316	**0,017**	
Parepare	0.376	0.344	**-0,032**	
Pangkep	0.317	0.274	**-0,043**	

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

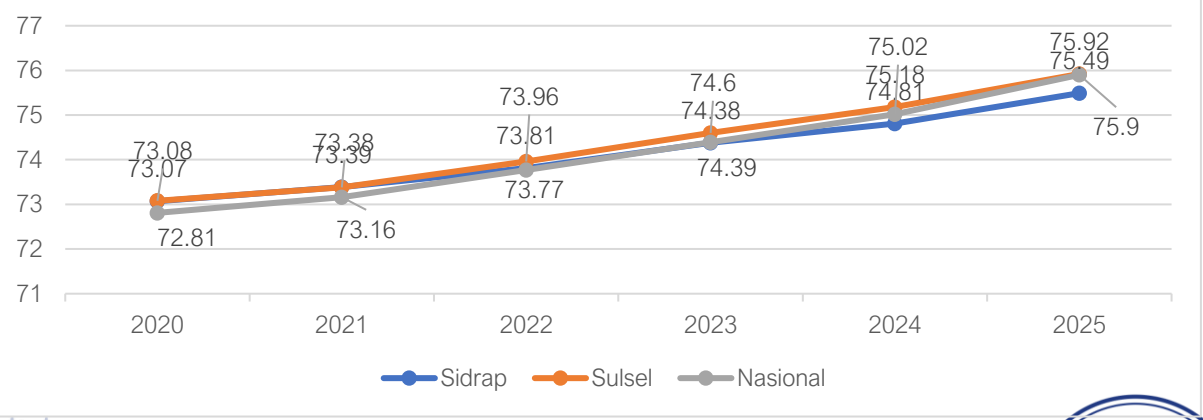
Jumlah masyarkat miskin Sidrap mengalami penurunan, namun disisi lain gini ratio mengalami kenaikan, kemungkinan besar faktor yang menaikkan gini rasio Kabupaten Sidenreng Rappang adalah meningkatnya kesejahteraan di sektor-sektor tertentu, belum terjadi pemerataan pendapatan bagi masyarakat kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indonesia memiliki Visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Dalam pencapaian visi ini, salah satu pilar utama yakni pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, Indonesia termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang tengah memasuki fenomena bonus demografi, dimana proporsi dari penduduk yang terkategorikan usia produktif (15-65 tahun) lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Bonus demografi menjadi peluang yang penting bagi Indonesia untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, syarat utama untuk memanfaatkan momen tersebut adalah melakukan investasi yang tepat sasaran, terkhususnya dalam pengembangan sumber daya manusia, mulai dari perencanaan keluarga, pembangunan sarana dan pra sarana pendidikan, kesehatan, dan memberikan peluang kerja yang memadai bagi generasi baru. Indikator yang selama ini digunakan untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia adalah indeks pembangunan manusia yang menitikberatkan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan pencapaian pembangunan manusia Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cukup baik dilihat dari nilai angka IPM yang konsisten meningkat. Memasuki tahun 2021 angka IPM sebesar 73,07, selanjutnya pada tahun 2022 mencatatkan IPM 73,39 dan terus mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 73,81 dan di tahun 2024 menjadi 74.81. Trend kenaikan terus terjaga hingga di tahun 2025 kembali naik menjadi 75,49. Walaupun terus mengalami kenaikan, angka IPM Sidereng Rappang tahun 2023, 2024, hingga 2025 masih berada di bawah capaian Provinsi dan Nasional.

Grafik 2.39
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistk, diolah Tahun 2026

Jika dibandingkan dengan wilayah Ajatappareng, IPM Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025, yaitu sebesar 75,49, sedikit lebih lambat dengan hanya mencatatkan angka pertumbuhan 0,43 persen. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperbaiki empat indikator utama yaitu angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup, dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

Tabel 2.38
Perbandingan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten/Kota Lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

No	Kab/Kota	2024	2025	Pertumbuhan	Rata-Rata Pertumbuhan Daerah Setara
1	Barru	74,51	75,41	0,9	0,66
2	Pinrang	75,43	75,87	0,44	
3	Sindereng Rappang	74,81	75,49	0,68	
4	Enrekang	75,83	76,5	0,67	
5	Pangkep	73,87	74,62	0,75	
6	Parepare	80,97	81,5	0,53	

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Selain aspek kesejahteraan ekonomi, kesehatan masyarakat menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam periode 2021 hingga 2025, indikator kesehatan masyarakat menunjukkan berbagai dinamika yang mencerminkan keberhasilan dan tantangan dalam sektor ini.

Menurut data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidenreng Rappang mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,68 poin per tahun. Pada tahun 2025, seluruh dimensi IPM—umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak—mengalami peningkatan, menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, sejumlah tantangan tetap ada, khususnya terkait dengan akses sanitasi dasar dan layanan kesehatan di daerah terpencil. Meskipun upaya perbaikan terus dilakukan, peningkatan akses sanitasi layak masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk memastikan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Selain itu, permasalahan gizi pada balita, seperti stunting dan wasting, masih menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah melalui berbagai program intervensi, seperti peningkatan gizi dan kesehatan ibu dan anak, terus berupaya menekan angka prevalensi masalah gizi ini.

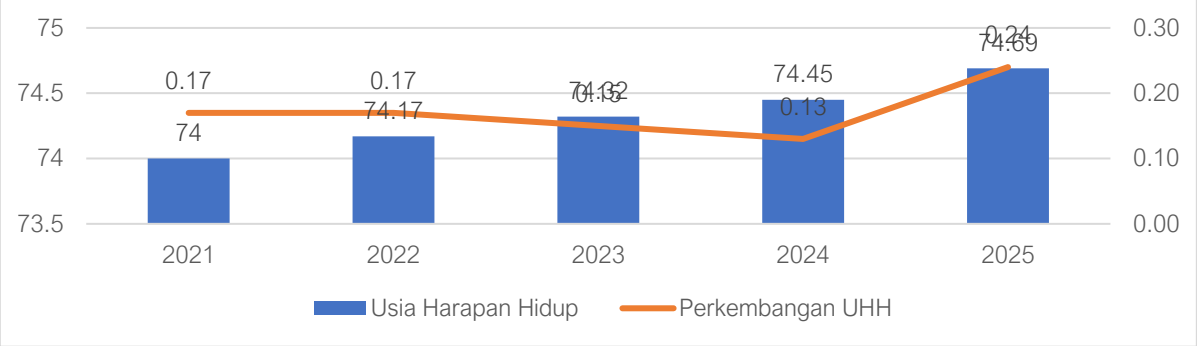
Selain tantangan gizi, perhatian juga tertuju pada cakupan layanan kesehatan, termasuk penanganan tuberkulosis. Tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis menunjukkan progres positif, namun cakupan penemuan kasus dan pengobatan tetap perlu ditingkatkan untuk memutus rantai penyebaran penyakit.

1. Usia Harapan Hidup

Salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah usia harapan hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang yang menunjukkan tren positif sejalan dengan perkembangan usia harapan hidup (UHH). UHH menjadi salah satu indikator untuk menggambarkan pembangunan manusia pada bidang kesehatan. UHH merupakan statistik yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang diharapkan seseorang akan hidup dalam suatu wilayah tertentu. Besar kecilnya UHH ditentukan oleh sejumlah faktor seperti perawatan kesehatan, gizi, sanitasi, akses terhadap air bersih, pendidikan, dan faktor-faktor lingkungan lainnya.

Perkembangan capaian UHH di Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 tahun terakhir secara umum menunjukkan tren positif. Data menunjukkan angka usia harapan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun 2021-2025. Pada tahun 2021, usia harapan hidup mencapai 74 tahun meningkat menjadi 74,17 tahun pada tahun 2022. Tren positif terus berlanjut dengan mencapai 74,32 tahun pada tahun 2023, 74,45 tahun di tahun 2024 hingga pada tahun 2025 menjadi 74,69 tahun.

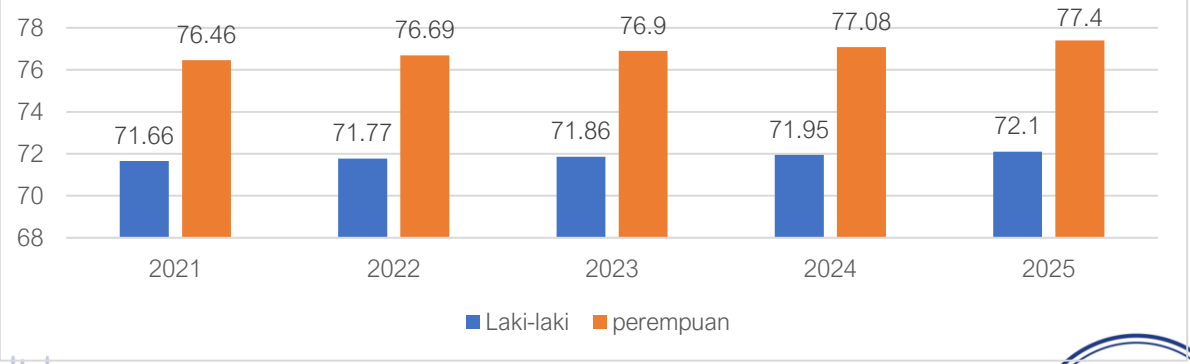
Grafik 2.40
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2025

UHH penduduk perempuan tahun 2025 sebesar 77,08 lebih tinggi dibandingkan AHH penduduk laki-laki yang hanya sebesar 71,95.

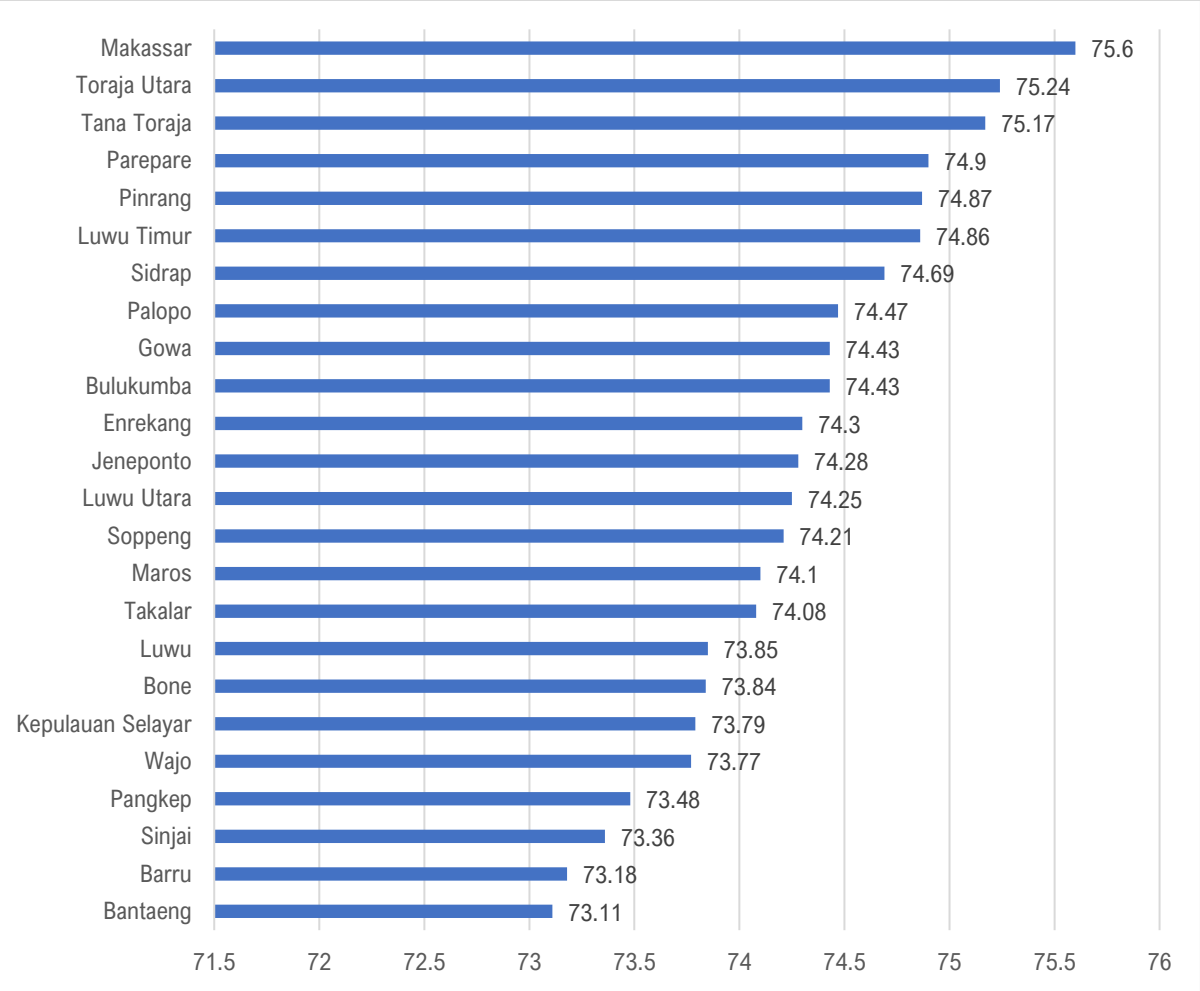
Grafik 2.41
Angka Harapan Hidup Per Jenis Kelamin di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

Meskipun terjadi peningkatan, angka usia harapan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan usia harapan hidup kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah dengan UHH tertinggi dicapai oleh Kota Makassar (75,6 tahun), Kabupaten Toraja Utara (75,24 tahun), dan Kabupaten Tana Toraja (75,17 tahun). Adapun daerah dengan AHH terendah terjadi di Kabupaten Barru (73,18 tahun) dan Kabupaten Bantaeng (73,11 tahun).

Grafik 2.42
Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

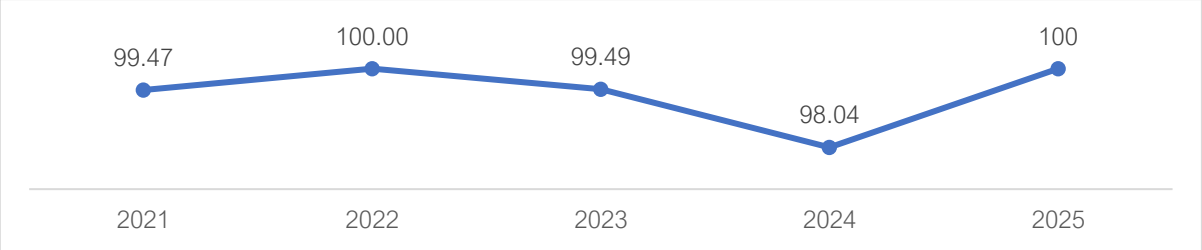
2. Kesehatan Ibu dan Anak

a. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persentase persalinan di fasilitas kesehatan merupakan statistik yang menggambarkan proporsi dari total jumlah persalinan yang di lakukan di fasilitas kesehatan terhadap total jumlah persalinan dalam suatu wilayah. Diharapkan agar semua persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, sehingga dapat meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Beberapa hal yang menjadi keuntungan jika persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan, yaitu 1). Keamanan ibu dan bayi dari risiko

komplikasi dan kematian, 2). Pencegahan penyakit menular dari ibu ke bayi, 3). Akses yang lebih baik dalam perawatan darurat yang mungkin terjadi selama proses persalinan, dan 4). Pemantauan kesehatan oleh tenaga medis selama proses dan pasca persalinan. Data menunjukkan bahwa persentase perempuan usia 15 – 49 tahun yang pernah melahirkan di fasilitas kesehatan (Rumah sakit, puskesmas, polindes, dan tempat praktik tenaga kesehatan) dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup baik. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 99,47 persen dan angka ini naik di tahun 2022 menjadi 100 persen. Pada tahun 2023 persentasenya sedikit menurun menjadi 99,49 persen dan kembali mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 98,04 persen, Hingga akhirnya pada tahun 2025 kembali naik menjadi 100 persen yang menunjukkan semua kelahiran di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan di fasilitas kesehatan.

Grafik 2.43
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

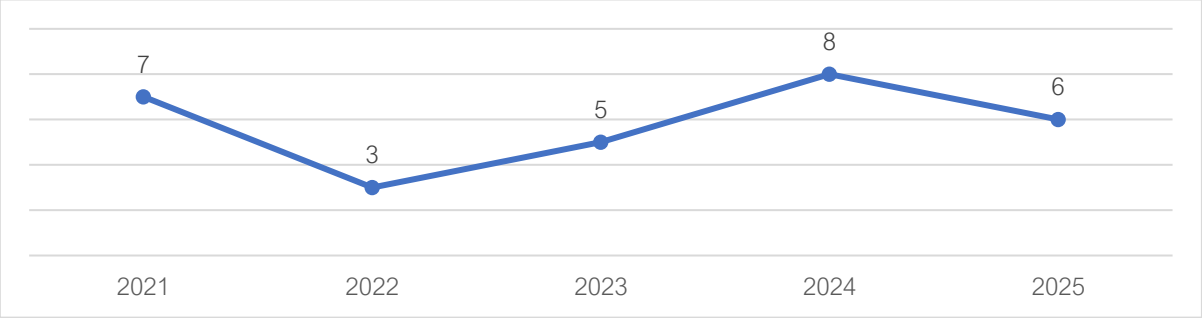
b. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Selain memastikan kesehatan bayi dan balita, menjaga kehidupan ibu pasca melahirkan juga merupakan parameter penting untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil suatu daerah. Angka kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain (misalnya terjatuh, kecelakaan, dll), per 100.000 kelahiran hidup. Selain itu, AKI juga merupakan salah satu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengukur kesehatan ibu.

Sebelum pemerintah daerah menyusun program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, indikator penting yang mesti diperhatikan adalah angka kematian ibu. Kebutuhan untuk membuat program-program tersebut seperti diperlukan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebab kinerja capaian angka kematian ibu tidak begitu baik. Di tahun 2020 terdapat 6 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, angka ini mengalami peningkatan hingga mencapai 7 orang di tahun 2021. Di tahun 2022, angka ini mengalami penurunan menjadi 3 ibu yang

mengalami kematian dalam 100.000 kelahiran hidup. Di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi 5 orang, lalu turun menjadi 3 kasus di tahun 2024. Pemerintah daerah tetap perlu memberikan perhatian khusus untuk menangani hal tersebut agar tak ada lagi ibu yang meninggal ketika melahirkan.

Grafik 2.44
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

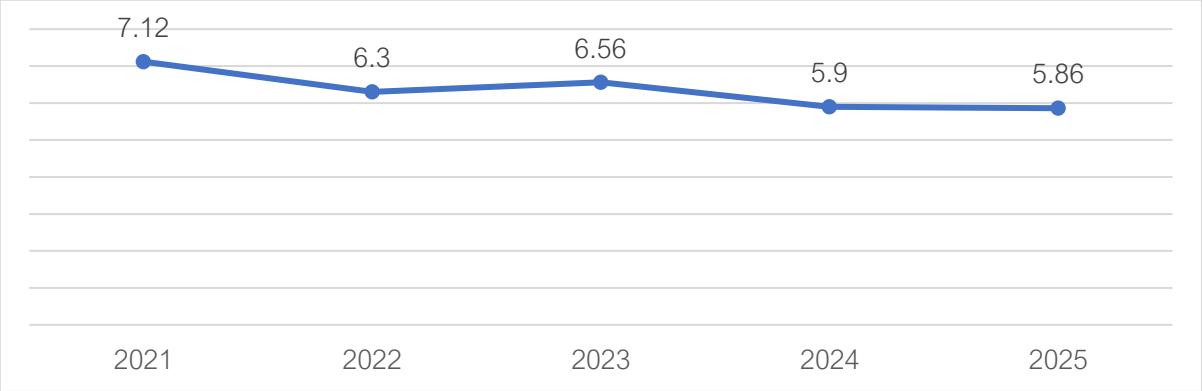
c. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak yang terganggu akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Kondisi ini dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kecerdasan anak dan kesehatan dewasa, serta sulit untuk diperbaiki. Di tingkat nasional, kebijakan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Pemerintah telah menetapkan *stunting* sebagai isu prioritas nasional dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 21,5 persen pada tahun 2023 menjadi 14 persen pada tahun 2024. Sejumlah kebijakan telah dilakukan untuk mencapai target tersebut. Di samping itu, juga telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) percepatan penurunan *stunting*, serta memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Karena telah menjadi isu nasional, kebijakan penurunan *stunting* juga menjadi kebijakan strategis di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam rangka mempercepat penurunan *stunting*, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menciptakan beberapa inovasi penurunan stunting di beberapa sektor berupa pendampingan kepada ibu hamil, ibu nifas, balita, dan remaja putri yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, dan tokoh masyarakat. Meskipun demikian, upaya penurunan *stunting* masih perlu ditingkatkan lagi. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan terjadi penurunan prevalensi *stunting*. Pada tahun 2021, tercatat

sebesar 7,12 persen, dan terus menurun hingga menjadi 5,86 persen pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan upaya serius dari pemerintah kabupaten dan segenap *stakeholder* dalam menurunkan *prevalensi stunting*.

Grafik 2.45
Prevalensi Stunting Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



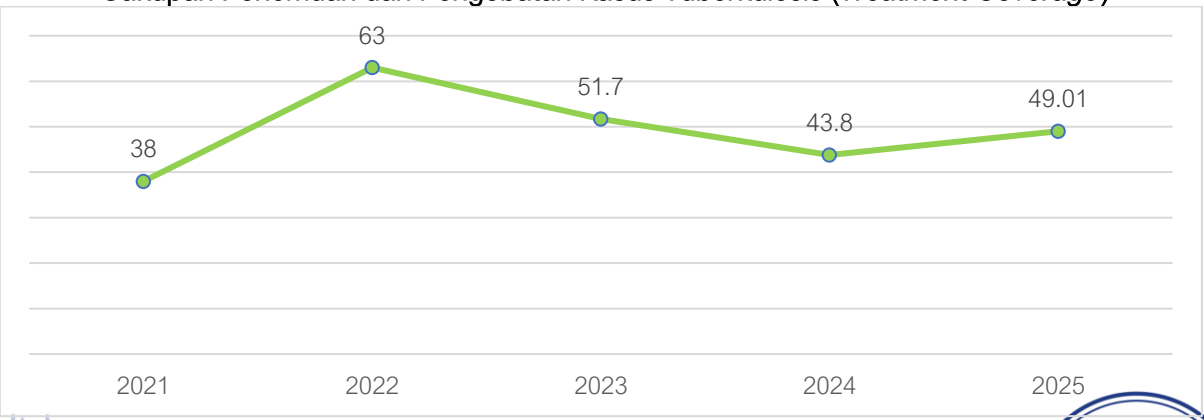
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

3. Penangangan Tuberculosis

a. Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Treatment Coverage) adalah ukuran yang menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang berhasil dideteksi dan diobati dalam suatu wilayah. Ini merupakan indikator penting dalam upaya pengendalian tuberkulosis karena memastikan bahwa kasus-kasus TB terdiagnosis dan mendapatkan pengobatan yang tepat dapat membantu menghentikan penyebaran penyakit ini. Data menunjukkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis cenderung mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 berada di angka 38 persen, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 63 persen. Namun pada tahun 2023 dan 2024 kembali mengalami penurunan berturut-turut yaitu menjadi 51,7 dan 43,8 persen sampai di tahun 2025 kembali mengalami peningkatan menjadi 49.01 persen.

Grafik 2.46
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)

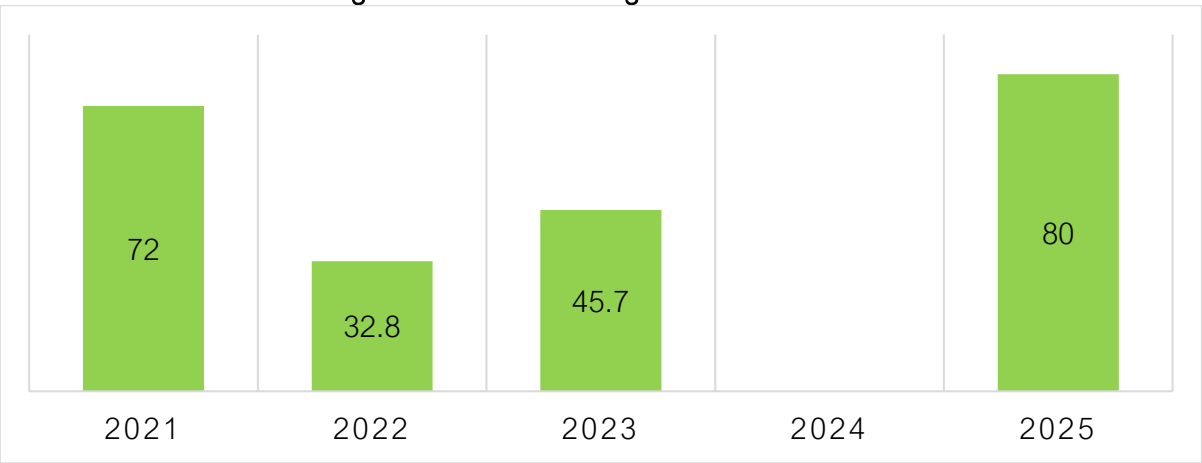


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

b. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis adalah ukuran yang menunjukkan persentase kasus tuberculosis yang berhasil sembuh atau dinyatakan sembuh setelah menyelesaikan regimen pengobatan yang tepat. Angka ini penting dalam mengukur efektivitas program pengendalian tuberculosis suatu negara atau wilayah. Untuk menghitung angka keberhasilan pengobatan tuberculosis, jumlah kasus yang berhasil sembuh atau dinyatakan sembuh (disebut sebagai "kesembuhan") diberi perbandingan dengan jumlah total kasus tuberculosis yang diobati, dan hasilnya dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase.

Grafik 2.47
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

Data menunjukkan angka keberhasilan pengobatan tuberkolusis di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 72 persen di tahun 2021, lalu menurun di tahun 2022 dan 2023 dan Kembali meningkat di tahun 2025 dengan angka 80 persen. Penurunan ini mengindasikan semakin tingginya keberhasilan penderita tuberkulosis untuk sembuh dari penyakitnya.

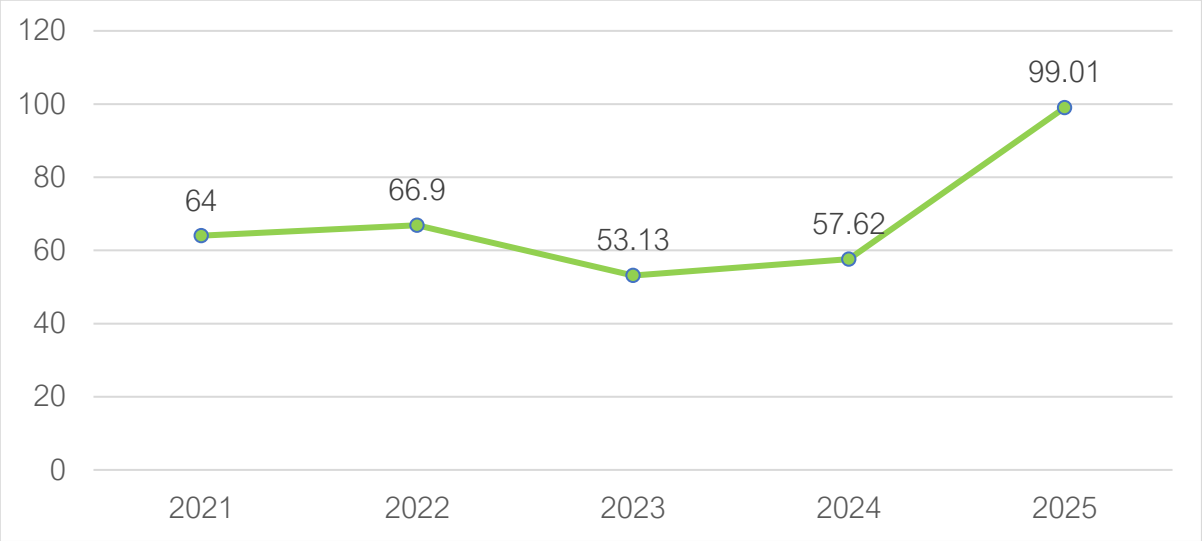
4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Program ini mencakup pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik) dan rujukan tingkat lanjut (rumah sakit), serta layanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, perawatan penyakit kronis, dan pengadaan obat-obatan. Dengan prinsip gotong royong, JKN memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, termasuk kelompok rentan, mendapatkan layanan kesehatan yang setara dan terjangkau.

JKN menjadi instrumen penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mendukung upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta

memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Grafik 2.48
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

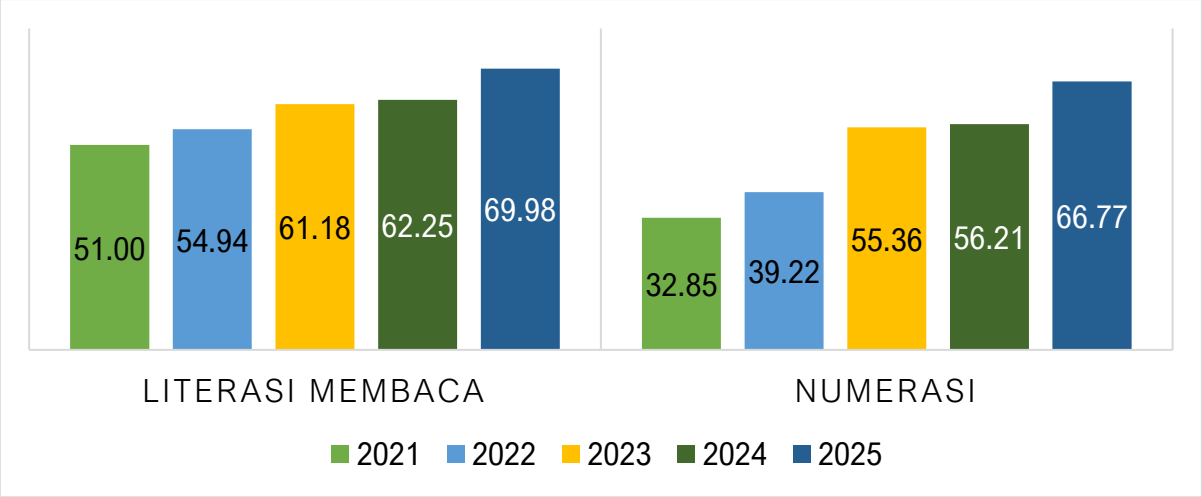
Data menunjukkan fluktuasi cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2021 hingga 2025. Pada awalnya, cakupan JKN tercatat sebesar 64 persen pada tahun 2021, kemudian meningkat di tahun 2022 dengan capaian 66,9 persen. Namun pada tahun 2023, terjadi penurunan menjadi 53,13 persen. Kemudian pada tahun 2024 tercatat adanya perbaikan dengan sedikit peningkatan menjadi 57,62 persen hingga pada tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan menjadi 99,01 persen. Peningkatan ini karena konsen pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam program BPJS Kesehatan gratis dan memastikan JKN yang luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan program di masa mendatang.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas Yang Merata

1. **Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi**

Persentase Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional diperoleh dari jumlah satuan pendidikan di daerah yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah. Literasi membaca adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi berbagai jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Grafik 2.49
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



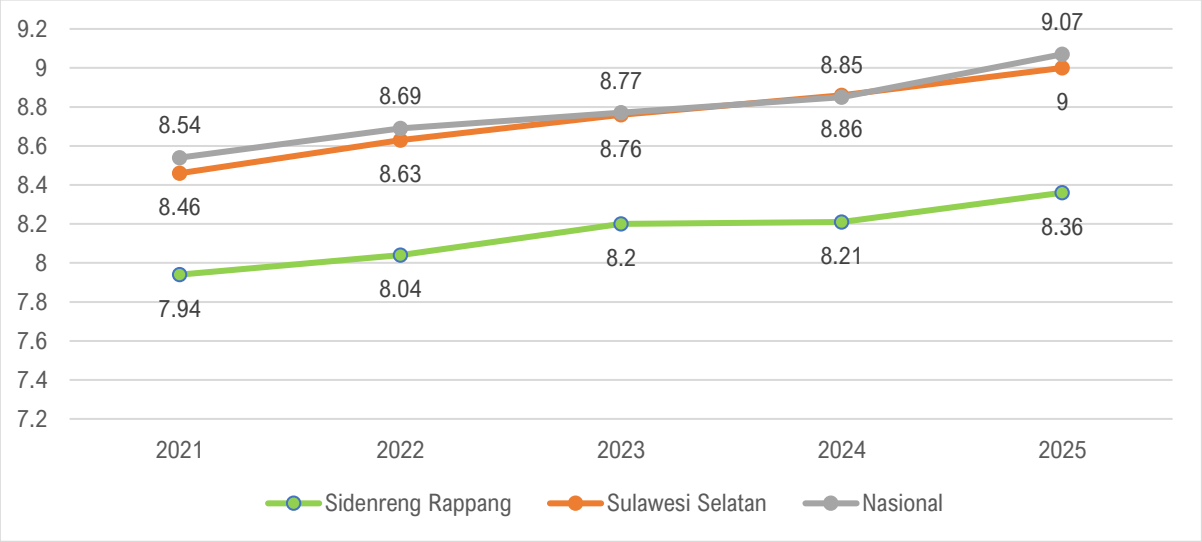
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan literasi membaca tercatat 51,00 persen, meningkat signifikan menjadi 69,98 persen pada tahun 2025. Demikian halnya pada kemampuan numerasi, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 32,85 persen pada tahun 2021, meningkat tajam menjadi 66,77 persen pada tahun 2025. Peningkatan capaian literasi membaca dan numerasi ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas dan pemerataan pendidikan khusunya pada aspek hasil pembelajaran di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Rata-Rata Lama Sekolah

Tren yang sama juga terjadi pada indikator rata-rata lama sekolah (RLS), yang menunjukkan kenaikan hingga tahun 2025 telah mencapai 8.36 Tahun. Angka 8,36 ini bermakna rata-rata penduduk telah mengeyam pendidikan selama 8 tahun atau di bangku sekolah menegah pertama (SMP). Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, berhasil menaikkan secara persisten angka rata-rata lama sekolah selama kurun waktu beberapa tahun terakhir. Walaupun demikian, capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang masih dibawah capaian nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021 di angka 7,94 tahun mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 8,04 tahun dan di tahun 2023 8,2 tahun sampai pada tahun 2025 menjadi 8,36 tahun. Dari angka tersebut, terlihat bahwa meski mengalami kenaikan konsisten, tapi rata-rata kenaikan masih belum siginifikan dan sangat lambat.

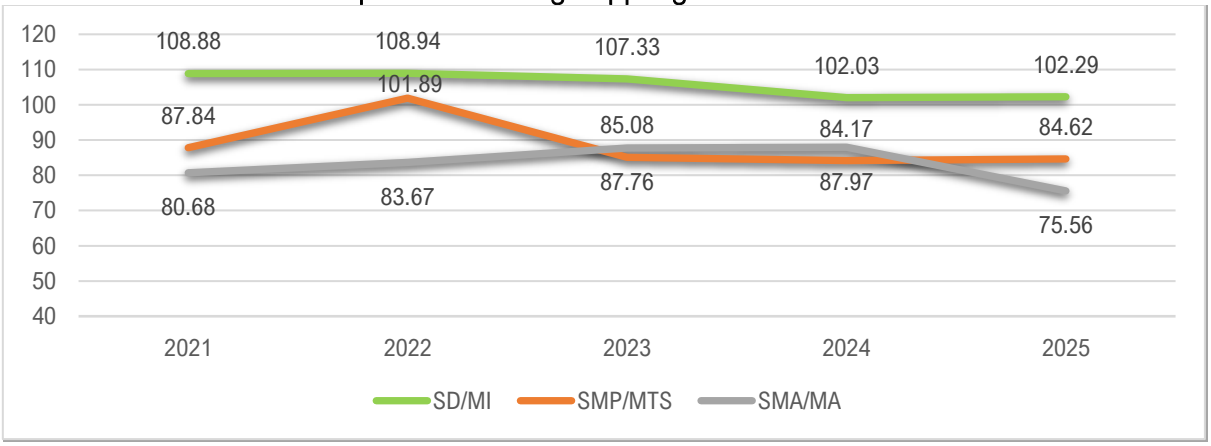
Grafik 2.50
Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan,
Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2026

Secara umum angka partisipasi kasar Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi, menggambarkan bahwa penduduk penduduk usia sekolah belum semuanya bersekolah. Untuk APK SD/MI, trennya mengalami penurunan dari 108,88 persen di tahun 2021 menjadi 102,29 persen di tahun 2025. Sejalan dengan SD/MI, APK SMP/MTs juga mengalami tren penurunan, di tahun 2021 angkanya mencapai 87,84 persen dan mengalami penurunan menjadi 84,62 persen di tahun 2025. APK SMA/SMK/MA juga mengalami tren negatif, tahun 2021 tercatat 80,68 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 75,56 persen pada tahun 2025.

Grafik 2.51
Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



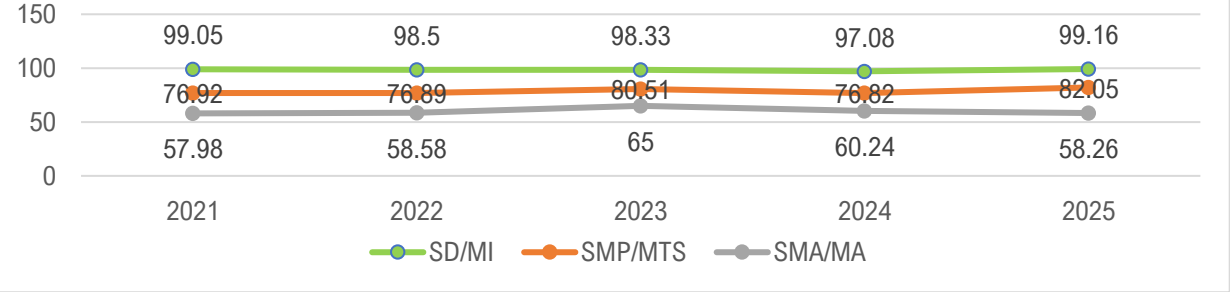
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2026

Angka partisipasi murni adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah

yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Nonformal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Indikator ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen, begitupun sebaliknya, jika angkanya dibawah 100, berarti ada anak usia sekolah yang bersekolah tidak tepat waktu.

APM SD/MI mengalami peningkatan dari 99,05 persen di tahun 2021 menjadi 99,16 di tahun 2025. peningkatan pada APM SMP/MTS juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang hanya 76,92 persen meningkat menjadi 82,05 persen. Tren positif juga terjadi pada APM SMA/MA dimana pada tahun 2021 di angka 57,98 persen meningkat menjadi 58, 26 persen.

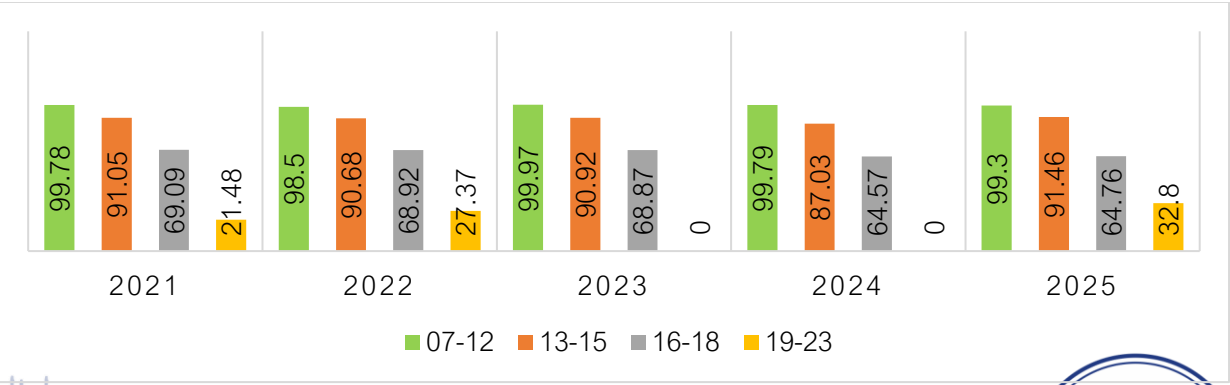
Grafik 2.52
Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2025

Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan yaitu SD (7-12 tahun), SLTP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun). Indikator ini menggambarkan seberapa besar proporsi penduduk usia tertentu yang *bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.*

Grafik 2.53
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2026

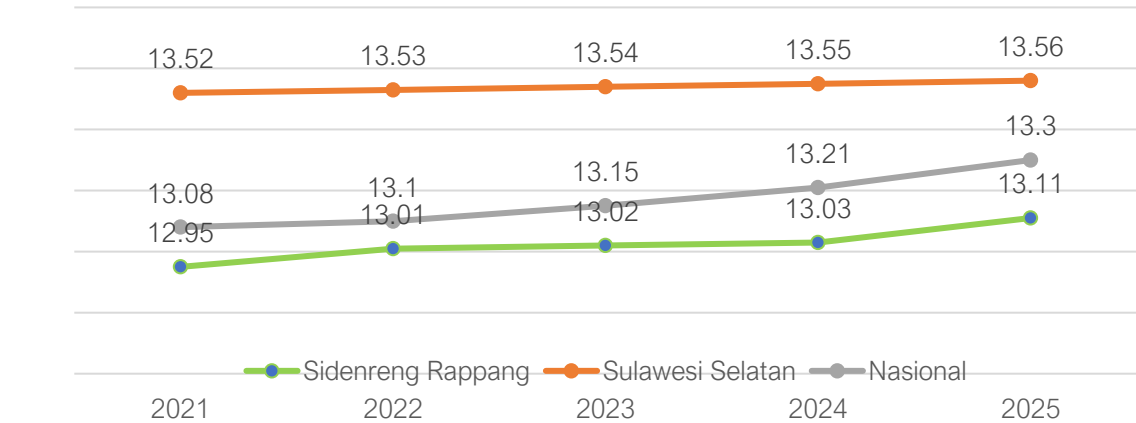
Dalam lima tahun terakhir, tren Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan fluktuasi, baik untuk jenjang Pendidikan SD Sederajat maupun SMP Sederajat. Pada jenjang Pendidikan SD Sederajat, tahun 2021 proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD Sederajat mencapai 99.78 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 98,5 dan terus mengalami flulktuasi hingga tahun 2025 berada di angka 99.3 persen

Sejalan dengan APS SD Sederajat, APS SMP Sederajat Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, APS untuk SMP Sederajat tercatat sebesar 91,05 persen dan pada tahun 2025 menjadi 91,46 persen. APS SMA Sederajat mengalami penurunan. Tahun 2021 berada di angka 69,09, terus menurun hingga tahun 2025 menjadi 64,76. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama sektor pendidikan bukan lagi pada akses pendidikan dasar, melainkan pada peningkatan keberlanjutan pendidikan menuju jenjang menengah dan perguruan tinggi melalui penguatan program pencegahan putus sekolah, perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi, serta pemberian dukungan pembiayaan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

3. Harapan Lama Sekolah

Capaian harapan lama sekolah (HLS) di Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2021 mencapai 12,95 tahun, dan terus mengalami kenaikan. Memasuki tahun 2022 naik menjadi 13,01 tahun, hingga akhirnya naik menjadi 13,11 tahun di tahun 2025. Capaian Harapan lama sekolah Sidenreng Rappang 5 tahun terakhir masih berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian nasional. Selain itu angka HLS Sidenreng Rappang masih cenderung melambat, namun di tahun 2025 sedikit mengalami peningkatan signifikan.

Grafik 2.54
Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan,
Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

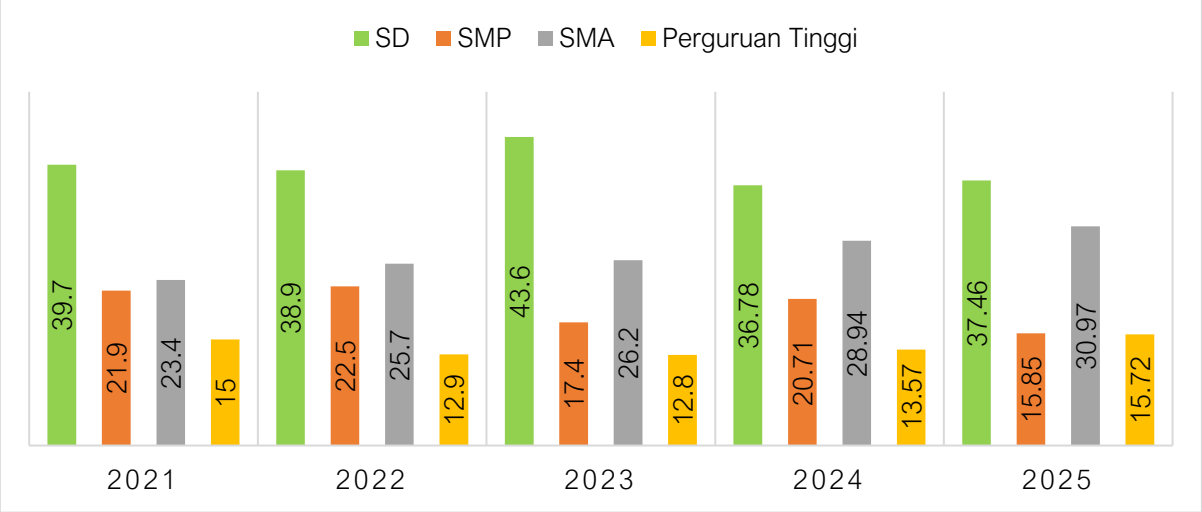


Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2026

4. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikasi kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Meskipun sebagian orang tetap percaya bahwa etos dan keseriusan dalam bekerja lebih menentukan ketimbang tingkat pendidikan belaka, tak dapat dipungkiri tingkat pendidikan masih menjadi akses penting menuju suatu pekerjaan. Tak hanya soal akses terhadap posisi dalam sebuah bidang pekerjaan, tingkat pendidikan juga akan berkorelasi positif dengan penghasilan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pekerja akan cenderung semakin tinggi pula penghasilannya.

Grafik 2.55
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja dengan Kualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024



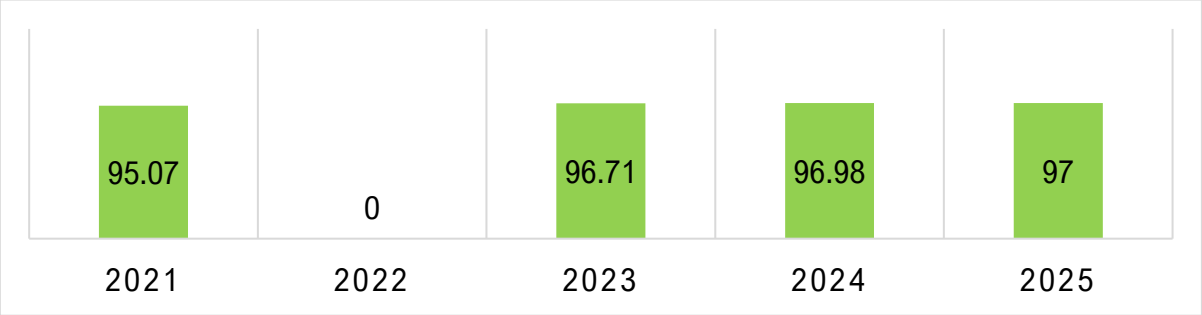
Sumber: BPS, diolah Tahun 2025

Pada tahun 2025, penduduk bekerja dengan tamatan SD ke bawah masih menunjukkan proporsi terbesar di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebesar 37,46 persen penduduk bekerja merupakan lulusan SD ke bawah. Mereka yang tidak/belum bersekolah, belum tamat SD maupun tamatan SD, termasuk dalam kelompok ini. Selanjutnya 15,85 persen penduduk bekerja merupakan mereka yang tamat sekolah menengah pertama, 30,97 persen tamat sekolah menengah atas. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tamatan pendidikan tinggi hanya mencapai 15,72 persen. Meskipun proporsinya cenderung meningkat dalam beberapa tahun tahun terakhir, hal ini tetap mengindikasikan masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang.

5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Pendidikan merupakan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, dapat menggambarkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduknya. Untuk mengukur tingkat pendidikan tersebut diperlukan suatu indikator yang dapat menggambarkan kualitas dan kuantitas penduduk di bidang pendidikan.

Grafik 2.56
Penduduk Usia 15 Tahun keAtas yang Bekerja menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025

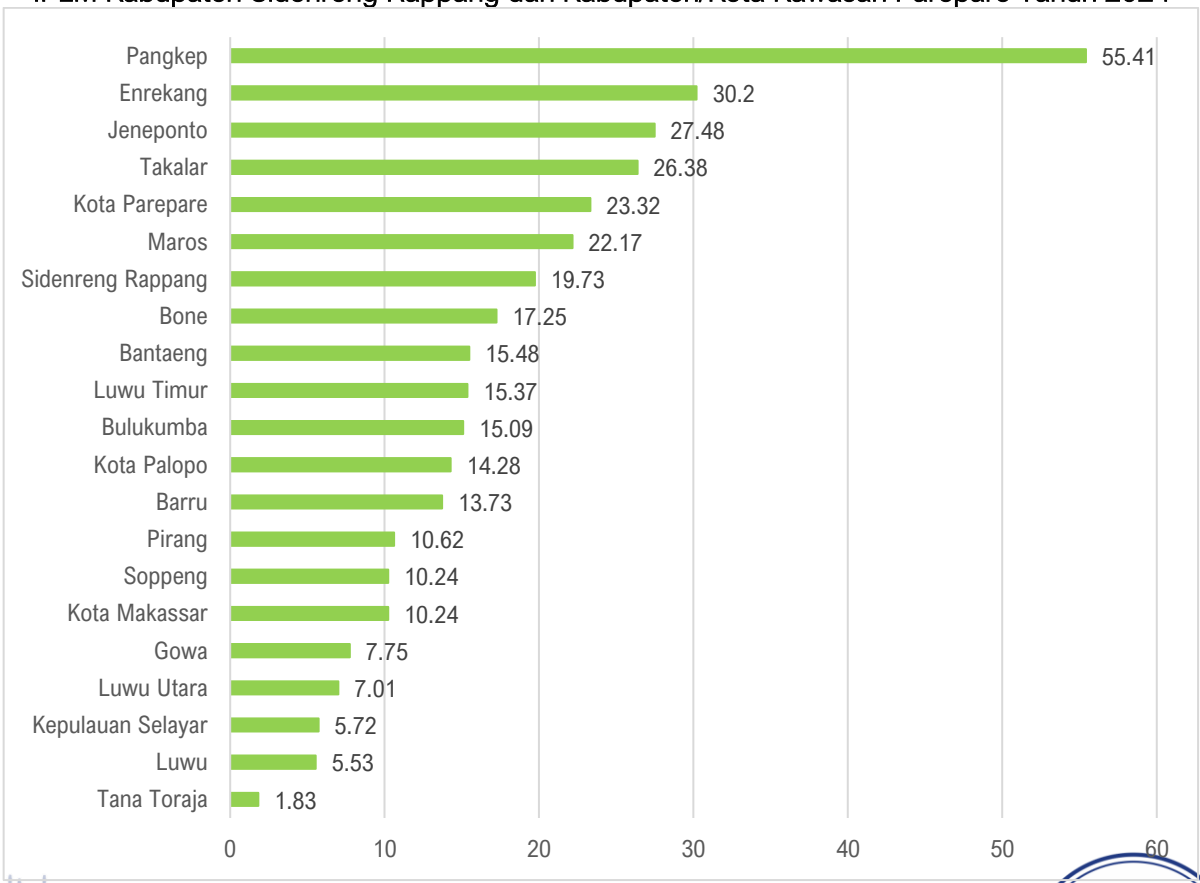


Sumber Dinas Koperasi, UKM, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Tahun 2026

6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2025 IPLM Kabupaten Sidenreng Rappang menempati posisi ketujuh tertinggi dari 24 Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. IPLM Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 menunjukkan dimensi kinerja berada di angka 0,227 sedangkan dimensi kepatuhan 0,128 . Kedua dimensi tersebut masih berada di bawah capaian Sulawesi Selatan dan Nasional.

Grafik 2.57
IPLM Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota Kawasan Parepare Tahun 2024



Sumber: Perpusnas, diolah Tahun 2026

7. Indeks Literasi Digital (ILD)

Indeks ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital secara umum. Indeks literasi digital diukur melalui empat pilar indikator besar, yakni *digital skills, digital ethics,* digital *safety*, dan *digital culture*. Indikator ini datanya belum tersedia di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

1. Persentase Penyandang Disabilitas Yang Bekerja Di Sektor Formal

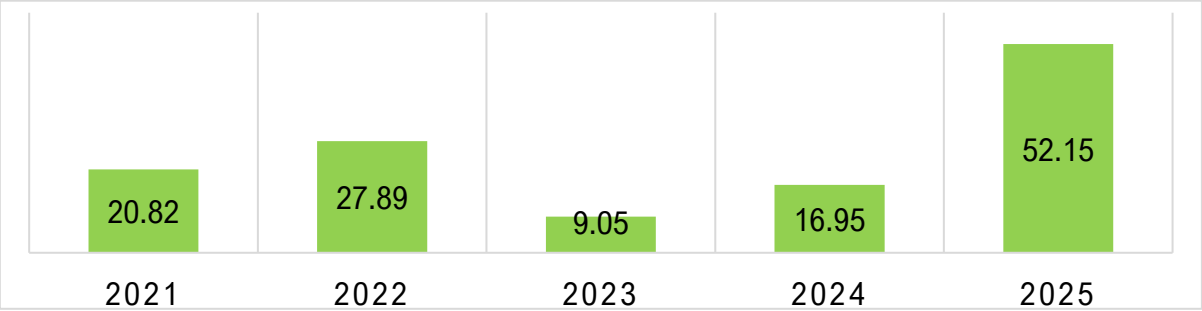
Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal merupakan ukuran penting untuk menilai inklusi dan keseteraan tempat kerja. Data ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memberikan kesempatan yang adil kepada penyandang disabilitas untuk berkontribusi secara produktif dalam perekonomian. Namun, data ini belum tersedia di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Ketenagakerjaan Nasional merupakan program jaminan sosial yang melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial ekonomi, seperti penyakit, kecekalan, cacat, dan kematian. Semakin tinggi cakupan jaminan sosial menunjukkan semakin tinggi pula perlindungan masyarakat dari berbagai risiko saat bekerja. Berbagai fenomena yang tidak terduga bisa berdampak pada kesejahteraan rumah tangga, seperti kecelakaan atau kematian. Keberadaan jaminan sosial dapat meringankan beban ekonomi jika hal tersebut terjadi.

Data menunjukkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kepesertaan jaminan sosial.

Grafik 2.58
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

Sementara itu, jika dilihat dari perkembangannya, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2021hingga 2025 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan. Tahun 2021 capaian Ketenagakerjaan 20,82 persen meningkat menjadi 27,89 di tahun 2022, mengalami penurunan di tahun 2023 dan 2024 dan kembali

meningkat di tahun 2025 menjadi 52,15 persen. Peningkatan ini dapat menunjukkan adanya perbaikan dalam akses atau pemanfaatan layanan jaminan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mungkin didorong oleh stabilisasi ekonomi atau peningkatan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial.

2.1.2.5. Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju

1. **Indeks Kerukunan Umat Beragama**

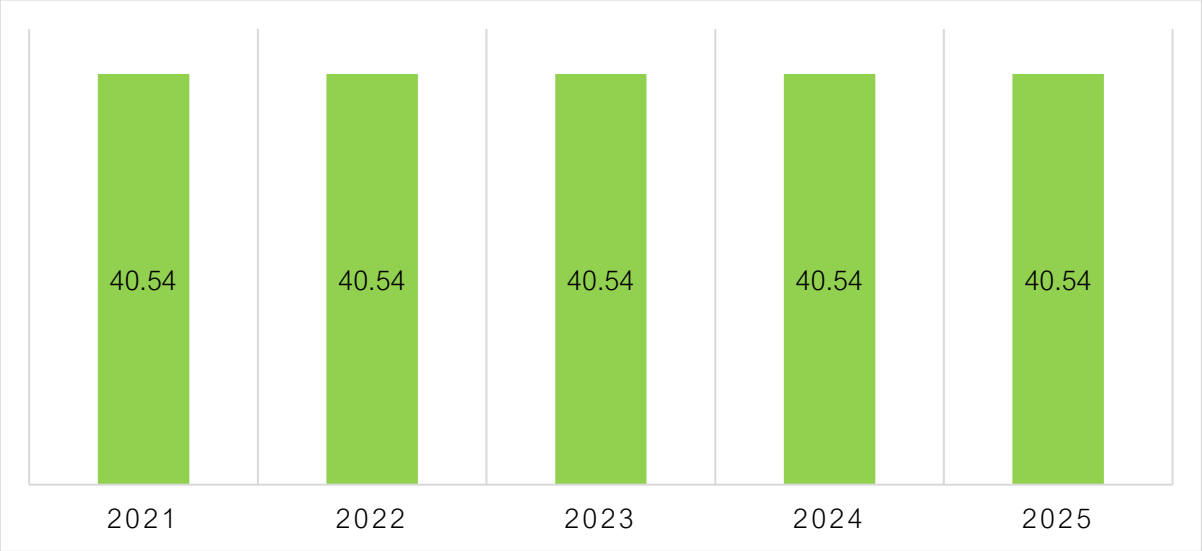
Konsep kerukunan tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri (BM) antara Meneteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang kerukunan yang dimaksud adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan Kerjasama dalam kehidupan permasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) untuk Kabupaten Sidenreng Rappang secara spesifik belum tersedia dalam data publik. Namun Kabupaten Sidenreng Rappang telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah pembentukan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama (PDSKUB) di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe yang merupakan wilayah dengan populasi umat Hindu Tolotang terbesar yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Program ini bertujuan untuk memperkuat toleransi, harmoni, dan moderasi beragama di tingkat desa.

2. **Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi**

Indeks Pembangunan Kebudayaan dibentuk oleh 7 dimensi meliputi Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender. Dari ke tujuh dimensi tersebut, terdapat 4 dimensi yang capaiannya dibawah nasional yaitu dimensi Ekonomi Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya dan Budaya Literasi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas dan jaringan pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan, penggunaan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari, intensitas pertunjukkan seni, penggunaan produk tradisional, dan peningkatan keterlibatan penduduk dalam pertunjukkan seni maupun upacara adat, serta peningkatan sinergitas antara instansi untuk pemajuan kebudayaan. Belum ada data Indeks Pembangunan Kebudayaan yang tersedia untuk Kabupaten Sidenreng Rappang namun dapat diproteksi dari persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi.

Grafik 2.59
Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Dan Situs Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Data di olah Tim, 2026

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Kualitas Keluarga

Keluarga sebagai Unit sosial ekonomi terkecil dalam masyarakat merupakan landasan dari semua intitusi, merupakan kelompok kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Keluarga adalah pencetak kualitas sumber daya manusia, lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang anak, pusat kegiatan penting berbagai aspek kehidupan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat.

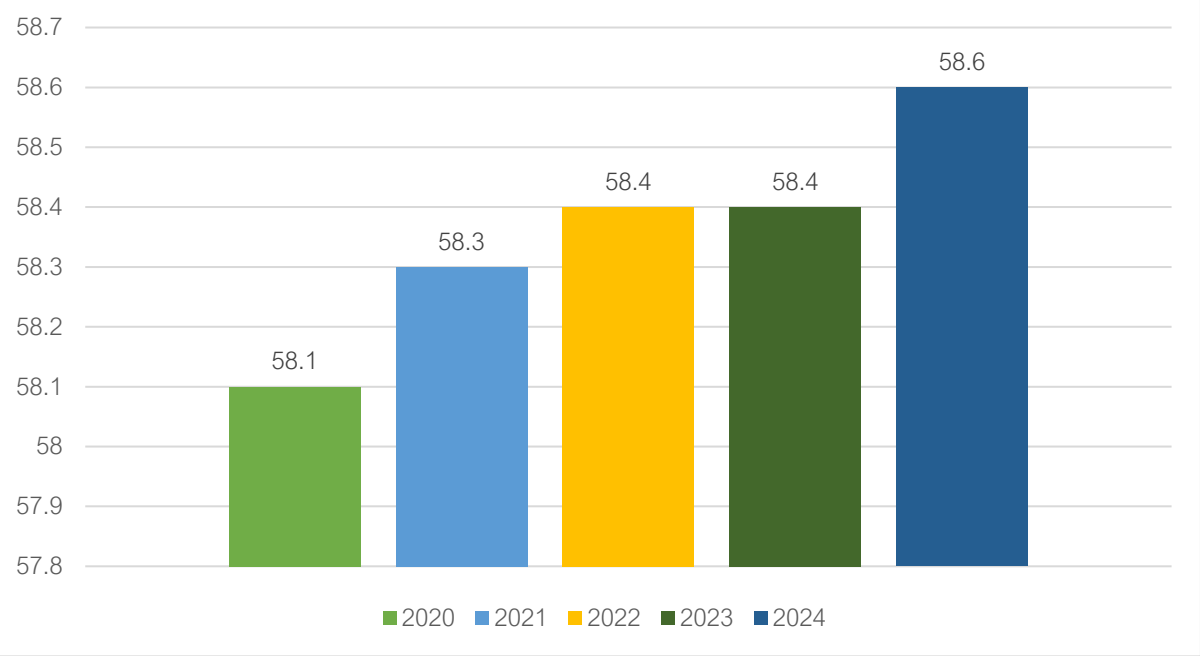
Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi keluarga yang berkualitas. Menurut UU Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berkualitas merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengukur sejauh mana capaian kualitas keluarga di suatu wilayah, maka disusun Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga. Perhitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) telah dilakukan beberapa kali dan terakhir dilakukan di tahun 2023 dengan menggunakan 25 indikator dan 5 dimensi. Namun, data Indeks Kualitas Keluarga hanya disajikan hingga level provinsi, sehingga belum tersedia di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak mengukur sejauh mana perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Penyusunan indeks ini terdiri dari 5 klaster, yang terdiri dari 4 klaster pembentuk Indeks Pemenuhan Anak dan 1 klaster pembentukan Indeks Perlindungan Anak. Secara detail, klaster-klaster tersebut terdiri dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan

alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2020 indeks ini tercatat sebesar 58,1 dan terus meningkat menjadi 58,6 di tahun 2024. Angka tahun 2025 belum rilis sehingga hanya sampai di tahun 2024. Peningkatan angka Ini mencerminkan masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti disparitas akses terhadap layanan kesehatan dan Pendidikan di daerah terpencil, serta kekurangan sumber daya untuk mendukung program-program perlindungan anak. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan indeks perlindungan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.60
Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024

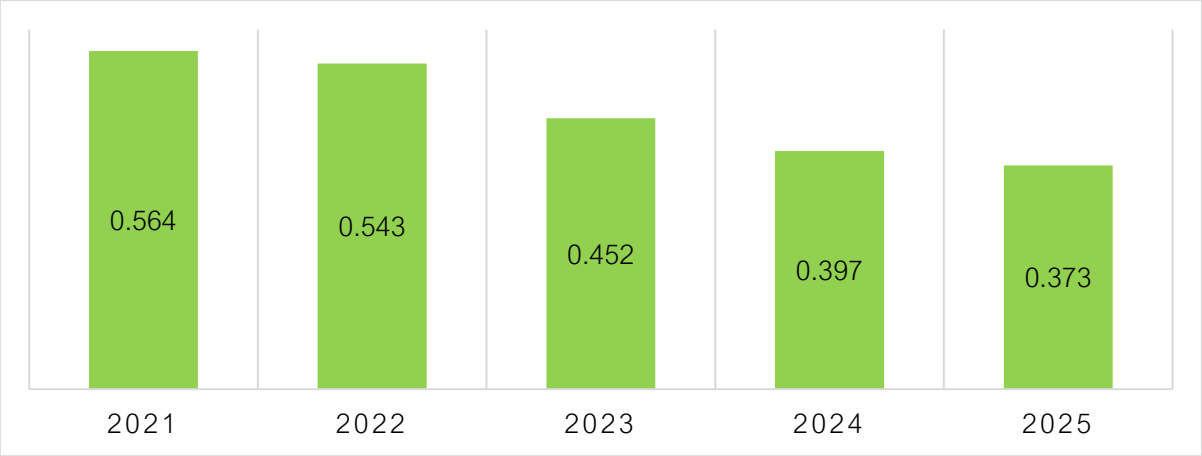


Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2025

3. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender digunakan untuk mengukur kesejangan atau ketidakseteraan antara jenis kelamin dalam suatu wilayah. Masuknya keseteraan gender sebagai salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mencerminkan pengakuan secara global bahwa pembangunan berkelanjutan tanpa memperhatikan kesetaraan gender adalah hal yang tidak mungkin. Keseteraan gender dipandang bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan hak dasar bagi setiap manusia, tapi menjadi pilar penting untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Terdapat tiga dimensi yang dijadikan sebagai aspek pengukuran, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Data menunjukan IKG Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung menurun dari 0,564 di tahun 2021 menjadi 0,373 di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Sidenreng Rappang mulai membaik atau menuju kesamaan gender antara laki-laki dan perempuan.

Grafik 2.61
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

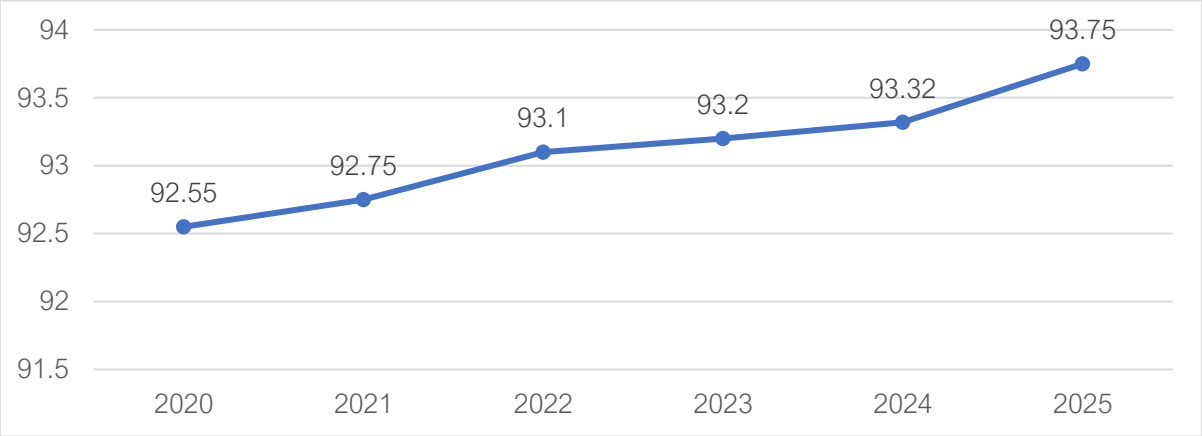


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, IPG sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.62
Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sulawesi Selatan; 2025

Indeks Pembangunan Gender secara keseluruhan dari tahun 2021-2025 cenderung menunjukkan peningkatan yang stabil, meskipun nilai indeksnya tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IPG tercatat sebesar 95,55, meningkat secara bertahap hingga mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar 93,75 pada tahun 2025. Kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan bisa terlihat dalam berbagai bidang atau komponen pembentuk IPG, yaitu bidang penddidikan, kesehatan dan sumbangan pendapatan.

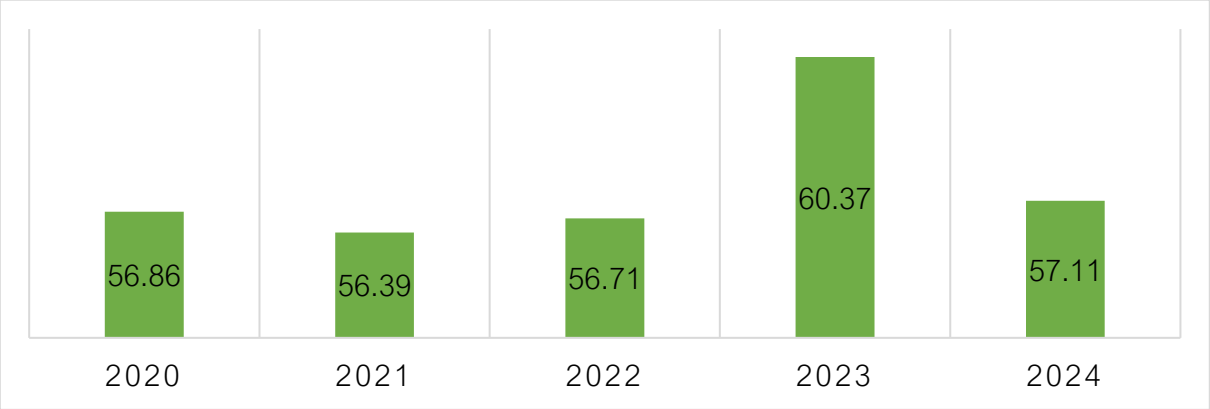
5. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur capaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indkator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur IDG melalui tiga dimensi, yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan di parlemen diukur dengan proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif. Kemudian dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai manajer, staf administrasi, pekerja professional dan teknisi. Sementara dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laik-laki dan perempuan di sektor non-pertanian.

Partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik terus menguat dalam lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari skor Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang konsisten tumbuh sejak 2020 hingga mencapai rekor tertinggi baru pada 2023. Adapun sejak tahun 2020 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan fluktuatif. Tahun 2020 nilai Indeks Pemberdayaan Gender adalah sebesar 56,86, mengalami sedikit penurunan tahun 2021 menjadi 56,39, dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 56,371. Kenaikan signifikan terlihat pada tahun 2023, yang mencapai 60,37, namun angka ini kembali menurun menjadi 57,11.

Grafik 2.63
Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024



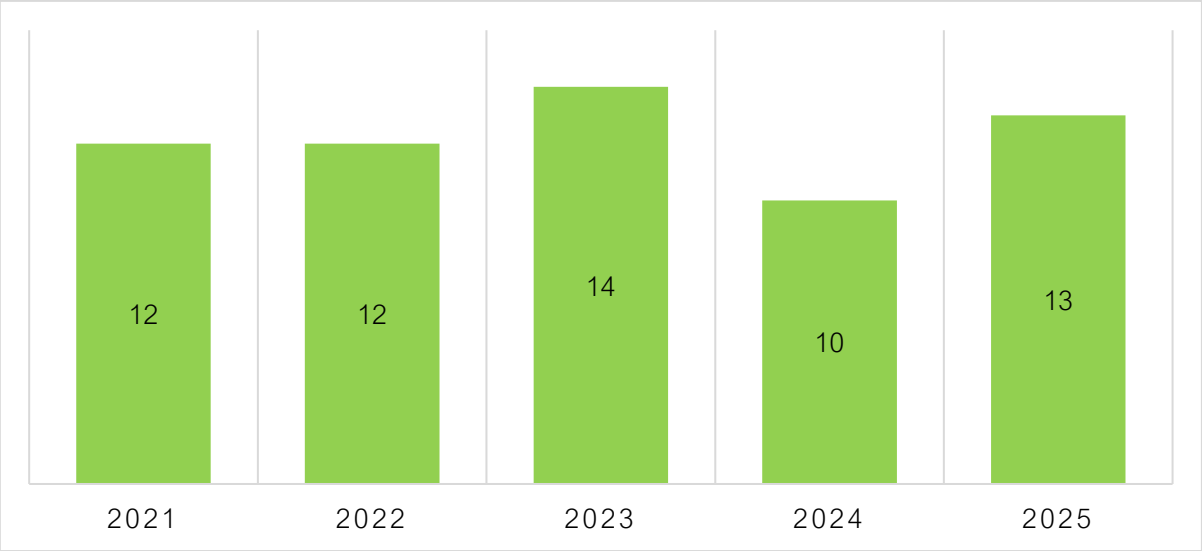
Sumber: Badan Pusat Statistik; 2025

6. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan sebuah instrumen untuk memberikan gambaran sejauh mana kemajuan pembangunan pemuda. Beberapa indikator yang membentuk indeks ini yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, dan gender dan diskriminasi. Hingga saat ini, data indeks pembangunan pemuda

baru disajikan di level provinsi, sehingga belum tersedia di Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun demikian, pelibatan pemuda dalam pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tetap menjadi perhatian pemerintah daerah melalui berbagai program dan kegiatan kepemudaan. Pelibatan ini diwujudkan melalui kemitraan dengan organisasi kepemudaan, seperti Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dalam pembangunan sumber daya manusia, penguatan ideologi kebangsaan, dan pemberdayaan ekonomi pemuda. Selain itu, komunitas pemuda seperti Dhemontz yang turut dilibatkan dalam mendukung program-program unggulan pemerintah daerah. Selain itu Indeks pembangunan pemuda dapat diproteksi menggunakan indikator Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif. Capaian Sidenreng Rappang mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2021sebanyak 12% organisasi pemuda yang aktif, angka ini mengalami peningkatan menjadi 13% di tahun 2025.

Grafik 2.64
Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif



Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan pariwisata; 2026

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumberdaya manusia merujuk pada kemampuan individu-individu dalam suatu populasi untuk bersaing secara efektif di pasar kerja atau dalam ekonomi secara keseluruhan. Daya saing sumberdaya manusia memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemakmuran masyarakat.

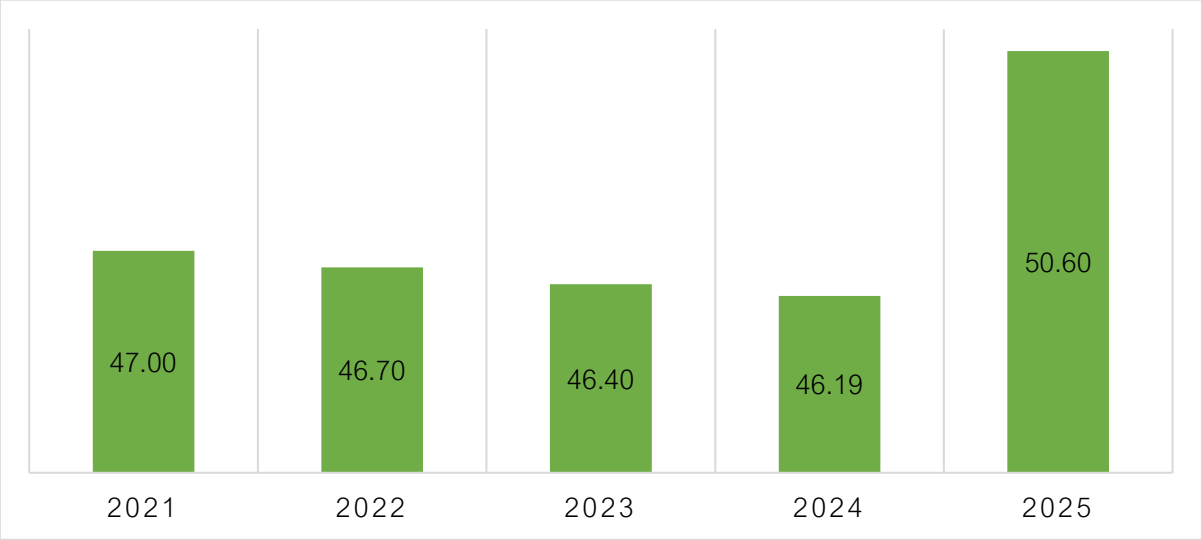
Indeks ini merupakan alat ukur yang baru digunakan di seluruh Provinsi Indonesia mulai tahun 2025, sehinga ketersediaan datanya masih belum dapat disajikan, jadi tahun 2021-2025 menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator yang termuat dalam IPM terdiri dari 3 yaitu 1) Indikator ketahanan hidup, yaitu ukuran ketahanan hidup seorang anak yang baru lahir hingga umur 5 tahun; 2) Indikator Pendidikan, untuk mengukur jumlah tahun sekolah

yang dapat dicapai oleh seorang anak hingga usia 18 tahun, serta nilai tes yang diselaraskan Bank Dunia untuk tiap negara; 3) Indikator Kesehatan, yang diukur dengan tingkat kelangsungan hidup orang dewasa usia 15-60 Tahun, dan angka stunting anak dibawah usia 5 tahun. Beberapa indikator berikut dapat memberikan gambaran kondisi aspek daya saing sumber daya manusia

1. Angka Ketergantungan

Proporsi Proporsi penduduk ini berimplikasi pada angka ketergantungan, yaitu suatu angka menunjukkan banyaknya penduduk non-produktif untuk setiap 100 penduduk produktif. Pada tahun 2025, angka ketergantungan di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 50,60, yang artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 50 penduduk non-produktif. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding posisi tahun 2021 yang berada di angka 47. Peningkatan ini menandakan semakin tingginya angka ketergantungan di tahun 2025.

Grafik 2.65
Rasio Ketergantungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

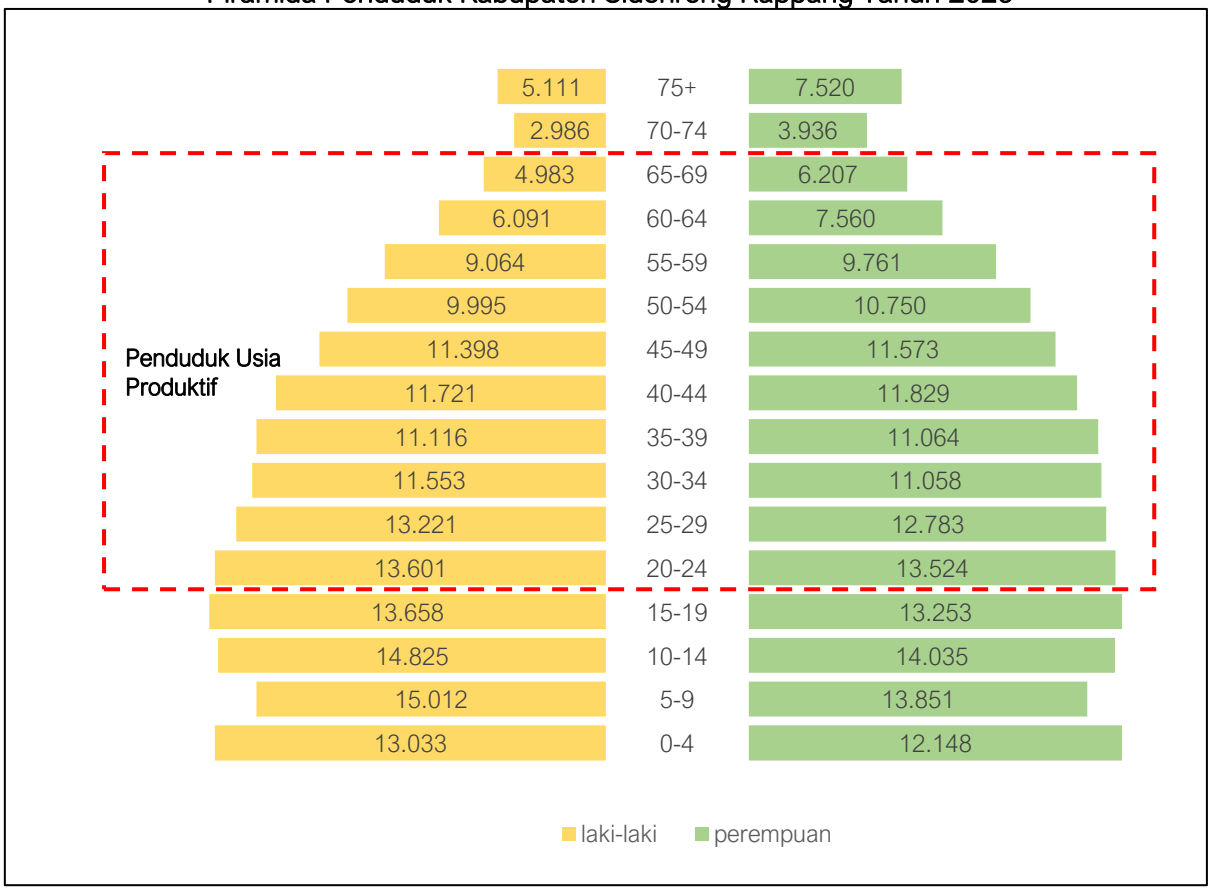


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

Jika mengamati komposisi penduduk dalam rentang waktu antara 2021 sampai dengan 2025, terlihat bahwa kondisi piramida penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan sejumlah perubahan komposisi. Proporsi penduduk usia produktif yaitu usia antara 15-64 tahun yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif atau usia dibawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk usia produktif tercatat sebesar 224.573 jiwa atau setara dengan 66,40 persen dari total populasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang mencapai 338.220 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk usia tidak produktif sebesar 113.647 jiwa atau 33,60 persen dari total populasi. Dari populasi produktif tersebut, terdapat perbedaan proporsi berdasarkan jenis kelamin. Proporsi penduduk perempuan usia produktif mencapai 113.155 jiwa, sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki usia produktif yang berjumlah 111.418 jiwa. Namun, meskipun proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia tidak produktif, selisih jumlah antara kedua kelompok masih tergolong

kecil. Hal ini menyebabkan angka beban tanggungan (*dependency ratio*) tetap cukup tinggi, bahwa setiap 100 penduduk produktif masih harus menanggung sekitar 51 penduduk tidak produktif.

Grafik 2.66
Piramida Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

2. Keterampilan SDM tenaga kerja

Keterampilan Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diukur melalui beberapa indikator atau instrumen, tergantung pada jenis keterampilan yang ingin diukur. Secara umum, keterampilan SDM diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama dan diukur melalui:

a. Hard Skills (Keterampilan Teknis)
b. Soft Skills (Keterampilan Sosial dan Interpersonal)
c. Keterampilan Kognitif dan Adaptif

Selain itu keterampilan tenaga kerja dapat diukur melalui indikator keterampilan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pengukuran keterampilan menggunakan variabel tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan. Capaian Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri mengalami kenaikan setiap tahunnya dimana pada tahun 2022 angka pilar keterampilan berada di angka 3,24 meningkat menjadi 4,5 di tahun 2025. Peningkatan terjadi di indikator kemudahan menemukan pekerja terampil yakni di angka sempurna yaitu 5, sehingga secara akumulatif meningkatkan nilai pilar keterampilan secara keseluruhan.

Grafik 2.67
Pilar keterampilan IDSD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2025



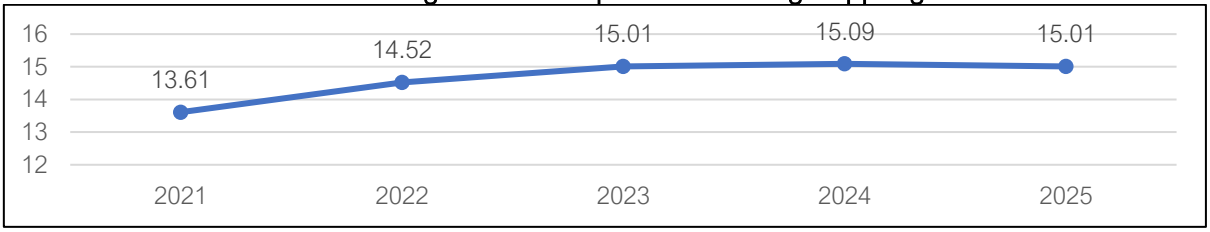
Sumber: Data diolah, 2026

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan atau industri manufaktur memegang peranan penting di dalam perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang. Industri ini berperan strategis dalam mendorong transformasi struktur ekonomi dari *commodity based* menuju *manufacture based*. Industri pengolahan dinilai lebih produktif sehingga mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku, menjadi penyumbang pajak terbesar, hingga membuka lapangan kerja. Industri pengolahan tercatat mampu memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata sebesar 14,64 persen selama periode 2021-2025. Sektor ini menjadi penyumbang ekonomi terbesar ketiga bagi Kabupaten Sidenreng Rappang setelah pertanian dan konstruksi. Peran dari sektor ini bagi ekonomi cenderung menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021, porsi industri pengolahan pada PDRB sebesar 13,61 persen, meningkat terus hingga tahun 2024 mencatatkan angka 15,09 persen, dan relatif stabil pada tahun 2025 dengan kontribusi sebesar 15,01 persen.

Grafik 2.68
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



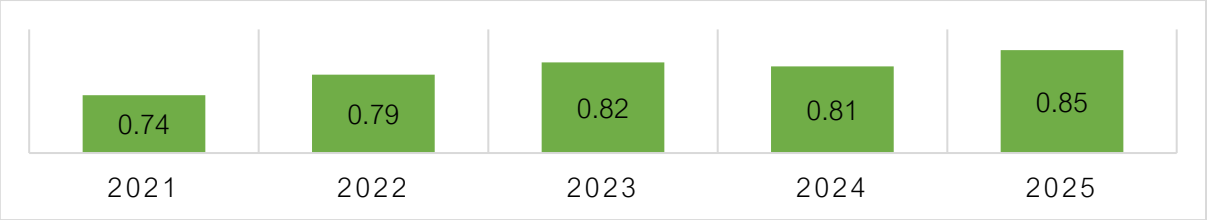
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

2. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Sektor penyediaan akomodasi makan dan minum merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang apabila dikelola secara optimal dan terintegrasi dengan pengembangan sektor lainnya. Sektor ini memiliki keterkaitan yang erat dengan pariwisata, salah satu objek wisata yang terkenal yaitu Taman Wisata Puncak Bila yang menjadi salah satu destinasi andalan daerah. Sektor ini menyumbang PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata 0,77 persen selama periode 2021-2025. Secara umum, sektor ini menunjukkan peningkatan kontribusi dari 0,74 persen pada tahun 2021, menjadi

0,85 persen pada tahun 2025. Meskipun demikian, peranan dari sektor ini masih relatif rendah dibandingkan dengan sektor transportasi dan pergudangan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan.

Grafik 2.69
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025

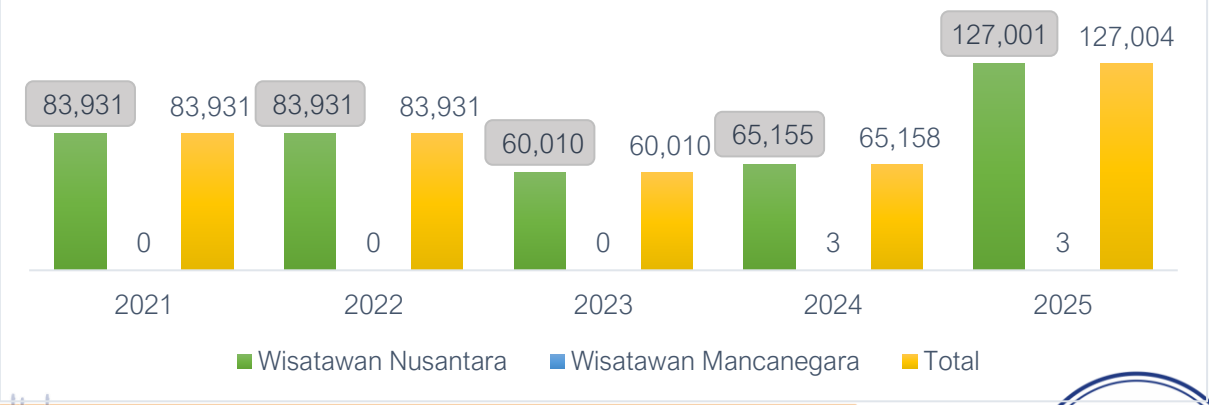


Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

3. Jumlah Wisatawan Mancanegara

Salah Salah satu tujuan akhir dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Tujuan akhir tersebut diharapkan dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (*quality tourism experience*), penguatan pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif, serta pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2025, kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, jumlah kunjungan tercatat sebesar 83.931 orang yang seluruhnya merupakan wisatawan nusantara. Angka tersebut relatif stagnan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah kunjungan mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 60.010 orang dan masih didominasi oleh wisatawan nusantara. Tahun 2024, meningkat menjadi 65.158 orang wisatawan. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2025 dengan total kunjungan mencapai 127.004 orang, yang terdiri dari 127.001 wisatawan nusantara dan 3 orang wisatawan mancanegara. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

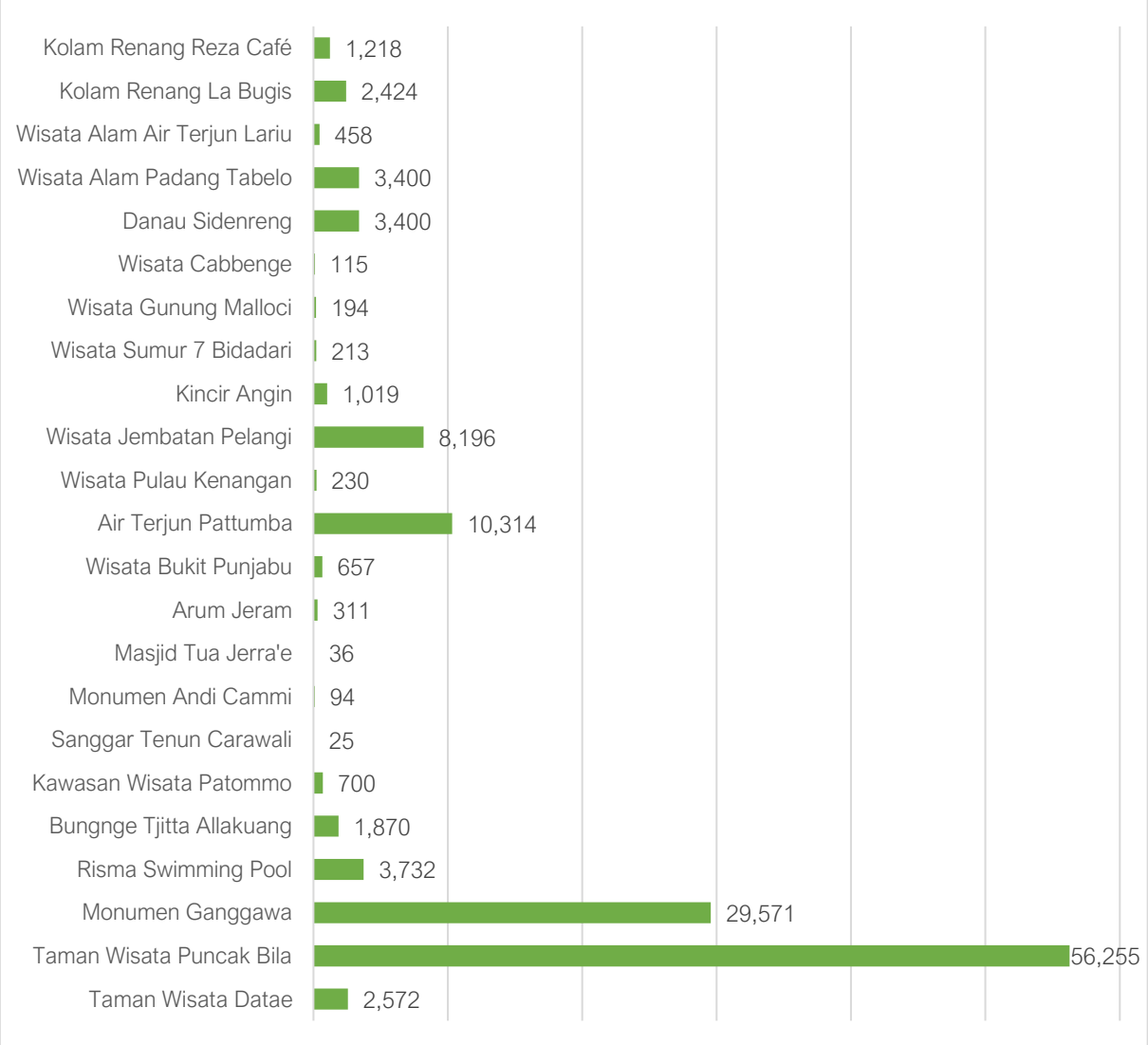
Grafik 2.70
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

Jika dilihat berdasarkan destinasi wisata, wisata buatan memiliki daya tarik terbesar bagi wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi Taman Wisata Puncak Bila tercatat sebesar 56.255 orang pada tahun 2025. Lalu destinasi selanjutnya yang menjadi daya tarik wisatawan yakni Monumen Ganggawa dan Wisata Air Terjun Pattumba dengan masing-masing jumlah pengunjung sebesar 29.571 orang dan 10.314 orang. Beberapa destinasi seperti Danau Sidenreng, Padang Tobelo, dan Jembatan Pelangi juga mencatat jumlah kunjungan yang cukup besar. Wisatawan mancanegara hanya tercatat sebanyak 3 kunjungan, yang seluruhnya berada di Wisata Sumur 7 Bidadari.

Grafik 2.71
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tujuan
Tahun 2025



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

4. Ekonomi Kreatif

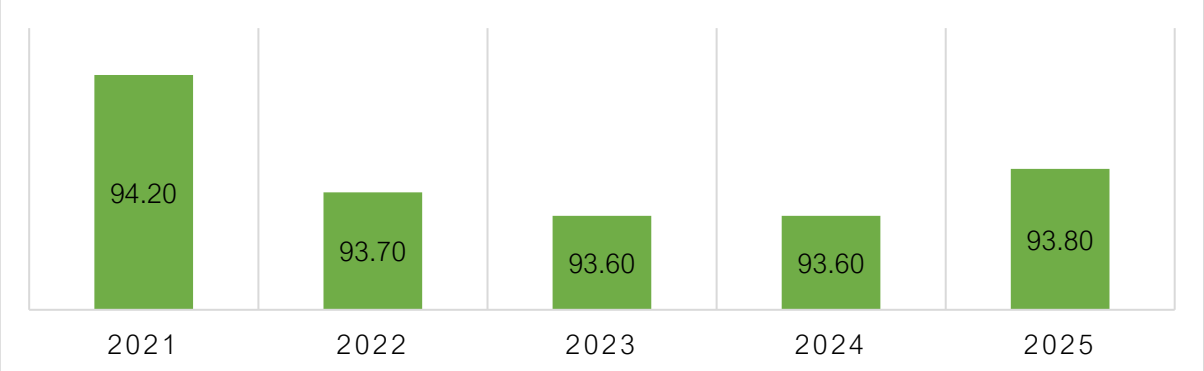
Dalam era digital saat ini, kata ekonomi kreatif atau yang biasa disingkat sebagai ekraf mungkin sudah tidak asing lagi di telinga. Berbagai bisnis dijalankan dengan mengutamakan konsep kreatif sehingga tidak saja memudahkan masyarakat, tapi juga mengintensifkan

kreativitas. Seiring berjalannya waktu, perkembangan bidang ekonomi pada akhirnya sampai di taraf ekonomi kreatif. Di mana kreativitas menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi, tentunya kreativitas dan inovasi-inovasi baru harus terus bertambah mengingat kita semua harus menyesuaikan hidup dengan keadaan, selain itu Industri ekonomi kreatif juga diharapkan mampu menjaga ketahanan ekonomi daerah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, ekraf mulai menunjukkan potensi signifikan dengan keberadaan 592 industri ekonomi kreatif yang tersebar di berbagai subsektor. Subsektor tersebut mencakup kerajinan wastra dan kerajinan tangan khas Bugis, kuliner inovatif seperti dodol kopi, fashion berbasis budaya Bugis, serta jasa kreatif berbasis digital. Perkembangan ini didukung oleh kolaborasi pemerintah daerah dan anak muda lewat event seperti Expo Kreatif Sulsel dan Saromase UMKM Fest.

5. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian

Usaha kecil dan menengah (UKM) non pertanian merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. UKM non pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang proporsinya lebih dari 90 persen dalam lima tahun terakhir. Tahun 2021, tercatat sebesar 94,20 persen, kemudian mengalami penurunan berturut-turut di tiga tahun berikutnya menjadi 93,70 dan 93,60 persen. Pada tahun 2025, mengalami sedikit peningkatan menjadi 93,80 persen. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan skala usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Grafik 2.72
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025

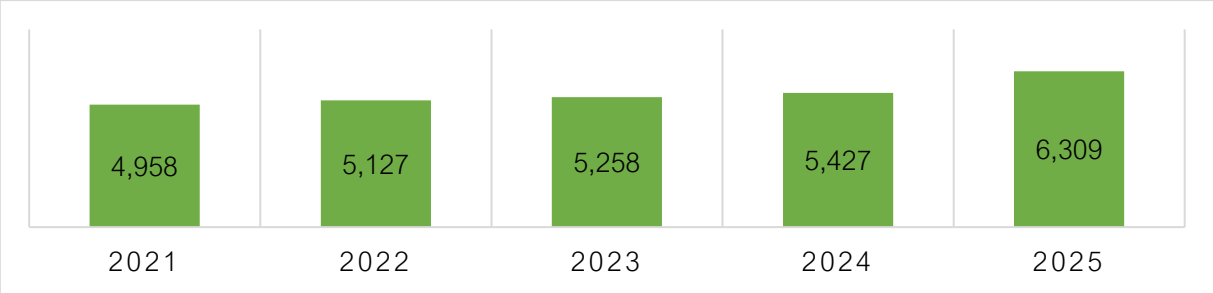


Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

6. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota

Industri pengolahan memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menyumbang 15,01 persen terhadap total PDRB. Pada tahun 2021, jumlah IKM tercatat sebesar 4.958 unit dan terus meningkat hingga mencapai 6.309 unit pada tahun 2025. Peningkatan IKM bisa menjadi pertanda keberhasilan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membangun industri dan sekonomi formal untuk menciptakan lapangan kerja yang banyak dan layak.

Grafik 2.73
Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



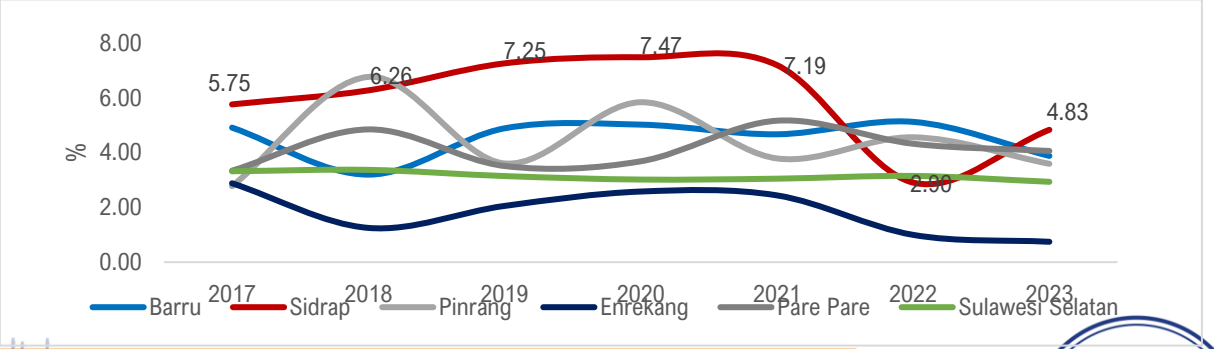
Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

7. Rasio Kewirausahaan Daerah

Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengatasi persoalan pengangguran pemuda saat ini adalah penumbuhan kewirausahaan. Sidenreng Rappang memiliki potensi penumbuhan kewirausahaan yang besar karena besarnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Dengan adanya potensi ini, kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang terutama kalangan pemuda perlu terus dirangsang dan dikembangkan agar mereka menjadi individu yang dapat menciptakan peluang ekonomi dan berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja. Pengembangan kewirausahaan pemuda menuju wirausaha kerah putih harus terus didorong agar menghasilkan pengaruh yang lebih besar terhadap perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pada tahun 2023, rasio kewirausahaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 4,83 persen, lebih tinggi dibanding Kabupaten/Kota di Kawasan Parepare serta rata-rata capaian Provinsi. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2023 menurun dibandingkan periode sebelum pandemi Covid-19 yang berada pada kisaran 5,75 persen hingga 7,47 persen. Pasca pandemi Covid-19, sektor usaha memang mengalami perlambatan di Kabupaten Sidenreng Rappang utamanya dipengaruhi oleh belum pulihnya rantai pasok bahan baku. Selain itu, ada berbagai tantangan yang masih dihadapi terutama pengusaha muda, antara lain dari sisi kompetensi, pengalaman, sumber daya, jejaring, dan dukungan keluarga untuk memulai dan menjalankan usahanya.

Grafik 2.74
Perkembangan Rasio Kewirausahaan Daerah Ajatappareng Tahun 2017-2023

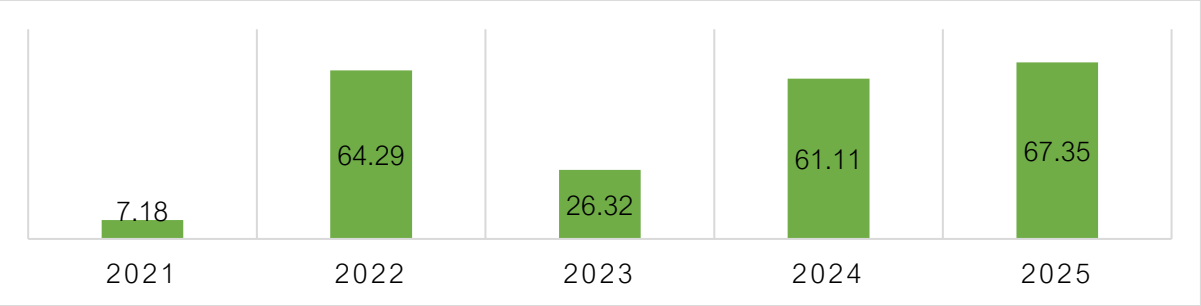


Sumber: BPS, diolah Tahun 2024

8. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Koperasi memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan dengan memanfaatkan potensi keunggulan daerah dan didorong menjadi pemain utama dalam mengelola potensi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat. Perjalanan 78 tahun koperasi sebagai organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama telah membuktikan bahwa keberadaannya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sebagaimana fungsi utamanya. Pada tahun 2025, persentase koperasi sehat di Kabupaten Sidenreng Rappang mencatatkan angka tertinggi selama periode 2021-2025 dengan mencapai 67,35 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan koperasi di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah baik.

Grafik 2.75
Perkembangan Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021–2025

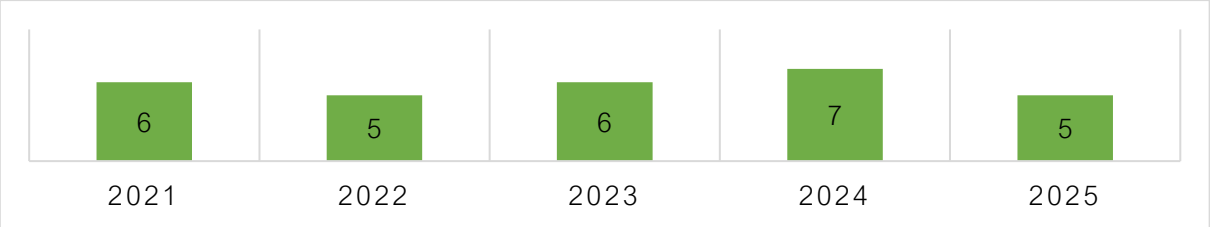


Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

9. RoA (Return on Assets) BUMD

Return On Asset (RoA) BUMD Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, RoA BUMD tercatat sebesar 6 persen, kemudian menurun menjadi 5 persen pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 RoA kembali meningkat menjadi 6 persen dan mencapai capaian tertinggi sebesar 7 persen pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 nilai RoA kembali mengalami penurunan menjadi 5 persen. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam produktivitas perusahaan daerah melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Peningkatan RoA pada tahun 2023 hingga 2024 mencerminkan kemampuan BUMD yang lebih baik dalam menghasilkan laba dari penggunaan aktiva perusahaan, sedangkan penurunan pada tahun 2025 mengindikasikan perlunya peningkatan efisiensi pengelolaan aset dan penguatan kinerja usaha BUMD. Angka RoA BUMD Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode tersebut dapat dikatakan cukup baik/sehat karena berada di atas 2 persen. Artinya, nilai rasio antara keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan penggunaan aktiva yang lebih dari 2 persen dapat menggambarkan bahwa kemampuan untuk mendapatkan laba bersih semakin tinggi dibandingkan aktiva perusahaan yang digunakan.

Grafik 2.76
RoA BUMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2021-2025



Sumber: Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

10. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Petani/Nelayan adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani/nelayan (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani/nelayan (IB) yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ekonomi ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani dan nelayan. Data NTP dan NTN dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data NTP dan NTN hanya tersedia pada level provinsi, sehingga tidak ada data yang tersedia untuk Kabupaten Sidenreng Rappang.

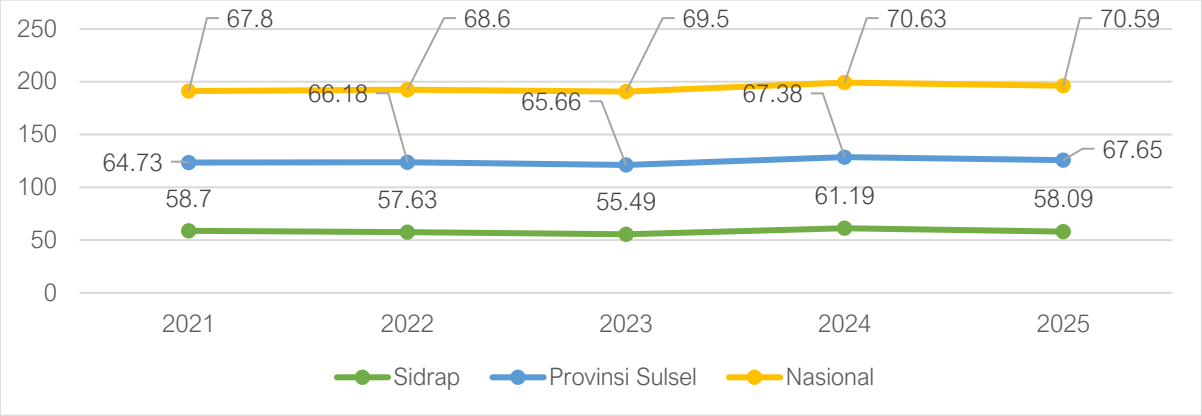
11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator penting dalam statistik ketenagakerjaan yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Indikator ini menunjukkan banyak sedikitnya penduduk usia kerja yang bersedia bekerja. Semakin tinggi TPAK semakin baik, sebab semakin tinggi pula bagian dari penduduk yang bersedia bekerja. Lebih lanjut, TPAK yang tinggi juga mengindikasikan pasar tenaga kerja yang kuat dan aktif. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya TPAK di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, struktur demografi penduduk, faktor budaya dan sosial, faktor teknologi, dan faktor geografis.

Data menunjukkan TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Pada tahun 2021, tercatat sebesar 58,7 persen dan mengalami penurunan secara bertahap pada tahun 2022 menjadi 57,63 serta rahun 2023 menjadi 55,49 persen. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 61,19, namun kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 58,09. Capaian TPAK yang relatif rendah ini mengindikasikan tingginya persentase penduduk usia kerja yang tidak masuk dalam pasar tenaga kerja. Konsekuensinya, penduduk usia produktif tersebut tidak bisa berkontribusi dalam kegiatan ekonomi.

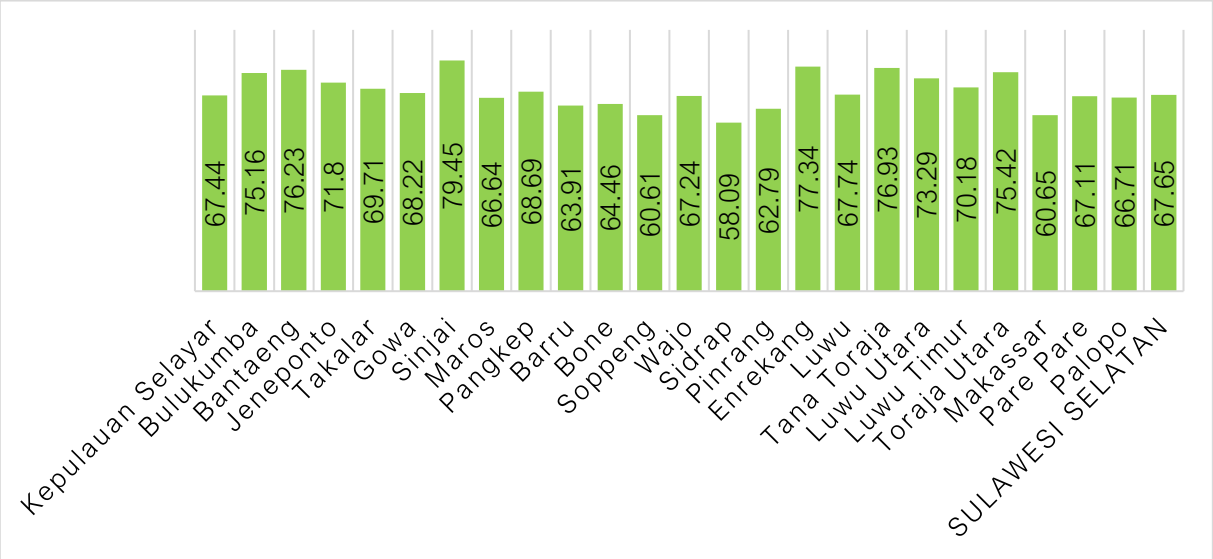
Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, posisi TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang terendah di tahun 2025. Daerah dengan TPAK tertinggi diraih oleh Sinjai (79,45%), Enrekang (77,34s%), dan Tana Toraja (76,93%). Rendahnya TPAK di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan masih besarnya potensi sumberdaya manusia yang belum termanfaatkan secara optimal.

Grafik 2.77
TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia
Tahun 2021–2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

Grafik 2.78
TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

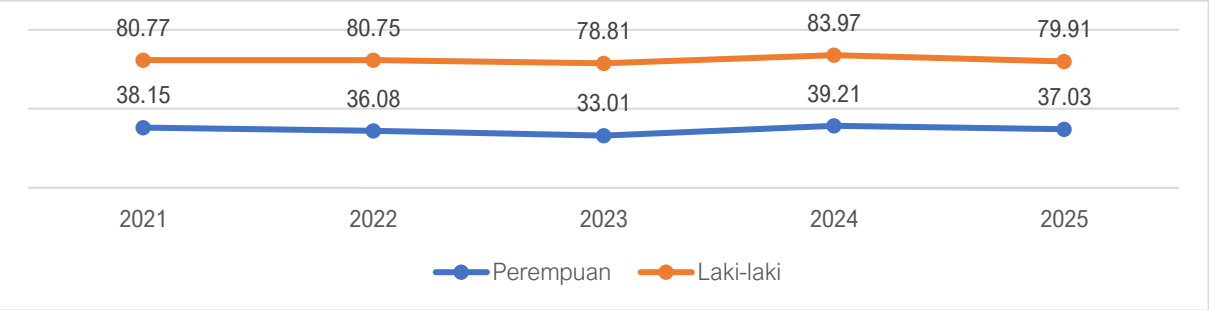
12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam statistik ketenagakerjaan yang menggambarkan proporsi perempuan usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan. TPAK Perempuan dihitung dengan membagi jumlah angkatan kerja perempuan dengan jumlah penduduk perempuan, lalu dikalikan 100. TPAK Perempuan menjadi penting karena menggambarkan sejauh mana perempuan terlibat dalam kegiatan ekonomi. Semakin tingginya TPAK perempuan dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan produktivitas, pengurangan ketimpangan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Data menunjukkan TPAK Perempuan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, TPAK perempuan tercatat sebesar 38,15 persen,

sedikit menurun menjadi 36,08 persen di tahun 2022. Tren penurunan berlanjut hingga tahun 2023 menjadi 33,01 persen. Di 2024, kembali naik sedikit menjadi 39,21 persen. Namun kembali menurun di tahun 2025 di angka 37,03 persen. TPAK perempuan memang biasanya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki karena perempuan umumnya berperan sebagai ibu rumah tangga. Adapun laki-laki memang biasanya berperan sebagai pencari nafkah di dalam rumah tangga, sehingga mesti bekerja atau masuk dalam kategori angkatan kerja.

Grafik 2.79
TPAK Perempuan dan Laki-Laki Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2021–2025

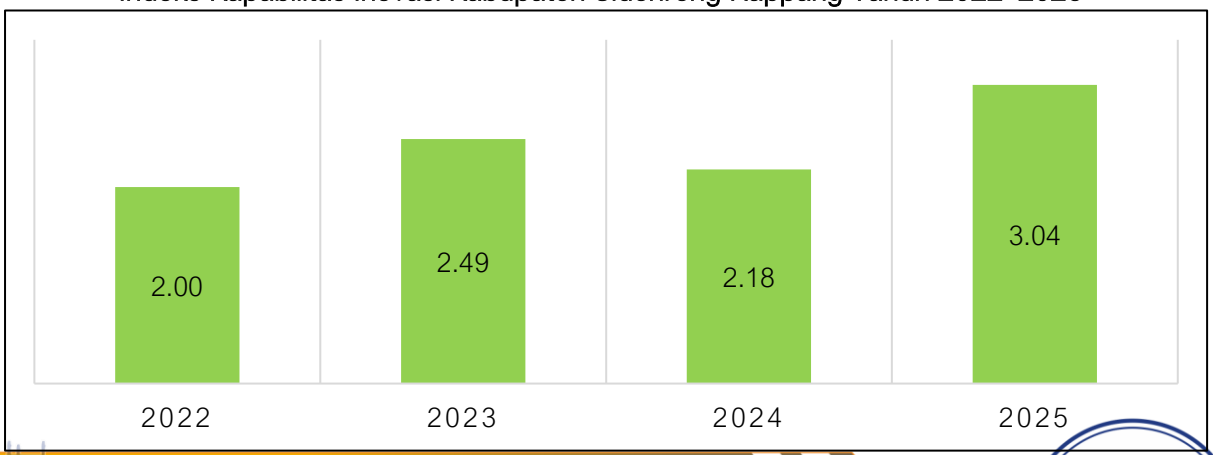


Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

13. Indeks Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas Kapabilitas inovasi mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran mengenaik kuantitas dan kualitas riset serta inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas visi, dan sudut padat yang berbeda. Selain itu, pilar ini menunjukkan sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Pada tahun 2022, Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat 2,00, kemudian naik pada tahun 2023 mencapai angka 2,49, namun kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 2,18. Pada tahun 2025, nilai indeks kapabilitas inovasi kembali meningkat mencapai angka 3,04.

Grafik 2.80
Indeks Kapabilitas Inovasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022–2025

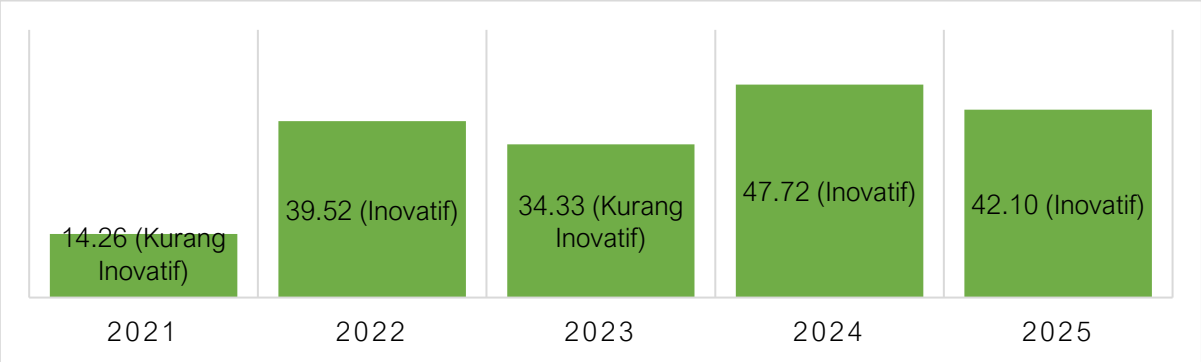


Sumber: BRIN, tahun 2026

14. Indeks Inovasi Daerah

Tingkat penguasaan IPTEK di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari dua indikator yakni indeks inovasi daerah dan proporsi belanja penelitian dan pengembangan pemerintah terhadap APBD. Inovasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Tuntutan masyarakat yang terus meningkat atas pelayanan publik menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi. Praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir ini. Nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) pada tahun 2021 tercatat sebesar 14,26 poin, meningkat di tahun selanjutnya mencapai 39,52 poin, lalu kembali turun menjadi 34,33 poin di tahun 2023. Tahun 2024, meningkat menjadi 47,72 poin. Namun pada tahun 2025, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 42,10 poin. Penurunan ini disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memenuhi 3 kategori standar pelayanan minimal. Namun meskipun mengalami penurunan, capaian tersebut tetap mempertahankan kategori inovatif. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, nilai IID Sidenreng Rappang menempati urutan ke-lima terendah. Empat daerah dengan IID 2025 tertinggi yakni Kota Palopo (74,55), Kota Parepare (66,84), Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (66,5), dan Kabupaten Bulukumba (62,1).

Grafik 2.81
Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah tahun Tahun 2026

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. Indeks Ekonomi Hijau

Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Belum tersedianya data Indeks Ekonomi Hijau di level daerah, maka proksi ukuran pembangunan

ekonomi hijau yang digunakan yakni indeks tutupan lahan dan Kualitas Udara (AQI) yang dihitung berdasarkan pengukuran partikular (PM2.5 dan PM 10), Ozon (O 3), Nitrogen Dioksida (NO2), Sulfur Dioksida (SO2) dan emisi Karbon Monoksida (CO). Secara umum, pembangunan ekonomi yang menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Sidenreng Rappang masih terjaga. Indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari angka 49,44 pada tahun 2023, menjadi 50,23 pada tahun 2024. Sementara itu, menurut laporan IQ air, kualitas udara di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 tercatat sangat baik dengan angka indeks 94,22.

Tabel 2.39
Indeks Ekonomi Hijau dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Pilar	Skor
Skor Pilar Lingkungan	93,38
Skor Pilar Ekonomi	11,14
Skor Pilar Sosial	74,21
Skor Indeks Ekonomi Hijau Sidrap	**64,87**

Sumber: Perhitungan Tim Penyusun Provinsi Sulsel, Tahun 2023

Skor rata-rata Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 64,87 dengan skor pilar lingkungan mencatatkan skor sebesar 93,38 diikuti oleh pilar sosial sebesar 74,21, dan pilar ekonomi dengan skor 11,14.

2. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Pembangunan Ekonomi Biru digunakan untuk mengelola pemanfaatan sumber daya yang menekankan prinsip keberlanjutan, namun sekaligus dapat mengevaluasi manfaat sosial yang diperoleh. IBEI dibangun dengan 3 pilar yang menjadi komponen utama pembangunan keberlanjutan, yaitu pilar lingkungan, ekonomi dan sosial. Kinerja pengembangan ekonomi biru perlu diukur dan dievaluasi secara periodik. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) merupakan indikator yang dikembangkan untuk memahami kondisi saat ini dari ekonomi biru dan perkembangannya di tingkat nasional dan regional. Skor rata-rata indeks ekonomi biru Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 55,3, dengan nilai pilar ekonomi adalah 45,8, pilar lingkungan sebesar 85,2, dan pilar sosial sebesar 45,5. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan skor yang cukup signifikan antara pilar ekonomi biru.

Tabel 2.40
Indeks Ekonomi Biru dan Pilar Pembentuknya di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

Pilar	Skor
Skor Pilar Lingkungan	85,2
Skor Pilar Ekonomi	45,8
Skor Pilar Sosial	42,5
Skor Indeks Ekonomi Biru Sidrap	**55,3**

Sumber: Perhitungan Tim Penyusun Provinsi Sulsel, Tahun 2023

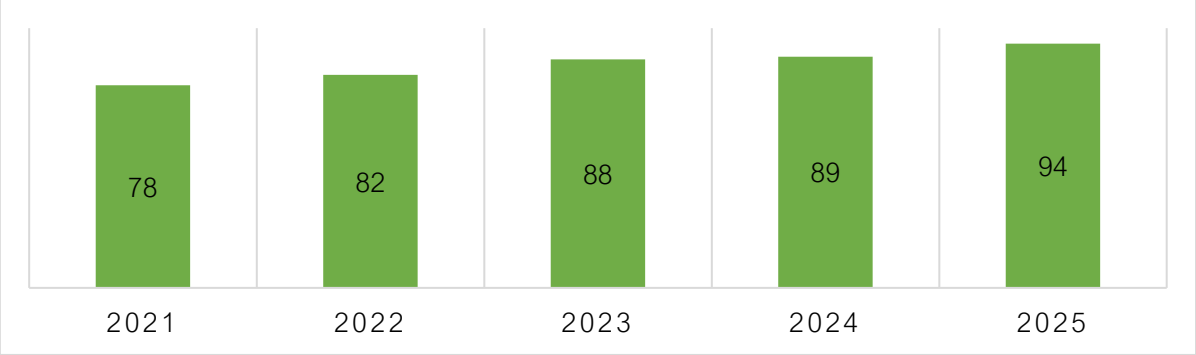
2.1.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan salah satu langkah strategis dalam menghadapi tantangan global di era teknologi. Pengarusutamaan transformasi digital tidak hanya sebatas penerapan teknologi baru tetapi juga melibatkan pengembangan sistem yang terintegrasi dan berorientasi pada efisiensi, aksesibilitas, serta inklusi.

1. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren positif dalam penyelenggaraan layanan publik secara online dan terintegrasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, terdapat 78 layanan yang sudah beralih ke platform digital, dan jumlah ini meningkat menjadi 82 layanan di tahun 2022. Tren peningkatan ini terus berlanjut dengan 88 layanan tercatat pada tahun 2023, dan mencapai 89 layanan pada tahun 2024. Tahun 2025, jumlah layanan digital publik semakin meningkat signifikan menjadi 94 layanan. Pertumbuhan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi, aksesibiltas, serta kualitas layanan kepada masyarakat.

Grafik 2.82
Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



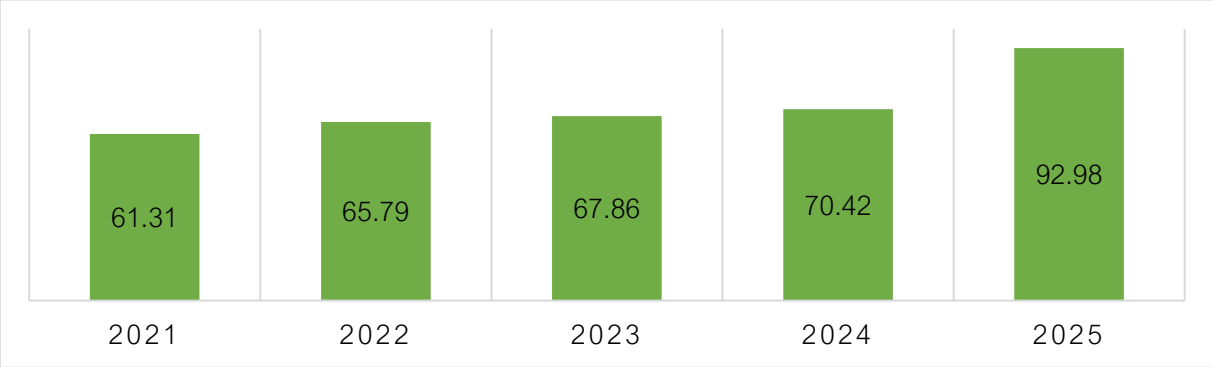
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2026

2. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Perkembangan Informasi harus dibarengi dengan sarana prasarana yang memadai terutama akses internet. Lebih jauh, internet menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat yang sekarang bergantung pada akses informasi melalui HP/Telepon. Adanya internet akan memperkuat cakupan informasi kepada setiap lapisan masyarakat.

Namun demikian, proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2021-2025 cenderung mengalami tren peningkatan, dari angka 61,31 persen di tahun 2021 meningkat signifikan menjadi 92,98 persen di tahun 2025. Masih terdapat sekitar 7,02 persen rumah tangga yang belum menikmati akses internet sehingga diperlukan upaya berkelanjutan melalui perluasan infrastruktur, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi dengan penyedia layanan guna memastikan akses internet dapat menjangkau seluruh rumah tangga secara merata.

Grafik 2.83
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025 (%)

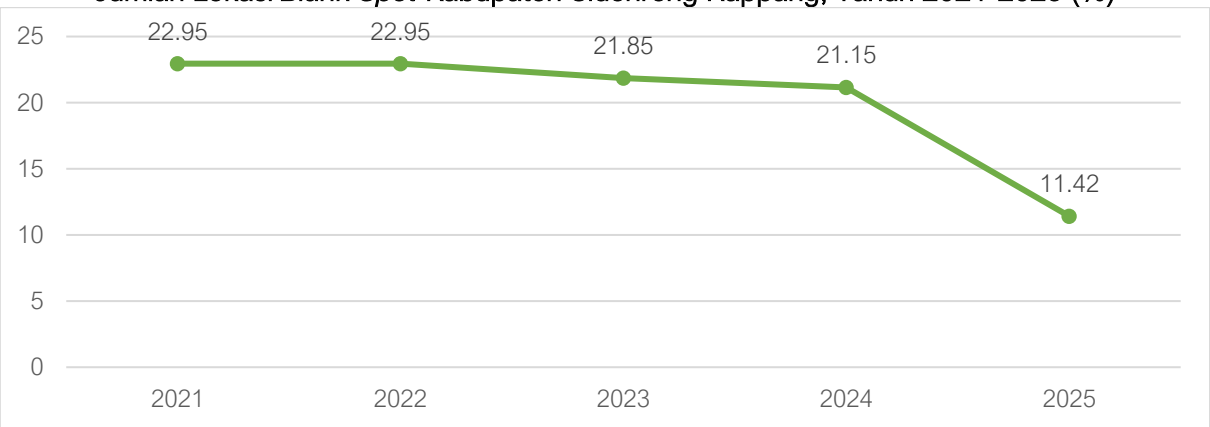


Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

3. Jumlah dan Lokasi Blank Spot

Akses jaringan telekomunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam mendukung pembangunan di era digital. Namun, tantangan blank spot, yaitu area yang tidak terjangkau oleh sinyal telekomunikasi, masih menjadi kendala di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil dan terisolasi. Keberadaan *blank spot* tidak hanya menghambat akses masyarakat terhadap informasi, tetapi juga berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi yang semakin mengandalkan teknologi digital.

Grafik 2.84
Jumlah Lokasi *Blank Spot* Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatikan Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 2026

Akses jaringan telekomunikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan perkembangan yang semakin baik dalam lima tahun terakhir, sebagaimana tercermin dari berkurangnya persentase lokasi blank spot. Pada tahun 2021, area blank spot tercatat sebesar 22,95 persen, kemudian menurun menjadi 21,85 persen pada tahun 2023. Angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 21,15 persen pada tahun 2024. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2025 dengan persentase 11,42 persen. Kondisi ini menunjukkan upaya pemerintah daerah bersama dengan operator telekomunikasi untuk meningkatkan infrastruktur jaringan, terutama di wilayah terpencil.

4. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Indeks ini mengadopsi G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy yang turut dihasilkan pemerintah Indonesia pada forum Digital Economic Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu (1) Infrastruktur dan Ekosistem; (2) Keterampilan Digital; (3) Pemberdayaan; dan (4) Pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia secara lebih komprehensif, objektif, dan terstandardisasi. Tidak ada data Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang tersedia untuk Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik Dan Global

1. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah

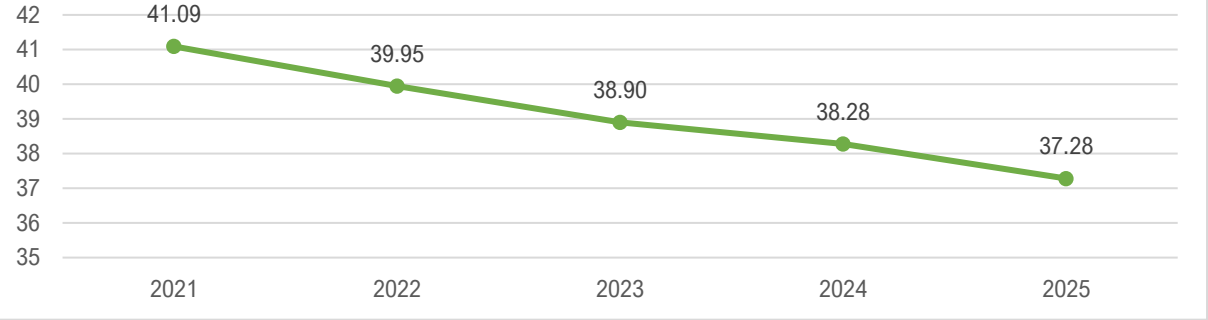
Koefisien Variasi Harga adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi. Perhitungan koefisien variasi harga dilakukan dengan langkah-langkah yaitu pertama menghitung rata-rata harga setahun per komoditas. Selanjutnya melakukan perhitungan standar deviasi untuk data komoditas. Setelah itu, menghitung koefisien variasi dengan cara membagi standar deviasi tiap komoditas terhadap rata-rata harga per komoditas. Kemudian untuk menghitung realisasi koefisien variasi per tahun didapatkan dengan cara menghitung rata-rata koefisien variasi seluruh komoditas. Data nilai persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2025 sebesar 11,72 persen.

2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; Cultivated Biological Resources (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual. Kontribusi PMTB pada PDRB tahun 2021 mencapai 41,09 persen. Lalu, mengalami

penurunan secara bertahap dari tahun ke tahun hingga menjadi 37,28 persen pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan lemahnya daya tarik investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.85
Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

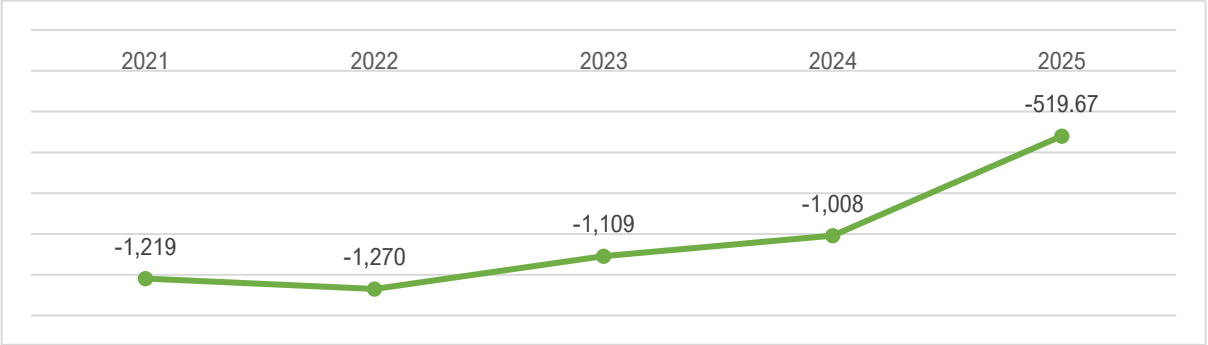


Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

3. Net Ekspor Barang dan Jasa

Data dan volume ekspor di tingkat kabupaten/kota hingga saat ini belum tersedia. Namun proksi untuk melihat sejauh mana interaksi ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan wilayah lainnya bisa dilihat pada nilai net ekspor barang dan jasa, yang merupakan salah satu komponen Produk Domestik Regionsal Bruto sisi pengeluaran. Data menunjukkan net ekspor, atau selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor, yang bernilai negatif. Ini berarti nilai ekspor Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor. Selama 5 tahun terakhir, nilai net ekspor mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat -1.219, kemudian meningkat signifikan menjadi -519,67 pada tahun 2025. Meskipun masih deficit, tren perbaikan ini mencerminkan adanya pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi daerah pascapandemi COVID-19.

Grafik 2.86
Nilai dan Volume Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Tahun 2026

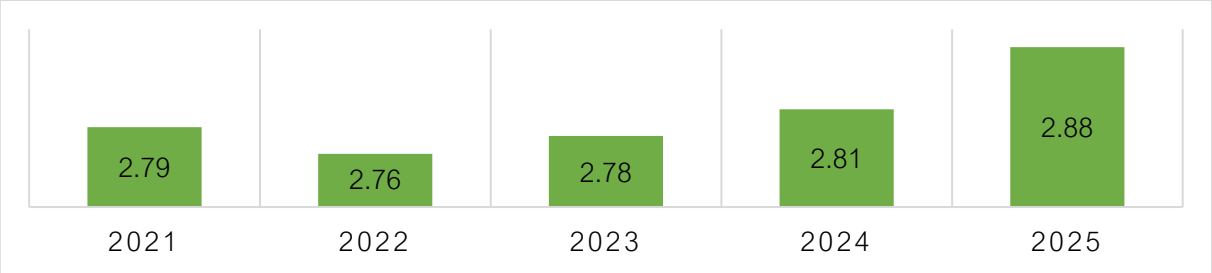
2.1.3.6. Perkotaan Dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap Provinsi

Peranan atau kontribusi Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap perekonomian Sulawesi Selatan mencatatkan angka rata-rata 2,88 persen selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, kontribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap ekonomi Sulawesi Selatan

mencatatkan angka 2,79 persen, lalu sedikit menurun menjadi 2,76 persen di tahun 2022. Di tiga tahun berturut-turut berikutnya mengalami kenaikan menjadi 2,78 persen di tahun 2023, 2,81 persen tahun 2024, dan mencapai angka 2,88 persen di tahun 2025. Dilihat secara tren, kontribusi ekonomi Sidenreng Rappang terhadap Sulawesi Selatan relatif stabil.

Grafik 2.87
Kontribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap PDRB Provinsi Tahun 2021-2025

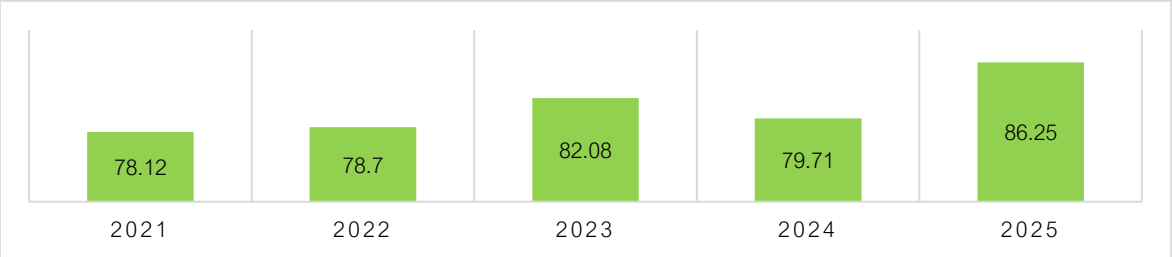


Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2026

2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Ketersediaan dan akses terhadap hunian layak merupakan salah satu bagian mendasar dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator rumah layak huni menjadi salah satu tujuan dalam SDGs menunjukkan pentingnya hal tersebut sebab terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia yang fundamental dan dipandang dapat menurunkan kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan. Rumah layak huni dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Grafik 2.88
Persentase Rumah Tangga Terhadap Rumah Layak Huni
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: BPS, diolah tahun 2026

Dalam konteks Kabupaten Sidenreng Rappang, persentase rumah tangga terhadap rumah layak huni (RLH) dan terjangkau menunjukkan tren positif dalam kurun waktu 2021-2025. Pada tahun 2021, RLH Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 78,12 persen dan terus mengalami peningkatan mencapai 86,25 persen pada tahun 2025. Angka tersebut menggambarkan terus membaiknya akses dan ketersediaan rumah layak huni bagi rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang dari waktu ke waktu.

Tabel 2.41
Capaian Akses Rumah Layak Huni Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Akses Rumah Layak Huni
1	Kepulauan Selayar	72,98
2	Bulukumba	70,34
3	Bantaeng	70,05
4	Jeneponto	58,57
5	Takalar	85,06
6	Gowa	93,67
7	Sinjai	79,87
8	Maros	76,87
9	Pangkajene dan Kepulauan	77,6
10	Barru	84,09
11	Bone	88,19
12	Soppeng	80,68
13	Wajo	85,86
14	**Sidenreng Rappang**	**86,25**
15	Pinrang	76,96
16	Enrekang	79,79
17	Luwu	80,61
18	Tana Toraja	57,76
19	Luwu Utara	84,96
20	Luwu Timur	75,54
21	Toraja Utara	56,71
22	Kota Makassar	75,29
23	Kota Parepare	78,85
24	Kota Palopo	85,06

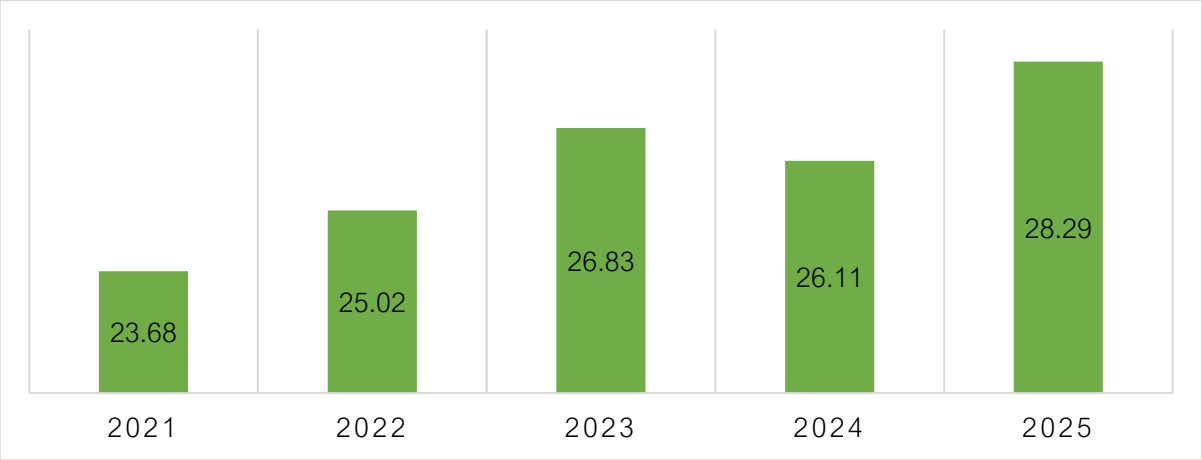
Sumber: BPS, diolah tahun 2026

Adapun capaian akses rumah layak huni menurut komponen kelayakan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 menunjukkan tren positif. Persentase rumah layak huni tercatat sebesar 79,71 persen, dengan ketahanan bangunan mencapai 83,66 persen. Dari segi kecukupan luas, capaiannya cukup tinggi yaitu 96,99 persen. Selain itu, akses terhadap air minum layak tercatat sebesar 96,78 persen, dan akses sanitasi layak berada di angka tertinggi yaitu 98,82 persen. Capaian ini berada di atas rata-rata capaian Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengeluaran per kapita untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga mencerminkan alokasi anggaran rumah tangga terhadap kebutuhan hunian yang layak serta utilitas pendukungnya. Kabupaten Sidenreng Rappang mencatat fluktuasi dalam rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran tercatat sebesar 23,68 persen dari total pengeluaran. Angka tersebut meningkat menjadi 25,02 persen pada tahun 2022, dan kembali naik hingga mencapai 26,83 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 26,11 persen, namun pada tahun 2025 kembali meningkat hingga mencapai 28,29 persen. Perubahan ini dapat

mencerminkan dinamika dalam kebutuhan dan prioritas pengeluaran rumah tangga di daerah tersebut.

Grafik 2.89
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Perumahan dan Fasilitasi Rumah Tangga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; Tahun 2026

3. Indeks Layanan Infrastruktur

Kualitas infrastruktur juga menjadi salah satu aspek yang patut dipertimbangkan dalam meningkatkan daya saing wilayah. Salah satu indikator yang umum digunakan ialah indeks infrastrukur yang merupakan indikator untuk menilai kualitas infrastruktur berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik dan telekomunikasi.

Pada tahun 2021 Indeks Layanan Infrastruktur berada pada angka 78,87 persen, mengalami sedikit kenaikan di tahun 2022 menjadi 80,27 persen. Pada tahun 2023 mencatat angka sebesar 80,57. Di tahun 2024, kembali naik mencapai angka 81,60 persen. Namun, pada tahun 2025 menurun menjadi 79,34. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan capaian pada beberapa indikator infrastruktur dasar, khususnya tingkat kemantapan jalan dan persentase rumah yang mengakses air bersih.

Data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 capaian berada pada angka 58,83 persen, kemudian menurun berturut-turut menjadi 57,91 persen pada tahun 2021, 57,50 persen pada tahun 2022, dan 56,84 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, tingkat kemantapan jalan meningkat signifikan menjadi 60,91 persen seiring upaya pemerintah daerah melalui kegiatan peningkatan jalan yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun pada tahun 2025 kembali menurun menjadi 40,78 persen akibat pelaksanaan survei kondisi jalan yang dilakukan secara lebih riil dan komprehensif sehingga menggambarkan kondisi aktual jalan di lapangan.

Tabel 2.42
Indeks Infrastruktur Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

No.	Data	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Kemantapan Jalan	%	57,91	57,50	56,84	60,91	40,78
2	Persentase Akses Sanitasi Layak	%	85,74	90,40	90,52	90,88	90,14
3	Persentase Rumah yang mengakses air bersih	%	90,43	91,56	93,49	93,98	88,85
4	Persentase Rumah Layak Huni	%	81,41	81,60	81,44	79,19	97,57
Indeks Layanan Infrastruktur		**Indeks**	**78,87**	**80,27**	**80,57**	**81,24**	**79,34**

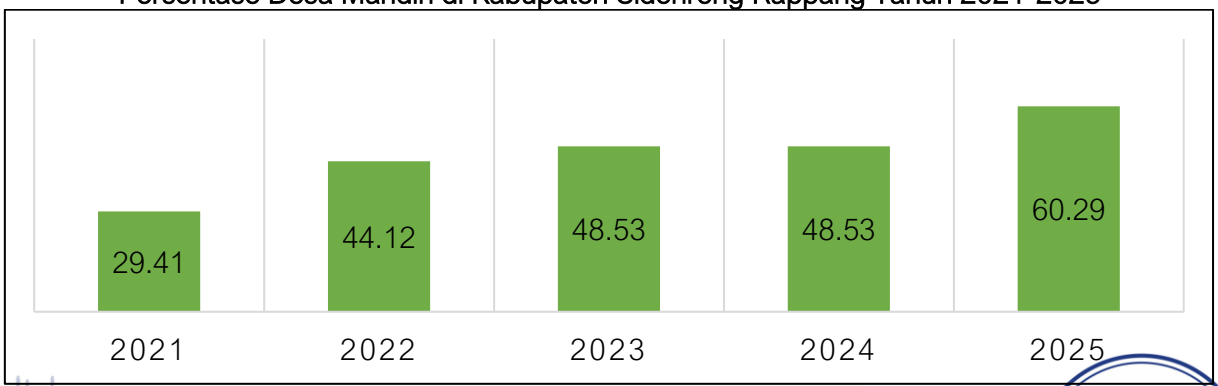
Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

4. Persentase Desa Mandiri

Undang-Undang Desa memberikan landasan bagi penguatan pemberdayaan masyarakat desa, di mana desa tidak lagi diposisikan sebagai bawahan pemerintah daerah, melainkan sebagai komunitas yang memiliki kemandirian dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Dengan demikian, masyarakat desa memiliki ruang untuk berpartisipasi dan menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang perkembangan status pembangunan desa menunjukkan tren yang semakin positif, khususnya pada peningkatan jumlah desa berstatus mandiri. Pada tahun 2021, persentase desa mandiri tercatat sebesar 29,41 persen, atau sekitar 20 desa dari total 68 desa. Angka tersebut meningkat menjadi 44,12 persen pada tahun 2022, atau sekitar 30 desa. Selanjutnya pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 48,53 persen atau sekitar 33 desa, dan relatif stabil pada tahun 2024 dengan persentase yang sama, yaitu 48,53 persen atau tetap sekitar 33 desa. Pada tahun 2025, proporsi desa mandiri meningkat cukup signifikan menjadi 60,29 persen, yang setara dengan sekitar 41 desa dari total 68 desa. Artinya ada 41 desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

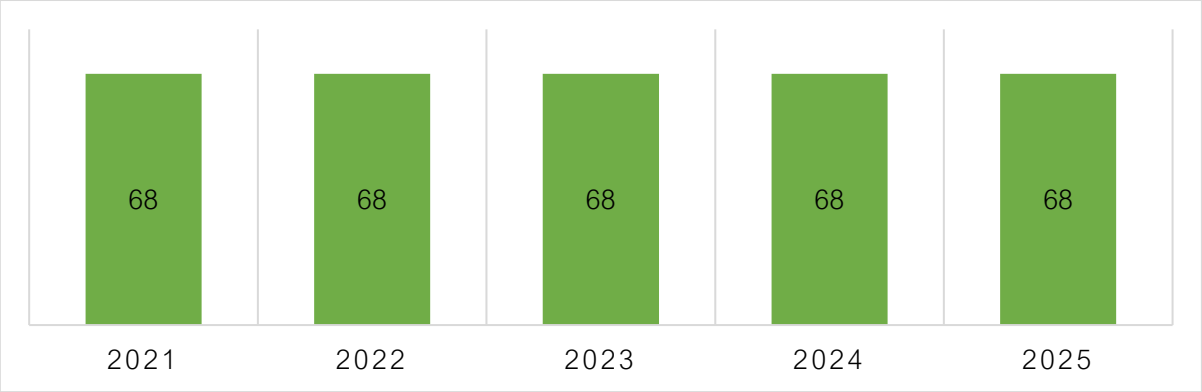
Grafik 2.90
Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

Sementara itu keberhasilan desa memperoleh predikat mandiri dapat dilihat dari seberapa aktif Bumdes yang dikelola oleh Desa dan memberdayakan masyarakat yang berada disekitarnya untuk membantu perekonomian desa tersebut. Berdasarkan capaian jumlah Desa yang memiliki BUMDES dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.91
Jumlah BumDes di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

Jumlah BUMDES ada sebanyak 68 dari 68 desa keseluruhan di Kabupaten Sidenreng Rappang, ini menunjukkan bahwa setiap desa memiliki BUMDES, walaupun demikian, Pendirian BUMDES Desa belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya secara mandiri, serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang kuat.

2.1.3.7. Persentase Penanganan Terhadap Gangguan Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat

Dalam Dalam rangka menjaga stabilitas sosial serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terus berkomitmen melakukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap berbagai potensi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor antara perangkat daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat.

Selama lima tahun terakhir, kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang relatif terkendali. Data menunjukkan jumlah kasus pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) yang dilaporkan mengalami fluktuasi, tercatat ada 4 kasus pada tahun 2021, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 21 kasus, lalu menurun drastis menjadi hanya 3 kasus di tahun 2024, namun kembali meningkat menjadi 1 kasus pada tahun 2025.

Sementara itu, jumlah konflik sosial yang terjadi tercatat nihil atau tidak terdapat konflik sosial dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tidak ada konflik sosial yang dilaporkan terjadi sejak tahun 2021 hingga tahun 2025. Jumlah kasus pelanggaran perda dan perkada yang tertangani/diselesaikan menunjukkan angka yang sama dengan jumlah kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Demikian pula dengan jumlah gangguan ketertiban dan ketentraman yang tertangani seluruhnya dapat diselesaikan sesuai jumlah kasus yang terjadi.

Secara keseluruhan, seluruh gangguan yang terjadi berhasil ditangani dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dinamika tahunan, pemerintah daerah tetap mampu menjaga suasana yang kondusif melalui penegakan hukum dan mediasi sosial yang efektif.

Tabel 2.43
Presentase Penanganan Terhadap Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 - 2025

No	Uraian	TAHUN					OPD
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda Dan Perkada/ Pelanggaran Keteriban Dan Ketentraman Yang Dilaporkan	4	6	21	3	10	Satpol PP
2	Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi	0	0	0	0	0	Kesbangpol
3	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda Dan Perkada/ Pelanggaran Ketertiban Dan Ketentraman Yang Tertangani/ Diselesaikan	4	6	21	3	10	Satpol PP
4	Jumlah Konflik Sosial Yang Tertangani/Terselesaikan	0	0	0	0	0	Kesbangpol
5	Jumlah Gangguan Ketertiban Dan Ketentraman	4	6	21	3	10	Kesbangpol
6	Jumlah Gangguan Ketertiban Dan Ketentraman Yang Tertangani	4	6	21	3	10	Satpol PP
Persentase penanganan gangguan ketertiban dan ketentraman (%)		100	100	100	100	100	

Sumber: Data diolah, 2026

2.1.3.8. Persentase Masyarakat Yang Terlibat Dalam Kegiatan Keagamaan

Partisipasi Partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren yang positif sebagai cerminan kehidupan sosial yang harmonis dan religius. Kegiatan keagamaan tidak hanya dilaksanakan di rumah ibadah masing-masing, tetapi juga dalam bentuk pengajian, peringatan hari besar keagamaan, majelis taklim, kegiatan sosial-keagamaan, dan pendidikan keagamaan nonformal.

Pemerintah daerah, bekerja sama dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan, terus mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat melalui fasilitasi kegiatan keagamaan di tingkat desa dan kelurahan, penyediaan sarana prasarana ibadah, serta dukungan terhadap kegiatan lintas agama yang bersifat inklusif.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan menunjukkan tren peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, persentase masyarakat yang terlibat dalam kegiatan keagamaan tercatat sebesar 18,43 persen, kemudian meningkat menjadi 18,71 persen pada tahun 2024, dan kembali meningkat signifikan menjadi 24,89 persen pada tahun 2025. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas keagamaan.

Tabel 2.44
Persentase Masyarakat yang Terlibat Dalam Kegiatan Keagamaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 - 2025

Persentase masyarakat yang terlibat dalam kegiatan keagamaan	2023	2024	2025
	18.43	18.71	24.89

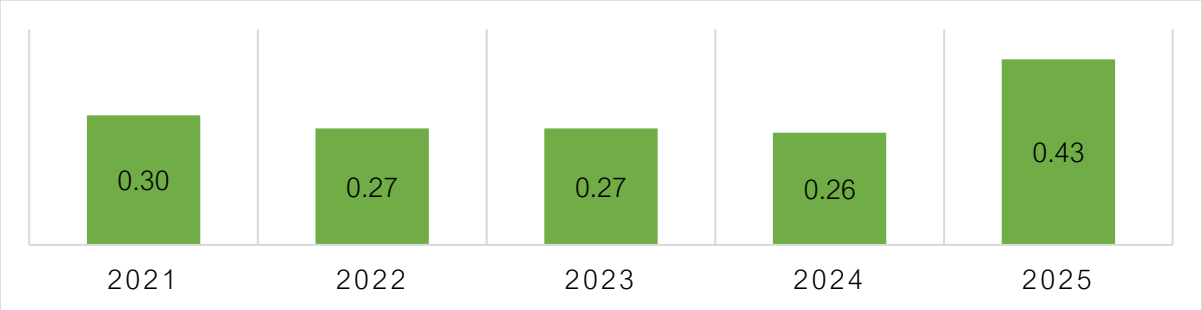
Sumber: Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

2.1.3.9. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Salah satu pilar dalam UU HKPD (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) adalah meningkatkan *local taxing ratio*, agar daerah tidak benar tergantung dari dana transfer pusat. Perubahan kebijakan UU HKPD diarahkan untuk mendukung peningkatan rasio pajak dan pendapatan daerah melalui *administrative* dan *compliance cost* yang lebih rendah. Target rasio pajak daerah terhadap PDRB yang diharapkan sekitar 3 persen dari PDRB. Selama lima tahun terakhir, rata-rata *local taxing ratio* Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 0,31 persen, masih jauh dari target yang diharapkan. Pencapaian tertinggi untuk rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang yakni pada tahun 2025 yaitu 0,43 dan terendah 0,26 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak.

Grafik 2.92
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

2. Tingkat Inflasi

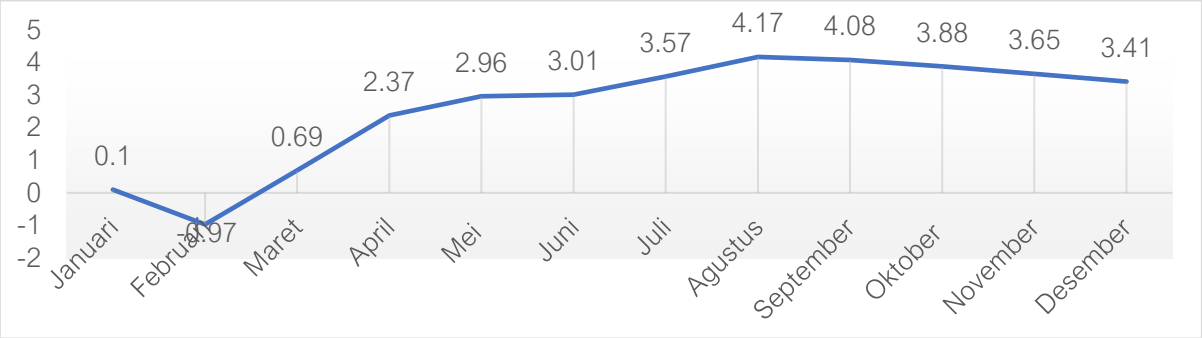
Lambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tiga tahun terakhir perlu dianalisis lebih jauh untuk menemukan penyebab. Pada bagian sebelumnya telah dibahas, bahwa ada dua penyebab umum pertumbuhan konsumsi melambat, yaitu penurunan daya beli akibat inflasi yang menggerus nilai riil pendapatan dan menurunnya pendapatan rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi. Penurunan daya beli merupakan sebuah kondisi dimana pendapatan rumah tangga tidak menurun, tapi permintaan rendah akibat dari kenaikan harga barang dan jasa. Rumah tangga yang berpendapatan Rp. 5 juta per bulan terlihat tinggi secara nominal, namun setelah dikoreksi dengan inflasi, angka tersebut bisa jadi sangat rendah. Oleh karena itu, inflasi perlu dikendalikan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Inflasi di Kabupaten Sidereng Rappang saat ini sudah menggunakan hasil pengukuran inflasi

sendiri dimana sebelumnya masih merujuk pada data inflasi Kota Parepare. Selama satu tahun terakhir yakni di tahun 2025. Nilai Inflasi tahunan Year on Year Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami berbagai dinamika atau fluktuasi.

Pada tahun 2025, rata-rata kenaikan harga barang dan jasa mencapai 2,5 persen. Pada Januari angka inflasi 0,1 persen dan terus mengalami kenaikan dimana puncaknya terjadi di bulan Agustus yakni berada di angka 4,17 persen. Angka inflasi terus mengalami penurunan hingga di akhir tahun Desember sudah mencapi 3,41 persen. Respon cepat pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah dan intervensi program pengendalian inflasi dari kemendagri melalui pertemuan *zoom meeting* inflasi setiap minggunya semakin efektif dalam mengendalikan kenaikan harga barang serta menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Grafik 2.93
Laju Inflasi Tahunan (Y-On-Y) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025



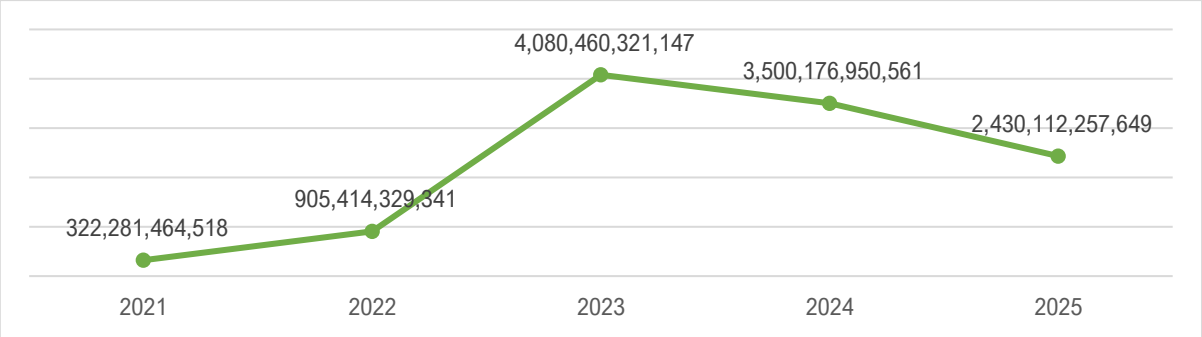
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah Tahun 2026

3. Pertumbuhan Investasi Daerah

Investasi merupakan variabel penentu pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Semua literatur dan penelitian tentang investasi dan pertumbuhan menyimpulkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Berbeda dengan konsumsi, investasi bekerja seperti bahan bakar, dimana kendaraan hanya bisa dijalankan jika bahan bakarnya cukup. Jika investasi sebuah negara/daerah rendah, maka pastinya melambat, begitupun sebaliknya. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2025, realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan perkembangan fluktuatif. Pada tahun 2021, total investasi tercatat sebesar Rp322,28 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp905,41 miliar pada tahun 2022. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan nilai investasi mencapai Rp4,08 triliun yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, pada tahun 2024 nilai investasi menurun menjadi Rp3,50 triliun dan kembali turun pada tahun 2025 menjadi Rp2,43 triliun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pengembangan investasi berskala besar, khususnya dari sektor energi seperti PT UPC Sidrap Bayu Energi yang sebelumnya memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.94
Pertumbuhan Investasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025

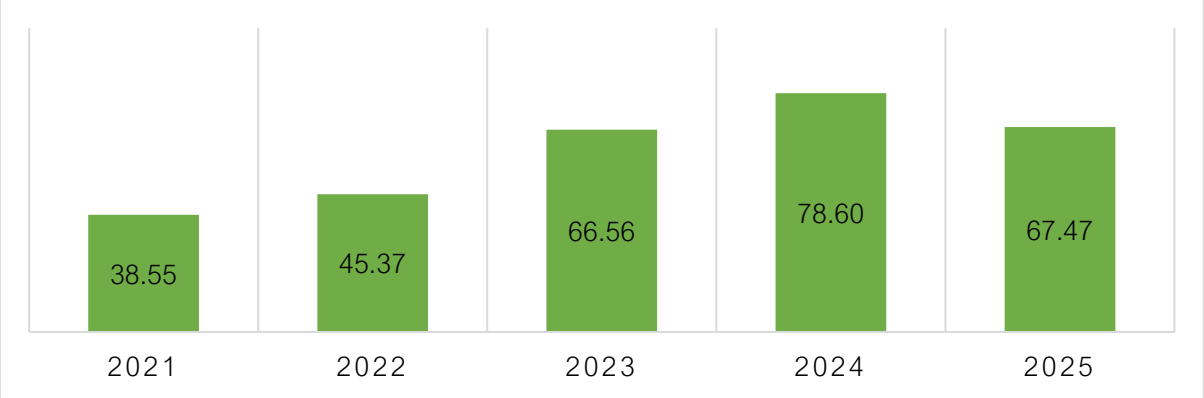


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LPKD satu tahun sebelum tahun berjalan. Di tahun 2021-2024 IPKD Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukan tren peningkatan yakni 38,55 persen di tahun 2021 dan naik menjadi 78,60 persen pada tahun di tahun 2024. Namun pada tahun 2025, mengalami penurunan di angka 67,47 persen. Adapun faktor penyebab penurunan skor IPKD adalah adanya perubahan metodologi dan standarisasi penilaian IPKD di setiap dimensi.

Grafik 2.95
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021–2025



Sumber: Kemendagri, diolah Tahun 2026

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegrasi Dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum merupakan perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/

Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Data indeks reformasi hukum Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari 55,43 di tahun 2023 menjadi 77,06 di tahun 2024. Peningkatan yang signifikan terjadi di variabel Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu.

Tabel 2.45
Indeks Reformasi Hukum dan variabel pengukuran 2023-2024

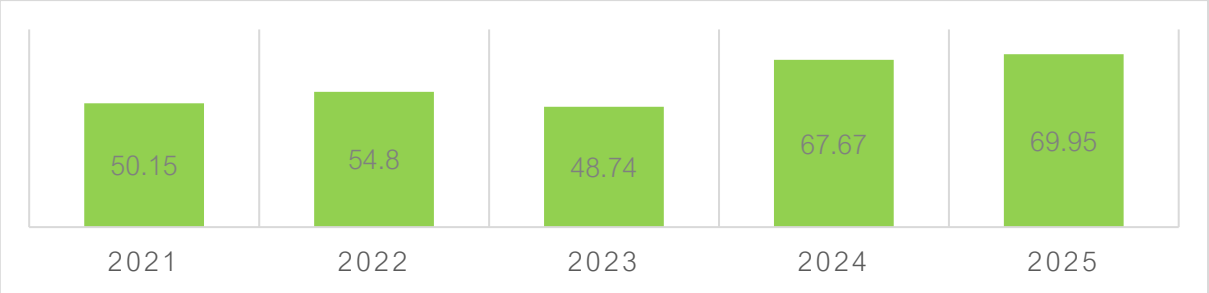
No	Variabel pengukuran	2023		2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/ memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	12,7	25	25
2	Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang undangan (legal drafter) pusat yang berkualita	25	16	25	23,1
3	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu	35	4,7	30	20,3
4	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	15	3,75	20	0
	Nilai Awal	100	37,15	100	68,4
	Nilai Apresiasi		18,28		9,28
	indeks reformasi hukum		**55,43**		**77,68**

Sumber: Data diolah, 2025

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Paradigma birokrasi yang dulunya berbasis aturan, saat ini harus mengarah pada masa depan, yaitu berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat. Secara umum, capaian IRB Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2025 capaian IRB meningkat 2,28 poin dari tahun sebelumnya menjadi 69,95. Peningkatan ini mengindikasikan upaya perangkat daerah melakukan optimalisasi dalam melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut, terutama dalam beberapa indikator seperti Survei Penilaian Integritas (SPI), kualitas pelayanan publik, kualitas pengelolaan arsip, profesionalitas ASN, dan kepatuhan terhadap standar pelayan publik.

Grafik 2.96
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Kemenpan-RB, diolah Tahun 2026

3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tabel 2.46
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2025

No.	Komponen	2024	2025
1.	Domain Kebijakan SPBE	5,00	5,00
	a. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	5,00	5,00
2.	Domain Tata Kelola	2,00	2,00
	a. Perencanaan Strategis SPBE b. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) c. Penyelenggaraan SPBE	2,25 2,00 1,50	2,25 2,00 1,50
3.	Domain Manajemen SPBE	1,27	1,27
	a. Penerapan Manajemen SPBE	1,38	1,38
	b. Audit TIK	1,00	1,00
4.	Domain Layanan SPBE	3,68	3,68
	a. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik b. Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80 3,50	3,80 3,50
Nilai SPBE		3,04 (Baik)	3,04 (Baik)

Sumber: Kemenpan RB, diolah Tahun 2026

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

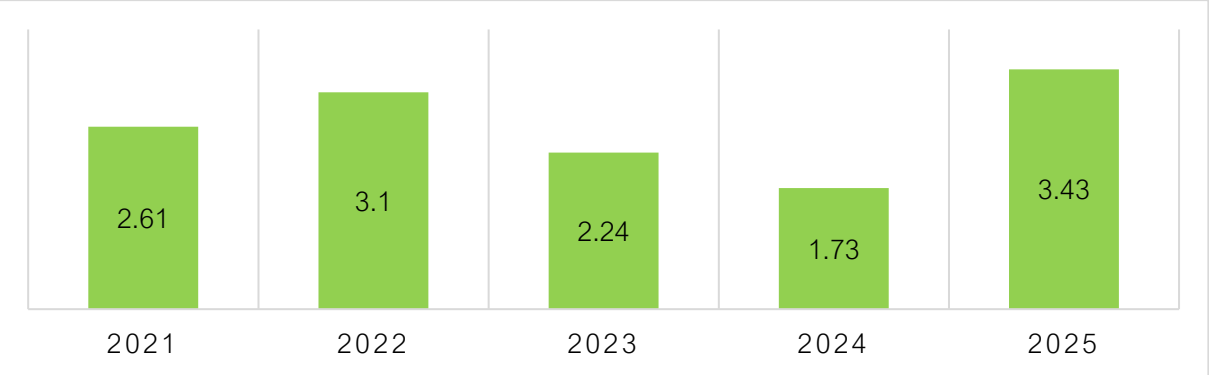
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 tercatat sebesar 3,04 dengan predikat “Baik”. Pada tahun 2025 tidak dilakukan pengukuran SPBE, sehingga nilai tahun 2024 sebesar 3,04 masih digunakan sebagai nilai yang berlaku/referensi capaian tahun 2025 karena

dianggap masih relevan. Dengan demikian, predikat "Baik" tidak diposisikan sebagai target baru pada tahun 2025, melainkan sebagai status capaian yang masih dipertahankan. Ke depan, peningkatan kinerja SPBE tetap perlu diarahkan pada penguatan tata kelola, kolaborasi dengan *stakeholder* di luar pemerintah daerah, serta peningkatan kualitas layanan publik dan layanan internal berbasis elektronik.

4. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Setelah sempat mengalami tren penurunan pada tahun 2023 dan 2024, kinerja pelayanan publik kembali menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2025 dengan kategori B- (baik dengan catatan). Meskipun capaian ini menandakan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik dibandingkan tahun sebelumnya, berbagai aspek pelayanan masih perlu terus diperkuat dan ditingkatkan secara berkelanjutan guna mencapai standar pelayanan yang lebih optimal.

Grafik 2.97
Indeks Pelayanan Publik Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Data diolah Tim RKPD 2027, 2026

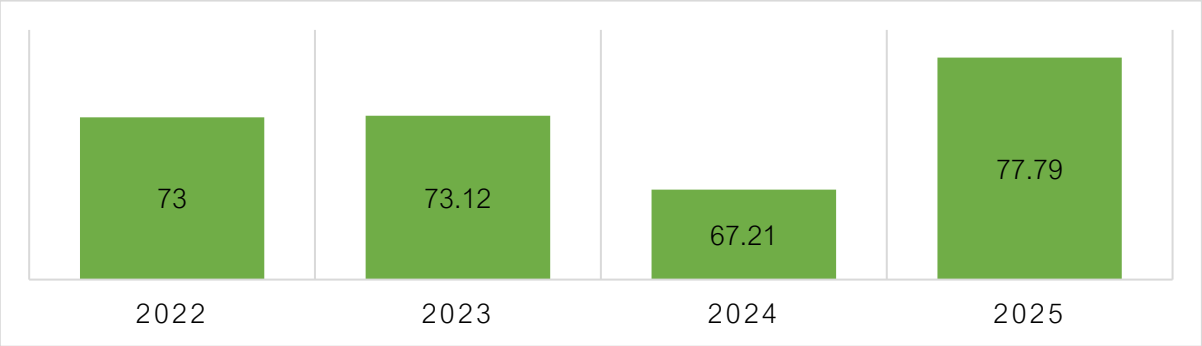
5. Indeks Survei Penilaian Integritas

Indeks Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat integritas instansi pemerintah melalui survei terhadap masyarakat, pengguna layanan, dan aparatur sipil negara. Indeks ini bertujuan untuk memetakan risiko korupsi sekaligus mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Nilai SPI Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2022–2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2022, nilai SPI tercatat sebesar 73, kemudian meningkat menjadi 73,12 pada tahun 2023. Selanjutnya, nilai tersebut mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 67,21 pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 77,79. Peningkatan capaian pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan persepsi integritas dan penguatan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, penguatan tata kelola pemerintahan, transparansi pelayanan publik, pengelolaan anggaran, serta

manajemen sumber daya manusia masih perlu terus ditingkatkan guna mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Grafik 2.98
Indeks Survei Penilaian Integritas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2025



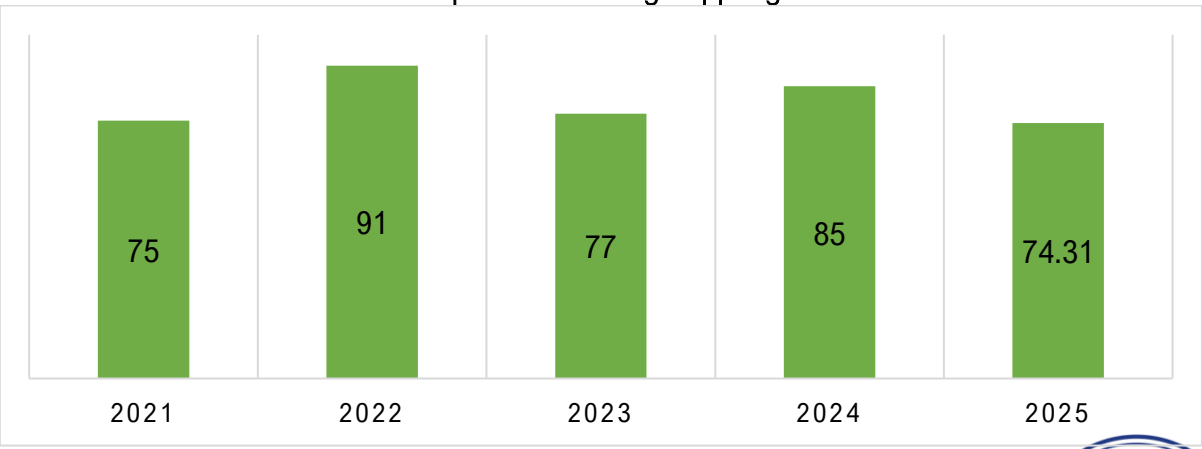
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tahun 2026

6. Indeks Persepsi Anti Korupsi (MCP KPK)

Komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan regulasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2021, nilai MCP tercatat sebesar 75, kemudian meningkat signifikan menjadi 91 pada tahun 2022. Selanjutnya, capaian tersebut menurun menjadi 77 pada tahun 2023, kembali meningkat menjadi 85 pada tahun 2024, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 74,31. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan guna mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Grafik 2.99
Nilai MCP KPK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



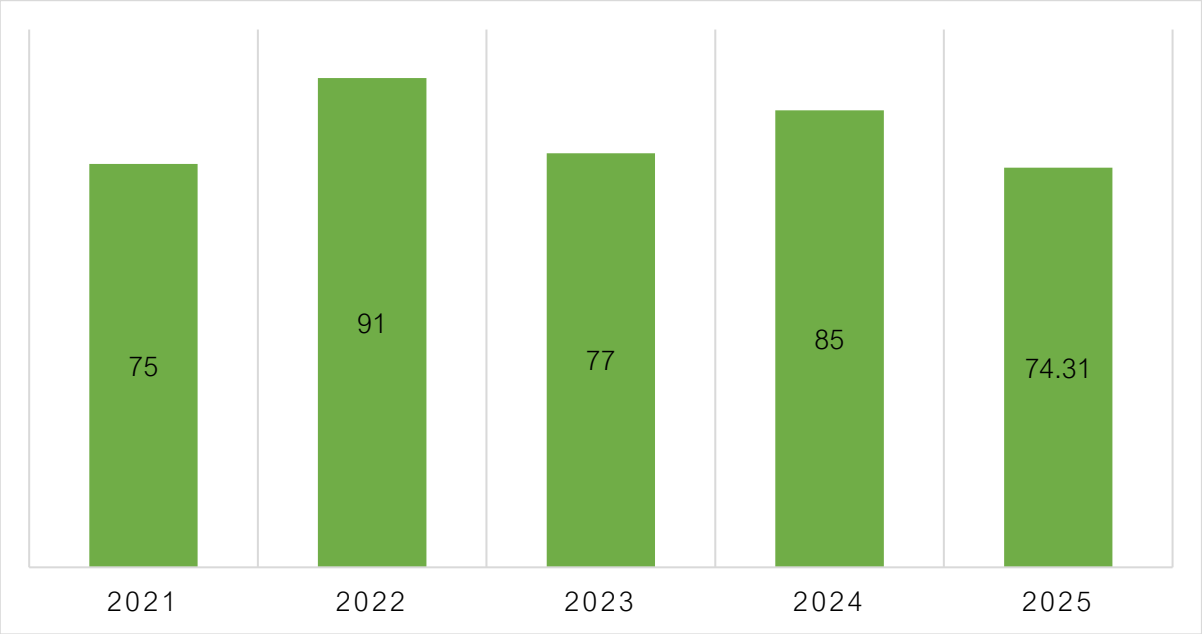
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tahun 2026

7. Indeks Persepsi Anti Korupsi (MCP KPK)

Komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan regulasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2021, nilai MCP tercatat sebesar 75, kemudian meningkat signifikan menjadi 91 pada tahun 2022. Selanjutnya, capaian tersebut menurun menjadi 77 pada tahun 2023, kembali meningkat menjadi 85 pada tahun 2024, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 74,31. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan secara konsisten dan berkelanjutan guna mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Grafik 2.100
Nilai MCP KPK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

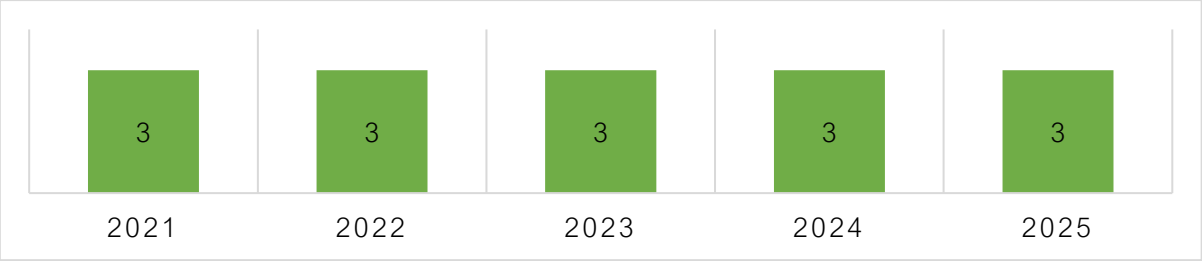


Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tahun 2026

8. Indeks Maturitas SPIP

Indeks maturitas Kabupaten Sidenreng Rappang menujukkan stabilitas yang cukup baik dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 sampai tahun 2025, berada di angka 3. Hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berkomitmen dalam menerapkan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku (NKK) guna mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, dan berkinerja tinggi. Harapannya akan semakin meningkatkan kualitas layanan publik, yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Grafik 2.101
Indeks Maturitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2026

9. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur, memantau, dan mempertanggungjawabkan capaian kinerja instansi pemerintah secara akuntabel dan terukur. Implementasi SAKIP menjadi penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, nilai SAKIP Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 65,82 dengan predikat "B". Predikat tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah telah berjalan dengan baik, khususnya pada unit kerja utama. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada beberapa unit kerja lainnya serta peningkatan komitmen dalam penerapan manajemen kinerja agar implementasi SAKIP dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Tabel 2.47
Nilai SAKIP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2025

Kabupaten/Kota/Provinsi	SAKIP	
	2024	2025
Sidenreng Rappang	65,08 (B)	65,82 (B)

Sumber: Kementerian PANRB, diolah Tahun 2026

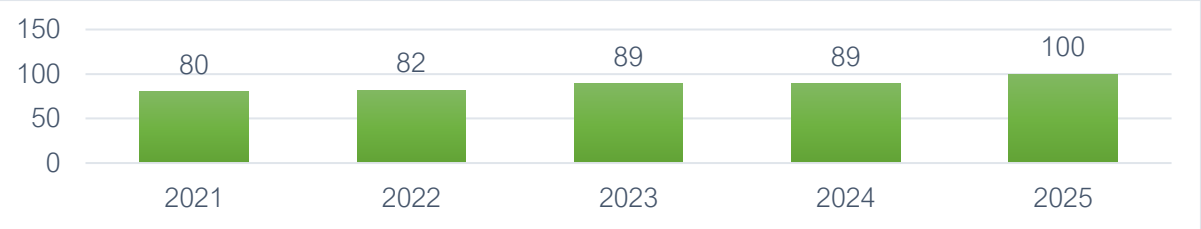
2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh, Dan Demokrasi Substansial

1. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan salah satu upaya dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menjamin kepastian hukum di daerah. Pelaksanaan penegakan regulasi yang optimal juga menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas sosial, aktivitas perekonomian, dan iklim investasi daerah. Persentase penegakan Perda di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2021, persentase penegakan Perda tercatat sebesar 80 persen, kemudian meningkat menjadi 82 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, capaian tersebut kembali meningkat menjadi 89 persen pada tahun 2023 dan tetap berada pada angka yang sama pada tahun 2024, hingga mencapai 100 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan semakin optimalnya upaya penegakan regulasi daerah dalam mendukung

terciptanya kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan kondusif, serta memperkuat stabilitas ekonomi dan daya saing iklim investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.102
Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

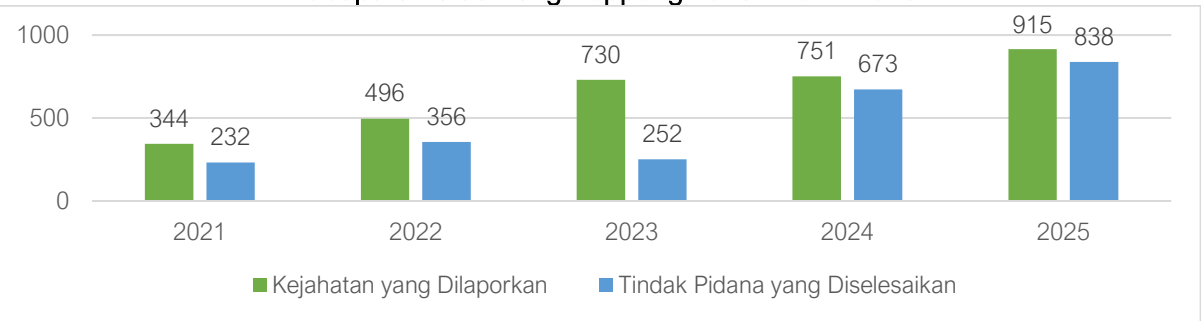


Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

2. Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani

Keamanan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung stabilitas sosial dan iklim investasi. Kondisi keamanan yang kondusif akan mendorong keberlanjutan aktivitas perekonomian serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha. Berdasarkan data Polres Kabupaten Sidenreng Rappang, jumlah kejahatan yang dilaporkan selama periode 2021-2025 menunjukkan tren meningkat, dari 344 kasus pada tahun 2021 menjadi 496 kasus pada tahun 2022, kemudian meningkat signifikan menjadi 730 kasus pada tahun 2023, 751 kasus pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 915 kasus pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, jumlah tindak pidana yang berhasil diselesaikan juga menunjukkan peningkatan, yaitu dari 232 kasus pada tahun 2021 menjadi 356 kasus pada tahun 2022, kemudian 252 kasus pada tahun 2023, meningkat tajam menjadi 673 kasus pada tahun 2024, dan mencapai 838 kasus pada tahun 2025. peningkatan penyelesaian perkara ini menunjukkan adanya penguatan kinerja penegakan hukum, meskipun kenaikan jumlah kejahatan yang dilaporkan tetap menjadi perhatian dalam upaya menjaga stabilitas keamanan daerah.

Grafik 2.103
Persentase Tindak Pidana yang Diselesaikan dan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

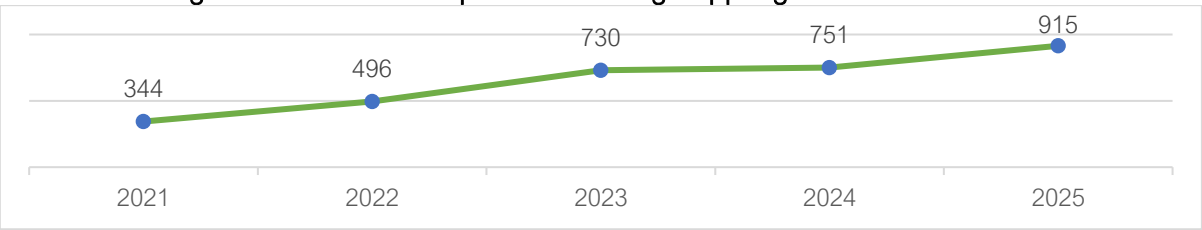


Sumber: Polres Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

Angka kriminalitas merupakan indikator yang menggambarkan jumlah kejadian tindak pidana pada waktu dan wilayah tertentu, termasuk berbagai bentuk perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun psikologis serta bertentangan dengan

normal sosial dan agaman. Perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021-2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 344 kasus, kemudian meningkat menjadi 496 kasus pada tahun 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023 sebesar 730 kasus dan 751 kasus pada tahun 2024, hingga mencapai 915 kasus pada tahun 2025. Pada tahun 2025, kasus kriminalitas didominasi oleh tindak pidana pencurian, penyalahgunaan narkoba, hingga penipuan dan penggelapan. Tingginya angka kriminalitas tersebut menunjukkan bahwa permasalahan keamanan dan penegakan hukum di Kabupaten Sidenreng Rappang masih memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih komprehensif serta berkelanjutan.

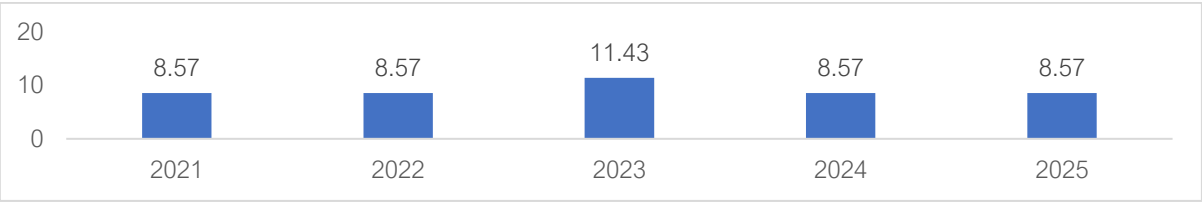
Grafik 2.104
Angka Kriminalitas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: POLRES Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

3. Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD

Grafik 2.105
Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: BPS, diolah Tahun 2026

Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Kehadiran perempuan di parlemen diharapkan dapat memperkuat penyusunan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan lainnya. Meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah diterapkan, proporsi perempuan dalam lembaga legislatif di Indonesia secara umum masih belum mencapai target kuota sebesar 30 persen.

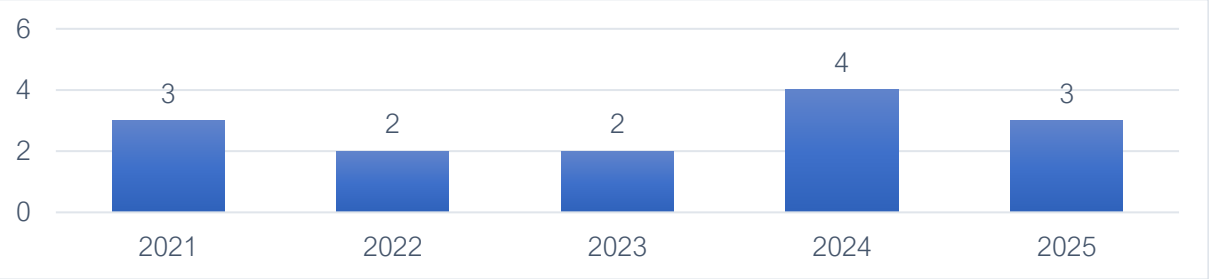
Kondisi serupa juga terlihat pada DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD selama periode 2021–2025 masih tergolong rendah dan cenderung stagnan. Pada tahun 2021, 2022, 2024, dan 2025, persentase keterwakilan perempuan tercatat sebesar 8,57 persen, sedangkan pada tahun 2023 sempat meningkat menjadi 11,43 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di tingkat daerah masih perlu terus diperkuat. Padahal,

keterwakilan perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif serta memastikan aspirasi dan kepentingan perempuan dapat terakomodasi secara lebih optimal dalam proses pembangunan daerah.

4. Perda yang Merupakan Inisatif DPRD

Jumlah Jumlah Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021-2025 menunjukkan dinamika capaian yang berfluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak tiga Perda inisiatif DPRD, kemudian menurun menjadi dua Perda pada tahun 2022 dan tetap berada pada angka yang sama pada tahun 2023. Selanjutnya, jumlah Perda inisiatif meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi empat Perda, sebelum kembali menurun pada tahun 2025 menjadi tiga Perda. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi melalui pembentukan Perda inisiatif masih perlu terus diperkuat. Padahal, Perda yang berasal dari inisiatif DPRD memiliki keunggulan, terutama dari aspek kedekatan dengan konstituen sehingga lebih mampu menampung dan mengakomodasi aspirasi masyarakat ke dalam alternatif kebijakan daerah.

Grafik 2.106
Perda Yang Merupakan Inisiatif DPRD di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



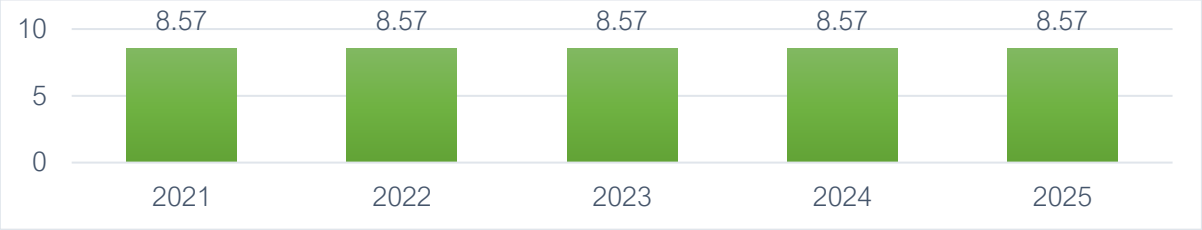
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2026

5. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik merupakan salah satu aspek penting dalam mendorong partisipasi politik yang inklusif dan berkeadilan gender. Kehadiran perempuan dalam struktur partai politik diharapkan dapat memperkuat peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta meningkatkan representasi kepentingan perempuan dalam kebijakan publik dan pembangunan daerah.

Persentase perempuan pengurus partai politik di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021–2025 tercatat sebesar 8,57 persen dan menunjukkan kondisi yang relatif stagnan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik masih tergolong rendah dan perlu terus ditingkatkan. Padahal, partisipasi perempuan dalam politik memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi, mendorong kesetaraan gender, serta menciptakan proses pengambilan kebijakan yang lebih representatif dan inklusif.

Grafik 2.107
Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2026

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Jumlah Kerjasama Provinsi/Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara

Hubungan kerjasama yang terjalin antara Kabupaten Sidenreng Rappang dengan daerah lain dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi maupun pembangunan di bidang-bidang lainnya. Oleh karenanya, hubungan kerjasama harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, konstruksi biaya masing-masing pihak, maupun mengenai lamanya waktu yang diperlukan untuk program kegiatan yang dikerjasamakan. Pada tahun 2024, jumlah kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Kabupaten/Kota Kembar/Bersaudara lainnya tercatat sebanyak 8 (delapan) kerja sama.

2. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas dan daya saing suatu daerah pada level provinsi maupun kabupaten/kota. IDSD dibangun atas empat komponen utama, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam 12 pilar daya saing, meliputi: (1) institusi, (2) insfrastruktur, (3) adopsi teknologi informasi dan komunikasi, (4) stabilitas ekonomi makro, (5) kesehatan, (6) keterampilan, (7) pasar produk, (8) pasar tenaga kerja, (9) sistem keuangan, (10) ukuran pasar, (11) dinamisme bisnis, dan (12) kapabilitas inovasi. Pada tahun 2024, skor IDSD Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 3,29, kemudian meningkat pada tahun 2025 menjadi 3,52. Peningkatan sebesar 0,23 poin tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja daya saing daerah secara agregat. Meskipun demikian, capaian tahun 2025 masih berada di bawah skor Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,71, namun sedikit lebih tinggi dibandingkan skor nasional sebesar 3,50. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya saing Kabupaten Sidenreng Rappang mulai menunjukkan perbaikan relatif pada tingkat nasional, tetapi masih perlu penguatan agar mampu lebih kompetitif di tingkat provinsi.

Peningkatan pada tahun 2025 didukung oleh membaiknya beberapa pilar, yaitu institusi, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, sistem keuangan, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi. Namun demikian, terdapat pilar yang

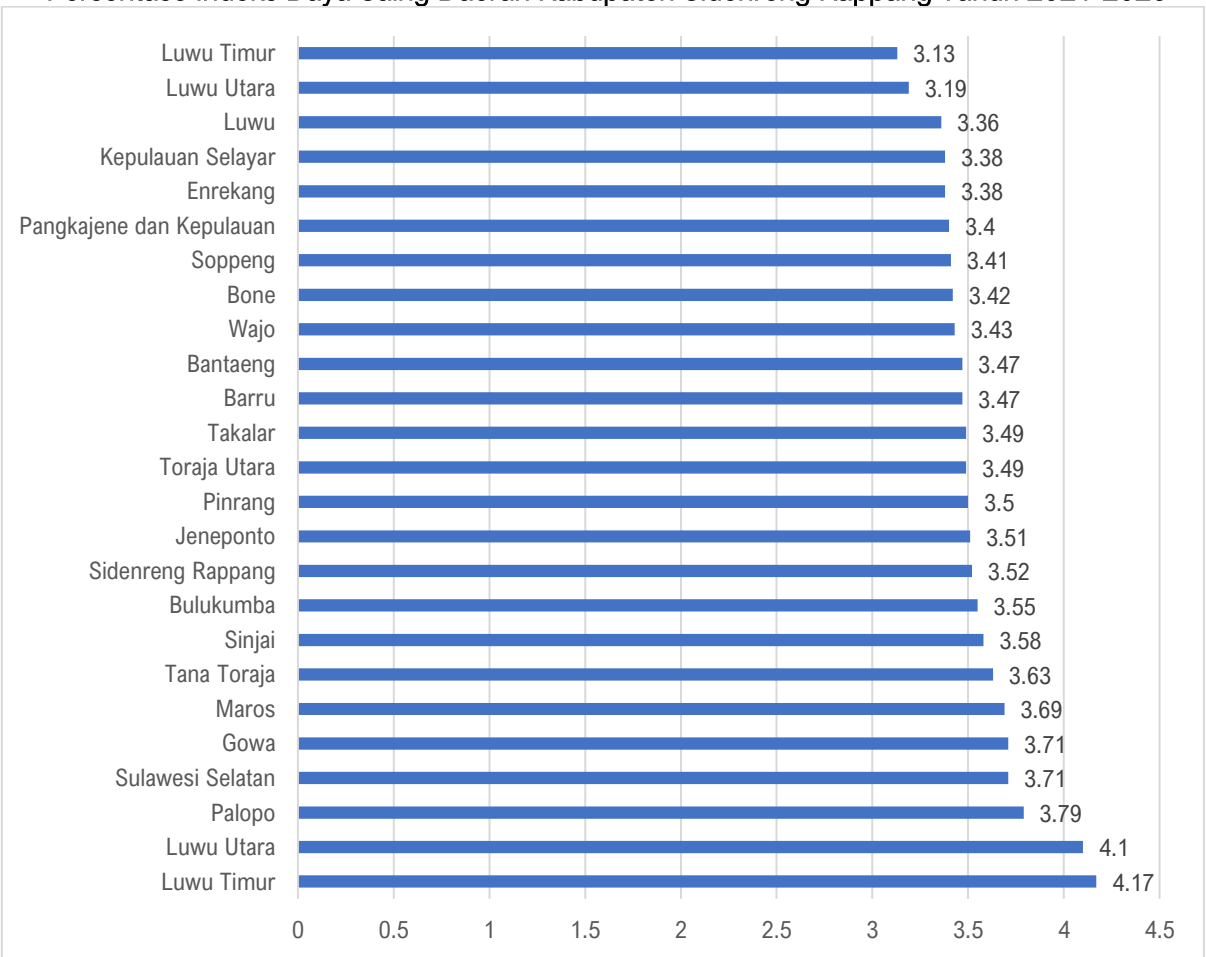
mengalami penurunan, yakni pilar 2 (infrastruktur), pilar 7 (pasar produk), dan pilar 8 (pasar tenaga kerja), sementara pilar pasar produk relatif stagnan. Untuk pilar infrastruktur terjadi penurunan karena belum adanya beberapa layanan infrastruktur transportasi non-darat. Untuk pilar pasar produk, tingkat persaingan domestik masih relatif rendah, khususnya pada sektor jasa. Untuk pilar pasar tenaga kerja, minimnya kebijakan terkait pasar tenaga kerja.

Tabel 2.48
Nilai Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wilayah Lainnya
Tahun 2025

Wilayah	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Sidenreng Rappang	4,43	3,16	4,40	4,10	3,84	4,50	2,60	2,83	2,28	4,10	2,96	3,04	**3,52**
Provinsi Sulawesi Selatan	4,40	3,85	3,87	4,24	3,87	3,90	2,54	2,59	3,02	4,73	3,29	4,24	**3,71**
Nasional	4,30	3,37	3,68	4,02	3,79	3,67	2,55	2,96	2,90	4,38	2,79	3,54	**3,50**

Sumber: BRIN, Tahun 2026

Grafik 2.108
Persentase Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Data diolah Tim RKPD 2027, 2026

Capaian IDSD Sidenreng Rappang berada di peringkat 9 tertinggi dari 24 kabupaten/kota Sulawesi Selatan, meningkat signifikan dari tahun yang sebelumnya yang berada di peringkat 5 terendah di tahun 2024.

2.1.5. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

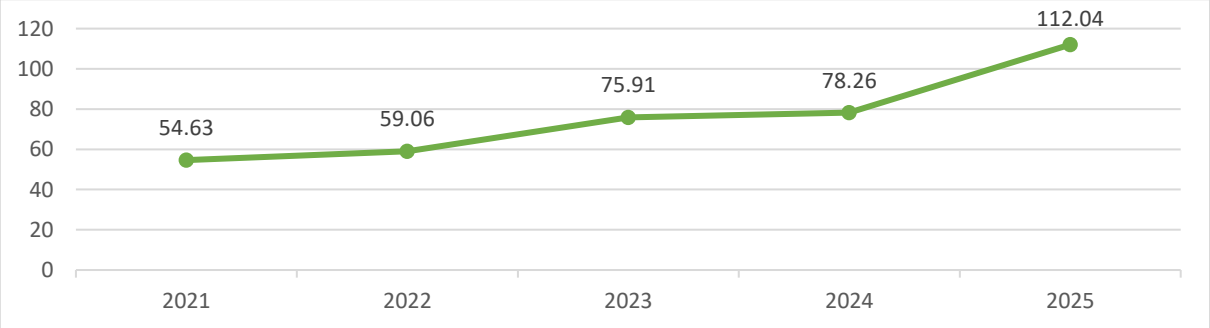
2.1.5.1. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 5 – 6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak.

Grafik 2.109
Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

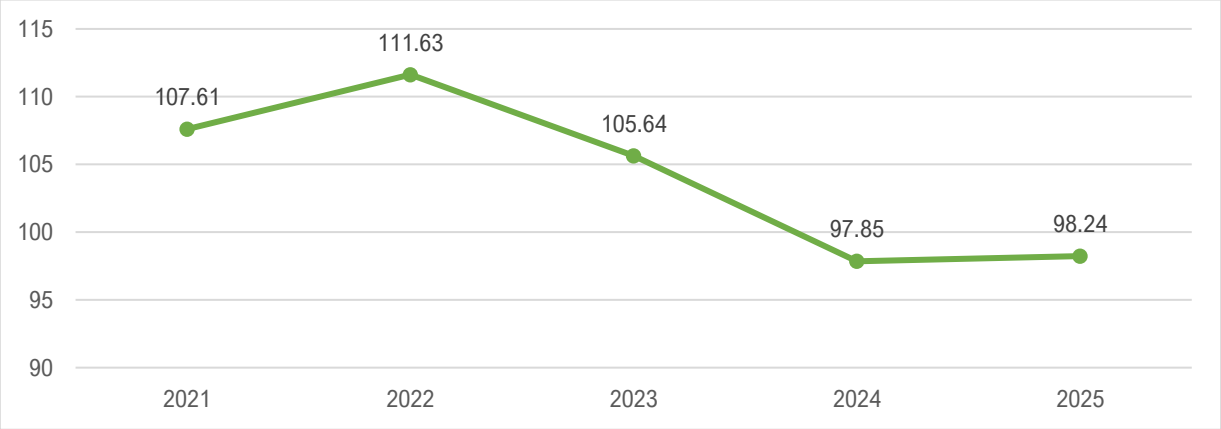
Tingkat partisipasi anak usia 5 – 6 tahun pada PAUD di Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan fluktuatif sepanjang lima tahun terakhir. Tahun 2021, tingkat partisipasi tercatat sebesar 54,63 persen, meningkat menjadi 59,06 persen pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 112.04 persen pada tahun 2025. Kenaikan ini menggambarkan adanya kemajuan dalam penyediaan layanan PAUD dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dini bagi perkembangan anak-anak usia tersebut. Meskipun terjadi kenaikan, angka partisipasi PAUD yang masih berada pada angka 81,6% menunjukkan adanya tantangan dalam

mencapai cakupan yang lebih luas. Beberapa permasalahan yang menghambat antara lain adalah keterbatasan akses di daerah terpencil, kurangnya fasilitas PAUD yang memadai, dan kendala sosial-ekonomi yang mempengaruhi kemampuan orang tua dalam mengakses pendidikan bagi anak-anak mereka. Selain itu, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas juga menjadi kendala dalam memperluas partisipasi di sektor PAUD.

b. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7 – 12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar

Tingkat Partisipasi Sekolah Dasar (SD) adalah salah satu indikator penting yang mencerminkan sejauh mana anak-anak usia sekolah dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mengakses pendidikan dasar secara merata. Indikator ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkualitas.

Grafik 2.110
Angka Partisipasi Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2024 (%)



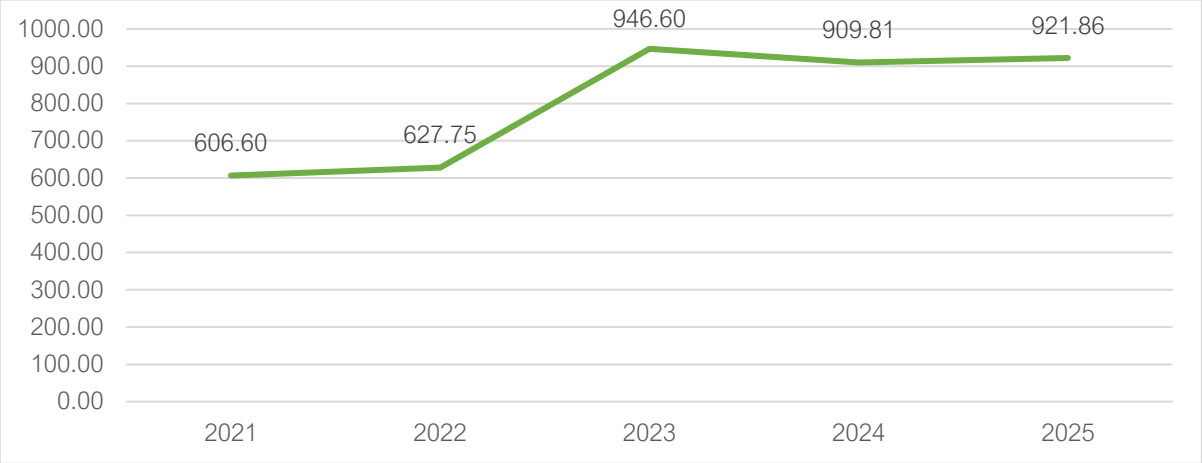
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Tingkat partisipasi SD tahun 2021 tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 107,61 persen. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 111,63 persen. Tahun 2023 ke 2024 mulai terjadi tren penurunan hingga 97,85 persen, dan kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2025 menjadi 98,24 persen.

c. Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 13 – 15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Tingkat partisipasi SMP mencerminkan sejauh mana anak usia sekolah menengah pertama (13–15 tahun) di Kabupaten Sidenreng Rappang terlibat dalam sistem pendidikan formal pada jenjang ini. Dalam lima tahun terakhir, tingkat partisipasi SMP menunjukkan fluktuasi yang menggambarkan tantangan sekaligus pencapaian dalam mendorong anak-anak untuk melanjutkan pendidikan menengah pertama.

Grafik 2.111
Angka Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025 (per 1000 penduduk usia sekolah)



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari 909,81 per 1.000 penduduk usia sekolah pada tahun 2024 menjadi 921,86 per 1.000 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia 13–15 tahun yang mengikuti pendidikan pada jenjang menengah pertama, baik melalui jalur pendidikan formal di SMP/MTs maupun melalui pendidikan nonformal melalui program Paket B. Kondisi ini mencerminkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan pada jenjang menengah pertama.

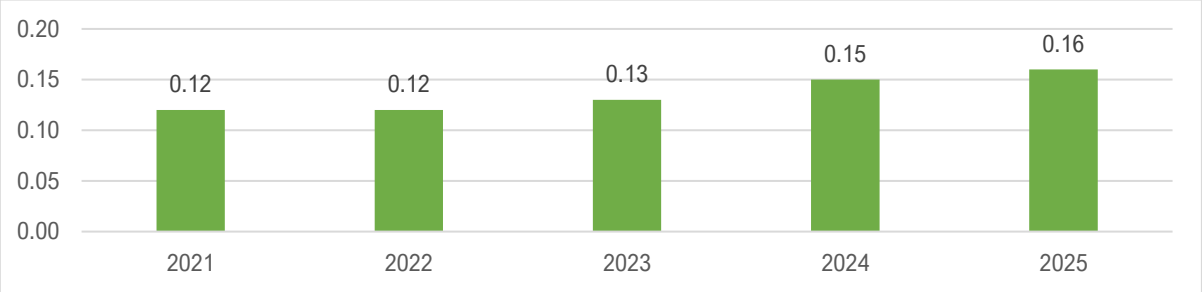
Meskipun demikian, capaian APS tersebut masih belum mencapai angka ideal 1.000 per 1.000, yang berarti masih terdapat sebagian anak usia sekolah menengah pertama yang belum mengikuti pendidikan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan di beberapa wilayah, serta adanya anak yang memilih bekerja atau belum melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan jenjang sekolah dasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui peningkatan akses pendidikan, penguatan program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta dorongan kepada masyarakat agar anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

2. Urusan Kesehatan

a. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk

Ketersediaan Ketersediaan dan distribusi tempat tidur rumah sakit yang tidak merata, menjadi persoalan tersendiri dalam implementasi sistem jaminan kesehatan nasional. Hal ini mengakibatkan terjadi penumpukan pasien di sejumlah rumah sakit pemerintah di daerah. Menurut organisasi kesehatan dunia, rasio ideal daya tampung RS adalah 1.000 penduduk : 1 tempat tidur.

Grafik 2.112
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk
di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk menunjukkan tren peningkatan, meskipun masih jauh dari standar ideal yang di tetapkan oleh WHO, tercatat sebesar 0,12 pada tahun 2020 hingga 2022, naik menjadi 0,13 pada tahun 2023, naik menjadi 0,15 pada tahun 2024 dan mencapai 0,16 pada tahun 2025.

b. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi

Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit yang mengampu rujukan pasien dari rumah sakit lain. Akreditasi adalah pengkuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, seluruh rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota berhasil mencapai akreditasi 100 persen selama lima tahun terakhir.

3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

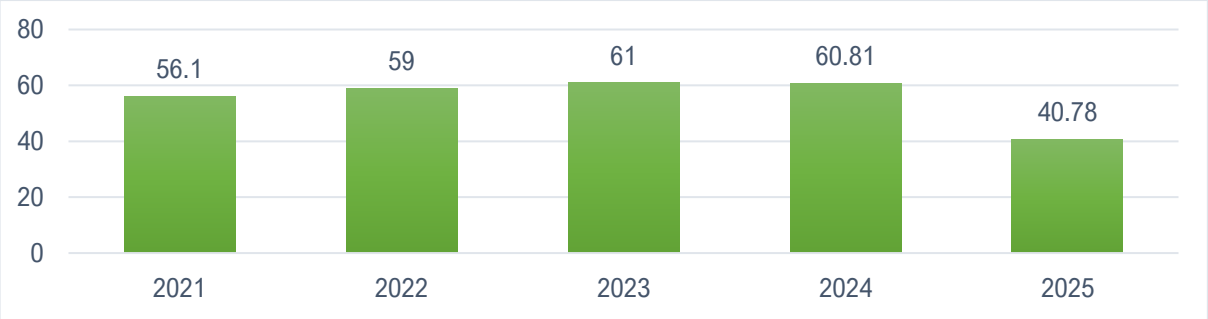
a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan merupakan keharusan jika pemerintah daerah ingin mendorong aktivitas ekonomi. Berbagai peneltian terkait infrastruktur dan pertumbuhan menunjukkan relasi positif antara keduanya, dimana infrastruktur menjadi variabel penentu cepat-lambatnya pertumbuhan ekonomi. Hal ini relevan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang mengingat laju pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir terus melambat.

Data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat mencatat tahun 2020 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 51,1 persen, sementara 48,9 persen kondisinya rusak ringan dan rusak berat. Meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 56,1 persen pada 2021, 59 persen pada tahun 2022, dan mencapai 61 persen pada tahun 2023, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2024 menurun menjadi 60,81 persen dan terus turun hinggan 40.78 persen pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena upaya dari pemerintah daerah melalui dinas teknis

melaksanakan kegiatan peningkatan jalan yang bersumber dari APBD maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Grafik 2.113
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

b. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

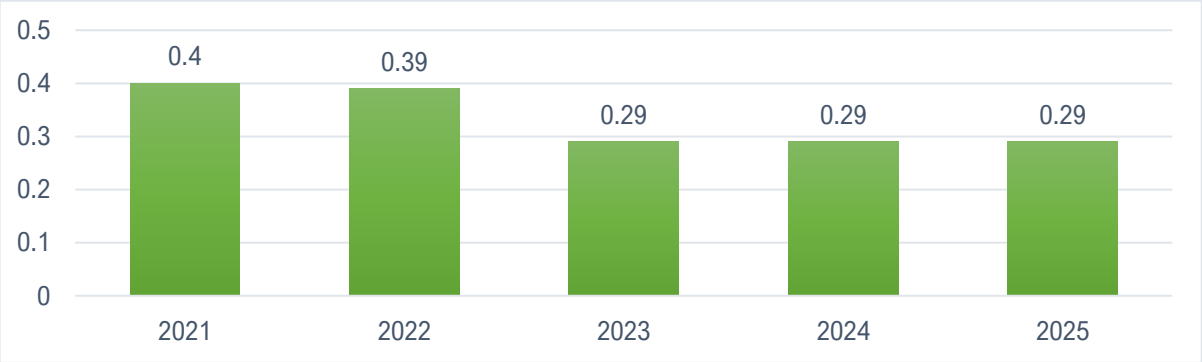
Pertumbuhan ekonomi memerlukan ketersediaan infrastruktur untuk memastikan mobilitas manusia serta barang dan jasa bisa berlangsung dengan lancar. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan pemerataan ekonomi di wilayah-wilayah. Untuk daerah dominan daratan, kualitas infrastruktur jalan adalah yang utama untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Dukungan infrastruktur terhadap kegiatan masyarakat dapat dilihat dari indikator panjang jalan terhadap jumlah penduduk. Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani atau menunjukkan tingkat kepadatan jalan. Angka yang terlalu tinggi menunjukkan beban jalan dalam melayani masyarakat semakin berat atau padat begitupun sebaliknya.

Dalam lima tahun terakhir rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 dan 2021, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk mencapai 0,4 persen. Namun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,39 persen. Angka ini mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi 0,29 persen. Penyebab dari menurunnya rasio tersebut dikarenakan jumlah panjang jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun 5 tahun terakhir stagnan dan tidak ada penambahan panjang jalan yaitu sepanjang

1.290,04 Km sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data BPS 5 tahun terakhir selalu bertambah. Pemerintah daerah bisa menjadikan data ini sebagai dasar untuk mengambil kebijakan membangun infrasturktur jalan. Jika rasionya rendah (dibawah 1), sebaiknya tidak lagi melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Tapi bila penduduk bertumbuh cepat, maka keputusan membangun adalah yang terbaik.

Grafik 2.114
Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

c. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

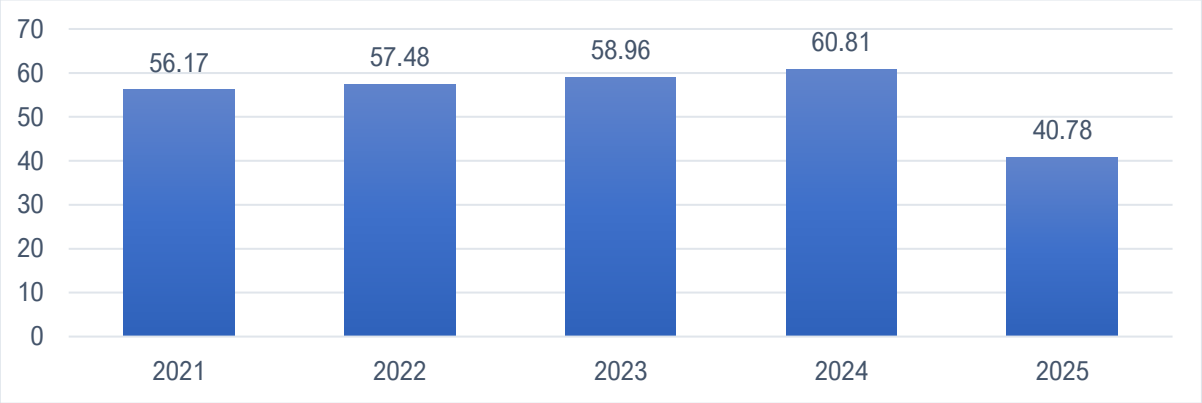
Laporan Bank Dunia berjudul *Infrastructure Sector Assessment* Program (InfraSAP) menyebut infrastruktur Indonesia berkualitas rendah dan tidak terencana dengan matang. Menurut Bank Dunia, buruknya kualitas infrastruktur karena dibangun tanpa pra-studi kelayakan dan analisis bertahap sebelum pelaksanaannya. Studi pendahuluan yang dimaksud terkait sisi hukum, teknis, ekonomi, komersial, lingkungan, dan aspek sosialnya. Jika dilevel nasional kualitas infrastruktur masih dikategorikan buruk, kondisi daerah sangat mungkin jauh lebih buruk. Buruknya kualitas infrastruktur merupakan hal krusial karena berhubungan dengan pertumbuhan daerah.

Karena wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dominan daratan, maka infrastruktur jalan yang paling penting. Kualitas jalan sangat menentukan perekonomian daerah secara umum dan mobilitas penduduk pada khususnya. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas infrastruktur jalan indikator yang dapat digunakan adalah persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam). Berdasarkan rilis data Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat, kualitas infrastruktur Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat 53,42 persen jalan dengan kondisi baik. Persentase ini terus meningkat dan mencapai 60,81 persen pada tahun 2024 namun kembali turun signifikan pada tahun .

Kualitas infrastruktur jalan Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh faktor terbatasnya anggaran yang selalu menjadi penyebab utama buruk infrastruktur di banyak

daerah. Pemerintah daerah membutuhkan anggaran besar pemeliharaan jalan yang hampir sama besar dengan biaya pembangunannya. Itu sebabnya, pemerintah daerah masih belum bisa memperbaiki kondisi jalan rusak yang angkanya 39,19 persen di tahun 2024.

Grafik 2.115
Persentase Jalan Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)
Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2026

d. Persentase Kawasan Permukiman yang belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 (Empat)

Kawasan pemukiman yang tidak dapat dilalui roda empat merupakan salah satu karakteristik pemukiman kumuh. Sesuai dengan definisinya, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Padatnya bangunan membuat kawasan ini sulit untuk dilalui kendaraan roda empat. Kondisi ini sangat berbahaya jika terjadi persitiwa kebakaran. Beberapa kejadian kebakaran di pemukiman padat menimbulkan kerugian besar karena sulit untuk dilakukan pemadaman diakibatkan oleh buruknya infrastruktur jalan.

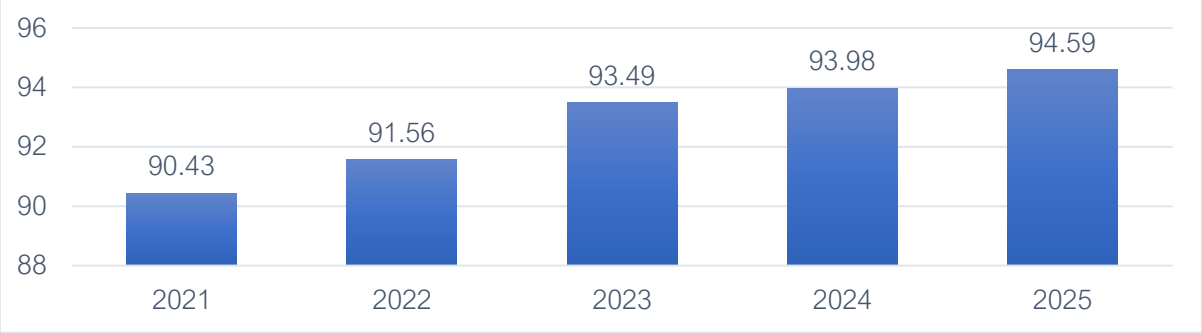
Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah yang tidak memiliki kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Data dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2025 persentase kawasan pemukiman yang belum bisa dijangkau kendaraan roda empat telah mencapai 0 persen.

e. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Selain menjamin bahwa setiap lahan pertanian bisa dialiri air, pemerintah daerah juga mesti memperhatikan infrastruktur air minum bagi masyarakatnya. Ketersediaan air minum bagi masyarakat merupakan hak dasar yang mestinya bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam lima tahun terakhir, persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum mengalami peningkatan

yang signifikan. Pada tahun 2021 berada di angka 89,19 persen dan terus meningkat hingga mencapai 94.59 persen pada tahun 2025.

Grafik 2.116
Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



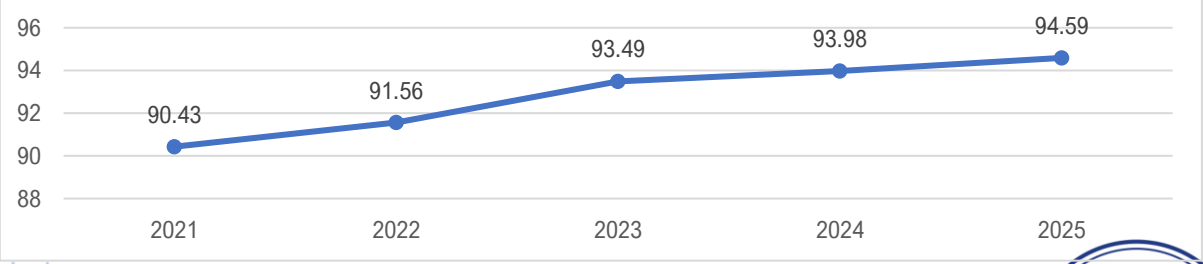
Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

f. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Perkotaan dan Pedesaan

Memperluas akses air minum kepada penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang tidaklah cukup, sebab akses air minum tersebut satu persoalan, sementara sumber air minumnya merupakan permasalahan lain. Sangat mungkin bagi penduduk sebuah daerah 100 persen memiliki akses terhadap air minum, tapi sumbernya dari mata air tidak terlindungi atau artinya tidak bersih dan tidak layak konsumsi.

Di Kabupaten Sidenreng, angka proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan masih sangat rendah. Tahun 2020, proporsi tersebut mencapai 89,19 persen, kemudian stagnan di angka 90,43 persen pada tahun 2021. Angka ini mengalami kenaikan di tahun 2022 dan 2023 dengan masing-masing nilai 90,43 persen dan 91,56 persen, hingga akhirnya pada tahun 2025 meningkat Kembali menjadi 94,59 persen. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa masih ada sekitar 5,41 persen penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang yang memang memiliki akses air minum, tapi diperoleh dari sumber tidak layak minum. Ini merupakan masalah serius pemerintah daerah, mengingat pentingnya air minum bersih dan berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat.

Grafik 2.117
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

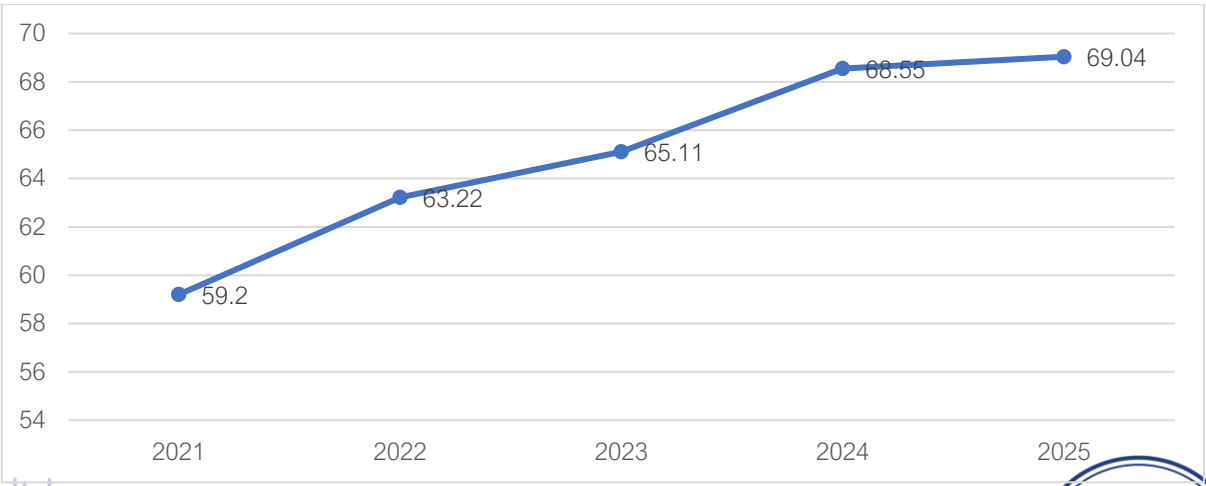
g. Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang salah satunya disebabkan oleh masalah pada produktivitas sektor pertanian. Sebagai sektor dengan kontribusi dominan dalam struktur ekonomi daerah, perubahan nilai tambah sektor pertanian sangat menentukan cepat-lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa tahun terakhir, terlihat jelas sektor pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi masalah serius.

Pengairan lahan pertanian adalah satu dari sekian banyak masalah pertanian yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagian lahan pertanian, terutama komoditas padi tidak memiliki jaringan irigasi dan hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber air satu-satunya. Karena hanya mengandalkan air hujan, petani hanya melakukan panen sekali dalam setahun, mengikuti siklus musim penghujan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka produktivitas sektor pertanian akan terus menurun.

Pemerintah daerah sudah berupaya setidaknya untuk menjaga agar jaringan irigasi yang sudah ada dapat berfungsi dengan baik. Tahun 2021 jaringan irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kondisi baik tercatat sebesar 59.02 persen. Selama lima tahun terakhir, angka ini terus meningkat hingga mencapai 69.04 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah bekerja sama secara efektif dalam membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi terutama untuk mengelola air genangan yang sering menyebabkan sawah petani terendam banjir saat musim penghujan. Meski demikian, masih terdapat 31.45 persen jaringan irigasi yang tidak berfungsi dengan baik, yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah terutama dalam konteks penurunan produktivitas sektor pertanian yang dapat diperbaiki dengan pengelolaan irigasi yang baik.

Grafik 2.118
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025

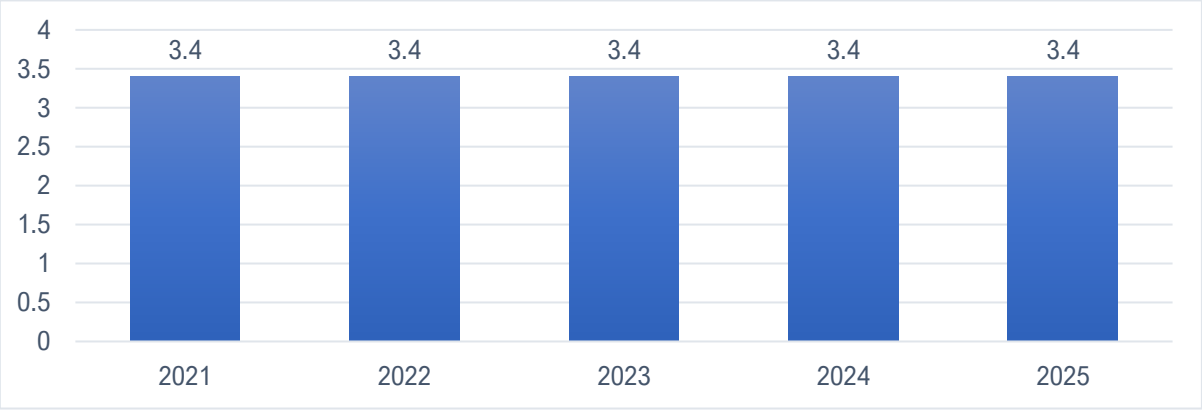


Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

h. Rasio Jaringan Irigasi

Selama lima tahun terakhir, rasio jaringan irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang tidak pernah mengalami perubahan, masih diangka 3,4. Angka ini menunjukkan bahwa setiap satu hektar lahan budidaya pertanian memiliki 3 Km panjang jaringan irigasi. Angka tersebut tentu sangat rendah sebab pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lapangan usaha utama, sehingga memerlukan jaringan irigasi yang lebih memadai untuk mencukupi kebutuhan air pada lahan budidaya. Rasio jaringan irigasi tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan karena luas lahan pertanian dan panjang saluran masih tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun terdapat peningkatan kualitas pengaliran air di beberapa sawah irigasi.

Grafik 2.119
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

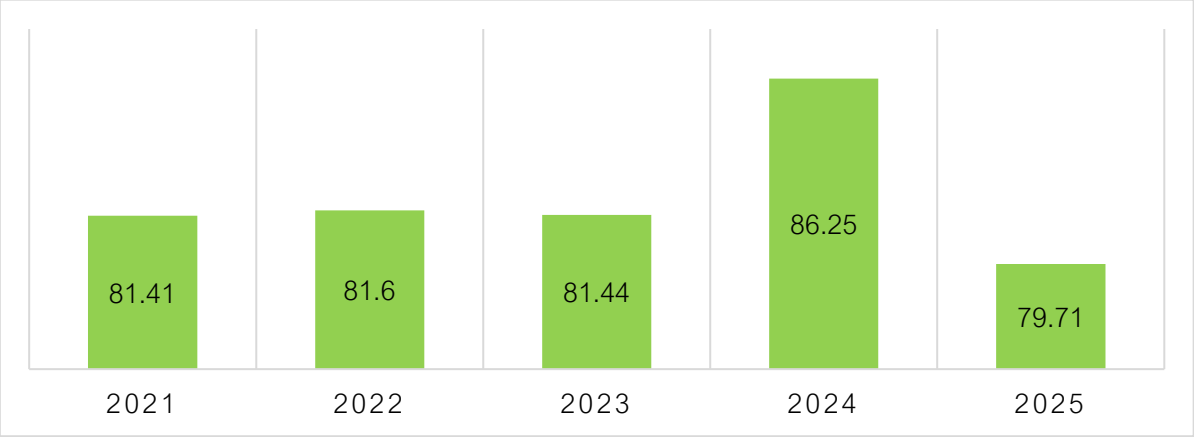
Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan harus didukung oleh strategi yang matang dan didukung dengan fakta, data, serta regulasi yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan.

Infrastruktur permukiman berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat. Penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase, jalan lingkungan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah di sekitar permukiman merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas

bangunan serta kesehatan penghuninya. Rasio rumah layak huni menunjukkan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kabupaten Sidenreng Rappang relatif stabil pada kisaran 81% selama periode 2021–2023, meningkat menjadi 86,25% pada tahun 2024, namun kembali menurun menjadi 79,71% pada tahun 2025. Penurunan sebesar 6,54 poin persentase pada 2025. Penurunan jumlah rumah layak huni dapat disebebkan oleh beberapa hal, termasuk berkurangnya kegiatan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) reguler dan strategis salah satunya program bedah rumah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman agar capaian dapat kembali meningkat dan dipertahankan secara berkelanjutan.

Grafik 2.120
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



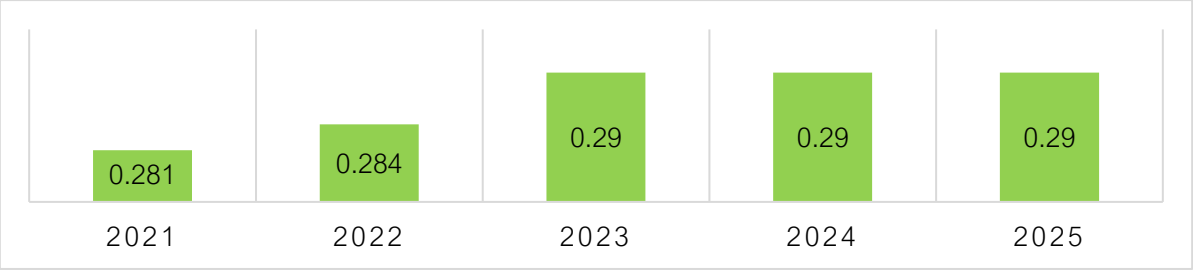
Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

b. Rasio Permukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio permukiman layak huni menunjukkan perbandingan antara luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman. Rasio permukiman layak huni di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren meningkat selama periode 2021–2025, dari 0,281 pada tahun 2021 menjadi 0,284 pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 0,290 pada tahun 2023 dan relatif stabil pada angka 0,290 hingga tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penyediaan dan kualitas permukiman layak huni, meskipun peningkatannya relatif terbatas setelah tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas permukiman perlu terus diperkuat, terutama melalui penanganan kawasan tidak layak huni dan peningkatan akses

terhadap infrastruktur dasar permukiman agar perbaikan dapat berlangsung lebih signifikan dan berkelanjutan.

Grafik 2.121
Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

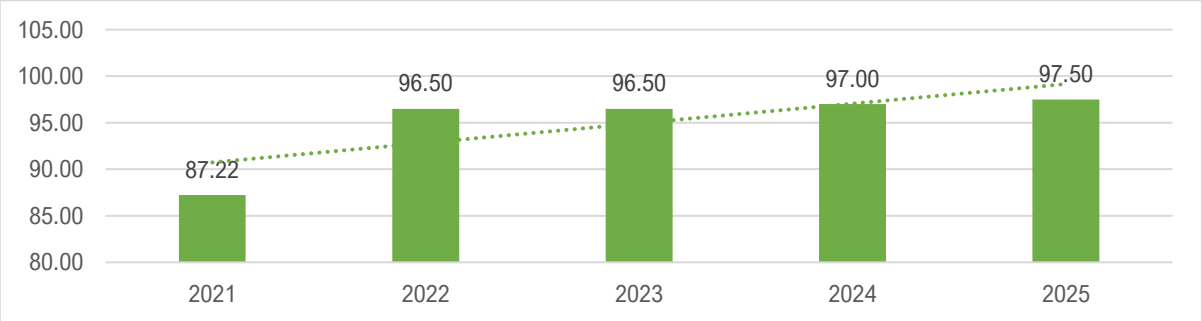


Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

c. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018. Indikator rumah layak huni salah satunya adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni. Nilai Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 100 persen. Dalam lima tahun terakhir, cakupan ketersediaan rumah layak huni menunjukkan tren meningkat, dari 87.22 persen di tahun 2021 menjadi 97.50 persen di tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi SPM. Faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya cakupan ketersediaan rumah layak dengan SPM yakni, ketersediaan lahan.

Grafik 2.122
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

d. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Rumah terjangkau adalah rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyakarat. Cakupan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan harga yang

terjangkau baik untuk dimiliki maupun disewa oleh seluruh lapisan masyakarat. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/PERMEN/M/2008, nilai SPM untuk indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70 persen. Dalam lima tahun terakhir, cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau menunjukkan nilai yang sama yakni 11.1 persen.

Grafik 2.123
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%)

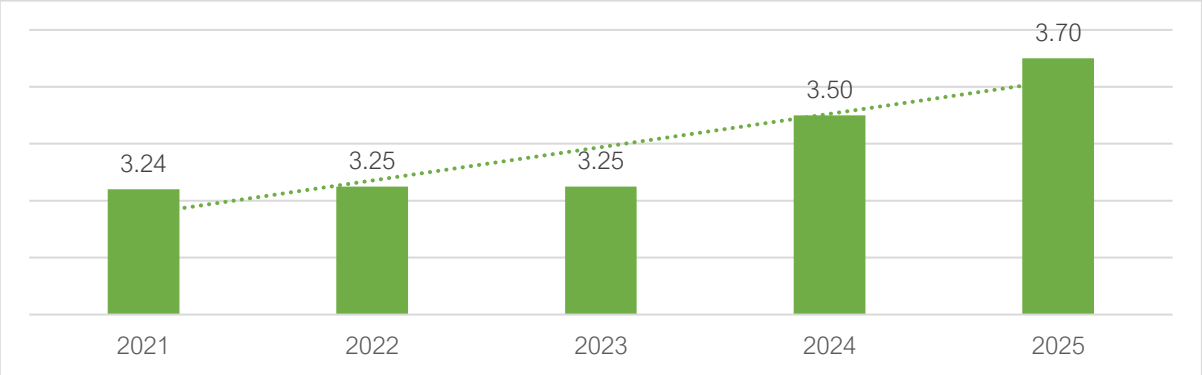


Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

e. Persentase Permukiman yang Tertata

Persentase pemukiman yang tertata menunjukkan perbandingan antara luas area permukiman tertata dengan luas area permukiman keseluruhan. Pada tahun 2021, persentase pemukiman yang tertata tercatat sebesar 3,24 persen. Angka ini mengalami peningkatan yang stabil hingga mencapai 3,70 persen di tahun 2025. Peningkatan ini belum menunjukkan kinerja yang signifikan karena presentase nya masih sangat kecil yang membuat masih terdapat rumah penduduk yang saling berhimpit satu dengan lainnya.

Grafik 2.124
Persentase Pemukiman yang Tertata di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



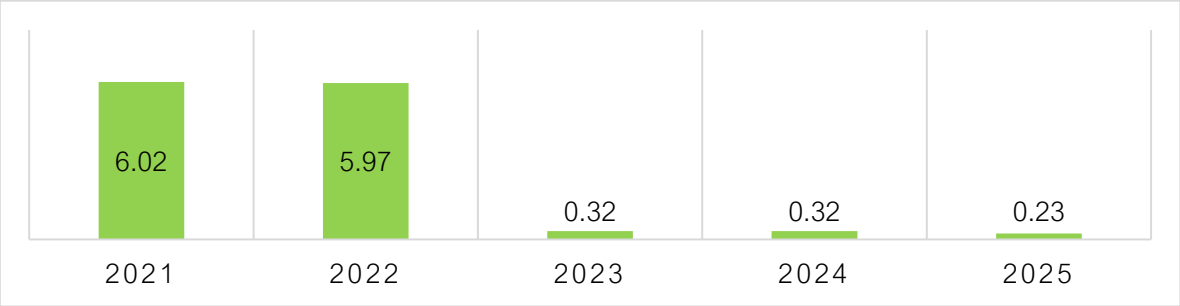
Sumber:Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

f. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus menurun. Capaian berkurang dari 6,02% pada tahun 2021 menjadi 5,97% pada tahun 2022, kemudian turun drastis menjadi 0,32% pada tahun 2023 dan tetap berada pada angka yang sama pada tahun

2024, sebelum kembali menurun menjadi 0,23% pada tahun 2025. Secara keseluruhan, terjadi penurunan sebesar 5,79 poin persentase dibandingkan tahun 2021 atau sekitar 96,18%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penanganan kawasan permukiman kumuh telah menunjukkan hasil yang sangat baik melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar, penataan kawasan, dan penyediaan sarana prasarana permukiman. Meskipun demikian, masih terdapat sisa kawasan kumuh yang memerlukan penanganan berkelanjutan agar target penghapusan permukiman kumuh dapat tercapai, disertai upaya menjaga kualitas kawasan yang telah ditingkatkan agar tidak kembali mengalami degradasi.

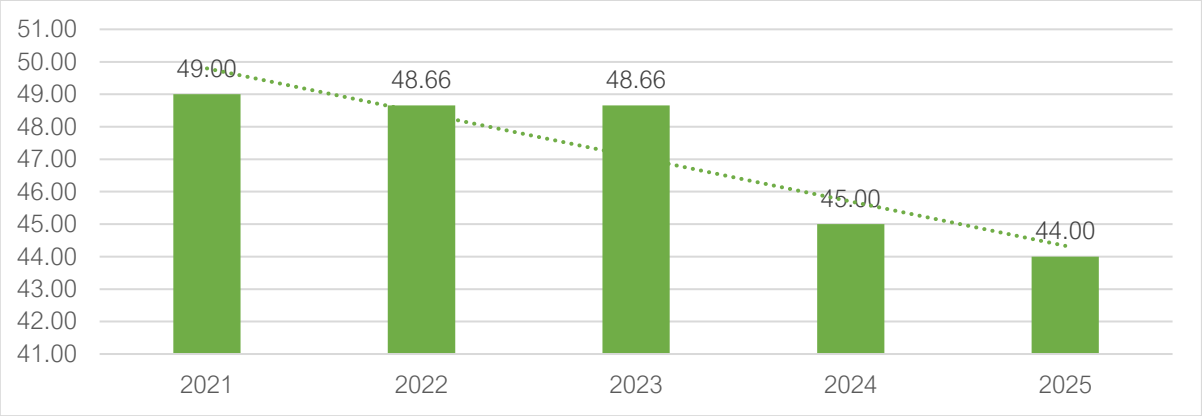
Grafik 2.125
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

g. Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Grafik 2.126
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

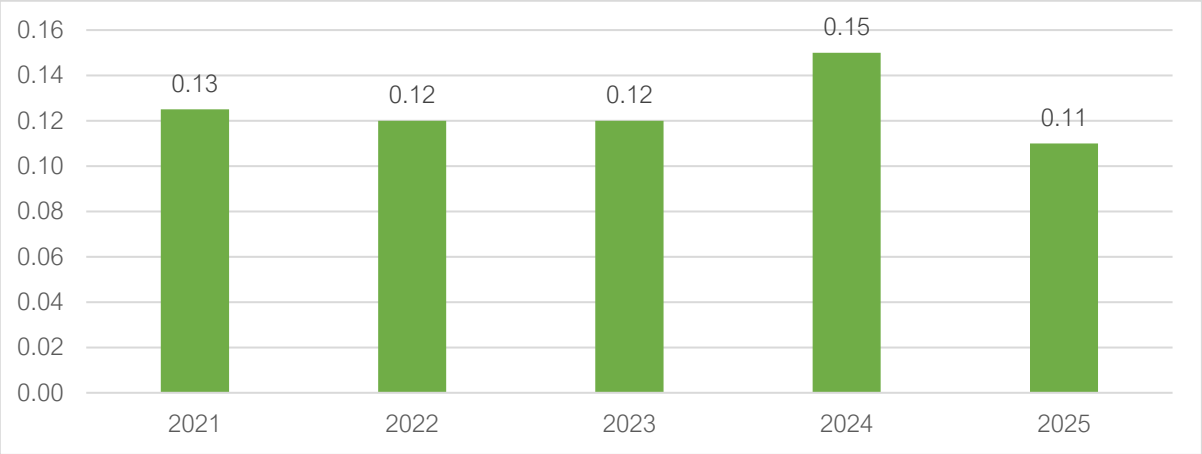
Pada tahun 2021, persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 49 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 44 persen di tahun 2025.

h. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Proporsi Proporsi rumah tangga kumuh adalah perbandingan antara banyaknya rumah tangga kumuh dengan jumlah rumah tangga seluruhnya. Rumah tangga kumuh

didefinisikan sebagai rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai >7, 2 m2 per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak. Pada tahun 2021, proporsi rumah tangga kumuh di sebesar 0,13 persen lalu terjadi peningkatan di tahun 2024 sebesar 0.15 persen dan pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 0,11 persen.

Grafik 2.127
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

i. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

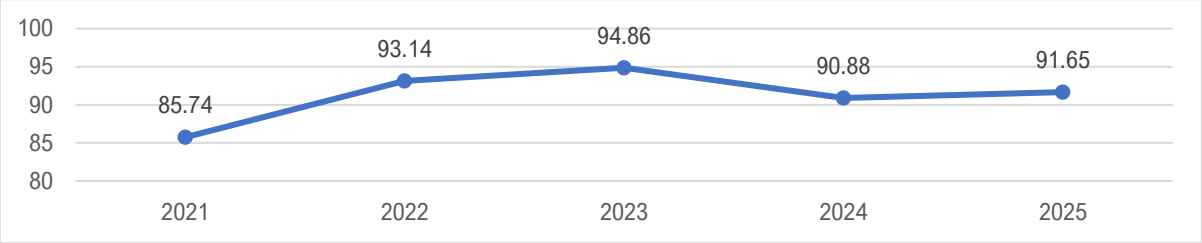
Pemukiman kumuh juga dicirkan dengan kondisi sanitasi yang buruk. Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Praktik mencuci atau mandi di sungai dimana orang membuang sampah dan kotoran merupakan contoh dari kondisi sanitasi yang buruk. Dampaknya bisa menyebabkan timbulnya penyakit diare, kolera, typhoid fever, dan paratyphoid fever, disentri, penyakit cacing tambang, ascariasis, hepatitis A dan E, penyakit kulit, trakhoma, schistosomiasis, cryptosporidiosis, malnutrisi, dan penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi.

Perkiraan kasus kesakitan pertahun di Indonesia akibat sanitasi buruk adalah penyakit diare sebesar 72%, kecacingan 0,85%, scabies 23%, trakhoma 0,14%, Hepatitis A 0,57%, Hepatitis E 0,02% dan Malnutrisi 2,5%, sedangkan kasus kematian akibat sanitasi buruk adalah diare sebesar 46%, kecacingan 0,1%, scabies 1,1%, hepatitis A 1,4% dan hepatitis E 0,04%.

Selama lima tahun terakhir, persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2021, sebesar 85,74 persen rumah tinggal sudah bersanitasi, meningkat menjadi 93,14 persen di tahun 2022. Angka ini mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 94,86 persen. Namun pada tahun 2024

angka ini kembali turun menjadi 90,88 persen tapi pada tahun 2025 sedikit meningkat menjadi 91.65 persen. Pasokan air bersih yang masih terbatas dibeberapa wilayah merupakan salah satu penyebab menurunnya persentase rumah bersanitasi begitupun dengan kesadaran masyarakat tentang pentingya sanitasi layak masih rendah, sehingga tidak ada kepedalian untuk mewujudkan lingkungan bersih.

Grafik 2.128
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

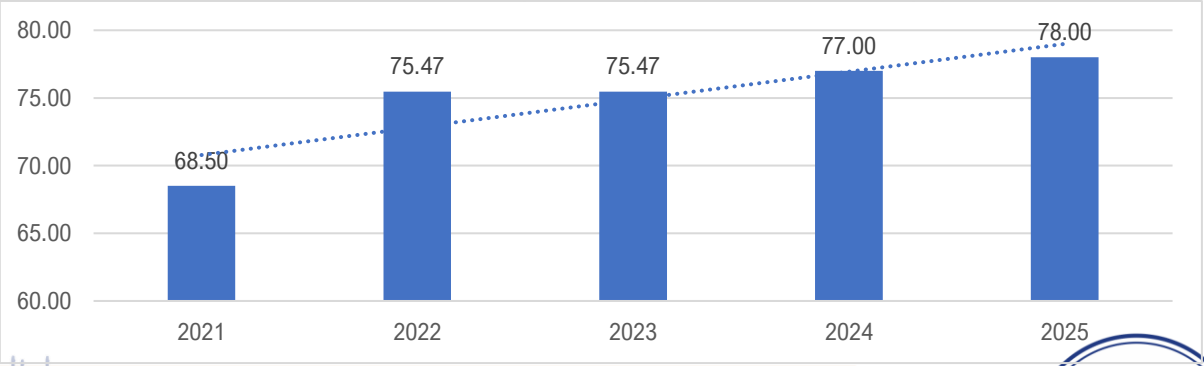


Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

j. Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang Didukung Dengan PSU

Sesuai Sesuai Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/Permen/ M/2008, tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mencatatkan angka 68.5 persen, meningkat menjadi 78 persen di tahun 2025, dapat dikatakan bahwa cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU menunjukkan perbaikan berarti dalam lima tahun terakhir.

Grafik 2.129
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%)

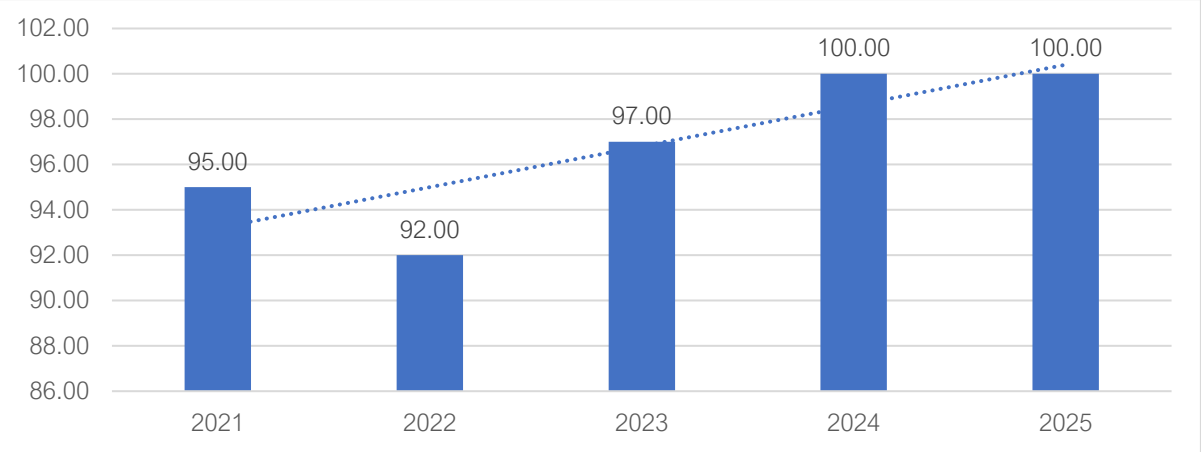


Sumber: Dinas Biciptapera Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman Ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) merupakan tujuan pokok dalam penegakan hukum. Kebutuhan akan ketentraman dan ketertiban masyarakat ini merupakan syarat fundamental bagi terciptanya masyarakat manusia yang teratur. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah ketentraman dan ketertiban dibutuhkan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Selama periode 2021-2024, persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan menunjukkan tren positif. Pada tahun 2021, gangguan trantibum yang dapat diselesaikan mencapai angka 95 persen, lalu meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2024 dan 2025. Cakupan petugas Linmas sangat memengaruhi tingkat penyelesaian pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum, sebab jika laporan meningkat sementara jumlah petugasnya berkurang maka penyelesaian pelanggaraan akan terhambat.

Grafik 2.130
Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

a. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Semakin berkembang suatu daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, aktivitas sosial masyarakat seringkali terganggu dengan berbagai tindakan-tindakan kriminal. Untuk melindungi masyarakat dari berbagai ganguan, maka pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemberian perlindungan hingga tingkat desa. Tanggung jawab tersebut tertuang dalam Permendagri No. 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Disebutkan bahwa perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan. Warga yang dipersiapkan untuk memberikan perlindungan dikenal dengan sebutan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas.

Satuan perlindungan masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana

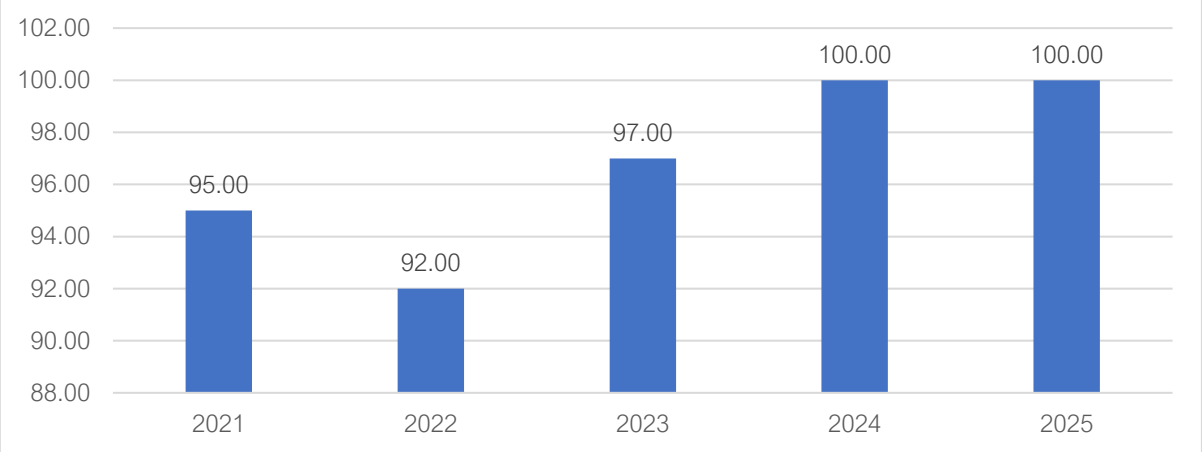
guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Tugas Satlinmas berdasrakan Permendagri No. 84 Tahun 2014 yaitu membantu dalam penanggulangan bencana, membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, dan membantu upaya pertahanan negara.

Karena peranannya yang penting, maka Kabupaten Sidenreng Rappang memasukkan Satlinmas dalam struktur Dinas Satpol PP. Dalam peraturan perundang-undangan, Satlinmas diusulkan pada tingkat desa dan kemudian dilantik oleh kepala daerah melalui Dinas Satpol PP. Karena jumlahnya terus bertambah, cakupan Satlinmas Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2021 hingga 2022 sebesar 29,24 persen, lalu pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 30 persen dan kembali berkurang 29 persen pada tahun 2025.

b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) pada tahun 2021 mencapai 95 persen dan menurun jadi 92 persen pada tahun 2022 lalu meningkat hingga 100 persen pada tahun 2024 dan 2025.

Grafik 2.131
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%)



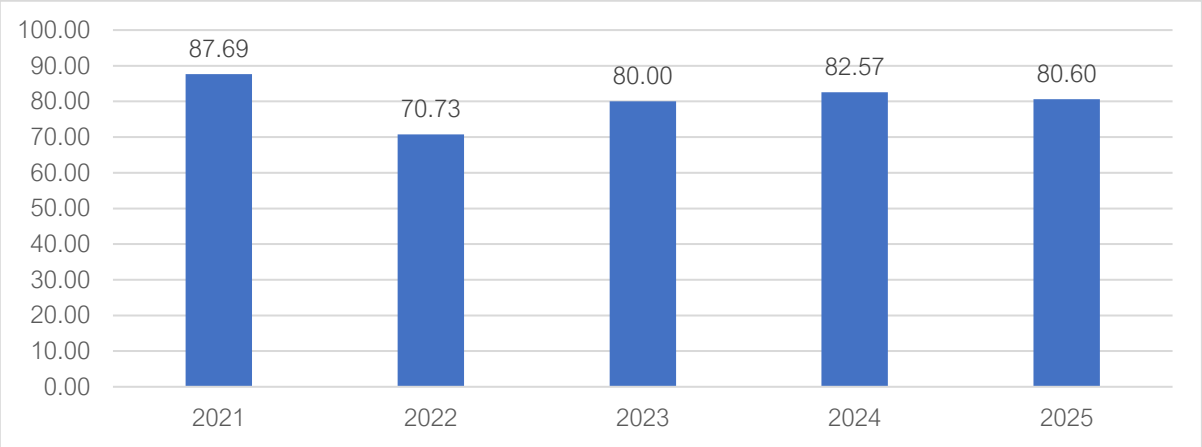
Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

c. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan ketentraman dan perlindungan masyarakat menuntut ketepatan dan kecepatan penanganan. Salah satu pelayanan publik yang sangat membutuhkan kecepatan penanganan adalah pemadam kebakaran. Itu sebabnya untuk mengukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran indikatornya adalah tingkat

waktu tanggap (*response time rate*) yang dibutuhkan oleh petugas ketika terjadi kebakaran. Waktu tanggap adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/ penyemprotan air pertama).

Grafik 2.132
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk daerah yang memiliki tingkat waktu tanggap manajemen kebakaran cukup tinggi walaupun berfluktuasi. Tahun 2021, persentase kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit mencapai 87.69 persen, kemudian pada tahun 2022 menurun jadi 70.73 persen, lalu mengalami tren peningkatan menjadi 80 persen di tahun 2023 dan 82.57 persen di tahun 2024 namun kembali turun jadi 80.60 persen di tahun 2025.

d. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Bencana alam dan kerusuhan ataupun konflik sosial tetap perlu mendapatkan perhatian karena kejadian bencana umumnya menimbulkan korban jiwa, kerugian dan kehilangan harta benda yang tidak sedikit, yaitu kerusakan rumah, serta sarana dan prasarana umum lainnya. Kejadian bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung sering terjadi di beberapa tempat di wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Bencana alam sering tidak dapat diperkirakan lokasi, waktu, dan besaran kejadiannya. Oleh karena itu, bantuan sosial sudah seharusnya menjadi salah satu kewajiban pemerintah kepada masyarakat ketika tertimpa bencana.

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat menunjukkan perbandingan antara jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan jumlah korban bencana yang

seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Dalam lima tahun terakhir, seluruh korban bencana selama masa tanggap darurat memperoleh bantuan sosial. Hal ini ditunjukkan oleh persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat mencatatkan angka 100 persen selama tahun 2020 sampai tahun 2024.

e. Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Dalam upaya meminimalisir korban bencana sangat diperlukan sarana dan prasarana yang lengkap.

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap menunjukkan perbandingan antara jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dengan jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Seluruh korban bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat yang lengkap. Hal ini ditunjukkan oleh persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap mencatatkan angka 100 persen selama tahun 2021 hingga tahun 2024.

6. Urusan Sosial

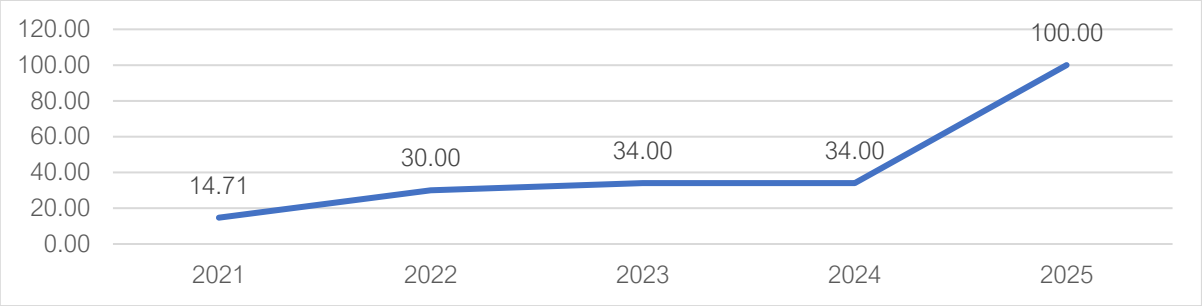
a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pembangunan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kerawanan sosial ekonomi, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi PMKS, juga merupakan masalah-masalah yang masih harus diatasi. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan secara langsung tanpa adanya kewajiban berkontribusi dari masyarakat. Bantuan ini diharapkan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat dan memberdayakan mereka yang lemah dan tidak mampu untuk dapat mempertahankan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kehidupan manusia dalam melewati berbagai situasi.



Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah PMKS yang diberikan bantuan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Dalam lima tahun terakhir, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021, persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial mencatatkan angka 14,71 persen lalu terus meningkat hingga mencapai 100 persen di tahun 2025.

Grafik 2.133
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

b. Persentase PMKS yang Tertangani

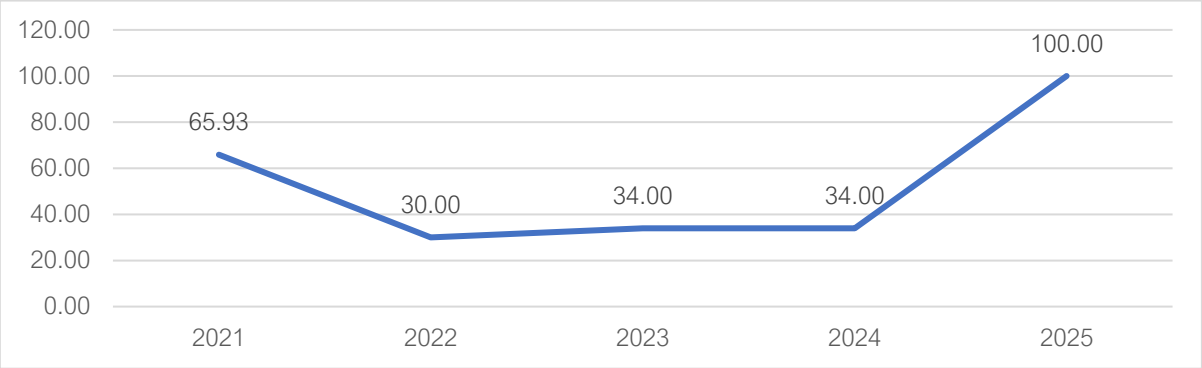
Pembangunan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterpencilan, dan penanganan korban akibat kejadian bencana alam serta bencana sosial. Namun, ternyata pembangunan yang dilaksanakan masih dihadapkan pada sejumlah persoalan penting seperti keterbatasan anggaran, kurangnya efektivitas pelaksanaan bantuan dan pelayanan jaminan sosial, serta luasnya cakupan pelayanan.

Penanganan para PMKS sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penanganan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial.

Dalam lima tahun terakhir, persentase PMKS yang tertangani menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, persentase PMKS yang tertangani 65.93 persen, namun mengalami tren penurunan yang signifikan menjadi 30 persen di tahun 2022, namun

kembali terjadi tren peningkatan pada tahun 2023 sebesar 34 persen dan meningkat signifikan sebesar 100 persen pada tahun 2025.

Grafik 2.134
Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



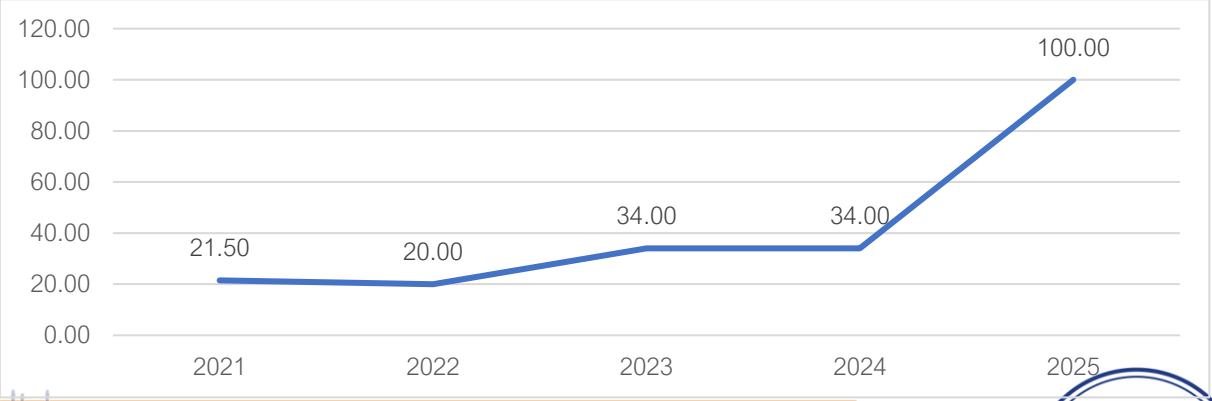
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

c. Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, yang dihadapi oleh PMKS adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam lima tahun terakhir, Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan signifikan. Tahun 2021, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 21.50 persen, mengalami penurunan menjadi 20 persen di tahun 2022 lalu terjadi peningkatan hingga mencapai 100 persen pada tahun 2025.

Grafik 2.135
Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

d. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Panti sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS agar mampu berperan aktif serta berkehidupan dalam masyarakat. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dengan jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial. Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat empat (4) panti sosial yang melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS. Dalam lima tahun terakhir, seluruh panti sosial tersebut tidak menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial.

e. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga, maupun jaringan pendukungnya baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dengan jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Di tahun 2020, terdapat bantuan dari pemerintah pusat. Akan tetapi di tahun 2021 hingga tahun 2025 sudah tidak ada bantuan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang artinya partisipasi usaha kelompok ataupun lembaga berbasis sosial masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang masih belum ada dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

f. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

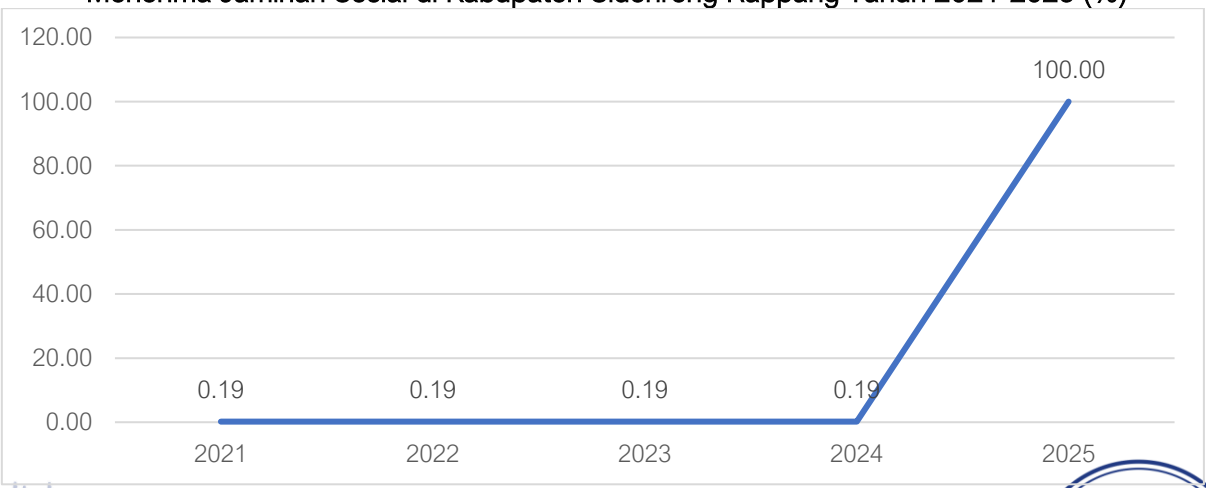
Kecacatan sering menyebabkan gangguan dan kendala bagi para penyandangnya, apalagi bila dikaitkan dengan masalah sosial lain, seperti kemiskinan dan pengangguran. Persoalan ini memengaruhi aktivitas fisik, kepercayaan, harga diri, dan interaksi sosial para penyandang cacat dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, para penyandang cacat juga menghadapi kondisi lain seperti, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sosial, minimnya aksesibilitas pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan penyandang cacat, pendidikan dan kesehatan, serta

pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh penyandang cacat. Hal itu mengakibatkan hak dasar mereka untuk tumbuh kembang dan berkreasi sebagaimana manusia yang sempurna menjadi terkendala.

Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.3064/M.PPN/05/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang perencanaan pembangunan yang memberi aksesibilitas bagi penyandang cacat telah menegaskan bahwa masyarakat dan pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas sarana dan prasarana umum bagi penyandang cacat pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum yang dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat.

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial menunjukkan perbandingan antara jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dengan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial. Di tahun 2021 hingga 2024 penyandang catat fisik dan mental yang telah menerima jaminan social sangat rendah hingga 0,19 persen, hal ini disebabkan jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang di temukan bertambah sedangkan anggaran untuk pemenuhan jaminan sosial sangat minim. Namun, selama tahun 2025, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial di Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah menerima jaminan sosial mencatatkan angka 100 persen. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian masyarakat maupun pemerintah terhadap penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.

Grafik 2.136
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

2.1.5.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Angka Angka Sengketa Pengusaha Pekerjaan Per Tahun

Dalam pelaksanaan hubungan industrial dimungkinkan terjadi perbedaan persepsi dan penafsiran maupun tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama/peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pengusaha maupun pekerja/buruh yang dapat berujung kepada terjadinya perselisihan hubungan industrial. Pada tahun 2021 sampai 2025, angka sengketa pengusaha-pekerja mencatatkan angka 0 persen yang berarti tidak ada satu pun kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Dalam lima tahun terakhir, seluruh kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama. Dalam rentang waktu dari tahun 2021 sampai 2025 tidak ada satu pun kasus yang membutuhkan penyelesaian dengan perjanjian bersama di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 Mediator Hubungan Industrial berkewajiban memanggil para pihak yang berselisih untuk dapat didengar keterangan yang diperlukan; mengatur dan memimpin mediasi; membantu membuat perjanjian bersama, apabila tercapai kesepakatan; membuat anjuran secara tertulis, apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian; membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial; membuat laporan hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

c. Keselamatan dan Perlindungan

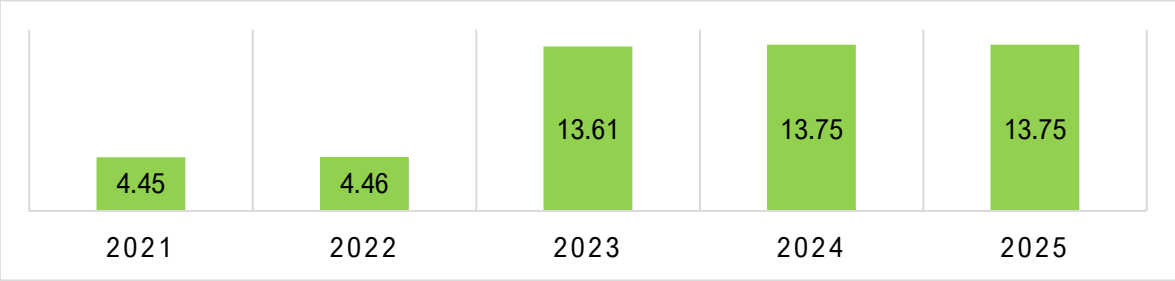
Setiap pekerjaan memiliki risiko masing-masing yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaanyang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 35 Ayat 3 disebutkan bahwa pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Karena itu pemerintah membuat peraturan pelaksana yaitu PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Kewajiban perusahaan untuk menerapakan K3 diatur dalam PP No. 50 Tahun 2012. Peraturan pemerintah tersebut menggunakan istilah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna

terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Oleh karena itu, penerapan SMK3 merupakan kewajiban perusahaan.

Persentase perusahaan yang menerapkan K3 di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan peningkatan dari 4,45% pada tahun 2021 menjadi 4,46% pada tahun 2022, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 13,61% pada tahun 2023. Capaian tersebut kembali meningkat tipis menjadi 13,75% pada tahun 2024 dan bertahan pada tingkat yang sama hingga tahun 2025. Meskipun menunjukkan perbaikan cakupan penerapan K3, persentase sebesar 13,75% masih tergolong rendah dan mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan belum menerapkan K3. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pembinaan, pengawasan, dan kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk memperluas cakupan penerapan K3 secara berkelanjutan.

Grafik 2.137
Persentase Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

d. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

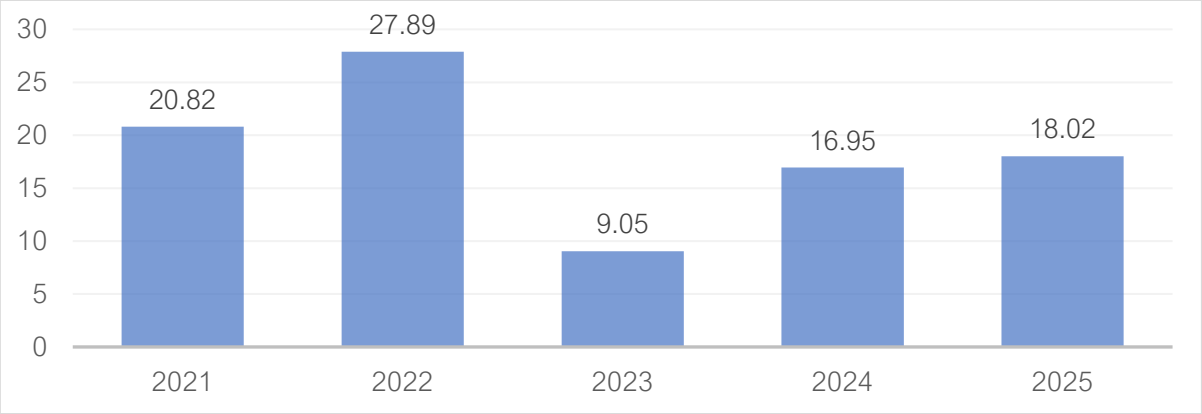
Ketika seorang pekerja pensiun atau mengalami PHK secara drastis pendapatan rumah tangga akan mengalami perubahan. Jika yang pensiun adalah ASN, mereka tak perlu khawatir, sebab setiap bulan negara masih menjamin pendapatan melalui gaji pensiun, namun yang jadi persoalan jika yang pensiun adalah pegawai swasta. Persoalan lainnya adalah ketika seorang pegawai swasta mengalami PHK, maka mereka hanya menerima pesangon beberapa bulan gaji dan tunjangan. Perusahaan tidak akan menanggung sama seperti negara menanggung pekerjanya. Untuk itulah dibentuk BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya dikenal Jamsostek.

BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk memberikan jaminan dan perlindungan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia. Melalui berbagai programnya, BPJS Ketenagakerjaan berusaha memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi siapapun yang mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT),

Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP). Perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan pekerjanya, harus mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kewajiban tersebut diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Meskipun sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. pada tahun 2025, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek berkisar di angka 18,02 persen. Kurangnya sosialisasi pentingnya asuransi ketenagakerjaan sangat diperlukan sehingga pekerja merasa membutuhkan BPJS ketenagakerjaan.

Grafik 2.138
Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Tabel 2.49
Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Tahun 2021 – 2025

No.	Tahun	Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja
1	2021	34,26
2	2022	67,50
3	2023	68,00
4	2024	45,97
5	2025	47,47

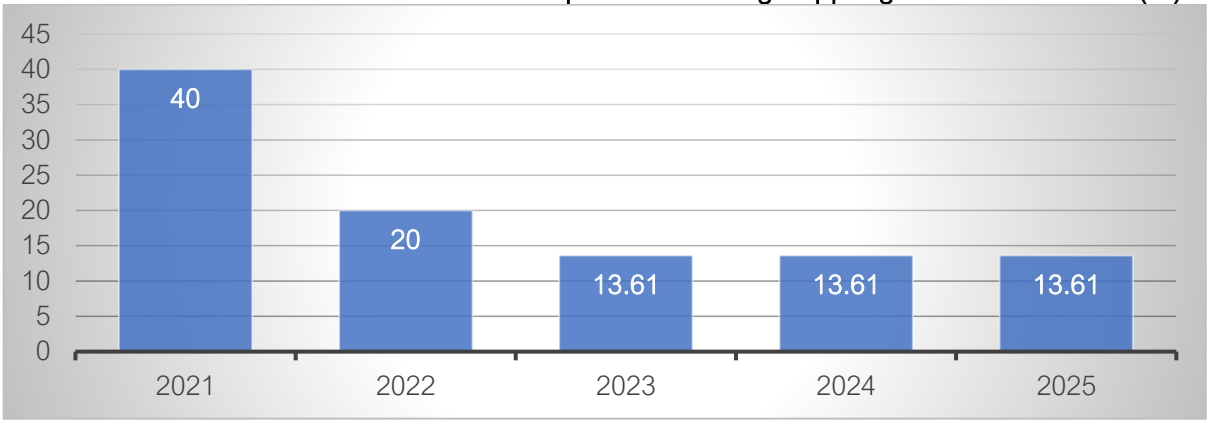
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap; 2026

e. Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Perusahaan yang melanggar ketentuan perundang-undangan wajib diperiksa oleh pemerintah daerah. Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan persentase perusahaan yang diperiksa mengalami penurunan lima tahun terakhir. Besaran pemeriksaan perusahaan

menurun dari 40% pada 2021 menjadi 20% pada 2022, lalu turun lagi ke 13,61% pada 2023 dan stagnan pada 2024 hingga 2025.

Grafik 2.139
Besaran Pemeriksaan Perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

f. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Unit pengawas ketenagakerjaan juga memiliki kewanangan untuk memerikan semua peralatan milik perusahaan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pengujian peralatan perusahaan berdasar pada UU No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dan Perpres No. 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, kewajiban tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Selama lima tahun terakhir, tahun 2021 hingga 2025, tidak ada perusahaan yang peralatannya telah di periksa oleh unit pengawas ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap aspek-aspek keselamatan dan Kesehatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang.

g. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

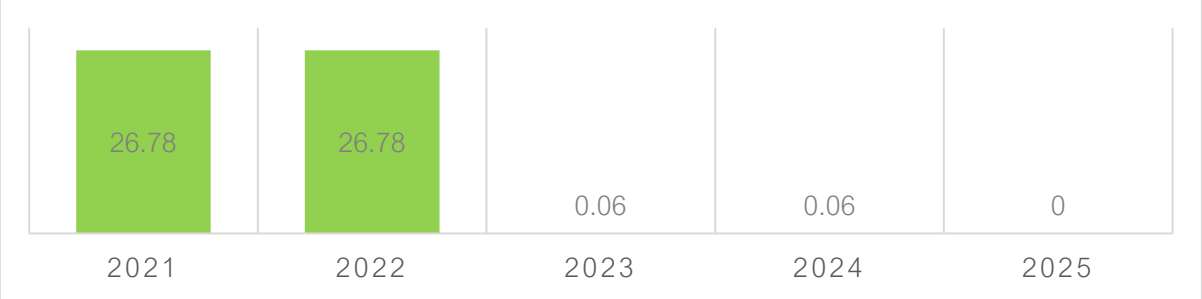
Tenaga kerja merupakan faktor produksi utama dalam proses produksi barang dan jasa. Jumlah output yang bisa dihasilkan oleh sebuah perusahaan, bergantung pada produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi produktivitas maka semakin besar besar pula output yang dihasilkan, begitupun sebaliknya. Pada level daerah, produktivitas tenaga kerja menentukan nilai PDRB. Oleh karena itu, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mensyaratkan pemerintah untuk mendorong produktivitas tenaga kerja.

Produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh modal manusia (*human capital*) yang terdiri dari pengetahuan dan keahlian (*skill*). Seorang pekerja bisa saja menyandang gelar pendidikan tinggi, tapi belum tentu ahli pada bidang tertentu. Pemerintah daerah bisa

memfasilitasi pekerja untuk meningkatkan kualitas modal manusia salah satunya dengan pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan oleh tempat kerja.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan penurunan yang sangat drastis selama periode 2021–2025. Capaian sebesar 26,78 pada tahun 2021 dan 2022 turun menjadi hanya 0,06 pada tahun 2023 dan 2024, kemudian mencapai 0 pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya penurunan yang sangat besar dalam cakupan pelatihan berbasis kompetensi, bahkan pada tahun 2025 tidak terdapat capaian pelatihan. Jika berlangsung secara berkelanjutan, kondisi tersebut berpotensi menghambat peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap keberlanjutan program pelatihan serta penguatan akses dan kapasitas penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi..

Grafik 2.140
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2025



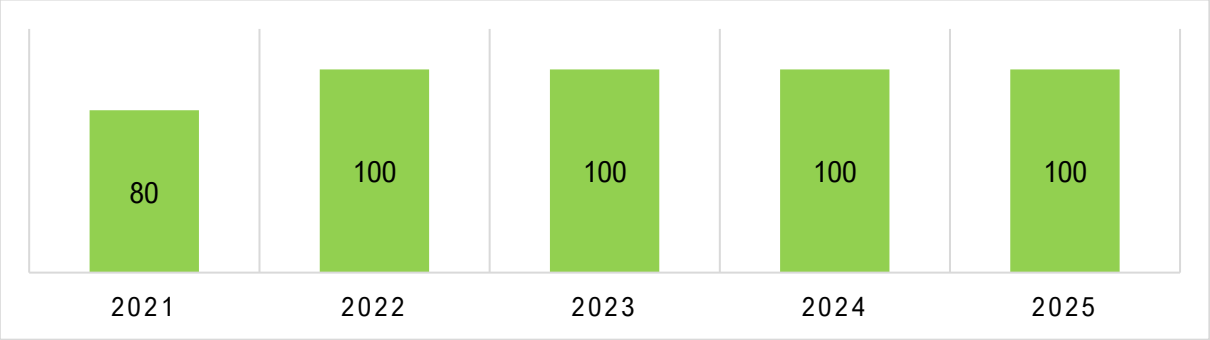
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

h. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Pelatihan berbasis masyarakat adalah pelatihan yang didesain berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, baik yang mengacu pada standar kompetensi maupun non standar. Tujuanya agar kompetensi dan pengetahuan masyarakat bisa meningkat untuk mengelola sumber daya daerahnya hingga menghasilkan pendapatan dan pengalaman kerja.

Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di kabupaten Sidenreng Rappang meningkat dari 80% (2021) menjadi 100% sejak 2022 dan tetap terjaga hingga 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa target pelatihan telah tercapai secara konsisten, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan keberlanjutan upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja berbasis masyarakat.

Grafik 2.141
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat
di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



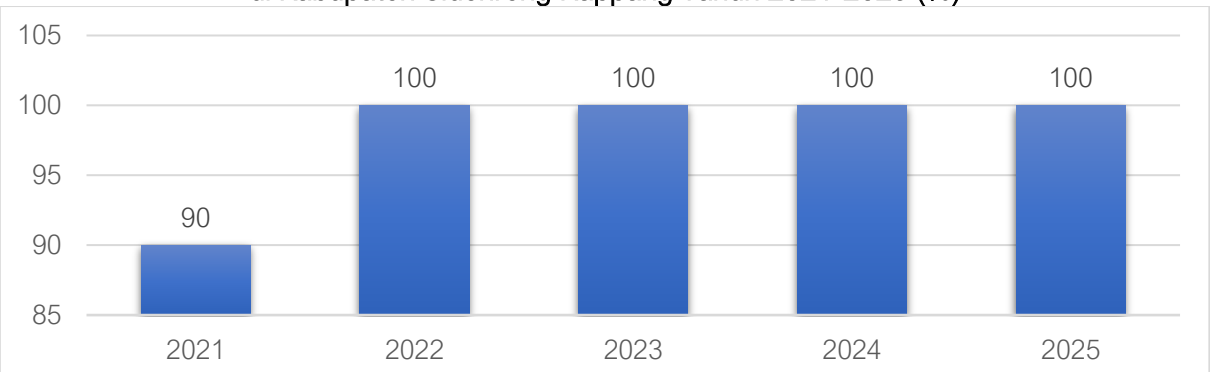
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

i. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Indonesia sedang berupaya untuk masuk dalam jajaran negara-negara perekonomian terbesar di dunia. Namun tantangan yang dihadapi adalah kurangnya wirausaha. Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi sebab saat ini rasio wirausaha di dalam negeri masih sekitar 3,1 persen dari total populasi penduduk. Untuk mencetak wirausaha baru, peran pemerintah daerah sangat strategis.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang membuat pelatihan kewirausahaan sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berbisnis dengan harapan mereka bisa menciptakan kesempatan kerja bagi orang lain. Dalam lima tahun terakhir, cakupan tenaga kerja/masyarakat yang mendapatkan pelatihan wirausaha cenderung naik dilhat dari angka besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Terdapat 90 persen tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di tahun 2021. Angka ini mengalami kenaikan menjadi 100 persen di tahun 2022 hingga tahun 2025. Itu artinya, dari seluruh pendaftar pelatihan, sudah mendapatkan pelatihan.

Grafik 2.142
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



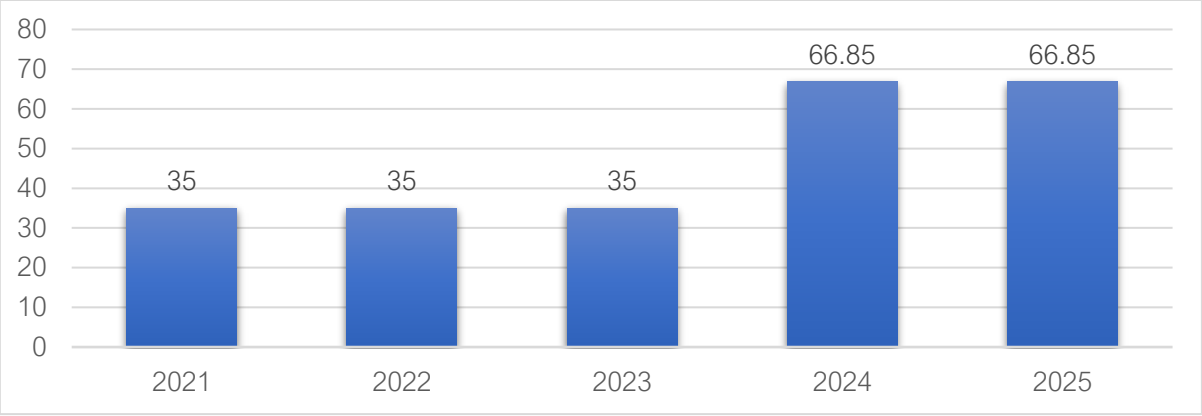
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah dengan pemberian akses yang seluas mungkin bagi perempuan untuk berperan aktif dalam seluruh aktifitas termasuk dalam hal partisipasi pada lembaga pemerintah. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Dalam lima tahun terakhir, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan perubahan signifikan di tahun 2024 setelah mengalami stagnansi pada empat tahun sebelumnya. Dari tahun 2021 hingga tahun 2023, berada pada angka 35 persen. Namun pada tahun 2024, melonjak drastis menjadi 66,85 persen dan stabil di angka yang sama pada tahun 2025. Angka ini memberikan gambaran bahwa pelibatan perempuan oleh pemerintah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan partisipasi perempuan baik dalam aktifitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, maupun politik. Melihat tren penurunan selama 4 (empat) tahun terakhir, maka diperlukan upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah yang sifatnya mendorosng kaum perempuan untuk berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam lembaga pemerintah sehingga di tahun-tahun selanjutnya kembali meningkat.

Grafik 2.143
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

b. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Keikutsertaan di badan pengambil keputusan dapat mengubah dinamika dan membawa perubahan bagi perempuan. Partisipasi di badan legislatif merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta dikaitkan dengan pemberdayaannya. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR menunjukkan sejauh

mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambil keputusan dalam proses politik formal khususnya di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di tahun 2025 terjadi peningkatan di angka 8,6 persen dimana 4 tahun sebelumnya terjadi stagnasi di angka 8,57 persen. Angka ini menunjukkan bahwa peluang serta keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat legislatif masih jauh dari angka 30 persen sesuai yang di amanatkan undang-undang.

Grafik 2.144
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2021-2025 (%)

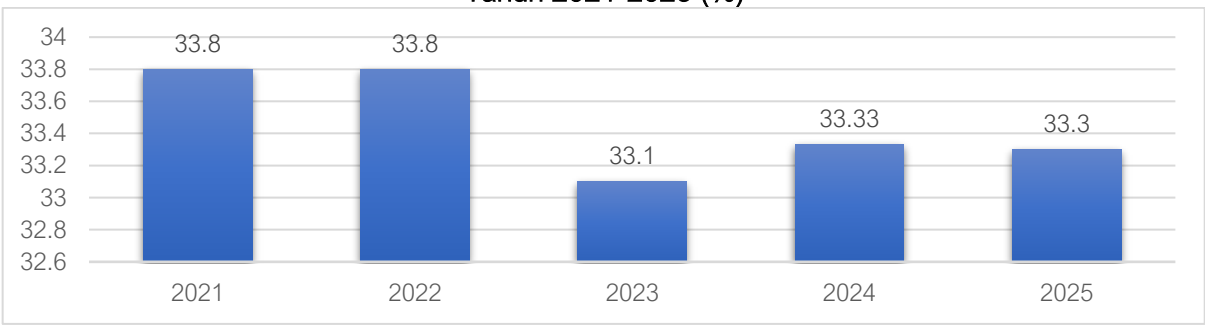


Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

c. Partisipasi Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

Selain partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, partisipasi perempuan di lembaga swasta juga memberikan gambaran sejauh mana perempuan memiliki akses dalam dunia kerja serta aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Semakin besar persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta tentu memiliki dampak yang positif terhadap pembangunan ekonomi di suatu wilayah begitupun sebaliknya.

Grafik 2.145
Partisipasi Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Persentase partisipasi perempuan di lembaga profesional menggambarkan proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga profesional terhadap seluruh pekerja perempuan. Dalam lima tahun terakhir, persentase perempuan sebagai tenaga profesional mengalami fluktuasi. Tahun 2020-2022 angka partisipasi perempuan konsisten di angka 33,8 persen, namun terjadi penurunan menjadi 33,1 persen di tahun 2023, sedikit naik di tahun 2024 dan di 2025 menjadi 33,3 persen.

d. Rasio KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu penting dalam pemberdayaan perempuan. Tindakan KDRT dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikologis bagi perempuan. Besaran angka kekerasan dalam rumah tangga merupakan indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Selama lima tahun terakhir, rasio KDRT di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren penurunan. Pada tahun 2021, rasio KDRT adalah 0,027 persen, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 0,0027 persen di tahun 2023. Penurunan berlanjut di tahun 2025 yang semakin rendah di angka 0,002 persen. Walaupun angka ini menunjukkan penurunan yang positif, namun tetap mengindikasikan keberadaan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.50
Rasio KDRT Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio KDRT	0,027	0,021	0,0027	0,0021	0,002

Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

e. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Menurut Peraturan Menteri PPPA No. 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sementara kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) yang teridentifikasi di pelayanan kesehatan merupakan fenomena gunung es karena belum menggambarkan jumlah seluruh kasus yang ada di masyarakat. Kasus KtP/A sangat mempengaruhi kesehatan korban sehingga berdampak pada penurunan kualitas manusia. Untuk itu,

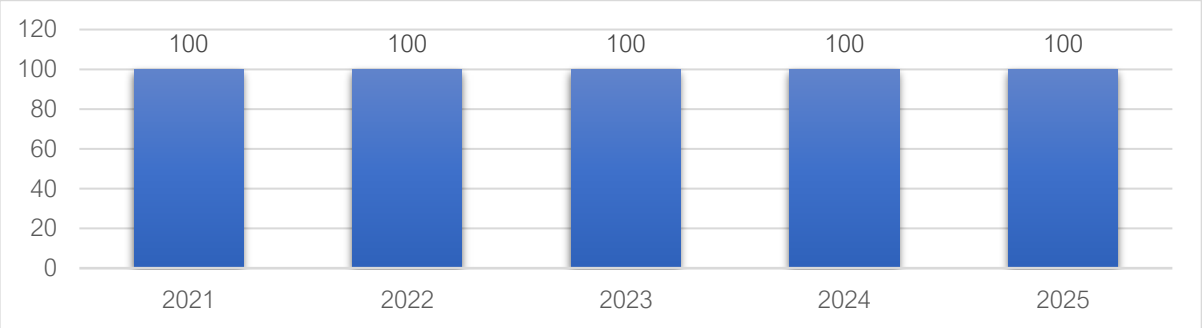
peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan kasus KtP/A salah satunya dengan fungsi Unit Pelayanan Terpadu. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut UPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan.

Dalam lima tahun terakhir, seluruh KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan penanganan pengaduan secara profesional di UPT. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan KtP/A yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT yang mencatatkan angka 100 persen. Capaian ini sesuai dengan SPM sebesar 100 persen dan artinya pelayanan UPT di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk penanganan pengaduan KtP/A sudah sangat baik.

f. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Layanan kesehatan menjadi salah satu SPM untuk KtP/A. Layanan kesehatan yang dimaksud adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dari tahun 2021 sampai tahun 2025 KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskemas mencapai 100 persen, artinya telah mencapai SPM yang ditetapkan sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perempuan dan anak korban kekerasan telah mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas dan mampu untuk tatalaksana KtP/A dan PPt/PKT di rumah sakit.

Grafik 2.146
Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT Rumah Sakit di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Pemdes PPA Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

g. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Salah satu dampak dari kekerasan bagi perempuan dan anak yakni disfungsi sosial. Disfungsi sosial membuat individu tertentu tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya

sesuai dengan status sosialnya. Untuk itu layanan rehabilitasi sosial bagi korban KtP/A menjadi penting. Layanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam lima tahun terakhir, tidak ada perempuan dan anak korban kekerasan terdata yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial. Hal ini berarti perempuan maupun anak korban kekerasan dapat pulih secara cepat tanpa layanan rehabilitasi sosial meskipun sebenarnya telah terdapat petugas layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang.

h. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

   Selain upaya perbaikan layanan kesehatan, aspek penegakan hukum juga perlu menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dalam lima tahun terakhir, cakupan penegakan hukum atas kasus-kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang konsisten mencatatkan angka 100 persen dari tahun 2021-2025. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperoleh penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.

i. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

   Pemberikan dukungan pada pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi kasus KtP/A menjadi isu penting. Informasi mengenai hukum, maupun hal teknis sederhana untuk membantu mendapat layanan yang menjadi haknya diperlukan bagi korban KtP/A. Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. Sejalan dengan penegakan hukum, seluruh korban KtP/A di Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh layanan bantuan hukum. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan KtP/A yang mendapatkan layanan bantuan hukum mencatatkan angka 100 persen selama tahun 2021-2025. Hal ini juga menunjukkan perbaikan layanan dan penegakan hukum di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Urusan Pangan

a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

   Dalam rangka mendorong ketahanan pangan, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan cadangan pangan sesuai dengan ketentuan yang diatur

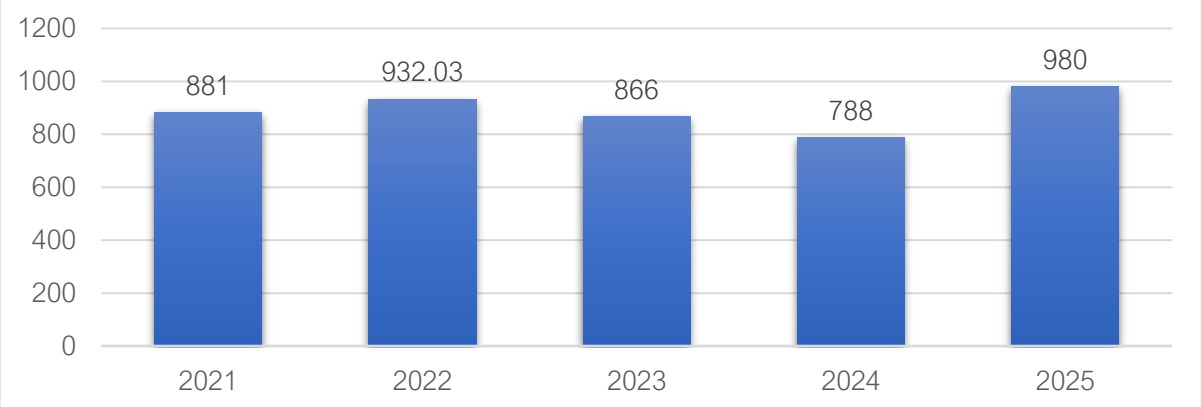
dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Cadangan pangan merupakan Langkah preventif untuk mengatasi potensi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan/atau keadaan darurat yang terkait dengan pangan.

Selama 2020-2023, tidak ada dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) yang memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan daerah. Namun di tahun 2024 sudah ada penguatan Cadangan pangan sebesar 3,33% namun belum memenuhi kuantitas standar cadangan pangan sebanyak 100ton sesuai dengan ketentuan yang diatur.

b. Ketersediaan Pangan Utama

Sebagai salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap penyediaan pangan utama di Sulawesi Selatan, ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup tinggi, meskipun 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2021 berada di angka 881.40 Kg. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan capaian 932,03 Kg, Namun pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 866 Kg dan penurunun berlanjut pada tahun 2024 dengan angka terendah yaitu 788 Kg. Di Tahun 2025 terjadi lonjakan di angka 980 Kg yang merupakan angka tertinggi di 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan perlu ada upaya lebih maksimal dalam pemenuhan kebutuhan pangan utama di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.147
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Kg)



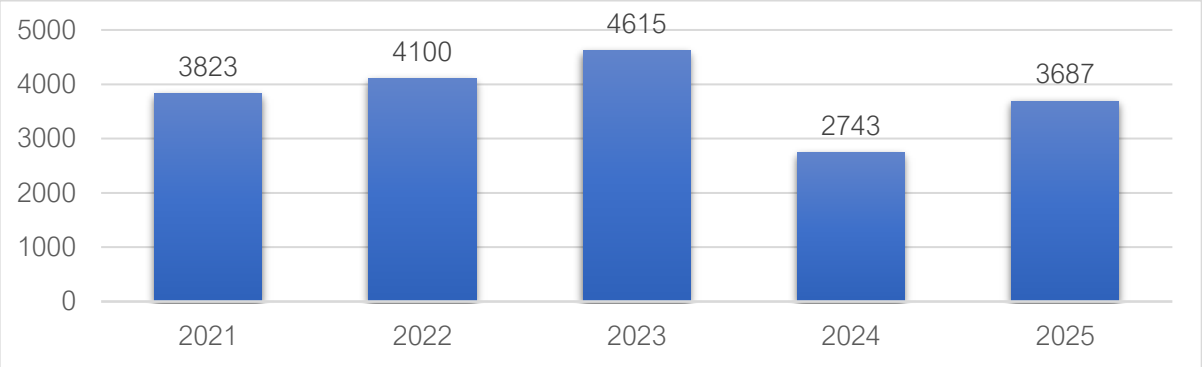
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sideneng Rappang; 2026

c. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan utama salah satu bagian penting untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk menghitung ketersediaan energi, pangan utama menjadi salah satu pertimbangannya. Setiap hari, masyarakat

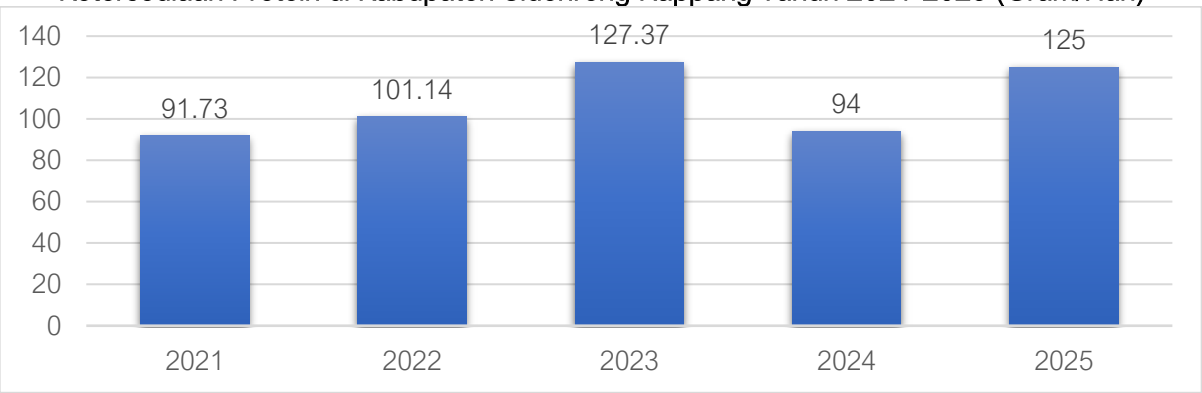
Kabupaten Sidenreng Rappang mengonsumsi 3.823 kkal energi pada tahun 2021. Angka ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 4.100 kkal/hari di tahun 2022. Ketersediaan energi kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023 menjadi 4.615 kkal/hari yang menjadi angka tertinggi di 5 tahun terakhir, Namun di tahun 2024, konsumsi energi masyarakat mengalami penurunan menjadi 2.743 kkal/hari lalu dilanjutkan dengan peningkatan di tahun 2025 dengan angka 3.687kkal/hari.

Grafik 2.148
Ketersediaan Energi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Kkal/Hari)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Grafik 2.149
Ketersediaan Protein di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Gram/Hari)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

d. Data Populasi Ternak dan Produksi Peternakan

Tabel 2.51
Data Populasi Ternak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Sapi	37.113	29.805	25.426	23.959	24.011
2.	Kerbau	1.607	1.697	1.502	1.317	1.406
3.	Kuda	161	171	168	124	173
4.	Kambing	5.800	5.209	4.292	3.256	3.712
5.	Ayam Buras	542.793	529.410	473.434	512.513	
6.	Ayam Pedaging	1.888.000	2.001.250	1.587.650	2.722.500	3.194.000

No	Jenis Ternak	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
7.	Ayam Petelur	4.562.924	3.984.953	3.794.705	4.094.117	5.172.045
8.	Itik	433.912	444.295	419.609	434.784	505.206
9.	Manila	79.583	79.559	74.119	74.929	67.817

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Tabel 2.52
Data Produksi Peternakan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	PRODUKSI TELUR					
	a) Ayam Ras	47.112.190	12.896.890	39.180.329	42.271.758	53.401.365
	b) Itik	2.166.089	712.427	2.094.688	2.170.442	2.521.988
	c) Ayam Buras/ Lokal	227.973	85.698	198.842	215.255	103.133
	d) Manila	397.278	109.195	370.002	374.046	338.542
2.	PRODUKSI DAGING					
	a) Sapi Potong	1.070.836	107.434	552.934	405.943	774.243
	b) Kambing	10.748	12.002	29.702	24.958	19.658
	c) Ayam :					
	1) Petelur	595.462	105.539	495.209	534.282	674.952
	2) Pedaging	821.280	176.871	690.628	1.184.288	1.389.390
	3) Buras	204.633	761	178.485	193.217	132.249
	4) Itik	169.226	11.183	163.648	169.566	197.030
	5) Manila	31.037	3.927	28.906	29.222	26.449

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

3. Urusan Pertanahan

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

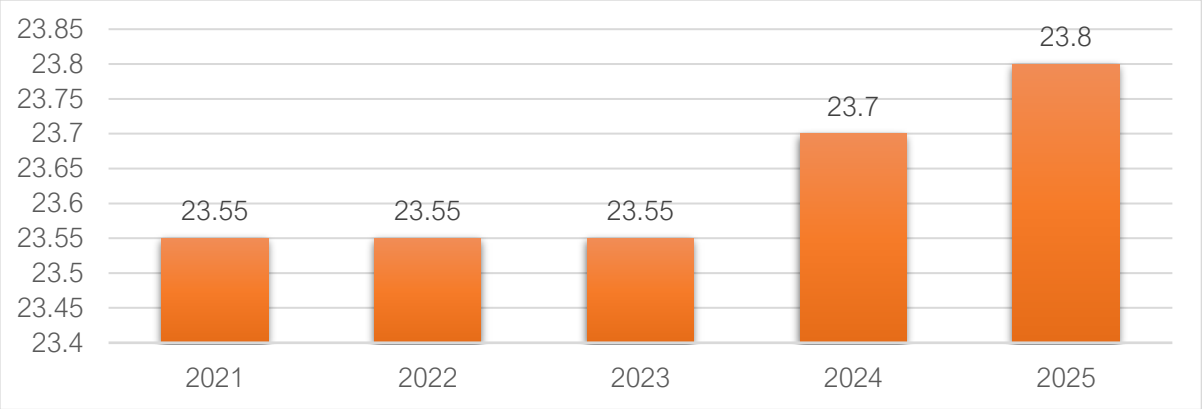
Sertifikasi tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap warga negara akan kepemilikan lahannya secara sah dan legal. Selain itu, sertifikasi tanah juga merupakan alat pembuktian yang kuat dengan tujuan melakukan pendaftaran tanah dalam rangka memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, serta terjaminnya tertib administrasi di bidang pertanahan sehingga tampak dan dirasakan baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanahnya dalam rangka tertib administrasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik di masa yang akan datang. Adapun masyarakat yang telah mendaftarkan tanahnya akan mendapatkan jaminan kepastian hukum yang meliputi kepastian status hak, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah sebagai suatu proses yang diakhiri dengan

terbitnya sertifikat oleh kantor pertanahan kabupaten atau kota dan mendapatkan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara umum, persentase luas lahan yang bersertifikat di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami peningkatan sepanjang 2021-2025 dari 23,55 persen di tahun 2021 menjadi 23,8 persen di tahun 2025. Adapun peningkatan persentase luas lahan bersertifikat ini sejalan dengan jatah sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PSTL) yang juga bertambah.

Grafik 2.150
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

4. Urusan Lingkungan Hidup

a. Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Sesuai UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah disetiap tingkatan wajib menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dalam UU nomor 32 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem masih banyak lagi tujuan lainnya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pada tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diawali dengan proses perencanaan yang mana pada pelaksanaan perencanaan, salah satunya melalui tahapan penyusunan RPPLH yang memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Dalam empat tahun terakhir, yaitu tahun 2021-2025, Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penyusunan RPPLH. Penyusunan dokumen RPPLH ini telah diatur dalam UU. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian pemerintah terkait dengan isu lingkungan hidup.

b. Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota

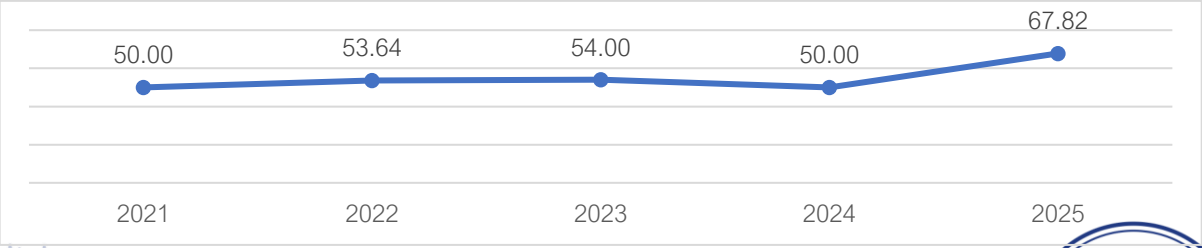
RPPLH secara garis besar memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Pada akhirnya RPPLH ini menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Karena belum tersedianya dokumen RPPLH dalam lima tahun terakhir, maka rencana pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang belum terintegrasi dengan RPPLH. Salah satu permasalahannya adalah belum tersosialisasikan ke seluruh OPD.

c. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Air merupakan kebutuhan makhluk yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Pemantauan kualitas air perlu dilakukan pada air sungai, air laut, air danau, air rawa, dan air tanah sehingga air dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Selain kebutuhan air minum, sumber air juga memainkan peran penting di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, produksi ternak, kehutanan, kegiatan industri, pembangkit tenaga air, perikanan, dan kegiatan kreatif lainnya. Salah satu indikator untuk menilai kualitas air yakni Indeks Kualitas Air.

Dalam lima tahun terakhir, indeks kualitas air di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, indeks kualitas air tercatat sebesar 50,00 poin, lalu mengalami kenaikan 2 tahun berturut turut menjadi 53,64 poin di tahun 2022 dan 54,00 di tahun 2023. Hal ini disebabkan berkurangnya pencemaran rendah, dimana semakin rendah nilai pencemaran air maka semakin baik kualitas air tersebut. Angka ini sempat mengalami penurunan di tahun 2024 di angka 50,00, namun dilanjutkan dengan kenaikan drastis di tahun 2025 di angka 67,82. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Sidenreng Rappang memenuhi baku mutu dengan berada direntang 0-1 poin. Meskipun demikian, peningkatan kualitas air perlu pengadaan laboratorium supaya untuk melakukan tes kualitas air tidak perlu lagi ke Makassar, begitu pula dengan Sumber Daya Manusia perlu ada peningkatan melalui pelatihan untuk pengoperasian alat.

Grafik 2.151
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

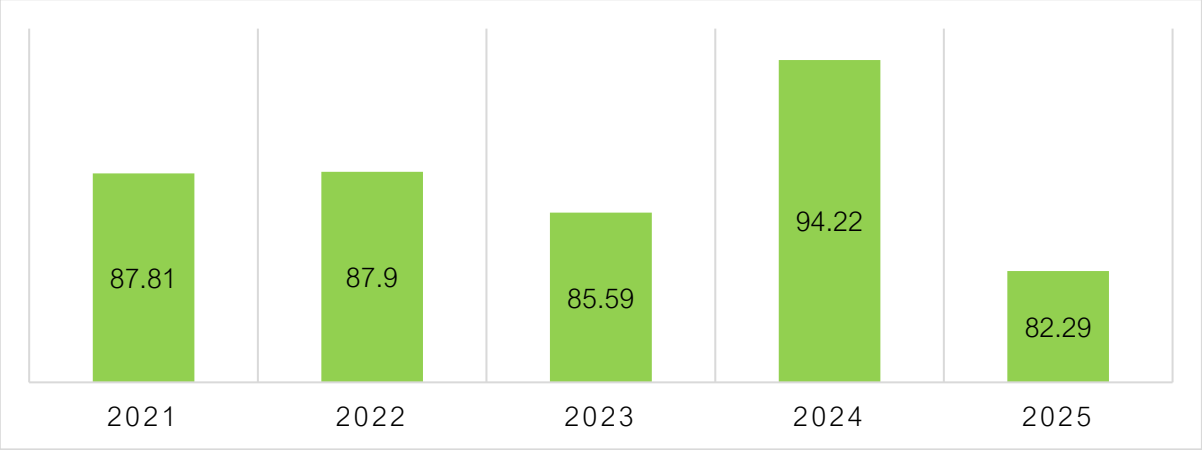


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

d. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. IKU merupakan suatu nilai yang menjelaskan dan menginformasikan kondisi dan perubahan kualitas udara dan menjadi masukan bagi pemerintah untuk perencanaan tentang udara bersih. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Dalam lima tahun terakhir, IKU di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, IKU mencatatkan angka 87,81 poin, dan sedikit meningkat menjadi 87,9 poin di tahun 2022. Angka ini kemudian merosot turun di angka 85,59 poin di tahun 2023. Pada tahun 2024, IKU kembali melonjak mencapai angka 94,22 poin, namun disusul dengan kemerosotan di angka 82,29 pada tahun 2025 yang menjadi angka terendah di 5 tahun terakhir.

Grafik 2.152
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

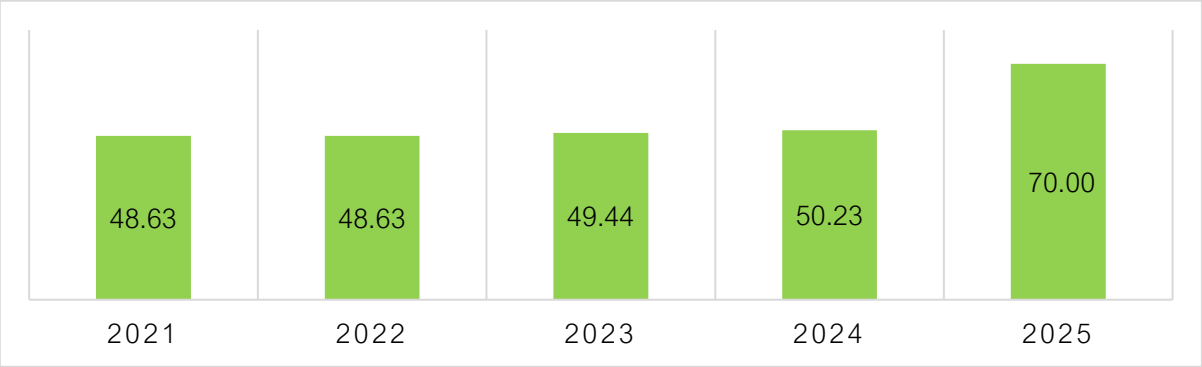
e. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010 penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Perhitungan

IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Asumsi yang digunakan dalam perhitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administrasinya.

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif. Pada tahun 2021 dan 2022, IKTL tercatat angka yang sama sebesar 48,63 poin, kemudian mengalami tren positif 3 tahun berturut-turut dari 2023 sampai dengan puncaknya di tahun 2025 dengan poin 70,00.

Grafik 2.153
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

f. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH D Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk mendorong kegiatan dan/atau usaha agar tertib administrasi, sehingga memudahkan proses pengawasan dan pembinaan yang diperlukan intervensi dari pemerintah. Adapun sepanjang tahun 2021-2025, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 35 usaha/kegiatan setiap tahunnya. Capaian ini sejalan dengan target tahunan yang diharapkan mampu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 35 usaha/kegiatan.

g. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

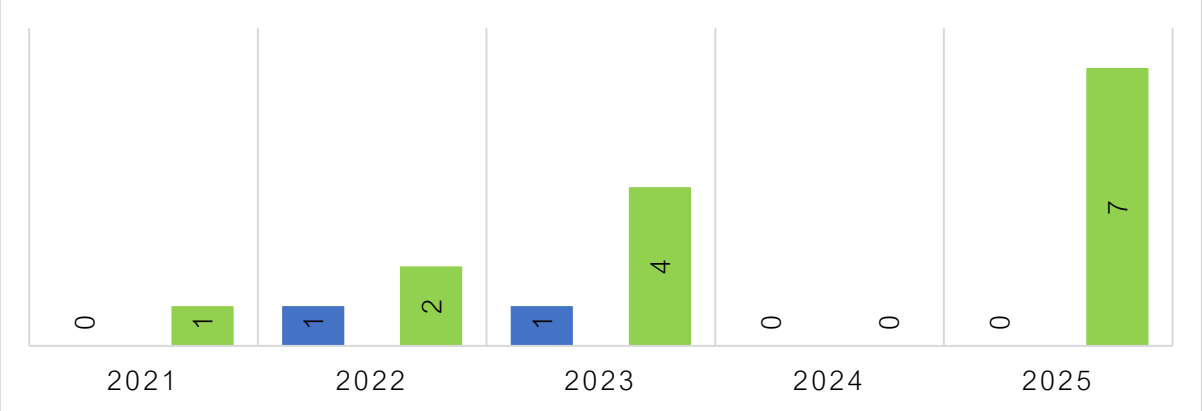
Pemberian penghargaan lingkungan hidup bertujuan untuk mendorong dan memotivasi serta mengapresiasi insan individu, kelompok, maupun instansi dalam berkontribusi menjaga dan memajukan lingkungan hidup. Adapun penghargaan lingkungan hidup ini terdiri dari Penghargaan Adipura dan Penghargaan Adiwiyata.

Penghargaan Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Sementara itu,

Penghargaan Adiwiyata merupakan penghargaan yang diberikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup melalui penerapan perilaku ramah lingkungan hidup oleh warga sekolah dan berhasil meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah, lingkungan sekitarnya, dan daerah.

Untuk Penghargaan Adipura, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengikut pada surat dari Kementerian Lingkungan Hidup untukTahun 2021 target pemberian Penghargaan Adiwiyata 15 sekolah namun hanya satu sekolah saja yang siap untuk mengikuti penilaian, hal ini disebabkan oleh terlambatnya penerbitan surat terkait penilaian Penghargaan Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup yakni bulan Nopember 2021. Di tahun 2022, angka ini mengalami kenaikan menjadi 2 sekolah. Tahun 2023, Kabupaten Sidenreng berhasil melakukan penghargaan adipura sebanyak 1 kali namun tidak ada Penghargaan Adiwiyata. Di tahun 2024-2025 tidak ada penghargaan adipura, namun terdapat 4 sekolah dengan penghargaan Adiwiyata di tahun 2024 dan mengalami peningkatan di tahun 2025 sebanyak 7 sekolah.

Grafik 2.154
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup (Adipura) dan Adiwiyata Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

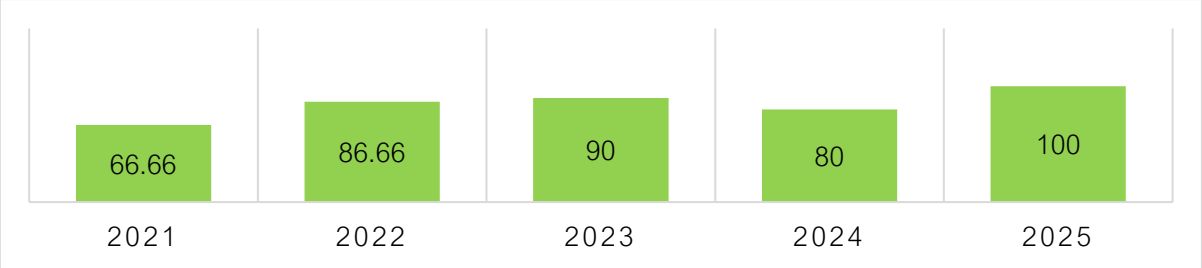


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

h. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami peningkatan selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 persentase berada pada angka 66,66%, kemudian meningkat menjadi 86,66% pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 90% pada tahun 2023. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 80%, capaian tersebut kembali meningkat secara signifikan hingga mencapai 100% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun ke tahun.

Grafik 2.155
Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

i. Timbulan Sampah yang Ditangani

Sampah selalu menjadi persoalan klasik yang muncul sebagai akibat dari adanya residual dari berbagai kegiatan individu maupun kelompok. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah melalui berbagai program dan himbauan guna menciptakan lingkungan yang asri, bersih, dan nyaman. Sepanjang tahun 2021-2025, jumlah timbulan sampah yang ditangani mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2021, persentase sampah yang ditangani mencapai 55,5 persen, dan meningkat signifikan hingga 74 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023, mencatat penurunan tajam menjadi 47,80 persen sebelum kembali meningkat hingga mencapai 74,88 persen pada tahun 2025.

Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya peningkatan sarana dan prasarana, optimalisasi penerapan program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*), serta pengembangan teknologi dan keterampilan sumber daya manusia di bidang pengelolaan sampah.

Grafik 2.156
Timbulan Sampah yang Ditangani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



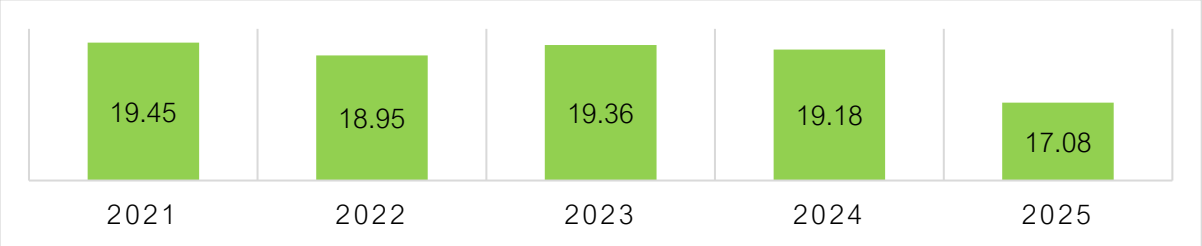
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

j. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangan Melalui 3R

Dalam upaya mengurangi jumlah sampah, program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) terus dioptimalkan untuk meminimalisir limbah kotor. Persentase capaian pengelolaan sampah melalui program 3R menunjukkan tren fluktuatif sepanjang tahun 2021-2025. Pada tahun 2021, capaian pengelolaan sampah melalui program 3R mencapai 19,45 persen.

Persentase ini naik turun hingga mencapai angka terendah di tahun 2025 dengan nilai 17,08 persen. Dalam rangka mengurangi jumlah sampah yang ada, program 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) harus terus dioptimalkan sehingga persoalan sampah yang cenderung menghasilkan limbah kotor dapat diminimalisir.

Grafik 2.157
Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

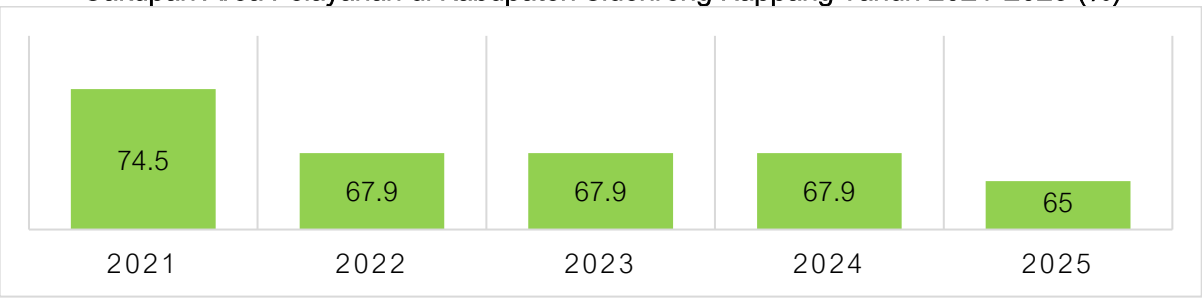


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

k. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Cakupan area pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021–2025 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021, cakupan area pelayanan tercatat sebesar 74,5%, kemudian menurun menjadi 67,9% pada tahun 2022 dan tetap berada pada angka yang sama hingga tahun 2024. Pada tahun 2025, persentase kembali mengalami penurunan menjadi 65%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa cakupan pelayanan belum mengalami perluasan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga diperlukan upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan agar jangkauan layanan dapat lebih optimal di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Grafik 2.158
Cakupan Area Pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



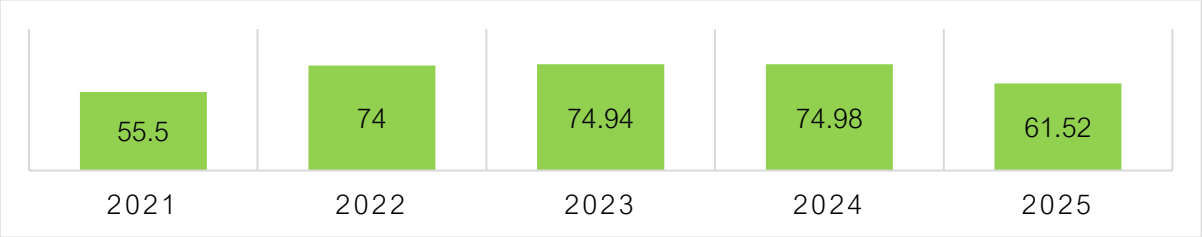
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

l. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021–2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, persentase sampah yang tertangani sebesar 55,5%, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 74% pada tahun 2022. Peningkatan masih berlanjut pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian masing-masing sebesar 74,94% dan 74,98%, yang menunjukkan kestabilan kinerja penanganan sampah dalam dua tahun tersebut. Namun, pada tahun 2025 persentase mengalami

penurunan menjadi 61,52%. Meskipun demikian, capaian tahun 2025 masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, sehingga secara umum menunjukkan adanya upaya peningkatan penanganan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam beberapa tahun terakhir.

Grafik 2.159
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

m. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Tempat pembuangan sampah menjadi sangat penting untuk pengelolaan sampah akhir secara terpadu yang terkumpul dari berbagai tempat dan menjadi salah satu aspek penilaian piala adipura sudah sesuai dengan program. Untuk mendapatkan piala adipura, nilainya harus lebih besar atau sama dengan 71. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021–2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 capaian berada pada angka 71, kemudian meningkat signifikan menjadi 80 pada tahun 2022. Setelah itu, nilai mengalami penurunan menjadi 74 pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 71 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, capaian kembali meningkat menjadi 74,88. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan operasional fasilitas persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun secara umum tetap berada pada tingkat capaian yang cukup baik dalam mendukung pengelolaan sampah daerah.

Grafik 2.160
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

5. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

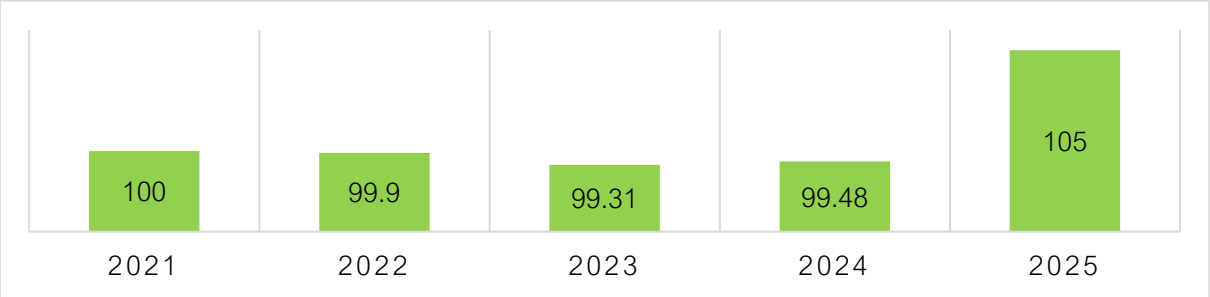
a. Persentase Penduduk Ber-KTP

Dokumen administrasi kependudukan seperti KTP harus dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tanpa adanya dokumen ini, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam

menggunakan berbagai layanan publik seperti kesehatan, perbankan, pendidikan dan lainnya.

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Sidenreng Rappang telah menunjukkan tren yang stabil dalam persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada tahun 2021, persentase penduduk yang ber-KTP tercatat sebesar 100 persen. Mengalami sedikit penurunan di 3 tahun berikutnya dengan angka terendah berada pada tahun 2023 di angka 99,31. Pada tahun 2024 angkanya sedikit naik di 99,48 persen disusul dengan kenaikan yang pesat di tahun 2025 di angka 105 persen, yang merupakan capaian tertinggi pada 5 tahun terakhir.

Grafik 2.161
Persentase Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk Di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

b. Persentase Penduduk Umur 0 – 17 tahun dengan Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah surat tanda bukti kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil tiap daerah, bukan surat keterangan lahir dari rumah sakit/dokter/bidan/kelurahan. Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Akta kelahiran digunakan untuk menghitung banyaknya bayi yang memiliki akta kelahiran sebelum melewati masa umur yang dianggap sebagai anak dan dapat memasuki dunia kerja maupun usia pernikahan. Kepemilikan akta tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat. Pengukuran indikator ini didasari oleh pemikiran bahwa pencatatan kelahiran anak dalam bentuk akta kelahiran adalah langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum, melindungi hak-haknya dan memastikan bahwa kelalaian dalam hak ini tidak terjadi. Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran. Ketika sudah dewasa, akta kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

Selama lima tahun terakhir, persentase penduduk usia 0-17 tahun berakta kelahiran di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021, persentase penduduk 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran tercatat sebesar 98 persen. Angka ini meningkat secara konsisten setiap tahunnya, dan mencapai 98,2 persen pada tahun 2025. Hal ini berarti dari setiap 100 bayi yang baru lahir, 98 orang diantaranya sudah memiliki akta kelahiran. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya pendataan dan pembuatan dokumen resmi penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.53
Presentase Penduduk Usia 0-17 Tahun yang Memiliki Akte Kelahiran

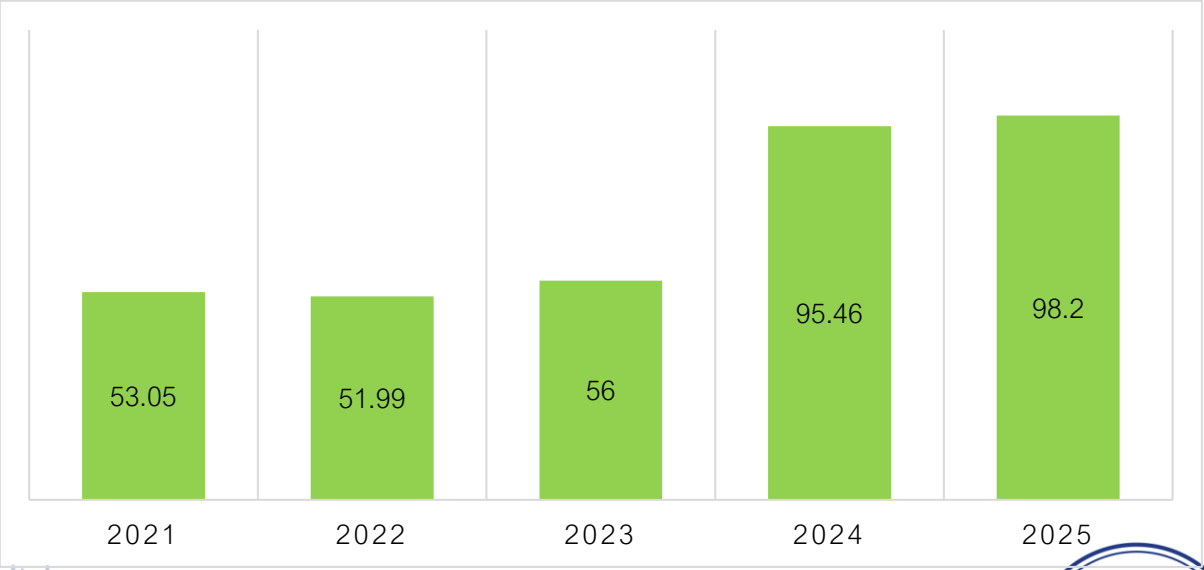
Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran	%	98	93,03	95,56	95,46	98,2

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

c. Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran

Sama halnya KTP, semua warga negara yang lahir dan memenuhi syarat seharusnya semuanya telah mendapatkan akta kelahiran. Namun, faktanya masih ada bayi lahir di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa akta kelahiran. Tahun 2021 penduduk yang memilki akta kelahiran hanya 53,05 persen. Di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 51,99 persen namun disusul dengan tren positif 3 tahun berturut-turut dengan puncaknya pada tahun 2025 di angka 98,2 persen yang merupakan angka tertinggi selama 5 tahun terakhir. Dari data tersebut, terlihat bahwa usaha pemerintah dalam percepatan perekaman data telah memberikan hasil yang signifikan.

Grafik 2.162
Penduduk yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas pelayanan publik di wilayah pedesaan. Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran yang didukung dari sumber daya manusia serta kelembagaan yang baik, diharapkan dapat menjadi motor penggerak perbaikan pelayanan di wilayah perdesaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahun terakhir, cakupan sarana dan prasarana perkantoran desa mencatatkan capaian yang baik yaitu 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah memiliki sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan berkondisi baik.

a. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, PKK merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan yang menjadi mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Adapun rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang tahun 2021-2025 adalah 106 kelompok. Hal ini berarti secara rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami perkembangan selama lima tahun terakhir.

b. Persentase PKK Aktif

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai peran dalam mengembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Dari tahun 2021-2025, seluruh PKK di Kabupaten Sidenreng Rappang aktif melakukan kegiatan keorganisasiannya. Hal ini ditunjukkan oleh persentase PKK yang aktif mencatatkan angka 100 persen. Ini menjelaskan bahwa perempuan aktif dalam mengekspresikan kemampuannya dalam memimpin organisasi, menjalin hubungan sosial sesama anggota, berkreatif dan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

c. Persentase Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam

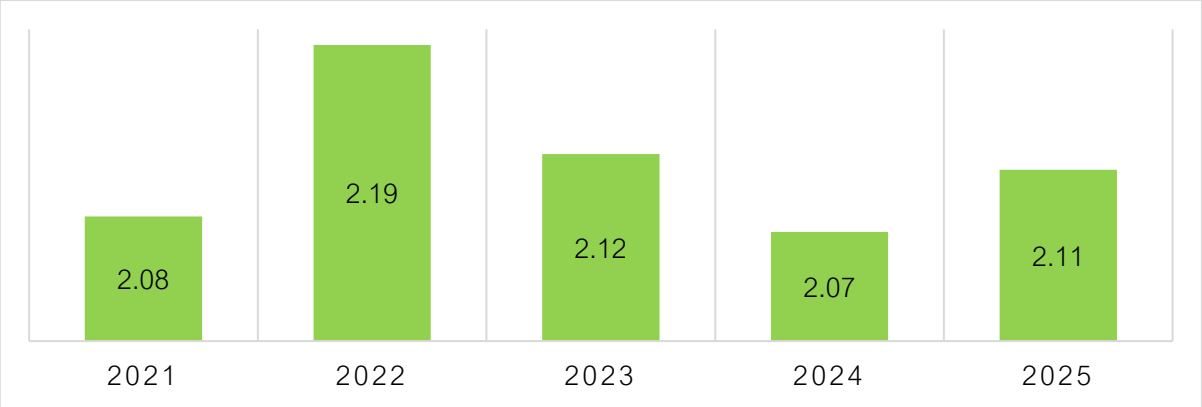
penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat di desa/kelurahan dan dikelola oleh Pengelola Posyandu, yang dikukuhkan dengan keputusan kepala desa/lurah. Pada tahun 2021-2025, persentase posyandu yang aktif telah mencapai angka 100 persen.

7. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

a. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan istilah yang digunakan di bidang demografi untuk menggambarkan jumlah rata-rata anak yang akan terlahir dari seorang wanita sepanjang hidupnya bila ia akan mengalami tingkat kesuburan spesifik usia terkini yang pasti dan ia akan selamat dari kelahiran sepanjang usia reproduktifnya. TFR di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pola yang sejalan dengan tren pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, TFR sebesar 2,08 persen, meningkat diangka 2,19 persen di tahun 2022 namun mengalami penurunan 2 tahun berturut-turut dengan angka terendah di 2,07 pada tahun 2024. Tahun 2025 kembali meningkat menjadi 2,11 persen.

Grafik 2.163
Total Fertility Rate Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%)

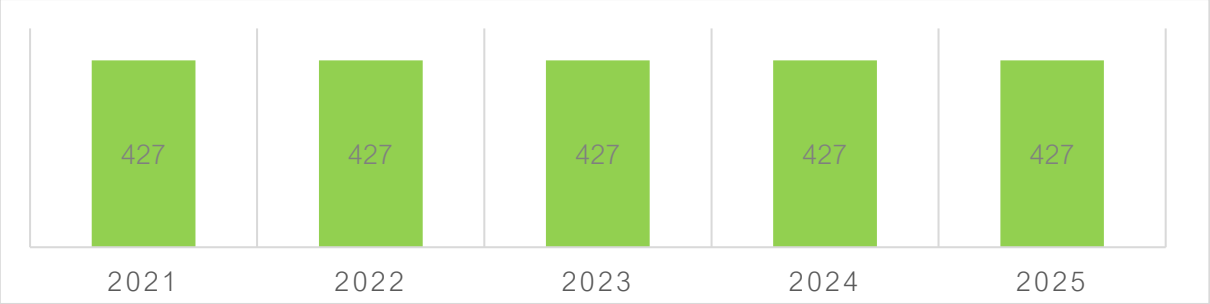


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

b. Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, NonFormal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Selain aspek koordinasi, regulasi, dan peran sektoral, peran penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan juga diperlukan untuk mendukung pengendalian penduduk. Dari Tahun 2021-2025, jumlah kerjasama penyelengaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan rata-rata sebesar 427 Kelompok. Dalam lima tahun tersebut, jumlah kerjasama tersebut tidak mengalami perubahan, hal ini mengindikasikan masih banyak sekolah siaga kependudukan (SSK) yang belum aktif.

Grafik 2.164
Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, NonFormal, dan Informal yang Melakukan Pendidikan KependudukanKabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Kelompok)

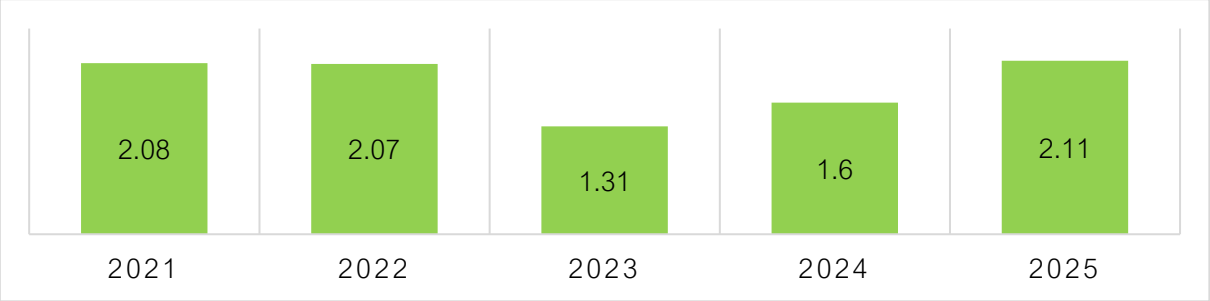


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

c. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pola yang berfluktuasi selama periode 2021–2025. Capaian menurun dari 2,08 anak per keluarga pada tahun 2021 menjadi 2,07 pada tahun 2022, kemudian turun tajam menjadi 1,31 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 1,60 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, rata-rata kembali meningkat hingga mencapai 2,11 anak per keluarga, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Perubahan yang cukup tajam, khususnya pada 2023–2025, menunjukkan bahwa dinamika jumlah anak per keluarga belum stabil. Kenaikan pada tahun 2025 juga perlu dicermati karena telah melampaui angka dua anak per keluarga, sehingga diperlukan penguatan program keluarga berencana dan edukasi perencanaan keluarga untuk menjaga tingkat fertilitas tetap terkendali.

Grafik 2.1655
Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

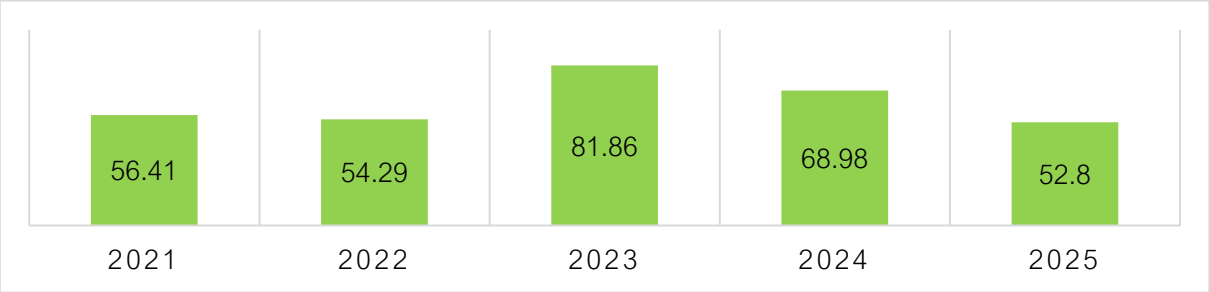
d. Ratio Akseptor KB

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti program gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi menjadi tiga fase yaitu fase menunda atau mencegah, fase penjarangan kehamilan, dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan.

Rasio akseptor KB di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode 2021–2025. Capaian menurun dari 56,41% pada tahun 2021

menjadi 54,29% pada tahun 2022, kemudian meningkat signifikan hingga mencapai 81,86% pada tahun 2023. Setelah itu, rasio kembali menurun menjadi 68,98% pada tahun 2024 dan 52,80% pada tahun 2025. Penurunan selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi dalam program KB belum dapat dipertahankan secara konsisten, sehingga diperlukan penguatan sosialisasi, akses pelayanan, serta pendampingan peserta KB untuk menjaga keberlanjutan partisipasi masyarakat.

Grafik 2.1666
Ratio Akseptor KB di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

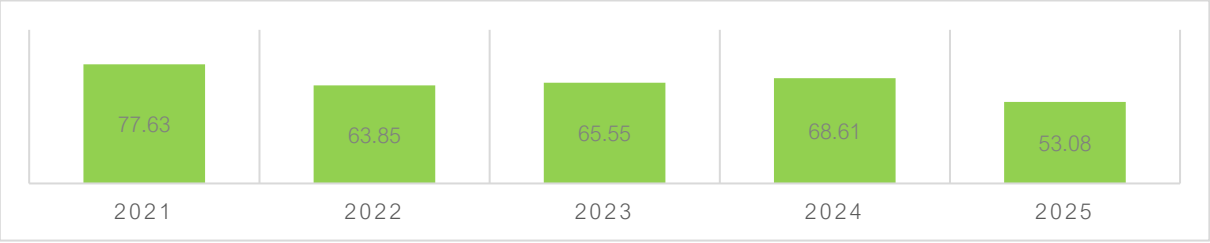


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

e. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagu Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Kontrasepsi Kontrasepsi merupakan salah satu upaya pengaturan kelahiran melalui metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya, perencanaan, pembekalan, dan penggunaan kontrasepsi disebut sebagai keluarga berencana.

Grafik 2.1677
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49
Di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

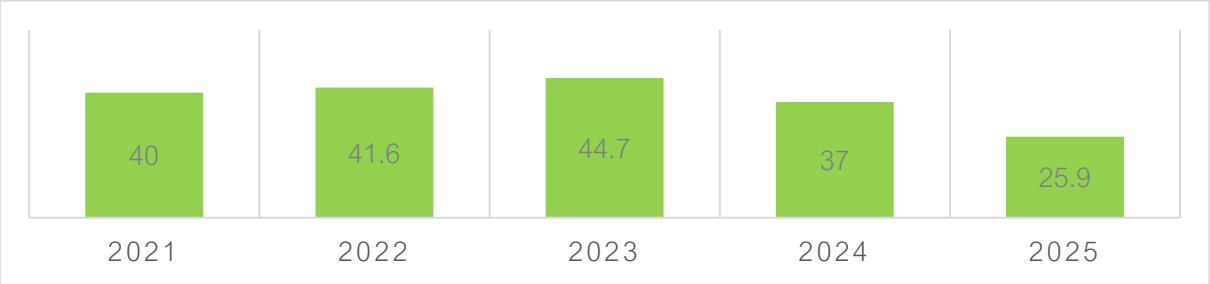
Dalam lima tahun terakhir, angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 menunjukkan tren penurunan, sebesar 77,63 persen di tahun 2021 menjadi 53,08 persen di tahun 2025. Angka ini belum mencapai target yang ditentukan sebesar 80,00 persen. Jumlah pemakai kontrasepsi/CPR diharapkan akan semakin meningkat sehingga akan berdampak terhadap pengendalian penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang.

f. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 – 19) per 1.000 Perempuan Usia 15 – 19 Tahun (AFR 15 – 19)

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 yang dipublikasikan tahun 2018 memperlihatkan, jumlah kelahiran remaja di Indonesia masih di angka 36 per 1.000

kelahiran. Artinya, dari 1.000 perempuan yang melahirkan, 36 di antaranya berusia di bawah 19 tahun. Perkawinan dini menyumbang tingginya kelahiran pada remaja, dan angka stunting atau balita pendek akibat gizi kronis. Angka kelahiran remaja di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2021, angka kelahiran remaja tercatat sebesar 40 per 1000 kelahiran, mengalami penurunan hingga mencapai 25,9 kelahiran per 10000 kelahiran di tahun 2025. Masih diperlukan sosialisasi tentang risiko perkawinan dini dan melahirkan di usia remaja masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kemampuan merencanakan masa depan termasuk saat berkeluarga, hamil, dan mengurus anak juga perlu disosialisasikan.

Grafik 2.1688
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun (ASFR 15–19) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)

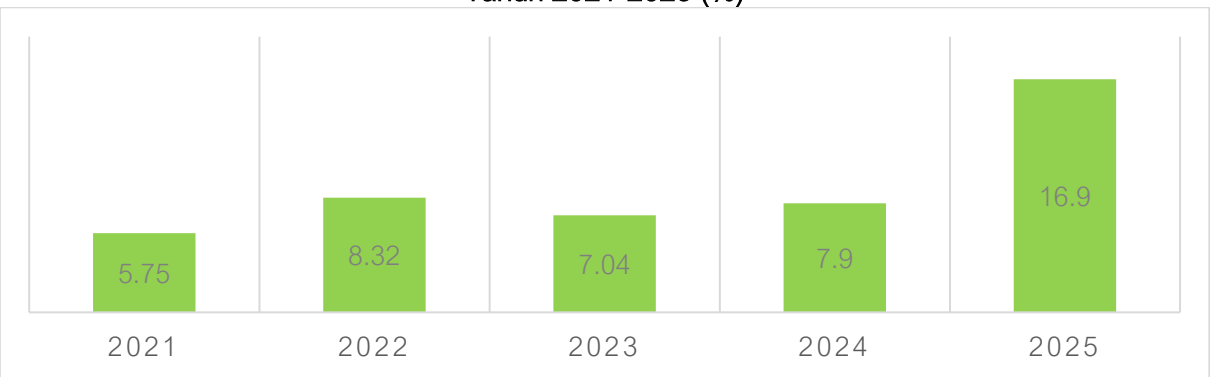


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

g. Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi atau yang lebih dikenal melalui istilah *Unmet Need* merupakan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kondisi mengindikasikan keinginan PUS terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi.

Grafik 2.1699
Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi *(Unmet Need)* Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

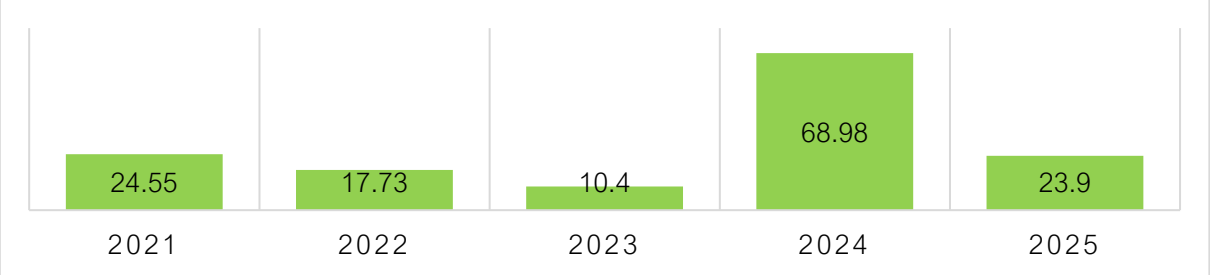
Dalam lima tahun terakhir, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi menunjukkan tren fluktuatif. Angka tertinggi berada pada tahun 2025 di 16,9% yang merupakan angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

h. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping lebih sedikit.

Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Capaian menurun dari 24,55% pada tahun 2021 menjadi 17,73% pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 10,40% pada tahun 2023, kemudian meningkat sangat signifikan menjadi 68,98% pada tahun 2024 sebelum kembali menurun menjadi 23,90% pada tahun 2025. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program MKJP belum berjalan secara konsisten. Penurunan capaian pada 2022–2023 dapat menjadi indikasi belum optimalnya jangkauan pelayanan dan sosialisasi kepada pasangan usia subur, sedangkan lonjakan pada 2024 menunjukkan adanya penguatan intervensi atau intensifikasi pelayanan KB. Namun, penurunan kembali pada 2025 mengindikasikan bahwa keberhasilan tersebut belum dapat dipertahankan secara berkelanjutan, sehingga diperlukan evaluasi terhadap kesinambungan program, efektivitas promosi penggunaan MKJP, serta kualitas pelayanan dan pendataan untuk menjaga stabilitas capaian pada tahun-tahun berikutnya.

Grafik 2.17070
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

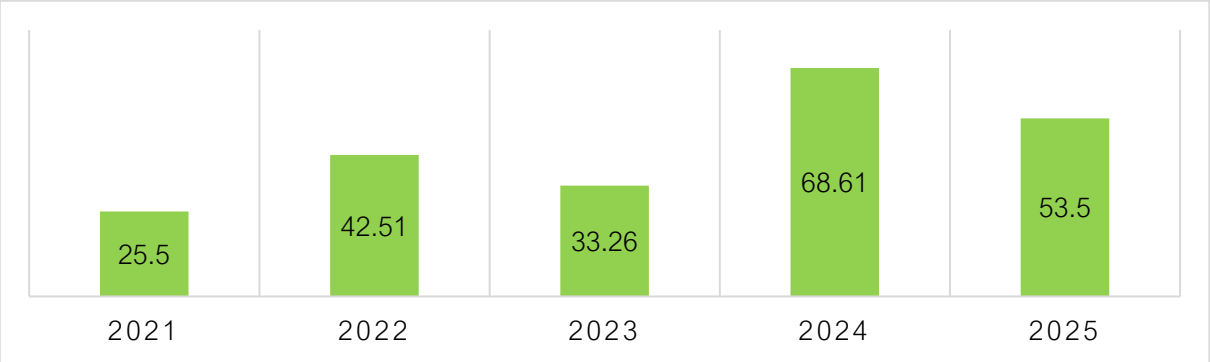
i. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi menjadi indikator pengendalian penduduk dari sisi pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat tertentu. Semakin tinggi tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi diharapkan akan semakin mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang.

Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan pola fluktuatif selama periode 2021–2025. Capaian meningkat dari 25,50% pada tahun 2021 menjadi 42,51% pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 33,26% pada tahun 2023 sebelum meningkat tajam hingga 68,61% pada tahun 2024.

Pada tahun 2025, capaian kembali menurun menjadi 53,50%. Penurunan ini menunjukkan bahwa peningkatan keberlangsungan penggunaan kontrasepsi belum dapat dipertahankan secara konsisten, sehingga diperlukan penguatan konseling, pendampingan peserta, serta akses dan kualitas pelayanan KB untuk mencegah terjadinya putus pakai kontrasepsi.

Grafik 2.1711
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)

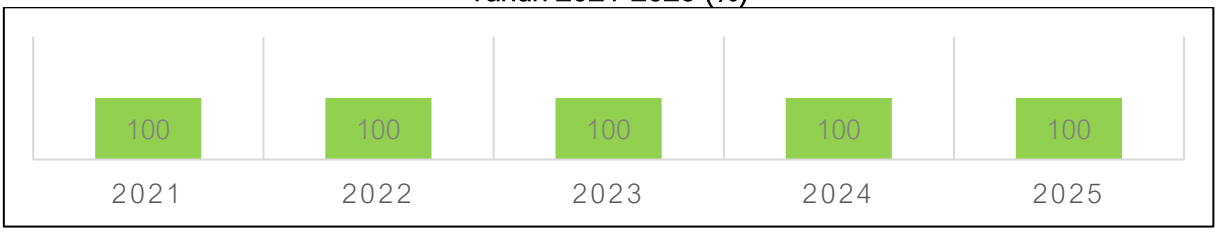


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

j. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

BKB adalah kegiatan khusus yang mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilakukan oleh sejumlah kader. BKB menyasar dalam peningkatan pengetahuan serta keterampilan dalam mengasuh anak. Secara umum, seluruh jumlah anggota kelompok BKB di Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan KB. Hal ini ditunjukkan oleh angka cakupan anggota BKB yang ber-KB dari tahun 2021-2025 mencatatkan angka 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan anggota terkait dengan pengendalian penduduk.

Grafik 2.1722
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



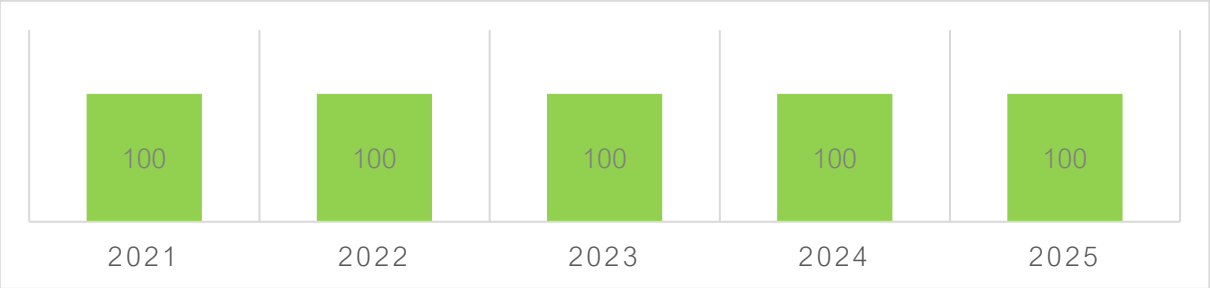
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

k. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

BKR merupakan program yang ditujukan bagi keluarga yang memiliki anak remaja sebagai wadah dan sumber informasi bagi orangtua untuk memperoleh pengetahuan tentang remaja. BKR menjadi salah satu indikator penting terutama bagi pendidikan dan

pengetahuan orang tua yang memiliki anak remaja. Secara umum, seluruh jumlah anggota kelompok BKR di Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan KB. Hal ini ditunjukkan oleh angka cakupan anggota BKR yang ber-KB tercatat sebesar 100 persen pada tahun 2021-2025. Hal ini menunjukkan peningkatan pengetahuan anggota BKR terkait dengan pengendalian penduduk.

Grafik 2.1733
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)

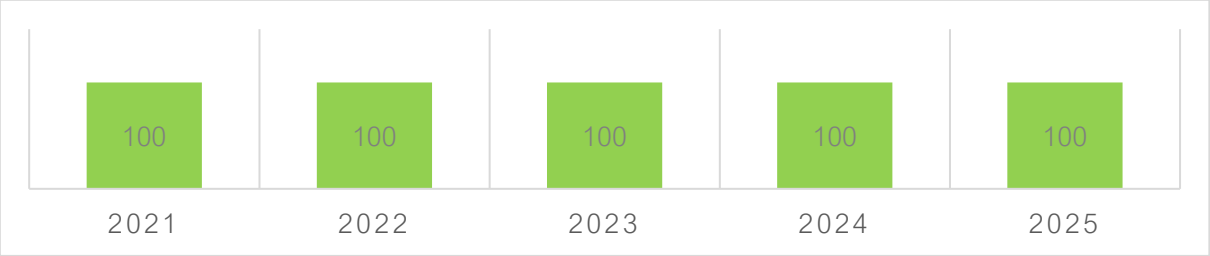


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

l. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah Kelompok Kegiatan Keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia, dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Sama halnya dengan BKB dan BKR, anggota BKL di Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan melakukan KB. Hal ini ditunjukkan oleh cakupan BKL yang ber-KB mencatatkan angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok Bina Keluarga yang dibentuk di Kabupaten Sidenreng Rappang mampu meningkatkan pengetahuan anggotanya terkait pentingnya KB untuk pengendalian penduduk.

Grafik 2.1744
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



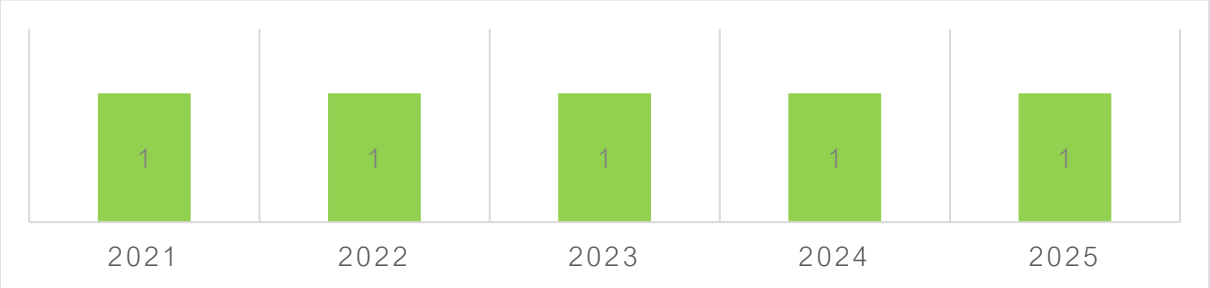
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

m. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

PPKS merupakan wadah kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), konseling, bimbingan dan fasilitasi pembentukan wadah KIE dan konseling langsung pada keluarga yang berbasis untuk menuju keluarga berkualitas.

Adapun (PPKS) di setiap kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang 2021-2025 masih mencapai 1 tempat saja. Ke depan, PPKS harus didorong untuk lebih banyak sehingga akan semakin banyak keluarga terlayani KIE dan konseling dan pada akhirnya akan berdampak terhadap pembangunan keluarga yang berkualitas.

Grafik 2.175
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025 (%)

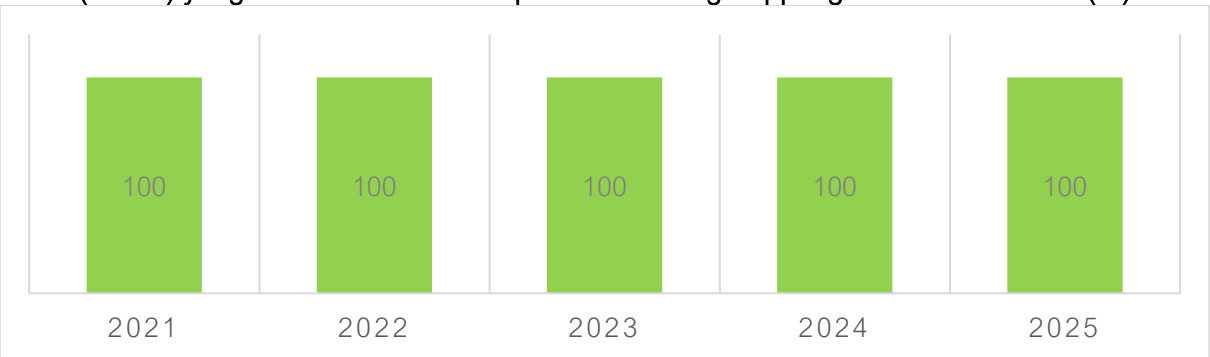


Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

n. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (IPPKS) yang ber-KB Mandiri

UPPKS merupakan kelompok usaha ekonomi produtif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera baik pasangan usia subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan. Adapun cakupan sebagaimana dimaksud di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2021-2025 mencatatkan angka 100 persen. Artinya seluruh anggota UPPKS melakukan KB secara mandiri selama lima tahun terakhir.

Grafik 2.176
Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (IPPKS) yang ber-KB Mandiri Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



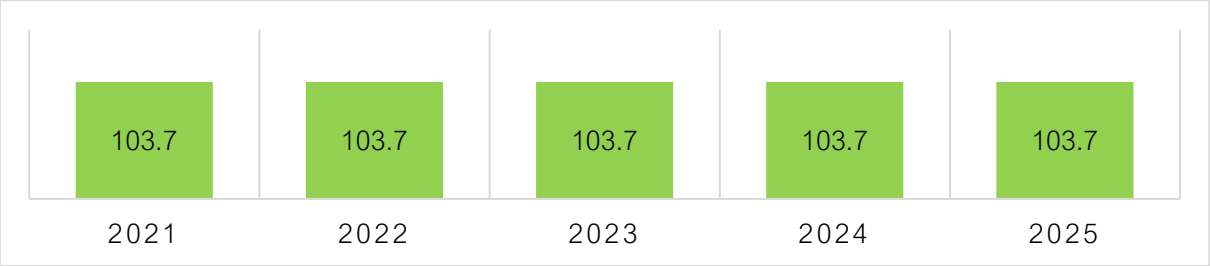
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

o. Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

PPKBD adalah merupakan perpanjangan tangan dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam menyampaikan informasi ke masyarakat luas. PPKBD adalah kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program KB di tingkat desa

atau kelurahan. Adapun rasio petugas PPKBD di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2021-2025 tercatat sebesar 103,7 atau 104. Artinya dari total desa atau kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 104 PPKBD yang tersebar.

Grafik 2.177
Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



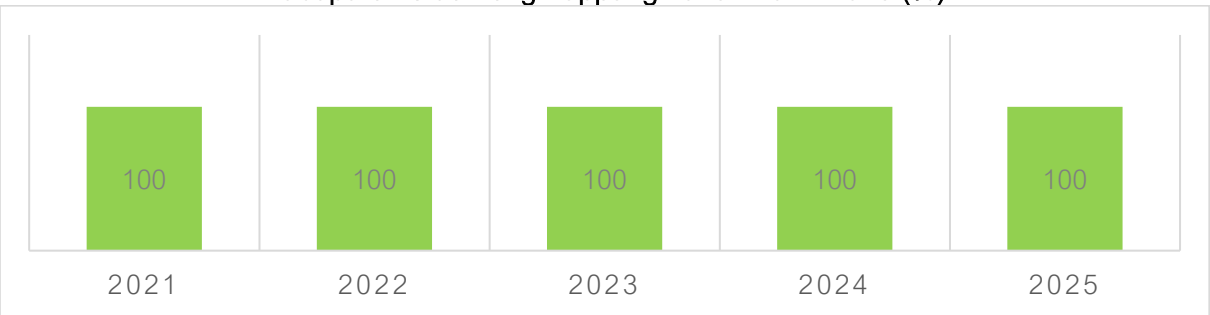
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

p. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Fasilitas kesehatan adalah fasilitas yang disiapkan kepada masyarakat untuk berobat. Adapun persentase faskes dan jejaringnya yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan menunjukkan tren meningkat dalam lima tahun terakhir. Selama periode tahun 2021-2025 persentase faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan di Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai angka 100 persen.

Capaian di tahun 2025 sudah memenuhi target yang ditentukan sebesar 100 persen. Artinya jejaring faskes sudah semuanya bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.

Grafik 2.178
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



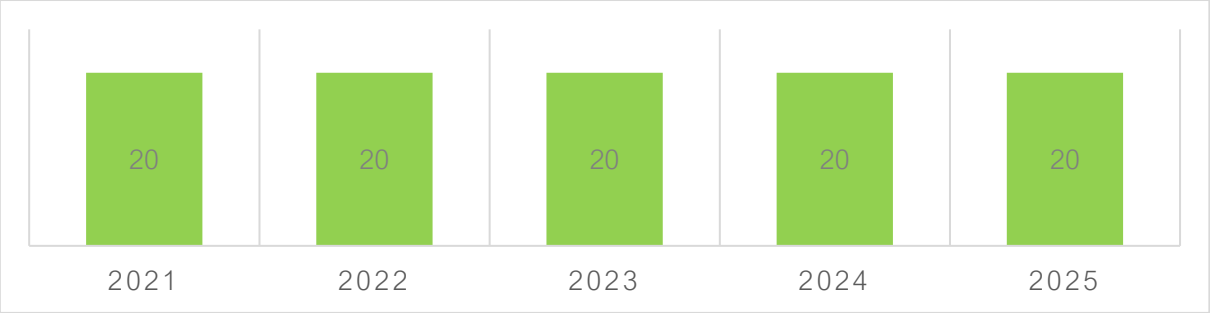
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

q. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Umur Rata-rata usia kawin pertama wanita dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tercatat sebesar 20 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa usia perkawinan pertama

perempuan masih berada pada usia muda sehingga perlu adanya peningkatan edukasi dan pendampingan terkait pendewasaan usia perkawinan. Upaya tersebut penting untuk mendukung kesehatan reproduksi, kesiapan ekonomi keluarga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Grafik 2.179
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



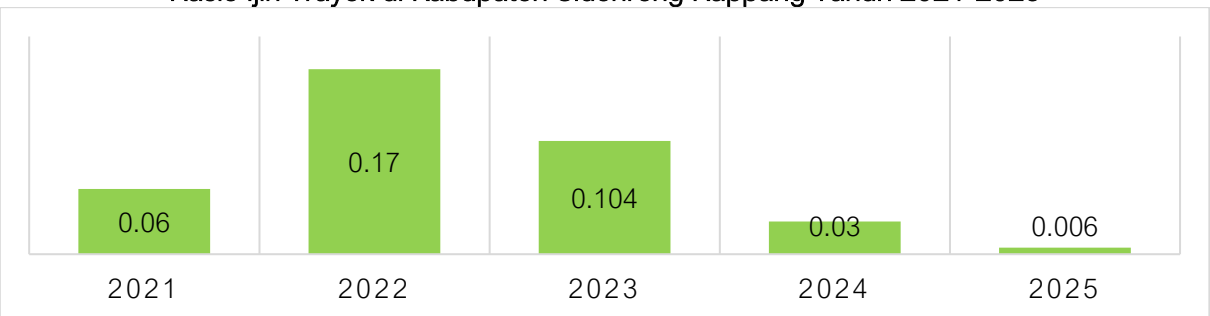
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

8. Urusan Perhubungan

a. Rasio Ijin Trayek

Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Rasio ijin trayek menunjukkan perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2021 rasio ijin trayek tercatat sebesar 0,06, kemudian naik menjadi 0,17 pada tahun 2022 lalu turun kembali di angka 0,104 pada tahun 2023. Angka tersebut terus turun di 2 tahun berikutnya dengan angka terendah pada tahun 2025 di 0,006. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang semakin pesat menjadi sebab kurangnya penumpang yang berdampak pada semakin berkurangnya armada angkutan umum.

Grafik 2.180
Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

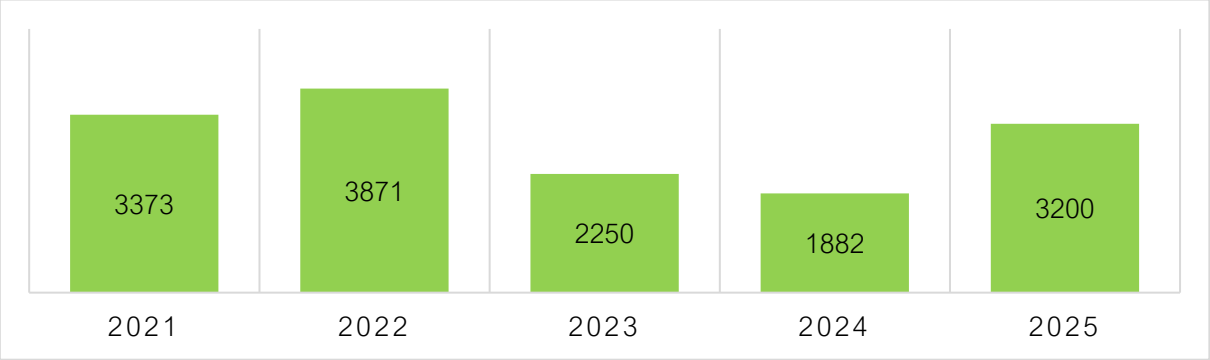
b. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Setiap mobil berpenumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan diharuskan melakukan dua pengujian yaitu uji tipe dan uji KIR atau dikenal dengan istilah uji berkala. Tujuannya adalah agar kendaraan yang

dimaksud tersebut bisa berfungsi dengan baik ketika dijalan sehingga mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keharusan untuk melakukan uji berkala tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan Permenhub No. 133 tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Uji Kir yang dimaksud adalah pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor dan pengesahan hasil uji dilakukan sekali dalam enam bulan.

Dalam Dalam lima tahun terakhir, jumlah kendaraan umum yang melakukan Uji KIR di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi. Tahun 2021 sebanyak 3.373 kendaraan umum telah melakukan pengujian. Di tahun 2022, angka ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 3871 kendaraan yang di uji KIR. Tahun 2023, jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR hanya sebanyak 2.250 kendaraan, dan penurunan berlanjut pada tahun 2024 dengan hanya 1882 kendaraan. Tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 3200 kendaraan.

Grafik 2.181
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025
(Kendaraan)



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

c. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Selain jalan, berbagai infrastruktur dasar juga dibutuhkan untuk memperlancar perpindahan barang dan manusia seperti pelabuhan laut, bandar udara, dan terminal bus. Perpindahan barang dan manusia merupakan parameter penting untuk melihat intensitas perdagangan dan aktivitas ekonomi disebuah daerah. Itu sebabnya daerah yang aktivitas ekonominya sangat pada (seperti misalnya Kota Makassar) pasti memiliki infrastruktur pendukung tersebut.

Berbeda dengan Kota Makassar yang memang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan intensitas kegiatan ekonominya masih relatif rendah tidak memiliki semua infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan bandar udara. Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memiliki satu terminal bus dan jumlahnya tidak pernah berubah dalam lima tahun terakhir. Ini mengidikasikan bahwa perpindahan barang dari luar daerah ke Kabupaten Sidenreng

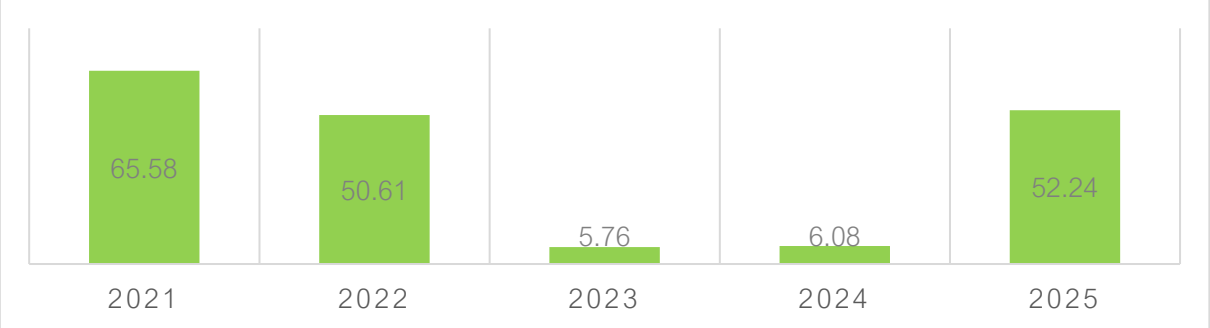
Rappang masih mengandalkan beberapa pelabuhan yang ada di daerah lain atau bandara yang berada di Kota Makassar.

d. Persentase Layanan Angkutan Darat

Pertumbuhan penduduk yang pesat membawa banyak implikasi terhadap banyak sektor, salah satunya transportasi. Transportasi merupakan instrumen fundamental untuk mendukung mobilitas penduduk, terutama mendukung kegiatan ekonomi. Banyaknya jumlah penduduk dan struktur demografi harusnya berdampak pada penyesuaian terhadap moda transportasi. Misalnya di Kota Makassar, dengan jumlah penduduk yang banyak dan sebagian besar adalah usia produktif tidak lagi relevan menggunakan moda transportasi lama (misalnya angkot), mereka membutuhkan layanan transportasi yang cepat seperti transportasi online. Melihat struktur demografi dan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, seharusnya sudah terlihat penyesuaian.

Penyesuaian paling utama setidaknya adalah penambahan moda transportasi umum untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Namun sepertinya penyesuain tersebut belum begitu terlihat di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama lima tahun terakhir angka persentase layanan angkutan darat di kabupaten ini memperlihatkan fluktuasi yang signifikan. Tahun 2021 persentase layanan angkutan darat sebesar 65,58 dan menurun menjadi 50,61 persen di tahun 2022. Pada tahun 2023, mengalami penurunan drastis menjadi 5,76 persen, sedikit meningkat di tahun 2024 dengan 6,08 persen dan di tahun 2025 mengalami peningkatan yang drastis di angka 52,24. Peningkatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat .

Grafik 2.182
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



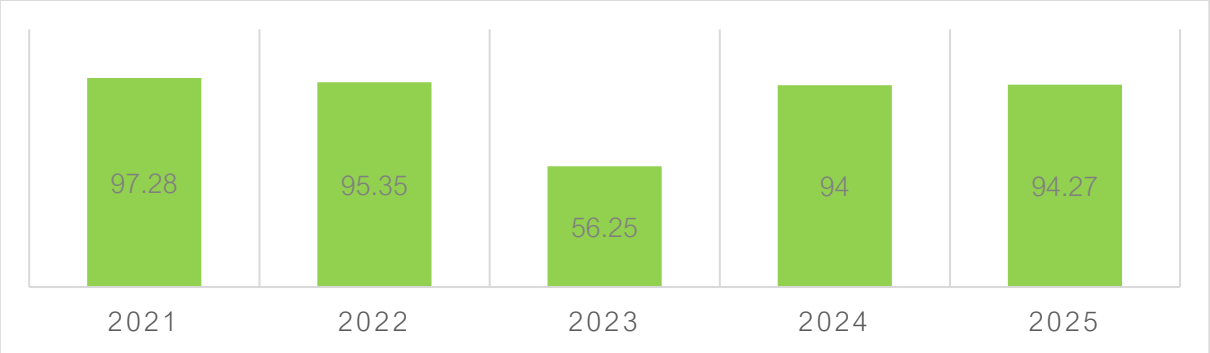
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

e. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Penurunan jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR pada bagian sebelumnya tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai ketaatan pemilik kendaraan dalam melakukan Uji Kir. Indikator tersebut harus dilengkapi dengan indikator persentase kepemilikan Kir angkutan umum, merupakan persentase kepemilikan Kir terhadap total kendaraan umum.

Tahun 2021 setelah pengujian kendaraan terakreditasi, persentase kepemilikan KIR angkutan umum meningkat dari tahun sebelumnya di angka 97,28 persen dan mengalami penurunan kembali menjadi 95,35 persen di tahun 2022. Pada tahun 2023 persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum semakin mengalami penurunan menjadi 56,25 persen, namun disusul dengan tren positif 2 tahun berturut turut hingga mencapai 94,27 presen di tahun 2025.

Grafik 2.183
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021 - 2025



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

f. Pemasangan Rambu – Rambu

Pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan bertujuan untuk memudahkan dan mengefektifkan dalam mengatur arus lalu lintas. Karena pemasangan rambu yang tepat dapat membantu para pengguna jalan yang mematuhi rambu-rambu yang berada di bagian atau sudut jalan agar lalu lintas menjadi tertib. Selama 5 tahun terakhir dari tahun 2021 sampai dengan 2025, tidak ada pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini karena kondisi *existing* rambu lalu lintas yang terpasang saat ini banyak yang rusak karena sudah melebihi umur teknis

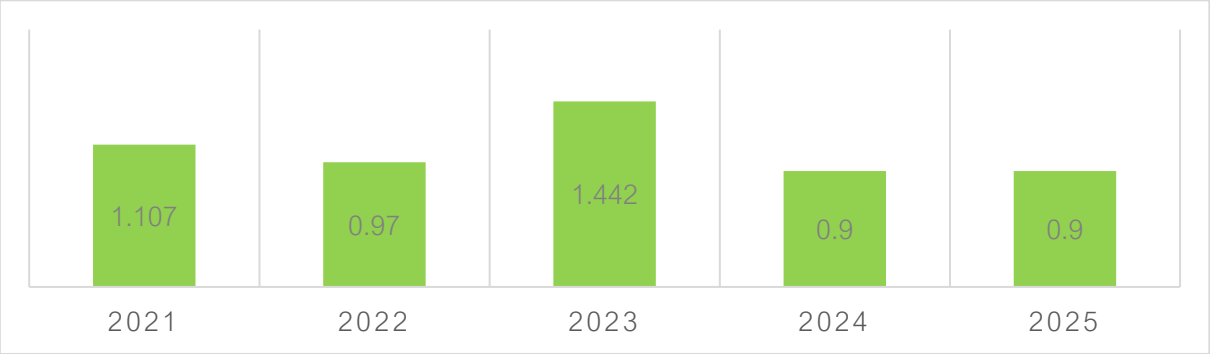
g. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan menunjukkan perbandingan antara jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Dari tahun 2021 hingga 2025 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan tercatat sebesar 1,107 persen, lalu mengalami penurunan menjadi 0,97 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami

peningkatan menjadi 1,44 persen disebabkan oleh volume kendaraan yang meningkat disetiap tahun yang tidak diimbangi dengan kapasitas jalan yang tersedia. Pada tahun 2024 lagi-lagi mengalami penurunan di angka 0,9 persen dan stagnan di tahun 2025.

Grafik 2.184
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025 (%)

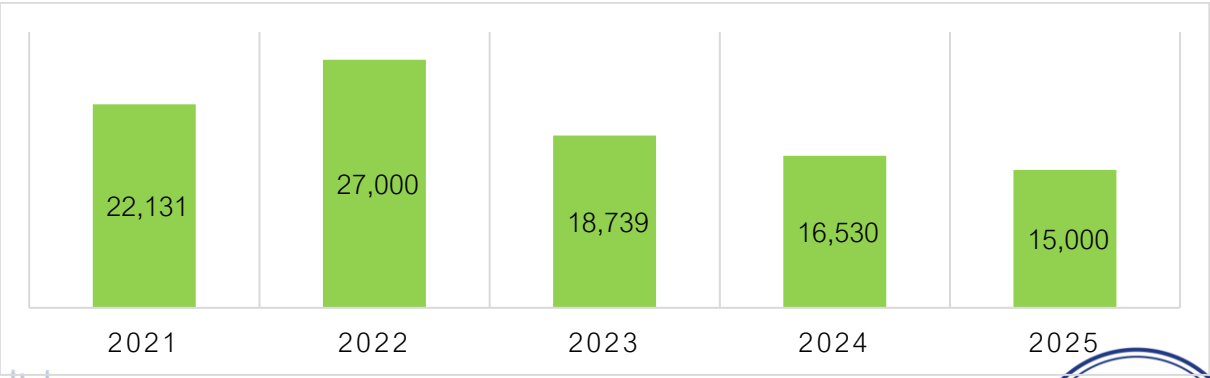


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

h. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kondisi geografis Kabupaten Sidenreng Rappang yang di dominasi oleh daratan, berimplikasi pada pemanfatan moda transportasi. Hampir semua manusia dan barang Sidenreng Rappang berpindah dengan memanfaatkan angkutan umum. Data menunjukkan, bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah orang/barang yang terangkut oleh angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren menurun. Tahun 2021, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tercatat sebesar 22.131 unit dan mengalami peningkatan menjadi 27.000 unit di tahun 2022. Namun pada 3 tahun berikutnya terjadi trend negatif dengan angka paling rendah pada tahun 2025 di 15.000 unit. Hal ini menunjukkan sarana dan prasarana transportasi yang tersedia tidak mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat akan transportasi dan semakin berkurangnya penggunaan angkutan umum karena pelayanannya yang dirasakan kurang memuaskan bagi para penumpang.

Grafik 2.185
Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



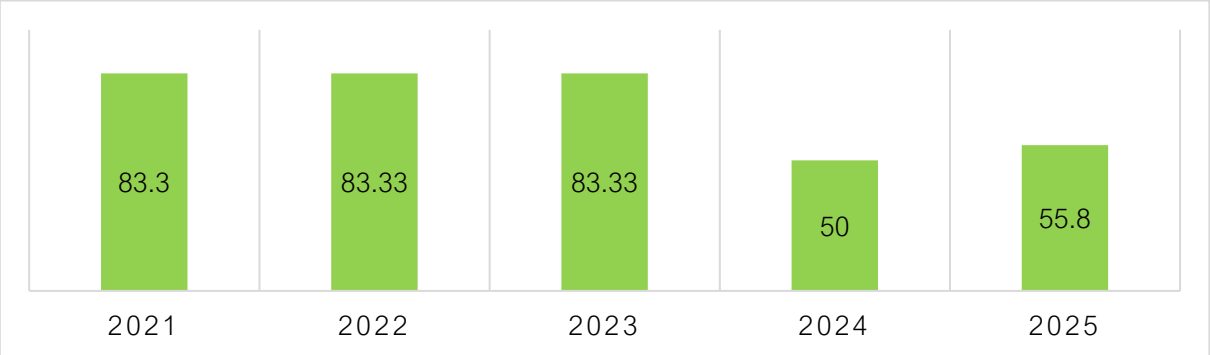
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

i. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota

Rasio konektivitas kabupaten/kota merupakan indikator yang menggambarkan tingkat keterhubungan wilayah melalui pelayanan transportasi darat dan moda transportasi lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, indikator ini penting karena mencerminkan kemudahan mobilitas masyarakat serta keterhubungan antarwilayah dan pusat-pusat kegiatan. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang menghitung rasio konektivitas berdasarkan pelayanan transportasi yang tersedia dan pembobotan konektivitas antarmoda.

Rasio konektivitas Kabupaten Sidenreng Rappang relatif stagnan pada 83,30–83,33% selama 2021–2023, tetapi kemudian turun cukup tajam menjadi 50,00% pada 2024 dan hanya sedikit membaik menjadi 55,80% pada 2025. Penurunan sekitar 27,53 poin persentase dibandingkan 2023 menunjukkan bahwa keterhubungan pelayanan transportasi mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya keterbatasan dalam cakupan pelayanan transportasi dan/atau sarana prasarana pendukung konektivitas, sehingga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan 2027. Penguatan jaringan pelayanan angkutan, peningkatan sarana dan prasarana transportasi, serta optimalisasi keterhubungan antarwilayah perlu diarahkan untuk mengembalikan rasio konektivitas dan memastikan mobilitas masyarakat maupun distribusi barang dapat berlangsung lebih efektif.

Grafik 2.186
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

9. Urusan Komunikasi Dan Informatika

a. Cakupan Pengembangan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kebutuhan informasi saat ini menjadi kebutuhan umum masyarakat selain kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Informasi yang baik akan meningkatkan pola pikir masyarakat untuk bergerak aktif terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan

salah satu indikator penting yang menunjukkan perkembangan masyarakat serta upaya memberdayakannya melalui jejaring informasi yang akurat. KIM merupakan lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

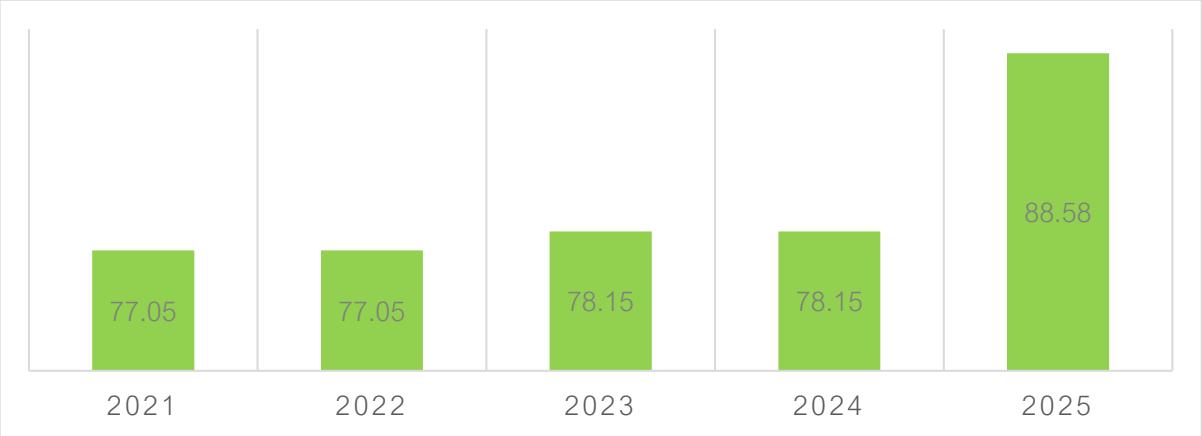
Adapun cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami perbaikan cakupan KIM mencapai 100 persen pada tahun 2021 namun untuk tahun 2022-2025 fokus pada program kegiatan

b. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Penyebaran informasi yang aktual dan akurat tidak akan terjadi tanpa adanya cakupan layanan telekomunikasi yang memadai. Berbagai kebijakan yang mendukung perluasan layanan komunikasi dilakukan untuk memastikan semua kalangan masyarakat dapat mengakses informasi sehingga akan mendorong masyarakat yang aktif dan partisipatif.

Adapun capaian cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2021-2025. Secara spesifik, mulai pada tahun 2021 cakupan layanan telekomunikasi mencapai 77,05 persen, kemudian terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 88,58 persen pada tahun 2025. Cakupan layanan komunikasi yang terus mengalami peningkatan, disebabkan adanya penambahan infrastruktur telekomonikasi sehingga hal ini dapat menambah luas jangkauan.

Grafik 2.187
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



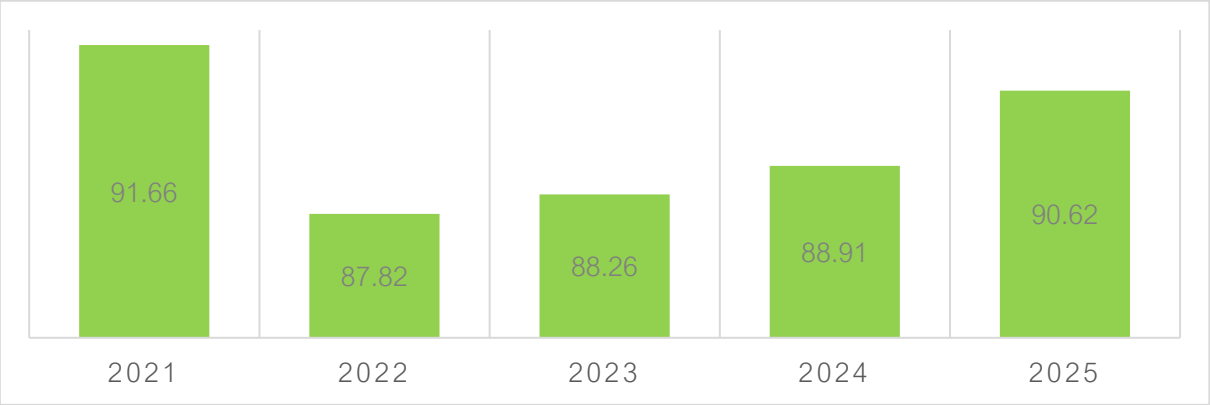
Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

c. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon

Perkembangan Informasi harus dibarengi dengan sarana prasarana yang memadai terutama akses internet. Lebih jauh, internet menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat yang sekarang bergantung pada akses informasi melalui HP/Telepon. Adanya internet akan memperkuat cakupan informasi kepada setiap lapisan masyarakat.

Namun demikian, proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2021-2025 cenderung mengalami tren fluktuatif, dari 91,66 persen di tahun 2021, turun pada tahun 2022 menjadi 87,82 persen. Tahun 2023 naik menjadi 88,26 persen dan terus membaik pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 88,91 persen dan 90,62 persen.

Grafik 2.188
Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (%)



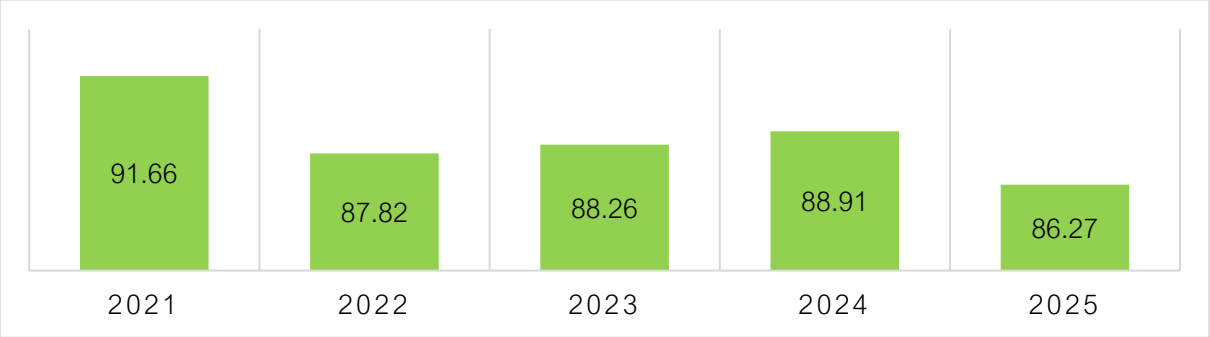
Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

d. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi

Selain media HP/Telepon dan televisi, komputer juga menjadi salah satu kebutuhan penting di era digital seperti saat ini. Hampir semua jenis pekerjaan pada membutuhkan komputer sebagai penunjang utamanya. Namun demikian, dibandingkan dengan HP/Telepon maka komputer pribadi relatif masih lebih mahal sehingga belum banyak masyarakat yang mampu menjangkaunya.

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan menurun dengan fluktuasi yang relatif kecil. Capaian menurun dari 91,66% pada tahun 2021 menjadi 87,82% pada tahun 2022, kemudian meningkat sedikit menjadi 88,26% pada tahun 2023 dan 88,91% pada tahun 2024, sebelum kembali turun menjadi 86,27% pada tahun 2025. Secara keseluruhan, terjadi penurunan sebesar 5,39 poin persentase dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepemilikan komputer pribadi di rumah tangga cenderung mengalami perlambatan, yang dapat menjadi indikasi pergeseran preferensi masyarakat dari penggunaan komputer ke perangkat bergerak seperti telepon pintar untuk mengakses layanan digital, serta masih adanya keterbatasan daya beli dan pemerataan akses teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap strategi peningkatan literasi digital, pemerataan akses perangkat TIK, serta penguatan infrastruktur digital agar pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Grafik 2.189
Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

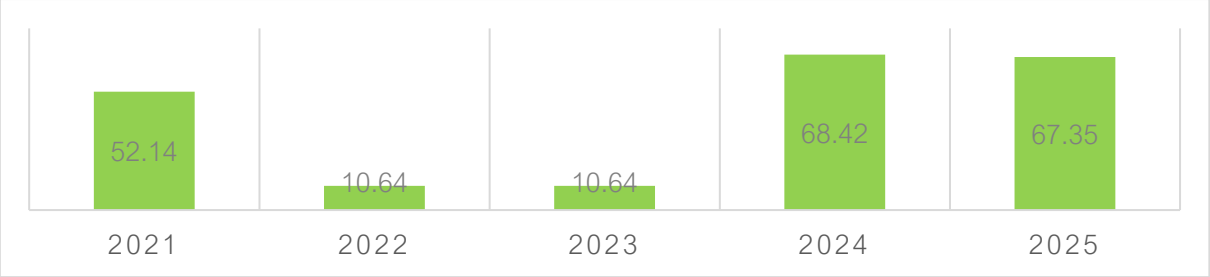
10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Sejak lama koperasi sering disebut sebagai soko guru (tiang penyangga) perekonomian Indonesia, seperti yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945, koperasi merupakan instrumen penting untuk mencapai kesejahteraan sosial, sebab pada koperasi tercermin tentang cara bagaimana perekonomian Indonesia dikelola yaitu dengan kekeluargaan. Sampai sekarang, koperasi masih terus berkembang diberbagai daerah dan sebagian benar-benar menjadi kelembagaan ekonomi dan mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Meskipun berkembang, tapi tak sedikit koperasi yang tidak berfungsi optimal (praktiknya mirip dengan perbankan), bahkan tidak lagi aktif.

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan dinamika yang sangat signifikan selama lima tahun terakhir, dari 52,14 persen di tahun 2021, mengalami penurunan tajam di tahun 2022 dan 2023 menjadi 10,64 persen. Kemudian mengalami peningkatan di dua tahun berikutnya mencapai 68,42 persen di tahun 2024 dan 67,35 persen di tahun 2025.

Grafik 2.190
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

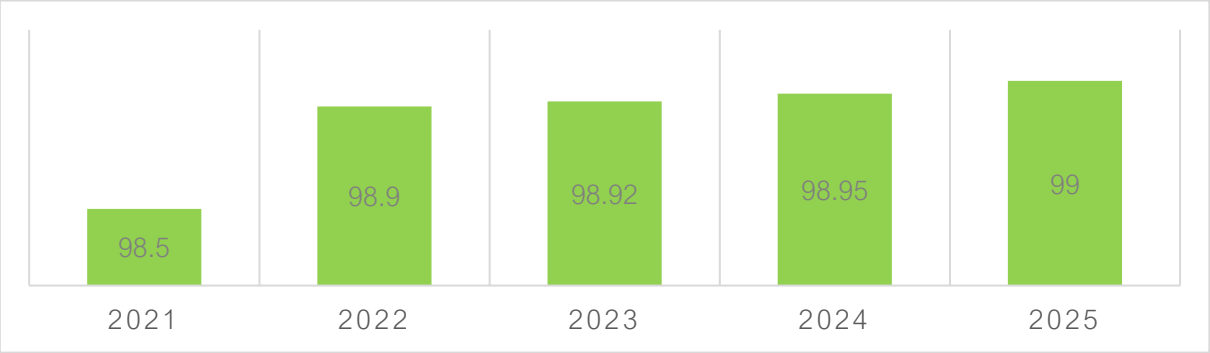
b. Persentase UKM non BPR/LKM Aktif

Sama dengan koperasi, keberadaan UKM dalam perekonomian Indonesia merupakan tiang penyangga aktivitas ekonomi. Kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia jauh lebuh besar daripada UB. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61,41 persen dengan jumlah UMKM hampir mencapai 60 juta unit. Data tersebut menunjukkan, bahwa penggerak roda perekonomian Indonesia pada dasarnya adalah UMKM.

Perkembangan UMKM yang pesat, tergambar dari keragaman aktivitas bisnisnya, sebagian bergerak di perdagangan, namun ada beberapa yang masuk dalam sektor keuangan berbentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Bagi negara-negara berkembang, termasuk juga di daerah, keberadaan LKM sangat membantu masyarakat miskin yang seringkali tidak diterima oleh perbankan karena dianggap tidak *bankable*. Kondisi tentu wajar melihat praktik perbankan saat ini, tapi juga ironis sebab sebagian dari mereka yang ditolak adalah UMKM yang berusaha bertahan hidup atau berkembang namun tidak memiliki akses permodalan. Peran LKM adalah membantu akses permodalan bagi pelaku UMKM, dengan persyaratan lebih mudah dan suku bungan lebih rendah dari perbankan pada umumnya.

Karena perannya yang penting, perkembangan LKM bisa dilihat hampir disemua daerah, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam kurun waktu 2021 sampai 2025, persentasi LKM di kabupaten ini sudah hampir mencapai 100 persen.

Grafik 2.191
Persentase UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

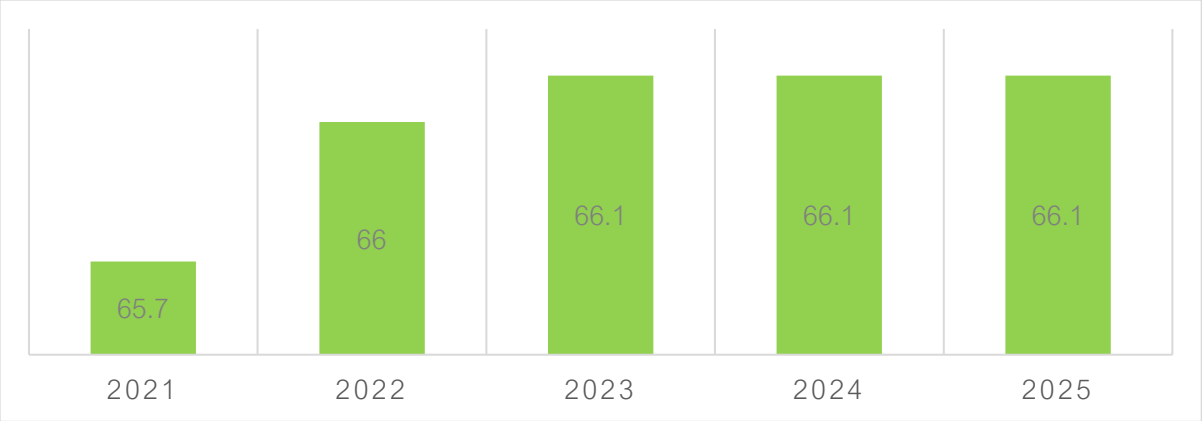
c. Persentase BPR/LKM Aktif

Selain Non BPR, praktik BPR juga besar proporsinya di Kabupaten Sidenreng Rappang. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Menurut OJK, usaha yang dapat dilaksanakan oleh

BPR hanya empat yaitu pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kedua memberikan kredit, ketiga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan keempat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Dalam lima tahun terakhir, terjadi tren fluktuaktif dalam persentase BPRL/LKM aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tahun 2021 terdapat 65,7 persen BPR/LKM aktif, kemudian mengalami sedikit peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2022 tercatat 66 persen, tahun 2023 menjadi 66,1 persen dan stabil sampai tahun 2025.

Grafik 2.192
Persentase BPR/LKM Aktif di Kabupaten Sidenrang Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

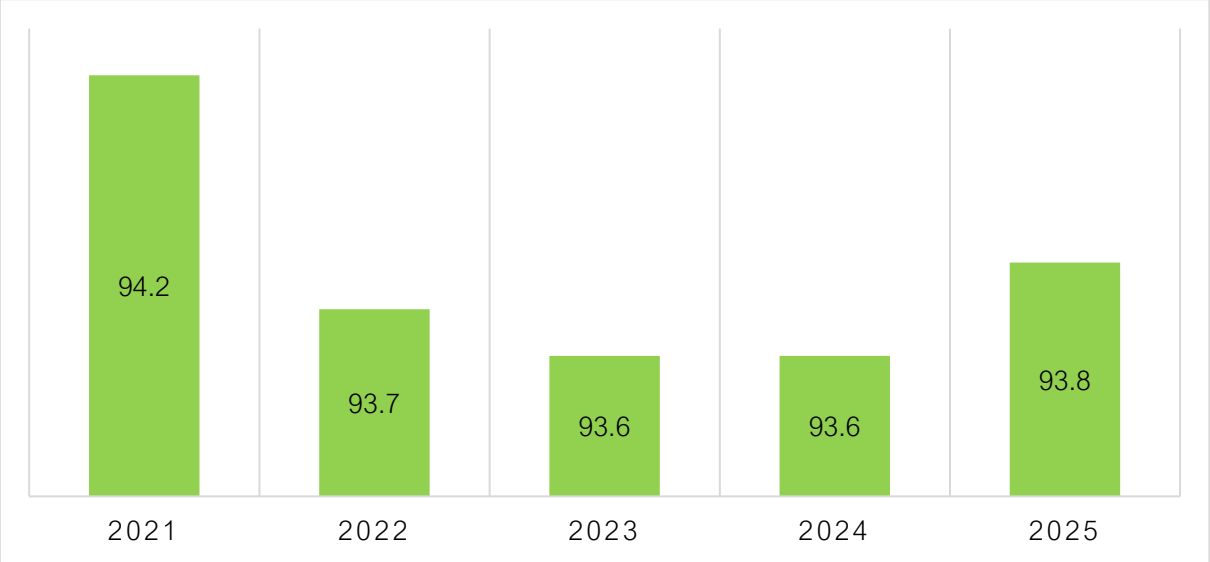
d. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil sudah terbukti melalui berbagai penelitian memberikan pengaruh besar terhadap perbaikan kesejahteraan rumah tangga miskin. Semua kalangan sepakat, bahwa usaha mikro dan kecil merupakan instrumen yang efektif untuk menaikkan status kesejahteraan rumah tangga miskin karena dibanyak daerah kegiatan usaha UMKM selalu muncul dari rumah tangga rentan atau miskin sebagai upaya mempertahankan ekonomi rumah tangga. Oleh sebab itu, mendorong dan mengembangkan UMKM merupakan hal yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah jika ingin mengentaskan kemiskinan.

Dari sekian banyak UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagian besar skala usahanya masih mikro dan kecil. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha dan omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta. Ciri lain yang dapat menandai usaha mikro dan kecil adalah perkembangan usahanya relatif stagnan sebab tujuan dari bisnisnya memang

bukan dikembangkan tapi hanya bertahan hidup (subsisten). Persentase usaha mikro dan kecil terhadap total usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kestabilan yang konsisten, di tahun 2021 ada 94 persen usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang dari total seluruh UMKM. Angka ini mengalami sedikit penurunan yaitu 93,8 persen di tahun 2025.

Grafik 2.193
Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

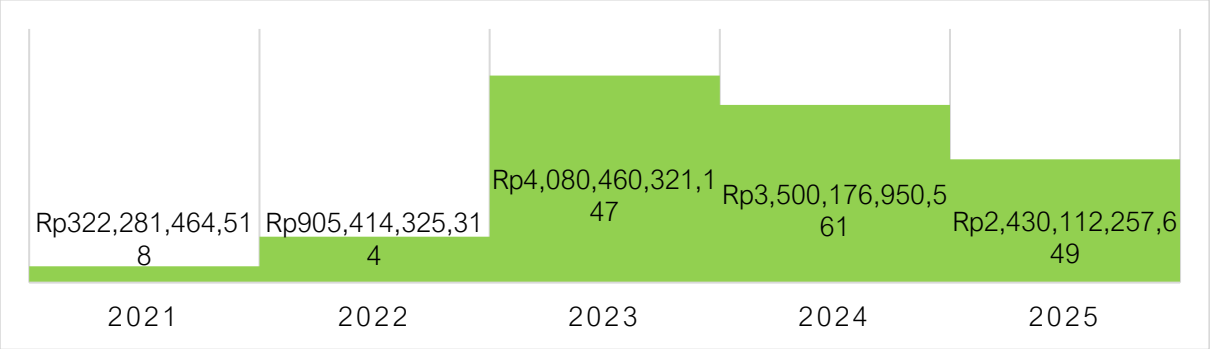
11. Urusan Penanaman Modal

a. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi merupakan variabel penentu pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Semua literatur dan penelitian tentang investasi dan pertumbuhan menyimpulkan adanya hubungan positif antara kedua variabel. Berbeda dengan konsumsi, investasi bekerja seperti bahan bakar, dimana kendaraan hanya bisa dijalankan jika bahan bakarnya cukup. Jika investasi sebuah negara/daerah rendah, maka pastinya melambat, begitupun sebaliknya. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami perlambatan yang signifikan, sebagian besar disebabkan oleh peningkatan nilai dan pertumbuhan investasi (PMA/PMDN). Tahun 2021 sebesar Rp. 322 miliar, total investasi PMA dan PMDN terus meningkat hingga mencapai Rp. 4.0 triliun di tahun 2023. Namun di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 3,5 triliun dan penurunan berlanjut di tahun 2025 menjadi 2,4 triliun. Faktor penyebab turunnya investasi PMA dan PMDN secara umumnya dapat dikaitkan dengan iklim investasi di daerah. Iklim investasi ini terdiri dari banyak komponen, misalnya kemudahan mengurus perizinan dan biayanya, pajak, upah pekerja, dan lain sebagainya.

Grafik 2.194
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021–2025 (Miliar Rp)

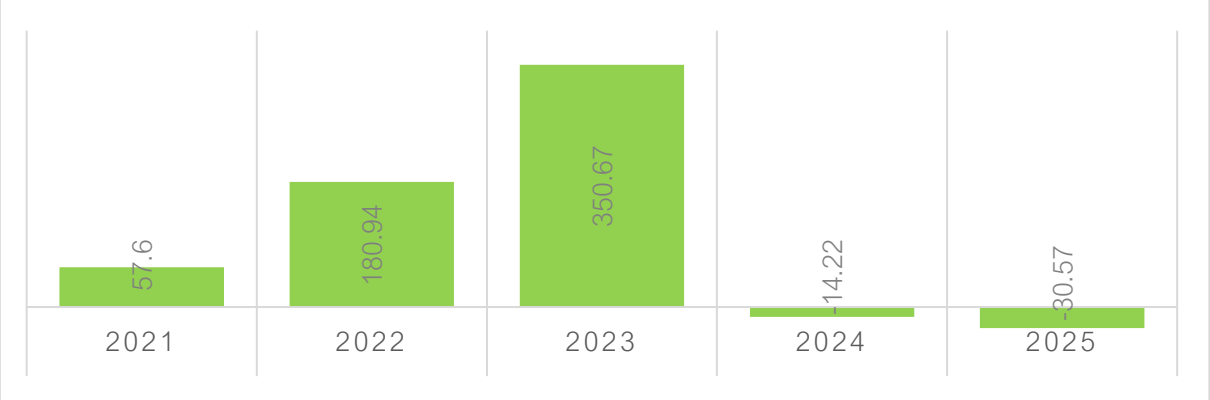


Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

b. Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA

Tren Tren nilai realisasi PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan, dari 57,60 persen di tahun 2021 menurun menjadi -30,57 persen di tahun 2025.

Grafik 2.195
Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

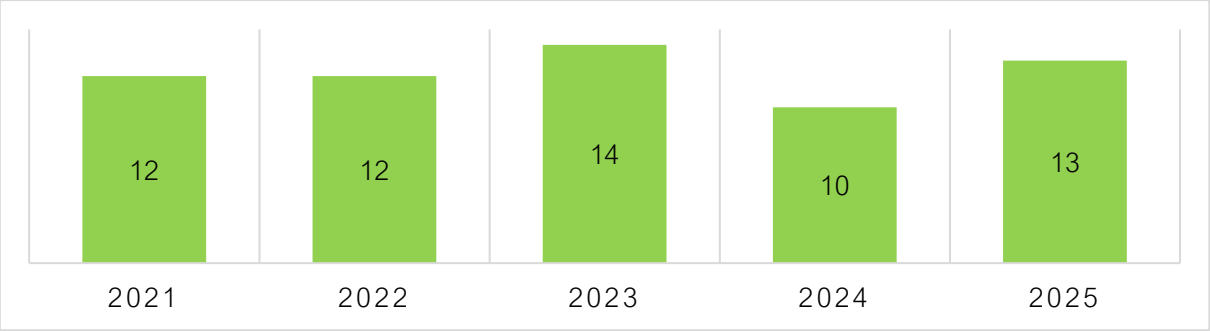
13. Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Kedudukan organisasi kepemudaan sangat penting sebagai wadah berhimpunnya pemuda dalam upaya melaksanakan kerja organisasi untuk mendukung cita-cita terbentuknya negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Organisasi pemuda pada tingkat daerah semakin penting mengingat terbatasnya sumber daya manusia di daerah yang mampu menggerakkan dan berkontribusi bagi pembangunan.

Adapun persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Sindenreng Rappang selama kurun waktu 2021-2025 mengalami angka yang fluktuatif. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Grafik 2.196
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



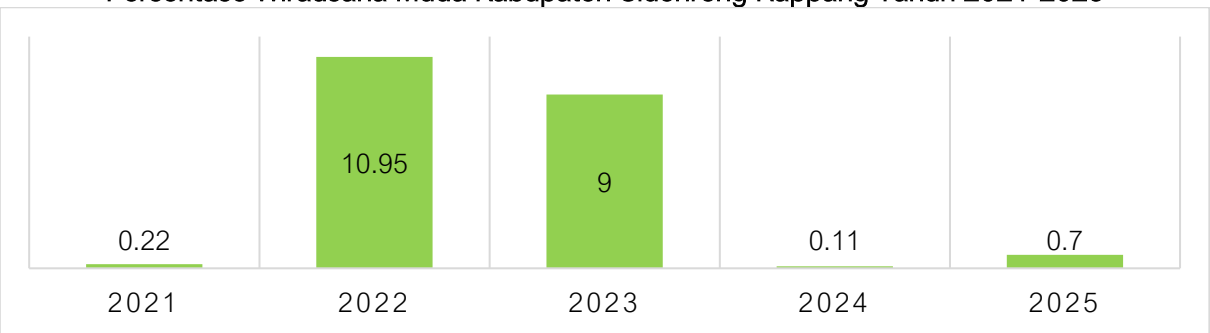
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

b. Persentase Wirausaha Muda

Di tengah semakin ketatnya seleksi untuk mendapatkan pekerjaan, pemuda memainkan peran penting untuk bisa membuka lapangan kerja baik untuk dirinya sendiri atau orang lain. Wirausaha sendiri masih menjadi tantangan karena masih belum banyak orang bahkan pemuda itu sendiri yang mampu melakukannya. Karena kunci utama menjadi wirausaha adalah harus mau mengambil risiko dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Apabila hal tersebut dikuasai, akan semakin banyak aktivitas ekonomi yang bergerak sekaligus juga berdampak pada perluasan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

Persentase Persentase wirausaha muda di Kabupaten Sidenreng Rapang selama tahun 2021-2025 masih cukup rendah. Artinya masih terdapat banyak peluang yang bisa diisi untuk mengisi kekurangan wirausaha muda. Diperlukan upaya dan dukungan pemerintah dan pemuda untuk bersama-sama mendorong lahir wirausaha muda melalui pendidikan dan pelatihan serta permodalan yang memadai.

Grafik 2.197
Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



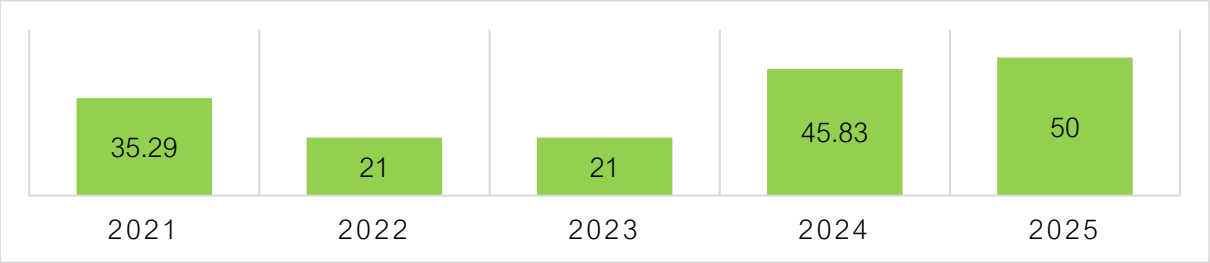
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

c. Cakupan Pembinaan Olahraga

Untuk Untuk mencapai prestasi tertinggi dalam suatu bidang, diperlukan pembinaan yang dilakukan sejak dini dan ketat terutama di bidang olahraga. Pembinaan olahraga sendiri merupakan bagian dan upaya peningkatan kualitas manusia yang ditujukan pada

peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional.

Grafik 2.198
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



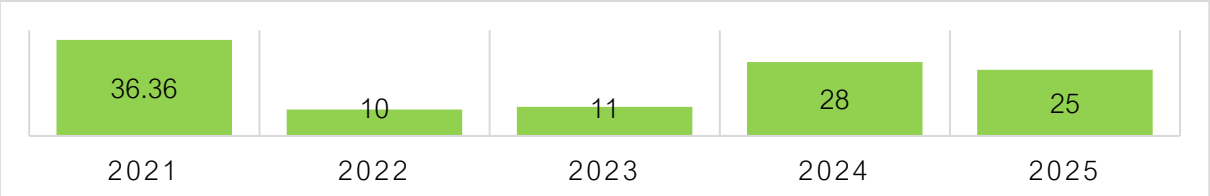
Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Adapun capaian cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2021-2025 menunjukkan variasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 mencatat angka 35,29 persen yang disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan pembatasan aktivitas fisik dan sosial serta penutupan fasilitas olahraga. Dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2022-2023 stagnan di 21 persen. Pada tahun 2024 mencapai angka 45,83 persen serta pada 2025 meningkat menjadi 50 persen.

d. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Untuk mendorong pencapaian terbaik di bidang olahraga, tidak hanya faktor pemain itu sendiri namun juga kehadiran pelatih yang berkualitas dan bersertifikasi memainkan peran yang tidak kalah penting. Pelatih yang bersertifikasi akan membawa suasana pembinaan olahraga sejalan dengan standar yang telah ditetapkan. Pelatih bersertifikasi juga memastikan kualitas output yang dihasilkan diharapkan akan mampu untuk bersaing. Pada tahun 2021, cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 36,36 persen. Mengalami penurunan di dua tahun berikutnya masing-masing diangka 10 persen dan 11 persen tahun 2022 dan 2023, kemudian mengalami peningkatan di dua tahun berikutnya menjadi 28 persen di tahun 2024 dan 25 persen di tahun 2025.

Grafik 2.199
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

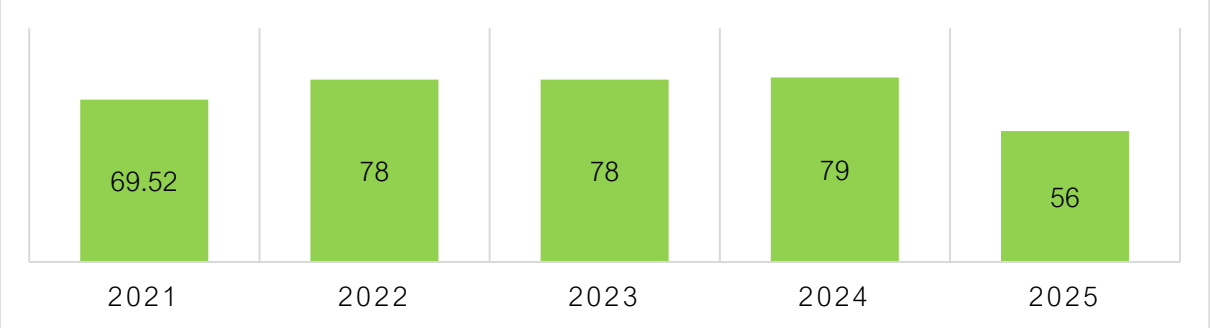
e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Pembinaan Pembinaan atlet sejak usia dini menjadi sangat penting untuk mencapai prestasi terbaik terutama dalam jangka panjang. Atlet muda merupakan investasi penting

dalam pengembangan olahraga di masa depan. Diperlukan cakupan pembinaan yang luas supaya bisa menjaring lebih banyak bakat potensial agar semakin banyak peluang setiap pemuda memperoleh peluang pembinaan.

Adapun cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2021-2025 masih cenderung meningkat. Pada tahun 2021 cakupan pembinaan atlet muda sebesar 69.52 persen, kemudian meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 79 persen di tahun 2024 namun mengalami penurunan di tahun 2025 menjadi sebesar 56 persen.

Grafik 2.200
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)

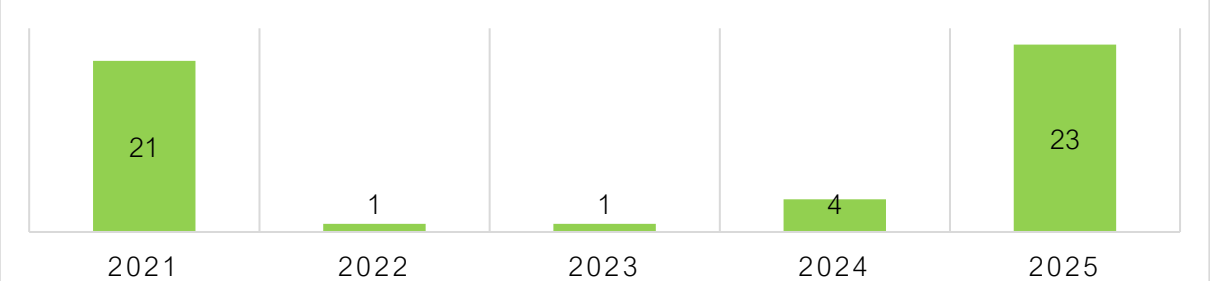


Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

f. Jumlah Atlet Berprestasi

Hasil akhir dari sebuah pembinaan adalah target untuk mencapai prestasi terbaik. Secara umum, keberhasilan dari sebuah pembinaan di bidang olahraga adalah atlet yang berhasil merengkuh kemenangan dalam sebuah pertandingan. Namun demikian, diperlukan upaya progresif bersama semua pihak terkait untuk mencapai hal tersebut. Jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2021, tercatat ada sebanyak 21 atlet berprestasi, namun pada tahun 2022 dan 2023 tercatat hanya ada masing-masing 1 atlet yang berprestai. Kondisi ini kemudian membaik pada tahun pada tahun-tahun berikutnya, dimana jumlah atlet berprestasi meningkat menjadi orang di 2024 lalu meningkat pesat di 2025 menjadi 23 atlet yang merupakan angka tertinggi di 5 tahun terakhir.

Grafik 2.201
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

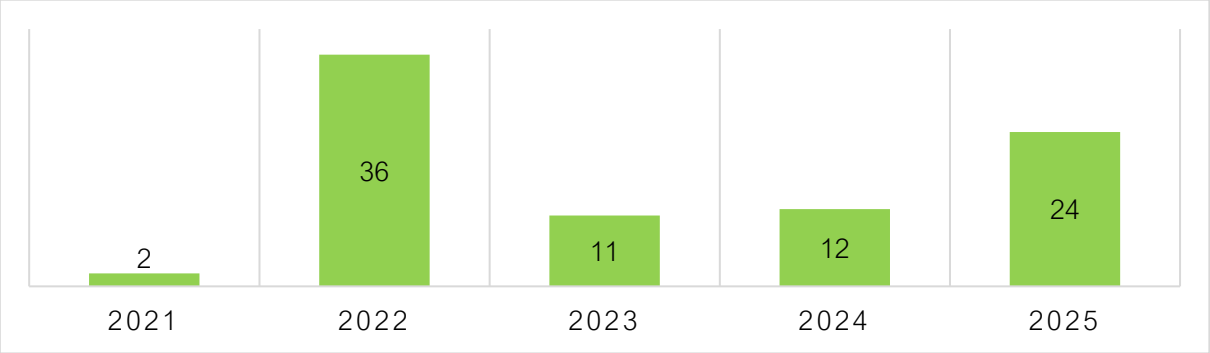


Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

g. Jumlah Prestasi Olahraga

Prestasi Prestasi olahraga merupakan tujuan akhir dari pembinaan pelatihan yang telah dilakukan sejak jauh hari. Atlet dipersiapkan untuk mampu bersaing dengan pesaing lainnya untuk menjadi yang terbaik dalam suatu pertandingan sehingga mampu mengecap prestasi terbaik dalam suatu bidang olahraga. Untuk mendapatkan prestasi olahraga terbaik diperlukan usaha dan kemauan yang tinggi dari atlet dan pelatih itu sendiri dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Grafik 2.202
Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Orang)



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

14. Urusan Statistik

a. Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi

Data statistik merupakan bagian paling mendasar dalam siklus perencanaan pembangunan. Saat merumuskan masalah, data ada syarat utama yang mesti dipenuhi dan ketika melakukan monitoring-evaluasi, para teknokrat juga membutuhkan data. Karena tingkat kepentingannya sangat tinggi, maka seharusnya data harus dapat diakses dengan mudah dan komprehensif (memuat semua indikator pembangunan daerah). Oleh sebab itu, pemerintah daerah wajib memiliki sistem data statistik yang mengintegrasikan semua perangkat daerah (data mikro sektoral).

Grafik 2.203
Tersedianya Sistem Data Dan Statistik yang Terintegrasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Ada/Tidak Ada)



Sumber: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan, sudah memiliki sistem data dan statistik yang terintegrasi. Salah satu yang sangat baik adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.

Meski bukan inisasi Pemda, tapi adanya SIPD sangat membantu daerah untuk membenahi dan memperbaharui data, sehingga ketika dibutuhkan dapat dengan diakses.

b. Buku Kabupaten Dalam Angka

Salah satu publikasi data statistik yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Buku Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka. Publikasi ini selalu dijadikan rujukan bagi para tenaga perencana dan pengambil kebijakan di daerah karena data yang termuat cukup lengkap. Berdasarkan pada Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2025, ada 12 pengelompokan data mulai dari Geografi hingga Sistem Neraca Regional, dan sebagian besar sumber datanya juga dari OPD lingkup pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada bagian akhir, BPS Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan perbandingan beberapa data dengan daerah di Sulawesi Selatan untuk menunjukkan posisi relatif masing-masing kabupaten/kota.

Grafik 2.204
Buku Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

c. Buku PDRB

Publikasi Publikasi BPS Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak kalah pentingnya dan selalu digunakan oleh pemerintah daerah pada saat penyusunan dokumen perencanaan adalah Buku PDRB. Buku PDRB yang dipublikasi BPS Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi dua, yaitu PDRB sisi lapangan usaha dan PDRB sisi pengeluaran. Publikasi PDRB sisi lapangan usaha berisi tentang data-data PDRB berdasarkan 17 lapangan usaha berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Selain itu beragam data turunan, seperti kontribusi sektoral terhadap PDRB, pertumbuhan ekonomi sektoral, dana pendapatan perkapita juga termasuk dalam publikasi ini. Semua disajikan dalam bentuk time series lima tahunan.

Grafik 2.205
Buku PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang;2026

Badan Pusat Statistik juga mempubikasikan Buku PDRB Pengeluaran, yang berisi tentang data PDRB sisi pengeluaran mulai dari konsumsi RT hingga ekspor-impor. Selain termuat data PDRB pengeluaran atas dasar harga berlaku dan harga konstan, publikasi ini juga mencatat data turunan, seperti pertumbuhan ekonomi berdasarkan komponen pengeluaran, kontribusi masing-masing komponen pengeluaran, dan pendapatan perkapita. Setiap kali publikasi, BPS Kabupaten Sidenreng Rappang menyajikanya dalam bentuk *time series* lima tahun terakhir.

15. Urusan Persandian

a. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

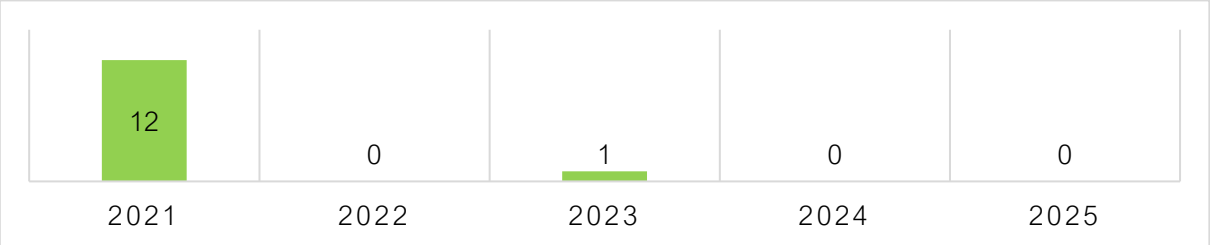
Komunikasi antara perangkat daerah menggunakan sandi merupakan tuntutan perkembangan zaman dalam rangka menjaga rahasia dan keamanan data. Adapun capaian persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah selama kurun waktu 2021-2025 telah terimplementasi secara baik mencapai 100 persen.

16. Urusan Kebudayaan

a. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Salah satu cara melestarikan warisan budaya dan menyebarluaskannya adalah menggelar festival seni dan budaya. Kegiatannya bisa bermacam-macam seperti perlombaan musik tradisional bugis, dan salah satu yang terbesar adalah Festival Danau Sidenreng. Namun tidak setiap tahun pemerintah daerah menggelar festival seni dan budaya. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat perubahan dalam frekuensi festival seni budaya selama tahun 2021-2025. Tahun 2021, festival seni budaya diadakan sebanyak 12 kali. Memasuki tahun 2022-2023 hanya dihelat sekali, kemudian sampai dengan tahun 2025 tidak ada perhelatan festival seni dan budaya.

Grafik 2.206
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025



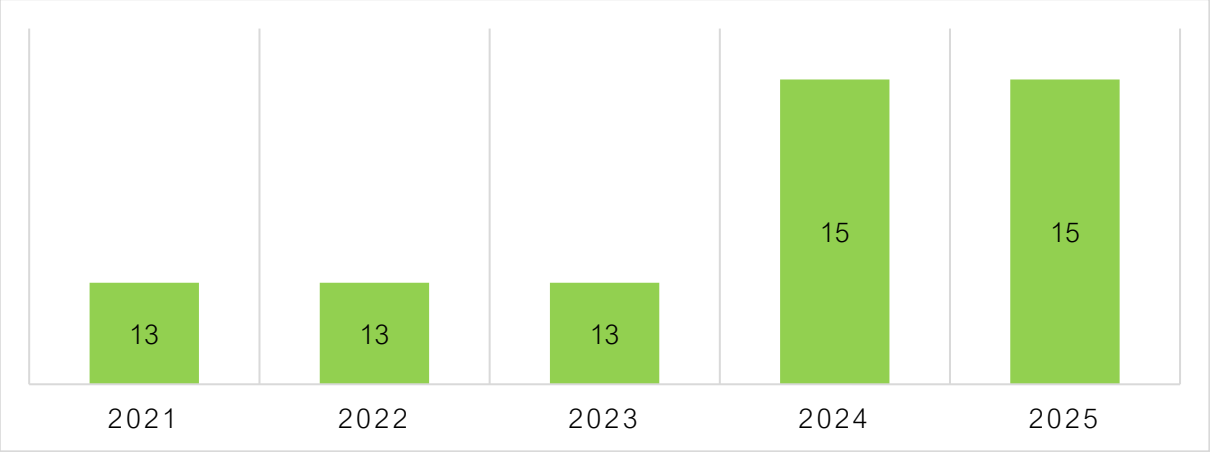
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

b. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki benda, situs, dan kawasan cagar budaya cukup banyak dan tersebar di beberapa kabupaten/kota, salah satunya di

Kabupaten Sidenreng Rappang. Karena dianggap sebagai warisan budaya, berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat UU hingga peraturan gubernur dibuat untuk menjaga kelestariannya. Namun upaya pelestarian tersebut sepertinya belum optimal dilakukan oleh pemerintah daerah karena angka persentase warisan budaya yang dilestarikan angkanya sangat rendah. Tahun 2021, terdapat 13 cagar budaya yang dilestarikan. Angka ini konsisten sampai pada tahun 2023, kemudian mengalami kenaikan hingga mencapai 15 benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2025.

Grafik 2.207
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



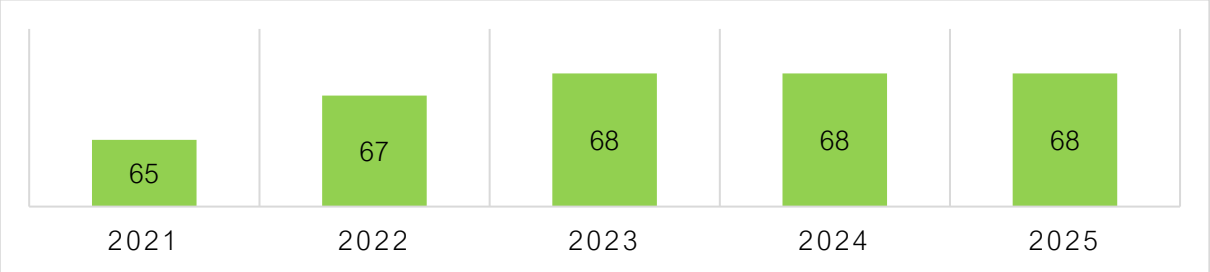
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya adalah Struktur Makam Syeh Keramat Padomai, Struktur Makam Nenek Petta Bolong Aje, Makam Puatta Punri Mojong, Langgara Tungga, Makam Korban 40.000 Jiwa Kulo, Makam Nene Mallomo, Makam Petta Soppo Batu, Bangunan Kolonial Belanda, Makam Andi Pajala Kitta. Semuanya tentu perlu dilestarikan, tidak hanya bendanya, tapi juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

c. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi

Kabupaten Sidenreng Rappang satu diantara banyak daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki cukup banyak kerya kebudayaan. Berdasarkan catatan Kongres Kebudayaan, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki karya kesenian masyarakat diantaranya adalah Cule Cule To Riolo, Manu Gagak (Ayam Ketawa), Paduppa (Marellau Pammase Dewata), Padendang, Bosara, Massempe Ri Parinyameng, pettenung, Pakkacaping Sarapo, Cule-cule Pakkacaping dan Meong Palo Karelle. Selain itu, daerah ini juga memiliki permainan rakyat beberapa diantaranya adalah Mappolo Becceng, Maccubbu, Massempek, Mammencak, Mappadendang, Makkurung Manuk, Mallanca, Maccukke/Maccengke, Maggasing dan Maggeccik. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara aktif melakukan revitalisasi dan inventarisasi karya budaya.

Grafik 2.208
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

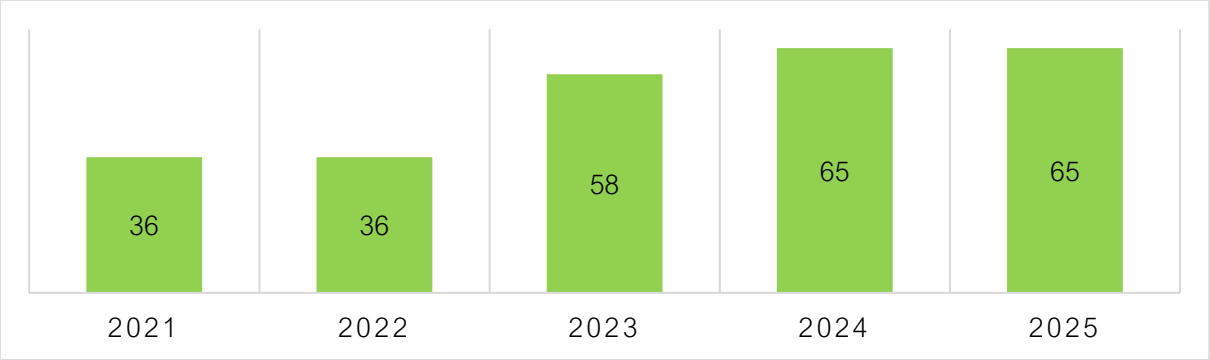


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

d. Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu

Sebagai bentuk upaya pelestarian dan pengelolaan warisan kebudayaan, termasuk cagar budaya, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Cagar Budaya. Dalam Perda tersebut, pengelolaan diartikan sebagai upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Selama lima tahun terakhir, pemerintah daerah telah secara konsisten meningkatkan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Pengelolaan ini tidak hanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda, tetapi juga merupakan tonggak awal dalam upaya pelestarian warisan budaya.

Grafik 2.209
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

17. Urusan Perpustakaan

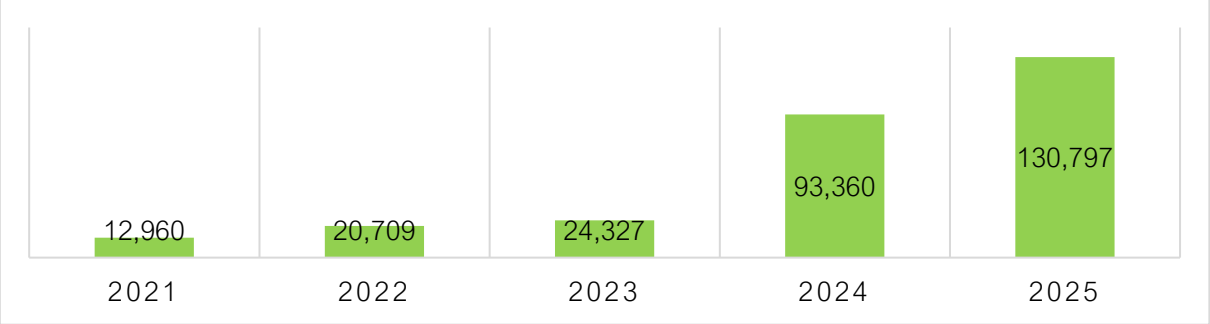
a. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis Peradaban Perpustakaan merupakan jendela dunia. Negara yang memiliki literasi tinggi akan cenderung memiliki masyarakat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya, masyarakat yang cerdas akan mendorong perekonomian lebih produktif

karena sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perpustakaan memainkan peran penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Perpustakaan dianggap berhasil adalah perpustakaan yang banyak dikunjungi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2021-2025, jumlah kunjungan perpustakaan mengalami tren positif yang signifikan. Pada tahun 2021 jumlah pengunjung di angka 12.960 dan terus meningkat, hingga mencapai puncaknya di tahun 2025 di angka 130.797 pengunjung. Hal ini juga menunjukkan minat baca masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terus bertumbuh.

Grafik 2.210
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

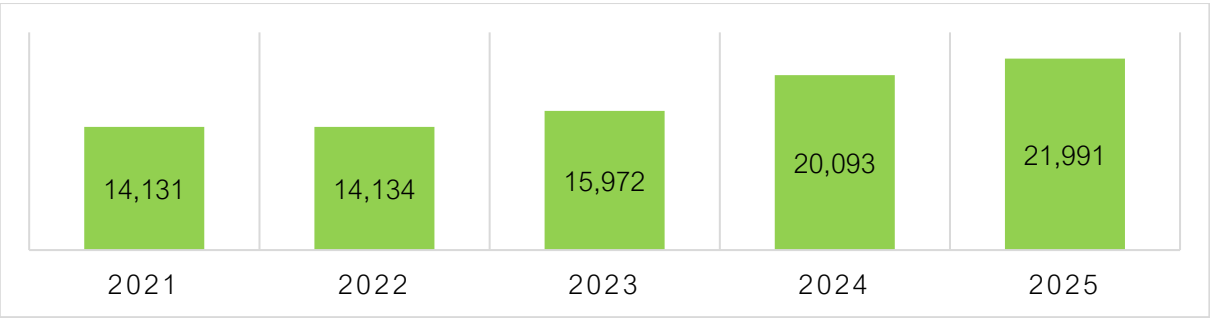


Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

b. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Untuk mendorong minat baca masyarakat, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macasm topik yang lebih variatif sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda hingga usia tua. Adapun jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik.

Grafik 2.211
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

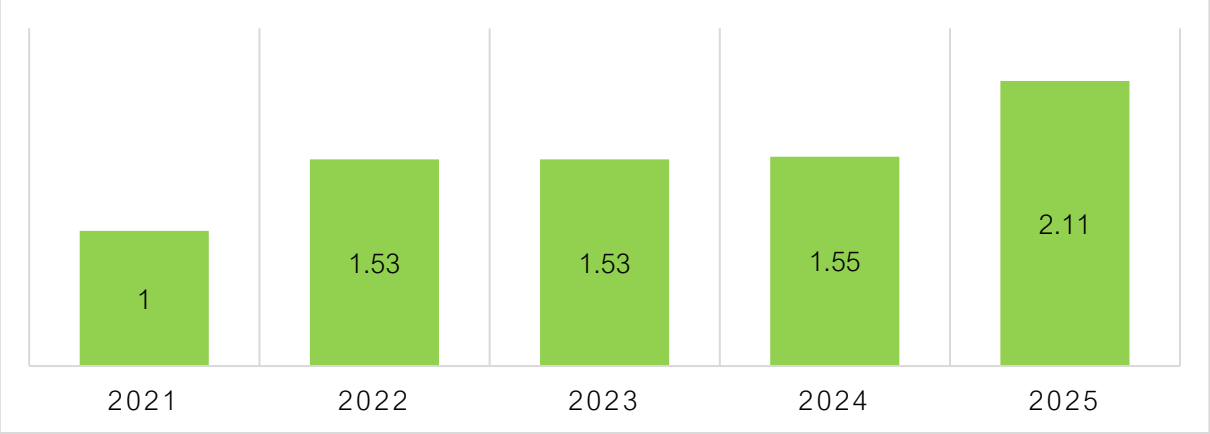
Jumlah koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2021-2025 cenderung meningkat. Pada tahun 2021 sebanyak 14.131 eksamplar, terus meningkat di 4 tahun berikutnya dengan angka tertinggi di tahun 2025 di 21.991

eksamplar. Meskipun demikian, capaian jumlah koleksi buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang masih terbatas.

c. Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk

Rasio perpustakaan persatuan penduduk menjadi indikator seberapa besar perpustakaan akan mampu menjadi daya tampung. Adapun rasio ini penting untuk menjadi perhatian terhadap kebutuhan perpustakaan. Apabila dirasa rasio terlalu besar, maka diperlukan perluasan pengembangan atau pendirian perpustakaan baru sehingga operasional, manfaat, dan efektivitas perpustakaan bisa lebih optimal.

Grafik 2.212
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

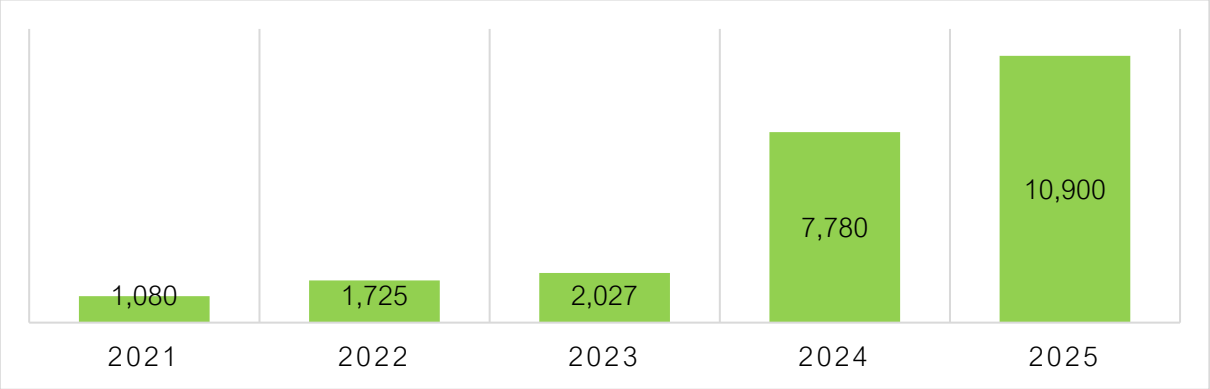
Selanjutnya, rasio perpustakaan per satuan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2021-2025 mengalami peningkatan dimana rasionya di tahun 2025 berada di angka 2,11. Rasio Perpustakaan Persatuan penduduk mengalami peningkatam signifikan karena adanya pembinaan pada semua jenis perpustakaan yang dilakukan secara merata dan komprehensif.

d. Jumlah Rata-Rata Pengunjung Pepustakaan/Tahun

Perpustakaan merupakan jendela dunia. Negara yang memiliki literasi tinggi akan cenderung memiliki masyarakat yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya, masyarakat yang cerdas akan mendorong perekonomian lebih produktif karena sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perpustakaan memainkan peran penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Adapun perpustakaan yang berhasil adalah perpustakaan yang banyak dikunjungi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang selama Tahun 2021-2025, jumlah kunjungan perpustakaan mengalami tren positif. Hal ini mengindikasikan minat baca dan rasa ingin tahu yang tinggi di kalangan masyarakat. Pada tahun 2021, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 1.080, kemudian meningkat signifikan menjadi 10.900 kunjungan pada tahun 2025.

Grafik 2.213
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025 (Orang)



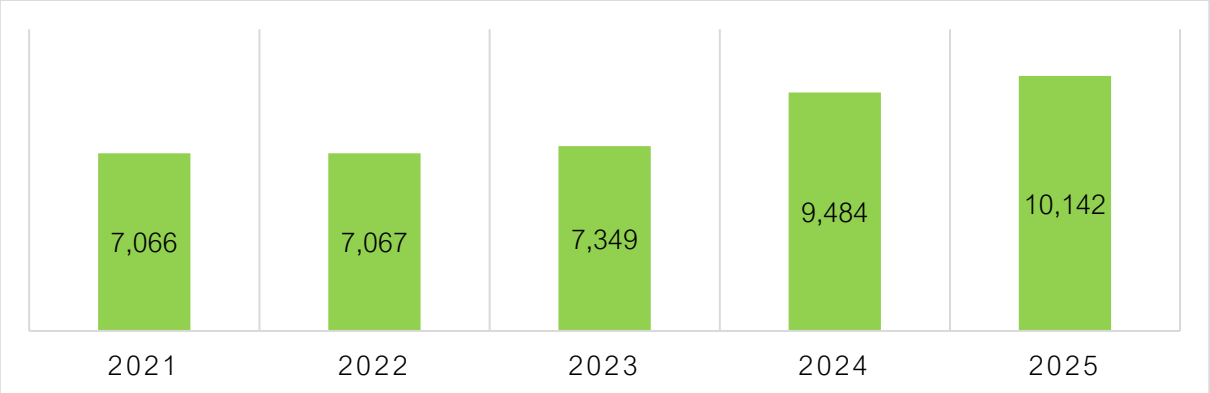
Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

e. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Untuk mendorong minat baca masyarakat, maka ketersediaan jumlah buku harus lebih banyak dengan berbagai macam topik yang lebih variatif sehingga bisa menjangkau kalangan pembaca dari usia muda shingga usia tua. Adapun jumlah dan judul koleksi buku merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian pengelola perpustakaan dengan terus melakukan penambahan serta melakukan perawatan yang baik.

Peningkatan koleksi judul buku di perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021-2025 menunjukkan tren positif. Pada tahun 2021 ada sebanyak 7.066 judul buku, meningkat menjadi 7.067 pada tahun 2022 dan terus meningkat hingga mencapai 10.142 judul buku di tahun 2025.

Grafik 2.214
Jumlah Koleksi Judul Buku di Perputakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

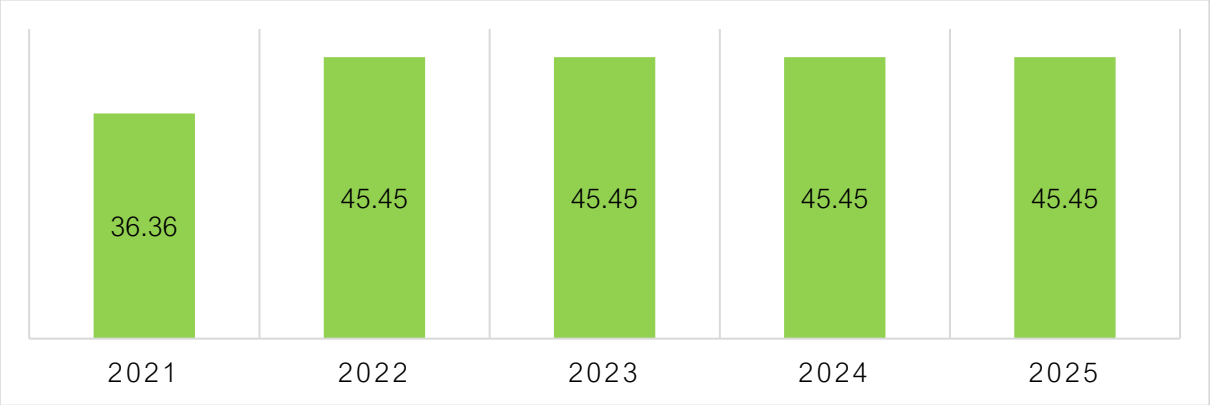


Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

f. Jumlah Pustakawan, Tenaga Perpustakaan

Selain ketersediaan buku, pustakawan dan tenaga perpustakaan juga menunjang minat baca pengunjung perpustakaan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang upaya untuk meningkatkan minat baca tampak jelas dengan ksenaikan jumlah pustakawan dan tenaga perpustakaan dari 36 orang di tahun 2021 menjadi 45 orang di tahun 2025.

Grafik 2.215
Jumlah Tenaga Perpustakaan, Pustakawan di Perputakaan Kabupaten Rappang
Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

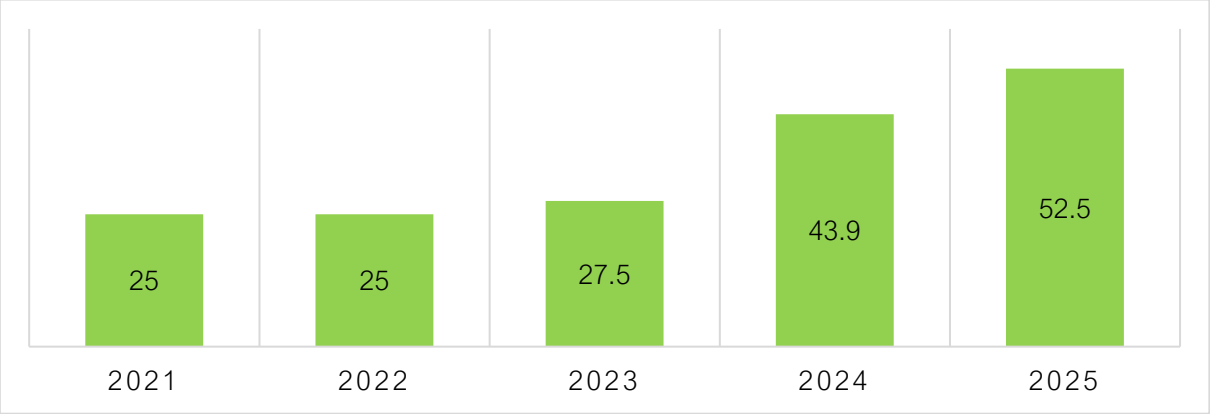
18. Urusan Kearsipan

a. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Pendokumentasian merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, sebab sebelum menyusun program, para teknokrat perlu melihat pencapaian masa lalu dan pencapaian tersebut terekam dalam banyak dokumen disebut dengan arsip. Definisi arsip berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pengarsipan, maka berbagai regulasi, mulai dari UU hingga peraturan pelaksana sudah dibuat agar ada standar baku pengarsipan mulai dari level nasional hingga daerah.

Tapi karena seringkali dianggap tidak begitu penting, upaya pengarsipan secara baku belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal tersebut tercermin dari masih rendahnya angka persentase perangkat daerah yang mengalola arsip secara baku. Tahun 2021 – 2022 hanya 25 persen perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Namun pada tahun 2023, ada sedikit peningkatan menjadi 27,50 persen perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku. Kemudian meningkat signifikan di tahun 2024 dan 2025 menjadi 43,90, lalu 52,5 persen. Ini menunjukkan bahwa hanya setengah perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengelola arsipnya berdasarkan aturan, padahal pengarsipan baku tersebut penting untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan.

Grafik 2.216
Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2021 - 2025

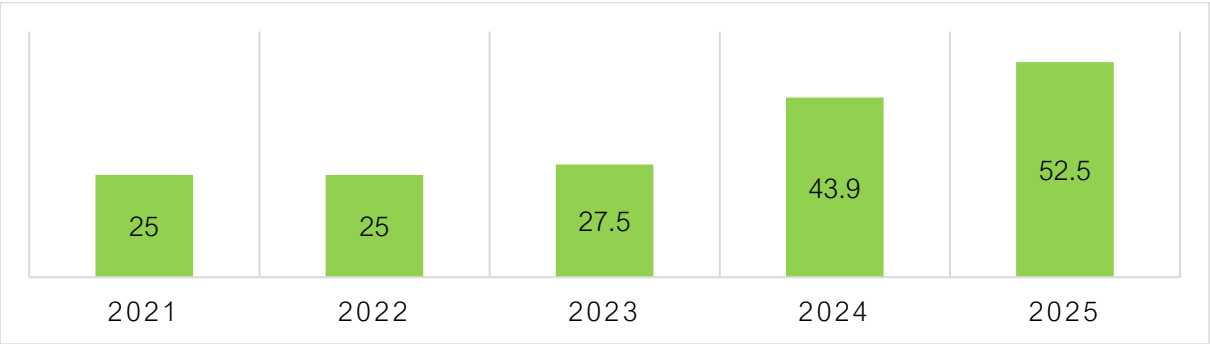


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

b. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Dalam mendorong perbaikan pengelolaan kearsipan agar sesuai dengan standar baku, maka kualitas SDM pengelola menjadi salah satu faktor pendorong. Semakin banyak SDM yang berkompeten, maka perbaikan pengelolaan kearsipan agar sesuai standar baku akan semakin cepat. Pada tahun 2020 dan 2021, tercatat ada 2 orang pengelola arsip yang mengikuti kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Namun pada tahun 2022 sampai tahun 2024 turun menjadi hanya 1 orang. Capaian ini masih sangat rendah dibanding dengan target sebesar 49 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas SDM perangkat daerah untuk menerapkan arsip baku masih sangat terbatas.

Grafik 2.217
Jumlah Pengelola Arsip yang Mengikuti Peningkatan SDM di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

2.1.5.3. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan

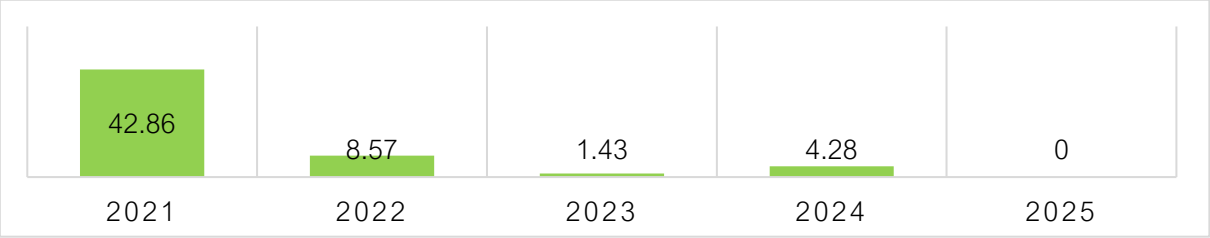
1. Urusan Kelautan Dan Perikanan

a. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan menunjukkan tren menurun sejak 2021 dan hanya mencapai 4,28% pada tahun 2024. Pada tahun 2025 tidak dilaksanakan kegiatan

pembinaan sehingga capaian menjadi 0%. Kondisi ini menunjukkan perlunya keberlanjutan program pembinaan untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian kelompok nelayan.

Grafik 2.218
Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)

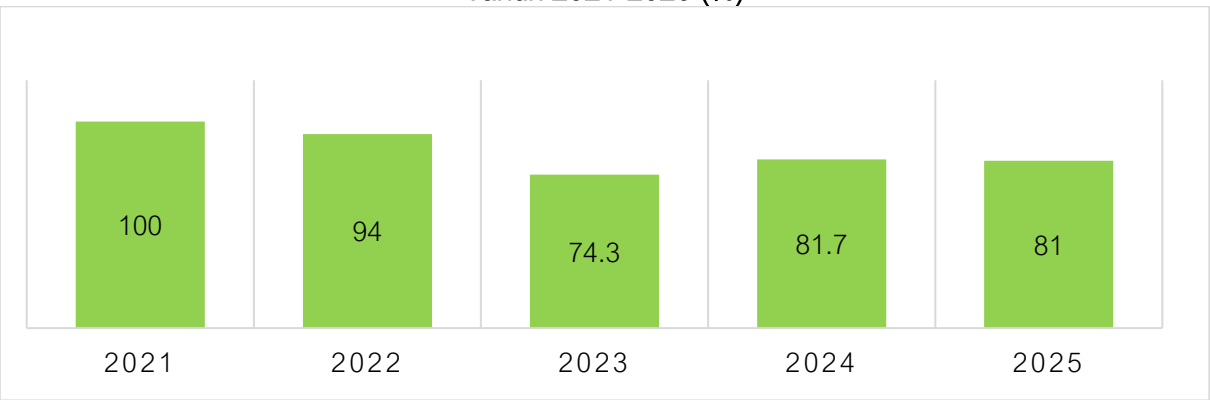


Sumber: Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Kontribusi kelompok nelayan terhadap total tangkapan ikan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren menurun dari 100% pada tahun 2021 menjadi 94,00% pada tahun 2022 dan mencapai titik terendah sebesar 74,30% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 kontribusi meningkat menjadi 81,70%, namun kembali sedikit menurun menjadi 81,00% pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran kelompok nelayan dalam mendukung produksi perikanan belum stabil, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelompok, akses terhadap sarana produksi, dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap total hasil tangkapan ikan.

Grafik 2.219
Kontribusi Kelompok Nelayan terhadap Total Tangkapan Ikan Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

c. Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman

Walaupun potensi sektor perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain, namun aktivitas penangkapan ikan harus tetap memperhatikan daya dukung habitat. Aktivitas penangkapan ikan yang dilkukan secara terus-menerus membuat kuantitas ikan perlahan berkurang, sehingga jika tidak dijaga kelestarianya maka kuantitas ikan pada waktu tertentu akan habis. Itu sebabnya aktivitas penangkapan ikan

harus tetap memperhatikan batasan biologi aman. Aktivitas penangkapan ikan di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2021-2025 sudah berada dalam batasan biologi aman.

d. Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial

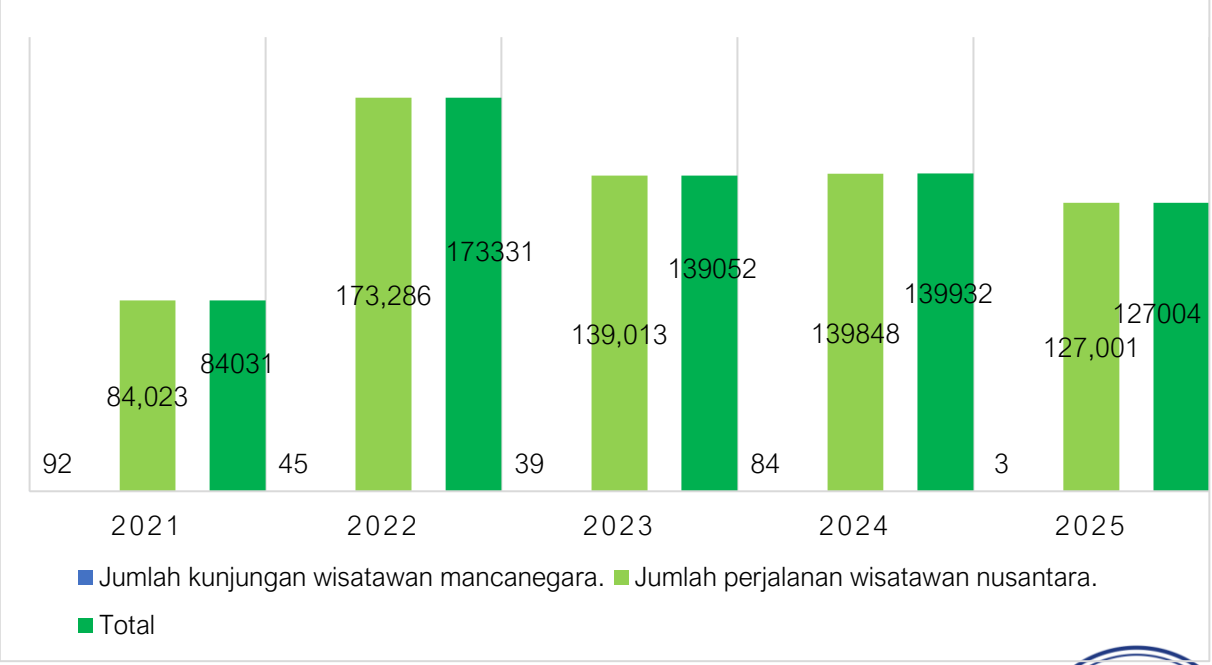
Kabupaten Sidenreng Rappang salah satu daerah yang tidak banyak memiliki wilayah laut. Namun dengan keterbatasan tersebut, pemerintah menetapkan kawasan lindung perairan. Data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tidak ada atau 0 hektar kawasan lahan lindung perairan dari setiap satu hektar lahan perairan di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2021 sampai tahun 2025.

2. Urusan Pariwisata

a. Kunjungan wisata

Wisatawan merupakan setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat/wilayah yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan di tempat yang dikunjungi dengan maksud kunjungan antara lain: (a) Personal: berlibur, rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, belajar atau pelatihan, kesehatan olah raga. keagamaan, belanja, transit, dan lain-lain; dan (b) Bisnis dan profesional: menghadiri pertemuan, konferensi atau kongres, pameran dagang, konser, pertunjukan, dan lain-lain. Secara umum wisatawan terdiri atas dua, yaitu mancanegara dan nusantara. Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan industri pariwisata yang memberikan dampak kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Grafik 2.220
Jumlah Kunjungan Wistawan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Orang)



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang; 2025

b. Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisatawan menunjukkan lamanya wisatawan mengunjungi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam satu kali kunjungan. Selain jumlah kunjungan wisatawan, lama kunjungan wisatawan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya pendapatan yang diperoleh daerah. Selama kurun waktu 2021-2025, rata-rata lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 1 hari. Artinya rata-rata wisatawan yang berkunjung merupakan wisatawan harian yang tidak memerlukan tempat tinggal sementara (akomodasi).

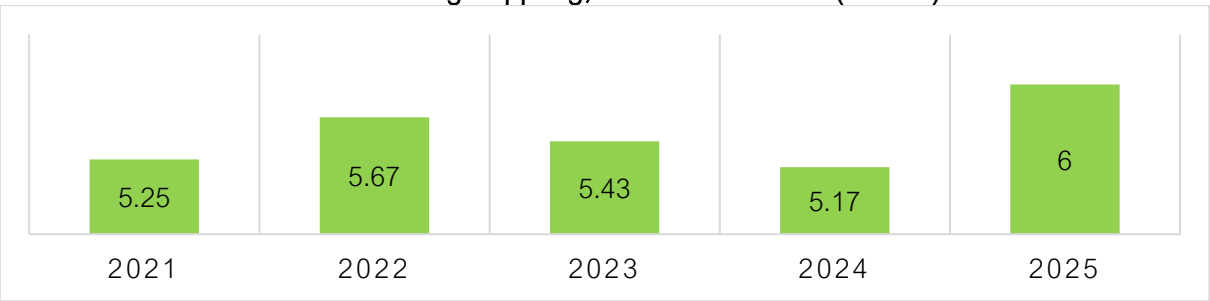
3. Urusan Pertanian

a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal sebagai salah satu daerah pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan serta merupakan lumbung padi nasional. Hal ini terlihat dari peran sektor pertanian terutama tanaman pangan yang memiliki andil cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian.

Produktivitas padi di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025, dengan kisaran 5,17–6,00 ton/ha. Setelah meningkat pada tahun 2022, produktivitas menurun selama dua tahun berturut-turut sebelum mencapai 6,00 ton/ha pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja produksi pertanian, namun fluktuasi yang terjadi mengindikasikan bahwa produktivitas belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini mencerminkan masih adanya pengaruh faktor eksternal, seperti perubahan iklim dan serangan hama, maupun faktor internal berupa penerapan teknologi budidaya dan ketersediaan sarana produksi. Ke depan, diperlukan penguatan inovasi budidaya, penyediaan benih unggul, peningkatan kualitas irigasi, serta pendampingan kepada petani untuk menjaga keberlanjutan peningkatan produktivitas.

Grafik 2.221
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kab. Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025 (Ton/ha)



Sumber : Dinas TPHPKP kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

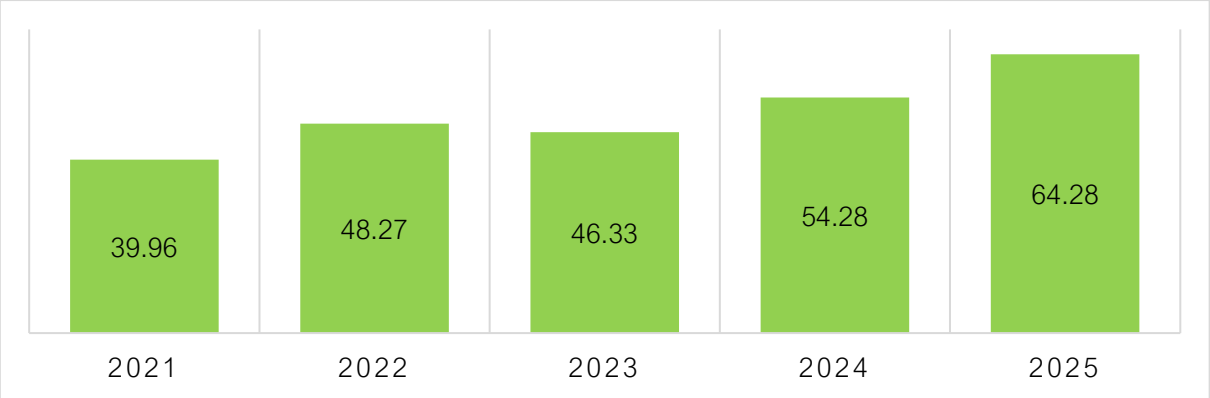
b. Cakupan Bina Kelompok Petani

Selain faktor alam, kemungkinan penyebab menurunya produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor non alamiah seperti adopsi teknologi yang

lambat, ketersediaan saprodi, kualias bibit, dll. Berbagai program bantuan sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, misalnya program kartu tani, program bantuan bibit, program pupuk bersubsidi, dan masih banyak program bantuan lainya. Meskipun pemerintah daerah sudah melakukan banyak hal untuk membantu petani, tapi cakupannya masih sangat terbatas, bahkan lima tahun terakhir terus menurun.

Cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode 2021–2025. Persentase kelompok petani yang mendapatkan pembinaan meningkat dari 39,96% pada tahun 2021 menjadi 48,27% pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 46,33% pada tahun 2023. Selanjutnya, capaian kembali meningkat menjadi 54,28% pada tahun 2024 dan mencapai 64,28% pada tahun 2025, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Peningkatan ini mengindikasikan semakin luasnya jangkauan pembinaan kepada kelompok petani, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan, adopsi teknologi budidaya, serta produktivitas usaha tani. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 35,72% kelompok petani yang belum memperoleh pembinaan pada tahun 2025, sehingga perlu dilakukan perluasan cakupan dan peningkatan kualitas pendampingan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata.

Grafik 2.222
Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang; 2026

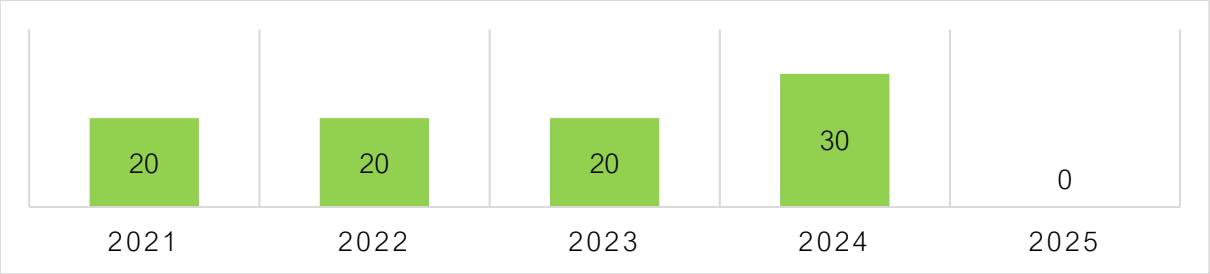
4. Urusan Perdagangan

a. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Sidenreng Rappang relatif stagnan sebesar 20% selama periode 2021–2023, kemudian meningkat menjadi 30% pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 tidak dilaksanakan kegiatan pembinaan sehingga cakupan menurun menjadi 0%. Kondisi ini mengindikasikan terhentinya upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha informal, yang berpotensi menghambat penguatan daya saing, kemampuan manajerial, serta pengembangan usaha. Oleh karena itu,

keberlanjutan program pembinaan perlu menjadi perhatian agar pelaku usaha informal tetap memperoleh pendampingan secara berkesinambungan.

Grafik 2.223
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)

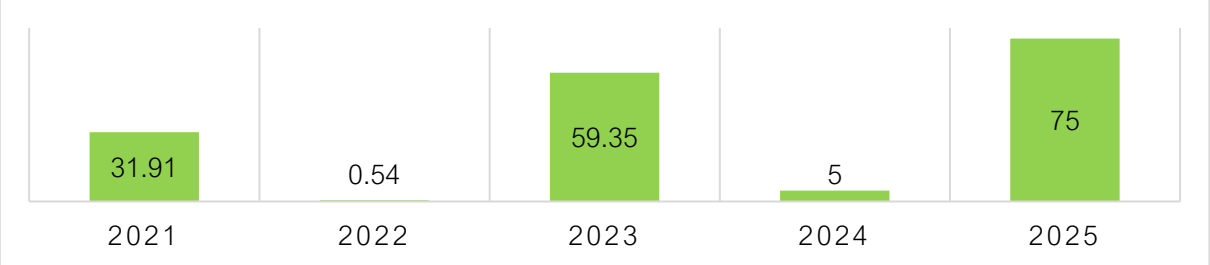


Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

5. Urusan Perindustrian

Cakupan pembinaan kelompok dan pelaku industri di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan perkembangan yang sangat fluktuatif selama periode 2021–2025. Capaian menurun drastis dari 31,91% pada tahun 2021 menjadi 0,54% pada tahun 2022, kemudian meningkat signifikan menjadi 59,35% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 5,00%, sebelum meningkat tajam hingga mencapai 75,00% pada tahun 2025, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Fluktuasi yang cukup besar tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pembinaan belum berlangsung secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan yang lebih berkelanjutan agar peningkatan kapasitas, produktivitas, dan daya saing kelompok maupun pelaku industri dapat terjaga secara optimal.

Grafik 2.224
Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

2.1.5.4. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

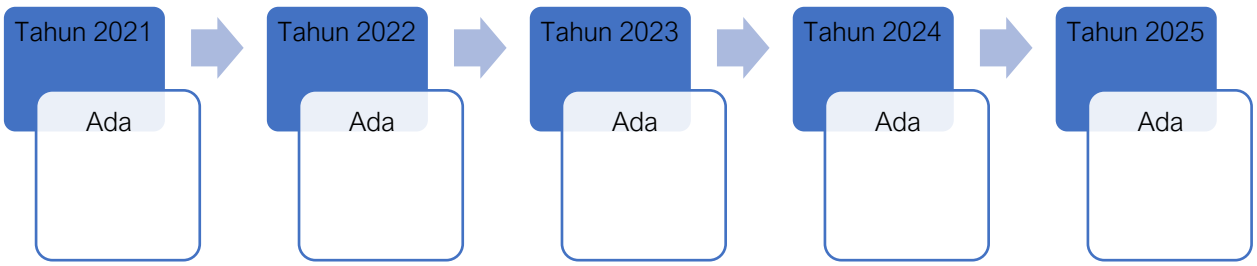
1. Perencanaan

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Menyusun dokumen perencanaan merupakan keharusan bagi pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan perundanga-undangan tersebut mengemukaan bahwa perancanaan pembangunan nasional terdiri atas tiga bagian yaitu rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Grafik 2.225
Ketersediaan Dokumen RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Ada/Tidak Ada)



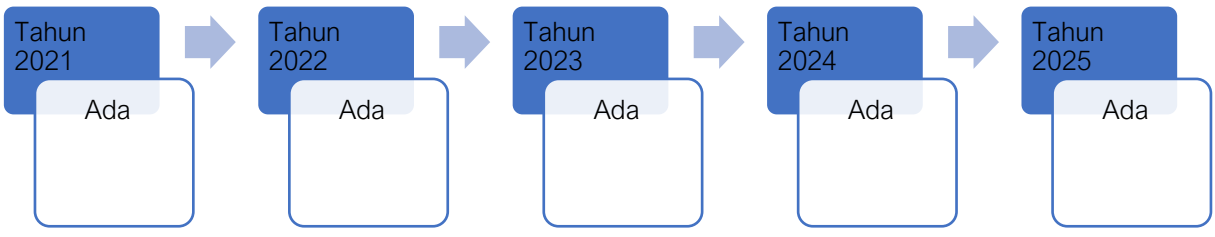
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2026

Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sudah membuat dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang ditetapkan oleh Perda yaitu Perda No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2025.

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

Selain mengamanatkan penyusunan RPJPD dan RPJMD, pemerintah daerah juga harus menyusun dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Menurut Permedagri 86 Tahun 2017. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Grafik 2.226
Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (Ada/Tidak Ada)

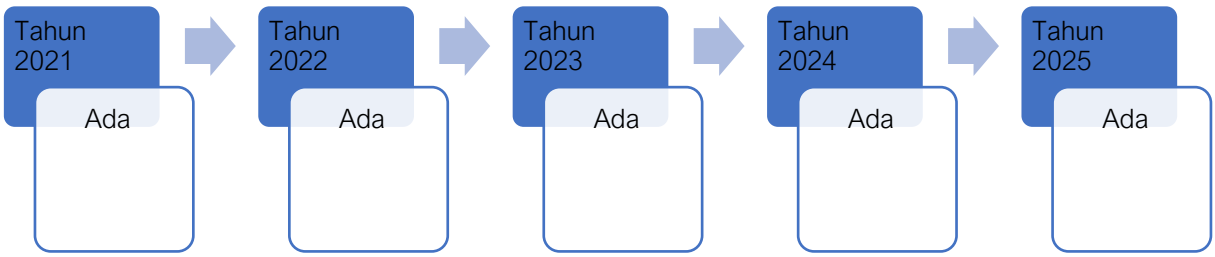


Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2026

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA

Selain mengamanatkan penyusunan RPJPD dan RPJMD, pemerintah daerah juga harus menyusun dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Menurut Permedagri 86 Tahun 2017. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Grafik 2.227
Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025 (Ada/Tidak Ada)



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

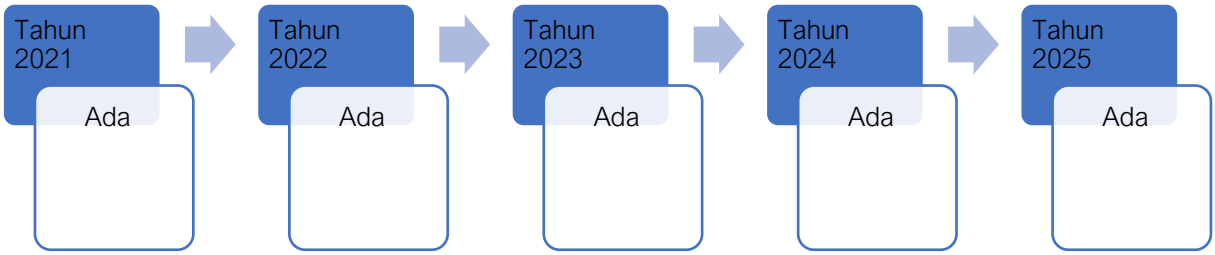
Kewajiban menyusun dokumen RKPD sudah diselesaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunya dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, Pemerintah daerah membuat Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

d. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Pemanfaatan ruang merupakan aktivitas menata ruang menjadi bermacam peruntukan, misalnya dijadikan sebaga pusat kegiatan daerah atau pusat pertumbuhan daerah, tergantung dari bagaimana pemerintah daerah mengarahkan pembangunan. Setiap program pembangunan daerah tidak bisa dijalankan jika melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW). Artinya dokumen RTRW pada dasarnya memuat rencana pemanfaatan ruang dan harus ditaati oleh pemerintah daerah. Dokumen RTRW adalah salah satu dokumen wajib dari sekian banyak dokumen perencanaan pemangunan berdasrakan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Sama halnya dengan dokumen wajib lainya, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun dan menetapkan dokumen RTRW. Dokumen tersebut ditetapkan dengan Perda No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 atas pertimbangan pemanfaatan ruang yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Grafik 2.228
Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025
(Ada/Tidak Ada)



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; diolat Tahun 2026

e. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD

Dokumen RPJMD merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang mesti dijabarkan kedalam program pembangunan tahunan. Perangkat daerah Bappeda diberikan kewenangan untuk menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan harapan ada harmonisasi antara ketiga dokumen tersebut karena dibuat oleh perangka daerah yang sama, meskipun dalam penyusunannya Bappeda harus bekerja sama dengan perangkat daerah lain. Selama ini, salah satu isu yang berkembang dalam dunia perencanaan adalah konsistensi dokumen perencanaan, baik RPJPD ke RPJMD ataupun dengan RKPD.

Namun sepertinya isu inkonsistensi antara RPJMD dan RKPD di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terjadi terlihat dari angka persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD yang mencapai 100 persen sepanjang tahun 2021 hingga 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa program dalam RPJMD tahun berkenaan Sebagian besar telah dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD. Hal ini tentu sangat positif sebab sebagian rencana pembangunan daerah dalam RPJMD adalah janji politik kepala dan wakil kepala daerah terpilih, sehingga jika kedua dokumen tersebut tidak konsisten maka sangat mungkin ada janji kampanye yang tidak terealisasi.

f. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

Setelah RKPD dibuat, maka tahapan selanjutnya adalah penganggaran. Pada tahapan ini, dokumen RKPD harus menjadi pedoman utama dalam menyusun rencana anggaran (RAPBD), setelah sebelumnya telah dibuat KUA PPAS sebagai jembatan antara RKPD dan RAPBD. RKPD sebagai dokumen yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk satu tahun ke depan, harus menjadi acuan utama dalam penyusunan RAPBD. Penjabaran tersebut sudah dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2025, penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD sudah mencapai 100

persen, menunjukkan bahwa konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sudah baik.

g. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Dokumen RTRW memuat struktur dan pola ruang yang akan diwujudkan oleh pemerintah daerah sepanjang periode RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu tahun 2012 hingga 2032. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jika sudah ditentukan, maka semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah harus mengikuti struktur dan pola ruang.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini telah sepenuhnya mengikuti RTRW. Selama tahun 2021 hingga 2025, persentase program/kegiatan pemerintah daerah yang sesuai dengan RTRW adalah 100 persen dan tidak pernah mengalami perubahan selama periode tersebut. Artinya selama lima tahun terakhir, program/kegiatan pemerintah daerah 83 persen sudah sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah ditentukan dalam dokumen RTRW. Hal tersebut tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik itu UU Tentang Penataan Ruang maupun Perda Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang RTRW.

2. Keuangan

a. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Adapun 4 jenis opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah sebagai berikut.

1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP): Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3) Opini Tidak Wajar: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

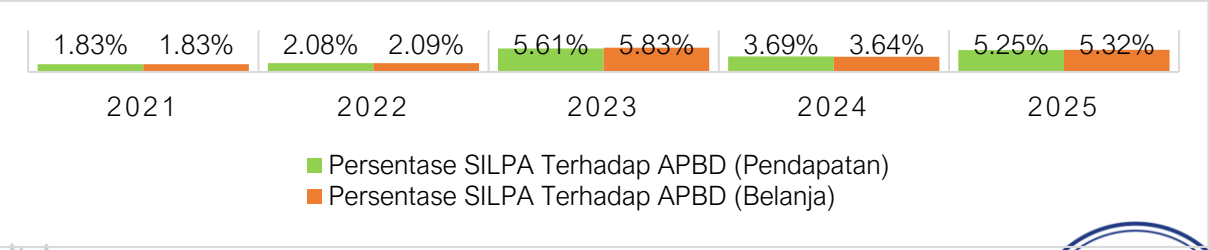
Pemberian opini sangat baik atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021-2025 merupakan prestasi yang membanggakan. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah telah memenuhi standar, kaidah, dan prinsip-prinsip akuntantabilitas yang berlaku.

b. Persentase SILPA

SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, merupakan selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto dalam APBD tahun bersangkutan. Dalam proses penyesuaian APBD, nilai SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Selama periode 2021 hingga 2025, pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan performa penyerapan anggaran yang cukup fluktuatif. Pada awal periode, eksekusi anggaran terbilang efektif dengan persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang memadai di angka 1,83% (2021) dan sekitar 2% (2022). Namun, efisiensi serapan ini tampak menurun di tahun-tahun berikutnya, ditandai dengan melonjaknya SILPA hingga mencapai puncaknya pada 2023 (5,83%) dan masih tertahan di level yang relatif tinggi, yakni di atas 5%, pada penghujung tahun 2025. Terlepas dari tantangan dalam mempertahankan konsistensi serapan tersebut, pemerintah daerah dinilai mampu mengelola proporsi APBD dengan cukup baik; hal ini terlihat dari selisih persentase antara komponen pendapatan dan belanja yang selalu selaras dengan rentang perbedaan yang kecil, yakni di bawah 0,25% setiap tahunnya.

Grafik 2.229
Persentase SILPA Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025

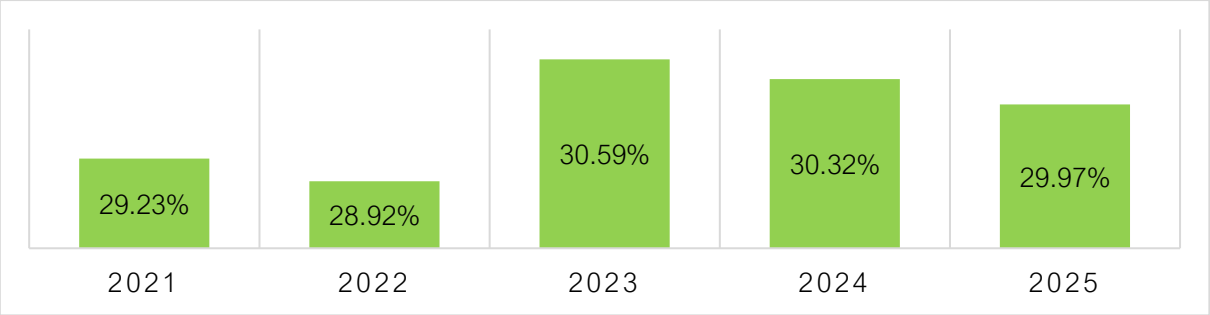


Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

c. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4, yang menetapkan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen, baik melalui intervensi APBN maupun APBD telah dijalankan dengan baik. Tujuan pengalokasian tersebut telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Selama periode 2021 hingga 2025, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan komitmen yang terbilang konsisten dalam memenuhi amanat alokasi belanja pendidikan minimal 20%. Berdasarkan data, porsi anggaran pendidikan di daerah ini selalu melampaui batas minimal tersebut dengan selisih yang cukup meyakinkan. Meskipun realisasinya sempat sedikit menurun pada tahun 2022 (28,92%), porsi anggaran ini kembali didorong naik hingga menyentuh titik tertingginya pada tahun 2023 (30,59%). Kendati pada dua tahun terakhir (2024–2025) terlihat adanya tren penurunan porsi anggaran secara perlahan hingga menyentuh angka 29,97%, secara keseluruhan postur pembiayaan sektor pendidikan dinilai sudah memadai karena secara stabil terus dipertahankan pada kisaran 29% hingga 30% setiap tahunnya.

Grafik 2.230
Persentase Belanja Pendidikan (20%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



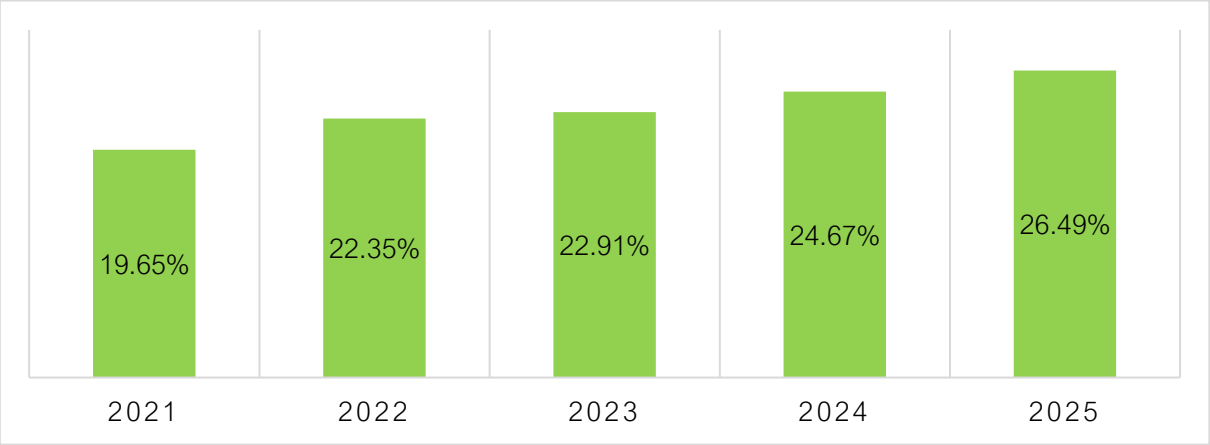
Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

d. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Dukungan pembiayaan yang memadai dibutuhkan untuk pembangunan kesehatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menetapkan alokasi anggaran minimal 5 persen dar APBN dan 10 persen dari APBD untuk sektor kesehatan. Selama kurun waktu 2021 hingga 2025, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren kinerja yang positif dan sangat konsisten dalam pemenuhan alokasi belanja kesehatan. Merujuk pada ketentuan alokasi minimal sebesar 10% dari APBD, capaian pembiayaan daerah ini dinilai sangat memadai karena porsinya selalu terealisasi hampir dua hingga lebih dari dua setengah kali lipat dari ambang batas kewajiban tersebut. Dimulai dari angka 19,65% pada tahun 2021, persentase alokasi

belanja kesehatan mencatatkan tren kenaikan yang terus berlanjut setiap tahunnya tanpa mengalami sedikit pun fluktuasi penurunan. Pertumbuhan positif ini memuncak secara bertahap hingga menyentuh porsi tertingginya di angka 26,49% pada akhir periode tahun 2025. Konsistensi peningkatan porsi anggaran dari tahun ke tahun ini merepresentasikan komitmen kuat dan terukur dari pemerintah daerah dalam memprioritaskan sektor kesehatan secara berkelanjutan.

Grafik 2.231
Persentase Belanja Kesehatan (10%) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

e. Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa

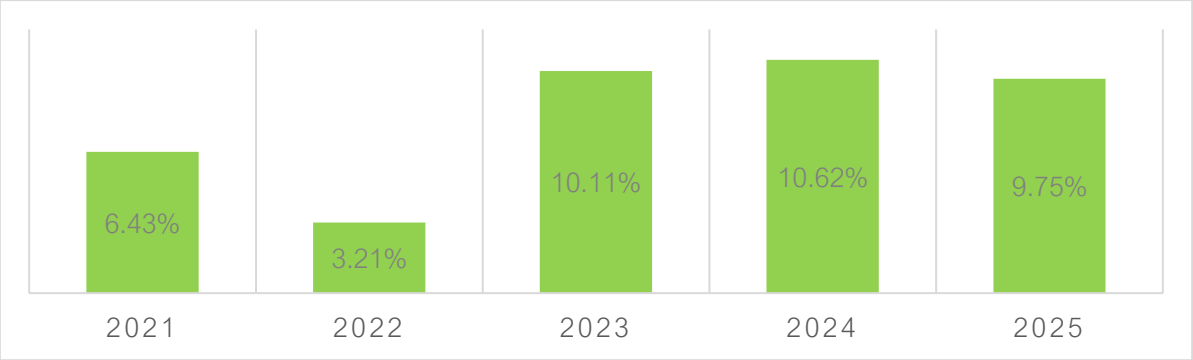
Bagi hasil merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki implikasi yang sangat luas, tidak hanya bagi pemerintah daerah itu sendiri, tetapi juga bagi berbagai pihak yang terlibat. Prinsip dasar dari bagi hasil adalah memastikan asas keadilan bagi daerah yang berhak.

Selama periode 2021 hingga 2025, persentase alokasi Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan dinamika fluktuasi yang sangat mencolok, yang secara garis besar terbagi ke dalam dua fase performa yang berbeda.

Pada awal periode, realisasi proporsi bagi hasil terbilang rendah dan kurang stabil. Setelah mencatatkan angka 6,43% pada tahun 2021, alokasi ini anjlok secara drastis hingga lebih dari separuhnya, menyentuh titik terendah di angka 3,21% pada tahun 2022.

Namun, pemerintah daerah dinilai berhasil melakukan lompatan kinerja yang sangat impresif pada fase berikutnya. Memasuki tahun 2023, terjadi lonjakan alokasi yang sangat signifikan—lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya—hingga menyentuh angka 10,11%. Tren penguatan ini bahkan terus berlanjut hingga mencapai titik puncaknya sebesar 10,62% pada tahun 2024. Meskipun pada akhir periode di tahun 2025 persentasenya sedikit terkoreksi ke angka 9,75%, secara keseluruhan komitmen penyaluran bagi hasil ke desa pada tiga tahun terakhir (2023–2025) dinilai jauh lebih optimal dan berhasil dipertahankan pada level yang relatif stabil di kisaran 10%.

Grafik 2.232
Bagi Hasil Kabupaten/Kota Dan Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

f. Penetapan APBD

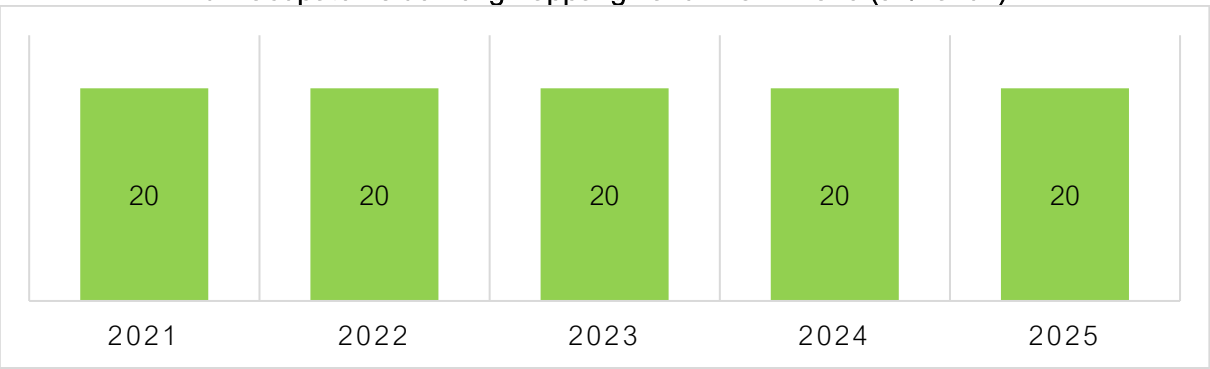
Setiap tahun APBD Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan melalui proses pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). APBD disusun dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan pendapatan daerah. Selama kurun waktu 2021-2025, penetapan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang selalu dilakukan tepat waktu.

3. Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

a. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatkan kualitas pegawai merupakan bagian integral dari upaya reformasi pemerintahan untuk mencapai *good governance*. Salah satu strategi yang digunakan adalah melalui penyediaan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi serta tuntutan perkembangan internal dan eksternal. Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Sidenreng Rappang telah secara konsisten mengalokasikan rata-rata 20 jam pembelajaran per tahun bagi pegawai dalam program Pendidikan dan pelatihan.

Grafik 2.233
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (JP/Tahun)

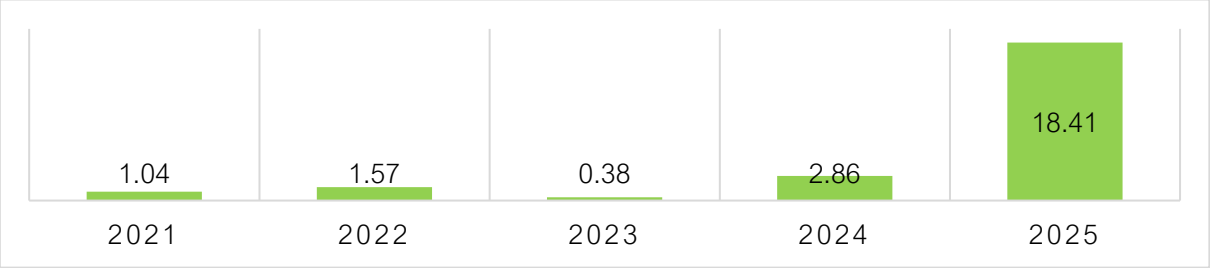


Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

b. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dalam upaya meningkatkan kualitas ASN, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengambil langkah melalui pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 210 Ayat (2) mengenai pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, dan/atau pelatihan (Diklat). Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan bagi ASN dilaksanakan melalui pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar. Selama periode 2021 hingga 2025, tingkat partisipasi ASN Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pendidikan dan pelatihan formal menunjukkan pola yang sangat timpang. Pada rentang 2021–2024, pengembangan kapasitas aparatur berjalan lambat dengan partisipasi yang sangat minim, di mana angka tertinggi hanya mencapai 2,86% (2024) dan bahkan sempat anjlok ke titik terendah 0,38% pada 2023. Perubahan drastis baru terjadi di akhir periode tahun 2025, dengan lonjakan persentase secara eksponensial hingga mencapai 18,41%. Meskipun peningkatan masif di tahun terakhir ini mencerminkan adanya upaya akselerasi kompetensi yang agresif, tren ekstrem ini mengindikasikan bahwa pola pengembangan SDM aparatur belum terbangun secara konsisten dan berkesinambungan setiap tahunnya.

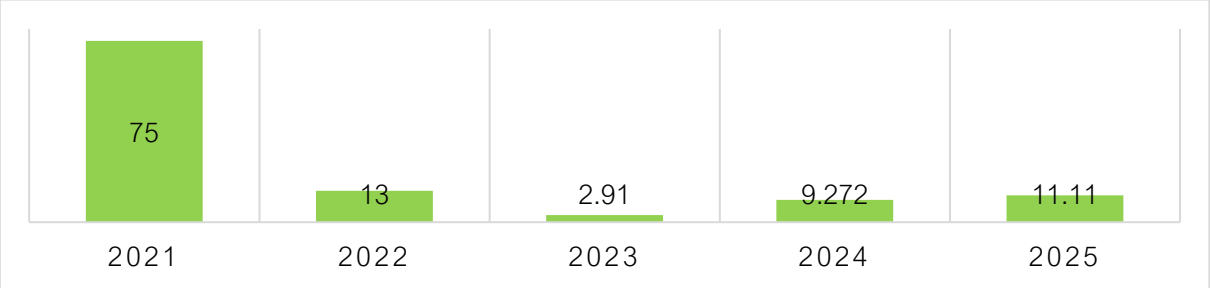
Grafik 2.234
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

c. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan penurunan yang signifikan setelah tahun pertama. Pada tahun 2021, angka keikutsertaan sempat berada di level tertinggi sebesar 75%, namun langsung anjlok drastis pada tahun 2022 menjadi 13% dan menyentuh titik terendah pada tahun 2023 di angka 2,91%. Meskipun terdapat tren pemulihan secara bertahap pada dua tahun terakhir—yaitu naik menjadi 9,272% (2024) dan 11,11% (2025)—realisasi di akhir periode ini masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan capaian awal di tahun 2021. Pola fluktuasi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan atau kepesertaan diklat struktural bagi para pejabat daerah mengalami penurunan intensitas yang cukup besar setelah tahun 2021.

Grafik 2.235
Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

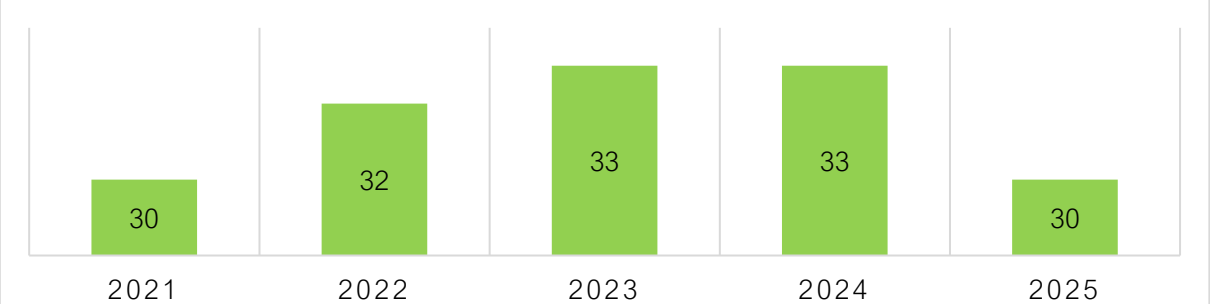


Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

d. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Pada tahun 2017 terjadi penyesuaian sesuai dengan amanat PP 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 yang mengakibatkan adanya perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya yang berjumlah 27 jabatan. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021 hingga 2025 bergerak relatif dinamis namun tetap stabil dalam rentang yang sempit. Jumlah jabatan tercatat sebanyak 30 posisi pada tahun 2021, kemudian mengalami sedikit penambahan menjadi 32 posisi pada 2022, dan sempat bertahan di angka tertinggi sebanyak 33 posisi selama rentang tahun 2023 hingga 2024. Pada penghujung periode di tahun 2025, jumlah JPT kembali mengalami penurunan menjadi 30 posisi, sama seperti kondisi di awal periode. Perubahan kumulatif yang hanya berkisar antara 30 hingga 33 jabatan ini mengindikasikan bahwa struktur organisasi lini atas di pemerintahan kabupaten tersebut cenderung dipertahankan secara ramping dan konsisten, tanpa adanya pemekaran kelembagaan yang signifikan.

Grafik 2.236
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025

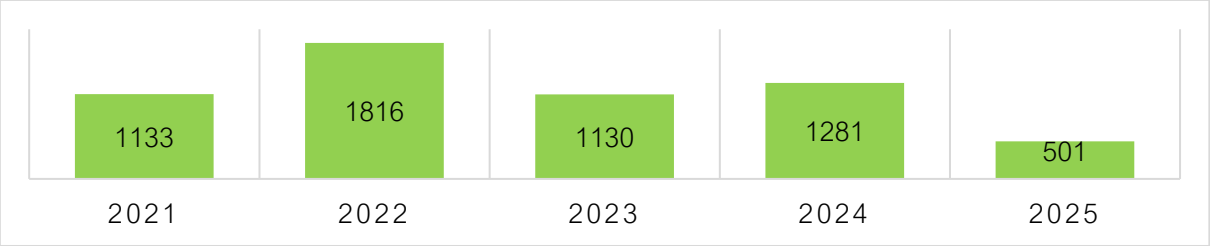


Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

e. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Selama lima tahun terakhir jumlah Jabatan Administrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2021–2025 menunjukkan tren fluktuasi sebelum akhirnya menyusut. Setelah dimulai dengan 1.133 jabatan pada tahun 2021, jumlah ini naik ke titik tertingginya sebesar 1.816 posisi pada tahun 2022. Meskipun sempat bergerak dinamis di angka 1.130 pada 2023 dan naik ke 1.281 pada 2024, terjadi penurunan yang masif di akhir periode tahun 2025 hingga hanya menyisakan 501 jabatan. Penurunan di tahun terakhir ini mengindikasikan adanya kebijakan restrukturisasi organisasi atau simplifikasi birokrasi yang sangat signifikan (seperti pengalihan ke jabatan fungsional) di lingkungan pemerintah daerah.

Grafik 2.237
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025

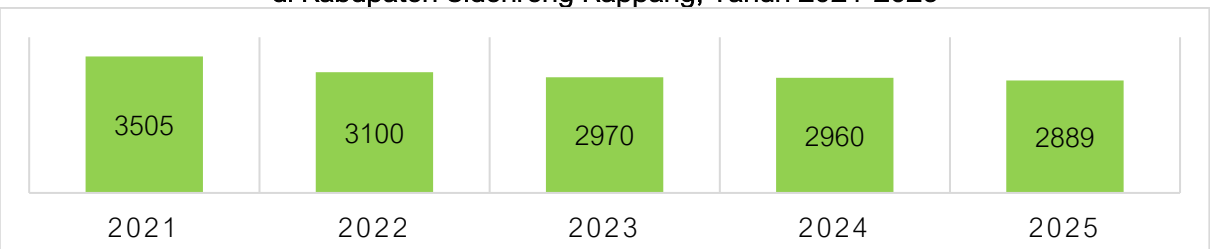


Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

f. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah

Jumlah pemangku Jabatan Fungsional Tertentu di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren penurunan yang konsisten setiap tahunnya selama periode 2021 hingga 2025. Jumlah jabatan ini berkurang secara bertahap dari angka tertinggi sebanyak 3.505 posisi pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 3.100 (2022), 2.970 (2023), 2.960 (2024), hingga mencapai titik terendah sebanyak 2.889 posisi pada tahun 2025. Tren penurunan yang stabil dalam lima tahun terakhir ini mengindikasikan adanya penyusutan jumlah personel atau penataan ulang terhadap formasi jabatan fungsional tertentu di lingkungan pemerintah daerah.

Grafik 2.238
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah
di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

4. Penelitian Dan Pengembangan

a. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah memberikan pedoman yang jelas tentang perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Pada bagian kedua tentang rencana kerja Kelitbangan Pasal 9 dijelaskan bahwa Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Daerah Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun Rencana Kerja Kelitbangan. Rencana Kerja Kelitbangan terdiri dari Rencana Induk Kelitbangan (RIK) yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Tahunan. RIK menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah wajib mengintergrasikan kegiatan Kelitbangan ke dalam agenda pembangunan jangka Panjang yang sudah di rencanakan.

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Sidenreng Rappang memasukkan semua rencana Kelitbangan dalam RPJMD ke RKPD. Indikator yang dapat digunakan adalah angka persentase implementasi rencana Kelitbangan yang mencapai 100 persen dari tahun 2021 hingga 2025. Itu berarti, pemerintah daerah mengadopsi semua rencana kelitbangan di RPJMD masuk kedalam RKPD.

b. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Hasil penelitian yang tidak diaplikasikan secara efektif sering kali menjadi masalah dalam pengelolaan sumber daya. Tantangan selanjutnya setelah penelitian dilakukan adalah memastikan bahwa temuan tersebut tidak hanya berakhir sebagai dokumen, tetapi bermanfaat, baik dalam bentuk kebijakan atau teknologi tepat guna. Dengan merancang inplementasi yang jelas dan memastikan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi, hasil penelitian dapat menjadu sumber daya berharga dalam memecahkan permasalahan di daerah. Berbeda dengan daerah lain, Kabupaten Sidenreng Rappang satu diantara sedikit daerah yang memanfaatkan hasil Kelitbangan secara optimal, dilihat dari angka persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan yang sudah mencapai 100 persen sejak tahun 2021 hingga 2025.

c. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Selain penyusunan rencana induk Kelitbangan, perangkat daerah yang bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan diharuskan untuk membuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa). SIDa merupakan suatu system komprehensif yang memfasilitasi proses kolaboratif untuk menumbuhkembangkan inovasi antara berbagai lembaga dan entitas, termasuk pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga

penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat setempat. Dokumen Rencana Induk Kelitbangan (RIK) dan SIDa saling melengkapi dengan tujuan untuk mengubah hasil penelitian menjadi inovasi yang efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada di daerah.

Perangkat dearah yang bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan berperan sebagai fasilitator utama yang memfasilitasi semua perangkat dalam menerapkan inovasi. Selama lima tahun terakhir, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai 100 persen pada tahun 2021 hingga 2025. Hal ini menandakan bahwa semua perangkat daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang telah disiapkan dan didukung untuk melaksanakan inovasi dalam rangka pembangunan daerah.

d. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan Di Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengalami kemajuan yang siginifikan dalam menerapkan inovasi di berbagai sektor dalam implementasi rencana kelitbangan, pemanfaatan kelitbangan dan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan inovasi dengan mencapai angka 100 persen, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas layanan publik sehingga relatif mudah untuk menerapkan semua inovasi yang diusulkan.

2.1.5.5. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

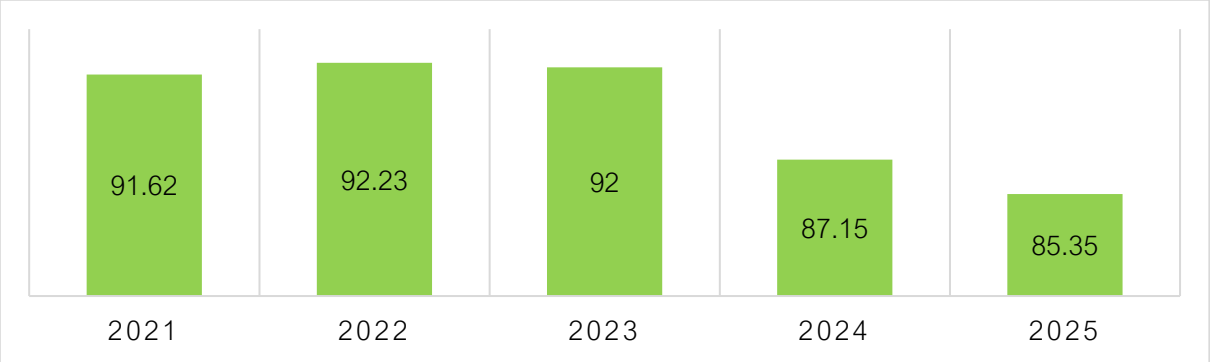
1. Inspektorat

a. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persentase tindak lanjut temuan merujuk pada angka atau proporsi hasil audit atau evaluasi yang diikuti oleh langkah-langkah tindak lanjut. Tujuan dari persentase tindak lanjut adalah untuk mengukur sejauh mana rekomendasi atau temuan yang diidentifikasi selama audit atau evaluasi telah direspons dan diimplementasikan oleh pihak yang bersangkutan. Persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan di dua tahun terakhir. Kinerja penyelesaian temuan awalnya bertahan cukup tinggi pada rentang tahun 2021–2023 di kisaran 91%–92%, dengan capaian puncak sebesar 92,23 pada tahun 2022. Namun, memasuki tahun 2024, angka efektivitas ini mulai merosot ke 87,15 dan terus turun hingga menyentuh titik terendah sebesar 85,35 pada tahun 2025. Penurunan yang konsisten di akhir periode ini mengindikasikan adanya perlambatan atau tantangan yang perlu dievaluasi dalam merespons dan menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK seharusnya dilakukan dengan cepat dan memadai, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pasal 20 dan 26 dalam undang-undang tersebut mewajibkan pejabat terkait untuk secara serius menindaklanjuti hasil pemeriksaaan BPK.

Grafik 2.239
Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

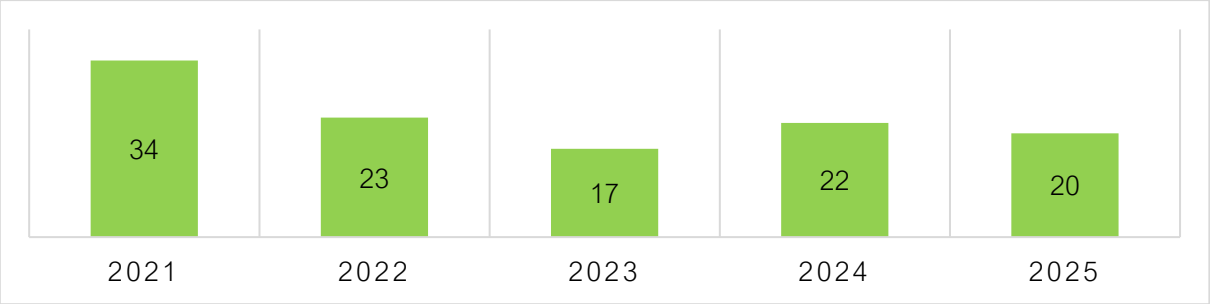


Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; diolah Tahun 2026

b. Jumlah Temuan BPK

Selama lima tahun terakhir, jumlah temuan BPK di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2021–2025 secara umum menunjukkan tren penurunan yang positif meskipun diwarnai sedikit fluktuasi. Jumlah kasus berada di titik tertinggi pada tahun 2021 dengan 34 temuan, lalu menurun secara signifikan hingga mencapai level terendah sebanyak 17 temuan pada tahun 2023. Meskipun sempat mengalami sedikit kenaikan menjadi 22 temuan pada tahun 2024, angka tersebut berhasil ditekan kembali menjadi 20 temuan di penghujung tahun 2025. Penurunan total kasus yang cukup signifikan dibandingkan awal periode ini mengindikasikan adanya peningkatan kepatuhan serta perbaikan kualitas tata kelola keuangan oleh pemerintah daerah.

Grafik 2.240
Jumlah Temuan BPK di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

2.1.6. Standar Pelayanan Minimal

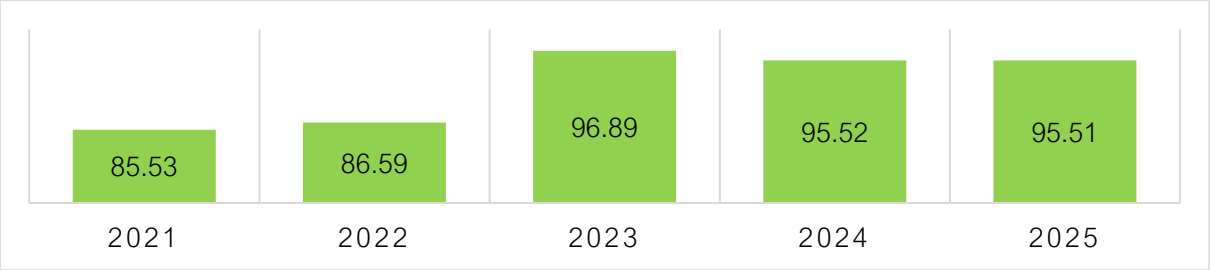
2.1.6.1. Urusan Pendidikan

1. Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar

Partisipasi pendidikan dasar merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur capaian program wajib belajar 9 tahun. Rentang usia 7 – 15 tahun mencakup anak-anak yang

semestinya berada pada jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Tingkat partisipasi anak pada rentang usia ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar telah terpenuhi secara merata. Indikator ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkualitas.

Grafik 2.241
Jumlah Warga Negara yang Berpartisipasi Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren peningkatan yang positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebesar 82,49 persen. Angka ini terus meningkat pada tahun 2021 dan 2022 berturut-turut menjadi 85,53 persen dan 86,59 persen. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, melonjak menjadi 96,89 persen. Namun mengalami penurunan menjadi 95,52 persen pada tahun 2024. Jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar relatif stabil pada tahun 2025 dengan capaian 95,51 persen.

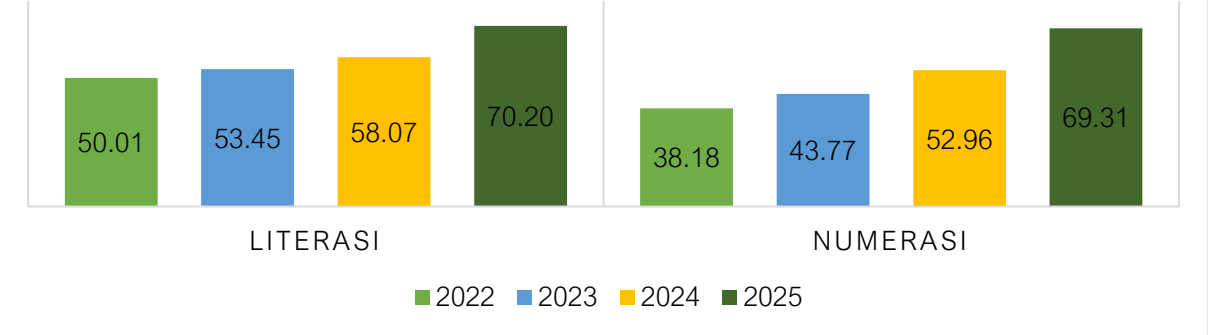
Penurunan angka partisipasi pendidikasn dasar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya terbatasnya fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di daerah terpencil, serta masalah ekonomi yang masih dihadapi oleh sebagian keluarga yang menghambat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, fenomena putus sekolah pada jenjang SMP masih menjadi masalah serius yang perlu dicarikan solusinya. Terdapat pula faktor sosial yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam menyekolahkan anak, seperti ketidakmampuan ekonomi dan kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan.

2. **Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional**

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang sangat penting bagi peserta didik di jenjang sekolah dasar sebagai fondasi dalam proses pembelajaran pada jenjang berikutnya. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca, tetapi juga meliputi keterampilan memahami, menafsirkan, serta menggunakan informasi dari berbagai jenis teks secara efektif. Sementara itu, numerasi meliputi kemampuan untuk berpikir logis, memahami

konsep bilangan dan hubungan matematis, serta menerapkan keterampilan matematika dalam kehidupan sehari-hari.

Grafik 2.242
Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SD Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2025

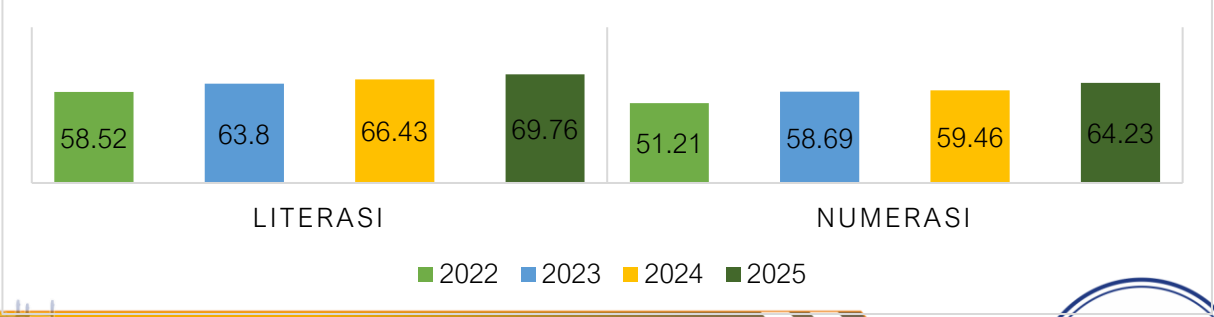


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan tren peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa sekolah dasar dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, persentase capaian literasi siswa berada di angka 50,01 persen, kemudian meningkat dari 53,45 persen pada tahun 2023 menjadi 58,07 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai angka 70,20 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya keberhasilan dari berbagai upaya perbaikan dalam kualitas pembelajaran literasi di tingkat sekolah dasar di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mencerminkan upaya yang lebih baik dalam membekali siswa dengan kemampuan dasar membaca, menulis, dan memahami teks.

Sementara itu, pada kemampuan numerasi siswa sekolah dasar berdasarkan hasil asesmen nasional juga menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2022, persentase capaian numerasi baru mencapai 38,18 persen. Mengalami peningkatan signifikan dari 43,77 persen pada tahun 2023 menjadi 52,96 persen pada tahun 2024. Dan pada tahun 2025 mencapai angka 69,31 persen. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan dalam kemampuan siswa untuk memahami dan menerapkan konsep matematika dasar, seperti operasi bilangan, pengukuran, dan pemecahan masalah sederhana.

Grafik 2.243
Persentase Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa SMP Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2025



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Hasil Asesmen Nasional menunjukkan adanya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa sekolah menengah pertama dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, persentase capaian literasi siswa berada di angka 58,52 persen, kemudian meningkat menjadi 63,8 persen pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 59,46 persen, capaian kemampuan literasi kembali mensgalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 dengan persentase mencapai 69,76 persen. Peningkatan ini menandakan adanya kemajuan berkelanjutan dalam kualitas pembelajaran literasi di tingkat sekolah menengah pertama, yang mencerminkan peningkatan kemampuan siswa dalam memahami teks dan berkomunikasi secara efektif.

Pada aspek kemampuan numerasi siswa SMP berdasarkan hasil asesmen nasional juga menunjukkan sedikit peningkatan dari 58,69 pada tahun 2023 menjadi 59,46 pada tahun 2024. Penignkatan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2025 dengan capaian mencapai 64,23 persen. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kemsampuan siswa SMP dalam memahami dan menerapkan konsep-konsep matematika yang lebih kompleks.

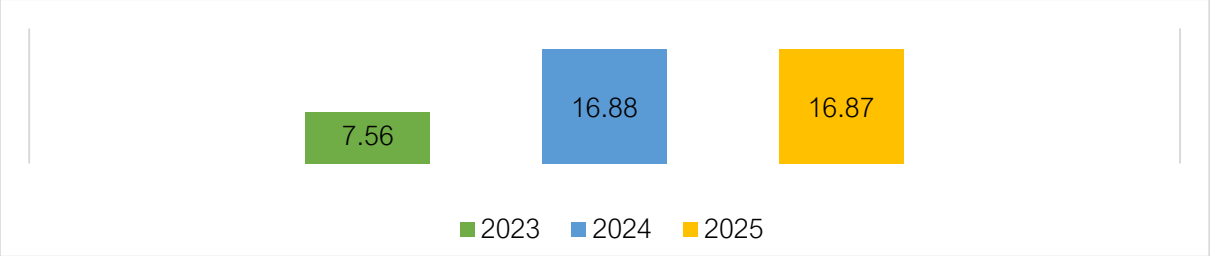
3. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan bentuk layanan pendidikan nonformal yang ditujukan bagi warga negara, khususnya usia 7–18 tahun, yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah. Program ini menjadi solusi bagi anak-anak yang putus sekolah atau tidak dapat mengakses pendidikan formal karena berbagai hambatan sosial, ekonomi, atau geografis. Melalui satuan pendidikan nonformal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), mereka dapat mengikuti program Paket A, Paket B, dan Paket C yang setara dengan SD, SMP, dan SMA.

Partisipasi dalam pendidikan kesetaraan mencerminkan komitmen negara untuk menjamin pemenuhan hak setiap anak atas pendidikan, tanpa terkecuali. Selain memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formal secara setara, program ini juga membekali peserta dengan keterampilan dasar dan penanaman nilai-nilai karakter, agar mereka dapat kembali ke jalur pendidikan atau terjun ke dunia kerja dengan lebih siap dan percaya diri.

Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (untuk mereka yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah) mengalami kenaikan signifikan dari 7,56 persen pada tahun 2023 menjadi 16,88 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2025, capaian partisipasi relatif stabil di angka 16,87 persen. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan akses terhadap pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang membantu anak-anak dan remaja yang sebelumnya tidak dapat mengakses pendidikan formal untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara.

Grafik 2.244
Jumlah Warga Negara Yang Berpartisipasi Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023-2025

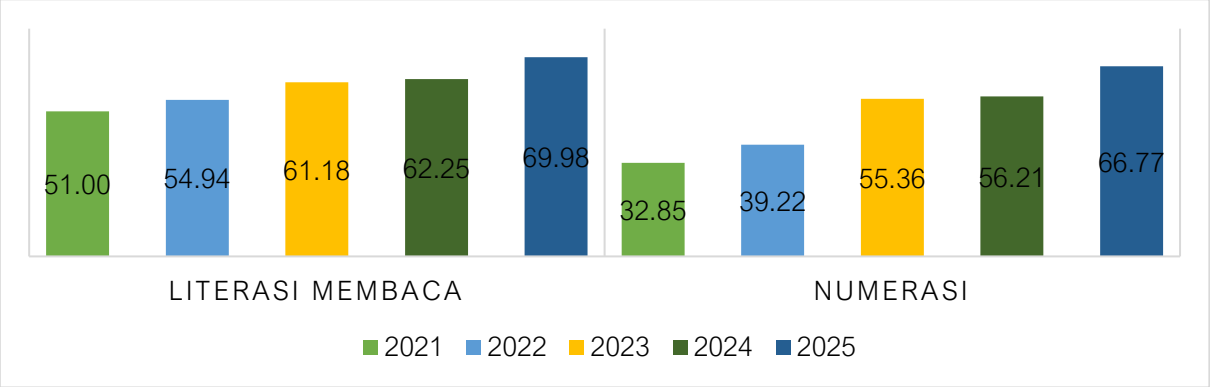


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

4. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional diperoleh dari jumlah satuan pendidikan di daerah yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah. Literasi membaca adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi berbagai jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan kemampuan numerasi adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Grafik 2.245
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah Tahun 2026

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk kemampuan literasi membaca tercatat 51,00 persen, meningkat signifikan menjadi 69,98 persen pada tahun

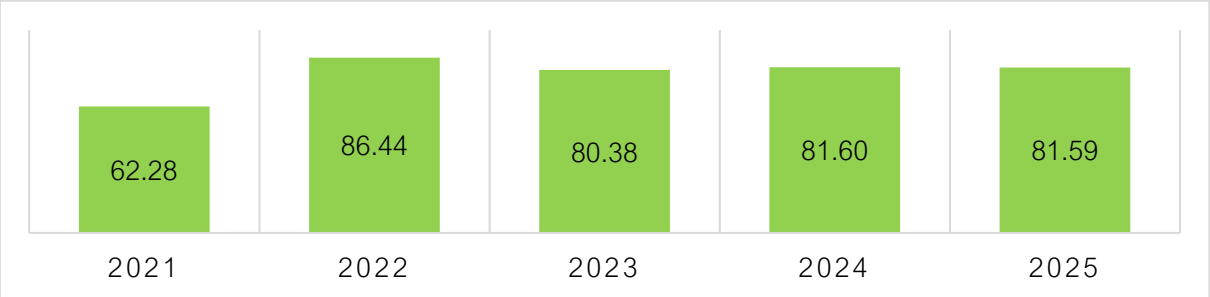
2025. Demikian halnya pada kemampuan numerasi, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 32,85 persen pada tahun 2021, meningkat tajam menjadi 66,77 persen pada tahun 2025. Peningkatan capaian literasi membaca dan numerasi ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas dan pemerataan pendidikan khusunya pada aspek hasil pembelajaran di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Salah satu indikator untuk melihat kemajuan sumberdaya manusia yang berdaya saing adalah kualitas pendidikan yang digambarkan dari hasil pembelajaran melalui capaian literasi membaca dan numerasi suatu daerah. Literasi membaca adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi), sedangkan Kemampuan numerasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

5. Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan dasar. Pada umumnya Pendidikan anak usia dini bertujuan mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Grafik 2.246
Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

Tingkat partisipasi anak usia 5 – 6 tahun pada PAUD di Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan pola fluktuatif sepanjang lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, tingkat partisipasi PAUD tercatat sebesar 62,28 persen, kemudian meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi 86,44 persen. Namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 80,38 persen, sebelum kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 81,60 persen, dan relative stabil pada

tahun 2025 dengan capaian 81,59 persen. Kenaikan ini menggambarkan adanya kemajuan dalam penyediaan layanan PAUD dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dini bagi perkembangan anak-anak usia tersebut.

2.1.6.2. Urusan Kesehatan

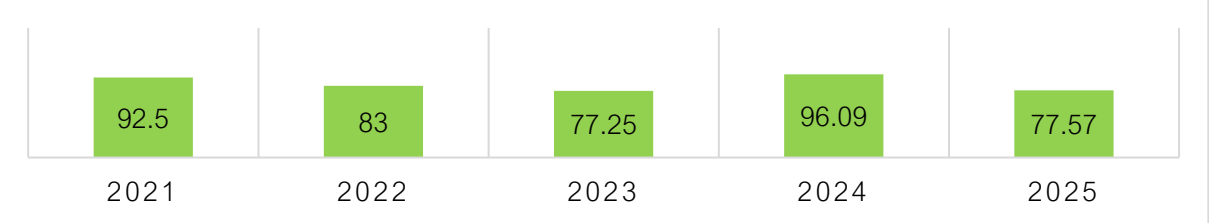
1. Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar yang sangat strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Layanan ini bertujuan untuk menjamin kesehatan ibu selama masa kehamilan, persalinan, hingga nifas, sekaligus memastikan tumbuh kembang janin berlangsung optimal.

Pelayanan kesehatan ibu hamil umumnya mencakup pemeriksaan kehamilan secara berkala (*antenatal care*/ANC), pemantauan kondisi fisik dan gizi ibu, pemberian tablet tambah darah, imunisasi, deteksi dini faktor risiko dan komplikasi, serta edukasi terkait persiapan persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Pelayanan ini dilaksanakan melalui fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, praktik bidan, serta jejaring pelayanan kesehatan lainnya.

Berdasarkan data capaian pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 2021 diperoleh data 92,5 persen dan terus menurun di tahun-tahun berikutnya, hingga berada di angka 77,57 persen di tahun 2025. Hal ini karena berkurangnya kunjungan masyarakat akibat rendahnya kepatuhan ibu hamil untuk mendapatkan layanan kesehatan di Puskesmas, Poskesdes, Pustu atau di Rumah sakit.

Grafik 2.247
Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2021-2025



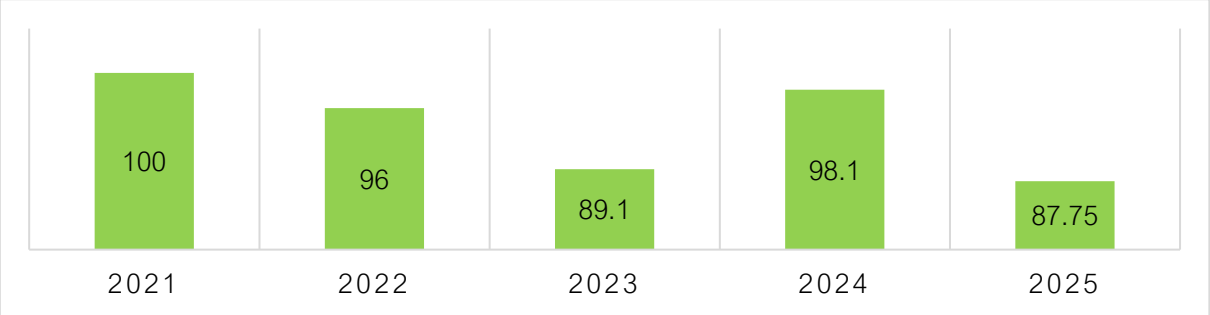
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

2. Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin merupakan aspek krusial dalam menjamin keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan. Saat ini, semakin banyak ibu melahirkan yang mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini berkontribusi langsung dalam menurunkan risiko komplikasi, seperti perdarahan dan infeksi pasca persalinan. Program persalinan aman yang digalakkan pemerintah, termasuk peningkatan kualitas Puskesmas dan rumah sakit, serta ketersediaan bidan di desa, telah mendorong meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong tenaga medis. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat dalam menjamin hak setiap ibu untuk mendapatkan persalinan yang aman dan bermartabat.

Capaian Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktiatif. Pada tahun 2021 sebanyak 100 persen, mengalami penurunan di tahun 2022 dan 2023 di angka 96 dan 89,1 persen. Pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan mencapai 98,1 persen, namun kembali mengalami penurunan di tahun 2025 menjadi 87,75 persen. Capaian menurun disebabkan masih ada beberapa fasilitas atau tenaga kesehatan di beberapa daerah yang belum terjangkau.

Grafik 2.248
Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2021-2025



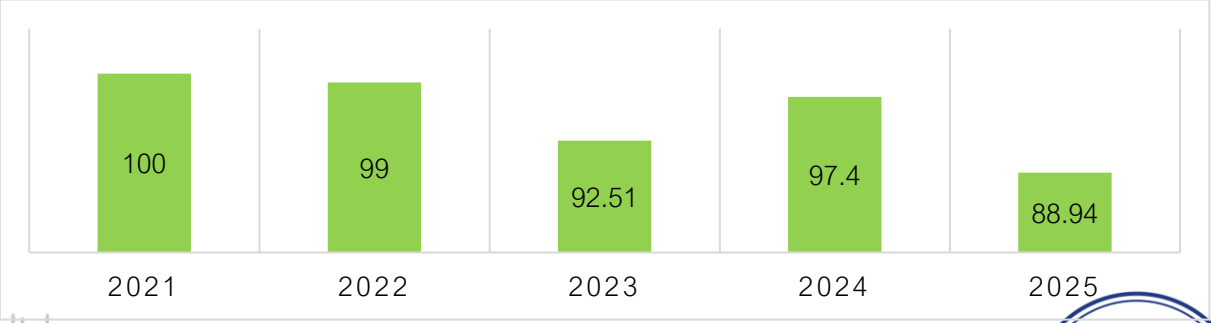
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

3. Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Saat ini, semakin banyak bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan segera setelah dilahirkan, seperti pemeriksaan fisik dasar, inisiasi menyusu dini (IMD), imunisasi hepatitis B, serta penimbangan dan pencatatan status gizi. Cakupan layanan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran orang tua dan peran aktif tenaga kesehatan dalam memberikan perlindungan sejak hari pertama kehidupan. Upaya ini menjadi bagian integral dari strategi nasional untuk menurunkan angka kematian neonatal dan memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan awal kehidupan yang sehat dan layak.

Capaian jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang yaitu, di tahun 2021 mencapai 100 persen namun mengalami flutktuatif menurun di tahun 2022 dan 2023 dan kembali naik di tahun 2024 dengan nilai 97,4 persen. Tahun 2025 kembali mengalami penurunan menjadi 88,94 persen. Capaian menurun disebabkan masih ada beberapa fasilitas atau tenaga kesehatan di beberapa daerah yang belum terjangkau.

Grafik 2.249
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2021-2025



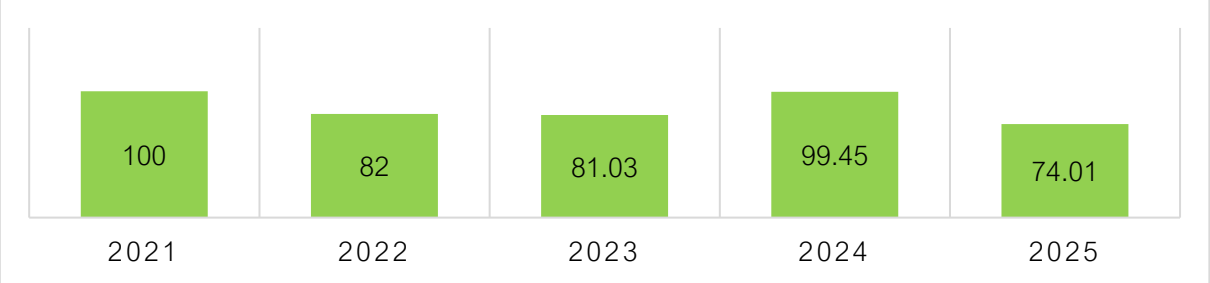
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

4. Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi balita memegang peran penting dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal pada masa-masa awal kehidupannya. Pemeriksaan rutin di Posyandu maupun Puskesmas, seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemberian imunisasi dasar lengkap, serta pemantauan perkembangan motorik dan kognitif, menjadi bagian dari layanan yang terus ditingkatkan. Selain itu, pemberian vitamin A, deteksi dini stunting, dan edukasi gizi kepada orang tua turut menjadi bagian dari upaya pencegahan masalah kesehatan sejak dini. Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam mewujudkan generasi balita yang sehat, cerdas, dan bebas dari gizi buruk.

Capaian jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami fluktuatif tiap tahunnya dimana di tahun 2021 mencapai 100 persen, mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2024 menjadi 99,45 persen. Namun pada tahun 2025 mengalami penurunan di angka 74,01 persen. Capaian menurun disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membawa bayinya ke posyandu ataupun ke puskesmas.

Grafik 2.250
Jumlah Balita Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tahun 2021-2025



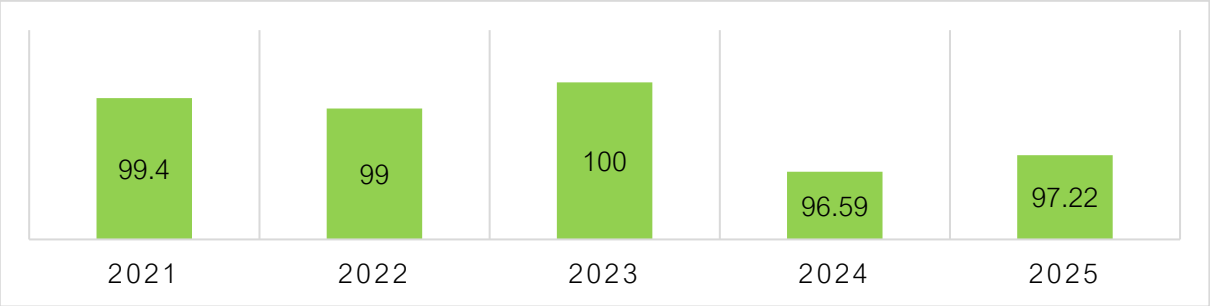
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

5. Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial mereka selama masa sekolah. Melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), anak-anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala, imunisasi lanjutan, penyuluhan tentang kebersihan diri, serta pemantauan status gizi. Layanan ini juga mencakup deteksi dini gangguan penglihatan, pendengaran, dan kesehatan gigi. Dengan adanya kolaborasi antara sekolah, puskesmas, dan orang tua, diharapkan anak-anak usia sekolah dapat tumbuh sehat, aktif, serta lebih siap mengikuti proses pembelajaran dengan optimal

Capaian jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang tergolong tinggi dan relatif stabil, meskipun mengalami fluktuatif. Pada tahun 2021 capaian tercatat sebesar 99,4 persen dan sedikit menurun di tahun 2025 menjadi 97,22 persen. Capaian ini disebabkan karena sudah adanya layanan pemeriksaan kesehatan di sekolah-sekolah.

Grafik 2.251
Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Tahun 2021-2025



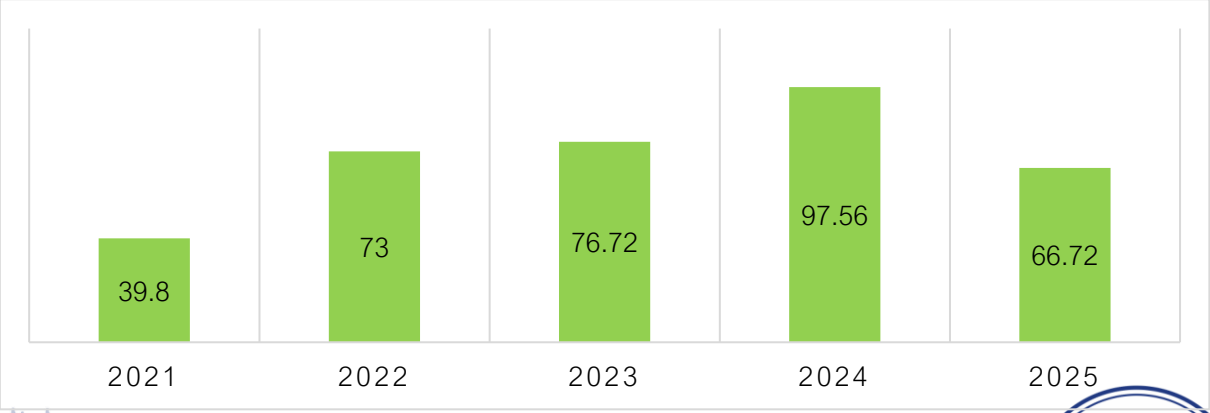
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

6. Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan

Kelompok usia produktif merupakan pilar penting dalam pembangunan, sehingga pelayanan kesehatan bagi mereka menjadi prioritas utama. Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan berkala, edukasi gaya hidup sehat, deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, serta pemeriksaan kesehatan reproduksi. Selain itu, program kesehatan kerja dan kesehatan jiwa juga mulai diperkuat untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental di tengah tekanan kehidupan modern. Dengan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan mudah diakses, diharapkan usia produktif tetap sehat, bugar, dan mampu berkontribusi maksimal dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Capaian jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami peningkatan, dimana di tahun 2021 hanya mencapai 39,8 persen dan naik menjadi 97,56 persen di tahun 2024. Kemudian menurun pada tahun 2025 menjadi 66,72 persen. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya inovasi layanan kesehatan yang mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat usia produktif, disamping itu juga kesadaran masyarakat yang menurun untuk meriksakan kesehatannya di fasilitas layanan kesehatan terdekat.

Grafik 2.252
Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Tahun 2021-2025



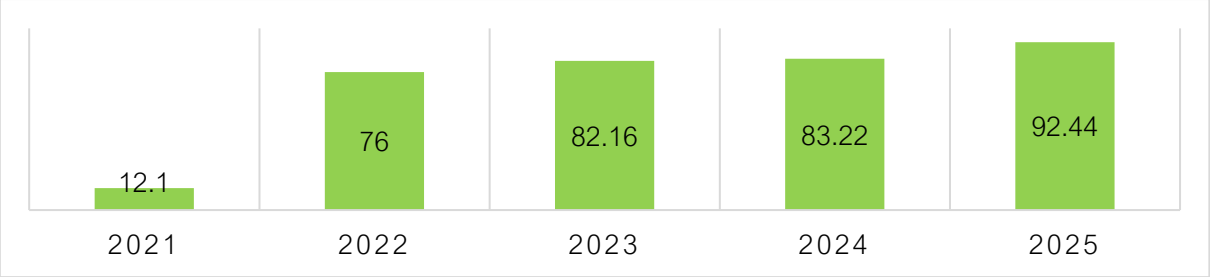
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

7. Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi usia lanjut menjadi semakin penting seiring meningkatnya harapan hidup dan jumlah penduduk lansia. Layanan ini difokuskan pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia, seperti pemeriksaan rutin tekanan darah, kadar gula darah, kesehatan jantung, serta penanganan penyakit kronis dan degeneratif. Selain itu, layanan kesehatan lansia juga mencakup konseling gizi, kebugaran jasmani, dan dukungan kesehatan jiwa untuk menjaga kualitas hidup mereka. Melalui posyandu lansia, kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan, dan fasilitas ramah lansia di Puskesmas maupun rumah sakit, pemerintah berupaya memastikan bahwa lansia tetap sehat, mandiri, dan bermartabat di masa tua.

Capaian jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan di kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan, dimana di tahun 2021 hanya mencapai 12,1 persen dan naik menjadi 92,44 persen di tahun 2025. Capaian peningkatan ini disebabkan karena sudah adanya layanan kesehatan posyandu terintegrasi untuk usia lanjut, disamping itu juga kesadaran masyarakat yang sudah meningkat untuk meriksakan kesehatannya di fasilitas layanan kesehatan terdekat.

Grafik 2.253
Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

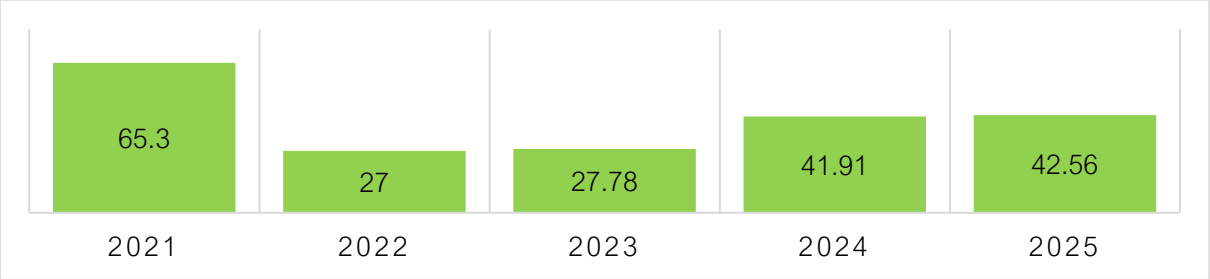
8. Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan komplikasi penyakit tidak menular seperti stroke, gagal jantung, dan penyakit ginjal kronis. Layanan ini mencakup deteksi dini melalui pemeriksaan tekanan darah secara rutin, edukasi tentang pola makan sehat rendah garam, peningkatan aktivitas fisik, serta kepatuhan minum obat. Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya juga menyediakan program manajemen penyakit kronis (Prolanis) yang mendampingi penderita hipertensi dalam mengontrol tekanan darah secara berkelanjutan. Dengan pendekatan preventif dan pengelolaan yang baik, diharapkan kualitas hidup penderita hipertensi dapat tetap terjaga dan risiko komplikasi dapat ditekan.

Capaian jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021 mencapai 65,3

persen, menurun drastis menjadi 27 persen pada tahun 2022. Mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi 41,91 persen. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih menganut paradigma sakit, yaitu Penderita hipertensi memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan hanya ketika dia sakit.

Grafik 2.254
Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Tahun 2021-2025



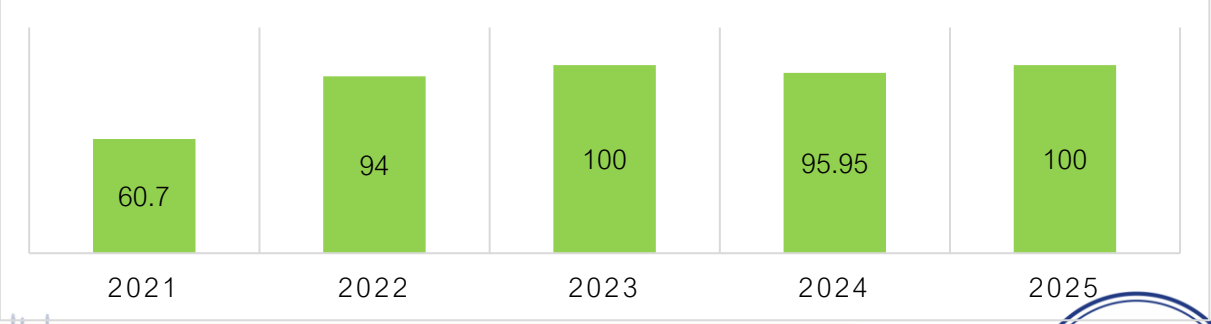
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

9. Jumlah warga negara penderita Diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus difokuskan pada pengelolaan jangka panjang untuk mencegah komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, hingga penyakit jantung. Layanan ini mencakup pemeriksaan gula darah secara berkala, edukasi tentang pengaturan pola makan, aktivitas fisik, serta kepatuhan dalam penggunaan obat atau insulin. Melalui program Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) di Puskesmas, penderita diabetes mendapatkan pendampingan berkelanjutan dari tenaga kesehatan. Pendekatan holistik dan terintegrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan menekan angka komplikasi akibat diabetes.

Capaian jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan, dimana di tahun 2021 hanya mencapai 60,7 persen dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka 100 persen di tahun 2025. Capaian peningkatan ini ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat serta keberhasilan program PROLANIS di Puskesmas khususnya untuk penderita penyakit Diabetes Melitus.

Grafik 2.255
Jumlah warga negara penderita diabetes meilitus 2021-2025



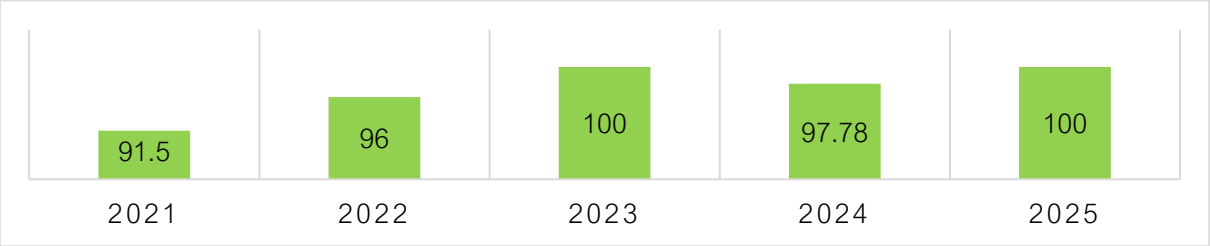
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

10. Jumlah warga negara penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan

Pelayanan kesehatan untuk penderita gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia dan gangguan bipolar, dirancang untuk memberikan dukungan menyeluruh—mulai dari deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial. Melalui layanan di Puskesmas serta Rumah Sakit Jiwa (RSJ), pasien mendapatkan akses konsultasi psikiatri, terapi psikososial, dan terapi obat-obatan standar sesuai pedoman WHO dan Kementerian Kesehatan. Program pengobatan secara berkala digabungkan dengan kegiatan rehabilitasi melalui Klinik Kesehatan Jiwa dan posyandu lansia/jiwa, memberikan lingkungan ramah dan pendampingan bagi pasien. Selain itu, keluarga dilibatkan aktif sebagai bagian dari proses perawatan—mendapatkan edukasi tentang gejala, manajemen risiko kekambuhan, dan cara mendukung pemulihan pasien di rumah.

Capaian jumlah warga negara penderita gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan, dimana di tahun 2021 berada diangka 91,5 persen dan di tahun 2025 mencapai angka 100 persen. Capaian peningkatan ini ini disebabkan karena sudah optimalnya layanan kesehatan di Puskesmas serta kolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan setempat khususnya dalam penaganan penderita gangguan jiwa berat.

Grafik 2. 256
Jumlah Warga Negara Penderita Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Tahun 2021-2025



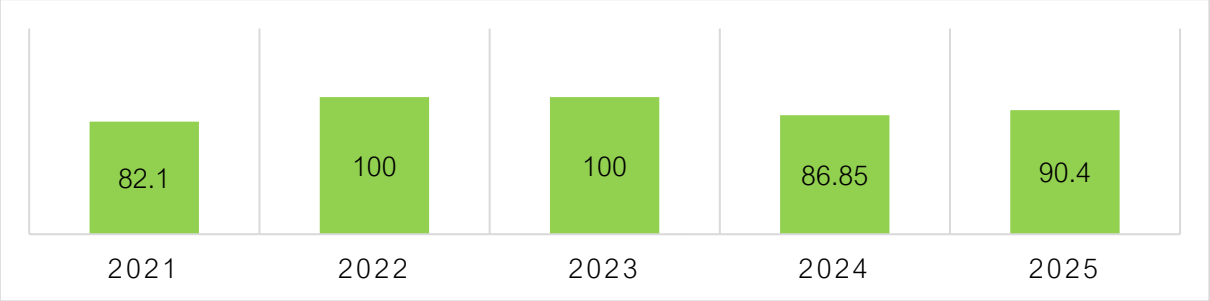
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

11. Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapatkan layanan Kesehatan

Layanan kesehatan bagi warga yang terduga tuberkulosis (TB) merupakan rangkaian pelayanan yang diberikan kepada individu yang menunjukkan gejala atau memiliki faktor risiko TB, seperti batuk lebih dari dua minggu, penurunan berat badan, demam berkepanjangan, dan riwayat kontak erat dengan penderita TB. Pelayanan ini meliputi pemeriksaan skrining, pemeriksaan dahak atau tes cepat molekuler (TCM), rontgen dada, penegakan diagnosis, hingga pemberian terapi sesuai standar apabila terkonfirmasi positif. Selain itu, dilakukan juga pelacakan kontak, edukasi kepatuhan minum obat, serta pemantauan rutin selama masa pengobatan untuk mencegah penularan dan resistensi obat. Peningkatan cakupan pelayanan bagi warga terduga TB sangat penting untuk mempercepat penemuan kasus, menekan angka penularan, dan mendukung eliminasi tuberkulosis di tingkat daerah maupun nasional.

Capaian warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan selama periode 2021- 2025 menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan cenderung stabil. Pada tahun 2021 sebesar 82,1 persen, kemudian meningkat signifikan di tahun 2022 dan 2023 mencapai angka 100 persen. Tahun 2025 berada di angka 90,4 persen. Capaian peningkatan ini ini disebabkan karena sudah optimalnya layanan kesehatan di Puskesmas serta kolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan setempat khususnya dalam penaganan penderita gangguan jiwa berat

Grafik 2.257
Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan
Tahun 2021-2025



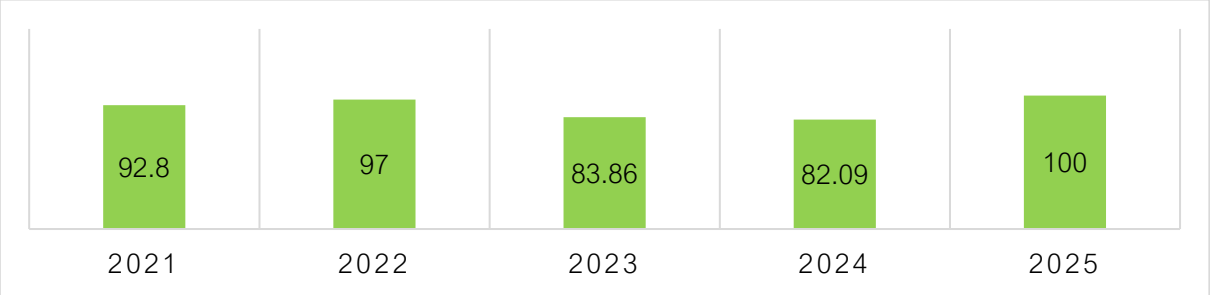
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

12. Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* yang mendapatkan layanan Kesehatan

Layanan kesehatan bagi warga yang berisiko atau telah terinfeksi HIV/AIDS merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah dalam pengendalian penyakit menular yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Melalui layanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT), penderita dapat mengetahui status HIV mereka secara rahasia dan aman. Bagi yang terkonfirmasi positif, fasilitas kesehatan menyediakan terapi antiretroviral (ARV) secara gratis untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh. elain pengobatan, layanan juga mencakup pendampingan psikososial, edukasi untuk mencegah penularan lebih lanjut, serta program pencegahan penularan dari ibu ke anak. Upaya ini diperkuat oleh jejaring layanan dari rumah sakit, Puskesmas, dan lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam edukasi dan advokasi. Dengan layanan yang komprehensif dan ramah, diharapkan orang dengan HIV dapat hidup sehat, produktif, dan bebas dari stigma.

Capaian jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 mencapai 92,8 persen dan menyentuh angka 100 persen pada tahun 2025. Capaian peningkatan ini ini disebabkan karena sudah optimalnya layanan kesehatan di Puskesmas serta kolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan setempat khususnya dalam penaganan penderita gangguan jiwa berat.

Grafik 2.258
Jumlah Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 2021-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

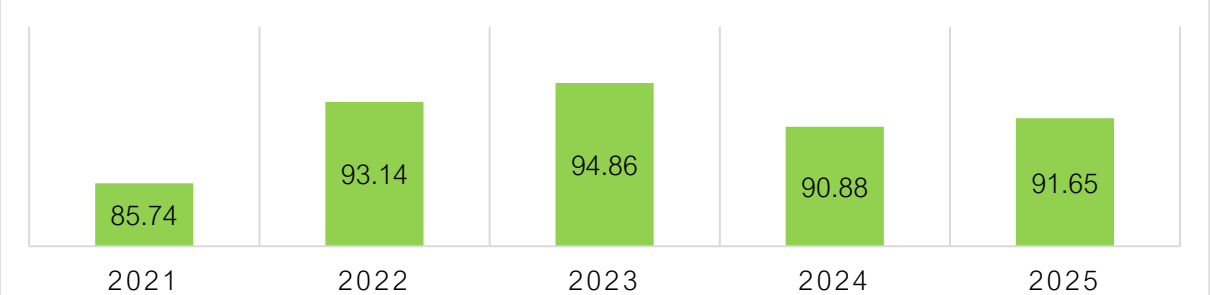
2.1.6.3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Layanan pengolahan air limbah domestik merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Air limbah domestik mencakup limbah dari kegiatan rumah tangga seperti air bekas cucian, dapur, kamar mandi, serta limbah dari kloset (black water). Pengelolaan limbah ini sangat penting agar tidak mencemari air tanah, sungai, dan sumber daya alam lainnya. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik terus meningkat, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki sistem terpusat atau tangki septik individual yang terstandar. Pemerintah daerah melalui unit pengelola sanitasi dan dukungan dari pusat berupaya memperluas cakupan layanan ini melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), sistem pengangkutan lumpur tinja terjadwal, dan edukasi masyarakat mengenai sanitasi aman.

Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 20s21 mencapai 85,74 persen, meningkat signifikan menjadi 93,14 persen pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 94,86 persen pada tahun 2023. Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 90,88 persen, kemudian meningkat menjadi 91,65 persen pada tahun 2025. Peningkatan terjadi karena adanya tambahan Pembangunan yang bersumber dari APBD maupun hibah air limbah setempat (HALS).

Grafik 2.259
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat; 2026

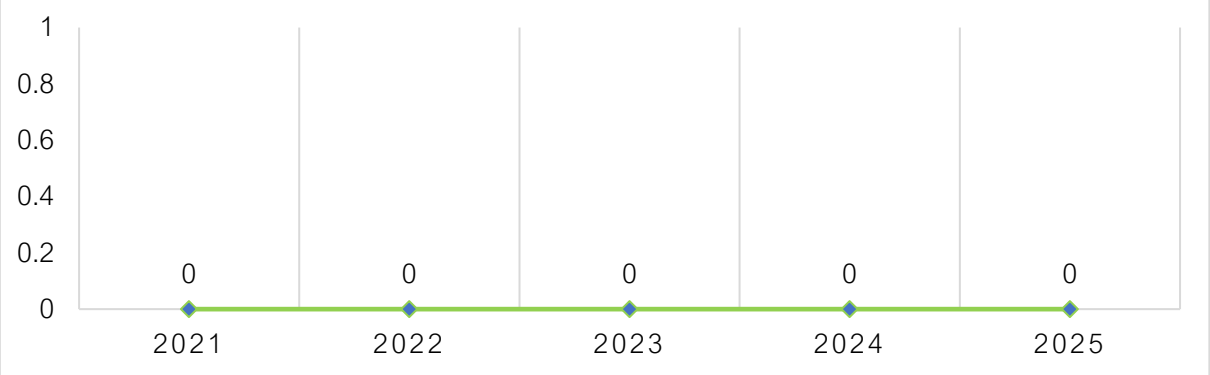
2.1.6.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Jumlah warga negara korban bencana alam yang memperoleh rumah layak huni

Warga Warga negara yang menjadi korban bencana alam berhak memperoleh perlindungan, termasuk hunian yang layak sebagai bagian dari pemulihan kehidupan pascabencana. Pemerintah melalui berbagai program, seperti pembangunan hunian tetap (huntap) dan bantuan stimulan perumahan, memberikan dukungan agar para korban dapat kembali hidup dengan aman dan bermartabat. Rumah yang dibangun tidak hanya memenuhi standar kelayakan dan kenyamanan, tetapi juga dirancang tahan terhadap risiko bencana di masa depan. Upaya ini mencerminkan komitmen negara dalam memenuhi hak dasar warga dan membangun ketangguhan komunitas secara berkelanjutan.

Jumlah warga negara korban bencana alam yang memperoleh rumah layak huni di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2021 hingga 2025 adalah 0 orang. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut, tidak ada korban bencana alam (seperti banjir, tanah longsor, atau gempa) yang menerima bantuan pembangunan atau rehabilitasi rumah permanen secara khusus dari program pemerintah daerah.

Grafik 2.260
Jumlah Warga Negara Korban Bencana Alam Yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Tahun 2021-2025



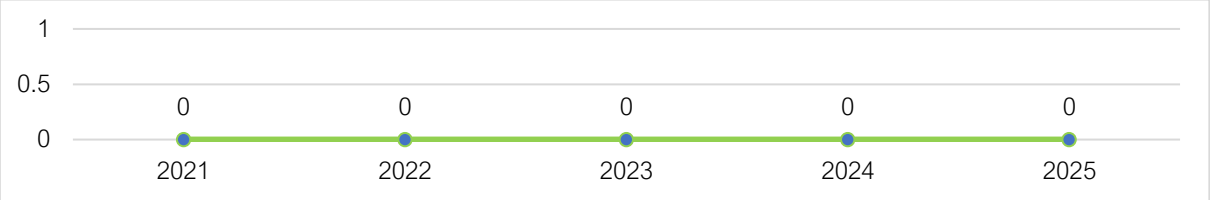
Sumber: Dinas Bina marga, cipta karya, pertanahan dan perumahan rakyat; 2026

2. Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni

Relokasi warga akibat program pembangunan oleh pemerintah daerah, seperti penataan kawasan kumuh, pembangunan infrastruktur, atau normalisasi sungai, merupakan langkah strategis yang sering kali berdampak langsung pada pemukiman masyarakat. Untuk menjamin hak dasar warga yang terdampak, pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitasi berupa rumah layak huni sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemulihan.

Jumlah warga negara yang terkena relokasi di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2021 hingga tahun 2025 tidak ada, hal ini karena belum pernah dilakukan relokasi yang berdampak karena adanya program pemerintah setempat.

Grafik 2.261
Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Bina marga, cipta karya, pertanahan dan perumahan rakyat; 2026

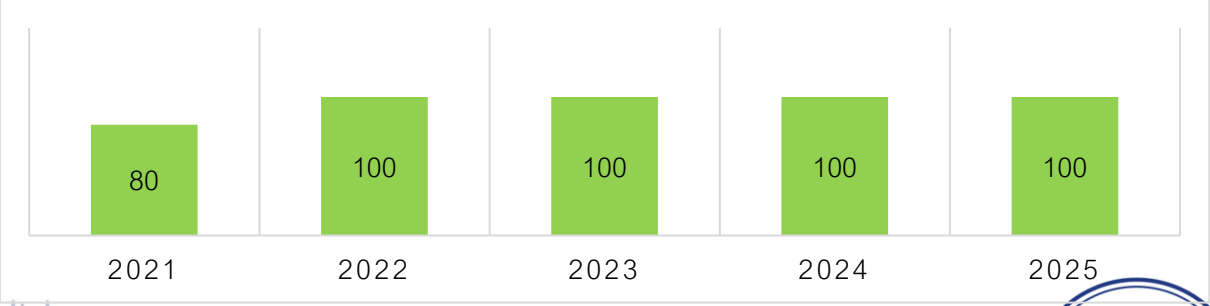
2.1.6.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada

Penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta menjamin pelaksanaan kebijakan daerah secara efektif. Dalam proses penegakan tersebut, tidak sedikit warga negara yang terlibat atau terdampak langsung, dan oleh karena itu, pemerintah daerah juga menyediakan berbagai bentuk layanan pendukung, baik bersifat edukatif, preventif, maupun rehabilitatif. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada dapat mencakup mereka yang terjaring razia (seperti PKL, gepeng, atau pelanggar aturan ketertiban), pelaku pelanggaran ringan, atau masyarakat yang terdampak kebijakan penertiban wilayah. Layanan yang diberikan biasanya berupa pembinaan sosial, konseling, pemberian informasi hukum, pelatihan keterampilan, atau bahkan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, capaian berada pada angka 80 persen, kemudian meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2022 dan konsisten bertahan hingga tahun 2025. Peningkatan terjadi karena layanan penegakan hukum dan perda sudah dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

Grafik 2.262
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda Dan Perkada Tahun 2021-2025



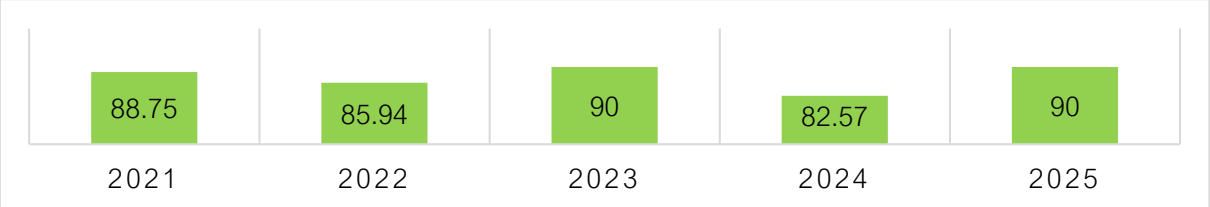
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 2026

2. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan salah satu bentuk layanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda warga negara. Ketika terjadi kebakaran, petugas pemadam kebakaran (damkar) bersama tim penyelamat berperan penting dalam merespons cepat, mengevakuasi korban, serta mencegah meluasnya dampak kebakaran. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi mencerminkan efektivitas kesiapsiagaan daerah dalam menangani situasi darurat. Layanan ini tidak hanya ditujukan untuk korban langsung yang berada di lokasi kejadian, tetapi juga meliputi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang membutuhkan penanganan khusus saat evakuasi. Pelayanan ini menjadi bagian penting dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin rasa aman dan cepat tanggap terhadap risiko kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi di lingkungan permukiman, fasilitas umum, atau kawasan padat penduduk.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Tahun 2021 berada di angka 88,75 persen, kemudian menurun menjadi 85,94 persen pada tahun 2022, dan kembali meningkat menjadi 90 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024 mengalami penurunan di angka 82,57 persen, namun kembali meningkat menjadi 90 persen pada tahun 2025. Peningkatan terjadi karena layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sudah optimal dilakukan oleh pemadam kebakaran.

Grafik 2.263
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2021-2025



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 2026

3. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

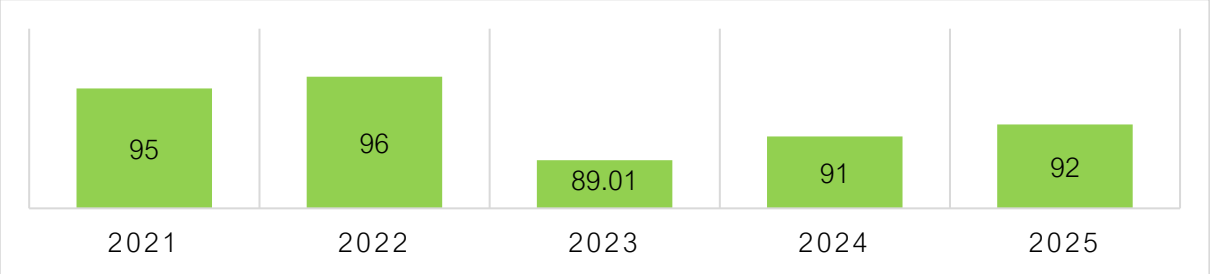
Layanan informasi rawan bencana merupakan bagian penting dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana. Layanan ini bertujuan memberikan edukasi dan peringatan dini kepada masyarakat mengenai potensi bahaya bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, atau tsunami. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana mencerminkan jangkauan pemerintah daerah dalam

menyebarkan informasi yang tepat, cepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi ini disampaikan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, sirine peringatan dini, radio komunitas, aplikasi digital, hingga sosialisasi langsung ke komunitas dan sekolah.

Dengan meningkatnya jumlah warga yang menerima informasi ini, diharapkan risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana dapat ditekan, karena masyarakat menjadi lebih siap, waspada, dan tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat terjadi. Layanan ini merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2021 mencapai 95 persen dan sedikit menurun di tahun 2025 menjadi 92 persen. Meskipun terjadi penurunan, capaian ini tetap menunjukkan tingkat jangkauan yang tinggi dan stabil. Peningkatan terjadi karena sudah memanfaatkan media sosial, website resmi pemerintah, dan platform pesan instan untuk menyebarkan informasi bencana secara luas dan cepat yang dilakukan oleh BPBD.

Grafik 2.264
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2021-2025



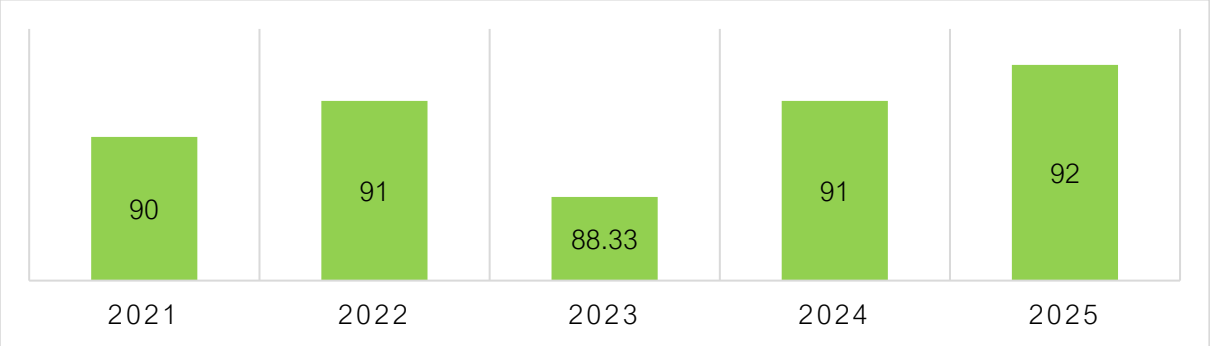
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2026

4. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan bagian penting dari upaya pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat. Layanan ini mencakup berbagai skegiatan seperti edukasi kebencanaan, pelatihan evakuasi, penyusunan rencana tanggap darurat, simulasi bencana, serta penguatan komunitas siaga bencana. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan ini mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana. Semakin banyak warga yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, semakin besar pula potensi untuk mengurangi dampak negatif saat bencana terjadi.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2021 mencapai 90 persen, meningkat menjadi 92 persen pada tahun 2025. Peningkatan terjadi karena kegiatan pelatihan pelatihan kesiapsiagaan di beberapa desa/kelurahan dan juga sekolah-sekolah yang dilakukan oleh BPBD.

Grafik 2.265
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Penanggulangan bencana Daerah; 2026

5. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

Layanan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana merupakan bagian krusial dari respons darurat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui tim tanggap bencana seperti BPBD, pemadam kebakaran, TNI/Polri, dan relawan. Layanan ini bertujuan untuk menyelamatkan jiwa, memindahkan warga dari zona berbahaya ke tempat aman, serta memberikan bantuan pertama pada saat kejadian bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau kebakaran besar. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi mencerminkan kapasitas daerah dalam merespons bencana secara cepat dan efektif. Semakin tinggi cakupan layanan ini, semakin besar pula peluang untuk mengurangi jumlah korban jiwa dan luka-luka, serta mempercepat proses pemulihan.

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2021 sebanyak 84 orang, menurun menjadi 57 orang pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 meningkat menjadi 100 orang. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan frekuensi atau skala bencana yang terjadi sehingga layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana juga meningkat.

Grafik 2.266
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Penanggulangan bencana Daerah; 2026

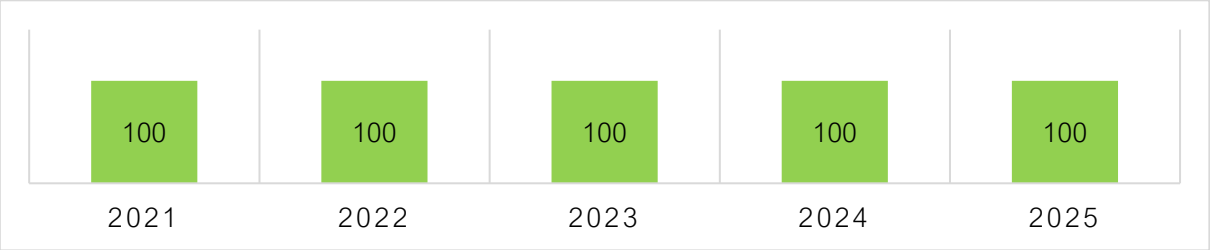
2.1.6.6. Urusan Sosial

1. Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti

Rehabilitasi sosial di luar panti bagi penyandang disabilitas merupakan bentuk layanan yang bertujuan meningkatkan kemandirian, partisipasi sosial, dan kualitas hidup mereka tanpa harus tinggal di lembaga. Layanan ini mencakup pendampingan psikososial, pelatihan keterampilan, terapi fisik dan mental, bantuan alat bantu, serta penguatan keluarga dan komunitas. Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial di luar panti terus mengalami peningkatan, seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendorong pendekatan berbasis masyarakat (*community-based rehabilitation/CBR*). Pendekatan ini dinilai lebih inklusif, karena memungkinkan penyandang disabilitas untuk tetap tinggal bersama keluarga dan berperan aktif di lingkungan sekitarnya.

Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi di luar panti di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten dengan persentase sebesar 100 persen selama lima tahun terakhir. Ini menunjukkan layanan penyediaan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas sudah dijalankan dengan sempurna.

Grafik 2.267
Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Tahun 2021-2025



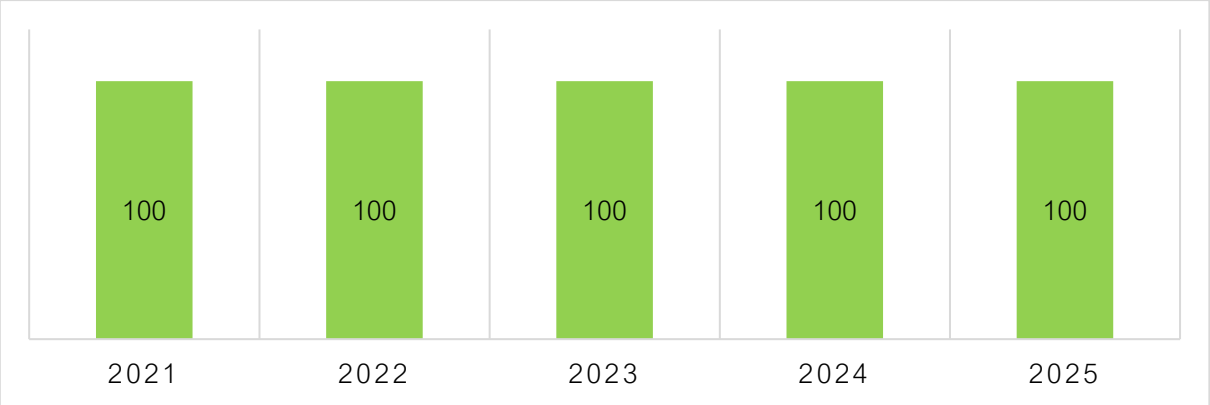
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

2. Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

Rehabilitasi Rehabilitasi sosial di luar panti bagi anak terlantar merupakan bentuk layanan berbasis masyarakat yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan fungsi sosial anak tanpa harus tinggal di lembaga. Layanan ini mencakup pendampingan psikososial, latihan hidup mandiri, konseling, terapi, dan dukungan dari tenaga sosial, yang semuanya dilakukan di lingkungan keluarga atau komunitas. Peningkatan cakupan layanan menandakan komitmen negara untuk memastikan anak-anak terlantar mendapatkan dukungan yang layak, tanpa harus dipisahkan dari keluarga dan komunitas mereka.

Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti di Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2021 hingga 2025 berada di angka 100 persen. Peningkatan ini menunjukkan layanan penyediaan rehabilitasi sosial di luar panti untuk anak terlantar sudah dijalankan dengan sempurna.

Grafik 2.268
Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Tahun 2021-2025



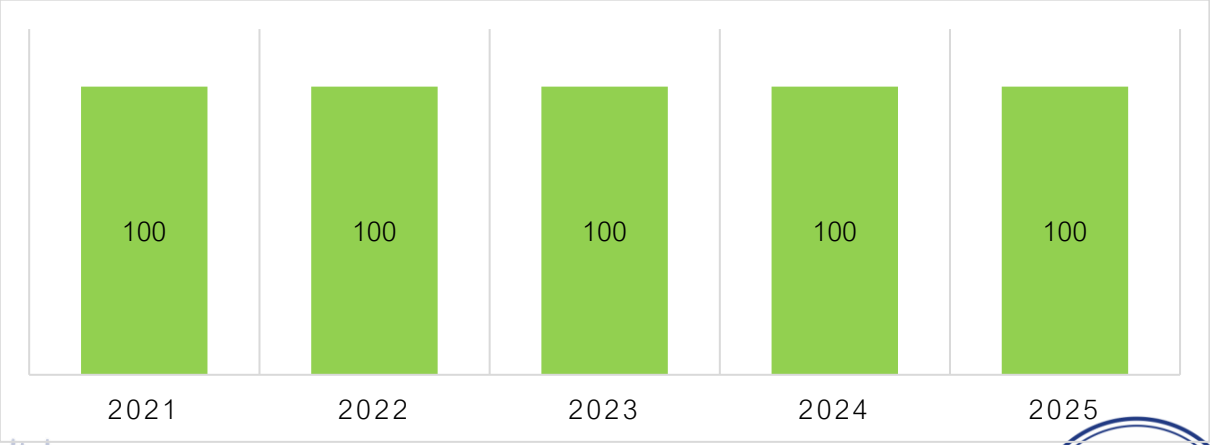
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

3. Jumlah Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti

Rehabilitasi sosial di luar panti bagi lanjut usia terlantar merupakan bentuk layanan sosial yang bertujuan untuk memulihkan, mengembangkan, dan mempertahankan fungsi sosial lansia agar mereka tetap mandiri dan bermartabat di tengah masyarakat. Layanan ini meliputi pendampingan psikososial, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dasar, pelatihan kemandirian, serta penguatan dukungan keluarga dan komunitas. Jumlah lansia terlantar yang memperoleh layanan ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan arah kebijakan yang lebih menekankan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas (*community-based care*) daripada penempatan di panti. Hal ini dinilai lebih efektif karena memungkinkan lansia untuk tetap berada di lingkungan sosial yang familiar, sekaligus mengurangi isolasi sosial

Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti di Kabupaten Sidenreng Rappang konsisten berada di angka 100 persen dalam lima tahun terakhir. Konsistensi ini menunjukkan layanan penyediaan rehabilitasi sosial di luar panti untuk warga negara lanjut usia sudah dijalankan dengan sempurna.

Grafik 2.269
Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Di Luar Panti Tahun 2021-2025



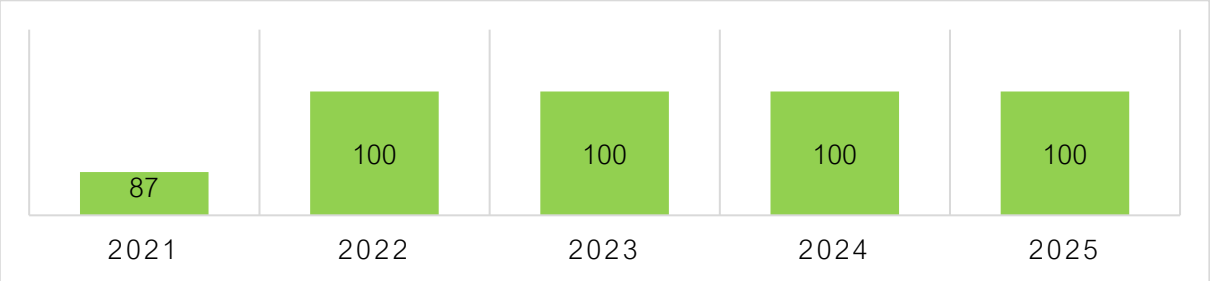
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

4. Jumlah Warga Negara/Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Di Luar Panti

Rehabilitasi Rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis (gepeng) di luar panti merupakan bentuk layanan sosial yang ditujukan untuk memulihkan fungsi sosial kelompok rentan ini, agar mereka dapat hidup mandiri dan bermartabat dalam masyarakat. Layanan ini meliputi penjangkauan, konseling, pelatihan keterampilan, dukungan administratif, bantuan kebutuhan dasar, dan integrasi kembali ke keluarga atau komunitas. Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti terus meningkat, didorong oleh pendekatan baru yang lebih humanis dan berbasis komunitas. Pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Sosial dan lembaga mitra berupaya menjangkau kelompok tuna sosial ini langsung di lapangan dan memberikan intervensi yang cepat tanpa harus menempatkan mereka di panti secara permanen.

Jumlah gelandangan dan pengemis yang yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2021 tercatat sebesar 87 persen dan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 100 persen. Angka ini menunjukkan layanan rehabilitasi untuk warga negara gelandangan dan pengemis sudah dijalankan dengan sangat baik.

Grafik 2.270
Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti Tahun 2021-2025



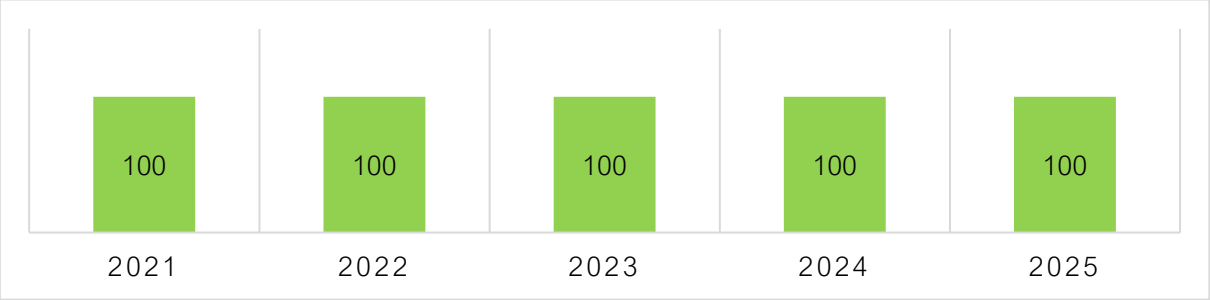
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

5. Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara yang menjadi korban bencana alam maupun bencana sosial merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas rasa aman dan pemulihan kehidupan. Layanan ini mencakup pemberian bantuan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, tempat pengungsian yang layak, dukungan psikososial, hingga bantuan pemulihan ekonomi dan sosial. Jumlah warga korban bencana yang memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial di kabupaten/kota terus mengalami peningkatan, seiring dengan perbaikan sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif dan terkoordinasi. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan lembaga sosial dan kemanusiaan, berupaya memastikan bahwa setiap korban bencana menerima bantuan secara cepat, tepat, dan merata.

Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2021 sampai tahun 2025 tercatat mencapai 100 persen setiap tahunnya. Capaian ini menunjukkan layanan perlindungan dan jaminan sosial untuk warga negara korban bencana sudah dijalankan dengan optimal.

Grafik 2.271
Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang; 2026

2.1.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kemudian baru-baru ini diperbaharui pada Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022. TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;

10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian TPB/SDGs tahun 2024 diperoleh hasil dari 118 indikator yang diintervensi ada 43 indikator yang tidak tercapai atau sekitar 36,44% dan yang tercapai sebanyak 55 indikator **atau** sekitar 46,61%. Upaya pemerintah daerah dalam mengintervensi indikator SDGs masih belum optimal sehingga perlu pendekatan holistik dan integratif untuk mendukung target SDGs kedepannya. Hingga pada tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kembali menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs tahun 2025-2029 yang terdiri dari beberapa 76 indikator SDGs dengan komposisi

1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan (6 indikator)
2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan (5 indikator);
3. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (15 indikator);
4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas (2 indikator);
5. Tujuan 5: Kesetaraan Gender (5 indikator);
6. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak (2 indikator);
7. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau (0 indikator);
8. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (12 indikator);
9. Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (4 indikator);
10. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan (4 indikator);
11. Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (2 indikator);
12. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (1 indikator);
13. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim (1 indikator);
14. Tujuan 14: Ekosistem Lautan (1 indikator);
15. Tujuan 15: Ekosistem Daratan (1 indikator);
16. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (11 indikator);
17. Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (4 indikator).

Adapun capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2021–2025 menunjukkan berbagai perkembangan yang

signifikan dalam upaya pencapaian target pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tabel berikut menyajikan data capaian dari masing-masing indikator, yang mencerminkan kontribusi lintas sektor dalam mendukung agenda global serta komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Data ini menjadi dasar evaluasi dan perencanaan strategis untuk memastikan keberlanjutan program-program pembangunan di masa mendatang. Adapun Capaian Indikator TPB/ SDGs



Tabel 2.54
Capaian Target TPB/SDG's Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	Capaian					OPD Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	
PILAR SOSIAL TUJUAN 1: MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	5,04	5,11	5,14	5,02		Dinas Sosial
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional 1. Imunisasi Dasar 2. Air Minum 3. Sanitasi			100 6,43 14,46	73,24 6,02 6,42		Dinas Kesehatan, Dinas Biciptapera
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	64	66,9	53,13	57,62	99,01	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	20,85	27,89	9,05	16,95	52,15	Dinas Koperasi, UKM, Nakertrans
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0,02	0,02	0,01	0,01	BPBD
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP	Rp5.365.088.000	Rp5.365.088.000	Rp20.425.900.000	Rp33.507.000	Rp15.692.200.000	BPBD
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	0	0	0	0	0	BPBD
PILAR SOSIAL TUJUAN 2: TANPA KELAPARAN							
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*prevalence of undernourishment*)	6,33	8,71	6,81	4,58	6,25	DTPHPKP
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	4,02	4,73	3,63	2,82		DTPHPKP

2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	7,12	6,31	6,29	5,9	5,86	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	0,01	1,98	2,2	2,7	2,82	Dinas Kesehatan
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil 15-49 tahun.	12,4	8,67	6,84	10,2		Dinas Kesehatan
2.4.1.(a)	Luas LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).			56,4	54,8	97,26	DTPHPKP
PILAR SOSIAL TUJUAN 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	7	3	5	8	6	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh (a) tenaga kesehatan terlatih (b) di fasilitas kesehatan.	100	99,7	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angkat Kematian Bagi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	0	0,4	0	0	1	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	7	10,3	10,9	17	13,9	Dinas Kesehatan
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	0,01	0,0011	0,09	0,549	0,189	Dinas Kesehatan
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	141	202	176	236	200	Dinas Kesehatan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,05	0,13	0,11	0,07	0,07	Dinas Kesehatan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	22	23	23	12	21	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	0,65	0,2	0,7	28,8	27,3	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	0,32	0,39	0,07	30	53	Dinas Kesehatan
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.			1	1,60		Dinas Pengendalian Penduduk & KB
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun, umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	41,6	31,8	31,8	37	25,9	Dinas Pengendalian Penduduk & KB
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,08	2,19	2,12	2,07	2,11	Dinas Pengendalian Penduduk & KB

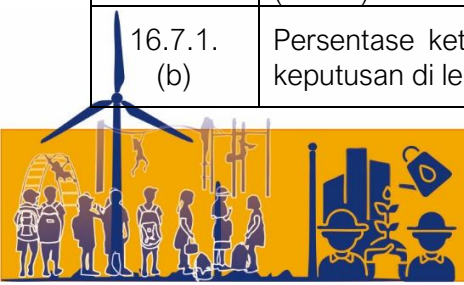
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	5,75	8,32	0,18	7,88		Dinas Pengendalian Penduduk & KB
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	24,71	25,10	23,65	25,05	6,51	Dinas Kesehatan
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.			5,84	6,36		Dinas Kesehatan
PILAR SOSIAL TUJUAN 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	92,16	91,94	94,52	92,84	95,60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.		58,98	49,80	62,41	76,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PILAR SOSIAL TUJUAN 5: KESETARAAN GENDER							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	2	4	4	2	2	Dinas Pemdes PPA
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	4	3	2	2	2	Dinas Pemdes PPA
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	50	125	125	623	601	Dinas Pemdes PPA
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	4	4	4	4	4	Dinas Pemdes PPA
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	3	3	2	2	2	Dinas Pemdes PPA
PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	90,43	91,56	93,49	93,98	94,59	Dinas Biciptapera

6.2.1*(a)	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.				3,70	5,79	Dinas Biciptapera
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman.			2,51	3,21		Dinas Biciptapera
PILAR EKONOMI TUJUAN 8: ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU							
7.1.1.(a)	Konsumsi Listrik per kapita.	7,29	8,52	2447	1679		Bagian Ekonomi SETDA
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga.			97,84	98,09		Bagian Ekonomi SETDA
PILAR EKONOMI TUJUAN 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	7,29	8,52	8,06	6,83		Bapperida
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	47,34	51,37	55,51	59,31		Bapperida
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	6,75	7,09	7,11	6,61		Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	20,9	44,89	44,9	35,09		Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
8.3.1.(a)	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal.	0,96	1,8	1,89	1,89	5	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp17.500	Rp17.800	Rp17.940	Rp18.140	Rp19.000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka			3,29	3,02		Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	10	9	6,5	14,12		Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	53	82	81	81	81	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
8.9.1.(a)	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.	92	45	39	84	3	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
8.9.1.(b)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara.	84.023	173.286	139.013	139.848	127.001	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
8.10.1. (b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	55	70	72	72	73	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
PILAR EKONOMI TUJUAN 9: INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR							
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan kabupaten	56,1	59	56,84	60,91		Dinas Biciptapera
9.2.1*	Rasio PDB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita	13,61	14,52	15,01	15,09	15,01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.2.1.(a)	Pertumbuhan PDB industri pengolahan.	7,13	12,17	8,13	4,71	4,71	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	25	25,19	27,88	28,18	30	
PILAR EKONOMI TUJUAN 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN							
10.1.1.(a)	Rasio Gini.	0,358	0,354	0,345	0,319		Dinas Sosial

10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	5,04	5,11	5,14	5,02		Dinas Sosial
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	12	20	30	33	41	Dinas Pemdes PPA
10.1.1. (e)	Jumlah Desa Tertinggal.	3	2	1	1	0	Dinas Pemdes PPA
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.			16,71	16,71		Dinas Pemdes PPA
PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 11: KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							
11.1.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	78,12	78,70	82,08	79,71		Dinas Biciptapera
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum.			0,057	0,050		Dinas Perhubungan
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukkan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP).			2048	3133	5410	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0,02	0,02	0,01	0,01	BPBD
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.			11,45	11,45	0,26	Dinas Lingkungan Hidup
PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 12: KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB							
12.5.1. (a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang.	78,89	77,66	73,96	71,25	10,83	Dinas Lingkungan Hidup
PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 13: PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM							
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	0	0,02	0,02	0,01	0,01	BPBD
PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 14: TUJUAN EKOSISTEM LAUTAN							
14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan.	110,9	121,9	110	100	70	Dinas Peternakan dan Perikanan
PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 15: EKOSISTEM DARAT							
15.9.1. (a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis	1					Dinas Lingkungan Hidup

PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA TUJUAN 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
16.1.1. (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	0	0	0	2	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.2. (a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.3. (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	30	49	0	211	280	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.2.1. (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	0,01	0,01	0,01	0,004	0,004	Dinas Pemdes PPA
16.2.3. (a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.				4	4	Dinas Pemdes PPA
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi.			100	100		Dinas Sosial
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	93,71	91,45	92,76	95,55		Bapperida
16.6.1. (a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	100	100	100	100		Badan Keuangan dan Aset Daerah
16.6.1. (b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	61.37 (Nilai Hasil Evaluasi)	63.53 (Nilai Hasil Evaluasi)	64.25 (Nilai Hasil Evaluasi)	65.08 (Nilai Hasil Evaluasi)	65.82 (Nilai Hasil Evaluasi)	Inspektorat
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ≥ B.				67,67	69,95	Inspektorat
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.				77,16		Bagian Organisasi
16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	Dinas Pemdes PPA
16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	10,34	10,34	6,90	6,90	6,90	Dinas Pemdes PPA



16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.			100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1. (b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	98,00	93,03	95,56	95,46	98,2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PILAR EKONOMI 17: KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	7,87	7,02	6,57	6,36	5,88	Badan Pendapatan Daerah
17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	0,30	0,27	0,27	0,26	0,43	Badan Pendapatan Daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	3,84	3,94	4,20	4,08	7,35	Badan Pendapatan Daerah
17.8.1*	Persentase pengguna internet.			67,86	70,42		DISKOMINFO
17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Data diolah, 2026

2.2. Indikator Pembangunan Daerah

2.2.1. Capaian Indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi tahun dasar yang strategis dalam mengukur arah dan kecepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Pada tahun ini, seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah mulai dijalankan secara terstruktur dengan mengacu pada target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, sehingga evaluasi capaian kinerja pada tahun pertama ini menjadi sangat penting sebagai cerminan awal dari komitmen dan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah.

Evaluasi pencapaian kinerja daerah dilakukan terhadap dua instrumen utama pengukuran kinerja, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU merupakan indikator yang mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran strategi yang menjadi prioritas utama kepala daerah, sedangkan IKD merupakan indikator yang lebih luas yang menggambarkan kondisi umum pembangunan daerah secara menyeluruh, baik dari aspek dampak (impact *)* , hasil (*outcome*), maupun keluaran (*output*) dari berbagai pemerintahan. Instrumen kedua ini secara bersama-sama memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana pencapaian pembangunan daerah telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Penyajian hasil evaluasi ini dimaksudkan untuk memberikan yang akurat dan terukur kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah, sekaligus menjadi bahan analisis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi indikator-indikator yang telah mencapai atau melampaui target, serta indikator-indikator yang masih memerlukan percepatan dan penghentian intervensi kebijakan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat terus dilanjutkan menuju visi RPJMD Tahun 2025–2029.

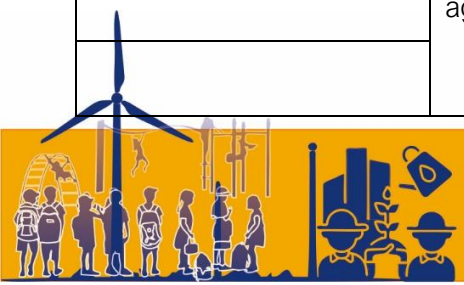
Dalam melakukan evaluasi terhadap capaian target-target RPJMD dan RKPD digunakan penilaian berdasarkan kriteria:

1. Sangat Tinggi dengan symbol “ST” dengan capaian 91 % ≤ 100 %;
2. Tinggi dengan symbol “T” dengan capaian 76 % ≤ 90%
3. Sedang dengan symbol “S” dengan capaian 66 % ≤ 75 %
4. Rendah dengan symbol “R” dengan capaian 51 % ≤ 65 %
5. Sangat Rendah dengan symbol “SR” dengan capaian ≤ 50 %

Tabel 2.55
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Kondisi	Tahun 2025			
					Awal 2024	Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi	Tingkat Capaian
M1.	T1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah		1	**Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**4.05**	**4.25**	**4.25**	**7.71**	**181.41**
Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan		1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dan produktivitas sektor pertanian	2	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%)	-0.78	3.00	3.00	10.70	356.66
			3	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	87.92	88.27	88.27	75.67	85.73
		2. Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri	4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	15.09	15.54	15.54	15.56	100.13
M2.	T2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		5	**Tingkat Kemiskinan (%)**	**5.02**	**4.6-4.01**	**4.6-4.01**	**4.91**	**88.91**
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif			6	**Rasio Gini (poin)**	**0.319**	**0.313**	**0.313**	**0.325**	**96.17**
		3. Meningkatnya pendapatan masyarakat	7	PDRB Perkapita (juta rupiah)	59.31	61.83	61.83	65.15	105.37
		4. Menurunnya tingkat pengangguran	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.02	2.93	2.93	3.36	85,32
M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua	T3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang inklusif		9	**Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)**	**74.81**	**75.10**	**75.10**	**75.49**	**100.52**
		5. Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata	10	Indeks Pendidikan (Indeks)	63.58	63.89	63.89	64.28	100.61

Misi	Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Kondisi	Tahun 2025			
					Awal 2024	Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi	Tingkat Capaian
		6. Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif	11	Indeks Kesehatan (Indeks)	83.77	84.00	84.00	84.14	100.17
		7. Terwujudnya kesetaraan gender yang inklusif	12	Indeks pembangunan gender (Indeks)	93.32	93.64	93.64	93,75	100,12
M4.	T4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan		**13**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**67.96**	**73.92**	**73.92**	**74.16**	**100.32**
Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan		8. Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca	14	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	3.04	11.94	11.94	*Belum rilis*	-
		9. Menurunnya tingkat risiko bencana	15	Indeks Resiko Bencana (Indeks)	119.2	118.90	118.90	159.5	65,85
M5.	T5. Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama		**16**	**Indeks Harmoni Indonasia (IHal)**	**N/A**	**67.25**	**67.25**	**N/A**	**N/A**
Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius		10. Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	17	Angka kriminalitas (kasus)	834	820	820	940	85,37
		11. Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda	18	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	18.71	18.99	18.99	24,89	131,07
			19	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)	55.26	55.36	55.36	55.77	100.74



Misi	Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Kondisi	Tahun 2025			
					Awal 2024	Target RPJMD	Target RKPD	Realisasi	Tingkat Capaian
			20	Indeks Pembangunan Pemuda (Indeks)	64.13	70.13	70.13	*Belum rilis*	-
M6.	T6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif		**21**	**Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)**	**68.51**	**70.29**	**70.29**	**60.69**	**86.34**
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital		12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi	22	Nilai SAKIP (poin)	65.08	67.15	67.15	65,82	98,02
			23	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	47.72	50.58	50.58	42.10	83.23
			24	Indeks SPBE (Indeks)	3.04	3.22	3.22	3.04	94.41
		13. Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	1.73	2.03	2.03	3.43	168.97
				Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	75.46	76.59	76.59	79.097	103.27
M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	T7. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas		**27**	**Indeks Daya Saing Daerah (Pilar Infrastruktur)**	**3.28**	**3.29**	**3.29**	**3.16**	**96.05**
		14. Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah	28	Indeks Infrastruktur (Indeks)	81.24	76.91	76.91	79,34	103,16

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2025–2029 pada tahun pertama pelaksanaannya, secara umum kinerja pembangunan daerah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Penilaian capaian dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni **Sangat Tinggi (ST)** untuk capaian 91%–100% ke atas, **Tinggi (T)** untuk capaian 76%–90%, **Sedang (S)** untuk capaian 66%–75%, **Rendah (R)** untuk capaian 51%–65%, dan **Sangat Rendah (SR)** untuk capaian di bawah 50%. Dari indikator yang telah tersedia data realisasinya, sebagian besar masuk dalam kategori **Sangat Tinggi (ST)**, di antaranya Pertumbuhan Ekonomi (181,41%), Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (356,66%), Indeks Pelayanan Publik (168,97%), dan PDRB Per Kapita (105,37%), yang mencerminkan bahwa fondasi pembangunan ekonomi dan pelayanan publik pada tahun pertama RPJMD telah berjalan dengan sangat baik.

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang capaiannya masih berada pada kategori dibatalkan dan memerlukan kebijakan intervensi. Indeks Risiko Bencana hanya mencapai 65,85% dan masuk kategori **Sedang (S)**, bahkan realisasinya menunjukkan kondisi yang memburuk dibandingkan kondisi awal. Angka Kriminalitas pun belum mencapai target dengan capaian 85,37% atau kategori **Tinggi (T)**, namun dengan tren yang berlawanan arah karena jumlah kasus justru meningkat. Selain itu, sejumlah indikator seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pembangunan Pemuda, Penurunan Intensitas Emisi GRK, dan Indeks Harmoni Indonesia belum tersedia data realisasinya, sehingga perlu diukur mekanisme pengukuran dan ketersediaan datanya pada periode berikutnya. Berbagai catatan ini menjadi acuan penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 agar program dan kegiatan yang dirancang lebih tepat sasaran dalam mendorong indikator pencapaian percepatan yang masih tertinggal.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian IKU RPJMD Tahun 2025, secara umum kinerja pembangunan daerah menunjukkan hasil yang positif, namun masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian dan perbaikan ke depan. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai agar lebih inklusif dan berdampak langsung pada penurunan kemiskinan, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan masyarakat, antara lain melalui program penguatan vokasi, pemberdayaan UMKM, dan perluasan perlindungan sosial. Di bidang ketahanan pangan dan lingkungan hidup, diperlukan intervensi yang lebih terarah pada aspek distribusi, akses pangan, serta pencegahan risiko bencana yang menunjukkan tren memburuk. Penguatan tata kelola pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi, peningkatan inovasi daerah, dan pemantapan sistem akuntabilitas kinerja juga perlu terus didorong agar capaian pelayanan publik yang sudah baik dapat diimbangi dengan reformasi birokrasi yang lebih sistemik. Selain itu, pemerintah daerah perlu segera membangun sistem pengumpulan data dan pelaporan yang terstandar untuk indikator-indikator yang belum memiliki realisasi data, guna memastikan evaluasi

pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan secara menyeluruh, akurat, dan akuntabel.

2.2.2. Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang 2021-2025

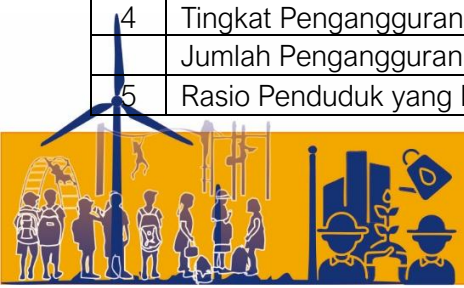
Indikator kinerja urusan pemerintahan merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memonitor capaian kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di berbagai bidang urusan pemerintahan. Indikator-indikator ini dirancang untuk dapat menunjukkan sejauh mana pemerintah telah berhasil memberikan pelayanan, fasilitas, dan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penetapan indikator kinerja yang tepat dan terukur sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Indikator-indikator ini harus disusun secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Selain itu, indikator kinerja juga perlu ditinjau dan disesuaikan secara berkala untuk menjamin kesesuaiannya dengan perkembangan situasi dan prioritas pembangunan. Evaluasi secara periodik terhadap capaian indikator kinerja urusan pemerintahan akan memberikan umpan balik yang berharga bagi pemerintah dalam memperbaiki kinerja, meningkatkan kualitas layanan, dan menyusun rencana strategis yang lebih efektif di masa mendatang. Dengan demikian, indikator kinerja urusan pemerintahan menjadi fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Capaian indicator penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.56
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2025

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI						
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.54	4.86	4.10	4.04	7.71
2	Laju Inflasi	%	1.61	4.09	2.1	1.03	3.41
3	PDRB Perkapita (ADHB)	Triliun Rp	15,250,127.36	16,699,0	56.64		65.15
4	Rasio Gini	Angka	0.358	0.354	0.345	0.319	0.325
5	Tingkat Kemiskinan	%	5.04	5.11	5.14	5.02	4.92
6	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	15.36	15.25	15.75	15.48	15.2
7	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0.64	0.86	0.54	0.51	0.74
8	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	%	94.95	94.96	94.86	-	95.09
	KESEJAHTERAAN SOSIAL						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71.21	71.54	74.38	74.81	75.49
	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74	74.17	74.32	74.45	74.69
	Angka Melek Huruf (AMH)	%	92.16	91.94	94.52	92.84	95.60
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	%	7.94	8.04	8.2	8,21	8.36
	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.95	13.01	13.02	13,03	13.11
	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	12.073	12.201	12.739	13.209	13.604
2	Persentase Balita Stunting	%	8.4	7.12	6.56	5.9	5.86
3	Angka Partispasi Angkatan Kerja	%	58.7	57.63	96.71	96.98	96.97
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.93	3,56	3.29	3.02	3.03
	Jumlah Pengangguran	Ribu Jiwa	7,845	6,813	4,596	4,713	5029
5	Rasio Penduduk yang Bekerja	%	95.07	96.44	96.71	45.77	96.98



No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
7	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11.2	11.4	14.71	14,83	18.69
8	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	83.3	81.4	80.1	88.41	86.88
10	Penguatan Cadangan Pangan	%	100	100	100	-	
12	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB (Hortikultura)	%	24.75	22.2	23.89	22.29	23.83
13	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	9.35	9.71	11	8.48	5.03
14	Produksi Sektor Pertanian	Ton	480,002	535,316	483,316	447,856	569,733
15	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	6.08	7.75	8.51	5.72	5.48
16	Produksi Sektor Perkebunan	Ton	8,149	8,297	8,551	8,807.20	7,048
17	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	56.74	55.13	56.94	59.79	63.73
18	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	39.96	48.27	46.33	54.28	64.28
20	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	4.99	5.13	5,41	5,33	
21	Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	%	1.33	1.34	1.33	1.29	1.31
22	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10.07	10.12	10.71	10.75	10.87
23	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	13.47	13.61	15.01	15.09	15.01
25	Pertumbuhan PDRB Industri	%		12.17	8.13	4.71	4.71
	OLAHRAGA						
1	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	25	21	36	4	23

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
2	Jumlah Prestasi Olahraga	Cabang	17	23	25	12	24
3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	36.36	36.36	37	28	25
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	PELAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
	Pendidikan						
1	APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	54.63	59.06	85.91	78.26	112.04
2	APM SD Sederajat	%	92.42	96.81	99.63	92.17	92.37
3	APM SMP Sederajat	%	60.67	62.78	96.52	87.36	89.16
4	Angka Putus Sekolah (Apts) SD/MI	%	0.09	0.18	0.12	0.12	0.36
5	Angka Putus Sekolah (Apts) SMP/Mts	%	0.53	0.41	0.51	0.50	0.64
6	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99.26	99.87	100	98	99.76
	Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts	%	96.15	98.67	100	97	97.35
7	Angka Melanjutkan (AM) Dari SD/MI Ke SMP/Mts	%	112.32	106.82	70.63	68.93	67.41
8	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar	Angka	1,381	772.29	77.7	73.77	782.21
9	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 64 Tahun	%	92.16%	91.94	94.52	92.84	95.60
10	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	95.76	96.36	92.59	93.58	93.47
	Kesehatan						
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	Orang	4	6			

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
2	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu (Balita)	Orang	0	0			
3	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu (Neonatal)	Orang	3	18			
4	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Bayi	4.5	1	1	1	7
5	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Balita	0	0.4	0	0	1
6	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Neonatal	3	7	10.9	17	65
7	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran	7	3	5	8	6
8	Rasio Posyandu per satuan Balita	Per 1000 balita	1:73	1:74	1:76	1:82	1:90
9	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
10	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	1:6.627	1:6.628	1:6.628	1:4.596	1 : 3074
11	Rasio Tenaga Medis per satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	1:8.965	1:8.973	1:8.781	1:2.381	1 : 1818
12	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	150	151	89.9	100	100
13	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	115	99.7	100	100	100
14	Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	%	99.1	89.6	100	63.2	63.2

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
15	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	%	100	100	100	100	100
16	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	%	100	94.2	118.5	81	81.2
17	Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	1.50	2.76	1.28	4.88	100
18	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	%	6.04	9.8	3.62	4,63	6.49
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	38	63	51.7	43,8	49.01
20	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis	Per 100.000 Penduduk	141	202	577	195	200
21	Tingkat Kematian Karena Tuberkolosis	Per 100.000 Penduduk	9.9	10.2	9.07	Blm ada data	98
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Kasus	426	656	567	647	668
23	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS	Kasus	242	168	242	Blm ada data	300
24	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
25	Penderita Diare yang ditangani	Orang	2,069	2,127	2,945	2,683	3,024
26	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	0.05	0.13	0.11	0.07	0.07
27	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari Total Populasi	%	0.01	0.011	0.014	0.005	0.007

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	-	-	-	-	-
29	Cakupan Kunjungan Bayi	%	117	104	92.5	95	98
30	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	94.3	85.5	75.6	74	75.5
31	Cakupan Pelayanan Nifas	%	100	99.6	88.8	84	83.5
32	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	%	57	56.7	14.6	8,4	18.7
33	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	106	99.7	81	97	94
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 Bln keluarga miskin	%	100	100	100	83	83
35	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	36.58		-	-	-
36	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100
37	CakupanDesa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24jam	%	100	100	100	100	100
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	51.1	56.1	61	60.81	40.78
2	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Km/jiwa	0.43	0.4	0.29	0,29	0.29
3	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (Minimal1.5 Meter)	%	3.97	4	4	4	4

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
4	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar	%	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
5	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	85.04	85.75	94.86	90.88	91.65
6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan	%	85.04	85.74	93.9	93.9	91.65
7	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	11.8				
8	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	59.31	76	65.11	68.55	69.04
9	Rasio Jaringan Irigasi	M/Ha	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
10	Persentase Penduduk Berakses air minum	%	90.43	91.56	97.6	93.98	94.59
11	Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum	%	91.56	93.49	97.6	93.98	94.59
12	Proporsi Penduduk Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	90.43	91.56	93.49	93.98	94.59
13	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	90.43	91.56	93.49	93.98	94.59
14	Ketaatan terhadap RTRW	%	40	41	41	68.85	
15	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	Unit/Jiwa	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
16	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	23.12		28.38	-	
17	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan Perkotaan	%	11.4	11.45	11.45	12.012	12.012
18	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	0,1	0,1	0,1	0.172	
	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman						
1	Rasio Rumah Layak Huni	%	0.2363	0.238	0.2397	0.24	97,5
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	6.02	5.87	0.32	0.32	
	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat						
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	per 10.000 penduduk	31	29	30	30	29
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	67.89	96	97	100	100
3	Persentase Penegakan PERDA	%	70	100	89	89	100
	Sosial						
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	14.71	30	34	34	100
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	65.93	30	34	34	100
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	52.7	21.5	34	34	100

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	0	0	0	0	0
5	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan
6	Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Bantuan	Tidak Ada Wahana	Tidak Ada Wahana	Tidak Ada Wahana
7	Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam satu tahun	%	100	100	100	100	100
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	0.19	0.19	0.19	0.19	100
9	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100
	PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR						
	Tenaga Kerja						
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	58.7	57.63	96.71	96.98	96.97
2	Rasio Penduduk yang bekerja	%	95.07	96.44	96.71	45.77	96.98

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0	0	0	0	0
4	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0	0	0	0
5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	40.69	5.25	4.62	5.86	6
6	Keselamatan dan perlindungan	%	4.45	4.46	13.61	13.75	13.76
8	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	40	20	13.61	13.61	13.61
9	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	0	0	0	0	0
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	90	100	100	100	100
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	35	35	35	66.85	66.85
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	8.57	8.57	8.57	8.57	8.6
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	33.8	33.8	33.1	33.3	33.3
4	Rasio KDRT	%	0.027	0.021	0.0027	0.0021	0.002
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	3.96	3.6	3.29	4.09	4.08
6	Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	38.15	36.08	33.01	33.81	32.44

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	0	0	0	0	0
9	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SD/MI/Sederajat	%	99.38	99.16	98.8	0	
10	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/ laki-laki di SMP/ MTs/ sederajat	%	76.13	76.89	103.45	0	
11	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di SMA/MA/Sederajat	%	58.45	58.67	101.4	0	
12	Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	60	60	97.82	0	
13	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	100	100.03	100.01	100.02	
	Pangan						
1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	881	932.03	866	788	980
2	Ketersediaan Pangan Utama (Jagung)	%	202	214	223	85.8	48
3	Ketersediaan Energi Perkapita	Kkal	3,823	4,100	4,615	2,743	3,687
4	Ketersediaan Protein Perkapita	Gram	91.73	101.14	127.37	94	125
	Pertanahan						

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	23.55	23.55	23.55	23.7	23.8
	Lingkungan Hidup						
2	Tersusunnya RPPLH	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	ada
3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten	Ada / Tidak ada	Tidak ada	-	3 Dokumen	Tidak Ada	2 Dokumen
6	Indeks Kualitas Air	%	50	53.64	54	50	67.82
7	Indeks Kualitas Udara	%	87.81	87.90	85.59	94.22	82.29
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	49.19	48.63	49.44	50.23	70.00
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	62.53	65.01	66.79	67.96	74.16
14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100
15	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Penghargaan Adiwiyata	1 Sekolah	2 Sekolah	-	4 Sekolah	7 Sekolah
16	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Kasus	7	66	100	80	100
18	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada Kabupaten/Kota	%	50.07	55.5	74.94	74.98	64.52

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Angka	100	99.90	99.31	99.48	107.83
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka	98	93.03	95.56	95.46	98.2
3	Rasio pasangan berakte nikah	Angka	34.21	48.2	57	50.89	52.43
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98.64	99.05	99.31	99.48	105
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	48.93	53.05	56	58.17	67.23
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						
1	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik	%	100	100	100	100	
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	106	106	106	106	106
4	Persentase LPM Berprestasi	%	100	100	0	0	0
5	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100
	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1.77	1.77	1.31	1.19	1.00
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.08	2.19	2.12	2.07	2.11
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak/ Keluarga	2.08	2.07	1.31	1.6	
4	Rasio Akseptor KB	%	56.41	54.29	81.86	68.98	

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
5	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	77.63	63.85	65.55	68.61	53.5
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 - 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	40	41.6	44.7	37	25.9
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	58.51	31.96	32.96	36.59	
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmet need)*	%	5.75	8.32	7.04	7.9	6,38
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24.55	17.73	10.4	68.98	
10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	25.5	42.51	33,26	68.61	
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	100	100	100	100	100
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	100	100	100	100	100
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	100	100	100	100	100
14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	1	1	1	1	1
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	100	100	100	100	100

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	103.7	103.7	103.7	103.7	103.7
17	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100
21	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	231,375,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
	Perhubungan						
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Juta Orang	3400		5940	5250	3100
2	Rasio ijin trayek	Rasio	0.14	0.06	0.104	0.03	0,006
3	Persentase layanan angkutan darat	%	5.9	5.9	5.76	6.08	52.24
4	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal BIS	Unit	1	1	1	1	1
5	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1.6	1.49	1.442	0.9	0,9
6	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	17,000		18,739	16,530	150,000
	Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	91.24	90.15	89.36	88.91	90.62
2	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	70.17	77.21	78.42	70.42	92.98

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	91.66	87.82	88.26	88.91	
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
1	Persentase koperasi aktif	%	52.14	10.64	10.64	68.42	67.35
2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	94.2	93.7	93.6	93.6	93.8
	Penanaman Modal dan Investasi						
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	322,281,464,518	905,414,329,314	4,080,460,321,147	3,500,176,950,561	2,430,112,257,649
2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	964	2566	4655	3474	5000
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	%	1.020	1.095	3.089	2.904	5.476
4	Persentase Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	57.596	180.939	350.673	-14.221	
	Kepemudaan dan Olah Raga						
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	12	12	14	10	13
2	Persentase wirausaha muda	%	0.022	10.95	9	0.11	0.7
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	35.529	21	21	45.83	50
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	36.36	10	11	28	25
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	69.52	78	78	79	56
6	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	21	1	1	4	23
7	Jumlah prestasi olahraga	Medali	2	36	11	12	24
	Statistik						
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
3	Buku PDRB	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Persandian						
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100
	Kebudayaan						
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	12	0	1	0	0
2	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Buah	13	13	13	15	15
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	65	67	68	68	68
	Perpustakaan						
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	12,960	7,655	124,327	93.36	130.797
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Exp.	14,131	14,134	15,972	20.093	21.991
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Unit/Jiwa	1,000	1.53	1.42	1,55	2,11
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	7,066	7,067	7,349	9.484	10.142
5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	36.36	45.45	45.45	45,45	45,45
	Kearsipan						
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	25	25	27.5	43,9	52,50

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	2	1	1	1	1
	PELAYANAN URUSAN PILIHAN						
	Pariwisata						
1	Kunjungan wisata (Wisatawan Nusantara)	orang	84,023	173,331	139,633	139,848	127,001
2	Kunjungan wisata (Wisatawan Mancanegara)	orang	92	45	39	84	3
3	Lama kunjungan Wisata	Hari	1	1	1	1	1
4	PAD Sektor Pariwisata	%	114	97	113	1,12	86
	Pertanian						
1	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	24.75	22.2	23.89	22.29	23.83
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	9.35	9.71	11	8.48	5.03
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	6.08	7.75	8.51	5.72	5.48
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (Perkebunan)	%	56.74	55.13	56.94	59.79	63.73
5	Cakupan bina kelompok tani (Perkebunan)	%	39.96	48.27	46.33	54.28	64.28
6	Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB	%	4.23	4.17	4.3	4.17	4.32
7	Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)	Ton	2,750,266	417,717	2,137.51	2,541,476	
8	Produktivitas Hasil Peternakan (Telur)	Ton	49,903,530	43,982,071	41,843,861	45,030,921	
10	Kontribusi Produksi Kelompok Tani Perkebunan terhadap PDRB	%				-	

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
	Perdagangan						
1	Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal	%	45.75	67.5	20	0	0
	Perindustrian						
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	10.1	8.38	20.04	0	
	Transmigrasi						
1	Persentase transmigran umum	%	1.54	1.54		1.5	
	Kelautan dan Perikanan						
1	Produksi perikanan	%	155.5	100	87.15	90.80	90
2	Cakupan bina kelompok nelayan	%	42.86	8.57	1.43	4.28	0.00
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	100.04	94	74.3	81.7	81
5	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	80	80	80	0	
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	Angka	0.35	0.35	0	0	0
7	Volume produksi perikanan tangkap	Ton					
8	Konsumsi Ikan	%	38	38	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	
	Penunjang Urusan						
	Perencanaan Pembangunan						
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	93.78	98.93	96.01	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	96.1	100	
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	
	Keuangan						
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	11,4	13,8	14,32	14,83	18,69
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1.83	2.09	5.83	3.64	5,25
4	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	29.23	28.92	30.59	30.32	29,97
5	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	19.65	22.35	22.91	24.67	26,49
6	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (tidak sesuai perhitungan 100 %)	Rasio	49.81	48.13		-	

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
7	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	6.43	3.21	10.11	10.62	9,75%
8	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan						
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP/ Tahun	20	20	20	20	20
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1.04	1.57	0.38	2.86	18,41
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	75	13	2.91	9,272	11,11
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	30	32	33	33	30
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	1,133	1.816	1.13	1.281	501
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah	Orang	3,505	3.1	2.97	2960	2889
	Penelitian dan Pengembangan						
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100	100	100	

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
	Pengawasan						
1	Persentase tindak lanjut perangkat daerah terhadap hasil pemeriksaaan APIP	%	91.62	92.23	92	87.15	85,35
2	Persentase pemyelesaian tidak lanjut hasil pengawasan umum dan teknis	%	0.58	0.16	12	-	
3	Jumlah temuan BPK	Kasus	34	23	17	22	20
	Sekretariat Dewan						
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/ Kota Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda.dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	ASPEK DAYA SAING						
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rupiah	1,218,069	1,107,459	1,259,261	1,259,261	

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	47.46	48.85	52.02	49.1	
3	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	0.7825	0.7974	0.785	0.7973	
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB/PDRB (indikator keterbukaan ekonomi)	%	0.68	0.69			
5	Angka Kriminalitas yang tertangani	Angka	344	496	730	751	
6	Rasio Ketergantungan	Angka	50.53	47.52	47.09		

Sumber: diolah Tim Penyusun RKPD Tahun 2025

Indikator penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja dan efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Indikator-indikator ini mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, hingga pelaksanaan program-program pembangunan. Indicator penyelenggaraan pemerintahan meliputi tiga aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Rakyat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Ketiga aspek ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, peningkatan daya saing daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Demikian pula, pelayanan umum yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga menjadi daya tarik bagi investasi, yang akhirnya mendukung daya saing daerah. Dalam praktiknya, pemerintah daerah perlu menyeimbangkan ketiga aspek ini dalam perencanaan dan pelaksanaan program-programnya. Evaluasi terhadap indikator-indikator dalam ketiga aspek ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2.2.3. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi pencapaian kinerja daerah juga dilakukan terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator lebih operasional dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah secara komprehensif. IKD memuat indikator-indikator yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan urusan pemerintahan pada setiap perangkat daerah, mulai dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, hingga urusan pemerintahan. Adapun IKK merupakan indikator yang ditetapkan secara nasional sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan seperangkat ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengevaluasi dan memonitor kinerja suatu program, kebijakan, atau organisasi. IKK berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan tujuan strategis menjadi target-target terukur yang dapat dilacak pencapaiannya. Penetapan IKK yang tepat memungkinkan pihak-pihak terkait untuk menilai sejauh mana suatu inisiatif atau rencana kerja telah berhasil diimplementasikan dan memberikan dampak yang diharapkan. IKK yang efektif harus memenuhi kriteria SMART: Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, dan Terikat Waktu. Indikator-indikator ini dapat mencakup berbagai dimensi, seperti input, output, outcome, dan dampak. Input merujuk pada sumber daya yang digunakan, sedangkan output adalah hasil langsung dari kegiatan. Outcome mengacu pada perubahan yang terjadi sebagai akibat dari output, dan dampak adalah efek jangka panjang yang

dihasilkan. Penetapan IKK harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, agar dapat mengakomodasi kebutuhan dan perspektif yang beragam. Selain itu, IKK perlu ditinjau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan situasi dan perkembangan terkini. Dengan demikian, IKK menjadi alat yang vital dalam mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil.

Evaluasi indikator kinerja kunci (IKK) merupakan langkah penting untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas suatu program atau kebijakan. IKK berfungsi sebagai tolok ukur yang objektif dan terukur dalam menilai pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Proses evaluasi IKK melibatkan analisis data dan informasi secara komprehensif untuk mengetahui sejauh mana target-target tersebut terealisasi.

Dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan IKU, evaluasi IKD dan IKK memberikan gambaran yang lebih mendetail mengenai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing bidang urusan telah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hasil evaluasi IKD dan IKK Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2024-2025

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	*Ketahanan Energi, Air dan Pangan*			
	1) Ketahanan Energi			
	1. Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh	174,61	265,50
	2) Ketahanan Pangan			
	1. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	87.92	75,68
	2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	4,58	6.25
	3. Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	88,68	86.88
	3) Ketahanan air			
	1. Kapasitas Air Baku	m3/detik	2.979,16	18,921.60
	2. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	20.96	34.45
2	*Kualitas Lingkungan Hidup*			
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	Indeks	67.96	74.16
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,70	5.79
	c) Pengelolaan Sampah	%	74.33	74,88

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
	1. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	74.33	74,88
	2. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	51.86	56.30
3	*Penurunan Intensitas Emisi GRK*	%	3.04	*belum rilis*
	a) Kumulatif (%)	%		
	b) Tahunan (%)	%		
4	Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	119,20	159,5
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.19	1.00
6	Rasio Penduduk	%	99.48	107.83
7	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km^2		
8	*Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati*			
	a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	%	0.55	3.18
9	Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati			
	b) Indeks pertanaman (IP) padi	Indeks	1:2	1:2
	c) Proporsi sawah irigasi	%	33.541,27	56.25
	d) Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1488.42	1497,87
	e) Angka Konsumsi Ikan/Pengeluaran Konsumsi Ikan	Rp		18791
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,05	7.71
2	Tingkat Kemiskinan	%	5.02	4.91
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	59,31	61,83
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.02	3,03
5	Indeks Gini	Indeks	0.319	0.325
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74.81	75.49
7	Indeks Kesehatan	Indeks	83.77	84.14
8	Angka Kriminalitas	Kasus	834	940
9	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan	%		
10	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	55.26	55,36
11	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.45	74,69

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
12	*Kesehatan Ibu dan Anak*			
	a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (%)	%	95	
	b) Jumlah kematian Ibu (kasus)	Kasus	8	8
	c) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	5.9	5.86
	d) Jumlah Kematian anak/balita (kasus)	Kasus	0	1
13	*Penanganan Tuberkulosis:*			
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	52.53	49
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	86.4	64
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	57.62	99.01
15	Indeks Pendidikan	%	63.56	64,28
16	*Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota untuk:*			
	a) Kemampuan Literasi SD	%	58.07	53.62
	b) Kemampuan Numerasi SD	%	52.96	48.35
	c) Kemampuan Literasi SMP	%	66.43	66.62
	d) Kemampuan Numerasi SMP	%	59.46	60.47
17	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	8.21	8.36
18	Angka Harapan Lama Sekolah	%	13.03	13.11
19	*Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi*			
	a) Angka partisipasi kasar SMA(%)	%		45.67
	b) Angka partisipasi kasar perguruan tinggi(%)	%		
20	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan (%)	%	96.98	97
21	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	16.95	55.92
22	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%`		0.043
23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	61.19	96,97
24	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	40.54	40.54
25	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/ fasilitasi oleh pemerintah daerah	%		100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
26	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	60.4	66.5
27	Indeks perlindungan anak (IPA)	%	67.44	67.44
28	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.397	0.397
29	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,32	92.6
30	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Indeks		
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	Skor		
2	Kontribusi PDRB Pengolahan (%)	%	15,09	15.56
3	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks		
4	*Pengembangan Pariwisata*			
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%		1
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (orang)/ Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara (%)	%		-9.19
5	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kabupaten/kota (unit)	Unit		592
6	*Produktifitas UMKM, Koperasi, BUMD*			
	a) Jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota (unit)	Unit		6039
	b) Persentase koperasi sehat di kab/kota (%)	%	61.11	67.35
	c) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	7	5
	d) Produktifitas padi (ton/Ha)	%	5.17	6
	e) Jumlah produksi perikanan (ton)	Ton	3.822	3.868
7	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	4,05	10,70
8	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	61.19	58.09
9	*Tingkat Penguasaan IPTEK*			
	a) Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks		3.04
10	*Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau*			
	b) Indeks Ekonomi Hijau (Indeks)	Indeks		
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%		
12	Net Ekspor Barang dan Jasa	%		1.10
13	*Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan*			
	a) Kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi	%		2.88-30
	b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (jumlah RT)	%	97	97,5
	c) Indeks Infrastruktur	Indeks	81.24	76.91
	d) Persentase Desa Mandiri	%	48.53	60.29
14	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.26	0.43
15	Tingkat Inflasi	%		
16	Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	%		
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	33.81	32.44

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
18	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	%		94
19	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (%)	%		11.72
20	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	96	96
21	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks		
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks		
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77.68	96.52
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,51	
3	Nilai SAKIP	Nilai		65,82
4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks		42,1
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	75.455	79,09
6	Indeks SPBE	Indeks	3.04	3,04
7	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	1.73	3.43
8	a) Indeks Survey Penilaian Integritas (Indeks)	Indeks	67.21	
	b) Nilai MCP KPK (nilai)	nilai	85	
	c) Indeks Maturitas SPIP (Indeks)	Indeks	3	3
9	Persentase Penegakan Hukum PERDA	%		
10	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	Indeks		
11	Persentase tindak kriminal yang ditangani	%		
	a) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	%	3,57	15
	b) Jumlah Perda yang merupakan inisiatif DPRD	Perda	4	3
	c) Persentase perempuan pengurus partai politik	%	8.57	8.6
12	Jumlah Kerja Sama Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (*Sister Province*/ Sister City) (jumlah)	Jumlah	8	

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2025

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024-2025

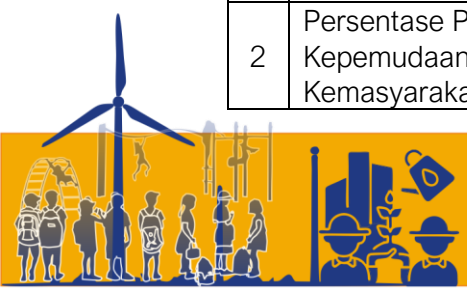
No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
	INDIKATOR KINERJA KUNCI			
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
A	Pendidikan			
1	Persentase anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD	%	81.6	65,33
2	Persentase anak Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	%	99.79	84,75
3	Persentase anak Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	%	16.88	16,34

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	%		55,33
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah pertama dalam Kondisi baik	%		46,48
B	Kesehatan			
1	Persentase kematian ibu	%		0,13
2	Prevelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%		5,86
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	96.09	77,08
4	Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai dengan standar	%	98.1	83,97
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	97.4	89,83
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	99.45	94,21
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%		100
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%		58,09
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	83.22	87,03
10	Persentase Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	%	41.19	31,07
11	Persentase pelayanan kesehatan Penderita diabetes melitus Sesuai Standar	%	95.95	92,86
12	Persentase pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat Sesuai Standar	%	97.78	97,91%
13	Persentase pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	%	86.85	100
14	Persentase pelayanan kesehatan Orang dengan resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* Sesuai Standar	%	82.09	98,43
C	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan Kabupaten/kota	%	65,11	69,04
2	Persentase kemantapan Kemantapan Jalan Kab/Kota	%	60.81	40.78
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%		88,85
4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%		90,14
5	Persentase Luas Kawasan Pemukiman rawan banjir yang terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian dan mitigasi banjir	%	73	90,00

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	%		Suket
7	Persentase kepatuhan persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/kota	%		100
8	Persentase kepatuhan persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	%		100
9	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%		34,12
10	Persentase penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	%		100
D	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%		0
2	Persentase luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%		31,26
3	Persentase Rumah layak Tidak layak huni yang tertangani	%		1,47
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, sarana dan utilitas Umum	%		25
E	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	0	1
2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong Praja	%		100
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	%		100
4	persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0,47	6,36
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%		83,72
F	Sosial			
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada	%	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
	saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota			
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	84,66
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
A	**Tenaga Kerja**			
1	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	%	0	0
2	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/Peraturan Kerja Bersama,Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan)	%	13.75	25
	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	0	10,82
B	**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**			
1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%		100
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif	%		100
C	**Pangan**			
1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah kabupaten/kota	%		5,73
D	**Pertanahan**			
1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%		24,21
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	%		97,31
3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	%		33,33
E	**Lingkungan Hidup**			
1	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	%	97.14	100
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	74,29	75,28
F	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**			
1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	%		98,20
2	Persentase Kepemilikian Kartu Identitas Anak (KIA)	%		62,10
3	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	%		100
4	Persentase Kepemilikian Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	%		98

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%		77,21
6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%		100
7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%		100
G	**Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**			
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	1.47	100
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	48.53	20
3	Persentase fasilitasi kerjasama desa	%		100
H	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**			
1	Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate/TFR)* per Wanita usia Subur usia 15-49 Tahun	%	2.07	2,11
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern / *modern Contraceptive Prevalance Rate*(mCPR)	%	68,61	53,5
3	Persentase Kebutuhan ber- Keluarga Berencana Yang Tidak Terpenuhi *(Unmet Need)*	%	7.90	16,9
I	**Perhubungan**			
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	50	0,30
2	*Volume/Capacity Ratio* di jalan kabupaten/kota	Rasio		0,21
3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%		100
J	**Komunikasi Dan Informatika**			
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksanan teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100
2	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	%	75.43	11,87
K	**Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**			
1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%		10,5
2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%		1,78
L	**Penanaman Modal**			
1	Persentase Peningkatan Investasi Di Kab/Kota	%	-14.22	-13,57
2	Realisasi total terhadap target investasi	%		195,10
M	**Kepemudaan dan Olahraga**			
1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	11	114,17
2	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	1.39	1,03



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
3	Persentase atelet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	%		0
4	Persentase jumlah atlet berprestasi	%		75,97
N	Statistik			
1	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	%		71,16
O	Persandian			
1	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah	%		49,46
P	Kebudayaan			
1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	%		60,73
2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	%		56,73
Q	Perpustakaan			
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	Nilai	60.48	61,98
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	93.76	19,73
R	Kearsipan			
1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	%	72.31	100
	Urusan Pilihan			
A	Kelautan dan Perikanan			
1	Produksi perikanan tangkap dan budaya	%		90,42
2	Angka Komsumsi ikan	Kg/Kap/ Th		34,69
B	Pariwisata			
1	Persentase Investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	%		23,08
2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan asing	%	8.970	-25
3	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota	%	60	9,06
C	Pertanian			
1	Peningkatan Produksi tanaman pangan	%		38,47
2	Peningkatan produksi holtikultura	%		-56,71
3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	%		24,4
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari *Surveylance* penyakit dari 5 penyakit Hewan menular Strategis (PHMS)	%		100
D	Perdagangan			
1	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapaannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	%	154.72	121.99

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
E	**Perindustrian**			
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi : 1. Pertumbuhan produk domestik regional bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota, 2. Konstribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik regional bruto kabupaten/kota, 3. jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota, 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas Kabupaten/kota, 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	%	10,9	11,34
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem informasi Industri Nasional	%	11,4	8,5
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	%	36,6	51,7
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	26,4	40
	Indikator Kinerja Kunci Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota			
A	**Perencanaan**			
1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	%	100	100
B	**Keuangan**			
1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	%		98,23
2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah	%	14,83	18,57
3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah			63,83
4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik			29,54
C	**Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**			
1	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	79,99	79,87
D	**Penelitian dan Pengembangan**			
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi dari program kegiatan	%	100	100

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
E	Fungsi Pengawasan			
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai		3,01
2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah (APIP)	Nilai		3
3	Manajemen risiko Indeks	Nilai		2,77
4	Persentase Tindak Lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	%		85,45
F	Fungsi Pengadaan			
1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Poin		35,56
2	Pemanfaatan sistem Pengadaan	Poin		24,11
3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Banrang/jasa (SDM)	Poin		20,53
G	Hubungan dengan Perwakilan Daerah			
1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu (100%) / Tidak Tepat Waktu (0%)		Tepat Waktu
2	Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	%		85,71
H	Pelayanan Publik			
1	Penilaian mal admistrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai		78

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2025

2.2.4. Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota. Legalitas Standar Pelayanan Minimal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi pelaksanaan SPM Tahun 2025 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi kewajiban dalam menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan jenis, mutu, dan target penerima layanan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting dilakukan mengingat SPM

merupakan prioritas utama dalam penggunaan anggaran daerah dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Hasil evaluasi pelaksanaan SPM Tahun 2025 selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam program perencanaan dan penganggaran pada RKPD Tahun 2027, khususnya dalam memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas layanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun capaian penerapan indikator standar pelayanan minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.59
Capaian Indikator SPM Tahun 2023-2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
I	**Pendidikan**				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	77.46%	89.48 %
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	90.52%	94.08 %
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (SD)	53.45%	63.25%	53.62%
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (SD)	43.77%	55.85%	48.35%
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (SMP)	-	-	66.62%
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (SMP)	-	-	60.47%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%	42.59%	28.33 %
II	**Kesehatan**				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	77.25%	96.09%	77.57 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	89.10%	98.1%	85.75 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	92.51%	97.4%	88.94 %
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	81.03%	99.45%	93.08 %

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	96.59%	97.22 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	72.72%	97.56%	66.72 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	82.16%	83.22%	92.44 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	27.78%	41.91%	42.56 %
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	95.95%	100 %
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	97.78%	100 %
11	Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	86.85%	90.40 %
12	Pelayanan kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human immunodeficiency Virus*)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	83.36%	82.09%	100 %
III	PEKERJAAN UMUM				
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	95%	93.98%	91.11 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	82.73%	90.99%	86.50 %
IV	PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	98.57%	100.00%	100 %

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100.00%	100 %
V	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	100%	100 %
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	89.01%	91%	11,31 %
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	88.33%	91%	5.94 %
4	Pelayanan penyelamtan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	57%	20.00 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	90%	100%	94.18 %
VI	SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100 %
4	Rehabilitasi sosial dasartuna sosial khususnya glandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%	100%	66.53 %

Sumber Data: Laporan Penerapan SPM Tahun 2025, diolah.

Hasil evaluasi pelaksanaan SPM Tahun 2025 di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan capaian yang bervariasi antar bidang urusan. Bidang Sosial mencatatkan kinerja yang sangat baik dengan seluruh jenis layanan dasar terealisasi 100%, meliputi rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) juga menunjukkan capaian yang cukup baik, di mana layanan ketenteraman dan menyampaikan umum serta mengeluarkan korban kebakaran berhasil mencapai pemenuhan 100%, meskipun layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana baru terealisasi 33,17% karena keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan personel. Bidang Pekerjaan Umum mencapai 88,85% untuk penyediaan kebutuhan air minum dan 90,14% untuk layanan pengolahan air limbah domestik, sementara Bidang Perumahan Rakyat belum terdapat kejadian bencana yang memerlukan penyediaan layanan sehingga target terpenuhi sesuai kondisi.

Bidang Kesehatan menunjukkan pencapaian yang beragam di antara jenis pelayanan pada dasarnya. Beberapa layanan telah terpenuhi 100% seperti pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus, ODGJ berat, dan orang tak terduga TBC, sementara layanan lainnya masih memerlukan peningkatan, di antaranya pelayanan kesehatan ibu hamil (77,08%), ibu bersalin (83,97%), bayi baru lahir (88,47%), dan pelayanan kesehatan usia produktif (60,97%). Khususnya pelayanan bagi penderita hipertensi baru terealisasi 31,07%, yang disebabkan oleh kurangnya alat ukur tekanan darah, rendahnya pemenuhan penderita dalam pengobatan, serta kurangnya tanggung jawab masyarakat terhadap layanan kesehatan. Bidang Pendidikan mencatatkan capaian identifikasi peserta didik anak usia dini sebesar 90,38%, sementara layanan pendidikan dasar berhasil melampaui target dengan capaian 108,61%. Berbagai permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan SPM Tahun 2025 ini selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan dasar perencanaan program percepatan penyediaan layanan dasar pada tahun-tahun berikutnya, termasuk dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.

2.2.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Suistainable Development Goals* (TPB/SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kemudian baru-baru ini diperbaharui pada Paraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022. TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat daerah. Adapun capaian target TPB/SDGs tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.60
Capaian target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Suistainable Development Goals (TPB/SDG's)

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Realisasi		OPD Penanggungjawab
					Tahun 2024	Tahun 2025	
TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN							
	Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DI MANAPUN						
	Target 1.2 : Pada Tahun 2030, Mengurangi Setidaknya Setengah Proporsi Laki-Laki, Perempuan Dan Anak-Anak Dari Semua Usia, Yang Hidup Dalam Kemiskinan Di Semua Dimensi, Sesuai Dengan Definisi Nasional.						
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	5,02	4,91	Dinas Sosial
	Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
2	1.3.1.[a]	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	57,62	99,01	Dinas Kesehatan
3	1.3.1.[b]	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	16,95	52,15	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
4	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	/100rb	0,01	0,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	34.407.019.000	2.816.200.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6	1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dok	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 02 TANPA KELAPARAN							
	Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN						
	Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
7	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	%	4,58	6,25	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
8	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	%	*tidak ada data tk. Kab/kota*	*tidak ada data tk. Kab/kota*	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
	Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
9	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	%	20,3	20,3	Dinas Kesehatan
10	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	%	2,7	2,82	Dinas Kesehatan
11	2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Dinas Kesehatan	%	10,2		Dinas Kesehatan
TUJUAN 03 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA							
	Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA						

	Target 3.1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
12	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINAS KESEHATAN	Kasus	8	6	Dinas Kesehatan
13	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	Dinas Kesehatan
	Target 3.2 : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
14	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angkat Kematian Bagi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per 1000	0	1	Dinas Kesehatan
15	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per 1000	17	13,9	Dinas Kesehatan
16	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Dinas Kesehatan	%	0,549	0,189	Dinas Kesehatan
17	3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	per 100 ribu	195	200	Dinas Kesehatan
18	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	per 1000	0,07	0,07	Dinas Kesehatan
19	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Dinas Kesehatan	orang	12	21	Dinas Kesehatan
	Target 3.4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
20	3.4.1.[b]	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	%	28,8	27,3	Dinas Kesehatan
21	3.4.1.[c]	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan	%	30	53	Dinas Kesehatan
	Target 3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						

22	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	%	1,6		Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
23	3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun, umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	%	37,0	25,9	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
24	3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	%	2,07	2,11	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
	Target 3.8 : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
25	3.8.1.[a]	*Unmet Need* Pelayanan Kesehatan.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	%	7,88		Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
	Target 3.a : Memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.						
26	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan	%	25,05	6,51	Dinas Kesehatan
TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS							
	Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA						
	Target 4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						
27	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	%	92,84	95,60	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Target 4.c : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.						
28	4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	%	62,41	76,28	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
TUJUAN 05 KESETARAAN GENDER							

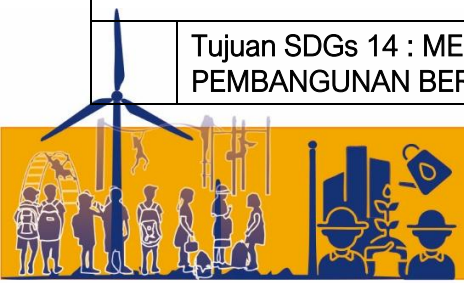
	Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN						
	Target 5.2 : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
29	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kasus	2	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
30	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kasus	2	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Target 5.3 : Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.						
31	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Orang	623	601	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Target 5.5 : Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
32	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kursi	4	4	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
33	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Orang	2	2	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	TUJUAN 06 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK						
	Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA						

	Target 6.1 : Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
34	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Dinas Biciptapera	%	93,98	94,59	Dinas Biciptapera
	Target 6.2 : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
35	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Dinas Biciptapera	%	3,70	5,79	Dinas Biciptapera
	TUJUAN 08 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI						
	Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA						
	Target 8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.						
36	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Bapperida	%	4.05	7.71	BAPPERIDA /Bagian Ekonomi
37	8.1.1.[a]	PDB per kapita.	Bapperida	Juta Rupiah	59.31	65.15	BAPPERIDA /Bagian Ekonomi
	Target 8.2 : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.						
38	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%			DinkopUKM Nakertrans
	Target 8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
39	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin.	BPS	%			Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

40	8.3.1.[a]	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal.	Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	%	1,89	5	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Target 8.5 : Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
41	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Rp	18140	19000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
42	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka.	BPS	%	3,02	3,36	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
43	8.5.2.[a]	Persentase setengah pengangguran.	BPS	%			
	Target 8.9 : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
44	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	%	81,00	81	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
45	8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.		Orang	84	3	
46	8.9.1.[b]	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Orang	139848	127,001	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
	Target 8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.						
47	8.10.1.(b)	Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	72	73	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TUJUAN 09 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR							
	Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI						
	Target 9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						

48	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	%	60,91	40,78	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat
	Target 9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
49	9.2.1*	Rasio PDB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	%	13,23	14,64	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
50	9.2.1.[a]	Pertumbuhan PDB industri pengolahan.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	%	4,71	11,58	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
51	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan.	Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	%	28,28	30	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN							
	Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA						
	Target 10.1 : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
52	10.1.1.(a)	Rasio Gini.	Dinas Sosial	Poin	0.319	0.325	DINAS SOSIAL
53	10.1.1.(c)	Jumlah daerah tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Desa	1	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
54	10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri.		Desa	33	41	
55	10.1.1.(e)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Desa	1	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN							

	Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN						
	Target 11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.						
56	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	%	79.19	97.57	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat
	Target 11.5 : Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang- orang dalam situasi rentan.						
57	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	/100rb	0,01	0,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 12 KOMSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB							
	Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN						
	Target 12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.						
58	12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	%	71,25	10,83	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM							
	Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA						
	Target 13.1 : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.						
59	13.01.01	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	/100rb	0,01	0,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUT							
	Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN						



	Target 14.6 : Pada tahun 2020, melarang bentuk- bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO).						
60	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan.	Dinas Peternakan	%	100	70	Dinas Peternakan
TUJUAN 15 EKOSISTEM DARAT							
	Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI						
	Target 15.9 : Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.						
61	15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis.	Dinas Lingkungan Hidup	Dok			DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
	Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN						
	Target 16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.						
62	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polres	Kasus	2	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
63	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Polres	Orang	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
64	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polres	Kasus	211	280	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Target 16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.						

65	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	%	0,004	0,004	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
66	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		%	4	4	
	Target 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.						
67	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	%	95,55	95,92	Badan Keuangan dan Aset Daerah
68	16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	%	100	100	Badan Keuangan dan Aset Daerah
69	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B.	Inspektorat	Nilai			Bagian Organisasi
	Target 16.7 : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.						
70	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	%	8,57	8,57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
71	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		%	6,9	6,9	
	Target 16.9 : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
72	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	Dinas Kependudukan Dan Capil	%	95,46	98,2	Dinas Kependudukan Dan Capil
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
	Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN						

	Target 17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
73	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pendapatan Daerah	%	6.360	5,880	Badan Pendapatan Daerah
74	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda	%	0,264	0,427	Badan Pendapatan Daerah
75	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Pendapatan Daerah	%	0,046	0,074	Badan Pendapatan Daerah
	Target 17.19 : Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
76	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).	Dinas Kependudukan Dan Capil	Ada/Tidak	Ada	ADA	Dinas Kependudukan Dan Capil

Sumber: Data diolah Tim Penyusun RKPD Tahun 2027

2.3. Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2025

Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan prinsip fundamental dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengharuskan adanya keterkaitan, keselarasan, dan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Konsistensi ini memastikan bahwa setiap dokumen perencanaan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam satu kesatuan sistem yang utuh dan terintegrasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan RKPD tahunan, di mana setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD harus bersumber dan sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Konsistensi vertikal ini memastikan bahwa perencanaan tahunan tidak menyimpang dari arah pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian target pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan terarah. Lebih lanjut, konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran tercermin dalam keterkaitan yang erat antara RKPD dan APBD, di mana setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD harus memperoleh alokasi anggaran yang memadai dalam APBD. Konsistensi horizontal ini memastikan bahwa seluruh rencana pembangunan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber daya keuangan yang telah dialokasikan secara proporsional sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

2.3.1. Penjabaran Program RPJMD

Program penjabaran evaluasi merupakan salah satu instrumen penting dalam konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029 telah dijabarkan secara berjenjang ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Konsistensi penjabaran antar dokumen perencanaan menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa arah dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD benar-benar tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, serta memiliki dukungan anggaran yang memadai. Evaluasi ini melibatkan 29 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan total 161 program yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.61
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD dan APBD

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja-PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
5	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	13	13	13	13	13	13	13	13	0	0	0	0
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
8	Dinas Sosial	7	6	6	6	6	6	6	6	1	0	0	0
9	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	9	8	8	8	8	8	8	8	1	0	0	0
10	Dinas Lingkungan Hidup	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	10	9	9	7	9	9	7	7	1	0	2	3
13	Dinas Perhubungan	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0
15	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	10	9	9	9	9	9	9	9	1	0	0	1

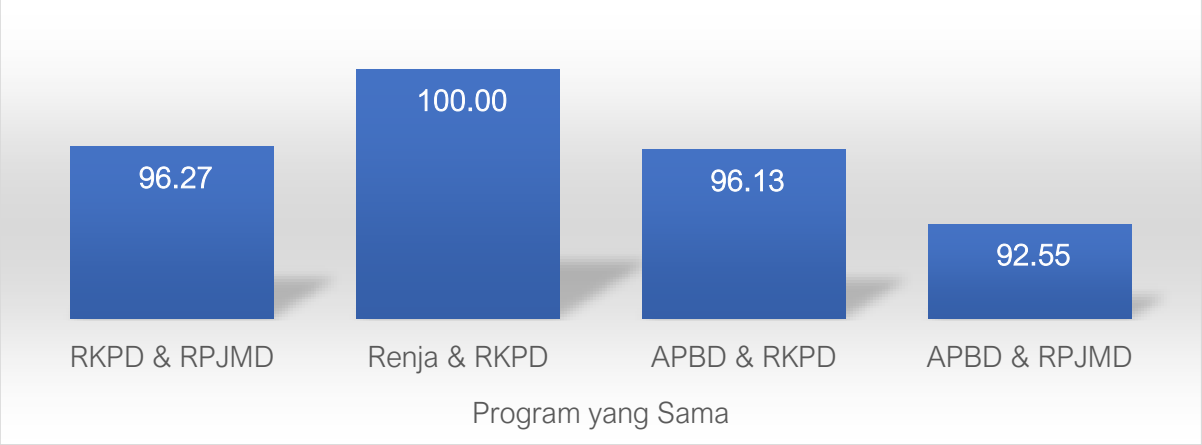
No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Program				Program yang Sama				Program Tidak Sama			
		RPJMD	RKPD	Renja-PD	APBD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD	RKPD & RPJMD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	APBD & RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	7	7	7	6	7	7	7	6	0	0	1	1
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6	6	6	5	6	6	5	5	0	0	1	1
19	Dinas Peternakan Dan Perikanan	9	9	9	8	9	9	8	8	0	0	1	1
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6	6	6	5	6	6	6	5	0	0	0	0
21	Sekretariat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
22	Sekretariat DPRD	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Danpengembangan Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
24	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
25	Badan Pendapatan Daerah	3	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
27	Inspektorat	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
28	Kecamatan	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
29	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0
TOTAL		161	155	155	149	155	155	151	149	5	0	5	7

Catatan:

1. *Angka pada kolom 3 s/d 6 adalah jumlah program pada setiap perangkat daerah yang tercantum dalam masing-masing dokumen;*
2. *Angka pada kolom 7 s/d kolom 10 adalah jumlah program yang konsisten antardokumen pada masing-masing perangkat daerah;*
3. *Angka pada kolom 11 s/d kolom 14 menunjukkan jumlah program yang tidak sama antar dokumen sebagaimana dimaksud.*

Hasil evaluasi penjabaran program menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik secara keseluruhan. Dari 161 program yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 155 program atau 96,3% telah dijabarkan ke dalam RKPD, dan seluruh program dalam RKPD tersebut sepenuhnya konsisten dengan Renja PD dengan tingkat kesesuaian 100%. Adapun tingkat kesesuaian antara APBD dengan RKPD mencapai 97,4% (151 dari 155 program), sedangkan kesesuaian APBD dengan RPJMD secara keseluruhan berada pada angka 92,5% (149 dari 161 program). Sebagian besar perangkat daerah, yakni 20 dari 29, menunjukkan konsistensi penuh di seluruh jenjang dokumen perencanaan dan penganggaran.

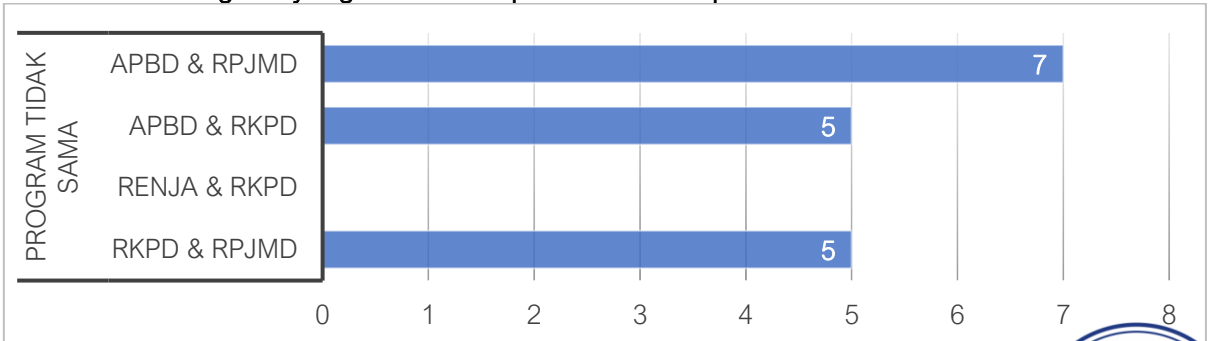
Grafik 2.272
Konsistensi Program pada Dokumen Perencanaan



Sumber: Data diolah Tim RKPD 2027,2026

Meskipun demikian, terdapat 9 perangkat daerah yang masih memiliki program yang tidak selaras antar dokumen. Ketidaksesuaian terbesar ditemukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki 3 program tidak selaras antara APBD dan RPJMD, diikuti Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata masing-masing dengan 1 program. Ketidakselarasan ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, khususnya dalam memastikan bahwa seluruh program prioritas RPJMD mempunyai penjabaran dan dukungan anggaran yang konsisten di seluruh jenjang dokumen perencanaan.

Grafik 2.273
Program yang tidak sama pada dokumen perencanaan Tahun 2025



Sumber: Data diolah Tim RKPD 2027,2026

Dari 29 perangkat daerah yang dievaluasi, sebanyak 20 perangkat daerah menunjukkan konsistensi penuh di seluruh jenjang dokumen perencanaan dan penganggaran, artinya seluruh program yang tercantum dalam RPJMD telah dijabarkan secara utuh mulai dari RKPD, Renja PD, hingga APBD tanpa ada program yang tertinggal. Perangkat daerah tersebut meliputi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, DPMPTSP, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bappeda, BKAD, BKPSDM, Inspektorat, Kecamatan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Capaian ini mencerminkan komitmen yang tinggi dari sebagian besar perangkat daerah dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggarannya dengan arah kebijakan RPJMD.

Sementara itu, ketidaksesuaian yang terjadi pada 9 perangkat daerah lainnya dapat dipecah ke dalam dua pola. Pertama, ketidaksesuaian antara RPJMD dengan RKPD, yang terjadi pada Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PMDPPA, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Pendapatan Daerah masing-masing dengan 1 program yang tidak terjabarkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya program dalam RPJMD yang belum terakomodir dalam perencanaan tahunan, yang dapat berdampak pada tidak tercapainya target jangka menengah jika tidak segera dikoreksi pada tahun-tahun berikutnya.

Kedua, ketidaksesuaian antara RKPD dengan APBD yang terjadi pada Dinas PMDPPA dengan 2 program, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas Peternakan dan Perikanan masing-masing dengan 1 program. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun program telah direncanakan dalam RKPD dan Renja PD, namun tidak sepenuhnya mendapat dukungan anggaran dalam APBD. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius mengingat program yang tidak memiliki ketahanan anggaran berisiko tidak terlaksana, sehingga tercapainya kinerja perangkat daerah terkait berpotensi terhambat.

Memperhatikan kondisi tersebut, penyusunan RKPD Tahun 2027 perlu memperkuat mekanisme sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, terutama bagi perangkat daerah yang masih memiliki kesenjangan antar dokumen. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain melalui penguatan proses verifikasi konsistensi program pada saat penyusunan Renja PD dan pembahasan APBD, serta memastikan bahwa setiap program prioritas RPJMD yang belum terjabarkan pada tahun 2025 diprioritaskan untuk masuk dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2027 sebagai bentuk koreksi dan percepatan target pembangunan jangka menengah daerah.



2.3.2. Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD

Salah satu hal penting yang termuat dalam RPJMD adalah program pembangunan daerah. Program tersebut menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun kegiatan dalam Renstra-PD. Kegiatan dalam Renstra-PD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD. Selanjutnya kegiatan dalam Renja-PD menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan dalam RKPD yang kemudian dijadikan sebagai dasar penyusunan kegiatan pada KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan R-APBD untuk ditetapkan menjadi kegiatan dalam APBD dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan informasi data tersebut, dapat digambarkan konsistensi dan pelaksanaan kegiatan RKPD sebagai berikut:

Tabel 2.62
Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Tidak Sama	
		Renja	RKPD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16	16	16	16	16	0	0
2	Dinas Kesehatan	24	24	18	24	18	0	0
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	14	12	14	12	0	6
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	8	8	7	8	7	0	1
5	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	17	17	17	17	17	0	0
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12	12	9	12	9	0	3
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10	10	10	10	10	0	0
8	Dinas Sosial	12	12	11	12	11	0	1
9	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	16	16	16	16	16	0	0
10	Dinas Lingkungan Hidup	18	18	17	18	17	0	1
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	17	17	13	17	13	0	4
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	21	21	12	21	12	0	0
13	Dinas Perhubungan	16	16	16	16	16	0	0
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12	12	12	12	12	0	0
15	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	17	17	17	17	17	0	0
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12	12	11	12	11	0	1
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	17	17	15	17	15	0	2

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan			Kegiatan Yang Sama		Kegiatan Tidak Sama	
		Renja	RKPD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	21	21	12	21	12	0	0
19	Dinas Peternakan Dan Perikanan	15	15	15	15	15	0	0
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11	11	10	11	10	0	1
21	Sekretariat Daerah	19	19	19	19	19	0	0
22	Sekretariat DPRD	15	15	14	15	14	0	1
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Danpengembangan Daerah	17	17	15	17	15	0	2
24	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	13	13	12	13	12	0	1
25	Badan Pendapatan Daerah	8	8	7	8	7	0	1
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	12	12	12	12	0	0
27	Inspektorat	10	10	10	10	10	0	0
28	Kecamatan Panca Lautang	9	9	10	9	10	0	1
29	Kecamatan Tellu Limpoe	11	11	11	11	11	0	0
30	Kecamatan Watang Pulu	9	9	9	9	9	0	0
31	Kecamatan Maritengngae	10	10	10	10	10	0	0
32	Kecamatan Watang Sidenreng	10	10	10	10	10	0	0
33	Kecamatan Dua Pitue	11	11	10	11	10	0	1
34	Kecamatan Pitu Riawa	9	9	9	9	9	0	0
35	Kecamatan Pitu Riase	10	10	10	10	10	0	0
36	Kecamatan Baranti	11	11	11	11	11	0	0
37	Kecamatan Panca Rijang	9	9	10	9	10	0	1
38	Kecamatan Kulo	10	10	9	10	9	0	1
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	11	11	11	11	11	0	0
	TOTAL	520	520	475	520	475	0	29

Keterangan Tabel:
Kolom (1) adalah nomor.
Kolom (2) adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah KabupatenSidenreng Rappang.
Kolom (3) memuat jumlah rencana kegiatan dalam Renja-PD pada setiap OPD.
Kolom (4) memuat jumlah rencana kegiatan dalam RKPD pada setiap OPD.
Kolom (5) memuat jumlah kegiatan dalam APBD pada setiap OPD.
Kolom (6) memuat jumlah rencana kegiatan yang sama antara Renja-PD dan RKPD
Kolom (7) memuat jumlah rencana kegiatan RKPD yang dilaksanakan dalam APBD.
Kolom (8) memuat jumlah kegiatan yang tidak sesuai antara Renja-PD dan RKPD. Penghitungan dilakukan dengan menambahkan jumlah kegiatan pada Renja-PD yang tidak ada dalam APBD dengan jumlah kegiatan dalam RKPD yang tidak ada dalam Renja-PD (8 = (3 - 6) + (4 - 6)).
Kolom (9) memuat jumlah kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD. Penghitungan dilakukan dengan menambahkan jumlah kegiatan pada RKPD yang tidak ada dalam APBD dengan jumlah kegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam RKPD (9 = (4 - 7) + (5- 7)).

Evaluasi konsistensi pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 dilakukan terhadap 39 perangkat daerah dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan total 520 kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan Renja PD. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dalam RKPD telah sepenuhnya konsisten dengan Renja PD, ditandai dengan tingkat kesesuaian Renja dan RKPD yang mencapai 100% atau sebanyak

520 kegiatan dari 520 kegiatan yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa proses penyusunan Renja PD telah berjalan dengan baik dan selaras dengan arah perencanaan tahunan daerah yang dituangkan dalam RKPD. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan pada tingkat penjabaran kegiatan dalam APBD. Dari 520 kegiatan yang direncanakan, hanya 475 kegiatan atau 91,3% yang berhasil dijabarkan dan mendapat dukungan anggaran dalam APBD, sementara 29 kegiatan atau 5,6% tidak terakomodir dalam penganggaran. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan fiskal daerah yang menyebabkan tidak seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat didanai, atau terdapat perubahan prioritas pada saat proses pembahasan dan penetapan APBD yang belum sepenuhnya mengakomodir seluruh kegiatan dalam RKPD.

Ketidaksesuaian antara APBD dan RKPD pada tingkat kegiatan yang diterapkan di berbagai perangkat daerah. Ketidaksesuaian terbesar ditemukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang masing-masing memiliki 9 kegiatan yang tidak teranggarkan dalam APBD dari total kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 4 kegiatan, diikuti Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 6 kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebanyak 3 kegiatan, serta Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengan 2 kegiatan yang tidak terakomodir dalam APBD. Pada tingkat kecamatan, Kecamatan Panca Lautang dan Kecamatan Panca Rijang masing-masing memiliki 1 kegiatan yang tidak teranggarkan, demikian pula Kecamatan Dua Pitue dan Kecamatan Kulo.

Sementara itu, terdapat sejumlah perangkat daerah yang menunjukkan konsistensi penuh antara RKPD dan APBD pada tingkat kegiatan, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat, BPBD, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Peternakan dan Perikanan, Sekretariat Daerah, BKPSDM, Inspektorat, beberapa kecamatan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Perangkat daerah-perangkat daerah ini berhasil memastikan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dalam RKPD mendapat dukungan anggaran penuh dalam APBD, sehingga pelaksanaan programnya dapat berjalan lebih optimal.

2.3.3. Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD

Sub kegiatan adalah langkah tambahan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan terakhir Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, oleh sebab itu dalam hal evaluasi terhadap pelakksaaan RKPD tidak hanya berheti pada kegiatan (intermediate outcome) tetapi harus sampai pada sub kegiatan yang bersifat outcome, maka berikut ini adalah konsistensi dan pelaksanaan sub kegiatan pada RKPD dan APBD:

Tabel 2.63
Konsistensi dan Pelaksanaan Sub Kegiatan RKPD

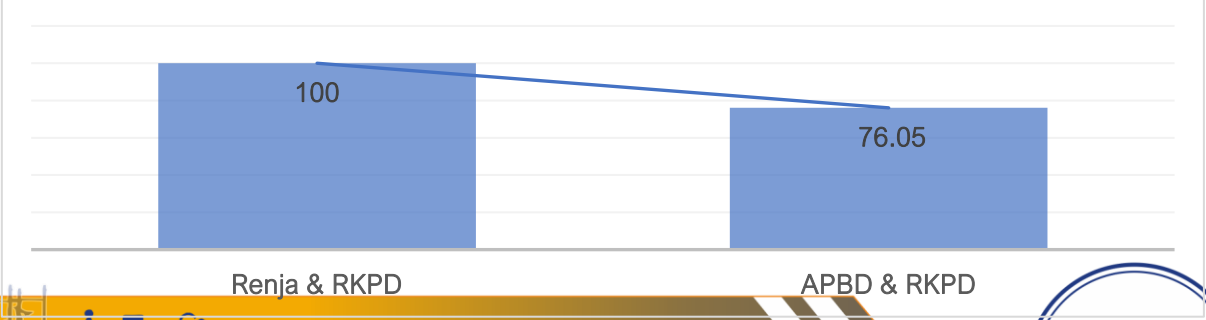
No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama		Sub Kegiatan Tidak Sama	
		Renja	RKPD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	78	78	78	78	78	0	0
2	Dinas Kesehatan	132	132	132	132	132	0	0
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	105	105	37	105	37	0	68
4	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	24	24	19	24	19	0	5
5	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat	38	38	36	38	36	0	2
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	56	56	22	56	22	0	34
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	36	36	33	36	33	0	3
8	Dinas Sosial	24	24	17	24	17	0	7
9	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	51	51	39	51	39	0	12
10	Dinas Lingkungan Hidup	38	38	36	38	36	0	2
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	66	66	25	66	25	0	41
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	61	61	26	61	26	0	35
13	Dinas Perhubungan	33	33	31	33	31	0	2
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	31	31	27	31	27	0	4
15	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	32	32	30	32	30	0	2
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36	36	26	36	26	0	10
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	37	37	26	37	26	0	11
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	74	74	26	74	26	0	48
19	Dinas Peternakan Dan Perikanan	30	30	26	30	26	0	4
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	24	24	19	24	19	0	5
21	Sekretariat Daerah	68	68	64	68	64	0	4
22	Sekretariat DPRD	57	57	52	57	52	0	5
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	107	107	45	107	45	0	63

No. Urut	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan			Sub Kegiatan Yang Sama		Sub Kegiatan Tidak Sama	
		Renja	RKPD	APBD	Renja & RKPD	APBD & RKPD	Renja & RKPD	APBD & RKPD
24	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	87	87	81	87	81	0	6
25	Badan Pendapatan Daerah	41	41	25	41	25	0	16
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43	43	43	43	43	0	0
27	Inspektorat	31	31	27	31	27	0	4
28	Kecamatan Panca Lautang	27	27	26	27	26	0	1
29	Kecamatan Tellu Limpoe	33	33	30	33	30	0	3
30	Kecamatan Watang Pulu	19	19	21	19	21	0	2
31	Kecamatan Maritengngae	22	22	23	22	23	0	1
32	Kecamatan Watang Sidenreng	20	20	23	20	23	0	3
33	Kecamatan Dua Pitue	27	27	23	27	23	0	4
34	Kecamatan Pitu Riawa	23	23	23	23	23	0	0
35	Kecamatan Pitu Riase	27	27	25	27	25	0	2
36	Kecamatan Baranti	26	26	25	26	25	0	1
37	Kecamatan Panca Rijang	18	18	20	18	20	0	2
38	Kecamatan Kulo	30	30	19	30	19	0	11
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	42	42	28	42	28	0	14
	TOTAL	1.754	1.754	1.334	1.754	1.334	0	437

Sumber: Data diolah Tim RKPD 2027, 2026

Evaluasi konsistensi pada tingkat sub kegiatan dilakukan terhadap 39 perangkat daerah dan kecamatan dengan total 1.754 sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD dan Renja PD. Seluruh sub kegiatan dalam Renja PD menunjukkan konsistensi penuh dengan RKPD dengan tingkat kesesuaian mencapai 100%, yang menegaskan bahwa proses penyusunan Renja PD pada tingkat sub kegiatan telah berjalan selaras dengan arah perencanaan tahunan daerah. Namun demikian, kesenjangan yang cukup besar terjadi pada penjabaran sub kegiatan ke dalam APBD, di mana hanya 1.334 sub kegiatan atau 76,05% yang terakomodir, sementara 437 sub kegiatan atau 24,9% tidak mendapat dukungan anggaran. Angka ketidaksesuaian ini jauh lebih besar dibandingkan pada tingkat kegiatan yang hanya 5,6%, menunjukkan adanya rasionalisasi anggaran yang cukup masif pada saat proses pembahasan APBD.

Grafik 2.274
Konsistensi Sub Kegiatan RKPD Tahun 2025



Sub kegiatan ketidaksesuaian terbesar terdapat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (68 sub kegiatan), Bappeda (63 sub kegiatan), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (48 sub kegiatan), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (41 sub kegiatan), Dinas PMDPPA (35 sub kegiatan), serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (34 sub kegiatan). Sebaliknya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan BKPSDM mencatatkan konsistensi penuh dengan seluruh sub kegiatannya terakomodir dalam APBD. Pada tingkat kecamatan, ketidaksesuaian umumnya kecil berkisar 1 hingga 4 sub kegiatan, kecuali Kecamatan Kulo yang memiliki 11 sub kegiatan tidak teranggarkan dari 30 sub kegiatan yang direncanakan.

Besarnya keselarasan pada tingkat sub kegiatan ini menjadi catatan penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. Perangkat daerah perlu lebih fokus dan realistis dalam menetapkan sub kegiatan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, serta memprioritaskan sub kegiatan yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian target RPJMD. Sub kegiatan yang tidak teranggarkan pada tahun 2025 perlu mendapat perhatian khusus untuk diprioritaskan kembali dalam perencanaan dan penganggaran tahun 2027 demi mendukung percepatan pencapaian kinerja pembangunan daerah.

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan komponen krusial yang menentukan arah dan fokus pembangunan daerah dalam periode satu tahun. Permasalahan pembangunan yang tercantum dalam RKPD harus mencerminkan kondisi riil daerah berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek pembangunan. Tujuan utama dari perumusan program pembangunan daerah adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh daerah, terutama jika masalah tersebut terjadi ditengah masyarakat. Permasalahan pembangunan perlu dirumuskan dengan cermat agar tidak keliru menentukan tujuan dan sasaran pembangunan. Keliru dalam merumuskan permasalahan, membuat agenda pembangunan daerah hanya menjadi rutinitas formal dan tidak akan pernah berhasil berkontribusi bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan desain program dan kegiatan untuk akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam setiap tahapannya.

Permasalahan pembangunan daerah dihasilkan dari evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah periode tahun sebelumnya. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Masalah pembangunan daerah dipisahkan

menjadi dua, yaitu permasalahan prioritas pembangunan daerah (makro daerah) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (mikro sektoral/perangkat daerah).

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, berbagai permasalahan pembangunan pada level makro daerah, diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kualitas dan Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

   Pertumbuhan ekonomi daerah memang telah menunjukkan tren positif pada dua tahun terakhir, dengan percepatan signifikan pada tahun 2025 yang menjadikan Sidrap sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 yang mencapai 7,71 persen sejatinya menyimpan permasalahan struktural yang tidak dapat diabaikan. Di balik angka yang tampak mengesankan tersebut, perekonomian daerah masih bertumpu dominan pada sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 30,21 persen terhadap total PDRB. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor ini menjadikan fondasi pertumbuhan ekonomi daerah rapuh dan tidak stabil, mengingat sektor pertanian sangat rentan terhadap tekanan eksternal seperti anomali iklim, degradasi lahan, serangan organisme pengganggu tanaman, serta fluktuasi harga komoditas di pasar global maupun nasional. Tanpa disertai penguatan sektor-sektor lain yang lebih bernilai tambah tinggi, pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada saat ini berisiko bersifat semu dan tidak dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Meskipun data makro 2025 menunjukkan peningkatan pertumbuhan secara keseluruhan, kontribusi sektor pertanian yang dominan sebagai sumber utama PDRB membuat ekonomi daerah belum sepenuhnya diversifikasi, terutama karena produktivitas pertanian masih fluktuatif dan belum optimal akibat keterbatasan teknologi, irigasi, serta akses benih unggul. Sementara itu, diversifikasi ekonomi ke sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa masih berjalan lambat karena keterbatasan investasi, rendahnya kualitas SDM, serta infrastruktur pendukung yang belum memadai. Daya saing produk lokal juga masih lemah akibat standarisasi yang belum memadai, akses pasar terbatas, dan branding yang kurang kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum bersifat inklusif, berkelanjutan, dan tahan guncangan, terutama mengingat ketergantungan pada produksi pertanian yang rentan terhadap faktor eksternal. Jika intervensi tidak terus dilakukan secara intensif, terdapat risiko besar terjadinya perlambatan atau bahkan kontraksi ekonomi ketika terjadi guncangan eksternal. Oleh karena itu, permasalahan ini tetap menjadi prioritas utama untuk memastikan percepatan transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih kuat dan beragam sesuai amanat visi “Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera” serta Misi 1 RPJMD.

2. Melambatnya Penurunan Angka Kemiskinan dan Meningkatnya Ketimpangan Pendapatan;

Tingkat kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 sebesar 4,91 persen memang mencatatkan penurunan dari 5,02 persen pada tahun sebelumnya, namun laju penurunan yang hanya berkisar 0,028 poin per tahun selama enam tahun. Secara komparatif, persentase kemiskinan Sidenreng Rappang konsistensinya lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 7,60% dan rata-rata Nasional sebesar 8,47% pada tahun 2025, serta menempatkan kabupaten ini pada peringkat ke-3 terendah di antara 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

Meskipun kemampuan penurunan persentase kemiskinan tersebut patut diapresiasi, terdapat permasalahan yang lebih dalam dan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan. Laju penurunan kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan dinamika yang lambat dan tidak konsisten, di mana dalam rentang enam tahun dari 2020 hingga 2025, penurunan total yang berhasil dicapai hanya sebesar 0,14 poin persentase, dari 5,05% menjadi 4,91%. Lebih jauh, penurunan tersebut tidak berlangsung secara linier, melainkan sempat mengalami kenaikan selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023. Pola ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih sangat rentan terhadap berbagai guncangan eksternal dan belum bertumpu pada fondasi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kokoh dan berkelanjutan. Permasalahan yang lebih tepat justru terlihat pada dimensi kedalaman dan intensitas kemiskinan yang ditunjukkan pemburukan pada tahun 2025. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidenreng Rappang meningkat dari 0,51 pada tahun 2024 menjadi 0,74 pada tahun 2025, sebuah angka yang cukup signifikan dan mengindikasikan bahwa jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin melebar. Dengan kata lain, meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, mereka yang masih berada dalam kemiskinan justru semakin jauh dari batas garis kemiskinan dan semakin sulit untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Kondisi serupa juga terlihat pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang meningkat dari 0,080 pada tahun 2024 menjadi 0,15 pada tahun 2025, menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara sesama penduduk miskin semakin membesar. Peningkatan simultan pada kedua Indeks ini merupakan sinyal yang sangat serius, karena menggambarkan bahwa kualitas pengentasan kemiskinan belum berjalan dengan baik. Penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan cenderung merupakan mereka yang berada di lapisan paling atas dari kelompok miskin, sementara yang berada di lapisan paling bawah justru semakin terpuruk.

Perlu pula dicermati bahwa meskipun Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Sidrap masih lebih baik dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional, peringkat Sidrap pada kedua Indeks tersebut mengalami penurunan yang cukup dramatis pada tahun

2025. Indeks Kedalaman Kemiskinan yang pada tahun 2024 berada di peringkat terbaik (peringkat 1 terendah) di antara 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, turun ke peringkat ke-4 pada tahun 2025. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan yang juga turun dari peringkat terbaik menjadi peringkat ke-4. Penurunan peringkat yang tajam dalam satu tahun ini menandakan adanya tekanan struktural terhadap kondisi kemiskinan yang terdalam di Kabupaten Sidenreng Rappang yang perlu segera direspons melalui intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berpihak pada kelompok termiskin dari yang miskin.

Persoalan kemiskinan semakin diperumit oleh tren memburuknya ketimpangan pendapatan yang meningkat dari kenaikan rasio gini dari 0,319 pada tahun 2024 menjadi 0,325 pada tahun 2025. Meningkatnya rasio gini di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan sinyal serius bahwa buah pertumbuhan ekonomi tidak didistribusikan secara adil, dan justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan akses terhadap faktor-faktor produksi, seperti lahan, modal, teknologi, dan jaringan pasar, yang membuat sebagian besar lapisan masyarakat bawah tidak mampu berpartisipasi secara bermakna dalam proses pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung.

3. **Masih Rendahnya Daya Saing Tenaga Kerja dan Partisipasi Angkatan Kerja;**

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 menunjukkan penampilan yang patut mendapat perhatian serius. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 3,36 persen dari 3,02 persen pada tahun 2024, kenaikan yang terjadi pada tahun 2025 mengindikasikan adanya tekanan pada pasar tenaga kerja lokal yang perlu diantisipasi secara terencana dan sistematis. Meskipun TPT Sidenreng Rappang berada pada peringkat ke-9 terendah di antara 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, tantangan yang lebih mendasar justru tercermin dari rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2025, TPAK Kabupaten Sidenreng Rappang hanya mencapai 58,09%, menempatkan kabupaten Sidenreng Rappang pada posisi terendah dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Rendahnya TPAK ini mencerminkan masih besarnya proporsi penduduk usia kerja yang tidak aktif pada pasar tenaga kerja, baik karena keterbatasan keterampilan, ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, maupun kurangnya akses terhadap peluang kerja yang tersedia.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja, melainkan lebih dalam menyentuh aspek kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Rendahnya partisipasi angkatan kerja yang disertai dengan kecenderungan meningkatnya tekanan terbuka menjadi sinyal bahwa diperlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif, mencakup peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, penguatan

sistem pelatihan kejuruan, serta penciptaan ekosistem ketenagakerjaan yang mampu mendorong lebih banyak penduduk usia produktif untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.

4. **Masih Rendahnya Kualitas Pembangunan Manusia (Masih stagnannya kualitas pembangunan manusia);**

IPM menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2025, yakni dari 73,07 pada tahun 2020 meningkat menjadi 73,39 pada tahun 2021, 73,81 pada tahun 2022, 74,38 pada tahun 2023, 74,81 pada tahun 2024, dan mencapai 75,49 pada tahun 2025. Peningkatan pada tahun 2025 sebesar 0,68 poin atau 0,91% merupakan lompatan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, dan menempatkan IPM Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kategori "Tinggi". Capaian ini merupakan hasil yang patut diapresiasi sebagai buah dari upaya pembangunan yang konsisten di berbagai sektor. Namun demikian, di balik tren positif tersebut, terdapat permasalahan mendasar yang perlu dicermati secara lebih mendalam, terutama dari sisi relatif posisi kabupaten ini terhadap pencapaian provinsi dan nasional, serta dari sisi ketertinggalan pada komponen-komponen pembentuk IPM yang menjadi akar dari permasalahan kualitas sumber daya manusia.

Dari perspektif perbandingan regional dan nasional, capaian IPM Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada di bawah IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan IPM Nasional dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2025, IPM Sidrap sebesar 75,49 tertinggal dari IPM Sulawesi Selatan sebesar 75,92 dan IPM Nasional sebesar 75,90. Meskipun selisihnya terlihat kecil secara angka, kondisi ini mengindikasikan bahwa laju peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Sidenreng Rappang belum mampu melampaui rata-rata provinsi maupun nasional, sehingga posisi relatif kabupaten ini cenderung stagnan. Dalam peta perbandingan antar kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, IPM Sidrap tahun 2025 berada di peringkat ke-7 dari 24 kabupaten/kota, sebuah posisi yang sebenarnya cukup baik namun masih jauh dari tiga kabupaten/kota dengan IPM tertinggi di Sulawesi Selatan seperti Makassar, Palopo, dan Parepare yang telah memasuki kategori sangat tinggi dengan IPM di atas 80.

Apabila ditelaah pada tataran komponen pembentuk IPM, permasalahan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Sidenreng Rappang paling menonjol pada dimensi pendidikan. Indeks Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi komponen dengan nilai terendah di antara tiga Indeks pembentuk IPM, yakni hanya mencapai 64,28 pada tahun 2025, meskipun secara konsisten meningkat dari 62,05 pada tahun 2020. Rendahnya Indeks Pendidikan ini ditopang oleh dua indikator pembentuknya yang juga tertinggal dari rata-rata provinsi dan nasional. Harapan Lama Sekolah (HLS) Sidrap pada tahun 2025 mencapai 13,11 tahun, namun angka ini masih berada di bawah HLS Sulawesi Selatan sebesar 13,56 tahun

dan HLS Nasional sebesar 13,30 tahun, serta menempatkan Sidrap pada peringkat ke-17 dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, bahkan mengalami penurunan peringkat dari posisi ke-16 pada tahun sebelumnya. Kondisi yang lebih mencerminkan terlihat pada Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yang pada tahun 2025 hanya mencapai 8,36 tahun, berarti bahwa rata-rata penduduk Sidrap berusia 25 tahun ke atas hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMP. Angka ini jauh tertinggal dari RLS Sulawesi Selatan sebesar 9,00 tahun dan RLS Nasional sebesar 9,07 tahun, serta menempatkan Sidrap di peringkat ke-17 secara konsisten dalam dua tahun terakhir. Ketertinggalan pada kedua indikator pendidikan ini dalam enam tahun berturut-turut merupakan sinyal yang sangat serius bahwa intervensi di sektor pendidikan belum memberikan dampak yang cukup signifikan untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia secara struktural.

Berbeda dengan dimensi pendidikan, kondisi Indeks Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang justru menunjukkan keunggulan komparatif yang konsisten. Indeks Kesehatan meningkat dari 82,82 pada tahun 2020 menjadi 84,14 tahun pada 2025, menjadikannya komponen tertinggi dalam pembentukan IPM Sidrap. Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai indikator pembentuknya juga terus meningkat dari 73,83 tahun pada 2020 menjadi 74,69 tahun pada 2025, dan secara konsisten selalu lebih tinggi dibandingkan UHH Sulawesi Selatan sebesar 74,47 tahun maupun UHH Nasional sebesar 74,15 tahun. Sidrap bahkan menempati peringkat ke-7 tertinggi UHH di antara 24 kabupaten/kota Sulawesi Selatan, sebuah prestasi yang patut dipertahankan dan ditingkatkan. Pada dimensi daya beli, Indeks Pengeluaran juga menunjukkan tren positif yang kuat, meningkat dari 75,89 tahun 2020 menjadi 79,54 pada tahun 2025, dengan pengeluaran perkapita mencapai Rp13.604.000 per tahun yang secara konsisten lebih tinggi dari rata-rata Sulawesi Selatan maupun nasional, menempatkan Sidrap di peringkat ke-6 tertinggi se-Sulawesi Selatan.

Meskipun Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran telah melampaui pencapaian provinsi dan nasional, keunggulan pada dua dimensi ini belum mampu menutupi kelemahan pada dimensi pendidikan. Hal ini mengindikasikan perlunya menyeimbangkan kembali investasi pembangunan manusia yang lebih terarah dan proporsional. Peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama, meliputi pemerataan akses pendidikan berkualitas hingga ke wilayah terpencil, penguatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik, serta pengembangan ekosistem belajar yang mendorong anak-anak tetap bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Hanya dengan memperkuat dimensi pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menutup kesenjangannya dengan provinsi dan nasional, sekaligus membangun fondasi modal manusia yang kokoh bagi generasi mendatang.



5. Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup;

Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi tekanan yang semakin kompleks. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mencapai 74,16 pada tahun 2025 memang melampaui target yang ditetapkan, namun angka tersebut masih berada di bawah IKLH Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 76,50, dan hanya tipis di bawah pencapaian nasional sebesar 74,20. Apabila ditelaah pada dimensi-dimensi pembentuknya, terungkap sejumlah persoalan mendasar yang tidak cukup hanya dilihat dari angka agregat. Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan paling tajam, turun hampir 12 poin dari 94,20 pada tahun 2024 menjadi 82,29 pada tahun 2025, menjadi yang terendah sejak tahun 2022. Penurunan drastis ini patut mendapat perhatian serius karena kualitas udara berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, produktivitas kerja, serta daya tarik investasi daerah.

Persoalan pengelolaan persampahan juga menjadi permasalahan lingkungan lain yang juga belum tertangani secara memadai. Persentase sampah yang tertangani terus mengalami penurunan, dari pencapaian yang lebih baik pada tahun-tahun sebelumnya menjadi hanya 54,97 persen pada tahun 2024. bahwa hampir separuh dari total timbulan sampah masyarakat yang dihasilkan masih belum dikelola dengan baik mencerminkan masih terbatasnya kapasitas penutupan infrastruktur persampahan, rendahnya kesadaran dalam masyarakat pemilahan dan pengelolaan sampah, serta belum optimalnya tata kelola sistem pengelolaan persampahan daerah secara menyeluruh. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada estetika lingkungan, namun juga berdampak pada pencemaran sumber udara, peningkatan risiko banjir, dan penurunan kualitas udara.

Dimensi kebencanaan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam lingkungan hidup daerah. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang melonjak tajam dari 119,2 poin menjadi 159,5 poin pada tahun 2025, suatu peningkatan yang sangat signifikan dan mengindikasikan meningkatnya kerentanan daerah terhadap ancaman bencana alam secara substansial. Lonjakan Indeks ini dapat disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, antara lain degradasi daya dukung lingkungan, alih-alih fungsi lahan, lemahnya infrastruktur mitigasi bencana, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem akibat perubahan iklim global. Apabila tren ini tidak segera direspons dengan kebijakan mitigasi dan adaptasi yang komprehensif, potensi kerugian jiwa dan material akibat bencana di masa mendatang akan semakin besar, dan pada gilirannya akan mengancam seluruh pencapaian pembangunan yang telah berhasil dicapai.

6. Belum Optimalnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban Umum serta Kehidupan Sosial Masyarakat:

Stabilitas keamanan dan perdamaian umum merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan kehidupan sosial

masyarakat yang harmonis. Tanpa kondisi keamanan yang kondusif, seluruh pencapaian pembangunan di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan hidup akan sulit untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, kondisi keamanan dan pemeliharaan umum menunjukkan tren yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Angka kriminalitas kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan yang signifikan dan konsisten dalam periode 2020–2024. Kondisi tersebut semakin meningkat apabila mempertimbangkan data realisasi tahun 2025 yang mencatat angka kriminalitas sebesar 915 kasus, meningkat drastis sebesar 164 kasus atau sekitar 21,84% dibandingkan realisasi tahun 2024. Angka ini sekaligus jauh melampaui target penurunan yang ditetapkan dalam RKPD, di mana target tahun 2026 ditetapkan pada 766 kasus. Dengan realisasi tahun 2025 yang sudah mencapai 915 kasus, jarak antara kondisi aktual dengan target yang ditetapkan semakin melebar, sehingga diperlukan intervensi yang jauh lebih intensif dan komprehensif untuk dapat mencapai target penurunan kriminalitas yang telah direncanakan. Dari sisi komposisi kasus, angka kriminalitas di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 didominasi oleh tiga jenis kejahatan utama, yaitu penyebaran, kasus narkoba, dan penggelapan, yang mencerminkan pergeseran pola kriminalitas ke arah kejahatan yang berdampak langsung pada rasa aman masyarakat serta mengindikasikan permasalahan sosial yang lebih dalam seperti mendorong narkotika di kalangan masyarakat.

Di luar dimensi keamanan dan kriminalitas, permasalahan kehidupan sosial masyarakat juga ikut memperkuat urgensi penetapan masalah pokok ini. Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 tercatat sebesar 55,26 dan sedikit meningkat menjadi 55,77 pada tahun 2025, namun angka ini masih relatif rendah dan menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai budaya lokal sebagai perekat sosial belum berjalan secara optimal. Sementara itu, Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2024 baru mencapai 64,13, masih jauh dari target RKPD tahun 2026 sebesar 72,93 dan target tahun 2027 sebesar 75,53. Rendahnya Indeks pembangunan pemuda ini patut diwaspadai mengingat kelompok usia muda merupakan segmen populasi yang paling rentan terhadap berbagai pengaruh negatif, termasuk keterlibatan dalam tindak kriminalitas dan merangkul narkoba.

7. Masih Perlunya Penguatan Tata Kelola Pemerintahan;

Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang sejatinya telah menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 mencapai angka 79,097, yang merupakan nilai tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan masuk dalam kategori Baik. Namun dibalik angka yang menggembirakan tersebut, terdapat kenyataan yang perlu diperhatikan secara serius. Perjalanan menuju angka tersebut tidaklah mulus, karena pada periode 2023–2024 IKM justru mengalami penurunan yang cukup tajam

sebelum kembali naik pada tahun 2025. Permasalahan ini juga tercermin dari hasil penilaian per unsur pelayanan dalam IKM tahun 2025. Dari sembilan unsur pelayanan yang dinilai berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, tujuh unsur telah berada pada kategori Baik, bahkan unsur kewajaran biaya/tarif mencapai kategori Sangat Baik dengan nilai 3,864. Namun dua unsur pelayanan masih berada dalam kategori C (Kurang Baik), yaitu penanganan pengaduan dengan nilai 2,774 dan kualitas sarana dan prasarana dengan nilai 2,961. Nilai rendahnya pada unsur penanganan pengaduan mengindikasikan bahwa mekanisme responsivitas pemerintah terhadap aspirasi, keluhan, dan masukan masyarakat belum berjalan secara optimal, suatu kondisi yang secara langsung melibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sementara itu, masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur pendukung layanan publik belum mencukupi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah masih adanya ketimpangan kualitas layanan antara satu unit pelayanan dengan unit lainnya, serta antara satu wilayah dengan wilayah lain. Misalnya, masih terdapat kecamatan yang kualitas pelayanannya masuk dalam kategori Kurang Baik, sementara unit layanan lainnya sudah mencatatkan nilai yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa standar pelayanan yang baik belum diterapkan secara merata dan konsisten di seluruh jajaran pemerintahan daerah. Masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, terutama di daerah yang lebih terpencil, berpotensi mendapatkan kualitas layanan yang lebih rendah dibandingkan masyarakat yang tinggal di pusat kota, sebuah kondisi yang tentunya tidak adil dan perlu segera diperbaiki.

Selain soal kepuasan masyarakat, tata kelola internal pemerintah daerah juga masih perlu terus diperkuat. Nilai SAKIP yang belum mencapai target, Indeks Inovasi Daerah yang masih rendah, serta Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum sesuai harapan menunjukkan bahwa pembenahan birokrasi daerah masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar. Dalam bahasa yang lebih sederhana, pemerintah daerah perlu bekerja lebih cerdas dengan memanfaatkan teknologi digital secara lebih maksimal, membangun sistem kerja yang lebih terukur dan akuntabel, serta mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru dalam pelayanan publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dapat terus tumbuh dan terjaga secara berkelanjutan, tidak hanya baik pada tahun-tahun tertentu saja.

8. Belum Optimalnya Ketersediaan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah

Infrastruktur daerah merupakan fondasi utama yang menopang seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, mulai dari akses ke sekolah dan layanan kesehatan, kelancaran distribusi hasil pertanian, hingga kemudahan masyarakat dalam menjalankan usaha sehari-hari. Sayangnya, kondisi infrastruktur di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 menunjukkan

pencahayaan yang cukup mempengaruhi. Indeks Infrastruktur yang sebelumnya mencapai titik tertinggi 81,24 pada tahun 2024 turun cukup tajam menjadi 79,34 pada tahun 2025. Penurunan yang paling terasa dan berdampak langsung bagi masyarakat adalah memburuknya kondisi jalan. Tingkat Kemantapan Jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan yang sangat drastis, dari 60,91 persen pada tahun 2024 menjadi hanya 40,78 persen pada tahun 2025. Artinya, lebih dari sebagian jalan di daerah ini saat ini berada dalam kondisi yang tidak mantap atau rusak. Kondisi jalan yang buruk bukan hanya membuat perjalanan menjadi tidak nyaman, namun juga berdampak nyata pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Petani menjadi kesulitan pengangkutan hasil panennya ke pasar, angkutan transportasi menjadi lebih mahal, waktu tempuh menjadi lebih lama, dan akses masyarakat ke sekolah maupun fasilitas kesehatan menjadi terhambat. Pada akhirnya, jalan yang rusak akan memperlambat seluruh roda perekonomian daerah secara keseluruhan.

Di samping masalah jalan, akses masyarakat terhadap air bersih juga mengalami kemunduran. Persentase rumah yang dapat mengakses air bersih menurun dari 93,98 persen menjadi 88,85 persen pada tahun 2025, padahal sebelumnya angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya, terdapat ribuan keluarga yang sebelumnya sudah bisa menikmati air bersih kini kembali kesulitan mengaksesnya, sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan mengingat air bersih adalah kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan manusia. Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya dapat diukur dari berapa banyak yang berhasil dibangun, tetapi juga dari seberapa baik infrastruktur tersebut dijaga agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan.

Sedangkan permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah (mikro sektoral), diidentifikasi sebagai berikut:

2.4.1. Urusan Wajib

a. Pendidikan

Beberapa masalah yang teridentifikasi pada urusan pendidikan diantaranya:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan;
2. Kekurangan guru berkualitas dan distribusi guru yang tidak merata antar sekolah;
3. Tingginya angka putus sekolah;
4. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa;
5. Lemahnya sistem informasi manajemen pendidikan daerah.

b. Kesehatan

Untuk urusan kesehatan, beberapa masalah yang dapat diidentifkasi, yaitu:

1. Masih rendahnya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di fasilitas kesehatan;
2. Masih Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB);

3. Masih Tingginya Angka Kematian Ibu;
4. Masih tingginya angka penyakit menular, khususnya AIDS, Tuberculosis, dan Malaria;
5. Masih adanya balita penderita gizi buruk;
6. Kekurangan tenaga medis spesialis dan paramedis;
7. Lemahnya sistem kesehatan preventif dan promosi kesehatan

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, adalah:

1. Masih tingginya persentase jalan Kabupaten kondisi rusak;
2. Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kabupaten tidak lagi mampu melayani perkembangan kota;
3. Belum tercapainya akses air minum 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Belum tercapainya akses Sanitasi 100 % bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Banyaknya infrastruktur jaringan irigasi yang rusak akibat banjir;
6. Kurangnya operasi dan pemeliharaan baik secara rutin maupun berkala pada sistem irigasi.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, adalah:

1. Masih ada beberapa kawasan kumuh yang belum tertangani;
2. Masih tingginya rumah dengan kondisi tidak layak huni
3. Masih belum tersedianya lahan untuk relokasi penanganan bencana.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, adalah:

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas;
2. Masih tingginya angka krmininalitas dan gangguan terhadap kemananan dan ketertiban masyarakat;
3. Lemahnya sistem penringatan dini bencana;
4. Kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
5. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana;

f. Sosial

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan sosial, adalah:

1. Masih rendahnya cakupan pemberian bantuan sosial;

2. Kurangnya fasilitas dan layanan bagi penyandang disabilitas;
3. Belum akuratnya data terpadu penanggulangan kemiskinan dan data penerima manfaat bantuan sosial;
4. Kurangnya SDM tenaga professional.

g. Ketenagakerjaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan Ketenagakerjaan, adalah:

1. Rendahnya cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
2. Masih rendahnya kualitas pencari kerja;
3. Ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri;
4. Lemahnya sistem informasi pasar kerja;
5. Kurangnya lembaga pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi.

h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adalah:

1. Masih Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Tingginya angka perkawinan usia anak;
3. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan;
4. Masih lemahnya sistem perlindungan perempuan dan anak.

i. Pangan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan Pangan, adalah:

1. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat;
2. Pola konsumsi pangan masyarakat belum memenuhi kaidah Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA);
3. Masih terdapat wilayah yang berpotensi rawan pangan;
4. Penanganan daerah rawan pangan belum optimal dan terintegrasi;
5. Fluktuasi harga pangan masih tinggi untuk beberapa komoditas strategis.

j. Pertanahan

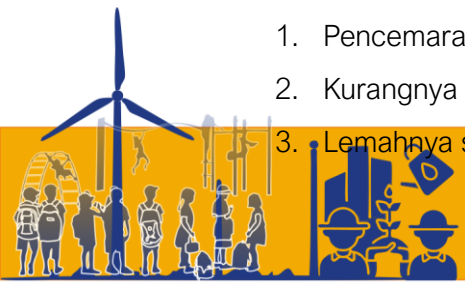
Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan ini, adalah:

1. Masih banyak lahan pemerintah daerah yang belum tersertifikasi;
2. Lambatnya proses sertifikasi tanah dan birokrasi yang berbelit;
3. Masih rendahnya pemenuhan lahan untuk kepentingan umum.

k. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup, adalah:

1. Pencemaran air, udara, dan tanah yang semakin meningkat;
2. Kurangnya sarana dan prasarana persampahan;
3. Lemahnya sistem pengelolaan sampah dan limbah;



4. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Kabupaten;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan;
6. Lemahnya sistem pengawasan lingkungan.

l. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, adalah:

1. Masih banyak penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap;
2. Masih rendahnya peningkatan SDM ASN dan Operator Pelayanan;
3. Masih belum optimalnya Sosialisasi Undang-Undang Administrasi Kependudukan;
4. Masih kurangnya penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
5. Kesulitan akses layanan bagi masyarakat di daerah terpencil.

m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, adalah:

1. Keterbatasan kapasitas SDM pengelola program pemberdayaan;
2. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam program pembangunan;
3. Minimnya akses permodalan untuk usaha mikro dan kecil;
4. Kesenjangan pembangunan antara desa mandiri, maju dan tertinggal;
5. Lemahnya koordinasi antar lembaga pemberdayaan masyarakat.

n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

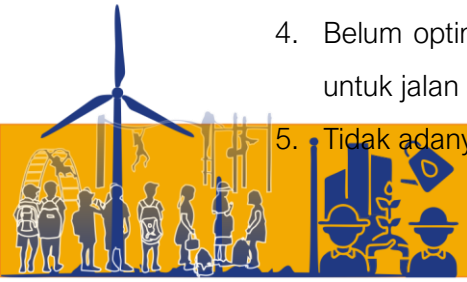
Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, adalah:

1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk;
2. Masih rendahnya pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) / Akseptor KB;
3. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need);
4. Lemahnya program pendidikan reproduksi.

o. Perhubungan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perhubungan, adalah:

1. Belum tersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
2. Minimnya penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;
3. Belum optimalnya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
4. Belum optimalnya pelayanan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten Kota;
5. Tidak adanya PPNS LLAJ di Dinas Perhubungan;



6. Belum optimalnya Pelakasanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dari segi Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana.

p. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan komunikasi dan informatika, adalah:

1. Adanya kesenjangan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan internet antar wilayah;
2. Rendahnya literasi digital masyarakat;
3. Kurangnya SDM bidang TIK;
4. Lemahnya sistem informasi publik.

q. Koperasi, Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan koperasi, usaha kecil menengah, adalah:

1. Rendahnya daya saing produk UMKM;
2. Lemahnya koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan'
3. Terbatasnya akses teknologi dan inovasi bagi UMKM;
4. Rendahnya persentase koperasi aktif;
5. Keterbatasan akses UMKM terhadap permodalan dan pasar.

r. Penanaman Modal

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan penanaman modal, adalah:

1. Rendahnya realisasi investasi;
2. Kurangnya SDM perizinan yang berkualitas;
3. Kurangnya sarana dan prsarana pelayanan publik;
4. Kurangnya promosi potensi investasi daerah;
5. Keterbatasan infrastruktur pendukung investasi.

s. Kepemudaan dan Olahraga

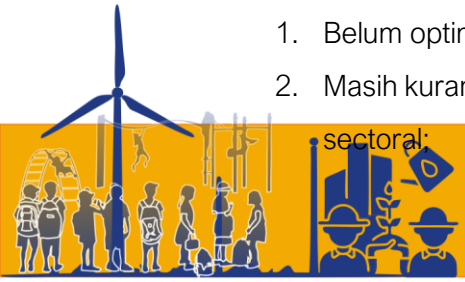
Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kepemudaan dan olahraga, adalah:

1. Kurangnya fasilitas olahraga dan kepemudaan;
2. Rendahnya prestasi olahraga daerah;
3. Lemahnya program pengembangan bakat pemuda;
4. Masih kurangnya SDM dan tenaga ahli di bidang olahraga;
5. Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
6. Masih kurangnya pelatihan keterampilan pemuda;
7. Masih kurangnya pelatihan pelaku olahraga.

t. Statistik

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan statistik, adalah:

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data sectoral;
2. Masih kurangnya upaya mewujudkan single data dan penguatan pengelolaan data statistik sectoral;



3. Kurangnya akurasi dan ketepatan waktu penyediaan data;
4. Masih rendahnya persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik (SDGs).

u. Persandian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan statistik, adalah:

1. Lemahnya sistem keamanan informasi pemerintah;
2. Kurangnya SDM bidang persandian dan keamanan siber;
3. Keterbatasan infrastruktur keamanan informasi.

v. Kebudayaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kebudayaan, adalah:

1. Kurangnya pelestarian dan pengembangan seni budaya;
2. Terbatasnya fasilitas kebudayaan;
3. Masih Kurangnya akses masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah
4. Belum Optimalnya Upaya Pelindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya Menjadi Bernilai Ekonomis;
5. Belum Tersedianya Bangunan Museum Daerah Kondisi Baik.

w. Perpustakaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perpustakaan, adalah:

1. Keterbatasan koleksi dan fasilitas perpustakaan;
2. Rendahnya Minat Baca Masyarakat;
3. Kurangnya perpustakaan di tingkat desa/kelurahan;
4. Kurangnya tenaga perpustakaan yang kompeten.

x. Kearsipan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kearsipan, adalah:

1. Masih rendahnya Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku;
2. Kurangnya SDM Pengelola Kearsipan baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kearsipan;
4. Rendahnya kesadaran pentingnya pengelolaan arsip.

2.4.2. Layanan Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

1. Masih terbatasnya penggunaan benih berkualitas dan terbatasnya akses dan tingginya harga pakan ikan;
2. Belum optimalnya upaya penataan kawasan perikanan budidaya melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur;
3. Masih adanya kelompok nelayan yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah;
4. Menurunnya produksi perikanan kelompok nelayan;

5. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM peternak, pembudidaya dan nelayan;
6. Terbatasnya akses peternak, pembudidaya dan nelayan terhadap permodalan;
7. Rusaknya lingkungan dan ekosistem danau;
8. Belum optimalnya perlindungan sumber daya ikan.

b. Pariwisata

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pariwisata, adalah:

1. Kurangnya promosi, branding dan pemasaran destinasi wisata;
2. Infrastruktur pendukung pariwisata yang belum memadai;
3. Rendahnya kualitas SDM sektor pariwisata;
4. Rendahnya Inovasi dan Kreasi produk wisata dari pelaku usaha ekonomi kreatif yang kurang menghasilkan produk – produk baru yang dapat menjadi daya tarik wisata.

c. Pertanian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pertanian adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas pertanian menurun;
2. Maraknya alih fungsi lahan pertanian;
3. Produksi sektor perkebunan cenderung mengalami penurunan;
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian;
5. Masih Tingginya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
6. Keterbatasan SDM penyuluh pertanian;
7. Produktifitas usaha peternakan terutama produk ayam petelur mengalami penurunan;
8. Fluktuasi harga komoditas peternakan;
9. Belum optimalnya produksi dan produktifitas peternakan.

d. Perdagangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perdagangan, adalah:

1. Sulitnya akses pasar bagi produk UMKM local;
2. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur perdagangan seperti pasar;
3. Fluktuasi harga komoditas yang merugikan petani/nelayan;
4. Kompetensi aparatur (SDM) yang kurang memadai;

e. Perindustrian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perindustrian, adalah:

1. Rendahnya daya saing produk industri local;
2. Keterbatasan SDM terampil untuk sektor industri;
3. Lambatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM);
4. Masih kurangnya jaringan kemitraan usaha bagi penguatan IKM dan fasilitasi kemitraan investasi dan penjualan produk.

f. Transmigrasi

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perindustrian, adalah:

1. Persentase transmigran swakarsa yang stagnan;
2. Masih kurangnya optimalnya pelaksanaan pemetaan calon transmigran pada saat proses seleksi sehingga pengiriman transmigran tidak sesuai dengan ketrampilan yang dibutuhkan dilokasi;
3. Kurangnya infrastruktur/ sarana dan prasarana pemukiman transmigrasi.

2.4.3. Penunjang Urusan

a. Perencanaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perencanaan, adalah:

1. Ketersediaan data akurat yang kurang memadai;
2. Masih Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi pembangunan;
3. Kualitas para perencana di Perangkat Daerah dan Kabupaten/ Kota masih belum memadai;
4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinergitas dan harmonisasi kegiatan antar perangkat daerah;
5. Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;
6. Inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan implementasi.

b. Keuangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan keuangan, adalah:

1. Ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat;
2. Realisasi pendapatan daerah yang cenderung menurun;
3. Rendahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Masih Lemahnya pengelolaan aset daerah;
5. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
6. Belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi yang didukung oleh sarana IT (belum terintegrasi dan belum online).

c. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang teridentifikasi pada kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, adalah:

1. Distribusi PNS yang tidak merata antar wilayah dan antar unit kerja;
2. Masih Rendahnya kompetensi dan kinerja sebagian ASN;
3. Masih Kurangnya sistem merit dalam pengembangan karier;
4. Rendahnya tingkat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN.

d. Kelitbangan/ Inovasi

Permasalahan yang teridentifikasi pada kelitbangan adalah:

1. Pelaksanaan penelitian belum sepenuhnya dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan program pembangunan daerah;
2. Hasil kajian belum menjadi acuan dalam perumusan perencanaan/kebijakan pembangunan daerah;
3. SDM peneliti yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kajian yang dibutuhkan;
4. Rendahnya budaya inovasi dalam birokrasi pemerintahan;
5. Minimnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset.

e. Pengawasan

Permasalahan yang teridentifikasi pada pengawasan adalah:

1. Masih ada temuan yang tidak ditindak lanjuti oleh perangkat daerah;
2. Masih ada ASN yang melakukan pelanggaran;
3. Masih adanya temuan BPK;
4. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil yang berarti OPD belum sepenuhnya mempertanggungjawabkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi OPD;
5. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga masih diperlukan sosialisasi serta membuka jalur pengaduan secara terbuka dan respon yang lebih cepat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
6. Masih terdapat temuan-temuan hasil pengawasan yang sifatnya berulang;
7. Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal;
8. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektifitas pengendalian secara periodik;
9. Belum meratanya kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawasan.

f. Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang teridentifikasi adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebhinekaan dan Pancasila;
2. Kurang optimalnya pembinaan terhadap kegiatan keagamaan dan sarana dan prasarana tempat ibadah belum terpenuhi;
3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sehingga terkadang ada kasus kejahatan yang tidak terlapor;
4. Peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika.

2.5. Isu Strategis

Perumusan isu strategis dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 merupakan penyaringan dari berbagai dinamika pembangunan

yang berlangsung pada skala global, nasional, regional, maupun lokal. Strategi yang dimaknai sebagai kondisi atau hal yang apabila tidak segera terselesaikan akan berdampak signifikan terhadap tercapainya tujuan pembangunan daerah, sekaligus sebagai potensi yang jika dikelola secara tepat dapat menjadi katalis percepatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan isu strategis RKPD Tahun 2027 ini mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, serta memperhatikan kebijakan prioritas nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2027. Selain itu, isu strategis daerah seperti tidak dapat juga dari tekanan eksternal perubahan global, perkembangan teknologi yang semakin pesat, dan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang harus terus diupayakan pencapaiannya hingga tahun 2030.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, berikut adalah isu-isu strategi yang dianggap paling relevan, mendesak, dan memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2027.

2.5.1. Isu Strategis Global

1. **Dampak Konflik Geopolitik Timur Tengah (Iran–Amerika Serikat) terhadap Pembangunan Daerah**

Situasi geopolitik global yang memanas, khususnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat bersama Israel dengan Iran sejak awal tahun 2026, telah memberikan dampak nyata yang merambat hingga ke tingkat daerah. Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan serentak ke Iran, memicu rentetan balasan militer yang mengguncang stabilitas wilayah Timur Tengah secara keseluruhan. Konflik ini bukan sekadar persoalan politik dan keamanan antarnegara, melainkan telah berkembang menjadi guncangan ekonomi global yang dampaknya dirasakan secara langsung oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, termasuk hingga ke daerah-daerah yang secara geografis sangat jauh dari medan konflik sekalipun.

Konflik di Timur Tengah berdampak sistemik terhadap perekonomian global karena kawasan tersebut merupakan pusat pasokan energi dunia. Dampaknya antara lain kenaikan biaya produksi dan distribusi terutama di sektor transportasi dan manufaktur, tekanan inflasi domestik karena harga barang dan jasa terdorong naik, serta penurunan daya beli masyarakat khususnya kelompok berpendapatan rendah. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu pergerakan harga minyak global akan langsung mendorong naiknya biaya transportasi hasil pertanian, biaya operasional usaha pertanian, dan harga pupuk non-subsidi. Bagi petani di Sidenreng Rappang yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah, kenaikan biaya produksi ini berpotensi menekan pendapatan riil petani dan memperburuk kondisi kemiskinan serta ketimpangan yang masih menjadi permasalahan utama daerah.

2. Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang dampaknya kini semakin dirasakan secara nyata di tingkat daerah. Fenomena cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan berkepanjangan, dan peningkatan suhu rata-rata telah mengancam berbagai sektor kehidupan, mulai dari pertanian, kesehatan masyarakat, hingga ketersediaan sumber daya air. Sebagai daerah dengan basis ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam, dampak perubahan iklim berpotensi memukul fondasi kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Urgensi penanganan isu ini bukan sekadar kewajiban lingkungan, melainkan juga imperatif pembangunan. Kegagalan dalam merespons perubahan iklim secara terencana akan berdampak pada penurunan produktivitas lahan, kerusakan infrastruktur, serta meningkatnya biaya pemulihan pascabencana yang jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan. Oleh karena itu, isu perubahan iklim dipilih sebagai isu strategis yang harus diintegrasikan ke dalam setiap aspek perencanaan pembangunan daerah, mulai dari tata ruang, pengelolaan lingkungan, hingga ketahanan pangan dan energi.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau Sustainable Development Goals (SDGs) telah menjadi kerangka global yang menjadi acuan pembangunan di seluruh negara, termasuk Indonesia. SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target yang bersifat universal, mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan memiliki peran krusial dalam memastikan lokalisasi SDGs dapat berjalan efektif.

Pemilihan SDGs sebagai isu strategis didasarkan pada kesadaran bahwa banyak target SDGs yang secara langsung bersinggungan dengan kondisi riil masyarakat daerah, seperti pengentasan kemiskinan, akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, dan kesetaraan gender. Tanpa upaya sistematis dalam mengarusutamakan SDGs ke dalam kebijakan dan program daerah, pencapaian target tersebut akan sulit terwujud. Dengan menjadikan SDGs sebagai isu strategis, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan berorientasi pada hasil yang inklusif, terukur, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Kemajuan Teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat dalam era Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berinteraksi secara fundamental. Otomasi, kecerdasan buatan, big data, dan konektivitas digital bukan lagi hal masa depan, melainkan realita yang tengah membentuk ulang lanskap ekonomi dan ketenagakerjaan secara global. Daerah yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan ini berisiko mengalami ketertinggalan yang sulit dikejar.



Di sisi lain, kemajuan teknologi juga membuka peluang besar bagi percepatan pembangunan daerah, mulai dari peningkatan efisiensi pelayanan publik melalui digitalisasi, penguatan ekosistem ekonomi berbasis inovasi, hingga perluasan akses pendidikan dan kesehatan. Isu ini dipilih sebagai prioritas strategis karena menyentuh dua dimensi sekaligus: ancaman disrupsi bagi tenaga kerja yang belum siap, dan peluang transformasi bagi daerah yang mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Penguatan kapasitas SDM berbasis teknologi dan modernisasi tata kelola pemerintahan menjadi kunci agar daerah tidak sekadar menjadi penonton di era perubahan ini.

2.5.2. Isu Strategis Nasional

Dalam perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045, Kabupaten Sidenreng Rapang selain diperhadapkan dengan isu strategis global juga diperhadapkan oleh berbagai isu strategis nasional yang berpotensi dapat berdampak positif dan negatif terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1. Pemanfaatan Bonus Demografi

Indonesia, termasuk daerah-daerah di dalamnya, sedang berada dalam periode emas bonus demografi, yakni kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan kelompok usia non-produktif. Kondisi ini merupakan peluang historis yang hanya datang sekali dalam perjalanan suatu bangsa, dan jendela kesempatan tersebut tidak akan terbuka selamanya.

Namun, bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan nyata apabila generasi muda yang besar jumlahnya tersebut memiliki kualitas yang memadai: sehat, terdidik, terampil, dan produktif. Apabila tidak dikelola dengan baik, bonus demografi justru dapat berbalik menjadi beban sosial berupa tingginya pengangguran, kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial. Isu ini dipilih sebagai prioritas karena urgensinya yang mendesak waktu yang tersedia untuk memanfaatkan momentum ini semakin terbatas, sehingga investasi besar-besaran pada peningkatan kualitas SDM, perluasan lapangan kerja, dan penguatan ekosistem kewirausahaan harus dimulai dan dipercepat sejak sekarang.

2. Kemiskinan Ekstrem dan Ketimpangan Pendapatan

Kemiskinan ekstrem dan ketimpangan pendapatan menjadi salah satu isu strategis yang harus mendapat perhatian penuh dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu ini tidak berdiri sendiri sebagai persoalan daerah semata, melainkan berkaitan langsung dengan agenda besar pembangunan nasional. Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target yang sangat tegas, yaitu kemiskinan ekstrem harus mencapai nol persen, dan angka kemiskinan nasional secara diturunkan menjadi lima persen pada tahun 2029. Target ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan merupakan komitmen negara yang diterapkan secara resmi dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang seluruh terkait, lembaga,

dan daerah untuk bergerak bersama secara keseluruhan berkelanjutan. Oleh karena itu, semua daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang jelas untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan target nasional tersebut.

Dalam konteks nasional, angka kemiskinan ekstrem Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,78 persen, dan pada tahun 2026 ditargetkan turun maksimal menjadi 0,38 persen sebelum mencapai nol persen di akhir tahun 2026. Untuk mengakselerasi pencapaian target ini, pemerintah pusat telah menetapkan 88 kabupaten dan kota sebagai wilayah prioritas yang menjadi konsentrasi penuh seluruh kementerian dan lembaga dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada keakuratan data, di mana pemerintah terus mengintegrasikan data penerima manfaat melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan meminimalisir kesalahan penerima. Bagi Kabupaten Sidenreng Rappang, momentum nasional ini seharusnya menjadi pendorong dan pemacu bagi daerah untuk mempercepat langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang selama ini dinilai masih terlalu lambat.

3. Prevalensi Stunting

Stunting atau gagal tumbuh pada anak balita merupakan salah satu persoalan pembangunan sumber daya manusia yang paling mendasar dan paling berdampak jangka panjang. Stunting bukan sekadar persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai usianya, melainkan mencerminkan kondisi kekurangan gizi kronis yang berlangsung sejak dalam kandungan hingga dua tahun pertama kehidupan, yang dikenal dengan periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Dampaknya jauh melampaui fisik semata: anak yang mengalami stunting berisiko mengalami keterlambatan perkembangan kognitif, kemampuan belajar yang lebih rendah, produktivitas yang menurun di masa dewasa, serta rentan terhadap penyakit tidak menular. Dengan kata lain, stunting hari ini adalah kemiskinan dan ketertinggalan generasi yang akan datang. Persoalan ini tidak bisa ditangani setengah-setengah, karena kerusakan yang ditimbulkan pada tahap tumbuh kembang awal anak bersifat permanen dan tidak dapat ditayangkan sepenuhnya jika intervensi terlambat dilakukan.

Dalam konteks nasional, pemerintah pusat telah menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas utama pembangunan. Penurunan stunting telah masuk dalam Asta Cita ke-4 pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan stunting menjadi 14,2 persen pada tahun 2029 dan mencapai 5 persen pada tahun 2045 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Secara nasional, prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 21,5 persen pada tahun 2023 menjadi 19,8 persen pada tahun 2024, melampaui target RPJMN

sebesar 20,1 persen. Namun demikian, tantangannya masih sangat besar mengingat untuk mencapai target 14,2 persen pada tahun 2029, Indonesia masih harus menurunkan sekitar 7,3 persen poin dalam lima tahun ke depan. Artinya, dibutuhkan rata-rata penurunan sekitar 1,5 hingga 2 persen per tahun secara konsisten, sebuah target yang menuntut kerja keras, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen yang tidak boleh kendur dari seluruh jajaran pemerintahan, termasuk hingga tingkat kabupaten dan desa.

4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal atau yang lazim disingkat SPM merupakan salah satu instrumen kebijakan paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara sederhana, SPM adalah jaminan dari negara kepada setiap warga negara bahwa mereka berhak mendapatkan layanan dasar dengan kualitas dan kualitas yang sudah ditentukan, tanpa memandang di mana mereka tinggal, baik di kota besar maupun di pelosok desa. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang dapat diperoleh setiap warga negara secara minimal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dengan demikian, SPM bukan sekedar kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah demi kelengkapan laporan semata, melainkan merupakan cerminan langsung dari kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika SPM tidak terpenuhi, artinya ada warga negara yang hak dasarnya terabaikan, dan itulah bentuk kegagalan pelayanan publik yang paling nyata dan paling berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Isu ini dipilih sebagai prioritas strategis nasional karena masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara standar layanan yang diamanatkan dengan kondisi aktual yang dialami masyarakat di lapangan. Faktor penghambatnya beragam, mulai dari keterbatasan kapasitas fiskal daerah, ketimpangan distribusi sumber daya manusia aparatur, hingga lemahnya sistem perencanaan dan monitoring berbasis capaian. Dengan menjadikan SPM sebagai isu strategis, daerah didorong untuk menempatkan pemenuhan hak dasar warga sebagai prioritas utama alokasi anggaran dan program pembangunan.

5. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program prioritas nasional paling ambisius yang diluncurkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun 2025. Program ini bukan sekedar program pemberian makanan kepada anak sekolah, melainkan merupakan sebuah kebijakan besar yang dirancang untuk menjawab tiga permasalahan pembangunan sekaligus dalam satu paket, yaitu perbaikan gizi dan kesehatan generasi muda, percepatan penurunan stunting, serta penggerak ekonomi lokal di daerah. MBG merupakan program pemberian makanan bergizi gratis satu kali per hari untuk memenuhi puncak kebutuhan kalori harian, dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah stunting,

sekaligus menggerakkan perekonomian daerah melalui keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan makanan dan distribusi. Dengan cakupan dan skala yang terus-menerus tidak merata dari tahun ke tahun, MBG menjadi isu strategis yang tidak dapat diabaikan oleh setiap pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunannya, karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada seberapa baik daerah mampu merespons, mengintegrasikan, dan mengoptimalkan peluang yang ditawarkan program ini bagi pembangunan lokal.

Dari dimensi ekonomi, Program MBG membuka peluang besar yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah dengan basis pertanian yang kuat. Program MBG dirancang dengan pendekatan rantai pasok lokal, di mana bahan pangan dan jasa pengolahan yang diupayakan berasal dari pelaku usaha di daerah. UMKM tidak ditempatkan sebagai objek pasif, tetapi sebagai aktor ekonomi utama dalam implementasi program. Hal ini sejalan dengan kondisi daerah yang selama ini memiliki produksi beras, palawija, hasil peternakan, dan komoditas pangan lainnya yang melimpah. Ketika petani, nelayan, dan UMKM lokal menjadi pemasok utama bahan baku MBG, maka program tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan gizi, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi lokal yang dapat memperpendek rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada pemasok luar, dan memperkuat kapasitas produksi komunitas lokal. Bagi petani Sidenreng Rappang yang selama ini kerap menghadapi persoalan jual beli harga dan pasar komoditas, Program MBG dapat menjadi solusi nyata dengan menyediakan pasar yang stabil, terjamin, dan berkesinambungan untuk hasil produksi pertanian lokal. Program ini juga telah membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru, serta menggandeng UMKM, petani, nelayan, dan koperasi lokal dalam ekosistem pelaksanaannya, sebuah dampak berganda yang sangat relevan bagi upaya daerah dalam menekan tingkat pengangguran dan memperluas kesempatan kerja bagi Masyarakat.

6. Konektivitas Wilayah

Konektivitas wilayah merupakan fondasi yang menentukan apakah seluruh potensi pembangunan suatu daerah dapat benar-benar terwujud atau justru terhambat oleh keterisolasian dan tingginya biaya pergerakan. Dalam konteks yang paling sederhana, konektivitas adalah tentang seberapa mudah seorang warga dapat menjangkau layanan kesehatan, seberapa cepat hasil panen petani bisa sampai ke pasar, dan seberapa lancar barang dan jasa berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Ketika akses menjadi lebih mudah, biaya logistik menurun, waktu pengiriman berkurang, dan distribusi barang menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga efek peningkatan konektivitas sangat terasa dalam sektor-sektor ekonomi produktif seperti perdagangan. Sebaliknya, ketika konektivitas buruk, yang terjadi bukan sekadar ketidaknyamanan dalam perjalanan, melainkan serangkaian kerugian ekonomi yang berdampak nyata pada pendapatan petani, harga konsumen, daya saing produk lokal, dan pada akhirnya pada kualitas hidup seluruh masyarakat. Bagi Kabupaten Sidenreng Rappang yang perekonomiannya bertumpu

pada sektor pertanian dengan kontribusi 30,21 persen terhadap PDRB, konektivitas wilayah bukan sekedar isu infrastruktur, melainkan isu ekonomi dan kesejahteraan yang paling mendasar.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pemerintah pusat secara tegas menempatkan peningkatan konektivitas antarwilayah sebagai salah satu agenda strategis pembangunan. RPJMN 2025-2029 memuat pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan, bukan hanya memperkuat jaringan dan mobilitas, tetapi juga menawarkan peluang pekerjaan, mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain seperti pariwisata dan ekonomi kreatif. Lebih spesifik lagi, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi, mempercepat program peningkatan konektivitas jalan daerah sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat sistem logistik nasional dan memperlancar arus distribusi hasil produksi daerah. Program Instruksi Presiden Jalan Daerah ini memberikan peluang besar bagi daerah-daerah yang memiliki kawasan produksi pertanian dan perkebunan, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk mendapatkan dukungan pembiayaan pusat dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan daerah yang menjadi urat nadi distribusi komoditas unggulan. Pelaksanaan program ini bertujuan memperbaiki kondisi jalan-jalan daerah yang rusak, terutama pada ruas penghubung kawasan produksi dan industri, di mana jalan daerah yang menjadi prioritas adalah yang berfungsi mendukung kawasan produksi pangan, pendistribusian energi, serta penghubung antar simpul transportasi dan wilayah terisolasi.

7. Swasembada Pangan, Air dan Energi

Swasembada nasional pangan, udara, dan energi merupakan tiga pilar kemandirian bangsa yang menjadi agenda paling strategis dalam pembangunan periode 2025–2029. Hal ketiga ini bukan sekedar sasaran teknis sektoral, melainkan merupakan fondasi kedaulatan negara yang menentukan sejauh mana Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar negeri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi adalah dasar kedaulatan bangsa, dan upaya untuk mewujudkannya harus menjadi prioritas untuk memastikan Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri. Ia menekankan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi perlindungan fisik bagi rakyat, karena tanpa pangan yang cukup, negara tidak dapat menjamin keberlangsungan kehidupan warganya. Komitmen ini bukan sekadar retorika, melainkan diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret yang mengikat seluruh jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah. Swasembada pangan, energi, dan udara secara tegas tercantum sebagai Prioritas Nasional Kedua dalam RPJMN 2025–2029, yang merupakan implementasi langsung dari Asta Cita poin kedua Presiden Prabowo Subianto, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Dengan demikian, setiap pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki tanggung jawab dan peran yang jelas

dalam menyukseskan agenda besar kemandirian bangsa ini melalui optimalisasi potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki.

Bagi Kabupaten Sidenreng Rappang, isu swasembada pangan memiliki resonansi yang sangat kuat dan langsung menyentuh identitas daerah. Kabupaten ini telah lama dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama di Sulawesi Selatan, dengan sektor pertanian yang menyumbang 30,21 persen terhadap total PDRB dan mencatatkan laju pertumbuhan luar biasa sebesar 10,70 persen pada tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bahkan telah menetapkan target produksi satu juta ton gabah sebagai kontribusi nyata terhadap program swasembada pangan nasional, dengan mendorong petani untuk menerapkan Indeks Pertanaman (IP) 300 atau tiga kali masa tanam dalam satu tahun. Target yang ambisius ini mencerminkan kesadaran daerah akan besarnya potensi pertanian yang dimiliki, sekaligus tanggung jawab moral Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu daerah penyangga ketahanan pangan nasional. Namun, untuk dapat merealisasikan target sebesar itu secara konsisten dan berkelanjutan, diperlukan kesiapan infrastruktur pendukung yang memadai, mulai dari jaringan irigasi, akses jalan usaha tani, ketersediaan sarana produksi pertanian, hingga sistem pascapanen dan pemasaran yang efisien.

Isu swasembada air menjadi dimensi yang tidak terpisahkan dari keberhasilan swasembada pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Air adalah nyawa dari seluruh aktivitas pertanian, dan ketersediaan serta keandalan pasokan air irigasi secara langsung menentukan kemampuan petani untuk mencapai IP 300 yang menjadi target daerah. Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional, mempercepat perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi pada Daerah Irigasi yang 60 persen kondisinya kurang optimal dalam menyediakan air irigasi untuk persawahan. Instruksi Presiden ini menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengidentifikasi seluruh jaringan irigasi yang membutuhkan rehabilitasi dan pemeliharaan, kemudian mengajukannya secara terkoordinasi kepada pemerintah pusat dengan didukung data teknis yang akurat dan lengkap. Sulawesi Selatan termasuk dalam 14 provinsi prioritas yang menjadi lokus penanganan irigasi dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional, sebuah posisi strategis yang memberikan peluang lebih besar bagi daerah-daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk mendapatkan dukungan rehabilitasi irigasi dari pemerintah pusat.

Swasembada energi merupakan dimensi ketiga yang semakin relevan dan mendesak untuk diperhatikan oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah pusat telah menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025–2029, dengan keputusan untuk mengutamakan proyek-proyek yang berkontribusi pada

swasembada pangan, energi, dan air, serta hilirisasi industri, yang menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang sangat serius dalam lima tahun mendatang. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi yang besar dalam pengembangan energi terbarukan, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang berlokasi di Kecamatan Watang Pulu merupakan PLTB terbesar di Indonesia dengan kapasitas 75 MW yang mampu menunjang kebutuhan listrik untuk 42.000 rumah tangga. Selain itu ada beberapa potensi energi terbarukan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah yaitu: (1) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) TERAPUNG DANAU dengan kapasitas 200 Mwp, dengan Lokasi Desa Mojong, (2) PLTS DARAT: dengan Lokasi Barukku, dan (3) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTB) dengan kapasitas 105 Mwe yang berlokasi di Kelurahan Massepe.

8. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Konsentrasi aktivitas ekonomi yang berlebihan pada titik-titik tertentu menimbulkan ketimpangan spasial yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan antar wilayah. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru merupakan strategi yang diarahkan untuk mendistribusikan manfaat pembangunan secara lebih merata, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki berbagai wilayah yang selama ini belum terjamah.

Wilayah Sulawesi Selatan disebut sebagai pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia karena memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sulawesi Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional dan dikenal sebagai lumbung pangan nasional yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan terciptanya swasembada pangan nasional. Selain pertanian, berbagai sektor juga memiliki peran penting untuk ekonomi nasional seperti perikanan, peternakan, dan industri kerajinan.

Pengembangan wilayah Sulawesi Selatan sebagai penunjang transportasi logistik di Kawasan timur Indonesia merupakan peluang bagi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menyokong kebutuhan pangan. Hingga saat ini, produk pertanian seperti beras, daging, telur di Kawasan Timur Indonesia, sebagain besar masih didistribusikan melalui Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki peluang besar untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut dikarenakan memiliki surplus produksi pertanian dan peternakan dan relatif dekat dengan pelabuhan Parepare dan Makassar sehingga dapat meminimalkan biaya logistik. Hal tersebut berpotensi menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi pusat baru pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan melalui pengembangan industri pangan.

2.5.3. Isu Strategis Daerah

Berangkat dari berbagai permasalahan daerah, isu strategis global, isu strategis nasional dan isu strategis regional, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan berbagai pertimbangan yaitu: (1) memiliki pengaruh yang

besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan regional, (2) merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah, (3) dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat, (4) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah, (5) kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani, dan (6) kesesuaian terhadap visi dan misi ranperda RPJPD. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur Daerah

Infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan yang menentukan daya saing suatu daerah dalam menarik investasi, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketersediaan infrastruktur yang memadai mencakup jalan, jembatan, irigasi, jaringan air bersih, sanitasi, dan fasilitas publik adalah prasyarat dasar yang harus dipenuhi sebelum berbagai program pembangunan lainnya dapat berjalan optimal.

Kondisi konektivitas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini menunjukkan persoalan yang serius dan membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda. Tingkat Kemantapan Jalan yang anjlok drastis dari 60,91 persen pada tahun 2024 menjadi hanya 40,78 persen pada tahun 2025 merupakan kemunduran yang sangat mengkhawatirkan. Artinya, lebih dari separuh jaringan jalan di daerah ini saat ini berada dalam kondisi tidak mantap, rusak ringan, atau rusak berat. Kondisi ini jauh di bawah rata-rata nasional maupun standar yang diharapkan, dan berdampak langsung pada tingginya biaya logistik yang harus ditanggung oleh petani dan pelaku usaha lokal. Konektivitas yang andal akan memastikan distribusi dari sentra produksi menuju pasar berlangsung lebih cepat, sehingga mampu menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi pangan. Biaya transportasi tetap menjadi kontributor terbesar biaya logistik, dan biaya logistik nasional mencapai 14,1 persen terhadap PDB berdasarkan data tahun 2023. Bagi Kabupaten Sidenreng Rappang, tingginya biaya logistik akibat buruknya kondisi jalan berarti hasil pertanian yang dijual petani ke pasar harganya tertekan, sementara harga barang kebutuhan pokok yang masuk ke daerah justru lebih mahal, sehingga menciptakan tekanan ganda pada kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

2. Penurunan Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang tercatat sebesar 4,91 persen pada tahun 2025 memang menunjukkan tren menurun, namun rata-rata penurunan yang hanya 0,028 poin per tahun selama enam tahun terakhir mengindikasikan bahwa tanpa terobosan kebijakan yang signifikan, target penurunan kemiskinan daerah berisiko tidak sejalan dengan laju penurunan yang diamanatkan secara nasional. Lebih dari sekadar angka kemiskinan umum, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kondisi kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem, yaitu mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan paling bawah dan paling sulit dijangkau oleh program-program pembangunan konvensional. Kelompok ini umumnya adalah mereka yang tidak memiliki aset produktif, tinggal di wilayah terpencil, tidak memiliki akses

terhadap layanan dasar, serta sangat rentan terhadap kejutan ekonomi sekecil apapun, termasuk kenaikan harga BBM, gagal panen, atau sakit anggota keluarga.

Menghadapi isu strategis ini, Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengambil langkah-langkah yang lebih berani, terukur, dan berpihak nyata pada kelompok masyarakat paling bawah. Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan daerah dengan program nasional menjadi keniscayaan, termasuk memaksimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai basis data tunggal dalam penyaluran seluruh program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi agar tidak ada lagi tumpang tindih penerima manfaat maupun penduduk miskin yang luput dari jangkauan program. Pada saat yang sama, intervensi tidak boleh hanya bersifat karitatif melalui bantuan sosial semata, tetapi harus diimbangi dengan program pemberdayaan ekonomi produktif yang memberikan akses nyata kepada kelompok miskin terhadap lahan, modal usaha, pelatihan keterampilan, dan jaringan pasar. Dengan mengintegrasikan pendekatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi secara bersamaan, dan dengan menjadikan target nasional nol persen kemiskinan ekstrem sebagai kompas arah kebijakan, Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menjadikan tahun 2027 sebagai tahun akselerasi nyata dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan penyempitan ketimpangan pendapatan secara berkelanjutan.

3. Pemeliharaan Kemanan, ketentrmanan dan Ketertiban Masyarakat

Pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat merupakan isu strategis yang mendesak untuk ditangani dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025, angka kriminalitas di Kabupaten Sidenreng Rappang mencatat tren peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2021–2025, dari 344 kasus pada tahun 2021 meningkat drastis menjadi 915 kasus pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 166 persen dalam kurun waktu lima tahun. Lonjakan angka kriminalitas yang begitu tajam ini mencerminkan belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan gangguan keamanan di daerah, sekaligus mengindikasikan adanya tekanan sosial ekonomi yang semakin kompleks di tengah masyarakat. Kondisi keamanan yang kurang kondusif pada persahabatan akan berdampak langsung terhadap iklim investasi, aktivitas ekonomi masyarakat, serta kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga penanganannya menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan seluruh agenda pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Isu ini selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang menempatkan pemeliharaan umum dan ketentraman masyarakat sebagai bagian dari agenda memperkuat ketahanan sosial dan stabilitas wilayah. Presiden Asta Cita Prabowo Subianto dengan tegas mendorong penegakan hukum yang berkeadilan, pemberantasan kejahatan, serta penguatan aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menciptakan

lingkungan yang aman dan menguntungkan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dukungan pemerintah pusat melalui penguatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), program pelatihan ketentraman dan Kesepakatan Umum, serta sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat kepolisian dalam forum Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) menjadi instrumen yang dapat dioptimalkan oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menekan angka kriminalitas dan gangguan pengawalan secara sistematis. Komitmen Indonesia terhadap pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, semakin menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan kesejahteraan bukan sekadar fungsi pemerintahan semata, melainkan bagian dari tanggung jawab kolektif dalam membangun masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang aman, teratur, dan harmonis sebagai landasan kokoh bagi terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Peningkatan Nilai Religius dan Pelestarian Budaya

Nilai religius dan kearifan budaya lokal merupakan dua pilar yang selama ini menjadi fondasi kokoh bagi kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Keduanya bukan sekadar warisan masa lalu yang perlu dijaga, melainkan merupakan kekuatan hidup yang terus berperan nyata dalam membentuk karakter masyarakat, merekatkan kohesi sosial, mencegah konflik horizontal, dan membangun ketahanan komunitas dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dalam konteks pembangunan, nilai religius dan budaya lokal bukan pula pelengkap yang bersifat pinggiran, melainkan merupakan dimensi pembangunan manusia yang paling dalam dan paling menentukan, karena di sinilah karakter, moral, dan jati diri masyarakat dibentuk dan diperkuat dari generasi ke generasi. Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, diperlukan penguatan toleransi antarumat beragama dengan menghargai perbedaan serta menjamin kebebasan beragama, melestarikan dan memanfaatkan lingkungan dengan mempertimbangkan mitigasi dampak perubahan iklim, serta pelestarian nilai dan warisan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Pernyataan ini dalam RPJMN 2025–2029 menegaskan bahwa penguatan nilai religius dan pelestarian budaya bukan hanya urusan adat istiadat, melainkan merupakan agenda strategis pembangunan nasional yang harus diintegrasikan dalam seluruh aspek perencanaan daerah.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelestarian nilai religius dan budaya lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini adalah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi yang membawa nilai-nilai baru yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai lokal yang telah lama tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan digital menghadapi paparan nilai-nilai global yang begitu intens melalui media sosial, platform streaming, dan berbagai konten digital lainnya, yang tidak jarang berpotensi menggerus identitas budaya lokal, menggantikan kearifan tradisional dengan nilai-nilai konsumerisme, individualisme, dan hedonisme yang tidak kompatibel dengan tatanan sosial-budaya masyarakat Sidenreng Rappang.

Kondisi ini memerlukan strategi pembinaan generasi muda yang cerdas dan kontekstual, yang tidak bersifat reaktif melarang semua yang baru, tetapi secara proaktif membangun jembatan antara nilai-nilai tradisional yang kuat dengan dinamika kehidupan modern yang terus bergerak cepat.

5. Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim

Bencana alam dan perubahan iklim bukan lagi ancaman yang dapat ditunda penanganannya untuk masa depan. Keduanya telah hadir sebagai kenyataan pembangunan yang nyata hari ini, yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk banjir yang semakin sering, kekeringan yang semakin panjang, tanah longsor yang semakin luas, dan gagal panen yang semakin mengkhawatirkan. Tahun 2025 menjadi saksi nyata bagaimana perubahan iklim tidak lagi sekadar isu akademik melainkan kenyataan yang dirasakan di seluruh dunia, dengan bencana alam yang datang silih berganti dan memaksa banyak negara untuk beradaptasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena dampaknya telah menyentuh sektor ekonomi, pangan, kesehatan, dan bahkan politik global. Bagi Kabupaten Sidenreng Rappang yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pertanian, dampak perubahan iklim bukan hanya soal lingkungan semata, melainkan merupakan ancaman langsung terhadap ketahanan pangan, pendapatan petani, dan pada akhirnya terhadap seluruh capaian pembangunan daerah yang telah dicapai dengan susah payah selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim bukan lagi pilihan kebijakan yang bersifat opsional, melainkan keharusan strategis yang harus ditempatkan dalam posisi yang setara dengan prioritas-prioritas pembangunan ekonomi dan sosial lainnya.

Data capaian daerah menunjukkan persoalan yang sangat serius dan memerlukan respons kebijakan yang cepat dan menyeluruh. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan dari 119,2 poin menjadi 159,5 poin pada tahun 2025. Peningkatan Indeks Risiko Bencana yang hampir 40 poin dalam satu tahun ini merupakan sinyal merah yang tidak boleh dianggap enteng, karena mencerminkan meningkatnya kerentanan daerah terhadap berbagai jenis ancaman bencana secara substansial. Dalam skema pengukuran risiko bencana, semakin tinggi angka Indeks maka semakin besar risiko yang dihadapi, sehingga lonjakan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa daerah semakin rentan dan kapasitas penanggulangannya belum memadai untuk mengimbangi peningkatan ancaman yang terjadi.

6. Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan hidup merupakan dua sisi dari satu keping persoalan yang sama, yaitu sejauh mana daerah mampu menjaga keseimbangan antara aktivitas pembangunan dan pelestarian lingkungan agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan sampah kerap dianggap sebagai masalah sepele yang cukup ditangani dengan mengangkut dan membuang ke

tempat pembuangan akhir. Padahal, paradigma seperti inilah yang justru menjadi akar dari krisis lingkungan yang semakin parah di banyak daerah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik bukan sekadar persoalan estetika dan kebersihan, melainkan merupakan ancaman nyata terhadap kesehatan masyarakat melalui pencemaran air dan udara, sumber emisi gas rumah kaca yang memperburuk perubahan iklim, penyebab banjir melalui penyumbatan drainase, serta penghambat daya tarik investasi dan pariwisata daerah. Dalam konteks yang lebih luas, kemampuan daerah dalam mengelola sampah dan menjaga kualitas lingkungan hidup merupakan cerminan langsung dari kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat peradaban masyarakatnya.

Isu ini ditetapkan sebagai prioritas daerah karena pengelolaan lingkungan yang baik merupakan investasi jangka panjang yang manfaatnya dirasakan lintas generasi. Pendekatan pengelolaan sampah tidak lagi dapat mengandalkan sistem kumpul-angkut-buang yang konvensional, melainkan harus bertransformasi menuju sistem yang berbasis pada prinsip ekonomi sirkular: pengurangan dari sumber, pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali. Kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan yang tidak dapat digantikan oleh kebijakan pemerintah semata.

7. Prevalensi Stunting

Penanganan prevalensi stunting merupakan isu strategis yang menempati posisi prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027, mengingat stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berimplikasi jangka panjang terhadap kemampuan kognitif, prestasi belajar, dan produktivitas generasi penerus daerah. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat stunting merupakan permasalahan yang bersifat permanen dan tidak dapat terjadi jika tidak ditangani sejak dini, sehingga setiap penurunan prevalensi yang berhasil dicapai merupakan investasi nyata bagi masa depan sumber daya manusia Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan hasil evaluasi, prevalensi stunting di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren penurunan, namun demikian capaian ini masih memerlukan upaya yang lebih kuat mengingat target penurunan stunting nasional yang semakin ambisius, serta masih adanya kemacetan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat dalam hal akses terhadap layanan gizi, sanitasi layak, dan air bersih yang merupakan faktor penentu utama terjadinya stunting.

Dari sisi kebijakan dan prioritas nasional, percepatan penurunan stunting mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari pemerintah pusat. Stunting telah ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dengan target penurunan yang terukur dan ambisius. Asta Cita Presiden Prabowo Subianto secara khusus mewujudkan komitmen tersebut melalui program unggulan Makan Bergizi Gratis yang menyasar anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai kelompok paling rentan terhadap masalah gizi dan stunting, yang merupakan peluang

besar untuk dimanfaatkan secara optimal oleh Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pelaksanaan yang efektif dan tepat sasaran di tingkat lokal. Berbagai instrumen dukungan lainnya menjadi instrumen yang harus disinergikan secara optimal dalam agenda percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sidenreng Rappang.

8. Gerakan Tanam, Panen dan Hilirisasi

Kabupaten Sidenreng Rappang telah membuktikan kapasitasnya sebagai daerah pertanian yang tidak hanya produktif tetapi juga inovatif dalam mengejar target produksi nasional. Produksi padi Sidenreng Rappang pada tahun 2025 meningkat mencapai 556.362 ton, tertinggi sepanjang tujuh tahun terakhir, dengan luas panen mencapai 95.362 hektare dan Produksi Padi Gabah Kering Giling berada di peringkat empat tertinggi di antara 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dan menempatkan Sidrap sebagai kabupaten andalan ketahanan pangan nasional. Namun, tantangan yang lebih kompleks, terletak pada tahapan selanjutnya yaitu membangun sistem pascapanen dan hilirisasi yang mampu mengubah surplus produksi menjadi nilai tambah ekonomi yang dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat luas. Selama ini, sebagian besar gabah yang diproduksi di Kabupaten Sidenreng Rappang dijual dalam bentuk gabah atau beras tanpa pengolahan lebih lanjut, sehingga nilai tambahnya tidak tertahan di daerah dan petani hanya menerima harga di tingkat yang paling rendah dalam rantai nilai.

Kebijakan nasional telah memberikan arah yang sangat jelas dan mendukung pengembangan hilirisasi pertanian sebagai kelanjutan dari keberhasilan swasembada pangan. Selain penguatan produksi, Presiden Prabowo menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Penetapan proyek-proyek hilirisasi prioritas nasional membuka peluang bagi daerah penghasil komoditas pertanian untuk mendapatkan dukungan kebijakan, pembiayaan, dan investasi dalam membangun industri pengolahan lokal yang berbasis komoditas unggulan daerah masing-masing. Bagi Kabupaten Sidenreng Rappang, peluang ini sangat relevan karena selain beras, daerah ini juga memiliki komoditas unggulan di sektor peternakan, perkebunan, dan hortikultura yang seluruhnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tinggi. Pemerintah menegaskan bahwa swasembada pangan 2025 bukanlah titik akhir melainkan fondasi bagi pembangunan pertanian yang lebih maju, dan hilirisasi pertanian menjadi agenda selanjutnya yang harus diakselerasi agar keberhasilan produksi dapat diubah menjadi kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat petani.

Gerakan Tanam, Panen, dan Hilirisasi dipilih sebagai isu strategis daerah karena potensi transformasinya yang besar. Dengan mendorong pengolahan produk pertanian hingga ke tingkat yang lebih hilir menjadi produk setengah jadi atau produk akhir yang memiliki nilai jual jauh lebih tinggi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan petani, menciptakan lapangan kerja baru di sektor agribisnis, dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional.



Keberhasilan gerakan ini membutuhkan dukungan ekosistem yang komprehensif, meliputi akses permodalan, teknologi pengolahan, infrastruktur logistik, serta jaminan pasar.

9. Penguatan Posisi sebagai Lumbung Pangan Nasional

Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal sebagai salah satu sentra strategi produksi pangan di Sulawesi Selatan, khususnya komoditas padi dan jagung, yang menjamin tulang punggung ketahanan pangan regional maupun nasional. Dengan luas lahan sawah yang signifikan dan dukungan infrastruktur irigasi teknis yang relatif memadai, Kabupaten Sidenreng secara konsisten mampu menghasilkan surplus produksi beras yang tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal, namun juga berkontribusi nyata terhadap pasokan pangan antar daerah dan program ketahanan pangan nasional. Posisi strategis ini merupakan aset pembangunan yang perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama karena kini hadir momentum nasional yang memperluas nilai strategis Sidrap secara signifikan. Pemerintahan pusat menjadikan ketahanan dan kelangsungan pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Setelah berhasil mencapai swasembada pangan beras pada tahun 2025 visi berikutnya adalah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia melalui penguatan rantai pasok, meningkatkan produktivitas petani, dan investasi pertanian cerdas iklim.

Namun demikian, kemampuan Sidrap untuk benar-benar menangkap peluang besar ini sangat bergantung pada seberapa serius tantangan struktural yang ada dapat diatasi. Alih fungsi lahan pertanian produktif, rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, terbatasnya akses petani terhadap teknologi modern dan permodalan, serta dampak perubahan iklim terhadap pola tanam serta ketersediaan air irigasi merupakan tantangan yang harus dihadapi kedepannya. Oleh karena itu, penguatan posisi Sidrap sebagai lumbung pangan nasional menuntut respons kebijakan terpadu, lintas sektor, dan berorientasi pada peluang penangkapan. Prioritas intervensi mencakup percepatan rehabilitasi irigasi melalui kerangka Inpres, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), pengembangan agribisnis hulu ke hilir untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, serta penguatan kelembagaan petani agar Sidrap tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, melainkan tumbuh sebagai daerah agribisnis yang modern, berdaya saing, dan mensejahterakan petaninya secara berkelanjutan.

10. Pengembangan Energi Terbarukan

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dan strategis, menjadikannya salah satu daerah terdepan dalam transisi energi bersih di Sulawesi Selatan. Potensi angin yang melimpah di wilayah ini telah terbukti dengan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap yang merupakan pembangkit listrik tenaga angin pertama dan terbesar di Indonesia, dengan kapasitas terpasang mencapai 75 MW. Keberadaan PLTB ini tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menegaskan Kabupaten Sidrap sebagai lokomotif pengembangan energi terbarukan berbasis angin di kawasan timur Indonesia.



Selain energi angin, wilayah Kabupaten Sidrap juga menyimpan potensi energi surya yang signifikan mengingat intensitas radiasi matahari yang tinggi sepanjang tahun, serta potensi energi panas bumi yang belum dioptimalkan secara maksimal.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 secara eksplisit menempatkan investasi transisi energi sebagai agenda prioritas nasional, dengan target peningkatan bauran energi terbarukan dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Hal ini sejalan juga dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat kemandirian bangsa melalui swasembada energi, yang mendorong setiap daerah untuk mengoptimalkan potensi energi lokalnya demi mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Sidenreng Rappang dengan posisinya yang strategis sebagai lokasi PLTB pertama dan terbesar di Indonesia menjadikannya rujukan nasional dalam pengembangan energi angin, sekaligus membuka peluang besar untuk menarik investasi hijau baik dari dalam maupun luar negeri.

Namun demikian, pengembangan energi terbarukan di Kabupaten Sidrap masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk berinvestasi pada infrastruktur energi berskala besar, belum optimalnya pemanfaatan potensi energi surya dan biomassa, serta masih rendahnya tingkat kemandirian energi di wilayah-wilayah terpencil menjadi permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan. Di sisi lain, kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi energi terbarukan, serta perlunya penguatan regulasi daerah yang mendukung iklim investasi energi bersih, serta menjadi bagian dari tantangan yang harus dijawab dalam perencanaan pembangunan tahun 2027.

11. Pemerataan dan Penguatan Sistem Kesehatan

Pemerataan dan penguatan sistem kesehatan merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027. Kondisi ini didorong oleh masih adanya kesenjangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan antarwilayah, keterbatasan distribusi tenaga kesehatan, serta masih tingginya beberapa indikator kesehatan yang perlu ditangani secara serius dan berkelanjutan. Penguatan sistem kesehatan tidak hanya mencakup aspek infrastruktur dan sarana prasarana, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan yang berkeadilan, serta penguatan tata kelola layanan kesehatan dari tingkat primer hingga rujukan.

Isu ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang menempatkan transformasi sistem kesehatan sebagai prioritas nasional, serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Dukungan pemerintah pusat

melalui berbagai instrumen kebijakan dan pendanaan, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menjadi peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan ke-3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera, semakin menegaskan urgensi daerah untuk terus mendorong pemerataan dan penguatan sistem kesehatan sebagai investasi jangka panjang untuk terwujudnya masyarakat Sidrap yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

12. Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan merupakan isu strategi yang memiliki posisi sentral dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027. Tantangan dalam bidang pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses pemerataan, tetapi juga menyangkut kualitas proses pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang mumpuni, serta relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman. Kesempurnaan mutu pendidikan antarjenjang dan antarwilayah, rendahnya melanjutkan angka sekolah di sebagian wilayah, serta perlunya adaptasi sistem pendidikan terhadap era digitalisasi menjadi tantangan nyata yang harus dijawab melalui kebijakan dan program pembangunan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Isu ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, Presiden Asta Cita Prabowo Subianto secara tegas mendorong penguatan pendidikan nasional yang berorientasi pada pembentukan generasi unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Program-program strategis nasional di bidang pendidikan menjadi peluang yang dapat disinergikan dengan program pendidikan daerah. Dukungan fiskal pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) bidang pendidikan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik pendidikan, serta program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turut memperkuat kapasitas daerah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Komitmen Indonesia terhadap pencapaian SDGs, khususnya tujuan ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan inklusif, semakin menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan bukan sekadar agenda daerah, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Sidrap yang cerdas, terampil, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

13. Peningkatan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Kelompok Marginal

Peningkatan kesetaraan gender, perlindungan anak, dan pemberdayaan kelompok marginal

merupakan isu strategi yang mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga keterwakilan dalam pengambilan keputusan publik, masih menjadi persoalan yang memerlukan penanganan serius. Di sisi lain, isu perlindungan anak yang mencakup pencegahan kekerasan, mencakup hak dasar anak, serta perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi, menjadi tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang terarah, mengingat angka perkawinan anak di Kabupaten Sidenreng masih sangat tinggi. Demikian pula dengan kelompok pemberdayaan marginal, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya, yang masih memerlukan perhatian khusus agar dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam proses pembangunan daerah.

Isu ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang secara eksplisit mendorong pengarusutamaan gender, mencakup hak anak, serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia yang berkualitas dan berkeadilan. Asta Cita Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal dalam proses pembangunan, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang selama ini belum sepenuhnya mendapatkan akses dan kesempatan yang setara. Dukungan pemerintah pusat melalui berbagai instrumen kebijakan, seperti Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender, program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menjadi landasan sekaligus peluang yang harus dioptimalkan oleh Kabupaten Sidrap.

14. Dayasaing Tenaga Kerja dan Kewirausahaan

Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan merupakan isu strategis yang memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi daerah meliputi masih tingginya tingkat kemiskinan terbuka, rendahnya penyerapan tenaga kerja terampil di sektor formal, ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya dan ekosistem jiwa kewirausahaan yang mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru yang inovatif dan berdaya saing. Kondisi ini diperparah dengan pesatnya perkembangan teknologi dan otomatisasi yang mengubah struktur kebutuhan tenaga kerja secara fundamental, sehingga menuntut adaptasi yang cepat dari seluruh pemangku kepentingan di daerah.

Isu ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang menempatkan peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja serta memperkuat ekosistem kewirausahaan sebagai bagian integral dari agenda transformasi ekonomi nasional. Presiden Asta Cita Prabowo Subianto secara khusus menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing sebagai pilar utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Berbagai program strategis nasional seperti pelatihan vokasi berbasis kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK), program Kartu Prakerja, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta pengembangan ekosistem startup dan ekonomi digital, menjadi peluang yang dapat disinergikan dengan program ketenagakerjaan dan kewirausahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

15. Perwujudan Good Governance dan Transformasi Pelayanan Publik

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transformasi pelayanan publik merupakan isu strategis yang menjadi fondasi utama keberhasilan seluruh agenda pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tantangan dalam aspek ini meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, penguatan kapasitas aparatur sipil negara, optimalisasi pemanfaatan informasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas dan keterjangkauan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Birokrasi yang efisien, responsif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi prasyarat mutlak dalam menciptakan iklim pemerintahan yang dipercaya masyarakat dan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Isu ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang menempatkan reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik sebagai agenda prioritas nasional dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Presiden Asta Cita Prabowo Subianto secara tegas mendorong pemberantasan korupsi, penguatan integritas aparatur negara, serta percepatan digitalisasi layanan pemerintah sebagai bagian dari upaya membangun institusi negara yang kuat dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Program-program strategis nasional menjadi instrumen yang dapat disinergikan dengan upaya Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

16. Inovasi dan Digitalisasi

Inovasi dan digitalisasi merupakan isu strategis yang semakin relevan dan mendesak dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027, seiring dengan pesatnya perkembangan informasi teknologi dan komunikasi yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Tantangan yang dihadapi

daerah dalam konteks ini meliputi masih terbatasnya infrastruktur digital yang merata hingga wilayah perdesaan, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis pemerintahan dan pelayanan publik, serta perlunya mendorong lahirnya inovasi-inovasi lokal yang mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah secara kreatif dan efisien. Kesenjangan digital yang masih terjadi antarwilayah dan antarkelompok masyarakat menjadi hambatan nyata yang perlu diatasi agar warga seluruh Kabupaten Sidenreng Rappang dapat merasakan manfaat dari transformasi digital secara merata dan berkeadilan.

Isu ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang menempatkan percepatan transformasi digital dan penguatan inovasi ekosistem sebagai bagian integral dari agenda pembangunan ekonomi dan penguatan daya saing bangsa. Presiden Asta Cita Prabowo Subianto secara khusus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur digital nasional, pengembangan ekonomi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang melek teknologi sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing di era global. Program-program strategis nasional menjadi peluang yang dapat disinergikan dengan agenda inovasi dan digitalisasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perumusan permasalahan dan isu strategi pembangunan daerah yang berkualitas tidak dapat dikecualikan dari proses evaluasi yang mendalam terhadap pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pijakan evaluatif yang kuat, permasalahan yang dirumuskan berisiko bersifat asumtif dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga program dan kegiatan yang dirancang pun berpotensi tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya. Berikiut disajikan keterkaitan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 dengan perumusan permasalahan dan isu startegis:



Tabel 2.64
Keterkaitan Hasil evaluasi RKPD 2025 dengan permasalahan dan isu strategis

HASIL EVALUASI RKPD 2025	PERMASALAHAN POKOK	ISU STRATEGIS
Pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidenreng Rappang mengalami tren peningkatan selama kurung waktu 6 tahun terakhir, bahkan mencapai angka tertinggi sepanjang 8 tahun terakhir pada Tahun 2025 yaitu 7,71 persen. Namun apabila diteliti lebih lanjut, angka 7,71 persen ini masih didominasi oleh sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi 30,21 persen pada tahun 2025, dimana sektor pertanian ini sangat rentan terhadap dampak eksternal seperti perubahan iklim dan serangan hama/penyakit, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung tidak stabil apabila sektor primer ini tidak diiringi oleh pertumbuhan pada sektor lainnya seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi maupun makan dan minuman. Tingginya produksi pertanian ini semakin memperkuat peran Sidenreng Rappang sebagai lumbung pangan nasional yang merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam konteks kebijakan nasional yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama pembangunan.	Belum optimalnya kualitas dan stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah	Gerakan Tanam, Panen, dan Hilirisasi
		Penguatan Posisi sebagai Lumbung Pangan Nasional
Tingkat kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,91 persen, turun dari 5,02 persen pada tahun sebelumnya, dengan selisih penurunan sebesar 0,11 poin. Meskipun mengalami tren penurunan selama enam tahun terakhir (2020–2025), tetapi rata-rata penurunan hanya berkisar pada 0,028 poin (6 tahun terakhir). Hal tersebut mengindikasikan bahwa intervensi program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan belum mampu mendorong percepatan penurunan kemiskinan secara optimal. Di sisi lain, kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya angka ketimpangan (gini ratio dari angka 0,319 di tahun 2024 menjadi 0,325 di tahun 2025), yang menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.	Melambatnya penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya ketimpangan pendapatan	Penurunan Angka Kemiskinan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 3,36 persen, meningkat dari 3,02 persen pada tahun 2024, setelah sebelumnya mengalami tren penurunan yang konsisten sejak tahun 2020 yang berada pada angka 5,91 persen. Kenaikan TPT pada tahun 2025 ini mengindikasikan adanya tekanan pada pasar kerja daerah yang belum mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja secara optimal. Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 tercatat sebesar 58,09 persen, menurun dari 61,19 persen pada tahun 2024. Lebih lanjut, angka TPAK ini menempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang pada posisi paling rendah di antara seluruh 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Rendahnya TPAK ini mencerminkan masih besarnya proporsi penduduk usia kerja yang tidak aktif berpartisipasi dalam pasar kerja. Selain itu, pola TPAK yang	Masih rendahnya daya saing tenaga kerja dan partisipasi Angkatan kerja	Dayasaing Tenaga Kerja dan Kewirausahaan

HASIL EVALUASI RKPD 2025	PERMASALAHAN POKOK	ISU STRATEGIS
berfluktuasi sepanjang periode 2020–2025 dengan rentang antara 55,48 persen hingga 61,19 persen menunjukkan belum stabilnya kondisi ketenagakerjaan daerah secara struktural. Meningkatnya TPT dan rendahnya TPAK yang berada di peringkat terbawah se-Sulawesi Selatan menegaskan perlunya isu strategi peningkatan daya saing tenaga kerja dan kewirausahaan yang fokus pada penguatan kompetensi, perluasan kesempatan kerja, serta mendorong tumbuhnya wirausaha baru sebagai penyerap angkatan kerja lokal.		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 tercatat sebesar 75,49, meningkat dari 74,81 pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 0,68 poin. Meskipun mengalami tren peningkatan, tetapi dalam tiga tahun terakhir capaian IPM Kabupaten Sidenreng Rappang secara konsisten berada di bawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 75,92 maupun rata-rata nasional sebesar 75,90 pada tahun 2025. Berdasarkan Indeks pembentuknya, Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran masih berada diatas capaian provinsi dan nasional, tetapi Indeks Pendidikan dengan komponen HLS dan RLS Kabupaten Sidenreng Rappang berada di bawah capaian Sulawesi Selatan maupun nasional dalam enam tahun terakhir. Penguatan sistem kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan intervensi terpadu yang diperlukan untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pembangunan manusia Kabupaten Sidrap secara menyeluruh.	Masih rendahnya kualitas pembangunan manusia	Pemerataan & Penguatan Sistem Kesehatan Prevalensi Stunting Peningkatan Mutu Pendidikan Peningkatan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Kelompok Marginal
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 meningkat mencapai nilai 74,16 persen, meskipun demikian, jika capaian tersebut dibandingkan dengan IKLH Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 76,50 dan IKLH Nasional sebesar 74,20 pada tahun 2025, terlihat bahwa IKLH Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada di bawah capaian provinsi dan nasional. Apabila ditelaah berdasarkan dari dimensi pembentuk IKLH, Indeks Kualitas Udara pada tahun 2025 tercatat sebesar 82,29, mengalami penurunan tajam hampir 12 poin dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 94,20 merupakan yang terendah sejak tahun 2022. Indeks Kualitas Udara sebesar 67,82 pada tahun 2025, meskipun tertinggi sejak tahun 2019, masih menjadi komponen dengan nilai terendah di antara ketiga dimensi.Tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup juga tercermin dari kinerja pengelolaan persampahan yang belum optimal. Persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan drastis menjadi 55,58 persen pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 54,97 persen pada tahun 2024, yang artinya hampir separuh dari total timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat masih belum tertangani dengan baik. Dimensi kebencanaan menjadi aspek yang tidak kalah pentingnya dalam konteks kualitas lingkungan	Rendahnya kualitas lingkungan hidup	Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim Pengembangan Energi Terbarukan Pengelolaan sampah dan lingkungan hidup

HASIL EVALUASI RKPD 2025	PERMASALAHAN POKOK	ISU STRATEGIS
hidup daerah. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan peningkatan dari 119,2 poin menjadi 159,5 poin di tahun 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan risiko bencana yang cukup tajam. Pengelolaan lingkungan hidup ini selaras dengan pengembangan energi terbarukan untuk mencapai pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.		
Stabilitas keamanan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian serius. Angka kriminalitas di Kabupaten Sidenreng Rappang mencatat tren peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2021–2025, dari 344 kasus pada tahun 2021 menjadi 496 kasus pada tahun 2022, meningkat lagi menjadi 730 kasus pada tahun 2023, kemudian 751 kasus pada tahun 2024, dan mencapai 915 kasus pada tahun 2025. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, angka kriminalitas meningkat lebih dari dua kali lipat atau tumbuh sekitar 166 persen sebuah ciptaan yang mencerminkan belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan gangguan keamanan di daerah. Kondisi ini menegaskan urgensi isu strategi peningkatan nilai keagamaan dan pelestarian budaya sebagai pendekatan preventif jangka panjang, di mana penguatan karakter masyarakat berbasis nilai agama dan kearifan budaya lokal menjadi instrumen penting dalam menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan dan harmonis di Kabupaten Sidenreng Rappang	Belum optimalnya stabilitas keamanan, ketertiban umum serta kehidupan sosial masyarakat	Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat
		Peningkatan nilai religius dan pelestarian budaya
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan tren yang fluktuatif dalam kurun waktu 2019–2025. Meskipun pada tahun 2025 IKM mencapai angka tertinggi selama tujuh tahun terakhir yakni 79.097 dan berada pada kategori B (Baik), perjalanan pencapaian ini tidak berlangsung secara linier terjadi penurunan yang cukup signifikan pada periode 2023–2024 dengan Indeks terendah menyentuh 75.455. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik daerah masih rentan terhadap penurunan dan belum sepenuhnya memiliki fondasi yang kokoh dan berkelanjutan. Pada tingkat unit pelayanan, capaian IKM tahun 2025 juga masih belum merata. DPMPTSP mencatat nilai tertinggi sebesar 81.843, sementara RSUD Nene Mallomo berada di angka paling rendah yakni 77.269. Di tingkat kecamatan, Kecamatan Pitu Riase bahkan masih berada dalam kategori C (Kurang Baik) dengan nilai 76,253 satu-satunya kecamatan yang belum mencapai kategori Baik, menunjukkan adanya ketidakseimbangan kualitas layanan yang nyata antar wilayah. Kondisi ini juga sejalan dengan data Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang pada tahun 2025 baru mencapai kategori B- (baik dengan catatan), setelah sebelumnya mengalami tren penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini mendorong urgensi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik harus berjalan seiring dengan akselerasi inovasi dan digitalisasi layanan agar peningkatan kepuasan masyarakat dapat terwujud secara merata dan terstruktur.	Masih perlunya penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Perwujudan *Good Governance* dan Transformasi Pelayanan Publik
		Inovasi dan digitalisasi

HASIL EVALUASI RKPD 2025	PERMASALAHAN POKOK	ISU STRATEGIS
Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Sidenreng Rappang dalam periode 2020–2025 menunjukkan pola yang belum stabil. Setelah sempat mencatat tren positif dari 78,82 pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya di angka 81,24 pada tahun 2024, Indeks ini malah mengalami penurunan cukup tajam menjadi 79,34 pada tahun 2025 mendekati posisi awal lima tahun lalu. Penurunan ini menandakan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur daerah yang telah dicapai sebelumnya belum sepenuhnya terjaga dan terkonsolidasi dengan baik. Penurunan Indeks tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya capaian pada dua indikator kunci. Tingkat Kemantapan Jalan mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 60,91% pada tahun 2024 menjadi hanya 40,78% pada tahun 2025 penurunan lebih dari 20 poin persentase dalam satu tahun. Demikian pula, Persentase Rumah yang Mengakses Air Bersih mengalami penurunan dari 93,98% menjadi 88,85%, setelah sebelumnya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2020.	Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan infrastruktur daerah	Infrastruktur Daerah

Sumber: Tim Penyusun RKPD Tahun 2027, diolah



2.6. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan saran dan pendapat yang disampaikan oleh anggota DPRD melalui kegiatan reses dan penjaringan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bapperida sebagai bahan dalam penyusunan rencana awal RKPD. Dalam kedudukannya, pokok-pokok pikiran DPRD berfungsi sebagai bahan masukan dalam penyusunan kegiatan, penetapan lokasi kegiatan, dan penentuan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029. Kehadiran pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD merupakan pengejawantahan nyata dari pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan daerah, di mana lembaga perwakilan rakyat ikut berperan aktif memastikan bahwa dokumen perencanaan tahunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Proses penginputan dan verifikasi pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 telah dilaksanakan sepenuhnya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ditetapkan. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang telah menginput aspirasi masyarakat yang dihimpun dari hasil kegiatan reses ke dalam sistem SIPD-RI, dan selanjutnya melalui proses validasi secara berjenjang oleh Sekretariat DPRD, Bapperida, Perangkat Daerah terkait, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rekapitulasi hasil proses penginputan dan validasi tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Rekapitulasi Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun 2027

No.	Tahapan Verifikasi	Jumlah Usulan	Keterangan
1	Verifikasi Sekwan DPRD	878	Seluruh Usulan diverifikasi
2	Verifikasi Mitra Bapperida	878	Seluruh Usulan diverifikasi
3	Verifikasi Perangkat Daerah	771	107 usulan ditolak/ dikembalikan
4	Verifikasi TAPD Perencana	771	

Sumber: Pokok-pokok Pikiran DPRD 2027 @SIPD-RI, diolah

Dari 878 usulan yang masuk pada tahap awal, sebanyak 107 usulan dikembalikan/ditolak pada tahap verifikasi Perangkat Daerah karena dinilai tidak sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan yang menjadi kewenangan perangkat daerah terkait, sehingga jumlah usulan yang dinyatakan valid dan melanjutkan proses verifikasi hingga tahap TAPD Perencana adalah sebanyak 771 usulan.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 mencakup berbagai bidang urusan pemerintahan yang mencerminkan kebutuhan dan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat di seluruh wilayah kecamatan. Aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses tersebut meliputi bidang infrastruktur jalan dan jembatan, pertanian dan ketahanan pangan, layanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta perbaikan sarana dan prasarana dasar di tingkat desa dan kelurahan. Rekapitulasi pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan bidang urusan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.66
Rekapitulasi Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan Urusan

No.	Bidang	Jumlah Usulan Pokir	Pokok Pikiran DPRD	Ket.
1	Infrastruktur Jalan Dan Jembatan	168	Pembangunan/peningkatan/rehab jalan dan jembatan	
2	Persampahan Dan Lingkungan	27	Sarana dan prasarana persampahan	
3	Kebencanaan	26	Sarana dan prasarana kebencanaan, sosialisasi pencegahan dan penanganan kebencanaan	
4	Pemberdayaan Ekonomi, UMKM Dan Koperasi	95	Sarana dan prasarana UMKM, fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku UMKM	
5	Peternakan Dan Kesehatan Hewan	24	Sarana dan prasarana, pengadaan vaksin	
6	Perikanan Dan Kelautan	87	Peningkatan kapasitas nelayan dan pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan	
7	Pertanian Dan Ketahanan Pangan	139	Pengadaan sara dan prasarana, bantuan alsintan, pupuk, pompanisasi, pembangunan jalan tani	
8	Perpustakaan	1	Sosialisasi peningkatan minat baca masyarakat	
9	Perdagangan Dan Industri	12	Peningkatan dan rehab pasar, sarana dan prasarana industri	
10	Sosial	11	Perluasan cakupan BPJS Kesehatan	
11	Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	1	Sosialisasi pernikahan usia anak	
12	Transmigrasi	4	Sarana dan prasarana penunjang daerah transmigrasi, peningkatan kapasitas/ keterampilan	
13	Tenaga Kerja	6	Peningkatan keterampilan pencari kerja	
14	Pariwisata	1	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	
15	Kepemudaan Dan Olahraga	35	Sarana dan Prasarana olahraga dan peningkatan kapasitas pemuda	
16	Perhubungan	26	Pengadaan/rehab lampu jalan	
17	Perumahan	20	Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni	

No.	Bidang	Jumlah Usulan Pokir	Pokok Pikiran DPRD	Ket.
18	Pekerjaan Umum	28	Sanitasi, air minum, pembangunan gedung untuk kepentingan umum, sarpras rumah ibadah, perbaikan TMP	
19	Komunikasi Digital	3	Sarana dan prasarana komunikasi digital	
20	Pendidikan	23	Sarana dan prasarana sekolah, sosialisasi bidang pendidikan, beasiswa bagi anak kurang mampu	
21	Pengelolaan SDA an Irigasi	19	Peningkatan/rehab irigasi dan tanggul	
22	Kesehatan	15	Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, penanganan stunting dan gizi masyarakat	
TOTAL		771 Usulan		

Sumber: Pokok-pokok Pikiran DPRD 2027 @SIPD-RI, diolah

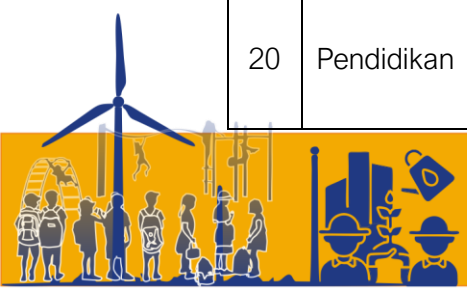
Berdasarkan data di atas, bidang infrastruktur jalan dan jembatan mendominasi usulan dengan 168 usulan (21,8%), diikuti pertanian dan ketahanan pangan dengan 139 usulan (18,0%), serta pemberdayaan ekonomi, UMKM dan koperasi dengan 95 usulan (12,3%). Pola ini mencerminkan bahwa konektivitas wilayah dan penguatan sektor pertanian masih menjadi kebutuhan paling mendasar yang dirasakan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, sejalan dengan karakteristik daerah yang sebagian besar wilayahnya bersifat perdesaan dengan basis ekonomi agraris.

Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027, seluruh pokok-pokok pikiran DPRD yang telah terverifikasi dikaji dan dianalisis kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029. Proses penyelarasan ini penting dilakukan mengingat RPJMD merupakan dokumen induk perencanaan jangka menengah yang telah memuat arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang mengikat seluruh dokumen perencanaan tahunan, termasuk RKPD. Dengan menyandarkan penelaahan pada RPJMD, dapat dipastikan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD tidak hanya responsif terhadap kebutuhan sesaat, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Hasil penelaahan keselarasan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Keselarasan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Pembangunan RPJMD

No.	Bidang	Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan RPJMD
1	Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Pembangunan/peningkatan/rehab jalan dan jembatan	PD7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas
2	Perhubungan	Pengadaan/rehab lampu jalan	

No.	Bidang	Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan RPJMD
3	Perumahan	Pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni	
4	Pekerjaan Umum	Sanitasi, air minum, pembangunan gedung untuk kepentingan umum, sarpras rumah ibadah, perbaikan TMP	
5	Persampahan dan lingkungan	Sarana dan prasarana persampahan	PD4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
6	Kebencanaan	Sarana dan prasarana kebencanaan, sosialisasi pencegahan dan penanganan kebencanaan	
7	Pemberdayaan ekonomi, UMKM dan Koperasi	Sarana dan prasarana UMKM, fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku UMKM	PD2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan
8	Sosial	Perluasan cakupan BPJS Kesehatan	
9	Perdagangan dan Industri	Peningkatan dan rehab pasar, sarana dan prasarana industri	
10	Transmigrasi	Sarana dan prasarana penunjang daerah transmigrasi, peningkatan kapasitas/ keterampilan	
11	Tenaga kerja	Peningkatan keterampilan pencari kerja	
12	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sarana dan prasarana, pengadaan vaksin	PD1. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan
13	Perikanan dan Kelautan	Peningkatan kapasitas nelayan dan pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan	
14	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengadaan sara dan prasarana, bantuan alsintan, pupuk, pompanisasi, pembangunan jalan tani	
15	Pengelolaan SDA dan irigasi	Peningkatan/rehab irigasi dan tanggul	
16	Pariwisata	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	
17	Kepemudaan dan Olahraga	Sarana dan Prasarana olahraga dan peningkatan kapasitas pemuda	PD5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius
18	Komunikasi Digital	Sarana dan prasarana komunikasi digital	PD6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
19	Perpustakaan	Sosialisasi peningkatan minat baca masyarakat	
20	Pendidikan	Sarana dan prasarana sekolah, sosialisasi bidang pendidikan, beasiswa bagi anak kurang mampu	PD3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas



No.	Bidang	Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan RPJMD
21	Kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, penanganan stunting dan gizi masyarakat	
22	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Sosialisasi pernikahan usia anak	

Sumber: Pokok-pokok Pikiran DPRD 2027 @SIPD-RI, diolah

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa seluruh pokok-pokok pikiran DPRD yang telah dinyatakan valid memiliki keselarasan dengan ketujuh prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029. Hal ini menandakan bahwa aspirasi yang dihimpun oleh DPRD dari masyarakat tidak berdiri sendiri, melainkan sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah yang telah disepakati bersama. Validasi yang telah dilakukan melalui SIPD-RI merupakan verifikasi keselarasan pada tataran perencanaan, yang selanjutnya akan dibahas dan disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun 2027.

Dengan mekanisme ini, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui lembaga perwakilan rakyat dapat terintegrasikan secara proporsional, transparan, dan bertanggung jawab dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Pokok-pokok pikiran DPRD dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dokumen perencanaan, melainkan menjadi bagian yang memperkuat legitimasi dan relevansi RKPD Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan yang berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.7. Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Peran Inovasi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, inovasi tidak lagi dipandang sebagai kegiatan pelengkap, melainkan menjadi bagian integral dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna menjawab dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, secara konsisten membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan antara lain melalui penyelenggaraan Klinik Inovasi dan

Perencanaan Pembangunan Daerah (KLIK IDE) serta Kelas Inovasi yang memberikan pendampingan intensif kepada perangkat daerah dalam merumuskan, mengembangkan, dan mengusulkan inovasi pelayanan publik, termasuk dalam rangka keikutsertaan pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) maupun pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri.

Berbagai inovasi yang telah diinisiasi oleh perangkat daerah menyasar sektor-sektor prioritas pembangunan, mulai dari tata kelola pemerintahan digital, pelayanan kesehatan, ketahanan pangan dan pertanian, pendidikan, hingga optimalisasi pendapatan asli daerah melalui perluasan transaksi nontunai (digitalisasi pembayaran/ETPD). Inovasi-inovasi tersebut lahir dari inisiatif organisasi perangkat daerah maupun aparatur sipil negara, termasuk hasil aktualisasi peserta Pelatihan Dasar CPNS, sebagai wujud budaya inovasi yang tumbuh di berbagai lini birokrasi.

Sebagai kelanjutan dari capaian tahun-tahun sebelumnya, RKPD Tahun 2027 memandang penting untuk mendokumentasikan dan mengintegrasikan inovasi daerah yang telah berjalan maupun yang direncanakan, sebagai bagian dari upaya peningkatan Indeks Inovasi Daerah, penguatan reformasi birokrasi, serta dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Berikut disajikan daftar inovasi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan tahun 2027.



Tabel 2.67
Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
1	KENCANG (Kartu Kendali Cegah Tekanan Darah Tinggi)	Tujuan utama dari inovasi KENCANG adalah meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian tekanan darah tinggi (hipertensi) melalui sistem pemantauan yang terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan.	PUSKESMAS BARANTI	2 Juni 2025
2	ALKES PENSI (ALARM KESEHATAN PEDULI HIPERTENSI)	Tujuan inovasi ini adalah Meningkatkan kesadaran pasien hipertensi dalam melakukan kontrol tekanan darah secara rutin dan meningkatkan kepatuhan minum obat melalui penggunaan inovasi ALKES PENSI (Alarm Kesehatan Peduli Hipertensi) di UPT Puskesmas Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang.	PUSKESMAS TANRUTEDONG	2 Juni 2025
3	Si-BUD (Sistem Informasi Beyond Use Date) Obat di UPT Puskesmas Tanrutedong	Tujuan inovasi ini adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian melalui optimalisasi pemberian informasi Beyond Use Date (BUD) guna menjamin penggunaan obat yang aman, efektif, dan rasional. Selain itu, inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien terkait BUD, menyediakan informasi yang jelas melalui label dan media edukasi, serta mengoptimalkan penyampaian informasi obat melalui pemanfaatan teknologi digital seperti QR Code. Melalui inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pasien dengan meminimalkan risiko penggunaan obat yang tidak sesuai serta mewujudkan pelayanan kefarmasian yang lebih informatif, inovatif, dan berorientasi pada pasien.	PUSKESMAS TANRUTEDONG	2 Juni 2025
4	ERUPSI (Edukasi Orang Tua untuk Pahami Waktu Erupsi Gigi Anak di Puskesmas Tanrutedong)	Tujuan utama inovasi ini adalah Meningkatkan pemahaman orang tua tentang waktu erupsi gigi anak melalui media edukasi yang mudah diakses dan menarik. Meningkatkan peran puskesmas dalam upaya promotif dan preventif kesehatan gigi dan mulut. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang tunggu sebagai sarana edukasi kesehatan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi kesehatan secara mandiri. Meningkatkan deteksi dini permasalahan gigi dan mulut pada anak melalui peningkatan pengetahuan orang tua. Menurunkan risiko terjadinya karies dan masalah gigi lainnya pada anak melalui edukasi yang berkelanjutan	PUSKESMAS TANRUTEDONG	2 Juni 2025
5	SIPATEN (Sistem Pengisian Identitas Pasien Terverifikasi)	Tujuan dari inovasi SIPATEN (Sistem Pengisian Identitas Pasien Terverifikasi) adalah:	PUSKESMAS TANRUTEDONG	2 Juni 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		1. Mengoptimalkan pengisian identitas pasien baru secara lengkap, akurat, dan terverifikasi pada aplikasi E-Puskesmas. 2. Meningkatkan kualitas dan keakuratan data rekam medis sebagai dasar pelayanan kesehatan dan pengambilan keputusan. 3. Mencegah terjadinya duplikasi data pasien dalam sistem rekam medis. 4. Meningkatkan kedisiplinan dan kompetensi petugas pendaftaran dalam melakukan input data sesuai standar. 5. Meningkatkan kesadaran pasien untuk membawa identitas diri saat berobat. 6. Mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu pelayanan publik.		
6	TERAPIS(Teknologi Arsip Puskesmas Strategis) melalui Pemamfaatan Microsoft Acces di UPT	Tujuan inovasi TERAPIS untuk mengoptimalkan untuk mengoptimalkan pengelolaan arsip data surat masuk dan surat keluar di UPT Pusmesmas Tanrutedong, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administasi persuratan, mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan arsip digital, mendukung peneraan sistem administrasi berbasis digital dan meningkatkan kompetensi ASN dalam pemanfaatan teknologi informasi.	PUSKESMAS TANRUTEDONG	2 Juni 2025
7	RME PINTAR (PELATIHAN INTERNAL TERINTEGRASI, ADAPTIF, DAN RINGKAS)	Tujuan inovasi RME PINTAR adalah meningkatkan kualitas dan efisiensi penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Target inovasi ini meliputi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam menggunakan RME, optimalisasi pencatatan elektronik, serta pemanfaatan data medis untuk pengambilan keputusan dan perencanaan program kesehatan.	PUSKESMAS BELAWAE	2 Juni 2025
8	SIMPEL (Sistem Pencatatan Arsip Elektronik) Inovasi Digitalisasi Berbasis Excel Untuk Efektivitas Registrasi	Tujuan dari inovasi SIMPEL adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip surat masuk dan keluar melalui sistem pencatatan elektronik berbasis Excel.	PUSKESMAS BELAWAE	2 Juni 2025
9	JEMPUT SEHAT(JELAJAH MONITORING KESEHATAN ANAK TERHENTI SEKOLAH)	Tujuan 1. Mendeteksi secara dini masalah kesehatan dan status gizi pada anak yang tidak lagi bersekolah.	PUSKESMAS DONGI	2 Juni 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi anak yang tidak terjangkau oleh program kesehatan sekolah. 3. Meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan anak secara berkala. 4. Mendukung peningkatan derajat kesehatan anak sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.		
10	"SENANDI" (Sistem Edukasi dan Pendampingan JKN Digital): Layanan Pendaftaran Pasien melalui Edukasi Mobile JKN di UPT Puskesmas Dongi"	Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran pasien berbasis digital melalui optimalisasi penggunaan Mobile JKN, dengan target 100% pasien JKN mendapatkan pelayanan pendaftaran yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan.	PUSKESMAS DONGI	2 Juni 2025
11	SILABU-DONGI (Sistem Labeling Obat Terpadu Puskesmas Dongi)	tujuan inovasi ini adalah Tersedianya label rak yang standar, informatif, dan seragam untuk seluruh item obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di gudang farmasi UPT Puskesmas Dongi, Meningkatkan pemahaman petugas terhadap tata letak obat melalui identifikasi visual yang jelas.	PUSKESMAS DONGI	2 Juni 2025
12	Observasi Kesehatan Ibu Hamil Cegah Stunting, AKI & AKB Melalui 5 langkah SMART (OKESI)	Tujuan inovasi OKESI adalah Meningkatkan kualitas pelayanan ibu hamil melalui implementasi inovasi OKESI, sehingga seluruh ibu hamil mendapatkan skrining faktor risiko, pendampingan, dan perencanaan persalinan yang optimal, dengan fokus pada penanganan komplikasi kehamilan. Meningkatkan cakupan skrining faktor risiko kehamilan dari kondisi baseline menjadi 100% pada seluruh ibu hamil dalam jangka waktu 1 tahun, Meningkatkan cakupan kunjungan ANC sesuai standar (≥ 6 kali selama kehamilan) hingga mencapai minimal 90% dari seluruh ibu hamil terdaftar, Memastikan seluruh ibu hamil dengan faktor risiko mendapatkan pemantauan dan pencatatan khusus setiap bulan untuk deteksi dini dan intervensi tepat waktu.	PUSKESMAS DONGI	1 agustus 2025
13	Cegah AKI & AKB serta stunting dengan PKK. (Peta Bumil Resti, Kantong Persalinan dan Kunjungan Rumah) CEGAT dengan PKK		PUSKESMAS DONGI	

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
14	RANSEL DORA (GERAKAN SWIPING BALITA UNTUK DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG DENGAN BARCODE)	Tujuan dari Inovasi Ransel Dora adalah: 1. Meningkatkan efektivitas pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja puskesmas, 2. Mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan data tumbuh kembang balita secara digital, 3. Meningkatkan kecepatan pelayanan kesehatan balita di posyandu dan puskesmas, 4. Mendukung deteksi dini gangguan tumbuh kembang balita sehingga dapat segera dilakukan intervensi, dan; 5. Mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan derajat kesehatan anak.	PUSKESMAS DONGI	2 januari 2025
15	BARRAKKA'NA SAROMASE (BERSALIN DI PUSKESMAS DAPAT PHOTO BOOTH BAYI, KK, AKTA LAHIR, DAN BPJS KESEHATAN MELALUI APLIKASI ALAKO DISDUKCAPIL MENUJU MASYARAKAT SIDRAP SEHAT DAN SEJAHTERAH)	Tujuan dari Inovasi Barakka'na Saromase adalah: 1. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas kesehatan. 2. Memastikan setiap bayi yang lahir langsung memiliki dokumen kependudukan 3. Memastikan bayi segera terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehata. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang cepat, mudah, dan terintegrasi.	PUSKESMAS DONGI	20 oktober 2025
16	GENERASI Z (GEN Z) GENCARKAN EDUKASI DAN BREAST CARE DALAM PEMBERIAN ASI	Tujuan dari Inovasi Generasi Z adalah: 1. Meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan ibu nifas tentang pentingnya perawatan payudara dalam proses menyusui. 2. Meningkatkan keterampilan ibu dalam melakukan perawatan payudara dengan teknik yang benar. 3. Mencegah terjadinya masalah menyusui seperti payudara bengkak, puting susu lecet, dan sumbatan ASI. 4. Membantu memperlancar produksi dan pengeluaran ASI sehingga bayi mendapatkan ASI secara optimal. 5. Mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sesuai rekomendasi World Health Organization.	PUSKESMAS DONGI	1 agustus 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas.		
17	LO KEREN SISTA (LAPOR KEHAMILAN SEJAK DINI DAN KONSULTASI GRATIS BERBASIS DIGITAL)	Tujuan inovasi ini adalah Meningkatkan pelaporan kehamilan sejak dini serta mempermudah akses ibu hamil terhadap layanan konsultasi kesehatan melalui media digital sehingga pelayanan kesehatan ibu dapat diberikan lebih cepat, tepat, dan menyeluruh.	PUSKESMAS DONGI	01-Nov-25
18	GEN-ZI – Gerakan Edukasi dan Konseling Gizi Digital	Tujuan yang hendak dicapai melalui inovasi GEN-ZI (Gerakan Edukasi dan Konseling Gizi Digital) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan konseling gizi di Puskesmas Lawawoi agar lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. 2. Mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan edukasi gizi melalui media digital yang praktis, menarik, dan mudah dipahami. 3. Meningkatkan kesadaran pasien mengenai pentingnya pola makan sehat, pencegahan penyakit, dan konsultasi gizi sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan. 4. Mendukung pengendalian penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, obesitas, dan penyakit lain yang berkaitan dengan pola makan. 5. Mendukung percepatan penurunan stunting melalui edukasi gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, keluarga balita, serta kelompok rentan lainnya. 6. Meningkatkan efisiensi kerja tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi gizi yang terstandar tanpa harus mengulang penjelasan dasar secara terus-menerus. 7. Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan promotif dan preventif di tingkat puskesmas. 8. Menjadikan inovasi GEN-ZI sebagai model pelayanan konseling gizi yang mudah direplikasi dan dapat dikembangkan di fasilitas kesehatan lainnya.	PUSKESMAS LAWAWOI	2 Juni 2025
19	SISTEM IMUNISASI TETANUS DIGITAL (SiTTa) (Sistem Digital Pencatatan dan Monitoring Imunisasi Tetanus pada Wanita Usia Subur dalam		PUSKESMAS LAWAWOI	2 Juni 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
	Mendukung Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal)			
20	GIGIH (Gerakan Informasi Gigi palsu lepasan yang Ideal untuk Hidup sehat lansia)	Inovasi GIGIH memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Menyediakan media edukasi yang menarik, informatif, dan mudah dipahami oleh lansia di ruang poli, dalam Prolanis, dan di ruang tunggu Puskesmas. 2. Meningkatkan pengetahuan lansia melalui media edukasi dan penyuluhan terkait penggunaan dan pemeliharaan gigi palsu lepasan 3. Meningkatkan kualitas hidup lansia melalui media edukasi terkait penggunaan dan pemeliharaan gigi palsu lepasan	PUSKESMAS BILOKKA	2 Juni 2025
21	Tata Arsip (Tertib Arsip, Transparansi Arsip dan Pelayanan Optimal)	Tujuan dari inovasi "Tata Arsip (Tertib Arsip, Transparansi Arsip, dan Pelayanan Optimal)" di Puskesmas Bilokka adalah untuk mewujudkan sistem pengelolaan arsip yang tertib, terstruktur, dan mudah diakses sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Secara khusus, inovasi ini bertujuan untuk menata seluruh arsip agar terklasifikasi dengan baik berdasarkan jenis dan fungsi, mempercepat proses temu kembali dokumen, serta mengurangi risiko kehilangan dan duplikasi arsip. Selain itu, inovasi ini juga menargetkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan arsip sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan dukungan terhadap pengambilan keputusan berbasis data. Adapun target yang ingin dicapai ke depan adalah terciptanya sistem arsip yang lebih efisien dengan waktu pencarian dokumen yang lebih singkat, meningkatnya kerapian dan keteraturan arsip di setiap unit kerja, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan responsif. Dengan tercapainya target tersebut, diharapkan inovasi ini dapat menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola administrasi dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal.	PUSKESMAS BILOKKA	2 Juni 2025
22	Optimalisasi Pengarsipan Surat Keluar pada Aplikasi Srikandi (OPSI SRIKANDI)	Tujuan utama pengoptimalisasian pengarsipan surat keluar pada aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) adalah untuk mempercepat tata kelola surat-menyurat dan kearsipan digital yang aman, efisien, serta transparan. Optimalisasi ini mendukung percepatan Sistem	PUSKESMAS BARUKKU	2 Juni 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan birokrasi modern yang lebih produktif dan mengurangi biaya operasional.		
23	LENTERA MEDIA DIGITAL	Tujuan inovasi LENTERA adalah meningkatkan efektivitas edukasi gizi dalam rangka menurunkan prevalensi balita dengan berat badan tidak naik di wilayah kerja Puskesmas Barukku. Selain itu, inovasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman ibu balita tentang prinsip gizi seimbang serta memperluas akses konsultasi gizi berbasis digital sebagai bagian dari transformasi pelayanan kesehatan. Target jangka panjangnya adalah mendukung percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan dan kabupaten.	PUSKESMAS BARUKKU	2 Juni 2025
24	CERDAS PROLANIS	Tujuan dari inovasi CERDAS Prolanis adalah meningkatkan kualitas pengelolaan penyakit kronis melalui peningkatan kepatuhan peserta dalam kontrol rutin, konsumsi obat, serta penerapan pola hidup sehat. Inovasi ini juga bertujuan meningkatkan keaktifan peserta dalam kegiatan Prolanis, memperkuat edukasi kesehatan, serta mengoptimalkan pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan. Dalam jangka ke depan, inovasi ini diharapkan mampu menurunkan risiko komplikasi penyakit kronis, meningkatkan kualitas hidup peserta, serta mendukung efektivitas pelayanan kesehatan di tingkat primer melalui pendekatan promotif dan preventif yang berkelanjutan.	PUSKESMAS BARUKKU	2 Juni 2025
25	Skrining Mandiri Online Tuberkulosis (SIMON TB)	Inovasi ini bertujuan untuk Meningkatkan deteksi dini dan penemuan kasus TB secara cepat, luas, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis skrining mandiri masyarakat	PUSKESMAS BARUKKU	2 januari 2025
26	Gerakan Sadar Tumbuh Kembang Anak (GARDA TUMBANG)	Tujuan inovasi Garda Tumbang (Gerakan Sadar Tumbuh Kembang Anak) adalah meningkatkan status pertumbuhan dan perkembangan anak balita melalui penguatan edukasi, pemantauan, dan pendampingan yang berkelanjutan serta berbasis digital. Secara khusus, target yang ingin dicapai meliputi peningkatan proporsi balita dengan pertumbuhan normal (berat badan naik sesuai umur), penurunan kasus berat badan tidak naik (growth faltering), serta pencegahan terjadinya masalah gizi lanjutan seperti underweight, wasting, dan stunting. Selain itu, inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan capaian perkembangan anak sesuai tahap usia melalui deteksi dini dan stimulasi yang tepat. Garda Tumbang juga menargetkan peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku ibu balita dalam pemenuhan gizi	PUSKESMAS BARUKKU	2 januari 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		seimbang, pola asuh, serta praktik pemberian makan bayi dan anak (PMBA). Di sisi lain, inovasi ini bertujuan memperluas akses layanan konsultasi dan edukasi melalui pemanfaatan media digital seperti WhatsApp Business, sehingga pelayanan tidak terbatas pada waktu dan tempat. Dalam jangka menengah hingga panjang, inovasi ini diharapkan mampu mewujudkan sistem pemantauan tumbuh kembang anak yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap penurunan prevalensi masalah gizi dan peningkatan kualitas kesehatan anak balita secara optimal.		
27	Sabda Andini (Sasaran Ibu Hamil Periksa Kehamilan Sedini Mungkin)	Tujuan inovasi SABDA ANDINI Adalah meningkatkan kepedulian ibu hamil terhadap kondisi kesehatannya sehingga dapat melahirkan genarasi penerus yang sehat dan berkualitas. Selain itu pemahaman terkait kondisi Kesehatan ibu hamil bukan hanya lingkungan keluarga yang peduli tetapi juga seluruh aspek Masyarakat.	PUSKESMAS BARUKKU	2 januari 2025
28	Optimalisasi Distribusi Tablet Tambah Darah Pada Remaja Putri di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Amparita (ATRIBUT MERAH)	Tujuan dari inovasi pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pencegahan anemia melalui perbaikan sistem pendataan, distribusi, edukasi, serta pemantauan konsumsi TTD secara berkelanjutan. Inovasi ini diharapkan mampu menghasilkan data sasaran yang akurat dan terbarui, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efisien. Dalam jangka menengah hingga panjang, inovasi ini ditargetkan dapat menurunkan prevalensi anemia pada remaja putri, meningkatkan status gizi, serta mendukung upaya pencegahan stunting sejak masa pra-konsepsi. Dengan demikian, inovasi ini diharapkan berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing di masa yang akan datang.	PUSKESMAS AMPARITA	2 januari 2025
29	EMPATI KAMI (Edukasi, Reminder dan Kartu Kontrol Pengingat) di UPT Puskesmas Amparita	Tujuan inovasi EMPATI KAMI di UPTD Puskesmas Amparita adalah meningkatkan kepatuhan pasien DM-HT dalam melakukan kontrol tepat waktu secara berkelanjutan, sehingga pengelolaan penyakit menjadi lebih optimal dan risiko komplikasi dapat ditekan. Secara khusus, inovasi ini menargetkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pasien tentang pentingnya kontrol rutin, tersedianya sistem pengingat yang efektif dan mudah diakses, serta terbangunnya sistem monitoring yang lebih terstruktur melalui kartu kontrol.	PUSKESMAS AMPARITA	2 Juni 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		Dalam jangka ke depan, diharapkan terjadi peningkatan persentase kunjungan kontrol tepat waktu, peningkatan keaktifan pasien dalam program pengelolaan penyakit kronis, serta peningkatan kualitas hidup pasien sebagai dampak dari pengendalian penyakit yang lebih baik.		
30	ptimalisasi Arsip Data Pegawai UPT Puskesmas Amparita Berbasis Digital Melalui Google Drive (MATA EMAS DI G.DRIVE)	Tujuan inovasi MATA EMAS DI G.DRIVE untuk mengoptimalkan pengelolaan arsip data pegawai di UPT Pusmesmas Amparita, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administasi kepegawaian, mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan arsip digital, mendukung peneraan sistem administrasi berbasis digital dan meningkatkan kompetensi ASN dalam pemanfaatan teknologi informasi.	PUSKESMAS AMPARITA	2 Juni 2025
31	Langsung Utamakan Rasa Kebersamaan Melalui Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Amparita (LUAR BIASA)	Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Amparita dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 95 – 100% Output Yang diharapkan dari inovasi ini adalah: 1. Adanya Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan survey kepuasan masyarakat online 2. Adanya Akses terhadap data responden untuk keperluan tindak lanjut *(following up)* 3. Memfasilitasi kebutuhan akses pengguna di Lingkungan Puskesmas terhadap aplikasi SKM online 4. Adanya Postingan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Amparita 5. Adanya Media Publikasi Pelayanan dan Kegiatan di Puskesmas Amparita dan data Capaian Pelayanan dan program – program di Puskesmas Amparita	PUSKESMAS AMPARITA	22-Sep-25
32	Edukasi Gizi Sehat bagi Ibu Hamil dalam Upaya Pencegahan STUNTING Wilayah Kerja UPT Puskesmas Kulo	Tujuan dari inovasi “Edukasi Gizi Sehat bagi Ibu Hamil dalam Upaya Pencegahan Stunting di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Kulo” adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil melalui perbaikan pengetahuan, sikap, dan perilaku dalam pemenuhan gizi seimbang sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini.	PUSKESMAS KULO	2 Juni 2025
33	SAHABAT KAKI(Sahabat Edukasi &Deteksi Dini Kaki Diabetik)	1. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Pasien 2. Meningkatkan Pelaksanaan Edukasi yang Terstruktur 3. Mewujudkan Sistem Deteksi Dini Kaki Diabetik	PUSKESMAS KULO	2 Juni 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		4. Meningkatkan Peran Aktif dan Kemandirian Pasien 5. Menurunkan Risiko Komplikasi Kaki Diabetik 6. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Preventif dan Berkelanjutan		
34	PINTAR GIZI (Peningkatan Pengetahuan ibu balita underweight melalui kelas online gizi seimbang di UPT Puskesmas Lancirang	Tujuan yang hendak dicapai melalui inovasi PINTAR GIZI adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu balita tentang gizi seimbang secara berkelanjutan sebagai upaya perubahan perilaku dalam pemberian makan anak, sehingga mampu menurunkan prevalensi balita dengan status gizi underweight di wilayah kerja UPT Puskesmas Lancirang, selain itu inovasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi ibu dalam kegiatan edukasi kesehatan melalui pemanfaatan media digital yang lebih mudah diakses, memperkuat peran tenaga kesehatan dalam memberikan pendampingan dan konsultasi gizi secara rutin, serta menciptakan sistem edukasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di masa yang akan datang	PUSKESMAS LANCIRANG	2 Juni 2025
35	DIGITALIS(Digitalis Arsip Terintegrasi Lincah dan Sistematis	Tujuan yang hendak dicapai melalui inovasi DIGITALIS (Digitalisasi Arsip Terintegrasi, Lincah, dan Sistematis) adalah untuk mewujudkan sistem pengelolaan arsip yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital sederhana. Inovasi ini ditujukan untuk meningkatkan kerapian dan keteraturan arsip, mempercepat proses pencarian dokumen, serta meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan arsip. Selain itu, DIGITALIS juga bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi di UPT Puskesmas Lancirang agar menjadi lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	PUSKESMAS LANCIRANG	2 Juni 2025
36	PENDAMPING BERKAS	Inovasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemantauan indikator Expired date perbekalan farmasi di UPT Puskesmas Pangkajene dengan melakukan digitalisasi pencatatan, dengan adanya inovasi ini menciptakan sistem pemantauan expired date perbekalan farmasi yang lebih efektif dan terintegrasi, sehingga dapat menurunkan jumlah obat kedaluwarsa, meningkatkan efisiensi pengelolaan stok, serta memastikan ketersediaan obat yang layak pakai bagi pasien di masa yang akan datang.	PUSKESMAS PANGKAJENE	2 Juni 2025
37	SIPITKI (Sistem Pencatatan Infrastruktur Teknologi	Tujuan Inovasi ini adalah meningkatkan efisiensi, akurasi dan kemudahan pengelolaan asset dengan mempermudah identifikasi asset, meningkatkan	PUSKESMAS PANGKAJENE	2 Juni 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
	Informasi melalui Google Sheets Berlabel QR Code)	akurasi data, mempercepat proses inventarisasi, memudahkan menitoring dan tracking, digitalisasi, paperless sistem, integrase dan kolaborasi		
38	KANTONG MANTAP JIWA (Kantong Pemantauan Kontrol dan Ketersediaan Obat Jiwa)	iNOVASI ini bertujuan mencegah kekambuhan dan memantau kepatuhan kontrol dan memantau kepatuhan minum obat. Tujuan lainnya yaitu : Meningkatkan kepatuhan pasien untuk datang control rawat jalan maupun rujukan spesialis Mencegah Relaps (Kekambuhan): Kepatuhan kontrol dan minum obat secara langsung berhubungan dengan penurunan angka kekambuhan pada ODGJ. Memantau Perkembangan Terapi: Memastikan pengobatan kronis (jangka panjang) berjalan efektif dan memantau efek samping. Deteksi Dini: Mempermudah tenaga kesehatan mendeteksi tanda-tanda awal perburukan kondisi kejiwaan.	PUSKESMAS PANGKAJENE	2 januari 2025
39	PERI GIGI ((aPlikasi fissurE Sealant Cegah KaRIes Gigi)	Tujuan umum yaitu mengurangi angka kejadian Karies di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun tujuan khususnya yaitu Masyarakat memahami pentingnya pencegahan karies sejak dini Masyarakat termotivasi untuk dapat berkunjung rutin ke Dokter Gigi	PUSKESMAS PANGKAJENE	2 januari 2025
40	Permak Srikandi (Pencatatan Surat Masuk dan Keluar melalui Srikandi)	Tujuan inovasi PERMAK SRIKANDI untuk meningkatkan sistem pencatatan surat masuk dan keluar melalui pemanfaatan srikandi di UPT Puskesmas Rappang, meningkatkan tertib arsip persuratan, mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan surat di lingkungan kerja.	PUSKESMAS RAPPANG	2 Juni 2025
41	SAR - WIRO SAKTI (SISTEM WAJIB REGISTRASI & OBSERVASI KEHAMILAN TERINTEGRASI	Tujuan umum inovasi SAR – WIRO SAKTI adalah menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui reformasi sistem pelayanan kehamilan berbasis Pencatatan wajib lintas layanan, Pengawalan aktif oleh bidan pengampu, dan Pemanfaatan teknologi digital sederhana namun efektif. Dengan memastikan seluruh ibu hamil tercatat sejak kontak layanan pertama dan dikawal secara konsisten hingga K6, inovasi ini memperkuat deteksi dini risiko, mempercepat intervensi medis dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu dan janin secara menyeluruh.	PUSKESMAS EMPAGAE	02-Sep-25
42	EDU-VISION (Edukasi dan Deteksi Dini Kesehatan Visus/Penglihatan Anak Sekolah)	Program EDUVISION: Edukasi dan Deteksi Dini Kesehatan Visus/Penglihatan Anak Sekolah dirancang dengan tujuan yang jelas dan terukur, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak sekolah. Tujuan ini tidak hanya berorientasi pada hasil jangka	PUSKESMAS EMPAGAE	10 desember 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		pendek, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul dalam jangka panjang.		
43	MACENNINGKA (MAPPING, CONTROLING, EVALUATING OLEH KADER POSYANDU)	Outcome yang diharapkan dari inovasi ini adalah terciptanya perubahan nyata dalam kesehatan ibu dan anak di wilayah kerja Puskesmas Empagae. Beberapa target outcome meliputi: 1. Penurunan prevalensi stunting di desa-desa sasaran hingga mendekati target nasional 14% sesuai RPJMN 2020–2024. 2. Peningkatan pengetahuan gizi masyarakat, khususnya ibu hamil, menyusui, dan keluarga balita, sehingga mereka mampu menerapkan pola makan bergizi seimbang. 3. Penguatan kapasitas kader posyandu sebagai agen perubahan yang berdaya, terampil, dan dihargai oleh masyarakat. 4. Terbangunnya sistem monitoring tumbuh kembang anak berbasis digital, sehingga pemerintah daerah memiliki data akurat dan real-time untuk pengambilan kebijakan. 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam posyandu, menjadikan posyandu sebagai pusat edukasi gizi dan kesehatan keluarga.	PUSKESMAS EMPAGAE	10 desember 2025
44	PELITA FARMASI	Inovasi PELITA FARMASI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian expired date obat di Instalasi Farmasi. Secara khusus, inovasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem pemantauan agar lebih cepat, akurat, dan terstandar, serta meningkatkan efisiensi kerja petugas farmasi dalam melakukan monitoring stok obat. Selain itu, inovasi ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian akibat obat kedaluwarsa serta menjamin keselamatan pasien melalui penggunaan obat yang aman dan layak. Dalam jangka panjang, inovasi ini diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh.	RSUD Arifin Nu'mang	2 Juni 2025
45	POSCAST SAROMASE (SAHABAT BERBAGI TOPIK MENGINSPIRASI UNTUK SEHAT)	Tujuan yang hendak dicapai melalui inovasi podcast Saromase ini adalah meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan melalui penyediaan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan dapat diakses secara luas. Inovasi ini juga bertujuan untuk menjadi media edukasi yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung program promotif	RSUD Arifin Nu'mang	20-Sep-25

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		dan preventif rumah sakit, serta menjangkau berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi digital		
46	MANRE SOP SI RATU	Tujuan Umum: 1. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan melalui peningkatan kepatuhan dan pemahaman terhadap SOP. Tujuan Khusus: 1. Meningkatkan pemahaman perawat terhadap SOP 2. Meningkatkan kepatuhan implementasi SOP 3. Mengurangi kesalahan tindakan keperawatan 4. Meningkatkan keselamatan pasien 5. Mendukung standar akreditasi rumah sakit	RSUD NENE MALLOMO	10 oktober 2025
47	PODCAST ALAKO	Adapun tujuan dari terbentuknya inovasi Podcast ALAKO ini adalah untuk meningkatkan penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas serta untuk memperluas informasi kesehatan kepada masyarakat melalui akses youtube. Melalui Podcast ALAKO untuk memberikan akses penyebaran informasi tentang kesehatan yang terjangkau, berkualitas, setara dan merata bagi dan merata bagi masyarakat seputar permasalahan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi.	RSUD NENE MALLOMO	10-Nov-25
48	KAWAN PASIEN (KAWAL PELAYANAN PASIEN) RSUD Nene Mallomo	Tujuan umum yaitu Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui pendampingan pasien secara terintegrasi guna mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pasien (patient centered care), meningkatkan keselamatan pasien, serta meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga selama menjalani proses pelayanan di rumah sakit.	RSUD NENE MALLOMO	10 desember 2025
49	Implementasi Edukasi Internet SMART CARE BBLR	tujuan inovasi ini adalah meningkatkan pemahaman orang tua mengenai perawatan bayi BBLR di rumah melalui program edukasi yang tersetruktur, aplikatif dan interaktif.	RSUD NENE MALLOMO	10 desember 2025
50	i-PATIN (Integrasi Layanan Digital Penjualan Benih Ikan Berbasis Online	Dengan sistem ini, transaksi dapat diselesaikan dalam hitungan detik tanpa perlu uang tunai atau transfer manual. Hal ini dapat membuat efisiensi waktu dan tenaga. QRIS sebagai sistem pembayaran resmi yang diawasi oleh Bank Indonesia meningkatkan rasa aman bagi pembeli. Konsumen tidak khawatir terkait penipuan atau uang tidak masuk karena seluruh transaksi tercatat	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	30 juli 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		otomatis. Sistem QRIS mengeliminasi kesalahan dalam perhitungan harga atau uang kembalian. Setiap pembayaran otomatis terverifikasi, meminimalkan potensi kehilangan atau manipulasi data. Layanan ini juga memberikan kemudahan dan memperluas pemasaran benih ikan.		
51	E-Puskeswan : Katalog Layanan Kesehatan Hewan	Tujuan dari inovasi E-Puskeswan: Katalog Layanan Kesehatan Hewan Puskeswan adalah untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya peternak, terhadap informasi layanan kesehatan hewan yang tersedia di Puskeswan melalui pemanfaatan teknologi digital. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hewan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga dapat mendukung pencegahan serta penanganan penyakit hewan secara lebih efektif. Target yang ingin dicapai melalui inovasi ini adalah minimal 80–100% peternak di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mengakses katalog layanan kesehatan hewan secara digital, serta terjadi peningkatan pemanfaatan layanan Puskeswan minimal 20% dalam satu tahun setelah inovasi diterapkan.	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	2 Juni 2025
52	SIPANDAI Digitalisasi dan Penataan Arsip Dokumen Pembuatan Akun Penyedia Sebagai Pengguna Katalog Elektronik Versi 6 (INAPROC)	Tujuan dari inovasi Digitalisasi dan Penataan Arsip Dokumen Pembuatan Akun Penyedia sebagai Pengguna Katalog Elektronik Versi 6 (INAPROC) adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi penyedia melalui pemanfaatan teknologi digital yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Secara umum, inovasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan dokumen penyedia yang tertib, terstruktur, dan mudah diakses guna mendukung kelancaran proses pembuatan akun penyedia pada Katalog Elektronik Versi 6 (INAPROC). Dengan adanya sistem berbasis Google Form yang diakses melalui barcode/QR Code, diharapkan proses pengumpulan dokumen tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan dilakukan secara mandiri oleh penyedia, sehingga dapat mengurangi beban kerja administratif serta meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan data.	BPBJ SEKRETARIAT DAERAH	2 Juni 2025
53	SIPENGAJA (Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa)	Tujuan pembangunan inovasi SIPENGAJA (Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa) adalah mewujudkan sistem pengelolaan persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terintegrasi, tertib administrasi, transparan, dan terdokumentasi secara digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Inovasi ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi proses	BPBJ SEKRETARIAT DAERAH	2 januari 2024

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		pengajuan paket pengadaan, memperkuat koordinasi antar pihak yang terlibat, serta mendukung percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.		
54	Inovasi: MAPATO Manajemen Pantau Stok Logistik Otomatis	Tujuan dari inovasi digitalisasi pengelolaan stok logistik di BPBD Kabupaten Sidrap adalah untuk menciptakan sistem yang responsif dan akuntabel. Berikut adalah rincian tujuannya: 1. Meningkatkan Kecepatan Respon Darurat (Response Time) 2. Menjamin Akurasi dan Validitas Data Stok 3. Mengoptimalkan Efisiensi Birokrasi dan Pelaporan 4. Meningkatkan Keamanan dan Akuntabilitas Arsip 5. Mewujudkan Perencanaan Logistik Berbasis Data (Data-Driven)	BPBD	2 Juni 2025
55	SIPANDA (Sistem Pengelolaan Data Bencana Daerah)	Optimalisasi Pengelolaan Data Laporan Kejadian Bencana melalui Sistem Digital Terintegrasi" adalah untuk mentransformasi tata kelola data kebencanaan daerah dari sistem manual berbasis Excel yang terfragmentasi menjadi sebuah ekosistem data digital yang akurat, cepat, dan akuntabel. Pada tahap awal, inovasi ini menargetkan terciptanya standardisasi format pelaporan digital secara terpusat guna menghapuskan penggunaan berbagai file lembar kerja yang terpisah di setiap unit kerja, sehingga seluruh informasi kejadian bencana terdokumentasi dalam satu pangkalan data yang seragam dan valid sejak laporan pertama diterima dari lapangan.	BPBD	
56	Peningkatan Edukasi Kebencanaan Berbasis Media Sosial (EDUKANSA)	Program Peningkatan Edukasi Kebencanaan Berbasis Media Sosial bertujuan untuk meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi yang efektif, sehingga mampu meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.	BPBD	2 Juni 2025
57	PABBISE (Program Aksi Bencana Berbasis Inovasi Sidenreng)	Tujuan utama inovasi PABBISE (Saling Mengingatkan dan Peduli Keselamatan) adalah meningkatkan kesiapan seluruh unsur daerah dalam menghadapi bencana secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Inovasi ini menargetkan meningkatnya kapasitas pemerintah desa/kelurahan, satuan pendidikan, serta masyarakat dalam memahami ancaman dan risiko bencana sehingga mampu melakukan tindakan pengurangan risiko sebelum bencana terjadi. Melalui pendekatan preventif, inovasi PABBISE mendorong perubahan	BPBD	2 Juni 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		paradigma dari pola responsif menjadi budaya kesiapsiagaan berbasis komunitas. Target jangka menengahnya adalah terbentuknya masyarakat sadar risiko, tersusunnya rencana aksi desa/kelurahan tangguh bencana, serta meningkatnya kemampuan lembaga pendidikan dalam melindungi kelompok rentan, khususnya anak usia dini.		
58	GRATISINFO:Panduan Teknis Pelaporan Gratifikasi dalam Format infografis untuk ASN	Tujuan utama dari peluncuran GRATISINFO adalah untuk menghilangkan "blind spot" atau ketidaktahuan ASN mengenai prosedur pelaporan gratifikasi. Secara jangka pendek, target yang ingin dicapai adalah tersedianya sarana edukasi visual yang terstandarisasi sehingga tidak ada lagi ambiguitas dalam membedakan antara pemberian yang sah dengan gratifikasi yang dilarang. Dengan tersedianya panduan ini, diharapkan setiap pegawai memiliki rujukan yang jelas dan seragam dalam menjalankan tugasnya tanpa keraguan terkait masalah integritas.	INSPEKTORAT	2 Juni 2025
59	SEHATI (Sosialisasi Edukasi Hentikan Amalan graTIfikasi) Untuk ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	novasi SEHATI dirancang dengan target pencapaian yang spesifik untuk mentransformasi budaya kerja di lingkungan pemerintah daerah: Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran ASN Mengenai Pencegahan Gratifikasi: Tujuan utama inovasi ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada setiap individu ASN mengenai batasan etika dan hukum dalam menerima pemberian. Dengan edukasi yang masif, diharapkan tumbuh kesadaran internal (pola pikir) bahwa menolak atau melaporkan gratifikasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk integritas diri. Target akhirnya adalah meningkatnya kepatuhan pelaporan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai bukti nyata transparansi birokrasi. Menyediakan Sarana Pembelajaran Berkelanjutan yang Merata: Inovasi ini bertujuan untuk memutus kesenjangan informasi antara ASN di pusat kabupaten dengan ASN yang bertugas di unit kerja terpencil. Melalui platform digital, materi edukasi menjadi "perpustakaan berjalan" yang dapat diakses kapan saja tanpa perlu menunggu jadwal sosialisasi tatap muka. Ini memastikan setiap ASN di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki akses informasi yang setara dan berkelanjutan, sehingga nilai-nilai antikorupsi tetap terjaga meskipun masa pelatihan atau sosialisasi formal telah berakhir. Standardisasi Pesan Integritas: Menjamin bahwa informasi mengenai	INSPEKTORAT	2 Juni 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		aturan gratifikasi yang diterima oleh seluruh perangkat daerah bersifat seragam dan akurat. Dengan adanya satu sumber materi digital yang telah divalidasi, risiko terjadinya salah penafsiran terhadap aturan hukum dapat diminimalisir, sehingga tercipta standar perilaku yang sama bagi seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Mendukung Terciptanya Zona Integritas: Secara organisasi, inovasi ini bertujuan sebagai motor penggerak bagi instansi untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan sistem edukasi yang terdigitalisasi dan terukur, daerah menunjukkan komitmen nyata dalam pembangunan zona integritas yang modern dan transparan.		
60	Prospektif (Prosedur verifikasi administrasi Ormas melalui Penyusunan SOP yang efektif	Meningkatkan kualitas pelayanan verifikasi administrasi Ormas agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Outcome 1. Meningkatnya kecepatan pelayanan 2. Menurunnya kesalahan administrasi 3. Meningkatnya kepuasan masyarakat	BADAN KESBANGPOL	2 Juni 2025
61	PERCEPATAN PENGUMPULAN HASIL PENGOLAHAN DATA PROFIL DESA (PANDAI DESA)	Tujuan dari inovasi ini dilakukan ialah agar setiap desa di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mengumpulkan profil desanya tepat waktu setiap tahunnya, sehingga perencanaan pembangunan, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan optimal.	DINAS PEMDESPPA	2 Juni 2025
62	BUMDesa Berdaya: Sistem pendampingan dan monitoring Terstruktur pelaporan keuangan BUMDesa	Tujuan dari inovasi BUMDesa Berdaya: Sistem Pendampingan dan Monitoring Terstruktur Pelaporan Keuangan BUMDesa adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pelaporan keuangan BUMDesa melalui sistem pendampingan dan monitoring yang terstruktur, terjadwal, dan mudah diterapkan oleh pengurus BUMDesa. Inovasi ini ditargetkan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengurus BUMDesa dalam melakukan pencatatan transaksi serta menyusun laporan keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, inovasi ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme pelaporan keuangan yang seragam dan berkelanjutan sehingga proses monitoring dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur.	DINAS PEMDESPPA	2 Juni 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
63	PESSE (Perlindungan, Edukasi, Sekolah, Sehat, Empowerment) berbasis nilai Pesse, Siri', dan Reso	Tujuan inovasi ini adalah menurunkan angka perkawinan anak, meningkatkan jumlah anak yang kembali mengakses pendidikan, memperkuat kapasitas keluarga dalam pengasuhan, serta membangun sistem perlindungan anak terpadu berbasis desa.	DINAS PEMDESPPA	30 juni 2025
64	i-Camp (Innovation Camp)	Tujuan pembangunan inovasi i-Camp adalah mewujudkan sistem pembinaan dan pengelolaan inovasi daerah yang terstandar, terdokumentasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang.	BAPPERIDA	2 Juni 2025
65	IDEAKTIF (Inovasi Daerah Aktif dan Informatif)	Inovasi IDEAKTIF bertujuan untuk meningkatkan diseminasi informasi inovasi daerah serta memperkuat proses identifikasi, pendokumentasian, dan pelaporan inovasi daerah melalui pemanfaatan media digital	BAPPERIDA	2 Juni 2025
66	Berselancar dilaut Banda (Layanan Utama Bank Data)	Inovasi Berselancar di Laut Banda bertujuan mewujudkan sistem pengelolaan data pembangunan yang cepat, akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk mendukung perencanaan serta evaluasi kinerja daerah.	BAPPERIDA	2 Juni 2025
67	DIGILAB-MOL (PANDUAN DIGITAL PENGGUNAAN ALAT LABORATORIUM BIOLOGI MOLEKULER)	Inovasi DIGILAB-MOL bertujuan mewujudkan standarisasi penggunaan alat laboratorium biologi molekuler melalui transformasi penyediaan panduan digital yang sesuai standar operasional, cepat dan mudah diakses, serta berorientasi pada peningkatan mutu layanan laboratorium.	UPT LABKESDA	2 Juni 2025
68	E-MAS TBC (E-Modul Self Asessment Sediaan Tuberculosis)	Inovasi E-MAS TBC (E-Modul Self Assessment Sediaan Tuberculosis) bertujuan untuk meningkatkan kualitas sediaan mikroskopik TBC di Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tier 1 melalui pemanfaatan media pembelajaran digital yang terstandar dan berbasis self assessment. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi teknis petugas laboratorium dalam pembuatan dan pewarnaan sediaan TBC secara benar dan konsisten sesuai standar yang berlaku. Selain itu, inovasi ini juga menargetkan tersedianya sarana pembelajaran mandiri yang mudah diakses, fleksibel, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung peningkatan mutu layanan laboratorium, memperkuat sistem penjaminan mutu, serta meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam program pengendalian TBC.	UPT LABKESDA	2 Juni 2025
69	SENADA (Standarisasi Prosudur Laboratorium	Tujuan utama inovasi SENADA adalah menyusun dan menetapkan buku panduan	UPT LABKESDA	2 Juni 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
	Entomologi melalui penyusunan buku panduan Instalas)	instalasi laboratorium entomologi sebagai standar operasional untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produktivitas kerja laboratorium. Adapun output dari inovasi ini yaitu tersedianya buku panduan instalasi laboratorium entomologi dalam bentuk cetak dan digital (QR barcode).		
70	ALAKO (APLIKASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ONLINE)	Tujuan utama dari program inovasi ALAKO ini adalah untuk mengatasi masalah utama yaitu keterbatasan yang dialami warga dalam mengurus dokumen kependudukan. Warga yang tidak dapat mengurus dokumen kependudukan di tempat Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dan Kecamatan yang memerlukan waktu yang lama dan biaya transportasi ke tempat tujuan dan waktu penyelesaian yang lama dapat diatasi dengan penggunaan teknologi aplikasi web dan android dan peralatan untuk koneksi jaringan secara online dapat mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus ke lokasi layanan dengan cukup datang di Kantor Pelayanan Desa dan Kelurahan. Masyarakat yang ada di pelosok Desa dan Kelurahan dapat sangat terbantu dalam pengurusan dokumen Administrasi Kependudukannya dan melengkapi dokumen kependudukannya, sehingga capaian kepemilikan dokumen kependudukan warga kabupaten Sidenreng Rappang dapat tercapai secara maksimal	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14 mei 2025
71	DIGIMON (Digital Government Content Innovation)	Inovasi DIGIMON *(Digital Government Content Innovation)* bertujuan untuk meningkatkan kapasitas admin pengelola media sosial Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menghasilkan konten digital yang informatif, edukatif, dan menarik guna memperkuat efektivitas komunikasi publik.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2 Juni 2025
72	Gula Aren Lumika	Inovasi Golla Lumika dari aren bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas produksi, dan daya saing gula aren yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di Desa Compong, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekaligus memperluas jangkauan pemasaran produk. Target inovasi ini adalah agar produksi Golla Lumikamampu mencapai standar kualitas higienis modern, meningkatkan kapasitas produksi hingga 150% dibanding metode tradisional, serta menembus pasar modern dan digital dalam tiga tahun ke depan	Desa Compong, Pitu Riase	2 januari 2024
73	SIPATUOKI (Sidrap Peduli Warga Tidak Mampu dan Orang Miskin)	Inovasi Gerakan SIPATUOKI' (Sidrap Peduli Warga Tidak Mampu dan Orang Miskin) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pendekatan kolaboratif antara	DINAS SOSIAL	28 oktober 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		pemerintah daerah dan masyarakat. Inovasi ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025–2029 yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.		
74	Program Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal (PAMMASE)	Tujuan utama Program PAMMASE adalah membawa Sidrap keluar dari kategori "Sanitasi Layak" menuju "Sanitasi Aman". Targetnya adalah seluruh rumah tangga di wilayah perkotaan dan penyangga memiliki akses penyedotan lumpur tinja yang terolah secara sempurna di IPLT.	BICIPTAPERA	
75	listrik masuk sawah	“mengembangkan solusi efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas sektor Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang”.	DTPHPKP	2 januari 2025
76	SI PERDA DAN PERKADA	Mewujudkan sistem informasi hukum daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui digitalisasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).	SATPOL PP	2 Juni 2025
77	PROTEKSI – Program Sosialisasi Terpadu dan Edukasi Kesiapsiagaan Inovatif	1. Meningkatkan Pengetahuan dan 2. Terbentuknya Masyarakat Siaga Kebakaran 3. Perluasan dan Pemerataan Edukasi Seluruh desa/kelurahan mendapatkan sosialisasi secara bertahap 4. Meningkatkan Kecepatan dan Ketepatan Respons Awal 5. Menurunkan Angka Kejadian dan Dampak Kebakaran 6. Mewujudkan Sistem Edukasi yang Berkelanjutan	SATPOL PP	2 Juni 2025
78	Satpol PP Go Digital : Sistem Pelaporan berbasis DRIVE (Data Rapi, Informatif, Valid, Efektif) & SHEET (Sistem Hasil Entry, Edukatif, Terpadu)	Mewujudkan sistem pelaporan kegiatan Satpol PP yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis DRIVE & SHEET.	SATPOL PP	2 Juni 2025
79	Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Melalui Kampanye Digital yang Humanis (KADIS PEDULI)	Inovasi ini Bertujuan untuk merekonstruksi citra instansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tugas pokok Satpol PP. Program ini didesain khusus untuk memperlihatkan wajah aparatur yang responsif, beretika, dan melayani, guna mengikis persepsi negatif sekaligus memberikan edukasi Peraturan Daerah dengan cara yang lebih mudah diterima oleh publik.	SATPOL PP	2 Juni 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
80	Malomo (Melayani percepatan izin, amanah dan praktis, langsung jadi (cepat), olahan pangan industri rumah tangga, mudah persayaraatannya, ongkosnya gratis)	Tujuan dari inovasi MALOMO ini adalah 1. 1.memudahkan pelaku UMKM 2. mendapatkan izin edar produk khususnya produk Industri Rumah Tangga Pangan.	DINAS KESEHATAN	30-Sep-25
81	PESONA (Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Edukatif Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal)	Tujuan dari Pemanfaatan media sosial sebgaai media edukatif bidang PAUD dan PNF yaitu : 1. Transformasi Penyampaian Informasi 2. Peningkatan Partisipasi dan Interaksi 3. fisiensi dan Inovasi Layanan Publik 4. Penguatan Literasi Digital	DINAS PENDIDIKAN	2 Juni 2025
82	SIPAKADATA (SIAP PAKAI DATA) SARPRAS SMART (SISTEM MUDAH AKSES DAN REAL-TIME TERINTEGRASI)	Tujuan dari inovasi SIPAKADATA (Siap Pakai Data) Sarpras SMART (Sistem Mudah Akses dan Real-Time Terintegrasi) adalah untuk mewujudkan sistem pengelolaan data sarana dan prasarana pendidikan yang terintegrasi, mutakhir, dan mudah diakses guna mendukung perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data.	DINAS PENDIDIKAN	2 Juni 2025
83	DIGDAYA (Digitalisasi Data Paud dan PNF Berdaya Guna)	Mewujudkan Sistem Database Terpadu *(Single Source of Truth),* Meningkatkan Aksesibilitas dan Kecepatan Informasi, Optimalisasi Perencanaan Berbasis Data *(Data-Driven Decision Making),* Mempercepat Proses Verifikasi Bantuan dan Layanan, Mendukung Transformasi Digital dan *Smart Governance,* serta Menjamin Keberlanjutan Data dan Monitoring	DINAS PENDIDIKAN	2 Juni 2025
84	SILABUS (Efisiensi Laporan Bulanan Sekolah)	Tujuan yang hendak dicapai melalui inovasi SILABUS (Efisiensi Laporan Bulanan Sekolah) adalah untuk mewujudkan sistem pelaporan bulanan sekolah yang lebih efektif, efisien, dan terstandar sehingga target pelaporan yang selama ini menjadi beban administrasi dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat di kemudian hari. Inovasi SILABUS dibangun untuk mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, meminimalkan keterlambatan pengumpulan laporan, serta meningkatkan kualitas data yang dilaporkan oleh sekolah.	DINAS PENDIDIKAN	

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
85	SEJARING “Sosialisasi Pengajuan SKMT secara Daring di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang”	Inovasi pengajuan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) secara daring bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya dalam proses pengajuan dokumen yang menjadi persyaratan penerbitan NUPTK bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	DINAS PENDIDIKAN	2 Juni 2025
86	Sipindai QR Code (Sistem Pintar Data Inventaris berbasis QR Code)	Tujuan dari inovasi ini adalah: Mewujudkan sistem inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) yang akuntabel dan transparan melalui pemanfaatan teknologi QR Code pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.	DINAS PENDIDIKAN	2 Juni 2025
87	Merasa Messi (Merajuk Asa Menuju Sekolah Impian)	Inovasi ini bertujuan Meningkatkan kompetensi dan Imajinasi guru dan siswa dalam mengembangkan Potensi dan kemampuan yang dimiliki dengan system pembelajaran berbasis teknologi dan digital secara efektif dan mendasar pada tujuan peningkatan pendidikan mutu dan karakter yang beralhlak mulia dan saromase yang berkesinambungan	SDN 5 OTTING	2 januari 2024
88	Penerapan Moderasi Beragama Pada Murid di UPT SD Negeri 10 Benteng (PAMMASE)	Program PAMMASE (Penerapan Moderasi Beragama pada Murid) bertujuan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif, harmonis, dan berkarakter melalui penguatan nilai-nilai moderasi beragama secara sistematis dan berkelanjutan.	SDN 10 BENTENG	8 januari 2024
89	TRANSISI (TRANSFORMASI SEKOLAH INOVATIF DAN INKLUSIF)	Tujuan Inovasi : Meningkatkan capaian literasi dan numerasi peserta didik minimal satu tingkat kategori (dari sedang ke tinggi) dalam 1-2 tahun, Mewujudkan iklim pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan 80% kegiatan aktif dan kontekstual, Membangun sekolah inklusif yang ramah bagi semua anak, termasuk berkebutuhan khusus, tanpa bergantung pada guru pendamping khusus, Meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga jumlah peserta didik baru bertambah dan sekolah menjadi contoh transformasi sekolah kecil di Kabupaten Sidrap, Menumbuhkan budaya refleksi dan growth mindset pada seluruh guru dan tenaga kependidikan.	UPT SD NEGERI 4 KULO	7 agustus 2025
90	Transformasi SIADIS (Sistem Administrasi Sekolah) dalam Pelayanan Administrasi	Inovasi ini bertujuan: Mewujudkan pelayanan administrasi sekolah yang cepat, transparan, dan efisien melalui platform digital, Meningkatkan kompetensi digital seluruh warga sekolah (guru, tendik, dan tenaga administrasi).	SDN 4 KULO	7 agustus 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
	Sekolah di UPT SD Negeri 4 Kulo	Mengurangi penggunaan kertas dan risiko kehilangan arsip, Memudahkan akses informasi bagi seluruh warga sekolah, termasuk proses PPDB online, Menjadi model digitalisasi administrasi bagi sekolah pedesaan lainnya di Kabupaten Sidrap.		
91	Amma (Anak Muslim Menghafal Amma)	Tujuan inovasi ini adalah memotivasi siswa agar mencintai Al-Quran sejak dini, menghafalnya dengan ikhlas serta mengamalkannya dalam perilaku keseharian. Demi terwujududnya karakter religious, disiplin dan bertanggungjawab, melalui kegiatan pembiasaan dan hafalan Juz Amma disertai dengan pemahaman makna serta pengamalan niai-nilai Al-Quran dalm kehidupan sehari-hari.	SD NEGERI 3 BARANTI	7 agustus 2025
92	PESSE CERIA (Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Pembuatan Makanan Tradisional Putu Pesse)	Tujuan dari inovasi ini adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pengetahuan peserta didik mengenai makanan tradisional daerah (Putu Pesse) 2. Menanamkan nilai kearifan lokal dan karakter budaya Bugis 3. Mendorong pelestarian kuliner tradisional di kalangan generasi muda 4. Menumbuhkan minat dan rasa bangga terhadap budaya lokal 5. Meningkatkan keterampilan praktik pembuatan makanan tradisional 6. Melestarikan warisan kuliner daerah agar tetap dikenal generasi muda	TK PEMBINA	7 agustus 2025
93	SIPAKAINGE (Sistem Informasi Penilaian Akademik dan Asesmen Interaktif Guru dan Orang Tua)	Tujuan inovasi ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik serta lapor pendidikan sekolah melalui optimalisasi peran orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Dengan menyadiakan sarana pemantauan hasil belajar harian sebagai panduan bagi orang tua untuk mendampingi anak belajar di rumah. Sehinggga terjadi sinergi antara kegiatan belajar di sekolah yang dipandu oleh guru dan belajar di rumah yang didampingi oleh orang tua.	SDN 2 MASSEPE	7 agustus 2025
94	BELAJAR DARI ALAM (Pembelajaran Berbasis Lingkungan dalam Mengenalkan Bagian-Bagian Pohon Pepaya pada Anak Usia Dini)	Tujuan dari inovasi ini adalah Meningkatkan minat belajar dan kemampuan observasi peserta didik melalui pembelajaran berbasis lingkungan pada anak usia dini.	TK ARAWA KAMPUNG BARU	7 agustus 2025

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
95	MALEBBI (Material Alternatif Listrik Berbasis Biomassa Inovatif)	Tujuan inovasi ini adalah Meningkatkan 80 % keterampilan berpikir kritis siswa serta antusiasme siswa dalam PBM Peningkatan kepedulian dan wawasan lingkungan sebesar 75 %, yang ditunjukkan melalui kemampuan mengaitkan konsep IPA dengan upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.	SMP Negeri 2 Pangsid	7 agustus 2025
96	SIRI' (Strategi Inovasi Refleksi dan Interaktif)	Inovasi ini bertujuan untuk: Peningkatan Literasi: Meningkatkan penguasaan bahasa daerah dan pemahaman filosofis jati diri Bugis Sidrap bagi seluruh target siswa.	SD 10 PANGSID	7 agustus 2025
97	KASIH SAYANG (Pembelajaran Berbasis projek dalam meningkatkan minat belajar siswa)	Tujuan inovasi ini adalah: meningkatkan kepedulian anak terhadap kebersihan lingkungan sejak usia dini, membiasakan anak memilah dan mengolah sampah dengan benar, mengembangkan kreativitas anak melalui pemanfaatan barang bakas menjadikarya bernilai guna, membentuk karakter disiplin ,mandiri,tanggung jawab dan gotong royong pada anak	TKN PGRI STANDAR CORAWALI	7 agustus 2025
98	KUPATUJUKI (Kokurikuler Penguatan Karakter Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat)	Inovasi KUPATUJUKI di UPT SD Negeri 3 Sereang dilaksanakan dengan tujuan utama untuk membangun ekosistem pembelajaran holistik yang menghubungkan nilaispiritual, mental, dan fisik secara berkesinambungan. Secara lebih rinci, tujuan dari inovasi	SDN 3 SEREANG	7 agustus 2025
99	ACARITA KI (RUANG BERCERITA BELAJAR & BERMAIN UNTUK LANSIA)	Program ini bertujuan untuk : Meningkatkan pemahaman kesehatan dan gizi untuk mencapai lansia sehat, serta mengurangi risiko penyakit, Memberdayakan lansia agar tetap produktif dan mandiri dalam beraktivitas, Menjadi wadah interaksi sosial untuk mengurangi rasa kesepian dan isolasi, Membina kesehatan mental dan spiritual guna mencapai husnul khotimah, serta Mengajarkan keterampilan baru (IPTEK, seni, kerajinan) sesuai perkembangan zaman.	Dinas PPKB	2 januari 2025
100	WIROSABLENG (Wadah Edukasi Remaja Putri untuk Stop Hamil Usia Belia melalui Penyuluhan KESPRO Cegah Stunting)	Inovasi Wirosableng merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk menurunkan angka kehamilan pada remaja dan prevalensi stunting di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, melalui 4 langkah inovatif melalui kolaborasi dengan semua stakeholder dalam kegiatan "FRESH" (forum remaja sehat/ posyandu remaja) dan "TERAS REMAJA "(Pojok Literasi khusus remaja) melalui platform WA, memonitoring sasaran remaja putri dengan menggunakan "BENDERA SANTRI", Pemberian konseling dan penghargaan sebagai reward keberhasilan dalam menunda	Puskesmas Empagae	1 Februari 2020

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		kehamilan dan pembetukan SATGAS 1000 HPK (hari pertama kehidupan). Mnfaat dari inovasi ini yaitu menurunnya angka kehamilan remaja, menurunkan anemia dan Berat bayi lahir rendah. Sasaran inovasi ini yaitu Desa Mojong Kec. Watang Sidenreng		
101	GAYA SEHATKI (Gerakan Keluarga Sayang Seribu Hari Pertama Kehidupan)	Inovasi ini wadah Pemberdayaan Masyarakat dalam mencegah dan menurunkan angka kejadian stunting di desa Sumpang Mango. Inovasi ini didasari oleh data Stunting Desa Sumpang Mango paling tinggi di Kecamatan Pituriawa tahun 2020, di mulai sejak bulan Oktober 2020. Sebagai upaya dalam melakukan Intervensi gizi spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif dengan melibatkan elemen masyarakat di fasilitasi oleh LintasPROGRAM Pelayanan Puskesmas dan Lintas Sektor Tingkat Desa. Manfaat dari inovasi ini adalah menurunnya angka stunting di desa sumpang mango kec.pitu riawa Sasaran inovasi ini adalah Pasangan Usia Subur (PUS), kehamilan, Persalinan, Neonatus, Bayi sampai berumur 24 Bulan di Desa Sumpan Mango	Puskesmas lancirang	20 Oktober 2020
102	English Corner SIPEMBERANI	English corner si pemberani merupakan salah satu program bagian dari English corner goes to school yang dirintis oleh English Corner. English corner merupakan organisasi bahasa Inggris terbesar yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berpusat di SMP Negeri 1 duapitue program English corner si pemberani ini telah berjalan sejak 2021 sampai saat ini dan telah menjangkau ribuan siswa dan ratusan sekolah. Program ini pada dasarnya memberikan pengajaran bahasa Inggris secara gratis kepada siswa SD yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.	UPT SMPN 1 DUAPITUE	3 Februari 2021
103	ANJANG SANA ANJANG SINI	Masalah kesehatan masyarakat Indonesia yang dihadapi saat ini adalah meningkatnya kasus Penyakit tidak menular (PTM). Untuk menyelesaikan permasalahan ini dan sesuai Amanah Permenkes No.71 tahun 2015 tentang penanggulangan PTM, maka kami menginisiasi membuat Inovasi “Anjang Sana Anjang Sini” yang telah diujicobakan pada Tahun 2021 dan diterapkan secara intens di tahun 2022 Tujuan inovasi adalah Meningkatkatkan pelayanan skrining kesehatan dalam rangka deteksi dini dan penemuan kasus penyakit tidak menular (PTM) di wilayah kerja Puskesmas Pangkajene.	UPT Puskesmas Pangkajene	2 April 2021
104	LAUT BANDA (Layanan Utama Bank Data)	Inovasi LAUT BANDA (Layanan Utama Bank Data) merupakan kegiatan pengelolaan data dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir,	Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian	6 September 2021

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan daerah yang memenuhi prinsip satu data. Dimana data yang dikumpulkan merupakan indikator Permendagri 86 tahun 2017 tentang perencanaan pembangunan daerah, indikator permendagri 18 tahun 2019 tentang LPPD, indikator Perpres 59 Tahun 2017 tentang SDGs, indikator Permendagri 100 tahun 2018 tentang SPM. Manfaat dan output dari inovasi ini adalah meningkatnya ketersediaan data, terwujudnya akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasiPROGRAM pembangunan dan juga terwujudnya single data (satu data) serta penguatan pengelolaan data statistik sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sasaran Inovasi Inovasi ini adalah Organisasi Perangkat daerah dan Masyarakat Umum	dan Pengembangan Daerah	
105	LEMOTA BERSOLEK	Inovasi ini adalah sebuah edukasi di bidang pertanian tentang bagaimana kita mampu mengelola potensi sumber daya yang ada di suatu desa agar bermanfaat secara utuh. Melihat potensi wilayah di desa betao adalah jeruk nipis dengan luasan lebih dari 300 Ha, maka dipilhlah judul Lemota yang artinya ‘’jeruk kita’’ sedangkan bersolek adalah kepanjangan dari ‘’Bersih olah ekonomi kemilau’’. Inovasi ini berusaha meningkatkan nilai ekonomi dengan cara melakukan pengolahan terlebih dahulu agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi dengan memanfaatkan Sumber daya manusia khususnya wanita tani disekitar berupa jeruk nipis bubuk instan, sirup, sabun cuci tangan dan limbah menjadi pupuk organik cair. Sasaranya adalah Wanita tani di Wilayah Kerja BPP Pitu riawa	UPT BPP Pitu riawa Dinas Tanaman Pangan, hortikutura, perkebunan dan ketahanan pangan Kab. Sidrap	7 September 2021
106	KLIK IDE (Klinik Inovasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Inovasi ini merupakan sebuah KLINIK yang memfasilitasi, menganalisis hingga melahirkan INOVASI yang mampu terintegrasi terhadap perencanaan pembangunan daerah yang disiapkan oleh perangkat daerah dari RPJMD, RKPD, RENSTRA hingga RENJA dan terejawantah menjadiPROGRAM, KEGIATAN dan . Manfaat dari inovasi ini yaitu Menyelesaikan masalah, pokok masalah dan akar masalah pembangunan di kabupaten Sidenreng Rappang, Menyusun/ MerancangPROGRAM, Kegiatan dan serta Mencapai target realisasi capaianPROGRAM visi misi RPJMD, capaian dataPROGRAM dan data makro, capaian indikator target perencanaan pembanguanan daerah.	Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13 Desember 2021

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		Manfaat yang diperoleh yaitu masuk Prolegda Perda Inovasi Daerah tahun 2022, dilakukan revisi terhadap Perbup TPP agar ASN yang memiliki Inovasi mendapatkan REWARD/ Penghargaan sebagai prestasi kerja setelah menjalankan inovasinya selama 1 tahun, serta Beberapa calon innovator telah aktif ke KLIK IDE melakukaan koordinasi, konsultasi dalam Menyusun dan melaksanakan Inovasi Daerah sesuai urusannya. Sasaran Inovasi Ini adalah Inovator dari Kepala Daerah, DPRD,Perangkat Daerah, ASN, dan Masyarakat Umum		
107	CEGAT DENGAN PEKA (CEGAH DAN DETEKSI DINI AMPUTASI DIABETES DENGAN PERAWATAN KAKI)	inovasi " CEGAT DENGAN PEKA", yang merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan perawatan yang berguna untuk mencegah dan mendeteksi dini luka diabetik pada penderita diabetes. Kegiatan pemeriksaan dan perawatan yang dimaksud adalah dengan cara 3 M, yaitu : M1: Memeriksa kaki secara rutin untuk menemukan masalah secara dini, M2: Memberikan edukasi tentang cara menjaga kaki, M3: Memberikan perawatan untuk masalah kaki yang serius. Manfaat dari Inovasi ini adalah menurunkan jumlah pasien diabetes yang menderita luka pada kaki. danjuga pasien diabetes semakin semangat dalam memeriksakan kesehatannya dan rutin dalam melakukan perawatan kaki. Sasarannya adalah Pasien RSUD Nene Mallomo	RSUD Nene Mallomo	5 Februari 2022
108	RUMAH LANGIT (Ruang Masyarakat Khusus Layanan Pendidikan Non Formal Gratis Terintegrasi)	Inovasi ini bertujuan memberi layanan pendidikan Non formal kepada masyarakat didaerah-daerah tertentu melalui ruang yang dibentuk untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dibidang pendidikan dan menjadikan rumah sebagai wadah atau sarana pendidikan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi-informasi terkait pendidikan dibidang pendidikan melalui kerjasama pihak Satuan Pendidikan Non Formal "UPT SPNF SKB SIDRAP" dengan pihak-pihak terkait. Manfaat yang dapat diperoleh dari inovasi ini yaitu masyarakat sadar pentingnya pendidikan , Mengurangi angka putus sekolah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakanPROGRAM pendidikan kesetaraan, Muncul bibit-bibit baru yang unggul dan sadar akan Pendidikan dan individu-individu yang aktif, kreatif, inovatif dan berdaya dengan adanyaPROGRAM pendidikan, pemberdayaan dan kepemudaan, masyarakat dapat mendeteksi lebih awal potensi-potensi	UPT SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20 Mei 2022

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		masalah yang akan muncul diwilayahnya dan lebih peka terhadap masalah-masalah sosial dan budaya yang ada di sekitarnya, Munculnya komunitas komunitas baru yang bergerak kearah yang positif, terciptanya tenaga pendidik lebih sadar dan memahami makna pekerjaan dalam memberi pelayanan dibidangnya. Sasarannya adalah Masyarakat Umum Putus Sekolah atau belum sekolah.		
109	D-ROBOTICS: DIGITAL ROBOTICS FOR INNOVATION & CREATIVE STUDENTS (Inovasi Layanan Pendidikan Berbasis Robotika untuk Memperkuat Literasi Digital dan STEM di Satuan Pendidikan)	D-ROBOTICS merupakan program kokurikuler berbasis teknologi yang mengintegrasikan pelatihan robotika sederhana, pemprograman, dan literasi STEM ke dalam kegiatan sekolah. Program ini melibatkan siswa secara aktif untuk merakit dan memprogram robot, serta mengembangankan soft skills seperti kolaborasi dan kreativitas. Tujuan dari inovasi ini antara lain: untuk menarik minat masyarakat untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Pancarijang, meningkatkan kesiapan digital dan STEM peserta didik, menjadikan sekolah sebagai pionir pendidikan teknologi di Kabupaten Sidrap, serta membangun model pembelajaran robotika yang dapat direplikasi.	SMP Negeri 1 Panca Rijang	Juli 2022
110	SIDRAP BERAS	SIDRAP BERAS: B : Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU) E : Edukasi dan Partisipasi Masyarakat R : Retribusi Sampah A : Angkutan Sampah S : Sumber Sampah Inovasi ini bertujuan untuk mengembangkan Inovasi Pengolahan Sampah dengan mendorong pengembangan teknologi. Pendekatan Smart City dalam tata kelola persampahan dengan menekankan pentingnya menciptakan akun atau rekening sampah bagi setiap warga sebagai dasar sistem yang adil dan transparan.	Dinas Lingkungan Hidup	1 Juli 2025
111	Kampung RUBUHA (RUMAH BURUNG HANTU	Tujuan Inovasi ini adalah untuk mengendalikan serangan hama tikus yang berdampak pada penurunan produksi padi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Outcome yang diharapkan dari inovasi ini adalah: Meningkatnya jumlah produksi padi yang didapatkan oleh petani di sekitar RUBUHA dan Menurunnya jumlah serangan hama tikus yang dirasakan oleh petani di sekitar RUBUHA. Output Yang diharapkan dari inovasi ini adalah: Jumlah pembuaatan	BPP Kecamatan Tellu Limpoe DTPHPKP	Agustus 2023

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		dan pemasangan rumah burung hantu meningkat di wilayah dua desa 5 unit tiap tahun, dan Jumlah penyuluhan yang dilakukan 4 kali tiap minggu.		
112	" PENARI " (PEMBINA MURID)	"PENARI" adalah akronim dari (Pembina Murid). Merupakan salah satu program yang ada di sekolah kami untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa dalam berbicara dan berpikir kritis serta melatih kepercayaan dirinya. Mereka bergiliran tampil menjadi PEMBINA MURID memberikan amanat/wejangan kepada teman-teman mereka setiap hatinya saat apel pagi.	UPT SMPN 3 DUA PITUE	2 Januari 2024
113	Menstimulus konsentrasi belajar siswa melalui pembiasaan literasi berbasis pendekatan Hipnoterapy (baca Qur'an)	15 menit sebelum memulai pembelajaran Peserta didik diberikan waktu untuk membaca Al'quran guna supaya mereka lebih fokus serta lebih tenang menerima materi yang akan disajikan oleh bapak/ibu guru.	UPT SMPN 5 PANCA RIJANG	16 Januari 2024
114	Passalama (Pelajar Pancasila dalam Mitigasi Bencana)	Inovasi Pelajar Pancasila dalam Mitigasi Bencana merupakan projek penguatan profil pelajar pancasila yang mengintegrasikan nilai-nilai pancasila dalam mitigasi bencana. Projek ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap tanggap bencana dalam kehidupan sehari-hari	SMP MUHAMMADIYAH RAPPANG	5 Februari 2024
115	PEKA PAS Perawat	Isi daripada Penilaian Kinerja Perawat: 1. Sikap Kerja, 2. Kinerja Pelayanan (Uraian Tugas), 3. Mutu Pelayanan.	UPT RSUD NENE MALLOMO	1 Juli 2024
116	Pustakawan Pintar (Pustakawan Profesional, Inovatif, Kreatif, Adaptif, Responsif)	Hingga saat ini, Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi tantangan dalam pengelolaan perpustakaan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya tenaga perpustakaan atau pustakawan yang memiliki inovasi dalam mengelola perpustakaan. Banyak pustakawan yang bekerja di instansi pendidikan, terutama di sekolah-sekolah, namun belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola dan mengembangkan perpustakaan secara inovatif dan kreatif. Kondisi ini membuat peran pustakawan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak maksimal dalam meningkatkan minat baca, mengelola koleksi perpustakaan, dan menyediakan akses informasi yang efektif bagi masyarakat, terutama siswa. Banyak pustakawan yang hanya menjalankan tugas administratif tanpa adanya inovasi dalam pelayanan perpustakaan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan atau inovasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang	7 Juli 2024

No	Judul Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
		untuk meningkatkan kemampuan pustakawan di daerah ini. Pustakawan Pintar, yang merupakan akronim dari Pustakawan Profesional, Inovatif, Kreatif, Adaptif, dan Responsif, menjadi sebuah inisiatif yang sangat penting untuk menjawab tantangan ini. Inovasi ini bertujuan untuk mendorong pustakawan sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang agar menjadi agen perubahan yang tidak hanya mengelola koleksi buku, tetapi juga berinovasi bak dalam memanfaatkan teknologi ataupun penerapan metode baru untuk meningkatkan minat baca, menyediakan informasi, serta mendukung proses pembelajaran di sekolah. Peran dan tanggung jawab peserta dalam praktik ini sangat krusial. Pustakawan yang terlibat diharapkan untuk menjadi lebih dari sekadar penjaga buku, melainkan sebagai fasilitator pembelajaran, penyedia informasi yang akurat, serta kreator kegiatan literasi yang dapat memotivasi siswa dan guru untuk memanfaatkan perpustakaan secara lebih maksimal.		
117	TAHFIDZ TALQIN JUARA	Kelas Tahfidz yang kami buat adalah kelas tahfidz pertama di sekolah dasar negeri Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi mata pelajaran wajib di satuan pendidikan kami. Program ini menjawab kebutuhan masyarakat akan pentingnya meningkatkan keimanan murid dengan pembiasaan positif melalui hafalan Qur'an.Metode yang digunakan adalah metode talqin protaba dan dipandu oleh guru kelas di UPT SD Negeri 11 Rappang yang telah mendapat lisensi/sertifikat sebagai pelatih tahfidz. Kelas tahfidz ini menjadi bagian dari mata pelajaran sekolah dan ciri khas keunggulan sekolah kami, bukan lagi kegiatan ekstrakurikuler. Kelas tahfidz dimulai setiap hari sekolah selama 1 jam pelajaran dan akan ditambah sesuai hasil evaluasi tiap bulan sesuai kurikulum yang telah disediakan. Selain kurikulum yang terstruktur, kami juga melengkapi kelas tahfidz dengan media pembelajaran audio visual sehingga mampu memfasilitasi tipe belajar tiap murid: audio, visual, dan audio-visual.	UPT SD Negeri 11 Rappang	2 Januari 2025

Sumber: Data diolah Tim RKPD Tahun 2027

BAB III

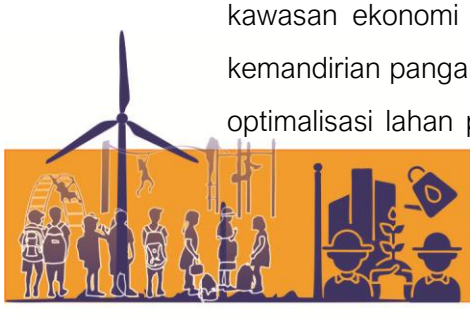
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi global dan nasional, kondisi ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, serta prospek dan tantangan perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD Tahun 2027. Selanjutnya, dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global, khususnya untuk tahun 2027. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2027 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027. Tahun 2027, arah kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada penguatan sektor unggulan daerah dengan mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan sebagai basis utama perekonomian daerah melalui modernisasi produksi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan nilai tambah hasil komoditas unggulan. Selain itu, peningkatan nilai tambah dan hilirisasi produk lokal juga diperlukan dengan cara mengembangkan pengolahan hasil pertanian dan peternakan, memperkuat rantai pasok, serta mendorong kemitraan antara pelaku usaha, koperasi, dan UMKM guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja.

Pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan juga dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas UMKM melalui akses pembiayaan, pendampingan usaha, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar, termasuk pemanfaatan digitalisasi dan *e-commerce*. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha dilakukan dengan cara menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian usaha, serta pengembangan kawasan ekonomi dan sentra produksi berbasis potensi wilayah. Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dilakukan dengan menjamin keberlanjutan produksi pangan melalui optimalisasi lahan pertanian, penguatan infrastruktur irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian,



serta stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas SDM juga perlu dikembangkan melalui pelatihan berbasis kebutuhan sektor unggulan, peningkatan keterampilan kewirausahaan, serta penguatan *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Pengembangan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan dilakukan dengan cara mendorong praktik ekonomi yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, serta adaptasi terhadap perubahan iklim guna menjaga keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2027 diproyeksikan berada pada fase penguatan dan konsolidasi, seiring dengan tren pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai salah satu kabupaten agraris utama di Sulawesi Selatan, Sidrap memiliki fondasi ekonomi yang relatif kuat, terutama pada sektor pertanian, namun sekaligus menghadapi tantangan struktural yang perlu diatasi agar pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif dan berkelanjutan. Dari sisi prospek, sektor pertanian masih akan menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Sidrap dikenal sebagai lumbung pangan, khususnya padi dan jagung, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2027, permintaan pangan nasional yang terus meningkat memberikan peluang besar bagi Sidrap untuk mempertahankan bahkan meningkatkan perannya sebagai daerah penyangga ketahanan pangan. Modernisasi pertanian melalui mekanisasi, pemanfaatan teknologi pertanian, perbaikan sistem irigasi, serta penerapan pertanian berbasis korporasi petani berpotensi mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.

Selain itu, peluang pengembangan agroindustri dan industri pengolahan berbasis hasil pertanian menjadi prospek penting. Jika hasil pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah, maka Sidrap dapat meningkatkan nilai ekonomi lokal, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer. Pertumbuhan sektor perdagangan, transportasi, konstruksi, dan jasa juga diperkirakan akan mengikuti peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan pembangunan infrastruktur daerah. Dari sisi sumber daya manusia, tahun 2027, membuka peluang peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengembangan kewirausahaan. Dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah dan sinergi dengan program nasional, UMKM dan usaha berbasis lokal berpotensi tumbuh sebagai penggerak ekonomi rakyat. Stabilitas ekonomi nasional yang relatif terjaga juga menjadi faktor eksternal positif yang mendukung iklim investasi dan konsumsi masyarakat di daerah.

Namun demikian, di balik prospek tersebut, tantangan perekonomian Sidrap pada 2027 masih cukup besar. Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian membuat ekonomi daerah rentan terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta gangguan distribusi sarana

produksi seperti pupuk dan benih. Tanpa diversifikasi ekonomi yang memadai, guncangan pada sektor pertanian dapat berdampak luas terhadap pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, terutama yang berkaitan dengan distribusi hasil produksi, akses pasar, dan efisiensi logistik. Infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas penunjang ekonomi yang belum merata dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor potensial di luar pertanian. Selain itu, kualitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah, khususnya dalam hal keterampilan kerja, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja lokal.

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan juga masih menjadi tantangan serius. Sebagian masyarakat, terutama di wilayah perdesaan, belum sepenuhnya menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Hal ini menuntut kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi rakyat, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Secara keseluruhan, perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2027 memiliki prospek yang cukup menjanjikan, terutama jika mampu memaksimalkan potensi sektor unggulan dan menangkap peluang transformasi ekonomi. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan struktural, melakukan diversifikasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Jika hal-hal tersebut dapat dijalankan secara konsisten, Sidrap berpeluang tumbuh sebagai daerah agribisnis dan ekonomi lokal yang kuat di tingkat regional.

3.1.1.1. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian kabupaten Sidenreng Rappang diproyeksikan memiliki prospek yang cukup cerah dan stabil, sejalan dengan arah pembangunan daerah dan dinamika perekonomian nasional. Sebagai daerah yang memiliki basis ekonomi agraris yang kuat, Sidrap tetap menempatkan sektor pertanian sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Peran strategis Sidrap sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan dan nasional memberikan peluang besar bagi daerah untuk terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prospek perekonomian Sidrap pada 2027 semakin terbuka dengan adanya upaya peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi dan pemanfaatan teknologi. Penggunaan alat dan mesin pertanian, perbaikan sistem irigasi, serta penerapan pola tanam yang lebih efisien diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi dan menekan biaya usaha tani. Selain itu, penguatan kelembagaan petani dan kemitraan usaha mendorong pertanian bergerak dari pola subsiten menuju sistem agribisnis yang lebih berorientasi pasar.

Di samping sektor pertanian, peluang pengembangan agroindustri dan industri pengolahan hasil pertanian menjadi prospek penting bagi perekonomian daerah. Pengolahan komoditas lokal

seperti padi, jagung, dan hasil pertanian lainnya menjadi produk bernilai tambah dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat struktur ekonomi daerah. Pertumbuhan sektor perdagangan, transportasi, konstruksi, dan jasa juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Prospek ekonomi Sidrap pada tahun 2027 juga didukung oleh berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM berperan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat dan menjadi sarana penting dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah berupa pembinaan, akses permodalan, dan perluasan jaringan pemasaran, UMKM diharapkan mampu tumbuh lebih produktif dan berdaya saing.

Dari sisi sumber daya manusia, peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi faktor penentu prospek ekonomi daerah. Program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kewirausahaan diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompeten dan adaptif terhadap perubahan. Tenaga kerja yang berkualitas akan mendukung peningkatan produktivitas, mendorong inovasi, serta menarik minat investasi ke daerah. Secara keseluruhan, prospek perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2027 menunjukkan arah yang positif. Dengan memaksimalkan potensi sektor unggulan, mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Sidrap berpeluang mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

3.1.1.2. Tantangan Perekonomian Global

Perekonomian global diperkirakan masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang bersumber dari faktor struktural, geopolitik, teknologi, dan lingkungan. Meskipun pemulihan ekonomi dunia pascapandemi telah berlangsung, laju pertumbuhan global cenderung tidak merata antarnegara dan kawasan. Perbedaan kapasitas fiskal, tingkat pembangunan, serta stabilitas politik membuat sebagian negara mampu tumbuh relatif cepat, sementara negara lainnya masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Salah satu tantangan utama perekonomian global pada 2027 adalah ketidakpastian geopolitik dan fragmentasi ekonomi dunia. Konflik antarnegara, ketegangan perdagangan, serta rivalitas kekuatan ekonomi besar berpotensi mengganggu rantai pasok global, arus perdagangan, dan investasi internasional. Proteksionisme yang meningkat serta kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi ke dalam negeri dapat menekan pertumbuhan perdagangan global dan mengurangi efisiensi ekonomi dunia.

Tantangan berikutnya adalah stabilitas keuangan global. Tingkat suku bunga yang relatif tinggi di sejumlah negara maju, sebagai respons terhadap tekanan inflasi sebelumnya, masih berpotensi menimbulkan risiko perlambatan ekonomi. Negara berkembang menghadapi

tantangan arus modal yang fluktuatif, beban utang yang meningkat, serta keterbatasan ruang fiskal. Kondisi ini dapat memperlemah kemampuan negara-negara tersebut dalam membiayai pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Selain itu, inflasi dan tekanan biaya hidup masih menjadi isu global, meskipun lajunya diperkirakan lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gangguan pasokan energi dan pangan, perubahan iklim, serta ketidakstabilan geopolitik dapat kembali memicu kenaikan harga komoditas. Hal ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan meningkatkan risiko kemiskinan, terutama di negara berpendapatan rendah dan menengah.

Perubahan iklim juga menjadi tantangan ekonomi global yang semakin nyata pada 2027. Dampak cuaca ekstrem, bencana alam, dan degradasi lingkungan tidak hanya mengancam ketahanan pangan dan energi, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Negara-negara dihadapkan pada kebutuhan investasi yang sangat besar untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sementara kapasitas pendanaan tidak selalu sebanding dengan kebutuhan tersebut.

Di sisi lain, transformasi digital dan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan tersendiri. Otomatisasi dan kecerdasan buatan berpotensi meningkatkan produktivitas global, namun juga menimbulkan risiko ketimpangan pasar tenaga kerja. Banyak jenis pekerjaan berisiko tergantikan, sementara penciptaan lapangan kerja baru membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi. Kesenjangan digital antarnegara dan antarkelompok masyarakat dapat memperlebar ketimpangan ekonomi global jika tidak dikelola dengan baik.

Tantangan demografi juga turut memengaruhi perekonomian global. Negara-negara maju menghadapi penuaan penduduk yang berdampak pada menurunnya produktivitas dan meningkatnya beban jaminan sosial, sementara banyak negara berkembang harus menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi penduduk usia produktif yang terus bertambah. Ketidakseimbangan ini menjadi tantangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara keseluruhan, tantangan perekonomian global pada tahun 2027 ditandai oleh tingginya ketidakpastian dan kebutuhan akan penyesuaian struktural yang mendalam. Dunia membutuhkan kerja sama internasional yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat sistem keuangan global, mengatasi perubahan iklim, serta memastikan bahwa transformasi teknologi dapat memberikan manfaat yang merata. Tanpa upaya kolektif dan kebijakan yang adaptif, tantangan-tantangan tersebut berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi global dan memperbesar kesenjangan antarnegara.

3.1.1.3. Tantangan Perekonomian Nasional

Pada tahun 2027, perekonomian nasional Indonesia diperkirakan menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun eksternal, seiring dengan dinamika perekonomian

global dan agenda pembangunan jangka menengah nasional. Meskipun Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang relatif kuat dan potensi pertumbuhan yang besar, berbagai tekanan dan risiko tetap perlu diantisipasi agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif.

Salah satu tantangan utama perekonomian nasional pada 2027 adalah ketidakpastian ekonomi global. Perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, serta fragmentasi perdagangan internasional berpotensi memengaruhi kinerja ekspor, investasi, dan stabilitas nilai tukar. Sebagai negara yang terintegrasi dalam sistem ekonomi global, Indonesia tidak sepenuhnya terlepas dari dampak fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan moneter negara maju, serta volatilitas arus modal internasional.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan stabilitas fiskal dan pembiayaan pembangunan. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta program perlindungan sosial masih sangat besar. Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah menghadapi keterbatasan akibat kebutuhan menjaga defisit anggaran dan rasio utang pada tingkat yang aman. Optimalisasi penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, menjadi tantangan tersendiri di tengah upaya menjaga iklim usaha dan daya beli masyarakat.

Dari sisi struktural, produktivitas dan daya saing nasional masih menjadi tantangan krusial. Produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif tertinggal dibandingkan beberapa negara di kawasan, sementara struktur ekonomi masih didominasi sektor-sektor bernilai tambah rendah. Transformasi ekonomi menuju industri pengolahan, ekonomi berbasis pengetahuan, dan hilirisasi sumber daya alam memerlukan investasi besar, reformasi regulasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang konsisten.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah ketenagakerjaan dan kualitas sumber daya manusia. Pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup dan berkualitas. Kesenjangan keterampilan antara kebutuhan dunia usaha dan kompetensi tenaga kerja masih menjadi hambatan utama. Selain itu, sektor informal yang masih besar menimbulkan tantangan dalam perlindungan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas.

Perekonomian nasional pada tahun 2027 juga dihadapkan pada tekanan inflasi dan ketahanan pangan–energi. Gangguan rantai pasok, perubahan iklim, serta fluktuasi harga energi global dapat memicu kenaikan harga dan menekan daya beli masyarakat. Pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, keberlanjutan subsidi, dan efisiensi anggaran, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.

Di samping itu, ketimpangan wilayah dan sosial ekonomi masih menjadi tantangan besar. Perbedaan tingkat pembangunan antarwilayah, terutama antara kawasan barat dan timur Indonesia, berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata. Urbanisasi yang cepat

juga menimbulkan tekanan pada infrastruktur, layanan publik, dan pasar tenaga kerja di perkotaan, sementara daerah perdesaan masih menghadapi keterbatasan akses dan peluang ekonomi.

Tantangan lingkungan dan perubahan iklim semakin memengaruhi perekonomian nasional. Dampak bencana alam, degradasi lingkungan, serta tuntutan transisi menuju ekonomi hijau memerlukan penyesuaian kebijakan dan investasi yang tidak kecil. Indonesia perlu menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dengan komitmen keberlanjutan lingkungan dan pengurangan emisi karbon.

Secara keseluruhan, tantangan perekonomian nasional Indonesia pada tahun 2027 menuntut kebijakan yang adaptif, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang. Keberhasilan menghadapi tantangan tersebut sangat bergantung pada konsistensi reformasi struktural, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, tantangan tersebut dapat diubah menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

3.1.1.4. Tantangan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan

Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan diperkirakan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks, baik yang bersumber dari dinamika internal daerah maupun dari perkembangan ekonomi nasional dan global. Sebagai salah satu provinsi dengan peran strategis di kawasan Indonesia Timur, Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar, namun keberlanjutan pertumbuhannya sangat bergantung pada kemampuan mengatasi berbagai kendala struktural dan risiko eksternal.

Salah satu tantangan utama perekonomian Sulawesi Selatan pada 2027 adalah ketergantungan yang masih tinggi pada sektor primer, terutama pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Meskipun sektor-sektor tersebut menjadi penopang utama perekonomian daerah, ketergantungan yang berlebihan membuat ekonomi provinsi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, serta gangguan produksi. Tanpa penguatan sektor hilir dan industri pengolahan, nilai tambah ekonomi yang dihasilkan masih relatif terbatas.

Tantangan berikutnya adalah kesenjangan pembangunan antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan seperti Makassar dan sekitarnya, sementara banyak kabupaten di wilayah pedalaman dan kepulauan masih tertinggal dari sisi infrastruktur, akses pasar, dan layanan publik. Ketimpangan ini berpotensi memperlebar disparitas pendapatan dan menghambat pemerataan manfaat pembangunan ekonomi.

Dari sisi infrastruktur, Sulawesi Selatan masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur ekonomi. Keterbatasan jaringan jalan, pelabuhan, irigasi,

dan infrastruktur logistik di beberapa wilayah menghambat distribusi barang dan jasa serta meningkatkan biaya ekonomi. Kondisi ini berdampak pada daya saing produk lokal dan minat investasi, khususnya di luar kawasan perkotaan.

Tantangan lain yang signifikan adalah kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan. Meskipun jumlah angkatan kerja terus meningkat, tingkat keterampilan dan produktivitas tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha. Kesenjangan keterampilan, tingginya proporsi tenaga kerja informal, serta keterbatasan lapangan kerja berkualitas menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi daerah.

Perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2027 juga dihadapkan pada tekanan inflasi dan ketahanan pangan. Sebagai daerah produsen pangan, Sulawesi Selatan tetap rentan terhadap gangguan distribusi, cuaca ekstrem, dan volatilitas harga komoditas. Ketidakstabilan harga pangan dapat menekan daya beli masyarakat dan memicu inflasi daerah, sehingga memerlukan pengelolaan pasokan dan distribusi yang lebih efektif.

Selain itu, tantangan lingkungan dan perubahan iklim semakin memengaruhi perekonomian daerah. Bencana alam, degradasi lahan, serta kerusakan ekosistem pesisir dan laut berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, terutama di sektor pertanian dan perikanan. Di sisi lain, tuntutan transisi menuju pembangunan yang lebih ramah lingkungan menuntut investasi dan penyesuaian kebijakan yang tidak ringan bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Dari aspek kelembagaan, tantangan juga muncul dalam koordinasi kebijakan dan efektivitas tata kelola pembangunan. Sinkronisasi antara kebijakan provinsi dan kabupaten/kota, serta antara pemerintah daerah dan pusat, masih perlu diperkuat agar program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan menjadi faktor kunci dalam menjawab tantangan ekonomi ke depan.

Secara keseluruhan, tantangan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2027 menuntut upaya transformasi ekonomi yang lebih terarah dan berkelanjutan. Penguatan nilai tambah ekonomi, pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan lingkungan yang bijak menjadi agenda penting yang harus dijalankan secara konsisten. Dengan kebijakan yang adaptif dan sinergi antar pemangku kepentingan, berbagai tantangan tersebut dapat dikelola sebagai bagian dari proses menuju perekonomian Sulawesi Selatan yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing.

3.1.1.5. Tantangan Perekonomian Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan hingga awal dekade 2020-an dikenal sebagai daerah dengan ekonomi dominan agraris, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah, sekitar 28-29 persen dari total PDRB. Sektor lain seperti konstruksi dan industri



pengolahan juga berperan, namun relatif lebih kecil dibanding sektor pertanian, meski struktur ini menunjukkan potensi untuk berkembang lebih luas dengan dukungan kebijakan dari investasi yang tepat.

Pada tahun 2025, perekonomian Sidrap tumbuh 7,71 persen (year-on-year) dengan kontribusi terbesar dari pertanian, kehutanan, dan perikanan sementara konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama dari sisi pengeluaran. Tingkat PDRB per kapita tercatat sekitar Rp65,15 juta. Namun, memasuki tahun 2027, Sidenreng Rappang menghadapi sejumlah tantangan struktural yang signifikan baik dari sisi internal maupun eksternal yang berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan kemampuan daerah untuk bersaing dalam ekonomi nasional yang semakin dinamis. Aspek tantangan utamanya diantaranya ketergantungan kuat pada sektor pertanian dimana pertanian masih menjadi pilar ekonomi utama Sidenreng Rappang, tetapi ketergantungan tinggi pada satu sektor ini menimbulkan risiko besar yaitu produktivitas pertanian seringkali dipengaruhi oleh kondisi iklim, infrastruktur irigasi, akses teknologi, dan kemampuan pemasaran komoditas. Ketergantungan berlebihan menyebabkan perekonomian daerah rentan terhadap gejolak harga komoditas dan perubahan iklim meskipun sektor lain seperti industri pengolahan dan jasa menunjukkan potensi, peran sektor non-pertanian belum maksimal dalam menciptakan nilai tambah yang signifikan dan menyerap tenaga kerja secara luas. Hal ini berdampak pada keterbatasan diversifikasi sektor yang akan memperlambat inovasi ekonomi lokal, menghambat penciptaan lapangan kerja di sektor produktif baru, serta memperbesar ketergantungan penduduk terhadap pekerjaan informal dan musiman.

Pengembangan UMKM dan pasar daerah juga menjadi tantangan karena Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menghadapi keterbatasan akses modal dan literasi keuangan yang rendah, sehingga UMKM kesulitan berkembang dan berinovasi. Keterbatasan akses pasar dan pemasaran digital menyebabkan produk UMKM sulit bersaing di luar wilayah lokal. Meski penelitian menunjukkan peran media sosial dalam meningkatkan omset UMKM, belum semua pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Hal ini berdampak pada UMKM yang belum kuat secara struktural akan tertinggal dalam persaingan ekonomi global dan nasional, menekan pertumbuhan usaha kecil di daerah dan menurunkan kontribusi UMKM terhadap PDRB dan penyerapan tenaga kerja.

Infrastruktur fisik seperti jaringan jalan, pasar, fasilitas irigasi, serta infrastruktur digital masih menjadi kendala utama pembangunan ekonomi di banyak kabupaten di Indonesia termasuk Sidenreng Rappang. Infrastruktur yang kurang memadai menghambat akses petani maupun UMKM ke input produksi dan pasar yang lebih luas, serta meningkatkan biaya logistik. Tanpa adanya investasi signifikan di infrastruktur, produktivitas ekonomi lokal tetap rendah dan integrasi Sidenreng Rappang dalam rantai nilai ekonomi nasional akan tertunda.



Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi keharusan untuk bersaing di ekonomi modern. Sementara upaya pemerintah daerah fokus pada pendidikan dan kesehatan, masih terdapat tantangan dalam pelatihan keterampilan produktif yang relevan dengan kebutuhan industri dan teknologi dan penyiapan generasi muda untuk memasuki pasar kerja berskala luas dengan keterampilan digital dan manajerial. Tanpa percepatan dalam pengembangan SDM, Sidenreng Rappang akan kalah bersaing dengan daerah lain yang lebih cepat mengadopsi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi.

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki 11 (sebelas) kecamatan dengan tingkat pembangunan yang berbeda. Ketimpangan tersebut mencakup akses layanan publik, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi, yang jika tidak diselesaikan segera akan memperbesar disparitas sosial ekonomi di daerah. Apabila pertumbuhan tidak inklusif dan terfokus pada sentra ekonomi tertentu, ketimpangan sosial akan semakin tajam, berpotensi mempengaruhi stabilitas sosial dan dukungan terhadap kebijakan pembangunan.

Era digital juga membuka peluang besar bagi pemasaran, layanan keuangan, dan pengembangan usaha baru namun digitalisasi UMKM dan layanan pemerintah masih di tahap awal dengan kebutuhan besar akan literasi digital dan investasi teknologi. Keterbatasan infrastruktur digital di kawasan perdesaan menjadi hambatan memperluas akses pasar secara online. Jika Kabupaten Sidenreng Rappang gagal mengadopsi teknologi digital secara menyeluruh, maka akan tertinggal dalam inovasi ekonomi dan kesulitan menarik investasi berbasis teknologi.

Selain tantangan internal, Kabupaten Sidenreng Rappang juga tidak lepas dari dampak ekonomi nasional serta global seperti inflasi, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan iklim yang mempengaruhi hasil pertanian. Ketidakpastian lingkungan global yang semakin tinggi akan berdampak pada tekanan harga komoditas lokal dan mengganggu stabilitas ekonomi di tingkat kabupaten.

3.1.1.5.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar perekonomian suatu daerah berdasarkan produksi barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah menghasilkan barang dan jasa mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi masuk menjadi salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebab kemakmuran penduduk selalu dimulai dari aktivitas ekonomi.

Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 7,71 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyedia Akomodasi dan Makan

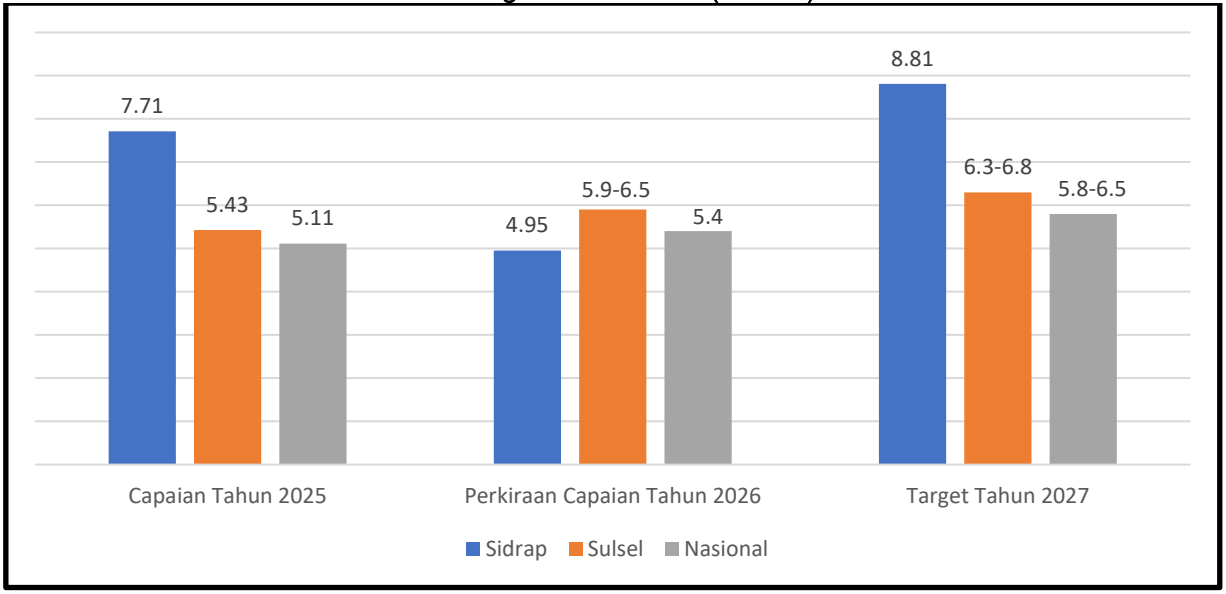
Minum sebesar 12,42 persen. Hal ini disebabkan oleh maraknya *event-event* dengan skala nasional maupun lokal yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 sehingga menstimulus tumbuhnya aktivitas pada sektor tersebut. Pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 11,66 persen diikuti oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 11,58 persen.

Selain lapangan usaha yang disebutkan di atas, terdapat 7 (tujuh) lapangan usaha yang juga tumbuh di atas 5 persen diantaranya yaitu: Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,70 persen; Real Estate sebesar 7,81 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,95 persen; Administrasi Pemerintah sebesar 6,38 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,97 persen; Jasa Pendidikan sebesar 5,90 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 5,81 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,68 persen; sementara itu, Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami kontraksi sebesar 0,05 persen.

Struktur PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,21 persen; diikuti oleh Konstruksi sebesar 15,63 persen; Industri Pengolahan sebesar 15,56 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,44 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai 71,85 persen. Pada tahun 2026, diharapkan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang bertumbuh di angka 4,95 persen dan pada tahun 2027 diproyeksikan berada di angka 8,81 persen. Angka ini merupakan gambaran optimisme yang tinggi dan ekonomi diharapkan tumbuh bertahap seiring dengan reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian, industri pengolahan dan dukungan terhadap sektor UMKM. Sementara itu, dengan melihat kondisi Sulawesi Selatan tahun 2025 yang pertumbuhan ekonominya sebesar 5,43 persen, maka di tahun 2026 Provinsi Sulawesi Selatan memperoyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9-6,5 persen dan 6,3-6,8 persen di tahun 2027 dan Nasional ditargetkan sebesar 5,4 persen tahun 2026 dan 5,8-6,5 persen di tahun 2027.

Kegiatan ekonomi yang tumbuh stabil akan memberi peluang berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menumbuhkan objek-objek pajak dan penerimaan daerah yang semakin luas. Pada sisi yang lain, target pertumbuhan ekonomi tersebut berimplikasi pada kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dalam wujud kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah yang besar, sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan tambahan pendanaan yang besar pula.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026 dan Target Tahun 2027 (Persen)



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2026, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dan Rancangan RKP Tahun 2027 (Data diolah Bapperida Kab. Sidenreng Rappang, 2026)

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023-2025 (persen)

	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,48	-0,78	10,70	28,81	28,76	30,21
B.	Pertambangan dan Penggalian	7,15	6,08	2,53	5,41	5,33	5,03
C.	Industri Pengolahan	8,13	4,71	11,58	15,01	15,09	15,56
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,77	4,66	0,12	0,08	0,08	0,08
E.	Pengadaan Air	3,2	7,92	-0,05	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	0,47	5,31	3,18	16,87	16,60	15,63
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,1	6,37	5,97	10,71	10,75	10,44
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,27	6,87	6,95	2,55	2,59	2,51
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,27	5,10	12,42	0,82	0,81	0,85
J.	Informasi dan Komunikasi	5,45	7,66	5,81	2,77	2,79	2,77
K.	Jasa Keuangan	-3,71	1,95	4,83	2,82	2,72	2,64
L.	Real Estate	7,74	5,98	7,81	3,88	3,89	3,83
M,N.	Jasa Perusahaan	7,26	12,19	5,68	0,12	0,13	0,12

	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan			Struktur PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
	(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Sosial Wajib	-0,97	8,96	6,38	3,83	3,97	3,88
P.	Jasa Pendidikan	4,23	6,11	5,90	3,65	3,69	3,68
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,88	9,53	4,61	1,56	1,62	1,56
R, S, T, U.	Jasa Lainnya	9,14	13,34	11,66	1,08	1,15	1,18
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		**3,28**	**4,05**	**7,71**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidenreng Rappang, 2026

3.1.1.5.2. PDRB Perkapita

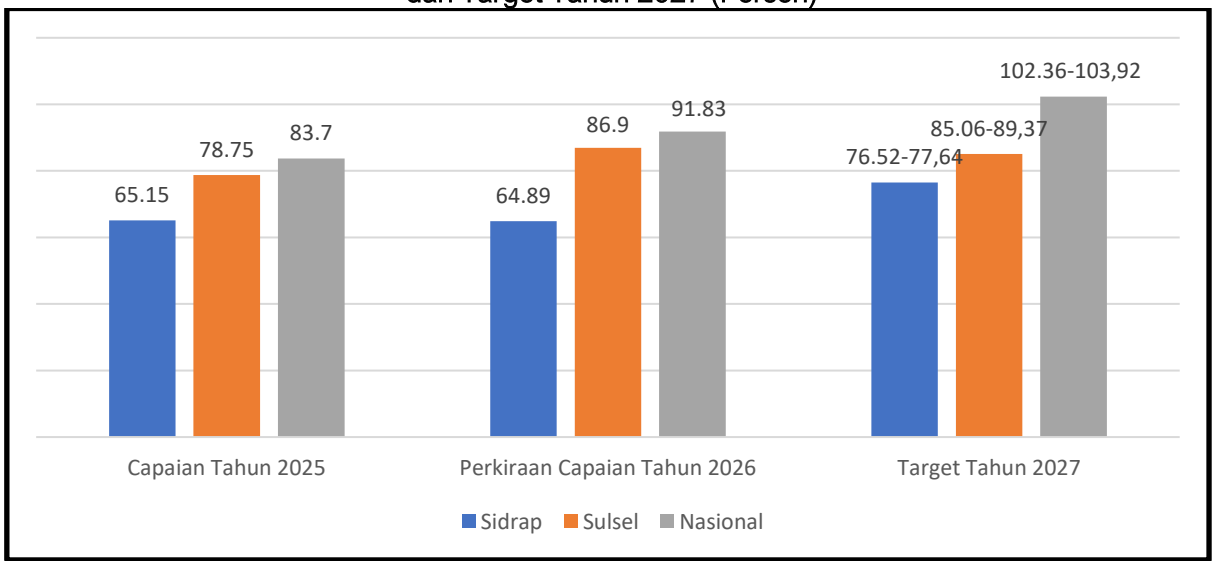
PDRB Perkapita (Produk Domestik Regional Bruto Perkapita) adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah yang dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Dengan kata lain, PDRB Perkapita adalah rata-rata nilai PDRB yang dikaitkan dengan setiap orang di daerah tersebut. Di tahun 2027, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang menggembirakan seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan berbagai kebijakan pembangunan yang diterapkan pemerintah. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi yang stabil berhasil meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong kesejahteraan secara umum. Di tingkat provinsi, Sulawesi Selatan juga mencatat peningkatan PDRB perkapita yang cukup signifikan, berkat pengembangan sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, serta pariwisata yang semakin maju. Namun, perbedaan antar kabupaten masih terlihat jelas, dimana Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan daerah agraris masih berada di bawah rata-rata Sulsel dalam hal PDRB perkapita. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada sektor primer dan keterbatasan akses terhadap investasi serta teknologi modern. Meskipun demikian, Sidrap terus berupaya meningkatkan produktivitas dan diversifikasi ekonomi untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Dengan demikian, di tahun 2027 menjadi momentum penting bagi Indonesia, Sulsel, dan Sidrap dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 terhadap tahun sebelumnya tumbuh sebesar 7,71 persen *yoy*. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,42 persen. Sementara itu dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi PKRT sebesar 6,41 persen.

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2025 mencapai Rp21,73 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp10,76 triliun. Dengan berdasar pada jumlah

penduduk interim Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025, PDRB Perkapita tercatat sebesar Rp65,15 juta. Kontribusi terbesar PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,21 persen dari total PDRB ADHB sedangkan menurut Pengeluaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 55,65 persen.

Grafik 3.2
PDRB Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026 dan Target Tahun 2027 (Persen)



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2026, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dan Rancangan RKP Tahun 2027 (Data diolah Bapperida Kab. Sidenreng Rappang, 2026)

3.1.1.5.3. Inflasi

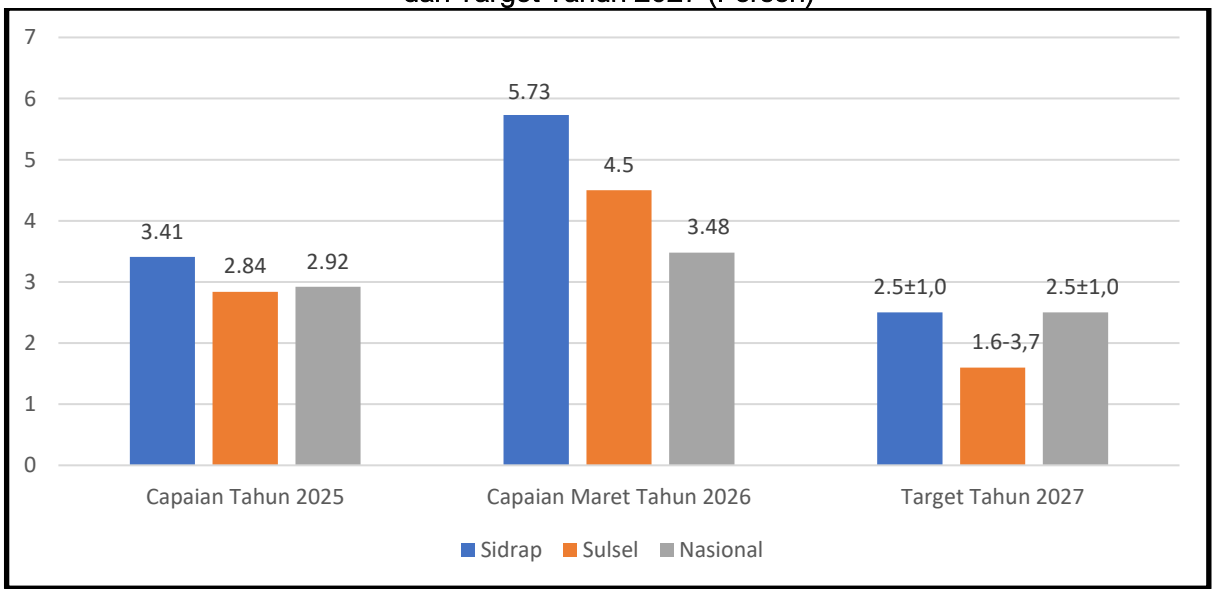
Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Kondisi ini menyebabkan penurunan daya beli masyarakat karena uang yang dimiliki menjadi kurang bernilai dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 2027, Pemerintah Indonesia menargetkan inflasi dapat dikendalikan dalam rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, sebagai bagian dari asumsi makroekonomi dalam perencanaan APBN 2027. Target ini diharapkan konsisten dicapai melalui sinergi kebijakan moneter dan fiskal serta penguatan sektor pangan melalui GNPIP. Bank Indonesia secara tegas menyampaikan optimisme bahwa inflasi domestik tetap rendah dan sesuai sasaran, yaitu di kisaran 2,5 ± 1,0 persen pada tahun 2026-2027, sehingga mencerminkan proyeksi inflasi ideal diantara 1,5 persen hingga 3,5 persen. Beberapa lembaga internasional seperti OECD juga memberikan proyeksi stabil namun sedikit lebih tinggi, yaitu pada level sekitar 3,0 persen, mengingat dampak dari memudarnya diskon harga listrik dan depresiasi rupiah perlahan mempengaruhi harga domestik. Sementara itu, model ekonometrik dari *Trading Economics* memprediksi inflasi Indonesia akan berada di sekitar 2,0 persen pada tahun 2027 dan 2,20 persen

di tahun 2028, menunjukkan inflasi yang relatif rendah dan konsisten dengan tren moderat ke bawah.

Pada Desember 2025 terjadi Inflasi *year on year* (*y-on-y*) Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,28. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Parepare sebesar 3,85 persen dengan IHK sebesar 110,69 dan terendah terjadi di Kota Palopo sebesar 2,32 persen dengan IHK sebesar 108,62. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,46 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 14,47 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,72 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoransebesar 1,24 persen; kelompok transportasi sebesar 0,42 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,63 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,46 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,26 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen. Adapun kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,46 persen. Tingkat inflasi *month to month* (*m-to-m*) pada Desember 2025 sebesar 0,49 persen dan tingkat Inflasi *year to date* (*y-to-d*) Provinsi Sulawesi Selatan bulan Desember 2025 sebesar 2,84 persen.

Secara khusus di Kabupaten Sidenreng Rappang, pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (*y-on-y*) sebesar 3,41 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,84. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,95 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,99 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,18 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,27 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,36 persen; kelompok transportasi sebesar 0,37 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,22 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,02 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,43 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 21,56 persen. Sedangkan kelompok pendidikan mengalami penurunan indeks sebesar 4,58 persen. Tingkat inflasi *month to month* (*m-to-m*) Kabupaten Sidenreng Rappang Desember 2025 sebesar 0,41 persen dan tingkat inflasi *year to date* (*y-to-d*) Kabupaten Sidenreng Rappang Desember 2025 sebesar 3,41 persen. Meskipun demikian, proyeksi inflasi tahun 2027 untuk Sidrap tetap diperkirakan akan mengikuti tren provinsi dan nasional yaitu berada dalam rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, dengan catatan adanya penguatan koordinasi TPID, peningkatan pasokan pangan lokal, serta intervensi pasar yang tepat sasaran.

Grafik 3.3
Inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional Capaian Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026
dan Target Tahun 2027 (Persen)



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2026, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dan Rancangan RKP Tahun 2027 (Data diolah Bapperida Kab. Sidenreng Rappang, 2026)

3.1.1.5.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

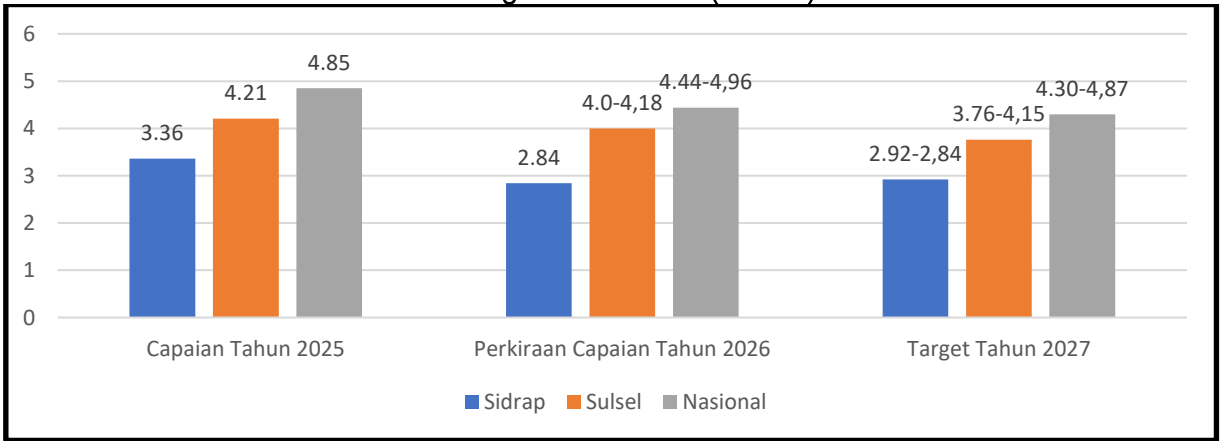
Pada tahun 2027, pemerintah menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka nasional terus menurun secara berkelanjutan sebagai bagian dari penguatan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Setelah target 2026 berada pada kisaran 4,44-4,96 persen, arah kebijakan 2027 difokuskan pada penurunan lebih lanjut melalui peningkatan investasi, hilirisasi industri, penguatan UMKM, pembangunan sektor padat karya, serta peningkatan kualitas SDM agar penciptaan lapangan kerja tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga lebih formal, produktif, dan inklusif. Sasaran ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.

Di Sulawesi Selatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 sebesar 4,45 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 orang penganggur. Pada November 2025, TPT laki-laki sebesar 4,03 persen, lebih rendah dibandingkan TPT perempuan yang sebesar 5,10 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,36 persen poin, mengalami peningkatan 1,17 persen poin dibandingkan Agustus 2025. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (6,08 persen) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,84 persen). Dibandingkan Agustus 2025, TPT perkotaan turun sebesar 0,04 persen poin, sedangkan TPT perdesaan naik 0,44 persen poin.

Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang, data capaian angka pengangguran di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 sebesar 3,02 persen kemudian naik menjadi 3,36 persen di tahun

2025. Sementara di tahun 2026 diperkirakan berada di angka 2,84 persen dan ditargetkan pada tahun 2027 adalah sebesar 2,92-2,84 persen.

Grafik 3.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026 dan Target Tahun 2027 (Persen)



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2026, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dan Rancangan RKP Tahun 2027 (Data diolah Bapperida Kab. Sidenreng Rappang, 2026)

3.1.1.5.5. Kemiskinan

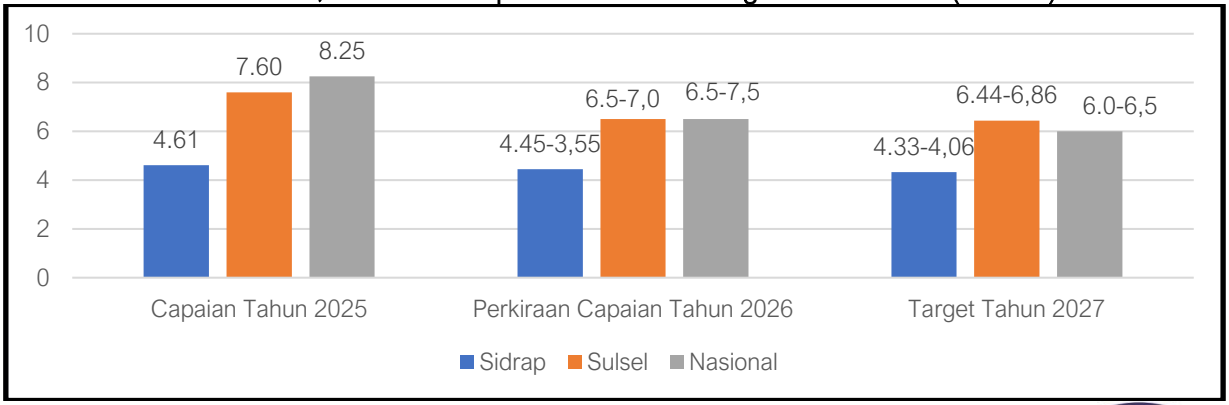
Pada tahun 2027, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan nasional menurun ke kisaran 6,0-6,5 persen sebagai bagian dari pelaksanaan tahun ketiga RPJMN 2025-2029 dan strategi percepatan menuju Indonesia Emas 2045. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya lebih tinggi, tetapi juga lebih inklusif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penurunan kemiskinan diarahkan melalui penguatan perlindungan sosial yang adaptif, penciptaan lapangan kerja produktif, hilirisasi dan industrialisasi nasional, pemberdayaan UMKM, pengendalian inflasi terutama harga pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan wilayah yang lebih merata. Dengan realisasi kemiskinan Maret 2025 sekitar 8,47 persen, target 2027 menuntut percepatan penurunan kemiskinan secara konsisten melalui sinergi pusat-daerah, reformasi program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan,perumahan, air bersih, serta ekonomi digital. Fokus kebijakan juga diarahkan pada pengurangan kesenjangan kemiskinan desa-kota, karena kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi dibanding perkotaan.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, data historis menunjukkan bahwa persentase kemiskinan pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,60 persen, lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,25 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa secara relatif kinerja penanggulangan kemiskinan di daerah telah berada pada posisi yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keberhasilan yang merata, mengingat masih terdapat kelompok masyarakat rentan yang

berpotensi kembali jatuh ke dalam kemiskinan akibat tekanan ekonomi maupun keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif. Untuk tahun 2026, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan diperkirakan menurun pada kisaran 6,5-7,0 persen dengan kecenderungan sama dengan rentang nasional sebesar 6,5-7,5 persen. Tren ini mengindikasikan adanya keberlanjutan upaya penurunan kemiskinan, namun laju penurunannya relatif moderat. Di tahun 2027, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan ditargetkan berada pada kisaran 6,44-6,86 persen. Meskipun menunjukkan arah penurunan, target tersebut masih relatif lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 6,0-6,5 persen.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menargetkan tingkat kemiskinan daerah turun menjadi 4,33-4,06 persen pada tahun 2027 sebagai bagian dari implementasi RPJMD 2025-2029 dalam mewujudkan Sidenreng Rappang yang Maju dan Sejahtera. Target ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk menekan angka kemiskinan secara progresif dan berkelanjutan melalui penguatan struktur ekonomi daerah, terutama berbasis sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta percepatan transformasi dari agrobisnis menuju agroindustri. Penurunan kemiskinan tersebut tidak hanya diarahkan melalui bantuan sosial, tetapi melalui strategi pembangunan yang lebih komprehensif, yaitu peningkatan produktivitas masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pengembangan UMKM, penguatan ekonomi desa, stabilisasi harga kebutuhan pokok, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan basis ekonomi Sidenreng Rappang yang kuat pada sektor pertanian, strategi 2027 juga difokuskan pada peningkatan nilai tambah hasil produksi lokal agar masyarakat tidak hanya menjadi produsen bahan mentah, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi lebih besar dari hilirisasi. Capaian angka kemiskinan pada tahun 2025 yaitu sebesar 4,61 persen mengalami penurunan 0,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 4,91 persen dan diharapkan angka kemiskinan pada tahun 2026 berada di kisaran angka 4,45-3,55 persen.

Grafik 3.5
Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026 dan Target Tahun 2027 (Persen)



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2026, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dan Rancangan RKP Tahun 2027 (Data diolah Bapperida Kab. Sidenreng Rappang, 2026)

3.1.1.5.6. Rasio Gini

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Rasio Gini Indonesia pada Maret 2025 berada di 0,375, turun dari 0,381 pada September 2024. Selanjutnya pada September 2025 turun lebih jauh menjadi 0,363, atau membaik 0,012 poin dibanding Maret 2025 dan turun 0,018 poin dibanding September 2024. Ini menunjukkan bahwa sepanjang 2025 terjadi perbaikan distribusi pengeluaran nasional, baik di perkotaan maupun perdesaan. Penurunan ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai diikuti oleh distribusi manfaat yang relatif lebih merata, didukung penguatan perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan, serta pemulihan ekonomi domestik. Dalam kerangka RPJMN 2025-2029, pemerintah menempatkan penurunan ketimpangan sebagai prioritas pembangunan dengan arah menuju pertumbuhan berkualitas dan pemerataan antarwilayah. Dengan basis 2025 sebesar 0,363, maka target operasional 2026 secara logis berada pada kisaran penurunan moderat sekitar 0,377-0,380, melalui penguatan program pengurangan kemiskinan, hilirisasi yang menciptakan pekerjaan, reforma sosial-ekonomi, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Rasio Gini 2027 diperkirakan dapat turun lebih lanjut di kisaran 0,362-0,367 dengan didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5 persen, penciptaan lapangan kerja formal meningkat, bantuan sosial semakin tepat sasaran, inflasi pangan terkendali, dan pembangunan wilayah luar Jawa lebih kuat.

Rasio Gini Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,350, lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang sebesar 0,363. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di daerah relatif lebih terkendali dibandingkan rata-rata nasional. Namun, tingkat ketimpangan tersebut masih berada pada level moderat, yang mengindikasikan bahwa distribusi hasil pembangunan belum sepenuhnya merata, baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah. Pada tahun 2027, Rasio Gini Sulawesi Selatan ditargetkan berada pada kisaran 0,346-0,349, lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 0,375-0,378. Target tersebut mencerminkan arah kebijakan yang menitikberatkan pada pengurangan ketimpangan secara bertahap. Namun demikian, capaian tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu memberikan manfaat yang lebih luas dan merata.

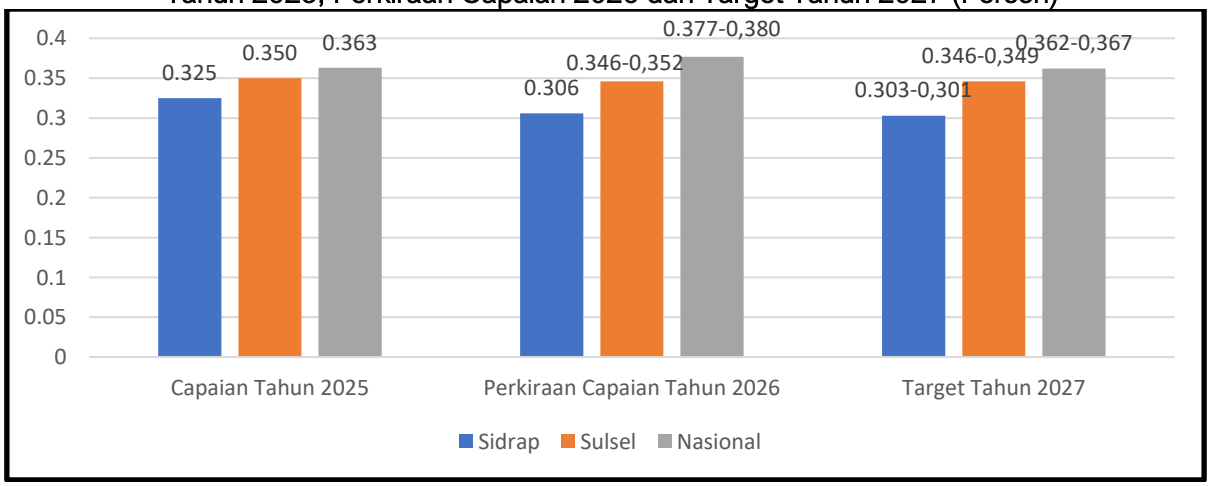
Rasio Gini Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 tercatat sebesar 0,325, capaian ini menempatkan Sidenreng Rappang pada kategori ketimpangan rendah-menengah dan relatif lebih baik dibanding sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan. Capaian ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat ekonomi daerah khususnya dari sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM mulai lebih merata. Dengan demikian, untuk tahun 2025 posisi Rasio Gini Sidenreng Rappang dapat diasumsikan berada pada level sekitar 0,31-0,32 sebagai basis pembangunan, dengan fokus menjaga agar ketimpangan tidak kembali melebar. Perbaikan tersebut mencerminkan beberapa faktor utama, yaitu sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masih menyerap

tenaga kerja besar, stabilisasi harga komoditas pangan membantu rumah tangga berpendapatan rendah, program perlindungan sosial dan belanja pemerintah daerah lebih efektif, serta konektivitas perdagangan regional Ajatappareng meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat bawah.

Mengacu pada arah RPJMD dan RKPD serta logika pembangunan inklusif, target Rasio Gini Sidenreng Rappang tahun 2026 secara realistis diarahkan turun bertahap ke kisaran 0,306. Penurunan ini bersifat moderat dengan strategi utama untuk mencapai target ini meliputi penguatan hilirisasi pertanian dan agroindustri, peningkatan produktivitas petani kecil, perluasan akses pembiayaan UMKM, pembangunan infrastruktur desa-produksi, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja. Apabila strategi tersebut berjalan konsisten, Sidenreng Rappang dapat menjaga posisi sebagai salah satu daerah dengan ketimpangan relatif terkendali di Sulawesi Selatan.

Pada 2027, jika agenda pemerataan ekonomi daerah berjalan efektif dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil, Rasio Gini Sidenreng Rappang diperkirakan dapat turun ke kisaran 0,303-0,301. Angka ini menunjukkan penguatan struktur ekonomi yang lebih inklusif, terutama jika transformasi pertanian menuju agroindustri berhasil, investasi perdesaan meningkat, lapangan kerja non-pertanian bertambah, dan intervensi kemiskinan ekstrem semakin tepat sasaran. Sebaliknya, risiko seperti gagal panen, fluktuasi harga pangan, atau perlambatan investasi dapat menahan penurunan Rasio Gini.

Grafik 3.6
Rasio Gini Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Capaian Tahun 2025, Perkiraan Capaian 2026 dan Target Tahun 2027 (Persen)



Sumber: BPS, RKPD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2026, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dan Rancangan RKP Tahun 2027 (Data diolah Bapperida Kab. Sidenreng Rappang, 2026)

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi

lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian target sasaran makro ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 dan pencapaian target nasional, dimulai dari angka kemiskinan yang menurun, Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat, Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi, Tingkat Pengangguran Terbuka yang semakin rendah, Gini Ratio dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca yang menurun, serta PDRB Perkapita yang semakin meningkat. Dalam perspektif itulah arah kebijakan perekonomian daerah sangat diperlukan, bukan hanya pada sektor pemerintah tetapi jauh lebih penting adalah untuk menjadi arahan bagi pelaku ekonomi lainnya di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional, maka ditetapkan indikator makro pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target Indikator Makro Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja Tahun 2027		
			RPJMD Kab. Sidrap	RKPD Prov. Sulsel	RKPD Kab. Sidrap
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,95	6,3-6,8	8,81
2	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	68,75	85,06-89,37	76,52-77,64
3	Inflasi	%	2,5 ± 1,0	1,6-3,7	2,5 ± 1,0
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,75	3,76-4,15	2,92-2,84
5	Kemiskinan	%	4,31-3,54	6,44-6,86	4,33-4,06
6	Rasio Gini	Angka	0,300	0,346-0,349	0,303-0,301
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,80	N/A (berubah menjadi Indeks Modal Manusia)	76,22-76,55
8	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	14,33	Belum rilis	Belum rilis

Sumber: Bapperida Kab. Sidenreng Rappang, 2026

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2027

Tahun 2027 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran sebesar 5,8-6,5 persen menuju pertumbuhan ekonomi delapan persen pada tahun 2029 sesuai RPJMN Tahun 2025-2029. Pertumbuhan ini diharapkan meningkatkan *gross national income* (GNI) per kapita ke US$5.800-5.840, mempertahankan status negara berpendapatan menengah atas, serta mendukung agenda ekonomi hijau melalui penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan kualitas lingkungan.

Pembangunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM melalui penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan serta peningkatan Indeks Modal

Manusia. Selain itu, kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal menjadi indikator utama untuk memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penguatan ekonomi domestik dilakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap guncangan dan mendorong pertumbuhan yang berkualitas melalui paket kebijakan terintegrasi, meliputi stabilitas makroekonomi, perlindungan daya beli, penguatan tabungan dan pembiayaan domestik, percepatan investasi dan belanja produktif, perbaikan iklim usaha, peningkatan produktivitas, serta penguatan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia. Melalui strategi tersebut, perekonomian domestik diharapkan tidak hanya lebih resilien terhadap tekanan eksternal, tetapi juga mampu membangun kapasitas pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, investasi diarahkan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan industrialisasi bernilai tambah, dengan target realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp2.322,0–Rp2.451,0 triliun. Investasi difokuskan pada sektor sekunder (Rp1.110,6–Rp1.180,4 triliun), hilirisasi (Rp636,4–Rp654,1 triliun), serta kawasan pusat pertumbuhan (Rp524,7–Rp546,2 triliun), dengan peningkatan porsi PMDN termasuk UMKM menjadi 48,9–49,0 persen. Selain itu, investasi berorientasi ekspor juga diperkuat melalui PMA dan PMDN, didukung kebijakan peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, serta pengembangan infrastruktur konektivitas dan logistik sebagai fondasi pertumbuhan.

Tabel 3.3
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2027 Sisi Pengeluaran (Persen)

No.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2027	
		Pertumbuhan	Kontribusi
1.	Konsumsi Rumah Tangga	5,3-5,6	54,1
2.	Konsumsi LNPRT	7,0-7,3	1,4
2.	Konsumsi Pemerintah	4,3-7,7	7,7
3.	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	6,5-7,5	29,0
4.	Ekspor Barang dan Jasa	7,1-8,8	22,0
5.	Impor Barang dan Jasa	7,8-9,9	20,7
Pertumbuhan PDB		**5,8-6,5**	

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2026 (diolah)

Hilirisasi diarahkan sebagai strategi utama untuk mendukung pencapaian sasaran sektor industri pengolahan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2027, sektor industri pengolahan ditargetkan tumbuh 5,9–6,6 persen dan memberikan kontribusi sebesar 21,5

persen terhadap PDB. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, implementasi hilirisasi dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir disertai penguatan ekosistem hilirisasi, mencakup peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pasokan bahan baku, penguatan konektivitas dan logistik, serta pendalaman produk turunan melalui:

1. Akselerasi hilirisasi komoditas berbasis sumber daya unggulan, seperti nikel, bauksit, garam, kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut, yang salah satunya akan diimplementasikan melalui berbagai PSN;
2. Pengembangan industri bernilai tambah tinggi, yang mencakup industri kimia, industri alat angkutan (termasuk pengembangan industri mobil nasional dan industri dirgantara), dan industri elektronika, serta industri mesin dan perlengkapan;
3. Peningkatan daya saing industri padat karya seperti industri tekstil salah satunya melalui pelaksanaan program Kredit Industri Padat Karya dan restrukturisasi mesin/peralatan;
4. Percepatan transformasi industri hijau melalui implementasi peta jalan dekarbonisasi industri, penerapan ekonomi sirkular, serta *pilot project* pembiayaan industri hijau dengan skema *Green Industry Service Company* (GISCO);
5. Perluasan dan pendalaman ekspor produk dan jasa industri, terutama melalui pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan yang telah diratifikasi;
6. Peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui penguatan rantai pasok industri, keberlanjutan penerapan industri 4.0, penyiapan SDM industri terampil dan produktif, serta penerapan standardisasi, serta dukungan kebijakan fiskal dan insentif yang tepat sasaran.

Selanjutnya, sektor pertanian dan perikanan tahun 2027 ditargetkan tetap tumbuh di tengah tantangan perubahan iklim melalui (1) perbaikan pengelolaan air dan irigasi, lahan/kawasan konservasi dan rehabilitasi, serta Jalan Usaha Tani; (2) penyediaan benih dan bibit unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), sarana produksi perikanan, pupuk subsidi, cetak sawah, optimasi lahan, revitalisasi tambak dan kampung nelayan; (3) penyuluhan dan regenerasi petani, nelayan, dan pembudidaya ikan; (4) peningkatan produksi lada, jagung, dan komoditas strategis lainnya, termasuk komoditas pertanian dan perikanan; serta (5) hilirisasi pertanian dan perikanan. Sementara itu, sektor perdagangan dari sisi dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, transformasi digitalisasi perdagangan, dan peningkatan konektivitas ke pasar global.

Tabel 3.4
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2027 Sisi Lapangan Usaha (Persen)

No.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2027	
		Pertumbuhan	Kontribusi
Sisi Lapangan Usaha*			
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,3-5,8	12,7

No.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2027	
		Pertumbuhan	Kontribusi
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,1-2,7	7,7
3.	Industri Pengolahan	5,9-6,6	21,5
4.	Konstruksi	5,3-6,4	9,5
5.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,4-6,7	13,1
6.	Transportasi dan Pergudangan	8,7-9,3	6,6
7.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,3-9,7	2,8
8.	Informasi dan Komunikasi	7,9-8,8	4,4
Sisi Kewilayahan			
1.	Kawasan Barat Indonesia (KBI)	5,7-6,3	78,7
2.	Kawasan Timur Indonesia (KTI)	6,5-7,5	21,3
Pertumbuhan PDB		**5,8-6,5**	

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2026 (diolah)
*Keterangan: *)8 dari 17 sektor dengan kontribusi terbesar pada perekonomian.*

Pada tahun 2027, peningkatan pertumbuhan dicapai melalui kontribusi pertumbuhan kapital sebesar 3,19–3,55 persen, kontribusi tenaga kerja sebesar 1,26–1,50 persen, dan kontribusi Total Factor Productivity (TFP) sebesar 1,85–2,45 persen. Pertumbuhan ekonomi ditingkatkan melalui (1) peningkatan kapital dengan dampak pengganda perekonomian yang besar, (2) peningkatan jumlah tenaga kerja ahli berdasarkan sektor unggulan wilayah untuk meminimalisir tingkat *mismatch*, dan (3) penguasaan dan penerapan teknologi baru terutama pada sektor industri manufaktur dan pengembangan infrastruktur konektivitas seperti transit-oriented development (TOD).

Secara kewilayahan, pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mengurangi ketimpangan wilayah antara KBI dan KTI. Pertumbuhan ekonomi KTI ditargetkan tumbuh lebih tinggi dibandingkan KBI yaitu sebesar 6,5-7,5 persen dengan menjaga momentum pertumbuhan KBI yang mencapai 5,7-6,3 persen. Akselerasi pertumbuhan KTI didorong oleh masih tingginya aktivitas hilirisasi sumber daya alam khususnya Sulawesi dan Maluku, serta optimalisasi sektor pariwisata dan pertanian di Wilayah Bali-Nusa Tenggara. Di sisi lain, wilayah Kalimantan difokuskan pada aktivasi ekosistem ekonomi IKN yang mulai beroperasi dan memperkuat *spillover effect* bagi provinsi penyangganya. Sementara itu, pertumbuhan KBI tetap difokuskan pada penguatan rantai pasok industri khususnya di wilayah Jawa dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan di wilayah Sumatera melalui percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Gambar 3. 1
Target Pertumbuhan Provinsi 2027



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2026 (diolah)

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sebagai instrumen utama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah secara terintegrasi, sebagaimana selaras dengan RPJMN 2025-2029, RKP 2027, serta kebijakan transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan inklusif, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini menempatkan keuangan daerah tidak hanya sebagai alat pembiayaan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan daya saing wilayah.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2027 menitikberatkan pada penguatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan, perbaikan kualitas belanja, pengelolaan pembiayaan yang sehat, serta reformasi tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah dituntut mampu menjaga kesinambungan fiskal dengan tetap responsif terhadap dinamika ekonomi global, nasional, dan lokal, termasuk risiko inflasi, perubahan iklim, ketahanan pangan, transformasi digital, dan kebutuhan pembangunan sumber daya manusia.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2027 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat

serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada aspek pendapatan daerah, kebijakan tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih inovatif, berkeadilan, dan berkelanjutan. implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menjadi landasan reformasi fiskal daerah melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, peningkatan efisiensi pemungutan, perluasan basis pajak, digitalisasi layanan perpajakan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan potensi ekonomi unggulan daerah, seperti pertanian modern, pariwisata, industri kreatif, perdagangan, dan hilirisasi komoditas lokal guna memperluas sumber penerimaan. Selain itu, penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi salah satu strategi penting untuk menciptakan sumber pendapatan yang lebih produktif.

Di sisi lain, transfer ke daerah dari pemerintah pusat tetap menjadi komponen utama pendapatan bagi sebagian besar daerah, terutama daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Oleh karena itu, arah kebijakan transfer tahun 2027 difokuskan pada peningkatan efektivitas, pemerataan, dan berbasis kinerja. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta berbagai insentif fiskal diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur strategis, serta pengendalian inflasi. Pengelolaan transfer ke daerah juga didorong semakin sinergis dengan prioritas nasional sehingga program pusat dan daerah dapat saling menguatkan.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2027 hingga 2028 disusun dengan pendekatan kehati-hatian, seiring dengan menurunnya transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut berdampak pada menyempitnya ruang fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk lebih selektif, terukur, dan realistis dalam menetapkan target pendapatan serta pengalokasiannya.

Pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditargetkan sebesar Rp1.198.081.372.277,00 dengan belanja daerah ditetapkan pada angka Rp1.228.081.372.277,00. Target tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, sebagai bentuk penyesuaian terhadap kapasitas fiskal riil daerah serta dinamika kebijakan fiskal nasional.

Dengan ruang fiskal yang menyempit, daerah harus memastikan arah kebijakan anggaran semakin jelas dan tepat. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan daerah diarahkan tidak semata pada peningkatan nominal penerimaan, tetapi juga pada penguatan kualitas dan kepastian

sumber-sumber pendapatan daerah. Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2027-2028 Kabupaten Sidenreng Rappang difokuskan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, diantaranya:

1. Optimalisasi pengembangan sumber daya manusia melalui pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor unggulan daerah sebagai strategi investasi berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, terutama pertanian, perdagangan, UMKM, serta potensi lokal lainnya;
3. Penguatan tata kelola keuangan daerah melalui pengelolaan yang efisien, transparan, dan berbasis mitigasi risiko untuk memastikan kebijakan pendapatan yang akuntabel serta mengurangi kebocoran dan ketergantungan pada transfer pusat.
4. Transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi sistem pendapatan daerah dan penguatan birokrasi guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemungutan pajak serta retribusi daerah;
5. Pengembangan infrastruktur dasar serta peningkatan akses dan mutu pelayanan publik yang memberikan dampak nyata bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

Untuk memperluas potensi Pajak daerah dan Retribusi daerah, beberapa langkah konkret yang diambil oleh pemda sebagai strategi pengoptimalan pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diarahkan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli daerah (PAD)

   Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, pemutakhiran basis data wajib pajak dan objek pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan penegakan regulasi secara proporsional.
2. Digitalisasi Sistem Pendapatan Daerah

   Penguatan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara non-tunai, integrasi data pendapatan dengan sistem pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring realisasi pendapatan secara berkelanjutan serta mendorong penggunaan aplikasi teknologi digital dalam pengelolaan data dan transaksi keuangan dan pengelolaan pendapatan daerah seperti implementasi sistem pembayaran elektronik untuk pajak dan retribusi daerah melalui *platform* QRIS, *virtual account*, dan dompet digital.
3. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

   Inventarisasi dan pemanfaatan aset daerah secara produktif melalui skema kerja sama yang sesuai ketentuan, didukung peningkatan kapasitas pengelola aset daerah.
4. Penguatan SDM Pengelola Pendapatan

   Peningkatan kapasitas aparatur, penyederhanaan prosedur pemungutan pendapatan, serta penguatan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan potensi kebocoran.

Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu tahun 2023-2024 meningkat sebesar Rp51,36 miliar (4,29 persen) dari Rp1.196.127.072.936,13 menjadi Rp1.247.494.491.726,80, pada tahun 2024-2025 meningkat sebesar Rp30,32 miliar (2,43 persen) dari Rp1.247.494.491.726,80 menjadi Rp1.277.819.635.854,01. Target pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2026 mengalami perubahan menjadi Rp1.099.930.637.000,00 atau menurun Rp177,88 miliar (-13,92 persen) dari realisasi tahun 2025 yang disebabkan oleh adanya penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Dalam RAPBN 2026, alokasi transfer ke daerah menurun signifikan karena sebagian anggaran dialihkan ke belanja kementerian/lembaga pusat. Ini langsung mengurangi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi sumber utama banyak APBD. TKD tahun 2026 turun menjadi sekitar Rp650 triliun dari sekitar Rp919 triliun pada tahun 2025. Kebijakan penghematan nasional atau penyesuaian belanja negara dapat menekan kapasitas fiskal pusat, sehingga ruang transfer ke daerah ikut menyusut. Hal ini berdampak besar terutama bagi daerah yang ketergantungan fiskalnya tinggi (60-90% dari transfer pusat).

3.2.2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2028

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kinerja pendapatan daerah di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan dinamika yang bervariasi, dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan arah kebijakan fiskal nasional. Di tahun 2023 hingga 2025, Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil meningkatkan realisasi pendapatan daerah, menandakan perbaikan dalam optimalisasi pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, meskipun masih bergantung pada transfer pusat, arah kebijakan pendapatan daerah mulai menunjukkan kecenderungan menuju kemandirian fiskal. Hal ini tercermin dari meningkatnya porsi PAD serta upaya untuk menggali potensi ekonomi lokal. Ke depan, tantangan seperti fluktuasi ekonomi nasional, tekanan fiskal pusat, dan dinamika politik daerah akan terus mempengaruhi realisasi maupun proyeksi pendapatan daerah. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan pendapatan, transparansi fiskal, serta inovasi pembiayaan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan fiskal di tingkat daerah.

3.2.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri dan mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan publik secara mandiri. PAD diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Meningkatkan PAD menjadi tujuan strategis pemerintah daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, PAD dapat menjadi instrumen penting dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi potensi PAD memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah. Pada tahun 2025, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp237,29 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp52,33 miliar (28,30 persen) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2024 yang sebesar Rp184,95 miliar dan realisasi penerimaan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp13,64 miliar (7,96 persen) jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 yang sebesar Rp171,31 miliar. Target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp6,21 miliar (2,62 persen) jika dibandingkan realisasi pada tahun 2025.

3.2.2.1.1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bersifat wajib bagi setiap individu atau badan usaha yang memenuhi ketentuan. Jenis-jenis pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, pemerintah dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah, memperluas cakupan layanan publik, dan memperkuat kemandirian dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pemungutan pajak yang efisien, transparan, serta kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 sebesar Rp92,73 miliar meningkat Rp41,03 miliar (79,37persen) dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2024 yang sebesar Rp51,70 miliar dan realisasi penerimaan tahun 2024 mengalami peningkatan Rp3,30 miliar (6,83 persen) jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 yang sebesar Rp48,39 miliar. Pada tahun 2026, ditargetkan menjadi sebesar Rp95,46 miliar, meningkat Rp2,72 miliar (2,94 persen) jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2025.

3.2.2.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh daerah. Jenis retribusi ini mencakup retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, yang semuanya diatur berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan dari retribusi daerah berfungsi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung pembiayaan

penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat tidak langsung, retribusi dibayarkan oleh masyarakat sebagai kompensasi atas manfaat langsung yang diterima, seperti pelayanan kebersihan, pemakaian pasar, atau izin mendirikan bangunan. Agar pemungutan retribusi efektif dan tidak membebani masyarakat, diperlukan pengelolaan yang transparan, pelayanan yang berkualitas, serta sosialisasi yang baik agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2025 sebesar Rp7,97 miliar mengalami penurunan sebesar Rp1,01 miliar (-11,26 persen) dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2024 yang sebesar Rp8,98 miliar dan realisasi penerimaan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp770,13 juta (-7,90 persen) jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 yang sebesar Rp9,75 miliar. Pada tahun 2026, ditargetkan menjadi sebesar Rp9,26 miliar, meningkat Rp1,29 miliar (16,22 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025.

3.2.2.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bentuk usaha lainnya. Pendapatan ini mencerminkan kontribusi dari aset-aset milik daerah yang dikelola secara profesional dan terpisah dari kekayaan pemerintah daerah, seperti saham, obligasi, atau bentuk investasi lainnya. Contohnya adalah dividen atau laba yang diperoleh dari BUMD yang bergerak di sektor air minum, energi, transportasi, maupun perdagangan. Optimalisasi hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan sangat bergantung pada kinerja BUMD dan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta strategi bisnis yang adaptif agar kekayaan daerah dapat dikelola secara produktif dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh positif pada tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp6,10 miliar mengalami peningkatan Rp357,87 juta (6,23 persen) dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2024 yang sebesar Rp5,74 miliar dan realisasi penerimaan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp49,17 juta (0,86 persen) jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 yang sebesar Rp5,69 miliar. Pada tahun 2026, ditargetkan menjadi sebesar Rp6,50 miliar, meningkat Rp399,66 juta (6,55 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025.

3.2.2.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan komponen PAD yang mencakup berbagai sumber pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini bersumber antara lain dari penerimaan bunga bank, keuntungan selisih kurs, pendapatan dari denda keterlambatan, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, serta jasa giro dan pendapatan lainnya yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun kontribusinya terhadap total PAD biasanya tidak sebesar komponen utama lainnya, namun lain-lain PAD yang sah tetap memegang peranan penting dalam mendukung keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan fleksibilitas fiskal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengelola sumber-sumber ini secara cermat dan transparan, guna memastikan akuntabilitas serta meningkatkan efisiensi penerimaan daerah secara keseluruhan. Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2025 sebesar Rp130,48 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp11,95 miliar (10,08 persen) dibandingkan realisasi penerimaan tahun 2024 sebesar Rp118,52 miliar dan realisasi penerimaan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp11,05 miliar (10,29 persen) jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 yang sebesar Rp107,47 miliar. Pada tahun 2026, ditargetkan menjadi sebesar Rp132,28 miliar, meningkat Rp1,79 miliar (1,38 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025.

3.2.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan salah satu sumber utama penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota. Pendapatan ini terdiri dari beberapa jenis, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta dana transfer lainnya yang bersifat spesifik maupun umum. Tujuan dari pendapatan transfer adalah untuk mendukung pemerataan pembangunan, mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, serta membantu pembiayaan penyelenggaraan layanan publik yang menjadi kewenangan daerah. Karena sifatnya yang sangat menentukan kapasitas fiskal daerah, pengelolaan pendapatan transfer harus dilakukan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan agar dana transfer yang diterima dapat digunakan secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Realisasi pendapatan transfer pada tahun 2023 sebesar Rp1,02 triliun mengalami peningkatan Rp33,57 miliar (3,28 persen) jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2024, pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp17,56 miliar (-1,66 persen) jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp1,05 triliun menjadi Rp1,03 triliun. Pada tahun 2026, ditargetkan menjadi sebesar Rp856,41 miliar, menurun Rp182,48 miliar (-17,57 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025.

3.2.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan salah satu komponen pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari sumber-sumber di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Jenis pendapatan ini mencakup antara lain penerimaan hibah, bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, serta penerimaan lainnya yang tidak termasuk dalam kategori utama pendapatan daerah, namun tetap sah menurut

peraturan perundang-undangan. Meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah relatif kecil, keberadaan lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap penting sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi agar pendapatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa menimbulkan permasalahan hukum atau administratif di kemudian hari. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari Rp1,91 miliar menjadi Rp6,07 miliar atau bertambah Rp4,15 miliar (217,17 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Pada tahun 2025 berkurang Rp4,45 miliar (-73,31 persen) dari Rp6,07 miliar menjadi Rp1,62 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2024. Pada tahun 2026, ditargetkan menjadi sebesar Rp0, menurun Rp1,62 miliar (-100 persen) jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025.

Perbandingan realisasi Pendapatan Daerah selama kurun waktu 2023-2028, target capaian tahun 2026 serta proyeksi pendapatan tahun 2027 dan 2028 dari masing-masing jenis Pendapatan Daerah secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2028 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

No.	Uraian	Realisasi			Target 2026	Proyeksi	
		2023	2024	2025		2027	2028
1	Pendapatan Daerah	1,196,127,072,936.13	1,247,494,491,726.80	1,277,819,635,854.01	1,099,930,637,000.00	1,198,081,372,277.00	1,217,046,693,056.91
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	171,316,137,750.00	184,956,715,500.80	237,293,217,416.01	243,511,889,000.00	303,795,801,277.00	326,521,474,056.91
1.1.1	Pajak Daerah	48,396,308,690.00	51,700,996,630.00	92,737,795,200.00	95,464,539,000.00	99,862,006,000.00	104,280,282,552.91
1.1.2	Retribusi Daerah	9,754,628,058.00	8,984,495,217.00	7,972,997,266.00	9,266,372,000.00	8,463,271,500.00	8,693,459,174.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,693,280,114.00	5,742,455,882.00	6,100,330,937.00	6,500,000,000.00	6,600,000,000.00	6,700,000,000.00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	107,471,920,888.00	118,528,767,771.80	130,482,094,013.01	132,280,978,000.00	188,870,523,777.00	206,847,732,330.00
	a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	12,000,000.00	1,423,550,800.00	26,500,000.00	-	-	100,000,000.00
	b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	190,075,000.00	789,160,774.59	1,136,460,419.00	100,000,000.00		100,000,000.00
	c. Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-
	d. Jasa Giro	1,704,570,011.00	2,043,001,835.00	2,141,188,838.00	849,179,000.00		1,350,000,000.00
	e. Pendapatan Bunga	56,565,319.00	23,433,109.00	268,970,408.00	-	-	-
	f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1,490,320,984.00	5,151,779,270.00	1,178,746,773.28	560,000,000.00		-

No.	Uraian	Realisasi			Target 2026	Proyeksi	
		2023	2024	2025		2027	2028
	g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	218,810,572.00	578,105,087.00	10,327,219.00	150,000,000.00		750,000,000.00
	h. Pendapatan Denda Pajak Daerah	217,504,582.00	120,805,884.00	238,218,970.00	-	-	-
	i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah	26,299,788.00	17,312,216.00	-	-	-	-
	j. Pendapatan dari Pengembalian	632,280,372.00	310,801,158.61	7,437,149,087.00	-	-	250,000,000.00
	k. Pendapatan BLUD	98,056,463,233.00	108,065,208,631.60	118,031,772,610.73	130,621,799,000.00		204,297,732,330.00
	RS NENE MALLOMO					77,500,000,000.00	80,000,000,000.00
	RS ARIFIN NUMANG					46,000,000,000.00	47,000,000,000.00
	PUSKESMAS					63,220,523,000.00	77,297,732,330.00
	l. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	5,016,506.00	12,759,688.00		-	-
	m. Lain Pendapatan Sah Lainnya	-	-	-	-	-	-
	n. Pendapatan Dana Kapitasi JKN	4,866,043,527.00	-	-	-	-	-
	o. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
	p. Hasil pengelolaan dana bergulir	987,500.00	592,500.00	-	-	-	-
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1,022,896,935,186.13**	**1,056,467,147,194.00**	**1,038,906,418,438.00**	**856,418,748,000.00**	**894,285,571,000.00**	**890,525,219,000.00**

No.	Uraian	Realisasi			Target 2026	Proyeksi	
		2023	2024	2025		2027	2028
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	931,749,773,995.00	988,330,791,026.00	951,630,602,159.00	801,418,748,000.00	839,285,571,000.00	835,525,219,000.00
	a. Dana Perimbangan	849,950,316,995.00	921,641,974,026.00	885,073,468,593.00	749,951,140,000.00	787,817,963,000.00	775,525,219,000.00
	1. Dana Transfer Umum	617,554,048,179.00	693,940,454,000.00	711,835,864,141.00	568,712,814,000.00	606,579,637,000.00	580,525,219,000.00
	a) Dana Bagi Hasil (DBH)	13,865,573,322.00	16,237,662,000.00	16,070,224,000.00	6,479,637,000.00	6,479,637,000.00	8,000,000,000.00
	b) Dana Alokasi Umum (DAU)	603,688,474,857.00	677,702,792,000.00	695,765,640,141.00	562,233,177,000.00	600,100,000,000.00	572,525,219,000.00
	2. Dana Transfer Khusus	232,396,268,816.00	227,701,520,026.00	173,237,604,452.00	181,238,326,000.00	181,238,326,000.00	195,000,000,000.00
	a) DAK Fisik	67,007,107,568.00	70,971,877,699.00	12,327,107,560.00	22,805,085,000.00	22,805,085,000.00	35,000,000,000.00
	b) DAK Non Fisik	165,389,161,248.00	156,729,642,327.00	160,910,496,892.00	158,433,241,000.00	158,433,241,000.00	160,000,000,000.00
	c) DAK Penugasan	-	-	-	-	-	-
	d) DAK Afirmasi	-	-	-	-	-	-
	b. Dana Insentif Daerah (DID)	20,900,516,000.00	5,478,445,000.00	12,647,349,000.00	-	-	-
	c. Dana Desa	60,898,941,000.00	61,210,372,000.00	53,909,784,566.00	51,467,608,000.00	51,467,608,000.00	60,000,000,000.00
1.2.2	Transfer Antar Daerah	91,147,161,191.13	68,136,356,168.00	87,275,816,279.00	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	80,388,580,691.13	63,064,400,168.00	70,391,514,279.00	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	10,758,580,500.00	5,071,956,000.00	16,884,302,000.00	-	-	-

No.	Uraian	Realisasi			Target 2026	Proyeksi	
		2023	2024	2025		2027	2028
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**1,914,000,000.00**	**6,070,629,032.00**	**1,620,000,000.00**	**-**	**-**	**-**
4.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1,794,000,000.00	1,314,000,000.00	-	-	-	-
4.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	-	-	1,500,000,000.00	-	-	-
4.3.1.5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	120,000,000.00	4,636,629,032.00	-	-	-	-

Sumber: Bapenda dan BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2026 (Diolah)

Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2025 sebesar Rp1.277.819.635.854,01 dan tahun 2026 sebesar Rp1.099.930.637.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 13,92 persen. Pendapatan Daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Pendapatan Asli Daerah terjadi peningkatan sebesar 2,62 persen. Jika dirinci maka Pajak Daerah dari tahun 2025 hingga tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 2,94 persen atau bertambah Rp2.726.743.800,00 dari Rp92.737.795.200,00 menjadi Rp95.464.539.000,00. Retribusi Daerah tahun 2025 hingga tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp1.293.374.734,00 atau sebesar 16,22 persen dari Rp7.972.997.266,00 menjadi Rp9.266.372.000,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 6,55 persen atau Rp399.669.063,00 dari Rp6.100.330.937,00 di tahun 2025 menjadi Rp6.500.000.000,00 di tahun 2026. Untuk Lain-Lain PAD yang Sah mengalami peningkatan sebesar 1,38 persen atau Rp1.798.883.986,99 dari Rp130.482.094.013,01 di tahun 2025 menjadi Rp132.280.978.000,00 di tahun 2026.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa secara nominal realisasi penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sahmengalami peningkatan dari tahun 2025 hingga tahun 2026.

Pada tahun 2027 proyeksi Pendapatan Daerah sebesar **Rp1.198.081.372.277,00** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah **Rp303.795.801.277,00**; Pendapatan Transfer **Rp894.285.571.000,00**; dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah **Rp0**.

Selain PAD, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga terus berusaha memaksimalkan pemanfaatan Pendapatan Transfer dari pusat yang diklasifikasikan sebagai Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang juga merupakan salah satu sumber-sumber Pendapatan Daerah. DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAK didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP) serta berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2023 bahwa rancangan arah kebijakan DAK memperhatikan arah kebijakan DAK dalam rencana pembangunan jangka menengah serta kerangka pendanaan jangka menengah berdasarkan perencanaan DAK lintas tahun. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan dan atau kebijakan tertentu dengan tujuan 1) mencapai prioritas nasional; 2) mempercepat pembangunan daerah; 3) mengurangi kesenjangan publik; 4) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan 5) mendukung operasionalisasi layanan publik.

Pemenuhan SPM yang dahulu diskemakan dengan DAK Reguler untuk kegiatan rutin idealnya dipenuhi melalui DAU dan penggunaannya disesuaikan dengan kinerja daerah dalam pencapaian SPM. DAK Fisik difokuskan berbasis tematik sedangkan DAK Reguler dilebur dalam formulasi DAU agar dapat mem-*boosting* pencapaian pembangunan di daerah. Tujuan dari pengaturan dan re-desain DAK Reguler menjadi DAU yang ditentukan penggunaannya adalah agar pola belanja lebih fokus pada layanan publik, pengurangan ketimpangan fiskal antar daerah dan percepatan ekualisasi layanan publik antar daerah melalui pengutamaan penggunaan DAU sesuai kinerja daerah, sedangkan DAK Tematik akan menitikberatkan pada peningkatan sinergi dan efisiensi belanja pusat, serta terciptanya keselarasan *output-outcome* antara pusat dan daerah. Di tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp181.238.326.000,00 yang terbagi atas DAK Fisik sebesar Rp22.805.085.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp158.433.241.000,00. DAK Fisik terdiri dari Bidang Kesehatan Rp3.840.346.000,00; Bidang Sanitasi Rp3.369.179.000,00; dan Bidang Konektivitas Rp15.595.560.000,00. Untuk DAK Non Fisik terdiri dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Rp47.937.400.000,00; Tunjangan Guru ASN Daerah Rp90.951.114.000,00; Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp16.854.352.000,00 yang terdiri dari BOK Dinas Rp7.632.434.000,00 dan BOK Puskesmas Rp9.221.918.000,00; Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Rp398.545.000,00; dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Rp2.291.830.000,00.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dinamika kebijakan nasional, serta kebutuhan riil masyarakat. Kebijakan belanja daerah tahun 2027 juga disusun dalam rangka mendukung sinkronisasi pembangunan daerah dengan tema RKP Nasional Tahun 2027 yaitu **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"** yang menekankan penguatan produktivitas ekonomi, kualitas pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah.

Secara umum, arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 difokuskan pada prinsip *money follows program priority*, yaitu pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah diarahkan agar lebih produktif, tepat sasaran, dan memberikan *multiplier effects* terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan pangan daerah.

Dalam rangka menjaga kesehatan fiskal daerah, kebijakan belanja tahun 2027 juga diarahkan pada penguatan efisiensi belanja melalui pengurangan belanja yang kurang prioritas, pembatasan belanja seremonial, perjalanan dinas, serta kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan dengan mengedepankan *outcome* dan manfaat langsung kepada masyarakat. Kebijakan efisiensi belanja ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan belanja berbasis produktivitas dan investasi cerdas.

Arah kebijakan belanja operasi tahun 2027 diprioritaskan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Belanja pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, pemerataan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan masyarakat. Sementara itu, belanja kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan, penurunan stunting, penguatan fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan, serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung penguatan sektor unggulan Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan sebagai basis utama perekonomian daerah. Dukungan anggaran difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian, irigasi, jalan produksi, pengembangan teknologi pertanian, peningkatan produktivitas petani dan peternak, serta penguatan hilirisasi produk pertanian guna meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Pada bidang infrastruktur, arah kebijakan belanja tahun 2027 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung konektivitas wilayah, pengembangan kawasan strategis, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, sanitasi, air bersih, perumahan dan permukiman, serta infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan ini juga selaras dengan ketentuan *mandatory spending* infrastruktur pelayanan publik yang harus dipenuhi pemerintah secara bertahap.

Belanja daerah tahun 2027 juga diarahkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, serta optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penggunaan anggaran didorong semakin transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga akan melakukan pengendalian belanja pegawai secara bertahap agar tetap

proporsional terhadap total APBD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang bersumber dari transfer pusat.

Selain itu, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga tetap dialokasikan secara memadai untuk mendukung perlindungan sosial masyarakat, penanganan keadaan darurat, pengendalian dampak inflasi, bencana alam, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah. Pengalokasian belanja dilakukan secara adaptif terhadap berbagai dinamika ekonomi nasional maupun global yang berpotensi mempengaruhi kondisi fiskal daerah.

Dengan arah kebijakan tersebut, belanja daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta mewujudkan pembangunan daerah yang maju, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3.2.3.1. Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. **Belanja Pegawai**

   Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2. **Belanja Barang dan Jasa**

   Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

3. **Belanja Bunga**

   Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

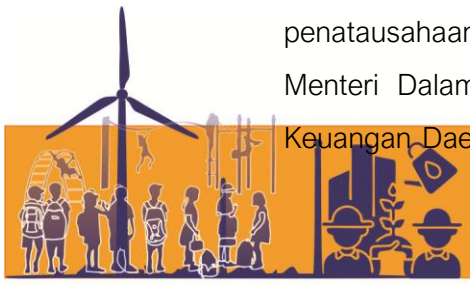
5. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan salah satu jenis belanja daerah yang memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai risiko sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah di Indonesia, belanja bantuan sosial menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan sosial, pemerataan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, serta penanganan kondisi darurat dan kerentanan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan perlindungan masyarakat. Dalam pelaksanaan urusan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan belanja daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang mengalami kondisi rentan atau terdampak risiko sosial.

Selanjutnya, pengertian belanja bantuan sosial secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.” Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan pemerintah daerah secara selektif kepada pihak tertentu yang memenuhi persyaratan dan mengalami kondisi kerentanan sosial. Bantuan sosial bukan merupakan bantuan yang diberikan secara tetap atau rutin kepada seluruh masyarakat, melainkan diberikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi tertentu sesuai kemampuan keuangan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, penatausahaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi bantuan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah harus



menetapkan penerima bantuan sosial secara jelas, mencantumkan besaran bantuan, tujuan penggunaan, serta mekanisme penyaluran agar pelaksanaan bantuan sosial dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun keuangan.

3.2.3.2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi:

1. **Belanja Modal Tanah**

   Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

2. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

   Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan kondisi siap pakai.

3. **Belanja Modal Bangunan dan Gedung**

   Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. **Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

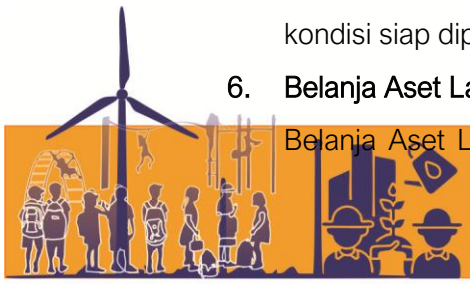
   Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. **Belanja Aset Tetap Lainnya**

   Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap 1 sampai dengan 4, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. **Belanja Aset Lainnya**

   Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan untuk menganggarkan aset tetap



yang tidak memenuhi kriteria aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.3.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan salah satu komponen belanja yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan pengeluaran yang sifatnya mendesak, darurat, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja ini memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat ketika terjadi kondisi luar biasa yang membutuhkan penanganan segera oleh pemerintah daerah.

Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, pengaturan mengenai belanja tidak terduga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, keadaan darurat, keadaan mendesak, serta kebutuhan lain yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

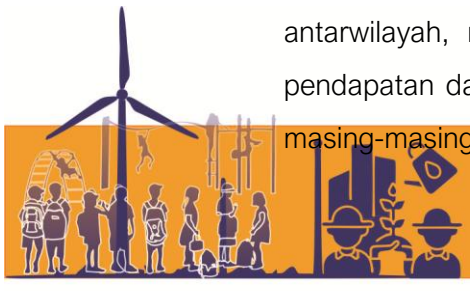
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa penggunaan belanja tidak terduga harus dilakukan secara selektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan anggaran belanja tidak terduga harus didukung dengan penetapan status keadaan darurat atau keadaan mendesak oleh kepala daerah sesuaiketentuan yang berlaku.

3.2.3.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Belanja Transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

1. Belanja Bagi Hasil

   Belanja bagi hasil merupakan salah satu jenis belanja transfer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pemerintah desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja ini bertujuan untuk mendukung pemerataan kemampuan keuangan antarwilayah, meningkatkan sinergi pembangunan daerah, serta menjamin pembagian pendapatan daerah secara adil dan proporsional sesuai kewenangan dan potensi daerah masing-masing.



Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, pengaturan mengenai belanja bagi hasil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja bagi hasil merupakan dana yang dianggarkan pemerintah daerah untuk dibagihasilkan kepada pemerintah daerah lain dan/atau pemerintah desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, ketentuan mengenai pembagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan sebagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sebagi bentuk dukungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

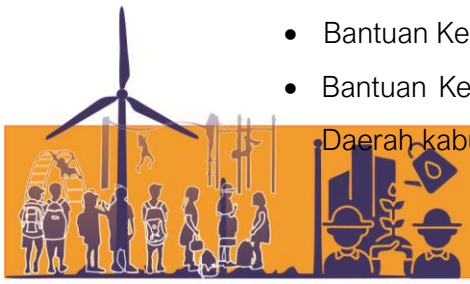
2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Pengalokasian Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan daerah. Bantuan Keuangan bersifat stimulan, yang berdasarkan usulan/proposal yang diterima oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula yaitu variabel pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan Keuangan terdiri atas:

- Bantuan Keuangan antar daerah provinsi;
- Bantuan Keuangan antar Daerah kabupaten/kota;
- Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;



- Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/ kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Secara rinci proyeksi Belanja Daerah sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.6
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2028 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Uraian	Realisasi			Target	Proyeksi	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Belanja Daerah	**1,151,123,590,855.64**	**1,266,456,132,250.82**	**1,261,343,055,331.00**	**1,119,930,637,000.00**	**1,228,081,372,277.00**	**1,217,834,193,056.91**
Belanja Operasi	**838,585,410,563.64**	**957,877,210,361.96**	**1,003,761,359,326.00**	**904,616,400,000.00**	**1,030,986,108,683.00**	**996,367,735,000.00**
Belanja Pegawai	472,483,506,773.00	540,153,881,905.00	588,775,646,498.00	545,233,324,576.00	578,081,253,600.00	565,763,380,000.00
Belanja Barang dan Jasa	335,504,801,308.64	346,989,604,241.96	373,668,745,613.00	346,626,239,924.00	452,004,855,083.00	429,954,355,000.00
Belanja Bunga	478,773,090.00	288,275,997.00	123,096,777.00	-	-	-
Belanja Hibah	29,866,376,892.00	70,267,257,078.00	41,116,370,438.00	12,750,835,500.00	900,000,000.00	650,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial	251,952,500.00	178,191,140.00	77,500,000.00	6,000,000.00	-	-
Belanja Modal	**195,388,897,620.00**	**172,087,450,001.86**	**132,931,295,288.00**	**98,517,337,000.00**	**64,137,162,594.00**	**97,295,041,056.91**
Belanja Tanah	-	541,312,000.00	0.00	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	28,753,603,970.00	43,971,274,302.00	38,823,380,587.00	19,651,461,900.00		-
Belanja Bangunan dan Gedung	82,185,556,904.00	54,199,987,160.86	27,514,283,832.00	11,762,911,000.00		18,109,041,056.91
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84,109,936,746.00	63,411,175,975.00	61,997,636,369.00	63,481,449,000.00	64,137,162,594.00	79,186,000,000.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	339,800,000.00	9,963,700,564.00	4,595,994,500.00	3,621,515,100.00	-	-
Belanja Tidak Terduga	**740,788,040.00**	**2,058,430,500.00**	**1,698,609,292.00**	**5,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**
Belanja Tidak Terduga	740,788,040.00	2,058,430,500.00	1,698,609,292.00	5,000,000,000.00	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
Belanja Transfer	**116,408,494,632.00**	**134,433,041,387.00**	**122,951,791,425.00**	**111,796,900,000.00**	**122,958,101,000.00**	**119,171,417,000.00**
Belanja Bagi Hasil	0	-	0.00	3,473,092,000.00	10,832,529,000.00	10,832,527,000.00
Belanja Bantuan Keuangan	116,408,494,632.00	134,433,041,387.00	122,951,791,425.00	108,323,808,000.00	112,125,572,000.00	108,338,890,000.00

Sumber: BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2026 (Diolah)

Sebagaimana dengan Kebijakan Keuangan Daerah, maka Belanja Daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar **Rp1.228.081.372.277,00** yang bersumber dari Belanja Operasi sebesar **Rp1.030.986.108.683,00**; Belanja Modal sebesar **Rp64.137.162.594,00**; Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp10.000.000.000,00**; serta Belanja Transfer sebesar **Rp122.958.101.000,00**. Belanja Daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan daerah tahun 2027.

Dalam penyusunan kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2027, pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang perlu memperhatikan berbagai aspek strategis, regulatif, fiskal, dan prioritas pembangunan daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kebijakan belanja daerah harus disusun secara sinkron dengan arah pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta kebutuhan dan karakteristik pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah yang berbasis pertanian, peternakan, dan perdagangan.

Salah satu hal utama yang perlu diperhatikan adalah penerapan prinsip *money follows program priority*, yaitu pengalokasian anggaran berdasarkan program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Belanja daerah tahun 2027 harus lebih diarahkan pada program yang produktif, berkualitas, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dibandingkan belanja yang bersifat administratif dan kurang memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga perlu memperhatikan sinkronisasi kebijakan belanja daerah dengan tema pembangunan nasional tahun 2027 yang diarahkan pada penguatan produktivitas, daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berkualitas, pengurangan kemiskinan, pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan penguatan investasi daerah. Oleh karena itu, alokasi belanja perlu difokuskan pada sektor-sektor strategis yang menjadi kekuatan utama daerah seperti pertanian, peternakan, UMKM, perdagangan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam aspek pengelolaan fiskal, pemerintah daerah perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah secara realistis agar belanja daerah tetap terjaga keberlanjutannya. Penyusunan belanja harus disesuaikan dengan proyeksi pendapatan daerah yang rasional dan mempertimbangkan potensi risiko fiskal akibat ketidakpastian ekonomi nasional maupun global. Dengan demikian, kebijakan belanja tidak menimbulkan defisit yang berlebihan dan tetap menjaga stabilitas APBD.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memperhatikan efisiensi belanja daerah sebagaimana arahan kebijakan nasional mengenai pengendalian belanja yang kurang produktif. Belanja perjalanan dinas, belanja rapat, belanja seremonial, dan pengeluaran

administratif lainnya perlu dikendalikan secara proporsional agar ruang fiskal daerah dapat lebih difokuskan pada belanja pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah tahun 2027 juga harus memperhatikan pemenuhan *mandatory spending sesuai* dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain alokasi belanja fungsi pendidikan minimal 20 persen dari APBD, alokasi belanja kesehatan minimal 10 persen di luar gaji, pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik, serta pengendalian belanja pegawai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari total belanja APBD secara bertahap.

Dalam mendukung pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memprioritaskan belanja yang mendukung ketahanan pangan dan penguatan sektor pertanian sebagai sektor unggulan daerah. Belanja diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan jalan usaha tani dan jalan produksi, pengembangan mekanisasi pertanian, peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan, penguatan cadangan pangan daerah, serta pengembangan hilirisasi produk pertanian dan peternakan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Pada sektor infrastruktur, kebijakan belanja perlu diarahkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Prioritas pembangunan infrastruktur meliputi peningkatan jalan dan jembatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pengelolaan drainase, penataan kawasan permukiman, pembangunan fasilitas pelayanan publik, serta infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah perlu memastikan belanja diarahkan pada peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat. Pada sektor pendidikan, prioritas diberikan pada pemerataan akses pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan masyarakat. Sedangkan pada sektor kesehatan, belanja diarahkan pada penguatan fasilitas kesehatan, penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan penguatan perlindungan sosial melalui pegalokasian belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga secara memadai. Hal ini penting untuk mengantisipasi risiko sosial, dampak inflasi, bencana alam, kerawanan pangan, dan kondisi darurat lainnya yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pengelolaan bantuan sosial harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan berbasis data yang valid.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kebijakan belanja daerah tahun 2027 perlu mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kapasitas aparatur sipil negara,

penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga perlu memperhatikan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah melalui pendekatan berbasis kinerja, berbasis hasil, berbasis data, dan berbasis kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pemborosan, penyimpangan anggaran, dan rendahnya kualitas belanja daerah.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, kebijakan belanja daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing ekonomi daerah, menjaga stabilitas fiskal daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 disusun sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk menjaga kesinambungan fiskal, mendukung stabilitas APBD, meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila pendapatan daerah tidak mampu sepenuhnya membiayai kebutuhan belanja daerah, sekaligus mengelola potensi surplus anggaran secara optimal guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembiayaan daerah memiliki peranan penting sebagai instrumen fiskal untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mengelola kebijakan pembiayaan daerah secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kondisi ekonomi makro, kapasitas fiskal daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah meliputi seluruh transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam konteks tersebut, arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 diarahkan pada pengelolaan pembiayaan yang sehat, berkelanjutan, dan tidak membebani kapasitas fiskal daerah di masa yang akan datang.

Dari sisi penerimaan pembiayaan daerah, kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya secara

selektif dan terukur untuk mendukung pembiayaan program prioritas daerah. Pemanfaatan SiLPA harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan belanja daerah, kesinambungan fiskal, serta efisiensi penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan ketergantungan terhadap pembiayaan dari sisa anggaran tahun sebelumnya.

Selain pemanfaatan SiLPA, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga perlu mendorong peningkatan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pengembalian pemberian pinjaman daerah, apabila tersedia, serta mempertimbangkan alternatif pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kebijakan pembiayaan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal dan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam hal kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang strategis dan produktif, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kebijakan pinjaman daerah secara sangat selektif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta regulasi terkait pengelolaan pinjaman daerah. Pinjaman daerah hanya dapat dilakukan untuk membiayai kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat serta mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap rencana pinjaman daerah harus mempertimbangkan kemampuan pengembalian pinjaman, batas rasio utang daerah, dan risiko fiskal daerah secara menyeluruh.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah, arah kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada penyediaan penyertaan modal daerah yang selektif dan produktif kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sehat dan memiliki prospek usaha yang baik. Penyertaan modal daerah harus didasarkan pada hasil analisis kelayakan usaha, kebutuhan pelayanan publik, dan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan penyertaan modal juga harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah agar tidak mengurangi kapasitas pendanaan program prioritas masyarakat.

Selain itu, pengeluaran pembiayaan daerah juga diarahkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok utang daerah apabila terdapat kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pengelolaan kewajiban pembayaran utang dilakukan tepat waktu guna menjaga kredibilitas dan kesehatan fiskal daerah.

Dalam rangka menjaga stabilitas APBD Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu menerapkan prinsip pembiayaan yang prudent atau hati-hati melalui pengendalian defisit anggaran daerah, optimalisasi pemanfaatan SiLPA, peningkatan efisiensi belanja daerah, penguatan Pendapatan Asli Daerah, serta pengendalian risiko fiskal daerah. Kebijakan pembiayaan daerah juga harus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, terutama pada sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, pertanian dan peternakan,

pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan UMKM, dan penguatan pelayanan publik.

Dengan demikian, penggunaan pembiayaan daerah tidak hanya berfungsi menutup defisit anggaran, tetapi juga menjadi instrumen percepatan pembangunan daerah yang produktif dan berkelanjutan. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu memperhatikan sinkronisasi kebijakan pembiayaan daerah dengan arah kebijakan fiskal nasional dan kebijakan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan program pembangunan daerah di tengah dinamika ekonomi nasional dan global yang dapat memengaruhi kapasitas fiskal daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan pembiayaan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, efektif, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan asas kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Setiap penggunaan pembiayaan daerah harus didukung dengan perencanaan yang matang, analisis risiko fiskal, dan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan pada masa mendatang.

Dengan arah kebijakan tersebut, pembiayaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 diharapkan mampu mendukung stabilitas APBD, memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan efektivitas pembangunan daerah, menjaga kesinambungan pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Selengkapnya realisasi, target dan proyeksi pembiayaan tahun 2023-2028 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.7
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023-2028

No	Uraian	Realisasi			Target	Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Surplus/defisit	**45,003,482,080.49**	**(18,961,640,524.02)**	**16,476,580,523.01**	**(20,000,000,000.00)**	**(30,000,000,000.00)**	**(787,500,000.00)**
3	**Pembiayaan**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**24,477,102,422.00**	**67,248,687,155.49**	**46,012,960,133.47**	**20,000,000,000.00**	**30,000,000,000.00**	**787,500,000.00**
3.1.1	Penggunaan SiLPA	24,477,102,422.00	67,248,687,155.49	46,012,960,133.47	20,000,000,000.00	30,000,000,000.00	787,500,000.00
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2,250,000,422.00**	**2,274,086,498.00**	**2,274,086,498.00**	**-**	**-**	**-**
3.2.1	Penyertaan Modal						
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok	2,250,000,422.00	2,274,086,498.00	2,274,086,498.00	-	-	-
	Pembiayaan Netto	**22,227,102,000.00**	**64,974,600,657.49**	**43,738,873,635.47**	**20,000,000,000.00**	**30,000,000,000.00**	**787,500,000.00**
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	67,230,584,080.49	46,012,960,133.47	60,215,454,158.48	-	-	-

Sumber: BKAD Kab. Sidenreng Rappang, 2026 (Diolah)



3.2.5. Pendanaan Pembangunan Lainnya

Pendanaan selain dari APBD dimaksudkan untuk menambah kapasitas pendanaan bagi daerah. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang diharapkan dimanfaatkan sebagai alternatif pembangunan, antara lain:

3.2.5.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dalam kerangka pembangunan nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran sentral sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Namun, seiring meningkatnya kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, serta tuntutan percepatan pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, APBN tidak hanya difokuskan pada belanja langsung, tetapi juga digunakan untuk mendorong berbagai skema pendanaan pembangunan lainnya.

Pendanaan pembangunan lainnya dari APBN mengacu pada strategi pembiayaan alternatif yang bersumber atau didukung oleh APBN, namun tidak dilakukan melalui belanja langsung (*direct spending*), melainkan melalui mekanisme yang lebih inovatif dan kolaboratif. Skema-skema ini digunakan untuk memperkuat peran APBN sebagai katalis pembangunan serta untuk mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah.

3.2.5.2. Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Dalam upaya mendorong pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, peran sektor swasta, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta, menjadi sangat penting. Salah satu bentuk kontribusi nyata sektor usaha terhadap pembangunan adalah melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Melalui CSR, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari operasional bisnisnya.

1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

   PKBL adalah program CSR yang khusus dilaksanakan oleh BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN. PKBL bertujuan untuk:

   - Meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
   - Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar melalui kegiatan bina lingkungan.

   a. Program Kemitraan

      Program Kemitraan dilakukan dengan memberikan pinjaman lunak atau pembinaan kepada UMKM agar dapat berkembang, mandiri, dan naik kelas. Bentuk bantuan ini dapat berupa:

      - Pembiayaan usaha kecil

- Pelatihan dan pendampingan
- Pemberian fasilitas produksi

Tujuannya adalah menciptakan kemandirian ekonomi di masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di sektor riil.

b. Program Bina Lingkungan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional BUMN. Kegiatannya meliputi:

- Bantuan pendidikan (beasiswa, fasilitas sekolah)
- Bantuan kesehatan (pengobatan gratis, pembangunan fasilitas kesehatan)
- Bantuan untuk sarana dan prasarana umum
- Bantuan dalam penanggulangan bencana
- Pelestarian lingkungan

Melalui Program Bina Lingkungan, BUMN turut serta dalam pembangunan sosial, budaya, dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

TJSL merupakan pengembangan konsep CSR yang lebih komprehensif, mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana perusahaan terutama yang menjalankan kegiatan di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan TJSL.

TJSL mencakup 3 (tiga) pilar utama:

- Sosial: Pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.
- Lingkungan: Pengelolaan dampak lingkungan, efisiensi energi, konservasi alam, dan pengurangan emisi.
- Ekonomi: Pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.

TJSL dilaksanakan tidak hanya oleh BUMN, tetapi juga oleh perusahaan swasta sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan sekitar. TJSL menjadi bagian dan strategi bisnis yang terintegrasi, bukan sekadar program filantropi.

3.2.5.3. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang sebelumnya dikenal sebagai *Public Private Partnership* (PPP), adalah suatu bentuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanan publik untuk kepentingan umum. Skema KPBU bertujuan untuk mengatasi keterbatasan pendanaan pemerintah, mempercepat penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik.

KPBU dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, pembagian risiko yang adil, serta tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan badan usaha. Dalam pelaksanaannya, KPBU dapat melibatkan pendanaan swasta untuk membangun, mengelola, dan memelihara infrastruktur publik seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, rumah sakit, sistem air minum, dan sektor lainnya.

Pemerintah, dalam hal ini dapat berupa kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, bertindak sebagai penanggung jawab proyek dan bertugas menyusun perencanaan, pemilihan badan usaha mitra, serta melakukan pengawasan. Sementara itu, badan usaha sebagai mitra swasta memberikan kontribusi berupa pendanaan, keahlian teknis, dan manajemen operasional.

Skema KPBU memberikan sejumlah keuntungan, antara lain:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara secara langsung.
2. Transfer risiko kepada pihak swasta, terutama pada fase konstruksi dan operasional.
3. Peningkatan kualitas layanan publik melalui inovasi dan efisiensi dari pihak swasta.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan konektivitas.

Adapun jenis-jenis KPBU yang umum digunakan di Indonesia meliputi:

1. *Build Operate Transfer* (BOT)
2. *Build Own Operate Transfer* (BOOT)
3. *Build Transfer Operate* (BTO)
4. *Design Build Finance Operate Maintain* (DBFOM)
5. *Operation and Maintenance* (O&M)

Untuk mendukung pelaksanaan KPBU, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan, seperti Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga menyediakan skema dukungan seperti *Viability Gap Fund* (VGF) dan jaminan pemerintah untuk menarik minat investor.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan infrastruktur nasional dan keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah, KPBU menjadi alternatif yang strategis dan berkelanjutan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, KPBU tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga wadah kolaborasi antara sektor publik dan swasta demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.2.5.4. Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan utang daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggaran, membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, serta mendukung kegiatan strategis daerah yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi

masyarakat. Penggunaan utang daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem keuangan daerah di Indonesia, pengaturan mengenai utang daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah sebagai bagian dari pembiayaan daerah untuk membiayai urusan pemerintahan daerah dan/atau pembangunan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah menjadi salah satu sumber penerimaan pembiayaan daerah yang digunakan terutama ketika pendapatan daerah belum mampu sepenuhnya membiayai kebutuhan pembangunan daerah yang bersifat prioritas dan produktif.

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaan utang daerah hanya dapat dilakukan apabila jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi batas maksimal pinjaman daerah, daerah memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, memenuhi persyaratan rasio kemampuan keuangan daerah, dan tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman kepada pemerintah pusat.

Pemerintah daerah juga wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal dalam melakukan pembiayaan utang daerah agar tidak menimbulkan risiko fiskal yang dapat membebani APBD pada masa mendatang. Oleh karena itu, pinjaman daerah tidak diperkenankan digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat konsumtif atau pengeluaran rutin yang tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Dalam praktiknya, pembiayaan utang daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Lembaga keuangan bank, Lembaga keuangan bukan bank, Masyarakat melalui penerbitan obligasi daerah, dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pinjaman daerah terdiri atas pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas daerah dalam satu tahun anggaran dan wajib dilunasi dalam tahun anggaran berjalan. Pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai penyediaan layanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan secara langsung, sedangkan pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan daerah dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan pinjaman daerah, pemerintah daerah wajib memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk jenis pinjaman tertentu, pemerintah daerah juga memerlukan pertimbangan dan persetujuan pemerintah pusat, khususnya apabila pinjaman tersebut bersumber dari luar negeri atau berkaitan dengan kebijakan fiskal nasional. Setiap pinjaman daerah wajib dicatat dalam APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah serta diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan atau beban fiskal yang berlebihan.

Dalam konteks pembangunan daerah, pembiayaan utang dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas wilayah, memperluas pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Namun demikian, penggunaan utang daerah harus dilakukan secara selektif dan terukur agar tidak menimbulkan ketergantungan fiskal maupun membebani generasi mendatang.

Dengan demikian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaan utang daerah merupakan bagian dari pembiayaan daerah yang dilakukan melalui pinjaman daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal, kemampuan keuangan daerah, akuntabilitas, serta keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.6. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan merupakan bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah. Mendasarkan pada proyeksi Pendapatan pada tabel sebelumnya, Kebijakan Kemampuan Keuangan Daerah diprioritaskan pada pemenuhan Belanja Operasi dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Operasi antara lain terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Hibah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari rencana penyertaan modal pemerintah dan pembayaran pokok utang.

Tabel 3.8
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026-2028

No	Uraian	Realisasi 2025	Target 2026	Proyeksi	
				2027	2028
1	Pendapatan	1,277,819,635,854.01	1,099,930,637,000.00	1,198,081,372,277.00	1,217,046,693,056.91
2	Pencairan Dana Cadangan				
3	SiLPA atau Penerimaan Daerah lainnya	46,012,960,133.47	20,000,000,000.00	30,000,000,000.00	-

No	Uraian	Realisasi 2025	Target 2026	Proyeksi	
				2027	2028
	Total Penerimaan	**1,323,832,595,987.48**	**1,119,930,637,000.00**	**1,228,081,372,277.00**	**1,217,046,693,056.91**
	Dikurangi:				
4	Belanja Pegawai + BTT+ Belanja Transfer	713,426,047,215.00	662,030,224,576.00	711,039,354,600.00	689,934,797,000.00
5	Pengeluaran pembiayaan	2,274,086,498.00	-	-	-
	Kapasitas Riil kemampuan Keuangan	**608,132,462,274.48**	**457,900,412,424.00**	**517,042,017,677.00**	**527,111,896,056.91**

Sumber: BKAD Kabupaten Sidenreng Rappang, 2026 (Diolah)

Selanjutnya perhitungan kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas, yaitu:

Prioritas Pertama, untuk membiayai Belanja Wajib yang ketentuannya diatur di dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Penyediaan anggaran Belanja Pendidikan yang tercantum pada Rekapitulasi Belanja Pemerintah Daerah Untuk *Mandatory Spending* untuk belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
b. Alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.
c. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Penyediaan anggaran BelanjaPegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, TunjanganKhusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus berupaya secara bertahap dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Pegawai.
d. Alokasi Anggaran Belanja Wajib Yang Didanai dari Hasil Penerimaan Pajak Yang Telah Ditentukan Penggunaannya, antara lain:
    - Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Penyediaananggaran atas Hasil Penerimaan PKB, wajib dianggarkan dan dialokasikanpalingsedikit10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatanmodadansaranatransportasiumum. Selanjutnya, PemerintahDaerah Kabupaten/Kota agar konsisten dalam mengalokasikan paling sedikit 10% terhadap hasilpenerimaan PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB yang mengalami perubahan sebagai akibat pemberian

dan/atau pengurangan dasar pengenaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB;

- Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Pajak Rokok Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok dari total pendapatan bagi hasil pajak rokok dalam Rancangan Peraturan Daerah wajib dianggarkan dan dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untukmendanaipelayanankesehatanuntukmasyarakat dan penegakan hukum. Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untukmasyarakat oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada petunjukteknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Selain itu, Pajak Rokok digunakan untuk pendanaan program JKN sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluhpersen) dari realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak Kabupaten/Kota dan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN,PemerintahDaerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan untuk digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta PBIJaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran dan tunggakan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju UHC, selain itu dapat digunakan untuk penganggaran bantuan iuran PBPU danBPyang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yangmendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas RawatInap Standar/RuangPerawatan Kelas III dan tunggakannya serta kontribusi peserta PBI. Penggunaan PajakRokok untuk penegakan hukum digunakan untuk minimal berupa Sosialisasi ketentuandi bidang Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Operasi pemberantasan rokok ilegal, diprioritaskan apabila DanaBagiHasilCukaiHasilTembakau(DBH-CHT)tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

Sedangkan Belanja Mengikat (*Mandatory Expenditure*), digunakan Belanja DAK BOS, Belanja Operasional Kantor, Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD), pemenuhan penerapan pelayanan dasar berupa implementasi urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembinaan dan pengawasan APIP, peningkatan SDM berupa Pendidikan dan Pelatihan, kegiatan instruksional dan untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan lainnya seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

Prioritas Kedua, untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Prioritas Ketiga, untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.

Tabel 3.9
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026-2028

No.	Uraian	Target APBD 2026 APBD Pokok (Rp)	Proyeksi	
			2027	2028
			(Rp)	(Rp)
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		457,900,412,424.00	517,042,017,677.00	527,111,896,056.91
1	Prioritas I	206,055,185,590.80	232,668,907,954.65	237,200,353,225.61
2	Prioritas II	137,370,123,727.20	155,112,605,303.10	158,133,568,817.07
3	Prioritas III	114,475,103,106.00	129,260,504,419.25	131,777,974,014.23

Sumber: BKAD dan Bapperida Kab. Sidenreng Rappang, 2026 (Diolah)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027

RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029. Sebagai tahun ketiga dalam siklus RPJMD, RKPD Tahun 2027 menjadi momentum krusial untuk memperkuat akselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui program dan kegiatan yang terukur, terintegrasi, serta responsif terhadap dinamika pembangunan lokal, regional, dan nasional. Posisi RKPD 2027 berada dalam rangkaian strategis pelaksanaan RPJMD 2025–2029 yang telah ditetapkan sebagai komitmen pembangunan lima tahun Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Tahun 2027 menjadi tahun konsolidasi dan percepatan pencapaian target RPJMD, sekaligus menjadi tahun evaluasi kritis untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, dan kebutuhan penyesuaian kebijakan guna memastikan target akhir RPJMD dapat tercapai secara optimal pada tahun 2029-2030.

RKPD 2027 tidak hanya berfungsi sebagai panduan alokasi anggaran melalui APBD, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat sinergi antara program prioritas daerah dengan agenda pembangunan nasional melalui sinkronisasi dengan RPJMN 2025–2029 yang berlandaskan Asta Cita sebagai arah kebijakan pembangunan nasional periode 2025–2029. Sinkronisasi RKPD 2027 dengan delapan misi Asta Cita nasional menjadi prasyarat utama dalam memastikan keselarasan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional. Dengan demikian, prioritas dan target pembangunan daerah tahun 2027 dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan lokal masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dalam asta cita melalui pelaksanaan 17 program prioritas nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2025–2029.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dengan menggunakan kerangka THIS (*Teknokratik, Holistik, Integratif, Spasial*), yang memastikan setiap program dan kegiatan dirumuskan secara berbasis data, lintas sektor, terpadu antar tingkat pemerintahan, serta memperhatikan dimensi kewilayahan. Proses perencanaan ini juga mengintegrasikan pendekatan *bottom-up* dan *top-down* secara sinergis, di mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dijaring melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten menjadi fondasi utama, sekaligus diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dari tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, penyusunan RKPD 2027 menggabungkan tiga pendekatan perencanaan secara bersamaan, yaitu pendekatan *politik* yang mencerminkan komitmen kepala daerah terpilih setara tertuang dalam visi misi

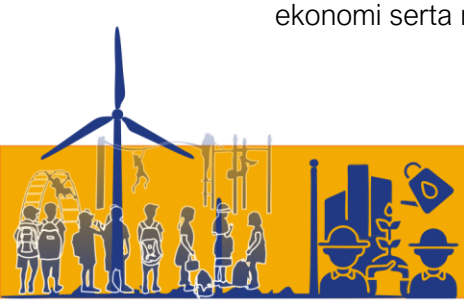
RPJMD, pendekatan *teknokratik* yang mengedepankan analisis rasional berdasarkan data kinerja dan kapasitas fiskal daerah, serta pendekatan *partisipatif* yang membuka ruang keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan mulai dari masyarakat, dunia usaha, afiliasi, hingga organisasi sipil dalam proses perutusan prioritas dan target pembangunan daerah tahun 2027.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 disusun untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah Terpilih yang ternuat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 yaitu **"Sidenreng Rappang MAJU dan SEJAHTERA"** yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029. RKPD 2027 menitikberatkan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui pendekatan yang inklusif dan terintegrasi. Visi tersebut memuat dua pokok gagasan utama, yaitu **Maju** yang dimaknai sebagai pengembangan wilayah melalui transformasi ekonomi berbasis agrobisnis dan agroindustri, penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta reformasi tata kelola pemerintahan; dan **Sejahtera** yang dimaknai sebagai peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh melalui terpenuhinya kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, penurunan angka kemiskinan, serta terciptanya rasa aman dan berkeadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai visi RPJMD 2025-2029, maka ditetapkan 8 (delapan) MISI strategis sebagai landasan operasional pembangunan daerah, sebagai berikut:

1) Membangun struktur perekonomian daerah yang kuat melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dan perlindungan sosial yang adaptif;
3) Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang inklusif untuk mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua;
4) Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;
5) Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradat dan religius;
6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital;
7) Mengembangkan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



Gambar 4.1
Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber data: Tim Penyusun RKPD Tahun 2027

Ketujuh misi tersebut selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 yang memposisikan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Maju dan Berkelanjutan, sekaligus terintegrasi dengan arah kebijakan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.

Dalam konteks penguatan struktur perekonomian daerah, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki strategi sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dikenal secara konsisten sebagai penghasil padi dalam skala besar, serta menyandang predikat sebagai produsen telur terbesar di kawasan Indonesia Timur. Potensi ini menjadikan sektor pertanian, peternakan, dan agrobisnis sebagai tumpuan utama perekonomian daerah, sekaligus menjadi modal dasar dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Keunggulan lokal tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong transformasi dari sistem pertanian tradisional menuju agrobisnis dan agroindustri modern yang berdaya saing.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2027 dirumuskan sebagai kelanjutan dan penajaman dari tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 pada tahun ketiga pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, dinamika permasalahan dan isu-isu strategis daerah, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Perumusan tujuan dan sasaran ini diarahkan untuk keinginan tercapainya pembangunan menuju terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang yang Maju dan Sejahtera pada akhir periode RPJMD Tahun 2029.

Tujuan dan sasaran, beserta indikator dan target yang telah diselaraskan dengan Visi dan Misi KDH terpilih yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA	M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan	T.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1	Meningkatnya ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian
				2	Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri
	M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif	T.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3	Meningkatnya pendapatan masyarakat
				4	Menurunnya tingkat pengangguran
	M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua	T.3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	5	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata
				6	Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif
				7	Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif
	M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan	T.4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	8	Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca
				9	Menurunnya tingkat risiko bencana
	M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius	T.5	Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama	10	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
				11	Meningkatnya nilai-nilai religius

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran	
					dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda
	M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital	T.6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif	12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi
				13	Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
	M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	T.7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	14	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah

Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD 2027 merupakan penjabaran operasional dari tujuh tujuan dan empat belas sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029. Tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Renja perangkat daerah Tahun 2027.

Tabel 4.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target Kinerja RPJMD Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA	M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan	T 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah		1	**Pertumbuhan Ekonomi (%)**	4.05	4.25	4.95	5.95	6.25	6.65	6.95
			1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dan produktivitas sektor pertanian	2	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%)	-0.78	3.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00
				3	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	87.92	88.27	88.62	88.98	89.34	89.69	90.05
			2. Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri	4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	15.09	15.54	16.32	17.14	17.90	19.25	20.60
	M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan	T 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		5	**Tingkat Kemiskinan (%)**	5.02	4.6-4.01	4.45-3.55	4.31-3.54	4.21-3.51	3.86-2.86	3.57-2.75
				6	**Rasio Gini (poin)**	0.319	0.313	0.306	0.300	0.294	0.288	0.281
			3. Meningkatnya pendapatan masyarakat	7	PDRB Perkapita (juta rupiah)	59.31	61.83	64.89	68.75	73.04	77.90	93.31

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Perlindungan Sosial Yang Adaptif		4. Menurunnya tingkat pengangguran	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.02	2.93	2.84	2.75	2.66	2.57	2.47
	M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua	T 3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang inklusif		**9**	**Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)**	**74.81**	**75.10**	**75.44**	**75.80**	**76.19**	**76.47**	**76.79**
			5. Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata	10	Indeks Pendidikan (Indeks)	63.56	63.89	65.33	66.82	68.34	69.91	71.52
			6. Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif	11	Indeks Kesehatan (Indeks)	83.77	84.00	84.40	84.79	85.19	85.59	85.99
			7. Terwujudnya kesetaraan gender yang inklusif	12	Indeks pembangunan gender (Indeks)	93.32	93.64	93.85	94.07	94.29	94.51	94.73
	M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang	T 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya		**13**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**67.96**	**73.92**	**74.14**	**74.35**	**74.56**	**74.77**	**74.98**
			8. Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca	14	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	3.04	11.94	13.27	14.33	15.52	16.72	17.92

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Berkelanjutan	alam yang berkelanjutan	9. Menurunnya tingkat risiko bencana	15	Indeks Resiko Bencana (Indeks)	119.20	118.90	118.40	117.90	117.40	116.90	116.40
	M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius	T 5. Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama		**16**	**Indeks Harmoni Indonasia (IHaI)**	**N/A**	**67.25**	**69.87**	**72.49**	**74.11**	**77.73**	**80.35**
			10. Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	17	Angka kriminalitas (kasus)	834	820	766	661	555	450	344
			11. Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda	18	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	18.71	18.99	19.34	19.72	20.12	20.62	21.32
				19	Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks)	55.26	55.36	55.46	55.56	55.66	55.76	55.86
				20	Indeks Pembangunan Pemuda (indeks)	64.13 (2023)	70.13	72.93	75.53	77.93	80.13	82.13
	M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan	T 6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif,		**21**	**Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)**	**68.51**	**70.29**	**72.07**	**73.86**	**75.64**	**77.42**	**79.2**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Kondisi Awal 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
	yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital	transparan, akuntabel dan inovatif	12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi	22	Nilai SAKIP (poin)	65.08	67.15	69.22	71.29	73.36	75.43	77.5
				23	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	47.72	50.58	53.62	56.84	60.25	63.86	67.69
				24	Indeks SPBE (Indeks)	3.04	3.22	3.42	3.62	3.84	4.07	4.31
			13. Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	25	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	1.73	2.03	2.33	2.64	2.94	3.24	3.54
				26.	Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks)	75.46	76.59	77.74	78.91	80.09	81.29	82.51
	M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	T 7. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas		27	**Indeks Daya Saing Daerah (Pilar Infrastruktur)**	**3.28**	**3.29**	**3.3**	**3.33**	**3.35**	**3.36**	**3.38**
			14. Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah	28	Indeks Infrastruktur (Indeks)	81.24	76.91	77.38	77.86	78.41	78.90	79.25

Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029

Penyajian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2027 disusun secara sistematis dalam bentuk tabel yang memuat keterkaitan antara visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, serta target pencapaian tahun berjalan. Setiap tujuan pembangunan diturunkan dari misi RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur, sedangkan setiap sasaran memuat indikator kinerja beserta target tahunan yang menggambarkan capaian antara menuju target akhir periode RPJMD pada Tahun 2029.

Penetapan indikator target tujuan dan sasaran Tahun 2027 mengacu pada target tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan realisasi pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya, dinamika kondisi makro daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan. Penyesuaian sasaran dilakukan secara terukur dan berbasis data guna menjaga konsistensi arah pembangunan sekaligus memastikan sasaran yang ditetapkan bersifat realistis dan dapat dicapai, tanpa mengurangi ambisi pencapaian visi dan misi daerah. Rincian tujuan, sasaran, indikator, dan target pembangunan daerah Tahun 2027 selanjutnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta Indikator dan Target RKPD Tahun 2027

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		No	Indikator	Realisasi 2025	Target RKPD		Target RPJMD	Ket.
									2026	2027	2027	
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA	M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan	T.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah			1	**Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**7.71**	**4.95**	**8.81**	**5.95**	*Penyesuaian target Prov Sulsel berdasarkan Permen PPN/ Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2026*
				1	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan produktivitas sektor pertanian	2	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%)	10.70	5.00	11.92	5.00	*Penyesuaian dengan LPE*
						3	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	75.67	88.62	77.77	88.98	Penyesuaian Berdasarkan Capaian 2025
				2	Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri	4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	15.56	16.32	17.14	17.14	*Penyesuaian dengan LPE*
	M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan	T.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat			5	**Tingkat Kemiskinan (%)**	**4.91**	**4.45-3.55**	**4,33-4,06**	**4.31-3.54**	*Hasil Rakortekbang*
						6	**Rasio Gini (Indeks)**	**0.325**	**0.306**	**0.303-0,301**	**0.300**	*Hasil Rakortekbang*
				3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	7	PDRB Perkapita (juta rupiah)	65.15	64.89	70.4	68.75	*Penyesuaian target Prov Sulsel berdasarkan Permen PPN/ Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2026*

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		No	Indikator	Realisasi 2025	Target RKPD		Target RPJMD	Ket.
									2026	2027	2027	
	Sosial Yang Adaptif			4	Menurunnya tingkat pengangguran	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.36	2.84	2,92-2,84	2.75	*Hasil Rakortekbang*
	M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua	T.3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif			**9**	**Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)**	**75.49**	**75.44**	**76,22-76,55**	**75.8**	*Hasil Rakortekbang*
				5	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata	10	Indeks Pendidikan (Indeks)	64.28	65.33	65.94	66.82	*Penyesuaian target berdasarkan Hasil Rakortekbang IPM*
				6	Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif	11	Indeks Kesehatan (Indeks)	84.14	84.40	84.67	84.79	*Penyesuaian target berdasarkan Hasil Rakortekbang IPM*
				7	Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif	12	Indeks pembangunan gender (Indeks)	93,75	93.85	94.07	94.07	*Menggunakan target RPJMD*
	M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan	T.4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan			**13**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)**	**74.16**	**74.14**	**74,35**	**74.35**	*Hasil Rakortekbang*
				8	Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca	14	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	3.04*)	13.27	14.33	14.33	*Hasil Rakortekbang*
				9	Menurunnya tingkat risiko bencana	15	Indeks Resiko Bencana (indeks)	159.5	118.40	117.90	117.90	*Menggunakan target RPJMD*
		T.5	Meningkatnya harmonisasi			16	**Indeks Harmoni Indonasia (IHal)**	**N/A**	**69.87**	**72.49**	**72.49**	*Menggunakan target RPJMD*

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		No	Indikator	Realisasi 2025	Target RKPD		Target RPJMD	Ket.
									2026	2027	2027	
	M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius		kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama	10	Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	17	Angka kriminalitas (kasus)	915	766	661	661	*Menggunakan target RPJMD*
				11	Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda	18	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	24.89	19.34	26.63	19.72	*Penyesuaian berdasarkan capaian 2025*
						19	Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks)	55.77	55.46	56.89	55.56	*Menggunakan target RPJMD*
						20	Indeks Pembangunan Pemuda lindeks)	64.19*)	72.93	75.53	75.53	*Menggunakan target RPJMD*
	M6.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital	T.6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif			**21**	**Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)**	**60.69**	**72.07**	**73.86**	**73.86**	*Menggunakan target RPJMD*
				12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi	22	Nilai SAKIP (Nilai)	65.82	69.22	71.29	71.29	*Menggunakan target RPJMD*
						23	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	42.1	53.62	56.84	56.84	*Menggunakan target RPJMD*
						24	Indeks SPBE (Indeks)	3.04	3.42	3.62	3.62	*Menggunakan target RPJMD*
				13	Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	25	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	3.43	2.33	4.15	2.64	*Menggunakan target RPJMD*
						26	Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks)	79.097	77.74	81.05	78.91	*Penyesuaian target berdasarkan capain 2025*
	M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas	T.7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas			**27**	**Indeks Daya Saing Daerah (Pilar Infrastruktur)**	**3.16**	**3.3**	**3.33**	**3.33**	*Menggunakan target RPJMD*

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		No	Indikator	Realisasi 2025	Target RKPD		Target RPJMD	Ket.
									2026	2027	2027	
	Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			14	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah	28	Indeks Infrastruktur (Indeks)	79,34	77.38	80.84	77.86	*Penyesuaian target berdasarkan capain 2025*

Sumber: Tim Penyusun RKPD Tahun 2027

**) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menggunakan capaian tahun 2024*

**) Indeks Pembangunan Pemuda menggunakan capaian tahun 2024*

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2027 dirumuskan melalui pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategi. Proses penetapan prioritas ini mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya, analisis mendalam terhadap permasalahan dan tantangan pembangunan aktual di daerah, serta aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan. Pendekatan teknokratis berbasis data dan perencanaan berbasis bukti dipadukan secara harmonis dengan pendekatan partisipatif untuk menghasilkan prioritas pembangunan yang tidak hanya responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, tetapi juga didukung oleh analisis yang komprehensif dan realistis sesuai dengan kapasitas fiskal serta kelembagaan daerah.

Dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029, sinkronisasi dengan prioritas nasional Asta Cita, hasil evaluasi pembangunan, serta aspirasi masyarakat, maka prioritas dan target pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi acuan strategi yang efektif dalam mencapai dan mengoptimalkan sumber daya pembangunan daerah. Komitmen terhadap tata kelola perencanaan yang baik, partisipatif, dan akuntabel menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang secara menyeluruh.

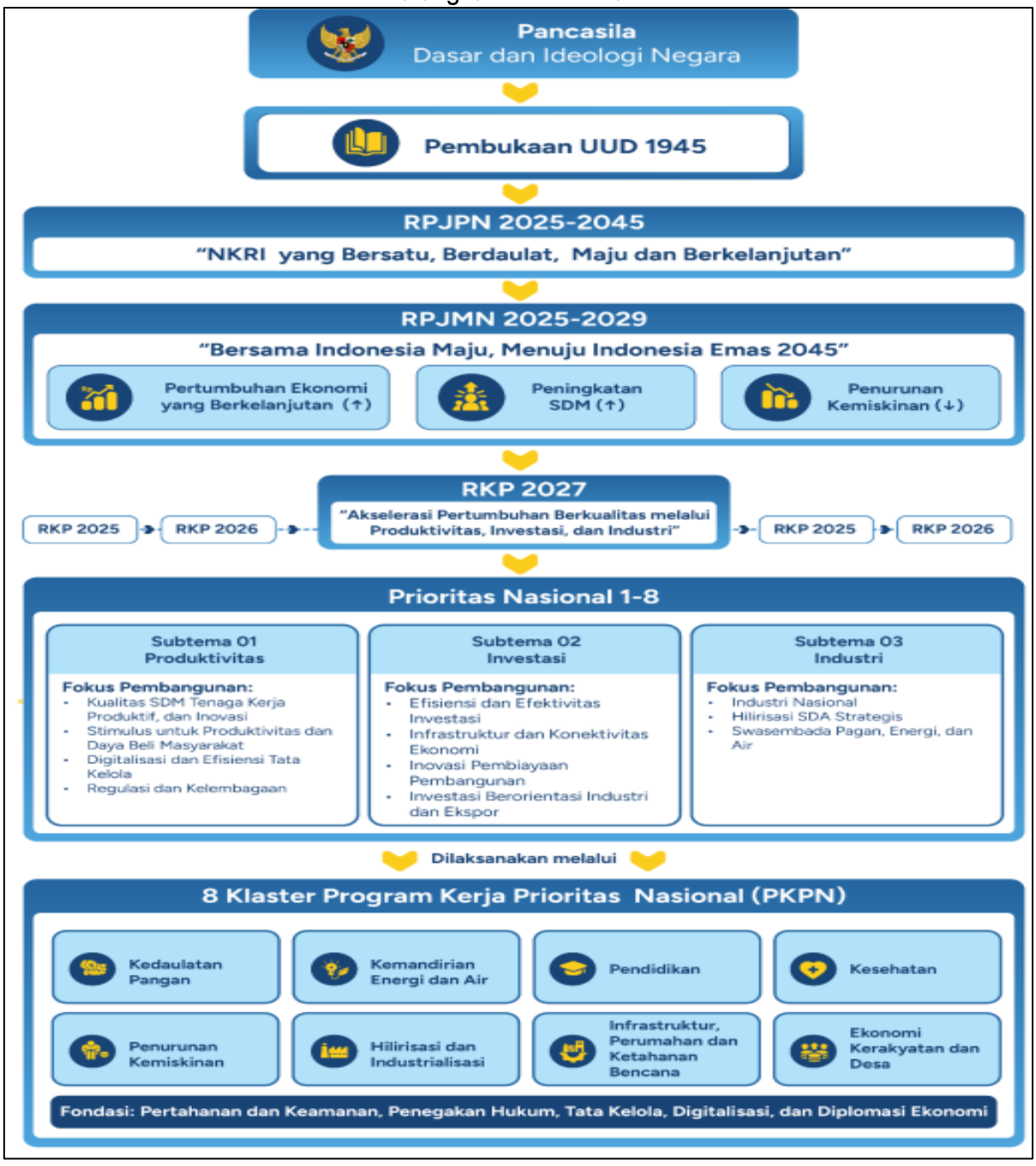
4.2.1. Prioritas, Sasaran dan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2027

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, subkegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2027 mengacu pada Tema RKP Tahun 2027, yaitu **"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri"**. Tema ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga subtema RKP Tahun 2027 yaitu: **(1) Produktivitas; (2) Investasi; dan (3) Industri** dilaksanakan melalui sebelas **Fokus Pembangunan (FP)** sebagai pendekatan startegis untuk meningkatkan ketajaman arah kebijakan dan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Dalam rangka memastikan sebelas FP dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan yang lebih konkret, RKP 2027 menjabarkannya lebih lanjut ke dalam delapan klaster

Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yaitu: (1) Kedaulatan pangan, (2) Kemandirian energi dan air, (3) Pendidikan, (4) Kesehatan, (5) Hilirisasi dan Industrialisasi, (6) Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana, (7) Ekonomi Kerakyayatan dan Desa, dan (8) Penurunan Kemiskinan.

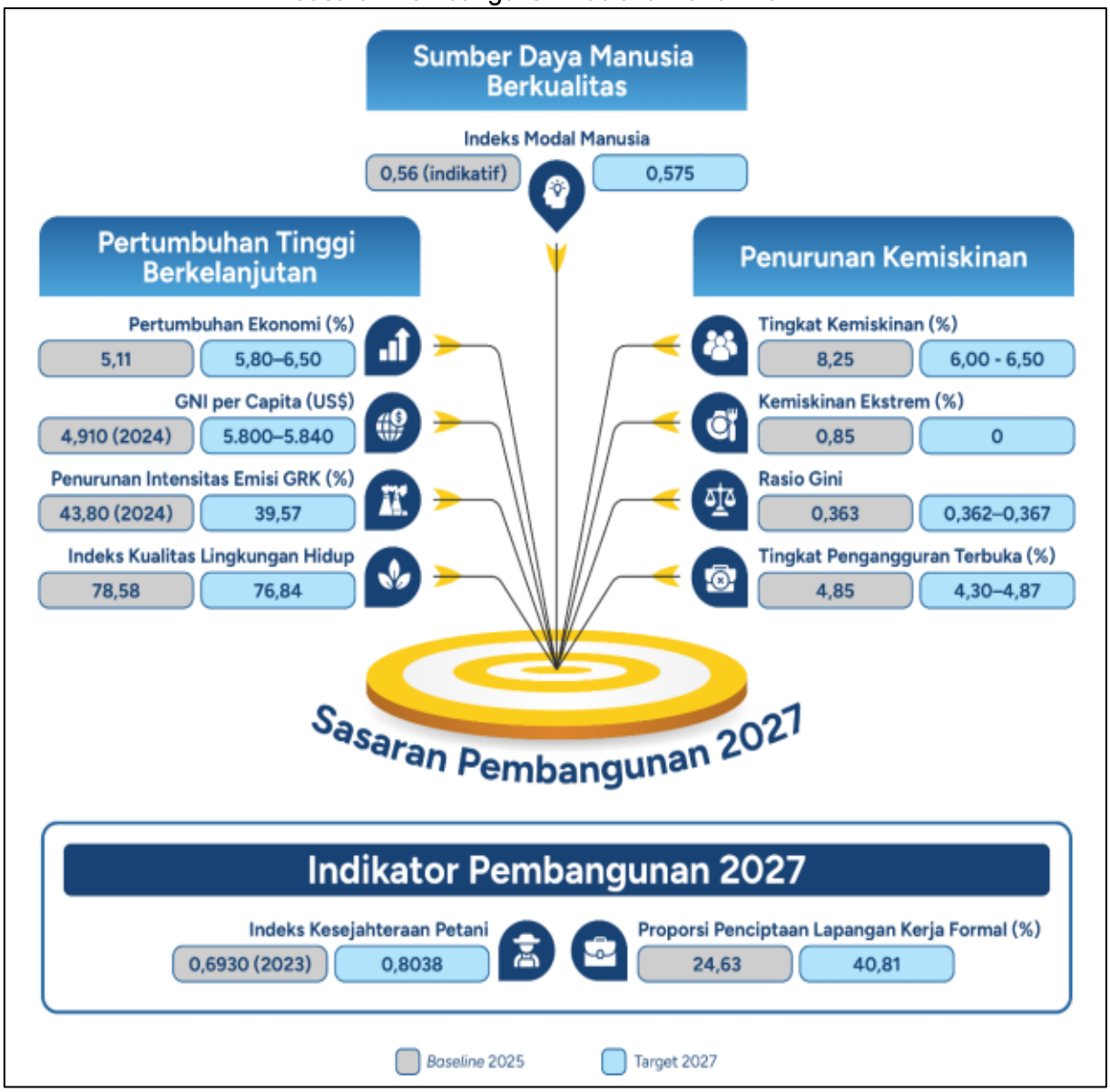
Gambar 4.2
Kerangka Pikir RKP 2027



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2027 diharapkan mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional yang berlandaskan pada **Trisula Pembangunan** yaitu (1) Pertumbuhan Tinggi yang Berkualitas, (2) Peningkatan Kulaitas SDM, dan (3) Penurunan Kemiskinan.

Gambar 4.3
Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027



Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

Sasaran pembangunan nasional tersebut diturunkan dari sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan dan memperhitungkan dinamika pembangunan yang terjadi. Sasaran pembangunan nasional menjadi panduan untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, dan memerlukan sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, sehingga prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari **Asta Cita** yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa **Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).** Prioritas Nasional meliputi:

1. **Prioritas Nasional 1:** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi,dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. **Prioritas Nasional 2:** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. **Prioritas Nasional 3**: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. **Prioritas Nasional 4**: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. **Prioritas Nasional 5:** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. **Prioritas Nasional 6:** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. **Prioritas Nasional 7**: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. **Prioritas Nasional 8:** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkahlangkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta proyek strategis nasional.

Tabel 4.4
17 Program Prioritas Nasional dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi 5. Pemberantasan kemiskinan 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2. Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi 9. Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan interansional yang kondusif 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2027

4.2.2. Prioritas, Sasaran dan Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027

Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2025-2029. Visi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 **"Sulawesi Selatan MAJU dan BERKARAKTER"**. Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

a) Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berahlak, dan Berdaya saing;

b) Meningkatkan Perekonomian Daerah yang merata dan berkelanjutan;

c) Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani;

d) Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran tercapainya indikator, dalam rangka mencapai misi. Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2027 sesuai RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. **Meningkatnya Kualitas Modal Manusia**, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan secara merata;
   2) Meningkatnya kualitas layanan pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif.
b. **Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Adaptif**, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya kualitas demokrasi;
   2) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan;
   3) Meningkatnya kualitas generasi dan kesetaraan gender.
c. **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif**, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan;
   2) Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global inklusif;
   3) Meningkatnya stabilitas fiscal dan ekonomi makro daerah;
   4) Meningkatnya pembangunan perdesaan;
   5) Menurunnya angka pengangguran.
d. **Meningkatnya Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi**, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
e. **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegras, Adaptif dan Inovatif**, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
   1) Terwujudnya birokrasi yang akuntabel, adaptif dan inovatif.
f. **Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan, Tangguh Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi**, dengan rumusan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya pengelolaan infrastruktur;
   2) Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada prioritas nasional yang termuat pada RPJMN tahun 2025-2029 dan RKP Tahun 2027. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis, serta disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029, untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2027 yaitu ***"Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan",*** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

PD1.	Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi;
PD2	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan local, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal;
PD3	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
PD4	Peningkatan ekonomi dan fiscal daerah yang modern dan berdaya saing;
PD5	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan;
PD6	Transformasi digital dan tata Kelola pemerintahan yang berintegrasi, adaptif, dan melayani berbasis digital;
PD7	Peningkatan layanan padat karya dan berwawasan lingkungan;
PD8	Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

4.2.3. Prioritas, Sasaran dan Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 pada hakikatnya merupakan penajaman fokus, perluasan cakupan, dan kelanjutan berkelanjutan dari prioritas pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang telah menunjukkan hasil positif dan memerlukan penguatan lebih lanjut. Penetapan prioritas ini dilakukan sebagai respons strategis terhadap dinamika permasalahan pembangunan yang terus berkembang dan semakin kompleks, dengan tetap memperhatikan proyeksi tantangan masa depan serta kendala-kendala yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan. Prioritas pembangunan daerah tahun 2027 dirumuskan melalui pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan upaya penyelesaian

permasalahan mendasar pembangunan daerah, respons terhadap isu-isu strategis yang muncul, serta implementasi arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Perumusan prioritas ini juga memastikan terciptanya sinergitas dan keterpaduan antara agenda pembangunan nasional dengan kebutuhan spesifik pembangunan daerah, sehingga setiap Program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memberikan dampak optimal bagi kemajuan daerah tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan. Prioritas pembangunan disjikan sebagai berikut:

PD1 Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan;

PD2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan;

PD3 Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas;

PD4 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana;

PD5 Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius;

PD6 Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;

PD7 Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas.

Berdasarkan kerangka prioritas pembangunan yang telah dirumuskan secara komprehensif tersebut, penetapan tema pembangunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 menjadi langkah strategis untuk merangkum seluruh agenda prioritas ke dalam satu visi yang terpadu dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan serta memperhatikan tema dan fokus RKP 2027 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tema Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 adalah **"Akselerasi Pembangunan Ekonomi, Swasembada Pangan dan SDM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan",** mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh berbasis keunggulan lokal sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan. **Akselerasi pembangunan ekonomi** diarahkan pada upaya memperkuat daya saing daerah melalui perluasan basis pertumbuhan yang selama ini bertumpu pada sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, mendorong berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, penguatan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan investasi, serta perluasan kesempatan kerja. Percepatan pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan angka pertumbuhan secara agregat, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesenjangan pendapatan antardaerah dan antarkelompok dapat terus dipersempit. Dalam dimensi **Swasembada Pangan**, percepatan pembangunan difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan di tingkat

rumah tangga, serta pembenahan rantai distribusi dan sistem logistik pangan daerah. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional sesuai misi pertama Asta Cita. Percepatan pembangunan **Sumber Daya Manusia** menjadi pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam tema ini, mengingat kualitas SDM merupakan kunci utama dalam menggerakkan seluruh roda pembangunan. Akselerasi di bidang SDM diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, pengembangan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, serta penurunan angka kemiskinan dan stunting secara lebih signifikan. SDM yang sehat, cerdas, dan terampil diyakini akan menjadi motor penggerak utama bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keempat elemen ini dirajut dalam semangat **pertumbuhan berkelanjutan** yang menjamin kelestarian lahan pertanian, efisiensi sumber daya alam, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesejahteraan yang diraih hari ini tidak mengorbankan masa depan generasi mendatang.

Untuk lebih lengkapnya, prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran beserta indikator dan target pembangunan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Prioritas Pembangunan, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta Indikator dan Target Tahun 2027

Prioritas Pembangunan	Tujuan		Sasaran		No	Indikator	Realisasi 2025	Target Tahun 2027
PD1. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan	T.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah			1	**Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**7.71**	**8.81**
			1	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan produktivitas sektor pertanian	2	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%)	10.70	11.92
					3	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	75.67	77.77
			2	Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri	4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	15.56	17.14
PD2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan	T.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat			5	**Tingkat Kemiskinan (%)**	**4.91**	**4,33-4,06**
					6	**Rasio Gini (Indeks)**	**0.325**	**0.303-0,301**
			3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	7	PDRB Perkapita (juta rupiah)	65.15	70.4
			4	Menurunnya tingkat pengangguran	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.36	2,92-2,84
PD3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas	T.3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif			9	**Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)**	**75.49**	**76,22-76,55**
			5	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata	10	Indeks Pendidikan (Indeks)	64.28	65.94
			6	Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif	11	Indeks Kesehatan (Indeks)	84.14	84.67

Prioritas Pembangunan	Tujuan		Sasaran		No	Indikator	Realisasi 2025	Target Tahun 2027
			7	Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif	12	Indeks pembangunan gender (Indeks)	93,75	94.07
PD4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	T.4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan			13	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)**	**67.96*)**	**74,35**
			8	Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca	14	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	3.04*)	14.33
			9	Menurunnya tingkat risiko bencana	15	Indeks Resiko Bencana (indeks)	159.5	117.90
PD5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius	T.5	Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama			16	**Indeks Harmoni Indonasia (IHal)**	**N/A**	**72.49**
			10	Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	17	Angka kriminalitas (kasus)	915	661
			11	Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda	18	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	24.89	26.63
					19	Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks)	55.77	56.89
					20	Indeks Pembangunan Pemuda lindeks)	64.19*)	75.53
PD6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	T.6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan,			**21**	**Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)**	**60.69**	**73.86**
			12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	22	Nilai SAKIP (Nilai)	65.82	71.29
					23	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	42.1	56.84

Prioritas Pembangunan	Tujuan		Sasaran		No	Indikator	Realisasi 2025	Target Tahun 2027
		akuntabel dan inovatif		berbasis inovasi dan digitalisasi	24	Indeks SPBE (Indeks)	3.04	3.62
			13	Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	25	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	3.43	4.15
					26	Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks)	79.097	81.05
PD7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	T.7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas			27	**Indeks Daya Saing Daerah (Pilar Infrastruktur)**	**3.16**	**3.33**
			14	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah	28	Indeks Infrastruktur (Indeks)	79,34	80.84

Sumber: Tim penyusun RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027, diolah.



Penetapan prioritas pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari keharusan untuk benar-benar berpijak pada permasalahan nyata dan isu-isu strategis yang dihadapi daerah. Prioritas pembangunan yang autentik hanya dapat lahir apabila proses perencanaannya diawali dengan identifikasi dan diagnosa yang mendalam terhadap kondisi tujuan daerah. Tanpa pijakan analisis permasalahan yang kuat, prioritas pembangunan berisiko hanya menjadi daftar program rutinitas yang kehilangan relevansinya terhadap kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2027 merupakan respons terencana, terukur, dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang paling mendesak dan isu strategi yang paling berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang secara berkelanjutan. Berikut disajikan keterkaitan antara permasalahan, isu strategis dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027:

Tabel 4.6
Keterkaitan Permaslaahan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah

PERMASALAHAN POKOK	ISU STRATEGIS	PRIORITAS PEMBANGUNAN
Belum optimalnya kualitas dan stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah	Gerakan Tanam, Panen, dan Hilirisasi	**P1.** Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah
	Penguatan Posisi sebagai Lumbung Pangan Nasional	
	Pengembangan Energi Terbarukan	
Melambatnya penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya ketimpangan pendapatan	Penurunan Angka Kemiskinan	**P2.** Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan
Masih rendahnya daya saing tenaga kerja dan partisipasi Angkatan kerja	Dayasaing Tenaga Kerja dan Kewirausahaan	
Masih rendahnya kualitas pembangunan manusia	Pemerataan & Penguatan Sistem Kesehatan	**P3.** Peningkatan Kaulitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas
	Prevalensi Stunting	
	Peningkatan Mutu Pendidikan	
	Peningkatan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Kelompok Marginal	
Rendahnya kualitas lingkungan hidup	Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	**P4.** Pengelolaan Lingkungan hidup dan Mitigasi Bencana
	Pengelolaan sampah dan lingkungan hidup	
Belum optimalnya stabilitas keamanan, ketertiban umum serta kehidupan sosial masyarakat	Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat	**P5.** Pengembangan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Kondusif, Berbudaya dan Religius
	Peningkatan nilai religius dan pelestarian budaya	
Masih perlunya penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Perwujudan Good Governance dan Transformasi Pelayanan Publik	**P6.** Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
	Inovasi dan digitalisasi	
Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan infrastruktur daerah	Infrastruktur Daerah	**P7.** Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas

Sumber: Tim penyusun RKPD Tahun 2027, diolah.

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 dirumuskan sebagai penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan memperhatikan isu strategis daerah, capaian kinerja tahun sebelumnya, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Perumusan prioritas pembangunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya daerah yang terbatas dialokasikan secara terarah pada isu-isu yang memberikan daya ungkit (leverage) paling signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran.

Sejalan dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), setiap prioritas pembangunan tidak berdiri sendiri, melainkan harus memiliki keterkaitan yang jelas dan terukur dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta dijabarkan lebih lanjut ke dalam program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu. Keterkaitan ini penting untuk menjaga konsistensi logika perencanaan (logical framework) mulai dari tataran strategis (tujuan dan sasaran) hingga tataran operasional (program dan perangkat daerah pelaksana), sekaligus menjadi instrumen kendali bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.

Melalui pemetaan hubungan prioritas pembangunan dengan tujuan, sasaran, dan program perangkat daerah, dapat diidentifikasi secara jelas program-program mana yang menjadi pengungkit utama pencapaian setiap sasaran pembangunan, sekaligus perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Hal ini juga menjadi dasar bagi penetapan program prioritas dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 yang selaras dengan arah kebijakan daerah. Keterkaitan antara prioritas pembangunan, tujuan, sasaran, dan program perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 disajikan secara rinci pada tabel berikut.

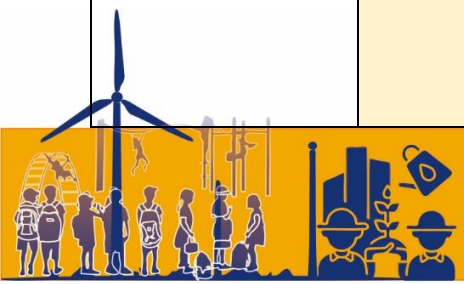
Tabel 4.7
Hubungan antara Prioritas Pembangunan dengan Tujuan dan Sasaran serta Program Perangkat Daerah

Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah	OPD Penanggungjawab
P1. Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri unggulan	Tujuan 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah		Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	Sasaran 1. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian		Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%)		
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (%)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortukultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
			Jumlah produksi Daging danTelur (Kg)		Dinas Peternakan dan Perikanan
		Meningkatnya distribusi dan kualitas Prasarana pertanian	Persentase ketersediaan prasarana pertanian (%)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortukultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortukultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan hewan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan Kejadiaan dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan menular (%)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Tanaman Pangan dan Perikanan
			Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani (%)	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan,

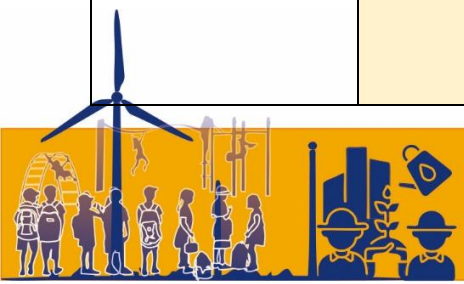
Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah	OPD Penanggungjawab
		Meningkatnya Kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian			Hortukultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
			Rasio Penyuluh Peternakan terhadap Pelaku Utaman Peternakan/Kelompok Ternak (Rasio)		Dinas Peternakan dan Perikanan
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Tanaman Pangan dan Perikanan
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Tanaman Pangan dan Perikanan
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortukultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan
	Sasaran 2. Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri		**Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)**	**Sasaran 2. Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri**	
		Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah	OPD Penanggungjawab
		Efisien, Merata dan Terintegrasi	distribusi perdagangan di wilayah kerjanya (%)		
		Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan (%)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya (%)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
P2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan	**Tujuan 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**		**Tingkat Kemiskinan (%)** **Rasio Gini (Indeks)**	**Tujuan 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**	
	Sasaran 3. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		**PDRB Perkapita (juta rupiah)**	**Sasaran 3. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat**	
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%) Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti (%)	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial



Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah	OPD Penanggungjawab
			Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh rehabilitasi Sosial Diluar Panti		
			Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti		
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial (%)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Meningkatnya Peran dan Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan Sosial dan Budaya Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat(%)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga



Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah	OPD Penanggungjawab
					Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya volume usahanya usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasitasi pengembangan (%)	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Sasaran 4. Menurunnya tingkat pengangguran		**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**	**Sasaran 4. Menurunnya tingkat pengangguran**	
		Terwujudnya tenaga kerja yang bersetifikat kompetensi	Persentase tenaga kerja bersetifikat kompetensi (%)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Terwujudnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKSBipartit, Struktur Skala Upah , dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) (%)	Program Hubungan Industrial	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
P3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas	**Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif**	
	Sasaran 5. Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata		**Indeks Pendidikan**	**Sasaran 5. Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata**	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun (%)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 7 - 12 Tahun (%)		
			Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 13 - 15 Tahun (%)		

Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah	OPD Penanggungjawab
			Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan (%)		
		Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (rasio)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik) (%)		
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (%)	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Sasaran 6. Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif		**Indeks Kesehatan**	**Sasaran 6. Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif**	
		Meningkatnya Kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Terwujudnya Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tengah masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Sesuai Standar pada Fasilitas Kesahatan yang Ada	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan (%)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan



Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah	OPD Penanggungjawab
	Sasaran 7. Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif		Indeks pembangunan gender	Sasaran 7. Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pegarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		pengurangan risiko dan dampak bencana	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
P4. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim	Tujuan 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Tujuan 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	
	Sasaran 8. Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Sasaran 8. Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca	
		Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (%)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

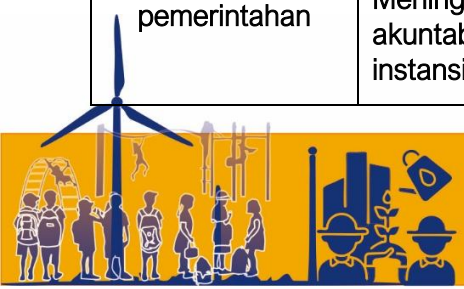


Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah	OPD Penanggungjawab
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan (%)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota (%)	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Sasaran 9. Menurunnya tingkat risiko bencana		Indeks Resiko Bencana	Sasaran 9. Menurunnya tingkat risiko bencana	
		Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pengurangan risiko dan dampak bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
		Respons darurat yang cepat dan terkoordinasi	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
P5. Pengembangan kehidupan sosial yang kondusif, berbudaya, dan religius	Tujuan 5. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat berbasis nilai-nilai agama, budaya dan adat		Angka Kriminalitas	Tujuan 5. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat berbasis nilai-nilai agama, budaya dan adat	
	Sasaran 10. Meningkatnya keamanan, dan ketertiban masyarakat		Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	Sasaran 10. Meningkatnya keamanan, dan ketertiban masyarakat berbasis nilai religius dan budaya	

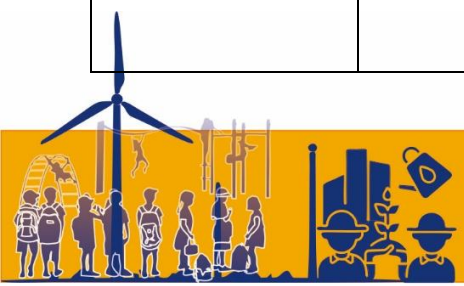


Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah	OPD Penanggungjawab
	berbasis nilai religius dan budaya	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda (%)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Ppenyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah (%)	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sasaran 11. Berkembangnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta kearifan lokal		**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan (%)**	**Sasaran 11. Berkembangnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta kearifan lokal**	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan		
		Meningkatnya daya saing Kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah	OPD Penanggungjawab
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan (mou)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan (produk hukum)		
			Persentase Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi Oleh Pemerintah (%)		
			Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Tepat Waktu (%)		
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan terhadap cagar budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (%)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)		
P6. Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan	**Tujuan 6. Terwujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Tujuan 6. Terwujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif**	
	Sasaran 12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		**Nilai SAKIP**	**Sasaran 12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi**	

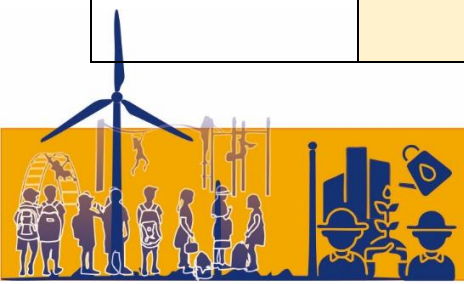


Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah	OPD Penanggungjawab
	berbasis inovasi dan digitalisasi	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan perda dan perbup	Persentase Konsistensi Program RPJMD-RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD		
			Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah		
		Meningkatnya tata kelola keuangan	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
			Persentase Penurunan SiLPA		
			Persentase laporan keuangan tepat waktu		
		Meningkatnya Upaya Eksensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)		
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)		



Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah	OPD Penanggungjawab
		Meningkatnya Mutu dan Performa ASN Secara Menyeluruh di Semua OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD (%)	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Rata-Rata SKP ASN Bernilai BAIK (Nilai)		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian berbasis Bukti dalam Pemanfaatan Daerah (%)	Program Riset dan Inovasi Daerah	
			Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan (Persentase)		
		Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Hasil Pengawasan dan Menurunnya Temuan BPK	Jumlah Temuan BPK (%)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Tindakjanjuti (%)		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Iternet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo (%)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Sasaran 13. Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik		**Indeks Pelayanan Publik (indeks)**	**Sasaran 13. Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik**	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftran penduduk	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah	OPD Penanggungjawab
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akta Pencacatan Sipil (%)	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP (%)	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
P7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	**Tujuan 7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas**		**Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur**	**Tujuan 7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas**	
	Sasaran 14. Meningkatnya pengelolaan infrastruktur daerah		**Indeks Layanan Infrastruktur**	**Sasaran 14. Meningkatnya pengelolaan infrastruktur daerah**	
		Meningkatnya tingkat kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota (%)	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
		Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik (%)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat



Prioritas Pembangunan	Tujuan dan Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas Daerah	OPD Penanggungjawab
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota (Persentase)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah terpasang terhadap kondisi ideal (%)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

Sumber: Tim Penyusun RKPD Tahun 2027.



4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2027

Berdasarkan isu strategis serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 yang telah diuraikan sebelumnya, perlu ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasran pembangunan daerah. strategi dan arah kebijakan sebagaiman tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Arah Kebijakan Tahun 2027, meliputi:

1. Mengoptimalkan potensi kawasan komoditas unggulan, peningkatan infrastruktur dan kapasitas SDM, penyediaan pupuk, pengendalian hama, pengembangan bibit dan pakan, stabilisasi harga, implementasi Program IP 300, penguatan Brigade Pangan, serta penerapan teknologi modern dan mekanisasi
2. Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui identifikasi dan pemetaan sentra potensial, penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industri, peningkatan akses pasar dan rantai pasok, standarisasi mutu serta sertifikasi produk agroindustri, penguatan promosi berbasis kearifan lokal, pengendalian inflasi daerah, dan pembangunan kawasan ekonomi unggulan
3. Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin, peningkatan efektivitas bantuan sosial dan layanan dasar, penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes berbasis potensi lokal, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing, serta pemberdayaan wirausaha generasi Z dan milenial
4. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
5. Pemetaan dan penanggulangan anak tidak sekolah, implementasi Program makanan bergizi gratis, peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik, penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang memadai, pengembangan budaya literasi, pendidikan karakter, dan soft skills, serta penguatan sekolah unggulan percontohan dengan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi
6. Perluasan jangkauan dan cakupan BPJS Kesehatan, penguatan Program pencegahan dan penanganan stunting, peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur kesehatan terutama di daerah terpencil, serta penguatan upaya promotif-preventif berbasis masyarakat dengan pendekatan keluarga.
7. Penguatan kerangka regulasi daerah, pencegahan perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, pengembangan Program ekonomi produktif, peningkatan aksesibilitas infrastruktur publik, dan pembangunan ketahanan keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial.



8. Penguatan regulasi lingkungan, peningkatan sarana-prasarana, pengelolaan lingkungan terpadu berbasis partisipasi masyarakat, pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan penataan ruang terbuka hijau
9. Penguatan regulasi mitigasi bencana, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan sistem peringatan dini, serta penguatan kapasitas masyarakat dan lembaga penanggulangan bencana.
10. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial masyarakat melalui penguatan koordinasi antarlembaga, pendidikan nilai-nilai kebangsaan, dan pencegahan konflik sosial.
11. Memperkuat nilai-nilai religius, melestarikan budaya lokal, dan memberdayakan pemuda melalui dukungan kegiatan keagamaan, pelestarian cagar budaya, serta pembinaan keterampilan berbasis nilai agama dan kearifan lokal
12. Penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan, penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan inovasi pemerintahan, pengembangan administrasi berbasis elektronik yang terintegrasi, peningkatan kapasitas ASN berbasis merit, penguatan pengawasan internal, pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis elektronik
13. Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik, peningkatan sarana-prasarana pelayanan publik, optimalisasi sistem pengaduan masyarakat, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik, serta pemantapan penerapan SOP pelayanan publik
14. Mengembangkan infrastruktur daerah yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan melalui perencanaan berbasis kebutuhan prioritas, optimalisasi sumber pendanaan, pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung

Adapun rumusan strategi untuk tahun 2027 adalah sebagai berikut:

a. Strategi Pembangunan Tahun 2027

ST.1 Pemetaan, identifikasi dan pengembangan wilayah komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan

ST.2 Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk pengembangan infrastruktur sistem irigasi serta pembangunan dan rehabilitasi jalan tani

ST.3 Peningkatan kapasitas SDM petani/peternak/nelayan dan penyuluh

ST.4 Implementasi Program "pupuk lancar" untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dan "listrik masuk sawah" untuk mendukung pompa irigasi, cold storage, dan alat pertanian modern

ST.5 Penguatan sistem pengendalian hama dan penyakit secara terpadu serta pengembangan sistem asuransi pertanian untuk mitigasi risiko gagal panen

ST.6 Peningkatan kapasitas produksi, pengembangan bibit unggul dan kemandirian pakan

ST.7 Implementasi Program IP 300 untuk mendukung penanaman tiga kali setahun melalui optimalisasi pengelolaan lahan, penyediaan varietas tanaman cepat panen, dan koordinasi jadwal tanam

ST.8 Pembentukan dan penguatan Brigade Pangan sebagai kelompok masyarakat untuk mendukung produktivitas pertanian melalui koordinasi sumber daya, penerapan praktik pertanian modern, dan pengawasan Program IP 300

ST.9 Pengembangan kawasan pertanian terintegrasi (integrated farming), mekanisasi pertanian di sentra produksi serta Penerapan teknologi pertanian modern dan inovasi

ST.10 Identifikasi sentra-sentra potensial untuk pengembangan produk unggulan daerah

ST.11 Pemetaan potensi pemanfaatan produk unggulan untuk pengembangan ekonomi lokal

ST.12 Pengembangan kemitraan antara petani, pelaku industri dan pengolahan

ST.13 Penguatan akses pasar dan jaringan pemasaran serta fasilitasi pengembangan rantai pasok produk unggulan daerah

ST.14 Standarisasi mutu dan sertifikasi produk agroindustri

ST.15 Penguatan daya tarik produk unggulan daerah berbasis kearifan lokal dan penguatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah

ST.16 Menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, Penguatan pengendalian inflasi daerah untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi rumah tangga

ST.17 Penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan pariwisata ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah

ST.17.A Percepatan hilirisasi produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan lokal melalui fasilitasi pengolahan pasca panen dan pengembangan industri berbasis bahan baku lokal guna meningkatkan nilai tambah komoditas daerah

ST.18 Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin dan rentan untuk intervensi tepat sasaran serta peningkatan peran dan fungsi TKPKD

ST.19 Peningkatan efektivitas dan perluasan cakupan bantuan sosial, penguatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan

ST.20 Peningkatan Kemanfaatan dan Keberlanjutan Sistem Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendampingan dan Peningkatan Keterampilan khusus bagi kelompok miskin dan rentan

ST.20.A Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dalam program 3 juta rumah melalui pembebasan biaya BPHTB dan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

ST.21 Penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes dan Penyusunan rencana pengembangan UMKM berbasis potensi lokal

ST.22 Fasilitasi akses permodalan, dan pemasaran bagi UMKM, pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM termasuk implementasi Program Koperasi Merah Putih untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan yang mendukung rantai pasok agroindustri local dan pengembangan Program UMKM Maju

ST.23 Pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing serta pengembangan potensi wirausaha generasi Z dan milenial

ST.24 Pengembangan Program ekonomi produktif untuk pemberdayaan keluarga miskin dan rentan



ST.24.A Akselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai target nasional 80.000 koperasi, termasuk fasilitasi legalitas, modal awal, dan infrastruktur operasional koperasi

ST.24.B Penguatan tata kelola, kapasitas SDM pengurus, dan sistem manajemen keuangan KDKMP melalui pelatihan, pendampingan berkelanjutan, dan pengawasan oleh Dinas Koperasi bersinergi dengan pemerintah desa

ST.25 Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan Program pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja

ST.26 Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata serta pengembangan kawasan transmigrasi prioritas nasional

ST.27 Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal

ST.28 Pemetaan, identifikasi serta Pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan anak tidak sekolah/putus sekolah dan Implementasi Program pemberian makanan bergizi gratis

ST.29 Peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta pemerataan pendistribusian tenaga kependidikan secara proporsional

ST.30 Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan

ST.31 Pengembangan budaya literasi di semua tingkat pendidikan dan masyarakat serta penguatan pendidikan karakter dan soft skills

ST.32 Pengembangan sekolah unggulan percontohan, Pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi serta implementasi Program Sekolah Rakyat

ST.33 Penyusunan basis data kepesertaan Program BPJS Kesehatan Gratis dan penanganan stunting

ST.34 Perluasan cakupan BPJS Kesehatan Gratis

ST.35 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan status gizi ibu dan anak serta Implementasi Program "Anak-Anak Sidrap Sehat"

ST.36 Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, akses layanan kesehatan berkualitas ke daerah terpencil serta peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan

ST.37 Implementasi Program kesehatan promotif dan preventif berbasis masyarakat dalam rangka deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan

ST.38 Penguatan sistem pencegahan penyakit dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif

ST.38.A Implementasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk skrining kesehatan dasar masyarakat mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan deteksi dini penyakit tidak menular bagi seluruh lapisan masyarakat

ST.38.B Implementasi Program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis dalam rangka penurunan stunting dan peningkatan status gizi keluarga miskin dan rentan

ST.38.C Implementasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui pemeriksaan kesehatan berkala bagi seluruh masyarakat dengan pendekatan promotif-preventif untuk deteksi dini penyakit tidak menular dan penyakit menular berbasis Puskesmas dan Posyandu

ST.39 Penyusunan kerangka regulasi daerah yang komprehensif tentang perlindungan



dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, dan penyandang disabilitas)

ST.40 Pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui Implementasi Program penguatan ketahanan keluarga

ST.41 Pengembangan Program ekonomi produktif bagi perempuan dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan

ST.42 Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas

ST.43 Penguatan keberdayaan dan resiliensi kelompok rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar

ST.44 Penguatan regulasi lingkungan hidup serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi Program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"

ST.45 Pengelolaan lingkungan secara terpadu berbasis pelibatan stakeholder dan partisipasi masyarakat

ST.46 Pengendalian pencemaran lingkungan, air, tanah dan udara

ST.47 Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan Penataan ruang terbuka hijau

ST.48 Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan

ST.49 Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi Program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"

ST.50 Penguatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana

ST.51 Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku yang mengganggu ketertiban sosial

ST.52 Penguatan sistem keamanan terpadu dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

ST.53 Meningkatkan dialog antarumat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung harmoni sosial dan mencegah konflik sosial

ST.54 Peningkatan dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap kegiatan keagamaan, peningkatan sarana prasarana tempat ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan serta penguatan kapasitas tokoh agama dalam pembangunan sosial kemasyarakatan yang inklusif

ST.55 Melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan lokal melalui penyelenggaraan festival, acara budaya, dan revitalisasi cagar budaya

ST.56 Mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan keterampilan, karakter disiplin, dan potensi generasi muda berlandaskan nilai agama dan budaya lokal

ST.57 Penyederhanaan proses birokrasi dan regulasi serta Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah

ST.58 Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengembangan inovasi pemerintahan

ST.59 Pengembangan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi

ST.60 Penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit serta peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan terintegrasi



ST.61 Pengembangan mekanisme pengawasan internal yang efektif dan preventif untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN

ST.62 Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik

ST.63 Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik

ST.64 Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik

ST.65 Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik

ST.66 Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik serta kepatuhan dalam penerapan SOP pelayanan publik

ST.67 Pemantapan sistem pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan responsif

ST.68 Identifikasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur prioritas

ST.69 Meningkatkan alokasi dana infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan

ST.70 Peningkatan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan layak huni, drainase dan permukiman melalui implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah untuk pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terintegrasi dengan pengembangan kawasan permukiman yang didukung fasilitas sanitasi dan drainase

ST.71 Merehabilitasi dan membangun jalan jembatan serta infrastruktur transportasi darat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperkuat sektor ekonomi unggulan

ST.72 Menerapkan sistem pemeliharaan rutin infrastruktur daerah dan infrastruktur perhubungan darat guna memastikan fungsi jangka panjang dan efisiensi penggunaan

Untuk mengetahui keterkaitan dan keselarasan antara kebijakan RKPD Tahun 2027 dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, maka disajikan tabel berikut:



Tabel 4.8
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2027

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
Visi " Kabupaten Sidenreng Rappang Maju Dan Sejahtera"	M1. Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan	T.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian	Mengoptimalkan potensi kawasan komoditas unggulan, peningkatan infrastruktur dan kapasitas SDM, penyediaan pupuk, pengendalian hama, pengembangan bibit dan pakan, stabilisasi harga, implementasi Program IP 300, penguatan Brigade Pangan, serta penerapan teknologi modern dan mekanisasi	St.1	Pemetaan, identifikasi dan pengembangan wilayah komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan
							St.2	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk pengembangan infrastruktur sistem irigasi serta pembangunan dan rehabilitasi jalan tani
							St.3	Peningkatan kapasitas SDM petani/ peternak/ nelayan dan penyuluh
							St.4	Implementasi Program "pupuk lancar" untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dan "listrik masuk sawah" untuk mendukung pompa irigasi, cold storage, dan alat pertanian modern
							St.5	Penguatan sistem pengendalian hama dan penyakit secara terpadu serta pengembangan sistem asuransi pertanian untuk mitigasi risiko gagal panen
							St.6	Peningkatan kapasitas produksi, pengembangan bibit unggul dan kemandirian pakan
							St.7	Implementasi Program IP 300 untuk mendukung penanaman tiga kali setahun melalui optimalisasi pengelolaan lahan, penyediaan varietas tanaman cepat panen, dan koordinasi jadwal tanam

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
							St.8	Pembentukan dan penguatan Brigade Pangan sebagai kelompok masyarakat untuk mendukung produktivitas pertanian melalui koordinasi sumber daya, penerapan praktik pertanian modern, dan pengawasan Program IP 300
							St.9	Pengembangan kawasan pertanian terintegrasi (integrated farming), mekanisasi pertanian di sentra produksi serta Penerapan teknologi pertanian modern dan inovasi
				2	Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri	Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui identifikasi dan pemetaan sentra potensial, penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industri, peningkatan akses pasar dan rantai pasok, standarisasi mutu serta sertifikasi produk agroindustri, penguatan promosi berbasis kearifan lokal, pengendalian inflasi daerah, dan pembangunan kawasan ekonomi unggulan	St.10	Identifikasi sentra-sentra potensial untuk pengembangan produk unggulan daerah
							St.11	Pemetaan potensi pemanfaatan produk unggulan untuk pengembangan ekonomi lokal
							St.12	Pengembangan kemitraan antara petani, pelaku industri dan pengolahan
							St.13	Penguatan akses pasar dan jaringan pemasaran serta fasilitasi pengembangan rantai pasok produk unggulan daerah
							St.14	Standarisasi mutu dan sertifikasi produk agroindustri
							St.15	Penguatan daya tarik produk unggulan daerah berbasis kearifan lokal dan penguatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah
							St.16	Menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, Penguatan pengendalian inflasi daerah

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
								untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi rumah tangga
							St.17	Penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan pariwisata ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah
							St.17.a	**Percepatan hilirisasi produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan lokal melalui fasilitasi pengolahan pasca panen dan pengembangan industri berbasis bahan baku lokal guna meningkatkan nilai tambah komoditas daerah**
	M2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif	T.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin, peningkatan efektivitas bantuan sosial dan layanan dasar, penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes berbasis potensi lokal, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing, serta pemberdayaan wirausaha generasi Z dan milenial	St.18	Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin dan rentan untuk intervensi tepat sasaran serta peningkatan peran dan fungsi TKPKD
							St.19	Peningkatan efektivitas dan perluasan cakupan bantuan sosial, penguatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan
							St.20	Peningkatan Kemanfaatan dan Keberlanjutan Sistem Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendampingan dan Peningkatan Keterampilan khusus bagi kelompok miskin dan rentan

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
							St.20.a	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dalam program 3 juta rumah melalui pembebasan biaya BPHTB dan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
							St.21	Penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes dan Penyusunan rencana pengembangan UMKM berbasis potensi lokal
							St.22	Fasilitasi akses permodalan, dan pemasaran bagi UMKM, pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM termasuk implementasi Program Koperasi Merah Putih untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan yang mendukung rantai pasok agroindustri local dan pengembangan Program UMKM Maju
							St.23	Pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing serta pengembangan potensi wirausaha generasi Z dan milenial
							St.24	Pengembangan Program ekonomi produktif untuk pemberdayaan keluarga miskin dan rentan
							St.24.a	Akselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh desa/ kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai target nasional 80.000 koperasi, termasuk fasilitasi legalitas, modal awal, dan infrastruktur operasional koperasi

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
							St.24.b	Penguatan tata kelola, kapasitas SDM pengurus, dan sistem manajemen keuangan KDKMP melalui pelatihan, pendampingan berkelanjutan, dan pengawasan oleh Dinas Koperasi bersinergi dengan pemerintah desa
				4	Menurunnya tingkat pengangguran	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal	St.25	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan Program pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja
							St.26	Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata serta pengembangan kawasan transmigrasi prioritas nasional
							St.27	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
	M3. Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua	T.3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	5	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata	Pemetaan dan penanggulangan anak tidak sekolah, implementasi Program makanan bergizi gratis, peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik, penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang memadai, pengembangan budaya literasi, pendidikan karakter, dan soft skills, serta penguatan sekolah unggulan percontohan	St.28	Pemetaan, identifikasi serta Pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan anak tidak sekolah/putus sekolah dan Implementasi Program pemberian makanan bergizi gratis
							St.29	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta pemerataan pendistribusian tenaga kependidikan secara proporsional
							St.30	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
							St.31	Pengembangan budaya literasi di semua tingkat pendidikan dan masyarakat serta penguatan pendidikan karakter dan soft skills

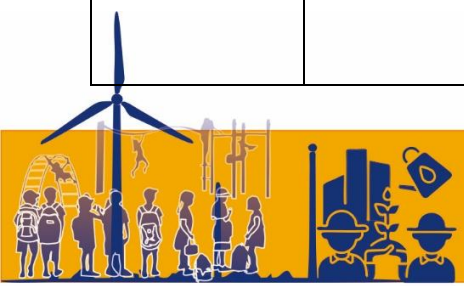
Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
						dengan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi	St.32	Pengembangan sekolah unggulan percontohan, Pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi serta implementasi Program Sekolah Rakyat
				6	Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif	Perluasan jangkauan dan cakupan BPJS Kesehatan, penguatan Program pencegahan dan penanganan stunting, peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur kesehatan terutama di daerah terpencil, serta penguatan upaya promotif-preventif berbasis masyarakat dengan pendekatan keluarga.	St.33	Penyusunan basis data kepesertaan Program BPJS Kesehatan Gratis dan penanganan stunting
							St.34	Perluasan cakupan BPJS Kesehatan Gratis
							St.35	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan status gizi ibu dan anak serta Implementasi Program "Anak-Anak Sidrap Sehat"
							St.36	Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, akses layanan kesehatan berkualitas ke daerah terpencil serta peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan
							St.37	Implementasi Program kesehatan promotif dan preventif berbasis masyarakat dalam rangka deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan
							St.38	Penguatan sistem pencegahan penyakit dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif
							St.38.a	Implementasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk skrining kesehatan dasar masyarakat mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan deteksi dini

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
								penyakit tidak menular bagi seluruh lapisan masyarakat
							St.38.b	Implementasi Program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis dalam rangka penurunan stunting dan peningkatan status gizi keluarga miskin dan rentan
							St.38.c	Implementasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui pemeriksaan kesehatan berkala bagi seluruh masyarakat dengan pendekatan promotif-preventif untuk deteksi dini penyakit tidak menular dan penyakit menular berbasis Puskesmas dan Posyandu
				7	Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif	Penguatan kerangka regulasi daerah, pencegahan perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, pengembangan Program ekonomi produktif, peningkatan aksesibilitas infrastruktur publik, dan pembangunan ketahanan keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial.	St.39	Penyusunan kerangka regulasi daerah yang komprehensif tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, dan penyandang disabilitas)
							St.40	Pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui Implementasi Program penguatan ketahanan keluarga
							St.41	Pengembangan Program ekonomi produktif bagi perempuan dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan
							St.42	Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas
							St.43	Penguatan keberdayaan dan resiliensi kelompok rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
	M4. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan	T.4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	8	Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca	Penguatan regulasi lingkungan, peningkatan sarana-prasarana, pengelolaan lingkungan terpadu berbasis partisipasi masyarakat, pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan penataan ruang terbuka hijau	St.44	Penguatan regulasi lingkungan hidup serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi Program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"
							St.45	Pengelolaan lingkungan secara terpadu berbasis pelibatan stakeholder dan partisipasi masyarakat
							St.46	Pengendalian pencemaran lingkungan, air, tanah dan udara
							St.47	Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan Penataan ruang terbuka hijau
							St.48	Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan
				9	Menurunnya tingkat risiko bencana	Penguatan regulasi mitigasi bencana, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan sistem peringatan dini, serta penguatan kapasitas masyarakat dan lembaga penanggulangan bencana.	St.49	Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi Program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"
							St.50	Penguatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana
	M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius	T.5	Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai	10	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat	Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial masyarakat melalui penguatan koordinasi antarlembaga, pendidikan nilai-nilai kebangsaan, dan pencegahan konflik sosial.	St.51	Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku yang mengganggu ketertiban sosial

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
			budaya, adat dan agama				St.52	Penguatan sistem keamanan terpadu dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
							St.53	Meningkatkan dialog antarumat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung harmoni sosial dan mencegah konflik sosial
				11	Berkembangnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta kearifan lokal	Memperkuat nilai-nilai religius, melestarikan budaya lokal, dan memberdayakan pemuda melalui dukungan kegiatan keagamaan, pelestarian cagar budaya, serta pembinaan keterampilan berbasis nilai agama dan kearifan lokal	St.54	Peningkatan dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap kegiatan keagamaan, peningkatan sarana prasarana tempat ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan serta penguatan kapasitas tokoh agama dalam pembangunan sosial kemasyarakatan yang inklusif
							St.55	Melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan lokal melalui penyelenggaraan festival, acara budaya, dan revitalisasi cagar budaya
							St.56	Mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan keterampilan, karakter disiplin, dan potensi generasi muda berlandaskan nilai agama dan budaya lokal
	M6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan	T.6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,	12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan, penguatan sistem perencanaan,	St.57	Penyederhanaan proses birokrasi dan regulasi serta Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah

Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
	yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital		transparan, akuntabel dan inovatif		berbasis inovasi dan digitalisasi	penganggaran, dan inovasi pemerintahan, pengembangan administrasi berbasis elektronik yang terintegrasi, peningkatan kapasitas ASN berbasis merit, penguatan pengawasan internal, pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis elektronik	St.58	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengembangan inovasi pemerintahan
							St.59	Pengembangan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi
							St.60	Penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit serta peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan terintegrasi
							St.61	Pengembangan mekanisme pengawasan internal yang efektif dan preventif untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN
							St.62	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik
				13	Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik, peningkatan sarana-prasarana pelayanan publik, optimalisasi sistem pengaduan masyarakat, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik, serta pemantapan penerapan SOP pelayanan publik	St.63	Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik
							St.64	Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik
							St.65	Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik
							St.66	Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik serta kepatuhan dalam penerapan SOP pelayanan publik



Visi	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan	Strategi	
							St.67	Pemantapan sistem pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan responsif
	M7. Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	T.7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	14	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah	Mengembangkan infrastruktur daerah yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan melalui perencanaan berbasis kebutuhan prioritas, optimalisasi sumber pendanaan, pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung	St.68	Identifikasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur prioritas
							St.69	Meningkatkan alokasi dana infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan
							St.70	Peningkatan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan layak huni, drainase dan permukiman melalui implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah untuk pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terintegrasi dengan pengembangan kawasan permukiman yang didukung fasilitas sanitasi dan drainase
							St.71	Merehabilitasi dan membangun jalan jembatan serta infrastruktur transportasi darat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperkuat sektor ekonomi unggulan
							St.72	Menerapkan sistem pemeliharaan rutin infrastruktur daerah dan infrastruktur perhubungan darat guna memastikan fungsi jangka panjang dan efisiensi penggunaan

Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, diolah.

Perencanaan pembangunan yang baik selalu dimulai dari pemahaman yang jelas tentang masalah yang ingin diselesaikan. Tanpa memahami hal tersebut, kebijakan yang dirumuskan berisiko tidak tepat sasaran dan strategi yang dipilih tidak akan membawa perubahan yang berarti. Oleh karena itu, setiap arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 disusun dengan mengacu langsung pada permasalahan pembangunan yang telah diidentifikasi, sehingga ada keterkaitan yang jelas antara kondisi yang ingin diubah, komitmen kebijakan yang ditetapkan, dan cara atau strategi untuk mewujudkannya. Keterkaitan ini juga berdampak langsung pada kualitas penganggaran daerah. Ketika kebijakan dan strategi benar-benar lahir dari permasalahan, maka alokasi anggaran melalui APBD dapat diarahkan pada program yang paling berdampak, bukan sekedar membiayai kegiatan rutin yang tidak berkontribusi pada perubahan kondisi masyarakat. Pada akhirnya, keselarasan antara permasalahan, kebijakan, dan strategi inilah yang menjadi dasar evaluasi pembangunan yang jujur dan akuntabel, karena keberhasilan setiap kebijakan dapat diukur secara langsung dari sejauh mana permasalahan yang menjadi landasannya berhasil diselesaikan. Berikut disajikan keterkaitan permasalahan dan arah kebijakan serta strategi:

Tabel 4.9
Keterkaitan Permasalahan, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2027

Permasalahan Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi	
Belum optimalnya kualitas dan stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah	Mengoptimalkan potensi kawasan komoditas unggulan, peningkatan infrastruktur dan kapasitas SDM, penyediaan pupuk, pengendalian hama, pengembangan bibit dan pakan, stabilisasi harga, implementasi program IP 300, penguatan Brigade Pangan, serta penerapan teknologi modern dan mekanisasi	St.1	Pemetaan, identifikasi dan pengembangan wilayah komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan
		St.2	Peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan, termasuk pengembangan infrastruktur sistem irigasi serta pembangunan dan rehabilitasi jalan tani
		St.3	Peningkatan kapasitas SDM petani/peternak/nelayan dan penyuluh
		St.4	Implementasi program "pupuk lancar" untuk memastikan ketersediaan pupuk bagi petani dan "listrik masuk sawah" untuk mendukung pompa irigasi, cold storage, dan alat pertanian modern
		St.5	Penguatan sistem pengendalian hama dan penyakit secara terpadu serta pengembangan sistem asuransi pertanian untuk mitigasi risiko gagal panen
		St.6	Peningkatan kapasitas produksi, pengembangan bibit unggul dan kemandirian pakan
		St.7	Implementasi program IP 300 untuk mendukung penanaman tiga kali setahun melalui optimalisasi pengelolaan lahan, penyediaan varietas tanaman cepat panen, dan koordinasi jadwal tanam

Permasalahan Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi	
		St.8	Pembentukan dan penguatan Brigade Pangan sebagai kelompok masyarakat untuk mendukung produktivitas pertanian melalui koordinasi sumber daya, penerapan praktik pertanian modern, dan pengawasan program IP 300
		St.9	Pengembangan kawasan pertanian terintegrasi (integrated farming), mekanisasi pertanian di sentra produksi serta Penerapan teknologi pertanian modern dan inovasi
	Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui identifikasi dan pemetaan sentra potensial, penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industri, peningkatan akses pasar dan rantai pasok, standarisasi mutu serta sertifikasi produk agroindustri, penguatan promosi berbasis kearifan lokal, pengendalian inflasi daerah, dan pembangunan kawasan ekonomi unggulan	St.10	Identifikasi sentra-sentra potensial untuk pengembangan produk unggulan daerah
		St.11	Pemetaan potensi pemanfaatan produk unggulan untuk pengembangan ekonomi lokal
		St.12	Pengembangan kemitraan antara petani, pelaku industri dan pengolahan
		St.13	Penguatan akses pasar dan jaringan pemasaran serta fasilitasi pengembangan rantai pasok produk unggulan daerah
		St.14	Standarisasi mutu dan sertifikasi produk agroindustri
		St.15	Penguatan daya tarik produk unggulan daerah berbasis kearifan lokal dan penguatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah
		St.16	Menjaga stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, Penguatan pengendalian inflasi daerah untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi rumah tangga
		St.17	Penciptaan iklim usaha untuk investasi dan pengembangan kawasan pariwisata ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah
		St.17.a	**Percepatan hilirisasi produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan lokal melalui fasilitasi pengolahan pasca panen dan pengembangan industri berbasis bahan baku lokal guna meningkatkan nilai tambah komoditas daerah**
Melambatnya penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya ketimpangan pendapatan	Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin, peningkatan efektivitas bantuan sosial dan layanan dasar, penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes	St.18	Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin dan rentan untuk intervensi tepat sasaran serta peningkatan peran dan fungsi TKPKD
		St.19	Peningkatan efektivitas dan perluasan cakupan bantuan sosial, penguatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan

Permasalahan Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi	
	berbasis potensi lokal, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing, serta pemberdayaan wirausaha generasi Z dan milenial	St.20	Peningkatan Kemanfaatan dan Keberlanjutan Sistem Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendampingan dan Peningkatan Keterampilan khusus bagi kelompok miskin dan rentan
		St.20.a	**Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dalam program 3 juta rumah melalui pembebasan biaya BPHTB dan PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**
		St.21	Penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes dan Penyusunan rencana pengembangan UMKM berbasis potensi lokal
		St.22	Fasilitasi akses permodalan, dan pemasaran bagi UMKM, pengembangan kemitraan koperasi dan UMKM termasuk implementasi program Koperasi Merah Putih untuk pembentukan koperasi desa/kelurahan yang mendukung rantai pasok agroindustri local dan pengembangan program UMKM Maju
		St.23	Pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing serta pengembangan potensi wirausaha generasi Z dan milenial
		St.24	Pengembangan program ekonomi produktif untuk pemberdayaan keluarga miskin dan rentan
		St.24.a	**Akselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai target nasional 80.000 koperasi, termasuk fasilitasi legalitas, modal awal, dan infrastruktur operasional koperasi**
		St.24.b	**Penguatan tata kelola, kapasitas SDM pengurus, dan sistem manajemen keuangan KDKMP melalui pelatihan, pendampingan berkelanjutan, dan pengawasan oleh Dinas Koperasi bersinergi dengan pemerintah desa**
Masih rendahnya daya saing tenaga kerja dan partisipasi Angkatan kerja	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal	St.25	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan program pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja
		St.26	Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui sektor ekonomi kreatif dan pariwisata serta pengembangan kawasan transmigrasi prioritas nasional
		St.27	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal

Permasalahan Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi	
Masih rendahnya kualitas pembangunan manusia	Pemetaan dan penanggulangan anak tidak sekolah, implementasi program makanan bergizi gratis, peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik, penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang memadai, pengembangan budaya literasi, pendidikan karakter, dan soft skills, serta penguatan sekolah unggulan percontohan dengan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi	St.28	Pemetaan, identifikasi serta Pengembangan sistem pencegahan dan penanggulangan anak tidak sekolah/putus sekolah dan Implementasi program pemberian makanan bergizi gratis
		St.29	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik serta pemerataan pendistribusian tenaga kependidikan secara proporsional
		St.30	Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
		St.31	Pengembangan budaya literasi di semua tingkat pendidikan dan masyarakat serta penguatan pendidikan karakter dan soft skills
		St.32	Pengembangan sekolah unggulan percontohan, Pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi serta implementasi program Sekolah Rakyat
	Perluasan jangkauan dan cakupan BPJS Kesehatan, penguatan program pencegahan dan penanganan stunting, peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur kesehatan terutama di daerah terpencil, serta penguatan upaya promotif-preventif berbasis masyarakat dengan pendekatan keluarga.	St.33	Penyusunan basis data kepesertaan program BPJS Kesehatan Gratis dan penanganan stunting
		St.34	Perluasan cakupan BPJS Kesehatan Gratis
		St.35	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan status gizi ibu dan anak serta Implementasi program "Anak-Anak Sidrap Sehat"
		St.36	Peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan, akses layanan kesehatan berkualitas ke daerah terpencil serta peningkatan kualitas dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan
		St.37	Implementasi program kesehatan promotif dan preventif berbasis masyarakat dalam rangka deteksi dini dan penanganan masalah kesehatan
		St.38	Penguatan sistem pencegahan penyakit dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif
		St.38.a	**Implementasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk skrining kesehatan dasar masyarakat mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan deteksi dini penyakit tidak menular bagi seluruh lapisan masyarakat**
		St.38.b	**Implementasi Program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis dalam**

Permasalahan Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi	
			rangka penurunan stunting dan peningkatan status gizi keluarga miskin dan rentan
		St.38.c	**Implementasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui pemeriksaan kesehatan berkala bagi seluruh masyarakat dengan pendekatan promotif-preventif untuk deteksi dini penyakit tidak menular dan penyakit menular berbasis Puskesmas dan Posyandu**
	Penguatan kerangka regulasi daerah, pencegahan perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, pengembangan program ekonomi produktif, peningkatan aksesibilitas infrastruktur publik, dan pembangunan ketahanan keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial.	St.39	Penyusunan kerangka regulasi daerah yang komprehensif tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, anak, dan penyandang disabilitas)
		St.40	Pencegahan dan penanganan perkawinan anak melalui Implementasi program penguatan ketahanan keluarga
		St.41	Pengembangan program ekonomi produktif bagi perempuan dan penyandang disabilitas dan kelompok rentan
		St.42	Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas
		St.43	Penguatan keberdayaan dan resiliensi kelompok rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar
Rendahnya kualitas lingkungan hidup	Penguatan regulasi lingkungan, peningkatan sarana-prasarana, pengelolaan lingkungan terpadu berbasis partisipasi masyarakat, pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan penataan ruang terbuka hijau	St.44	Penguatan regulasi lingkungan hidup serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"
		St.45	Pengelolaan lingkungan secara terpadu berbasis pelibatan stakeholder dan partisipasi masyarakat
		St.46	Pengendalian pencemaran lingkungan, air, tanah dan udara
		St.47	Pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan Penataan ruang terbuka hijau
		St.48	Pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan
	Penguatan regulasi mitigasi bencana, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan sistem peringatan dini, serta penguatan kapasitas masyarakat dan lembaga penanggulangan bencana.	St.49	Penguatan regulasi mitigasi bencana serta peningkatan sarana dan prasarana melalui Implementasi program "Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana"
		St.50	Penguatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana

Permasalahan Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi	
Belum optimalnya stabilitas keamanan, ketertiban umum serta kehidupan sosial masyarakat	Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial masyarakat melalui penguatan koordinasi antarlembaga, pendidikan nilai-nilai kebangsaan, dan pencegahan konflik sosial.	St.51	Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku yang mengganggu ketertiban sosial
		St.52	Penguatan sistem keamanan terpadu dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
		St.53	Meningkatkan dialog antarumat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk mendukung harmoni sosial dan mencegah konflik sosial
	Memperkuat nilai-nilai religius, melestarikan budaya lokal, dan memberdayakan pemuda melalui dukungan kegiatan keagamaan, pelestarian cagar budaya, serta pembinaan keterampilan berbasis nilai agama dan kearifan lokal	St.54	Peningkatan dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap kegiatan keagamaan, peningkatan sarana prasarana tempat ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan serta penguatan kapasitas tokoh agama dalam pembangunan sosial kemasyarakatan yang inklusif
		St.55	Melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan kebudayaan lokal melalui penyelenggaraan festival, acara budaya, dan revitalisasi cagar budaya
		St.56	Mengoptimalkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui pengembangan keterampilan, karakter disiplin, dan potensi generasi muda berlandaskan nilai agama dan budaya lokal
Masih perlunya penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan, penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan inovasi pemerintahan, pengembangan administrasi berbasis elektronik yang terintegrasi, peningkatan kapasitas ASN berbasis merit, penguatan pengawasan internal, pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis elektronik	St.57	Penyederhanaan proses birokrasi dan regulasi serta Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah
		St.58	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengembangan inovasi pemerintahan
		St.59	Pengembangan sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi
		St.60	Penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit serta peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan terintegrasi
		St.61	Pengembangan mekanisme pengawasan internal yang efektif dan preventif untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN
		St.62	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik
	Penyelenggaraan dan pengembangan Mall	St.63	Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik

Permasalahan Pembangunan	Arah Kebijakan	Strategi	
	Pelayanan Publik, peningkatan sarana-prasarana pelayanan publik, optimalisasi sistem pengaduan masyarakat, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik, serta pemantapan penerapan SOP pelayanan publik	St.64	Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik
		St.65	Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik
		St.66	Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik serta kepatuhan dalam penerapan SOP pelayanan publik
		St.67	Pemantapan sistem pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan responsif
Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan infrastruktur daerah	Mengembangkan infrastruktur daerah yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan melalui perencanaan berbasis kebutuhan prioritas, optimalisasi sumber pendanaan, pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung	St.68	Identifikasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur prioritas
		St.69	Meningkatkan alokasi dana infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan
		St.70	Peningkatan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan layak huni, drainase dan permukiman melalui implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah untuk pembangunan dan renovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terintegrasi dengan pengembangan kawasan permukiman yang didukung fasilitas sanitasi dan drainase
		St.71	Merehabilitasi dan membangun jalan jembatan serta infrastruktur transportasi darat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperkuat sektor ekonomi unggulan
		St.72	Menerapkan sistem pemeliharaan rutin infrastruktur daerah dan infrastruktur perhubungan darat guna memastikan fungsi jangka panjang dan efisiensi penggunaan

Sumber: Tim penyusun RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027, diolah.

4.4. Keselarasan Perencanaan Pembangunan

4.4.1. Keselarasan dengan RPJMD

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, RKPD berkedudukan sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran operasional dari RPJMD. Hubungan antara kedua dokumen ini bersifat hierarkis sekaligus substantif, artinya RKPD tidak hanya harus menyelaraskan secara formal dengan RPJMD, tetapi juga harus mampu menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka menengah ke dalam program dan kegiatan tahunan yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan. RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 tidak disusun sebagai dokumen yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya sistematis pencapaian seluruh target RPJMD 2025–2029 secara

konsisten dan berkelanjutan.

Kedudukan RKPD sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD menuntut lebih dari sekadar konsistensi dokumen, ia menuntut konsistensi substantif terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, tema maupun prioritas pembangunan daerah dengan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan sebagai komitmen politik dan teknis pemerintah daerah selama lima tahun. RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027, sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029, mengemban tanggung jawab ganda: akumulasi capaian pembangunan yang telah dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya tidak terputus, sekaligus mengakselerasi target-target yang masih memerlukan intervensi agar seluruh target akhir RPJMD dapat tercapai pada tahun 2029.



Tabel 4.10
Sinkronisasi RPJMD dengan RKPD Tahun 2027

RPJMD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025-2029					RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2027				
Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan		Sasaran		Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan		Sasaran	
PD1. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan	T.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan produktivitas sektor pertanian	PD1. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan	T.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan produktivitas sektor pertanian
			2	Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri				2	Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri
PD2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan	T.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PD2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan	T.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3	Meningkatnya pendapatan masyarakat
			4	Menurunnya tingkat pengangguran				4	Menurunnya tingkat pengangguran
PD3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas	T.3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	5	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata	PD3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas	T.3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	5	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata
			6	Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif				6	Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif

RPJMD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025-2029					RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2027				
Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan		Sasaran		Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan		Sasaran	
			7	Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif				7	Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif
PD4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	T.4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan			PD4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana	T.4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan		
			8	Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca				8	Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca
			9	Menurunnya tingkat risiko bencana				9	Menurunnya tingkat risiko bencana
PD5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius	T.5	Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama			PD5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius	T.5	Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama		
			10	Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat				10	Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
			11	Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda				11	Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda
PD6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	T.6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan,			PD6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	T.6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan,		
			12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah				12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

RPJMD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025-2029					RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2027				
Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan		Sasaran		Prioritas Pembangunan Daerah	Tujuan		Sasaran	
		akuntabel dan inovatif		berbasis inovasi dan digitalisasi			akuntabel dan inovatif		berbasis inovasi dan digitalisasi
			13	Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik				13	Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
PD7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	T.7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas			PD7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	T.7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas		
			14	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah				14	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah

Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, diolah

Selain tujuan dan sasaran, keselarasan antara RPJMD Tahun 2025-2029 juga tergambarkan pada perumusan tema RKPD Tahun 2027 yang bersumber dari tema RPJMD Tahun 2025-2029. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD 2027 merupakan penjabaran operasional dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, tema RKPD 2027 dirumuskan untuk memperkuat pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sesuai dengan tema RPJMD tahun 2027, sehingga seluruh program, kegiatan, dan anggaran yang direncanakan dalam RKPD tetap berada dalam koridor dan mendukung target-target pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Keselarasan tema ini memastikan kesinambungan perencanaan, konsistensi kebijakan, serta fokus pencapaian hasil pembangunan yang lebih terukur dan berdampak di tahun 2027.

Gambar 4.4
Keselarasan Tema RPJMD dengan Tema RKPD

Tema RPJMD	Tema RKPD
"Penguatan Ekonomi, Swasembada Pangan dan SDM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan"	"Akselerasi Pembangunan Ekonomi, Swasembada Pangan, dan SDM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan"

Sumber: Data diolah Tim RKPD 2027, 2026

Tema RKPD Tahun 2027 bersumber dari arah kebijakan RPJMD, karena dirumuskan sebagai penjabaran lebih operasional dan kontekstual dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Tema tersebut mengakomodasi fokus prioritas kebijakan RPJMD pada tahun kelima, sehingga mencerminkan komitmen untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah melalui pendekatan yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan. Keselarasan ini memastikan bahwa setiap langkah kebijakan dalam RKPD 2027 tidak menyimpang dari kerangka strategis RPJMD, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan yang telah direncanakan. Selain itu, prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2027 juga selaras dengan Arah Kebijakan RPJMD. Prioritas-prioritas tersebut merupakan derivasi langsung dari program unggulan dan strategi utama RPJMD, yang difokuskan pada pencapaian target kinerja tahun akhir periode RPJMD. Dengan demikian, alokasi sumber daya, program, dan kegiatan dalam RKPD dirancang untuk mendukung secara konkret implementasi arah kebijakan RPJMD, baik dalam aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan. Keselarasan ini menjamin adanya kesinambungan perencanaan, efisiensi anggaran, serta pencapaian hasil pembangunan yang lebih optimal dan terukur di tahun 2027.

Tema RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 bersumber langsung dari arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Arah kebijakan RPJMD pada tahapan tahun 2027 secara eksplisit menekankan pentingnya penguatan struktur ekonomi daerah, pemantapan swasembada pangan sebagai keunggulan komparatif Kabupaten Sidenreng Rappang, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prasyarat utama pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga muatan kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tema tahunan yang lebih operasional dan akseleratif, sehingga setiap program dan kegiatan yang dirancang dalam RKPD 2027 memiliki pijakan kebijakan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.11
Tema RKPD 2027 bersumber dari Arah Kebijakan RPJMD

Arah Kebijakan RPJMD	Tema RKPD
Mengoptimalkan potensi kawasan komoditas unggulan, peningkatan infrastruktur dan kapasitas SDM, penyediaan pupuk, pengendalian hama, pengembangan bibit dan pakan, stabilisasi harga, implementasi program IP 300, penguatan Brigade Pangan, serta penerapan teknologi modern dan mekanisasi	"Akselerasi Pembangunan Ekonomi, Swasembada Pangan, dan SDM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan"
Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui identifikasi dan pemetaan sentra potensial, penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industri, peningkatan akses pasar dan rantai pasok, standarisasi mutu serta sertifikasi produk agroindustri, penguatan promosi berbasis kearifan lokal, pengendalian inflasi daerah, dan pembangunan kawasan ekonomi unggulan	
Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin, peningkatan efektivitas bantuan sosial dan layanan dasar, penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes berbasis potensi lokal, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing, serta pemberdayaan wirausaha generasi Z dan milenial	
Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal	
Pemetaan dan penanggulangan anak tidak sekolah, implementasi program makanan bergizi gratis, peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik, penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang memadai, pengembangan budaya literasi, pendidikan karakter, dan soft skills, serta penguatan sekolah unggulan percontohan dengan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi	
Perluasan jangkauan dan cakupan BPJS Kesehatan, penguatan program pencegahan dan penanganan stunting, peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur kesehatan terutama di daerah terpencil, serta penguatan upaya promotif-preventif berbasis masyarakat dengan pendekatan keluarga.	

Arah Kebijakan RPJMD	Tema RKPD
Penguatan kerangka regulasi daerah, pencegahan perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, pengembangan program ekonomi produktif, peningkatan aksesibilitas infrastruktur publik, dan pembangunan ketahanan keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial.	
Penguatan regulasi lingkungan, peningkatan sarana-prasarana, pengelolaan lingkungan terpadu berbasis partisipasi masyarakat, pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan penataan ruang terbuka hijau	
Penguatan regulasi mitigasi bencana, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan sistem peringatan dini, serta penguatan kapasitas masyarakat dan lembaga penanggulangan bencana.	
Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial masyarakat melalui penguatan koordinasi antarlembaga, pendidikan nilai-nilai kebangsaan, dan pencegahan konflik sosial.	
Memperkuat nilai-nilai religius, melestarikan budaya lokal, dan memberdayakan pemuda melalui dukungan kegiatan keagamaan, pelestarian cagar budaya, serta pembinaan keterampilan berbasis nilai agama dan kearifan lokal	
Penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan, penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan inovasi pemerintahan, pengembangan administrasi berbasis elektronik yang terintegrasi, peningkatan kapasitas ASN berbasis merit, penguatan pengawasan internal, pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis elektronik	
Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik, peningkatan sarana-prasarana pelayanan publik, optimalisasi sistem pengaduan masyarakat, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik, serta pemantapan penerapan SOP pelayanan publik	
Mengembangkan infrastruktur daerah yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan melalui perencanaan berbasis kebutuhan prioritas, optimalisasi sumber pendanaan, pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung	

Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah.

Dalam kerangka tersebut, prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2027 disusun dengan memastikan keselarasan yang erat dengan arah kebijakan RPJMD. Setiap prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari kebijakan jangka menengah yang telah digariskan, sekaligus respons terhadap kondisi dan kebutuhan aktual masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang. Keselarasan ini penting untuk menjamin bahwa pembangunan tahunan tidak berjalan secara parsial dan tidak terputus, melainkan terintegrasi dalam satu alur kebijakan yang konsisten dari jangka menengah hingga pelaksanaan tahunan.

Tabel 4.12
Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah
Mengoptimalkan potensi kawasan komoditas unggulan, peningkatan infrastruktur dan kapasitas SDM, penyediaan pupuk, pengendalian hama, pengembangan bibit dan pakan, stabilisasi harga, implementasi program IP 300, penguatan Brigade Pangan, serta penerapan teknologi modern dan mekanisasi	PD1. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan
Mendorong pengembangan ekonomi lokal melalui identifikasi dan pemetaan sentra potensial, penguatan kemitraan antara petani dan pelaku industri, peningkatan akses pasar dan rantai pasok, standarisasi mutu serta sertifikasi produk agroindustri, penguatan promosi berbasis kearifan lokal, pengendalian inflasi daerah, dan pembangunan kawasan ekonomi unggulan	
Penyusunan basis data terpadu masyarakat miskin, peningkatan efektivitas bantuan sosial dan layanan dasar, penguatan kelembagaan UMKM dan BUMDes berbasis potensi lokal, fasilitasi akses permodalan dan pemasaran, pengembangan produk unggulan UMKM yang berdaya saing, serta pemberdayaan wirausaha generasi Z dan milenial	PD2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan
Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal	
Pemetaan dan penanggulangan anak tidak sekolah, implementasi program makanan bergizi gratis, peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik, penyediaan sarana-prasarana pendidikan yang memadai, pengembangan budaya literasi, pendidikan karakter, dan soft skills, serta penguatan sekolah unggulan percontohan dengan kurikulum berbasis muatan lokal dan digitalisasi	PD3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas
Perluasan jangkauan dan cakupan BPJS Kesehatan, penguatan program pencegahan dan penanganan stunting, peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur kesehatan terutama di daerah terpencil, serta penguatan upaya promotif-preventif berbasis masyarakat dengan pendekatan keluarga.	
Penguatan kerangka regulasi daerah, pencegahan perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, pengembangan program ekonomi produktif, peningkatan aksesibilitas infrastruktur publik, dan pembangunan ketahanan keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial.	



Arah Kebijakan RPJMD	Prioritas Pembangunan Daerah
Penguatan regulasi lingkungan, peningkatan sarana-prasarana, pengelolaan lingkungan terpadu berbasis partisipasi masyarakat, pengendalian pencemaran air dan udara, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dan penataan ruang terbuka hijau	PD4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
Penguatan regulasi mitigasi bencana, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan sistem peringatan dini, serta penguatan kapasitas masyarakat dan lembaga penanggulangan bencana.	
Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial masyarakat melalui penguatan koordinasi antarlembaga, pendidikan nilai-nilai kebangsaan, dan pencegahan konflik sosial.	PD5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius
Memperkuat nilai-nilai religius, melestarikan budaya lokal, dan memberdayakan pemuda melalui dukungan kegiatan keagamaan, pelestarian cagar budaya, serta pembinaan keterampilan berbasis nilai agama dan kearifan lokal	
Penyederhanaan birokrasi dan penataan kelembagaan, penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan inovasi pemerintahan, pengembangan administrasi berbasis elektronik yang terintegrasi, peningkatan kapasitas ASN berbasis merit, penguatan pengawasan internal, pemantapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis elektronik	PD6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
Penyelenggaraan dan pengembangan Mall Pelayanan Publik, peningkatan sarana-prasarana pelayanan publik, optimalisasi sistem pengaduan masyarakat, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pelayanan publik, serta pemantapan penerapan SOP pelayanan publik	
Mengembangkan infrastruktur daerah yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan melalui perencanaan berbasis kebutuhan prioritas, optimalisasi sumber pendanaan, pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung	PD7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas

Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah

4.4.2. Keselarasan dengan Provinsi dan Nasional

Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bukan sekedar kewajiban normatif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan instrumen strategi untuk memastikan bahwa setiap rupiah belanja daerah memberikan kontribusi terukur terhadap pencapaian target pembangunan nasional. RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 disusun dengan integrasi arah kebijakan dan sasaran

prioritas RKP Tahun 2027 ke dalam struktur perencanaan daerah, melalui penelaahan terhadap agenda pembangunan nasional yang berlandaskan delapan misi Asta Cita dan 17 program prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Dengan pendekatan ini, RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan lokal, tetapi sekaligus menjadi kontribusi nyata Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Keselarasan prioritas pembangunan RKPD 2027 dengan prioritas pembangunan nasional disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.13
Keselarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Nasional		Daerah	
Prioritas Nasional (Asta Cita)	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan KDH
PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	P6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	13. ASN/ Perangkat Desa Sejahtera
PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi		
	6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba		
PN2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	9. Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan interansional yang kondusif	P1. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan	3. Pupuk Lancar
	1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air		4. Listrik Masuk Sawah
PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi		5. Harga Komoditi Pertanian Dan Perkebunan Stabil
	2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara		6. Peternakan Dan Perikanan Sukses

Nasional		Daerah	
Prioritas Nasional (Asta Cita)	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan KDH
PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.	13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	P7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah	9. Jalan Mulus
	14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya		8. Tersedianya Lapangan Kerja
PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.	8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi	P3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas	1. BPJS Kesehatan Gratis
	7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat		11. Anak-Anak Sidrap Sehat
	10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas		2. Pendidikan Unggul
	17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.		
PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Pemberantasan kemiskinan	P2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan	7. UMKM Maju
	12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani		12. Pengembangan Potensi Wirausaha Generasi Z Dan Milenial

Nasional		Daerah	
Prioritas Nasional (Asta Cita)	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Unggulan KDH
PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.	11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup	P4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan	14. Sidrap Bersih Dan Tangguh Bencana
	16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah	P5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius	10. Sidrap Aman Dan Religius

Sumber: RKP 2027, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, diolah

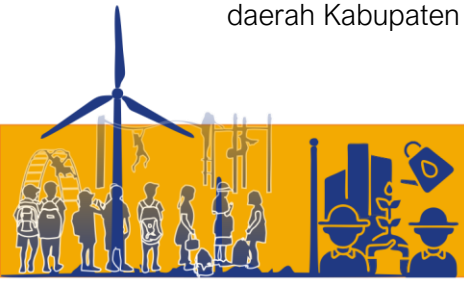
Tabel 4.14
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dengan Prioritas Nasional Asta Cita

Tujuan		Sasaran		Asta Cita
T.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	1	Meningkatnya Ketahanan Pangan dan produktivitas sektor pertanian	PN2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
		2	Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri	PN 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
T.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PN 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
		4	Menurunnya tingkat pengangguran	
T.3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	5	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata	PN 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
		6	Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif	
		7	Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif	

Tujuan		Sasaran		Asta Cita
T.4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	8	Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca	PN 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
		9	Menurunnya tingkat risiko bencana	
T.5	Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama	10	Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	
		11	Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda	
T.6	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif	12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi	PN 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
		13	Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	PN1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
T.7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	14	Meningkatnya kualitas pengelolaan infrastruktur daerah	PN3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

Sumber: RKP 2027, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029, diolah

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang berjenjang, RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan dan mengintegrasikan arah kebijakan serta memprioritaskan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertua dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029. Keselarasan ini merupakan bagian dari komitmen Kabupaten Sidenreng Rappang untuk berkontribusi secara aktif dan terencana dalam pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Berikut disajikan keselarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Provinsi Sulawesi Selatan:



Tabel 4.15
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulsel
P1. Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri unggulan	P3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
	P4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing
P2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan	P5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan
P3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas	P1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi
P4. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim	P8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi
P5. Pengembangan kehidupan sosial yang kondusif, berbudaya, dan religius	P2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal
P6. Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan	P6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital
P7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas	P7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan

Sumber: Rancangan RKPD Prov Sulsel, diolah.

Keselarasan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Sidenreng Rappang penting untuk memastikan bahwa capaian pembangunan di tingkat kabupaten memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi maupun target-target strategis nasional, sekaligus menghindari tumpang tindih maupun kesenjangan arah kebijakan antartingkat pemerintahan. Sasaran utama pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2027 mencakup tiga fokus strategis, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga fokus tersebut diterjemahkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang beserta indikator kinerja masing-masing.

Tabel 4.16
Keselarasan Sasaran Utama Pembangunan Nasional, Provinsi Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027

No.	RKP 2027		RKPD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2027		RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2027	
	Sasaran Utama Pembangunan Nasional	Indikator	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tujuan/Sasaran	Indikator
1	Pertumbuhan Tinggi yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	T.3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	T1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
			S.3.1. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	S1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dan produktivitas sektor pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%)
				Rasio Volume usaha Koperasi terhadap PDRB		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)
				Indeks Ketahanan Pangan	S2. Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
		GNI per Kapita/ PDRB Per kapita			T2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
					S3. Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita (juta rupiah)
		Penurunan Intensitas Emisi GRK	T.6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yg merata dan lingkungan yang berkelanjutan	Indeks Williamson	T4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)
				Penurunan Intensitas Emisi GRK		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	S.6.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, serta Ketangguhan Adaptasi dan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana	S8. Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	S9. Menurunnya tingkat risiko bencana	Indeks Resiko Bencana (indeks)

No.	RKP 2027		RKPD PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2027		RKPD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2027	
	Sasaran Utama Pembangunan Nasional	Indikator	Tujuan/Sasaran	Indikator	Tujuan/Sasaran	Indikator
2	Penurunan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	T.3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Rasio Gini	T2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)
		Kemiskinan Ekstrem	S.3.5. Menurunnya Kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan		Rasio Gini (Indeks)
		Rasio Gini			S3. Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita (juta rupiah)
		Tingkat Pengangguran Terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka	S4. Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
3	Sumber Daya Manusia Berkualitas	Indeks Modal Manusia/ IPM	T.1. Meningkatnya kualitas Modal Manusia	Indeks Modal Manusia	T3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)
			S.1.1. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	Usia Harapan Hidup	S5. Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata	Indeks Pendidikan (Indeks)
			S.1.2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	Rata rata lama sekolah	S6. Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif	Indeks Kesehatan (Indeks)
				Harapan lama sekolah	S7. Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif	Indeks pembangunan gender (Indeks)

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027



Keselarasan antara sasaran pembangunan nasional dan daerah tidak cukup hanya dilihat dari kesesuaian program dan kegiatan secara tekstual, tetapi harus dapat dibuktikan melalui keselarasan indikator makro pembangunan yang menjadi ukuran bersama keberhasilan pembangunan di semua tingkat pemerintahan. Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang diukur melalui beberapa indikator makro pembangunan daerah, maka disinkronisasikan target sasaran pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 4.17
Sinkronisasi Target Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi
Dan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027

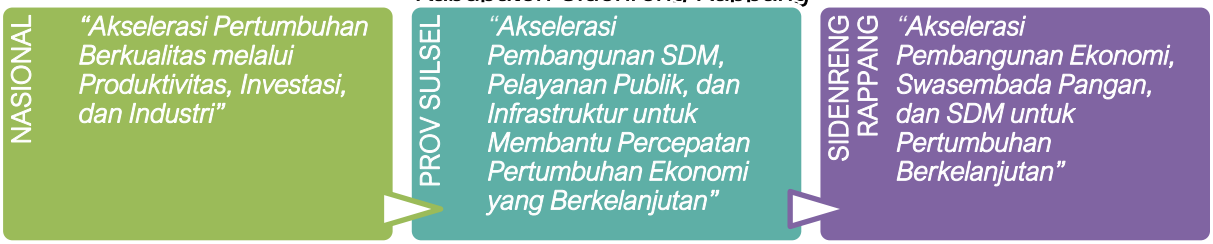
No.	Sasaran Pembangunan	Indikator Makro	Target Tahun 2027			Ket.
			Nasional	Prov. Sulsel	Kab. Sidrap	
1	Pertumbuhan Tinggi yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.8 – 6,5 Persen	6,3-6,8 Persen	8.81 Persen	*Penyesuaian target Prov Sulsel berdasarkan Permen PPN/ Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2026*
		GNI per Kapita/ PDRB Per kapita	5.800 – 5.840 US$	86,9-92,7 juta Rp.	70.40 juta Rp.	*Penyesuaian target Prov Sulsel berdasarkan Permen PPN/ Bappenas RI Nomor 4 Tahun 2026*
		Penurunan Intensitas Emisi GRK	39,57 Persen	37,22 Persen	14,33 Persen	*Hasil Rakortekbang*
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,84	83,23 poin	74,35 poin	*Hasil Rakortekbang*
2	Penurunan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,0 – 6,5 Persen	6,44-6,86 Persen	4,33-4,06	*Hasil Rakortekbang*
		Kemiskinan Ekstrem	0 Persen	0 Persen	0 Persen	*Menyesuaikan target nasional*
		Rasio Gini	0,362 – 0,367	0,346-0,349 poin	0,303-0,301 poin	*Hasil Rakortekbang*
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,30 – 4,87 Persen	3,76-4,15 Persen	2,92-2,84 Persen	*Hasil Rakortekbang*
3	Sumber Daya Manusia Berkualitas	Indeks Modal Manusia/ IPM	0,575	0,547-0,560	76,22-76,55 Persen	*Hasil Rakortekbang*

Sumber: RKP 2027, RKPD Provinsi Sulsel Tahun 2027, diolah

Sinkronisasi proses ini dilandasi oleh semangat untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan di tingkat Kabupaten/ Kota selaras dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Keselarasan vertikal ini menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/ Kota di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Selain keselarasan pada tataran prioritas dan program pembangunan, keselarasan tema RKPD merupakan dimensi penting lainnya yang mencerminkan kesatuan arah dan semangat pembangunan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam satu tahun perencanaan yang sama. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027, penyusunan tema daerah dilakukan dengan memperhatikan tema pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2027 serta tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Tahun 2027. Tema RKPD kabupaten yang selaras dengan tema provinsi dan nasional juga memperkuat posisi daerah dalam mengakses dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi, karena program-program prioritas daerah yang diusulkan memiliki relevansi dan keterkaitan yang jelas dengan agenda pembangunan yang sedang menjadi fokus bersama. Keselarasan tema RKPD disajikan sebagai berikut:

Gambar 4.5
Keselarasan Tema Pemabangunan RKP, RKPD Provinsi Sulsel dan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber: RKP 2027, RKPD Provinsi Sulsel 2027, diolah.

Tema pembangunan nasional tahun 2027 yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2027 adalah ***"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"*** , yang mencerminkan komitmen pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara kuantitatif, tetapi berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan produktivitas sektoral, perluasan investasi, dan pendalaman industrialisasi sebagai mesin utama pertumbuhan jangka menengah. Merespons tema nasional tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan tema RKPD Tahun 2027 yaitu ***"Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Membantu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan"*** , yang mengakhiri agenda percepatan nasional ke dalam konteks regional dengan menekankan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi hanya dapat terwujud jika didukung oleh sumber daya

manusia yang berkualitas, pelayanan publik yang efektif, dan infrastruktur wilayah yang mampu sebagai fondasi daya saing regional. Selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi tersebut, Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tema RKPD Tahun 2027 yaitu *"Akselerasi Pembangunan Ekonomi, Swasembada Pangan, dan SDM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan"* , yang secara substantif mencerminkan keselarasan yang kuat sekaligus kontekstualisasi yang tepat atas agenda percepatan yang diusung bersama oleh pemerintah pusat dan provinsi. Kata *"akselerasi"* yang menjadi pembuka tema kabupaten merupakan cerminan langsung dari semangat yang sama yang diusung tema nasional dan provinsi, menandakan bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang berada dalam satu gelombang percepatan pembangunan yang bergerak serentak di semua tingkatan pemerintahan. Substansi tema kabupaten sendiri menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai orientasi utama yang ingin dipercepat, dengan swasembada pangan sebagai keunggulan komparatif daerah yang menjadi kontribusi spesifik Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap agenda ketahanan pangan nasional, serta peningkatan kualitas SDM sebagai pemenuhan yang selaras dengan penekanan yang sama dalam tema provinsi, sehingga ketiganya membentuk satu kesatuan arah pembangunan yang koheren, saling melengkapi, dan berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan.

4.5. Dukungan Daerah Terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN)

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2027 senantiasa memperhatikan keselarasan dan sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya Program Strategi Nasional (ProSN) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka pembangunan nasional Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten berperan aktif mendukung pencapaian Program Strategi Nasional melalui penyelarasan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah. Dukungan tersebut diwujudkan dalam berbagai kebijakan intervensi yang mencakup ketahanan ketahanan pangan dan swasembada melalui optimalisasi lahan produktif pertanian dan peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah; percepatan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya lokal guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memperluas lapangan kerja; pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antarwilayah demi melancarkan kelancaran arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat; serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang berkeadilan.



Tabel 4.18
Dukungan Program dan Sub Kegiatan RKPD Tahun 2027 yang mendukung Program Strategis Nasional (ProSN)

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Menurunnya Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem	Tingkat Kemiskinan	%	Sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	20 Orang	75.000.000
									1.06.05.2.020.008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	50 Usulan	10.000.000
									1.06.05.1.02.0012	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin				
							Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1 Dokumen	16.000.000



No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
		Sekolah Rakyat	Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat Tahun 2029	Tingkat Kemiskinan	%	Sosial		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.03.0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha				
								PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.052.020.008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	Orang	60 Orang	32.000.000
											Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	20 Orang	75.000.000
											Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	20 Orang	75.000.000
											Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	50 Usulan	10.000.000

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.010.001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	7 Dokumen	10.000.000
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Meningkatnya Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	Perumahan dan Kawasan Permukiman		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				
									1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota				
								PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh & Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	10 Unit Rumah	125.000.000



No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru				
							Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1Dokumen	1 Dokumen	150.000.000

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				
2	Ketahanan Pangan	Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	Terlaksananya jaringan irigasi Swasembada Pangan yang Berkelanjutan	Tingkat Kesiapan Teknis dan Operasi Pemeliharaan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	25 KM	450.000.000
									1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa				
									1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah				
									1.03.02.2.02.0127	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku				
		Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Beroperasinya Balai Penyuluh Pertanian (BPP).	Operasionalisasi BPP	Unit	Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	Unit	11 Unit	13.000.000

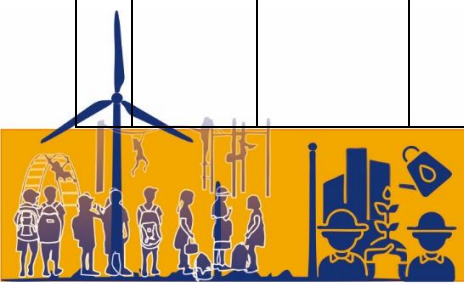


No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
									3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	Unit	11 Unit	2.261.000
		Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/ Lumbung Pangan/Food Estate)	Meningkatnya Indeks Pertanaman Hasil Cetak Sawah	Luas Hasil Cetak Sawah yang Ditingkatkan IP-nya	Hektare	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota				
							Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				
									2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang tersedia	unit	1 unit	1.000.000
							Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	51205,30 Ha	25.000.000
		Pangan Akuatik	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Garam	Ton	Kelautan dan Perikanan	Perindustrian	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam				

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				Produksi Perikanan Tangkap	Ton		Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				
							Lingkungan Hidup		3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				
		Kampung Nelayan	Terwujudnya tata kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	Miliar Rupiah	Kelautan dan Perikanan	Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				
							Lingkungan Hidup		3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				
3	Kesehatan Untuk Semua	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Pencegahan dan Penurunan Stunting.	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1 Dokumen	151.000.000
									1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1 Dokumen	200.000.000
							Pekerjaan Umum dan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	1.03.03.2.01.0028	Pembinaan Pengelolaan dan				

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
							Penataan Ruang	PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan				
									1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	0 Liter/Detik	-
							Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	15 Keluarga	158.597.000
							Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)				
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja,	Persentase Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	0 Dokumen	12.000.000
								UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	0 Laporan	99.000.000

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Dewasa, dan Lansia yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit					MASYARAKAT		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular			
									1.02.02.2.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Laporan	0 Laporan	19.588.500
							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.02.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	3 Dokumen	36.000.000
		Jaminan Kesehatan Nasional	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1 Dokumen	58.000.000.000
							Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	Orang	60 Orang	32.000.000
											Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	20 Orang	75.000.000



No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
											Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	20 Orang	75.000.000
											Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	50 Usulan	10.000.000
							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Dokumen	4 Dokumen	500.000
		Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	Tercapainya Penuntasan TBC melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas	Cakupan Penemuan Kasus TBC	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	7894 Orang	400.000.000
									1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	6121 Orang	40.000.000
							Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	Orang	20 Orang	75.000.000

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
											Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota			
							Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	12 Dokumen	12 Dokumen	500.000
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/ Kota	Meningkatkan Kualitas Rumah Sakit Tipe atau Kelas D Menjadi C melalui Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas di Rumah Sakit Daerah	Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai Standar	%	Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap Jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	0 Unit	500.000.000
								PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.01.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	100 Orang	50.000.000

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Makan Bergizi Gratis	Meningkatnya Asupan Gizi dan Pengetahuan Gizi Kelompok Sasaran	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat dan SMA/ sederajat. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat	%	Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	22 Orang	100.000.000
							Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	60 Dokumen	54.619.000
				Pendek) pada Balita						Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
							Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan				
							Pangan	PROGRAM PENANGANAN	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian	Jumlah sarana pengujian keamanan	Dokumen	1 Dokumen	36.761.500

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								KERAWANAN PANGAN		Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/ Kota			
							Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				
4	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggulan	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun dalam Pendidikan Menengah Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi	%	Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1 Dokumen	55.000.000

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran		dalam Pendidikan Khusus					1.01.02.1.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1 Dokumen	55.000.000
									1.01.02.1.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	223 Dokumen	25.000.000
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	Pengendalian Inflasi dengan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan Pemantauan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Provinsi	Bulan	Perdagangan	Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	laporan	5 laporan	120.286.000
		Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal melalui Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan	Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan RAT	%	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota				

No.	Pro-SN	Proyek/ Kegiatan	Outcome Proyek/ Kegiatan	Indikator Outcome	Satuan	Pengampu Bidang Urusan Utama	Bidang Urusan Terkait	Program	Kode	Sub Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
			Merah Putih											
		Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	Lingkungan Hidup	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	27.357,27 Ton	3.825.000.000
									2.11.11.2.01.0016	Penanganan Sampah melalui Pengumpulan	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	91 Persentase	5.000.000
								PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				
				Penurunan Emisi GRK	%	Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Kabupaten/ Kota				
									2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK				

Sumber: Data diolah Tim RKPD 2027, 2026



4.6. Dukungan Daerah terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 sepenuhnya diorientasikan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) nasional melalui penerjemahan agenda-agenda strategi tersebut ke dalam program dan kegiatan nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat daerah secara langsung. Komitmen ini merupakan perubahan dari prinsip keselarasan perencanaan antara pusat dan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sekaligus cerminan dari tekad Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan dampak yang terukur dan berarti bagi seluruh lapisan masyarakat.



Tabel 4.19
Dukungan RKPD 2027 Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

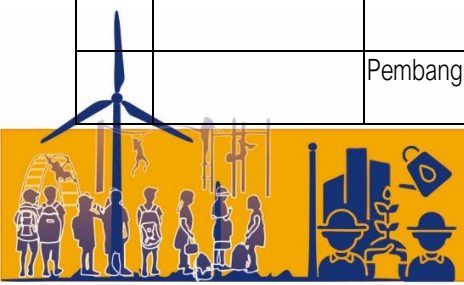
No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
1,	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)			
2,	Prioritas Nasional 2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest			
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/ lumbung pangan Kalimantan Tengah			
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan			
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/ lumbung pangan Papua Selatan			
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Lainnya	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		325.000.000
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		325.000.000
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	100.000.000
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	225.000.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		282.000.000
			Pengembangan Prasarana Pertanian		32.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	5.000.000
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	51.205,30 Ha	25.000.000
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	1 Unit	1.000.000
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	1 Unit	1.000.000
			Pembangunan Prasarana Pertanian		200.000.000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1 Unit	50.000.000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1 Unit	100.000.000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	1 Unit	50.000.000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		50.000.000
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1 Unit	50.000.000

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		175.000.000
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		175.000.000
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2313 Ha	150.000.000
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	25.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		1.400.000.194
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		1.400.000.194
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota	30 Lembaga	150.000.000
			Normalisasi/Restorasi Sungai	5 KM	250.000.000
			Pembangunan Tanggul Sungai	1 KM	50.000.000
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1 Dokumen	150.000.000
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		800.000.194
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3 KM	100.000.194
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4 KM	250.000.000
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	25 KM	450.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		79.000.000
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		79.000.000
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	15 Unit	65.000.000
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	40 Orang	7.000.000
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	10 Orang	7.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		88.000.000
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		88.000.000

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 Unit	68.000.000
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Unit	20.000.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		70.000.000
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota		70.000.000
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	35.000.000
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	4500 Dosis	10.000.000
				4000 Ekor	20.000.000
			Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	4500 Dosis	5.000.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		30.000.000
			Pembangunan Prasarana Pertanian		30.000.000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1 Unit	30.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		80.000.000
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota		80.000.000
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	40.000.000
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 Laporan	10.000.000
				5 Unit Usaha	15.000.000
			Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	5 Unit Usaha	15.000.000
		Pembangunan pangan akuatik (blue food)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		79.000.000
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		79.000.000
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	15 Unit	65.000.000
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	40 Orang	7.000.000



No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	10 Orang	7.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		88.000.000
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		88.000.000
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 Unit	68.000.000
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Unit	20.000.000
		Pembangunan pangan hewani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA		70.000.000
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota		70.000.000
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	35.000.000
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	4500 Dosis	10.000.000
				4000 Ekor	20.000.000
			Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	4500 Dosis	5.000.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		30.000.000
			Pembangunan Prasarana Pertanian		30.000.000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1 Unit	30.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		80.000.000
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota		80.000.000
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	40.000.000
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan masyarakat Veteriner	12 Laporan	10.000.000
				5 Unit Usaha	15.000.000
			Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	5 Unit Usaha	15.000.000
		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		325.000.000
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		325.000.000



No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	100.000.000
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	225.000.000
		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan			
		Peningkatan penyediaan energi			
		Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi			
		Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan			
		Konservasi sumberdaya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		2.500.000.388
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		2.500.000.388
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 Unit	150.000.000
			Normalisasi/Restorasi Sungai	5 KM	250.000.000
			Pembangunan Tanggul Sungai	1 KM	50.000.000
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1 Unit	150.000.000
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	1 Dokumen	150.000.000
			Rehabilitasi Embung	10 Unit	150.000.000
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	25 KM	450.000.000
				2 KM	250.000.000
				2 KM	100.000.194
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	3 KM	100.000.194
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4 KM	250.000.000
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	25 KM	450.000.000
		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		100.000.000
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota		100.000.000
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	50.000.000
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7,5 Liter/Detik	50.000.000
		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		416.349.361.550

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	300.000.000
				6 Unit	20.000.000
				2 Unit	50.000.000
			Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	6 Unit	20.000.000
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	200 M^3/Hari	50.000.000
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	2 Unit	50.000.000
			Penyediaan Unit pengolahan setempat		
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 Dokumen	300.000.000
		Pengembangan terpadu pesisir utara jawa			
		Penguatan faktor pendukung ekonomi digital			
		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya			
		Pengelolaan susut dan sisa pangan			
		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik			
		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		10.000.000
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	415 Pelaku Usaha	5.000.000
			Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota	415 Pelaku Usaha	5.000.000
		Peningkatan kualitas ekosistem gambut			
		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		7.213.428.000
			Pengelolaan Sampah	2 Dokumen	7.183.428.000
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2 Kelompok	10.000.000
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	20.000.000

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		10.506.856.000
			Pengelolaan Sampah	2 Dokumen	7.183.428.000
			Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	9.261,35 Ton	1.968.428.000
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional	39.400 Ton	1.050.000.000
			Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	7 Laporan	5.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	2 Unit	300.000.000
		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut			
3,	Prioritas Nasional 3	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya			
		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		1.013.235.000
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	13.235.000
			Penyediaan Akses Internet	60 Titik	1.000.000.000
		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur- Yogyakarta-Prambanan			
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramena			
		Percepatan pembagunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba			
		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo			
		Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim			
		Pengembangan koperasi sektor produksi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		10.000.000
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	10.000.000
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		10.000.000

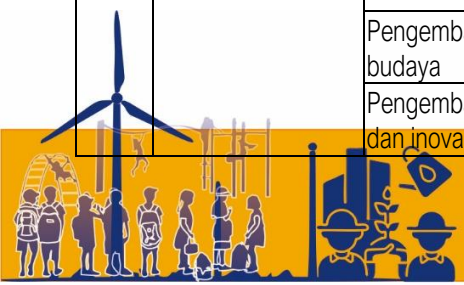
No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
4,	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		34.919.290.000
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11 Paket	27.955.432.000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	11 Unit	707.958.000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1 Orang	100.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	223 Satuan Pendidikan	15.000.000
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	9873 Satuan Pendidikan	5.994.900.000
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	223 Orang	15.000.000
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	223 Dokumen	25.000.000
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Dokumen	50.000.000
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	11 Ruang	2.000.000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	223 Peserta didik	2.000.000
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	223 Orang	50.000.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	20 Ruang	2.000.000
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas			
		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		7.774.200.000
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6 Dokumen	7.635.200.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6 Satuan Pendidikan	10.000.000
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	223 Dokumen	25.000.000
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Dokumen	50.000.000
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	2.000.000
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	223 Peserta didik	2.000.000
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	223 Orang	50.000.000

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul			
		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		21.765.000.000
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	5 Dokumen	100.000.000
				17 Laporan	14.410.000.000
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen	50.000.000
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	17 Laporan	7.205.000.000
40,		Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi			
		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		252.000.000
			Invensi dan Inovasi	1 Kegiatan	204.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	16.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan	16.000.000
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	1 Laporan	16.000.000
		Penurunan kematian ibu dan anak			
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		61.775.369.000
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	55200 Orang	61.375.369.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6122 Orang	100.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6780 Orang	50.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	5673 Orang	200.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25150 Orang	50.000.000
		Pencegahan dan penurunan stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		1.828.420.000
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	382.910.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0 Orang	1.000.000

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0 Orang	1.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0 Orang	25.400.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	180.000.000
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen	12.000.000
			Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	0 Dokumen	1.200.000
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 Unit	1.200.000
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	0 Dokumen	3.600.000
			Pengelolaan Layanan Imunisasi	0 Dokumen	36.000.000
			Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	0 Dokumen	1.200.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		760.000.000
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11 Dokumen	16.000.000
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	15 Orang	500.000
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	7 Orang	500.000
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	106 Laporan	500.000
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	741 laporan	741.000.000
				1 Laporan	1.000.000
				1 Laporan	500.000
		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kabupaten/ Kota		
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
			Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
		Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		422.910.000
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	382.910.000
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6121 Orang	40.000.000
		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita			
		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		61.588.969.000
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	55200 Orang	61.375.369.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	196.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0 Orang	16.600.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0 Orang	500.000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0 Orang	500.000
		Eliminasi penyakit kusta danSchistosomiasis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	55200 Orang	61.375.369.000
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 Unit	200.000.000
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	23 Paket	2.800.000.000
		Investasi pelayanan kesehatan primer	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		63.425.369.000
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	55200 Orang	61.375.369.000
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0 Unit	1.000.000.000
			Pembangunan Puskesmas	1 Unit	550.000.000
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	500.000.000

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
		Pembangunan RS lengkap berkualitas di Kabupaten/ Kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		63.475.369.000
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	55200 Orang	61.375.369.000
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0 Unit	1.000.000.000
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	16 Unit	500.000.000
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 Unit	100.000.000
			Pengembangan Rumah Sakit	0 Unit	500.000.000
		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		1.310.000.000
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	100 Dokumen	30.000.000
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100 Dokumen	30.000.000
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	50.000.000
			Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya ManusiaKesehatan	-	50.000.000
				-	50.000.000
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	50.000.000
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	50.000.000
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kabupaten/ Kota	120 Orang	500.000.000
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/ Kota	120 Orang	500.000.000
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya			
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi			



No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga			
5,	Prioritas Nasional 5	Pengembangan hilirisasi Nikel			
		Pengembangan hilirisasi Tembaga			
		Pengembangan hilirisasi Bauksit			
		Pengembangan hilirisasi Timah			
		Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit			
		Pengembangan hilirisasi Kelapa			
		Pengembangan hilirisasi Rumput Laut			
		Pengembangan hilirisasi Kimia			
		Pengembangan industri semikonduktor			
		Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil			
		Penguatan industri logam dasar, besi dan baja			
		Pengembangan industri dirgantara			
		Pengembangan KEK Sei Mangkei			
		Pengembangan KIT Batang			
		Pengembangan KI Weda bay			
6,	Prioritas Nasional 6	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		99.400.000
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	7 Lembaga	49.400.000
				46 Orang	200.000
				100 Orang	200.000
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	7 Lembaga	49.400.000
			Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	100 Orang	200.000
		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		99.400.000
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	7 Lembaga	49.400.000
				46 Orang	200.000
				100 Orang	200.000

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	7 Lembaga	49.400.000
			Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	100 Orang	200.000
		Peningkatan kemandirian melalui kartU usaha afirmatif			
		Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara			
		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM(PSU)		300.000.000
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3 Lokasi	150.000.000
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	3 Lokasi	150.000.000
		Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		200.000.000
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	100 SR	50.000.000
				7.5 Liter/Detik	50.000.000
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7,5 Liter/Detik	50.000.000
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	50.000.000
7,	Prioritas Nasional 7	Pencegahan tindak pidana korupsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		4.184.528.550
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	10 Dokumen	2.445.140.000
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	14 Laporan	270.600.000
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	285.450.000
			Kerjasama Pengawasan Internal	1 Kesepakatan	64.950.000
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen	86.470.000
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	35 Laporan	687.945.700
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	35 Laporan	343.972.850
		Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		120.500.000
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100 Orang	100.000.000
			Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1.500.000
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	48 Dokumen	15.000.000

No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
			Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Laporan	2.000.000
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	100 Orang	2.000.000
		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		1.042.000.000
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / kota	3 Laporan	500.000.000
			Relasi Media	3 Laporan	500.000.000
			Penyusunan Konten	660 Konten	29.000.000
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	4 Orang	2.000.000
			Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	1 Dokumen	5.000.000
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	3 Komunitas	3.000.000
			Pelayanan Informasi Publik		
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	26 Rekomendasi	3.000.000
		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		7.725.659.000
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	666 Dokumen	5.502.658.000
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	4 Laporan	1.903.077.750
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	37.590.000
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	52.020.000
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	12.907.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	101.401.000
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	666 Dokumen	2.310.000
			Penagihan Pajak Daerah	300000 Dokumen	69.135.250
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	11.841.000
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 Laporan	32.719.000
		Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak			
8.	Prioritas Nasional 8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		445.000.000
			Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebebangsaan	1 Dokumen	396.000.000
			Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan,	1 Dokumen	500.000

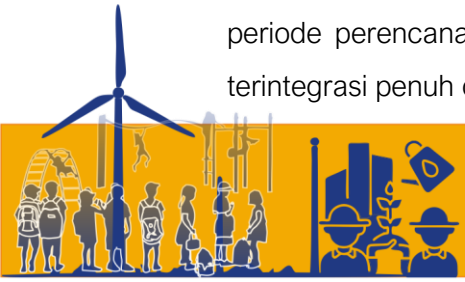
No.	Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027
			Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
			Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen	500.000
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wwasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70 Orang	500.000
			Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wwasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70 Orang	45.000.000
			Sub kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	500.000
			Sub Kegiatan Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingya penghayatan dan pengalaman pancasila dan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1 Keluarga	1.000.000
			Sub kegiatan Pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	1 Dokumen	1.000.000
		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		80.000.000
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	70 Objek	20.000.000
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5 Objek	20.000.000
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	5 Objek	20.000.000
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	70 Objek	20.000.000
		Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut			

Sumber: Data diolah Tim RKPD 2027, 2026

4.7. Kesepakatan Hasil Rakortekbang Tahun 2027

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah (Rakortekbang) Tahun 2026 ditetapkan sebagai salah satu unsur wajib muatan RKPD Tahun 2027 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hasil sinkronisasi dan penyelarasan prioritas pembangunan nasional dan daerah yang telah disepakati dalam forum Rakortekbang tidak bersifat rekomendatif semata, melainkan wajib dituangkan secara konkrit ke dalam dokumen perencanaan tahunan daerah. Pasal 6 ayat (1) Permendagri maksudnya, kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 menjadi muatan program dan/atau sub kegiatan pada RKPD Tahun 2027 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027. Program dan/atau sub kegiatan yang diakomodasi merupakan bentuk dukungan terhadap capaian *outcome* yang mengutamakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta Program Strategi Nasional yang mendukung Asta Cita, sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat (2).

Dalam pelaksanaan Rakortekbang Tahun 2026 Kabupaten Sidenreng Rappang, teridentifikasi seJumlah kesepakatan program dan/atau sub kegiatan yang secara substansi mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah, namun belum termuat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah periode 2025–2029 yang bersangkutan. Terhadap kondisi ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tetap mengakomodir kesepakatan yang dimaksud ke dalam RKPD Tahun 2027, dengan berpedoman pada Pasal 6 ayat (3) Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa program dan/atau sub kegiatan hasil kesepakatan Rakortekbang yang berada di luar Renstra Perangkat Daerah tetap dapat dimuat, dengan program dan/atau sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah, dan selanjutnya menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan Renstra Perangkat Daerah. Dasar keabsahan pencantuman yang dimaksud adalah Berita Acara Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 yang memuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kementerian/lembaga terkait, sebagaimana ditindaklanjuti dan diselaraskan dengan daftar kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026. Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 6 ayat (3), Perangkat Daerah pengampu program dan/atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud diwajibkan untuk: (1) mencatatkan program dan/atau sub kegiatan hasil kesepakatan Rakortekbang tersebut ke dalam dokumen pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah; dan (2) mengusulkan penyesuaian/perubahan Renstra Perangkat Daerah pada kesempatan pertama, sehingga pada periode perencanaan program berikutnya dan/atau sub kegiatan dimaksud telah selaras dan terintegrasi penuh dengan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah.



Tabel 4.20
Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tahun 2027 Berdasarkan Bidang Urusan Dengan RKPD Tahun 2027

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
1.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.			
							2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	30	30.00	
							2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	52	52.00	
2.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan			
							3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen			

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
					3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	48	0.00	
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha			
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	0		
3.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1		
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1.00	
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u	Dokumen	4		

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
							3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,	Dokumen	10		
4.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM		3.00	
							1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM		4.00	
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik		0.00	
							1.03.03.2.01.	Perluasan Sistem Penyediaan	Jumlah Sambungan Rumah	SR		100.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
							0032	Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				
				Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/ Kota	Dokumen	6		
							1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/ Kota	Dokumen			
							1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	10		
				Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	1	5.00	
							1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	1	1.00	
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	0	1.00	
							1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	100	100.00	
					1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	5		

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
						REGIONAL							
							1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/ SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit	1		
					1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1		
							1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	2	2.00	
					1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	6	6.00	
							1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	10		
					1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	10	10.00	
							1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	5		
5.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit		1500.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
			infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kota									
							2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		1.00	
					2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit			
							2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit			
				Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit	1500	1500.00	
							2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan	Unit	1	1.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
								C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				
					2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							
							2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	0		
							2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	0		
6.	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	750	15.00	
							2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	laporan	5	5.00	
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
							2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
							2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi Kabupaten/ Kota	Laporan	12	1.00	
7.	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		10.00	
							3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok			
							3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit			
					3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
							3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	2	2.00	
							3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	0		
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang	Pelaku Usaha	0		

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
						SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		kewenangan Kabupaten/ Kota	diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota				
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaku Usaha	0		
							3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaku Usaha		415.00	
							3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin Kabupaten/ Kota , yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha			
8.	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	2.00	
							3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	12.50	0	
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA							

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
						PERTANIAN							
							3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan		2.00	
							3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha		0	
							3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/ Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1		
							3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1		
9.	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah			

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
			dan penyeludupan.										
							2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggar	Dokumen			
							2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan	Dokumen	1	1.00	
							2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1.00	
10.	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	2	2.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
			ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
							2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen			
							2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket		2.00	
					2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	40	7.00	
							2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	35	35.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
								Hidup					
					2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton		0	
							2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase		91.00	
							2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton		0	
							2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTKabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional	Ton		39.40	
11.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							
							1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	14		
							1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan	Unit	0		

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
								Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
					1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH							
							1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah		10.00	
							1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit			
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
							1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	0		
							1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	3	3.00	
12.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	0	200.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
			pemberantasan kemiskinan.	pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor									
							3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	0	10.00	
							3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang			
							3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi			
					3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga		10.00	
13.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga	7	7.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
			penyandang disabilitas.										
							1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		46.00	
							1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/ Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	0		
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang		20.00	
							1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	20	20.00	
							1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	50	50.00	
14.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja,	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang			

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kesempatan kerja dan perlindungan pekerja									
							2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	52	800.00	
					2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	15		
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	10328	0	
15.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA							



No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
			penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesejahteraan Masyarakat Desa									
							2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit			
					2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
							2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen		68.00	
				Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							
							2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5	5.00	
							2.13.03.3.01.0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan,	Dokumen	0		

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
								dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabu				
					2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
							2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	0		
							2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	0		
16.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%		40.00	
							2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	62	62.00	
							2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	%	20	40.00	
17.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel	Laporan			

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
		INFORMATIKA	pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).					Sengketa Informasi Publik	serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				
							2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan			
							2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi			
							2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media			
							2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	Orang	153000	36661.00	
							2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	Dokumen	4	1.00	
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau	Layanan			



No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
									Portal Data Nasional				
							2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi			
							2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah			
							2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Cerdas	Dokumen		1.00	
							2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Titik	55	60.00	
							2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	3	6.00	
18.	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi,	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Orang	110	110.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
			dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					Daerah	Pemantauan				
							8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	Orang	35	35.00	
					8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
							8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Orang		100.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
									Ormas Asing di Daerah				
					8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	Orang	50	50.00	
							8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Orang	240	240.00	
19.	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Dokumen	0		

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
			agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
							2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	0		
20.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat		5.00	
							2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	212	5.00	
							2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Unit Usaha		10.00	
					2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha			

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
						USAHA MIKRO (UMKM)							
							2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang			
							2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Orang	200	15.00	
							2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	Kegiatan	1		
21.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Lokasi			
							3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	Dokumen			
							3.26.02.2.02.	Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah Orang Pengelola	Orang			

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
							0008	Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pariwisata Strategis Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan				
							3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	Lokasi			
							3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Dokumen			
							3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit		1.00	
					3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	2	2.00	
							3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	3	3.00	
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	0		
							3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen			
							3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi	Dokumen			

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
								Kreatif	Kreatif				
							3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga			
							3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan	0		
							3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen			
							3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk			
22.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek		70.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
			kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
							2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	70		
							2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/ Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/ Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Dokumen	1		
					2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek		21.00	
							2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Objek	4		
							2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek		2.00	
							2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	3		
23.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		1.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
			perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
							1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	22	22.00	
							1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik		3500.00	
							1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	22	22.00	
							1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	40	1.00	
							1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit		10.00	
							1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	11	11.00	
							1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil	Peserta Didik		165.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
									Peserta Didik				
24.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2		
							1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap Jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	Unit	3	0.00	
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	23	23.00	
							1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen			
							1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	Dokumen		1.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
									Kesehatan Masyarakat				
							1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen		1.00	
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang			
							1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	5	100.00	
25.	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga			
							2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang			
					2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN							

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
						PEREMPUAN							
							2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/ Kota	Orang	8		
							2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	5		
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
							2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan			
							2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/ Kota	Orang			
							2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	Orang	23	5.00	
							2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Lembaga	5		

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
								penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi				
26.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	4	4.00	
							2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	4	12.00	
					2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
							2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan d	Laporan	4	3.00	
							2.12.03.2.02.	Fasilitasi Terkait Pencatatan	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	4	12.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
							0006	Sipil	Fasilitasi Pencatatan Sipil				
27.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan			
							2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kegiatan	1	1.00	
							2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	6	6.00	
							2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit			
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
							2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen			
							2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	Kelompok		11.00	
							2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Laporan / Dokumen	11	11.00	
							2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Laporan	1	1.00	
28.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Kabupaten/ Kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang			

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
			(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
							2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	800	110.00	
							2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/ Kota	Orang			
							2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/ Kota	Organisasi	0		
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang			
							2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang			
							2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan	Orang	0		

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
								Keolahragaan (Sport Science)	pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				
							2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	Orang	20	1.00	
							2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga			
29.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	30	30.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
			untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
							2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/ Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	19	19.00	
							2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar		500.00	
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							
							2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	6	6.00	
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	2	2.00	
30.	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di	Orang	100	100.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
			lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	kebakaran sesuai standar					kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				
							1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/ Kota yang tertangani	Kegiatan	1	1.00	
							1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota	Orang	150	150.00	
							1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	2	2.00	
							1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen		1.00	
							1.05.03.2.04.	Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Binwas	Laporan		1.00	

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
							0005	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				
				Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan		4.00	
							1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1		
							1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4	4.00	
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	12	4.00	
							1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1		

No	Kode Bidang Urusan	Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome Prioritas	Kode Program	Program	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Hasil Kesepakatan Rakortekbang 2026	Target RKPD 2027	Ket.
31.	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1.00	
							2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Pengguna	10	42.00	

Sumber: Hasil Rakortekbang Tahun 2026 @SIPD-RI, diolah

Tabel 4.21
Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Tematik Tahun 2026 Dengan RKPD Tahun 2027

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
1	KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH	Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian lokal melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih													
			001256 Proporsi Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih	%	65	80	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan,	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Unit Usaha	10		50.000.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			yang Menjalankan RAT				DAN MENENGAH		Kabupaten/ Kota	produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota					
2	PANGAN AKUATIK	Terwujudnya Ketersediaan Sumber Pangan Akuatik Secara Berkelanjutan Sebagai Bentuk Swasembada dan Ketahanan Pangan.	000549 Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2476, 86	2476,86									
							3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	10	0	150.000.000
							3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	12	0	100.000.000
3	PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	Terwujudnya internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga negara, kementerian/lembaga dan pemerintah													

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
		daerah													
			001200 Indeks Pelaksanaan Peta Jalan PIP	Indeks	50	50									
4	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan													
			000041 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	87,78	95,64									
							1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui	Dokumen	1	550	150.000.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
									Bangunan Gedung melalui SIMBG	SIMBG	SIMBG				
							1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun	Unit Rumah	3	3	50.000.000
							1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Unit Rumah	1	0	50.000.000
							1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	10	10	100.000.000
							1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	1	3	25.000.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
									berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						
5	DIGITALISASI PEMBELAJARAN	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang pendidikan													
			000710 Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69,63	69,63									
			000714 Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,76	62,76									
							1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	22	104 orang	100.000.000
6	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang pendidikan													

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
	DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH														
			000711 Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%	86.1 %	86.1 %									
			000739 Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	%	64,28 %	64,28 %									
							1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1 dokumen	150.000.000
7	MAKAN BERGIZI GRATIS	Meningkatnya asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran													
			000011 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	17	17									
			000141 Tingkat penyelesaian	(%)	100	100									

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat.												
							1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	22	239	50.000.000
							1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	60	60 Dokumen	54.619.000
							2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah	Dokumen	1	2 Dokumen	36.761.500

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
									Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota	Kabupaten/ Kota				
							3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	12	0	50.000.000
8	PERLINDUNGAN ANAK	Terpenuhinya hak dan perlindungan khusus anak melalui penguatan pelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak dalam proses pembangunan													
			000614 Persentase Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase	710	710									
			000630 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	74,5	70,02									
							1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan	Terlayaninya satuan pendidikan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan	Kegiatan	5	5	50.000.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
							PENDIDIKAN		pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				
							1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan SosialAda Catatan Pembahasan Urusan	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	16	150	50.000.000
							1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	21	25	50.000.000
							2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.02.0012 Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	Orang	25	25	5.000.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
							5.01 PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Berita Acara	2	2	178.184.998
9	EKONOMI SYARIAH	Terintegrasinya implementasi Ekonomi Syariah dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga negara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah													
			001195 Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	1300	1300									
			001198 Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,56	0,59									
							1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	20	20	15.000.000
							2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0027 Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Unit Usaha	300	300	5.000.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
							3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.04.0019 Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Pelaku Usaha	1	50	5.000.000
							3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen	1	4	30.000.000
							4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	4	30.000.000
10	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, Dan Lansia Yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, Dan Pengurangan Potensi Beban													

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
		Anggaran Pengendalian Penyakit													
			000827 Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	55	55									
							1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	74.187.641.000
							1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0056 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Laporan	1	14	20.000.000
							1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0057 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Laporan	1	14	100.000.000
							2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	4	3	500.000.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
11	PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan melalui penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam pembangunan													
			000015 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.294	0.294									
			000612 Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	725	725									
							1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	22	104	25.000.000
							1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	14	469.700.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
							2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	20	60	500.000.000
							2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0015 Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Lembaga	40	40	5.000.000
							2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0021 Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Terlaksananya Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Orang	5	100	5.000.000
12	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/ KOTA	meningkatkan kualitas rumah sakit tipe atau kelas D menjadi C melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas di rumah sakit daerah													

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			000824 Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	Persentase	100	100									
			000826 Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase											
							1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap Jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap Jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	3	3	600.000.000
							1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	1.02.03.2.02.0005 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di	Orang	100	100	50.000.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
								KESEHATAN	Kesehatan Sesuai Standar	Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				
13	PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)	Tercapainya Penuntasan TBC Melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas													
			000551 Penemuan Kasus TBC	%	90	90									
							1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	7894	7894	276.750.000
							1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	6121	1429	100.000.000
							1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	Orang	20	20	30.000.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
										Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota				
							2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	3	3	69.000.000
14	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH	Terwujudnya kemandirian dan daya saing kampung nelayan serta kampung budi daya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir.													
			001209 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	Miliar Rupiah	143,45	143,45									
							3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	40	40	45.000.000
							3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan	Kelompok	12	0	50.000.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
									Nelayan Kecil		Kelembagaannya				
							3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	12	0	100.000.000
			000072 Persentase Penurunan Emisi GRK	Persentase	14,33	14,33									
			000676 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	74,88	74,88									
15	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan													
			000014 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98,8	98,8									
							1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	74.187.641.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
							1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	50	50	30.000.000
							2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	3	3	69.000.000
16	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM	Menurunnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrem													
			000004 Tingkat Kemiskinan	(%)	4.31 - 3.54	4.31 -3.54									
							1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	20	20	15.000.000
							1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	20	20	30.000.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
										Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kewenangan Kabupaten/ Kota				
							1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0009 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Orang	100	100	200.000
							2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	20.130.000
17	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	Pencegahan dan Penurunan Stunting													
			000817 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	17.00	16,59									
							1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	3.854.956.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
								MASYARAKAT							
							1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	469.700.000
							1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	2,5	0	25.000.000
							2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	30	30	358.597.000
							2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	741	741	741.000.000
18	PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko, penanganan													

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
		darurat, dan pemulihan pascabencana secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan guna melindungi masyarakat serta meminimalkan dampak bencana.													
			000268 Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	Persentase											
			000847 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	0,50										
							1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	500.000
							1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1	150.000.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
							1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	10	10	500.000
							1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	Kegiatan	1	1	150.000.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
							1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1		500.000
19	SEKOLAH RAKYAT	Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat tahun 2029													
			000004 Tingkat Kemiskinan	(%)	4,31 - 3,54	4,31 - 3,54									
							1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	50	200	30.000.000
							2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	7	1	10.000.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
20	PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN	Beroperasinya Balai Penyuluh Pertanian (BPP)													
			001226 Operasionalisasi BPP	Unit	11	11									
							3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	Unit	11	11 Unit	2.500.000
							3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01.0016 Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Tersedia Sarana dan prasarana serta Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	Unit	11	11 Unit	2.261.000
21	MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)	Meningkatnya Indeks Pertanaman Hasil Cetak Sawah													
			001227 Luas Hasil Cetak Sawah yang ditingkatkan IP nya	Hektare	1.650	1.650									

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
							1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.001 1 Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/ Kota	Dokumen	1		10.000.000
							2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.2.01.000 3 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	1	1 Unit	2.000.000
							2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.2.01.000 6 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang tersedia	unit	1	1 Unit	1.000.000
							3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.000 5 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	51205,3	51.205,30	50.500.000
							3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.03.2.01.001 4 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/ Kota	Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	1	1 Dokumen	1.000.000
22	IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN	Terlaksananya jaringan irigasi swasembada pangan yang berkelanjutan													

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
			001244 Tingkat kesiapan teknis dan operasi pemeliharaan irigasi untuk mendukung swasembada pangan (%)	%	75	75									
							1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	5	5	50.000.000
							1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	25	25	1.171.122.000
							1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	1	0	75.000.000
							1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0026 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	1	0	75.000.000
23	MASYARAKAT ADAT	Meningkatnya pengakuan, perlindungan, pemberdayaan,													

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
		serta akses masyarakat hukum adat terhadap pelayanan dasar dan pelestarian budaya secara berkelanjutan.													
			001247 Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui	%	100	100									
							2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	2	0	5.000.000
							2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	18	18	3.500.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
24	PENGENDALIAN INFLASI	Pengendalian inflasi dengan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting													
			001248 LAPORAN PEMANTAUAN STOK/PASOKAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI PROVINSI	Bulan	12	12									
			001249 LAPORAN PEMANTAUAN STOK/PASOKAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI KAB/KOTA	Laporan	12	12									
							2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/ Kota	laporan	5	5	111.357.000

No	Tematik	Kinerja Tematik	Indikator Outcome	Satuan	Target 2027	Kesepakatan Target Indikator Outcome	Bidang Urusan	Program	Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Target Sub Kegiatan	Kesepakatan Target Sub Kegiatan	Pagu Sub Kegiatan
							2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0020 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/ Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/ Kota	Dokumen	11	12	49.509.200
							3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	1	12	20.000.000

Sumber: Hasil Rakortekbang 2026, diolah

4.8. Highlight Intervensi Pembangunan Wilayah Sulawesi Selatan

Pembangunan wilayah Sulawesi Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung Sulawesi sebagai **" Penunjang *Superhub* Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA"** melalui tiga fokus utama sebagai berikut: (1) pembangunan perdesaan, daerah afirmasi, dan transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan kawasan perbatasan (PKSN) dan kecamatan perbatasan prioritas), kawasan perdesaan prioritas, dan kawasan transmigrasi; (2) pembangunan kota terpadu dan terintegrasi; serta (3) pembangunan wilayah kepulauan. Selain itu, pengembangan wilayah Sulawesi perlu didukung oleh penguatan rantai pasok dan aksesibilitas infrastruktur bagi klaster industri berbasis hilirisasi komoditas unggulan, terutama sektor gas bumi, pertanian, perkebunan, kelautan, dan perikanan.

Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada fokus pembangunan yang pertama yaitu Pembangunan Perdesaan, Daerah afirmasi, dan Transmigrasi serta Pembangunan Kewilayahan Prioritas Lainnya. Kawasan Transmigrasi Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi salah satu KT Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2027. KT Pitu Riase menawarkan potensi besar dengan luas 27.139,20 Ha dari total 95.139,78 Ha, yang dinilai layak untuk transmigrasi berdasarkan kesesuaian lahan, terutama kategori S1/S2 yang mendukung pertanian produktif. Infrastruktur jalan yang relatif baik memfasilitasi distribusi barang dan jasa, sementara potensi ekonomi mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan industri kecil. Komoditas unggulan yang diarahkan untuk pengembangan di Pitu Riase meliputi pertanian seperti padi, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu; hortikultura seperti cabe rawit dan kacang panjang; tanaman farmakologi seperti jahe dan kunyit; serta perkebunan seperti kakao, cengkeh, jambu mete, kemiri, kelapa, kopi arabika, dan lada. Sektor peternakan mencakup sapi, kerbau, kambing, serta ayam buras dan ras. Kawasan Pitu Riase memiliki potensi signifikan dengan lahan luas, kepadatan penduduk rendah (24.997 jiwa, 30 jiwa/km²), dan peluang pengembangan agribisnis serta pariwisata. Potensi pariwisata diperkuat oleh PLTB Sidrap, ladang kincir angin terbesar di Indonesia, yang menjadi destinasi wisata edukatif.



Tabel 4.22
Dukungan Daerah Terhadap *Highlight* Intervensi Wilayah Sulawesi

RKP 2027		RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2027	
Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungan Pemerintah Daerah, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
A. Pembangunan Perdesaan, Daerah Afirmasi dan Transmigrasi			
Kawasan Transmigrasi (KT)			
A3: KT Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	- Swasembada Air	Kawasan Transmigrasi Pitu Riase	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
			Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
			Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Penyuluhan Transmigrasi
			Pelatihan Transmigrasi
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
			Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
			Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

RKP 2027		RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2027	
Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungan Pemerintah Daerah, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
B. Pembangunan Kota Terpadu			
C. Pembangunan Wilayah Kepulauan			
D. Fokus Pembangunan Kewilayahan Prioritas Lainnya			
Provinsi Sulawesi Selatan	- Penuntasan Tuberkulosis	Kabupaten Sidenreng Rappang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Provinsi Sulawesi Selatan	- 3 Juta Rumah: 1 Juta Rumah Baru & 2 Juta Renovasi Rumah	Kabupaten Sidenreng Rappang	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
			Penetapan Wajib Pajak Daerah
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
			Penagihan Pajak Daerah
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

RKP 2027		RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2027	
Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungan Pemerintah Daerah, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
Provinsi Sulawesi Selatan	- Elektrifikasi Desa	Kabupaten Sidenreng Rappang	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
Provinsi Sulawesi Selatan	- Budi Daya Ikan Darat Tematik	Kabupaten Sidenreng Rappang	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

RKP 2027		RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2027	
Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungan Pemerintah Daerah, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Provinsi Sulawesi Selatan	- Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi (Padi, Jagung, dan Kedelai)	Kabupaten Sidenreng Rappang	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura
			Pengembangan Prasarana Pertanian
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

RKP 2027		RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2027	
Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungan Pemerintah Daerah, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
			Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/ Kota
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/ Kota
			Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota
			Pembangunan Prasarana Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian

RKP 2027		RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2027	
Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungan Pemerintah Daerah, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
Provinsi Sulawesi Selatan	- Pengembangan Kawasan Perkebunan (Tebu, Kakao, Kelapa, Kopi, Jambu Mete, dan Lada)	Kabupaten Sidenreng Rappang	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/ Benih
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Pengembangan Prasarana Pertanian
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
			Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan
	- Kompor Listrik untuk Rumah Tangga	Kabupaten Sidenreng Rappang	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

RKP 2027		RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2027	
Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungan Pemerintah Daerah, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Provinsi Sulawesi Selatan	- Swasembada Air	Kabupaten Sidenreng Rappang	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Normalisasi/Restorasi Sungai
			Pembangunan Tanggul Sungai
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
			Rehabilitasi Embung
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Rehabilitasi Check Dam
Provinsi Sulawesi Selatan	- Peningkatan Produksi Daging, Susu, dan Telur	Kabupaten Sidenreng Rappang	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota

RKP 2027		RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2027	
Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungan Pemerintah Daerah, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
			Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain
Provinsi Sulawesi Selatan	- Hilirisasi Industri Strategis: Peternakan Ayam Terintegrasi	Kabupaten Sidenreng Rappang	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber: Rancangan RKP 2027, diolah



4.9. Sinkronisasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)

Sejalan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, Pemerintah Pusat menetapkan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai salah satu muatan pokok Rancangan RKP Tahun 2027 diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2), yang terdiri atas 8 (delapan) klaster prioritas dengan 60 strategi program, ditopang oleh dasar tata kelola. PKPN diarahkan sebagai instrumen konsolidasi kebijakan lintas sektor untuk mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pemerataan antarwilayah, dan penciptaan lapangan kerja, dengan skema pembiayaan yang menggabungkan APBN dan Non-APBN sebagai wujud investasi pembangunan nasional.

Berdasarkan kerangka kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menegaskan dukungan dan komitmennya terhadap pelaksanaan PKPN Tahun 2027 dengan bersandar pada keunggulan komparatif dan karakteristik sektoral daerah, yang selaras dengan seJumlah klaster PKPN sebagai berikut:

1. Klaster Kedaulatan Pangan — Kabupaten Sidenreng Rappang dikenal secara nasional sebagai salah satu lumbung padi dan penyangga pangan nasional di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan produksi padi yang konsisten berada pada peringkat empat besar Kabupaten/ Kota se-Sulawesi Selatan, serta merupakan salah satu sentra produksi telur terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Kondisi ini memposisikan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah yang secara alamiah mendukung agenda pelestarian pangan nasional, termasuk pada program peningkatan produksi pangan dan protein hewani.
2. Klaster Hilirisasi dan Industrialisasi — Sejalan dengan arah PKPN untuk mendorong nilai komoditas, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menginisiasi pengembangan hilirisasi hasil pertanian, di antaranya industri pengolahan tepung beras sebagai bentuk pemanfaatan surplus produksi padi daerah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.
3. Klaster Kemandirian Energi dan Udara — Keberadaan infrastruktur pembangkit energi terbarukan berbasis energi angin di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi modal daerah dalam mendukung agenda nasional penguatan bauran energi terbarukan dan kemandirian energi.

Dukungan konkret Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap klaster-klaster PKPN selanjutnya dituangkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada rencana kerja dan pendanaan RKPD Tahun 2027 sebagaimana disajikan pada matriks keterkaitan berikut, serta menjadi acuan sinkronisasi lebih lanjut dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.



Tabel 4.23
Dukungan RKPD Tahun 2027 terhadap Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
Prioritas Nasional 4	FP: Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, Dan Inovasi	Makan Bergizi Gratis (MBG) Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6122 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6780 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5673 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Dinas Kesehatan
		Makan Bergizi Gratis (MBG) Anak Sekolah	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			
			Administrasi Tata Pemerintahan			
			Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi	0 Perangkat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
			Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Perangkat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	22 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	22 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			



Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	223 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	223 Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

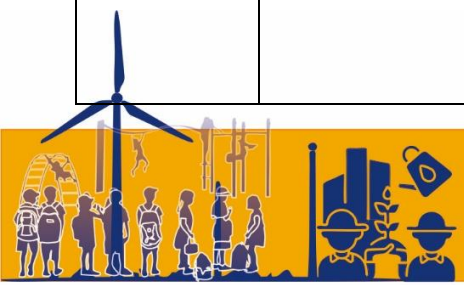


Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
		Sekolah Rakyat	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota			
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	60 Orang	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Orang	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	20 Orang	Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	50 Usulan	Dinas Sosial
		Rumah Sakit *Upgrade*	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN**			



Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
			Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap Jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit	Dinas Kesehatan
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	23 Paket	Dinas Kesehatan
		Penuntasan Tuberkolosis	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7894 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6121 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

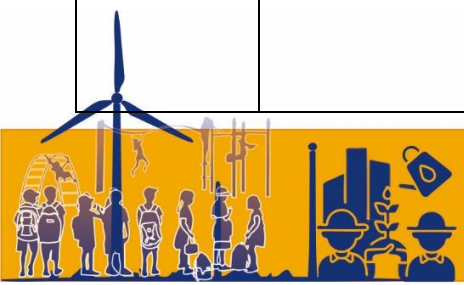


Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
		Digitalisasi Pendidikan (Papan Interaktif Digital)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	22 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	22 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	223 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Bantuan Perlengkapan Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			



Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	16 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	20 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	20 Paket	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	11 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	11 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT)	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	223 Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37600 Orang/bulan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	17 Laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Prioritas Nasional 6	FP: Stimulus Untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat	PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi	16 Orang	Dinas Sosial

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
				Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota		
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	16 Orang	Dinas Sosial
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	11 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	11 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	16 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	21 Orang	Dinas Sosial

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
				Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota		
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	150 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	8 Orang	Dinas Sosial
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota			
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	60 Orang	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	20 Orang	Dinas Sosial



Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
				Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota		
		PRO-KESRA Penduduk Berusaha dan Bekerja	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
			Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	20 Lembaga	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	200 Orang	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	5 Orang	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	1 Kegiatan	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	300 Unit Usaha	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
			Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	5 Unit Usaha	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Penyusunan Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	Jumlah Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	200 Dokumen	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2 Unit	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	800 Orang	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota			
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	60 Orang	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	50 Orang	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota			
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA Layanan Terpadu	10 Orang	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perusahaan	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur	20 Laporan	Dinas Koperasi,



Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota			
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10,328 Orang	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota			Kerja Dan Transmigrasi
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25 Orang	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		Gerakan ASRI: Penggantian Atap Seng Menjadi Genteng	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota			
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di	10 Unit Rumah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	1 Unit	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
		Program 3 Juta Rumah	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota			
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
			Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1 Unit Rumah	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota			
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	3 Lokasi	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	Badan Pendapatan Daerah
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	Badan Pendapatan Daerah
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	60000 Obyek Pajak	Badan Pendapatan Daerah
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	310000 Dokumen	Badan Pendapatan Daerah
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	310000 Dokumen	Badan Pendapatan Daerah
Prioritas Nasional 3	FP: Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola	Pusat Data Nasional (*Enabler*)	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			

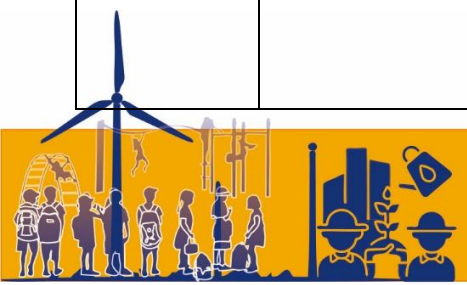
Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	10 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Cerdas	1 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	60 Titik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota			
			Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	40 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
Prioritas Nasional 7	FP: Regulasi dan Hukum	Pemberantasan Narkoba (*Enabler*)	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 Orang	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Prioritas Nasional 3	FP: Infrastruktur dan	Elektrifikasi Desa	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**			

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
	Konektivitas Ekonomi					
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota			
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	1 Unit	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Pera
Prioritas Nasional 6		Percepatan Pembangunan Daerah 3T	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			
			Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			
			Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja	1 Dokumen	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
				Samakan dengan Daerah Lain		
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	200 Kepala Keluarga	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	10 Orang	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	10 Orang	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			
			Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	10 Kepala Keluarga	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Prioritas Nasional 2	FP: Industri Nasional	Gerakan ASRI: Pengendalian Sampah Terpadu	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			
			Pengelolaan Sampah			
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan	2 Kelompok	Dinas Lingkungan Hidup



Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
				Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/ Kota yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	27.357,27 Ton	Dinas Lingkungan Hidup
			Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	91 Persentase	Dinas Lingkungan Hidup
			Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas	9.261,35 Ton	Dinas Lingkungan Hidup



Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
				lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		
			Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	7 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTKabupaten/ Kota atau TPA/TPST Regional	39.400 Ton	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas Nasional 5	FP: Hilirisasi SDA Strategis	Hilirisasi Industri Strategis	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**			
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota			
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Dinas Perdagangan

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
						dan Perindustrian
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan			

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	4 Dokumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal	10 Dokumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
				Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota			
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi			

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
			Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	30 Unit Usaha	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25 Orang	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			

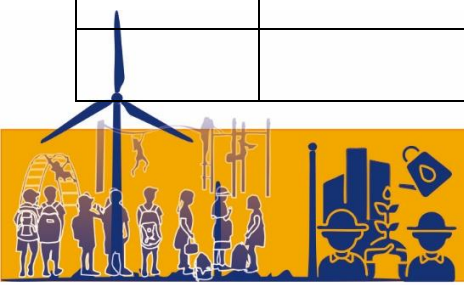
Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5 Unit Usaha	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	10 Unit Usaha	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	20 Lembaga	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	200 Orang	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	5 Orang	
			Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	1 Kegiatan	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	300 Unit Usaha	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
			Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi	5 Unit Usaha	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga



Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Teknologi Produksi kepada UMKM	Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi		Kerja Dan Transmigrasi
			Penyusunan Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	Jumlah Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	200 Dokumen	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Prioritas Nasional 2	FP: Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Pengembangan kawasan pangan terintegrasi	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	0,1 Ton	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	1 Laporan	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	2 Laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	5 Laporan	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	2 Laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	2 Laporan	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Pengembangan Prasarana Pertanian			

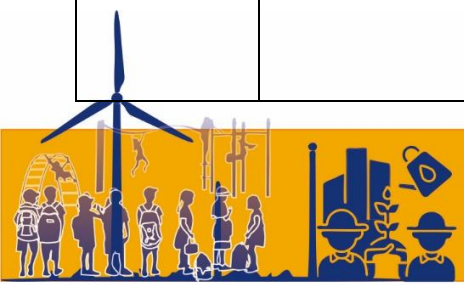


Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	51205,30 Ha	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	1 Unit	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan

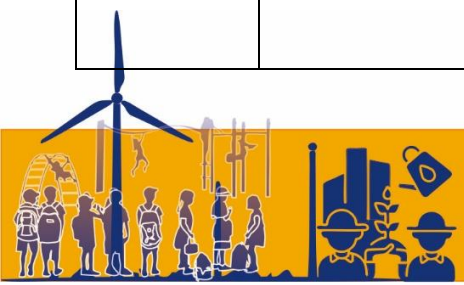
Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
						Ketahanan Pangan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/ Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B di Kabupaten/ Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	Dinas Tanaman Pangan,



Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota			Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Pembangunan Prasarana Pertanian			
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan



Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
						Ketahanan Pangan
		Pengembangan Kawasan Perkebunan	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	1 Laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	5 Laporan	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Pengembangan Prasarana Pertanian			
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	1 Unit	



Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota			
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2313 Ha	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan Ketahanan Pangan
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	5 Ha	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Dan

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
						Ketahanan Pangan
		Kampung Nelayan Merah Putih	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	10 Unit	Dinas Peternakan Dan Perikanan
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	15 Unit	Dinas Peternakan Dan Perikanan
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang	Dinas Peternakan Dan Perikanan
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	12 Kelompok	Dinas Peternakan Dan Perikanan

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	12 Unit	Dinas Peternakan Dan Perikanan
		Budidaya Ikan Darat Tematik	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 Unit	Dinas Peternakan Dan Perikanan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Unit	Dinas Peternakan Dan Perikanan
			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	2 Dokumen	Dinas Peternakan Dan Perikanan
		Peningkatan produksi daging, susu, dan telur	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota			

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	Dinas Peternakan Dan Perikanan
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan	Dinas Peternakan Dan Perikanan
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain			
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/ Kota lain	4000 Ekor	Dinas Peternakan Dan Perikanan
			Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/ Kota lain	4500 Dosis	Dinas Peternakan Dan Perikanan
		Kompor Listrik untuk Rumah Tangga	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
		Swasembada Air	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	5 KM	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
			Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1 KM	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
			Rehabilitasi Embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi	10 Unit	

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3 KM	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4 KM	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	25 KM	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Gerakan ASRI: Penghijauan	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota			
			Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/ Kota yang di tetapkan	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis			

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			(KLHS) Kabupaten/ Kota			
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2 Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup



Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja RKPD 2027	OPD Penanggung Jawab
			Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota			
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	52 Ha	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Unit	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Tim Penyusun RKPD Tahun 2027, diolah



4.10. Pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) dalam Dokumen Perencanaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran pembangunan, RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 menerapkan pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan tidak hanya terukur secara output, tetapi juga bermakna secara outcome dan dampak bagi masyarakat. Penerapan pendekatan THIS dijabarkan melalui salah satu prioritas tematik pembangunan daerah tahun 2027, yaitu Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting.

- TEMATIK: Fokus pada Satu Prioritas yang Jelas

  Prevalensi stunting ditetapkan sebagai prioritas tematik RKPD 2027 mengingat angka prevalensi 2024 sebesar 20,3% masih jauh dari target nasional. Seluruh sumber daya dan intervensi diarahkan pada satu tema besar: Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting melalui pendekatan konvergensi lintas sektor. Tema ini diturunkan dari visi "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera" dan misi "Mengembangkan Kualitas SDM yang Inklusif", serta selaras dengan 17 Program Prioritas Presiden dan Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau 26.720 penerima manfaat di Kabupaten Sidenreng Rappang per Mei 2026.

- HOLISTIK: Intervensi Hulu-Tengah-Hilir Secara Menyeluruh

  Stunting dipandang sebagai masalah multidimensi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor. Program Anak-anak Sidrap Sehat merancang intervensi dari hulu hingga hilir yang mencakup tiga pilar utama: (1) Intervensi Gizi Spesifik (sektor kesehatan): PMT Double Protein, suplementasi vitamin, inovasi SERBU STUNTING, TIMUN EMAS, PIA BUJANG ASIK; (2) Intervensi Gizi Sensitif (non-kesehatan): DASHAT, GENTING (785 OTA mengintervensi 1.888 anak), Gerakan Makan Telur, perlindungan sosial keluarga berisiko; dan (3) Tata Kelola Manajerial: Pemutakhiran data e-PPBGM real time, Rakor TPPS rutin dipimpin Wakil Bupati, audit kasus stunting tidak membaik.

- INTEGRATIF: Keterpaduan Lintas Sektor, Kewenangan, dan Sumber Dana

  Program ini melibatkan 9 OPD utama di bawah koordinasi BAPPERIDA sebagai Ketua Tim Konvergensi, didukung regulasi yang kuat (6 SK/Perbup aktif), serta memadukan berbagai sumber pendanaan: APBD, APBN, DAK, Dana Desa, dan CSR dari dunia usaha. Integrasi vertikal dilaksanakan melalui sinkronisasi dengan program nasional (PKH, BPNT, BSPS) dan DAK Fisik bidang sanitasi dan air minum. Integrasi horizontal dikoordinasikan melalui rapat TPPS yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati.

- SPASIAL: Ketepatan Lokus dan Intervensi Berbasis Wilayah

  Penetapan lokus prioritas didasarkan pada data e-PPBGM by name by address sehingga intervensi dapat dilakukan secara presisi. Lima kecamatan dengan angka stunting tertinggi ditetapkan sebagai lokus utama: Kulo (10,26%), Baranti (8,52%), Pitu Riase (7,38%), Tellu Limpoe (6,57%), dan Dua Pitue — yang mencatat penurunan signifikan namun tetap perlu

konsolidasi. Penetapan lokus ini dikuatkan melalui SK Bupati Nomor 457/VIII/2025 tentang Desa/Kelurahan Prioritas Stunting Tahun 2026, dan akan diperbarui dengan SK serupa untuk Tahun 2027. Peta tematik sebaran stunting per desa diintegrasikan dengan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memastikan intervensi infrastruktur (air bersih, sanitasi, RTLH) tepat sasaran secara spasial.



Tabel 4.24
Matriks keterpaduan pendekatan THIS

Pendekatan THIS	Dimensi Intervensi	Program/ Kegiatan	OPD/ Pelaksana	Sumber Dana	Lokus/ Sasaran	Target 2027
TEMATIK	Fokus Tema Pembangunan	Prevalensi Stunting yang merupakan penjabaran dari Program Unggulan Kepala Daerah yaitu Anak-anak Sidrap Sehat yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2027	BAPPERIDA (Koordinator)	APBD Kab.	Seluruh wilayah Kab. Sidrap	1 Tema Unggulan Aktif
	Target Indikator Makro	Penurunan prevalensi stunting dari 20,3% (2024) menjadi 14% sesuai target RPJMN 2025-2029	Dinas Kesehatan	APBN + APBD	11 Puskesmas se-Kab. Sidrap	Prevalensi Stunting ≤ 14%
	Sinkronisasi Nasional	Selaras dengan Program MBG Presiden Prabowo-Gibran	Dinas Kesehatan + Disdikbud	APBN	Seluruh sekolah & PAUD	Cakupan MBG Meningkat
HOLISTIK	Intervensi Gizi Spesifik (Hulu)	PMT Double Protein, Pemberian TTD Remaja Putri, Suplementasi Vitamin A, Tatalaksana Gizi Buruk, Inovasi SERBU STUNTING & TIMUN EMAS	Dinas Kesehatan & seluruh Puskesmas	APBD + DAK Kes.	5 Kec. Prioritas + seluruh kecamatan	Jumlah Stunting Turun Dari 1.368 Anak
	Intervensi Gizi Sensitif (Tengah)	DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), Bantuan Sosial keluarga berisiko, Gerakan Makan Telur, Perlindungan Sosial (PKH, BPNT)	Dinas Sosial, Dinas KB, Dinas Ketahanan Pangan, TP PKK	APBN + APBD + CSR	Kec. Dua Pitue, Tellu Limpoe, Baranti, Kulo, Pitu Riase	3.500 Keluarga Berisiko Terintervensi
	Tata Kelola & Manajerial (Hilir)	Pemutakhiran data e-PPBGM real time, Rakor TPPS rutin, Audit kasus stunting tidak membaik, Inovasi Lentera Media Digital & Wirosableng 212	BAPPERIDA + Dinas Kesehatan + Dinas KB	APBD	Seluruh desa/kelurahan	100% Data E-PPBGM Ter-Update Bulanan
	Penguatan SDM &	Pelatihan kader Posyandu, Penguatan	Dinas Kesehatan +	APBD + CSR	Seluruh Posyandu &	100% Kader

Pendekatan THIS	Dimensi Intervensi	Program/ Kegiatan	OPD/ Pelaksana	Sumber Dana	Lokus/ Sasaran	Target 2027
	Kapasitas	kapasitas bidan desa, Seminar Parenting TP PKK, Inovasi PIA BUJANG ASIK	Disdikbud + TP PKK + DWP		Puskesmas	Posyandu Terlatih
INTEGRATIF	**Integrasi Lintas OPD (Horizontal)**	9 OPD berkoordinasi: BAPPERIDA, Dinkes, Dinas KB, Disdikbud, BICIPTAPERA, Dinsos, Dinas PMDes PPA, Dinas Pangan, Kecamatan/Desa	TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) diketuai Wakil Bupati	APBD	Kab. Sidenreng Rappang	Rakor TPPS Min. 4x/Tahun
	Integrasi Pusat-Daerah (Vertikal)	DAK Fisik bidang sanitasi dan air minum, Dana Desa (BLT-DD, ketahanan pangan desa), Program K/L: PKH, BPNT, BSPS Kemensos	Dinkes + BICIPTAPERA + Dinsos + Dinas PMDes PPA	APBN + DAK + DD	Desa/kelurahan prioritas stunting	100% Desa Prioritas Tercover Program Pusat
	Integrasi Regulasi & Hukum	6 Regulasi aktif: Perbup ASI Eksklusif, SK TPPS 2025, SK Desa Prioritas 2025 & 2026, SK Tim GENTING, SK OTA Kecamatan	BAPPERIDA + Bagian Hukum Setda	APBD	Kab. Sidenreng Rappang	1 Perda/Perbup Baru Perkuat Intervensi
	Integrasi Sumber Pendanaan	APBD Kab., APBN/DAK, Dana Desa, CSR perusahaan (785 OTA-Cegah Stunting yang telah intervensi 1.888 anak), Kontribusi swasta (donasi telur dll.)	BAPPERIDA + BPKAD + Dinas PMDes + Dunia Usaha	Multi-sumber	Seluruh wilayah Kab. Sidrap	Pendanaan Kolaboratif Tidak Terganggu Jika 1 Sumber Dipotong
SPASIAL	**Lokus Prioritas (Angka Stunting Tinggi)**	5 Kecamatan: Kulo (10,26%), Baranti (8,52%), Pitu Riase (7,38%), Tellu Limpoe (6,57%), Dua Pitue (3,24% — turun signifikan, perlu konsolidasi) berdasarkan data e-PPBGM Maret 2026	Dinkes + BAPPERIDA + Kecamatan	APBD + DAK + DD	Kec. Kulo, Baranti, Pitu Riase, Tellu Limpoe, Dua Pitue	Seluruh Desa Prioritas Tercover Intervensi Spesifik

Pendekatan THIS	Dimensi Intervensi	Program/ Kegiatan	OPD/ Pelaksana	Sumber Dana	Lokus/ Sasaran	Target 2027
	Penetapan SK Desa Prioritas	SK Bupati Nomor 457/VIII/2025 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun 2026 menjadi acuan lokus intervensi spasial	BAPPERIDA + Bagian Hukum + Kecamatan	APBD	Desa/kel. per SK Bupati	SK Desa Prioritas 2027 Ditetapkan Januari 2027
	Peta Tematik Stunting	Peta sebaran balita stunting per desa berbasis data e-PPBGM by name by address; diintegrasikan dengan RTRW Kab. Sidrap untuk intervensi infrastruktur (air bersih, sanitasi, RTLH)	BAPPERIDA + BICIPTAPERA + Dinkes	APBD	Seluruh desa/kel. Kab. Sidrap	1 Peta Tematik Stunting Ter-Update Per Semester

Sumber: Tim Penyusun RKPD Tahun 2027, diolah



4.11. Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 telah mempertimbangkan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Lintas Sektor sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor. Penyusunan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada mekanisme administratif dan sektoral semata, melainkan juga memperhatikan potensi risiko strategis yang bersifat lintas sektor. Identifikasi risiko dilakukan secara sistematis terhadap seluruh Prioritas Pembangunan Daerah (PD) yang telah ditetapkan, mencakup analisis atas kemungkinan terjadinya risiko, dampak yang ditimbulkan, serta strategi mitigasi yang diperlukan.

Siklus manajemen risiko yang diterapkan meliputi empat tahapan utama, yaitu: (1) identifikasi dan penyusunan profil risiko pembangunan daerah; (2) pengelolaan dan pengendalian risiko melalui program dan kegiatan yang responsif; (3) pemantauan dan evaluasi perkembangan risiko secara berkala; serta (4) pelaporan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian RKPD. Pelaksanaan siklus ini dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bersama Inspektorat Daerah selaku mitra pengawasan internal.

Berdasarkan hasil identifikasi risiko yang dilakukan terhadap tujuh Prioritas Pembangunan Daerah, terdapat beberapa risiko strategis yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran RKPD Tahun 2027. Risiko-risiko tersebut bersifat lintas sektor dan memerlukan penanganan secara terpadu oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara bersamaan.

1. Pada bidang pertanian dan ketahanan pangan (PD1), risiko utama yang dihadapi adalah ancaman penurunan produksi akibat perubahan iklim ekstrem, serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), dan potensi kelangkaan pupuk bersubsidi yang dapat berdampak langsung terhadap capaian Indeks Ketahanan Pangan dan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian. Mitigasi atas risiko ini dilakukan melalui penguatan penyuluhan pertanian, penyediaan cadangan pangan daerah, serta peningkatan pengendalian OPT secara terpadu;
2. Pada bidang kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan (PD2), risiko yang teridentifikasi adalah tekanan inflasi yang dapat menekan daya beli masyarakat serta potensi mismatch antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Risiko ini berpengaruh langsung terhadap capaian Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Strategi mitigasi yang ditempuh antara lain melalui operasi pasar, penguatan perlindungan sosial adaptif, serta pelatihan vokasi berbasis kompetensi;

3. Pada bidang kualitas sumber daya manusia (PD3), risiko yang paling signifikan adalah distribusi tenaga pendidik yang tidak merata serta potensi kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular yang dapat menurunkan Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan. Penanganan risiko ini memerlukan koordinasi lintas OPD antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Badan Kepegawaian Daerah melalui redistribusi tenaga pendidik, penguatan surveilans kesehatan, dan percepatan cakupan imunisasi;
4. Pada bidang lingkungan hidup dan kebencanaan (PD4), risiko bencana banjir dan kekeringan berulang merupakan risiko dengan tingkat dampak paling tinggi karena bersifat lintas sektor, berpotensi mengganggu produksi pertanian, merusak infrastruktur, dan menyebabkan pengungsian masyarakat secara serentak. Mitigasi risiko ini dilaksanakan melalui normalisasi sungai, pengembangan sistem peringatan dini bencana, serta pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang melibatkan BPBD, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Dinas Lingkungan Hidup;
5. Pada bidang kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan (PD5), risiko utama yang diidentifikasi adalah potensi konflik sosial yang dipicu oleh tekanan ekonomi, kesenjangan antarkelompok masyarakat, serta melemahnya kohesi sosial akibat pengaruh negatif media sosial dan informasi yang tidak terverifikasi. Risiko ini berpotensi menghambat pencapaian Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) dan meningkatkan angka kriminalitas di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penanganan risiko ini bersifat lintas sektor dan melibatkan koordinasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Sekretariat Daerah melalui penguatan mekanisme deteksi dini konflik, pembinaan kehidupan beragama, pelestarian nilai budaya lokal, dan fasilitasi kegiatan kepemudaan yang produktif;
6. Pada bidang tata kelola pemerintahan (PD6), risiko yang diidentifikasi adalah inkonsistensi kualitas perencanaan OPD yang berpotensi menurunkan nilai SAKIP dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Mitigasi dilakukan melalui bimbingan teknis perencanaan berbasis kinerja, penguatan sistem monitoring berbasis digital, serta sinergi antara Bapperida dan Inspektorat dalam pengendalian pelaksanaan RKPD;
7. Pada bidang infrastruktur (PD7), risiko utama adalah laju kerusakan jalan yang melebihi kemampuan pemeliharaan anggaran, yang dimitigasi melalui penertiban kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dan optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur.

4.12. Aspirasi Masyarakat (Musrenbang)

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas mensyaratkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi forum resmi dan strategi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta prioritas pembangunan di wilayahnya. Melalui forum ini, prinsip perencanaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel diwujudkan secara nyata dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah.

Proses Musrenbang dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga Kabupaten/ Kota , serta forum perangkat daerah yang menghimpun masukan dari sektor-sektor pembangunan. Pada setiap jenjang, aspirasi masyarakat dikompilasi, dicari, dan dipilah berdasarkan kewenangan serta ketersediaan anggaran, sehingga menghasilkan daftar usulan yang terseleksi dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara keseluruhan, proses Musrenbang RKPD 2027 berhasil menghimpun dan memverifikasi usulan masyarakat sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.25
Rekapitulasi Usulan Aspirasi Masyarakat (Musrenbang) Tahun 2027

No.	Proses Tahapan	Jumlah Usulan	Keterangan
1	Usulan Masyarakat	1.532	Tanggal 01 s.d 12 Januari 2026
2	Verifikasi Mitra Bapperida	1.265	Tanggal 13 s.d 18 Januari 2026
3	Usulan Desa/Kelurahan, Kecamatan	2.046	Tanggal 13 s.d 23 Februari 2026
4	Verifikasi OPD	1.493	

Sumber: Hasil Musrenbang @SIPD-RI, diolah.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi proses perencanaan, Pemerintah Daerah mengintegrasikan seluruh tahapan Musrenbang ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD-RI, setiap usulan yang masuk dari masyarakat pada forum Musrenbang desa/kelurahan hingga Kabupaten/ Kota dicatat secara digital, terstruktur, dan dapat ditelusuri secara real-time. Sistem ini memungkinkan sinkronisasi data perencanaan lintas tingkat pemerintahan secara langsung, mengurangi potensi distorsi informasi, serta mempercepat proses konsolidasi usulan menjadi program dan kegiatan dalam dokumen RKPD.

Lebih lanjut, seluruh usulan yang berhasil diakomodasi kemudian disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Proses penyelarasan ini memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya ditampung secara prosedural, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah. Gambaran keselarasan antara aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.26
Keselarasan Pokok-pokok Pikiran DPRD dengan Prioritas Pembangunan

No.	Bidang	Aspirasi Masyarakat (Musrenbang)	Prioritas Pembangunan
1	Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Pembangunan/peningkatan/rehab jalan dan jembatan	PD7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas
2	Perhubungan	Pengadaan/rehab lampu jalan	
3	Perumahan	Pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin dan rentan	
4	Pekerjaan Umum	Sanitasi dan air bersih untuk masyarakat miskin dan rentan, pembangunan gedung/kantor untuk kepentingan umum, sarpras rumah ibadah, perbaikan TMP	
5	Persampahan dan lingkungan	Sarana dan prasarana persampahan dan pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan	PD4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana
6	Kebencanaan	Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan, sosialisasi pencegahan dan penanganan bencana, peningkatan kapasitas petugas dan relawan	
7	Pemberdayaan ekonomi, UMKM dan Koperasi	Sarana dan prasarana UMKM/koperasi, peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi, fasilitasi permodalan	PD2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan
8	Sosial	Perluasan cakupan BPJS Kesehatan dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, alat bantu disabilitas	
9	Perdagangan dan Industri	Peningkatan dan rehab pasar, sarana dan prasarana industri	
10	Transmigrasi	Sarana dan prasarana penunjang kawasan transmigrasi, peningkatan kapasitas/ keterampilan masyarakat kawasan transmigrasi	
11	Tenaga kerja	Peningkatan keterampilan pencari kerja	
12	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sarana dan prasarana, pengadaan vaksin	PD1. Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah melalui Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan
13	Perikanan dan Kelautan	Peningkatan kapasitas nelayan dan pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan	

No.	Bidang	Aspirasi Masyarakat (Musrenbang)	Prioritas Pembangunan
14	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengadaan sarana dan prasarana, bantuan alsintan, pupuk, pompanisasi, dan infrastruktur pendukung pertanian seperti jalan produksi, saluran irigasi dan tempat penampungan air lainnya	
15	Pengelolaan SDA dan irigasi	Peningkatan/rehab irigasi dan tanggul	
16	Pariwisata	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, Peningkatan infrastruktur pendukung daerah pariwisata	
17	Kepemudaan dan Olahraga	Sarana dan Prasarana olahraga, sport centre dan peningkatan kapasitas pemuda	PD5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius
18	Ketentraman dan Ketertiban	Pengadaan/ pengaktifan kembali poskamling	
19	Kebudayaan	Pembangunan/ rehabilitasi cagar budaya dan pelestarian budaya daerah	
20	Pelayanan Publik	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan publik	PD6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
21	Pendidikan	Peningkatan Sarana dan prasarana sekolah, Sosialisasi bidang pendidikan, beasiswa bagi pelajar kurang mampu	PD3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas
22	Kesehatan dan KB	Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat serta peningkatan kapasitas kader KB dan masyarakat	

Sumber: Hasil Musrenbang @SIPD-RI, diolah.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2027

Kerangka pembiayaan pembangunan daerah merupakan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam membiayai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Penyusunan kerangka pendanaan ini bertujuan untuk bahwa setiap prioritas pembangunan yang ditetapkan dapat didukung oleh sumber-sumber pembiayaan yang realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan peraturan-undangan yang berlaku.

Kerangka pembiayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 disusun berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Analisis terhadap kapasitas fiskal daerah menjadi landasan utama dalam menentukan besaran alokasi pembiayaan bagi masing-masing urusan pemerintahan, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, maupun urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun rencana.

Dalam konteks keterbatasan fiskal yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, penyusunan kerangka pendanaan Tahun 2027 juga mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pengalokasian anggaran. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dituntut untuk mampu mengoptimalkan setiap sumber daya keuangan yang tersedia agar memberikan dampak dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan wilayah, serta penguatan sektor-sektor unggulan daerah. Selain itu, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta pemanfaatan skema pembiayaan alternatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) maupun investasi swasta, juga menjadi pertimbangan strategi dalam memperluas ruang fiskal guna mendukung pencapaian target-target pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 yang telah ditetapkan.

Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan Tahun 2027 dan Proyeksi Tahun 2028

No.	Uraian	Realisasi			Target	Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Pendapatan Daerah**	**1,196,127,072,936.13**	**1,247,494,491,726.80**	**1,277,819,635,854.01**	**1,099,930,637,000.00**	**1,198,081,372,277.00**	**1,217,046,693,056.91**
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	171,316,137,750.00	184,956,715,500.80	237,293,217,416.01	243,511,889,000.00	303,795,801,277.00	326,521,474,056.91
1.1.1	Pajak Daerah	48,396,308,690.00	51,700,996,630.00	92,737,795,200.00	95,464,539,000.00	99,862,006,000.00	104,280,282,552.91
1.1.2	Retribusi Daerah	9,754,628,058.00	8,984,495,217.00	7,972,997,266.00	9,266,372,000.00	8,463,271,500.00	8,693,459,174.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,693,280,114.00	5,742,455,882.00	6,100,330,937.00	6,500,000,000.00	6,600,000,000.00	6,700,000,000.00
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	107,471,920,888.00	118,528,767,771.80	130,482,094,013.01	132,280,978,000.00	188,870,523,777.00	206,847,732,330.00
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1,022,896,935,186.13**	**1,056,467,147,194.00**	**1,038,906,418,438.00**	**856,418,748,000.00**	**894,285,571,000.00**	**890,525,219,000.00**
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**931,749,773,995.00**	**988,330,791,026.00**	**951,630,602,159.00**	**801,418,748,000.00**	**839,285,571,000.00**	**835,525,219,000.00**
	a. Dana Perimbangan	**849,950,316,995.00**	**921,641,974,026.00**	**885,073,468,593.00**	**749,951,140,000.00**	**787,817,963,000.00**	**775,525,219,000.00**
	1. Dana Transfer Umum	***617,554,048,179.00***	**693,940,454,000.00**	**711,835,864,141.00**	**568,712,814,000.00**	**606,579,637,000.00**	**580,525,219,000.00**
	1) Dana Bagi Hasil (DBH)	13,865,573,322.00	16,237,662,000.00	16,070,224,000.00	6,479,637,000.00	6,479,637,000.00	8,000,000,000.00
	2) Dana Alokasi Umum (DAU)	603,688,474,857.00	677,702,792,000.00	695,765,640,141.00	562,233,177,000.00	600,100,000,000.00	572,525,219,000.00
	2. Dana Transfer Khusus	***232,396,268,816.00***	**227,701,520,026.00**	**173,237,604,452.00**	**181,238,326,000.00**	**181,238,326,000.00**	**195,000,000,000.00**
	b. Dana Insentif Daerah (DID)	20,900,516,000.00	5,478,445,000.00	12,647,349,000.00	-	-	-
	c. Dana Desa	60,898,941,000.00	61,210,372,000.00	53,909,784,566.00	51,467,608,000.00	51,467,608,000.00	60,000,000,000.00

No.	Uraian	Realisasi			Target	Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.2.2	Transfer Antar Daerah	91,147,161,191.13	68,136,356,168.00	87,275,816,279.00	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	80,388,580,691.13	63,064,400,168.00	70,391,514,279.00	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00	55,000,000,000.00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	10,758,580,500.00	5,071,956,000.00	16,884,302,000.00	-	-	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1,914,000,000.00	6,070,629,032.00	1,620,000,000.00	-	-	-
	Belanja Daerah	1,151,123,590,855.64	1,266,456,132,250.82	1,261,343,055,331.00	1,119,930,637,000.00	1,228,081,372,277.00	1,217,834,193,056.91
	Belanja Operasi	838,585,410,563.64	957,877,210,361.96	1,003,761,359,326.00	904,616,400,000.00	1,030,986,108,683.00	996,367,735,000.00
	Belanja Pegawai	472,483,506,773.00	540,153,881,905.00	588,775,646,498.00	545,233,324,576.00	578,081,253,600.00	565,763,380,000.00
	Belanja Barang dan Jasa	335,504,801,308.64	346,989,604,241.96	373,668,745,613.00	346,626,239,924.00	452,004,855,083.00	429,954,355,000.00
	Belanja Bunga	478,773,090.00	288,275,997.00	123,096,777.00	-	-	-
	Belanja Hibah	29,866,376,892.00	70,267,257,078.00	41,116,370,438.00	12,750,835,500.00	900,000,000.00	650,000,000.00
	Belanja Bantuan Sosial	251,952,500.00	178,191,140.00	77,500,000.00	6,000,000.00	-	-
	Belanja Modal	195,388,897,620.00	172,087,450,001.86	132,931,295,288.00	98,517,337,000.00	64,137,162,594.00	97,295,041,056.91
	Belanja Tidak Terduga	740,788,040.00	2,058,430,500.00	1,698,609,292.00	5,000,000,000.00	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	Belanja Tidak Terduga	740,788,040.00	2,058,430,500.00	1,698,609,292.00	5,000,000,000.00	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
	Belanja Transfer	116,408,494,632.00	134,433,041,387.00	122,951,791,425.00	111,796,900,000.00	122,958,101,000.00	119,171,417,000.00
	Belanja Bagi Hasil	0	-	0.00	3,473,092,000.00	10,832,529,000.00	10,832,527,000.00
	Belanja Bantuan Keuangan	116,408,494,632.00	134,433,041,387.00	122,951,791,425.00	108,323,808,000.00	112,125,572,000.00	108,338,890,000.00
	Surplus/defisit	45,003,482,080.49	(18,961,640,524.02)	16,476,580,523.01	(20,000,000,000.00)	(30,000,000,000.00)	(787,500,000.00)
3	Pembiayaan						

No.	Uraian	Realisasi			Target	Proyeksi	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**24,477,102,422.00**	**67,248,687,155.49**	**46,012,960,133.47**	**20,000,000,000.00**	**30,000,000,000.00**	**787,500,000.00**
3.1.1	Penggunaan SiLPA	24,477,102,422.00	67,248,687,155.49	46,012,960,133.47	20,000,000,000.00	30,000,000,000.00	787,500,000.00
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2,250,000,422.00**	**2,274,086,498.00**	**2,274,086,498.00**	**-**	**-**	**-**
3.2.1	Penyertaan Modal						
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok	2,250,000,422.00	2,274,086,498.00	2,274,086,498.00	-	-	-
	Pembiayaan Netto	**22,227,102,000.00**	**64,974,600,657.49**	**43,738,873,635.47**	**20,000,000,000.00**	**30,000,000,000.00**	**787,500,000.00**
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	67,230,584,080.49	46,012,960,133.47	60,215,454,158.48	-	-	-

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah, (diolah)



Kerangka pendanaan daerah merupakan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas fiskal daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Analisis kerangka pendanaan dilakukan dengan menelaah realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2023–2025, target tahun 2026, serta proyeksi tahun 2027–2028 sebagaimana tersaji dalam Tabel 5.1. Secara umum, kondisi keuangan daerah berada dalam posisi yang cukup sehat, meskipun terdapat sejumlah tekanan fiskal yang perlu dikelola secara cermat, terutama menyangkut struktur belanja dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2023–2025 menunjukkan tren yang cukup positif, dengan realisasi berturut-turut sebesar Rp1,196 triliun, Rp1,247 triliun, dan Rp1,277 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang tumbuh signifikan dari Rp171,3 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp237,3 miliar pada tahun 2025, meskipun pendapatan transfer masih mendominasi struktur pendapatan daerah secara keseluruhan. Pada tahun 2026, target pendapatan ditetapkan lebih konservatif sebesar Rp1,099 triliun sebagai dampak dari penyesuaian kebijakan transfer pemerintah pusat, khususnya penurunan Dana Alokasi Umum dan Dana Perimbangan. Merespons kondisi tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan kembali meningkat pada tahun 2027 menjadi Rp1,198 triliun dan pada tahun 2028 mencapai Rp1,217 triliun, seiring dengan proyeksi pertumbuhan PAD yang diperkirakan mencapai Rp303,8 miliar pada tahun 2027 dan Rp326,5 miliar pada tahun 2028.

Belanja Daerah selama periode 2023–2025 bergerak sejalan dengan kapasitas pendapatan yang tersedia, dengan realisasi sebesar Rp1,151 triliun pada tahun 2023, Rp1,266 triliun pada tahun 2024, dan Rp1,261 triliun pada tahun 2025. Struktur belanja masih didominasi oleh Belanja Operasi terutama Belanja Pegawai yang terus tumbuh dan menekan ruang fiskal untuk kebutuhan pembangunan yang lebih produktif. Di sisi lain, Belanja Modal menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari Rp195,4 miliar pada tahun 2023 hingga diproyeksikan hanya sebesar Rp64,1 miliar pada tahun 2027, sebelum diharapkan kembali meningkat menjadi Rp97,3 miliar pada tahun 2028. Target belanja tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1,119 triliun, dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp1,228 triliun pada tahun 2027 serta Rp1,217 triliun pada tahun 2028. Tren penurunan Belanja Modal ini perlu mendapat perhatian serius dan upaya afirmatif agar kapasitas pembangunan infrastruktur dan layanan publik daerah tidak terganggu dalam jangka menengah.

Posisi anggaran daerah mencatat surplus pada tahun 2023 sebesar Rp45 miliar dan tahun 2025 sebesar Rp16,5 miliar, sementara defisit terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp18,9 miliar. Ke depan, defisit direncanakan secara terukur sebesar Rp20 miliar pada tahun 2026 dan Rp30 miliar pada tahun 2027 guna mendorong akselerasi program pembangunan prioritas, sebelum menyempit tajam menjadi Rp787,5 juta pada tahun 2028. Seluruh defisit yang direncanakan akan ditutup melalui penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, tanpa rencana pengambilan pinjaman baru maupun penyertaan modal baru pada periode 2026–2028.

Kondisi ini mencerminkan pengelolaan pembiayaan daerah yang prudent dan bertanggung jawab terhadap kesinambungan fiskal daerah dalam jangka menengah.

Secara keseluruhan, kondisi keuangan daerah berada dalam posisi yang cukup sehat dan menunjukkan arah yang positif, meskipun terdapat sejumlah tantangan struktural yang memerlukan penanganan yang tepat dan terencana. Kemandirian fiskal daerah terus menguat, ditandai oleh pertumbuhan PAD yang konsisten khususnya pada komponen Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah yang menjadi modal penting untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Kendati demikian, ketergantungan terhadap transfer yang masih berada di atas 70% dari total pendapatan menjadikan daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal pusat, sebagaimana terlihat dari penurunan tajam target pendapatan pada tahun 2026.

Dari sisi belanja, tekanan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional secara keseluruhan perlu dikelola dengan bijak dan disiplin agar tidak terus menggerus ruang fiskal yang semestinya dapat dialokasikan untuk program pembangunan yang lebih produktif. Tren penurunan Belanja Modal yang terjadi secara konsisten sejak 2023 hingga 2027 menjadi perhatian utama yang memerlukan upaya afirmatif dan kebijakan yang tegas untuk membalikkan tren tersebut. Adapun rencana defisit terencana sebesar Rp30 miliar pada tahun 2027 merupakan kebijakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, selama didukung oleh ketersediaan SiLPA yang memadai dan kepastian realisasi proyeksi pendapatan yang telah ditetapkan.

5.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

Rencana Program yang termuat dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Sebagai dokumen perencanaan tahunan pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, RKPD Tahun 2027 disusun dengan memastikan konsistensi vertikal terhadap sasaran, indikator kinerja, dan kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2027 dirumuskan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Program Prioritas Pembangunan Daerah, maupun untuk pemenuhan Pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah hingga menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang ada. Kebutuhan penganggaran untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara terperinci beserta kebutuhan anggaran yang nantinya sebagai pedoman dalam penggunaan belanja untuk menerjemahkan indicator kinerja yang akan dicapai. Dalam konteks pelaksanaan

otonomi daerah, setiap perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci utama dalam memastikan sinergi pelaksanaan program dan menghindari tumpang tindih kegiatan. Oleh karena itu, rencana yang disusun dalam dokumen ini telah melalui proses harmonisasi dan integrasi lintas sektor untuk memaksimalkan dampak pembangunan yang dihasilkan.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Tahun 2027 disajikan pada Tabel 5.2 sebagai berikut:



Tabel 5.2

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAB. SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**352.765.413.000,00**								**362.190.211.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**352.598.913.000,00**								**361.815.211.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**352.598.913.000,00**								**361.815.211.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**291.710.055.000,00**								**291.726.103.000,00**	
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien						***291.565.055.000,00***								***291.581.103.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	291.565.055.000,00							100 %	291.581.103.000,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						75.000.000,00						Kantor/ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		75.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang Disusun Tepat Waktu						75.000.000,00						Kantor/ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00							2 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00							4 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00							1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00							4 Laporan	10.000.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						290.214.763.000,00						Kantor/ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		290.214.763.000,00	
		Tersedianya Laporan Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu						290.214.763.000,00						Kantor/ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		290.214.763.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00							12 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00							2 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00							4 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00							1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	5.000.000,00							18 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37600 Orang/bulan		37600 Orang/bulan	37600 Orang/bulan	290.164.763.000,00							37600 Orang/bulan	290.164.763.000,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						290.164.763.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			290.164.763.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37600 Orang/bulan		37600 Orang/bulan	37600 Orang/bulan	290.164.763.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD					37600 Orang/bulan	290.164.763.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan/Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						20.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Laporan	5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						528.500.000,00						Kantor/ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		528.500.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Sesuai Rencana						528.500.000,00						Kantor/ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		528.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00							10 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	515.500.000,00							20 Laporan	515.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00							4 Paket	3.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00							1 Paket	5.000.000,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Paket	3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Laporan	5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						515.500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			515.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	515.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Laporan	515.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						155.000.000,00						Kantor/ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		155.000.000,00	
		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah sesuai perencanaan dan spesifikasi teknis						155.000.000,00						Kantor/ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		155.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000.000,00							10 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	50.000.000,00							1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	45.000.000,00							5 Unit	45.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00							5 Unit	50.000.000,00	
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			45.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	45.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						494.500.000,00						Kantor/ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		510.548.000,00	
		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang operasional kantor sesuai kontrak yang mendukung kelancaran tugas perangkat daerah						494.500.000,00						Kantor/ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		510.548.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.000.000,00							12 Laporan	105.048.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	404.000.000,00							12 Laporan	404.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	414 Laporan		414 Laporan	414 Laporan	1.500.000,00							414 Laporan	1.500.000,00	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	414 Laporan		414 Laporan	414 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene |\ 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					414 Laporan	1.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						89.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			105.048.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene |\ 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	105.048.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						404.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			404.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	404.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene |\ 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	404.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						242.292.000,00						Kantor/ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		242.292.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						242.292.000,00						Kantor/ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		242.292.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	35.000.000,00							1 Unit	35.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	82.292.000,00							18 Unit	82.292.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	25.000.000,00							5 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00							1 Unit	100.000.000,00	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						82.292.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			82.292.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	82.292.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene |\ 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Unit	82.292.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene |\ 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						35.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene |\ 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene |\ 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**53.606.858.000,00**								**60.950.658.000,00**	
		Meningkatnya Akses Pendidikan yang Inklusif Bagi Anak Usia Sekolah						***52.923.858.000,00***								***53.916.158.000,00***	
			999.Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 13 - 15 Tahun	98.15 %		90.73 %	92.59 %	52.923.858.000,00							94.44 %	53.916.158.000,00	
			999.Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun	98.15 %		87.53 %	90.50 %	52.923.858.000,00							93.05 %	53.916.158.000,00	
			999.Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 7 - 12 Tahun	99.97 %		99.85 %	99.88 %	52.923.858.000,00							99.91 %	53.916.158.000,00	
			999.Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan	21.45 %		18.40 %	19.16 %	52.923.858.000,00							19.93 %	53.916.158.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						30.339.300.000,00						Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		32.605.500.000,00	
		Tersedianya Layanan Pembelajaran yang Bermutu Tingkat SD/MI						30.339.300.000,00						Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		32.605.500.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000,00							1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku		200 Buku	200 Buku	500.000,00							200 Buku	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00							1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	500.000,00							5 Kegiatan	50.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	500.000,00							5 Komunitas	35.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital		1 Konten Digital	1 Konten Digital	500.000,00							1 Konten Digital	35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	500.000,00							24 Orang	35.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	500.000,00							25 Orang	60.500.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00							1 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5500 Paket		5500 Paket	5500 Paket	500.000,00							5500 Paket	202.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket		15 Paket	16 Paket	2.000.000,00							18 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	22 Orang		22 Orang	22 Orang	100.000.000,00							22 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10000 Peserta Didik		10000 Peserta Didik	10000 Peserta Didik	15.000.000,00							10000 Peserta Didik	15.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	500.000,00							24 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20 Ruang		12 Ruang	14 Ruang	500.000,00							16 Ruang	802.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang		10 Ruang	15 Ruang	500.000,00							18 Ruang	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		13 Ruang	15 Ruang	500.000,00							17 Ruang	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	25 Ruang		10 Ruang	15 Ruang	500.000,00							18 Ruang	302.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	500.000,00							5 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	95 Unit		65 Unit	75 Unit	1.966.000.000,00							80 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.000.000,00							4 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	237 Satuan Pendidikan		237 Satuan Pendidikan	237 Satuan Pendidikan	35.000.000,00							237 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	11 Satuan Pendidikan		11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	20.000.000,00							11 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	236 Satuan Pendidikan		235 Satuan Pendidikan	235 Satuan Pendidikan	28.071.300.000,00							236 Satuan Pendidikan	28.000.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik		70 Peserta Didik	70 Peserta Didik	50.000.000,00							70 Peserta Didik	50.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	236 Orang		235 Orang	235 Orang	15.000.000,00							236 Orang	15.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Menunjang Pembelajaran Tingkat SD/MI						30.339.300.000,00						Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		32.605.500.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000,00							1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku		200 Buku	200 Buku	500.000,00							200 Buku	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00							1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk penecgahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	500.000,00							5 Kegiatan	50.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	500.000,00							5 Komunitas	35.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital		1 Konten Digital	1 Konten Digital	500.000,00							1 Konten Digital	35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	500.000,00							24 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	500.000,00							25 Orang	60.500.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00							1 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5500 Paket		5500 Paket	5500 Paket	500.000,00							5500 Paket	202.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket		15 Paket	16 Paket	2.000.000,00							18 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	22 Orang		22 Orang	22 Orang	100.000.000,00							22 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10000 Peserta Didik		10000 Peserta Didik	10000 Peserta Didik	15.000.000,00							10000 Peserta Didik	15.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	500.000,00							24 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20 Ruang		12 Ruang	14 Ruang	500.000,00							16 Ruang	802.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang		10 Ruang	15 Ruang	500.000,00							18 Ruang	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		13 Ruang	15 Ruang	500.000,00							17 Ruang	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	25 Ruang		10 Ruang	15 Ruang	500.000,00							18 Ruang	302.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	500.000,00							5 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	95 Unit		65 Unit	75 Unit	1.966.000.000,00							80 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.000.000,00							4 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	237 Satuan Pendidikan		237 Satuan Pendidikan	237 Satuan Pendidikan	35.000.000,00							237 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	11 Satuan Pendidikan		11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	20.000.000,00							11 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	236 Satuan Pendidikan		235 Satuan Pendidikan	235 Satuan Pendidikan	28.071.300.000,00							236 Satuan Pendidikan	28.000.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik		70 Peserta Didik	70 Peserta Didik	50.000.000,00							70 Peserta Didik	50.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	236 Orang		235 Orang	235 Orang	15.000.000,00							236 Orang	15.000.000,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Pembinaan Peserta Didik Tingkat SD/MI						30.339.300.000,00						Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		32.605.500.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000,00							1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku		200 Buku	200 Buku	500.000,00							200 Buku	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00							1 Dokumen	55.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	500.000,00							5 Kegiatan	50.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	500.000,00							5 Komunitas	35.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital		1 Konten Digital	1 Konten Digital	500.000,00							1 Konten Digital	35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	500.000,00							24 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	500.000,00							25 Orang	60.500.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00							1 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5500 Paket		5500 Paket	5500 Paket	500.000,00							5500 Paket	202.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket		15 Paket	16 Paket	2.000.000,00							18 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	22 Orang		22 Orang	22 Orang	100.000.000,00							22 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10000 Peserta Didik		10000 Peserta Didik	10000 Peserta Didik	15.000.000,00							10000 Peserta Didik	15.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	500.000,00							24 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20 Ruang		12 Ruang	14 Ruang	500.000,00							16 Ruang	802.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang		10 Ruang	15 Ruang	500.000,00							18 Ruang	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		13 Ruang	15 Ruang	500.000,00							17 Ruang	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	25 Ruang		10 Ruang	15 Ruang	500.000,00							18 Ruang	302.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	500.000,00							5 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	95 Unit		65 Unit	75 Unit	1.966.000.000,00							80 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.000.000,00							4 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	237 Satuan Pendidikan		237 Satuan Pendidikan	237 Satuan Pendidikan	35.000.000,00							237 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	11 Satuan Pendidikan		11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	20.000.000,00							11 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	236 Satuan Pendidikan		235 Satuan Pendidikan	235 Satuan Pendidikan	28.071.300.000,00							236 Satuan Pendidikan	28.000.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik		70 Peserta Didik	70 Peserta Didik	50.000.000,00							70 Peserta Didik	50.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	236 Orang		235 Orang	235 Orang	15.000.000,00							236 Orang	15.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			802.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	20 Ruang		12 Ruang	14 Ruang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					16 Ruang	802.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			302.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	25 Ruang		10 Ruang	15 Ruang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Ruang	302.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.966.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	95 Unit		65 Unit	75 Unit	1.966.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD					80 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	25 Paket		15 Paket	16 Paket	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Paket	2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik		70 Peserta Didik	70 Peserta Didik	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					70 Peserta Didik	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					1 Orang	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			60.500.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					25 Orang	60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						20.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	11 Satuan Pendidikan		11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					11 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						28.071.300.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			28.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	236 Satuan Pendidikan		235 Satuan Pendidikan	235 Satuan Pendidikan	28.071.300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	DAK Non Fisik-BOS Reguler					236 Satuan Pendidikan	28.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			15.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	236 Orang		235 Orang	235 Orang	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					236 Orang	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			35.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					24 Orang	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			35.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital		1 Konten Digital	1 Konten Digital	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					1 Konten Digital	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			35.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					24 Orang	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						55.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			55.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					1 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			35.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					5 Komunitas	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					5 Kegiatan	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			35.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku		200 Buku	200 Buku	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					200 Buku	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			202.000.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5500 Paket		5500 Paket	5500 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					5500 Paket	202.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			200.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang		10 Ruang	15 Ruang	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18 Ruang	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					4 Unit	2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	22 Orang		22 Orang	22 Orang	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22 Orang	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						35.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			35.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	237 Satuan Pendidikan		237 Satuan Pendidikan	237 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				237 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			200.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		13 Ruang	15 Ruang	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17 Ruang	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			15.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10000 Peserta Didik		10000 Peserta Didik	10000 Peserta Didik	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10000 Peserta Didik	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					1 Paket	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						14.357.900.000,00						Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		17.531.400.000,00	
		Tersedianya Layanan Pembelajaran yang Bermutu Tingkat SMP/MTs						14.357.900.000,00						Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		17.531.400.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000,00							1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku		200 Buku	200 Buku	500.000,00							200 Buku	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00							1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibanguin	20 Unit		10 Unit	13 Unit	500.000,00							15 Unit	202.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	50.000.000,00							5 Kegiatan	50.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	500.000,00							5 Komunitas	35.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital		1 Konten Digital	1 Konten Digital	500.000,00							1 Konten Digital	35.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	35 Paket		15 Paket	20 Paket	500.000,00							25 Paket	102.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	51 Orang		50 Orang	51 Orang	500.000,00							51 Orang	305.500.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	500.000,00							25 Orang	60.500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00							1 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3500 Paket		3500 Paket	3500 Paket	500.000,00							3500 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	45 Paket		15 Paket	20 Paket	500.000,00							25 Paket	102.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang		8 Ruang	10 Ruang	2.000.000,00							15 Ruang	2.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	22 Orang		22 Orang	22 Orang	50.000.000,00							22 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3500 Peserta Didik		3500 Peserta Didik	3500 Peserta Didik	15.000.000,00							3500 Peserta Didik	15.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	52 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	51 Satuan Pendidikan	35.000.000,00							51 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	500.000,00							24 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	15 Ruang		4 Ruang	8 Ruang	500.000,00							10 Ruang	502.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		10 Ruang	12 Ruang	500.000,00							15 Ruang	202.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang		8 Ruang	10 Ruang	500.000,00							15 Ruang	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		12 Ruang	15 Ruang	500.000,00							18 Ruang	250.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	23 Ruang		10 Ruang	12 Ruang	500.000,00							18 Ruang	202.000.000,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	25 Ruang		5 Ruang	15 Ruang	500.000,00							18 Ruang	202.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang		5 Ruang	10 Ruang	500.000,00							15 Ruang	302.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	500.000,00							5 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	50 Unit		25 Unit	35 Unit	2.000.000.000,00							40 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.000.000,00							4 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	11 Satuan Pendidikan		11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	20.000.000,00							11 Satuan Pendidikan	2.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	51 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	51 Satuan Pendidikan	12.053.400.000,00							51 Satuan Pendidikan	12.053.400.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	112 Peserta Didik		99 Peserta Didik	100 Peserta Didik	50.000.000,00							100 Peserta Didik	50.000.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	51 Orang		50 Orang	51 Orang	15.000.000,00							51 Orang	15.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Menunjang Pembelajaran Tingkat SMP/MTs						14.357.900.000,00						Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		17.531.400.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000,00							1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku		200 Buku	200 Buku	500.000,00							200 Buku	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00							1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	20 Unit		10 Unit	13 Unit	500.000,00							15 Unit	202.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	50.000.000,00							5 Kegiatan	50.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	500.000,00							5 Komunitas	35.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital		1 Konten Digital	1 Konten Digital	500.000,00							1 Konten Digital	35.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	35 Paket		15 Paket	20 Paket	500.000,00							25 Paket	102.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	51 Orang		50 Orang	51 Orang	500.000,00							51 Orang	305.500.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	500.000,00							25 Orang	60.500.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00							1 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3500 Paket		3500 Paket	3500 Paket	500.000,00							3500 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	45 Paket		15 Paket	20 Paket	500.000,00							25 Paket	102.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang		8 Ruang	10 Ruang	2.000.000,00							15 Ruang	2.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	22 Orang		22 Orang	22 Orang	50.000.000,00							22 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3500 Peserta Didik		3500 Peserta Didik	3500 Peserta Didik	15.000.000,00							3500 Peserta Didik	15.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	52 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	51 Satuan Pendidikan	35.000.000,00							51 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	500.000,00							24 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	15 Ruang		4 Ruang	8 Ruang	500.000,00							10 Ruang	502.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		10 Ruang	12 Ruang	500.000,00							15 Ruang	202.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang		8 Ruang	10 Ruang	500.000,00							15 Ruang	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		12 Ruang	15 Ruang	500.000,00							18 Ruang	250.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	23 Ruang		10 Ruang	12 Ruang	500.000,00							18 Ruang	202.000.000,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	25 Ruang		5 Ruang	15 Ruang	500.000,00							18 Ruang	202.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang		5 Ruang	10 Ruang	500.000,00							15 Ruang	302.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	500.000,00							5 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	50 Unit		25 Unit	35 Unit	2.000.000.000,00							40 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.000.000,00							4 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	11 Satuan Pendidikan		11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	20.000.000,00							11 Satuan Pendidikan	2.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	51 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	51 Satuan Pendidikan	12.053.400.000,00							51 Satuan Pendidikan	12.053.400.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	112 Peserta Didik		99 Peserta Didik	100 Peserta Didik	50.000.000,00							100 Peserta Didik	50.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	51 Orang		50 Orang	51 Orang	15.000.000,00							51 Orang	15.000.000,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Pembinaan Peserta Didik Tingkat SMP/MTs						14.357.900.000,00						Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		17.531.400.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000,00							1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku		200 Buku	200 Buku	500.000,00							200 Buku	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00							1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	20 Unit		10 Unit	13 Unit	500.000,00							15 Unit	202.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	50.000.000,00							5 Kegiatan	50.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	500.000,00							5 Komunitas	35.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital		1 Konten Digital	1 Konten Digital	500.000,00							1 Konten Digital	35.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	35 Paket		15 Paket	20 Paket	500.000,00							25 Paket	102.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	51 Orang		50 Orang	51 Orang	500.000,00							51 Orang	305.500.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	500.000,00							25 Orang	60.500.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00							1 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3500 Paket		3500 Paket	3500 Paket	500.000,00							3500 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	45 Paket		15 Paket	20 Paket	500.000,00							25 Paket	102.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang		8 Ruang	10 Ruang	2.000.000,00							15 Ruang	2.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	22 Orang		22 Orang	22 Orang	50.000.000,00							22 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3500 Peserta Didik		3500 Peserta Didik	3500 Peserta Didik	15.000.000,00							3500 Peserta Didik	15.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	52 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	51 Satuan Pendidikan	35.000.000,00							51 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	500.000,00							24 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	15 Ruang		4 Ruang	8 Ruang	500.000,00							10 Ruang	502.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		10 Ruang	12 Ruang	500.000,00							15 Ruang	202.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang		8 Ruang	10 Ruang	500.000,00							15 Ruang	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		12 Ruang	15 Ruang	500.000,00							18 Ruang	250.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	23 Ruang		10 Ruang	12 Ruang	500.000,00							18 Ruang	202.000.000,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	25 Ruang		5 Ruang	15 Ruang	500.000,00							18 Ruang	202.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang		5 Ruang	10 Ruang	500.000,00							15 Ruang	302.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	500.000,00							5 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	50 Unit		25 Unit	35 Unit	2.000.000.000,00							40 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.000.000,00							4 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	11 Satuan Pendidikan		11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	20.000.000,00							11 Satuan Pendidikan	2.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	51 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	51 Satuan Pendidikan	12.053.400.000,00							51 Satuan Pendidikan	12.053.400.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	112 Peserta Didik		99 Peserta Didik	100 Peserta Didik	50.000.000,00							100 Peserta Didik	50.000.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	51 Orang		50 Orang	51 Orang	15.000.000,00							51 Orang	15.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			502.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	15 Ruang		4 Ruang	8 Ruang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					10 Ruang	502.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			302.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang		5 Ruang	10 Ruang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					15 Ruang	302.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	20 Ruang		8 Ruang	10 Ruang	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					15 Ruang	2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			202.000.000,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	23 Ruang		10 Ruang	12 Ruang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					18 Ruang	202.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			202.000.000,00	
		Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	20 Unit		10 Unit	13 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					15 Unit	202.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						2.000.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	50 Unit		25 Unit	35 Unit	2.000.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					40 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			250.000.000,00	
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		12 Ruang	15 Ruang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					18 Ruang	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			202.000.000,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	25 Ruang		5 Ruang	15 Ruang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					18 Ruang	202.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					4 Unit	2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			102.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	35 Paket		15 Paket	20 Paket	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					25 Paket	102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			102.000.000,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	45 Paket		15 Paket	20 Paket	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					25 Paket	102.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					5 Unit	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			15.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3500 Peserta Didik		3500 Peserta Didik	3500 Peserta Didik	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3500 Peserta Didik	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	112 Peserta Didik		99 Peserta Didik	100 Peserta Didik	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100 Peserta Didik	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					1 Orang	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			60.500.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25 Orang	60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						20.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	11 Satuan Pendidikan		11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Satuan Pendidikan	2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						12.053.400.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			12.053.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	51 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	51 Satuan Pendidikan	12.053.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOS Reguler					51 Satuan Pendidikan	12.053.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			15.000.000,00	
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	51 Orang		50 Orang	51 Orang	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					51 Orang	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			305.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	51 Orang		50 Orang	51 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					51 Orang	305.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			35.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital		1 Konten Digital	1 Konten Digital	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					1 Konten Digital	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			35.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					24 Orang	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						55.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			55.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					1 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			35.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					5 Komunitas	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					5 Kegiatan	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						35.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			35.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	52 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	51 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					51 Satuan Pendidikan	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			200.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	20 Ruang		8 Ruang	10 Ruang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					15 Ruang	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			60.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	22 Orang		22 Orang	22 Orang	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					22 Orang	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			35.000.000,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku		200 Buku	200 Buku	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					200 Buku	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3500 Paket		3500 Paket	3500 Paket	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					3500 Paket	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			202.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang		10 Ruang	12 Ruang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					15 Ruang	202.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					1 Paket	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						6.994.858.000,00						Kelompok Satuan Pendidikan Anak Usia Dini		7.872.958.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kualifikasi Pendidik PAUD						6.994.858.000,00						Kelompok Satuan Pendidikan Anak Usia Dini		7.872.958.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	11 Paket		11 Paket	11 Paket	25.000.000,00							11 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	223 Dokumen		223 Dokumen	223 Dokumen	25.000.000,00							223 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas		4 Komunitas	4 Komunitas	500.000,00							4 Komunitas	5.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	223 Konten Digital		223 Konten Digital	223 Konten Digital	500.000,00							223 Konten Digital	10.000.000,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	223 Satuan Pendidikan		223 Satuan Pendidikan	223 Satuan Pendidikan	15.000.000,00							223 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	10171 Satuan Pendidikan		9775 Satuan Pendidikan	9873 Satuan Pendidikan	5.994.900.000,00							9972 Satuan Pendidikan	6.000.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	100.000.000,00							1 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00							1 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	11 Paket		11 Paket	11 Paket	500.000,00							11 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	11 Paket		11 Paket	11 Paket	500.000,00							11 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	223 Orang		223 Orang	223 Orang	50.000.000,00							223 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	330 Peserta Didik		110 Peserta Didik	165 Peserta Didik	500.000,00							220 Peserta Didik	15.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	223 Satuan Pendidikan		223 Satuan Pendidikan	223 Satuan Pendidikan	500.000,00							223 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	223 Peserta didik		223 Peserta didik	223 Peserta didik	2.000.000,00							223 Peserta didik	2.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	223 Orang		223 Orang	223 Orang	500.000,00							223 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	20 Ruang		20 Ruang	20 Ruang	500.000,00							20 Ruang	202.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11 Ruang		11 Ruang	11 Ruang	2.000.000,00							11 Ruang	2.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang		20 Ruang	20 Ruang	2.000.000,00							20 Ruang	2.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	11 Unit		11 Unit	11 Unit	707.958.000,00							11 Unit	707.958.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Unit		11 Unit	11 Unit	500.000,00							11 Unit	202.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500.000,00							2 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	500.000,00							10 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	223 Orang		223 Orang	223 Orang	15.000.000,00							223 Orang	15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Manajemen Kelembagaan PAUD						6.994.858.000,00						Kelompok Satuan Pendidikan Anak Usia Dini		7.872.958.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	11 Paket		11 Paket	11 Paket	25.000.000,00							11 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	223 Dokumen		223 Dokumen	223 Dokumen	25.000.000,00							223 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas		4 Komunitas	4 Komunitas	500.000,00							4 Komunitas	5.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	223 Konten Digital		223 Konten Digital	223 Konten Digital	500.000,00							223 Konten Digital	10.000.000,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	223 Satuan Pendidikan		223 Satuan Pendidikan	223 Satuan Pendidikan	15.000.000,00							223 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	10171 Satuan Pendidikan		9775 Satuan Pendidikan	9873 Satuan Pendidikan	5.994.900.000,00							9972 Satuan Pendidikan	6.000.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	100.000.000,00							1 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00							1 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	11 Paket		11 Paket	11 Paket	500.000,00							11 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	11 Paket		11 Paket	11 Paket	500.000,00							11 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	223 Orang		223 Orang	223 Orang	50.000.000,00							223 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	330 Peserta Didik		110 Peserta Didik	165 Peserta Didik	500.000,00							220 Peserta Didik	15.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	223 Satuan Pendidikan		223 Satuan Pendidikan	223 Satuan Pendidikan	500.000,00							223 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	223 Peserta didik		223 Peserta didik	223 Peserta didik	2.000.000,00							223 Peserta didik	2.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	223 Orang		223 Orang	223 Orang	500.000,00							223 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	20 Ruang		20 Ruang	20 Ruang	500.000,00							20 Ruang	202.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11 Ruang		11 Ruang	11 Ruang	2.000.000,00							11 Ruang	2.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang		20 Ruang	20 Ruang	2.000.000,00							20 Ruang	2.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	11 Unit		11 Unit	11 Unit	707.958.000,00							11 Unit	707.958.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Unit		11 Unit	11 Unit	500.000,00							11 Unit	202.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500.000,00							2 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	500.000,00							10 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	223 Orang		223 Orang	223 Orang	15.000.000,00							223 Orang	15.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						707.958.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			707.958.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	11 Unit		11 Unit	11 Unit	707.958.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan					11 Unit	707.958.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			30.000.000,00	
		Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	11 Paket		11 Paket	11 Paket	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Paket	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			15.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	330 Peserta Didik		110 Peserta Didik	165 Peserta Didik	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					220 Peserta Didik	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Orang	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	100.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Orang	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	223 Satuan Pendidikan		223 Satuan Pendidikan	223 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					223 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						5.994.900.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			6.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	10171 Satuan Pendidikan		9775 Satuan Pendidikan	9873 Satuan Pendidikan	5.994.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOP PAUD					9972 Satuan Pendidikan	6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			15.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	223 Orang		223 Orang	223 Orang	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					223 Orang	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	223 Konten Digital		223 Konten Digital	223 Konten Digital	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					223 Konten Digital	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			25.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	223 Orang		223 Orang	223 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					223 Orang	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						25.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	223 Dokumen		223 Dokumen	223 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					223 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas		4 Komunitas	4 Komunitas	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Komunitas	5.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	11 Ruang		11 Ruang	11 Ruang	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Ruang	2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000,00	
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	223 Peserta didik		223 Peserta didik	223 Peserta didik	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					223 Peserta didik	2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	223 Orang		223 Orang	223 Orang	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					223 Orang	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			200.000.000,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	11 Paket		11 Paket	11 Paket	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Paket	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			202.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Unit		11 Unit	11 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Unit	202.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						25.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			25.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	11 Paket		11 Paket	11 Paket	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Paket	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	223 Satuan Pendidikan		223 Satuan Pendidikan	223 Satuan Pendidikan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					223 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			202.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	20 Ruang		20 Ruang	20 Ruang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Ruang	202.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang		20 Ruang	20 Ruang	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Ruang	2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						1.914.800.000,00						Satuan Pendidikan Non Formal		2.940.800.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Layanan Pendidikan Nonformal Dalam Menyelenggarakan Layanan						1.914.800.000,00						Satuan Pendidikan Non Formal		2.940.800.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	50 Paket		50 Paket	50 Paket	500.000,00							50 Paket	52.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku		200 Buku	200 Buku	500.000,00							200 Buku	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00							6 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	2.000.000,00							4 Kegiatan	25.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00							1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas		4 Komunitas	4 Komunitas	500.000,00							4 Komunitas	25.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital		1 Konten Digital	1 Konten Digital	500.000,00							1 Konten Digital	35.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00							1 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	200 Paket		200 Paket	200 Paket	500.000,00							200 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	25.000.000,00							6 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	330 Peserta Didik		110 Peserta Didik	165 Peserta Didik	500.000,00							220 Peserta Didik	231.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	223 Orang		223 Orang	223 Orang	500.000,00							223 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	500.000,00							1 Ruang	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	2 unit		2 unit	2 unit	2.000.000,00							2 unit	2.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	500.000,00							4 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		4 Unit	4 Unit	500.000,00							4 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	6 Peserta Didik		6 Peserta Didik	6 Peserta Didik	500.000,00							6 Peserta Didik	35.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan		6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	10.000.000,00							6 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1088 Satuan Pendidikan		1048 Satuan Pendidikan	1058 Satuan Pendidikan	1.817.800.000,00							1068 Satuan Pendidikan	1.738.800.000,00	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			231.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	330 Peserta Didik		110 Peserta Didik	165 Peserta Didik	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					220 Peserta Didik	231.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			25.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Orang	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	6 Satuan Pendidikan		6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						1.817.800.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.738.800.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1088 Satuan Pendidikan		1048 Satuan Pendidikan	1058 Satuan Pendidikan	1.817.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan					1068 Satuan Pendidikan	1.738.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			35.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital		1 Konten Digital	1 Konten Digital	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Konten Digital	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	223 Orang		223 Orang	223 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					223 Orang	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			25.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas		4 Komunitas	4 Komunitas	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Komunitas	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			25.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Kegiatan	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	200 Paket		200 Paket	200 Paket	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200 Paket	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			35.000.000,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku		200 Buku	200 Buku	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200 Buku	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			200.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		4 Unit	4 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						25.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			25.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Orang	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			35.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	6 Peserta Didik		6 Peserta Didik	6 Peserta Didik	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Peserta Didik	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	2 unit		2 unit	2 unit	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 unit	2.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			52.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	50 Paket		50 Paket	50 Paket	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50 Paket	52.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			200.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Ruang	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**27.000.000,00**								**425.000.000,00**	
		Terwujudnya Kurikulum yang Relevan dengan Kebutuhan Lokal						***25.500.000,00***								***125.000.000,00***	
			999.Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100 Persentase		20 Persentase	40 Persentase	25.500.000,00							60 Persentase	125.000.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						1.000.000,00						Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		200.000.000,00	
		Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan Dasar yang Telah Ditetapkan						1.000.000,00						Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		200.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	41491 Buku		41491 Buku	41491 Buku	500.000,00							41491 Buku	100.000.000,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	273 Orang		273 Orang	273 Orang	500.000,00							273 Orang	100.000.000,00	
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	41491 Buku		41491 Buku	41491 Buku	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					41491 Buku	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	273 Orang		273 Orang	273 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					273 Orang	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						26.000.000,00						Kelompok Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		225.000.000,00	
		Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang Telah Ditetapkan						26.000.000,00						Kelompok Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		225.000.000,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00							2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00							2 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00							2 Dokumen	100.000.000,00	
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						25.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			25.000.000,00	
		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**7.255.000.000,00**								**8.713.450.000,00**	
		Tersedianya Tenaga Pendidik Yang Kompeten dan Merata						***7.255.000.000,00***								***8.713.450.000,00***	
			999.Indeks Pemerataan Guru	99.07 Rasio		95.07 Rasio	96.07 Rasio	7.255.000.000,00							97.07 Rasio	8.713.450.000,00	
			999.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik)	86 %		82 %	83 %	7.255.000.000,00							84 %	8.713.450.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						7.255.000.000,00						Pendidik dan Tenaga Kependidikan		8.713.450.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan						7.255.000.000,00						Pendidik dan Tenaga Kependidikan		8.713.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00							5 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	7.205.000.000,00							17 Laporan	8.663.450.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Panokaiene II Q	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						7.205.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			8.663.450.000,00	
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	7.205.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || Q	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17 Laporan	8.663.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**166.500.000,00**								**375.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**166.500.000,00**								**375.000.000,00**	
5.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**40.000.000,00**								**200.000.000,00**	
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan						***38.500.000,00***								***180.000.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	97.00 Persentase		55.90 Persentase	66.48 Persentase	38.500.000,00							93.71 Persentase	180.000.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan						19.000.000,00						Masyarakat		20.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	70 Objek		70 Objek	70 Objek	18.000.000,00							70 Objek	20.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						18.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	70 Objek		70 Objek	70 Objek	18.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					70 Objek	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						20.500.000,00						Masyarakat		105.000.000,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi Pelestarian Kesenian dan Pengembangan Kesenian Tradisional yang Pelakunya Berasal dari Masyarakat Lokal di Kabupaten/Kota						20.500.000,00						Masyarakat		105.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek		5 Objek	5 Objek	20.000.000,00							5 Objek	20.000.000,00	
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat		4 Sertifikat	6 Sertifikat	500.000,00							8 Sertifikat	85.000.000,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						20.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek		5 Objek	5 Objek	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Objek	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			85.000.000,00	
		Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat		4 Sertifikat	6 Sertifikat	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Sertifikat	85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Perganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						500.000,00						Lembaga Adat		75.000.000,00	
		Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat						500.000,00						Lembaga Adat		75.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek		1 Objek	1 Objek	500.000,00							3 Objek	75.000.000,00	
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			75.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek		1 Objek	1 Objek	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Objek	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						19.000.000,00						Masyarakat		20.000.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan						19.000.000,00						Masyarakat		20.000.000,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-		-	-	500.000,00							-	0,00	
			Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	-		-	-	500.000,00							-	0,00	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						500.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	-		-	70 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota						500.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			0,00	
		Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**30.000.000,00**								**30.000.000,00**	
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah						***30.000.000,00***								***30.000.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	55.71 Persentase		38.57 Persentase	42.86 Persentase	30.000.000,00							47.14 Persentase	30.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00						Dokumen Sejarah		30.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Sejarah yang Direvitalisasi						30.000.000,00						Dokumen Sejarah		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00							3 Dokumen	30.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah						30.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			30.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**51.500.000,00**								**100.000.000,00**	
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Terhadap Cagar Budaya						***50.500.000,00***								***100.000.000,00***	
			999.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	71.43 %		40.00 %	45.71 %	50.500.000,00							54.29 %	100.000.000,00	
			999.Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	85.71 Persentase		80.00 Persentase	81.43 Persentase	50.500.000,00							82.86 Persentase	100.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						20.500.000,00						Cagar Budaya		20.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya						20.500.000,00						Cagar Budaya		20.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	32 Objek		18 Objek	21 Objek	20.000.000,00							26 Objek	20.000.000,00	
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						20.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			20.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	32 Objek		18 Objek	21 Objek	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26 Objek	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						31.000.000,00						Cagar Budaya		80.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya						31.000.000,00						Cagar Budaya		80.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek		1 Objek	2 Objek	500.000,00							2 Objek	50.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	12 Objek		4 Objek	5 Objek	30.000.000,00							6 Objek	30.000.000,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						30.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			30.000.000,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	12 Objek		4 Objek	5 Objek	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Objek	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			50.000.000,00	
		Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek		1 Objek	2 Objek	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Objek	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya						20.500.000,00						Cagar Budaya		20.000.000,00	
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-		-	-	500.000,00							-	0,00	
	2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda						500.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			0,00	
		Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-		-	4 Objek	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya						31.000.000,00						Cagar Budaya		80.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-		-	-	500.000,00							-	0,00	
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya						500.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-		-	3 Objek	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**45.000.000,00**								**45.000.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Museum						***45.000.000,00***								***45.000.000,00***	
			999.Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Ke Museum	70 %		58 %	61 %	45.000.000,00							64 %	45.000.000,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						45.000.000,00						Museum		45.000.000,00	
		Terlaksananya Pameran Koleksi Museum						45.000.000,00						Museum		45.000.000,00	
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1388 Unit		1388 Unit	1388 Unit	20.000.000,00							1388 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00							1 Unit	25.000.000,00	
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu						20.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1388 Unit		1388 Unit	1388 Unit	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1388 Unit	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum						25.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			25.000.000,00	
		Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN						**199.912.550.200,00**								**201.142.550.100,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**199.912.550.200,00**								**201.142.550.100,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**199.912.550.200,00**								**201.142.550.100,00**	
9.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***129.474.900.200,00***								***129.474.900.100,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	129.474.900.200,00							100 %	129.474.900.100,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						80.000.000,00						-		80.000.000,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						80.000.000,00						-		80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00							3 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00							3 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00							3 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00							3 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00							3 Dokumen	10.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00							3 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00							3 Laporan	10.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Laporan	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						128.573.659.200,00						-		128.573.659.100,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						128.573.659.200,00						-		128.573.659.100,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00							3 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00							3 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00							4 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00							3 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00							3 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00							18 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1732 Orang/bulan		1732 Orang/bulan	1732 Orang/bulan	128.513.659.200,00							1732 Orang/bulan	128.513.659.100,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						128.513.659.200,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			128.513.659.100,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1732 Orang/bulan		1732 Orang/bulan	1732 Orang/bulan	128.513.659.200,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1732 Orang/bulan	128.513.659.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan/Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	-					3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					18 Laporan	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						70.000.000,00						-		70.000.000,00	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						70.000.000,00						-		70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00							3 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00							3 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00							6 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00							3 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00							3 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00							3 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00							3 Dokumen	10.000.000,00	
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Laporan	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						43.560.000,00						-		43.560.000,00	
		Perencanaan Pengelolaan Restribusi Daerah						43.560.000,00						-		43.560.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.890.000,00							3 Dokumen	10.890.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.890.000,00							3 Dokumen	10.890.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.890.000,00							3 Laporan	10.890.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.890.000,00							3 Dokumen	10.890.000,00	
	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						10.890.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.890.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.890.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	10.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						10.890.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.890.000,00	
		Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.890.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	10.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah						10.890.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.890.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.890.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	10.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						10.890.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.890.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.890.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	10.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						69.764.000,00						-		69.764.000,00	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						69.764.000,00						-		69.764.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.075.000,00							12 Dokumen	9.075.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.150.000,00							12 Dokumen	18.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	9.075.000,00							3 Dokumen	9.075.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	10.000.000,00							1 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	17.414.000,00							5 Orang	17.414.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit		3 Unit	3 Unit	6.050.000,00							3 Unit	6.050.000,00	
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						6.050.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			6.050.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit		3 Unit	3 Unit	6.050.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	6.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						9.075.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			9.075.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	9.075.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	9.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						9.075.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			9.075.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.075.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	9.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						18.150.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			18.150.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.150.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	18.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						17.414.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			17.414.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	17.414.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Orang	17.414.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Desa Lainungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Orang	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						160.000.000,00						-		160.000.000,00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor						160.000.000,00						-		160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00							3 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00							12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00							12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00							4 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	20.000.000,00							3 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	20.000.000,00							25 Paket	20.000.000,00	
			Jumtah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	20.000.000,00							3 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	20.000.000,00							3 Paket	20.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					25 Paket	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Paket	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Paket	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Paket	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Paket	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.988.550.000,00						-		1.988.550.000,00	
		Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.988.550.000,00						-		1.988.550.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00							1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00							1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	308.550.000,00							1 Unit	308.550.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00							1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00							1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.550.000.000,00							2 Unit	1.550.000.000,00	
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						308.550.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			308.550.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	308.550.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	308.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Desa Lainungan II 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						530.000.000,00						-		530.000.000,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						530.000.000,00						-		530.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00							12 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00							12 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00							3 Laporan	30.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						250.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						250.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						211.112.000,00						-		211.112.000,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						211.112.000,00						-		211.112.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	5.000.000,00							9 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	20.000.000,00							3 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	257 Unit		257 Unit	257 Unit	36.000.000,00							257 Unit	36.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	257 Unit		257 Unit	257 Unit	90.112.000,00							257 Unit	90.112.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	20.000.000,00							5 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	20.000.000,00							3 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	20.000.000,00							3 Unit	20.000.000,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						90.112.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			90.112.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	257 Unit		257 Unit	257 Unit	90.112.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					257 Unit	90.112.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						36.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	257 Unit		257 Unit	257 Unit	36.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					257 Unit	36.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					9 Unit	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Desa Lainungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Desa Lainungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
10.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***63.249.286.000,00***								***63.949.286.000,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	63.249.286.000,00							100 %	63.949.286.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit		16 Unit	16 Unit	3.700.000.000,00							16 Unit	5.500.000.000,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	40.000.000,00							14 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00							1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	14 Unit		14 Unit	14 Unit	50.000.000,00							14 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	90.046.500,00							4 Keluarga	35.140.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	23 Paket		23 Paket	23 Paket	4.800.000.000,00							23 Paket	2.800.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	69.800.000,00							2 Layanan	27.830.000,00	
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	550.000.000,00							1 Unit	550.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit		3 Unit	5 Unit	1.500.000.000,00							5 Unit	1.500.000.000,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	4.800.000.000,00							3 Unit	6.500.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	400.000.000,00							1 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500.000.000,00							2 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00							1 Unit	550.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas						550.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000.000,00	
		Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	550.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000.000,00	
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit		3 Unit	5 Unit	500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	14 Unit		14 Unit	14 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Unit	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000.000,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit		2 Unit	1 Unit	500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						300.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit		16 Unit	16 Unit	500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16 Unit	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					55 Unit	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000.000,00	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						2.800.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.800.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	23 Paket		23 Paket	23 Paket	2.800.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23 Paket	2.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan DIintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Keluarga	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Layanan	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						40.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			40.000.000,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	40.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Paket	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	525.400.000,00							55410 Orang	555.834.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	182.945.000,00							25200 Orang	155.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	232.160.000,00							5734 Orang	238.776.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.900.000,00							1 Dokumen	149.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.143.100.000,00							1 Dokumen	58.151.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	524.650.000,00							1 Dokumen	527.955.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.300.000,00							1 Dokumen	74.932.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	119.700.000,00							1 Dokumen	131.572.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	89.600.000,00							14 Dokumen	96.732.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.800.000,00							1 Dokumen	78.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.356.500,00							1 Dokumen	1.965.372.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.200.000,00							1 Dokumen	80.282.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	428.262.000,00							14 Dokumen	430.368.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.250.000,00							1 Dokumen	123.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	56.800.000,00							14 Dokumen	66.172.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000,00							1 Dokumen	247.342.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	465.152.000,00							14 Dokumen	494.580.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	267.887.000,00							1 Dokumen	278.206.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.799.000,00							1 Dokumen	70.081.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	700.000.000,00							14 Dokumen	700.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	14 Unit		14 Unit	14 Unit	50.000.000,00							14 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	77.600.000,00							4 Unit	83.622.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	91.528.000,00							6810 Orang	89.920.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	370.440.000,00							6179 Orang	351.094.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.450.000,00							1 Laporan	173.357.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	113.600.000,00							500 Orang	119.412.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	6121 Orang	216.600.000,00							6243 Orang	230.040.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	130.700.000,00							7000 Orang	130.496.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	690.800.000,00							8289 Orang	715.260.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	96.250.000,00							490 Orang	95.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	755 Orang	254.200.000,00							750 Orang	270.960.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	220.600.000,00							5354 Orang	306.722.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	130.900.000,00							108873 Orang	201.632.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	142.600.000,00							50658 Orang	207.634.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	218.400.000,00							246811 Orang	260.620.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	115.800.000,00							294 Orang	122.552.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	76.100.000,00							14 Unit	76.940.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	94.750.000,00							4 Tatanan	101.437.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						100.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					6179 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					6810 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						200.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			200.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					5734 Orang	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25200 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					55410 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					246811 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50658 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					108873 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5354 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	775 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					750 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						400.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	400.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					8289 Orang	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7000 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						151.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			151.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	151.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					1 Dokumen	151.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						200.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					14 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						100.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						22.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	22.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Dokumen	22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						47.870.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			47.870.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	47.870.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					14 Dokumen	47.870.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						22.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	22.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					294 Orang	22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						57.000.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			58.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.000.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	58.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						32.499.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			32.499.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.499.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	32.499.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						700.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			700.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	700.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Dokumen	700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	14 Unit		14 Unit	14 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Unit	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						40.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			40.000.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						40.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			40.000.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	40.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Unit	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						40.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			40.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	6121 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					6243 Orang	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						40.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			40.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	40.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					500 Orang	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					490 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Tatanan	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						200.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			200.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	155.295.000,00							14 Dokumen	168.425.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						53.007.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			53.007.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	53.007.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Dokumen	53.007.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						180.000.000,00						-		180.000.000,00	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						180.000.000,00						-		180.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00							10 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	120.000.000,00							14 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	16 Unit		16 Unit	16 Unit	20.000.000,00							16 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	20.000.000,00							14 Unit	20.000.000,00	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Unit	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	16 Unit		16 Unit	16 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16 Unit	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						120.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			120.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	120.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Unit	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	-	500.000.000,00							-	500.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000.000,00	
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-		-	2 Unit	500.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah FKTP yang melaksanakan pengelolaan kesehatan primer	-		-	-	20.000.000,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	590.650.000,00							-	692.525.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	424.038.500,00							-	536.742.350,00	
			Jumlah Laporan Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit dengue	-		-	-	40.000.000,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	142.100.000,00							-	152.690.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	64.200.000,00							-	83.172.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	176.660.000,00							-	185.827.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	100.950.000,00							-	113.286.000,00	
	1.02.02.2.02.0051	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit dengue						40.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit dengue	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit dengue	-		-	14 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						132.910.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			132.910.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	14 Paket	132.910.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					-	132.910.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						30.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	14 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	273 Orang	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						100.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0058	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Primer						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Primer di FKTP	Jumlah FKTP yang melaksanakan pengelolaan kesehatan primer	-		-	14 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	1650 Orang	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
11.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**899.158.000,00**								**889.037.000,00**	
		Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memadai, Berkualitas dan Merata						***580.000.000,00***								***580.000.000,00***	
			999.Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90 %		85 %	87 %	580.000.000,00							88 %	580.000.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						30.000.000,00						-		30.000.000,00	
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						30.000.000,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	30.000.000,00							100 Dokumen	30.000.000,00	
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						30.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Desa Lainungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						150.000.000,00						-		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00							4 Dokumen	50.000.000,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Desa Lainungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	120 Orang	719.158.000,00							130 Orang	709.037.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	120 Orang	500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Desa Lainungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					130 Orang	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						150.000.000,00						-		150.000.000,00	
		Perencanaan dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						150.000.000,00						-		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
	1.02.03.2.02.0004	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	4 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	100 Orang	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
12.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**424.619.000,00**								**424.619.000,00**	
		Terwujudnya Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memiliki Izin						***424.619.000,00***								***424.619.000,00***	
			999.Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memiliki Izin	100 %		100 %	100 %	424.619.000,00							100 %	424.619.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	150 Dokumen		130 Dokumen	135 Dokumen	50.000.000,00							140 Dokumen	50.000.000,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	150 Dokumen		130 Dokumen	135 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					140 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						160.000.000,00						-		160.000.000,00	
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						160.000.000,00						-		160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	160.000.000,00							10 Dokumen	160.000.000,00	
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						160.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			160.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	160.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Desa Lainungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Dokumen	160.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						100.000.000,00						-		100.000.000,00	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						100.000.000,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	130 Dokumen		110 Dokumen	115 Dokumen	100.000.000,00							120 Dokumen	100.000.000,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						100.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	130 Dokumen		110 Dokumen	115 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Desa Lainungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						54.619.000,00						-		54.619.000,00	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						54.619.000,00						-		54.619.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	54.619.000,00							60 Dokumen	54.619.000,00	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						54.619.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			54.619.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	54.619.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60 Dokumen	54.619.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						60.000.000,00						-		60.000.000,00	
		Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						60.000.000,00						-		60.000.000,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	130 Unit		110 Unit	115 Unit	60.000.000,00							120 Unit	60.000.000,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						60.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	130 Unit		110 Unit	115 Unit	60.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Desa Lainungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120 Unit	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
13.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**568.097.500,00**								**597.754.700,00**	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Aakan Hidup Bersih dan Sehat						***260.000.000,00***								***260.000.000,00***	
			999.Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	88 %		80 %	82 %	260.000.000,00							84 %	260.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						189.984.500,00						-		200.082.950,00	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						189.984.500,00						-		200.082.950,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	335 Dokumen		281 Dokumen	284 Dokumen	189.984.500,00							301 Dokumen	200.082.950,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						80.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			80.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	335 Dokumen		281 Dokumen	284 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					301 Dokumen	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						130.000.000,00						-		130.000.000,00	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						130.000.000,00						-		130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	65.640 Dokumen		52.251 Dokumen	55.287 Dokumen	100.000.000,00							58.738 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	106 Keluarga		106 Keluarga	106 Keluarga	30.000.000,00							106 Keluarga	30.000.000,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						100.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			100.000.000,00	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	65.640 Dokumen		52.251 Dokumen	55287 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					58.738 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						30.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			30.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	106 Keluarga		106 Keluarga	106 Keluarga	30.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Desa Lainungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					106 Keluarga	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	248.113.000,00							175 Dokumen	267.671.750,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Desa Lainungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					175 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO						**79.500.000.000,00**								**86.500.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**79.500.000.000,00**								**86.500.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**79.500.000.000,00**								**86.500.000.000,00**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
14.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						307.447.168.977,00								315.197.863.155,00	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						*77.500.000.000,00*								*80.000.000.000,00*	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	77.500.000.000,00							100 %	80.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						77.500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			80.000.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	1 Unit Kerja	77.500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16 Unit Kerja	80.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
15.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						92.015.948.500,00								97.703.543.750,00	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						*1.800.000.000,00*								*4.500.000.000,00*	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	1.800.000.000,00							100 %	4.500.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit		16 Unit	16 Unit	3.700.000.000,00							16 Unit	5.500.000.000,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	4.800.000.000,00							3 Unit	6.500.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	400.000.000,00							1 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.100.000.000,00							1 Unit	500.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						100.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000.000,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						100.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						200.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit		16 Unit	10 Unit	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16 Unit	1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						100.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	10 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					55 Unit	500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000.000,00	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit		3 Unit	1 Unit	500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-		-	-	2.200.000.000,00							-	4.200.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						1.000.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.000.000.000,00	
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-		-	1 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	3.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG						48.000.000.000,00								52.200.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						48.000.000.000,00								52.200.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						48.000.000.000,00								52.200.000.000,00	
16.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						307.447.168.977,00								315.197.863.155,00	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						*44.200.000.000,00*								*46.200.000.000,00*	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	44.200.000.000,00							100 %	46.200.000.000,00	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.988.550.000,00						-		1.988.550.000,00	
		Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.988.550.000,00						-		1.988.550.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.550.000.000,00							2 Unit	1.550.000.000,00	
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.200.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	1.200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	1.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						43.000.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			45.000.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	1 Unit Kerja	43.000.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	Pendapatan dari BLUD					16 Unit Kerja	45.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG
17.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***3.800.000.000,00***								***6.000.000.000,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	3.800.000.000,00							100 %	6.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit		16 Unit	16 Unit	3.700.000.000,00							16 Unit	5.500.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit		3 Unit	5 Unit	1.500.000.000,00							5 Unit	1.500.000.000,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	4.800.000.000,00							3 Unit	6.500.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit		3 Unit	1 Unit	500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.000.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit		16 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Unit	2.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						2.300.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.500.000.000,00	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit		3 Unit	1 Unit	2.300.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	3.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN NU'MANG
		RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE						**10.000.000.000,00**								**6.500.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.000.000.000,00**								**6.500.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**10.000.000.000,00**								**6.500.000.000,00**	
18.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***800.000.000,00***								***300.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	800.000.000,00							100 %	300.000.000,00	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.988.550.000,00						-		1.988.550.000,00	
		Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.988.550.000,00						-		1.988.550.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.550.000.000,00							2 Unit	1.550.000.000,00	
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						300.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			300.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	10 Unit	300.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Tanru Tedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	0 Unit Kerja	500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Desa Salobukkang || 1	Pendapatan dari BLUD					16 Unit Kerja	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
19.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***6.200.000.000,00***								***5.200.000.000,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	6.200.000.000,00							100 %	5.200.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit		16 Unit	16 Unit	3.700.000.000,00							16 Unit	5.500.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	23 Paket		23 Paket	23 Paket	4.800.000.000,00							23 Paket	2.800.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit		3 Unit	5 Unit	1.500.000.000,00							5 Unit	1.500.000.000,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	4.800.000.000,00							3 Unit	6.500.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.100.000.000,00							1 Unit	500.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit		3 Unit	1 Unit	500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Desa Salobukkang || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						1.000.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit		1 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Desa Salobukkang || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						2.000.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 Unit		16 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Desa Salobukkang || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16 Unit	2.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	50 Unit	500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Tanru Tedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					55 Unit	500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						1.500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.500.000.000,00	
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	3 Unit		3 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Tanru Tedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	1.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						2.000.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	23 Paket		23 Paket	0 Paket	2.000.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Desa Salobukkang || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23 Paket	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	502.100.000,00							1 Dokumen	501.650.000,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						500.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-		-	-	2.200.000.000,00							-	4.200.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						1.200.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.200.000.000,00	
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-		-	1 Unit	1.200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Tanru Tedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	1.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DUA PITUE
		UPT PUSKESMAS KULO						**4.213.181.500,00**								**4.583.713.650,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.213.181.500,00**								**4.583.713.650,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.213.181.500,00**								**4.583.713.650,00**	
20.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***3.508.193.000,00***								***3.859.012.300,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	3.508.193.000,00							100 %	3.859.012.300,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.508.193.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.859.012.300,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.508.193.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pendapatan dari BLUD					16 Unit Kerja	3.859.012.300,00	UPT PUSKESMAS KULO
21.	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***595.188.500,00***								***602.903.350,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	595.188.500,00							100 %	602.903.350,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	90.046.500,00							4 Keluarga	35.140.000,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	69.800.000,00							2 Layanan	27.830.000,00	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.010.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55 Unit	1.010.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.010.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Keluarga	1.010.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.010.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					2 Layanan	1.010.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	525.400.000,00							55410 Orang	555.834.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	182.945.000,00							25200 Orang	155.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	232.160.000,00							5734 Orang	238.776.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.900.000,00							1 Dokumen	149.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.143.100.000,00							1 Dokumen	58.151.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	524.650.000,00							1 Dokumen	527.955.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.300.000,00							1 Dokumen	74.932.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	119.700.000,00							1 Dokumen	131.572.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	89.600.000,00							14 Dokumen	96.732.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.800.000,00							1 Dokumen	78.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.356.500,00							1 Dokumen	1.965.372.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.200.000,00							1 Dokumen	80.282.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	428.262.000,00							14 Dokumen	430.368.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.250.000,00							1 Dokumen	123.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	56.800.000,00							14 Dokumen	66.172.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000,00							1 Dokumen	247.342.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	465.152.000,00							14 Dokumen	494.580.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	267.887.000,00							1 Dokumen	278.206.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.799.000,00							1 Dokumen	70.081.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	983.389.000,00							14 Dokumen	970.181.200,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	77.600.000,00							4 Unit	83.622.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	91.528.000,00							6810 Orang	89.920.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	370.440.000,00							6179 Orang	351.094.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.450.000,00							1 Laporan	173.357.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	113.600.000,00							500 Orang	119.412.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	6121 Orang	216.600.000,00							6243 Orang	230.040.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	130.700.000,00							7000 Orang	130.496.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	690.800.000,00							8289 Orang	715.260.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	96.250.000,00							490 Orang	95.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	755 Orang	254.200.000,00							750 Orang	270.960.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	220.600.000,00							5354 Orang	306.722.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	130.900.000,00							108873 Orang	201.632.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	142.600.000,00							50658 Orang	207.634.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	218.400.000,00							246811 Orang	260.620.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	115.800.000,00							294 Orang	122.552.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	76.100.000,00							14 Unit	76.940.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	94.750.000,00							4 Tatanan	101.437.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						24.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			24.240.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6011 Orang	24.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6179 Orang	24.240.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.010.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6750 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6810 Orang	1.010.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.010.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5600 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5734 Orang	1.010.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.010.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25100 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					25200 Orang	1.010.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						25.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			25.654.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55100 Orang	25.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55410 Orang	25.654.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.050.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	223865 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					246811 Orang	5.050.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						14.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			14.544.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	45948 Orang	14.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					50658 Orang	14.544.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	98751 Orang	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					108873 Orang	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	4856 Orang	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5354 Orang	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						18.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			18.180.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	760 Orang	18.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					750 Orang	18.180.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						26.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			26.260.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7518 Orang	26.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					8289 Orang	26.260.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						3.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.636.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7400 Orang	3.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					7000 Orang	3.636.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						180.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			181.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	181.800.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			12.120.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	12.120.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						62.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			62.620.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	62.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	62.620.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	255 Orang	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					294 Orang	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						12.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			12.120.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	12.120.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Unit	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						68.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			68.680.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	68.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	68.680.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Laporan	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						12.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			12.120.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	12.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Unit	12.120.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						26.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			26.260.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	5999 Orang	26.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6243 Orang	26.260.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	400 Orang	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					500 Orang	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	450 Orang	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					490 Orang	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Tatanan	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			12.120.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	12.120.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						3.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.636.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	3.636.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						36.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			36.360.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	36.360.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	155.295.000,00							14 Dokumen	168.425.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	590.650.000,00							-	692.525.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	424.038.500,00							-	536.742.350,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	142.100.000,00							-	152.690.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	64.200.000,00							-	83.172.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	176.660.000,00							-	185.827.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	100.950.000,00							-	113.286.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	14 Paket	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						3.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.636.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	14 Laporan	3.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	3.636.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						18.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			18.180.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	14 Orang	18.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	18.180.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						99.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			99.990.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	99.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	99.990.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						19.588.500,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			21.547.350,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	19.588.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	21.547.350,00	UPT PUSKESMAS KULO
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.212.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	1600 Orang	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	1.212.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
22.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**899.158.000,00**								**889.037.000,00**	
		Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memadai, Berkualitas dan Merata						***2.800.000,00***								***2.820.000,00***	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			999.Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90 %		85 %	87 %	2.800.000,00							88 %	2.820.000,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	120 Orang	719.158.000,00							130 Orang	709.037.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.820.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	1 Orang	2.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					130 Orang	2.820.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
23.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**568.097.500,00**								**597.754.700,00**	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Aakan Hidup Bersih dan Sehat						***2.800.000,00***								***2.828.000,00***	
			999.Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	88 %		80 %	82 %	2.800.000,00							84 %	2.828.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	248.113.000,00							175 Dokumen	267.671.750,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						2.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.828.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	1 Dokumen	2.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					175 Dokumen	2.828.000,00	UPT PUSKESMAS KULO
		UPT PUSKESMAS PANGKAJENE						**8.067.818.000,00**								**8.333.050.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.067.818.000,00**								**8.333.050.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**8.067.818.000,00**								**8.333.050.000,00**	
24.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***7.302.168.000,00***								***7.481.485.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	7.302.168.000,00							100 %	7.481.485.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						7.302.168.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.481.485.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	1 Unit Kerja	7.302.168.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pendapatan dari BLUD					16 Unit Kerja	7.481.485.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
25.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***633.220.000,00***								***709.592.000,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	633.220.000,00							100 %	709.592.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	90.046.500,00							4 Keluarga	35.140.000,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	69.800.000,00							2 Layanan	27.830.000,00	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	1 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55 Unit	110.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	18140 Keluarga	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Keluarga	110.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	1 Layanan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					2 Layanan	110.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	525.400.000,00							55410 Orang	555.834.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	182.945.000,00							25200 Orang	155.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	232.160.000,00							5734 Orang	238.776.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.900.000,00							1 Dokumen	149.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.143.100.000,00							1 Dokumen	58.151.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	524.650.000,00							1 Dokumen	527.955.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.300.000,00							1 Dokumen	74.932.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	119.700.000,00							1 Dokumen	131.572.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	89.600.000,00							14 Dokumen	96.732.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.800.000,00							1 Dokumen	78.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.356.500,00							1 Dokumen	1.965.372.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.200.000,00							1 Dokumen	80.282.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	428.262.000,00							14 Dokumen	430.368.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.250.000,00							1 Dokumen	123.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	56.800.000,00							14 Dokumen	66.172.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000,00							1 Dokumen	247.342.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	465.152.000,00							14 Dokumen	494.580.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	267.887.000,00							1 Dokumen	278.206.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.799.000,00							1 Dokumen	70.081.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	983.389.000,00							14 Dokumen	970.181.200,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	77.600.000,00							4 Unit	83.622.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	91.528.000,00							6810 Orang	89.920.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	370.440.000,00							6179 Orang	351.094.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.450.000,00							1 Laporan	173.357.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	113.600.000,00							500 Orang	119.412.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	6121 Orang	216.600.000,00							6243 Orang	230.040.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	130.700.000,00							7000 Orang	130.496.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	690.800.000,00							8289 Orang	715.260.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	96.250.000,00							490 Orang	95.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	755 Orang	254.200.000,00							750 Orang	270.960.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	220.600.000,00							5354 Orang	306.722.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	130.900.000,00							108873 Orang	201.632.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	142.600.000,00							50658 Orang	207.634.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	218.400.000,00							246811 Orang	260.620.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	115.800.000,00							294 Orang	122.552.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	76.100.000,00							14 Unit	76.940.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	94.750.000,00							4 Tatanan	101.437.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						41.960.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			57.156.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	941 Orang	41.960.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6179 Orang	57.156.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	941 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6810 Orang	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						1.960.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.156.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	869 Orang	1.960.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5734 Orang	2.156.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	3468 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					25200 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						195.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			214.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	9500 Orang	195.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55410 Orang	214.500.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	35593 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					246811 Orang	110.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	7311 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					50658 Orang	110.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	15531 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					108873 Orang	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	832 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5354 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	149 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					750 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						5.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.720.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	246 Orang	5.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					8289 Orang	5.720.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	1505 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					7000 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						160.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			176.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	176.000.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	149 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					294 Orang	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	1 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Unit	550.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						35.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			40.590.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	35.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Laporan	40.590.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	1 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Unit	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	1026 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6243 Orang	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	1505 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					500 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	190 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					490 Orang	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	1 Tatanan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Tatanan	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						6.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			6.600.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	6.600.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	155.295.000,00							14 Dokumen	168.425.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	590.650.000,00							-	692.525.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	424.038.500,00							-	536.742.350,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	142.100.000,00							-	152.690.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	64.200.000,00							-	83.172.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	176.660.000,00							-	185.827.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	100.950.000,00							-	113.286.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	1 Paket	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	12 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	138 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						136.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			149.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	136.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	149.600.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						35.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			38.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	38.500.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			510.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	138 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	510.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
26.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**899.158.000,00**								**889.037.000,00**	
		Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memadai, Berkualitas dan Merata						***50.000.000,00***								***55.000.000,00***	
			999.Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90 %		85 %	87 %	50.000.000,00							88 %	55.000.000,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	120 Orang	719.158.000,00							130 Orang	709.037.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	114 Orang	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					130 Orang	55.000.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
27.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**568.097.500,00**								**597.754.700,00**	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Hidup Bersih dan Sehat						***35.930.000,00***								***39.523.000,00***	
			999.Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	88 %		80 %	82 %	35.930.000,00							84 %	39.523.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						189.984.500,00						-		200.082.950,00	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						189.984.500,00						-		200.082.950,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	335 Dokumen		281 Dokumen	284 Dokumen	189.984.500,00							301 Dokumen	200.082.950,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	335 Dokumen		281 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					301 Dokumen	550.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	248.113.000,00							175 Dokumen	267.671.750,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						35.430.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			38.973.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	12 Dokumen	35.430.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					175 Dokumen	38.973.000,00	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE
		UPT PUSKESMAS LAWAWOI						**5.468.060.500,00**								**6.014.866.550,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.468.060.500,00**								**6.014.866.550,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.468.060.500,00**								**6.014.866.550,00**	
28.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***4.850.000.000,00***								***5.335.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	4.850.000.000,00							100 %	5.335.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						4.850.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.335.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.850.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16 Unit Kerja	5.335.000.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
29.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***401.060.500,00***								***441.166.550,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	401.060.500,00							100 %	441.166.550,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	90.046.500,00							4 Keluarga	35.140.000,00	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	30 Unit	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55 Unit	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	12564 Keluarga	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Keluarga	550.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	525.400.000,00							55410 Orang	555.834.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	182.945.000,00							25200 Orang	155.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	232.160.000,00							5734 Orang	238.776.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.900.000,00							1 Dokumen	149.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	524.650.000,00							1 Dokumen	527.955.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	89.600.000,00							14 Dokumen	96.732.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.800.000,00							1 Dokumen	78.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.356.500,00							1 Dokumen	1.965.372.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	428.262.000,00							14 Dokumen	430.368.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.250.000,00							1 Dokumen	123.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	56.800.000,00							14 Dokumen	66.172.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000,00							1 Dokumen	247.342.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	465.152.000,00							14 Dokumen	494.580.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	267.887.000,00							1 Dokumen	278.206.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.799.000,00							1 Dokumen	70.081.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	983.389.000,00							14 Dokumen	970.181.200,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	91.528.000,00							6810 Orang	89.920.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	370.440.000,00							6179 Orang	351.094.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.450.000,00							1 Laporan	173.357.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	113.600.000,00							500 Orang	119.412.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	6121 Orang	216.600.000,00							6243 Orang	230.040.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	130.700.000,00							7000 Orang	130.496.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	690.800.000,00							8289 Orang	715.260.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	96.250.000,00							490 Orang	95.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	755 Orang	254.200.000,00							750 Orang	270.960.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	220.600.000,00							5354 Orang	306.722.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	130.900.000,00							108873 Orang	201.632.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	142.600.000,00							50658 Orang	207.634.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	218.400.000,00							246811 Orang	260.620.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	115.800.000,00							294 Orang	122.552.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	94.750.000,00							4 Tatanan	101.437.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6011 Orang	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6179 Orang	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	632 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6810 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	614 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5734 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	2332 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					25200 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55100 Orang	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55410 Orang	22.000.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						15.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			16.500.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	11774 Orang	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					246811 Orang	16.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	4714 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					50658 Orang	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						12.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			13.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	1478 Orang	12.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					108873 Orang	13.200.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	329 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5354 Orang	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						34.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			37.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	760 Orang	34.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					750 Orang	37.400.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						20.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.550.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7518 Orang	20.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					8289 Orang	22.550.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						15.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			16.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	30 Orang	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					7000 Orang	16.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						15.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			16.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	50 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	16.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						135.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			148.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	148.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						38.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			41.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	50 Dokumen	38.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	41.800.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	372 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	22.000.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	100 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	55.000.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						17.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			18.700.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	200 Orang	17.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					294 Orang	18.700.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						7.560.500,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			8.316.550,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	7.560.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	8.316.550,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Laporan	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						25.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			27.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	7518 Orang	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6243 Orang	27.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						15.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			16.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	1274 Orang	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					500 Orang	16.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	10 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					490 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	5 Tatanan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Tatanan	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	372 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	22.000.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	155.295.000,00							14 Dokumen	168.425.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						7.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.700.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	7.700.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	590.650.000,00							-	692.525.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	424.038.500,00							-	536.742.350,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	64.200.000,00							-	83.172.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	176.660.000,00							-	185.827.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	100.950.000,00							-	113.286.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	5 Paket	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	100 Laporan	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	22.000.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						25.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			27.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	100 Laporan	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	27.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	55100 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
30.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**568.097.500,00**								**597.754.700,00**	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Aakan Hidup Bersih dan Sehat						***20.000.000,00***								***22.000.000,00***	
			999.Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	88 %		80 %	82 %	20.000.000,00							84 %	22.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	248.113.000,00							175 Dokumen	267.671.750,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					175 Dokumen	22.000.000,00	UPT PUSKESMAS LAWAWOI
		UPT PUSKESMAS MANISA						**3.541.392.000,00**								**3.455.100.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.541.392.000,00**								**3.455.100.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.541.392.000,00**								**3.455.100.000,00**	
31.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***2.979.724.000,00***								***2.841.762.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	2.979.724.000,00							100 %	2.841.762.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.979.724.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.841.762.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.979.724.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pendapatan dari BLUD					16 Unit Kerja	2.841.762.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
32.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***530.368.000,00***								***578.908.000,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	530.368.000,00							100 %	578.908.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	90.046.500,00							4 Keluarga	35.140.000,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	69.800.000,00							2 Layanan	27.830.000,00	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	15 Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55 Unit	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Keluarga	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					2 Layanan	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	525.400.000,00							55410 Orang	555.834.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	182.945.000,00							25200 Orang	155.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	232.160.000,00							5734 Orang	238.776.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.900.000,00							1 Dokumen	149.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.143.100.000,00							1 Dokumen	58.151.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	524.650.000,00							1 Dokumen	527.955.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.300.000,00							1 Dokumen	74.932.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	119.700.000,00							1 Dokumen	131.572.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	89.600.000,00							14 Dokumen	96.732.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.800.000,00							1 Dokumen	78.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.356.500,00							1 Dokumen	1.965.372.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.200.000,00							1 Dokumen	80.282.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	428.262.000,00							14 Dokumen	430.368.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.250.000,00							1 Dokumen	123.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	56.800.000,00							14 Dokumen	66.172.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000,00							1 Dokumen	247.342.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	465.152.000,00							14 Dokumen	494.580.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	267.887.000,00							1 Dokumen	278.206.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.799.000,00							1 Dokumen	70.081.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	983.389.000,00							14 Dokumen	970.181.200,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	77.600.000,00							4 Unit	83.622.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	91.528.000,00							6810 Orang	89.920.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	370.440.000,00							6179 Orang	351.094.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.450.000,00							1 Laporan	173.357.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	113.600.000,00							500 Orang	119.412.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	6121 Orang	216.600.000,00							6243 Orang	230.040.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	130.700.000,00							7000 Orang	130.496.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	690.800.000,00							8289 Orang	715.260.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	96.250.000,00							490 Orang	95.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	755 Orang	254.200.000,00							750 Orang	270.960.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	220.600.000,00							5354 Orang	306.722.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	130.900.000,00							108873 Orang	201.632.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	142.600.000,00							50658 Orang	207.634.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	218.400.000,00							246811 Orang	260.620.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	115.800.000,00							294 Orang	122.552.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	76.100.000,00							14 Unit	76.940.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	94.750.000,00							4 Tatanan	101.437.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						7.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			8.250.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6011 Orang	7.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6179 Orang	8.250.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6750 Orang	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6810 Orang	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5600 Orang	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5734 Orang	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						15.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			17.160.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25100 Orang	15.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					25200 Orang	17.160.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						12.300.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			13.530.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55100 Orang	12.300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55410 Orang	13.530.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	223865 Orang	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					246811 Orang	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	45948 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					50658 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	98751 Orang	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					108873 Orang	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	4856 Orang	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5354 Orang	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						17.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			18.700.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	760 Orang	17.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					750 Orang	18.700.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						11.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			12.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7518 Orang	11.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					8289 Orang	12.100.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						6.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.150.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7400 Orang	6.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					7000 Orang	7.150.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						196.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			215.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	196.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	215.600.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						17.300.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			19.030.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	17.300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	19.030.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						58.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			63.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	58.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	63.800.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	255 Orang	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					294 Orang	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	1 Unit	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Unit	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						105.168.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			111.188.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	105.168.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	111.188.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Laporan	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	1 Unit	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Unit	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						4.900.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.390.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	5999 Orang	4.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6243 Orang	5.390.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	400 Orang	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					500 Orang	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	450 Orang	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					490 Orang	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Tatanan	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						100.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			110.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						30.700.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			33.770.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.700.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	33.770.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik						2.100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.310.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	2.310.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	155.295.000,00							14 Dokumen	168.425.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						13.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			14.740.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	1 Dokumen	13.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	14.740.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	590.650.000,00							-	692.525.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	424.038.500,00							-	536.742.350,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	142.100.000,00							-	152.690.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	64.200.000,00							-	83.172.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	176.660.000,00							-	185.827.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	100.950.000,00							-	113.286.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	14 Paket	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	14 Laporan	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						4.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			4.620.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	14 Orang	4.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	4.620.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						22.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			24.860.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	22.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	24.860.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						22.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			24.860.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	22.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	24.860.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	1600 Orang	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	110.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
33.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**899.158.000,00**								**889.037.000,00**	
		Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memadai, Berkualitas dan Merata						***6.000.000,00***								***6.600.000,00***	
			999.Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90 %		85 %	87 %	6.000.000,00							88 %	6.600.000,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	120 Orang	719.158.000,00							130 Orang	709.037.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						6.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			6.600.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	50 Orang	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					130 Orang	6.600.000,00	UPT PUSKESMAS MANISA
		UPT PUSKESMAS BILOKKA						**4.047.699.000,00**								**4.452.468.900,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.047.699.000,00**								**4.452.468.900,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.047.699.000,00**								**4.452.468.900,00**	
34.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***3.300.000.000,00***								***3.630.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	3.300.000.000,00							100 %	3.630.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.300.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.630.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.300.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pendapatan dari BLUD					16 Unit Kerja	3.630.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
35.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***480.549.000,00***								***528.603.900,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	480.549.000,00							100 %	528.603.900,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	90.046.500,00							4 Keluarga	35.140.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	69.800.000,00							2 Layanan	27.830.000,00	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						560.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			616.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	1 Unit	560.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55 Unit	616.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	19850 Keluarga	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Keluarga	550.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	100 Layanan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					2 Layanan	550.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	525.400.000,00							55410 Orang	555.834.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	182.945.000,00							25200 Orang	155.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	232.160.000,00							5734 Orang	238.776.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.900.000,00							1 Dokumen	149.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.143.100.000,00							1 Dokumen	58.151.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	524.650.000,00							1 Dokumen	527.955.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.300.000,00							1 Dokumen	74.932.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	119.700.000,00							1 Dokumen	131.572.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	89.600.000,00							14 Dokumen	96.732.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.800.000,00							1 Dokumen	78.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.356.500,00							1 Dokumen	1.965.372.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.200.000,00							1 Dokumen	80.282.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	428.262.000,00							14 Dokumen	430.368.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.250.000,00							1 Dokumen	123.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	56.800.000,00							14 Dokumen	66.172.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000,00							1 Dokumen	247.342.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	465.152.000,00							14 Dokumen	494.580.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	267.887.000,00							1 Dokumen	278.206.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.799.000,00							1 Dokumen	70.081.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	983.389.000,00							14 Dokumen	970.181.200,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	77.600.000,00							4 Unit	83.622.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	91.528.000,00							6810 Orang	89.920.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	370.440.000,00							6179 Orang	351.094.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.450.000,00							1 Laporan	173.357.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	113.600.000,00							500 Orang	119.412.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	6121 Orang	216.600.000,00							6243 Orang	230.040.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	130.700.000,00							7000 Orang	130.496.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	690.800.000,00							8289 Orang	715.260.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	96.250.000,00							490 Orang	95.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	755 Orang	254.200.000,00							750 Orang	270.960.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	220.600.000,00							5354 Orang	306.722.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	130.900.000,00							108873 Orang	201.632.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	142.600.000,00							50658 Orang	207.634.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	218.400.000,00							246811 Orang	260.620.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	115.800.000,00							294 Orang	122.552.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	76.100.000,00							14 Unit	76.940.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	94.750.000,00							4 Tatanan	101.437.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						16.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			18.260.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	336 Orang	16.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6179 Orang	18.260.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	336 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6810 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	315 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5734 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	924 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					25200 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						27.900.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			30.690.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	970 Orang	27.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55410 Orang	30.690.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	12302 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					246811 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	115 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					50658 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	100 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					108873 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	100 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5354 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						14.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			15.620.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	50 Orang	14.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					750 Orang	15.620.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						33.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			36.960.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	100 Orang	33.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					8289 Orang	36.960.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	50 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					7000 Orang	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	50 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	50 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						107.242.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			117.966.200,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	100 Dokumen	107.242.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	117.966.200,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						20.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.440.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	1 Dokumen	20.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	22.440.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						47.550.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			52.305.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	1 Dokumen	47.550.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	-					14 Dokumen	52.305.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	50 Orang	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					294 Orang	22.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Unit	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						55.747.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			61.321.700,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	55.747.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	61.321.700,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Laporan	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Unit	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	100 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6243 Orang	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	100 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					500 Orang	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	100 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					490 Orang	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	1 Tatanan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Tatanan	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			440.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	440.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						38.550.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			42.405.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	38.550.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	42.405.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	155.295.000,00							14 Dokumen	168.425.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						12.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			13.640.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	12.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	13.640.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	590.650.000,00							-	692.525.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	424.038.500,00							-	536.742.350,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	142.100.000,00							-	152.690.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	64.200.000,00							-	83.172.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	176.660.000,00							-	185.827.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	100.950.000,00							-	113.286.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	100 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						74.900.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			82.390.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	74.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	82.390.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						10.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			11.000.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	100 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
36.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**899.158.000,00**								**889.037.000,00**	
		Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memadai, Berkualitas dan Merata						***23.150.000,00***								***25.465.000,00***	
			999.Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90 %		85 %	87 %	23.150.000,00							88 %	25.465.000,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	120 Orang	719.158.000,00							130 Orang	709.037.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						23.150.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			25.465.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	100 Orang	23.150.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					130 Orang	25.465.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
37.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**568.097.500,00**								**597.754.700,00**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Aakan Hidup Bersih dan Sehat						***5.000.000,00***								***5.500.000,00***	
			999.Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	88 %		80 %	82 %	5.000.000,00							84 %	5.500.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						189.984.500,00						-		200.082.950,00	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						189.984.500,00						-		200.082.950,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	335 Dokumen		281 Dokumen	284 Dokumen	189.984.500,00							301 Dokumen	200.082.950,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	335 Dokumen		281 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					301 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	248.113.000,00							175 Dokumen	267.671.750,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					175 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS BILOKKA
		UPT PUSKESMAS LANCIRANG						**3.431.497.500,00**								**3.204.146.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.431.497.500,00**								**3.204.146.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.431.497.500,00**								**3.204.146.000,00**	
38.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***2.912.860.000,00***								***3.204.146.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	2.912.860.000,00							100 %	3.204.146.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.912.860.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.204.146.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	2.912.860.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Ponrengae || 0	Pendapatan dari BLUD					16 Unit Kerja	3.204.146.000,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
39.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***449.449.500,00***								***0,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	449.449.500,00							100 %	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	90.046.500,00							4 Keluarga	35.140.000,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	69.800.000,00							2 Layanan	27.830.000,00	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Ponrengae || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55 Unit	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						58.346.500,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	58.346.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Keluarga	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)						42.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	42.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					2 Layanan	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	525.400.000,00							55410 Orang	555.834.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	182.945.000,00							25200 Orang	155.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	232.160.000,00							5734 Orang	238.776.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.900.000,00							1 Dokumen	149.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.143.100.000,00							1 Dokumen	58.151.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	524.650.000,00							1 Dokumen	527.955.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.300.000,00							1 Dokumen	74.932.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	119.700.000,00							1 Dokumen	131.572.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	89.600.000,00							14 Dokumen	96.732.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.800.000,00							1 Dokumen	78.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.356.500,00							1 Dokumen	1.965.372.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.200.000,00							1 Dokumen	80.282.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	428.262.000,00							14 Dokumen	430.368.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.250.000,00							1 Dokumen	123.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	56.800.000,00							14 Dokumen	66.172.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000,00							1 Dokumen	247.342.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	465.152.000,00							14 Dokumen	494.580.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	267.887.000,00							1 Dokumen	278.206.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.799.000,00							1 Dokumen	70.081.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	983.389.000,00							14 Dokumen	970.181.200,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	502.100.000,00							1 Dokumen	501.650.000,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	77.600.000,00							4 Unit	83.622.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	91.528.000,00							6810 Orang	89.920.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	370.440.000,00							6179 Orang	351.094.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.450.000,00							1 Laporan	173.357.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	113.600.000,00							500 Orang	119.412.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	6121 Orang	216.600.000,00							6243 Orang	230.040.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	130.700.000,00							7000 Orang	130.496.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	690.800.000,00							8289 Orang	715.260.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	96.250.000,00							490 Orang	95.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	755 Orang	254.200.000,00							750 Orang	270.960.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	220.600.000,00							5354 Orang	306.722.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	130.900.000,00							108873 Orang	201.632.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	142.600.000,00							50658 Orang	207.634.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	218.400.000,00							246811 Orang	260.620.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	115.800.000,00							294 Orang	122.552.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	76.100.000,00							14 Unit	76.940.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	94.750.000,00							4 Tatanan	101.437.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						51.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6,011 Orang	51.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6179 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						8.728.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6,750 Orang	8.728.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6810 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5,600 Orang	400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5734 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						37.945.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25,100 Orang	37.945.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					25200 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						16.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55,100 Orang	16.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55410 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						40.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	223,865 Orang	40.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					246811 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						12.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	45,948 Orang	12.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					50658 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						7.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	98,751 Orang	7.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					108873 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						1.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	4,856 Orang	1.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5354 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						12.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	760 Orang	12.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					750 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						11.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7,518 Orang	11.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					8289 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						7.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7,400 Orang	7.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					7000 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						6.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	6.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						21.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						33.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						18.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	18.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						9.680.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.680.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						6.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						3.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	255 Orang	3.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					294 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						4.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						4.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Unit	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						700.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	700.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Laporan	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						6.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Unit	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						2.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	5,999 Orang	2.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6243 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						3.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	400 Orang	3.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					500 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						6.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	450 Orang	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					490 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						1.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	1.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Tatanan	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						37.100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	155.295.000,00							14 Dokumen	168.425.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	590.650.000,00							-	692.525.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	424.038.500,00							-	536.742.350,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	142.100.000,00							-	152.690.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	64.200.000,00							-	83.172.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	176.660.000,00							-	185.827.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	100.950.000,00							-	113.286.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	14 Paket	600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						450.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	14 Laporan	450.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						4.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	14 Orang	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						1.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	1.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						1.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	1.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						4.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	1,600 Orang	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
40.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**899.158.000,00**								**889.037.000,00**	
		Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memadai, Berkualitas dan Merata						***28.888.000,00***								***0,00***	
			999.Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90 %		85 %	87 %	28.888.000,00							88 %	0,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	120 Orang	719.158.000,00							130 Orang	709.037.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						28.888.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	1 Orang	28.888.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					130 Orang	0,00	UPT PUSKESMAS LANCIRANG
		UPT PUSKESMAS BARANTI						**4.358.416.500,00**								**4.805.258.150,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.358.416.500,00**								**4.805.258.150,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.358.416.500,00**								**4.805.258.150,00**	
41.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***3.559.829.000,00***								***3.915.811.900,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	3.559.829.000,00							100 %	3.915.811.900,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.559.829.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.915.811.900,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.559.829.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					16 Unit Kerja	3.915.811.900,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
42.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***467.587.500,00***								***514.346.250,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	467.587.500,00							100 %	514.346.250,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	90.046.500,00							4 Keluarga	35.140.000,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	69.800.000,00							2 Layanan	27.830.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	10 Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55 Unit	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Keluarga	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					2 Layanan	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	525.400.000,00							55410 Orang	555.834.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	182.945.000,00							25200 Orang	155.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkn Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	232.160.000,00							5734 Orang	238.776.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.900.000,00							1 Dokumen	149.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.143.100.000,00							1 Dokumen	58.151.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	524.650.000,00							1 Dokumen	527.955.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.300.000,00							1 Dokumen	74.932.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	119.700.000,00							1 Dokumen	131.572.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	89.600.000,00							14 Dokumen	96.732.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.800.000,00							1 Dokumen	78.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.356.500,00							1 Dokumen	1.965.372.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.200.000,00							1 Dokumen	80.282.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	428.262.000,00							14 Dokumen	430.368.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.250.000,00							1 Dokumen	123.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	56.800.000,00							14 Dokumen	66.172.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000,00							1 Dokumen	247.342.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	465.152.000,00							14 Dokumen	494.580.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	267.887.000,00							1 Dokumen	278.206.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.799.000,00							1 Dokumen	70.081.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	983.389.000,00							14 Dokumen	970.181.200,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	77.600.000,00							4 Unit	83.622.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	91.528.000,00							6810 Orang	89.920.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	370.440.000,00							6179 Orang	351.094.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.450.000,00							1 Laporan	173.357.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	113.600.000,00							500 Orang	119.412.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	130.700.000,00							7000 Orang	130.496.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	690.800.000,00							8289 Orang	715.260.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	96.250.000,00							490 Orang	95.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	755 Orang	254.200.000,00							750 Orang	270.960.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	220.600.000,00							5354 Orang	306.722.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	130.900.000,00							108873 Orang	201.632.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	142.600.000,00							50658 Orang	207.634.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	218.400.000,00							246811 Orang	260.620.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	115.800.000,00							294 Orang	122.552.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	76.100.000,00							14 Unit	76.940.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	94.750.000,00							4 Tatanan	101.437.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						7.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.700.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	15 Orang	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6179 Orang	7.700.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	10 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6810 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						3.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.300.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	30 Orang	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5734 Orang	3.300.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					25200 Orang	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						9.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			9.900.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	90 Orang	9.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55410 Orang	9.900.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	20 Orang	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					246811 Orang	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	20 Orang	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					50658 Orang	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						15.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			16.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	150 Orang	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					108873 Orang	16.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						35.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			38.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	800 Orang	35.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5354 Orang	38.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	20 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					750 Orang	22.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						65.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			71.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	45 Orang	65.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					8289 Orang	71.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						4.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			4.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	4 Orang	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					7000 Orang	4.400.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						6.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			6.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	6.600.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						75.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			82.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1400 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	82.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			4.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	40 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	4.400.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	750 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	55.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	20 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	500 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	55.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						3.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.300.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	3 Orang	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					294 Orang	3.300.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	20 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						3.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.300.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	30 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	3.300.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	10 Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Unit	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						108.587.500,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			119.446.250,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	1000 Dokumen	108.587.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	119.446.250,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	50 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Laporan	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.000.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	22.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						3.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.300.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	30 Unit	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Unit	3.300.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	100 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					500 Orang	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						4.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			4.400.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	40 Orang	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					490 Orang	4.400.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						3.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.300.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	30 Tatanan	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Tatanan	3.300.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						4.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			4.400.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	40 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	4.400.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						15.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			16.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	15 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	16.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	50 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						52.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			57.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	520 Dokumen	52.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	57.200.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	20 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	155.295.000,00							14 Dokumen	168.425.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						3.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.300.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	30 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	3.300.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	424.038.500,00							-	536.742.350,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	142.100.000,00							-	152.690.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	64.200.000,00							-	83.172.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	176.660.000,00							-	185.827.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	10 Paket	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						9.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			9.900.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	9 Orang	9.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	9.900.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						75.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			82.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	650 Laporan	75.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	82.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	20 Orang	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
43.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**899.158.000,00**								**889.037.000,00**	
		Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memadai, Berkualitas dan Merata						***3.000.000,00***								***3.300.000,00***	
			999.Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90 %		85 %	87 %	3.000.000,00							88 %	3.300.000,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	120 Orang	719.158.000,00							130 Orang	709.037.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.300.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	30 Orang	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					130 Orang	3.300.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
44.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**568.097.500,00**								**597.754.700,00**	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Aakan Hidup Bersih dan Sehat						***110.000.000,00***								***121.000.000,00***	
			999.Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	88 %		80 %	82 %	110.000.000,00							84 %	121.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						189.984.500,00						-		200.082.950,00	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						189.984.500,00						-		200.082.950,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	335 Dokumen		281 Dokumen	284 Dokumen	189.984.500,00							301 Dokumen	200.082.950,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						79.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			86.900.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	335 Dokumen		281 Dokumen	24 Dokumen	79.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					301 Dokumen	86.900.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	248.113.000,00							175 Dokumen	267.671.750,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						31.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			34.100.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	65 Dokumen	31.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					175 Dokumen	34.100.000,00	UPT PUSKESMAS BARANTI
		UPT PUSKESMAS BARUKKU						**4.104.854.500,00**								**4.520.289.950,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.104.854.500,00**								**4.520.289.950,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.104.854.500,00**								**4.520.289.950,00**	
45.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***3.300.000.000,00***								***3.630.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	3.300.000.000,00							100 %	3.630.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.300.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.630.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.300.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pendapatan dari BLUD					16 Unit Kerja	3.630.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
46.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***701.900.000,00***								***772.090.000,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	701.900.000,00							100 %	772.090.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	90.046.500,00							4 Keluarga	35.140.000,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	69.800.000,00							2 Layanan	27.830.000,00	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	1 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55 Unit	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	100 Keluarga	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Keluarga	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	4 Layanan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					2 Layanan	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	525.400.000,00							55410 Orang	555.834.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	182.945.000,00							25200 Orang	155.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	232.160.000,00							5734 Orang	238.776.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.900.000,00							1 Dokumen	149.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.143.100.000,00							1 Dokumen	58.151.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	524.650.000,00							1 Dokumen	527.955.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.300.000,00							1 Dokumen	74.932.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelainjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	119.700.000,00							1 Dokumen	131.572.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	89.600.000,00							14 Dokumen	96.732.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.800.000,00							1 Dokumen	78.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.356.500,00							1 Dokumen	1.965.372.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.200.000,00							1 Dokumen	80.282.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	428.262.000,00							14 Dokumen	430.368.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.250.000,00							1 Dokumen	123.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	56.800.000,00							14 Dokumen	66.172.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000,00							1 Dokumen	247.342.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	465.152.000,00							14 Dokumen	494.580.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	267.887.000,00							1 Dokumen	278.206.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.799.000,00							1 Dokumen	70.081.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	983.389.000,00							14 Dokumen	970.181.200,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	77.600.000,00							4 Unit	83.622.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	91.528.000,00							6810 Orang	89.920.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	370.440.000,00							6179 Orang	351.094.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.450.000,00							1 Laporan	173.357.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	113.600.000,00							500 Orang	119.412.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	6121 Orang	216.600.000,00							6243 Orang	230.040.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	130.700.000,00							7000 Orang	130.496.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	690.800.000,00							8289 Orang	715.260.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	96.250.000,00							490 Orang	95.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	755 Orang	254.200.000,00							750 Orang	270.960.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	220.600.000,00							5354 Orang	306.722.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	130.900.000,00							108873 Orang	201.632.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	142.600.000,00							50658 Orang	207.634.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	218.400.000,00							246811 Orang	260.620.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	115.800.000,00							294 Orang	122.552.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	76.100.000,00							14 Unit	76.940.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	94.750.000,00							4 Tatanan	101.437.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						35.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			38.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	342 Orang	35.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6179 Orang	38.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	342 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6810 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	345 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5734 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	1220 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					25200 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			55.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	2749 Orang	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55410 Orang	55.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	1532 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					246811 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	15673 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					50658 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	15673 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					108873 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	15673 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5354 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						30.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			33.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	45 Orang	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					750 Orang	33.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	425 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					8289 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	20 Orang	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					7000 Orang	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	15673 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						186.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			204.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	186.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	204.600.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						40.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			44.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	44.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	22.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	45 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					294 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	1 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Unit	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						120.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			132.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	132.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Laporan	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	1 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Unit	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						40.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			44.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	425 Orang	40.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6243 Orang	44.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	15 Orang	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					500 Orang	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	5 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					490 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	1 Tatanan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Tatanan	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	22.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						60.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			66.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	66.000.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	155.295.000,00							14 Dokumen	168.425.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						300.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			330.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	330.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	590.650.000,00							-	692.525.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	424.038.500,00							-	536.742.350,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	142.100.000,00							-	152.690.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	64.200.000,00							-	83.172.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	176.660.000,00							-	185.827.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	100.950.000,00							-	113.286.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	1 Paket	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						6.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.150.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	12 Laporan	6.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	7.150.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						8.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			8.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	45 Orang	8.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	8.800.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						125.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			138.050.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	125.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	138.050.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			660.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	660.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	45 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
47.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**899.158.000,00**								**889.037.000,00**	
		Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memadai, Berkualitas dan Merata						***500.000,00***								***550.000,00***	
			999.Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90 %		85 %	87 %	500.000,00							88 %	550.000,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	120 Orang	719.158.000,00							130 Orang	709.037.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	12 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					130 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
48.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**568.097.500,00**								**597.754.700,00**	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Aakan Hidup Bersih dan Sehat						***5.954.500,00***								***6.549.950,00***	
			999.Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	88 %		80 %	82 %	5.954.500,00							84 %	6.549.950,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						189.984.500,00						-		200.082.950,00	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						189.984.500,00						-		200.082.950,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	335 Dokumen		281 Dokumen	284 Dokumen	189.984.500,00							301 Dokumen	200.082.950,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						5.354.500,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.889.950,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	335 Dokumen		281 Dokumen	12 Dokumen	5.354.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					301 Dokumen	5.889.950,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	248.113.000,00							175 Dokumen	267.671.750,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			660.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					175 Dokumen	660.000,00	UPT PUSKESMAS BARUKKU
		UPT PUSKESMAS DONGI						**3.482.632.000,00**								**3.885.200.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.482.632.000,00**								**3.885.200.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.482.632.000,00**								**3.885.200.000,00**	
49.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***2.938.000.000,00***								***3.300.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	2.938.000.000,00							100 %	3.300.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.938.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.300.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	2.938.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi II 1	Pendapatan dari BLUD					16 Unit Kerja	3.300.000.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
50.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***427.770.000,00***								***461.051.800,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	427.770.000,00							100 %	461.051.800,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	90.046.500,00							4 Keluarga	35.140.000,00	
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						1.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			660.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	1.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				4 Keluarga	660.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	525.400.000,00							55410 Orang	555.834.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	182.945.000,00							25200 Orang	155.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	232.160.000,00							5734 Orang	238.776.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.900.000,00							1 Dokumen	149.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.143.100.000,00							1 Dokumen	58.151.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	524.650.000,00							1 Dokumen	527.955.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.300.000,00							1 Dokumen	74.932.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	119.700.000,00							1 Dokumen	131.572.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	89.600.000,00							14 Dokumen	96.732.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.800.000,00							1 Dokumen	78.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.356.500,00							1 Dokumen	1.965.372.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.200.000,00							1 Dokumen	80.282.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	428.262.000,00							14 Dokumen	430.368.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.250.000,00							1 Dokumen	123.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	56.800.000,00							14 Dokumen	66.172.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000,00							1 Dokumen	247.342.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	465.152.000,00							14 Dokumen	494.580.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	267.887.000,00							1 Dokumen	278.206.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.799.000,00							1 Dokumen	70.081.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	983.389.000,00							14 Dokumen	970.181.200,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	77.600.000,00							4 Unit	83.622.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	91.528.000,00							6810 Orang	89.920.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	370.440.000,00							6179 Orang	351.094.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.450.000,00							1 Laporan	173.357.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	113.600.000,00							500 Orang	119.412.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	6121 Orang	216.600.000,00							6243 Orang	230.040.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	130.700.000,00							7000 Orang	130.496.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	690.800.000,00							8289 Orang	715.260.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	96.250.000,00							490 Orang	95.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	755 Orang	254.200.000,00							750 Orang	270.960.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	220.600.000,00							5354 Orang	306.722.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	130.900.000,00							108873 Orang	201.632.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	142.600.000,00							50658 Orang	207.634.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	218.400.000,00							246811 Orang	260.620.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	115.800.000,00							294 Orang	122.552.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	76.100.000,00							14 Unit	76.940.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	94.750.000,00							4 Tatanan	101.437.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						21.140.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			23.254.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	5958 Orang	21.140.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				6179 Orang	23.254.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6700 Orang	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				6810 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						12.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			13.200.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5414 Orang	12.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5734 Orang	13.200.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						12.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			13.640.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25100 Orang	12.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					25200 Orang	13.640.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						16.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			18.150.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55100 Orang	16.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55410 Orang	18.150.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	223865 Orang	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					246811 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	45948 Orang	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					50658 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	98751 Orang	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					108873 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	4856 Orang	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5354 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	760 Orang	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					750 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						22.900.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			25.190.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7518 Orang	22.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					8289 Orang	25.190.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						3.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.850.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7400 Orang	3.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					7000 Orang	3.850.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.320.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	1.320.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						12.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			13.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	13.200.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						106.544.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			117.198.400,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	106.544.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	117.198.400,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.320.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.320.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						7.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.700.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	255 Orang	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					294 Orang	7.700.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	550.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Unit	550.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						112.018.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			118.124.600,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	112.018.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	118.124.600,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Laporan	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	550.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Unit	550.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	5999 Orang	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6243 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	400 Orang	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					500 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	450 Orang	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					490 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						1.100.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			110.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	1.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Tatanan	110.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			440.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	440.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						3.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.850.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	3.850.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						59.300.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			65.230.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	65.230.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	155.295.000,00							14 Dokumen	168.425.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						31.668.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			34.834.800,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	31.668.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	34.834.800,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	-		-	-	5.000.000,00							-	5.500.000,00	
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	-		-	55 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	64.200.000,00							-	83.172.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	176.660.000,00							-	185.827.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	100.950.000,00							-	113.286.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	14 Paket	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	14 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						3.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.850.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	1600 Orang	3.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Otting || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Bulucenrana || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Betao Riase || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1 || Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	3.850.000,00	UPT PUSKESMAS DONGI
51.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**899.158.000,00**								**889.037.000,00**	
		Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memadai, Berkualitas dan Merata						***30.662.000,00***								***33.728.200,00***	
			999.Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90 %		85 %	87 %	30.662.000,00							88 %	33.728.200,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	120 Orang	719.158.000,00							130 Orang	709.037.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30.662.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			33.728.200,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	1 Orang	30.662.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Kalempang II 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					130 Orang	33.728.200,00	UPT PUSKESMAS DONGI
		UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG						**6.176.845.500,00**								**6.794.530.050,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.176.845.500,00**								**6.794.530.050,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**6.176.845.500,00**								**6.794.530.050,00**	
52.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***5.549.919.000,00***								***6.104.910.900,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	5.549.919.000,00							100 %	6.104.910.900,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						5.549.919.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			6.104.910.900,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	5.549.919.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pendapatan dari BLUD					16 Unit Kerja	6.104.910.900,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
53.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***476.844.000,00***								***524.528.400,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	476.844.000,00							100 %	524.528.400,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	90.046.500,00							4 Keluarga	35.140.000,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	69.800.000,00							2 Layanan	27.830.000,00	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55 Unit	550.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Keluarga	550.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					2 Layanan	550.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	525.400.000,00							55410 Orang	555.834.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	182.945.000,00							25200 Orang	155.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	232.160.000,00							5734 Orang	238.776.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.900.000,00							1 Dokumen	149.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.143.100.000,00							1 Dokumen	58.151.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	524.650.000,00							1 Dokumen	527.955.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.300.000,00							1 Dokumen	74.932.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	119.700.000,00							1 Dokumen	131.572.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	89.600.000,00							14 Dokumen	96.732.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.800.000,00							1 Dokumen	78.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.356.500,00							1 Dokumen	1.965.372.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.200.000,00							1 Dokumen	80.282.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	428.262.000,00							14 Dokumen	430.368.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.250.000,00							1 Dokumen	123.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	56.800.000,00							14 Dokumen	66.172.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000,00							1 Dokumen	247.342.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	465.152.000,00							14 Dokumen	494.580.200,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	267.887.000,00							1 Dokumen	278.206.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.799.000,00							1 Dokumen	70.081.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	983.389.000,00							14 Dokumen	970.181.200,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	77.600.000,00							4 Unit	83.622.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	91.528.000,00							6810 Orang	89.920.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	370.440.000,00							6179 Orang	351.094.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.450.000,00							1 Laporan	173.357.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	113.600.000,00							500 Orang	119.412.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	6121 Orang	216.600.000,00							6243 Orang	230.040.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	130.700.000,00							7000 Orang	130.496.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	690.800.000,00							8289 Orang	715.260.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	96.250.000,00							490 Orang	95.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	755 Orang	254.200.000,00							750 Orang	270.960.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	220.600.000,00							5354 Orang	306.722.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	130.900.000,00							108873 Orang	201.632.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	142.600.000,00							50658 Orang	207.634.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	218.400.000,00							246811 Orang	260.620.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	115.800.000,00							294 Orang	122.552.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	76.100.000,00							14 Unit	76.940.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	94.750.000,00							4 Tatanan	101.437.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						15.080.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			16.588.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6011 Orang	15.080.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6179 Orang	16.588.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6750 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6810 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5600 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5734 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25100 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					25200 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						34.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			37.400.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55100 Orang	34.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55410 Orang	37.400.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	223865 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					246811 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						5.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			6.050.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	45948 Orang	5.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					50658 Orang	6.050.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						2.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	98751 Orang	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					108873 Orang	2.750.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	4856 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5354 Orang	550.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						8.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			8.800.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	760 Orang	8.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					750 Orang	8.800.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						20.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.440.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7518 Orang	20.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					8289 Orang	22.440.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						6.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			6.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7400 Orang	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					7000 Orang	6.600.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						2.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	2.750.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						70.240.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			77.264.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.240.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	77.264.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						6.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			6.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	6.600.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						6.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			6.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	6.600.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						22.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			24.640.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	22.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	24.640.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						12.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			13.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	255 Orang	12.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					294 Orang	13.200.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						80.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			88.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	88.000.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						2.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.750.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Unit	2.750.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						120.524.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			132.576.400,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	120.524.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	132.576.400,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						2.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.750.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Laporan	2.750.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			550.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Unit	550.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	5999 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6243 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						4.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			4.400.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	400 Orang	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					500 Orang	4.400.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.320.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	450 Orang	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					490 Orang	1.320.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Tatanan	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						2.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.750.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	2.750.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						6.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			6.600.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	6.600.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						25.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			27.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	27.500.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik						1.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.320.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.320.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						2.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	2.750.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	155.295.000,00							14 Dokumen	168.425.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksanaya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	590.650.000,00							-	692.525.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	424.038.500,00							-	536.742.350,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	142.100.000,00							-	152.690.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	64.200.000,00							-	83.172.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	176.660.000,00							-	185.827.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	100.950.000,00							-	113.286.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	14 Paket	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						12.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			13.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	14 Laporan	12.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	13.200.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						34.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			37.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	14 Orang	34.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	37.400.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						25.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			27.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	27.500.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						30.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			33.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	33.000.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	1600 Orang	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
54.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**899.158.000,00**								**889.037.000,00**	
		Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memadai, Berkualitas dan Merata						***1.000.000,00***								***1.100.000,00***	
			999.Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90 %		85 %	87 %	1.000.000,00							88 %	1.100.000,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	120 Orang	719.158.000,00							130 Orang	709.037.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	14 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					130 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
55.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**568.097.500,00**								**597.754.700,00**	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Aakan Hidup Bersih dan Sehat						***23.882.500,00***								***26.270.750,00***	
			999.Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	88 %		80 %	82 %	23.882.500,00							84 %	26.270.750,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	248.113.000,00							175 Dokumen	267.671.750,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						23.882.500,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			26.270.750,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	14 Dokumen	23.882.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					175 Dokumen	26.270.750,00	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG
		UPT PUSKESMAS EMPAGAE						**4.467.249.500,00**								**4.581.470.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.467.249.500,00**								**4.581.470.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.467.249.500,00**								**4.581.470.000,00**	
56.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***3.812.449.000,00***								***3.390.970.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	3.812.449.000,00							100 %	3.390.970.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.812.449.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.390.970.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.812.449.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16 Unit Kerja	3.390.970.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
57.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***531.000.500,00***								***755.800.000,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	531.000.500,00							100 %	755.800.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	90.046.500,00							4 Keluarga	35.140.000,00	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55 Unit	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			6.100.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	50 Keluarga	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Keluarga	6.100.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	525.400.000,00							55410 Orang	555.834.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	182.945.000,00							25200 Orang	155.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	232.160.000,00							5734 Orang	238.776.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.900.000,00							1 Dokumen	149.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.143.100.000,00							1 Dokumen	58.151.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	524.650.000,00							1 Dokumen	527.955.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelaniutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	119.700.000,00							1 Dokumen	131.572.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	89.600.000,00							14 Dokumen	96.732.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.800.000,00							1 Dokumen	78.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.356.500,00							1 Dokumen	1.965.372.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.200.000,00							1 Dokumen	80.282.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	428.262.000,00							14 Dokumen	430.368.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.250.000,00							1 Dokumen	123.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	56.800.000,00							14 Dokumen	66.172.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000,00							1 Dokumen	247.342.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	465.152.000,00							14 Dokumen	494.580.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	267.887.000,00							1 Dokumen	278.206.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	983.389.000,00							14 Dokumen	970.181.200,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	77.600.000,00							4 Unit	83.622.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	91.528.000,00							6810 Orang	89.920.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	370.440.000,00							6179 Orang	351.094.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.450.000,00							1 Laporan	173.357.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	113.600.000,00							500 Orang	119.412.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	6121 Orang	216.600.000,00							6243 Orang	230.040.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	130.700.000,00							7000 Orang	130.496.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	690.800.000,00							8289 Orang	715.260.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	96.250.000,00							490 Orang	95.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	755 Orang	254.200.000,00							750 Orang	270.960.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	220.600.000,00							5354 Orang	306.722.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	130.900.000,00							108873 Orang	201.632.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	142.600.000,00							50658 Orang	207.634.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	218.400.000,00							246811 Orang	260.620.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	115.800.000,00							294 Orang	122.552.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	94.750.000,00							4 Tatanan	101.437.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						5.700.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.800.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6011 Orang	5.700.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6179 Orang	7.800.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						5.700.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.200.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6750 Orang	5.700.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6810 Orang	10.200.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						5.700.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.200.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5600 Orang	5.700.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5734 Orang	10.200.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						5.700.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.800.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25100 Orang	5.700.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					25200 Orang	7.800.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						24.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			29.400.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55100 Orang	24.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55410 Orang	29.400.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						18.900.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			91.500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	223865 Orang	18.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					246811 Orang	91.500.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						18.900.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			91.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	45948 Orang	18.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					50658 Orang	91.500.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						18.900.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			91.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	98751` Orang	18.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					108873 Orang	91.500.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						18.900.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			91.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	4856 Orang	18.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5354 Orang	91.500.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	49 Orang	9.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					750 Orang	11.600.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						21.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			33.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7518 Orang	21.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					8289 Orang	33.800.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						5.300.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	112 Orang	5.300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					7000 Orang	5.800.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	7.800.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	7.800.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						185.836.500,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			224.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	185.836.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	224.000.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	11.600.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			6.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	6.800.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.800.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	7.800.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						26.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			29.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	26.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	29.400.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						9.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	255 Orang	9.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					294 Orang	11.600.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						2.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.600.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	1 Unit	2.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Unit	2.600.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						115.477.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			32.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	115.477.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	32.000.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			4.500.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Laporan	4.500.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.900.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	3.900.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						6.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.800.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	5999 Orang	6.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6243 Orang	7.800.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						4.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.800.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	400 Orang	4.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					500 Orang	7.800.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						4.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.800.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	450 Orang	4.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					490 Orang	7.800.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.500.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Tatanan	10.500.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.800.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	7.800.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						2.087.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.800.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.087.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	7.800.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.800.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	7.800.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						36.700.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			40.300.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.700.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	40.300.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						1.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.500.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	155.295.000,00							14 Dokumen	168.425.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						14.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			19.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	19.000.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	590.650.000,00							-	692.525.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	424.038.500,00							-	536.742.350,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	142.100.000,00							-	152.690.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	64.200.000,00							-	83.172.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	176.660.000,00							-	185.827.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	100.950.000,00							-	113.286.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.800.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	10 Paket	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	7.800.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	11.600.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						8.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			13.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	15 Orang	8.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	13.200.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						18.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			75.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	18.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	75.500.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						15.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			99.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	15.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	99.000.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.200.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	1600 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	20.200.000,00	UPT PUSKESMAS EMPAGAE
		UPT PUSKESMAS RAPPANG						**5.067.224.000,00**								**5.573.946.400,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.067.224.000,00**								**5.573.946.400,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.067.224.000,00**								**5.573.946.400,00**	
58.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***4.442.101.000,00***								***4.886.311.100,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	4.442.101.000,00							100 %	4.886.311.100,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						4.442.101.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			4.886.311.100,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	4.442.101.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pendapatan dari BLUD					16 Unit Kerja	4.886.311.100,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
59.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.946.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***565.193.000,00***								***621.712.300,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	565.193.000,00							100 %	621.712.300,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	90.046.500,00							4 Keluarga	35.140.000,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	69.800.000,00							2 Layanan	27.830.000,00	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55 Unit	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Keluarga	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					2 Layanan	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	525.400.000,00							55410 Orang	555.834.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	182.945.000,00							25200 Orang	155.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	232.160.000,00							5734 Orang	238.776.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.900.000,00							1 Dokumen	149.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.143.100.000,00							1 Dokumen	58.151.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	524.650.000,00							1 Dokumen	527.955.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.300.000,00							1 Dokumen	74.932.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	119.700.000,00							1 Dokumen	131.572.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	89.600.000,00							14 Dokumen	96.732.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.800.000,00							1 Dokumen	78.912.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.356.500,00							1 Dokumen	1.965.372.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.200.000,00							1 Dokumen	80.282.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	428.262.000,00							14 Dokumen	430.368.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.250.000,00							1 Dokumen	123.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	56.800.000,00							14 Dokumen	66.172.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000,00							1 Dokumen	247.342.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	465.152.000,00							14 Dokumen	494.580.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	267.887.000,00							1 Dokumen	278.206.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.799.000,00							1 Dokumen	70.081.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	983.389.000,00							14 Dokumen	970.181.200,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	77.600.000,00							4 Unit	83.622.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	91.528.000,00							6810 Orang	89.920.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	370.440.000,00							6179 Orang	351.094.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.450.000,00							1 Laporan	173.357.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	113.600.000,00							500 Orang	119.412.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	6121 Orang	216.600.000,00							6243 Orang	230.040.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	130.700.000,00							7000 Orang	130.496.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	690.800.000,00							8289 Orang	715.260.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	96.250.000,00							490 Orang	95.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	755 Orang	254.200.000,00							750 Orang	270.960.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	220.600.000,00							5354 Orang	306.722.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	130.900.000,00							108873 Orang	201.632.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	142.600.000,00							50658 Orang	207.634.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	218.400.000,00							246811 Orang	260.620.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	115.800.000,00							294 Orang	122.552.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	76.100.000,00							14 Unit	76.940.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	94.750.000,00							4 Tatanan	101.437.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						28.360.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			31.196.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6011 Orang	28.360.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6179 Orang	31.196.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6750 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6810 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5600 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5734 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25100 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					25200 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						9.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.560.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55100 Orang	9.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55410 Orang	10.560.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	223865 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					246811 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	45948 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					50658 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	98751 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					108873 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	4856 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5354 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						8.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			9.680.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	760 Orang	8.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					750 Orang	9.680.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						9.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.120.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7518 Orang	9.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					8289 Orang	10.120.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7400 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					7000 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						151.294.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			166.423.400,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	151.294.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	166.423.400,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						18.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			19.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	19.800.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	-					1 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						37.232.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			40.955.200,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	37.232.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	40.955.200,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	255 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					294 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Unit	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						143.107.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			157.417.700,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	1 Dokumen	143.107.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	157.417.700,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Laporan	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Unit	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	5999 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6243 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	400 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					500 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	450 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					490 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Tatanan	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			440.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	440.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						45.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.160.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	50.160.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	155.295.000,00							14 Dokumen	168.425.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	590.650.000,00							-	692.525.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	424.038.500,00							-	536.742.350,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	64.200.000,00							-	83.172.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	176.660.000,00							-	185.827.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	14 Paket	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						34.600.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			38.060.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	34.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	38.060.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						76.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			83.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	1 Laporan	76.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	83.600.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	1600 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
60.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**899.158.000,00**								**889.037.000,00**	
		Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memadai, Berkualitas dan Merata						***5.000.000,00***								***5.500.000,00***	
			999.Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90 %		85 %	87 %	5.000.000,00							88 %	5.500.000,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	120 Orang	719.158.000,00							130 Orang	709.037.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	0 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					130 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
61.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**568.097.500,00**								**597.754.700,00**	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Aakan Hidup Bersih dan Sehat						***22.930.000,00***								***25.223.000,00***	
			999.Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	88 %		80 %	82 %	22.930.000,00							84 %	25.223.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						189.984.500,00						-		200.082.950,00	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						189.984.500,00						-		200.082.950,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	335 Dokumen		281 Dokumen	284 Dokumen	189.984.500,00							301 Dokumen	200.082.950,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						10.130.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.143.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	335 Dokumen		281 Dokumen	0 Dokumen	10.130.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					301 Dokumen	11.143.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	248.113.000,00							175 Dokumen	267.671.750,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						12.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			14.080.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	0 Dokumen	12.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					175 Dokumen	14.080.000,00	UPT PUSKESMAS RAPPANG
		UPT PUSKESMAS AMPARITA						**5.144.158.000,00**								**5.657.673.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.144.158.000,00**								**5.657.673.800,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.144.158.000,00**								**5.657.673.800,00**	
62.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***4.409.996.000,00***								***4.850.995.600,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	4.409.996.000,00							100 %	4.850.995.600,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						4.409.996.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			4.850.995.600,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.409.996.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16 Unit Kerja	4.850.995.600,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
63.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***422.662.000,00***								***464.928.200,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	422.662.000,00							100 %	464.928.200,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	90.046.500,00							4 Keluarga	35.140.000,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	69.800.000,00							2 Layanan	27.830.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	12 Bulan Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55 Unit	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	26819 Keluarga	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Keluarga	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	24 Layanan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					2 Layanan	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	525.400.000,00							55410 Orang	555.834.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	182.945.000,00							25200 Orang	155.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	232.160.000,00							5734 Orang	238.776.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.900.000,00							1 Dokumen	149.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.143.100.000,00							1 Dokumen	58.151.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	524.650.000,00							1 Dokumen	527.955.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.300.000,00							1 Dokumen	74.932.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	119.700.000,00							1 Dokumen	131.572.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	89.600.000,00							14 Dokumen	96.732.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.800.000,00							1 Dokumen	78.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.356.500,00							1 Dokumen	1.965.372.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.200.000,00							1 Dokumen	80.282.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	428.262.000,00							14 Dokumen	430.368.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.250.000,00							1 Dokumen	123.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	56.800.000,00							14 Dokumen	66.172.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000,00							1 Dokumen	247.342.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	465.152.000,00							14 Dokumen	494.580.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	267.887.000,00							1 Dokumen	278.206.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.799.000,00							1 Dokumen	70.081.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	983.389.000,00							14 Dokumen	970.181.200,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	77.600.000,00							4 Unit	83.622.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	91.528.000,00							6810 Orang	89.920.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	370.440.000,00							6179 Orang	351.094.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.450.000,00							1 Laporan	173.357.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	113.600.000,00							500 Orang	119.412.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	6121 Orang	216.600.000,00							6243 Orang	230.040.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	130.700.000,00							7000 Orang	130.496.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	690.800.000,00							8289 Orang	715.260.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	96.250.000,00							490 Orang	95.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	755 Orang	254.200.000,00							750 Orang	270.960.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	220.600.000,00							5354 Orang	306.722.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	130.900.000,00							108873 Orang	201.632.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	142.600.000,00							50658 Orang	207.634.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	218.400.000,00							246811 Orang	260.620.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	115.800.000,00							294 Orang	122.552.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	76.100.000,00							14 Unit	76.940.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	94.750.000,00							4 Tatanan	101.437.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						13.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			14.300.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	456 Orang	13.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6179 Orang	14.300.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	451 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6810 Orang	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						3.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.300.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	426 Orang	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5734 Orang	3.300.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						13.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			14.300.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	1248 Orang	13.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					25200 Orang	14.300.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						25.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			27.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	3656 Orang	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55410 Orang	27.500.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	17145 Orang	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					246811 Orang	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	3518 Orang	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					50658 Orang	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						15.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			16.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	7563 Orang	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					108873 Orang	16.500.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						90.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			99.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	373 Orang	90.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5354 Orang	99.000.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						25.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			27.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	62 Orang	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					750 Orang	27.500.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						28.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			31.240.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	572 Orang	28.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					8289 Orang	31.240.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						1.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.540.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	491 Orang	1.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					7000 Orang	1.540.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	55.000.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						18.362.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.198.200,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	18.362.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	20.198.200,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	22.000.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						30.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			33.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	33.000.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	68 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					294 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						25.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			27.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	27.500.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Unit	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						44.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			48.400.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	44.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Laporan	48.400.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						50.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			55.000.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	55.000.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Unit	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						35.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			38.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	572 Orang	35.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6243 Orang	38.500.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	491 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					500 Orang	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	5 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					490 Orang	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	1 Tatanan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Tatanan	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						3.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.300.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	3.300.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	22.000.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	11.000.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	22.000.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik						1.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.100.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	155.295.000,00							14 Dokumen	168.425.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	590.650.000,00							-	692.525.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	424.038.500,00							-	536.742.350,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	142.100.000,00							-	152.690.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	64.200.000,00							-	83.172.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	176.660.000,00							-	185.827.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	100.950.000,00							-	113.286.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						7.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.700.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	7.700.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						12.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			13.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	62 Orang	12.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	13.200.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						12.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			13.750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	12.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	13.750.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						12.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			13.750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	12.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	13.750.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						5.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.500.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	68 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	5.500.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
64.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**899.158.000,00**								**889.037.000,00**	
		Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memadai, Berkualitas dan Merata						***2.000.000,00***								***2.200.000,00***	
			999.Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90 %		85 %	87 %	2.000.000,00							88 %	2.200.000,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	120 Orang	719.158.000,00							130 Orang	709.037.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.200.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	14 Orang	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					130 Orang	2.200.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
65.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**568.097.500,00**								**597.754.700,00**	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Aakan Hidup Bersih dan Sehat						***75.000.000,00***								***81.600.000,00***	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			999.Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	88 %		80 %	82 %	75.000.000,00							84 %	81.600.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						189.984.500,00						-		200.082.950,00	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						189.984.500,00						-		200.082.950,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	335 Dokumen		281 Dokumen	284 Dokumen	189.984.500,00							301 Dokumen	200.082.950,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						10.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.100.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	335 Dokumen		281 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					301 Dokumen	10.100.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	248.113.000,00							175 Dokumen	267.671.750,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						65.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			71.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	12 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					175 Dokumen	71.500.000,00	UPT PUSKESMAS AMPARITA
		UPT PUSKESMAS BELAWAE						**2.371.413.277,00**								**2.608.554.055,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.371.413.277,00**								**2.608.554.055,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.371.413.277,00**								**2.608.554.055,00**	
66.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**307.447.168.977,00**								**315.197.863.155,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***1.855.284.777,00***								***2.040.813.255,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	1.855.284.777,00							100 %	2.040.813.255,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						175.720.523.777,00						-		183.471.218.055,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	16 Unit Kerja	175.720.523.777,00							16 Unit Kerja	183.471.218.055,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.855.284.777,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.040.813.255,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	16 Unit Kerja		16 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.855.284.777,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pendapatan dari BLUD					16 Unit Kerja	2.040.813.255,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
67.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**92.015.948.500,00**								**97.703.543.750,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Mudah Diakses Masyarakat						***290.270.000,00***								***319.297.000,00***	
			999.Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	290.270.000,00							100 %	319.297.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
		Pembangunan Puskesmas						21.970.406.500,00						-		25.824.506.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	55 Unit	665.560.000,00							55 Unit	1.066.036.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	4 Keluarga	90.046.500,00							4 Keluarga	35.140.000,00	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	69.800.000,00							2 Layanan	27.830.000,00	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	55 Unit		55 Unit	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55 Unit	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4 Keluarga		4 Keluarga	1050 Keluarga	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Keluarga	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	2 Layanan		2 Layanan	8 Layanan	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					2 Layanan	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	55200 Orang	525.400.000,00							55410 Orang	555.834.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	25150 Orang	182.945.000,00							25200 Orang	155.940.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	5673 Orang	232.160.000,00							5734 Orang	238.776.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.900.000,00							1 Dokumen	149.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.143.100.000,00							1 Dokumen	58.151.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	524.650.000,00							1 Dokumen	527.955.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	73.300.000,00							1 Dokumen	74.932.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	119.700.000,00							1 Dokumen	131.572.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	89.600.000,00							14 Dokumen	96.732.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.800.000,00							1 Dokumen	78.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.830.356.500,00							1 Dokumen	1.965.372.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.200.000,00							1 Dokumen	80.282.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	428.262.000,00							14 Dokumen	430.368.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.250.000,00							1 Dokumen	123.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	56.800.000,00							14 Dokumen	66.172.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	239.580.000,00							1 Dokumen	247.342.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	465.152.000,00							14 Dokumen	494.580.200,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	267.887.000,00							1 Dokumen	278.206.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71.799.000,00							1 Dokumen	70.081.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	983.389.000,00							14 Dokumen	970.181.200,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	502.100.000,00							1 Dokumen	501.650.000,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	4 Unit	77.600.000,00							4 Unit	83.622.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	6780 Orang	91.528.000,00							6810 Orang	89.920.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	6122 Orang	370.440.000,00							6179 Orang	351.094.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	158.450.000,00							1 Laporan	173.357.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	450 Orang	113.600.000,00							500 Orang	119.412.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	6121 Orang	216.600.000,00							6243 Orang	230.040.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	7200 Orang	130.700.000,00							7000 Orang	130.496.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	7894 Orang	690.800.000,00							8289 Orang	715.260.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	470 Orang	96.250.000,00							490 Orang	95.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	755 Orang	254.200.000,00							750 Orang	270.960.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	5099 Orang	220.600.000,00							5354 Orang	306.722.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	103689 Orang	130.900.000,00							108873 Orang	201.632.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	48245 Orang	142.600.000,00							50658 Orang	207.634.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	235059 Orang	218.400.000,00							246811 Orang	260.620.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	273 Orang	115.800.000,00							294 Orang	122.552.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	14 Unit	76.100.000,00							14 Unit	76.940.000,00	
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	4 Tatanan	94.750.000,00							4 Tatanan	101.437.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6293 Orang		6011 Orang	72 Orang	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6179 Orang	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6870 Orang		6750 Orang	72 Orang	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6810 Orang	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5856 Orang		5600 Orang	72 Orang	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5734 Orang	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						28.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			31.680.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25300 Orang		25100 Orang	270 Orang	28.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					25200 Orang	31.680.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						10.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.550.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55830 Orang		55100 Orang	596 Orang	10.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					55410 Orang	11.550.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						72.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			79.200.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	272110 Orang		223865 Orang	3097 Orang	72.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					246811 Orang	79.200.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						10.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.880.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55850 Orang		45948 Orang	623 Orang	10.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					50658 Orang	11.880.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120033 Orang		98751 Orang	40 Orang	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					108873 Orang	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5903 Orang		4856 Orang	48 Orang	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					5354 Orang	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						10.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.880.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	740 Orang		760 Orang	13 Orang	10.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					750 Orang	11.880.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						10.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.880.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9138 Orang		7518 Orang	97 Orang	10.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					8289 Orang	11.880.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.700.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.770.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6600 Orang		7400 Orang	72 Orang	10.700.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					7000 Orang	11.770.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						10.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.880.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	11.880.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						10.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.880.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	11.880.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						43.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			47.520.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	43.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	47.520.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						10.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.880.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	11.880.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						12.900.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			14.190.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	12.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	14.190.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						5.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.940.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	5.940.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						1.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.980.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	1.980.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						13.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			14.520.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	336 Orang		255 Orang	596 Orang	13.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					294 Orang	14.520.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0030	Penyedisaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	4 Unit		4 Unit	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Unit	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						24.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			26.400.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	26.400.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						4.950.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.445.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	4.950.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Laporan	5.445.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						5.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.940.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	5.940.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	14 Unit		14 Unit	1 Unit	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Unit	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						9.900.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.890.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6487 Orang		5999 Orang	5 Orang	9.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					6243 Orang	10.890.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						9.900.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.890.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	600 Orang		400 Orang	1 Orang	9.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					500 Orang	10.890.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						4.950.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.445.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	530 Orang		450 Orang	0 Orang	4.950.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					490 Orang	5.445.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						4.950.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.445.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan		4 Tatanan	3 Tatanan	4.950.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					4 Tatanan	5.445.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						4.950.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.445.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	5.445.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						9.900.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.890.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	10.890.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						9.900.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.890.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	9.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	10.890.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						13.200.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			14.520.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	14.520.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik						3.300.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.630.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	3.300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	3.630.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						1.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.650.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	1.650.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						155.295.000,00						-		168.425.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	155.295.000,00							14 Dokumen	168.425.800,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						13.320.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			14.652.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	13.320.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					14 Dokumen	14.652.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						69.710.247.000,00						-		71.530.611.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	590.650.000,00							-	692.525.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	424.038.500,00							-	536.742.350,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	142.100.000,00							-	152.690.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	-	64.200.000,00							-	83.172.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	176.660.000,00							-	185.827.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	100.950.000,00							-	113.286.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						14.850.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			16.335.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	10 Paket	14.850.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	16.335.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						10.800.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			11.880.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	12 Laporan	10.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	11.880.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						9.900.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.890.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	13 Orang	9.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	10.890.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						750.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			825.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	750.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	825.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						750.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			825.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	750.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	825.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						8.400.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			9.240.000,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	-		-	596 Orang	8.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					-	9.240.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
68.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**899.158.000,00**								**889.037.000,00**	
		Tersedianya Tenaga Kesehatan yang Memadai, Berkualitas dan Merata						***66.158.000,00***								***72.773.800,00***	
			999.Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	90 %		85 %	87 %	66.158.000,00							88 %	72.773.800,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Tingkat Kabupaten/Kota						719.158.000,00						-		709.037.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	120 Orang	719.158.000,00							130 Orang	709.037.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						66.158.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			72.773.800,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang		110 Orang	55 Orang	66.158.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					130 Orang	72.773.800,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
69.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**568.097.500,00**								**597.754.700,00**	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Aakan Hidup Bersih dan Sehat						***1.600.500,00***								***1.760.000,00***	
			999.Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	88 %		80 %	82 %	1.600.500,00							84 %	1.760.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						248.113.000,00						-		267.671.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	248.113.000,00							175 Dokumen	267.671.750,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						1.600.500,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.760.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	185 Dokumen		170 Dokumen	12 Dokumen	1.600.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					175 Dokumen	1.760.000,00	UPT PUSKESMAS BELAWAE
		DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR						**9.714.337.194,00**								**15.834.729.425,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.714.337.194,00**								**15.834.729.425,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**9.714.337.194,00**								**15.834.729.425,00**	
70.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.006.337.000,00**								**9.440.721.425,00**	
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien						***7.973.337.000,00***								***9.352.721.425,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	7.973.337.000,00							100 %	9.352.721.425,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.000.000,00						Aparatur pengelola perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja pada internal Perangkat Daerah		35.000.000,00	
		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah						35.000.000,00						Aparatur pengelola perencanaan, keuangan, dan evaluasi kinerja pada internal Perangkat Daerah		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00							1 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00							2 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00							1 Dokumen	4.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00							1 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00							1 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00							1 Laporan	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00							1 Laporan	5.000.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			7.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	7.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						4.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			7.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	7.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.862.457.000,00						seluruh aparatur sipil negara pada internal perangkat daerah		8.592.221.425,00	
		Cakupan Layanan Admninistrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.862.457.000,00						seluruh aparatur sipil negara pada internal perangkat daerah		8.592.221.425,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00							1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	5.000.000,00							18 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1176 Orang/bulan		1176 Orang/bulan	1176 Orang/bulan	6.852.457.000,00							1176 Orang/bulan	8.582.221.425,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.852.457.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			8.582.221.425,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1176 Orang/bulan		1176 Orang/bulan	1176 Orang/bulan	6.852.457.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1176 Orang/bulan	8.582.221.425,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			5.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Laporan	5.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						214.380.000,00						Seluruh aparatur sipil negara dan non-ASN pada internal perangkat daerah, tamu/masyarakat pengguna layanan kantor, serta penyedia jasa penunjang operasional		171.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	200.000.000,00							70 Laporan	160.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.850.000,00							1 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00							1 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.530.000,00							1 Paket	3.000.000,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	2.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.530.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			3.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.530.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	3.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.850.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			2.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.850.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	2.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			160.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		70 Laporan	75 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					70 Laporan	160.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00						Seluruh aparatur sipil negara pada internal selaku pengguna aset		50.000.000,00	
		Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00						Seluruh aparatur sipil negara pada internal selaku pengguna aset		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00							1 Unit	50.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	50.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						537.500.000,00						Aparatur internal Perangkat Daerah selaku pengguna fasilitas kantor, tenaga kerja penyedia jasa kebersihan dan keamanan, serta masyarakat pengguna layanan		292.500.000,00	
		Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						537.500.000,00						Aparatur internal Perangkat Daerah selaku pengguna fasilitas kantor, tenaga kerja penyedia jasa kebersihan dan keamanan, serta masyarakat pengguna layanan		292.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00							12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00							12 Laporan	240.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00							1 Laporan	2.500.000,00	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						35.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	50.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.500.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			2.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	2.500.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						500.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			240.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	240.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						307.000.000,00						Aparatur Sipil Negara Pengguna Aset Daerah		300.000.000,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan						307.000.000,00						Aparatur Sipil Negara Pengguna Aset Daerah		300.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00							1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	197.000.000,00							20 Unit	197.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00							1 Unit	3.000.000,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						197.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			197.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	197.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Unit	197.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	5 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	3.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	100.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						214.380.000,00						Seluruh aparatur sipil negara dan non-ASN pada internal perangkat daerah, tamu/masyarakat pengguna layanan kantor, serta penyedia jasa penunjang operasional		171.000.000,00	
		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						214.380.000,00						Seluruh aparatur sipil negara dan non-ASN pada internal perangkat daerah, tamu/masyarakat pengguna layanan kantor, serta penyedia jasa penunjang operasional		171.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.000.000,00							-	4.000.000,00	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			4.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pakat Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	4.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
71.	1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**1.708.000.194,00**								**6.394.008.000,00**	
		Tersedianya Jaringan Irigasi yang Baik dan Terpelihara						***633.000.194,00***								***5.744.008.000,00***	
			999.Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	85 %		73 %	75 %	633.000.194,00							78 %	5.744.008.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						958.000.000,00						Sektor Ekonomi dan Infrastruktur		1.058.000.000,00	
		Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						958.000.000,00						Sektor Ekonomi dan Infrastruktur		1.058.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00							1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00							1 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Embung yang Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00							1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	30 Lembaga		30 Lembaga	30 Lembaga	150.000.000,00							30 Lembaga	150.000.000,00	
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM		1 KM	1 KM	250.000.000,00							1 KM	100.000.000,00	
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1 KM		1 KM	1 KM	50.000.000,00							1 KM	100.000.000,00	
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota						150.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			150.000.000,00	
		Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	30 Lembaga		30 Lembaga	30 Lembaga	150.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30 Lembaga	150.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai						250.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			100.000.000,00	
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 KM		1 KM	5 KM	250.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 KM	100.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai						50.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			100.000.000,00	
		Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	1 KM		1 KM	1 KM	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 KM	100.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya						150.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			250.000.000,00	
		Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	250.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						150.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			150.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0129	Rehabilitasi Embung						150.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			100.000.000,00	
		Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	10 Unit	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	100.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
		Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						750.000.194,00						Kelembagaan lokal yang mengelola air irigasi di tingkat usaha tani		5.336.008.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	25 KM		25 KM	25 KM	250.000.000,00							25 KM	1.171.122.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM		2 KM	2 KM	250.000.000,00							2 KM	1.564.886.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2 KM		2 KM	2 KM	100.000.194,00							2 KM	2.000.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						100.000.194,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			2.000.000.000,00	
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2 KM		2 KM	3 KM	100.000.194,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 KM	2.000.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						250.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			1.564.886.000,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM		2 KM	4 KM	250.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 KM	1.564.886.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						250.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			1.171.122.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	25 KM		25 KM	25 KM	250.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25 KM	1.171.122.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
		Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						958.000.000,00						Sektor Ekonomi dan Infrastruktur		1.058.000.000,00	
			Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	-		-	-	8.000.000,00							-	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	-		-	-	50.000.000,00							-	200.000.000,00	
	1.03.02.2.01.0031	Rehabilitasi Check Dam						8.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			8.000.000,00	
		Terehabilitasinya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	-		-	1 Unit	8.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	8.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku						50.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			200.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	-		-	5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	200.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						750.000.194,00						Kelembagaan lokal yang mengelola air irigasi di tingkat usaha tani		5.336.008.000,00	
		Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						750.000.194,00						Kelembagaan lokal yang mengelola air irigasi di tingkat usaha tani		5.336.008.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	75.000.000,00							-	300.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	75.000.000,00							-	300.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa						75.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			300.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	1 KM	75.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	300.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah						75.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			300.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	1 KM	75.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	300.000.000,00	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
		DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT						**60.480.107.400,00**								**90.379.074.231,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**60.355.107.400,00**								**89.679.074.231,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**59.830.107.400,00**								**86.954.074.231,00**	
72.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.378.223.400,00**								**8.188.731.824,00**	
		Terpenuhinya Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						***6.730.223.400,00***								***8.032.731.824,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	6.730.223.400,00							100 %	8.032.731.824,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						41.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah		51.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan						41.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah		51.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	8.000.000,00							4 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	8.000.000,00							5 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00							3 Laporan	7.000.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	8.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	8.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						8.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Laporan	8.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Laporan	7.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.690.223.400,00						Organisasi Perangkat Daerah		5.860.631.824,00	
		Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.690.223.400,00						Organisasi Perangkat Daerah		5.860.631.824,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00							3 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	50.000.000,00							18 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	854 Orang/bulan		812 Orang/bulan	854 Orang/bulan	5.630.223.400,00							854 Orang/bulan	5.800.631.824,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.630.223.400,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.800.631.824,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	854 Orang/bulan		812 Orang/bulan	854 Orang/bulan	5.630.223.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					854 Orang/bulan	5.800.631.824,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Laporan	10.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						50.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Laporan	50.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah		3.000.000,00	
		Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah						3.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah		3.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00							1 Dokumen	3.000.000,00	
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						564.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah		595.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah						564.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah		595.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00							12 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	500.000.000,00							150 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	50.000.000,00							12 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	4.000.000,00							40 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		7 Paket	4 Paket	5.000.000,00							4 Paket	36.000.000,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40 Paket	4.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		7 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Paket	36.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	50.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	5.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						500.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150 Laporan	500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah		200.000.000,00	
		Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan						20.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah		200.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		2 Unit	5 Unit	10.000.000,00							3 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00							5 Unit	50.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		2 Unit	5 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	150.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	50.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						709.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah		690.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah						709.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah		690.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	199.000.000,00							12 Laporan	275.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00							12 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan		1000 Laporan	1000 Laporan	10.000.000,00							1000 Laporan	15.000.000,00	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan		1000 Laporan	1000 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1000 Laporan	15.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						199.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			275.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	199.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	275.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						500.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	400.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						351.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah		789.100.000,00	
		Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						351.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah		789.100.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	100.000.000,00							13 Unit	324.100.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.000.000,00							2 Unit	95.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit		23 Unit	23 Unit	221.000.000,00							23 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00							5 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000.000,00							10 Unit	10.000.000,00	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						221.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit		23 Unit	23 Unit	221.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				23 Unit	350.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						100.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			324.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Unit	324.100.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	10.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	10.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			95.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	95.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
73.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**100.000.000,00**								**587.500.000,00**	
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum yang Layak						***75.000.000,00***								***587.500.000,00***	
			999.Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Air Minum Layak dan Aman	97.32 %		95.21 %	95.70 %	75.000.000,00							96.31 %	587.500.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00						Masyarakat Sidrap		587.500.000,00	
			Persentase Penduduk berakses air minum					100.000.000,00						Masyarakat Sidrap		587.500.000,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR		150 SR	100 SR	50.000.000,00							150 SR	562.500.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0 Liter/Detik		2,5 Liter/Detik	0 Liter/Detik	25.000.000,00							10 Liter/Detik	25.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik		15 Liter/Detik	7,5 Liter/Detik	25.000.000,00							0 Liter/Detik	0,00	
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						25.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	5 Liter/Detik		15 Liter/Detik	7,5 Liter/Detik	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0 Liter/Detik	0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						25.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			25.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0 Liter/Detik		2,5 Liter/Detik	2,5 Liter/Detik	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Liter/Detik	25.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						50.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			562.500.000,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	150 SR		150 SR	100 SR	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150 SR	562.500.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
74.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**3.801.179.000,00**								**6.584.500.000,00**	
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah						***3.701.179.000,00***								***6.584.500.000,00***	
			999.Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	94.65 Persentase		92.26 Persentase	92.88 Persentase	3.701.179.000,00							93.46 Persentase	6.584.500.000,00	
		Persentase Rumah tinggal bersanitasi						3.801.179.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		6.584.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00							1 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	10 Unit		6 Unit	6 Unit	20.000.000,00							10 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	50.000.000,00							2 Unit	150.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						20.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			100.000.000,00	
		Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	10 Unit		6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	100.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja						50.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	150.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						200.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			90.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 9	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	90.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						3.801.179.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		6.584.500.000,00	
		Persentase Rumah tinggal bersanitasi						3.801.179.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		6.584.500.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	-	3.369.179.000,00						-	4.312.500.000,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	-		-	-	30.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	-	32.000.000,00						-	632.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						30.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			500.000.000,00	
		Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	-		-	40 M³/Hari	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	500.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						50.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			50.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						50.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			750.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	200 M³/Hari	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	750.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0050	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat						32.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			632.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-		-	40 M³/Hari	32.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	632.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						3.369.179.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			4.312.500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	200 Rumah Tangga	3.369.179.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	4.312.500.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
75.	1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**80.000.000,00**								**3.616.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan						***10.000.000,00***								***3.316.000.000,00***	
			999.Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	63.5 Persentase		63 Persentase	63.5 Persentase	10.000.000,00							63.5 Persentase	3.316.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		3.616.000.000,00	
		Tidak terjadi genangan & 2 kali setahun						80.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		3.616.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00							2 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00							2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	1 Kawasan Genangan		2 Kawasan Genangan	2 Kawasan Genangan	10.000.000,00							2 Kawasan Genangan	300.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	175 Sistem Drainase Perkotaan		300 Sistem Drainase Perkotaan	350 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000,00							200 Sistem Drainase Perkotaan	60.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	500 Sistem Drainase Perkotaan		500 Sistem Drainase Perkotaan	1000 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000,00							500 Sistem Drainase Perkotaan	1.200.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	250 Sistem Drainase Perkotaan		150 Sistem Drainase Perkotaan	300 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000,00							300 Sistem Drainase Perkotaan	291.000.000,00	
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	500 M		100 M	1000 M	10.000.000,00							500 M	1.050.000.000,00	
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	200 Meter		100 Meter	150 Meter	10.000.000,00							150 Meter	315.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			1.050.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	500 M		100 M	1000 M	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					500 M	1.050.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			315.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	200 Meter		100 Meter	150 Meter	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150 Meter	315.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			300.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	300.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			300.000.000,00	
		Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	1 Kawasan Genangan		2 Kawasan Genangan	2 Kawasan Genangan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Kawasan Genangan	300.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0028	Rehablitasi Sistem Drainase Perkotaan						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			291.000.000,00	
		Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	250 Sistem Drainase Perkotaan		150 Sistem Drainase Perkotaan	300 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300 Sistem Drainase Perkotaan	291.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			1.200.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	500 Sistem Drainase Perkotaan		500 Sistem Drainase Perkotaan	1000 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					500 Sistem Drainase Perkotaan	1.200.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			100.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			60.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	175 Sistem Drainase Perkotaan		300 Sistem Drainase Perkotaan	350 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200 Sistem Drainase Perkotaan	60.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
76.	1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**1.150.000.000,00**								**5.150.000.000,00**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung						***1.150.000.000,00***								***5.150.000.000,00***	
			999.Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.150.000.000,00							100 Persentase	5.150.000.000,00	
		Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB						1.150.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		5.150.000.000,00	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						150.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			150.000.000,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						1.150.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		5.150.000.000,00	
		Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB						1.150.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		5.150.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.000.000.000,00						-	5.000.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	3 Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
77.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**4.000.000.000,00**								**5.000.000.000,00**	
		Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata						***4.000.000.000,00***								***5.000.000.000,00***	
			999.Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	4.000.000.000,00							100 Persentase	5.000.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						4.000.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		5.000.000.000,00	
		Persentase bangunan yang tertata						4.000.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		5.000.000.000,00	
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	5 Kawasan		5 Kawasan	5 Kawasan	4.000.000.000,00							5 Kawasan	5.000.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota						4.000.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	5 Kawasan		5 Kawasan	5 Kawasan	4.000.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Kawasan	5.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
78.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**42.729.705.000,00**								**56.546.342.407,00**	
		Meningkatnya Tingkat Kemantapan Jalan						***42.729.705.000,00***								***56.546.342.407,00***	
			999.Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	40.813 %		40.791 %	40.796 %	42.729.705.000,00							40.802 %	56.546.342.407,00	
		Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik						42.729.705.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		56.546.342.407,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM		2 KM	2 KM	300.000.000,00							2 KM	350.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	6 KM		6 KM	6 KM	19.024.705.000,00							6 KM	23.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20 KM		20 KM	20 KM	1.455.000.000,00							20 KM	4.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6 KM		6 KM	6 KM	21.000.000.000,00							6 KM	22.000.000.000,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	4 Meter		4 Meter	4 Meter	900.000.000,00							4 Meter	7.146.342.407,00	
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						300.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			350.000.000,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM		2 KM	2 KM	300.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 KM	350.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						1.455.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			4.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20 KM		20 KM	20 KM	1.455.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					20 KM	4.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan						19.024.705.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			23.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	6 KM		6 KM	6 KM	19.024.705.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					6 KM	23.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan						21.000.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			22.000.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6 KM		6 KM	6 KM	21.000.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					6 KM	22.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan						900.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			7.146.342.407,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	4 Meter		4 Meter	4 Meter	900.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)					4 Meter	7.146.342.407,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						42.729.705.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		56.546.342.407,00	
		Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik						42.729.705.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		56.546.342.407,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						50.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			50.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	-		-	10 KM	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
79.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**191.000.000,00**								**351.000.000,00**	
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi						***141.000.000,00***								***291.000.000,00***	
			999.Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	141.000.000,00							100 Persentase	291.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						110.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		260.000.000,00	
		Persentase Tenaga terampil yang terlatih						110.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		260.000.000,00	
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	10.000.000,00							20 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100.000.000,00							50 Orang	250.000.000,00	
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			10.000.000,00	
		Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Orang	10.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			250.000.000,00	
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50 Orang	250.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						51.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		51.000.000,00	
		Persentase sistem informasi jasa konstruksi yang terselenggara						51.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		51.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00							2 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi		1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	11.000.000,00							1 Layanan Informasi	11.000.000,00	
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Orang		4 Orang	4 Orang	10.000.000,00							4 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	20 Perangkat Pendukung		20 Perangkat Pendukung	20 Perangkat Pendukung	20.000.000,00							20 Perangkat Pendukung	20.000.000,00	
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi						20.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			20.000.000,00	
		Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	20 Perangkat Pendukung		20 Perangkat Pendukung	20 Perangkat Pendukung	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Perangkat Pendukung	20.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			10.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Orang		4 Orang	4 Orang	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Orang	10.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi						11.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			11.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi		1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	11.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Layanan Informasi	11.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Persentase dokumen pengawasan tersusun						30.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		40.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	5 Bangunan Konstruksi		5 Bangunan Konstruksi	5 Bangunan Konstruksi	10.000.000,00							5 Bangunan Konstruksi	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	10 Paket Pekerjaan		10 Paket Pekerjaan	10 Paket Pekerjaan	10.000.000,00							10 Paket Pekerjaan	20.000.000,00	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			20.000.000,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	10 Paket Pekerjaan		10 Paket Pekerjaan	10 Paket Pekerjaan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Paket Pekerjaan	20.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			10.000.000,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	5 Bangunan Konstruksi		5 Bangunan Konstruksi	5 Bangunan Konstruksi	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Bangunan Konstruksi	10.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						30.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		40.000.000,00	
		Persentase dokumen pengawasan tersusun						30.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		40.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	-		-	-	10.000.000,00							-	10.000.000,00	
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						10.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			10.000.000,00	
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	-		-	5 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	10.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
80.	1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**400.000.000,00**								**930.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang						***355.000.000,00***								***885.000.000,00***	
			999.Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	355.000.000,00							100 Persentase	885.000.000,00	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						320.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah Dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		850.000.000,00	
		Persentase Jumlah Dokumen Tersusun						320.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah Dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		850.000.000,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00							0 Dokumen	0,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00							2 Dokumen	850.000.000,00	
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						150.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			850.000.000,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	850.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota						170.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0 Dokumen	0,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang		60.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang						60.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang		60.000.000,00	
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00							1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00							1 Dokumen	25.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang						25.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			25.000.000,00	
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang						25.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			25.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
			-	-		-	-	10.000.000,00							-	10.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						20.000.000,00						-		20.000.000,00	
		-						20.000.000,00						-		20.000.000,00	
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00							-	10.000.000,00	
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00							-	10.000.000,00	
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota						10.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			10.000.000,00	
		Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	-		-	6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	10.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota						10.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			10.000.000,00	
		Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	10.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang						60.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang		60.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	-		-	-	10.000.000,00							-	10.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR						10.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			10.000.000,00	
		Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	-		-	10 Kasus	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	10.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**525.000.000,00**								**2.725.000.000,00**	
81.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**250.000.000,00**								**450.000.000,00**	
		Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah						***50.000.000,00***								***250.000.000,00***	
			999.Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00							100 %	250.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						150.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		350.000.000,00	
		Persentase ketersediiaan rumah layak huni						150.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	100.000.000,00	
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana						50.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						50.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						50.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			150.000.000,00	
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
			-	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						100.000.000,00						-		100.000.000,00	
		-						100.000.000,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00							-	50.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						50.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			50.000.000,00	
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	3 Unit Rumah	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			50.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		-	1 Unit Rumah	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
82.	1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**50.000.000,00**								**50.000.000,00**	
			-	-		-	-	25.000.000,00							-	25.000.000,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
		-						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		-	-	25.000.000,00							-	25.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-		-	-	25.000.000,00							-	25.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						25.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			25.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-		-	14 Unit Rumah	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	25.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						25.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			25.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	25.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
83.	1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**125.000.000,00**								**2.025.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman						***125.000.000,00***								***2.025.000.000,00***	
			999.Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	84.21 Persentase		81.27 Persentase	82.05 Persentase	125.000.000,00							83.05 Persentase	2.025.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						125.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		2.025.000.000,00	
		Menurunnya luas permukima n kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha						125.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		2.025.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah		10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	100.000.000,00							10 Unit Rumah	2.000.000.000,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						100.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah		10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	100.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit Rumah	2.000.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Menurunnya luas permukima n kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha						125.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		2.025.000.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	-		-	-	25.000.000,00							-	25.000.000,00	
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						25.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			25.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	25.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
84.	1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**100.000.000,00**								**200.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman						***100.000.000,00***								***200.000.000,00***	
			999.Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	78.5 Persentase		77.8 Persentase	78.5 Persentase	100.000.000,00							78.5 Persentase	200.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						100.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		200.000.000,00	
		Persentase PSU perumahan						100.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		200.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	3 Lokasi		3 Lokasi	3 Lokasi	75.000.000,00							3 Lokasi	175.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0012	Penyedisan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						75.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			175.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	3 Lokasi		3 Lokasi	3 Lokasi	75.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Lokasi	175.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		Persentase PSU perumahan						100.000.000,00						Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang		200.000.000,00	
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-		-	-	25.000.000,00							-	25.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						25.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			25.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-		-	1 Lokasi	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	25.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**125.000.000,00**								**700.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**125.000.000,00**								**700.000.000,00**	
85.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**75.000.000,00**								**650.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelesaian Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan						***75.000.000,00***								***650.000.000,00***	
			999.Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	75.000.000,00							100 Persentase	650.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		650.000.000,00	
		Persentase Luas tanah yang dibebaskan						75.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		650.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	75.000.000,00							10 Dokumen	650.000.000,00	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			650.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Dokumen	650.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
86.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**50.000.000,00**								**50.000.000,00**	
			-	-		-	-	25.000.000,00							-	25.000.000,00	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
		-						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	-		-	-	25.000.000,00							-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	25.000.000,00							-	25.000.000,00	
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						25.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	25.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria						25.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	-		-	1 Berita Acara	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	25.000.000,00	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						**10.210.765.000,00**								**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.210.765.000,00**								**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**10.210.765.000,00**								**0,00**	
87.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.067.751.500,00**								**0,00**	
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien						***6.046.751.500,00***								***0,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	6.046.751.500,00							100 %	0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.000.000,00						-		0,00	
		Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	2.000.000,00							9 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	3.500.000,00							5 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	1.500.000,00							9 Dokumen	0,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	3.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.686.877.000,00						-		0,00	
		Cakupan Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah						5.686.877.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00							12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	2.000.000,00							18 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	151 Orang/bulan		91 Orang/bulan	106 Orang/bulan	5.679.877.000,00							121 Orang/bulan	0,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.679.877.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	151 Orang/bulan		91 Orang/bulan	106 Orang/bulan	5.679.877.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					121 Orang/bulan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						3.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						161.986.500,00						-		0,00	
		Cakupan Administrasi Umum Perangka						161.986.500,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00							4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	144.030.600,00							35 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.010.450,00							1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	500.000,00							5 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.000.000,00							12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.445.450,00							1 Paket	0,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.445.450,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.445.450,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.010.450,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.010.450,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						144.030.600,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	144.030.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						157.000.000,00						-		0,00	
		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						157.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	115.000.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	1.000.000,00							15 Laporan	0,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						115.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	115.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						54.888.000,00						-		0,00	
		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						54.888.000,00						-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	5.000.000,00							1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.000.000,00							3 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	44.888.000,00							18 Unit	0,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						44.888.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	44.888.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
88.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**1.738.013.500,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum						***1.508.013.500,00***								***0,00***	
			999.Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda	100 %		100 %	100 %	1.508.013.500,00							100 %	0,00	
		presentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.461.213.500,00						-		0,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	45 Orang		45 Orang	45 Orang	75.000.000,00							45 Orang	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	123.013.500,00							12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	1.228.200.000,00							4 laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00							12 Laporan	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	4 Unit	25.000.000,00							4 Unit	0,00	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						123.013.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	123.013.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						1.228.200.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan		4 laporan	4 laporan	1.228.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						25.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	4 Unit	25.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja						75.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	45 Orang		45 Orang	45 Orang	75.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45 Orang	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						201.800.000,00						-		0,00	
		Presentase penegakan Perda.Perbub dan peraturan Lainnya						201.800.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80 Laporan		80 Laporan	80 Laporan	75.000.000,00							80 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	51.800.000,00							11 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00							4 Laporan	0,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						51.800.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	51.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						75.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						75.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	80 Laporan		80 Laporan	80 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					80 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						75.000.000,00						-		0,00	
		Presentase ASN Satol PP yang sudah Mengikuti pembinaan pembinaan Diklat PPNS						75.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00							1 Laporan	0,00	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						75.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.461.213.500,00						-		0,00	
		presentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.461.213.500,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	5.000.000,00							-	0,00	
	1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantiburn Provinsi dan Kabupaten/ Kota						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
89.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**2.405.000.000,00**								**0,00**	
		Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran						***2.402.500.000,00***								***0,00***	
			999.Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Ppenyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %		100 %	100 %	2.402.500.000,00							100 %	0,00	
		presentase pencegahan,pengendalian,pemadaman,penyelamatan,danpenanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota						2.405.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.150.000.000,00							12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00							1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00							4 Laporan	0,00	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.150.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.150.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)						2.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.405.000.000,00						-		0,00	
		presentase pencegahan,pengendalian,pemadaman,penyelamatan,danpenanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota						2.405.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-		-	-	2.500.000,00							-	0,00	
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)						2.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-		-	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**3.177.108.000,00**								**1.934.883.044,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.177.108.000,00**								**1.934.883.044,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**3.177.108.000,00**								**1.934.883.044,00**	
90.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.776.608.000,00**								**731.883.044,00**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien						***2.757.608.000,00***								***726.883.044,00***	
			1.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	2.757.608.000,00							100 %	726.883.044,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00						Perangkat Daerah/Internal Organisasi, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)		15.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00						Perangkat Daerah/Internal Organisasi, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000,00							5 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00							12 Laporan	5.000.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00						Perangkat Daerah/Internal Organisasi, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000,00							5 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00							12 Laporan	5.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.375.002.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan		17.250.591,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.375.002.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan		17.250.591,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00							12 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.368.002.000,00							12 Orang/bulan	2.250.591,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						2.375.002.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan		17.250.591,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00							12 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.368.002.000,00							12 Orang/bulan	2.250.591,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.368.002.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.250.591,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	22/12 Orang/bulan	2.368.002.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Orang/bulan	2.250.591,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						7.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.000.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pengelola Administrasi Perkantoran, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		212.000.000,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						162.000.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pengelola Administrasi Perkantoran, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		212.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	7.000.000,00							10 Laporan	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	150.000.000,00							40 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00							1 Paket	5.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						162.000.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pengelola Administrasi Perkantoran, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		212.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	7.000.000,00							10 Laporan	7.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	150.000.000,00							40 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00							1 Paket	5.000.000,00	
		Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan						162.000.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pengelola Administrasi Perkantoran, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		212.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	7.000.000,00							10 Laporan	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	150.000.000,00							40 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00							1 Paket	5.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Laporan	7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40 Laporan	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						45.000.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pemangku Kepentingan		200.000.000,00	
		Jumlah Paket Meubel yang Disediakan						45.000.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pemangku Kepentingan		200.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	15.000.000,00							3 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	30.000.000,00							7 Unit	150.000.000,00	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						45.000.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pemangku Kepentingan		200.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	15.000.000,00							3 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	30.000.000,00							7 Unit	150.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Unit	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						103.500.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pemangku Kepentingan		136.526.453,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						103.500.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pemangku Kepentingan		136.526.453,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.000.000,00							12 Laporan	26.526.453,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00							12 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	5.500.000,00							18 Laporan	20.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						103.500.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pemangku Kepentingan		136.526.453,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.000.000,00							12 Laporan	26.526.453,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00							12 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	5.500.000,00							18 Laporan	20.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						103.500.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pemangku Kepentingan		136.526.453,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.000.000,00							12 Laporan	26.526.453,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00							12 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	5.500.000,00							18 Laporan	20.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.500.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	5.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						28.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			26.526.453,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	26.526.453,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						70.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						81.106.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pemangku Kepentingan		151.106.000,00	
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/ rehabilitasi						81.106.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pemangku Kepentingan		151.106.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00							2 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	56.106.000,00							12 Unit	86.106.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.000.000,00							10 Unit	35.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						81.106.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pemangku Kepentingan		151.106.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00							2 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	56.106.000,00							12 Unit	86.106.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.000.000,00							10 Unit	35.000.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						81.106.000,00						Internal Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pemangku Kepentingan		151.106.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00							2 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	56.106.000,00							12 Unit	86.106.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.000.000,00							10 Unit	35.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						56.106.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			86.106.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	56.106.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Unit	86.106.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
91.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**400.500.000,00**								**1.203.000.000,00**	
		Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana						***274.500.000,00***								***788.000.000,00***	
			1.Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %		100 %	100 %	274.500.000,00							100 %	788.000.000,00	
			999.Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %		100 %	100 %	274.500.000,00							100 %	788.000.000,00	
			999.Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %		100 %	100 %	274.500.000,00							100 %	788.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						10.500.000,00						Masyarakat		30.000.000,00	
		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana						10.500.000,00						Masyarakat		30.000.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang		100 Orang	100 Orang	10.000.000,00							100 Orang	30.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang		100 Orang	100 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100 Orang	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kab/Kota yang tertangani						224.000.000,00						Masyarakat		590.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	170.000.000,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan		2 Kawasan	2 Kawasan	10.000.000,00							2 Kawasan	10.000.000,00	
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00							1 Kegiatan	10.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00							10 Keluarga	5.000.000,00	
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan		1 laporan	1 laporan	10.000.000,00							1 laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	30.000.000,00							3 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	11 Orang		11 Orang	11 Orang	110.000.000,00							11 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	150 Orang		150 Orang	150 Orang	10.000.000,00							150 Orang	10.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Kegiatan	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						30.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	150 Orang		150 Orang	150 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150 Orang	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						5.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Keluarga	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan		2 Kawasan	2 Kawasan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Kawasan	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						110.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	11 Orang		11 Orang	11 Orang	110.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Orang	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						5.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			170.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan		1 laporan	1 laporan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 laporan	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						5.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						115.000.000,00						Masyarakat		353.000.000,00	
		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana						115.000.000,00						Masyarakat		353.000.000,00	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	100 Orang		114 Orang	100 Orang	5.000.000,00							100 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00							1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	580 Orang		800 Orang	760 Orang	55.000.000,00							720 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5 Orang		5 Orang	5 Orang	10.000.000,00							5 Orang	28.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00							1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00							1 Laporan	40.000.000,00	
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas						5.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						20.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			28.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5 Orang		5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Orang	28.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota						5.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota						5.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	100 Orang		114 Orang	100 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100 Orang	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						55.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	580 Orang		800 Orang	760 Orang	55.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					720 Orang	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						15.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terbentuknya sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, responsif, dan berbasis risiko						51.000.000,00						Masyarakat		230.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00							1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00							1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00							1 Kegiatan	50.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						5.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	
		Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						15.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						5.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Kegiatan	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Peniguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						5.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana						10.500.000,00						Masyarakat		30.000.000,00	
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	500.000,00							-	0,00	
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						224.000.000,00						Masyarakat		590.000.000,00	
		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kab/Kota yang tertangani						224.000.000,00						Masyarakat		590.000.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	29.000.000,00							-	70.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						29.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	4 Orang	29.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						51.000.000,00						Masyarakat		230.000.000,00	
		Terbentuknya sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, responsif, dan berbasis risiko						51.000.000,00						Masyarakat		230.000.000,00	
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	-	500.000,00							-	0,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	-	500.000,00							-	0,00	
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	10 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL						**2.840.180.000,00**								**7.358.810.614,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.840.180.000,00**								**7.358.810.614,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**2.840.180.000,00**								**7.358.810.614,00**	
92.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.391.180.000,00**								**6.240.210.614,00**	
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien						***2.388.380.000,00***								***6.160.210.614,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	2.388.380.000,00							100 %	6.160.210.614,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						37.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		130.000.000,00	
		Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						37.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	200.000,00							3 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	36.400.000,00							6 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	200.000,00							3 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	200.000,00							6 Laporan	20.000.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						36.400.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			70.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	36.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Dokumen	70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			20.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Laporan	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.785.280.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		4.697.210.614,00	
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.785.280.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		4.697.210.614,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.400.000,00							12 Dokumen	23.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000,00							1 Laporan	21.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bulan		252 Orang/bulan	252 Orang/bulan	1.778.680.000,00							252 Orang/bulan	4.653.210.614,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.778.680.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			4.653.210.614,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bulan		252 Orang/bulan	252 Orang/bulan	1.778.680.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					252 Orang/bulan	4.653.210.614,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPenguijan/Verifikasi Keuangan SKPD						6.400.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			23.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	23.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			21.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	21.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						400.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		32.000.000,00	
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						400.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		32.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	200.000,00							3 Dokumen	17.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000,00							2 Dokumen	15.000.000,00	
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			15.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS SOSIAL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			17.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	17.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		52.000.000,00	
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		52.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	200.000,00							21 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	200.000,00							21 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	200.000,00							10 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	200.000,00							15 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	200.000,00							15 Orang	15.000.000,00	
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21 Dokumen	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			7.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21 Dokumen	7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		15 Orang	21 Orang	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Orang	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						201.450.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		211.000.000,00	
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						201.450.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		211.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	190.000.000,00							120 Laporan	201.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.450.000,00							4 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.000.000,00							12 Paket	4.000.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.450.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.450.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Paket	6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			4.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						190.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			201.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	190.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120 Laporan	201.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						21.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		400.000.000,00	
		Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						21.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		400.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	200.000,00							4 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	20.600.000,00							4 Unit	140.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	200.000,00							3 Unit	110.000.000,00	
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			150.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.600.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			140.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	20.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	140.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			110.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						255.050.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		218.500.000,00	
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						255.050.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		218.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	23.800.000,00							12 Laporan	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00							12 Laporan	170.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000,00							12 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.050.000,00							12 Laporan	1.500.000,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.050.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.050.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						23.800.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	23.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			12.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						230.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			170.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	170.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		499.500.000,00	
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		499.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00							1 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	200.000,00							13 Unit	56.300.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	39.800.000,00							13 Unit	236.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit		39 Unit	39 Unit	10.000.000,00							39 Unit	27.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						39.800.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			236.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	39.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13 Unit	236.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			56.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13 Unit	56.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			27.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit		39 Unit	39 Unit	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					39 Unit	27.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						40.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			180.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	180.000.000,00	DINAS SOSIAL
93.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**50.000.000,00**								**533.000.000,00**	
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial yang Meningkatkan Kapasitas Masyarakat						***49.400.000,00***								***533.000.000,00***	
			999.Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100 %		100 %	100 %	49.400.000,00							100 %	533.000.000,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						200.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		8.000.000,00	
		Persentase Sumbangan Daerah yang Terkumpul						200.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	200.000,00							4 Dokumen	8.000.000,00	
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			8.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	8.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						49.800.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		525.000.000,00	
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang Tertangani						49.800.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		525.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga		7 Lembaga	7 Lembaga	49.200.000,00							7 Lembaga	105.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	46 Orang		46 Orang	46 Orang	200.000,00							46 Orang	130.000.000,00	
			Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	100 Orang		100 Orang	100 Orang	200.000,00							100 Orang	70.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						49.200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			105.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga		7 Lembaga	7 Lembaga	49.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Lembaga	105.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			70.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	100 Orang		100 Orang	100 Orang	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100 Orang	70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			130.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	46 Orang		46 Orang	46 Orang	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					46 Orang	130.000.000,00	DINAS SOSIAL
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang Tertangani						49.800.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		525.000.000,00	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	-	200.000,00							-	220.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi						200.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			220.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	55 Orang	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	220.000.000,00	DINAS SOSIAL
94.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**5.000.000,00**								**5.000.000,00**	
		Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan						***5.000.000,00***								***5.000.000,00***	
			999.Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	5.000.000,00							100 Persentase	5.000.000,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						5.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		5.000.000,00	
		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Di Pulangkan						5.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		5.000.000,00	
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang		3 Orang	3 Orang	5.000.000,00							3 Orang	5.000.000,00	
	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						5.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang		3 Orang	3 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
95.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**107.000.000,00**								**65.000.000,00**	
		Tersedianya Layanan Rehabilitasi Sosial Bagi Kelompok Rentan						***71.500.000,00***								***24.000.000,00***	
			999.Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 %		100 %	100 %	71.500.000,00							100 %	24.000.000,00	
			999.Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	100 %		100 %	100 %	71.500.000,00							100 %	24.000.000,00	
			999.Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 %		100 %	100 %	71.500.000,00							100 %	24.000.000,00	
			999.Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	100 %		100 %	100 %	71.500.000,00							100 %	24.000.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						77.000.000,00						Oranisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		57.000.000,00	
		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi						77.000.000,00						Oranisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		57.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		14 Orang	16 Orang	3.000.000,00							19 Orang	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		9 Orang	11 Orang	10.000.000,00							14 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		14 Orang	16 Orang	2.500.000,00							19 Orang	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		9 Orang	11 Orang	2.500.000,00							14 Orang	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		9 Orang	11 Orang	3.000.000,00							14 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		14 Orang	16 Orang	30.000.000,00							19 Orang	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		14 Orang	16 Orang	10.000.000,00							19 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		9 Orang	11 Orang	1.000.000,00							14 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		14 Orang	16 Orang	5.000.000,00							19 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		19 Orang	21 Orang	10.000.000,00							24 Orang	5.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						30.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			15.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		14 Orang	16 Orang	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19 Orang	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		14 Orang	16 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		9 Orang	11 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						3.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		9 Orang	11 Orang	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						5.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		14 Orang	16 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		19 Orang	21 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						3.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			4.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		14 Orang	16 Orang	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19 Orang	4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						2.500.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		14 Orang	16 Orang	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19 Orang	4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						2.500.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			4.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		9 Orang	11 Orang	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Orang	4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						1.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		9 Orang	11 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						30.000.000,00						Oranisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		8.000.000,00	
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						30.000.000,00						Oranisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		8.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		6 Orang	8 Orang	10.000.000,00							10 Orang	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang		120 Orang	150 Orang	20.000.000,00							170 Orang	4.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						20.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang		120 Orang	150 Orang	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					170 Orang	4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		6 Orang	8 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Orang	4.000.000,00	DINAS SOSIAL
96.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**192.000.000,00**								**101.600.000,00**	
		Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Menjangkau Masyarakat Rentan						***192.000.000,00***								***71.600.000,00***	
			999.Persentase Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100 %		100 %	100 %	192.000.000,00							100 %	71.600.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						192.000.000,00						Oranisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		101.600.000,00	
		Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial						192.000.000,00						Oranisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		101.600.000,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	120 Orang		40 Orang	60 Orang	32.000.000,00							80 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang		15 Orang	20 Orang	74.800.000,00							25 Orang	15.000.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang		15 Orang	20 Orang	75.000.000,00							25 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	80 Usulan		40 Usulan	50 Usulan	10.000.000,00							60 Usulan	30.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						32.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	120 Orang		40 Orang	60 Orang	32.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					80 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						74.800.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			15.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang		15 Orang	20 Orang	74.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25 Orang	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						75.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			30.000.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang		15 Orang	20 Orang	75.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25 Orang	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			30.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Peninditaksyakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	80 Usulan		40 Usulan	50 Usulan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60 Usulan	30.000.000,00	DINAS SOSIAL
		Persentase Data Masyarakat Miskin yang Diverifikasi dan Validasi serta Diberi Bantuan Sosial						192.000.000,00						Oranisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		101.600.000,00	
			Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	200.000,00							-	21.600.000,00	
	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin						200.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			21.600.000,00	
		Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	100 Orang	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	21.600.000,00	DINAS SOSIAL
97.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**55.000.000,00**								**214.000.000,00**	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana						***54.600.000,00***								***107.000.000,00***	
			999.Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %		100 %	100 %	54.600.000,00							100 %	107.000.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						50.000.000,00						Oranisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		150.000.000,00	
		Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan Sosial						50.000.000,00						Oranisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		150.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang		450 Orang	450 Orang	10.000.000,00							450 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang		450 Orang	450 Orang	200.000,00							450 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang		300 Orang	300 Orang	200.000,00							300 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang		450 Orang	450 Orang	30.000.000,00							450 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		5 Orang	5 Orang	9.600.000,00							5 Orang	25.000.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						30.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			50.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang		450 Orang	450 Orang	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					450 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			25.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang		450 Orang	450 Orang	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					450 Orang	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			25.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang		300 Orang	300 Orang	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					300 Orang	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			25.000.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang		450 Orang	450 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					450 Orang	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						9.600.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			25.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		5 Orang	5 Orang	9.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Orang	25.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						5.000.000,00						Oranisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		64.000.000,00	
		Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						5.000.000,00						Oranisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		64.000.000,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung		3 Kampung	3 Kampung	200.000,00							3 Kampung	32.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang		26 Orang	26 Orang	4.800.000,00							26 Orang	32.000.000,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						200.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			32.000.000,00	
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung		3 Kampung	3 Kampung	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Kampung	32.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						4.800.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			32.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang		26 Orang	26 Orang	4.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26 Orang	32.000.000,00	DINAS SOSIAL
98.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**40.000.000,00**								**200.000.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan						***40.000.000,00***								***200.000.000,00***	
			999.Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	100 %		100 %	100 %	40.000.000,00							100 %	200.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						40.000.000,00						Oranisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		200.000.000,00	
		Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan						40.000.000,00						Oranisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeolder Terkait		200.000.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	14 Makam		14 Makam	14 Makam	40.000.000,00							14 Makam	200.000.000,00	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						40.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			200.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	14 Makam		14 Makam	14 Makam	40.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Makam	200.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						**5.518.162.000,00**								**16.743.476.725,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.466.662.000,00**								**16.507.476.725,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**2.486.500.000,00**								**12.710.000.000,00**	
99.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**						**11.500.000,00**								**50.000.000,00**	
		Terwujudnya Rencana Tenaga Kerja yang Dijadikan Acuan Kegiatan						***11.500.000,00***								***50.000.000,00***	
			999.Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	25 %		13 %	15 %	11.500.000,00							17 %	50.000.000,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						11.500.000,00						perangkat daerah, pelaku usaha, tenaga kerja, dan pencari kerja		50.000.000,00	
		Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten						11.500.000,00						perangkat daerah, pelaku usaha, tenaga kerja, dan pencari kerja		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.500.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						11.500.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			50.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
100.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**115.000.000,00**								**10.075.000.000,00**	
		Tersedianya Tenaga Kerja yang Bersertifikasi dan Kompeten						***115.000.000,00***								***10.075.000.000,00***	
			999.Persentase Tenaga Kerja Bersetifikat Kompetensi	36 %		32 %	33 %	115.000.000,00							34 %	10.075.000.000,00	
		Persentase pelaksanaan pelatihan						115.000.000,00						pencari kerja, tenaga kerja, dan masyarakat usia produktif		10.075.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2 Unit		2 Unit	2 Unit	75.000.000,00							2 Unit	75.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota						75.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			75.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	2 Unit		2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	75.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						115.000.000,00						pencari kerja, tenaga kerja, dan masyarakat usia produktif		10.075.000.000,00	
		Persentase pelaksanaan pelatihan						115.000.000,00						pencari kerja, tenaga kerja, dan masyarakat usia produktif		10.075.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	40.000.000,00							-	10.000.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						40.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			10.000.000.000,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	800 Orang	40.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	10.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
101.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**50.000.000,00**								**535.000.000,00**	
		Terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja yang Maksimal						***40.000.000,00***								***535.000.000,00***	
			999.Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kab/Kota	60 %		18 %	25 %	40.000.000,00							35 %	535.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00						pencari kerja, perusahaan, lembaga pelatihan, dan kelompok khusus		500.000.000,00	
		Jumlah Lowongan Kerja Yang Tersedia Di Wilayah Kab.						30.000.000,00						pencari kerja, perusahaan, lembaga pelatihan, dan kelompok khusus		500.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang		20 Orang	20 Orang	30.000.000,00							20 Orang	500.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						30.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			500.000.000,00	
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang		20 Orang	60 Orang	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Orang	500.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						10.000.000,00						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		5.000.000,00	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui pasar kerja online						10.000.000,00						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		5.000.000,00	
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	50 Orang		50 Orang	50 Orang	10.000.000,00							50 Orang	5.000.000,00	
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	50 Orang		50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50 Orang	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00						pra-penempatan (calon PMI dan keluarganya) dan purna-penempatan (PMI yang kembali dan keluarganya), serta lembaga penunjang		30.000.000,00	
		Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA) yang dibantukan						10.000.000,00						pra-penempatan (calon PMI dan keluarganya) dan purna-penempatan (PMI yang kembali dan keluarganya), serta lembaga penunjang		30.000.000,00	
			Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA Layanan Terpadu	-		-	-	10.000.000,00							-	30.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.07.04.2.04.0004	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			30.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA Layanan Terpadu	-		-	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
102.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**2.310.000.000,00**								**2.050.000.000,00**	
		Terwujudnya Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak						***2.310.000.000,00***								***2.025.000.000,00***	
			999.Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	40 %		17 %	20 %	2.310.000.000,00							25 %	2.025.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						35.000.000,00						perusahaan (manajemen & HRD), pekerja/serikat pekerja, dan lembaga pemerintah		50.000.000,00	
		Besaran pemeriksaan perusahaan						35.000.000,00						perusahaan (manajemen & HRD), pekerja/serikat pekerja, dan lembaga pemerintah		50.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	40 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	10.000.000,00							25 Laporan	25.000.000,00	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			25.000.000,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	40 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25 Laporan	25.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						2.275.000.000,00						perusahaan, pekerja/serikat pekerja, lembaga pemerintah, dan kelompok terdampak lain		2.000.000.000,00	
		Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek						2.275.000.000,00						perusahaan, pekerja/serikat pekerja, lembaga pemerintah, dan kelompok terdampak lain		2.000.000.000,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10628 Orang		10000 Orang	10328 Orang	2.275.000.000,00							10628 Orang	2.000.000.000,00	
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						2.275.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10628 Orang		10000 Orang	10,328 Orang	2.275.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10628 Orang	2.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Besaran pemeriksaan perusahaan						35.000.000,00						perusahaan (manajemen & HRD), pekerja/serikat pekerja, dan lembaga pemerintah		50.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-		-	-	25.000.000,00							-	25.000.000,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						25.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-		-	15 Perusahaan	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	25.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**2.980.162.000,00**								**3.797.476.725,00**	
103.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.785.162.000,00**								**3.501.476.725,00**	
		Tercapainya Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						***2.760.662.000,00***								***3.464.476.725,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	2.760.662.000,00							100 %	3.464.476.725,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00						perangkat daerah, tim perencana/anggaran, pejabat pengawas, dan pemangku kepentingan termasuk masyarakat		14.000.000,00	
		Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00						perangkat daerah, tim perencana/anggaran, pejabat pengawas, dan pemangku kepentingan termasuk masyarakat		14.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00							3 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.500.000,00							3 Laporan	7.000.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.500.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			7.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	7.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.500.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			7.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Laporan	7.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.185.982.000,00						Aparatur sipil negara, pejabat pengelola keuangan, dan unit kerja perangkat daerah yang memerlukan dukungan administrasi pengelolaan keuangan daerah		3.022.296.725,00	
		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.185.982.000,00						Aparatur sipil negara, pejabat pengelola keuangan, dan unit kerja perangkat daerah yang memerlukan dukungan administrasi pengelolaan keuangan daerah		3.022.296.725,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	175 Dokumen		175 Dokumen	175 Dokumen	4.000.000,00							175 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	4.000.000,00							17 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan		462 Orang/bulan	462 Orang/bulan	2.177.982.000,00							462 Orang/bulan	3.012.296.725,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.177.982.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			3.012.296.725,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan		462 Orang/bulan	462 Orang/bulan	2.177.982.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					462 Orang/bulan	3.012.296.725,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPenguijan/Verifikasi Keuangan SKPD						4.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	175 Dokumen		175 Dokumen	175 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					175 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17 Laporan	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						8.000.000,00						Aparatur sipil negara dan perangkat daerah yang memerlukan pelayanan administrasi kepegawaian guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.		10.000.000,00	
		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						8.000.000,00						Aparatur sipil negara dan perangkat daerah yang memerlukan pelayanan administrasi kepegawaian guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	4.000.000,00							28 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	4.000.000,00							28 Dokumen	5.000.000,00	
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						4.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						4.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						175.000.000,00						Perangkat daerah dan aparatur sipil negara dalam mendukung kelancaran administrasi umum penyelenggaraan pemerintahan daerah.		106.000.000,00	
		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah						175.000.000,00						Perangkat daerah dan aparatur sipil negara dalam mendukung kelancaran administrasi umum penyelenggaraan pemerintahan daerah.		106.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	398 Laporan		398 Laporan	398 Laporan	15.000.000,00							398 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan		45 Laporan	45 Laporan	158.500.000,00							45 Laporan	99.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	1.500.000,00							10 Paket	1.500.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.500.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			1.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Paket	1.500.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	398 Laporan		398 Laporan	398 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					398 Laporan	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						158.500.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			99.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan		45 Laporan	45 Laporan	158.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45 Laporan	99.500.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						55.000.000,00						Perangkat daerah, aparatur sipil negara, dan unit kerja pemerintah daerah yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.		25.000.000,00	
		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						55.000.000,00						Perangkat daerah, aparatur sipil negara, dan unit kerja pemerintah daerah yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.		25.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00							1 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00							2 Unit	20.000.000,00	
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						5.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						176.000.000,00						Jasa Pelayanan Umum, Komunikasi, dan Sumber Daya Air dan Listrik		240.000.000,00	
		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						176.000.000,00						Jasa Pelayanan Umum, Komunikasi, dan Sumber Daya Air dan Listrik		240.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	74.000.000,00							12 Laporan	72.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00							12 Laporan	168.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						74.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			72.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	74.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	72.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						102.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			168.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	168.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						170.180.000,00						perangkat daerah, aparatur pemerintah daerah, dan masyarakat		84.180.000,00	
		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						170.180.000,00						perangkat daerah, aparatur pemerintah daerah, dan masyarakat		84.180.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	96.000.000,00							1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	69.180.000,00							12 Unit	69.180.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	11 Unit	5.000.000,00							11 Unit	5.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						69.180.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			69.180.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	69.180.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Unit	69.180.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	11 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Unit	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						96.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	96.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
104.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**30.000.000,00**								**50.000.000,00**	
		Meningkatnya Koperasi yang Sehat						***30.000.000,00***								***50.000.000,00***	
			999.Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	8.5 %		7.5 %	7.7 %	30.000.000,00							8.0 %	50.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						30.000.000,00						pengurus koperasi, anggota, pengawas internal dan eksternal, serta lembaga penunjang		50.000.000,00	
		Persentase koperasi yang diawasi						30.000.000,00						pengurus koperasi, anggota, pengawas internal dan eksternal, serta lembaga penunjang		50.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha		30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	30.000.000,00							40 Unit Usaha	50.000.000,00	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			50.000.000,00	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha		30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40 Unit Usaha	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
105.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**50.000.000,00**								**50.000.000,00**	
		Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Aktif dan Berkualitas						***50.000.000,00***								***50.000.000,00***	
			999.Persentase Koperasi Aktif	70.00 %		68.50 %	68.70 %	50.000.000,00							68.90 %	50.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00						pengurus, pengawas, anggota koperasi, dan lembaga penunjang		50.000.000,00	
		Persentase anggota koperasi yang dilatih						50.000.000,00						pengurus, pengawas, anggota koperasi, dan lembaga penunjang		50.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang		20 Orang	30 Orang	50.000.000,00							30 Orang	50.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						50.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			50.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang		20 Orang	25 Orang	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30 Orang	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
106.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**70.000.000,00**								**25.000.000,00**	
		Meningkatnya Koperasi Berkualitas						***60.000.000,00***								***20.000.000,00***	
			999.Persentase Koperasi Berkualitas	33 %		23.20 %	25 %	60.000.000,00							27 %	20.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						70.000.000,00						pengurus, pengawas, anggota koperasi, dan lembaga penunjang		25.000.000,00	
		Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.						70.000.000,00						pengurus, pengawas, anggota koperasi, dan lembaga penunjang		25.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5 Unit Usaha		5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	10.000.000,00							5 Unit Usaha	5.000.000,00	
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha		10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50.000.000,00							10 Unit Usaha	15.000.000,00	
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat		5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00							5 Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat		5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	5 Unit Usaha		5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit Usaha	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			15.000.000,00	
		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha		10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit Usaha	15.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
107.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**25.000.000,00**								**101.000.000,00**	
		Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang Berkembang Menjadi Wirausaha						***5.000.000,00***								***95.500.000,00***	
			999.Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	28 %		20 %	22 %	5.000.000,00							24 %	95.500.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						25.000.000,00						pelaku usaha mikro, kelembagaan pendukung, pemerintah/pemangku kepentingan, dan mitra strategis		101.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase usaha mikro yang diberdayakan						25.000.000,00						pelaku usaha mikro, kelembagaan pendukung, pemerintah/pemangku kepentingan, dan mitra strategis		101.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	-	5.000.000,00							-	70.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	5.000.000,00							-	15.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	-	5.000.000,00							-	5.500.000,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	-	5.000.000,00							-	5.500.000,00	
	2.17.07.2.01.0016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM						5.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			70.000.000,00	
		Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	20 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						5.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	200 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	15.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha						5.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	5 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.500.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						5.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	1 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk						5.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	300 Unit Usaha	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.500.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
108.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**20.000.000,00**								**70.000.000,00**	
		Meningkatnya Skala Usaha Mikro						***10.000.000,00***								***70.000.000,00***	
			999.Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Volume Usahanya Setelah Difasitasi Pengembangan	5.5 %		3.5 %	4.0 %	10.000.000,00							4.5 %	70.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						20.000.000,00						pelaku usaha mikro potensial, kelembagaan pendukung, pemerintah/pemangku kepentingan, dan mitra strategis		70.000.000,00	
		Persentase usaha mikro yang difasitasi pengembangan						20.000.000,00						pelaku usaha mikro potensial, kelembagaan pendukung, pemerintah/pemangku kepentingan, dan mitra strategis		70.000.000,00	
			Jumlah Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	-		-	-	10.000.000,00							-	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	-	10.000.000,00							-	50.000.000,00	
	2.17.08.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	5 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.17.08.2.01.0025	Penyusunan Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan						10.000.000,00			3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			20.000.000,00	
		Tersusunnya Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	Jumlah Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	-		-	200 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**51.500.000,00**								**236.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**51.500.000,00**								**236.000.000,00**	
109.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**1.500.000,00**								**100.000.000,00**	
		Terwujudnya Perencanaan Kawasan Transmigrasi						***1.500.000,00***								***100.000.000,00***	
			999.Persentase Perencanaan Kawasan Transmigrasi	5 %		3 %	4 %	1.500.000,00							4 %	100.000.000,00	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						1.500.000,00						Masyarakat calon transmigran dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pengembangan kawasan permukiman/transmigrasi.		100.000.000,00	
		Jumlah dokumen perencanaan untuk kawasan transmigrasi						1.500.000,00						Masyarakat calon transmigran dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pengembangan kawasan permukiman/transmigrasi.		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00							1 Dokumen	100.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi						1.500.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			100.000.000,00	
		Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
110.	3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**30.000.000,00**								**116.000.000,00**	
		Terwujudnya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi						***15.000.000,00***								***60.500.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100 %		100 %	100 %	15.000.000,00							100 %	60.500.000,00	
		Jumlah KK yang difasilitasi penempatannya						30.000.000,00						Masyarakat calon transmigran, penduduk usia produktif, dan keluarga sasaran yang diarahkan dalam program penataan persebaran penduduk guna mendukung pemerataan penduduk dan pengembangan kawasan permukiman.		116.000.000,00	
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	5 Kepala Keluarga		5 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	10.000.000,00							5 Kepala Keluarga	5.000.000,00	
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	5 Kepala Keluarga		5 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Kepala Keluarga	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00						Masyarakat calon transmigran, penduduk usia produktif, dan keluarga sasaran yang diarahkan dalam program penataan persebaran penduduk guna mendukung pemerataan penduduk dan pengembangan kawasan permukiman.		116.000.000,00	
		Jumlah KK yang difasilitasi penempatannya						30.000.000,00						Masyarakat calon transmigran, penduduk usia produktif, dan keluarga sasaran yang diarahkan dalam program penataan persebaran penduduk guna mendukung pemerataan penduduk dan pengembangan kawasan permukiman.		116.000.000,00	
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-		-	-	5.000.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	-	5.000.000,00							-	5.500.000,00	
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	-	5.000.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	-		-	-	5.000.000,00							-	5.500.000,00	
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi						5.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	200 Kepala Keluarga	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi						5.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			50.000.000,00	
		Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-		-	10 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal						5.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.500.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	-		-	10 Orang	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Raise || Desa Lagading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.500.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi						5.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.500.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	-		-	1 Lokasi	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Raise || Desa Lagading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.500.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
111.	3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**20.000.000,00**								**20.000.000,00**	
		Terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan						***10.000.000,00***								***10.000.000,00***	
			999.Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	100 %		100 %	100 %	10.000.000,00							100 %	10.000.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						20.000.000,00						Kelompok masyarakat pada kawasan satuan permukiman		20.000.000,00	
		Jumlah Satuan Permukiman yang dibina						20.000.000,00						Kelompok masyarakat pada kawasan satuan permukiman		20.000.000,00	
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	10 Kepala Keluarga		10 Kepala Keluarga	10 Kepala Keluarga	10.000.000,00							10 Kepala Keluarga	10.000.000,00	
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman		1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	10.000.000,00							1 Satuan Permukiman	10.000.000,00	
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			10.000.000,00	
		Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	10 Kepala Keluarga		10 Kepala Keluarga	10 Kepala Keluarga	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Kepala Keluarga	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			10.000.000,00	
		Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman		1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Satuan Permukiman	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**3.468.137.000,00**								**3.323.602.759,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.468.137.000,00**								**3.323.602.759,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**350.000.000,00**								**147.406.000,00**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
112.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**275.000.000,00**								**55.401.000,00**	
		Terwujudnya Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender						***270.000.000,00***								***55.401.000,00***	
			999.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	270.000.000,00							100 Persentase	55.401.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						20.000.000,00						Perangkat Daerah dan Pokja PUG		15.401.000,00	
		Terbentuknya Pokja PUG						20.000.000,00						Perangkat Daerah dan Pokja PUG		15.401.000,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00							1 Laporan	10.301.000,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			10.301.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	10.301.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Terbentuknya Pokja PUG						20.000.000,00						Perangkat Daerah dan Pokja PUG		15.401.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	5.000.000,00							-	5.100.000,00	
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.100.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	40 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						250.000.000,00						Organisasi		15.000.000,00	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						250.000.000,00						Organisasi		15.000.000,00	
			Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	250.000.000,00							-	15.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						250.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	100 Orang	250.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000,00						Keluarga		25.000.000,00	
		Persentase partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan						5.000.000,00						Keluarga		25.000.000,00	
			Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	5.000.000,00							-	25.000.000,00	
	2.08.02.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			25.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	2 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
113.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**15.000.000,00**								**15.300.000,00**	
		Tersedianya Layanan Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan						***5.000.000,00***								***5.100.000,00***	
			999.Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0.001 %		0.001 %	0.001 %	5.000.000,00							0.001 %	5.100.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00						Perempuan, Masyarakat		5.100.000,00	
		Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani						5.000.000,00						Perempuan, Masyarakat		5.100.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	5.000.000,00							-	5.100.000,00	
	2.08.03.2.01.0008	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.100.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000,00						Perempuan, Masyarakat		5.100.000,00	
		Persentase kasus kekerasan yang berhasil dirujuk dan ditangani						5.000.000,00						Perempuan, Masyarakat		5.100.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00							-	5.100.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						5.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.100.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	8 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00						-		5.100.000,00	
		Jumlah lembaga perlindungan perempuan yang aktif						5.000.000,00						-		5.100.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	5.000.000,00							-	5.100.000,00	
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.100.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	5 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
114.	2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**12.000.000,00**								**20.502.000,00**	
		Meningkatnya Ketahanan Keluarga Melalui Peningkatan Kapasitas dan Layanan Edukatif						***12.000.000,00***								***20.502.000,00***	
			999.Persentase Keluarga dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapatkan Pengembangan Kualitas Keluarga	100 %		100 %	100 %	12.000.000,00							100 %	20.502.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						12.000.000,00						Keluarga, Perempuan dan Anak		20.502.000,00	
		Indeks Kualitas Keluarga (IKK)						12.000.000,00						Keluarga, Perempuan dan Anak		20.502.000,00	
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	12.000.000,00							100 Orang	20.502.000,00	
	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.						12.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			20.502.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	12.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100 Orang	20.502.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
115.	2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**25.000.000,00**								**35.803.000,00**	
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Secara Menyeluruh Melalui Layanan Berbasis Klaster						***15.000.000,00***								***35.803.000,00***	
			999.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	62.50 Indeks		62.45 Indeks	62.45 Indeks	15.000.000,00							62.50 Indeks	35.803.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						10.000.000,00						Lembaga		20.502.000,00	
		Persentase lembaga yang menerapkan kebijakan PHA						10.000.000,00						Lembaga		20.502.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	10.000.000,00							-	20.502.000,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			20.502.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	2 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	20.502.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						15.000.000,00						Anak		15.301.000,00	
		Persentase penguatan dan pengembangan lembaga yang dilaksanakan						15.000.000,00						Anak		15.301.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	10.000.000,00							-	10.201.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	5.000.000,00							-	5.100.000,00	
	2.08.06.2.02.0010	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			10.201.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	10.201.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.100.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	25 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
116.	2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**23.000.000,00**								**20.400.000,00**	
		Tersedianya Layanan Perlindungan Khusus Bagi Anak						***11.000.000,00***								***5.100.000,00***	
			999.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	11.000.000,00							100 Persentase	5.100.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						6.000.000,00						Anak, Keluarga		5.100.000,00	
		Persentase pencegahan kekerasan yang dilakukan terhadap anak						6.000.000,00						Anak, Keluarga		5.100.000,00	
			Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	6.000.000,00							-	5.100.000,00	
	2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						6.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.100.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-		-	5 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						6.000.000,00						Anak		5.100.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						6.000.000,00						Anak		5.100.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	6.000.000,00							-	5.100.000,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						6.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.100.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	5 Orang	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						11.000.000,00						Lembaga		10.200.000,00	
		Jumlah penguatan dan engembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus						11.000.000,00						Lembaga		10.200.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	6.000.000,00							-	5.100.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	5.000.000,00							-	5.100.000,00	
	2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.100.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	5 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0018	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota						6.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.100.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**3.118.137.000,00**								**3.176.196.759,00**	
117.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.818.137.000,00**								**3.039.490.759,00**	
		Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Layanan Penunjang yang Efektif dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah						***2.808.637.000,00***								***3.034.990.759,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	2.808.637.000,00							100 %	3.034.990.759,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.595.000,00						OPD		12.626.000,00	
		Persentase fasilitasi penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja						12.595.000,00						OPD		12.626.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00							1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.500.000,00							3 Dokumen	3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00							1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00							1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00							1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.095.000,00							2 Laporan	3.126.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			3.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	3.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.095.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			3.126.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.095.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	3.126.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.384.137.000,00						OPD, ASN		2.667.114.759,00	
		Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.384.137.000,00						OPD, ASN		2.667.114.759,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	6.000.000,00							20 Laporan	7.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan		300 Orang/bulan	300 Orang/bulan	2.378.137.000,00							300 Orang/bulan	2.660.114.759,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.378.137.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			2.660.114.759,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan		300 Orang/bulan	300 Orang/bulan	2.378.137.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					300 Orang/bulan	2.660.114.759,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						6.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			7.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Laporan	7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						105.000.000,00						OPD		71.000.000,00	
		Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah						105.000.000,00						OPD		71.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan		145 Laporan	145 Laporan	105.000.000,00							145 Laporan	71.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						105.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			71.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan		145 Laporan	145 Laporan	105.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					145 Laporan	71.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00						OPD		21.000.000,00	
		Persenatase Pengadaan Barang Milik Daerah						10.000.000,00						OPD		21.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	5.000.000,00							1 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.000.000,00							3 Unit	16.000.000,00	
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			16.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						190.000.000,00						OPD		191.000.000,00	
		Persentase Jasa Penunjag Urusan Pemerintahan Daerah						190.000.000,00						OPD		191.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00							12 Laporan	42.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	152.000.000,00							12 Laporan	149.000.000,00	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						38.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			42.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						152.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			149.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	152.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	149.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						116.405.000,00						OPD		76.750.000,00	
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah						116.405.000,00						OPD		76.750.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00							1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	65.000.000,00							10 Unit	65.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	1.405.000,00							5 Unit	1.750.000,00	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						65.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	65.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.405.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			1.750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	1.405.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	1.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			10.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
118.	2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**5.000.000,00**								**5.100.000,00**	
		Meningkatnya Desa yang Tertata Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Potensi Lokal						***5.000.000,00***								***5.100.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	5.000.000,00							100 Persentase	5.100.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						5.000.000,00						-		5.100.000,00	
		Persentase Penataan Desa						5.000.000,00						-		5.100.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	-		-	-	5.000.000,00							-	5.100.000,00	
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa						5.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.100.000,00	
		Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	-		-	68 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
119.	2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**10.000.000,00**								**6.906.000,00**	
		Meningkatnya Kolaborasi Antar Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan						***10.000.000,00***								***6.906.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Kerjasama antar Desa	100 %		100 %	100 %	10.000.000,00							100 %	6.906.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						10.000.000,00						Desa		6.906.000,00	
		Jumlah Kerja Sama Desa yang Terfasilitasi						10.000.000,00						Desa		6.906.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	8 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00							6 Dokumen	6.906.000,00	
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			6.906.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	8 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Dokumen	6.906.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
120.	2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**70.000.000,00**								**60.404.000,00**	
		Terwujudnya Tata Kelola Desa yang Transparan dan Partisipatif						***50.000.000,00***								***55.304.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	50.000.000,00							100 Persentase	55.304.000,00	
		Cakupan Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa						70.000.000,00						Pemerintah Desa		60.404.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	5.000.000,00							68 Dokumen	12.783.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	20.000.000,00							68 Dokumen	15.301.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	25.000.000,00							68 Dokumen	15.401.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	5.000.000,00							68 Dokumen	6.719.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan		0 Laporan	38 Laporan	5.000.000,00							0 Laporan	0,00	
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						20.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			15.301.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					68 Dokumen	15.301.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						25.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			15.401.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					68 Dokumen	15.401.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						5.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			0,00	
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0 Laporan		0 Laporan	38 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0 Laporan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						5.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			6.719.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					68 Dokumen	6.719.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						5.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			12.783.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					68 Dokumen	12.783.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						70.000.000,00						Pemerintah Desa		60.404.000,00	
		Cakupan Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa						70.000.000,00						Pemerintah Desa		60.404.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	-	5.000.000,00							-	5.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-		-	-	5.000.000,00							-	5.100.000,00	
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						5.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.100.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	-		-	136 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa						5.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-		-	68 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
121.	2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**215.000.000,00**								**64.296.000,00**	
		Terwujudnya Kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Desa						***207.500.000,00***								***64.296.000,00***	
			999.Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Mampu Meningkatkan Kapasitas dalam Pemberdayaan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	207.500.000,00							100 %	64.296.000,00	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif						215.000.000,00						Pemerintah Desa, Lembaga		64.296.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	106 Dokumen		106 Dokumen	106 Dokumen	150.000.000,00							106 Dokumen	20.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	18 Dokumen		17 Dokumen	18 Dokumen	10.000.000,00							18 Dokumen	3.570.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50 Laporan		20 Laporan	30 Laporan	7.500.000,00							40 Laporan	7.265.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	79 Lembaga		81 Lembaga	80 Lembaga	35.000.000,00							80 Lembaga	15.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50 Unit		20 Unit	30 Unit	7.500.000,00							40 Unit	13.361.000,00	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						10.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			3.570.000,00	
		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	18 Dokumen		17 Dokumen	18 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Dokumen	3.570.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						35.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			15.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	79 Lembaga		81 Lembaga	80 Lembaga	35.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					80 Lembaga	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						7.500.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			13.361.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50 Unit		20 Unit	30 Unit	7.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40 Unit	13.361.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						7.500.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			7.265.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50 Laporan		20 Laporan	30 Laporan	7.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40 Laporan	7.265.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						150.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	106 Dokumen		106 Dokumen	106 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					106 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						215.000.000,00						Pemerintah Desa, Lembaga		64.296.000,00	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif						215.000.000,00						Pemerintah Desa, Lembaga		64.296.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-		-	-	5.000.000,00							-	5.100.000,00	
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						5.000.000,00			-	-	2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penurunan Kemiskinan			5.100.000,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-		-	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN						**11.061.533.000,00**								**23.097.754.057,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.015.739.000,00**								**969.572.280,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**1.015.739.000,00**								**969.572.280,00**	
122.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**						**3.000.000,00**								**3.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan						***3.000.000,00***								***3.000.000,00***	
			999.Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	100 %		100 %	100 %	3.000.000,00							100 %	3.000.000,00	
		Jumlah Lumbung Pangan yang Dimanfaatkan						3.000.000,00						Kelompok Tani		3.000.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 unit		1 unit	1 unit	1.000.000,00							1 unit	1.000.000,00	
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						1.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			1.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1 unit		1 unit	1 unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 unit	1.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						3.000.000,00						Kelompok Tani		3.000.000,00	
		Jumlah Lumbung Pangan yang Dimanfaatkan						3.000.000,00						Kelompok Tani		3.000.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-		-	-	2.000.000,00							-	2.000.000,00	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						2.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			2.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	-		-	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	2.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
123.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**888.409.500,00**								**843.405.680,00**	
		Meningkatnya Variasi Konsumsi Pangan Masyarakat						***886.409.500,00***								***841.405.680,00***	
			999.Skor Pola Pangan Harapan	92.00 Nilai		89.50 Nilai	90.01 Nilai	886.409.500,00							90.60 Nilai	841.405.680,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						337.319.300,00						Masyarakat		509.057.980,00	
		Jumlah Laporan Informasi Ketahanan Pangan						337.319.300,00						Masyarakat		509.057.980,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	26.434.000,00							11 Dokumen	49.820.600,00	
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00							2 Laporan	1.000.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1 Dokumen	1.000.000,00	
			Informasi Stok Pangan	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	29.002.300,00							11 Dokumen	29.396.300,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	5 laporan		5 laporan	5 laporan	120.286.000,00							5 laporan	111.446.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga		15 Keluarga	30 Keluarga	158.597.000,00							30 Keluarga	315.395.080,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	1.000.000,00							11 Laporan	1.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						158.597.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			315.395.080,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga		15 Keluarga	15 Keluarga	158.597.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30 Keluarga	315.395.080,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						120.286.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			111.446.000,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	5 laporan		5 laporan	5 laporan	120.286.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 laporan	111.446.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan						29.002.300,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			29.396.300,00	
		Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	29.002.300,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Dokumen	29.396.300,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						1.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			1.000.000,00	
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	1.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						1.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			1.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	11 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Laporan	1.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						1.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			1.000.000,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota						26.434.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			49.820.600,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	26.434.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Dokumen	49.820.600,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						500.000.000,00						Masyarakat		278.150.500,00	
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang Dikelola						500.000.000,00						Masyarakat		278.150.500,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	19 Ton		10 Ton	19 Ton	500.000.000,00							18 Ton	278.150.500,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						500.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			278.150.500,00	
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	19 Ton		10 Ton	19 Ton	500.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Ton	278.150.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						51.090.200,00						-		56.197.200,00	
		Jumlah Dokumen Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						51.090.200,00						-		56.197.200,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.994.600,00							1 Laporan	20.994.600,00	
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.095.600,00							1 Dokumen	35.202.600,00	
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						30.095.600,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			35.202.600,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.095.600,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	35.202.600,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						20.994.600,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			20.994.600,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.994.600,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	20.994.600,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
124.	2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**79.818.000,00**								**89.356.600,00**	
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan						***79.818.000,00***								***89.356.600,00***	
			999.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	100 %		100 %	100 %	79.818.000,00							100 %	89.356.600,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						45.690.000,00						Pemerintah Daerah		46.967.600,00	
		Jumlah Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kecamatan						45.690.000,00						Pemerintah Daerah		46.967.600,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.690.000,00							1 Dokumen	46.967.600,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						45.690.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			46.967.600,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.690.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	46.967.600,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						34.128.000,00						Masyarakat		42.389.000,00	
		Jumlah Desa Rawan Pangan yang tertangani						34.128.000,00						Masyarakat		42.389.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.628.000,00							1 Laporan	14.759.000,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00							1 Dokumen	20.130.000,00	
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00							1 Dokumen	7.500.000,00	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						16.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			20.130.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	20.130.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						10.628.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			14.759.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.628.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	14.759.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						7.500.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			7.500.000,00	
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
125.	2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**44.511.500,00**								**33.810.000,00**	
		Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan						***44.511.500,00***								***33.810.000,00***	
			999.Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	44.511.500,00							100 Persentase	33.810.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						44.511.500,00						Masyarakat		33.810.000,00	
		Jumlah Informasi Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						44.511.500,00						Masyarakat		33.810.000,00	
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.750.000,00							1 Laporan	5.750.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00							1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.761.500,00							1 Dokumen	27.060.000,00	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						2.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			1.000.000,00	
		Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						36.761.500,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			27.060.000,00	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.761.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	27.060.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						5.750.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.750.000,00	
		Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.750.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	5.750.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.045.794.000,00**								**22.128.181.777,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**10.045.794.000,00**								**22.128.181.777,00**	
126.	3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.004.793.600,00**								**13.470.485.959,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan dalam Mendukung Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan						***8.978.293.600,00***								***13.464.285.959,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	8.978.293.600,00							100 %	13.464.285.959,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						47.500.000,00						Pegawai DTPHPKP		77.800.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun						47.500.000,00						Pegawai DTPHPKP		77.800.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		12 Data	12 Data	7.000.000,00							12 Data	13.800.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00							1 Dokumen	3.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00							1 Dokumen	3.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00							1 Dokumen	13.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00							1 Dokumen	5.900.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00							1 Dokumen	5.800.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00							1 Dokumen	3.200.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00							2 Laporan	2.800.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	13.000.000,00							2 Laporan	25.900.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			13.600.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	13.600.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			3.200.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	3.200.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						4.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.800.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	5.800.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			3.400.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	3.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.900.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	5.900.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			2.800.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	2.800.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			25.900.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	13.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	25.900.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			3.400.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	3.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			13.800.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		12 Data	12 Data	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Data	13.800.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.243.715.600,00						Pegawai DTPHPKP		10.098.060.459,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun						8.243.715.600,00						Pegawai DTPHPKP		10.098.060.459,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.530.000,00							1 Dokumen	2.591.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.988.000,00							1 Dokumen	2.998.800,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.953.000,00							1 Dokumen	2.221.400,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.384.000,00							1 Dokumen	1.827.200,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00							12 Dokumen	20.607.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00							2 Laporan	2.800.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	3.136.000,00							18 Laporan	4.098.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1288 Orang/bulan		1288 Orang/bulan	1288 Orang/bulan	8.216.724.600,00							1288 Orang/bulan	10.060.917.059,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.216.724.600,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			10.060.917.059,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1288 Orang/bulan		1288 Orang/bulan	350 Orang/bulan	8.216.724.600,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1288 Orang/bulan	10.060.917.059,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.988.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			2.998.800,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.988.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.998.800,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						15.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			20.607.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	20.607.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.953.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			2.221.400,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.953.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.221.400,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			2.800.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	2.800.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.530.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			2.591.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.530.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.591.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.136.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			4.098.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	3.136.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Laporan	4.098.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.384.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			1.827.200,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.384.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.827.200,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						6.009.000,00						Pegawai DTPHPKP		6.109.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersusun						6.009.000,00						Pegawai DTPHPKP		6.109.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.353.000,00							1 Laporan	2.353.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.656.000,00							1 Dokumen	3.756.000,00	
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						3.656.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			3.756.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.656.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	3.756.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.353.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			2.353.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.353.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	2.353.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						155.750.000,00						Pegawai DTPHPKP		601.287.500,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Tersedia						155.750.000,00						Pegawai DTPHPKP		601.287.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00							1 Laporan	595.537.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.750.000,00							1 Paket	5.750.000,00	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.750.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.750.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.750.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	5.750.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			595.537.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	595.537.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00						Pegawai DTPHPKP		286.800.000,00	
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00						Pegawai DTPHPKP		286.800.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		175 Unit	88 Unit	5.000.000,00							9 Unit	84.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit		11 Unit	12 Unit	5.000.000,00							17 Unit	202.800.000,00	
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			84.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		175 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9 Unit	84.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			202.800.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit		11 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17 Unit	202.800.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						446.750.000,00						Pegawai DTPHPKP		1.666.710.000,00	
		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana						446.750.000,00						Pegawai DTPHPKP		1.666.710.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.000.000,00							12 Laporan	66.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	375.000.000,00							1 Laporan	1.596.960.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.750.000,00							1 Laporan	3.750.000,00	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.750.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			3.750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.750.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	3.750.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						68.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			66.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	66.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						375.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			1.596.960.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	375.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	1.596.960.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.069.000,00						Pegawai DTPHPKP		733.719.000,00	
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.069.000,00						Pegawai DTPHPKP		733.719.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00							1 Unit	56.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit		56 Unit	56 Unit	85.069.000,00							56 Unit	635.969.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		45 Unit	45 Unit	5.000.000,00							45 Unit	41.750.000,00	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						85.069.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			635.969.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit		56 Unit	46 Unit	85.069.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					56 Unit	635.969.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			41.750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		45 Unit	45 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45 Unit	41.750.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			56.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	56.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
127.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**392.000.000,00**								**1.735.515.500,00**	
		Tersedianya Sarana Pertanian Berkualitas dengan Distribusi Merata						***381.000.000,00***								***1.735.515.500,00***	
			999.Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	6.40 %		5.69 %	5.86 %	381.000.000,00							6.03 %	1.735.515.500,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						392.000.000,00						Kelompok Tani		1.735.515.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Terlaksana						392.000.000,00						Kelompok Tani		1.735.515.500,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diserbanyak	20.00 Ton		0.10 Ton	12.50 Ton	50.000.000,00							15.00 Ton	225.000.000,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	225.000.000,00							3 Laporan	998.711.000,00	
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	10 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00							6 Laporan	47.481.000,00	
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00							1 Laporan	53.981.000,00	
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00							2 Laporan	20.736.500,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00							2 Laporan	304.244.000,00	
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	10 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00							6 Laporan	45.481.000,00	
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	25 Laporan		5 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00							15 Laporan	39.881.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			304.244.000,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	304.244.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						225.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			998.711.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	225.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Laporan	998.711.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih						50.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			225.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	20.00 Ton		0.10 Ton	0,1 Ton	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.00 Ton	225.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan						5.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			53.981.000,00	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	53.981.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura						5.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			45.481.000,00	
		Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	10 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Laporan	45.481.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan						5.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			39.881.000,00	
		Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	25 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Laporan	39.881.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan						1.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			20.736.500,00	
		Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	20.736.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura						1.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			47.481.000,00	
		Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	10 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Laporan	47.481.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
128.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**320.000.000,00**								**6.035.318.818,00**	
		Terwujudnya Prasarana Pertanian yang Mendukung Efisiensi Produksi						***211.000.000,00***								***5.958.318.818,00***	
			999.Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian	100 %		100 %	100 %	211.000.000,00							100 %	5.958.318.818,00	
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Terlaksana						40.000.000,00						Kelompok Tani		2.355.806.500,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00							2 Laporan	395.114.000,00	
			Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00							1 Unit	424.000.000,00	
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	1.000.000,00							2 Unit	160.250.000,00	
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	63 Unit		65 Unit	65 Unit	1.000.000,00							65 Unit	433.000.000,00	
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	4 Unit		1 Unit	3 Unit	1.000.000,00							3 Unit	18.095.500,00	
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.000.000,00							2 Unit	702.752.000,00	
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5 Unit		1 Unit	5 Unit	1.000.000,00							5 Unit	150.500.000,00	
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5 Unit		1 Unit	3 Unit	1.000.000,00							4 Unit	18.095.000,00	
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	51505.30 Ha		51105.30 Ha	51205.30 Ha	25.000.000,00							51305.30 Ha	51.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						5.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			395.114.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	395.114.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						25.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			51.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	51505.30 Ha		51105.30 Ha	51205,30 Ha	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					51305.30 Ha	51.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan						1.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			18.095.500,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	4 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	18.095.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan						1.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			433.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	63 Unit		65 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					65 Unit	433.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura						1.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			160.250.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	160.250.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan						1.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			424.000.000,00	
		terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	424.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura						1.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			702.752.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	702.752.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan						1.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			18.095.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	18.095.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan						1.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			150.500.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	5 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	150.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						280.000.000,00						Kelompok Tani		3.679.512.318,00	
		Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian						280.000.000,00						Kelompok Tani		3.679.512.318,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit		6 Unit	10 Unit	100.000.000,00							15 Unit	3.209.012.318,00	
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00							1 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00							1 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	15 Unit		1 Unit	8 Unit	50.000.000,00							10 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00							1 Unit	20.500.000,00	
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian						50.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			75.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	75.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						100.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			3.209.012.318,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit		6 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Unit	3.209.012.318,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit						50.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			75.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	75.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						30.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			20.500.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	20.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						50.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			300.000.000,00	
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	15 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	300.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						40.000.000,00						Kelompok Tani		2.355.806.500,00	
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Terlaksana						40.000.000,00						Kelompok Tani		2.355.806.500,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-		-	-	1.000.000,00							-	1.000.000,00	
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	-		-	-	1.000.000,00							-	1.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	-	1.000.000,00							-	1.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota						1.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			1.000.000,00	
		Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	1.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota						1.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			1.000.000,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	1.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota						1.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			1.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	1.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
129.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**175.000.000,00**								**855.861.500,00**	
		Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian						***175.000.000,00***								***855.861.500,00***	
			999.Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	100 %		100 %	100 %	175.000.000,00							100 %	855.861.500,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						175.000.000,00						Petani		855.861.500,00	
		Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						175.000.000,00						Petani		855.861.500,00	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	5 Ha		5 Ha	5 Ha	25.000.000,00							5 Ha	5.000.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3125 Ha		2313 Ha	2663 Ha	150.000.000,00							2763 Ha	850.861.500,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						150.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			850.861.500,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3125 Ha		2313 Ha	2313 Ha	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2763 Ha	850.861.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						25.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	5 Ha		5 Ha	5 Ha	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Ha	5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
130.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**154.000.400,00**								**31.000.000,00**	
		Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Dan Kelompok Tani						***146.500.400,00***								***6.000.000,00***	
			999.Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	6.04 %		3.35 %	4.22 %	146.500.400,00							4.79 %	6.000.000,00	
		Jumlah Kelompok Tani yang Dibina						154.000.400,00						Kelompok Tani		31.000.000,00	
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	121.739.400,00							1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00							1 Unit	5.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota						20.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						121.739.400,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			1.000.000,00	
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	121.739.400,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						154.000.400,00						Kelompok Tani		31.000.000,00	
		Jumlah Kelompok Tani yang Dibina						154.000.400,00						Kelompok Tani		31.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	2.500.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	2.500.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan oleh penyuluh pertanian	-		-	-	2.500.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang tersedia di wilayah kab/kota dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	2.500.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	-	2.261.000,00							-	5.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						2.500.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	11 Unit	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.27.07.2.01.0011	Penumbuhan dan peningkatan kapasitas Penyuluh pertanian swadaya						2.500.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian swadaya	Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang tersedia di wilayah kab/kota dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	11 Orang	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						2.500.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	11 Unit	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0015	Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota						2.500.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan oleh penyuluh pertanian	-		-	2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa						2.261.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Tersedia Sarana dan prasarana serta Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	11 Unit	2.261.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**13.924.815.000,00**								**14.477.241.796,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.924.815.000,00**								**14.477.241.796,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**13.924.815.000,00**								**14.477.241.796,00**	
131.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.899.458.500,00**								**4.701.041.796,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan dalam Mendukung Pembangunan Lingkungan Hidup						***4.856.758.500,00***								***4.662.541.796,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	4.856.758.500,00							100 %	4.662.541.796,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.700.000,00						-		35.200.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun						22.700.000,00						-		35.200.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00							1 Dokumen	1.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00							2 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00							2 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00							2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00							1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00							2 Laporan	11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00							2 Laporan	3.000.000,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			12.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.500.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.700.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			1.700.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			11.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	11.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			3.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.944.692.376,00						-		4.075.771.796,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun						3.944.692.376,00						-		4.075.771.796,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00							1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00							1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00							12 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00							1 Laporan	7.700.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00							12 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang/bulan		560 Orang/bulan	560 Orang/bulan	3.927.192.376,00							560 Orang/bulan	4.052.571.796,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.927.192.376,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.052.571.796,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang/bulan		560 Orang/bulan	560 Orang/bulan	3.927.192.376,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					560 Orang/bulan	4.052.571.796,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPenguijan/Verifikasi Keuangan SKPD						1.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	1.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.500.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			7.700.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	7.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.500.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						8.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.500.000,00						-		4.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.500.000,00						-		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00							1 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00							1 Dokumen	2.000.000,00	
	2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.500.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			2.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						152.500.000,00						-		203.500.000,00	
		Jumlah Layanan Administrasi Umum yang Tersedia						152.500.000,00						-		203.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188 Laporan		185 Laporan	185 Laporan	150.000.000,00							187 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	78 Paket		70 Paket	72 Paket	2.500.000,00							74 Paket	3.500.000,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.500.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			3.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	78 Paket		70 Paket	72 Paket	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					74 Paket	3.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188 Laporan		185 Laporan	185 Laporan	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					187 Laporan	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.300.000,00						-		45.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.000.000,00							10 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000,00							1 Unit	1.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000,00							1 Unit	1.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	20.000.000,00							4 Unit	20.000.000,00	
	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar						100.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			1.000.000,00	
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						20.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			1.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						502.766.124,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Pendanaan		93.600.000,00	
		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana						502.766.124,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Pendanaan		93.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00							12 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	442.766.124,00							12 Laporan	33.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan		500 Laporan	500 Laporan	5.000.000,00							500 Laporan	5.000.000,00	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan		500 Laporan	500 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					500 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						55.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						442.766.124,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			33.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	442.766.124,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	33.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						234.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		243.970.000,00	
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						234.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		243.970.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00							1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit		75 Unit	76 Unit	124.000.000,00							77 Unit	133.970.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00							1 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	5.000.000,00							30 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit		76 Unit	76 Unit	15.000.000,00							76 Unit	15.000.000,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						124.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			133.970.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	79 Unit		75 Unit	76 Unit	124.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					77 Unit	133.970.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						5.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30 Unit	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit		76 Unit	76 Unit	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					76 Unit	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40.300.000,00						-		45.000.000,00	
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.300.000,00						-		45.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	100.000,00							-	3.000.000,00	
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			3.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
132.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**2.500.000,00**								**178.758.000,00**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Hidup untuk Memitigasi Dampak KRP						***1.500.000,00***								***173.758.000,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %		100 %	100 %	1.500.000,00							100 %	173.758.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						500.000,00						-		168.758.000,00	
		Jumlah Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota						500.000,00						-		168.758.000,00	
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	168.758.000,00	
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota						500.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			168.758.000,00	
		RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	168.758.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						2.000.000,00						-		10.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/kota						2.000.000,00						-		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00							2 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1 Dokumen	5.000.000,00	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD						1.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			5.000.000,00	
		Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						1.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			5.000.000,00	
		Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
133.	2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**65.100.000,00**								**110.500.000,00**	
		Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan						***45.100.000,00***								***80.500.000,00***	
			999.Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	100 %		100 %	100 %	45.100.000,00							100 %	80.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						40.100.000,00						-		85.500.000,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	10.000.000,00							2 Lokasi	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00							2 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.000.000,00							2 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000,00							2 Dokumen	15.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						10.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pajak Air Tanah					2 Dokumen	25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						10.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			15.000.000,00	
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pajak Air Tanah					2 Lokasi	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						20.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			20.000.000,00	
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pajak Air Tanah					2 Paket	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						100.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			15.000.000,00	
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pajak Air Tanah					2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						25.000.000,00						-		25.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						25.000.000,00						-		25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	16 Laporan		12 Laporan	13 Laporan	10.000.000,00							14 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	16 Titik		12 Titik	13 Titik	15.000.000,00							14 Titik	15.000.000,00	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						10.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			10.000.000,00	
		Terlaksanya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	16 Laporan		12 Laporan	13 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pajak Air Tanah					14 Laporan	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						15.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			15.000.000,00	
		Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	16 Titik		12 Titik	13 Titik	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pajak Air Tanah					14 Titik	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						40.100.000,00						-		85.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						40.100.000,00						-		85.500.000,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-		-	-	0,00							-	10.500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						0,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			10.500.000,00	
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
134.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**1.650.328.500,00**								**2.155.000.000,00**	
		Terwujudnya Pelestarian Keanekaragaman Hayati yang Lestari						***1.650.328.500,00***								***2.155.000.000,00***	
			999.Persentase Luas RTH Publik dari Wilayah Kota/Perkotaan	29.86 %		24.46 %	25.12 %	1.650.328.500,00							26.65 %	2.155.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						1.650.328.500,00						-		2.155.000.000,00	
		Luasan RTH publik kewenangan DLH yang terkelola						1.650.328.500,00						-		2.155.000.000,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Ha		50 Ha	52 Ha	1.645.328.500,00							54 Ha	2.150.000.000,00	
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00							1 Unit	5.000.000,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						1.645.328.500,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			2.150.000.000,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Ha		50 Ha	52 Ha	1.645.328.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					54 Ha	2.150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya						5.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			5.000.000,00	
		Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
135.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**43.000.000,00**								**43.000.000,00**	
		Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)						***43.000.000,00***								***43.000.000,00***	
			999.Persentase Pengurangan Limbah B3	100 %		100 %	100 %	43.000.000,00							100 %	43.000.000,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3						20.000.000,00						-		20.000.000,00	
		Jumlah laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3						20.000.000,00						-		20.000.000,00	
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	9 Usaha		6 Usaha	7 Usaha	20.000.000,00							7 Usaha	20.000.000,00	
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3						20.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			20.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	9 Usaha		6 Usaha	7 Usaha	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Usaha	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						23.000.000,00						-		23.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						23.000.000,00						-		23.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	23.000.000,00							6 Dokumen	23.000.000,00	
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan						23.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			23.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	23.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Dokumen	23.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
136.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**25.000.000,00**								**37.000.000,00**	
		Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan						***25.000.000,00***								***37.000.000,00***	
			999.Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %		100 %	100 %	25.000.000,00							100 %	37.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00						-		37.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00						-		37.000.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	35 Badan Usaha		35 Badan Usaha	35 Badan Usaha	15.000.000,00							35 Badan Usaha	27.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00							7 Dokumen	10.000.000,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						10.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			10.000.000,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Dokumen	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						15.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			27.000.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	35 Badan Usaha		35 Badan Usaha	35 Badan Usaha	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35 Badan Usaha	27.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
137.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**						**10.000.000,00**								**10.000.000,00**	
		Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						***10.000.000,00***								***10.000.000,00***	
			999.Presentase Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	100 %		100 %	100 %	10.000.000,00							100 %	10.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						10.000.000,00						-		10.000.000,00	
		Jumlah Calon MHA yang dilakukan identifikas, verifikasi dan Validasi tentang Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						10.000.000,00						-		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH						10.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
138.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**33.000.000,00**								**37.000.000,00**	
		Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						***33.000.000,00***								***37.000.000,00***	
			999.Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup	100 %		100 %	100 %	33.000.000,00							100 %	37.000.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						33.000.000,00						-		37.000.000,00	
		Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup						33.000.000,00						-		37.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	9 Entitas		8 Entitas	8 Entitas	33.000.000,00							8 Entitas	37.000.000,00	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						33.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			37.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	9 Entitas		8 Entitas	8 Entitas	33.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Entitas	37.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
139.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**13.000.000,00**								**15.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup						***13.000.000,00***								***15.000.000,00***	
			999.Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	13.000.000,00							100 %	15.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						13.000.000,00						-		15.000.000,00	
		Jumlah laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti						13.000.000,00						-		15.000.000,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	10 Pengaduan		10 Pengaduan	10 Pengaduan	13.000.000,00							10 Pengaduan	15.000.000,00	
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						13.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			15.000.000,00	
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	10 Pengaduan		10 Pengaduan	10 Pengaduan	13.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Pengaduan	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
140.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**7.183.428.000,00**								**7.189.942.000,00**	
		Terwujudnya Sistem Pengelolaan Sampah yang Efisien						***7.178.428.000,00***								***7.159.942.000,00***	
			999.Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	92.90 %		81 %	83.90 %	7.178.428.000,00							86.80 %	7.159.942.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						7.183.428.000,00						-		7.189.942.000,00	
		Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah						7.183.428.000,00						-		7.189.942.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00							2 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	5.000.000,00							7 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok	10.000.000,00							2 Kelompok	20.000.000,00	
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	43500 Ton		38.500 Ton	39.400 Ton	1.050.000.000,00							40.900 Ton	1.050.000.000,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	9267.27 Ton		9260.02 Ton	9261.35 Ton	1.968.428.000,00							9263.37 Ton	1.779.942.000,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	28370.39 Ton		27021.25 Ton	27357.27 Ton	3.825.000.000,00							27822.38 Ton	3.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.000.000,00							2 Unit	1.300.000.000,00	
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	99 Persentase		88 Persentase	91 Persentase	5.000.000,00							93 Persentase	10.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						10.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			20.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Kelompok	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						300.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			1.300.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	1.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota						20.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			20.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan						3.825.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			3.000.000.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	28370.39 Ton		27021.25 Ton	27.357,27 Ton	3.825.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					27822.38 Ton	3.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah						5.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			10.000.000,00	
		Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	99 Persentase		88 Persentase	91 Persentase	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					93 Persentase	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						1.968.428.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			1.779.942.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	9267.27 Ton		9260.02 Ton	9.261,35 Ton	1.968.428.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9263.37 Ton	1.779.942.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah						5.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			10.000.000,00	
		Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Laporan	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						1.050.000.000,00			-	-	4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan			1.050.000.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	43500 Ton		38.500 Ton	39.400 Ton	1.050.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40.900 Ton	1.050.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						**3.668.053.400,00**								**3.995.845.899,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.668.053.400,00**								**3.995.845.899,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**3.668.053.400,00**								**3.995.845.899,00**	
141.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.257.253.400,00**								**3.343.845.899,00**	
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien						***3.250.553.400,00***								***3.332.845.899,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	3.250.553.400,00							100 %	3.332.845.899,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						42.053.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		25.000.000,00	
		Terpenuhinya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah						42.053.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.000,00							4 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	41.753.000,00							9 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100.000,00							6 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100.000,00							6 Laporan	1.000.000,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						41.753.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			22.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	41.753.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9 Dokumen	22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						100.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						100.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Laporan	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Laporan	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.466.118.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		2.328.081.899,00	
		Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah						2.466.118.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		2.328.081.899,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	1.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/bulan		288 Orang/bulan	288 Orang/bulan	2.465.618.000,00							288 Orang/bulan	2.327.081.899,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.465.618.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.327.081.899,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/bulan		288 Orang/bulan	288 Orang/bulan	2.465.618.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					288 Orang/bulan	2.327.081.899,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						15.836.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		26.129.500,00	
		Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						15.836.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		26.129.500,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	500.000,00							24 Dokumen	500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	500.000,00							15 Orang	2.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	13.836.000,00							25 Orang	22.129.500,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	500.000,00							24 Paket	500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	500.000,00							24 Orang	500.000,00	
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24 Paket	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24 Dokumen	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24 Orang	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						13.836.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			22.129.500,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	13.836.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25 Orang	22.129.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Orang	2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						125.863.500,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		152.318.500,00	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah						125.863.500,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		152.318.500,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00							12 Dokumen	500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.100.000,00							12 Laporan	6.634.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan		65 Laporan	65 Laporan	110.537.500,00							65 Laporan	139.184.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.000.000,00							4 Paket	1.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	500.000,00							12 Paket	500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.016.000,00							4 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	500.000,00							12 Paket	1.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.710.000,00							4 Paket	500.000,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.016.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.016.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Paket	3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.710.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.710.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Paket	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Paket	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						8.100.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.634.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	6.634.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						110.537.500,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			139.184.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan		65 Laporan	65 Laporan	110.537.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					65 Laporan	139.184.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						96.904.800,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		177.000.000,00	
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						96.904.800,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		177.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	22.696.400,00							10 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500.000,00							2 Unit	500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	72.708.400,00							7 Unit	155.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	500.000,00							10 Unit	1.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29 Unit		29 Unit	29 Unit	500.000,00							29 Unit	500.000,00	
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						22.696.400,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	22.696.400,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						72.708.400,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			155.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	72.708.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Unit	155.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29 Unit		29 Unit	29 Unit	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					29 Unit	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						415.043.100,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		440.372.000,00	
		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						415.043.100,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		440.372.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	64.000.000,00							12 Laporan	70.980.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	329.897.100,00							12 Laporan	355.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.646.000,00							12 Laporan	13.052.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00							12 Laporan	500.000,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						64.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			70.980.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	64.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	70.980.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.646.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.052.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.646.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	13.052.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						329.897.100,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			355.840.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	329.897.100,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	355.840.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.435.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		194.944.000,00	
		Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.435.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		194.944.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.840.000,00							1 Unit	85.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	500.000,00							12 Unit	500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	56.344.000,00							12 Unit	84.944.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit		23 Unit	23 Unit	33.251.000,00							23 Unit	24.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit		25 Unit	25 Unit	500.000,00							25 Unit	500.000,00	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						56.344.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			84.944.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	56.344.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Unit	84.944.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Unit	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						33.251.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			24.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit		23 Unit	23 Unit	33.251.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23 Unit	24.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4.840.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.840.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit		25 Unit	25 Unit	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25 Unit	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
142.	2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**297.500.000,00**								**377.700.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftran Penduduk						***258.000.000,00***								***374.700.000,00***	
			999.Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	99.80 %		99.60 %	99.65 %	258.000.000,00							99.70 %	374.700.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						293.000.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		374.200.000,00	
		Terpenuhinya Dokumen Pelayanan Peridaftaran Penduduk						293.000.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		374.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	36.500.000,00							24 Dokumen	59.797.710,00	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	220.000.000,00							36 Laporan	269.718.260,00	
			Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	36.500.000,00							24 Laporan	44.684.030,00	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						36.500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			59.797.710,00	
		Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	36.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24 Dokumen	59.797.710,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						220.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			269.718.260,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	220.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36 Laporan	269.718.260,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan						36.500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			44.684.030,00	
		Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	36.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24 Laporan	44.684.030,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk						500.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		500.000,00	
		Terpenuhinya Penataan pendaftran Penduduk						500.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		500.000,00	
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	500.000,00							6 Dokumen	500.000,00	
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Dokumen	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						3.000.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		2.000.000,00	
		Terpenuhinya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						3.000.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		2.000.000,00	
			Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00							4 Dokumen	500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00							12 Laporan	500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00							4 Laporan	500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	500.000,00	
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk						1.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk						1.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						1.000.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		1.000.000,00	
		Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						1.000.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	500.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00							12 Laporan	500.000,00	
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
143.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**54.950.000,00**								**125.450.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil						***51.950.000,00***								***121.950.000,00***	
			999.Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	87.64 %		84.39 %	85.25 %	51.950.000,00							86.00 %	121.950.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						44.450.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		95.450.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Pecatatan Sipil						44.450.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		95.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2100 Dokumen		2000 Dokumen	2100 Dokumen	34.000.000,00							2100 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4 Paket		4 Paket	4 Paket	450.000,00							4 Paket	450.000,00	
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan		6 Layanan	6 Layanan	10.000.000,00							6 Layanan	35.000.000,00	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						34.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2100 Dokumen		2000 Dokumen	2100 Dokumen	34.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2100 Dokumen	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						10.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan		6 Layanan	6 Layanan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Layanan	35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan						450.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			450.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4 Paket		4 Paket	4 Paket	450.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Paket	450.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						9.500.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		28.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						9.500.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		28.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00							12 Dokumen	500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00							12 Laporan	500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00							12 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1.000.000,00							3 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	500.000,00							3 Laporan	500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	500.000,00							11 Laporan	500.000,00	
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota						1.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil						6.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil						1.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 Laporan	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						1.000.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		2.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						1.000.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	500.000,00							3 Laporan	1.000.000,00	
	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
144.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**57.850.000,00**								**123.850.000,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan						***46.850.000,00***								***122.850.000,00***	
			999.Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	60 Persentase		60 Persentase	60 Persentase	46.850.000,00							60 Persentase	122.850.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						10.500.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		23.000.000,00	
		Terwujudnya Database Kependudukan Kab. Sidrap						10.500.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		23.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00							12 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	500.000,00							3 Dokumen	1.000.000,00	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						10.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			22.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						46.850.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		99.850.000,00	
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						46.850.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		99.850.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00							12 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	36.000.000,00							3 Dokumen	69.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000,00							1 Laporan	350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	500.000,00	
	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						350.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			350.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	350.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						36.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			69.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	36.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	69.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan						10.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						500.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		1.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						500.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	1.000.000,00	
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
145.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**500.000,00**								**25.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan						***500.000,00***								***25.000.000,00***	
			999.Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	90 %		90 %	90 %	500.000,00							90 %	25.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						500.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		25.000.000,00	
		Terwujudnya Penyusunan Profil Kependudukan						500.000,00						Organasasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stekeholder terkait		25.000.000,00	
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	150 Dokumen		150 Dokumen	150 Dokumen	500.000,00							150 Dokumen	25.000.000,00	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota						500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	
		Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	150 Dokumen		150 Dokumen	150 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**4.102.007.000,00**								**7.968.500.948,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.102.007.000,00**								**7.968.500.948,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**4.102.007.000,00**								**7.968.500.948,00**	
146.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.606.017.000,00**								**3.186.351.048,00**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Dukungan Terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***1.443.017.000,00***								***3.182.851.048,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	1.443.017.000,00							100 %	3.182.851.048,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.500.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, dan Stakeholder Terkait		6.151.100,00	
		Jumlah Dokumen Perencaaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.500.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, dan Stakeholder Terkait		6.151.100,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	500.000,00							5 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	1.151.100,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	500.000,00	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.151.100,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.151.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.204.177.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, dan Stakeholder Terkait		2.413.162.448,00	
		Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.204.177.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, dan Stakeholder Terkait		2.413.162.448,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	1.204.177.000,00							30 Orang/bulan	2.413.162.448,00	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.204.177.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.413.162.448,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	1.204.177.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					30 Orang/bulan	2.413.162.448,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						130.500.000,00						-		230.000.000,00	
		Presentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran						130.500.000,00						-		230.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.500.000,00							12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	80.000.000,00							12 Paket	180.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						80.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			180.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	80.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.500.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, dan Stakeholder Terkait		362.037.500,00	
		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, dan Stakeholder Terkait		362.037.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	51.000.000,00							12 Laporan	78.037.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00							12 Laporan	284.000.000,00	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						51.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			78.037.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	51.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	78.037.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						80.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			284.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Baru Lapoa II O	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	284.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						135.840.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, dan Stakeholder Terkait		175.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah						135.840.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, dan Stakeholder Terkait		175.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	80.000.000,00							1 Unit	69.160.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	55.000.000,00							4 Unit	105.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	840.000,00							4 Unit	840.000,00	
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						55.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			105.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	55.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						840.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			840.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	840.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	840.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						80.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			69.160.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	69.160.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
147.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**260.325.000,00**								**850.972.000,00**	
		Meningkatnya Kesadaran Penduduk Terhadap Usia Ideal Perkawinan						***246.325.000,00***								***842.972.000,00***	
			999.Median Usia Kawin Pertama perempuan (MUKP) pada Kelompok Umur 25-49 Tahun	100 Tahun		100 Tahun	100 Tahun	246.325.000,00							100 Tahun	842.972.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						160.625.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, dan Stakeholder Terkait		553.826.100,00	
		Cakupan OPD yang terlibat dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)						160.625.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, dan Stakeholder Terkait		553.826.100,00	
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	500.000,00							1 Kegiatan	30.525.000,00	
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000,00							1 Kegiatan	1.000.000,00	
			Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	500.000,00							1 Perangkat Daerah	1.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Kegiatan	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			30.525.000,00	
		Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Kegiatan	30.525.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Perangkat Daerah	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						99.700.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, dan Stakeholder Terkait		297.145.900,00	
		Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten						99.700.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, dan Stakeholder Terkait		297.145.900,00	
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1 Dokumen	6.385.700,00	
			Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	7.103.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	27.600.000,00							11 Dokumen	132.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	500.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1 Dokumen	965.200,00	
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	1.000.000,00							11 Laporan	14.100.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00							1 Laporan	62.022.000,00	
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	106 Unit		106 Unit	106 Unit	1.000.000,00							106 Unit	500.000,00	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			62.022.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Laporan	62.022.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			6.385.700,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	6.385.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						27.600.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			132.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	27.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					11 Dokumen	132.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			14.100.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					11 Laporan	14.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mealui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000,00	
		Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	106 Unit		106 Unit	106 Unit	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					106 Unit	500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			965.200,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	965.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			7.103.000,00	
		Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	7.103.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Cakupan OPD yang terlibat dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)						160.625.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, dan Stakeholder Terkait		553.826.100,00	
			Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi tentang hasil analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	-		-	-	500.000,00							-	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	3.000.000,00							-	3.000.000,00	
			Jumlah indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah provinsi dan kabupaten/kota	-		-	-	1.000.000,00							-	1.000.000,00	
			Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	-		-	-	625.000,00							-	625.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	-		-	-	1.000.000,00							-	20.051.100,00	
			Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	-		-	-	500.000,00							-	2.000.000,00	
			Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi pemanfaatan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-		-	-	1.000.000,00							-	1.000.000,00	
			Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	150.000.000,00							-	346.500.000,00	
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri	-		-	-	1.000.000,00							-	145.125.000,00	
	2.14.02.2.01.0040	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas						625.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	-		-	1 Kampung KB	625.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0042	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						150.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			346.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	63 Kelompok	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	346.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0043	Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			145.125.000,00	
		Terwujudnya Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri	-		-	106 Kampung KB	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	145.125.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0050	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan antara tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan antara tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah provinsi dan kabupaten/kota	-		-	1 Indikator	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0051	Advokasi dan Sosialisasi tentang Hasil Analisis Dampak Kependudukan sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000,00	
		Terlaksananya advokasi dan sosialisasi tentang hasil analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi tentang hasil analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	-		-	1 Laporan / Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0052	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/KotaPengembangan media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.000.000,00	
		Tersedianya media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK).	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.02.2.01.0053	Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota						3.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pemanfaatan (PJPK) dan Rencana Aksi Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0054	Sosialisasi dan advokasi pemanfaatan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi dan advokasi pemanfaatan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang mendapatkan sosialisasi dan advokasi pemanfaatan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-		-	1 OPD	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0055	Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.051.100,00	
		Terlaksananya advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	-		-	11 Laporan / Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	20.051.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten						99.700.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, dan Stakeholder Terkait		297.145.900,00	
			Jumlah analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	-		-	-	1.000.000,00							-	1.000.000,00	
			Jumlah Data Parameter dan Proyeksi Kependudukan dalam Pembangunan Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	-		-	-	500.000,00							-	500.000,00	
			Jumlah dokumen pemanfaatan Sistem Peringatan Dini Dampak Kependudukan	-		-	-	500.000,00							-	5.870.000,00	
			Jumlah Kecamatan dan desa keluarhan yang memanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	-		-	-	500.000,00							-	1.000.000,00	
			Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	-	63.600.000,00							-	65.200.000,00	
	2.14.02.2.02.0029	Penyusunan Analisis Dampak Kependudukan sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Terlaksananya penyusunan analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Jumlah analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						63.600.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			65.200.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	11 Laporan	63.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	65.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0032	Penyediaan dan Pemanfaatan Data Parameter dan Proyeksi Kependudukan dalam Pembangunan Daerah tingkat Kabupaten/Kota						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			500.000,00	
		Jumlah Data Parameter dan Proyeksi Kependudukan dalam Pembangunan Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	Jumlah Data Parameter dan Proyeksi Kependudukan dalam Pembangunan Daerah tingkat Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	-		-	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0034	Pemanfaatan Sistem Peringatan Dini Dampak Kependudukan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.870.000,00	
		Terlaksananya pemanfaatan Sistem Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Jumlah dokumen pemanfaatan Sistem Peringatan Dini Dampak Kependudukan	-		-	1 Laporan / Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.870.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0035	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa keluarhan yang memanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	-		-	1 Laporan / Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
148.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**584.930.000,00**								**1.718.909.000,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Metode Kontrasepsi Modern						***576.930.000,00***								***1.709.534.000,00***	
			999.Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	63.40 %		57.40 %	58.90 %	576.930.000,00							60.40 %	1.709.534.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						208.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, dan Stakeholder Terkait		900.725.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						208.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, dan Stakeholder Terkait		900.725.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1 Dokumen	129.000.000,00	
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	625.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	165.000.000,00							11 Laporan	537.900.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	625.000,00	
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	500.000,00							11 Laporan	132.000.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	11 Organisasi		11 Organisasi	11 Organisasi	40.000.000,00							11 Organisasi	99.950.000,00	
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00							1 Unit	625.000,00	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Laporan	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Unit	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana						165.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			537.900.000,00	
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	165.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					11 Laporan	537.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			132.000.000,00	
		Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					11 Laporan	132.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			129.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Dokumen	129.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Dokumen	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						40.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			99.950.000,00	
		Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	11 Organisasi		11 Organisasi	11 Organisasi	40.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					11 Organisasi	99.950.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						81.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, Penyuluh/Petugas Lapangan KB, dan Stakeholder Terkait		267.250.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK						81.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, Penyuluh/Petugas Lapangan KB, dan Stakeholder Terkait		267.250.000,00	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	106 Orang		106 Orang	106 Orang	79.500.000,00							106 Orang	265.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	625.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	500.000,00							1 Organisasi	625.000,00	
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00							1 Unit	625.000,00	
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Unit	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						79.500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			265.375.000,00	
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	106 Orang		106 Orang	106 Orang	79.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					106 Orang	265.375.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Organisasi	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Laporan	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Cakupan fasilitas kesehatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB						295.930.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, Faskes, dan Stakeholder Terkait		550.934.000,00	
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00							1 Orang	625.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	625.000,00	
			Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000,00							1 Kegiatan	625.000,00	
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	625.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1329 Orang		1329 Orang	1329 Orang	265.230.000,00							1329 Orang	505.534.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00							1 Orang	625.000,00	
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00							1 Orang	625.000,00	
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00							1 Orang	625.000,00	
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00							1 Unit	625.000,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						265.230.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			505.534.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1329 Orang		1329 Orang	1329 Orang	265.230.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1329 Orang	505.534.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Laporan	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Dokumen	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Unit	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Orang	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Orang	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Orang	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Orang		1 Orang	1 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Orang	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Kegiatan	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						295.930.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, Faskes, dan Stakeholder Terkait		550.934.000,00	
		Cakupan fasilitas kesehatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB						295.930.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, Faskes, dan Stakeholder Terkait		550.934.000,00	
			Jumlah kesertaan KB Pascapersalinan	-		-	-	500.000,00							-	625.000,00	
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dan Jumlah Gerak Pelayanan bergerak/MUYAN	-		-	-	500.000,00							-	625.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	500.000,00							-	22.050.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	20.700.000,00							-	17.100.000,00	
	2.14.03.2.03.0028	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Tim Pelayanan KB Bergerak dan atau Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN))						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Terlaksananya dukungan operasional pelayanan KB Bergerak (Tim pelayanan KB Bergerak dan atau Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN))	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dan Jumlah Gerak Pelayanan bergerak/MUYAN	-		-	1 Layanan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						20.700.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			17.100.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	12 Laporan	20.700.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	17.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0032	Peningkatan kesertaan KB Pascapersalinan						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			625.000,00	
		Terlaksananya advokasi dukungan kebijakan pemerintah daerah terkait KB Pascapersalinan, promosi dan edukasi KB Pascapersalinan, koordinasi dan pelaksanaan pelayanan KB Pascapersalinan di fasilitas kesehatan, serta pemantauan dan evaluasi	Jumlah kesertaan KB Pascapersalinan	-		-	1 Laporan / Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			22.050.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	6 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	22.050.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
149.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**1.650.735.000,00**								**2.212.268.900,00**	
		Menurunnya Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15-19 Tahun						***1.643.235.000,00***								***2.204.268.900,00***	
			999.Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR)	100 Nilai		100 Nilai	100 Nilai	1.643.235.000,00							100 Nilai	2.204.268.900,00	
		Cakupan Desa/Kelurahan Yang Ikut Dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						19.035.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, dan Stakeholder Terkait		579.568.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	500.000,00							11 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	500.000,00							11 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	11 Orang		6 Orang	7 Orang	500.000,00							8 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	30 Orang		10 Orang	15 Orang	500.000,00							20 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	530 Kelompok		400 Kelompok	450 Kelompok	500.000,00							465 Kelompok	1.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	11 Keluarga		11 Keluarga	11 Keluarga	500.000,00							11 Keluarga	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	500.000,00							11 Laporan	30.837.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	500.000,00							5 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	106 Laporan		106 Laporan	106 Laporan	500.000,00							106 Laporan	318.000.000,00	
			Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	530 Orang		400 Orang	450 Orang	1.000.000,00							465 Orang	1.348.900,00	
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000.000,00							10 Unit	130.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	11 Keluarga		11 Keluarga	11 Keluarga	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					11 Keluarga	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			318.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	106 Laporan		106 Laporan	106 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					106 Laporan	318.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			130.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					10 Unit	130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			3.000.000,00	
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	30 Orang		10 Orang	15 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					20 Orang	3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.348.900,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	530 Orang		400 Orang	450 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					465 Orang	1.348.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					5 Laporan	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					11 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	11 Orang		6 Orang	7 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					8 Orang	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			30.837.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Laporan	30.837.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					11 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	530 Kelompok		400 Kelompok	11 Kelompok	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					465 Kelompok	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0029	Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Laporan	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						1.631.700.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, dan Stakeholder Terkait		1.632.700.000,00	
		Cakupan Kelompok Kemasyarakatan Yang Ikut Dalam Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						1.631.700.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, dan Stakeholder Terkait		1.632.700.000,00	
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	741 laporan		741 laporan	741 laporan	741.000.000,00							741 laporan	741.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00							1 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	1.500.000,00	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						741.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			741.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	741 laporan		741 laporan	741 laporan	741.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					741 laporan	741.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.14.04.2.02.0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Laporan	1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					1 Laporan	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						19.035.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, dan Stakeholder Terkait		579.568.900,00	
		Cakupan Desa/Kelurahan Yang Ikut Dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						19.035.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, dan Stakeholder Terkait		579.568.900,00	
			Jumlah Kelompok Kegiatan/Poktan atau setara Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan)	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah lansia yang menjadi anggota Sekolah Lansia di kelompok Bina Keluarga Lansia	-		-	-	500.000,00							-	2.162.500,00	
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	-	1.535.000,00							-	86.220.000,00	
	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)						1.535.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			86.220.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	11 Laporan / Dokumen	1.535.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	86.220.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0034	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.162.500,00	
		Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Jumlah lansia yang menjadi anggota Sekolah Lansia di kelompok Bina Keluarga Lansia	-		-	7 Kegiatan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	2.162.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0039	Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			1.000.000,00	
		Tersedianya biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan) bagi BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan/Poktan atau setara Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan)	-		-	373 Kelompok	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Cakupan Kelompok Kemasyarakatan Yang Ikut Dalam Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						1.631.700.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat, Desa/Kelurahan, dan Stakeholder Terkait		1.632.700.000,00	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	889.200.000,00							-	889.200.000,00	
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						889.200.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			889.200.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	741 Keluarga	889.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB					-	889.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN						**12.702.998.000,00**								**15.550.849.395,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.702.998.000,00**								**15.550.849.395,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**12.702.998.000,00**								**15.550.849.395,00**	
150.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.250.048.000,00**								**3.277.277.000,00**	
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien						***3.249.548.000,00***								***3.180.777.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	3.249.548.000,00							100 %	3.180.777.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.500.000,00						-		16.500.000,00	
		Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah						16.500.000,00						-		16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	11.000.000,00							5 Dokumen	11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.500.000,00							2 Laporan	5.500.000,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						11.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	11.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.410.418.000,00						-		2.396.927.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Persentase Pemenuhan Dokumen Adaministrasi Keuangan						2.410.418.000,00						-		2.396.927.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		28 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.410.418.000,00							31 Orang/bulan	2.396.927.000,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.410.418.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.396.927.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		28 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.410.418.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					31 Orang/bulan	2.396.927.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00						-		5.500.000,00	
		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00						-		5.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	500.000,00							15 Paket	5.500.000,00	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.500.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Paket	5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						94.500.000,00						-		94.500.000,00	
		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum dan Kepegawaian						94.500.000,00						-		94.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan		55 Laporan	55 Laporan	85.000.000,00							55 Laporan	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00							4 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	3.500.000,00							7 Paket	3.500.000,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	3.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Paket	3.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Paket	6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						85.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan		55 Laporan	55 Laporan	85.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					55 Laporan	85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						29.000.000,00						-		48.500.000,00	
		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						29.000.000,00						-		48.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	7.500.000,00							1 Unit	7.500.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00							Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	3 Unit	20.000.000,00							3 Unit	35.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	1.000.000,00							1 Unit	6.000.000,00	
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						7.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	7.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	3 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						609.130.000,00						-		585.350.000,00	
		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						609.130.000,00						-		585.350.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00							12 Laporan	37.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	565.580.000,00							12 Laporan	546.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan		155 Laporan	155 Laporan	1.550.000,00							155 Laporan	1.550.000,00	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.550.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.550.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan		155 Laporan	155 Laporan	1.550.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					155 Laporan	1.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			37.800.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	37.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						565.580.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			546.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	565.580.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	546.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.000.000,00						-		130.000.000,00	
		Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						90.000.000,00						-		130.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00							1 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	65.000.000,00							16 Unit	85.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00							1 Unit	30.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						65.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	65.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16 Unit	85.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
151.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**9.452.950.000,00**								**12.273.572.395,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat						***9.399.450.000,00***								***12.273.572.395,00***	
			999.Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	90 Persentase		35 Persentase	50 Persentase	9.399.450.000,00							65 Persentase	12.273.572.395,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						5.000.000,00						-		10.000.000,00	
		Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota yang tersusun						5.000.000,00						-		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	10.000.000,00	
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						9.225.000.000,00						-		11.401.760.800,00	
		Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia						9.225.000.000,00						-		11.401.760.800,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1700 Unit		1350 Unit	1500 Unit	9.075.000.000,00							1700 Unit	10.720.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit		35 Unit	40 Unit	150.000.000,00							40 Unit	681.760.800,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						9.075.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			10.720.000.000,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1700 Unit		1350 Unit	1500 Unit	9.075.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					1700 Unit	10.720.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						150.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			681.760.800,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit		35 Unit	40 Unit	150.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)					40 Unit	681.760.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						500.000,00						-		6.500.000,00	
		Persentase pengelolaan Terminal Type C sesuai standar						500.000,00						-		6.500.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00							1 Unit	6.500.000,00	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						500.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			6.500.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	6.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						75.000.000,00						-		111.000.000,00	
		Presentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum						75.000.000,00						-		111.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen		2000 Dokumen	2000 Dokumen	20.000.000,00							2000 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit		9 Unit	9 Unit	30.000.000,00							9 Unit	55.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.000.000,00							2 Unit	11.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang		2 Orang	2 Orang	15.000.000,00							2 Orang	20.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						10.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			11.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						15.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			20.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang		2 Orang	2 Orang	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Orang	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						20.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			25.000.000,00	
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen		2000 Dokumen	2000 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2000 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						30.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			55.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit		9 Unit	9 Unit	30.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9 Unit	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						94.450.000,00						-		546.061.595,00	
		Persentase Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						94.450.000,00						-		546.061.595,00	
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8 Laporan		4 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00							6 Laporan	3.740.595,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	59 Laporan		55 Laporan	55 Laporan	47.950.000,00							57 Laporan	76.321.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	19 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	45.000.000,00							17 Laporan	65.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	168 Dokumen		168 Dokumen	168 Dokumen	500.000,00							168 Dokumen	401.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						45.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			65.000.000,00	
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	19 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					17 Laporan	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						1.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			3.740.595,00	
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8 Laporan		4 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Laporan	3.740.595,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						500.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			401.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	168 Dokumen		168 Dokumen	168 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					168 Dokumen	401.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						47.950.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			76.321.000,00	
		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	59 Laporan		55 Laporan	55 Laporan	47.950.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					57 Laporan	76.321.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						1.000.000,00						-		31.000.000,00	
		Presentase Pengajuan Andalalin yang Disetujui						1.000.000,00						-		31.000.000,00	
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	1.000.000,00							2 Orang	31.000.000,00	
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin						1.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			31.000.000,00	
		Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Orang	31.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						2.000.000,00						-		14.000.000,00	
		Presentase Kelaikan Aspek LLAJ yang di Audit						2.000.000,00						-		14.000.000,00	
			Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang		2 Orang	2 Orang	1.000.000,00							2 Orang	13.000.000,00	
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5 Laporan		5 Laporan	6 Laporan	1.000.000,00							5 Laporan	1.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						1.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			1.000.000,00	
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5 Laporan		5 Laporan	6 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Laporan	1.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						1.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			13.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang		2 Orang	2 Orang	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Orang	13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						45.000.000,00						-		138.250.000,00	
		Persentase Layanan Angkutan Darat						45.000.000,00						-		138.250.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00							12 Laporan	138.250.000,00	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						45.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			138.250.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	138.250.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00						-		15.000.000,00	
		Rasio Ijin Trayek Angkutan Umum						5.000.000,00						-		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00							12 Dokumen	15.000.000,00	
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			15.000.000,00	
		Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**4.778.816.000,00**								**6.591.218.868,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.778.816.000,00**								**6.591.218.868,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**4.727.565.000,00**								**6.376.967.868,00**	
152.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.060.621.000,00**								**3.317.721.868,00**	
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien						***3.033.621.000,00***								***3.278.721.868,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	3.033.621.000,00							100 %	3.278.721.868,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.732.000,00						-		23.232.000,00	
		Tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah						20.732.000,00						-		23.232.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		10 Data	15 Data	2.000.000,00							20 Data	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00							2 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00							1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.732.000,00							4 Dokumen	5.232.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00							1 Laporan	3.000.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.732.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.232.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.732.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	5.232.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		10 Data	15 Data	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Data	1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.058.924.000,00						-		2.416.326.868,00	
		Cakupan Administrasi Keuangan						2.058.924.000,00						-		2.416.326.868,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00							1 Laporan	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	5.700.000,00							5 Laporan	3.700.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	385 Orang/bulan		330 Orang/bulan	350 Orang/bulan	2.051.224.000,00							367 Orang/bulan	2.405.626.868,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.051.224.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.405.626.868,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	385 Orang/bulan		330 Orang/bulan	350 Orang/bulan	2.051.224.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					367 Orang/bulan	2.405.626.868,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.700.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.700.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	5.700.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Laporan	3.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.500.000,00						-		1.500.000,00	
		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.500.000,00						-		1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	2.000.000,00							23 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000,00							1 Paket	500.000,00	
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						123.149.000,00						-		328.149.000,00	
		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah						123.149.000,00						-		328.149.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00							12 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	117.149.000,00							12 Laporan	317.149.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00							4 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00							4 Paket	2.000.000,00	
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Paket	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Paket	8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						117.149.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			317.149.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	117.149.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	317.149.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4.000.000,00						-		28.000.000,00	
		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4.000.000,00						-		28.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.000.000,00							1 Unit	14.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	2.000.000,00							3 Unit	14.000.000,00	
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	14.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	14.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						767.000.000,00						-		354.000.000,00	
		Cakupan Jassa Penunjang Pemerintah Daerah						767.000.000,00						-		354.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.000.000,00							12 Laporan	78.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	694.000.000,00							12 Laporan	266.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00							12 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00							12 Laporan	8.000.000,00	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						63.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			78.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	78.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						694.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			266.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	694.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	266.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						84.316.000,00						-		166.514.000,00	
		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						84.316.000,00						-		166.514.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	12.000.000,00							1 Unit	27.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		15 Unit	11 Unit	60.592.000,00							11 Unit	114.790.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	4.724.000,00							10 Unit	20.724.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00							1 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	3 Unit	2.000.000,00							3 Unit	2.000.000,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.592.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			114.790.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		15 Unit	11 Unit	60.592.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Unit	114.790.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.724.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.724.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	4.724.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	20.724.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						12.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			27.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	27.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	3 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
153.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**593.368.000,00**								**1.496.368.000,00**	
		Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah						***590.368.000,00***								***1.486.368.000,00***	
			999.Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100 %		91 %	92 %	590.368.000,00							95 %	1.486.368.000,00	
		Terlaksananya informasi dan komunikasi publik yang telah dikelolah						593.368.000,00						-		1.496.368.000,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00							3 Laporan	1.100.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						500.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.100.000.000,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Laporan	1.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						593.368.000,00						-		1.496.368.000,00	
		Terlaksananya informasi dan komunikasi publik yang telah dikelolah						593.368.000,00						-		1.496.368.000,00	
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	-	2.000.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	12.368.000,00							-	52.368.000,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	3.000.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	29.000.000,00							-	244.000.000,00	
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	3.000.000,00							-	2.000.000,00	
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
			Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	-	4.000.000,00							-	3.000.000,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	35.000.000,00							-	80.000.000,00	
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						35.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	60 %	35.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						12.368.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			52.368.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	36661 Orang	12.368.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	52.368.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0028	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat						4.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	50 %	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						3.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	26 Rekomendasi	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0030	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	4 Orang	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						3.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	3 Komunitas	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten						29.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			244.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	660 Konten	29.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	244.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
154.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**1.073.576.000,00**								**1.562.878.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika						***1.073.576.000,00***								***1.562.878.000,00***	
			999.Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	100 %		100 %	100 %	1.073.576.000,00							100 %	1.562.878.000,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000,00						-		17.000.000,00	
		Terlaksananya domain dan sub domain yang dikelolah						1.000.000,00						-		17.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00							10 Dokumen	17.000.000,00	
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			17.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Dokumen	17.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Terlaksananya aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan						1.072.576.000,00						-		1.545.878.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.235.000,00							1 Dokumen	5.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						13.235.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.235.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.072.576.000,00						-		1.545.878.000,00	
		Terlaksananya aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan						1.072.576.000,00						-		1.545.878.000,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	4.341.000,00							-	158.889.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	5.000.000,00							-	10.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	30.000.000,00							-	203.574.500,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	1.000.000.000,00							-	1.148.414.500,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	20.000.000,00							-	20.000.000,00	
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet						1.000.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.148.414.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	60 Titik	1.000.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	1.148.414.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						5.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						30.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			203.574.500,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	6 Layanan	30.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	203.574.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						20.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	60 Titik	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah						4.341.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			158.889.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	2 Aplikasi	4.341.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	158.889.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**27.000.000,00**								**96.000.000,00**	
155.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**27.000.000,00**								**96.000.000,00**	
		Tercapainya, Kolaborasi, Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)						***27.000.000,00***								***96.000.000,00***	
			999.Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan	100 %		100 %	100 %	27.000.000,00							100 %	96.000.000,00	
		Terlaksananya data statistik yang tersedia						27.000.000,00						-		96.000.000,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	1.000.000,00							3 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	1 Orang		1 Orang	1 Orang	9.000.000,00							1 Orang	7.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%		60 %	62 %	10.000.000,00							64 %	23.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	68 %		30 %	40 %	5.000.000,00							60 %	65.000.000,00	
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia						5.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	68 %		30 %	40 %	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60 %	65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral						10.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			23.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%		60 %	62 %	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					64 %	23.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						9.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	1 Orang		1 Orang	1 Orang	9.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Orang	7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral						1.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Laporan	1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						27.000.000,00						-		96.000.000,00	
		Terlaksananya data statistik yang tersedia						27.000.000,00						-		96.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	-	2.000.000,00							-	0,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	40 %	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**24.251.000,00**								**118.251.000,00**	
156.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**24.251.000,00**								**118.251.000,00**	
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah						***24.251.000,00***								***118.251.000,00***	
			999.Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	72 %		68 %	69 %	24.251.000,00							70 %	118.251.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						24.251.000,00						-		118.251.000,00	
		Terlaksananya perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian						24.251.000,00						-		118.251.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00							1 Laporan	8.000.000,00	
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						8.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Terlaksananya perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian						24.251.000,00						-		118.251.000,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	-	10.000.000,00							-	14.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	6.251.000,00							-	96.251.000,00	
	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.000.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	14.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						6.251.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			96.251.000,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	1 Laporan	6.251.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	96.251.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**2.718.695.000,00**								**3.236.714.724,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.718.695.000,00**								**3.236.714.724,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**2.718.695.000,00**								**3.236.714.724,00**	
157.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.408.022.500,00**								**2.866.582.724,00**	
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien						***2.408.022.500,00***								***2.866.582.724,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	2.408.022.500,00							100 %	2.866.582.724,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						26.701.000,00						Bidang Sekretariat		31.040.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						26.701.000,00						Bidang Sekretariat		31.040.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.090.000,00							2 Dokumen	8.230.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	6.500.000,00							4 Dokumen	7.752.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.698.000,00							2 Dokumen	8.658.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.413.000,00							1 Laporan	6.400.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.752.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	6.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	7.752.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						7.698.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.658.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.698.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	8.658.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						7.090.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.230.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.090.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	8.230.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.413.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.400.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.413.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	6.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.895.164.500,00						-		2.085.581.724,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.895.164.500,00						-		2.085.581.724,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.980.000,00							1 Laporan	5.810.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		20 Orang/bulan	21 Orang/bulan	1.889.184.500,00							22 Orang/bulan	2.079.771.724,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.889.184.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.079.771.724,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		20 Orang/bulan	23 Orang/bulan	1.889.184.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22 Orang/bulan	2.079.771.724,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.980.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.810.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.980.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	5.810.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						103.206.000,00						-		165.740.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						103.206.000,00						-		165.740.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.700.000,00							2 Laporan	8.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		11 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00							13 Laporan	153.060.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.506.000,00							4 Paket	4.080.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.506.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.080.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.506.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Paket	4.080.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						8.700.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.700.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	8.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			153.060.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		11 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13 Laporan	153.060.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						58.505.000,00						-		191.500.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						58.505.000,00						-		191.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		3 Unit	6 Unit	8.255.000,00							5 Unit	18.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	250.000,00							1 Unit	23.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		7 Unit	4 Unit	50.000.000,00							6 Unit	150.500.000,00	
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						250.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			23.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	250.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	23.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						8.255.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			18.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		3 Unit	6 Unit	8.255.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			150.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		7 Unit	4 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Unit	150.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						232.882.000,00						-		244.350.000,00	
		Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						232.882.000,00						-		244.350.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00							12 Laporan	74.075.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	171.382.000,00							12 Laporan	168.775.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140 Laporan		132 Laporan	134 Laporan	1.500.000,00							136 Laporan	1.500.000,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	140 Laporan		132 Laporan	134 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					136 Laporan	1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			74.075.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	74.075.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						171.382.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			168.775.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	171.382.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	168.775.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						91.564.000,00						-		148.371.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						91.564.000,00						-		148.371.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00							1 Unit	70.786.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		11 Unit	11 Unit	57.498.000,00							11 Unit	64.268.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		10 Unit	10 Unit	14.066.000,00							12 Unit	13.317.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						57.498.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			64.268.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		11 Unit	11 Unit	57.498.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Unit	64.268.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.066.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.317.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		10 Unit	10 Unit	14.066.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Unit	13.317.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			70.786.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	70.786.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
158.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**21.164.000,00**								**40.554.000,00**	
		Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi						***21.164.000,00***								***40.554.000,00***	
			999.Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	21.164.000,00							100 Persentase	40.554.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						10.164.000,00						Pelaku Usaha		13.519.000,00	
		Jumlah Perda yang Diterbitkan						10.164.000,00						Pelaku Usaha		13.519.000,00	
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.164.000,00							1 Dokumen	13.519.000,00	
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko						10.164.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.519.000,00	
		Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.164.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	13.519.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						11.000.000,00						-		27.035.000,00	
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah						11.000.000,00						-		27.035.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00							-	27.035.000,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	1.000.000,00							-	0,00	
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			27.035.000,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	27.035.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
159.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**39.436.000,00**								**32.354.000,00**	
		Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal						***39.436.000,00***								***32.354.000,00***	
			999.Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	0.67 Persentase		0.66 Persentase	0.66 Persentase	39.436.000,00							0.67 Persentase	32.354.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						39.436.000,00						Investor		32.354.000,00	
		Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota						39.436.000,00						Investor		32.354.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.436.000,00							1 Dokumen	32.354.000,00	
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00							Dokumen	0,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						19.436.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			32.354.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.436.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	32.354.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						20.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
160.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**198.664.500,00**								**232.749.000,00**	
		Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang Efisien dan Sesuai SOP						***198.664.500,00***								***232.749.000,00***	
			999.Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	198.664.500,00							100 %	232.749.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						198.664.500,00						Masyarakat		232.749.000,00	
		Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP						198.664.500,00						Masyarakat		232.749.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	16.560.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15 Pelaku Usaha		15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	9.532.500,00							15 Pelaku Usaha	8.432.500,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4800 Pelaku Usaha		4765 Pelaku Usaha	4770 Pelaku Usaha	166.628.000,00							4780 Pelaku Usaha	190.197.500,00	
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.560.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	16.560.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						166.628.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			190.197.500,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4800 Pelaku Usaha		4765 Pelaku Usaha	4770 Pelaku Usaha	166.628.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4780 Pelaku Usaha	190.197.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						9.532.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.432.500,00	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15 Pelaku Usaha		15 Pelaku Usaha	18 Pelaku Usaha	9.532.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Pelaku Usaha	8.432.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP						198.664.500,00						Masyarakat		232.749.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	17.504.000,00						-	17.559.000,00	
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						17.504.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			17.559.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	160 Kegiatan Usaha	17.504.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	17.559.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
161.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**35.984.000,00**								**41.795.000,00**	
		Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal						***35.984.000,00***								***41.795.000,00***	
			999.Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	100 %		100 %	100 %	35.984.000,00							100 %	41.795.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						35.984.000,00						Investor		41.795.000,00	
		Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal						35.984.000,00						Investor		41.795.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha		30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	20.000.000,00						30 Kegiatan Usaha	14.245.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	7.276.000,00						100 Pelaku Usaha	16.231.000,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						7.276.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.231.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	7.276.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100 Pelaku Usaha	16.231.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						20.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.245.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	30 Kegiatan Usaha		30 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30 Kegiatan Usaha	14.245.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal						35.984.000,00						Investor		41.795.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	8.708.000,00							-	11.319.000,00	
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						8.708.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.319.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	52 Kegiatan Usaha	8.708.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	11.319.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
162.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**15.424.000,00**								**22.680.000,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal						***15.424.000,00***								***22.680.000,00***	
			999.Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	100 %		100 %	100 %	15.424.000,00							100 %	22.680.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						15.424.000,00						Masyarakat		22.680.000,00	
		Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizina						15.424.000,00						Masyarakat		22.680.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	15.424.000,00							4 Dokumen	22.680.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						15.424.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			22.680.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	15.424.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	22.680.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN						**3.217.476.000,00**								**18.630.658.445,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.067.476.000,00**								**16.683.141.445,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**3.067.476.000,00**								**16.683.141.445,00**	
163.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.447.476.000,00**								**2.951.300.000,00**	
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien						***2.428.476.000,00***								***2.933.300.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	2.428.476.000,00							100 %	2.933.300.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.500.000,00						Organisasi Perangkat Daerah dan stake holder terkait		10.104.400,00	
		Terselenggaranya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.500.000,00						Organisasi Perangkat Daerah dan stake holder terkait		10.104.400,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000,00							4 Dokumen	10.104.400,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			10.104.400,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	10.104.400,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.927.394.000,00						Organisasi perangkat daerah, stakeholder terkait		2.495.365.350,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.927.394.000,00						Organisasi perangkat daerah, stakeholder terkait		2.495.365.350,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	8.000.000,00							4 Dokumen	19.630.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan		280 Orang/bulan	280 Orang/bulan	1.919.394.000,00							280 Orang/bulan	2.475.735.350,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.919.394.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			2.475.735.350,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan		280 Orang/bulan	280 Orang/bulan	1.919.394.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					280 Orang/bulan	2.475.735.350,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						8.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			19.630.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	19.630.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						128.000.000,00						Organisasi perangkat daerah dan Stakeholder terkait		264.125.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah						128.000.000,00						Organisasi perangkat daerah dan Stakeholder terkait		264.125.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00							4 Laporan	25.254.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00							4 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	14.000.000,00							4 Paket	18.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	14.000.000,00							4 Paket	20.871.000,00	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			20.871.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	14.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Paket	20.871.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			18.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	14.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Paket	18.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			25.254.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	25.254.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						80.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.500.000,00						Organisasi perangkat Daerah dan Stakeholder terkait		6.590.250,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.500.000,00						Organisasi perangkat Daerah dan Stakeholder terkait		6.590.250,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500.000,00							2 Unit	590.250,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5.000.000,00							2 Unit	6.000.000,00	
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			590.250,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	590.250,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	6.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						289.082.000,00						-		48.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						289.082.000,00						-		48.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	34.082.000,00							12 Laporan	18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	245.000.000,00							120 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00							4 Laporan	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00							4 Laporan	3.000.000,00	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	3.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						34.082.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	34.082.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	18.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.000.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			7.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	7.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						245.000.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	245.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120 Laporan	20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.000.000,00						-		127.115.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.000.000,00						-		127.115.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00							1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	60.000.000,00							3 Unit	62.565.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.000.000,00							3 Unit	14.550.000,00	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.000.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			62.565.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	11 Unit	60.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	62.565.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			14.550.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	14.550.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
164.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**110.000.000,00**								**6.530.000.000,00**	
		Meningkatnya Kapasitas Pemuda melalui Wirausaha Berbasis Budaya Lokal						***55.000.000,00***								***6.530.000.000,00***	
			999.Rasio Wirausaha Pemuda	0.10 Persentase		0.06 Persentase	0.09 Persentase	55.000.000,00							0.09 Persentase	6.530.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						50.000.000,00						Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Stakeholder terkait		5.500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan penyadaran,pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan						50.000.000,00						Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Stakeholder terkait		5.500.000.000,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	25.000.000,00							-	500.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	25.000.000,00							-	5.000.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota						25.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			500.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	4 Orang	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota						25.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	110 Orang	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00						-		1.030.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan						60.000.000,00						-		1.030.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	30.000.000,00							-	30.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						30.000.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	5 Organisasi	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota						30.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			30.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Organisasi	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
165.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**500.000.000,00**								**7.101.841.445,00**	
		Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga						***484.000.000,00***								***6.996.841.445,00***	
			999.Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	16 Persentase		8 Persentase	10 Persentase	484.000.000,00							11 Persentase	6.996.841.445,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						27.500.000,00						-		450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00							2 Dokumen	100.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat						1.000.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			100.000.000,00	
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00						Masyarakat, Organisasi Keolahragaan dan Stake holder terkait		4.941.841.445,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00						Masyarakat, Organisasi Keolahragaan dan Stake holder terkait		4.941.841.445,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	50.000.000,00							-	4.941.841.445,00	
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			4.941.841.445,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	7 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	4.941.841.445,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00						-		650.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00						-		650.000.000,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	5.000.000,00							-	150.000.000,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	5.000.000,00							-	500.000.000,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						5.000.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			500.000.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	100 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota						5.000.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			150.000.000,00	
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	3 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						12.500.000,00						-		60.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						12.500.000,00						-		60.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	2.500.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
	2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						5.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	1 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota						2.500.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Orang	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.03.0015	Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah						5.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						400.000.000,00						-		1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						400.000.000,00						-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	400.000.000,00							-	1.000.000.000,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						400.000.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			1.000.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	3 Kerja Sama	400.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						27.500.000,00						-		450.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						27.500.000,00						-		450.000.000,00	
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	-		-	-	1.000.000,00							-	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	-	25.500.000,00							-	250.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0011	Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota						1.000.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			100.000.000,00	
		Terlaksana Pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Olahraga Wisata di tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Lembaga	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.05.0012	Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat						25.500.000,00			-	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			250.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemasalan Olahraga di Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	2 Orang	25.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
166.	2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**10.000.000,00**								**100.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kepramukaan						***5.000.000,00***								***50.000.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	97 Persentase		85 Persentase	87 Persentase	5.000.000,00							90 Persentase	50.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						10.000.000,00						Organisasi Pramuka dan Stakeholder terkait		100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						10.000.000,00						Organisasi Pramuka dan Stakeholder terkait		100.000.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-		-	-	5.000.000,00							-	50.000.000,00	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	-		-	-	5.000.000,00							-	50.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0011	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	-		-	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.04.2.01.0013	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			50.000.000,00	
		Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-		-	2 Organisasi	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**150.000.000,00**								**1.947.517.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**150.000.000,00**								**1.947.517.000,00**	
167.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**60.000.000,00**								**1.025.000.000,00**	
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata						***35.000.000,00***								***505.000.000,00***	
			999.Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	27 Persentase		10 Persentase	15 Persentase	35.000.000,00							22 Persentase	505.000.000,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						45.000.000,00						Masyarakat dan Stakeholder terkait		1.010.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						45.000.000,00						Masyarakat dan Stakeholder terkait		1.010.000.000,00	
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	5.000.000,00							2 Lokasi	500.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00							1 Unit	500.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						5.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Lokasi	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						30.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			500.000.000,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
			-	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						5.000.000,00						-		5.000.000,00	
		-						5.000.000,00						-		5.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						5.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	-		-	1 Lokasi	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						5.000.000,00						-		5.000.000,00	
		-						5.000.000,00						-		5.000.000,00	
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						5.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-		-	1 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						45.000.000,00						Masyarakat dan Stakeholder terkait		1.010.000.000,00	
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						5.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	-		-	1 Lokasi	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						5.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00						-		5.000.000,00	
		-						5.000.000,00						-		5.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha						5.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	1 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
168.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**52.000.000,00**								**587.517.000,00**	
		Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata						***52.000.000,00***								***587.517.000,00***	
			999.Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	40 Persentase		25 Persentase	30 Persentase	52.000.000,00							35 Persentase	587.517.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						52.000.000,00						Masyarakat dan Stakeholder terkait		587.517.000,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						52.000.000,00						Masyarakat dan Stakeholder terkait		587.517.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi		3 Promosi	3 Promosi	7.000.000,00							3 Promosi	87.517.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	45.000.000,00							2 Kegiatan	500.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						45.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			500.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	45.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Kegiatan	500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						7.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			87.517.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi		3 Promosi	3 Promosi	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Promosi	87.517.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
169.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**35.000.000,00**								**35.000.000,00**	
			-	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00						-		5.000.000,00	
		-						5.000.000,00						-		5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif						5.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	-		-	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						30.000.000,00						-		30.000.000,00	
		-						30.000.000,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	-		-	-	5.000.000,00							-	5.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan						5.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif						5.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah						5.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	-		-	1 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual						5.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	-		-	1 Kegiatan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.04.2.02.0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah						5.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	-		-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual						5.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	-		-	1 Produk	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
170.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**3.000.000,00**								**300.000.000,00**	
		Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat						***3.000.000,00***								***300.000.000,00***	
			1.Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	1.09 Persentase		0.47 Persentase	0.63 Persentase	3.000.000,00							0.78 Persentase	300.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						3.000.000,00						Masyarakat dan stakeholder terkait		300.000.000,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						3.000.000,00						Masyarakat dan stakeholder terkait		300.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	20 Orang		20 Orang	20 Orang	1.000.000,00							20 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200 Orang		200 Orang	200 Orang	2.000.000,00							200 Orang	200.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			200.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200 Orang		200 Orang	200 Orang	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200 Orang	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			100.000.000,00	
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	20 Orang		20 Orang	20 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Orang	100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**3.269.058.000,00**								**6.838.576.079,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.269.058.000,00**								**6.838.576.079,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**3.197.058.000,00**								**6.713.576.079,00**	
171.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.807.513.000,00**								**3.143.576.079,00**	
		Meningkatnya Layanan Administrasi dan Keuangan Perangkat Daerah						***2.768.513.000,00***								***3.110.576.079,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	2.768.513.000,00							100 %	3.110.576.079,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.668.000,00						ASN		8.200.000,00	
		Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran						14.668.000,00						ASN		8.200.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00							1 Dokumen	1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00							2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00							1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00							1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.568.000,00							1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00							1 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00							1 Laporan	1.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.568.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.568.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.100.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.252.593.000,00						ASN		2.390.656.079,00	
		Cakupan Layananan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.252.593.000,00						ASN		2.390.656.079,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00							1 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00							12 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.249.593.000,00							12 Orang/bulan	2.387.656.079,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.249.593.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.387.656.079,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	308 Orang/bulan	2.249.593.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Orang/bulan	2.387.656.079,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00						ASN		1.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						1.000.000,00						ASN		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00							1 Laporan	1.000.000,00	
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9.000.000,00						ASN		9.000.000,00	
		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9.000.000,00						ASN		9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00							4 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00							12 Dokumen	4.000.000,00	
	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						4.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						115.605.000,00						ASN		157.000.000,00	
		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						115.605.000,00						ASN		157.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00							12 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00							12 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.964.000,00							12 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	99.641.000,00							12 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	8 Paket	5.000.000,00							6 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		6 Paket	8 Paket	3.000.000,00							8 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	8 Paket	3.000.000,00							8 Paket	4.000.000,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	8 Paket	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Paket	3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		6 Paket	8 Paket	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Paket	3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		5 Paket	8 Paket	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Paket	4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.964.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.964.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						99.641.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	99.641.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00						ASN		30.000.000,00	
		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah						50.000.000,00						ASN		30.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	1 Unit	50.000.000,00							4 Unit	30.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		2 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						266.727.000,00						ASN		336.000.000,00	
		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						266.727.000,00						ASN		336.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	145.000.000,00							12 Laporan	195.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	118.727.000,00							12 Laporan	138.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00							12 Laporan	3.000.000,00	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						145.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			195.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	145.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	195.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						118.727.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			138.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	118.727.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	138.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						97.920.000,00						ASN		211.720.000,00	
		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						97.920.000,00						ASN		211.720.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.000.000,00							2 Unit	61.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	10.000.000,00							9 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	70.920.000,00							9 Unit	70.920.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.000.000,00							10 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	2.000.000,00							10 Unit	44.800.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						70.920.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			70.920.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	70.920.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9 Unit	70.920.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9 Unit	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			44.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	44.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			61.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	61.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
172.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**364.545.000,00**								**3.500.000.000,00**	
		Meningkatnya Akses Layanan Perpustakaan yang Berkualitas						***274.545.000,00***								***3.415.000.000,00***	
			999.Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	74,48 %		70,48 %	71,48 %	274.545.000,00							72,48 %	3.415.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						186.000.000,00						Siswa, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat pada umumnya		1.070.000.000,00	
		Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat						186.000.000,00						Siswa, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat pada umumnya		1.070.000.000,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar		1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	10.000.000,00							1000 Eksemplar	700.000.000,00	
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00							1 Dokumen	20.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar		500 Eksemplar	Eksemplar	20.000.000,00							Eksemplar	15.000.000,00	
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	300 Eksemplar		100 Eksemplar	150 Eksemplar	76.000.000,00							200 Eksemplar	150.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00							1 Perpustakaan	20.000.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	0,00							1 Layanan	45.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan		25 Perpustakaan	30 Perpustakaan	10.000.000,00							30 Perpustakaan	30.000.000,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	19 Perpustakaan		19 Perpustakaan	19 Perpustakaan	10.000.000,00							19 Perpustakaan	30.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	22 Perpustakaan		22 Perpustakaan	22 Perpustakaan	15.000.000,00							22 Perpustakaan	15.000.000,00	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102 Orang		102 Orang	102 Orang	20.000.000,00							102 Orang	40.000.000,00	
			Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	5.000.000,00							Dokumen	5.000.000,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan		25 Perpustakaan	30 Perpustakaan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30 Perpustakaan	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	22 Perpustakaan		22 Perpustakaan	22 Perpustakaan	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22 Perpustakaan	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			45.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	0,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Layanan	45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			30.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	19 Perpustakaan		19 Perpustakaan	19 Perpustakaan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19 Perpustakaan	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat						20.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar		500 Eksemplar	100 Eksemplar	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Eksemplar	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			5.000.000,00	
		Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			40.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102 Orang		102 Orang	102 Orang	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					102 Orang	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						20.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			700.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar		1000 Eksemplar	100 Eksemplar	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1000 Eksemplar	700.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota						76.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			150.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	300 Eksemplar		100 Eksemplar	150 Eksemplar	76.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					200 Eksemplar	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Perpustakaan	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						178.545.000,00						Siswa, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat pada Umumnya		2.430.000.000,00	
		Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca dan Peningkatan Literasi						178.545.000,00						Siswa, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat pada Umumnya		2.430.000.000,00	
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	11 Orang		11 Orang	11 Orang	15.000.000,00							11 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	22 Perpustakaan		20 Perpustakaan	21 Perpustakaan	15.000.000,00							21 Perpustakaan	50.000.000,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	11 Lokus		11 Lokus	11 Lokus	75.000.000,00							11 Lokus	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	11 Orang		11 Orang	11 Orang	73.545.000,00							11 Orang	140.000.000,00	
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00							1 Perpustakaan	2.020.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	11 Orang		11 Orang	11 Orang	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Orang	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	22 Perpustakaan		20 Perpustakaan	21 Perpustakaan	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21 Perpustakaan	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			2.020.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Perpustakaan	2.020.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						73.545.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			140.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	11 Orang		11 Orang	11 Orang	73.545.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Orang	140.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						75.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			200.000.000,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	11 Lokus		11 Lokus	11 Lokus	75.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Lokus	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
173.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**25.000.000,00**								**70.000.000,00**	
		Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno						***25.000.000,00***								***70.000.000,00***	
			999.Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	25.000.000,00							100 Persentase	70.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00						Masyarakat pada umumnya		70.000.000,00	
		Persentase Naskah Kuno Milik yang Dilestarikan						25.000.000,00						Masyarakat pada umumnya		70.000.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	8 Orang		6 Orang	6 Orang	20.000.000,00							8 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	35 Eksemplar		26 Eksemplar	30 Eksemplar	5.000.000,00							30 Eksemplar	20.000.000,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						20.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	8 Orang		6 Orang	6 Orang	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Orang	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						5.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	35 Eksemplar		26 Eksemplar	2 Eksemplar	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30 Eksemplar	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**72.000.000,00**								**125.000.000,00**	
174.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**72.000.000,00**								**100.000.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis						***57.000.000,00***								***75.000.000,00***	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			999.Tingkat Ketersediaan Arsip	80 Persentase		80 Persentase	80 Persentase	57.000.000,00							80 Persentase	75.000.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00						Masyarakat		35.000.000,00	
		Persentase Arsip Aktif dan Inaktif yang telah dibuatkan Daftar Arsip						30.000.000,00						Masyarakat		35.000.000,00	
			Jumlah arsiparis	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00							4 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00							1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	100 Berkas		100 Berkas	100 Berkas	15.000.000,00							100 Berkas	5.000.000,00	
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	100 Berkas		100 Berkas	100 Berkas	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100 Berkas	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0006	Penyusunan Database Arsiparis						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00						Masyarakat		10.000.000,00	
		Perentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Daftar Sarana Temu Balik						10.000.000,00						Masyarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	250 Arsip		50 Arsip	100 Arsip	10.000.000,00							150 Arsip	5.000.000,00	
			Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00							1 Dokumen	5.000.000,00	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	250 Arsip		50 Arsip	100 Arsip	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150 Arsip	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0005	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						32.000.000,00						Masyarakat dan ASN		55.000.000,00	
		Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN						32.000.000,00						Masyarakat dan ASN		55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	0,00							100 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna		10 Pengguna	10 Pengguna	32.000.000,00							10 Pengguna	5.000.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						32.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna		10 Pengguna	42 Pengguna	32.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Pengguna	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	0,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
175.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**0,00**								**15.000.000,00**	
		Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK						***0,00***								***15.000.000,00***	
			999.Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	50 Persentase		50 Persentase	50 Persentase	0,00							50 Persentase	15.000.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						0,00						-		10.000.000,00	
		Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip dengan NSPK						0,00						-		10.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 Arsip		10 Arsip	10 Arsip	0,00							10 Arsip	10.000.000,00	
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						0,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10 Arsip		10 Arsip	10 Arsip	0,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Arsip	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota						0,00						ASN DAN MASYARAKAT		5.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tingkat Kesesuaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana dengan NSPK						0,00						ASN DAN MASYARAKAT		5.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 Arsip		10 Arsip	10 Arsip	0,00							10 Arsip	5.000.000,00	
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 Arsip		10 Arsip	10 Arsip	0,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Arsip	5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
176.	2.24.04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**						**0,00**								**10.000.000,00**	
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup						***0,00***								***10.000.000,00***	
			999.Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	70 Persentase		30 Persentase	40 Persentase	0,00							50 Persentase	10.000.000,00	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota						0,00						ASN DAN MASYARAKAT		10.000.000,00	
		Cakupan Layanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup						0,00						ASN DAN MASYARAKAT		10.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	10 Arsip		10 Arsip	10 Arsip	0,00							10 Arsip	10.000.000,00	
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup						0,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	10 Arsip		10 Arsip	10 Arsip	0,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Arsip	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN						**9.603.311.000,00**								**12.361.402.657,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**9.603.311.000,00**								**12.361.402.657,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**9.143.311.000,00**								**11.054.941.890,00**	
177.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.203.311.000,00**								**9.849.941.890,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan						***8.193.311.000,00***								***9.819.941.890,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	8.193.311.000,00							100 %	9.819.941.890,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.000.000,00						-		16.000.000,00	
		Tingkat Ketepatan Waktu pelpaoran Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah						22.000.000,00						-		16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	17.000.000,00							6 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00							5 Laporan	6.000.000,00	
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						17.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Laporan	6.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.318.511.000,00						-		9.413.176.890,00	
		Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.318.511.000,00						-		9.413.176.890,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00							12 Laporan	800.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2555 Orang/bulan		1582 Orang/bulan	1788 Orang/bulan	7.310.511.000,00							2020 Orang/bulan	9.412.376.890,00	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.310.511.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			9.412.376.890,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2555 Orang/bulan		1582 Orang/bulan	1788 Orang/bulan	7.310.511.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2020 Orang/bulan	9.412.376.890,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						8.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			800.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	800.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						212.000.000,00						-		105.000.000,00	
		Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						212.000.000,00						-		105.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00							12 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	200.000.000,00							150 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket		50 Paket	40 Paket	5.000.000,00							40 Paket	40.000.000,00	
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			40.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket		50 Paket	10 Paket	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					40 Paket	40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	200 Laporan	200.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					150 Laporan	60.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00						-		20.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00						-		20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	50.000.000,00							10 Unit	20.000.000,00	
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						497.300.000,00						-		211.265.000,00	
		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						497.300.000,00						-		211.265.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.000.000,00							12 Laporan	51.265.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	427.300.000,00							12 Laporan	155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00							12 Laporan	5.000.000,00	
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						68.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			51.265.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	51.265.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						427.300.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			155.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	427.300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	155.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						103.500.000,00						-		84.500.000,00	
		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Deaerah						103.500.000,00						-		84.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.000.000,00							1 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	52.500.000,00							3 Unit	52.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		10 Unit	15 Unit	5.000.000,00							15 Unit	7.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	20.000.000,00							7 Unit	20.000.000,00	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						52.500.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			52.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	52.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	52.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		10 Unit	8 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Unit	7.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						26.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Unit	20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
178.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**505.000.000,00**								**380.000.000,00**	
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap						***505.000.000,00***								***380.000.000,00***	
			999.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2628.46 Ton		2428.29 Ton	2476.86 Ton	505.000.000,00							2526.4 Ton	380.000.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						315.000.000,00						Masyarakat Perikanan Tangkap		335.000.000,00	
		Persentase Produksi Perikanan Tangkap						315.000.000,00						Masyarakat Perikanan Tangkap		335.000.000,00	
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	15 Unit		15 Unit	15 Unit	165.000.000,00							15 Unit	335.000.000,00	
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						165.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			335.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	15 Unit		15 Unit	15 Unit	165.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Unit	335.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil						190.000.000,00						Kelompok Nelayan Kecil		45.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang		40 Orang	40 Orang	40.000.000,00							40 Orang	45.000.000,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						40.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			45.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang		40 Orang	20 Orang	40.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					40 Orang	45.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		Persentase Produksi Perikanan Tangkap						315.000.000,00						Masyarakat Perikanan Tangkap		335.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-		-	-	150.000.000,00							-	0,00	
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						150.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-		-	10 Unit	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						190.000.000,00						Kelompok Nelayan Kecil		45.000.000,00	
		Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil						190.000.000,00						Kelompok Nelayan Kecil		45.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	-		-	-	100.000.000,00							-	0,00	
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						50.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-		-	12 Kelompok	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil						100.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	-		-	12 Unit	100.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
179.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**300.000.000,00**								**790.000.000,00**	
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya						***300.000.000,00***								***790.000.000,00***	
			999.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1397.32 Ton		1290.91 Ton	1316.72 Ton	300.000.000,00							1343.06 Ton	790.000.000,00	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						300.000.000,00						Kelompok Pembudidaya Ikan		790.000.000,00	
		Persentase Produksi Perikanan Budidaya						300.000.000,00						Kelompok Pembudidaya Ikan		790.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit		2 Unit	2 Unit	150.000.000,00							2 Unit	440.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100.000.000,00							5 Unit	350.000.000,00	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			440.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit		2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	440.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00			6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			350.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	350.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		Persentase Produksi Perikanan Budidaya						300.000.000,00						Kelompok Pembudidaya Ikan		790.000.000,00	
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						50.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	
		Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	-		-	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
180.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**85.000.000,00**								**35.000.000,00**	
		Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati						***85.000.000,00***								***35.000.000,00***	
			999.Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	83 %		75 %	77 %	85.000.000,00							79 %	35.000.000,00	
		Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan						85.000.000,00						-		35.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	415 Pelaku Usaha		415 Pelaku Usaha	415 Pelaku Usaha	5.000.000,00							415 Pelaku Usaha	35.000.000,00	
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						5.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			35.000.000,00	
		Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	415 Pelaku Usaha		415 Pelaku Usaha	415 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					415 Pelaku Usaha	35.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						85.000.000,00						-		35.000.000,00	
		Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan						85.000.000,00						-		35.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	-	30.000.000,00							-	0,00	
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						50.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	10 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						30.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	
		Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	-		-	10 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
181.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**50.000.000,00**								**0,00**	
		-	-	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						50.000.000,00						-		0,00	
		-						50.000.000,00						-		0,00	
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	-	50.000.000,00							-	0,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						50.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	12 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**460.000.000,00**								**1.306.460.767,00**	
182.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**355.000.000,00**								**1.000.000.000,00**	
		Tersedianya Sarana Pertanian Berkualitas dengan Distribusi Merata						***205.000.000,00***								***1.000.000.000,00***	
			999.Jumlah Produksi Daging	3733931 Kg		3164073 Kg	3270129 Kg	205.000.000,00							3381264 Kg	1.000.000.000,00	
			999.Jumlah Produksi Telur	56560490 Kg		47989756 Kg	49586632 Kg	205.000.000,00							51243987 Kg	1.000.000.000,00	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00						-		57.000.000,00	
		Persentase Akseptor Yang Dilayani						50.000.000,00						-		57.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00							12 Dokumen	57.000.000,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						50.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			57.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	57.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00						-		17.000.000,00	
		Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak						5.000.000,00						-		17.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00							12 Laporan	17.000.000,00	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						5.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			17.000.000,00	
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	17.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						300.000.000,00						-		926.000.000,00	
		Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						300.000.000,00						-		926.000.000,00	
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5000 Dosis		4500 Dosis	4500 Dosis	150.000.000,00							4500 Dosis	426.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5500 Ekor		4000 Ekor	4000 Ekor	150.000.000,00							4500 Ekor	500.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						150.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			500.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5500 Ekor		4000 Ekor	4000 Ekor	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					4500 Ekor	500.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						150.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			426.000.000,00	
		Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5000 Dosis		4500 Dosis	4500 Dosis	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					4500 Dosis	426.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
183.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**65.000.000,00**								**241.460.767,00**	
		Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner						***65.000.000,00***								***241.460.767,00***	
			999.Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	21 %		21 %	21 %	65.000.000,00							21 %	241.460.767,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00						-		198.460.767,00	
		Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis						40.000.000,00						-		198.460.767,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00							12 Laporan	198.460.767,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			198.460.767,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	198.460.767,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						25.000.000,00						-		43.000.000,00	
		Persentase penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner						25.000.000,00						-		43.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00							12 Laporan	18.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	5 Unit Usaha		5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	15.000.000,00							5 Unit Usaha	25.000.000,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						10.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			18.000.000,00	
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	18.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan						15.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			25.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	5 Unit Usaha		5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit Usaha	25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
184.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**14.000.000,00**								**10.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian						***14.000.000,00***								***10.000.000,00***	
			999.Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	100 %		100 %	100 %	14.000.000,00							100 %	10.000.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						14.000.000,00						-		10.000.000,00	
		Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan						14.000.000,00						-		10.000.000,00	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.000.000,00							1 Laporan	10.000.000,00	
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						14.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			10.000.000,00	
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
185.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**26.000.000,00**								**55.000.000,00**	
		Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Dan Kelompok Tani						***13.000.000,00***								***55.000.000,00***	
			999.Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak	1:21 Rasio		1:19 Rasio	1:21 Rasio	13.000.000,00							1:20 Rasio	55.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						26.000.000,00						-		55.000.000,00	
		Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak						26.000.000,00						-		55.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	13.000.000,00							-	30.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	13.000.000,00							-	25.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						13.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			30.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	11 Unit	13.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						13.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			25.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	1341 Unit	13.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	25.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						**5.232.403.000,00**								**6.845.466.384,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**5.232.403.000,00**								**6.845.466.384,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**5.101.798.000,00**								**5.552.266.384,00**	
186.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.589.759.500,00**								**4.852.266.384,00**	
		Terwujudnya Dukungan Administratif dan Operasional yang Efektif dan Efisien dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah						***4.569.759.500,00***								***4.739.266.384,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	4.569.759.500,00							100 %	4.739.266.384,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.000.000,00						-		15.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan perangkat daerah						19.000.000,00						-		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00							1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00							3 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00							2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00							2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00							1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00							4 Laporan	2.000.000,00	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	4.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	2.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.043.875.000,00						-		3.844.651.384,00	
		Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						4.043.875.000,00						-		3.844.651.384,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00							1 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348 Orang/bulan		348 Orang/bulan	348 Orang/bulan	4.041.375.000,00							348 Orang/bulan	3.842.651.384,00	
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.041.375.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.842.651.384,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348 Orang/bulan		348 Orang/bulan	29/12 Orang/bulan	4.041.375.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					348 Orang/bulan	3.842.651.384,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	2.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						113.452.500,00						-		290.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perangkat daerah secara tertib, efektif dan efisien						113.452.500,00						-		290.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	83.452.500,00							50 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	10.000.000,00							20 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	20.000.000,00							20 Paket	20.000.000,00	
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	3 Paket	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Paket	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	10 Paket	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Paket	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						83.452.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	83.452.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50 Laporan	250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						11.522.000,00						-		50.000.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara tertib dan efektif						11.522.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	11.522.000,00							10 Unit	50.000.000,00	
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.522.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	20 Unit	11.522.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						301.600.000,00						-		542.615.000,00	
		Tersedianya jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien						301.600.000,00						-		542.615.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	115.000.000,00							12 Laporan	94.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	186.000.000,00							12 Laporan	447.715.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000,00							1 Laporan	900.000,00	
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						600.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			900.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	900.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						115.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			94.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	15 Laporan	115.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	94.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						186.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			447.715.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	10 Laporan	186.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	447.715.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.310.000,00						-		110.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah secara berkala dan optimal						100.310.000,00						-		110.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00							1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	48.688.000,00							18 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	11.340.000,00							1 Unit	20.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	15.000.000,00							10 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	15.282.000,00							5 Unit	15.000.000,00	
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						11.340.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	11.340.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						48.688.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		18 Unit	14 Unit	48.688.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Unit	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	5 Unit	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.282.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksanariya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	10 Unit	15.282.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksanariya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
187.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**400.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	200.000,00							-	0,00	
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						200.000,00						-		0,00	
		-						200.000,00						-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-		-	-	200.000,00							-	0,00	
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)						200.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-		-	1 Laporan	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)						200.000,00						-		0,00	
		-						200.000,00						-		0,00	
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	-		-	-	200.000,00							-	0,00	
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA						200.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	
		Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	-		-	1 Dokumen	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
188.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**300.000.000,00**								**400.000.000,00**	
		Tersedianya Sarana Perdagangan yang Efisien dan Terintegrasi						***300.000.000,00***								***400.000.000,00***	
			999.Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya	18.75 %		18.75 %	18.75 %	300.000.000,00							18.75 %	400.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						300.000.000,00						-		400.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan sarana distribusi perdagangan						300.000.000,00						-		400.000.000,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	300.000.000,00							3 Unit	400.000.000,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						300.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit		3 Unit	5 Unit	300.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
189.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**146.273.500,00**								**200.000.000,00**	
		Tercapainya Stabilitas Harga Barang Pokok melalui Pengawasan yang Efektif						***146.273.500,00***								***110.000.000,00***	
			999.Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	100 %		100 %	100 %	146.273.500,00							100 %	110.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						20.952.500,00						-		40.000.000,00	
		Terselenggaranya kegiatan pemantauan dan pengawasan stok serta distribusi barang kebutuhan pokok dan penting (Bapokting)						20.952.500,00						-		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	952.500,00							1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00							12 Laporan	20.000.000,00	
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						952.500,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	952.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						20.000.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						113.338.000,00						-		90.000.000,00	
		Terlaksananya intervensi pasar (operasi pasar, pasar murah) pada saat terjadi gejolak harga						113.338.000,00						-		90.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	95.589.000,00							11 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	728.000,00							1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.021.000,00							1 Laporan	20.000.000,00	
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						17.021.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.021.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						728.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan		1 Laporan	48 Laporan	728.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						95.589.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	11 Laporan		11 Laporan	1 Laporan	95.589.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						11.983.000,00						-		70.000.000,00	
		Tersusunnya laporan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai alokasi dan kebutuhan						11.983.000,00						-		70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	658.500,00							1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	587.500,00							1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.737.000,00							1 Laporan	30.000.000,00	
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan						658.500,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			10.000.000,00	
		Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	658.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						587.500,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	587.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						10.737.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.737.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
190.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**400.000,00**								**0,00**	
			-	-		-	-	200.000,00							-	0,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						400.000,00						-		0,00	
		-						400.000,00						-		0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	-		-	-	200.000,00							-	0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	-		-	-	200.000,00							-	0,00	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional						200.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	-		-	10 Pelaku Usaha	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						200.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	-		-	3 Pelaku Usaha	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
191.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**64.965.000,00**								**100.000.000,00**	
		Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk						***64.965.000,00***								***50.000.000,00***	
			999.Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) berbanda tera sah yang berlaku	100.00 %		88.00 %	90.00 %	64.965.000,00							93.00 %	50.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						64.965.000,00						-		100.000.000,00	
		Terlaksananya pelayanan tera, tera ulang, dan pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan metrologi legal						64.965.000,00						-		100.000.000,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1952 Unit		1742 Unit	1793 Unit	31.055.500,00							1845 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	25 Orang		25 Orang	25 Orang	33.909.500,00							25 Orang	50.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						31.055.500,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1952 Unit		1742 Unit	1742 Unit	31.055.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1845 Unit	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						33.909.500,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			50.000.000,00	
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	25 Orang		25 Orang	25 Orang	33.909.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25 Orang	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**130.605.000,00**								**1.293.200.000,00**	
192.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**100.205.000,00**								**1.218.200.000,00**	
		Terwujudnya Perkembangan Industri Lokal yang Kompetitif						***100.205.000,00***								***1.218.200.000,00***	
			999.Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	5 %		5 %	5 %	100.205.000,00							5 %	1.218.200.000,00	
		Tersusunnya dokumen rencana pembangunan industri kabupaten/kota serta terlaksananya evaluasi secara berkala guna mendukung arah pengembangan sektor industri yang terarah dan berkelanjutan						100.205.000,00						-		1.218.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.370.000,00							1 Dokumen	527.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.036.000,00							1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.599.000,00							1 Dokumen	361.200.000,00	
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						38.036.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			300.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.036.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						27.370.000,00			-	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			527.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.370.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	527.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						4.599.000,00			-	-	-			361.200.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.599.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	361.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						100.205.000,00						-		1.218.200.000,00	
		Tersusunnya dokumen rencana pembangunan industri kabupaten/kota serta terlaksananya evaluasi secara berkala guna mendukung arah pengembangan sektor industri yang terarah dan berkelanjutan						100.205.000,00						-		1.218.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-		-	-	200.000,00							-	0,00	
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	-		-	-	30.000.000,00							-	30.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						200.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-		-	1 Dokumen	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota						30.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			30.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
193.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**400.000,00**								**0,00**	
				-		-	-	200.000,00							-	0,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						400.000,00						-		0,00	
		-						400.000,00						-		0,00	
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	-	200.000,00							-	0,00	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	-	200.000,00							-	0,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						200.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	4 Dokumen	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						200.000,00			-	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			0,00	
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	10 Dokumen	200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
194.	3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**30.000.000,00**								**75.000.000,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri						***30.000.000,00***								***75.000.000,00***	
			999.Pertumbuhan IKM	1 %		1 %	1 %	30.000.000,00							1 %	75.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						30.000.000,00						Masyarakat pelaku usaha industri		75.000.000,00	
		Tersedianya data dan informasi industri yang akurat						30.000.000,00						Masyarakat pelaku usaha industri		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	7 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00							1 Dokumen	75.000.000,00	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						30.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	3. Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas			75.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	7 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**145.000.000,00**								**196.989.195,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**145.000.000,00**								**196.989.195,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**145.000.000,00**								**196.989.195,00**	
195.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**490.000.000,00**								**805.928.490,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan						***145.000.000,00***								***196.989.195,00***	
			999.Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	145.000.000,00							100 Persentase	196.989.195,00	
			999.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	145.000.000,00							100 Persentase	196.989.195,00	
			999.Tingkat Kematangan UKPBJ	4 Angka		3 Angka	3 Angka	145.000.000,00							3 Angka	196.989.195,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						145.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang		196.989.195,00	
		Persentase data pembangunan yang dilaporkan						145.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang		196.989.195,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00							12 Dokumen	51.989.195,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00							12 Laporan	62.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00							12 Laporan	83.000.000,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						45.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			51.989.195,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	51.989.195,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						60.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			83.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	83.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						40.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	62.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						**1.164.720.000,00**								**12.495.172.800,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.164.720.000,00**								**12.495.172.800,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.164.720.000,00**								**12.495.172.800,00**	
196.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**1.724.720.000,00**								**13.213.377.285,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						***1.164.720.000,00***								***12.495.172.800,00***	
			999.Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan	35 Dokumen		35 Dokumen	35 Dokumen	1.164.720.000,00							35 Dokumen	12.495.172.800,00	
			999.Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan	730 Dokumen		730 Dokumen	730 Dokumen	1.164.720.000,00							730 Dokumen	12.495.172.800,00	
			999.Persentase Kegiatan Kesagmaan yang Difasilitasi Oleh Pemerintah	100 %		100 %	100 %	1.164.720.000,00							100 %	12.495.172.800,00	
			999.Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	1.164.720.000,00							100 %	12.495.172.800,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						1.164.720.000,00						ASN Lingkup Setda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12.495.172.800,00	
		Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan						1.164.720.000,00						ASN Lingkup Setda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12.495.172.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	45 Dokumen		45 Dokumen	45 Dokumen	1.152.720.000,00							45 Dokumen	12.423.812.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	33 Dokumen		33 Dokumen	33 Dokumen	7.000.000,00							33 Dokumen	39.760.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	5.000.000,00							11 Dokumen	31.600.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						1.152.720.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			12.423.812.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	45 Dokumen		45 Dokumen	45 Dokumen	1.152.720.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45 Dokumen	12.423.812.800,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						5.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			31.600.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Dokumen	31.600.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						7.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	5. Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius			39.760.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	33 Dokumen		33 Dokumen	33 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					33 Dokumen	39.760.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN						**11.898.504.000,00**								**12.447.338.459,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.898.504.000,00**								**12.447.338.459,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**11.898.504.000,00**								**12.447.338.459,00**	
197.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**28.427.089.000,00**								**23.605.923.459,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan						***11.718.504.000,00***								***12.447.338.459,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	11.718.504.000,00							100 %	12.447.338.459,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.620.000,00								21.620.000,00	
		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran						21.620.000,00						ASN Lingkup Sekretariat Daerah		21.620.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00							1 Dokumen	2.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.570.000,00							2 Dokumen	5.570.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.550.000,00							1 Dokumen	2.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00							1 Dokumen	2.400.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00							1 Dokumen	2.600.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.500.000,00							2 Laporan	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.900.000,00							2 Laporan	1.900.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.570.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.570.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.570.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	5.570.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.600.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.600.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.600.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.400.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.400.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.400.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.100.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.100.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.100.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.550.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.550.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.550.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.550.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	4.500.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.900.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.900.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.900.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	1.900.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.863.384.000,00						ASN Lingkup Sekretariat Daerah		11.528.218.459,00	
		Cakupan Layanan Admninistrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.863.384.000,00						ASN Lingkup Sekretariat Daerah		11.528.218.459,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	59.000.000,00							14 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen		360 Dokumen	360 Dokumen	16.780.000,00							360 Dokumen	16.780.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00							1 Laporan	1.080.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.300.000,00							12 Laporan	2.300.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1498 Orang/bulan		1498 Orang/bulan	1498 Orang/bulan	10.783.504.000,00							1498 Orang/bulan	11.468.058.459,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.783.504.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.468.058.459,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1498 Orang/bulan		1498 Orang/bulan	1498 Orang/bulan	10.783.504.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					1498 Orang/bulan	11.468.058.459,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						16.780.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.780.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen		360 Dokumen	360 Dokumen	16.780.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					360 Dokumen	16.780.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						59.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	59.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Dokumen	40.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.800.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.080.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	1.080.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.300.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.300.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	2.300.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.500.000,00						BMD Lingkup Sekretariat Daerah		2.500.000,00	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi barang milik daerah						2.500.000,00						BMD Lingkup Sekretariat Daerah		2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00							12 Laporan	1.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00							2 Dokumen	1.000.000,00	
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	1.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.500.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.011.000.000,00						Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		895.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.011.000.000,00						Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		895.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan		24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	600.000.000,00							24 Orang/Bulan	600.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan		28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	180.000.000,00							28 Orang/Bulan	180.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang		6 Orang	6 Orang	51.000.000,00							6 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	48 Paket		48 Paket	48 Paket	180.000.000,00							48 Paket	85.000.000,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						180.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			180.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan		28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	180.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					28 Orang/Bulan	180.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						180.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	48 Paket		48 Paket	48 Paket	180.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Paket	85.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						51.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6 Orang		6 Orang	6 Orang	51.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Orang	30.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						600.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			600.000.000,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan		24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	600.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24 Orang/Bulan	600.000.000,00	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						**195.000.000,00**								**297.979.795,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**195.000.000,00**								**297.979.795,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**195.000.000,00**								**297.979.795,00**	
198.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**490.000.000,00**								**805.928.490,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan						***195.000.000,00***								***282.979.795,00***	
			999.Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	195.000.000,00							100 Persentase	282.979.795,00	
			999.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	195.000.000,00							100 Persentase	282.979.795,00	
			999.Tingkat Kematangan UKPBJ	4 Angka		3 Angka	3 Angka	195.000.000,00							3 Angka	282.979.795,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						118.500.000,00						ASN, OPD dan Kelompok Masyarakat		170.000.000,00	
		Persentase Pelaksanaan kebijakan Perekonomian						118.500.000,00						ASN, OPD dan Kelompok Masyarakat		170.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00							4 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	28.500.000,00							4 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00							2 Laporan	30.000.000,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						30.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			125.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	125.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						60.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	30.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						28.500.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	28.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	15.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						76.500.000,00						ASN, OPD dan Kelompok Masyarakat		127.979.795,00	
		Persentase pelaksanaan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam						76.500.000,00						ASN, OPD dan Kelompok Masyarakat		127.979.795,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00							1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	63.500.000,00							16 Dokumen	112.979.795,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						63.500.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			112.979.795,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	63.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					16 Dokumen	112.979.795,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						13.000.000,00			2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	15.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN						**225.000.000,00**								**288.911.560,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**225.000.000,00**								**288.911.560,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**225.000.000,00**								**288.911.560,00**	
199.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**1.724.720.000,00**								**13.213.377.285,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						***210.000.000,00***								***288.911.560,00***	
			999.Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan	35 Dokumen		35 Dokumen	35 Dokumen	210.000.000,00							35 Dokumen	288.911.560,00	
			999.Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan	730 Dokumen		730 Dokumen	730 Dokumen	210.000.000,00							730 Dokumen	288.911.560,00	
			999.Persentase Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi Oleh Pemerintah	100 %		100 %	100 %	210.000.000,00							100 %	288.911.560,00	
			999.Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	210.000.000,00							100 %	288.911.560,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						225.000.000,00						OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang		288.911.560,00	
		Persentase pemanfaatan dan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah						225.000.000,00						OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang		288.911.560,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00							4 Dokumen	118.911.560,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00							3 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	70.000.000,00							3 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	15.000.000,00							1 Perangkat Daerah	15.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	15.000.000,00							1 Perangkat Daerah	10.000.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	60.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						70.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	85.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						75.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			118.911.560,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	118.911.560,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Perangkat Daerah	10.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
	4.01.02.2.01.0005	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Perangkat Daerah		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Perangkat Daerah	15.000.000,00	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		BAGIAN KERJASAMA						**145.000.000,00**								**196.969.695,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**145.000.000,00**								**196.969.695,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**145.000.000,00**								**196.969.695,00**	
200.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**1.724.720.000,00**								**13.213.377.285,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						***145.000.000,00***								***196.969.695,00***	
			999.Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan	35 Dokumen		35 Dokumen	35 Dokumen	145.000.000,00							35 Dokumen	196.969.695,00	
			999.Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan	730 Dokumen		730 Dokumen	730 Dokumen	145.000.000,00							730 Dokumen	196.969.695,00	
			999.Persentase Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi Oleh Pemerintah	100 %		100 %	100 %	145.000.000,00							100 %	196.969.695,00	
			999.Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	145.000.000,00							100 %	196.969.695,00	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						145.000.000,00						ASN, OPD Lingkup Kab. Sidrap serta Lembaga/Pihak Ketiga		196.969.695,00	
		Persentase Jumlah Kerjasama yang difasilitasi						145.000.000,00						ASN, OPD Lingkup Kab. Sidrap serta Lembaga/Pihak Ketiga		196.969.695,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	51.363.000,00							20 Dokumen	76.969.695,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	50.716.500,00							15 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	42.920.500,00							35 Laporan	55.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						51.363.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			76.969.695,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	51.363.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Dokumen	76.969.695,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						50.716.500,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	50.716.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Dokumen	65.000.000,00	BAGIAN KERJASAMA
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						42.920.500,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	42.920.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35 Laporan	55.000.000,00	BAGIAN KERJASAMA
		BAGIAN ORGANISASI						**170.000.000,00**								**220.000.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**170.000.000,00**								**220.000.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**170.000.000,00**								**220.000.000,00**	
201.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**28.427.089.000,00**								**23.605.923.459,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan						***140.000.000,00***								***190.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	140.000.000,00							100 %	190.000.000,00	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						170.000.000,00						OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang		220.000.000,00	
		Persentase pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah						170.000.000,00						OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang		220.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00							2 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00							1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00							4 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00							1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00							1 Laporan	30.000.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						50.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	85.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						30.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	30.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						25.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	30.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						30.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	40.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						35.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	35.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA						**150.000.000,00**								**310.959.500,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**150.000.000,00**								**310.959.500,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**150.000.000,00**								**310.959.500,00**	
202.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**490.000.000,00**								**805.928.490,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan						***150.000.000,00***								***310.959.500,00***	
			999.Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	150.000.000,00							100 Persentase	310.959.500,00	
			999.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	150.000.000,00							100 Persentase	310.959.500,00	
			999.Tingkat Kematangan UKPBJ	4 Angka		3 Angka	3 Angka	150.000.000,00							3 Angka	310.959.500,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						150.000.000,00						ASN Lingkup Setda dan OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang		310.959.500,00	
		Persentase pelaksanaan tender tepat waktu						150.000.000,00						ASN Lingkup Setda dan OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang		310.959.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00							12 Dokumen	205.959.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00							12 Dokumen	60.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang		300 Orang	300 Orang	45.000.000,00							300 Orang	45.000.000,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						30.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	60.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						75.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			205.959.500,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	205.959.500,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						45.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang		300 Orang	300 Orang	45.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300 Orang	45.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL						**16.358.585.000,00**								**10.938.585.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**16.358.585.000,00**								**10.938.585.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**16.358.585.000,00**								**10.938.585.000,00**	
203.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**28.427.089.000,00**								**23.605.923.459,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan						***15.958.585.000,00***								***10.813.585.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	15.958.585.000,00							100 %	10.813.585.000,00	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						35.000.000,00						ASN Lingkup Sekretariat Daerah		25.000.000,00	
		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian peangkat daerah						35.000.000,00						ASN Lingkup Sekretariat Daerah		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00							12 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00							12 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	15.000.000,00							50 Paket	15.000.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50 Paket	15.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	5.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	5.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.368.857.000,00						ASN Lingkup Sekretariat Daerah		3.600.857.000,00	
		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah						5.368.857.000,00						ASN Lingkup Sekretariat Daerah		3.600.857.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	2.500.494.000,00							25 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270 Laporan		270 Laporan	270 Laporan	1.800.000.000,00							270 Laporan	1.485.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.000.000,00							12 Paket	1.080.154.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	405.000.000,00							12 Paket	352.340.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	127.971.000,00							12 Paket	127.971.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	510.392.000,00							12 Paket	510.392.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	15.000.000,00							4 Paket	15.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						127.971.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			127.971.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	127.971.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	127.971.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						510.392.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			510.392.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	510.392.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	510.392.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Paket	15.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.080.154.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	1.080.154.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						405.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			352.340.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	405.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	352.340.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.500.494.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	2.500.494.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25 Laporan	30.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.800.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.485.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270 Laporan		270 Laporan	270 Laporan	1.800.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					270 Laporan	1.485.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						600.000.000,00						ASN Lingkup Sekretariat Daerah		165.000.000,00	
		Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah						600.000.000,00						ASN Lingkup Sekretariat Daerah		165.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100.000.000,00							5 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	150.000.000,00							20 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00							1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00							2 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	150.000.000,00							10 Unit	25.000.000,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	50.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	50.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	15.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	25.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						150.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Unit	25.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.704.065.000,00						ASN Lingkup Sekretariat Daerah		3.863.365.000,00	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah						5.704.065.000,00						ASN Lingkup Sekretariat Daerah		3.863.365.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.130.070.000,00							12 Laporan	1.130.070.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.130.000.000,00							12 Laporan	2.449.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	430.000.000,00							12 Laporan	270.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.995.000,00							12 Laporan	13.995.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						13.995.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.995.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.995.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	13.995.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.130.070.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.130.070.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.130.070.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.130.070.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						430.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			270.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	430.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	270.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.130.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.449.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.130.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	2.449.300.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.110.663.000,00						ASN Lingkup Sekretariat Daerah		1.079.263.000,00	
		Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						2.110.663.000,00						ASN Lingkup Sekretariat Daerah		1.079.263.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.000.000.000,00							7 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	452.272.000,00							18 Unit	302.272.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	500.391.000,00							37 Unit	450.391.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit		55 Unit	55 Unit	158.000.000,00							55 Unit	126.600.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						500.391.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			450.391.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	500.391.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					37 Unit	450.391.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						452.272.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			302.272.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	452.272.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Unit	302.272.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						158.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			126.600.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit		55 Unit	55 Unit	158.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					55 Unit	126.600.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.000.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Unit	200.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						1.425.000.000,00						Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.440.000.000,00	
		Persentase kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi						1.425.000.000,00						Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.440.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	840.000.000,00							12 Paket	840.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	105.000.000,00							12 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	480.000.000,00							12 Paket	480.000.000,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						840.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			840.000.000,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	840.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	840.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						480.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			480.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	480.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	480.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						105.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	105.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	120.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						1.115.000.000,00						Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		765.100.000,00	
		Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan						1.115.000.000,00						Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		765.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00							6 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	85 Laporan		85 Laporan	85 Laporan	1.100.000.000,00							85 Laporan	750.100.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						15.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Laporan	15.000.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						1.100.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			750.100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	85 Laporan		85 Laporan	85 Laporan	1.100.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					85 Laporan	750.100.000,00	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
		BAGIAN HUKUM						**190.000.000,00**								**232.323.230,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**190.000.000,00**								**232.323.230,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**190.000.000,00**								**232.323.230,00**	
204.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**1.724.720.000,00**								**13.213.377.285,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						***190.000.000,00***								***232.323.230,00***	
			999.Jumlah Kerjasama Daerah yang Dihasilkan	35 Dokumen		35 Dokumen	35 Dokumen	190.000.000,00							35 Dokumen	232.323.230,00	
			999.Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan	730 Dokumen		730 Dokumen	730 Dokumen	190.000.000,00							730 Dokumen	232.323.230,00	
			999.Persentase Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi Oleh Pemerintah	100 %		100 %	100 %	190.000.000,00							100 %	232.323.230,00	
			999.Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	190.000.000,00							100 %	232.323.230,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						190.000.000,00						ASN dan OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang		232.323.230,00	
		Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan						190.000.000,00						ASN dan OPD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang		232.323.230,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	18 Kasus		18 Kasus	18 Kasus	80.000.000,00							18 Kasus	85.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	730 Dokumen		730 Dokumen	730 Dokumen	85.000.000,00							730 Dokumen	97.323.230,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	730 Dokumen		730 Dokumen	730 Dokumen	25.000.000,00							730 Dokumen	50.000.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						85.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			97.323.230,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	730 Dokumen		730 Dokumen	550 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					730 Dokumen	97.323.230,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						80.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	18 Kasus		18 Kasus	15 Kasus	80.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Kasus	85.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						25.000.000,00			4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	730 Dokumen		730 Dokumen	550 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					730 Dokumen	50.000.000,00	BAGIAN HUKUM
		SEKRETARIAT DPRD						**34.158.667.000,00**								**32.448.513.850,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**34.158.667.000,00**								**32.448.513.850,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**34.158.667.000,00**								**32.448.513.850,00**	
205.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**24.491.092.000,00**								**24.907.731.850,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan						***24.416.092.000,00***								***24.837.731.850,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	24.416.092.000,00							100 %	24.837.731.850,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.621.000,00						-		21.621.000,00	
		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Perangkat Daerah						21.621.000,00						-		21.621.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000,00							1 Dokumen	1.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.268.000,00							1 Dokumen	2.268.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.734.000,00							1 Dokumen	2.734.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.827.000,00							1 Dokumen	2.827.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.192.000,00							1 Laporan	2.192.000,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.827.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.827.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.827.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.827.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.734.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.734.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.734.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.734.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.600.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.600.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.268.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.268.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.268.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.268.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.192.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.192.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.192.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	2.192.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.508.391.000,00						-		2.990.954.850,00	
		Cakupan administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.508.391.000,00						-		2.990.954.850,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.462.000,00							12 Dokumen	6.462.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00							1 Laporan	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.576.000,00							2 Laporan	3.576.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan		360 Orang/bulan	360 Orang/bulan	2.495.853.000,00							360 Orang/bulan	2.978.416.850,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.495.853.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.978.416.850,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan		360 Orang/bulan	360 Orang/bulan	2.495.853.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					360 Orang/bulan	2.978.416.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						6.462.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.462.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.462.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	6.462.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	2.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.576.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.576.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	3.576.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	3.576.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00						-		30.000.000,00	
		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100.000.000,00						-		30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	100.000.000,00							20 Orang	30.000.000,00	
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		20 Orang	30 Orang	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20 Orang	30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						544.766.000,00						-		519.766.000,00	
		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah						544.766.000,00						-		519.766.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00							12 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	90.000.000,00							36 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	51.332.000,00							12 Paket	51.332.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	61.434.000,00							12 Paket	61.434.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	42.000.000,00							12 Paket	42.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	50.000.000,00							5 Paket	25.000.000,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						61.434.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			61.434.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	61.434.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	61.434.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						42.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			42.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	42.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	42.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						50.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Paket	25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						51.332.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			51.332.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	51.332.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	51.332.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						250.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			250.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan		36 Laporan	30 Laporan	90.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36 Laporan	90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						210.000.000,00						-		90.000.000,00	
		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah						210.000.000,00						-		90.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	140.000.000,00							1 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		2 Unit	3 Unit	50.000.000,00							3 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00							2 Unit	20.000.000,00	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						140.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	140.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		2 Unit	3 Unit	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.344.134.000,00						-		1.493.210.000,00	
		Cakupan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah						1.344.134.000,00						-		1.493.210.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	481.320.000,00							36 Laporan	481.320.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	750.924.000,00							12 Laporan	900.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.890.000,00							12 Laporan	75.890.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00							12 Laporan	36.000.000,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						36.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	36.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						481.320.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			481.320.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	481.320.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36 Laporan	481.320.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.890.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			75.890.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.890.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	75.890.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						750.924.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			900.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.924.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						709.676.000,00						-		709.676.000,00	
		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						709.676.000,00						-		709.676.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	350.000.000,00							4 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	274.676.000,00							26 Unit	274.676.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	35.000.000,00							26 Unit	35.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00							1 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	25.000.000,00							50 Unit	25.000.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						35.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	35.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26 Unit	35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						274.676.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			274.676.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	274.676.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26 Unit	274.676.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						25.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	25.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50 Unit	25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						350.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			350.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	350.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						18.036.254.000,00						-		18.036.254.000,00	
		Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						18.036.254.000,00						-		18.036.254.000,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	420 Orang/Bulan		420 Orang/Bulan	420 Orang/Bulan	17.399.254.000,00							420 Orang/Bulan	17.399.254.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang		35 Orang	35 Orang	210.000.000,00							35 Orang	210.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	427.000.000,00							4 Paket	427.000.000,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						17.399.254.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			17.399.254.000,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	420 Orang/Bulan		420 Orang/Bulan	420 Orang/Bulan	17.399.254.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					420 Orang/Bulan	17.399.254.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						427.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			427.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	427.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Paket	427.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						210.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			210.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang		35 Orang	35 Orang	210.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					35 Orang	210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						1.016.250.000,00						-		1.016.250.000,00	
		Cakupan Layanan Administrasi DPRD						1.016.250.000,00						-		1.016.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	86.250.000,00							12 Laporan	86.250.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket		36 Paket	36 Paket	930.000.000,00							36 Paket	930.000.000,00	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						86.250.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			86.250.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	86.250.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	86.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						930.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			930.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36 Paket		36 Paket	36 Paket	930.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36 Paket	930.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
206.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**9.667.575.000,00**								**7.540.782.000,00**	
		Terlaksananya Program Kerja DPRD Tepat Waktu						***9.638.075.000,00***								***7.506.282.000,00***	
			999.Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	9.638.075.000,00							100 %	7.506.282.000,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						410.875.500,00						-		438.012.500,00	
		Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasannya						410.875.500,00						-		438.012.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	74.875.500,00							10 Dokumen	74.875.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00							1 Dokumen	153.137.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00							4 Dokumen	210.000.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						36.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			153.137.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	153.137.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						74.875.500,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			74.875.500,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	1 Dokumen	74.875.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Dokumen	74.875.500,00	SEKRETARIAT DPRD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						300.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			210.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						149.451.500,00						-		158.427.000,00	
		Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						149.451.500,00						-		158.427.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00							1 Dokumen	32.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.927.000,00							1 Dokumen	37.927.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.500.000,00							1 Dokumen	19.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.524.500,00							1 Dokumen	44.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.500.000,00							1 Dokumen	19.500.000,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						19.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			19.500.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	19.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						19.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			19.500.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	19.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						32.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			32.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	32.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						37.927.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			37.927.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.927.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	37.927.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						35.524.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			44.500.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.524.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	44.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						160.314.000,00						-		157.814.000,00	
		Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang terlaksana						160.314.000,00						-		157.814.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.936.000,00							1 Dokumen	13.936.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.700.000,00							1 Laporan	8.700.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00							1 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00							1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.262.000,00							1 Laporan	17.262.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.916.000,00							1 Dokumen	32.916.000,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						60.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						8.700.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.700.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.700.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	8.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						17.262.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			17.262.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.262.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	17.262.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						7.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran						13.936.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.936.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.936.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	13.936.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						32.916.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			32.916.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.916.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	32.916.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						1.099.563.000,00						-		1.199.563.000,00	
		Persentase Anggota DPRD yang meningkat Kapasitasnya						1.099.563.000,00						-		1.199.563.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	800.000.000,00							5 Dokumen	900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	114.073.000,00							12 Dokumen	114.073.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	17.490.000,00							Dokumen	17.490.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang		7 Orang	7 Orang	168.000.000,00							7 Orang	168.000.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						800.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			900.000.000,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	800.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Dokumen	900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						168.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			168.000.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang		7 Orang	7 Orang	168.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Orang	168.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						17.490.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			17.490.000,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.490.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Dokumen	17.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						114.073.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			114.073.000,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	114.073.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	114.073.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						130.000.000,00						-		80.000.000,00	
		Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat						130.000.000,00						-		80.000.000,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00							3 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00							12 Laporan	50.000.000,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						100.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						30.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						7.717.371.000,00						-		5.506.965.500,00	
		Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD						7.717.371.000,00						-		5.506.965.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.717.371.000,00							12 Dokumen	5.506.965.500,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						7.717.371.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.506.965.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.717.371.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	5.506.965.500,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH						**6.881.633.880,00**								**8.635.704.284,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.881.633.880,00**								**8.635.704.284,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**6.605.633.880,00**								**8.285.718.069,00**	
207.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.431.633.880,00**								**5.517.859.657,00**	
		Meningkatnya Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan						***5.386.633.880,00***								***5.517.859.657,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	5.386.633.880,00							100 %	5.517.859.657,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						24.800.000,00						ASN dan Non ASN Lingkup Bapperida		21.941.727,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						24.800.000,00						ASN dan Non ASN Lingkup Bapperida		21.941.727,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	16.500.000,00							8 Dokumen	14.439.295,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	4.300.000,00							5 Laporan	3.877.310,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	4.000.000,00							5 Laporan	3.625.122,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						16.500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.439.295,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	16.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Dokumen	14.439.295,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.300.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.877.310,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	4.300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Laporan	3.877.310,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.625.122,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Laporan	3.625.122,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.501.866.000,00						ASN dan Non ASN Lingkup Bapperida		4.490.639.977,00	
		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.501.866.000,00						ASN dan Non ASN Lingkup Bapperida		4.490.639.977,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00							12 Dokumen	57.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00							12 Laporan	21.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	4.476.866.000,00							14 Orang/bulan	4.411.639.977,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.476.866.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.411.639.977,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	160 Orang/bulan	4.476.866.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Orang/bulan	4.411.639.977,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD						20.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			57.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	57.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	21.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.500.000,00						ASN dan Non ASN Lingkup Bapperida		9.733.500,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah						1.500.000,00						ASN dan Non ASN Lingkup Bapperida		9.733.500,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00							12 Laporan	9.733.500,00	
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.500.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.733.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	9.733.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						337.773.880,00						ASN dan Non ASN Lingkup Bapperida		150.807.000,00	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah						337.773.880,00						ASN dan Non ASN Lingkup Bapperida		150.807.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan		170 Laporan	170 Laporan	324.773.880,00							170 Laporan	134.992.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.000.000,00							4 Paket	10.815.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00							1 Paket	5.000.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.815.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Paket	10.815.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Paket	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						324.773.880,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			134.992.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan		170 Laporan	170 Laporan	324.773.880,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					170 Laporan	134.992.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00						ASN dan Non ASN Lingkup Bapperida		165.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah						10.000.000,00						ASN dan Non ASN Lingkup Bapperida		165.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		5 Unit	4 Unit	5.000.000,00							3 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		10 Unit	8 Unit	5.000.000,00							6 Unit	155.000.000,00	
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						5.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		5 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			155.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		10 Unit	8 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	155.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						427.894.000,00						ASN dan Non ASN Lingkup Bapperida		438.144.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah						427.894.000,00						ASN dan Non ASN Lingkup Bapperida		438.144.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00							12 Laporan	70.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	357.894.000,00							12 Laporan	357.035.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	5.000.000,00							110 Laporan	10.609.000,00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.609.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					110 Laporan	10.609.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						65.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			70.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	70.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						357.894.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			357.035.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	357.894.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	357.035.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						127.800.000,00						ASN dan Non ASN Lingkup Bapperida		241.593.453,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						127.800.000,00						ASN dan Non ASN Lingkup Bapperida		241.593.453,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00							1 Unit	159.135.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	77.800.000,00							10 Unit	74.263.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	25.000.000,00							15 Unit	8.195.453,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						77.800.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			74.263.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	77.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	74.263.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.195.453,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Retribusi Jasa Umum					15 Unit	8.195.453,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			159.135.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	159.135.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
208.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**450.000.000,00**								**1.403.068.412,00**	
		Terwujudnya Dokumen Perencanaan Daerah yang Berkualitas dan Terintegrasi						***450.000.000,00***								***1.403.068.412,00***	
			999.Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	100 %		100 %	100 %	450.000.000,00							100 %	1.403.068.412,00	
			999.Persentase Konsistensi Program RPJMD-RKPD	100 %		100 %	100 %	450.000.000,00							100 %	1.403.068.412,00	
			999.Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	450.000.000,00							100 %	1.403.068.412,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						380.429.300,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		1.233.068.412,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan perda dan perkada						380.429.300,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		1.233.068.412,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	22.273.000,00							2 Berita Acara	82.142.500,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	38.824.500,00							2 Berita Acara	50.350.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	82.879.500,00							2 Berita Acara	120.530.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	148.957.500,00							100 Dokumen	385.798.932,00	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	28.561.700,00							2 Dokumen	289.193.980,00	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	11.923.100,00							8 Dokumen	270.378.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1841 Usulan		1841 Usulan	1841 Usulan	47.010.000,00							1841 Usulan	34.675.000,00	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						28.561.700,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			289.193.980,00	
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	28.561.700,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	289.193.980,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						11.923.100,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			270.378.000,00	
		Sinkroninya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	11.923.100,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Dokumen	270.378.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						38.824.500,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.350.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	38.824.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Berita Acara	50.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						22.273.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			82.142.500,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	22.273.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Berita Acara	82.142.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						82.879.500,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			120.530.000,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	82.879.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Berita Acara	120.530.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						47.010.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			34.675.000,00	
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1841 Usulan		1841 Usulan	1841 Usulan	47.010.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1841 Usulan	34.675.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						148.957.500,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			385.798.932,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	100 Dokumen		100 Dokumen	2 Dokumen	148.957.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Dokumen	385.798.932,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						54.853.700,00						Organisasi Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait		95.000.000,00	
		Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah						54.853.700,00						Organisasi Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait		95.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.853.700,00							1 Dokumen	95.000.000,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						54.853.700,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			95.000.000,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	54.853.700,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						14.717.000,00						Organisasi Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait		75.000.000,00	
		Tercapainya target indikator perencanaan pembangunan daerah						14.717.000,00						Organisasi Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait		75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.717.000,00							1 Laporan	75.000.000,00	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						14.717.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	14.717.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
209.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**724.000.000,00**								**1.364.790.000,00**	
		Meningkatnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan (RPJMD-Renstra, RKPD-Renja) Perangkat Daerah						***654.000.000,00***								***1.232.752.500,00***	
			999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %		100 %	100 %	654.000.000,00							100 %	1.232.752.500,00	
			999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Bidang Perekonomian dan SDA	100 %		100 %	100 %	654.000.000,00							100 %	1.232.752.500,00	
			999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	654.000.000,00							100 Persentase	1.232.752.500,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						314.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait		447.825.000,00	
		Terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra,Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						314.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait		447.825.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	70.000.000,00							16 Dokumen	132.037.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	162.000.000,00							4 Laporan	183.750.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	82.000.000,00							48 Laporan	132.037.500,00	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						82.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			132.037.500,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	82.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					48 Laporan	132.037.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						70.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			132.037.500,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Dokumen	132.037.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						162.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			183.750.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	162.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	183.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						160.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait		325.500.000,00	
		Terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra,Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA						160.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait		325.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	100.000.000,00							16 Dokumen	173.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00							12 Dokumen	152.250.000,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						100.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			173.250.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	16 Dokumen		16 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Dokumen	173.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						60.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			152.250.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	152.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						250.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait		591.465.000,00	
		Terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra,Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						250.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait		591.465.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	40.000.000,00							20 Laporan	106.312.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	30.000.000,00							44 Laporan	163.537.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	110.000.000,00							20 Laporan	158.287.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	70.000.000,00							44 Laporan	163.327.500,00	
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						40.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			106.312.500,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	40.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Laporan	106.312.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						110.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			158.287.500,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	110.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Laporan	158.287.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						30.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			163.537.500,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					44 Laporan	163.537.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						70.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			163.327.500,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	70.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					44 Laporan	163.327.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**276.000.000,00**								**349.986.215,00**	
210.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**276.000.000,00**								**349.986.215,00**	
		Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah						***46.000.000,00***								***79.000.000,00***	
			999.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pemanfaatan Pembangunan Daerah	100 %		100 %	100 %	46.000.000,00							100 %	79.000.000,00	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						92.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		79.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Termanfaatkannya hasil penelitian,pengembangan pengkajian dan penerapan oleh perangkat daerah						92.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah, Masyarakat dan Stakeholder Terkait		79.000.000,00	
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan		1 Pelatihan	1 Pelatihan	46.000.000,00							1 Pelatihan	50.000.000,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.000.000,00							1 Laporan	29.000.000,00	
	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						46.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			29.000.000,00	
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	29.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						46.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan		1 Pelatihan	1 Pelatihan	46.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Pelatihan	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan						***46.000.000,00***								***195.986.215,00***	
			999.Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	46.000.000,00							100 Persentase	195.986.215,00	
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						184.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait		270.986.215,00	
		Tercapainya Indeks Inovasi Daerah						184.000.000,00						Organisasi Perangkat Daerah dan Stakeholder Terkait		270.986.215,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.000.000,00							1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.000.000,00							1 Laporan	70.986.215,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.000.000,00							1 Laporan	75.000.000,00	
			Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	46.000.000,00							1 Sistem Informasi	50.000.000,00	
	5.05.03.2.02.0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah						46.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			70.986.215,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	70.986.215,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah						46.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						46.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	46.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Sistem Informasi	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi						46.000.000,00			8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**150.807.476.120,00**								**150.861.101.900,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**150.807.476.120,00**								**150.861.101.900,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**150.807.476.120,00**								**150.861.101.900,00**	
211.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23.501.416.120,00**								**23.546.578.620,00**	
		Tercapainya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif						***23.388.416.120,00***								***23.433.578.620,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	23.388.416.120,00							100 %	23.433.578.620,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						279.500.000,00						-		279.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						279.500.000,00						-		279.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	15.500.000,00							3 Dokumen	15.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00							5 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	11.000.000,00							3 Dokumen	11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	11.000.000,00							3 Dokumen	11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	15.500.000,00							3 Dokumen	15.500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	15.500.000,00							20 Laporan	15.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	11.000.000,00							2 Laporan	11.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						200.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Dokumen	200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						15.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	15.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	15.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						11.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						15.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	15.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	15.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						11.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	15.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Laporan	15.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	11.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.554.859.060,00						-		9.554.859.060,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan						9.554.859.060,00						-		9.554.859.060,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00							12 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.400.000,00							12 Dokumen	10.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00							12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.100.000,00							1 Laporan	10.100.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	15.000.000,00							17 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173 Orang/bulan		173 Orang/bulan	173 Orang/bulan	9.489.359.060,00							173 Orang/bulan	9.489.359.060,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.489.359.060,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.489.359.060,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173 Orang/bulan		173 Orang/bulan	173 Orang/bulan	9.489.359.060,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					173 Orang/bulan	9.489.359.060,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						10.400.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.400.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	10.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.100.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.100.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	10.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					17 Laporan	15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00						-		10.000.000,00	
		Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00						-		10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	5.000.000,00							1 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	5.000.000,00							1 Orang	5.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Orang	5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Orang	5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						686.832.000,00						-		686.994.500,00	
		Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						686.832.000,00						-		686.994.500,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	12.371.000,00							5 Dokumen	12.371.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00							12 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00							12 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	236.855.500,00							200 Laporan	236.855.500,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	10.000.000,00							25 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.000.000,00							12 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	16.250.000,00							12 Paket	16.412.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	395.355.500,00							12 Paket	395.355.500,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						16.250.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.412.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	16.250.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	16.412.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						395.355.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			395.355.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	395.355.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	395.355.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	6.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.371.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			12.371.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	12.371.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Dokumen	12.371.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					25 Paket	10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						236.855.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			236.855.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	236.855.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					200 Laporan	236.855.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4.515.000.000,00						-		4.560.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4.515.000.000,00						-		4.560.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00							1 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	4.500.000.000,00							2 Unit	4.545.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.500.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.545.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	20 Unit	4.500.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	4.545.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.786.500.000,00						-		5.786.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah						5.786.500.000,00						-		5.786.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	253.443.000,00							12 Laporan	253.443.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.325.000.000,00							12 Laporan	2.325.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	130 Laporan		130 Laporan	130 Laporan	3.200.500.000,00							130 Laporan	3.200.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan		1000 Laporan	1000 Laporan	7.557.000,00							1000 Laporan	7.557.000,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.557.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.557.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan		1000 Laporan	1000 Laporan	7.557.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1000 Laporan	7.557.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						253.443.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			253.443.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	253.443.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	253.443.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.200.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.200.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	130 Laporan		130 Laporan	130 Laporan	3.200.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					130 Laporan	3.200.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.325.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.325.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.325.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	2.325.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.668.725.060,00						-		2.668.725.060,00	
		Tersedianya Administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah						2.668.725.060,00						-		2.668.725.060,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	2.138.725.060,00							15 Unit	2.138.725.060,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46 Unit		46 Unit	46 Unit	290.000.000,00							46 Unit	290.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit		30 Unit	30 Unit	124.000.000,00							30 Unit	124.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	116.000.000,00							1 Unit	116.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						290.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			290.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46 Unit		46 Unit	46 Unit	290.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					46 Unit	290.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						2.138.725.060,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.138.725.060,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	2.138.725.060,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Unit	2.138.725.060,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						124.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			124.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit		30 Unit	30 Unit	124.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					30 Unit	124.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						116.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			116.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	116.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	116.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
212.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**126.845.900.000,00**								**126.854.363.280,00**	
		Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien dan Transparan						***126.538.900.000,00***								***126.547.363.280,00***	
			999.Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan	100 %		100 %	100 %	126.538.900.000,00							100 %	126.547.363.280,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						600.000.000,00						-		600.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah						600.000.000,00						-		600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.317.000,00							2 Dokumen	21.317.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.988.000,00							2 Dokumen	21.988.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	18.536.000,00							2 Dokumen	18.536.000,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.637.400,00							2 Dokumen	100.637.400,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	69.672.000,00							2 Dokumen	69.672.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.989.000,00							2 Dokumen	21.989.000,00	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	32.000.000,00							3 Dokumen	32.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang		2 Orang	2 Orang	25.500.000,00							2 Orang	25.500.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	102.360.600,00							2 Dokumen	102.360.600,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	78.000.000,00							2 Dokumen	78.000.000,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	27.000.000,00							3 Dokumen	27.000.000,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00							3 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	36.000.000,00							3 Dokumen	36.000.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						100.637.400,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			100.637.400,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.637.400,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	100.637.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						69.672.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			69.672.000,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	69.672.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	69.672.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						36.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	36.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						45.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						32.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			32.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	32.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						27.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			27.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	27.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						102.360.600,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			102.360.600,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	102.360.600,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	102.360.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						78.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			78.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	78.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	78.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						21.989.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.989.000,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.989.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	21.989.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						18.536.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			18.536.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	18.536.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	18.536.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						21.317.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.317.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.317.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	21.317.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						21.988.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.988.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.988.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	21.988.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						25.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang		2 Orang	2 Orang	25.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Orang	25.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						195.000.000,00						-		195.000.000,00	
		Terpenuhinya Pengelolaan Administrasi Keuangan						195.000.000,00						-		195.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00							12 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00							12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00							12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00							6 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00							12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00							12 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00							2 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00							12 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	15.000.000,00							36 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang		2 Orang	2 Orang	5.000.000,00							2 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00							12 Dokumen	10.000.000,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						50.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						25.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	
		Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						25.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembayaan Daerah						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					36 Laporan	15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang		2 Orang	2 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Orang	5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						214.000.000,00						-		214.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi						214.000.000,00						-		214.000.000,00	
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	10.000.000,00							2 Lembaga	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	12.000.000,00							25 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	480 Dokumen		480 Dokumen	480 Dokumen	10.000.000,00							480 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00							1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00							12 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	15.000.000,00							18 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00							1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang		2 Orang	2 Orang	12.000.000,00							2 Orang	12.000.000,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00							2 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	10.000.000,00	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksanaanya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	480 Dokumen		480 Dokumen	480 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					480 Dokumen	10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					18 Laporan	15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						50.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						50.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						12.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					25 Dokumen	12.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						12.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Orang		2 Orang	2 Orang	12.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Orang	12.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Lembaga	10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						125.821.900.000,00						-		125.830.363.280,00	
		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						125.821.900.000,00						-		125.830.363.280,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.850.000.000,00							12 Laporan	2.850.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	68 Laporan		68 Laporan	68 Laporan	112.125.572.000,00							68 Laporan	112.125.572.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	846.328.000,00							12 Laporan	854.791.280,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000.000,00							1 Laporan	10.000.000.000,00	
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						2.850.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.850.000.000,00	
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.850.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	2.850.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						112.125.572.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			112.125.572.000,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	68 Laporan		68 Laporan	68 Laporan	112.125.572.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					68 Laporan	112.125.572.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						10.000.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	10.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						846.328.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			854.791.280,00	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	846.328.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	854.791.280,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						15.000.000,00						-		15.000.000,00	
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan						15.000.000,00						-		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00							12 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00							12 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Orang		12 Orang	12 Orang	5.000.000,00							12 Orang	5.000.000,00	
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12 Orang		12 Orang	12 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Orang	5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
213.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**460.160.000,00**								**460.160.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah						***427.660.000,00***								***427.660.000,00***	
			999.Persentase Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	95 %		95 %	95 %	427.660.000,00							95 %	427.660.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						460.160.000,00						-		460.160.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi						460.160.000,00						-		460.160.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00							2 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.572.000,00							2 Laporan	7.572.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00							12 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	250.000.000,00							5 Laporan	250.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00							12 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	10.000.000,00							30 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00							2 Laporan	7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	37.588.000,00							12 Laporan	37.588.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00							4 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00							2 Dokumen	25.000.000,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						25.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						25.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						37.588.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			37.588.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	37.588.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	37.588.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						250.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	250.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Laporan	250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					30 Laporan	10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						75.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						7.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.500.000,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	7.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						7.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.500.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	7.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						7.572.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.572.000,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.572.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Laporan	7.572.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**14.167.261.306,00**								**15.707.269.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**14.167.261.306,00**								**15.707.269.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**14.167.261.306,00**								**15.707.269.000,00**	
214.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.415.932.306,00**								**12.543.709.000,00**	
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien						***11.405.932.306,00***								***12.543.709.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	11.405.932.306,00							100 %	12.543.709.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.610.000,00						Organisasi Perangkat Daerah		9.811.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.610.000,00						Organisasi Perangkat Daerah		9.811.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.421.000,00							4 Dokumen	6.250.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3.189.000,00							3 Laporan	3.561.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.421.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.250.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.421.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	6.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.189.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.561.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3.189.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Laporan	3.561.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.850.263.000,00						-		10.855.060.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan						9.850.263.000,00						-		10.855.060.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	12.509.000,00							24 Dokumen	19.250.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.103.000,00							4 Laporan	2.810.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/bulan		840 Orang/bulan	840 Orang/bulan	9.835.651.000,00							840 Orang/bulan	10.833.000.000,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.835.651.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.833.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/bulan		840 Orang/bulan	770 Orang/bulan	9.835.651.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					840 Orang/bulan	10.833.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12.509.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			19.250.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	12.509.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24 Dokumen	19.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.103.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.810.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.103.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	2.810.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						243.400.000,00						-		278.568.000,00	
		Tersedianya Pemenuhan Administrasi Umum Kantor						243.400.000,00						-		278.568.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		40 Laporan	45 Laporan	176.710.000,00							50 Laporan	201.568.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	61.860.000,00							1 Paket	71.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.830.000,00							2 Paket	5.500.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.830.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	196 Paket	4.830.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Paket	5.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						61.860.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			71.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	61.860.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Paket	71.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						176.710.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			201.568.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		40 Laporan	45 Laporan	176.710.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50 Laporan	201.568.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						86.263.000,00						-		98.500.000,00	
		Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						86.263.000,00						-		98.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000.000,00							10 Unit	10.500.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	10.000.000,00							1 Unit	11.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	66.263.000,00							4 Unit	76.500.000,00	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						66.263.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			76.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	13 Unit	66.263.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	76.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.500.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	11.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.050.936.306,00						-		1.096.150.000,00	
		Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.050.936.306,00						-		1.096.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	190.110.306,00							12 Laporan	195.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	860.826.000,00							12 Laporan	900.650.000,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						190.110.306,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			195.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	190.110.306,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	195.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						860.826.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			900.650.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	860.826.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	900.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						176.460.000,00						-		205.620.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik						176.460.000,00						-		205.620.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00							1 Unit	62.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	91.500.000,00							18 Unit	99.500.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	2.100.000,00							10 Unit	3.100.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	32.860.000,00							30 Unit	40.520.000,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						91.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			99.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	91.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Unit	99.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.100.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	2.100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	3.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						32.860.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.520.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	32.860.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30 Unit	40.520.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	62.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
215.	5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**2.751.329.000,00**								**3.163.560.000,00**	
		Meningkatnya Upaya Eksensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah						***2.749.019.000,00***								***3.163.560.000,00***	
			999.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	2.749.019.000,00							100 Persentase	3.163.560.000,00	
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	20.24 Persentase		17.94 Persentase	18.82 Persentase	2.749.019.000,00							19.44 Persentase	3.163.560.000,00	
			999.Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	2.749.019.000,00							100 Persentase	3.163.560.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.751.329.000,00						Organisasi perangkat daerah		3.163.560.000,00	
		Tercapainya Target PAD						2.751.329.000,00						Organisasi perangkat daerah		3.163.560.000,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	887 Dokumen		605 Dokumen	666 Dokumen	2.310.000,00							733 Dokumen	2.810.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	52.020.000,00							3 Dokumen	62.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	300000 Dokumen		300000 Dokumen	300000 Dokumen	69.135.250,00							300000 Dokumen	79.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	11.841.000,00							4 Dokumen	21.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	34.557.000,00							10 Dokumen	41.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100000 Dokumen		100000 Dokumen	100000 Dokumen	252.890.000,00							100000 Dokumen	310.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.590.000,00							1 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	32.719.000,00							4 Laporan	42.150.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.903.077.750,00							4 Laporan	2.100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	31.215.000,00							1 Laporan	38.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	12.907.000,00							3 Laporan	22.500.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.102.000,00							12 Laporan	90.250.000,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan		12 Layanan	12 Layanan	2.310.000,00							12 Layanan	2.950.000,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50000 Obyek Pajak		50000 Obyek Pajak	50000 Obyek Pajak	118.254.000,00							50000 Obyek Pajak	195.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit		2 Unit	2 Unit	101.401.000,00							2 Unit	110.200.000,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						37.590.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.590.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						52.020.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.500.000,00	
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	15 Dokumen	52.020.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	62.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						12.907.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			22.500.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	12.907.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Laporan	22.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						101.401.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			110.200.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit		2 Unit	2 Unit	101.401.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	110.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						1.903.077.750,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.100.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.903.077.750,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	2.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						31.215.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			38.500.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	31.215.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	38.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						118.254.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			195.000.000,00	
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50000 Obyek Pajak		50000 Obyek Pajak	60000 Obyek Pajak	118.254.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50000 Obyek Pajak	195.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						252.890.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			310.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100000 Dokumen		100000 Dokumen	310000 Dokumen	252.890.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100000 Dokumen	310.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						2.310.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.950.000,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan		12 Layanan	12 Layanan	2.310.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Layanan	2.950.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						2.310.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.810.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	887 Dokumen		605 Dokumen	4400 Dokumen	2.310.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					733 Dokumen	2.810.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						69.135.250,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			79.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	300000 Dokumen		300000 Dokumen	310000 Dokumen	69.135.250,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300000 Dokumen	79.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						34.557.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			41.200.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	34.557.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Dokumen	41.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						11.841.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.500.000,00	
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	11.841.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	21.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						32.719.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			42.150.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	32.719.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	42.150.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						89.102.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			90.250.000,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.102.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	90.250.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**4.274.256.000,00**								**6.552.735.929,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.274.256.000,00**								**6.552.735.929,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**4.139.256.000,00**								**6.049.692.179,00**	
216.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.774.256.000,00**								**4.352.970.679,00**	
		Mengukur Jangkauan dan Cakupan Dukungan Program Urusan Pemerintahan						***3.743.256.000,00***								***4.347.518.804,00***	
			1.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.50 %		67.25 %	67.50 %	3.743.256.000,00							68.00 %	4.347.518.804,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00						-		27.760.626,00	
		Tersusunnya dokumen RKA-SKPD sesuai dengan pedoman dan jadwal yang ditetapkan						20.000.000,00						-		27.760.626,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00							1 Dokumen	6.953.125,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00							1 Dokumen	4.751.876,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00							1 Dokumen	5.451.875,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00							1 Dokumen	5.451.875,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00							12 Laporan	5.151.875,00	
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.451.875,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	5.451.875,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						4.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.451.875,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	5.451.875,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.953.125,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	6.953.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.751.876,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	4.751.876,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.151.875,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	5.151.875,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.309.256.000,00						-		3.659.785.404,00	
		Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah						3.309.256.000,00						-		3.659.785.404,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00							12 Dokumen	2.300.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00							1 Laporan	3.300.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	5.000.000,00							13 Laporan	3.151.875,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.294.256.000,00							40 Orang/bulan	3.651.033.529,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.294.256.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.651.033.529,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.294.256.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					40 Orang/bulan	3.651.033.529,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.300.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Dokumen	2.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.300.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	3.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.151.875,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Laporan	3.151.875,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						97.000.000,00						-		239.062.500,00	
		Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan yang aman serta terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD secara efektif						97.000.000,00						-		239.062.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	96.000.000,00							30 Laporan	235.062.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.000.000,00							12 Paket	4.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Paket	4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						96.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			235.062.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	96.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					30 Laporan	235.062.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25.000.000,00						-		75.960.799,00	
		Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah						25.000.000,00						-		75.960.799,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00							1 Unit	24.443.375,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	20.000.000,00							5 Unit	51.517.424,00	
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			24.443.375,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	24.443.375,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			51.517.424,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	51.517.424,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						190.000.000,00						-		216.641.350,00	
		Tersedianya jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara optimal dan tepat sasaran						190.000.000,00						-		216.641.350,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	53.000.000,00							12 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	131.000.000,00							12 Laporan	130.641.350,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00							1 Laporan	6.000.000,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						53.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	53.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						131.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			130.641.350,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	131.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	130.641.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						133.000.000,00						-		133.760.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien						133.000.000,00						-		133.760.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00							1 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	92.000.000,00							15 Unit	92.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit		23 Unit	23 Unit	11.000.000,00							23 Unit	11.760.000,00	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						92.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			92.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	92.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Unit	92.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.760.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit		23 Unit	23 Unit	11.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					23 Unit	11.760.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
217.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**365.000.000,00**								**1.696.721.500,00**	
		Meningkatnya Kinerja ASN yang Kompeten dan Profesional						***254.000.000,00***								***1.654.247.125,00***	
			999.Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD	80 %		70 %	73 %	254.000.000,00							75 %	1.654.247.125,00	
			999.Rata-Rata SKP ASN Bernilai BAIK	95 Nilai		91 Nilai	92 Nilai	254.000.000,00							93 Nilai	1.654.247.125,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						55.000.000,00						Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang		448.955.901,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN						55.000.000,00						Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang		448.955.901,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00							1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200 Dokumen		200 Dokumen	200 Dokumen	4.000.000,00							200 Dokumen	27.259.375,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00							1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	23.677.188,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00							1 Dokumen	24.512.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00							1 Dokumen	1.852.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00							1 Dokumen	7.453.125,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00							1 Dokumen	3.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen		7 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00							5 Dokumen	342.656.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00							1 Laporan	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00							1 Laporan	6.227.813,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	2.000.000,00							1 Lembaga	4.167.450,00	
	5.03.02.2.01.0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.453.125,00	
		Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	7.453.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						12.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			24.512.500,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	24.512.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			342.656.250,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen		7 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Dokumen	342.656.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN						2.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.227.813,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	6.227.813,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN						2.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.852.200,00	
		Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	1.852.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian						4.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			27.259.375,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200 Dokumen		200 Dokumen	200 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					200 Dokumen	27.259.375,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	1.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.167.450,00	
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Lembaga	4.167.450,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.150.000,00	
		Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	3.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			23.677.188,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	23.677.188,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	1.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						40.000.000,00						-		159.188.951,00	
		Terlaksananya pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN						40.000.000,00						-		159.188.951,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	20.000.000,00							500 Dokumen	91.518.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dokumen		200 Dokumen	200 Dokumen	10.000.000,00							200 Dokumen	20.401.451,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	10.000.000,00							500 Dokumen	47.268.750,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						20.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			91.518.750,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					500 Dokumen	91.518.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			47.268.750,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					500 Dokumen	47.268.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.401.451,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200 Dokumen		200 Dokumen	200 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					200 Dokumen	20.401.451,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						215.000.000,00						-		895.094.375,00	
		Terlaksananya ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi						215.000.000,00						-		895.094.375,00	
			Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00							3 Laporan	2.101.250,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	8 Orang		8 Orang	8 Orang	3.000.000,00							8 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	3 Orang		3 Orang	3 Orang	5.000.000,00							3 Orang	5.253.125,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	5.000.000,00							5 Orang	5.253.125,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	5 Orang		5 Orang	5 Orang	5.000.000,00							5 Orang	2.101.250,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	135 Orang		135 Orang	135 Orang	5.000.000,00							135 Orang	5.500.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	196 Orang		340 Orang	100 Orang	15.000.000,00							200 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00							3 Dokumen	26.265.625,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00							1 Dokumen	26.265.625,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00							1 Dokumen	2.101.250,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00							2 Dokumen	255.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00							3 Laporan	5.253.125,00	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	196 Orang		340 Orang	100 Orang	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					200 Orang	500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						120.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			255.000.000,00	
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Dokumen	255.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	135 Orang		135 Orang	135 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					135 Orang	5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat						30.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			26.265.625,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Dokumen	26.265.625,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.253.125,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Orang	5.253.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.253.125,00	
		Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	5.253.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.253.125,00	
		Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan diklat dan Sertifikasi Jabatan fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	3 Orang		3 Orang	3 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Orang	5.253.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			26.265.625,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	26.265.625,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.101.250,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	5 Orang		5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Orang	2.101.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0011	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional						3.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.101.250,00	
		Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	2.101.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN						4.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.101.250,00	
		Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	2.101.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						3.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	
		Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	8 Orang		8 Orang	8 Orang	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Orang	60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						55.000.000,00						-		193.482.273,00	
		Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						55.000.000,00						-		193.482.273,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	2.000.000,00							100 Orang	4.900.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	1.500.000,00							15 Orang	3.496.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00							12 Laporan	4.725.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	15.000.000,00							48 Dokumen	41.126.524,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00							1 Dokumen	24.540.500,00	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	3.000.000,00							15 Dokumen	10.003.125,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	3.000.000,00							15 Laporan	8.053.124,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	22.000.000,00							15 Laporan	78.578.125,00	
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						1.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			24.540.500,00	
		Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	24.540.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			41.126.524,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					48 Dokumen	41.126.524,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.725.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	4.725.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.900.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					100 Orang	4.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						1.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.496.500,00	
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Orang	3.496.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						22.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			78.578.125,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	22.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Laporan	78.578.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						3.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.003.125,00	
		Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen		15 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Dokumen	10.003.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN						3.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.053.124,00	
		Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					15 Laporan	8.053.124,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						55.000.000,00						-		193.482.273,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	-		-	-	5.000.000,00							-	18.059.375,00	
	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			18.059.375,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	-		-	400 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	18.059.375,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**135.000.000,00**								**503.043.750,00**	
218.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**135.000.000,00**								**503.043.750,00**	
		Meningkatnya Rasio PNS yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Sesuai Jabatan Fungsionalnya						***60.000.000,00***								***494.638.750,00***	
			999.Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	50 %		32 %	35.5 %	60.000.000,00							40 %	494.638.750,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						55.000.000,00						-		111.461.875,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti sertifikasi kompetensi meningkat						55.000.000,00						-		111.461.875,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	52 Orang		51 Orang	51 Orang	40.000.000,00							52 Orang	91.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	2.101.250,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	2.101.250,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	15.759.375,00	
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.101.250,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	2.101.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.759.375,00	
		Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	15.759.375,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						40.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			91.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	52 Orang		51 Orang	52 Orang	40.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					52 Orang	91.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.101.250,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	2.101.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						80.000.000,00						-		391.581.875,00	
		Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya						80.000.000,00						-		391.581.875,00	
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	15.000.000,00							50 Orang	42.025.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00							4 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	8.253.125,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00							1 Dokumen	2.101.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	30 Laporan		0 Laporan	75 Laporan	40.000.000,00							30 Laporan	325.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00							1 Laporan	2.101.250,00	
			Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	5.000.000,00							1 Lembaga	2.101.250,00	
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.101.250,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	2.101.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.101.250,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Lembaga	2.101.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			42.025.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50 Orang	42.025.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.101.250,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	2.101.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.253.125,00	
		Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	8.253.125,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						40.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			325.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	30 Laporan		0 Laporan	75 Laporan	40.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					30 Laporan	325.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Dokumen	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT						**10.020.779.000,00**								**17.311.101.956,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.020.779.000,00**								**17.311.101.956,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**10.020.779.000,00**								**17.311.101.956,00**	
219.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.087.213.150,00**								**9.743.397.581,00**	
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien						***8.087.213.150,00***								***9.743.397.581,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	8.087.213.150,00							100 %	9.743.397.581,00	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.903.994.600,00						-		6.558.916.956,00	
		Persentasi Realisasi Anggaran						6.903.994.600,00						-		6.558.916.956,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	660 Orang/bulan		660 Orang/bulan	660 Orang/bulan	6.903.994.600,00							660 Orang/bulan	6.558.916.956,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.903.994.600,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.558.916.956,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	660 Orang/bulan		660 Orang/bulan	660 Orang/bulan	6.903.994.600,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					660 Orang/bulan	6.558.916.956,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						290.625.000,00						-		1.678.023.375,00	
		Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						290.625.000,00						-		1.678.023.375,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang		70 Orang	70 Orang	290.625.000,00							70 Orang	1.678.023.375,00	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						290.625.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.678.023.375,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang		70 Orang	70 Orang	290.625.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					70 Orang	1.678.023.375,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						319.460.000,00						-		644.978.775,00	
		Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum						319.460.000,00						-		644.978.775,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	18.670.000,00							6 Laporan	96.545.400,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78 Laporan		70 Laporan	75 Laporan	285.980.000,00							75 Laporan	471.663.675,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	7.280.000,00							3 Paket	8.431.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	7.530.000,00							3 Paket	68.338.200,00	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.530.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			68.338.200,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	7.530.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Paket	68.338.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.280.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.431.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	7.280.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Paket	8.431.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						18.670.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			96.545.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	18.670.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Laporan	96.545.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						285.980.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			471.663.675,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78 Laporan		70 Laporan	75 Laporan	285.980.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					75 Laporan	471.663.675,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						337.604.550,00						-		519.201.050,00	
		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan						337.604.550,00						-		519.201.050,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	19.052.750,00							2 Unit	79.052.750,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		1 Unit	1 Unit	291.900.000,00							Unit	291.900.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		23 Unit	11 Unit	26.651.800,00							22 Unit	148.248.300,00	
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						291.900.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			291.900.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		1 Unit	1 Unit	291.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					Unit	291.900.000,00	INSPEKTORAT

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						19.052.750,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			79.052.750,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	19.052.750,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	79.052.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.651.800,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			148.248.300,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		23 Unit	11 Unit	26.651.800,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					22 Unit	148.248.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						135.309.000,00						-		205.134.825,00	
		Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						135.309.000,00						-		205.134.825,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	51.000.000,00							12 Laporan	91.039.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	83.209.000,00							12 Laporan	112.363.125,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1.100.000,00							3 Laporan	1.732.500,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.100.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.732.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1.100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Laporan	1.732.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						51.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			91.039.200,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	51.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	91.039.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						83.209.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			112.363.125,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	83.209.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	112.363.125,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.220.000,00						-		137.142.600,00	
		Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan						100.220.000,00						-		137.142.600,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00							1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit		21 Unit	23 Unit	65.785.000,00							23 Unit	121.707.600,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	9.435.000,00							30 Unit	15.435.000,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						65.785.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			121.707.600,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit		21 Unit	23 Unit	65.785.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					23 Unit	121.707.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.435.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.435.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	9.435.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					30 Unit	15.435.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	0,00	INSPEKTORAT
220.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**1.566.542.850,00**								**5.339.641.625,00**	
		Meningkatnya Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pengawasan dan Menurunnya Temuan BPK						***1.566.542.850,00***								***5.339.641.625,00***	
			999.Jumlah Temuan BPK	22 %		22 %	22 %	1.566.542.850,00							22 %	5.339.641.625,00	
			999.Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Tindaklanjuti	56.5 %		42.6 %	47.1 %	1.566.542.850,00							50.4 %	5.339.641.625,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.222.570.000,00						-		3.831.641.625,00	
		Persentase perangkat daerah yang bersih dari temuan penyimpangan keuangan audit BPK						1.222.570.000,00						-		3.831.641.625,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	86.470.000,00							10 Dokumen	334.677.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	64.950.000,00							1 Kesepakatan	411.896.625,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	10 Laporan		8 Laporan	10 Laporan	184.800.000,00							10 Laporan	268.380.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	285.450.000,00							25 Laporan	670.404.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	270.600.000,00							16 Laporan	770.070.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	200.600.000,00							16 Laporan	857.514.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	129.700.000,00							8 Laporan	518.700.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						270.600.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			770.070.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	270.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Laporan	770.070.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						285.450.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			670.404.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	25 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	285.450.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					25 Laporan	670.404.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						129.700.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			518.700.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	129.700.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	518.700.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						200.600.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			857.514.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	200.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Laporan	857.514.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						184.800.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			268.380.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	10 Laporan		8 Laporan	10 Laporan	184.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Laporan	268.380.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						64.950.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			411.896.625,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	64.950.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Kesepakatan	411.896.625,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						86.470.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			334.677.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	86.470.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Dokumen	334.677.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						343.972.850,00						-		1.508.000.000,00	
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						343.972.850,00						-		1.508.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	343.972.850,00							35 Laporan	1.508.000.000,00	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						343.972.850,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.508.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	343.972.850,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					35 Laporan	1.508.000.000,00	INSPEKTORAT
221.	6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**367.023.000,00**								**2.228.062.750,00**	
		Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Internal di Perangkat Daerah						***367.023.000,00***								***2.228.062.750,00***	
			999.Capaian Pemenuhan Indikator MCP KPK-RI	100 %		100 %	100 %	367.023.000,00							100 %	2.228.062.750,00	
			999.Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 3	100 %		94 %	97 %	367.023.000,00							100 %	2.228.062.750,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						132.800.000,00						-		927.168.750,00	
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang Terlaksana						132.800.000,00						-		927.168.750,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi		0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	132.800.000,00							0 Rekomendasi	927.168.750,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						132.800.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			927.168.750,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi		0 Rekomendasi	2 Rekomendasi	132.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					0 Rekomendasi	927.168.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						234.223.000,00						-		1.300.894.000,00	
		Persentase SAKIP Perangkat Daerah berkategori BAIK						234.223.000,00						-		1.300.894.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	28.600.000,00							4 Kegiatan	44.730.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	79.443.000,00							38 perangkat daerah	310.100.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	28.900.000,00							38 perangkat daerah	85.200.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	97.280.000,00							38 perangkat daerah	860.864.000,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						97.280.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			860.864.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	97.280.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					38 perangkat daerah	860.864.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						28.900.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			85.200.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	28.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					38 perangkat daerah	85.200.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						28.600.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			44.730.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	28.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Kegiatan	44.730.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						79.443.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			310.100.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	79.443.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					38 perangkat daerah	310.100.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN PANCA LAUTANG						**2.387.733.000,00**								**2.408.150.820,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.387.733.000,00**								**2.408.150.820,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.387.733.000,00**								**2.408.150.820,00**	
222.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.968.749.000,00**								**2.995.470.500,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***2.332.133.000,00***								***2.352.494.820,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	2.332.133.000,00							100 %	2.352.494.820,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00						-		1.010.000,00	
		Tersedian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00						-		1.010.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00							2 Dokumen	505.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000,00							2 Laporan	505.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			505.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Desa Corawali || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	505.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			505.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Desa Corawali || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	505.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.066.061.000,00						-		2.086.721.000,00	
		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.066.061.000,00						-		2.086.721.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 Orang/bulan		14 Orang/bulan	742 Orang/bulan	2.066.061.000,00							742 Orang/bulan	2.086.721.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.066.061.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.086.721.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.066.061.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					742 Orang/bulan	2.086.721.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.535.000,00						-		254.605.785,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terseleggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.535.000,00						-		254.605.785,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.224.000,00							12 Laporan	3.757.240,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313 Laporan		313 Laporan	313 Laporan	81.075.000,00							313 Laporan	79.318.225,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	105363 Paket		105363 Paket	105363 Paket	16.673.000,00							105363 Paket	17.344.730,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	220 Paket		220 Paket	220 Paket	22.483.000,00							220 Paket	22.707.830,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket		29 Paket	29 Paket	90.833.000,00							14 Paket	91.876.670,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90 Paket		90 Paket	90 Paket	38.247.000,00							90 Paket	39.601.090,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.669.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.725.690,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	220 Paket		220 Paket	220 Paket	5.669.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Desa Corawali || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					220 Paket	5.725.690,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						38.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			38.515.340,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket		29 Paket	29 Paket	38.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Desa Corawali || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Paket	38.515.340,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.061.620,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90 Paket		90 Paket	90 Paket	9.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Desa Corawali || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					90 Paket	10.061.620,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.990.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.069.900,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	105363 Paket		105363 Paket	1053 Paket	7.990.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Desa Corawali || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					105363 Paket	8.069.900,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.324.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.357.240,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.324.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Desa Corawali || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	3.357.240,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						43.715.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			41.521.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313 Laporan		313 Laporan	313 Laporan	43.715.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Desa Corawali || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					313 Laporan	41.521.500,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.231.000,00						-		6.293.310,00	
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.231.000,00						-		6.293.310,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		10 Unit	0 Unit	6.231.000,00							0 Unit	6.293.310,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						6.231.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.293.310,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		10 Unit	10 Unit	6.231.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Desa Corawali || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0 Unit	6.293.310,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						593.007.500,00						-		607.418.085,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						593.007.500,00						-		607.418.085,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	56 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	27.000.000,00							48 Laporan	27.270.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	564.325.000,00							48 Laporan	578.261.865,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	1.682.500,00							48 Laporan	1.886.220,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						150.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			151.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	150.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Desa Corawali || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	151.500,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.150.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	56 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Desa Corawali || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	15.150.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						115.325.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			116.150.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	115.325.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Desa Corawali || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	116.150.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
		Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.664.500,00						-		39.422.320,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		20 Unit	Unit	38.072.000,00							Unit	39.422.320,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		56 Unit	8 Unit	1.094.000,00							8 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.072.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.272.720,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		20 Unit	3 Unit	20.072.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Desa Corawali || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Unit	20.272.720,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						134.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		56 Unit	8 Unit	134.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Desa Corawali || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Unit	0,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
			-	-		-	-	250.000,00							-	0,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000,00						-		0,00	
		-						250.000,00						-		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	250.000,00							-	0,00	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						250.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	150 Orang	250.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.664.500,00						-		39.422.320,00	
		Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.664.500,00						-		39.422.320,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	9.498.500,00							-	0,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						962.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	962.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Desa Corawali || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
223.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.250.000,00**								**1.515.000,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik						***750.000,00***								***505.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	750.000,00							100 %	505.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.250.000,00						-		1.515.000,00	
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilimpahkan kepada Camat						1.250.000,00						-		1.515.000,00	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	250.000,00							12 Dokumen	505.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00							12 Laporan	505.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00							12 Laporan	505.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						250.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			505.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	250.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	505.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			505.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	505.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			505.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	505.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
224.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**438.594.000,00**								**442.979.940,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***500.000,00***								***505.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	500.000,00							100 %	505.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						500.000,00						-		505.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan						500.000,00						-		505.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00							12 Laporan	505.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			505.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	505.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						438.094.000,00						-		442.474.940,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan						438.094.000,00						-		442.474.940,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	505.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	500.000,00							8 Lembaga Kemasyarakatan	505.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			505.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Lembaga Kemasyarakatan	505.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			505.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	505.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
225.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**600.000,00**								**606.000,00**	
		Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah						***600.000,00***								***606.000,00***	
			999.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	600.000,00							100 %	606.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						600.000,00						-		606.000,00	
		Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum						600.000,00						-		606.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	505.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		1 Laporan	Laporan	100.000,00							Laporan	101.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			505.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	505.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						100.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			101.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		1 Laporan	12 Laporan	100.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Laporan	101.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
226.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**50.000.000,00**								**50.000.000,00**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat						***50.000.000,00***								***50.000.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00							100 %	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00							4 Dokumen	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						50.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
227.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**1.500.000,00**								**1.515.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan						***500.000,00***								***505.000,00***	
			999.Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	500.000,00							100 %	505.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.500.000,00						-		1.515.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.500.000,00						-		1.515.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	505.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	505.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	505.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			505.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	505.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			505.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	505.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			505.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	505.000,00	KECAMATAN PANCA LAUTANG
		KELURAHAN BILOKKA						**417.160.000,00**								**421.579.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**417.160.000,00**								**421.579.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**417.160.000,00**								**421.579.600,00**	
228.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.968.749.000,00**								**2.995.470.500,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***267.160.000,00***								***270.079.600,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	267.160.000,00							100 %	270.079.600,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.535.000,00						-		254.605.785,00	
		Terseleggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.535.000,00						-		254.605.785,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.224.000,00							12 Laporan	3.757.240,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313 Laporan		313 Laporan	313 Laporan	81.075.000,00							313 Laporan	79.318.225,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	105363 Paket		105363 Paket	105363 Paket	16.673.000,00							105363 Paket	17.344.730,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	220 Paket		220 Paket	220 Paket	22.483.000,00							220 Paket	22.707.830,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket		29 Paket	29 Paket	90.833.000,00							14 Paket	91.876.670,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90 Paket		90 Paket	90 Paket	38.247.000,00							90 Paket	39.601.090,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.125.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.206.250,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	220 Paket		220 Paket	220 Paket	8.125.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Bilokka II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					220 Paket	8.206.250,00	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.474.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.548.740,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket		29 Paket	29 Paket	7.474.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Bilokka II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Paket	7.548.740,00	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						13.140.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.271.400,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90 Paket		90 Paket	90 Paket	13.140.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Bilokka II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					90 Paket	13.271.400,00	KELURAHAN BILOKKA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.627.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.653.270,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	105363 Paket		105363 Paket	105 Paket	2.627.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Bilokka || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					105363 Paket	2.653.270,00	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						200.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Bilokka || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	200.000,00	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15.600.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.819.125,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313 Laporan		313 Laporan	313 Laporan	15.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Bilokka || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					313 Laporan	15.819.125,00	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						593.007.500,00						-		607.418.085,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						593.007.500,00						-		607.418.085,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	56 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	27.000.000,00							48 Laporan	27.270.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	564.325.000,00							48 Laporan	578.261.865,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	1.682.500,00							48 Laporan	1.886.220,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						62.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			250.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	62.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Bilokka || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	250.000,00	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.040.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	56 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Bilokka || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	4.040.000,00	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						209.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			211.497.535,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	209.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Bilokka || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	211.497.535,00	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.664.500,00						-		39.422.320,00	
		Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.664.500,00						-		39.422.320,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		20 Unit	Unit	38.072.000,00							Unit	39.422.320,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		56 Unit	8 Unit	1.094.000,00							8 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						6.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.593.280,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		20 Unit	3 Unit	6.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Bilokka || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Unit	6.593.280,00	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						528.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		56 Unit	8 Unit	528.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Bilokka || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Unit	0,00	KELURAHAN BILOKKA
		Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.664.500,00						-		39.422.320,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	9.498.500,00							-	0,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						403.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	403.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Bilokka || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	KELURAHAN BILOKKA
229.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**438.594.000,00**								**442.979.940,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***150.000.000,00***								***151.500.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	150.000.000,00							100 %	151.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						438.094.000,00						-		442.474.940,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan						438.094.000,00						-		442.474.940,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	137.094.000,00							0 Pokmas / Ormas	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	12 Unit	300.000.000,00							12 Unit	441.464.940,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						100.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			151.500.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Bilokka || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Unit	151.500.000,00	KELURAHAN BILOKKA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						50.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas	120 Pokmas / Ormas	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Bilokka || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					0 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN BILOKKA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		KELURAHAN WETTE						**347.320.000,00**								**350.791.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**347.320.000,00**								**350.791.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**347.320.000,00**								**350.791.200,00**	
230.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.968.749.000,00**								**2.995.470.500,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***192.550.000,00***								***194.473.500,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	192.550.000,00							100 %	194.473.500,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.535.000,00						-		254.605.785,00	
		Terseleggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.535.000,00						-		254.605.785,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.224.000,00							12 Laporan	3.757.240,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313 Laporan		313 Laporan	313 Laporan	61.075.000,00							313 Laporan	79.318.225,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	105363 Paket		105363 Paket	105363 Paket	16.673.000,00							105363 Paket	17.344.730,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	220 Paket		220 Paket	220 Paket	22.483.000,00							220 Paket	22.707.830,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket		29 Paket	29 Paket	90.833.000,00							14 Paket	91.876.670,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90 Paket		90 Paket	90 Paket	38.247.000,00							90 Paket	39.601.090,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.374.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.427.740,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	220 Paket		220 Paket	220 Paket	5.374.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Wetee || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					220 Paket	5.427.740,00	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19.952.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.151.520,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket		29 Paket	29 Paket	19.952.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Wetee || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Paket	20.151.520,00	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.461.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.505.610,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90 Paket		90 Paket	90 Paket	4.461.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Wetee || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					90 Paket	4.505.610,00	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.056.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.096.560,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	105363 Paket		105363 Paket	105363 Paket	4.056.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Wetee || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					105363 Paket	4.096.560,00	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						200.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Wetee || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	200.000,00	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.130.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.231.300,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313 Laporan		313 Laporan	313 Laporan	10.130.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Wetee || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					313 Laporan	10.231.300,00	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						593.007.500,00						-		607.418.085,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						593.007.500,00						-		607.418.085,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	56 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	27.000.000,00							48 Laporan	27.270.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	564.325.000,00							48 Laporan	578.261.865,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	1.682.500,00							48 Laporan	1.886.220,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			757.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	750.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Wetee || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	757.500,00	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.040.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	56 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Wetee || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	4.040.000,00	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						130.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			138.667.950,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	130.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Wetee || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	138.667.950,00	KELURAHAN WETTE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.664.500,00						-		39.422.320,00	
		Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.664.500,00						-		39.422.320,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		20 Unit	Unit	38.072.000,00							Unit	39.422.320,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		56 Unit	8 Unit	1.094.000,00							8 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						6.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.395.320,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		20 Unit	3 Unit	6.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Wetee || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Unit	6.395.320,00	KELURAHAN WETTE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						332.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		56 Unit	8 Unit	332.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Wetee || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Unit	0,00	KELURAHAN WETTE
		Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.664.500,00						-		39.422.320,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	9.498.500,00							-	0,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						7.295.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	7.295.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Wetee || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	KELURAHAN WETTE
231.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**438.594.000,00**								**442.979.940,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***154.770.000,00***								***156.317.700,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	154.770.000,00							100 %	156.317.700,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						438.094.000,00						-		442.474.940,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan						438.094.000,00						-		442.474.940,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	137.094.000,00							0 Pokmas / Ormas	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	12 Unit	300.000.000,00							12 Unit	441.464.940,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						100.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			156.317.700,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Wetee || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Unit	156.317.700,00	KELURAHAN WETTE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						54.770.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas	120 Pokmas / Ormas	54.770.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Wetee || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					0 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN WETTE
		KELURAHAN LAJONGA						**308.480.000,00**								**311.564.820,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**308.480.000,00**								**311.564.820,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**308.480.000,00**								**311.564.820,00**	
232.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.968.749.000,00**								**2.995.470.500,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***176.156.000,00***								***177.917.580,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	176.156.000,00							100 %	177.917.580,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.535.000,00						-		254.605.785,00	
		Terseleggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.535.000,00						-		254.605.785,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.224.000,00							12 Laporan	3.757.240,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313 Laporan		313 Laporan	313 Laporan	81.075.000,00							313 Laporan	79.318.225,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	105363 Paket		105363 Paket	105363 Paket	16.673.000,00							105363 Paket	17.344.730,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	220 Paket		220 Paket	220 Paket	22.483.000,00							220 Paket	22.707.830,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket		29 Paket	29 Paket	90.833.000,00							14 Paket	91.876.670,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90 Paket		90 Paket	90 Paket	38.247.000,00							90 Paket	39.601.090,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.315.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.348.150,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	220 Paket		220 Paket	220 Paket	3.315.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Lajonga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					220 Paket	3.348.150,00	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.407.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.661.070,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket		29 Paket	29 Paket	25.407.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Lajonga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Paket	25.661.070,00	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.646.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.762.460,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	90 Paket		90 Paket	90 Paket	11.646.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Lajonga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					90 Paket	11.762.460,00	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.525.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	105363 Paket		105363 Paket	105363 Paket	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Lajonga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					105363 Paket	2.525.000,00	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Lajonga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	0,00	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						11.630.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.746.300,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313 Laporan		313 Laporan	313 Laporan	11.630.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Lajonga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					313 Laporan	11.746.300,00	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						593.007.500,00						-		607.418.085,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						593.007.500,00						-		607.418.085,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	56 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	27.000.000,00							48 Laporan	27.270.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	564.325.000,00							48 Laporan	578.261.865,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	1.682.500,00							48 Laporan	1.886.220,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						720.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			727.220,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	720.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Lajonga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	727.220,00	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.040.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	56 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Lajonga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	4.040.000,00	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						110.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			111.946.380,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	110.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Lajonga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	111.946.380,00	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.664.500,00						-		39.422.320,00	
		Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.664.500,00						-		39.422.320,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		20 Unit	Unit	38.072.000,00							Unit	39.422.320,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		56 Unit	8 Unit	1.094.000,00							8 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						6.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.161.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		20 Unit	3 Unit	6.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Lajonga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Unit	6.161.000,00	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		56 Unit	8 Unit	100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Lajonga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Unit	0,00	KELURAHAN LAJONGA
		Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						48.664.500,00						-		39.422.320,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	9.498.500,00							-	0,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						838.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	838.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Lajonga || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	0,00	KELURAHAN LAJONGA
233.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**438.594.000,00**								**442.979.940,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***132.324.000,00***								***133.647.240,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	132.324.000,00							100 %	133.647.240,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						438.094.000,00						-		442.474.940,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan						438.094.000,00						-		442.474.940,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	137.094.000,00							0 Pokmas / Ormas	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	12 Unit	300.000.000,00							12 Unit	441.464.940,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						100.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			133.647.240,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit		12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Lajonga || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Unit	133.647.240,00	KELURAHAN LAJONGA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						32.324.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksanarya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas	120 Pokmas / Ormas	32.324.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Lautan || Kelurahan Lajonga || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					0 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN LAJONGA
		KECAMATAN TELLU LIMPOE						**3.049.377.000,00**								**3.845.161.888,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.049.377.000,00**								**3.845.161.888,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.049.377.000,00**								**3.845.161.888,00**	
234.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.906.787.000,00**								**4.739.463.388,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Dukungan Administrasi Pemerintahan Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional						***2.981.472.000,00***								***3.759.259.888,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	2.981.472.000,00							100 %	3.759.259.888,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.040.000,00						-		14.031.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perangkat Daerah						5.040.000,00						-		14.031.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.360.000,00							12 Dokumen	10.301.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.680.000,00							12 Laporan	3.730.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.360.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.301.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.360.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	10.301.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.680.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.730.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.680.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	3.730.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.737.305.000,00						-		3.389.620.888,00	
		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara tertib, akuntabel dan sesuai ketentuan.						2.737.305.000,00						-		3.389.620.888,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00							12 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1176 Orang/bulan		980 Orang/bulan	1036 Orang/bulan	2.736.305.000,00							1092 Orang/bulan	3.388.620.888,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.736.305.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.388.620.888,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1176 Orang/bulan		980 Orang/bulan	1036 Orang/bulan	2.736.305.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1092 Orang/bulan	3.388.620.888,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.330.000,00						-		3.930.000,00	
		Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tertib, akurat dan akuntabel guna mendukung kelancaran manajemen aparatur Perangkat Daerah						3.330.000,00						-		3.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00							12 Dokumen	2.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	930.000,00							12 Dokumen	1.130.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						930.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.130.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	930.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	1.130.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.400.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.800.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	2.800.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						243.282.000,00						-		277.903.500,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah secara tertib, efektif dan akuntabel.						243.282.000,00						-		277.903.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	23.707.000,00							28 Laporan	24.198.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan		144 Laporan	163 Laporan	47.829.000,00							158 Laporan	63.130.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86.803 Paket		78.931 Paket	87.315 Paket	40.827.500,00							84.624 Paket	44.865.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket		67 Paket	28 Paket	5.783.000,00							16 Paket	2.875.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.213 Paket		2.294 Paket	2.398 Paket	125.135.500,00							2.277 Paket	142.835.500,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.783.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.875.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket		67 Paket	28 Paket	5.783.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16 Paket	2.875.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						23.234.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			43.133.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.213 Paket		2.294 Paket	318 Paket	23.234.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.277 Paket	43.133.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.715.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.695.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86.803 Paket		78.931 Paket	14953 Paket	8.715.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84.624 Paket	9.695.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.335.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.775.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan		28 Laporan	4 Laporan	4.335.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28 Laporan	4.775.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						24.374.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.940.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan		144 Laporan	62 Laporan	24.374.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					158 Laporan	36.940.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						267.901.000,00						-		329.221.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas urusan Pemerintah Daerah						267.901.000,00						-		329.221.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	112 Unit		71 Unit	18 Unit	76.986.000,00							86 Unit	92.785.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		44 Unit	26 Unit	160.145.000,00							18 Unit	186.216.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.770.000,00							1 Unit	50.220.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						24.141.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			34.731.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	112 Unit		71 Unit	2 Unit	24.141.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					86 Unit	34.731.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.073.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.658.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		44 Unit	3 Unit	35.073.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Unit	40.658.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.770.000,00				-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.220.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.770.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	50.220.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						463.045.000,00						-		504.787.000,00	
		Tersedianya dukungan Jasa Penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien						463.045.000,00						-		504.787.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	69.790.000,00							84 Laporan	75.527.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	390.800.000,00							84 Laporan	426.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	209 Laporan		204 Laporan	199 Laporan	2.455.000,00							204 Laporan	3.260.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						600.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.125.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	209 Laporan		204 Laporan	70 Laporan	600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					204 Laporan	1.125.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			18.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84 Laporan	18.750.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						34.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			48.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	12 Laporan	34.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84 Laporan	48.000.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						186.884.000,00						-		219.970.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah						186.884.000,00						-		219.970.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit	6 Unit	101.748.000,00							6 Unit	134.228.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	62.166.000,00							21 Unit	62.292.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		7 Unit	4 Unit	2.800.000,00							6 Unit	2.450.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.072.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.076.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	2 Unit	20.072.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21 Unit	20.076.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						700.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		7 Unit	2 Unit	700.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Unit	700.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Unit	40.000.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
235.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**2.460.000,00**								**8.470.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang Responsif, Inovatif, dan Berbasis Teknologi Digital Untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Prima						***1.230.000,00***								***8.470.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	1.230.000,00							100 %	8.470.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.460.000,00						-		8.470.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.460.000,00						-		8.470.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.230.000,00							12 Laporan	4.150.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.230.000,00							12 Laporan	4.320.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						1.230.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.320.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.230.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	4.320.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1.230.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.150.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.230.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	4.150.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
236.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.342.710.000,00**								**1.366.077.400,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa/Kelurahan						***11.305.000,00***								***17.410.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	11.305.000,00							100 %	17.410.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3.075.000,00						-		3.550.000,00	
		Terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa secara terpadu untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi dan kemandirian masyarakat desa						3.075.000,00						-		3.550.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.075.000,00							12 Laporan	3.550.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.075.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.550.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.075.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	3.550.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.339.635.000,00						-		1.362.527.400,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang mendorong partisipasi, kemandirian dan peningkatan kapasitas masyarakat Kelurahan						1.339.635.000,00						-		1.362.527.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.230.000,00							12 Laporan	5.930.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	23.800.000,00							36 Lembaga Kemasyarakatan	25.130.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						7.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.930.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36 Lembaga Kemasyarakatan	7.930.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						1.230.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.930.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.230.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	5.930.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
237.	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**2.910.000,00**								**5.362.000,00**	
		Terciptanya Kondisi Wilayah Kecamatan yang Aman, Tertib, dan Kondusif Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Aktif Masyaraka						***2.910.000,00***								***5.362.000,00***	
			999.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	2.910.000,00							100 %	5.362.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						2.910.000,00						-		5.362.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Guna Menciptakan Situasi Wilayah yang Aman, Tertib dan Kondusif						2.910.000,00						-		5.362.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.680.000,00							12 Laporan	3.720.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.230.000,00							12 Laporan	1.642.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1.680.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.720.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.680.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	3.720.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.230.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.642.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.230.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.642.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
238.	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**50.000.000,00**								**50.000.000,00**	
		Meningkatnya Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Mendukung Stabilitas Wilayah dan Pelayanan Masyarakat Secara Terkoordinasi, Partisipatif, dan Berkelanjutan						***50.000.000,00***								***50.000.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00							100 %	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah secara Tertib, Lancar dan sesuai Ketentuan Perundang-undangan						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00							4 Dokumen	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						50.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
239.	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**1.230.000,00**								**4.660.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Akuntabel, dan Sesuai Regulasi Melalui Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif dan Berkelanjutan						***1.230.000,00***								***4.660.000,00***	
			999.Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	1.230.000,00							100 %	4.660.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.230.000,00						-		4.660.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Secara Efektif dan sesuai Ketentuan Perundang-undangan						1.230.000,00						-		4.660.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.230.000,00							12 Dokumen	4.660.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.230.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.660.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.230.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	4.660.000,00	KECAMATAN TELLU LIMPOE
		KELURAHAN MASSEPE						**411.160.000,00**								**412.417.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**411.160.000,00**								**412.417.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**411.160.000,00**								**412.417.000,00**	
240.	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.906.787.000,00**								**4.739.463.388,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Dukungan Administrasi Pemerintahan Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional						***177.781.000,00***								***178.198.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	177.781.000,00							100 %	178.198.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						243.282.000,00						-		277.903.500,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah secara tertib, efektif dan akuntabel.						243.282.000,00						-		277.903.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	23.707.000,00							28 Laporan	24.198.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan		144 Laporan	163 Laporan	47.829.000,00							158 Laporan	63.130.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86.803 Paket		78.931 Paket	87.315 Paket	40.827.500,00							84.624 Paket	44.865.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.213 Paket		2.294 Paket	2.398 Paket	125.135.500,00							2.277 Paket	142.835.500,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.946.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.213 Paket		2.294 Paket	387 Paket	9.946.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Massepe || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.277 Paket	9.500.000,00	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.788.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.800.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86.803 Paket		78.931 Paket	13576 Paket	6.788.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Massepe || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					84.624 Paket	6.800.000,00	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.124.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.146.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan		28 Laporan	4 Laporan	1.124.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Massepe || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					28 Laporan	1.146.000,00	KELURAHAN MASSEPE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.565.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.565.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan		144 Laporan	17 Laporan	3.565.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Messape || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					158 Laporan	3.565.000,00	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						267.901.000,00						-		329.221.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas urusan Pemerintah Daerah						267.901.000,00						-		329.221.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	112 Unit		71 Unit	18 Unit	76.986.000,00							86 Unit	92.785.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		44 Unit	26 Unit	160.145.000,00							18 Unit	186.216.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						18.575.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			19.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	112 Unit		71 Unit	9 Unit	18.575.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Messape || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					86 Unit	19.000.000,00	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.596.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			17.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		44 Unit	2 Unit	16.596.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Messape || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					18 Unit	17.000.000,00	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						463.045.000,00						-		504.787.000,00	
		Tersedianya dukungan Jasa Penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien						463.045.000,00						-		504.787.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	69.790.000,00							84 Laporan	75.527.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	390.800.000,00							84 Laporan	426.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	209 Laporan		204 Laporan	199 Laporan	2.455.000,00							204 Laporan	3.260.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						285.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			285.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	209 Laporan		204 Laporan	19 Laporan	285.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Messape || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					204 Laporan	285.000,00	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.400.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	12 Laporan	9.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Messape || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					84 Laporan	9.400.000,00	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						54.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			54.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Messape || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84 Laporan	54.000.000,00	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						186.884.000,00						-		219.970.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah						186.884.000,00						-		219.970.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit	6 Unit	101.748.000,00							6 Unit	134.228.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	62.166.000,00							21 Unit	62.292.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						6.274.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.274.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	3 Unit	6.274.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Messape || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					21 Unit	6.274.000,00	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						51.228.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			51.228.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit	1 Unit	51.228.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Messape || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	51.228.000,00	KELURAHAN MASSEPE
241.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.342.710.000,00**								**1.366.077.400,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa/Kelurahan						***233.379.000,00***								***234.219.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	233.379.000,00							100 %	234.219.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.339.635.000,00						-		1.362.527.400,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang mendorong partisipasi, kemandirian dan peningkatan kapasitas nasyarakat Kelurahan						1.339.635.000,00						-		1.362.527.400,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	23.800.000,00							36 Lembaga Kemasyarakatan	25.130.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	785.842.000,00							11 Pokmas / Ormas	668.200.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		30 Unit	15 Unit	528.763.000,00							14 Unit	663.267.400,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.800.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.800.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Messape || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36 Lembaga Kemasyarakatan	2.800.000,00	KELURAHAN MASSEPE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						69.419.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			69.419.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		30 Unit	1 Unit	69.419.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Messape || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Unit	69.419.000,00	KELURAHAN MASSEPE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						161.160.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			162.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	161.160.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Messape || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					11 Pokmas / Ormas	162.000.000,00	KELURAHAN MASSEPE
		KELURAHAN AMPARITA						**361.120.000,00**								**402.703.000,00**	
		7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					**361.120.000,00**								**402.703.000,00**	
		7.01	**KECAMATAN**					**361.120.000,00**								**402.703.000,00**	
242.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.906.787.000,00**								**4.739.463.388,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Dukungan Administrasi Pemerintahan Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional						***142.258.000,00***								***170.612.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	142.258.000,00							100 %	170.612.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						243.282.000,00						-		277.903.500,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah secara tertib, efektif dan akuntabel.						243.282.000,00						-		277.903.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	23.707.000,00							28 Laporan	24.198.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan		144 Laporan	163 Laporan	47.829.000,00							158 Laporan	63.130.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86.803 Paket		78.931 Paket	87.315 Paket	40.827.500,00							84.624 Paket	44.865.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.213 Paket		2.294 Paket	2.398 Paket	125.135.500,00							2.277 Paket	142.835.500,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.197.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.213 Paket		2.294 Paket	313 Paket	12.197.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Amparita || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					2.277 Paket	13.000.000,00	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.975.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.614.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86.803 Paket		78.931 Paket	5016 Paket	3.975.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Amparita || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					84.624 Paket	4.614.000,00	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.799.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.799.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan		28 Laporan	4 Laporan	2.799.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Amparita || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					28 Laporan	2.799.000,00	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.532.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.665.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan		144 Laporan	8 Laporan	2.532.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Amparita || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					158 Laporan	2.665.000,00	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						267.901.000,00						-		329.221.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas urusan Pemerintah Daerah						267.901.000,00						-		329.221.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		44 Unit	26 Unit	160.145.000,00							18 Unit	186.216.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.710.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			24.050.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		44 Unit	2 Unit	8.710.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Amparita || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					18 Unit	24.050.000,00	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						463.045.000,00						-		504.787.000,00	
		Tersedianya dukungan Jasa Penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien						463.045.000,00						-		504.787.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	69.790.000,00							84 Laporan	75.527.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	390.800.000,00							84 Laporan	426.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.560.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	12 Laporan	8.560.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Amparita || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					84 Laporan	9.000.000,00	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						90.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Amparita || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84 Laporan	100.000.000,00	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						186.884.000,00						-		219.970.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah						186.884.000,00						-		219.970.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit	6 Unit	101.748.000,00							6 Unit	134.228.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	62.166.000,00							21 Unit	62.292.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						6.484.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.484.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	3 Unit	6.484.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Amparita || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					21 Unit	6.484.000,00	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit	3 Unit	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Amparita || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	8.000.000,00	KELURAHAN AMPARITA
243.	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.342.710.000,00**								**1.366.077.400,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa/Kelurahan						***218.862.000,00***								***232.091.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	218.862.000,00							100 %	232.091.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.339.635.000,00						-		1.362.527.400,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang mendorong partisipasi, kemandirian dan peningkatan kapasitas nasyarakat Kelurahan						1.339.635.000,00						-		1.362.527.400,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	23.800.000,00							36 Lembaga Kemasyarakatan	25.130.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	785.842.000,00							11 Pokmas / Ormas	668.200.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		30 Unit	15 Unit	528.763.000,00							14 Unit	663.267.400,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.800.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Amparita || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						107.942.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			120.091.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		30 Unit	4 Unit	107.942.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Amparita || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Unit	120.091.000,00	KELURAHAN AMPARITA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						108.120.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			109.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	108.120.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Amparita || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					11 Pokmas / Ormas	109.000.000,00	KELURAHAN AMPARITA
		KELURAHAN PAJALELE						**468.400.000,00**								**518.375.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**468.400.000,00**								**518.375.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**468.400.000,00**								**518.375.000,00**	
244.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.906.787.000,00**								**4.739.463.388,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Dukungan Administrasi Pemerintahan Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional						***151.004.000,00***								***154.495.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	151.004.000,00							100 %	154.495.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						243.282.000,00						-		277.903.500,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah secara tertib, efektif dan akuntabel						243.282.000,00						-		277.903.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	23.707.000,00							28 Laporan	24.198.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan		144 Laporan	163 Laporan	47.829.000,00							158 Laporan	63.130.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86.803 Paket		78.931 Paket	87.315 Paket	40.827.500,00							84.624 Paket	44.865.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.213 Paket		2.294 Paket	2.398 Paket	125.135.500,00							2.277 Paket	142.835.500,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.332.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.623.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.213 Paket		2.294 Paket	381 Paket	13.332.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					2.277 Paket	9.623.000,00	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.986.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.505.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86.803 Paket		78.931 Paket	14500 Paket	6.986.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Pajalele || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					84.624 Paket	6.505.000,00	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.011.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.040.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan		28 Laporan	4 Laporan	4.011.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Pajalele || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					28 Laporan	4.040.000,00	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.565.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.065.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan		144 Laporan	17 Laporan	3.565.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Pajalele || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					158 Laporan	3.065.000,00	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						267.901.000,00						-		329.221.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas urusan Pemerintah Daerah						267.901.000,00						-		329.221.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		44 Unit	26 Unit	160.145.000,00							18 Unit	186.216.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.081.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			24.081.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		44 Unit	1 Unit	24.081.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Pajalele || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					18 Unit	24.081.000,00	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						463.045.000,00						-		504.787.000,00	
		Tersedianya dukungan Jasa Penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien						463.045.000,00						-		504.787.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	69.790.000,00							84 Laporan	75.527.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	390.800.000,00							84 Laporan	426.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	209 Laporan		204 Laporan	199 Laporan	2.455.000,00							204 Laporan	3.260.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						250.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			450.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	209 Laporan		204 Laporan	30 Laporan	250.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Pajalele || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					204 Laporan	450.000,00	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.577.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.577.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	12 Laporan	9.577.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Pajalele || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					84 Laporan	9.577.000,00	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						54.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Pajalele || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84 Laporan	60.000.000,00	KELURAHAN PAJALELE
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah						186.884.000,00						-		219.970.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit	6 Unit	101.748.000,00							6 Unit	134.228.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	62.166.000,00							21 Unit	62.292.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						7.032.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.154.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	4 Unit	7.032.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Pajalele || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					21 Unit	7.154.000,00	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						8.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit	0 Unit	8.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Pajalele || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Unit	9.000.000,00	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						186.884.000,00						-		219.970.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah						186.884.000,00						-		219.970.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	20.170.000,00							-	21.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						20.170.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	3 Unit	20.170.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Baula || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	21.000.000,00	KELURAHAN PAJALELE
245.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.342.710.000,00**								**1.366.077.400,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa/Kelurahan						***317.396.000,00***								***363.880.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	317.396.000,00							100 %	363.880.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.339.635.000,00						-		1.362.527.400,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang mendorong partisipasi, kemandirian dan peningkatan kapasitas masyarakat Kelurahan						1.339.635.000,00						-		1.362.527.400,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	23.800.000,00							36 Lembaga Kemasyarakatan	25.130.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	785.842.000,00							11 Pokmas / Ormas	668.200.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		30 Unit	15 Unit	528.763.000,00							14 Unit	663.267.400,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.800.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.800.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Pajalele || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36 Lembaga Kemasyarakatan	2.800.000,00	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						96.196.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			142.680.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		30 Unit	1 Unit	96.196.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Pajalele || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Unit	142.680.000,00	KELURAHAN PAJALELE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						218.400.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			218.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	218.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Pajalele || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					11 Pokmas / Ormas	218.400.000,00	KELURAHAN PAJALELE
		KELURAHAN TODDANG PULU						**320.800.000,00**								**328.390.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**320.800.000,00**								**328.390.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**320.800.000,00**								**328.390.000,00**	
246.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.906.787.000,00**								**4.739.463.388,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Dukungan Administrasi Pemerintahan Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional						***145.330.000,00***								***151.920.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	145.330.000,00							100 %	151.920.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						243.282.000,00						-		277.903.500,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah secara tertib, efektif dan akuntabel.						243.282.000,00						-		277.903.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	23.707.000,00							28 Laporan	24.198.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan		144 Laporan	163 Laporan	47.829.000,00							158 Laporan	63.130.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86.803 Paket		78.931 Paket	87.315 Paket	40.827.500,00							84.624 Paket	44.865.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.213 Paket		2.294 Paket	2.398 Paket	125.135.500,00							2.277 Paket	142.835.500,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						42.085.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			42.185.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.213 Paket		2.294 Paket	374 Paket	42.085.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Toddang Pulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					2.277 Paket	42.185.000,00	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.842.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.788.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86.803 Paket		78.931 Paket	12289 Paket	5.842.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Toddang Pulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84.624 Paket	6.788.500,00	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.875.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.875.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan		28 Laporan	4 Laporan	5.875.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Toddang Pulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					28 Laporan	5.875.000,00	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						4.597.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.597.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan		144 Laporan	18 Laporan	4.597.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Toddang Pulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					158 Laporan	4.597.500,00	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						267.901.000,00						-		329.221.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas urusan Pemerintah Daerah						267.901.000,00						-		329.221.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	112 Unit		71 Unit	18 Unit	76.986.000,00							86 Unit	92.785.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		44 Unit	26 Unit	160.145.000,00							18 Unit	186.216.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						3.720.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.820.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	112 Unit		71 Unit	1 Unit	3.720.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Toddang Pulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					86 Unit	3.820.000,00	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.830.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.930.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		44 Unit	8 Unit	10.830.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Toddang Pulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					18 Unit	10.930.000,00	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						463.045.000,00						-		504.787.000,00	
		Tersedianya dukungan Jasa Penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien						463.045.000,00						-		504.787.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	69.790.000,00							84 Laporan	75.527.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	390.800.000,00							84 Laporan	426.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	209 Laporan		204 Laporan	199 Laporan	2.455.000,00							204 Laporan	3.260.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						450.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	209 Laporan		204 Laporan	20 Laporan	450.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Toddang Pulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					204 Laporan	500.000,00	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.206.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	12 Laporan	10.206.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Toddang Pulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84 Laporan	10.300.000,00	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						44.800.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	12 Laporan	44.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Toddang Pulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					84 Laporan	50.000.000,00	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						186.884.000,00						-		219.970.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah						186.884.000,00						-		219.970.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit	6 Unit	101.748.000,00							6 Unit	134.228.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	62.166.000,00							21 Unit	62.292.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		7 Unit	4 Unit	2.800.000,00							6 Unit	2.450.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						6.574.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.574.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	3 Unit	6.574.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Toddang Pulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					21 Unit	6.574.000,00	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						350.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			350.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		7 Unit	1 Unit	350.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Toddang Pulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	350.000,00	KELURAHAN TODDANG PULU

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Toddang Pulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN TODDANG PULU
247.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.342.710.000,00**								**1.366.077.400,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa/Kelurahan						***175.470.000,00***								***176.470.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	175.470.000,00							100 %	176.470.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.339.635.000,00						-		1.362.527.400,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang mendorong partisipasi, kemandirian dan peningkatan kapasitas masyarakat Kelurahan						1.339.635.000,00						-		1.362.527.400,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	23.800.000,00							36 Lembaga Kemasyarakatan	25.130.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	785.842.000,00							11 Pokmas / Ormas	668.200.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		30 Unit	15 Unit	528.763.000,00							14 Unit	663.267.400,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.800.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.800.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Toddang Pulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36 Lembaga Kemasyarakatan	2.800.000,00	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						101.870.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			102.870.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		30 Unit	3 Unit	101.870.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Toddang Pulu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Unit	102.870.000,00	KELURAHAN TODDANG PULU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						70.800.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			70.800.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	70.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Toddang Pulu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Pokmas / Ormas	70.800.000,00	KELURAHAN TODDANG PULU
		KELURAHAN BAULA						**290.680.000,00**								**338.915.900,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**290.680.000,00**								**338.915.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**290.680.000,00**								**338.915.900,00**	
248.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.906.787.000,00**								**4.739.463.388,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Dukungan Administrasi Pemerintahan Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional						***167.268.000,00***								***173.438.500,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	167.268.000,00							100 %	173.438.500,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						243.282.000,00						-		277.903.500,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah secara tertib, efektif dan akuntabel.						243.282.000,00						-		277.903.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	23.707.000,00							28 Laporan	24.198.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan		144 Laporan	163 Laporan	47.829.000,00							158 Laporan	63.130.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86.803 Paket		78.931 Paket	87.315 Paket	40.827.500,00							84.624 Paket	44.865.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.213 Paket		2.294 Paket	2.398 Paket	125.135.500,00							2.277 Paket	142.835.500,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.068.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.213 Paket		2.294 Paket	289 Paket	13.068.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Baula || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					2.277 Paket	14.000.000,00	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.364.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86.803 Paket		78.931 Paket	14574 Paket	3.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Baula || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					84.624 Paket	4.364.000,00	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.523.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.523.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan		28 Laporan	4 Laporan	1.523.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Baula || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					28 Laporan	1.523.000,00	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.032.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.097.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan		144 Laporan	17 Laporan	2.032.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Baula || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					158 Laporan	4.097.500,00	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						267.901.000,00						-		329.221.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas urusan Pemerintah Daerah						267.901.000,00						-		329.221.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	112 Unit		71 Unit	18 Unit	76.986.000,00							86 Unit	92.785.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		44 Unit	26 Unit	160.145.000,00							18 Unit	186.216.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						14.820.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	112 Unit		71 Unit	3 Unit	14.820.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					86 Unit	15.000.000,00	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						48.680.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		44 Unit	5 Unit	48.680.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Baula || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					18 Unit	50.000.000,00	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						463.045.000,00						-		504.787.000,00	
		Tersedianya dukungan Jasa Penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien						463.045.000,00						-		504.787.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	69.790.000,00							84 Laporan	75.527.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	390.800.000,00							84 Laporan	426.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	209 Laporan		204 Laporan	199 Laporan	2.455.000,00							204 Laporan	3.260.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						420.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			450.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	209 Laporan		204 Laporan	30 Laporan	420.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Baula || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					204 Laporan	450.000,00	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.200.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	12 Laporan	8.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Baula || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					84 Laporan	8.500.000,00	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						60.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Baula || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					84 Laporan	60.000.000,00	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						186.884.000,00						-		219.970.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah						186.884.000,00						-		219.970.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit	6 Unit	101.748.000,00							6 Unit	134.228.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	62.166.000,00							21 Unit	62.292.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		7 Unit	4 Unit	2.800.000,00							6 Unit	2.450.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						6.454.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.454.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	3 Unit	6.454.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					21 Unit	6.454.000,00	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.050.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.050.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		7 Unit	3 Unit	1.050.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Baula || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	1.050.000,00	KELURAHAN BAULA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.520.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit	1 Unit	7.520.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	8.000.000,00	KELURAHAN BAULA
249.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.342.710.000,00**								**1.366.077.400,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa/Kelurahan						***123.412.000,00***								***165.477.400,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	123.412.000,00							100 %	165.477.400,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.339.635.000,00						-		1.362.527.400,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang mendorong partisipasi, kemandirian dan peningkatan kapasitas nasyarakat Kelurahan						1.339.635.000,00						-		1.362.527.400,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	23.800.000,00							36 Lembaga Kemasyarakatan	25.130.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	785.842.000,00							11 Pokmas / Ormas	668.200.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		30 Unit	15 Unit	528.763.000,00							14 Unit	663.267.400,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.800.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.800.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Baula || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					36 Lembaga Kemasyarakatan	2.800.000,00	KELURAHAN BAULA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						85.332.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			126.677.400,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		30 Unit	3 Unit	85.332.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Baula || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Unit	126.677.400,00	KELURAHAN BAULA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						35.280.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	35.280.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Baula || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					11 Pokmas / Ormas	36.000.000,00	KELURAHAN BAULA
		KELURAHAN ARATENG						**404.560.000,00**								**328.070.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**404.560.000,00**								**328.070.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**404.560.000,00**								**328.070.000,00**	
250.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.906.787.000,00**								**4.739.463.388,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Dukungan Administrasi Pemerintahan Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional						***141.674.000,00***								***151.540.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	141.674.000,00							100 %	151.540.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						243.282.000,00						-		277.903.500,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah secara tertib, efektif dan akuntabel.						243.282.000,00						-		277.903.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	23.707.000,00							28 Laporan	24.198.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan		144 Laporan	163 Laporan	47.829.000,00							158 Laporan	63.130.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86.803 Paket		78.931 Paket	87.315 Paket	40.827.500,00							84.624 Paket	44.865.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.213 Paket		2.294 Paket	2.398 Paket	125.135.500,00							2.277 Paket	142.835.500,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.273.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.394.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.213 Paket		2.294 Paket	385 Paket	11.273.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Arateng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					2.277 Paket	11.394.500,00	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.020.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.098.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	86.803 Paket		78.931 Paket	11409 Paket	5.020.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Arateng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					84.624 Paket	6.098.500,00	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.040.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.040.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28 Laporan		28 Laporan	4 Laporan	4.040.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Arateng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					28 Laporan	4.040.000,00	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.162.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.200.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan		144 Laporan	24 Laporan	7.162.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Arateng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					158 Laporan	8.200.000,00	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						267.901.000,00						-		329.221.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas urusan Pemerintah Daerah						267.901.000,00						-		329.221.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	112 Unit		71 Unit	18 Unit	76.986.000,00							86 Unit	92.785.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		44 Unit	26 Unit	160.145.000,00							18 Unit	186.216.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						15.730.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.234.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	112 Unit		71 Unit	9 Unit	15.730.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Arateng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					86 Unit	20.234.000,00	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.175.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			19.497.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		44 Unit	3 Unit	16.175.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Arateng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					18 Unit	19.497.000,00	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						463.045.000,00						-		504.787.000,00	
		Tersedianya dukungan Jasa Penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien						463.045.000,00						-		504.787.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	69.790.000,00							84 Laporan	75.527.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	390.800.000,00							84 Laporan	426.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	209 Laporan		204 Laporan	199 Laporan	2.455.000,00							204 Laporan	3.260.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						450.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			450.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	209 Laporan		204 Laporan	30 Laporan	450.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Arateng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					204 Laporan	450.000,00	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.847.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	12 Laporan	9.847.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Arateng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					84 Laporan	10.000.000,00	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						54.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			54.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Arateng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					84 Laporan	54.000.000,00	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						186.884.000,00						-		219.970.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Daerah						186.884.000,00						-		219.970.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit	6 Unit	101.748.000,00							6 Unit	134.228.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	62.166.000,00							21 Unit	62.292.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		7 Unit	4 Unit	2.800.000,00							6 Unit	2.450.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						9.276.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.276.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	3 Unit	9.276.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Arateng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					21 Unit	9.276.000,00	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						700.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			350.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		7 Unit	1 Unit	700.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Arateng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	350.000,00	KELURAHAN ARATENG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						8.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		7 Unit	1 Unit	8.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Arateng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Unit	8.000.000,00	KELURAHAN ARATENG
251.	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.342.710.000,00**								**1.366.077.400,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa/Kelurahan						***262.886.000,00***								***176.530.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	262.886.000,00							100 %	176.530.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.339.635.000,00						-		1.362.527.400,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang mendorong partisipasi, kemandirian dan peningkatan kapasitas nasyarakat Kelurahan						1.339.635.000,00						-		1.362.527.400,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	23.800.000,00							36 Lembaga Kemasyarakatan	25.130.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	785.842.000,00							11 Pokmas / Ormas	668.200.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		30 Unit	15 Unit	528.763.000,00							14 Unit	663.267.400,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.800.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Lembaga Kemasyarakatan		36 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Arateng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					36 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	KELURAHAN ARATENG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						68.004.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			101.530.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit		30 Unit	2 Unit	68.004.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Arateng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Unit	101.530.000,00	KELURAHAN ARATENG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						192.082.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			72.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	192.082.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Tellu Limpoe || Kelurahan Arateng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Pokmas / Ormas	72.000.000,00	KELURAHAN ARATENG
		KECAMATAN WATANG PULU						**3.441.909.000,00**								**4.092.764.971,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.441.909.000,00**								**4.092.764.971,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.441.909.000,00**								**4.092.764.971,00**	
252.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.188.433.000,00**								**4.699.484.971,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***3.387.709.000,00***								***4.028.764.971,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	3.387.709.000,00							100 %	4.028.764.971,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.139.837.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		3.803.692.971,00	
		Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.139.837.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		3.803.692.971,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang/bulan		560 Orang/bulan	560 Orang/bulan	3.139.837.000,00							560 Orang/bulan	3.803.692.971,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.139.837.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.803.692.971,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang/bulan		560 Orang/bulan	560 Orang/bulan	3.139.837.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					560 Orang/bulan	3.803.692.971,00	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.532.500,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		363.819.200,00	
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.532.500,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		363.819.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan		355 Laporan	355 Laporan	109.910.000,00							355 Laporan	111.485.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	231.806.000,00							15 Paket	234.905.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						34.749.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	5 Paket	34.749.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Paket	45.000.000,00	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						61.137.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.187.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan		355 Laporan	285 Laporan	61.137.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					355 Laporan	50.187.500,00	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						494.507.500,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		442.066.800,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						494.507.500,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		442.066.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.312.000,00							12 Laporan	67.712.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	416.715.500,00							12 Laporan	361.964.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.480.000,00							12 Laporan	12.390.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.980.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.990.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.980.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	4.990.000,00	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						110.945.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			88.822.500,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	110.945.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	88.822.500,00	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.556.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		89.906.000,00	
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						193.556.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		89.906.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	122.912.000,00							15 Unit	37.252.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	15.644.000,00							15 Unit	11.776.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						22.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.072.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	1 Unit	22.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Unit	20.072.000,00	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.060.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	10 Unit	5.060.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN WATANG PULU
253.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.200.000,00**								**4.000.000,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik						***600.000,00***								***2.000.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	600.000,00							100 %	2.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.200.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		4.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.200.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000,00							1 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	600.000,00							5 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						600.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						600.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN WATANG PULU
254.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.851.796.000,00**								**467.156.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***600.000,00***								***2.000.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	600.000,00							100 %	2.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						600.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		2.000.000,00	
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan						600.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	600.000,00							5 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						600.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.851.196.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		465.156.000,00	
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan						1.851.196.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		465.156.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	600.000,00							5 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						600.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN WATANG PULU
255.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**600.000,00**								**2.000.000,00**	
		Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah						***600.000,00***								***2.000.000,00***	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			999.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	600.000,00							100 %	2.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						600.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		2.000.000,00	
		Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						600.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	600.000,00							12 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						600.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN WATANG PULU
256.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**50.000.000,00**								**50.000.000,00**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat						***50.000.000,00***								***50.000.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00							100 %	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		50.000.000,00	
		Terlaksanya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00							4 Dokumen	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						50.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN WATANG PULU
257.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**1.200.000,00**								**4.000.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan						***600.000,00***								***2.000.000,00***	
			999.Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	600.000,00							100 %	2.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.200.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		4.000.000,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.200.000,00						KANTOR KECAMATAN WATANG PULU		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	600.000,00							5 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	600.000,00							5 Dokumen	2.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						600.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN WATANG PULU
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						600.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN WATANG PULU
		KELURAHAN LAWAWOI						**438.200.000,00**								**258.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**438.200.000,00**								**258.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**438.200.000,00**								**258.000.000,00**	
258.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.188.433.000,00**								**4.699.484.971,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***196.421.000,00***								***147.804.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	196.421.000,00							100 %	147.804.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.532.500,00						KANTOR KELURAHAN LAWAWOI		363.819.200,00	
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.532.500,00						KANTOR KELURAHAN LAWAWOI		363.819.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan		355 Laporan	355 Laporan	109.910.000,00							355 Laporan	111.485.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.895.500,00							10 Paket	9.119.792,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	231.806.000,00							15 Paket	234.905.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	7.921.000,00							10 Paket	8.309.408,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						26.568.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			63.700.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	5 Paket	26.568.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Lawawoi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Paket	63.700.000,00	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.651.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.485.408,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	18 Paket	1.651.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Lawawoi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	1.485.408,00	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.516.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.319.792,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	12 Paket	1.516.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Lawawoi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Paket	2.319.792,00	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						8.195.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.647.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan		355 Laporan	12 Laporan	8.195.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Lawawoi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					355 Laporan	6.647.500,00	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						494.507.500,00						KANTOR KELURAHAN LAWAWOI		442.066.800,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						494.507.500,00						KANTOR KELURAHAN LAWAWOI		442.066.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.312.000,00							12 Laporan	67.712.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	416.715.500,00							12 Laporan	361.964.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.480.000,00							12 Laporan	12.390.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.440.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.440.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Lawawoi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.200.000,00	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.400.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			12.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Lawawoi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	12.400.000,00	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						60.151.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			56.871.300,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.151.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Lawawoi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	56.871.300,00	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.556.000,00						KANTOR KELURAHAN LAWAWOI		89.906.000,00	
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						193.556.000,00						KANTOR KELURAHAN LAWAWOI		89.906.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	122.912.000,00							15 Unit	37.252.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	15.644.000,00							15 Unit	11.776.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						83.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.180.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	4 Unit	83.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Lawawoi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Unit	3.180.000,00	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	7 Unit	2.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Lawawoi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Unit	0,00	KELURAHAN LAWAWOI
259.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.851.796.000,00**								**467.156.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***241.779.000,00***								***110.196.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	241.779.000,00							100 %	110.196.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.851.196.000,00						KANTOR KELURAHAN LAWAWOI		465.156.000,00	
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan						1.851.196.000,00						KANTOR KELURAHAN LAWAWOI		465.156.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1.540.320.000,00							5 Pokmas / Ormas	111.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	310.276.000,00							5 Unit	352.156.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						39.579.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			86.196.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	1 Unit	39.579.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Lawawoi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	86.196.000,00	KELURAHAN LAWAWOI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						202.200.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			24.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	202.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Lawawoi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Pokmas / Ormas	24.000.000,00	KELURAHAN LAWAWOI
		KELURAHAN ARAWA						**534.320.000,00**								**251.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**534.320.000,00**								**251.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**534.320.000,00**								**251.000.000,00**	
260.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.188.433.000,00**								**4.699.484.971,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***119.600.000,00***								***103.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	119.600.000,00							100 %	103.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.532.500,00						KANTOR KELURAHAN ARAWA		363.819.200,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.532.500,00						KANTOR KELURAHAN ARAWA		363.819.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan		355 Laporan	355 Laporan	109.910.000,00							355 Laporan	111.485.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.895.500,00							10 Paket	9.119.792,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.054.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	12 Paket	1.054.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Arawa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						8.195.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan		355 Laporan	26 Laporan	8.195.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Arawa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					355 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						494.507.500,00						KANTOR KELURAHAN ARAWA		442.066.800,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						494.507.500,00						KANTOR KELURAHAN ARAWA		442.066.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.312.000,00							12 Laporan	67.712.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	416.715.500,00							12 Laporan	361.964.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.480.000,00							12 Laporan	12.390.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.020.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.020.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Arawa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.200.000,00	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.400.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Arawa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	9.400.000,00	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						81.993.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			64.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	81.993.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Arawa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	64.400.000,00	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.556.000,00						KANTOR KELURAHAN ARAWA		89.906.000,00	
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						193.556.000,00						KANTOR KELURAHAN ARAWA		89.906.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	55.000.000,00							6 Unit	40.878.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	122.912.000,00							15 Unit	37.252.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						6.938.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	3 Unit	6.938.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Arawa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Unit	7.000.000,00	KELURAHAN ARAWA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Arawa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Unit	20.000.000,00	KELURAHAN ARAWA
261.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.851.796.000,00**								**467.156.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***414.720.000,00***								***141.000.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	414.720.000,00							100 %	141.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.851.196.000,00						KANTOR KELURAHAN ARAWA		465.156.000,00	
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan						1.851.196.000,00						KANTOR KELURAHAN ARAWA		465.156.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1.540.320.000,00							5 Pokmas / Ormas	111.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	310.276.000,00							5 Unit	352.156.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						44.400.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	1 Unit	44.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Arawa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	120.000.000,00	KELURAHAN ARAWA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						370.320.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	370.320.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Arawa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Pokmas / Ormas	21.000.000,00	KELURAHAN ARAWA
		KELURAHAN ULU ALE						**678.440.000,00**								**177.200.000,00**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**678.440.000,00**								**177.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**678.440.000,00**								**177.200.000,00**	
262.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.188.433.000,00**								**4.699.484.971,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***161.500.000,00***								***156.200.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	161.500.000,00							100 %	156.200.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.532.500,00						KANTOR KELURAHAN ULUALE		363.819.200,00	
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.532.500,00						KANTOR KELURAHAN ULUALE		363.819.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan		355 Laporan	355 Laporan	109.910.000,00							355 Laporan	111.485.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.895.500,00							10 Paket	9.119.792,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	231.806.000,00							15 Paket	234.905.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						64.061.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	44 Paket	64.061.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Paket	60.000.000,00	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.649.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	12 Paket	3.649.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.960.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan		355 Laporan	55 Laporan	12.960.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					355 Laporan	12.000.000,00	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						494.507.500,00						KANTOR KELURAHAN ULUALE		442.066.800,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						494.507.500,00						KANTOR KELURAHAN ULUALE		442.066.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.312.000,00							12 Laporan	67.712.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	416.715.500,00							12 Laporan	361.964.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.480.000,00							12 Laporan	12.390.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.400.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	2.000.000,00	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.200.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	10.200.000,00	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						61.256.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	61.256.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	65.000.000,00	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.556.000,00						KANTOR KELURAHAN ULUALE		89.906.000,00	
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						193.556.000,00						KANTOR KELURAHAN ULUALE		89.906.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	122.912.000,00							15 Unit	37.252.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						6.974.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	3 Unit	6.974.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Unit	3.000.000,00	KELURAHAN ULU ALE
263.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.851.796.000,00**								**467.156.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***516.940.000,00***								***21.000.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	516.940.000,00							100 %	21.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.851.196.000,00						KANTOR KELURAHAN ULUALE		465.156.000,00	
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan						1.851.196.000,00						KANTOR KELURAHAN ULUALE		465.156.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1.540.320.000,00							5 Pokmas / Ormas	111.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	310.276.000,00							5 Unit	352.156.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						77.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	1 Unit	77.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	0,00	KELURAHAN ULU ALE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						439.440.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	439.440.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Uluale || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Pokmas / Ormas	21.000.000,00	KELURAHAN ULU ALE
		KELURAHAN BANGKAI						**400.760.000,00**								**260.286.000,00**	
		7 UNSUR KEWILAYAHAN						**400.760.000,00**								**260.286.000,00**	
		7.01 KECAMATAN						**400.760.000,00**								**260.286.000,00**	
264.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.188.433.000,00**								**4.699.484.971,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***205.940.000,00***								***160.326.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	205.940.000,00							100 %	160.326.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.532.500,00						KANTOR KELURAHAN BANGKAI		363.819.200,00	
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.532.500,00						KANTOR KELURAHAN BANGKAI		363.819.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan		355 Laporan	355 Laporan	109.910.000,00							355 Laporan	111.485.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.895.500,00							10 Paket	9.119.792,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	231.806.000,00							15 Paket	234.905.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	7.921.000,00							10 Paket	8.309.408,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.551.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			46.205.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	10 Paket	60.551.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Bangkai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Paket	46.205.000,00	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.643.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.824.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	39 Paket	4.643.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Bangkai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Paket	4.824.000,00	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.161.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	12 Paket	3.161.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Bangkai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Paket	0,00	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						14.325.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.650.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan		355 Laporan	50 Laporan	14.325.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Bangkai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					355 Laporan	25.650.000,00	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						494.507.500,00						KANTOR KELURAHAN BANGKAI		442.066.800,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						494.507.500,00						KANTOR KELURAHAN BANGKAI		442.066.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.312.000,00							12 Laporan	67.712.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	416.715.500,00							12 Laporan	361.964.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.480.000,00							12 Laporan	12.390.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.200.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Bangkai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.500.000,00	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.912.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.712.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.912.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Bangkai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	14.712.000,00	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						58.124.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			41.871.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.124.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Bangkai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	41.871.000,00	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.556.000,00						KANTOR KELURAHAN BANGKAI		89.906.000,00	
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						193.556.000,00						KANTOR KELURAHAN BANGKAI		89.906.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	55.000.000,00							6 Unit	40.878.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	122.912.000,00							15 Unit	37.252.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	15.644.000,00							15 Unit	11.776.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	1 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Bangkai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.024.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.686.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	5 Unit	4.024.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Bangkai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Unit	2.686.000,00	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						45.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.878.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	45.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Bangkai || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Unit	20.878.000,00	KELURAHAN BANGKAI
265.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.851.796.000,00**								**467.156.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***194.820.000,00***								***99.960.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	194.820.000,00							100 %	99.960.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.851.196.000,00						KANTOR KELURAHAN BANGKAI		465.156.000,00	
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan						1.851.196.000,00						KANTOR KELURAHAN BANGKAI		465.156.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1.540.320.000,00							5 Pokmas / Ormas	111.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	310.276.000,00							5 Unit	352.156.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						30.060.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			75.960.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	1 Unit	30.060.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Bangkai || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	75.960.000,00	KELURAHAN BANGKAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						164.760.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			24.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	164.760.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Bangkai || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Pokmas / Ormas	24.000.000,00	KELURAHAN BANGKAI
		KELURAHAN BATU LAPPA						**599.600.000,00**								**187.390.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**599.600.000,00**								**187.390.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**599.600.000,00**								**187.390.000,00**	
266.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.188.433.000,00**								**4.699.484.971,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***117.263.000,00***								***84.390.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	117.263.000,00							100 %	84.390.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.532.500,00						KANTOR KELURAHAN BATU LAPPA		363.819.200,00	
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.532.500,00						KANTOR KELURAHAN BATU LAPPA		363.819.200,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan		355 Laporan	355 Laporan	109.910.000,00							355 Laporan	111.485.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.895.500,00							10 Paket	9.119.792,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	231.806.000,00							15 Paket	234.905.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	7.921.000,00							10 Paket	8.309.408,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.877.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	3 Paket	45.877.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Paket	20.000.000,00	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.627.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	17 Paket	1.627.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.515.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.800.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	12 Paket	1.515.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Paket	1.800.000,00	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.097.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan		355 Laporan	23 Laporan	5.097.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					355 Laporan	10.000.000,00	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						494.507.500,00						KANTOR KELURAHAN BATU LAPPA		442.066.800,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						494.507.500,00						KANTOR KELURAHAN BATU LAPPA		442.066.800,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.312.000,00							12 Laporan	67.712.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	416.715.500,00							12 Laporan	361.964.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.480.000,00							12 Laporan	12.390.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.440.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.440.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.500.000,00	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.400.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	10.000.000,00	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						44.246.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	44.246.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	45.000.000,00	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.556.000,00						KANTOR KELURAHAN BATU LAPPA		89.906.000,00	
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						193.556.000,00						KANTOR KELURAHAN BATU LAPPA		89.906.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	122.912.000,00							15 Unit	37.252.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	15.644.000,00							15 Unit	11.776.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	1 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.060.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.090.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	3 Unit	4.060.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15 Unit	4.090.000,00	KELURAHAN BATU LAPPA
267.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.851.796.000,00**								**467.156.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***482.337.000,00***								***91.000.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	482.337.000,00							100 %	91.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.851.196.000,00						KANTOR KELURAHAN BATU LAPPA		465.156.000,00	
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan						1.851.196.000,00						KANTOR KELURAHAN BATU LAPPA		465.156.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1.540.320.000,00							5 Pokmas / Ormas	111.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	310.276.000,00							5 Unit	352.156.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						118.737.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	45 Unit	118.737.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	70.000.000,00	KELURAHAN BATU LAPPA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						363.600.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	363.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Watang Pulu || Kelurahan Batu Lappa || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Pokmas / Ormas	21.000.000,00	KELURAHAN BATU LAPPA
		KECAMATAN MARITENGNGAE						**5.190.283.000,00**								**5.721.088.716,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.190.283.000,00**								**5.721.088.716,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.190.283.000,00**								**5.721.088.716,00**	
268.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.962.783.000,00**								**6.493.588.716,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***5.122.783.000,00***								***5.654.588.716,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	5.122.783.000,00							100 %	5.654.588.716,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.839.283.000,00						ASN Kecamatan Maritengngae		5.302.088.716,00	
		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.839.283.000,00						ASN Kecamatan Maritengngae		5.302.088.716,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	994 Orang/bulan		896 Orang/bulan	924 Orang/bulan	4.839.283.000,00							952 Orang/bulan	5.302.088.716,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.839.283.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.302.088.716,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	994 Orang/bulan		896 Orang/bulan	924 Orang/bulan	4.839.283.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Maiellino || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				952 Orang/bulan	5.302.088.716,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kecamatan Maritengngae		178.000.000,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kecamatan Maritengngae		178.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	22.000.000,00							8 Laporan	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	99.000.000,00							8 Laporan	109.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	35.000.000,00							8 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	4.000.000,00							8 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	8.000.000,00							8 Paket	8.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Paket	500.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Paket	1.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kecamatan Maritengngae		184.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kecamatan Maritengngae		184.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	24.000.000,00							24 Unit	24.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	151.000.000,00							24 Unit	160.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						46.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	46.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24 Unit	55.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kecamatan Maritengngae		639.500.000,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kecamatan Maritengngae		639.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	67.000.000,00							8 Laporan	67.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	560.500.000,00							8 Laporan	560.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	12.000.000,00							8 Laporan	12.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Laporan	18.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						111.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			111.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	111.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Laporan	111.500.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kecamatan Maritengngae		190.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kecamatan Maritengngae		190.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	71.000.000,00							8 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	58.000.000,00							24 Unit	58.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	24 Unit	12.000.000,00							24 Unit	12.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						23.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			23.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	3 Unit	23.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24 Unit	23.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	3 Unit	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24 Unit	1.500.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
269.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**2.000.000,00**								**2.000.000,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik						***1.000.000,00***								***1.000.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	1.000.000,00							100 %	1.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.000.000,00						Masyarakat Kecamatan Maritengngae		2.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.000.000,00						Masyarakat Kecamatan Maritengngae		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00							1 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00							1 Laporan	1.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
270.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.073.180.000,00**								**1.045.500.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***8.000.000,00***								***8.000.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	8.000.000,00							100 %	8.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.000.000,00						Masyarakat Desa di Kecamatan Maritengngae		1.000.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan						1.000.000,00						Masyarakat Desa di Kecamatan Maritengngae		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00							1 Laporan	1.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Maritengngae		1.044.500.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Maritengngae		1.044.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1.000.000,00							7 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00							14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
271.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**1.000.000,00**								**1.000.000,00**	
		Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah						***1.000.000,00***								***1.000.000,00***	
			999.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	1.000.000,00							100 %	1.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1.000.000,00						Masyarakat Kecamatan Maritengngae		1.000.000,00	
		Terselenggaranya Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1.000.000,00						Masyarakat Kecamatan Maritengngae		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00							1 Laporan	1.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
272.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**50.000.000,00**								**50.000.000,00**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat						***50.000.000,00***								***50.000.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00							100 %	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						Masyarakat Kecamatan Maritengngae		50.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						Masyarakat Kecamatan Maritengngae		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00							12 Dokumen	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						50.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
273.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**3.000.000,00**								**3.000.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan						***1.000.000,00***								***1.000.000,00***	
			999.Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	1.000.000,00							100 %	1.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						3.000.000,00						Masyarakat Desa di Kecamatan Maritengngae		3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						3.000.000,00						Masyarakat Desa di Kecamatan Maritengngae		3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1 Dokumen	1.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN MARITENGNGAE
		KELURAHAN PANGKAJENE						**639.720.000,00**								**287.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**639.720.000,00**								**287.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**639.720.000,00**								**287.000.000,00**	
274.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.962.783.000,00**								**6.493.588.716,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***113.000.000,00***								***113.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	113.000.000,00							100 %	113.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kelurahan Pangkajene		178.000.000,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kelurahan Pangkajene		178.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	22.000.000,00							8 Laporan	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	99.000.000,00							8 Laporan	109.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	35.000.000,00							8 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	4.000.000,00							8 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	8.000.000,00							8 Paket	8.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene II 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	500.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	1.000.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kelurahan Pangkajene		184.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kelurahan Pangkajene		184.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	24.000.000,00							24 Unit	24.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	151.000.000,00							24 Unit	160.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				24 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24 Unit	15.000.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kelurahan Pangkajene		639.500.000,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kelurahan Pangkajene		639.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	67.000.000,00							8 Laporan	67.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	560.500.000,00							8 Laporan	560.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	12.000.000,00							8 Laporan	12.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Laporan	1.500.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						67.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			67.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	67.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Laporan	67.000.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kelurahan Pangkajene		190.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kelurahan Pangkajene		190.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	71.000.000,00							8 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	58.000.000,00							24 Unit	58.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	24 Unit	12.000.000,00							24 Unit	12.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	3 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	3 Unit	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	1.500.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE
275.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.073.180.000,00**								**1.045.500.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***517.220.000,00***								***164.500.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	517.220.000,00							100 %	164.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan Pangkajene		1.044.500.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan Pangkajene		1.044.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00							14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2.293.680.000,00							7 Pokmas / Ormas	252.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	749.500.000,00							14 Unit	763.500.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						123.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			125.500.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	123.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Unit	125.500.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						390.720.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	390.720.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Pangkajene || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Pokmas / Ormas	36.000.000,00	KELURAHAN PANGKAJENE
		KELURAHAN LAUTANG BENTENG						**471.080.000,00**								**262.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**471.080.000,00**								**262.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**471.080.000,00**								**262.000.000,00**	
276.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.962.783.000,00**								**6.493.588.716,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***108.000.000,00***								***108.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	108.000.000,00							100 %	108.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kelurahan Lautang Benteng		178.000.000,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kelurahan Lautang Benteng		178.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	22.000.000,00							8 Laporan	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	99.000.000,00							8 Laporan	109.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	35.000.000,00							8 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	4.000.000,00							8 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	8.000.000,00							8 Paket	8.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi/Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	500.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	1.000.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kelurahan Lautang Benteng		184.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kelurahan Lautang Benteng		184.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	24.000.000,00							24 Unit	24.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	151.000.000,00							24 Unit	160.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	15.000.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kelurahan Lautang Benteng		639.500.000,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kelurahan Lautang Benteng		639.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	67.000.000,00							8 Laporan	67.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	560.500.000,00							8 Laporan	560.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	12.000.000,00							8 Laporan	12.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	1.500.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						62.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	62.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Laporan	62.000.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kelurahan Lautang Benteng		190.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kelurahan Lautang Benteng		190.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	71.000.000,00							8 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	58.000.000,00							24 Unit	58.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	24 Unit	12.000.000,00							24 Unit	12.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	3 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	3 Unit	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	1.500.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
277.	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.073.180.000,00**								**1.045.500.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***353.580.000,00***								***144.500.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	353.580.000,00							100 %	144.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan Lautang Benteng		1.044.500.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan Lautang Benteng		1.044.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00							14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2.293.680.000,00							7 Pokmas / Ormas	252.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	749.500.000,00							14 Unit	763.500.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						103.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			105.500.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	103.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Unit	105.500.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						247.080.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	247.080.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lautang Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Pokmas / Ormas	36.000.000,00	KELURAHAN LAUTANG BENTENG
		KELURAHAN MAJJELING						**551.960.000,00**								**262.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**551.960.000,00**								**262.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**551.960.000,00**								**262.000.000,00**	
278.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.962.783.000,00**								**6.493.588.716,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***108.000.000,00***								***108.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	108.000.000,00							100 %	108.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kelurahan Majjelling		178.000.000,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kelurahan Majjelling		178.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	22.000.000,00							8 Laporan	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	99.000.000,00							8 Laporan	109.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	35.000.000,00							8 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	4.000.000,00							8 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	8.000.000,00							8 Paket	8.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	500.000,00	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	1.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kelurahan Majjelling		184.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kelurahan Majjelling		184.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	24.000.000,00							24 Unit	24.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	151.000.000,00							24 Unit	160.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	15.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kelurahan Majelling		639.500.000,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kelurahan Majelling		639.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	67.000.000,00							8 Laporan	67.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	560.500.000,00							8 Laporan	560.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	12.000.000,00							8 Laporan	12.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	1.500.000,00	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						62.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	62.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Laporan	62.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kelurahan Majelling		190.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kelurahan Majelling		190.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	71.000.000,00							8 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	58.000.000,00							24 Unit	58.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	24 Unit	12.000.000,00							24 Unit	12.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyedisan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	3 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	3 Unit	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	1.500.000,00	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING
279.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.073.180.000,00**								**1.045.500.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***434.460.000,00***								***144.500.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	434.460.000,00							100 %	144.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan Majelling		1.044.500.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan Majelling		1.044.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00							14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2.293.680.000,00							7 Pokmas / Ormas	252.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	749.500.000,00							14 Unit	763.500.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	-					14 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						103.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			105.500.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	103.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Unit	105.500.000,00	KELURAHAN MAJJELING
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						327.960.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	327.960.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Pokmas / Ormas	36.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING
		KELURAHAN WALA						**441.080.000,00**								**262.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**441.080.000,00**								**262.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**441.080.000,00**								**262.000.000,00**	
280.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.962.783.000,00**								**6.493.588.716,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***108.000.000,00***								***108.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	108.000.000,00							100 %	108.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kelurahan Wala		178.000.000,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kelurahan Wala		178.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	22.000.000,00							8 Laporan	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	99.000.000,00							8 Laporan	109.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	35.000.000,00							8 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	4.000.000,00							8 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	8.000.000,00							8 Paket	8.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Wala || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	500.000,00	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Wala || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Wala || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	1.000.000,00	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Wala || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kelurahan Wala		184.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kelurahan Wala		184.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	24.000.000,00							24 Unit	24.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	151.000.000,00							24 Unit	160.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Wala || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Wala || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	15.000.000,00	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kelurahan Wala		639.500.000,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kelurahan Wala		639.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	67.000.000,00							8 Laporan	67.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	560.500.000,00							8 Laporan	560.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	12.000.000,00							8 Laporan	12.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	1.500.000,00	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Wala || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						62.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	62.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Wala || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Laporan	62.000.000,00	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kelurahan Wala		190.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kelurahan Wala		190.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	71.000.000,00							8 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	58.000.000,00							24 Unit	58.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	24 Unit	12.000.000,00							24 Unit	12.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	3 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Wala || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	3 Unit	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Wala || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	1.500.000,00	KELURAHAN WALA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Wala || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN WALA
281.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.073.180.000,00**								**1.045.500.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***323.580.000,00***								***144.500.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	323.580.000,00							100 %	144.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan Wala		1.044.500.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan Wala		1.044.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00							14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2.293.680.000,00							7 Pokmas / Ormas	252.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	749.500.000,00							14 Unit	763.500.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Wala || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	KELURAHAN WALA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						103.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			105.500.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	103.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Wala || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Unit	105.500.000,00	KELURAHAN WALA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						217.080.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	217.080.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Wala || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Pokmas / Ormas	36.000.000,00	KELURAHAN WALA
		KELURAHAN RIJANG PITTU						**807.360.000,00**								**272.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**807.360.000,00**								**272.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**807.360.000,00**								**272.000.000,00**	
282.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.962.783.000,00**								**6.493.588.716,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***113.000.000,00***								***113.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	113.000.000,00							100 %	113.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kelurahan Rijang Pittu		178.000.000,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kelurahan Rijang Pittu		178.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	22.000.000,00							8 Laporan	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	99.000.000,00							8 Laporan	109.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	35.000.000,00							8 Paket	35.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	4.000.000,00							8 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	8.000.000,00							8 Paket	8.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	500.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	1.000.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kelurahan Rijang Pittu		184.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kelurahan Rijang Pittu		184.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	24.000.000,00							24 Unit	24.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	151.000.000,00							24 Unit	160.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				24 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				24 Unit	15.000.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kelurahan Rijang Pittu		639.500.000,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kelurahan Rijang Pittu		639.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	67.000.000,00							8 Laporan	67.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	560.500.000,00							8 Laporan	560.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	12.000.000,00							8 Laporan	12.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Laporan	1.500.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						67.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			67.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	67.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				8 Laporan	67.000.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kelurahan Rijang Pittu		190.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kelurahan Rijang Pittu		190.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	71.000.000,00							8 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	58.000.000,00							24 Unit	58.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	24 Unit	12.000.000,00							24 Unit	12.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	3 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	3 Unit	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	1.500.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
283.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.073.180.000,00**								**1.045.500.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***684.860.000,00***								***149.500.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	684.860.000,00							100 %	149.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan Rijang Pittu		1.044.500.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan Rijang Pittu		1.044.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00							14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2.293.680.000,00							7 Pokmas / Ormas	252.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	749.500.000,00							14 Unit	763.500.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						108.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			110.500.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	108.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Unit	110.500.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						573.360.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	573.360.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Rijang Pitu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Pokmas / Ormas	36.000.000,00	KELURAHAN RIJANG PITTU
		KELURAHAN MAJJELING WATTANG						**464.120.000,00**								**262.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**464.120.000,00**								**262.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**464.120.000,00**								**262.000.000,00**	
284.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.962.783.000,00**								**6.493.588.716,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***108.000.000,00***								***108.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	108.000.000,00							100 %	108.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kelurahan Majjelling Wattang		178.000.000,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kelurahan Majjelling Wattang		178.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	22.000.000,00							8 Laporan	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	99.000.000,00							8 Laporan	109.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	35.000.000,00							8 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	4.000.000,00							8 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	8.000.000,00							8 Paket	8.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majjelling Watang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	500.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majjelling Watang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majjelling Watang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majjelling Watang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	1.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majjelling Watang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kelurahan Majjelling Wattang		184.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kelurahan Majjelling Wattang		184.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	24.000.000,00							24 Unit	24.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	151.000.000,00							24 Unit	160.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majjelling Watang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majjelling Watang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	15.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kelurahan Majjelling Wattang		639.500.000,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kelurahan Majjelling Wattang		639.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	67.000.000,00							8 Laporan	67.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	560.500.000,00							8 Laporan	560.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	12.000.000,00							8 Laporan	12.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majjelling Watang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	1.500.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majjelling Watang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						62.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	62.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majjelling Watang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Laporan	62.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kelurahan Majjelling Wattang		190.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kelurahan Majjelling Wattang		190.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	71.000.000,00							8 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	58.000.000,00							24 Unit	58.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	24 Unit	12.000.000,00							24 Unit	12.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	3 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majjelling Watang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	3 Unit	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling Watang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	1.500.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling Watang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
285.	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.073.180.000,00**								**1.045.500.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***346.620.000,00***								***144.500.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	346.620.000,00							100 %	144.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan Majjelling Wattang		1.044.500.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan Majjelling Wattang		1.044.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00							14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2.293.680.000,00							7 Pokmas / Ormas	252.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	749.500.000,00							14 Unit	763.500.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling Watang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						103.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			105.500.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	103.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Majelling Watang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Unit	105.500.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						240.120.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	240.120.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lekessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Pokmas / Ormas	36.000.000,00	KELURAHAN MAJJELING WATTANG
		KELURAHAN LAKESSI						**526.360.000,00**								**267.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**526.360.000,00**								**267.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**526.360.000,00**								**267.000.000,00**	
286.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.962.783.000,00**								**6.493.588.716,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***113.000.000,00***								***113.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	113.000.000,00							100 %	113.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kelurahan Lakessi		178.000.000,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.000.000,00						Kantor Kelurahan Lakessi		178.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	22.000.000,00							8 Laporan	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	99.000.000,00							8 Laporan	109.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	35.000.000,00							8 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	4.000.000,00							8 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	8.000.000,00							8 Paket	8.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lekessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	500.000,00	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lekessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lekessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lakessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	1.000.000,00	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lakessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kelurahan Lakessi		184.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						175.000.000,00						Kantor Kelurahan Lakessi		184.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	24.000.000,00							24 Unit	24.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	24 Unit	151.000.000,00							24 Unit	160.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lakessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		24 Unit	3 Unit	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lakessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	15.000.000,00	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kelurahan Lakessi		639.500.000,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						639.500.000,00						Kantor Kelurahan Lakessi		639.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	67.000.000,00							8 Laporan	67.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	560.500.000,00							8 Laporan	560.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	12.000.000,00							8 Laporan	12.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lakessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	1.500.000,00	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lakessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						67.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			67.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	67.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lakessi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Laporan	67.000.000,00	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kelurahan Lakessi		190.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.000.000,00						Kantor Kelurahan Lakessi		190.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	71.000.000,00							8 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	58.000.000,00							24 Unit	58.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	24 Unit	12.000.000,00							24 Unit	12.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						5.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		24 Unit	3 Unit	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lakessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	3 Unit	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lakessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					24 Unit	1.500.000,00	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lakessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN LAKESSI
287.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.073.180.000,00**								**1.045.500.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***403.860.000,00***								***144.500.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	403.860.000,00							100 %	144.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan Lakessi		1.044.500.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan						3.072.180.000,00						Masyarakat Kelurahan Lakessi		1.044.500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00							14 Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2.293.680.000,00							7 Pokmas / Ormas	252.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	749.500.000,00							14 Unit	763.500.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lekessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000,00	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						103.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			105.500.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	103.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lekessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					14 Unit	105.500.000,00	KELURAHAN LAKESSI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						297.360.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	297.360.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Maritengngae || Kelurahan Lekessi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Pokmas / Ormas	36.000.000,00	KELURAHAN LAKESSI
		KECAMATAN WATTANG SIDENRENG						**2.622.744.000,00**								**2.741.037.340,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.622.744.000,00**								**2.741.037.340,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.622.744.000,00**								**2.741.037.340,00**	
288.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.967.462.000,00**								**3.091.807.340,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***2.557.244.000,00***								***2.678.537.340,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	2.557.244.000,00							100 %	2.678.537.340,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.320.344.000,00						-		2.343.547.440,00	
		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.320.344.000,00						-		2.343.547.440,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 Orang/bulan		434 Orang/bulan	448 Orang/bulan	2.320.344.000,00							448 Orang/bulan	2.343.547.440,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.320.344.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.343.547.440,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 Orang/bulan		434 Orang/bulan	448 Orang/bulan	2.320.344.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					448 Orang/bulan	2.343.547.440,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.826.500,00						-		215.517.900,00	
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.826.500,00						-		215.517.900,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	34.259.000,00							48 Laporan	36.159.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	66.224.500,00							48 Laporan	111.127.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket		48 Paket	48 Paket	16.955.000,00							48 Paket	17.528.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.640.000,00							12 Paket	10.680.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.000.000,00							12 Paket	17.275.400,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	22.748.000,00							6 Paket	22.748.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.030.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	3 Paket	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	3.030.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			17.275.400,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	3 Paket	12.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	17.275.400,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						15.794.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.794.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	3 Paket	15.794.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Paket	15.794.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.080.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket		48 Paket	12 Paket	8.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Paket	8.080.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.150.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	15.150.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						27.874.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.554.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan		48 Laporan	3 Laporan	27.874.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	60.554.500,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						145.989.000,00						-		174.292.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						145.989.000,00						-		174.292.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	24.396.000,00							4 Unit	64.944.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	121.593.000,00							4 Unit	109.348.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.360.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	36.360.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			43.077.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	1 Unit	35.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	43.077.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						239.169.000,00						-		253.656.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						239.169.000,00						-		253.656.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	46.400.000,00							48 Laporan	53.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	189.853.000,00							48 Laporan	197.031.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	2.916.000,00							48 Laporan	2.925.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.116.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.125.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	1.116.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	1.125.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	16.000.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						48.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			57.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					48 Laporan	57.000.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.133.500,00						-		104.794.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.133.500,00						-		104.794.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.059.500,00							5 Unit	41.684.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	46.862.000,00							7 Unit	46.632.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	22 Unit	12.212.000,00							22 Unit	16.478.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.148.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.158.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	2 Unit	25.148.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Unit	25.158.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.952.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	7 Unit	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22 Unit	5.952.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						28.967.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.434.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	2 Unit	28.967.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	30.434.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
289.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.500.000,00**								**1.500.000,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik						***1.500.000,00***								***1.500.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	1.500.000,00							100 %	1.500.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.500.000,00						-		1.500.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						1.500.000,00						-		1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00							12 Laporan	1.500.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						1.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
290.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**635.302.000,00**								**482.668.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***6.500.000,00***								***6.500.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	6.500.000,00							100 %	6.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.500.000,00						-		1.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa						1.500.000,00						-		1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00							12 Laporan	1.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						633.802.000,00						-		481.168.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						633.802.000,00						-		481.168.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00							12 Laporan	1.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00							4 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						1.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
291.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**50.000.000,00**								**50.000.000,00**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat						***50.000.000,00***								***50.000.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00							100 %	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00							12 Dokumen	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						50.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
292.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**3.000.000,00**								**3.000.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan						***1.500.000,00***								***1.500.000,00***	
			999.Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	1.500.000,00							100 %	1.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						3.000.000,00						-		3.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						3.000.000,00						-		3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00							5 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00							5 Dokumen	1.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						1.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN WATTANG SIDENRENG
		KELURAHAN SIDENRENG						**381.240.000,00**								**272.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**381.240.000,00**								**272.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**381.240.000,00**								**272.000.000,00**	
293.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.967.462.000,00**								**3.091.807.340,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***122.150.000,00***								***143.132.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	122.150.000,00							100 %	143.132.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.826.500,00						-		215.517.900,00	
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.826.500,00						-		215.517.900,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	34.259.000,00							48 Laporan	36.159.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	66.224.500,00							48 Laporan	111.127.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket		48 Paket	48 Paket	16.955.000,00							48 Paket	17.528.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.640.000,00							12 Paket	10.680.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	22.748.000,00							6 Paket	22.748.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.550.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.550.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	3 Paket	2.550.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	2.550.000,00	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.318.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.318.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	2.318.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Paket	2.318.000,00	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.319.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.149.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket		48 Paket	12 Paket	3.319.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Paket	3.149.500,00	KELURAHAN SIDENRENG

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.003.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.003.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	7.003.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	7.003.000,00	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.427.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.857.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan		48 Laporan	3 Laporan	12.427.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	16.857.500,00	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						145.989.000,00						-		174.292.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						145.989.000,00						-		174.292.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	24.396.000,00							4 Unit	64.944.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	121.593.000,00							4 Unit	109.348.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						16.684.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.618.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	7 Unit	16.684.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	13.618.000,00	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.524.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			23.255.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	1 Unit	11.524.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	23.255.000,00	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						239.169.000,00						-		253.656.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						239.169.000,00						-		253.656.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	46.400.000,00							48 Laporan	53.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	189.853.000,00							48 Laporan	197.031.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	2.916.000,00							48 Laporan	2.925.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						600.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			600.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					48 Laporan	600.000,00	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.200.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			12.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	12.400.000,00	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						43.996.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			46.677.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	43.996.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					48 Laporan	46.677.000,00	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.133.500,00						-		104.794.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.133.500,00						-		104.794.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.059.500,00							5 Unit	41.684.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	46.862.000,00							7 Unit	46.632.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	22 Unit	12.212.000,00							22 Unit	16.478.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						7.158.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.158.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	1 Unit	7.158.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Unit	7.158.000,00	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.666.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.842.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	5 Unit	3.666.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22 Unit	3.842.000,00	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.704.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.704.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	1 Unit	3.704.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	3.704.000,00	KELURAHAN SIDENRENG
294.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**635.302.000,00**								**482.668.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***259.090.000,00***								***128.868.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	259.090.000,00							100 %	128.868.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						633.802.000,00						-		481.168.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						633.802.000,00						-		481.168.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00							4 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	288.120.000,00							12 Pokmas / Ormas	109.800.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	336.182.000,00							3 Unit	361.868.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						125.250.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			121.868.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit	1 Unit	125.250.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	121.868.000,00	KELURAHAN SIDENRENG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						132.840.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	132.840.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Pokmas / Ormas	6.000.000,00	KELURAHAN SIDENRENG
		KELURAHAN KANYUARA						**297.480.000,00**								**262.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**297.480.000,00**								**262.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**297.480.000,00**								**262.000.000,00**	
295.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.967.462.000,00**								**3.091.807.340,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***154.812.000,00***								***135.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	154.812.000,00							100 %	135.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.826.500,00						-		215.517.900,00	
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.826.500,00						-		215.517.900,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	34.259.000,00							48 Laporan	36.159.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	66.224.500,00							48 Laporan	111.127.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket		48 Paket	48 Paket	16.955.000,00							48 Paket	17.528.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.640.000,00							12 Paket	10.680.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	22.748.000,00							6 Paket	22.748.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.540.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.550.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	3 Paket	2.540.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	2.550.000,00	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.318.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.318.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	2.318.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Kanyuara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Paket	2.318.000,00	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.604.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.149.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket		48 Paket	12 Paket	2.604.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Kanyuara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Paket	3.149.500,00	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.991.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.003.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	6.991.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Kanyuara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	7.003.000,00	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						16.857.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.857.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	16.857.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Kanyuara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	16.857.500,00	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						145.989.000,00						-		174.292.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						145.989.000,00						-		174.292.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	24.396.000,00							4 Unit	64.944.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	121.593.000,00							4 Unit	109.348.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						4.836.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.225.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	1 Unit	4.836.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Kanyuara || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	7.225.000,00	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						37.200.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			22.016.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	1 Unit	37.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Kanyuara || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	22.016.000,00	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						239.169.000,00						-		253.656.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						239.169.000,00						-		253.656.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	46.400.000,00							48 Laporan	53.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	189.853.000,00							48 Laporan	197.031.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	2.916.000,00							48 Laporan	2.925.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						600.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			600.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Kanyuara || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					48 Laporan	600.000,00	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.400.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			12.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	12.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Kanyuara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	12.900.000,00	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						54.179.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			46.677.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	54.179.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Kanyuara || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					48 Laporan	46.677.000,00	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.133.500,00						-		104.794.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.133.500,00						-		104.794.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.059.500,00							5 Unit	41.684.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	46.862.000,00							7 Unit	46.632.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	22 Unit	12.212.000,00							22 Unit	16.478.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						7.398.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.158.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	2 Unit	7.398.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Unit	7.158.000,00	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.204.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.842.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	5 Unit	3.204.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Kanyuara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22 Unit	2.842.000,00	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.684.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.704.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	1 Unit	3.684.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Kanyuara || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	3.704.000,00	KELURAHAN KANYUARA
296.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**635.302.000,00**								**482.668.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***142.668.000,00***								***127.000.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	142.668.000,00							100 %	127.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						633.802.000,00						-		481.168.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						633.802.000,00						-		481.168.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00							4 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	288.120.000,00							12 Pokmas / Ormas	109.800.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	336.182.000,00							3 Unit	361.868.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Kanyuara || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						90.188.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit	1 Unit	90.188.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Kanyuara || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	120.000.000,00	KELURAHAN KANYUARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						51.480.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	51.480.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Kanyuara || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Pokmas / Ormas	6.000.000,00	KELURAHAN KANYUARA
		KELURAHAN EMPAGAE						**355.800.000,00**								**353.938.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**355.800.000,00**								**353.938.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**355.800.000,00**								**353.938.000,00**	
297.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.967.462.000,00**								**3.091.807.340,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***130.256.000,00***								***131.296.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	130.256.000,00							100 %	131.296.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.826.500,00						-		215.517.900,00	
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.826.500,00						-		215.517.900,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	34.259.000,00							48 Laporan	36.159.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	66.224.500,00							48 Laporan	111.127.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket		48 Paket	48 Paket	16.955.000,00							48 Paket	17.528.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.640.000,00							12 Paket	10.680.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	22.748.000,00							6 Paket	22.748.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.550.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.550.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	3 Paket	2.550.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	2.550.000,00	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.318.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.318.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	2.318.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Paket	2.318.000,00	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.032.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.149.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket		48 Paket	12 Paket	3.032.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Watang Sidenreng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Paket	3.149.500,00	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.265.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.003.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	5.265.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	7.003.000,00	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						9.065.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.857.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	9.065.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	16.857.500,00	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						145.989.000,00						-		174.292.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						145.989.000,00						-		174.292.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	24.396.000,00							4 Unit	64.944.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	121.593.000,00							4 Unit	109.348.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						1.876.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.741.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	1 Unit	1.876.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	7.741.000,00	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						37.869.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	1 Unit	37.869.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	21.000.000,00	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						239.169.000,00						-		253.656.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						239.169.000,00						-		253.656.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	46.400.000,00							48 Laporan	53.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	189.853.000,00							48 Laporan	197.031.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	2.916.000,00							48 Laporan	2.925.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						600.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			600.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	600.000,00	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.800.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			12.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					48 Laporan	12.400.000,00	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						43.677.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			46.677.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	12 Laporan	43.677.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					48 Laporan	46.677.000,00	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.133.500,00						-		104.794.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.133.500,00						-		104.794.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.059.500,00							5 Unit	41.684.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	46.862.000,00							7 Unit	46.632.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	22 Unit	12.212.000,00							22 Unit	16.478.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						7.158.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.158.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	1 Unit	7.158.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Unit	7.158.000,00	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.342.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.842.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	5 Unit	2.342.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22 Unit	3.842.000,00	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.704.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.842.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	1 Unit	3.704.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	3.842.000,00	KELURAHAN EMPAGAE
298.	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**635.302.000,00**								**482.668.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***225.544.000,00***								***218.800.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	225.544.000,00							100 %	218.800.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						633.802.000,00						-		481.168.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan						633.802.000,00						-		481.168.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00							4 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	288.120.000,00							12 Pokmas / Ormas	109.800.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	336.182.000,00							3 Unit	361.868.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						120.744.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit	1 Unit	120.744.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	120.000.000,00	KELURAHAN EMPAGAE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						103.800.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			97.800.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	103.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan WT. Sidenreng || Kelurahan Empagae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Pokmas / Ormas	97.800.000,00	KELURAHAN EMPAGAE
		KECAMATAN DUA PITUE						**1.874.135.000,00**								**1.872.300.720,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.874.135.000,00**								**1.872.300.720,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.874.135.000,00**								**1.872.300.720,00**	
299.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.055.799.000,00**								**2.055.781.360,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***1.789.035.000,00***								***1.786.349.720,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	1.789.035.000,00							100 %	1.786.349.720,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.335.000,00						Kantor Kecamatan		1.348.350,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.335.000,00						Kantor Kecamatan		1.348.350,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.335.000,00							1 Laporan	1.348.350,00	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.335.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.348.350,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	1.335.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	1.348.350,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.558.063.000,00						Kantor Kecamatan		1.553.068.000,00	
		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.558.063.000,00						Kantor Kecamatan		1.553.068.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan		406 Orang/bulan	420 Orang/bulan	1.558.063.000,00							434 Orang/bulan	1.553.068.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.558.063.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.553.068.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan		406 Orang/bulan	420 Orang/bulan	1.558.063.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					434 Orang/bulan	1.553.068.000,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						154.012.000,00						Kantor Kecamatan		155.552.120,00	
		Terseleggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah						154.012.000,00						Kantor Kecamatan		155.552.120,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.600.000,00							1 Laporan	14.746.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	52.130.000,00							120 Laporan	52.651.300,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	800 Paket		800 Paket	800 Paket	3.709.000,00							800 Paket	3.746.090,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		13 Paket	14 Paket	1.500.000,00							14 Paket	1.515.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	78.334.000,00							8 Paket	79.117.340,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	3.739.000,00							7 Paket	3.776.390,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi/Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.515.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		13 Paket	14 Paket	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14 Paket	1.515.000,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						31.462.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			31.776.620,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	4 Paket	31.462.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Paket	31.776.620,00	KECAMATAN DUA PITUE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.739.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.776.390,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	3.739.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Paket	3.776.390,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.846.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.864.460,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	800 Paket		800 Paket	900 Paket	1.846.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					800 Paket	1.864.460,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						14.600.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.746.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	14.746.000,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.300.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	193 Laporan	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120 Laporan	30.300.000,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						36.351.000,00						Kantor Kecamatan		36.714.510,00	
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						36.351.000,00						Kantor Kecamatan		36.714.510,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	6.351.000,00							3 Unit	6.414.510,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						6.351.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.414.510,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	5 Unit	6.351.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	6.414.510,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						255.566.000,00						Kantor Kecamatan		258.121.660,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						255.566.000,00						Kantor Kecamatan		258.121.660,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	54.792.000,00							12 Laporan	55.339.920,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	195.774.000,00							12 Laporan	197.731.740,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	5.000.000,00							250 Laporan	5.050.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.515.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan		250 Laporan	90 Laporan	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					250 Laporan	1.515.000,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						35.028.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			35.378.280,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.028.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	35.378.280,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						70.079.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			70.779.790,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.079.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	70.779.790,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.472.000,00						Kantor Kecamatan		50.976.720,00	
		Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.472.000,00						Kantor Kecamatan		50.976.720,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.000.000,00							2 Unit	10.100.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	37.618.000,00							11 Unit	37.994.180,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.854.000,00							4 Unit	2.882.540,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						22.178.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			22.399.780,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	4 Unit	22.178.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Unit	22.399.780,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.854.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.882.540,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.854.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	2.882.540,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	10.100.000,00	KECAMATAN DUA PITUE
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						36.351.000,00						Kantor Kecamatan		36.714.510,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00							-	30.300.000,00	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.300.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	30.300.000,00	KECAMATAN DUA PITUE
300.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**900.000,00**								**909.000,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik						***300.000,00***								***303.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	300.000,00							100 %	303.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						900.000,00						Kantor Kecamatan		909.000,00	
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilimpahkan kepada Camat						900.000,00						Kantor Kecamatan		909.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	300.000,00							3 Dokumen	303.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	300.000,00							3 Laporan	303.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	300.000,00							3 Laporan	303.000,00	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha						300.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			303.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	303.000,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						300.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			303.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Laporan	303.000,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						300.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			303.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Laporan	303.000,00	KECAMATAN DUA PITUE
301.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**646.996.000,00**								**654.146.760,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***300.000,00***								***303.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	300.000,00							100 %	303.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						600.000,00						Kantor Kecamatan		606.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan						600.000,00						Kantor Kecamatan		606.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	300.000,00							2 Laporan	303.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	300.000,00							3 Lembaga Kemasyarakatan	303.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						300.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			303.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Lembaga Kemasyarakatan	303.000,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						300.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			303.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	303.000,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						646.396.000,00						Kantor Kecamatan		653.540.760,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan						646.396.000,00						Kantor Kecamatan		653.540.760,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	300.000,00							3 Laporan	303.000,00	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						300.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			303.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Laporan	303.000,00	KECAMATAN DUA PITUE
302.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**450.000,00**								**454.500,00**	
		Terciptanya Kondisi Wilayah Kecamatan yang Aman, Tertib, dan Kondusif Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Aktif Masyarakat						***450.000,00***								***454.500,00***	
			999.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	450.000,00							100 %	454.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						450.000,00						Kantor Kecamatan		454.500,00	
		Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum						450.000,00						Kantor Kecamatan		454.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	450.000,00							2 Laporan	454.500,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						450.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			454.500,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	450.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	454.500,00	KECAMATAN DUA PITUE
303.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**50.000.000,00**								**50.500.000,00**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat						***50.000.000,00***								***50.500.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00							100 %	50.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						Kantor Kecamatan		50.500.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						Kantor Kecamatan		50.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00							12 Dokumen	50.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						50.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.500.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	50.500.000,00	KECAMATAN DUA PITUE
304.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**1.350.000,00**								**1.363.500,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan						***450.000,00***								***454.500,00***	
			999.Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	450.000,00							100 %	454.500,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.350.000,00						Kantor Kecamatan		1.363.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.350.000,00						Kantor Kecamatan		1.363.500,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	450.000,00							3 Dokumen	454.500,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	450.000,00							3 Dokumen	454.500,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	450.000,00							3 Dokumen	454.500,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						450.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			454.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	450.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	454.500,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						450.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			454.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	450.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	454.500,00	KECAMATAN DUA PITUE
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						450.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			454.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	450.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	454.500,00	KECAMATAN DUA PITUE
		KELURAHAN SALOMALLORI						**392.440.000,00**								**396.364.400,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**392.440.000,00**								**396.364.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**392.440.000,00**								**396.364.400,00**	
305.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.055.799.000,00**								**2.055.781.360,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***119.764.000,00***								***120.961.640,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	119.764.000,00							100 %	120.961.640,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						154.012.000,00						Kantor Kecamatan		155.552.120,00	
		Terseleggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah						154.012.000,00						Kantor Kecamatan		155.552.120,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	52.130.000,00							120 Laporan	52.651.300,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	800 Paket		800 Paket	800 Paket	3.709.000,00							800 Paket	3.746.090,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	78.334.000,00							8 Paket	79.117.340,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						22.565.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			22.790.650,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	2 Paket	22.565.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Salomalori || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Paket	22.790.650,00	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.863.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.881.630,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	800 Paket		800 Paket	250 Paket	1.863.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Salomalori || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					800 Paket	1.881.630,00	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						13.130.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.261.300,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	40 Laporan	13.130.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Salomalori || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120 Laporan	13.261.300,00	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						255.566.000,00						Kantor Kecamatan		258.121.660,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						255.566.000,00						Kantor Kecamatan		258.121.660,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	54.792.000,00							12 Laporan	55.339.920,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	195.774.000,00							12 Laporan	197.731.740,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	5.000.000,00							250 Laporan	5.050.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.515.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan		250 Laporan	90 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Salomalori || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					250 Laporan	1.515.000,00	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.804.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.902.040,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.804.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Salomalori || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	9.902.040,00	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						63.502.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			64.137.020,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.502.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Salomalori || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	64.137.020,00	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.472.000,00						Kantor Kecamatan		50.976.720,00	
		Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.472.000,00						Kantor Kecamatan		50.976.720,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	37.618.000,00							11 Unit	37.994.180,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						7.400.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.474.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	3 Unit	7.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Salomalori || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Unit	7.474.000,00	KELURAHAN SALOMALLORI
306.	7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**646.996.000,00**								**654.146.760,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***272.676.000,00***								***275.402.760,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	272.676.000,00							100 %	275.402.760,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						646.396.000,00						Kantor Kecamatan		653.540.760,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan						646.396.000,00						Kantor Kecamatan		653.540.760,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Lembaga Kemasyarakatan		20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00							20 Lembaga Kemasyarakatan	2.020.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	367.360.000,00							2 Pokmas / Ormas	371.714.400,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	276.736.000,00							4 Unit	279.503.360,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			505.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Lembaga Kemasyarakatan		20 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Salomalori || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Lembaga Kemasyarakatan	505.000,00	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						136.736.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			138.103.360,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	136.736.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Salomalori || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	138.103.360,00	KELURAHAN SALOMALLORI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						135.440.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			136.794.400,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	135.440.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Salomalori || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Pokmas / Ormas	136.794.400,00	KELURAHAN SALOMALLORI
		KELURAHAN TANRU TEDONG						**488.920.000,00**								**494.490.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**488.920.000,00**								**494.490.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**488.920.000,00**								**494.490.000,00**	
307.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.055.799.000,00**								**2.055.781.360,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***115.500.000,00***								***116.655.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	115.500.000,00							100 %	116.655.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						154.012.000,00						Kantor Kecamatan		155.552.120,00	
		Terseleggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah						154.012.000,00						Kantor Kecamatan		155.552.120,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	52.130.000,00							120 Laporan	52.651.300,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	78.334.000,00							8 Paket	79.117.340,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						24.307.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			24.550.070,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	2 Paket	24.307.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Tanru Tedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Paket	24.550.070,00	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						9.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.090.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	40 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Tanru Tedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120 Laporan	9.090.000,00	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						255.566.000,00						Kantor Kecamatan		258.121.660,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						255.566.000,00						Kantor Kecamatan		258.121.660,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	54.792.000,00							12 Laporan	55.339.920,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	195.774.000,00							12 Laporan	197.731.740,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	5.000.000,00							250 Laporan	5.050.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.020.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan		250 Laporan	170 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Tanru Tedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					250 Laporan	2.020.000,00	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.960.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.059.600,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.960.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Tanru Tedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	10.059.600,00	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						62.193.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.814.930,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	62.193.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Tanru Tedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	62.814.930,00	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.472.000,00						Kantor Kecamatan		50.976.720,00	
		Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.472.000,00						Kantor Kecamatan		50.976.720,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	37.618.000,00							11 Unit	37.994.180,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						8.040.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.120.400,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	3 Unit	8.040.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Tanru Tedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Unit	8.120.400,00	KELURAHAN TANRU TEDONG
308.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**646.996.000,00**								**654.146.760,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***373.420.000,00***								***377.835.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	373.420.000,00							100 %	377.835.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						646.396.000,00						Kantor Kecamatan		653.540.760,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan						646.396.000,00						Kantor Kecamatan		653.540.760,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Lembaga Kemasyarakatan		20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00							20 Lembaga Kemasyarakatan	2.020.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	367.360.000,00							2 Pokmas / Ormas	371.714.400,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	276.736.000,00							4 Unit	279.503.360,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.515.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Lembaga Kemasyarakatan		20 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Tanru Tedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					20 Lembaga Kemasyarakatan	1.515.000,00	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						140.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			141.400.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	1 Unit	140.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Tanru Tedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Unit	141.400.000,00	KELURAHAN TANRU TEDONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						231.920.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			234.920.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas		2 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	231.920.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Dua Pitue || Kelurahan Tanru Tedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Pokmas / Ormas	234.920.000,00	KELURAHAN TANRU TEDONG
		KECAMATAN PITU RIAWA						**2.588.803.000,00**								**2.682.911.918,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.588.803.000,00**								**2.682.911.918,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.588.803.000,00**								**2.682.911.918,00**	
309.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.824.803.000,00**								**2.921.911.918,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***2.530.803.000,00***								***2.624.911.918,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	2.530.803.000,00							100 %	2.624.911.918,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.277.731.000,00						-		2.364.113.918,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						2.277.731.000,00						-		2.364.113.918,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan		336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	2.277.731.000,00							336 Orang/bulan	2.364.113.918,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.277.731.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.364.113.918,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan		336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	2.277.731.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Pongi II 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					336 Orang/bulan	2.364.113.918,00	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						249.739.000,00						-		249.739.000,00	
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						249.739.000,00						-		249.739.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.375.000,00							12 Laporan	6.375.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	92.080.000,00							12 Laporan	92.080.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	4.406.000,00							1000 Paket	4.406.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	146.878.000,00							12 Paket	146.878.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						62.686.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.686.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	6 Paket	62.686.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Pongi II 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	62.686.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.406.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.406.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Paket		1000 Paket	500 Paket	2.406.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Pongi II 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1000 Paket	2.406.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi II 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						55.902.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.902.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	55.902.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi II 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	55.902.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						238.893.000,00						-		249.619.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						238.893.000,00						-		249.619.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00							12 Laporan	33.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	202.193.000,00							12 Laporan	209.919.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.700.000,00							12 Laporan	6.700.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.040.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.040.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.040.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi II 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	2.040.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi II 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	21.000.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						77.262.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			84.988.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	77.262.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi II 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	84.988.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.440.000,00						-		58.440.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						58.440.000,00						-		58.440.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	12 Unit	20.660.000,00							12 Unit	20.660.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.780.000,00							12 Unit	37.780.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.116.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.116.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	4 Unit	20.116.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi II 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Unit	20.116.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						8.660.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.660.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	2 Unit	8.660.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi II 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Unit	8.660.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
310.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**2.000.000,00**								**2.000.000,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik						***1.000.000,00***								***1.000.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	1.000.000,00							100 %	1.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.000.000,00						-		2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						2.000.000,00						-		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00							12 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00							12 Laporan	1.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi II 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi II 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
311.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**594.840.000,00**								**594.840.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***1.000.000,00***								***1.000.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	1.000.000,00							100 %	1.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.000.000,00						-		1.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa						1.000.000,00						-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00							2 Laporan	1.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi II 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						593.840.000,00						-		593.840.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						593.840.000,00						-		593.840.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00							2 Laporan	1.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
312.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**1.000.000,00**								**1.000.000,00**	
		Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah						***1.000.000,00***								***1.000.000,00***	
			999.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	1.000.000,00							100 %	1.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1.000.000,00						-		1.000.000,00	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00						-		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00							12 Laporan	1.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
313.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**50.000.000,00**								**50.000.000,00**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat						***50.000.000,00***								***50.000.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00							100 %	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						50.000.000,00						-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00							12 Dokumen	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						50.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
314.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**3.000.000,00**								**3.000.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan						***1.000.000,00***								***1.000.000,00***	
			999.Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	1.000.000,00							100 %	1.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						3.000.000,00						-		3.000.000,00	
		Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi						3.000.000,00						-		3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00							10 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00							10 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00							10 Dokumen	1.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Desa Dongi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN PITU RIAWA
		KELURAHAN PONRANGAE						**522.040.000,00**								**524.040.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**522.040.000,00**								**524.040.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**522.040.000,00**								**524.040.000,00**	
315.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.824.803.000,00**								**2.921.911.918,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***147.500.000,00***								***149.500.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	147.500.000,00							100 %	149.500.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						249.739.000,00						-		249.739.000,00	
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						249.739.000,00						-		249.739.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.375.000,00							12 Laporan	6.375.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	92.080.000,00							12 Laporan	92.080.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	4.406.000,00							1000 Paket	4.406.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	146.878.000,00							12 Paket	146.878.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						42.096.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			42.096.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	3 Paket	42.096.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Ponrengae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	42.096.000,00	KELURAHAN PONRANGAE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Paket		1000 Paket	250 Paket	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Ponrengae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1000 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN PONRANGAE
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.687.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.687.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.687.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Ponrengae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.687.500,00	KELURAHAN PONRANGAE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						18.089.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			18.089.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.089.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Ponrengae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	18.089.000,00	KELURAHAN PONRANGAE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						238.893.000,00						-		249.619.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						238.893.000,00						-		249.619.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00							12 Laporan	33.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	202.193.000,00							12 Laporan	209.919.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.700.000,00							12 Laporan	6.700.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.330.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.330.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.330.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Ponrengae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	2.330.000,00	KELURAHAN PONRANGAE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						5.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Ponrengae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	7.000.000,00	KELURAHAN PONRANGAE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						62.465.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.465.500,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	62.465.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Ponrengae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	62.465.500,00	KELURAHAN PONRANGAE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.440.000,00						-		58.440.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						58.440.000,00						-		58.440.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	12 Unit	20.660.000,00							12 Unit	20.660.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.780.000,00							12 Unit	37.780.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						8.832.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.832.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	4 Unit	8.832.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Ponrengae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Unit	8.832.000,00	KELURAHAN PONRANGAE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	2 Unit	6.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Ponrengae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Unit	6.000.000,00	KELURAHAN PONRANGAE
316.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**594.840.000,00**								**594.840.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***374.540.000,00***								***374.540.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	374.540.000,00							100 %	374.540.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						593.840.000,00						-		593.840.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						593.840.000,00						-		593.840.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25 Lembaga Kemasyarakatan		25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00							25 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	261.000.000,00							4 Unit	261.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25 Lembaga Kemasyarakatan		25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Ponrengae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	KELURAHAN PONRANGAE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						130.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			130.500.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	2 Unit	130.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Ponrengae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	130.500.000,00	KELURAHAN PONRANGAE
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						593.840.000,00						-		593.840.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	327.840.000,00							-	327.840.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						242.040.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			242.040.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	135 Pokmas / Ormas	242.040.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Ponrengae || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	242.040.000,00	KELURAHAN PONRANGAE
		KELURAHAN LANCIRANG						**364.800.000,00**								**365.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**364.800.000,00**								**365.800.000,00**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01	**KECAMATAN**						**364.800.000,00**								**365.800.000,00**	
317.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.824.803.000,00**								**2.921.911.918,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***146.500.000,00***								***147.500.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	146.500.000,00							100 %	147.500.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						249.739.000,00						-		249.739.000,00	
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						249.739.000,00						-		249.739.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.375.000,00							12 Laporan	6.375.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	92.080.000,00							12 Laporan	92.080.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	4.406.000,00							1000 Paket	4.406.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	146.878.000,00							12 Paket	146.878.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						42.096.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			42.096.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	3 Paket	42.096.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Lancirang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	42.096.000,00	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1000 Paket		1000 Paket	250 Paket	1.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Lancirang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1000 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.687.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.687.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.687.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Lancirang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.687.500,00	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						18.089.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			18.089.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.089.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Lancirang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	18.089.000,00	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						238.893.000,00						-		249.619.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						238.893.000,00						-		249.619.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00							12 Laporan	33.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	202.193.000,00							12 Laporan	209.919.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.700.000,00							12 Laporan	6.700.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.330.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.330.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.330.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Lancirang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	2.330.000,00	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.000.000,00			-	-	1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah			5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Lancirang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	5.000.000,00	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						62.465.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.465.500,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	62.465.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Lancirang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	62.465.500,00	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.440.000,00						-		58.440.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						58.440.000,00						-		58.440.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	12 Unit	20.660.000,00							12 Unit	20.660.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.780.000,00							12 Unit	37.780.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						8.832.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.832.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	3 Unit	8.832.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Lancirang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Unit	8.832.000,00	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	1 Unit	6.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Lancirang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Unit	6.000.000,00	KELURAHAN LANCIRANG
318.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**594.840.000,00**								**594.840.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***218.300.000,00***								***218.300.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	218.300.000,00							100 %	218.300.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						593.840.000,00						-		593.840.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25 Lembaga Kemasyarakatan		25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00							25 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	261.000.000,00							4 Unit	261.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25 Lembaga Kemasyarakatan		25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Lancirang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						130.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			130.500.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	2 Unit	130.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Lancirang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Unit	130.500.000,00	KELURAHAN LANCIRANG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						593.840.000,00						-		593.840.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						593.840.000,00						-		593.840.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	327.840.000,00							-	327.840.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						85.800.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			85.800.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	135 Pokmas / Ormas	85.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Riawa || Kelurahan Lancirang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					-	85.800.000,00	KELURAHAN LANCIRANG
		KECAMATAN PITU RIASE						**1.711.693.000,00**								**1.728.809.930,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.711.693.000,00**								**1.728.809.930,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.711.693.000,00**								**1.728.809.930,00**	
319.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.919.693.000,00**								**1.938.889.930,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***1.615.693.000,00***								***1.631.849.930,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	1.615.693.000,00							100 %	1.631.849.930,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.408.121.000,00						Kecamatan		1.422.202.210,00	
		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.408.121.000,00						Kecamatan		1.422.202.210,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.500.000,00							3 Laporan	7.575.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bulan		238 Orang/bulan	252 Orang/bulan	1.400.621.000,00							252 Orang/bulan	1.414.627.210,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.400.621.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.414.627.210,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bulan		238 Orang/bulan	252 Orang/bulan	1.400.621.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					252 Orang/bulan	1.414.627.210,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.575.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Laporan	7.575.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						77.037.000,00						Kecamatan		77.807.370,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah						77.037.000,00						Kecamatan		77.807.370,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00							12 Laporan	60.600.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.332.000,00							12 Paket	5.385.320,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.755.000,00							12 Paket	3.792.550,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.950.000,00							12 Paket	8.029.500,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.895.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.913.950,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	6 Paket	1.895.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	1.913.950,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.950.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.029.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	0 Paket	7.950.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	8.029.500,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah			4.545.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	6 Paket	4.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	4.545.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						35.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			35.350.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	35.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	35.350.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						193.745.000,00						Kecamatan		195.682.450,00	
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						193.745.000,00						Kecamatan		195.682.450,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	8.000.000,00							3 Unit	8.080.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	40.000.000,00							7 Unit	40.400.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	145.745.000,00							2 Unit	147.202.450,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						8.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.080.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	8.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Unit	8.080.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.400.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	40.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Unit	40.400.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.250.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	25.250.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						181.721.000,00						Kecamatan		183.538.210,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						181.721.000,00						Kecamatan		183.538.210,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00							12 Laporan	18.180.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	162.905.000,00							12 Laporan	164.534.050,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	816.000,00							12 Laporan	824.160,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						300.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			303.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	303.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.110.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	11.110.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						57.813.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			58.391.130,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	57.813.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	58.391.130,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.069.000,00						Kecamatan		59.659.690,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.069.000,00						Kecamatan		59.659.690,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	29.906.000,00							10 Unit	30.205.060,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.334.000,00							5 Unit	10.437.340,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	18.829.000,00							2 Unit	19.017.290,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.250.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	25.250.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.684.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.710.840,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	3 Unit	2.684.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	2.710.840,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						13.430.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.564.300,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	13.430.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	13.564.300,00	KECAMATAN PITU RIASE
320.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**6.000.000,00**								**6.060.000,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik						***3.000.000,00***								***3.030.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	3.000.000,00							100 %	3.030.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						6.000.000,00						Kecamatan		6.060.000,00	
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilimpahkan kepada Camat						6.000.000,00						Kecamatan		6.060.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00							12 Laporan	3.030.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00							12 Laporan	3.030.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.030.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	3.030.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.030.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	3.030.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
321.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**341.520.000,00**								**344.935.200,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***6.000.000,00***								***6.060.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	6.000.000,00							100 %	6.060.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3.000.000,00						Kecamatan		3.030.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi Masyarakat Desa dalam kegiatan Pemberdayaan						3.000.000,00						Kecamatan		3.030.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00							12 Laporan	3.030.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.030.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Laporan	3.030.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						338.520.000,00						Kecamatan		341.905.200,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan						338.520.000,00						Kecamatan		341.905.200,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	505.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.500.000,00							1 Lembaga Kemasyarakatan	2.525.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.525.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Lembaga Kemasyarakatan	2.525.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			505.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Laporan	505.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
322.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**50.000.000,00**								**50.500.000,00**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat						***50.000.000,00***								***50.500.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00							100 %	50.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						Kecamatan		50.500.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan						50.000.000,00						Kecamatan		50.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00							12 Dokumen	50.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						50.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.500.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	50.500.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
323.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**9.000.000,00**								**9.090.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan						***3.000.000,00***								***3.030.000,00***	
			999.Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	3.000.000,00							100 %	3.030.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						9.000.000,00						Kecamatan		9.090.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						9.000.000,00						Kecamatan		9.090.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00							3 Dokumen	3.030.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00							3 Dokumen	3.030.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00							3 Dokumen	3.030.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.030.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	3.030.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.030.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	3.030.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.030.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3 Dokumen	3.030.000,00	KECAMATAN PITU RIASE
		KELURAHAN BATU						**614.520.000,00**								**620.665.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**614.520.000,00**								**620.665.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**614.520.000,00**								**620.665.200,00**	
324.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.919.693.000,00**								**1.938.889.930,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***279.000.000,00***								***281.790.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	279.000.000,00							100 %	281.790.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						77.037.000,00						Kecamatan		77.807.370,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah						77.037.000,00						Kecamatan		77.807.370,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00							12 Laporan	60.600.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.332.000,00							12 Paket	5.385.320,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.755.000,00							12 Paket	3.792.550,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.860.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.878.600,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	6 Paket	1.860.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Raise || Kelurahan Batu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	1.878.600,00	KELURAHAN BATU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						832.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			840.320,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	6 Paket	832.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Raise || Kelurahan Batu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Paket	840.320,00	KELURAHAN BATU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.250.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Raise || Kelurahan Batu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	25.250.000,00	KELURAHAN BATU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						193.745.000,00						Kecamatan		195.682.450,00	
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						193.745.000,00						Kecamatan		195.682.450,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	145.745.000,00							2 Unit	147.202.450,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						120.745.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			121.952.450,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	120.745.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Raise || Kelurahan Batu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	121.952.450,00	KELURAHAN BATU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						181.721.000,00						Kecamatan		183.538.210,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						181.721.000,00						Kecamatan		183.538.210,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00							12 Laporan	18.180.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	162.905.000,00							12 Laporan	164.534.050,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	816.000,00							12 Laporan	824.160,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						516.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			521.160,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	516.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Raise || Kelurahan Batu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	521.160,00	KELURAHAN BATU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.070.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Raise || Kelurahan Batu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	7.070.000,00	KELURAHAN BATU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						105.092.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			106.142.920,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	105.092.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Raise || Kelurahan Batu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	106.142.920,00	KELURAHAN BATU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.069.000,00						Kecamatan		59.659.690,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.069.000,00						Kecamatan		59.659.690,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	29.906.000,00							10 Unit	30.205.060,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.334.000,00							5 Unit	10.437.340,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	18.829.000,00							2 Unit	19.017.290,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						4.906.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.955.060,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	5 Unit	4.906.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Raise || Kelurahan Batu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	4.955.060,00	KELURAHAN BATU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.650.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.726.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	2 Unit	7.650.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Raise || Kelurahan Batu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	7.726.500,00	KELURAHAN BATU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.399.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.452.990,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	5.399.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Raise || Kelurahan Batu || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	5.452.990,00	KELURAHAN BATU
325.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**341.520.000,00**								**344.935.200,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***335.520.000,00***								***338.875.200,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	335.520.000,00							100 %	338.875.200,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						338.520.000,00						Kecamatan		341.905.200,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan						338.520.000,00						Kecamatan		341.905.200,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	335.520.000,00							1 Pokmas / Ormas	338.875.200,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						335.520.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			338.875.200,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	335.520.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Pitu Raise || Kelurahan Batu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Pokmas / Ormas	338.875.200,00	KELURAHAN BATU
		KECAMATAN BARANTI						**3.319.125.000,00**								**5.283.114.299,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.319.125.000,00**								**5.283.114.299,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.319.125.000,00**								**5.283.114.299,00**	
326.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.036.569.000,00**								**5.612.412.299,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***3.263.512.500,00***								***4.838.355.799,00***	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	3.263.512.500,00							100 %	4.838.355.799,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						850.000,00						-		1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						850.000,00						-		1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	850.000,00							4 Dokumen	1.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						850.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	850.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.008.325.000,00						-		3.643.314.299,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.008.325.000,00						-		3.643.314.299,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 Orang/bulan		448 Orang/bulan	448 Orang/bulan	3.008.325.000,00							448 Orang/bulan	3.643.314.299,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.008.325.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.643.314.299,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	448 Orang/bulan		448 Orang/bulan	448 Orang/bulan	3.008.325.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)					448 Orang/bulan	3.643.314.299,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.099.600,00						-		482.959.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.099.600,00						-		482.959.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	55.360.000,00							4 Laporan	59.585.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	95.034.000,00							4 Laporan	148.635.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	15.374.500,00							6 Paket	30.360.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	13.563.000,00							6 Paket	24.626.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	60.830.100,00							6 Paket	148.775.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	12.938.000,00							6 Paket	70.977.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.063.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Paket	13.063.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.640.600,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			98.586.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	10.640.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Paket	98.586.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.031.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			61.070.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	3.031.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Paket	61.070.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.656.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			18.641.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	3.656.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Paket	18.641.500,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.455.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			19.680.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.455.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	19.680.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.196.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			78.798.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.196.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	78.798.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						201.514.000,00						-		400.227.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						201.514.000,00						-		400.227.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.219.000,00							5 Unit	97.374.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	161.295.000,00							5 Unit	302.853.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.328.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			67.483.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.328.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	67.483.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.642.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			177.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	35.642.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	177.200.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.654.000,00						-		811.664.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.654.000,00						-		811.664.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	74.850.000,00							4 Laporan	127.059.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	327.960.000,00							4 Laporan	664.885.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.844.000,00							4 Laporan	19.720.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.124.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.124.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	13.000.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			63.209.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	63.209.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						72.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			408.925.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	72.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	408.925.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.126.400,00						-		273.248.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.126.400,00						-		273.248.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	104.712.400,00							6 Unit	191.422.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	34.276.000,00							10 Unit	44.908.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	7.250.000,00							2 Unit	5.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	13.888.000,00							5 Unit	31.418.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.632.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Unit	30.632.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.750.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	5 Unit	2.750.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Unit	1.000.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.024.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			19.554.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	2.024.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	19.554.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						37.490.400,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			124.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	37.490.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Unit	124.200.000,00	KECAMATAN BARANTI
327.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.025.000,00**								**4.000.000,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik						***512.500,00***								***2.000.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	512.500,00							100 %	2.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.025.000,00						-		4.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.025.000,00						-		4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	512.500,00							4 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	512.500,00							4 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						512.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	512.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						512.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	512.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN BARANTI
328.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.754.473.500,00**								**2.129.982.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***512.500,00***								***377.558.500,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	512.500,00							100 %	377.558.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						512.500,00						-		1.800.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						512.500,00						-		1.800.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	512.500,00							12 Laporan	1.800.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						512.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.800.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	512.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.800.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.753.961.000,00						-		2.128.182.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahaan						1.753.961.000,00						-		2.128.182.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	512.500,00							12 Laporan	4.900.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	1.330.992.500,00							12 Pokmas / Ormas	1.406.480.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	422.456.000,00							5 Unit	716.802.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						512.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			294.858.500,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	1 Unit	512.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	294.858.500,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						512.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			76.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	512.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Pokmas / Ormas	76.000.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						512.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.900.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	512.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	4.900.000,00	KECAMATAN BARANTI
329.	7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**512.500,00**								**3.600.000,00**	
		Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah						***512.500,00***								***3.600.000,00***	
			999.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	512.500,00							100 %	3.600.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						512.500,00						-		3.600.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum						512.500,00						-		3.600.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	512.500,00							4 Laporan	3.600.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						512.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.600.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	512.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	3.600.000,00	KECAMATAN BARANTI
330.	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**51.000.000,00**								**55.000.000,00**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat						***51.000.000,00***								***55.000.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	51.000.000,00							100 %	55.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						51.000.000,00						-		55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						51.000.000,00						-		55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	51.000.000,00							12 Dokumen	55.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						51.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	4 Dokumen	51.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	55.000.000,00	KECAMATAN BARANTI
331.	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**1.025.000,00**								**3.600.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan						***512.500,00***								***1.800.000,00***	
			999.Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	512.500,00							100 %	1.800.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.025.000,00						-		3.600.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.025.000,00						-		3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	512.500,00							4 Dokumen	1.800.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	512.500,00							4 Dokumen	1.800.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						512.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.800.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	512.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	1.800.000,00	KECAMATAN BARANTI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						512.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.800.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	512.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	1.800.000,00	KECAMATAN BARANTI
		KELURAHAN BARANTI						**587.200.000,00**								**587.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**587.200.000,00**								**587.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**587.200.000,00**								**587.200.000,00**	
332.	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.036.569.000,00**								**5.612.412.299,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***131.245.500,00***								***131.245.500,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	131.245.500,00							100 %	131.245.500,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.099.600,00						-		482.959.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.099.600,00						-		482.959.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	55.360.000,00							4 Laporan	59.585.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	95.034.000,00							4 Laporan	148.635.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	15.374.500,00							6 Paket	30.360.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	13.563.000,00							6 Paket	24.626.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	60.830.100,00							6 Paket	148.775.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	12.938.000,00							6 Paket	70.977.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.098.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.098.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	1.098.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	1.098.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.550.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.550.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	10.550.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	10.550.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.157.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.157.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	1.157.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	1.157.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.286.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.286.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	2.286.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	2.286.500,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						16.140.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.140.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	16.140.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	16.140.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						16.260.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.260.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	16.260.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	16.260.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						201.514.000,00						-		400.227.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						201.514.000,00						-		400.227.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.219.000,00							5 Unit	97.374.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	161.295.000,00							5 Unit	302.853.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						4.250.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.250.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	4.250.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	4.250.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.318.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.318.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	1 Unit	14.318.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	14.318.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.654.000,00						-		811.664.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.654.000,00						-		811.664.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	74.850.000,00							4 Laporan	127.059.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	327.960.000,00							4 Laporan	664.885.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.844.000,00							4 Laporan	19.720.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						960.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			960.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	960.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	960.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.300.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	13.300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	13.300.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						44.160.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			44.160.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	44.160.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	44.160.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.126.400,00						-		273.248.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.126.400,00						-		273.248.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	104.712.400,00							6 Unit	191.422.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	34.276.000,00							10 Unit	44.908.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	7.250.000,00							2 Unit	5.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	13.888.000,00							5 Unit	31.418.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.632.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.632.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	1 Unit	1.632.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	1.632.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						750.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	4 Unit	750.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	750.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.442.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.442.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	2 Unit	1.442.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	1.442.000,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.942.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.942.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	2.942.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	2.942.000,00	KELURAHAN BARANTI
333.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.754.473.500,00**								**2.129.982.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***455.954.500,00***								***455.954.500,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	455.954.500,00							100 %	455.954.500,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.753.961.000,00						-		2.128.182.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahaan						1.753.961.000,00						-		2.128.182.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	1.330.992.500,00							12 Pokmas / Ormas	1.406.480.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	422.456.000,00							5 Unit	716.802.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						107.754.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			107.754.500,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	2 Unit	107.754.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	107.754.500,00	KELURAHAN BARANTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						348.200.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			348.200.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	348.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Baranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Pokmas / Ormas	348.200.000,00	KELURAHAN BARANTI
		KELURAHAN PANRENG						**477.040.000,00**								**477.040.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**477.040.000,00**								**477.040.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**477.040.000,00**								**477.040.000,00**	
334.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.036.569.000,00**								**5.612.412.299,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***173.549.000,00***								***173.549.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	173.549.000,00							100 %	173.549.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.099.600,00						-		482.959.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.099.600,00						-		482.959.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	55.360.000,00							4 Laporan	59.585.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	95.034.000,00							4 Laporan	148.635.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	15.374.500,00							6 Paket	30.360.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	13.563.000,00							6 Paket	24.626.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	60.830.100,00							6 Paket	148.775.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	12.938.000,00							6 Paket	70.977.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng II 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.568.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.568.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	11.568.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng II 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	11.568.500,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.459.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.459.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	2.459.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng II 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	2.459.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.217.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.217.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	2.217.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng II 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	2.217.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.005.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.005.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	1.005.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng II 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	1.005.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15.292.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.292.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	15.292.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng II 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	15.292.500,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						201.514.000,00						-		400.227.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						201.514.000,00						-		400.227.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.219.000,00							5 Unit	97.374.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	161.295.000,00							5 Unit	302.853.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						7.910.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.910.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	7.910.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng II 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	7.910.000,00	KELURAHAN PANRENG

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						62.623.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.623.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	4 Unit	62.623.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	62.623.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.654.000,00						-		811.664.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.654.000,00						-		811.664.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	74.850.000,00							4 Laporan	127.059.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	327.960.000,00							4 Laporan	664.885.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.844.000,00							4 Laporan	19.720.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.400.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.400.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	2.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	2.400.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.800.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	10.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	10.800.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						38.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			38.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	38.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	38.500.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.126.400,00						-		273.248.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.126.400,00						-		273.248.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	104.712.400,00							6 Unit	191.422.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	34.276.000,00							10 Unit	44.908.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	7.250.000,00							2 Unit	5.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	13.888.000,00							5 Unit	31.418.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3.514.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.514.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	1 Unit	3.514.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	3.514.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	6 Unit	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	1.500.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.760.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.760.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	4 Unit	3.760.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	3.760.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	7.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	7.000.000,00	KELURAHAN PANRENG
335.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.754.473.500,00**								**2.129.982.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***303.491.000,00***								***303.491.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	303.491.000,00							100 %	303.491.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.753.961.000,00						-		2.128.182.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahaan						1.753.961.000,00						-		2.128.182.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	1.330.992.500,00							12 Pokmas / Ormas	1.406.480.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	422.456.000,00							5 Unit	716.802.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						65.451.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			65.451.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	1 Unit	65.451.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	65.451.000,00	KELURAHAN PANRENG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						238.040.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			238.040.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	238.040.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Desa Panreng || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Pokmas / Ormas	238.040.000,00	KELURAHAN PANRENG
		KELURAHAN DUAMPANUA						**487.120.000,00**								**487.120.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**487.120.000,00**								**487.120.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**487.120.000,00**								**487.120.000,00**	
336.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.036.569.000,00**								**5.612.412.299,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***136.880.000,00***								***136.880.000,00***	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	136.880.000,00							100 %	136.880.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.099.600,00						-		482.959.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.099.600,00						-		482.959.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	55.360.000,00							4 Laporan	59.585.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	95.034.000,00							4 Laporan	148.635.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	15.374.500,00							6 Paket	30.360.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	13.563.000,00							6 Paket	24.626.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	60.830.100,00							6 Paket	148.775.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	12.938.000,00							6 Paket	70.977.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.240.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.240.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	2.240.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	2.240.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.295.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.295.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	10.295.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	10.295.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.048.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.048.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	2.048.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	2.048.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.010.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.010.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	2.010.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	2.010.500,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						17.160.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			17.160.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	17.160.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	17.160.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						16.292.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.292.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	16.292.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	16.292.500,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						201.514.000,00						-		400.227.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						201.514.000,00						-		400.227.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.219.000,00							5 Unit	97.374.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	161.295.000,00							5 Unit	302.853.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						4.250.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.250.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	4 Unit	4.250.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	4.250.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.695.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.695.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	1 Unit	5.695.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	5.695.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.654.000,00						-		811.664.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.654.000,00						-		811.664.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	74.850.000,00							4 Laporan	127.059.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	327.960.000,00							4 Laporan	664.885.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.844.000,00							4 Laporan	19.720.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.200.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	1.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	1.200.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.350.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.350.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	14.350.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	14.350.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						55.065.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.065.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	55.065.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	55.065.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.126.400,00						-		273.248.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.126.400,00						-		273.248.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	104.712.400,00							6 Unit	191.422.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	34.276.000,00							10 Unit	44.908.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	7.250.000,00							2 Unit	5.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	13.888.000,00							5 Unit	31.418.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.824.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.824.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	1 Unit	1.824.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	1.824.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						750.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	4 Unit	750.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	750.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.060.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.060.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	1 Unit	1.060.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	1.060.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.640.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.640.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	2.640.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	2.640.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
337.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.754.473.500,00**								**2.129.982.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***350.240.000,00***								***350.240.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	350.240.000,00							100 %	350.240.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.753.961.000,00						-		2.128.182.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahaan						1.753.961.000,00						-		2.128.182.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	1.330.992.500,00							12 Pokmas / Ormas	1.406.480.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	422.456.000,00							5 Unit	716.802.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						102.120.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			102.120.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	2 Unit	102.120.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	102.120.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						248.120.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			248.120.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	248.120.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Duampanua || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Pokmas / Ormas	248.120.000,00	KELURAHAN DUAMPANUA
		KELURAHAN MANISA						**517.120.000,00**								**517.120.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**517.120.000,00**								**517.120.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**517.120.000,00**								**517.120.000,00**	
338.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.036.569.000,00**								**5.612.412.299,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***196.042.000,00***								***196.042.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	196.042.000,00							100 %	196.042.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.099.600,00						-		482.959.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.099.600,00						-		482.959.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	55.360.000,00							4 Laporan	59.585.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	95.034.000,00							4 Laporan	148.635.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	15.374.500,00							6 Paket	30.360.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	13.563.000,00							6 Paket	24.626.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	60.830.100,00							6 Paket	148.775.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	12.938.000,00							6 Paket	70.977.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.125.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.125.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	2.125.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	2.125.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.686.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.686.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	11.686.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	11.686.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.805.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.805.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	2.805.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	2.805.000,00	KELURAHAN MANISA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.042.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.042.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	2.042.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	2.042.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.500.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	1.500.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.765.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.765.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	7.765.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	7.765.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						201.514.000,00						-		400.227.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						201.514.000,00						-		400.227.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.219.000,00							5 Unit	97.374.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	161.295.000,00							5 Unit	302.853.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						3.766.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.766.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	4 Unit	3.766.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	3.766.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.379.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			35.379.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	2 Unit	35.379.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	35.379.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.654.000,00						-		811.664.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.654.000,00						-		811.664.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	74.850.000,00							4 Laporan	127.059.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	327.960.000,00							4 Laporan	664.885.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.844.000,00							4 Laporan	19.720.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						960.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			960.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	960.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	960.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.200.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	13.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	13.200.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						56.840.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			56.840.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	56.840.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	56.840.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.126.400,00						-		273.248.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.126.400,00						-		273.248.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	104.712.400,00							6 Unit	191.422.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	34.276.000,00							10 Unit	44.908.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	7.250.000,00							2 Unit	5.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	13.888.000,00							5 Unit	31.418.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3.032.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.032.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	1 Unit	3.032.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	3.032.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						750.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	4 Unit	750.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	750.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.192.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.192.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	2 Unit	2.192.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	2.192.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						52.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			52.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	52.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	52.000.000,00	KELURAHAN MANISA
339.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.754.473.500,00**								**2.129.982.000,00**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***321.078.000,00***								***321.078.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	321.078.000,00							100 %	321.078.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.753.961.000,00						-		2.128.182.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahaan						1.753.961.000,00						-		2.128.182.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	1.330.992.500,00							12 Pokmas / Ormas	1.406.480.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	422.456.000,00							5 Unit	716.802.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						42.958.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			42.958.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	1 Unit	42.958.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	42.958.000,00	KELURAHAN MANISA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						278.120.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			278.120.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	278.120.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Mamminasae || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Pokmas / Ormas	278.120.000,00	KELURAHAN MANISA
		KELURAHAN BENTENG						**457.000.000,00**								**457.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**457.000.000,00**								**457.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**457.000.000,00**								**457.000.000,00**	
340.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.036.569.000,00**								**5.612.412.299,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***135.340.000,00***								***135.340.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	135.340.000,00							100 %	135.340.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.099.600,00						-		482.959.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.099.600,00						-		482.959.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	55.360.000,00							4 Laporan	59.585.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	95.034.000,00							4 Laporan	148.635.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	15.374.500,00							6 Paket	30.360.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	13.563.000,00							6 Paket	24.626.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	60.830.100,00							6 Paket	148.775.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	12.938.000,00							6 Paket	70.977.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.100.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.100.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	3.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	3.100.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.090.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.090.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	6.090.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	6.090.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.438.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.438.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	1.438.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	1.438.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.162.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.162.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	1 Paket	3.162.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Paket	3.162.500,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.100.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	4.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	4.100.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						14.227.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.227.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	14.227.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	14.227.500,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						201.514.000,00						-		400.227.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						201.514.000,00						-		400.227.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.219.000,00							5 Unit	97.374.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	161.295.000,00							5 Unit	302.853.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						9.715.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.715.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	4 Unit	9.715.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	9.715.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.638.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.638.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	1 Unit	7.638.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	7.638.000,00	KELURAHAN BENTENG

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.654.000,00						-		811.664.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.654.000,00						-		811.664.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	74.850.000,00							4 Laporan	127.059.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	327.960.000,00							4 Laporan	664.885.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.844.000,00							4 Laporan	19.720.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.200.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	1.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	1.200.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.200.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			12.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	12.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	12.200.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						61.395.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			61.395.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	61.395.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					4 Laporan	61.395.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.126.400,00						-		273.248.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.126.400,00						-		273.248.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	104.712.400,00							6 Unit	191.422.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	34.276.000,00							10 Unit	44.908.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	7.250.000,00							2 Unit	5.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	13.888.000,00							5 Unit	31.418.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						4.274.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.274.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	2 Unit	4.274.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					10 Unit	4.274.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						750.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	4 Unit	750.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					2 Unit	750.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.410.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.410.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	2 Unit	3.410.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	3.410.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.640.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.640.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	2.640.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	2.640.000,00	KELURAHAN BENTENG
341.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.754.473.500,00**								**2.129.982.000,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***321.660.000,00***								***321.660.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	321.660.000,00							100 %	321.660.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.753.961.000,00						-		2.128.182.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahaan						1.753.961.000,00						-		2.128.182.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	1.330.992.500,00							12 Pokmas / Ormas	1.406.480.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	422.456.000,00							5 Unit	716.802.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						103.660.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			103.660.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit		5 Unit	2 Unit	103.660.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					5 Unit	103.660.000,00	KELURAHAN BENTENG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						218.000.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			218.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas		12 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	218.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Baranti || Kelurahan Benteng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Pokmas / Ormas	218.000.000,00	KELURAHAN BENTENG
		KECAMATAN PANCA RIJANG						**3.412.435.000,00**								**3.922.867.189,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.412.435.000,00**								**3.922.867.189,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.412.435.000,00**								**3.922.867.189,00**	
342.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.043.231.000,00**								**4.395.219.389,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***3.359.435.000,00***								***3.862.247.189,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	3.359.435.000,00							100 %	3.862.247.189,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.108.239.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		3.595.671.189,00	
		Terselenggaranya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.108.239.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		3.595.671.189,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	555 Orang/bulan		548 Orang/bulan	534 Orang/bulan	3.108.239.000,00							549 Orang/bulan	3.595.671.189,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.108.239.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.595.671.189,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	555 Orang/bulan		548 Orang/bulan	546 Orang/bulan	3.108.239.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					549 Orang/bulan	3.595.671.189,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						136.219.500,00						-		149.725.700,00	
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						136.219.500,00						-		149.725.700,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.813.000,00							12 Laporan	2.528.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	118.988.500,00							60 Laporan	131.275.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		12 Paket	14 Paket	11.890.000,00							16 Paket	14.142.500,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.572.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.219.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		12 Paket	12 Paket	1.572.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16 Paket	4.219.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.813.000,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.528.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.813.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	2.528.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						58.163.500,00			-	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.267.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	58.163.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60 Laporan	62.267.500,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						310.441.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		145.150.000,00	
		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah						310.441.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		145.150.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.756.000,00							12 Unit	14.800.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	272.685.000,00							12 Unit	130.350.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						6.956.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.400.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	100 Unit	6.956.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Unit	9.400.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						54.175.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			34.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	4 Unit	54.175.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Unit	34.000.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						419.877.500,00						Kantor Camat Panca Rijang		408.970.500,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						419.877.500,00						Kantor Camat Panca Rijang		408.970.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	88.086.000,00							60 Laporan	85.960.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	327.901.500,00							60 Laporan	318.290.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	3.890.000,00							60 Laporan	4.720.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						420.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.190.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	85 Laporan	420.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60 Laporan	1.190.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						46.150.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			46.150.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	46.150.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60 Laporan	46.150.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						56.506.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			68.821.500,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	56.506.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60 Laporan	68.821.500,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.454.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		95.702.000,00	
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						68.454.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		95.702.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		4 Unit	5 Unit	27.240.000,00							6 Unit	34.750.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	29.524.000,00							18 Unit	43.314.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	11.690.000,00							7 Unit	17.638.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						18.470.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			19.610.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	4 Unit	18.470.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Unit	19.610.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.930.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.840.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	2.930.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Unit	6.840.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						4.040.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.550.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		4 Unit	2 Unit	4.040.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6 Unit	11.550.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
343.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**300.000,00**								**2.400.000,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik						***300.000,00***								***2.400.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	300.000,00							100 %	2.400.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						300.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		2.400.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						300.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		2.400.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000,00							12 Laporan	2.400.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						300.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.400.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	2.400.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
344.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.667.784.000,00**								**662.478.100,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***300.000,00***								***2.400.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	300.000,00							100 %	2.400.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						300.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		2.400.000,00	
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan						300.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		2.400.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000,00							12 Laporan	2.400.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						300.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.400.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	2.400.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
345.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**1.500.000,00**								**1.500.000,00**	
		Terwujudnya Lingkungan yang Tertib Melalui Koordinasi yang Efektif Antar Perangkat Daerah sasaran : RENSTRA						***1.500.000,00***								***1.500.000,00***	
			999.Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	1.500.000,00							100 %	1.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1.500.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		1.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						1.500.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00							12 Laporan	1.500.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
346.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**50.000.000,00**								**50.000.000,00**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat						***50.000.000,00***								***50.000.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00							100 %	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		50.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00							12 Dokumen	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						50.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
347.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**900.000,00**								**4.320.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan						***300.000,00***								***1.440.000,00***	
			999.Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	300.000,00							100 %	1.440.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						900.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		4.320.000,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						900.000,00						Kantor Camat Panca Rijang		4.320.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00							12 Dokumen	1.440.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00							12 Dokumen	1.440.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00							12 Dokumen	1.440.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						300.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.440.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	1.440.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						300.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.440.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	1.440.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						300.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.440.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	1.440.000,00	KECAMATAN PANCA RIJANG
		KELURAHAN RAPPANG						**686.400.000,00**								**304.540.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**686.400.000,00**								**304.540.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**686.400.000,00**								**304.540.000,00**	
348.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.043.231.000,00**								**4.395.219.389,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***175.077.000,00***								***162.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	175.077.000,00							100 %	162.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						136.219.500,00						Kelurahan Rappang		149.725.700,00	
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						136.219.500,00						Kelurahan Rappang		149.725.700,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	118.988.500,00							60 Laporan	131.275.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		12 Paket	14 Paket	11.890.000,00							16 Paket	14.142.500,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.701.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.701.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		12 Paket	5 Paket	3.701.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Paket	3.701.500,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						18.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			31.280.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	5 Laporan	18.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					60 Laporan	31.280.000,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						310.441.000,00						Kelurahan Rappang		145.150.000,00	
		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah						310.441.000,00						Kelurahan Rappang		145.150.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	272.685.000,00							12 Unit	130.350.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						56.410.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			42.700.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	5 Unit	56.410.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Unit	42.700.000,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						419.877.500,00						Kelurahan Rappang		408.970.500,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						419.877.500,00						Kelurahan Rappang		408.970.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	88.086.000,00							60 Laporan	85.960.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	327.901.500,00							60 Laporan	318.290.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	3.890.000,00							60 Laporan	4.720.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						950.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			950.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	1 Laporan	950.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60 Laporan	950.000,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.860.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.860.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	11.860.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					60 Laporan	11.860.000,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						78.181.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			68.034.500,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	78.181.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					60 Laporan	68.034.500,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.454.000,00						Kelurahan Rappang		95.702.000,00	
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						68.454.000,00						Kelurahan Rappang		95.702.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	29.524.000,00							18 Unit	43.314.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	11.690.000,00							7 Unit	17.638.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						3.474.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.474.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	2 Unit	3.474.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Unit	1.474.000,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	3 Unit	2.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN RAPPANG
349.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.667.784.000,00**								**662.478.100,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***511.323.000,00***								***142.540.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	511.323.000,00							100 %	142.540.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.667.484.000,00						Kelurahan Rappang		660.078.100,00	
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan						1.667.484.000,00						Kelurahan Rappang		660.078.100,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38 Pokmas / Ormas		30 Pokmas / Ormas	32 Pokmas / Ormas	1.414.380.000,00							34 Pokmas / Ormas	392.940.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		11 Unit	12 Unit	253.104.000,00							13 Unit	267.138.100,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						85.923.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		11 Unit	1 Unit	85.923.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Unit	100.000.000,00	KELURAHAN RAPPANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						425.400.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			42.540.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38 Pokmas / Ormas		30 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	425.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Rappang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					34 Pokmas / Ormas	42.540.000,00	KELURAHAN RAPPANG
		KELURAHAN LALE BATA						**592.800.000,00**								**468.786.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**592.800.000,00**								**468.786.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**592.800.000,00**								**468.786.200,00**	
350.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.043.231.000,00**								**4.395.219.389,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***249.000.000,00***								***124.986.200,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	249.000.000,00							100 %	124.986.200,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						136.219.500,00						Kelurahan Lalebata		149.725.700,00	
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						136.219.500,00						Kelurahan Lalebata		149.725.700,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	118.988.500,00							60 Laporan	131.275.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		12 Paket	14 Paket	11.890.000,00							16 Paket	14.142.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	Paket	3.528.000,00							Paket	1.780.200,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.942.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			194.200,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1.942.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Lalebata || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Paket	194.200,00	KELURAHAN LALE BATA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.854.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.410.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		12 Paket	12 Paket	1.854.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Lalebata || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Paket	1.410.000,00	KELURAHAN LALE BATA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						17.325.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	17.325.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Lalebata || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					60 Laporan	13.500.000,00	KELURAHAN LALE BATA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						310.441.000,00						Kelurahan Lalebata		145.150.000,00	
		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah						310.441.000,00						Kelurahan Lalebata		145.150.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.756.000,00							12 Unit	14.800.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	272.685.000,00							12 Unit	130.350.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						25.400.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	150 Unit	25.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Lalebata || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Unit	0,00	KELURAHAN LALE BATA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.050.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	7 Unit	100.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Lalebata || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Unit	10.050.000,00	KELURAHAN LALE BATA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						419.877.500,00						Kelurahan Lalebata		408.970.500,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						419.877.500,00						Kelurahan Lalebata		408.970.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	88.086.000,00							60 Laporan	85.960.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	327.901.500,00							60 Laporan	318.290.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	3.890.000,00							60 Laporan	4.720.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						840.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			840.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	840.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Lelebata || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					60 Laporan	840.000,00	KELURAHAN LALE BATA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.576.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.450.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	6.576.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Lelebata || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60 Laporan	6.450.000,00	KELURAHAN LALE BATA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						67.881.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			64.260.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	67.881.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Lelebata || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					60 Laporan	64.260.000,00	KELURAHAN LALE BATA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.454.000,00						Kelurahan Lalebata		95.702.000,00	
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						68.454.000,00						Kelurahan Lalebata		95.702.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		4 Unit	5 Unit	27.240.000,00							6 Unit	34.750.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	29.524.000,00							18 Unit	43.314.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	11.690.000,00							7 Unit	17.638.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						4.632.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.232.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	8 Unit	4.632.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Lelebata || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Unit	6.232.000,00	KELURAHAN LALE BATA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.850.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.850.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	2 Unit	1.850.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Lelebata || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7 Unit	1.850.000,00	KELURAHAN LALE BATA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.200.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		4 Unit	1 Unit	20.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Lelebata || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	20.200.000,00	KELURAHAN LALE BATA
351.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.667.784.000,00**								**662.478.100,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***343.800.000,00***								***343.800.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	343.800.000,00							100 %	343.800.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.667.484.000,00						Kelurahan Lalebata		660.078.100,00	
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan						1.667.484.000,00						Kelurahan Lalebata		660.078.100,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38 Pokmas / Ormas		30 Pokmas / Ormas	32 Pokmas / Ormas	1.414.380.000,00							34 Pokmas / Ormas	392.940.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						343.800.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			343.800.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38 Pokmas / Ormas		30 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	343.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Lelebata || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					34 Pokmas / Ormas	343.800.000,00	KELURAHAN LALE BATA
		KELURAHAN MACCORAWALIE						**649.200.000,00**								**294.586.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**649.200.000,00**								**294.586.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**649.200.000,00**								**294.586.000,00**	
352.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.043.231.000,00**								**4.395.219.389,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***133.600.000,00***								***128.986.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	133.600.000,00							100 %	128.986.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						136.219.500,00						Kelurahan Maccorawalie		149.725.700,00	
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						136.219.500,00						Kelurahan Maccorawalie		149.725.700,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	118.988.500,00							60 Laporan	131.275.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		12 Paket	14 Paket	11.890.000,00							16 Paket	14.142.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	Paket	3.528.000,00							Paket	1.780.200,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.586.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.586.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1.586.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Maccorawalie || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Paket	1.586.000,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.362.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.562.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		12 Paket	4 Paket	2.362.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Maccorawalie II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Paket	2.562.000,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.227.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Maccorawalie II 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					60 Laporan	14.227.500,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						310.441.000,00						Kelurahan Maccorawalie		145.150.000,00	
		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah						310.441.000,00						Kelurahan Maccorawalie		145.150.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.756.000,00							12 Unit	14.800.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	272.685.000,00							12 Unit	130.350.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						5.400.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.400.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	1 Unit	5.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Maccorawalie II 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Unit	5.400.000,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						22.600.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			22.600.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	3 Unit	22.600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Maccorawalie II 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Unit	22.600.000,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						419.877.500,00						Kelurahan Maccorawalie		408.970.500,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						419.877.500,00						Kelurahan Maccorawalie		408.970.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	88.086.000,00							60 Laporan	85.960.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	327.901.500,00							60 Laporan	318.290.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	3.890.000,00							60 Laporan	4.720.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						840.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			900.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	2 Laporan	840.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Maccorawalie II 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					60 Laporan	900.000,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			12.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	6 Laporan	11.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Maccorawalie II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60 Laporan	12.500.000,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						68.338.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.736.500,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	5 Laporan	68.338.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Maccorawalie II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					60 Laporan	62.736.500,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.454.000,00						Kelurahan Maccorawalie		95.702.000,00	
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						68.454.000,00						Kelurahan Maccorawalie		95.702.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		4 Unit	5 Unit	27.240.000,00							6 Unit	34.750.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	29.524.000,00							18 Unit	43.314.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	11.690.000,00							7 Unit	17.638.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.474.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.474.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	2 Unit	1.474.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Maccorawalie II 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Unit	1.474.000,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	3 Unit	1.500.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Maccorawalie II 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Unit	2.000.000,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		4 Unit	1 Unit	3.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Maccorawalie II 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					6 Unit	3.000.000,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
353.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.667.784.000,00**								**662.478.100,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***515.600.000,00***								***165.600.000,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	515.600.000,00							100 %	165.600.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.667.484.000,00						Kelurahan Maccorawalie		660.078.100,00	
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan						1.667.484.000,00						Kelurahan Maccorawalie		660.078.100,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38 Pokmas / Ormas		30 Pokmas / Ormas	32 Pokmas / Ormas	1.414.380.000,00							34 Pokmas / Ormas	392.940.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		11 Unit	12 Unit	253.104.000,00							13 Unit	267.138.100,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						85.800.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			159.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		11 Unit	3 Unit	85.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Maccorawalie || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Unit	159.000.000,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						429.800.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.600.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38 Pokmas / Ormas		30 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	429.800.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Maccorawalie || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					34 Pokmas / Ormas	6.600.000,00	KELURAHAN MACCORAWALIE
		KELURAHAN KADIDI						**422.880.000,00**								**125.138.100,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**422.880.000,00**								**125.138.100,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**422.880.000,00**								**125.138.100,00**	
354.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.043.231.000,00**								**4.395.219.389,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***126.119.000,00***								***117.000.000,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	126.119.000,00							100 %	117.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						136.219.500,00						Kelurahan Kadidi		149.725.700,00	
		Terselenggaranya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						136.219.500,00						Kelurahan Kadidi		149.725.700,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	118.988.500,00							60 Laporan	131.275.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		12 Paket	14 Paket	11.890.000,00							16 Paket	14.142.500,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.400.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.250.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		12 Paket	4 Paket	2.400.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Kadidi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					16 Paket	2.250.000,00	KELURAHAN KADIDI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Kadidi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					60 Laporan	10.000.000,00	KELURAHAN KADIDI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						310.441.000,00						Kelurahan Kadidi		145.150.000,00	
		Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah						310.441.000,00						Kelurahan Kadidi		145.150.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	272.685.000,00							12 Unit	130.350.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						39.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	2 Unit	39.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Kadidi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					12 Unit	21.000.000,00	KELURAHAN KADIDI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						419.877.500,00						Kelurahan Kadidi		408.970.500,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						419.877.500,00						Kelurahan Kadidi		408.970.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	88.086.000,00							60 Laporan	85.960.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	327.901.500,00							60 Laporan	318.290.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	3.890.000,00							60 Laporan	4.720.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						840.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			840.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	2 Laporan	840.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Kadidi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60 Laporan	840.000,00	KELURAHAN KADIDI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	6 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Kadidi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					60 Laporan	9.000.000,00	KELURAHAN KADIDI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						56.995.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			54.438.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	5 Laporan	56.995.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Kadidi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					60 Laporan	54.438.000,00	KELURAHAN KADIDI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.454.000,00						Kelurahan Kadidi		95.702.000,00	
		Terselenggaranya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						68.454.000,00						Kelurahan Kadidi		95.702.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	29.524.000,00							18 Unit	43.314.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	11.690.000,00							7 Unit	17.638.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.474.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.524.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	2 Unit	1.474.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Kadidi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					18 Unit	14.524.000,00	KELURAHAN KADIDI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.410.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.948.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	2 Unit	3.410.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Kadidi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					7 Unit	4.948.000,00	KELURAHAN KADIDI
355.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.667.784.000,00**								**662.478.100,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***296.761.000,00***								***8.138.100,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	296.761.000,00							100 %	8.138.100,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.667.484.000,00						Kelurahan Kadidi		660.078.100,00	
		Tercapainya Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan						1.667.484.000,00						Kelurahan Kadidi		660.078.100,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38 Pokmas / Ormas		30 Pokmas / Ormas	32 Pokmas / Ormas	1.414.380.000,00							34 Pokmas / Ormas	392.940.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		11 Unit	12 Unit	253.104.000,00							13 Unit	267.138.100,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						81.381.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.138.100,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 Unit		11 Unit	2 Unit	81.381.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Kadidi || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)					13 Unit	8.138.100,00	KELURAHAN KADIDI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						215.380.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38 Pokmas / Ormas		30 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	215.380.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Panca Rijang || Kelurahan Kadidi || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					34 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN KADIDI
		KECAMATAN KULO						**1.381.451.000,00**								**1.449.602.550,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.381.451.000,00**								**1.449.602.550,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.381.451.000,00**								**1.449.602.550,00**	
356.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.324.078.000,00**								**1.389.360.900,00**	
		Terselenggaranya Dukungan Administratif dan Operasional Untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan						***1.324.078.000,00***								***1.389.360.900,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	1.324.078.000,00							100 %	1.389.360.900,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.087.251.000,00						Kantor Kecamatan Kulo		1.141.613.550,00	
		Tersedianya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.087.251.000,00						Kantor Kecamatan Kulo		1.141.613.550,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan		204 Orang/bulan	238 Orang/bulan	1.087.251.000,00							266 Orang/bulan	1.141.613.550,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.087.251.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.141.613.550,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan		204 Orang/bulan	312 Bulan Orang/bulan	1.087.251.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					266 Orang/bulan	1.141.613.550,00	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						83.295.600,00						Kantor Kecamatan		86.539.380,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah						83.295.600,00						Kantor Kecamatan		86.539.380,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	59091 Laporan		59091 Laporan	59091 Laporan	20.467.500,00							59091 Laporan	20.569.875,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	513 Laporan		513 Laporan	513 Laporan	35.200.000,00							513 Laporan	36.960.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16544 Paket		16544 Paket	16544 Paket	5.293.500,00							16544 Paket	5.558.175,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 Paket		45 Paket	45 Paket	3.050.000,00							45 Paket	3.202.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		5 Paket	3 Paket	19.284.600,00							5 Paket	20.248.830,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.050.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.202.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 Paket		45 Paket	90 buah Paket	3.050.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					45 Paket	3.202.500,00	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19.284.600,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.248.830,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		5 Paket	11 buah Paket	19.284.600,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Paket	20.248.830,00	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.293.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.558.175,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16544 Paket		16544 Paket	16544 Paket	5.293.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					16544 Paket	5.558.175,00	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.467.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.569.875,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	59091 Laporan		59091 Laporan	59091 Laporan	20.467.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					59091 Laporan	20.569.875,00	KECAMATAN KULO

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						35.200.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.960.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	513 Laporan		513 Laporan	513 Laporan	35.200.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				513 Laporan	36.960.000,00	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						22.100.000,00						Kantor Kecamatan		23.205.000,00	
		Tersedianya Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						22.100.000,00						Kantor Kecamatan		23.205.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit		30 Unit	30 Unit	22.100.000,00							30 Unit	23.205.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						22.100.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			23.205.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit		30 Unit	30 Unit	22.100.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Unit	23.205.000,00	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108.991.400,00						Kantor Kecamatan		114.440.970,00	
		Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108.991.400,00						Kantor Kecamatan		114.440.970,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17.350.000,00							12 Laporan	18.217.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	91.041.400,00							12 Laporan	95.593.470,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	118 Laporan		118 Laporan	118 Laporan	600.000,00							118 Laporan	630.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						600.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			630.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	118 Laporan		118 Laporan	118 Laporan	600.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				118 Laporan	630.000,00	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.350.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			18.217.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Bulan Laporan	17.350.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	18.217.500,00	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						91.041.400,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			95.593.470,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Bulan Laporan	91.041.400,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	95.593.470,00	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.440.000,00						Kantor Kecamatan		23.562.000,00	
		Tersedianya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.440.000,00						Kantor Kecamatan		23.562.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	17.316.000,00							3 Unit	18.181.800,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	24 Unit	5.124.000,00							24 Unit	5.380.200,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						17.316.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			18.181.800,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	17.316.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	18.181.800,00	KECAMATAN KULO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.124.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.380.200,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	24 Unit	5.124.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24 Unit	5.380.200,00	KECAMATAN KULO
357.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**1.111.000,00**								**1.166.550,00**	
		Meningkatnya Efektivitas dan Jangkauan Pelayanan Pemerintahan Terhadap Pelayanan Publik						***555.500,00***								***583.275,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	555.500,00							100 %	583.275,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.111.000,00						Kantor Kecamatan		1.166.550,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.111.000,00						Kantor Kecamatan		1.166.550,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	555.500,00							1 Laporan	583.275,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	555.500,00							1 Laporan	583.275,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						555.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			583.275,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	555.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	583.275,00	KECAMATAN KULO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						555.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			583.275,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	555.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	583.275,00	KECAMATAN KULO
358.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**4.595.500,00**								**4.825.275,00**	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan						***4.595.500,00***								***4.825.275,00***	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %		100 %	100 %	4.595.500,00							100 %	4.825.275,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4.595.500,00						Kantor Kecamatan		4.825.275,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan						4.595.500,00						Kantor Kecamatan		4.825.275,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.595.500,00							2 Laporan	4.825.275,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						4.595.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.825.275,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.595.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Laporan	4.825.275,00	KECAMATAN KULO
359.	7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**50.000.000,00**								**52.500.000,00**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Guna Mendukung Stabilitas Pemerintahan dan Kehidupan Bermasyarakat						***50.000.000,00***								***52.500.000,00***	
			999.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00							100 %	52.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						50.000.000,00						Kantor Kecamatan		52.500.000,00	
		Terselenggaranya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						50.000.000,00						Kantor Kecamatan		52.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00							4 Dokumen	52.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						50.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			52.500.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	52.500.000,00	KECAMATAN KULO
360.	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**1.666.500,00**								**1.749.825,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan						***555.500,00***								***583.275,00***	
			999.Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	555.500,00							100 %	583.275,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						1.666.500,00						Kantor Kecamatan		1.749.825,00	
		Tersedianya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						1.666.500,00						Kantor Kecamatan		1.749.825,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	555.500,00							1 Dokumen	583.275,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	555.500,00							1 Dokumen	583.275,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	555.500,00							1 Dokumen	583.275,00	
		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.666.500,00						Kantor Kecamatan		1.749.825,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	555.500,00							1 Dokumen	583.275,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	555.500,00							1 Dokumen	583.275,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	555.500,00							1 Dokumen	583.275,00	
		Tersedianya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						1.666.500,00						Kantor Kecamatan		1.749.825,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	555.500,00							1 Dokumen	583.275,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	555.500,00							1 Dokumen	583.275,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	555.500,00							1 Dokumen	583.275,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						555.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			583.275,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	555.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	583.275,00	KECAMATAN KULO
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						555.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			583.275,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	555.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	583.275,00	KECAMATAN KULO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						555.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			583.275,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	555.500,00	Provinsi Sulawesi Selatan || Kab. Sidenreng Rappang || Kecamatan Kulo || Desa Kulo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	583.275,00	KECAMATAN KULO
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**4.164.755.000,00**								**4.990.622.986,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**4.164.755.000,00**								**4.990.622.986,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**4.164.755.000,00**								**4.990.622.986,00**	
361.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.850.269.000,00**								**2.146.922.986,00**	
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien						***1.816.769.000,00***								***2.088.922.986,00***	
			999.Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %	1.816.769.000,00							100 %	2.088.922.986,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.500.000,00						ASN Lingkup Kesbangpol		15.500.000,00	
		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencannaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah						16.500.000,00						ASN Lingkup Kesbangpol		15.500.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00							1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00							4 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00							2 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00							2 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00							1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00							4 Laporan	2.500.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.500.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.425.705.000,00						ASN Lingkup Kesbangpol		1.672.872.986,00	
		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.425.705.000,00						ASN Lingkup Kesbangpol		1.672.872.986,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00							1 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00							4 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bulan		252 Orang/bulan	252 Orang/bulan	1.416.705.000,00							252 Orang/bulan	1.665.872.986,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.416.705.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.665.872.986,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252 Orang/bulan		252 Orang/bulan	252 Orang/bulan	1.416.705.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)					252 Orang/bulan	1.665.872.986,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						7.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						99.300.000,00						ASN Lingkup Kesbangpol		91.586.000,00	
		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah						99.300.000,00						ASN Lingkup Kesbangpol		91.586.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135 Laporan		127 Laporan	127 Laporan	94.800.000,00							130 Laporan	87.086.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	4.500.000,00							25 Paket	4.500.000,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.500.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	4.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25 Paket	4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						94.800.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			87.086.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135 Laporan		127 Laporan	127 Laporan	94.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					130 Laporan	87.086.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40.000.000,00						ASN Lingkup Kesbangpol		40.000.000,00	
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah						40.000.000,00						ASN Lingkup Kesbangpol		40.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00							5 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	30.000.000,00							8 Unit	30.000.000,00	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Unit	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	30.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8 Unit	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						156.500.000,00						ASN Lingkup Kesbangpol		206.500.000,00	
		Cakupan Ketersedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						156.500.000,00						ASN Lingkup Kesbangpol		206.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.000.000,00							12 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	126.000.000,00							12 Laporan	173.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80 Laporan		60 Laporan	65 Laporan	2.500.000,00							70 Laporan	3.500.000,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80 Laporan		60 Laporan	65 Laporan	2.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					70 Laporan	3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						28.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						126.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			173.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	126.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	173.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						112.264.000,00						ASN Lingkup Kesbangpol		120.464.000,00	
		Cakupan Ketersedian Pemeliharaan Barang Milik daerah						112.264.000,00						ASN Lingkup Kesbangpol		120.464.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00							1 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	7.264.000,00							11 Unit	7.264.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	65.000.000,00							11 Unit	73.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit		19 Unit	20 Unit	20.000.000,00							21 Unit	20.000.000,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						65.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			73.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	65.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Unit	73.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						7.264.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.264.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	7.264.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					11 Unit	7.264.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit		19 Unit	20 Unit	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					21 Unit	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Unit	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
362.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**396.000.000,00**								**684.000.000,00**	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						***391.500.000,00***								***642.000.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan/Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 %		80 %	85 %	391.500.000,00							90 %	642.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						396.000.000,00						Masyarakat Umum dan Pelajar		684.000.000,00	
		Capaian Masyarakat yang mendapakan pembinaan penyuluhan ideologi pancasila dan karakter bangsa						396.000.000,00						Masyarakat Umum dan Pelajar		684.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							2 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	1.000.000,00							1 Keluarga	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00							1 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang		70 Orang	70 Orang	45.000.000,00							80 Orang	66.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang		70 Orang	70 Orang	500.000,00							80 Orang	6.000.000,00	
			Jumlah Paskibraka	70 Orang		55 Orang	70 Orang	345.000.000,00							70 Orang	565.000.000,00	
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	70 Orang		55 Orang	70 Orang	1.000.000,00							70 Orang	6.000.000,00	
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	6.000.000,00	
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1 Dokumen	6.000.000,00	
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00							1 Dokumen	6.000.000,00	
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						500.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						500.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						500.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang		70 Orang	70 Orang	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					80 Orang	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						45.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			66.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang		70 Orang	70 Orang	45.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					80 Orang	66.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						500.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Laporan	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						1.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Keluarga	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka						1.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						345.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			565.000.000,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	70 Orang		55 Orang	70 Orang	345.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					70 Orang	565.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila						500.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila						500.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila						1.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	70 Orang		55 Orang	70 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					70 Orang	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
363.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**939.500.000,00**								**1.028.700.000,00**	
		Meningkatnya Etika dan Budaya Politik						***937.500.000,00***								***1.004.700.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik	100 %		100 %	100 %	937.500.000,00							100 %	1.004.700.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						939.500.000,00						Masyarakat dan Pengurus Partai Politik		1.028.700.000,00	
		Presentase masyarakat dan partai politik yang mendpatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemula						939.500.000,00						Masyarakat dan Pengurus Partai Politik		1.028.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00							4 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00							4 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00							4 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.500.000,00							1 Kegiatan	6.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang		30 Orang	35 Orang	6.000.000,00							40 Orang	6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang		100 Orang	110 Orang	925.000.000,00							120 Orang	998.700.000,00	
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						2.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						2.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						925.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			998.700.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	140 Orang		100 Orang	110 Orang	925.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					120 Orang	998.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						6.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang		30 Orang	35 Orang	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					40 Orang	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						3.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Laporan	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka						1.500.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Kegiatan	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
364.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**49.000.000,00**								**30.000.000,00**	
		Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan						***42.500.000,00***								***6.000.000,00***	
			999.Persentase Organisasi Masyarakat dan Masyarakat yang Diberdayakan	80 %		80 %	80 %	42.500.000,00							80 %	6.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						49.000.000,00						Masyarakat Lingkup Kabupaten Sidrap		30.000.000,00	
		Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi masyarakat						49.000.000,00						Masyarakat Lingkup Kabupaten Sidrap		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00							4 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00							4 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	36.000.000,00							5 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 Orang		25 Orang	25 Orang	6.000.000,00							25 Orang	6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	6.000.000,00							100 Orang	6.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						500.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						500.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						6.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100 Orang	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						6.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 Orang		25 Orang	25 Orang	6.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25 Orang	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						36.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	36.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5 Laporan	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
365.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**130.986.000,00**								**318.000.000,00**	
		Meningkatnya Ketahanan Masyarakat melalui Pembinaan Sosial Budaya						***130.986.000,00***								***306.000.000,00***	
			999.Persentase Pembinaan dan Pengembangan KetahananEkonomi, Sosial, dan Budaya	100 %		85 %	90 %	130.986.000,00							90 %	306.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						130.986.000,00						Masyarakat Umum dan Pelajar		318.000.000,00	
		Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya						130.986.000,00						Masyarakat Umum dan Pelajar		318.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00							1 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	2.486.000,00							4 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	45.000.000,00							10 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang		150 Orang	250 Orang	1.500.000,00							300 Orang	6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang		150 Orang	250 Orang	80.000.000,00							300 Orang	100.000.000,00	
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						2.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						2.486.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	2.486.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						80.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang		150 Orang	250 Orang	80.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300 Orang	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						1.500.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300 Orang		150 Orang	250 Orang	1.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					300 Orang	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						45.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	45.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10 Laporan	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
366.	8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**799.000.000,00**								**783.000.000,00**	
		Meningkatnya Deteksi Dini dan Penyelesaian Konflik Sosial						***796.000.000,00***								***769.500.000,00***	
			999.Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah	100 %		100 %	100 %	796.000.000,00							100 %	769.500.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						799.000.000,00						Masyarakat		783.000.000,00	
		persentase peningkatan kewaspadaan nasional, peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial						799.000.000,00						Masyarakat		783.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000,00							12 Dokumen	675.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00							1 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00							12 Laporan	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	240 Orang		240 Orang	240 Orang	95.000.000,00							240 Orang	90.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	1.000.000,00							50 Orang	4.500.000,00	
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						1.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.500.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						1.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.500.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1 Dokumen	4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						1.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.500.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50 Orang	4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						95.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	240 Orang		240 Orang	240 Orang	95.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					240 Orang	90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						1.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.500.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Laporan	4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						700.000.000,00			1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-	6. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			675.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12 Dokumen	675.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H						**1.228.081.372.277,00**								**1.355.480.434.555,00**	

5.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan tahapan krusial yang menentukan arah dan fokus pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses ini dimulai dari cascading yang sistematis, dimana visi jangka panjang daerah diturunkan menjadi misi-misi strategis, kemudian dijabarkan dalam tujuan yang lebih spesifik, dan selanjutnya dioperasionalkan melalui sasaran-sasaran yang terukur. Setiap tingkatan dalam hierarki ini memiliki keterkaitan logis yang kuat, memastikan bahwa program prioritas yang akan dirumuskan benar-benar sejalan dengan cita-cita pembangunan daerah.

Proses identifikasi program prioritas dimulai dengan analisis mendalam terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan. Setiap arah kebijakan kemudian diturunkan menjadi program-program potensial yang dapat menjadi instrumen pelaksanaan kebijakan tersebut. Pada tahap ini, pemerintah daerah melakukan pemetaan komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, menganalisis kesenjangan antara kondisi saat ini dengan target yang ingin dicapai, serta mengidentifikasi berbagai stakeholder yang akan terlibat dalam implementasi program. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang telah terkumpul melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) berjenjang.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan prioritas program tersebut, seluruh alokasi anggaran ditetapkan secara terencana dan diukur berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan dengan mengutamakan program-program yang memberikan dampak langsung dan signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, mendorong inovasi dalam pelayanan publik, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah guna memastikan setiap program prioritas yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat anggaran demi terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.



Tabel 5.3

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Program Unggulan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
Visi " SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA"								
M1 Membangun Struktur Perekonomian Daerah Yang Kuat Melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis Menuju Agroindustri Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan								
P3 Pupuk Lancar, P4 Listrik masuk sawah, P5 Harga Komoditas pertanian dan perkebunan stabil, P6 Peternakan dan perikanan sukses	PD1 Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah	**Tujuan 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah**		**Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**%**	**8,39-10,39**	**4.664.088.195**	
		Sasaran 1 Meningkatnya ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian		**Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%)**	**%**	**11.92**	**4.086.409.695**	
				Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	**Indeks**	**77.77**		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tersedianya sarana pertanian berkualitas dengan distribusi merata	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	5,86	392.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan
				Jumlah Produksi Daging (Kg)	Kg	3.270.129	170.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
				Jumlah Produksi Telur (Kg)	Kg	49.586.632		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Terwujudnya prasarana pertanian yang mendukung efisiensi produksi	Persentase ketersediaan prasarana pertanian	%	100	317.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	100	175.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan hewan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan Kejadiaan dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan menular (%)	%	21	65.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kompetensi penyuluh dan kelompok tani	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	%	4,22	154.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
				Rasio Penyuluh Peternakan terhadap Pelaku Utaman Peternakan/ Kelompok Ternak (Rasio)	Rasio	1:21	52.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	2.476,86	72.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	1.316,72	88.000.000	Dinas Peternakan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Tersedianya jaringan irigasi yang baik dan terpelihara	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	75	1.708.000.194	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya variasi konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	90.01	893.409.500	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunana dan Ketahanan Pangan
		Sasaran 2 Meningkatnya nilai tambah produk melalui pengembangan agroindustri		**Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)**	**%**	**12.92**	**577.678.500**	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya sarana perdagangan yang efisien dan terintegrasi	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	18,75	300.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Terwujudnya perkembangan industri lokal yang kompetitif	Cakupan Kelompok dan Pelaku Industri yang Mendapatkan Pembinaan	%	5,00	130.605.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tercapainya stabilitas harga barang pokok melalui pengawasan yang efektif	Cakupan Pengawasan Terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Lainnya	%	100	147.073.500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
M2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memperluas Kesempatan Berusaha, Menciptakan Lapangan Kerja Dan Perlindungan Sosial Yang Adaptif								
P7 UMKM Maju, P8 Tersedianya Lapangan Kerja, P12	PD2 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan	**Tujuan 2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**		**Tingkat Kemiskinan (%)**	**%**	**4.33-4.06**	**3.199.000.000**	
				Rasio Gini (Indeks)	**Indeks**	**0.303-0.301**		

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
Pengembangan Potensi Wirausaha Generasi Z dan Milenial	Penurunan Kemiskinan	**Sasaran 3 Meningkatnya pendapatan masyarakat**		**PDRB Perkapita (juta rupiah)**	**Juta Rupiah**	**76.52-77.64**	**734.000.000**	
		Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial yang meningkatkan kapasitas masyarakat	Persentase Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	100	50.000.000	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Tersedianya layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	%	100	107.000.000	Dinas Sosial
				Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	%	100		
				Jumlah Warga Negara Lanjut Usia yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	%	100		
				Jumlah Warga Negara Gelandangan/Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	%	100		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terwujudnya perlindungan sosial yang menjangkau masyarakat rentan	Persentase Penerima Manfaat yang Mendapatkan Bantuan Sosial	%	100	192.000.000	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Terwujudnya kemandirian lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	215.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi wirausaha	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	22	25.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Terwujudnya tata kelola desa yang transparan dan partisipatif	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif dan berkualitas	Persentase koperasi aktif	%	68,70	50.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya skala usaha mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasitasi pengembangan	%	4	20.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Sasaran 4 Menurunnya tingkat pengangguran		**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**	**%**	**2.92-2.84**	**2.465.000.000**	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tersedianya tenaga kerja yang bersertifikasi dan kompeten	Persentase tenaga kerja bersetifikat kompetensi	%	33	155.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Hubungan Industrial	Terwujudnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKSBipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	%	20	2.310.000.000	Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
M3 Mengembangkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Inklusif Untuk Mewujudkan Pendidikan Unggul Dan Kesehatan Untuk Semua								
P1 BPJS Kesehatan Gratis, P2 Pendidikan Unggul, P11 Anak-anak Sidrap Sehat	PD3 Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Unggul dan Kesehatan Berkualitas	**Tujuan 3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**76.22-76.55**	**130.824.189.000**	
		Sasaran 5 Meningkatnya mutu dan akses pendidikan yang berkualitas dan merata		**Indeks Pendidikan**	**Indeks**	**65.94**	**61.254.903.000**	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya akses pendidikan yang inklusif bagi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5 - 6 Tahun	%	90,5	53.610.358.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 7 - 12 Tahun	%	99,88		

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
				Angka Partisipasi Sekolah Anak usia 13 - 15 Tahun	%	92,59		
				Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Tahun Kesetaraan	%	19,16		
		Program Pengembangan Kurikulum	Terwujudnya kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	40	25.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tersedianya tenaga pendidik yang kompeten dan merata	Indeks Pemerataan Guru	Indeks	96,07	7.255.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Serdik)	%	83		
		Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya akses layanan perpustakaan yang berkualitas	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	71,48	364.545.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Sasaran 6 Meningkatnya layanan kesehatan berkualitas yang terjangkau dan responsif		**Indeks Kesehatan**	**Indeks**	**84.67**	**69.261.286.000**	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat	Cakupan pelayanan Kesehatan Masyarakat	%	100	68.321.286.000	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat	Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	82	260.000.000	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai, berkualitas dan merata	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Fasilitas Kesehatan	rasio	87	680.000.000	
		Sasaran 7 Mewujudkan kesetaraan gender yang inklusif		**Indeks pembangunan gender**	**Indeks**	**94.07**	**308.000.000**	

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Program Pegarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Terwujudnya kebijakan pembangunan yang responsif gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	100	285.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	Tersedianya layanan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	%	0,001	5.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Tersedianya layanan perlindungan khusus bagi anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	18.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
M4 Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Yang Berkelanjutan								
P14 Sidrap Bersih dan Tangguh Bencana	PD4 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan	**Tujuan 4 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan**		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Indeks**	**74.35**	**9.297.856.500**	
		Sasaran 8 Menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca		**Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)**	**%**	**14.33**	**8.898.856.500**	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	%	100	65.100.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terwujudnya pelestarian keanekaragaman hayati yang lestari	Persentase luas RTH Publik dan Privat dari Wilayah Kota/Perkotaan	%	25,12	1.650.328.500	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efisien	Persentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	%	83,9	7.183.428.000	Dinas Lingkungan Hidup

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Sasaran 9 Menurunnya tingkat risiko bencana		**Indeks Resiko Bencana**	**Indeks**	**117.90**	**399.000.000**	
		Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	399.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100		
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		
M5 Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius								
P10 Sidrap Aman dan Religius	PD5 Pengembangan Kehidupan Sosial yang Kondusif, Berbudaya, dan Religius	**Tujuan 5 Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama**		**Indeks Harmoni Indonesia (IHal)**	**Indeks**	**72,49**	**7.184.733.500**	
		Sasaran 10 Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat		**Angka kriminalitas**	**kasus**	**661**	**5.260.013.500**	
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda	%	100	1.738.013.500	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya Layanan Pencegahan dan penyelamatan Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Ppenyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	2.405.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Meningkatnya deteksi dini dan penyelesaian konflik sosial	Persentase Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim dalam Rangka Cegah dan Deteksi Dini Konflik dalam Daerah	%	100	799.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya ketahanan masyarakat melalui pembinaan sosial budaya	Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	90	318.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Sasaran 11 Meningkatnya nilai-nilai religius dan pelestarian budaya serta pembinaan generasi muda		**Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan (%)**	**%**	**26.63**	**1.924.720.000**	
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	**Indeks**	**56.89**		
				Indeks Pembangunan pemuda	**Indeks**	**75.53**		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas pemuda melalui wirausaha berbasis budaya lokal	Rasio wirausaha pemuda	%	0,09	80.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	%	10	590.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tepat waktu (%)	%	100	1.164.720.000	Sekretariat Daerah
				Perssentase kegiatan keagaamaan yang difasilitasi oleh pemerintah	%	100		
				Jumlah produk hukum yang dihasilkan	Dokumen	730		
				Jumlah kerjasama daerah yang dihasilkan	Dokumen	35		
		Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	66,48	40.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan terhadap cagar budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	45,71	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	81,43		
M6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital								
P13 ASN/ Perangkat Desa Sejahtera	PD6 Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	**Tujuan 6 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**73.86**	**133.936.646.850**	
		Sasaran 11 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis inovasi dan digitalisasi		**nilai SAKIP**	**Nilai**	**71.29**	**133.352.347.850**	
				Indeks Inovasi daerah	**Indeks**	**56.84**		
				Indeks SPBE	**Indeks**	**3.62**		
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Konsistensi Program RPJMD-RKPD	%	100	450.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
				Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	%	100		
				Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	100		
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan	Persentase penyampaian laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	%	100	126.845.900.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Upaya Eksensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%	100	2.751.329.000	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	18,82		
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100		

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
		Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kinerja ASN yang kompeten dan profesional	Rata-Rata SKP ASN Bernilai BAIK	Nilai	73	365.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai seluruh OPD	%	92		
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pemanfaatan Pembangunan Daerah	%	100	300.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	100		
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Tindak Lanjut terhadap Hasil Pengawasan dan Menurunnya Temuan BPK	Jumlah Temuan BPK	Temuan	22	1.566.542.850	Inspektorat
				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di Tindakjanjuti	%	47,1		
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Iternet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	%	100	1.073.576.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Sasaran 12 Tercapainya peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik		**Indeks Pelayanan Publik (indeks)**	**Indeks**	**4.15**	**584.299.000**	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IIKM)	**Indeks**	**81.05**		
		Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftran penduduk	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	%	99,65	297.500.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Akta Pencacatan Sipil	%	85,25	54.950.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Terwujudnya pelayanan perizinan yang efisien dan sesuai SOP	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	%	100	231.849.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Program Unggulan KDH	Prioritas Pembangunan Daerah	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas Daerah	Outcome	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027		OPD Penanggungjawab
						Kinerja	Keuangan (Rp)	
M7 Mengembangkan Infrastruktur Yang Merata Dan Berkualitas Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Serta Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat								
P9 Jalan Mulus	PD7 Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah	**Tujuan 7 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas**		**Indeks daya saing daerah pilar infrastruktur**	**Indeks**	**3.33**	**56.438.834.000**	
		Sasaran 13 Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur daerah		**Indeks Infrastruktur**	**Indeks**	**79.65**	**56.438.834.000**	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya tingkat kemantapan jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	40,796	42.829.705.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Pera
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	63,5	80.000.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	%	82,05	125.000.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Pera
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Air Minum yang layak	Persentase Rumah Tangga yang mengakses Air Minum Layak dan Aman	%	95,7	100.000.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestic layak dan aman)	%	92,88	3.851.179.000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Pera
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	50	9.452.950.000	Dinas Perhubungan

Sumber: RPJMD Kab. Sidenreng Rappang 2025-2029, diolah

Tabel 5.3 menggambarkan kerangka perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 yang disusun secara sistematis dengan menghubungkan visi, misi, tujuan, sasaran, hingga program prioritas daerah beserta indikator kinerja dan perangkat daerah yang bertanggung jawab.

Visi Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi landasan adalah "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera" , yang diturunkan ke dalam tujuh misi pembangunan. Misi pertama (M1) fokus pada penguatan struktur perekonomian daerah melalui percepatan pengembangan agrobisnis menuju agroindustri di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Program-program di bawah misi ini meliputi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya, pengelolaan sumber daya udara, serta peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, yang semuanya dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

Misi kedua (M2) diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan berusaha, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif. Program-program yang dirancang meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan UMKM dan koperasi, lembaga pemberdayaan kemasyarakatan dan desa, administrasi pemerintahan desa, pelatihan kerja, serta hubungan industrial. Pelaksanaan program ini melibatkan Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

Misi ketiga (M3) menitikberatkan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia yang inklusif guna mewujudkan pendidikan unggul dan kesehatan untuk semua. Prioritas program yang dirancang meliputi pengelolaan pendidikan, pengembangan kriteria, peningkatan kompetensi guru, pembinaan perpustakaan, penyediaan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Di sisi lain, terdapat juga program pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan serta anak, yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Misi keempat (M4) bertujuan mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Program-program yang direncanakan mencakup pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan persampahan, serta penanggulangan bencana daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dan penurunan indeks risiko bencana, yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Misi kelima (M5) ditujukan untuk mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradat, dan religius. Program yang dirancang meliputi peningkatan

ketentraman dan kesejahteraan umum, pencegahan kebakaran, peningkatan kewaspadaan nasional, pembangunan ketahanan ekonomi sosial budaya, pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan cagar budaya. Program ini dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Misi keenam (M6) fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi digital. Prioritas programnya meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, kepegawaian, penelitian dan inovasi daerah, pengawasan, pengelolaan aplikasi informatika, serta peningkatan layanan administrasi kependudukan, catatan sipil, dan perizinan. Program-program ini dikelola oleh berbagai OPD teknis seperti Bappeda, BKAD, Inspektorat, Diskominfo, dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Misi ketujuh (M7) diarahkan pada pengembangan infrastruktur yang merata dan berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program yang direncanakan meliputi penyelenggaraan jalan, pengelolaan sistem drainase, pengelolaan kawasan organisasi kumuh, penyediaan air minum layak, pengelolaan air limbah domestik, serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Keseluruhan program ini dikelola oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, serta Dinas Perhubungan.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dalam pencapaian kinerja tahunan yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi dasar dalam evaluasi keberhasilan pembangunan daerah. Dalam kerangka tersebut, seluruh target kinerja dirancang secara sistematis untuk menjawab tantangan pembangunan kontemporer dan mendukung visi serta misi kepala daerah periode 2025-2029.

Penetapan kinerja ini merupakan cerminan dari capaian pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kinerja pembangunan daerah dilakukan melalui berbagai indikator yang komprehensif, meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur pencapaian prioritas strategi daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menilai efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan, serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Keseluruhan indikator tersebut menjadi instrumen penting dalam mencapai keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.

Dalam menetapkan target indikator kinerja tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang juga mempertimbangkan capaian pembangunan hingga tahun 2025, termasuk tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan angka partisipasi pendidikan, yang menjadi acuan dalam menyusun target yang realistis namun progresif. Integrasi komitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar turut menjadi penentu arah kebijakan anggaran dan program. Dengan pendekatan perencanaan yang partisipatif, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika lokal maupun global, RKPD Tahun 2027 diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mempercepat transformasi Sidrap menjadi kabupaten agroindustri yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan

6.1. Indikator Makro Pembangunan

Pencapaian indikator makro yang mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan terbuka, Indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan dan indikator lingkungan memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah, yang menjadi landasan dalam merumuskan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Target-target yang ditetapkan dalam indikator makro pembangunan

tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan daerah, serta diselaraskan dengan target pembangunan provinsi dan nasional guna menciptakan sinergi yang optimal antara pembangunan daerah dan nasional.

Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta arahan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya daerah dan mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Penetapan target ini dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal, kemampuan kelembagaan, dan daya dukung sumber daya manusia yang tersedia di kabupaten. Tujuh indikator kinerja makro tersebut sebagaimana dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Penetapan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Realisasi 2025	Target	
				2026	2027
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	7.71	4.95	8.81
2	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	65.15	64.89	70.40
3	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	4.91	4.45-3.55	4.33-4.06
4	Rasio Gini (Indeks)	Indeks	0.325	0.306	0.303-0.301
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	3.36	2.84	2.92-2.84
6	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	Indeks	75.49	75.44	75.8
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persen	3.04 *)	13.27	14.33
8	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	Persen	2.88	2.80	2.94
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks)	Indeks	74.16	77.14	74.35

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah. 2026
**) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menggunakan capaian tahun 2024*

Sembilan indikator makro pembangunan yang disajikan dalam Tabel 6.1 merepresentasikan capaian fundamental pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dihasilkan dari sinergi berbagai program pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan terkait. Pertumbuhan ekonomi mencapai angka 7.71% pada tahun 2025 dan dilakukan revisi target dari target RPJMD menjadi 8.81%, mencerminkan optimisme terhadap akselerasi perekonomian daerah di tahun-tahun mendatang. Sementara itu, PDRB per kapita mencapai angka Rp65,15 juta pada tahun 2025, dan dilakukan revisi target dari target RPJMD menjadi Rp. 70.40 juta di tahun 2027 dan diharapkan terus meningkat seiring dengan penguatan daya beli masyarakat dan produktivitas ekonomi lokal. Upaya pengentasan kemiskinan tercermin pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi kisaran 4.91% pada tahun 2025 dan lebih rendah lagi menjadi 3,31–3,54% pada tahun 2027, menunjukkan komitmen kuat terhadap pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Distribusi pendapatan yang lebih

merata diupayakan melalui penurunan rasio Gini dari 0,325 menjadi 0,306 pada tahun 2025 dan mencapai 0,300 pada tahun 2027, sebagai indikasi pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif.

Pada aspek sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat dari realisasi 75,49 menjadi 75,44 pada tahun 2025 dan mencapai 75,8 pada tahun 2027, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Tingkat pengangguran terbuka diarahkan menurun menjadi 2,84% pada tahun 2025, menandakan upaya penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan juga terlihat dari target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi 14,33% pada tahun 2027 dari realisasi sebelumnya 13,27%, serta peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 77,14 pada tahun 2025 dan stabil pada 74,35 pada tahun 2027. Secara keseluruhan, target-target tersebut mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). IKU dirancang untuk mengukur kinerja prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus kepala daerah dalam periode kepemimpinannya, sehingga mencerminkan visi dan misi yang ingin diwujudkan. Penetapan IKU dilakukan secara pemilihan dengan memilih indikator-indikator yang paling strategis dan berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Target IKU tahun 2027 disusun dengan mempertimbangkan pencapaian tahun-tahun sebelumnya, kondisi aktual daerah, serta sumber daya yang tersedia, sehingga target yang ditetapkan bersifat realistis namun tetap menantang untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 telah menetapkan 26 indikator tujuan dan sasaran yang mencerminkan arah pembangunan daerah sesuai visi “Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) dipilih secara strategis untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah dalam mewujudkan janji politik dan program unggulan, sekaligus memastikan keselarasan dengan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, seperti pengentasan kemiskinan, swasembada pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, reformasi birokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Pemilihan 12 IKU ini, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 10 Tahun

2025 dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, bertujuan untuk memfokuskan evaluasi pada indikator yang bersifat SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), strategis, dan mampu mencerminkan dampak pembangunan yang signifikan bagi masyarakat Sidenreng Rappang. Selanjutnya disajikan pada table berikut ini:

Tabel 6.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027

No.	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target	
				2026	2027
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7.71	4.95	8.81
2	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	75.67	88.62	77.77
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	4.91	4.45-3.55	4.33-4.06
4	Rasio Gini	Rasio	0.325	0.306	0.303-0.301
5	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	65,15	64.89	70.40
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.36	2.84	2.92-2.84
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75.49	75.44	76.22-76.55
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74.16	74.14	74.35
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	3.04 *)	13.27	14.33
10	Angka Kriminalitas	Kasus	940	766	661
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60.69	72.07	73.86
12	Indeks Infrastruktur	Indeks	79.54	80.56	80.84

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027
**) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menggunakan capaian tahun 2024*

6.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran komprehensif yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah secara menyeluruh. IKD mengintegrasikan berbagai dimensi pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan, sehingga memberikan gambaran holistik tentang kondisi pembangunan daerah. Berbeda dengan IKU yang lebih fokus pada prioritas strategi kepala daerah dan IKK yang mengukur kinerja urusan pemerintahan, IKD lebih menekankan pada outcome atau hasil akhir pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Penilaian IKD dilakukan secara periodik dan hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara nasional, sekaligus menjadi referensi dalam identifikasi daerah-daerah yang masih memerlukan perbaikan dan penguatan. Target peningkatan IKD tahun 2027 menjadi komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Tabel 6.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Katerangan
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
1	*Ketahanan Energi, Air dan Pangan*					
	a) Ketahanan Energi					
	1. Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh	265,50	279.81	294,11	
	b) Ketahanan Pangan					
	1. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	75,68	76,72	77.77	
	2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	6.25	4,4	4,31	
	3. Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	86.88	89,5	90,01	
	c) Ketahanan air					
	1. Kapasitas Air Baku	m3/detik	18.921,60	19.315,8	19.710,00	
	2. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	34.45	40.84	47.24	
2	*Kualitas Lingkungan Hidup*					
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	Indeks	74.16	67.21	**74,35**	
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	5.79	6,72	7,64	
	c) Pengelolaan Sampah					
	1. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	74,88	27,52	35,01	
	2. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	56.30	85	90	
3	*Penurunan Intensitas Emisi GRK*	%	3,04 (2024)	13,27	14,33	
	a) Kumulatif (%)	%	-	0,35	0,47	
	b) Tahunan (%)	%	-	1,53	2,01	
4	Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	159,5	118,4	117,9	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Katerangan
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.00	0,82	0,79	
6	Rasio Penduduk	%	107.83	98,16	98,15	
7	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km^2	179.60	177,84	179,09	
8	*Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati*					
	a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	%	3.18	1,43	1,61	
9	Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati					
	b) Indeks pertanaman (IP) padi	indeks	2	3	3	
	c) Proporsi sawah irigasi	%	56.25	72.00	73.00	
	d) Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	1.497,87	1.290,91	1.316,72	
	e) Angka Konsumsi Ikan/Pengeluaran Konsumsi Ikan	Rp	18.791	18.000	19.000	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	7.71	4,95	8.81	
2	Tingkat Kemiskinan	%	4.91	4.45 - 3.55	4.33 - 4.06	
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	61,83	64,89	70.40	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,03	2,84	2,92-2.84	
5	Indeks Gini	Indeks	0.325	0,306	0,303-0.301	
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75.49	75,44	76.22-76.55	
7	Indeks Kesehatan	Indeks	84.14	84,4	84.67	
8	Angka Kriminalitas	Kasus	940	766	661	
9	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan	%	24.89	25.00	26.63	
10	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	55,36	55,46	55,56	
11	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.69	74,79	74,94	
12	*Kesehatan Ibu dan Anak*					
	a) Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (%)	%	100	96,25	97,5	
	b) Jumlah kematian Ibu (kasus)	Kasus	8	7	7	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Katerangan
	c) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	20.3 (2024)	19,00	17.00	
	d) Jumlah Kematian anak/balita (kasus)	Kasus	1	0	0	
13	*Penanganan Tuberkulosis:*					
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	49	68	70	
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	64	88,14	89,02	
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99.01	99.00	100	
15	Indeks Pendidikan	%	64,28	66,82	65.94	
16	*Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kab/kota untuk:*					
	a) Kemampuan Literasi SD	%	53.62	63,07	65,57	
	b) Kemampuan Numerasi SD	%	48.35	58,76	61,66	
	c) Kemampuan Literasi SMP	%	66.62	68,63	69,73	
	d) Kemampuan Numerasi SMP	%	60.47	62,46	63,96	
17	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	8.36	8,23	8,24	
18	Angka Harapan Lama Sekolah	%	13.11	13,05	13,06	
19	*Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi*					
	a) Angka partisipasi kasar SMA(%)	%	45.67	85,87	86,43	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Katerangan
	b) Angka partisipasi kasar perguruan tinggi(%)	%		26,98	13,06	
20	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan (%)	%		9,98	11,3	
21	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	55.92	61.93	65.18	
22	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%`	0.043	11,48	12,96	
23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	%	96,97	64,63	97,8	
24	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	40.54	51.43	60.00	
25	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/ fasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	90	95	
26	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	66.5	66.66	66.73	
27	Indeks perlindungan anak (IPA)	%	67.44	67.56	67.69	
28	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.373	0.334	0.394	
29	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92.6	93.7	93.89	
30	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Indeks	N/A	69,87	72,49	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	Skor	55.3 (2024)	104,45	114,56	
2	Kontribusi PDRB Pengolahan (%)	%	15.56	16,32	17,14	
3	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,52	3,53	3,65	
4	*Pengembangan Pariwisata*					
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	1	0,875	0,9	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Katerangan
	b) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	%	-9.19	0,875	0,9	
5	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kabupaten/kota (unit)	Unit	592	155	170	
6	*Produktifitas UMKM, Koperasi, BUMD*					
	a) Jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota (unit)	Unit	6039	168	186	
	b) Persentase koperasi sehat di kab/kota (%)	%	67.35	65	70	
	c) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%		0,06655	0,073205	
	d) Produktifitas padi (ton/Ha)	Ton/Ha	6.00	6.03	6.07	
	e) Jumlah produksi perikanan (ton)	Ton	3.868,00	2.428,29	2.470,86	
7	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	10,70	5	11.92	
8	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	58.09	97,5	97,8	
9	*Tingkat Penguasaan IPTEK*					
	a) Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3.04	3,07	3,26	
10	*Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau*					
	a) Indeks Ekonomi Hijau (indeks)	Indeks	60.53	70,43	75,93	
11	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	37.28	39,27	39,4	
12	Net Ekspor Barang dan Jasa	%	1,10	0,15	0,2	
13	*Kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan*					
	a) Kontribusi PDRB kab/kota terhadap provinsi	%	2.90	2,8	2,94	
	b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (jumlah RT)	%	97,5	84,93	87,78	
	c) Indeks Infrastruktur	Indeks	79.54	80.56	80.84	
	d) Persentase Desa Mandiri	%	60.29	54,41	57,35	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Katerangan
14	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.43	0,995	1,01	
15	Tingkat Inflasi	%	3.41	1,5-3.5	1,5-3.5	
16	Pertumbuhan Investasi Daerah (%)	%	-30.572	5,8	5,83	
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	32.44	37,25	38,97	
18	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	%	94	91	95	
19	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (%)	%	11.72	10	10	
20	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	67.47	74.21	77.92	
21	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4.15	4.0	4.23	
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	*belum rilis*	72,93	75,53	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96.52	61,3	63,6	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60.69	72,07	73,86	
3	Nilai SAKIP	Nilai	65,82	69,22	71.29	
4	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	42,1	53,62	56.84	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	79.097	77.74	81.05	
6	Indeks SPBE	Indeks	3,04	3,42	3.62	
7	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.43	2,33	4.15	
8	a) Indeks Survey Penilaian Integritas (indeks)	Indeks	77,79	75,07	80,02	
	b) Nilai MCP KPK (nilai)	nilai	74,31	86,92	88,44	
	c) Indeks Maturitas SPIP (indeks)	Indeks	3	3	3	
9	Persentase Penegakan Hukum PERDA	%	100	90	92	
10	Indeks Daya Saing Daerah Pilar Infrastruktur	Indeks	3.16	3,30	3,33	
11	Persentase tindak kriminal yang ditangani	%	91,58	89,6	89,8	
	1. Persentase perempuan terpilih	%	15	16	16	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Katerangan
	terhadap total anggota DPRD					
	2. Jumlah Perda yang merupakan inisiatif DPRD	Perda	3	3	4	
	3. Persentase perempuan pengurus partai politik	%	8.6	16	16	
12	Jumlah Kerja Sama Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (*Sister Province*/ Sister City) (jumlah)	Jumlah	25	9	9	

Sumber: Data Diolah Tim Penyusun RKPD 2027

6.3.1. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. IKK mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan mulai dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga urusan pilihan yang disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerah. Setiap Perangkat Daerah memiliki IKK yang spesifik sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang kemudian diagregasi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara keseluruhan. Pencapaian target IKK tahun 2027 akan menjadi tolok ukur keberhasilan setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus sebagai dasar dalam penilaian kinerja organisasi dan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah secara keseluruhan selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.4
Penetapan target Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Ket.
	INDIKATOR KINERJA KUNCI					
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
A	Pendidikan					
1	Persentase anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD	%	65,33	87,53	90,5	

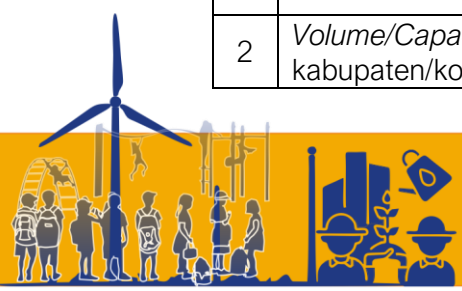
No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Ket.
2	Persentase anak Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	%	84,75	99,85	99,88	
3	Persentase anak Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	%	16,34	18,4	19,16	
4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	%	55,33	59.78	64.24	
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah pertama dalam Kondisi baik	%	46,48	72.75	73,25	
B	Kesehatan					
1	Persentase kematian ibu	%	0,13	0.00	0.00	
2	Prevelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	20,30	19,00	17,00	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	77,08	100	100	
4	Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai dengan standar	%	83,97	100	100	
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	89,83	100	100	
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	94,21	100	100	
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100	100	
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	58,09	100	100	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	87,03	100	100	
10	Persentase Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	%	31,07	100	100	
11	Persentase pelayanan kesehatan Penderita diabetes melitus Sesuai Standar	%	92,86	100	100	
12	Persentase pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat Sesuai Standar	%	97,91%	100	100	
13	Persentase pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	%	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Ket.
14	Persentase pelayanan kesehatan Orang dengan resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus)* Sesuai Standar	%	98,43	100	100	
C	**Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**					
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan Kabupaten/kota	%	68,69	85	87	
2	Persentase kemantapan Kemantapan Jalan Kab/Kota	%	40.78	40,791	40,796	
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	88.85	95.21	95.7	
4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	90,14	92.26	92.88	
5	Persentase Luas Kawasan Pemukiman rawan banjir yang terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian dan mitigasi banjir	%	90.00	95.00	95.00	
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	%	Suket	-	-	
7	Persentase kepatuhan persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/kota	%	100	22	23	
8	Persentase kepatuhan persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	%	100	100	100	
9	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	34,12	100	100	
10	Persentase penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	%	100	100	100	
D	**Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**					
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	
2	Persentase luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	31,26	35	45	

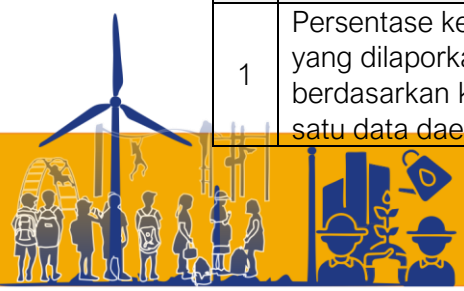
No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Ket.
3	Persentase Rumah layak Tidak layak huni yang tertangani	%	1,47	39,8	57,6	
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, sarana dan utilitas Umum	%	25	15	25	
E	**Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**					
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	33	100	100	
2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh satuan Polisi Pamong Praja	%	100	100	100	
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	%	100	90	92	
4	persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	6,36	100	100	
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	83,72	100	100	
F	**Sosial**					
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	84,66	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Ket.
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
A	Tenaga Kerja					
1	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	%	0	13	100	
2	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/Peraturan Kerja Bersama,Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta Bpjs Ketenagakerjaan)	%	25	20	20	
	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	10,82	18,09	26,89	
B	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	
C	Pangan					
1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah kabupaten/kota	%	5,73	24	24	
D	Pertanahan					
1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	24,21	35,00	50,00	
2	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	%	97,31	100	100	
3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	%	33,33	33,33	50,00	
E	Lingkungan Hidup					
1	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Ket.
	Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota					
2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	75,28	80	83.9	
F	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**					
1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	%	98,20	96,05	97	
2	Persentase Kepemilikian Kartu Identitas Anak (KIA)	%	62,10	65,25	65,50	
3	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	%	100	100	100	
4	Persentase Kepemilikian Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	%	98	99,60	99,65	
5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	77,21	76,5	77	
6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	65	67	
7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	
G	**Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**					
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	100	1.47	1.47	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	20	54,41	57,35	
3	Persentase fasilitasi kerjasama desa	%	100	100	100	
H	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**					
1	Angka Kelahiran Total *(Total Fertility Rate/TFR)* per Wanita usia Subur usia 15-49 Tahun	%	2,11	2,09	2,08	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern / *modern Contraceptive Prevalance Rate*(mCPR)	%	53,5	57,40	58,90	
3	Persentase Kebutuhan ber-Keluarga Berencana Yang Tidak Terpenuhi *(Unmet Need)*	%	16,9	11	10	
I	**Perhubungan**					
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,30	0,5	0,5	
2	*Volume/Capacity Ratio* di jalan kabupaten/kota	Rasio	0,21	0.27	0.32	



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Ket.
3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	100	100	100	
J	Komunikasi Dan Informatika					
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksanan teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100	
2	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	100	100	100	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	%	11,88	100	100	
K	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah					
1	Persentase pertumbuhan voluem usaha koperasi	%	10,5	12,5	15,5	
2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%	1,78	18,98	21,5	
L	Penanaman Modal					
1	Persentase Peningkatan Investasi Di Kab/Kota	%	-13,57	0,63	0,63	
2	Realisasi total terhadap target investasi	%	195,10			
M	Kepemudaan dan Olahraga					
1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	114,17	0,15	0,16	
2	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	1,03	1,5	1,6	
3	Persentase atelet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	%	0	5	1	
4	Persentase jumlah atlet berprestasi	%	75,97			
N	Statistik					
1	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	%	71,16			



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Ket.
O	**Persandian**					
1	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah	%	49,46			
P	**Kebudayaan**					
1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	%	60,73	80,00	81,43	
2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	%	56,73	70,00	75,00	
Q	**Perpustakaan**					
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	Nilai	61,98	70,48	71,48	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	19,73	94,06	94,16	
R	**Kearsipan**					
1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	%	100	75	80	
	Urusan Pilihan					
A	**Kelautan dan Perikanan**					
1	Produksi perikanan tangkap dan budaya	%	90,42	100	100	
2	Angka Komsumsi ikan	Kg/Kap/Th	34,69			
B	**Pariwisata**					
1	Persentase Investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	%	23,08			
2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan asing	%	-25	50	50	
3	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota	%	9,06	30	40	
C	**Pertanian**					
1	Peningkatan Produksi tanaman pangan	%	38,47	10	10	
2	Peningkatan produksi holtikultura	%	-56,71	34	16	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Ket.
3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	%	24,4	9	9,5	
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari *Surveylance* penyakit dari 5 penyakit Hewan menular Strategis (PHMS)	%	100	100	100	
D	**Perdagangan**					
1	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapaannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	%	121.99	88	93	
E	**Perindustrian**					
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi : 1. Pertumbuhan produk domestik regional bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota, 2. Konstribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik regional bruto kabupaten/kota, 3. jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota, 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas Kabupaten/kota, 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	%	11,34	11,5	12	
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem informasi Industri Nasional	%	8,5	9	9,5	
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	%	51,7	52,2	52,7	
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	40	43	45	
	Unsur Penunjang					
A	**Perencanaan**					
1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	%	100	100	100	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Ket.
B	Keuangan					
1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	%	98,23			
2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah	%	18,57	17,94	18,82	
3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah		63,83			
4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik		29,54			
C	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan					
1	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	79,87	80	80	
D	Penelitian dan Pengembangan					
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi dari program kegiatan	%	100	100	100	
E	Fungsi Pengawasan					
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,01	3,1	3,3	
2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern pemerintah (APIP)	Nilai	3	3	3	
3	Manajemen risiko Indeks	Nilai	2,77	2	2	
4	Persentase Tindak Lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	%	85,45	92	93	
F	Fungsi Pengadaan					
1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Poin	35,56	21	24	

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target RKPD 2026	Target RKPD 2027	Ket.
2	Pemanfaatan sistem Pengadaan	Poin	24,11	25	25	
3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Banrang/jasa (SDM)	Poin	20,53	25	27	
G	**Hubungan dengan Perwakilan Daerah**					
1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu (100%) / Tidak Tepat Waktu (0%)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
2	Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	%	85,71	100	100	
H	**Pelayanan Publik**					
1	Penilaian mal admistrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai	78			

Sumber: Tim Penyusun RKPD Tahun 2027

6.4. Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Guna mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang, RPJPD menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran pokok pembangunan daerah pada setiap tahapan periodisasi. IKU RPJPD ini bersifat makro dan strategis, mencerminkan kondisi capaian pembangunan daerah secara menyeluruh, serta menjadi acuan bagi penetapan indikator kinerja pada dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD) agar tetap konsisten dan berkesinambungan dalam mendukung pencapaian visi jangka panjang daerah. Penyajian target IKU RPJPD untuk Tahun 2027 dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai proyeksi capaian kinerja pembangunan daerah yang akan diwujudkan pada tahun rencana, sebagai bagian dari evaluasi berkala terhadap konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan jangka panjang. Penetapan target tersebut disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, proyeksi tren perkembangan, kapasitas fiskal daerah, serta dinamika kondisi eksternal yang memengaruhi pelaksanaan pembangunan, sehingga target yang ditetapkan bersifat realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan tersajinya target IUP RPJPD Tahun 2027 ini, diharapkan dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2027 tetap berorientasi pada

pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah.

Tabel 6.5
Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab. Sidenreng Rappang	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027	Sumber
1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,69	74,79	74,94	Badan Pusat Statistik Kab Sidrap
2. Kesehatan Ibu dan Anak:				
a) Persentase Persalinan di fasilitas Kesehatan	100	96,25	97,5	Dinas Kesehatan Kab Sidrap
b) Jumlah Kematian Ibu	8,00	7	7	Dinas Kesehatan Kab Sidrap
c) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	20,30	22,05	20,8	SSGI
d) Jumlah Kematian anak	1	0	0	Dinas Kesehatan Kab. Sidrap
3. Penanganan Tuberkulosis				
a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	49,00	68	70	Dinas Kesehatan Kab Sidrap
b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (%)	64,00	88,14	89,02	Dinas Kesehatan Kab Sidrap
4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,01	99.00	100.00	Dinas Kesehatan Kab Sidrap
5. Hasil Pembelajaran:				
a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk SD/Sederajat:				
- Literasi Membaca	53,63	63,07	65,57	Surat Edaran Kemedikdasmen Nomer 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026
- Numerasi	48,35	58,7	61,66	Surat Edaran Kemedikdasmen Nomer 3101/ B/ MDM.A/PR.07.05/2026
b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk SMP/Sederajat:				

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab. Sidenreng Rappang	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027	Sumber
- Literasi Membaca	66,62	68,63	69,73	Surat Edaran Kemedikdasmen Nomer 3101/B/MDM.A/PR.07 .05/2026
- Numerasi	60,47	62,46	63,96	Surat Edaran Kemedikdasmen Nomer 3101/B/MDM.A/PR.07 .05/2026
c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,36	8,23	8,24	Badan Pusat Statistik Kab. Sidrap
d) Harapan Lama Sekolah	13,11	13,05	13,06	Badan Pusat Statistik Kab. Sidrap
6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)				
a) Angka Partisipasi Kasar SMA Sederajat	45,67	85,87	86,43	Porlap Data Kemendikdasmen/Dinas Pencatatan Sipil
b) Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi		26,98	13,06	
7. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	97,00	9,98	11,3	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Tingkat Kemiskinan (%)				
a) Tingkat Kemiskinan	4,91	4.45-3.55	4,33-4,06	Badan Pusat Statistik Kab. Sidrap
b) Indeks Gini	0,325	0,306	0.303-0,301	Badan Pusat Statistik Kab. Sidrap
9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	55.92	61.93	65.18	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%),	0,043	11,48	12,96	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	15,56	16,32	17,14	Badan Pusat Statistik Kab. Sidrap
12. Pengembangan Pariwisata				
a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,00	0,875	0,9	Badan Pusat Statistik Kab. Sidrap
b) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestic dan mancanegara (%)	-9,19	0,875	0,9	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab. Sidenreng Rappang	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027	Sumber
13. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kab/kota	592,00	155	170	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN				
a) Jumlah industri kecil dan menengah pada level kab/kota (unit)	6039	168	186	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
b) Persentase Koperasi Sehat di Kab/Kota (%)	67,35	65	70	Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
c) Return on Asset (ROA) BUMD (%)		0,06655	0,073205	Bagian Ekonomi Sekda
d) Produksi Padi (ton)	569.733	620.065	623.862	Badan Pusat Statistik
e) Jumlah Produksi Perikanan (ton)	3.868,00	2.428,29	2.470,86	Dinas Perikanan dan Peternakan
15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik				
a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,36	2,84	2,92-2,84	Badan Pusat Statistik Kab. Sidenreng Rapapng
16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)				
a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	37,03	37,25	38,97	Badan Pusat Statistik Kab. Sidenreng Rapapng
b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	58,09	64,63	97,8	Badan Pusat Statistik Kab. Sidenreng Rapapng
17. Tingkat Penguasaan IPTEK				
a) Indeks Kapabilitas Inovasi	3,04	3,07	3,26	BRIN
18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				
a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	64.87 (2024)	70,43	75,93	
19. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	94,00	91	92	Dinak Komunikasi dan Informatika
20. Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	11,72	10	10	Badan Pusat Statistik
21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	37,28	39,27	39,4	Badan Pusat Statistik

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab. Sidenreng Rappang	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027	Sumber
22. Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0,10	0,15	0,2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
23. Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan				
a) Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap Provinsi (%)	2,88	2,8	2,83	Badan Pusat Statistik Kab. SIdenreng Rappang
b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	97,50	84,93	87,78	Dibiciptapera
c) Indeks Layanan Infrastruktur	76,91	80.56	80.84	Dibiciptapera
d) Persentase Desa Mandiri (%)	60,29	54,41	57,35	DispemdesPPA
24. Indeks Reformasi Hukum	96,52	61,3	63,6	Bagian Hukum Setda
25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,06	3,42	3,62	Dinas Komunikasi dan Informatika
26. Indeks Pelayanan Publik	3,43	2,33	4.15	Sidrapkab.go.id
27. Anti Korupsi				
i. Indeks Survey Penilaian Integritas	77,79	75,07	80,02	KPK
ii. Nilai MCP KPK	74,31	86,92	88,44	KPK
iii. Indeks Maturitas SPIP	3	3	3	BPKP
28. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	90	92	Satuan Polisi Pamong Praja
29. Persentase tindak Kriminal yang ditangani	91,58	89,6	89,8	Polres Sidrap
30. a) Persentase Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	15	16	16	Sekretariat Dprd
b) Perda yang merupakan Inisiatif DPRD (Jumlah Perda	3	3	4	Sekretariat Dprd
c) Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	2,40	16	16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,43	0,995	1,01	Badan Pusat Statistik
32. Tingkat Inflasi	3,41	1,025	1,025	Badan Pusat Statistik
33. Pertumbuhan Investasi Daerah	-30.572	5,8	5,83	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
34. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	67.47	74.21	77.92	Kemendagri

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab. Sidenreng Rappang	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027	Sumber
35. Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)	25	9	9	Bagian Kerja Sama Sekda
36. Indeks Daya Saing Daerah	3,52	*3,53*	3,65	BRIN
37. Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	40,54	51,43	60,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
38. Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/ fasilitasi oleh pemerintah daerah.	100	90	95	Bagian Kesejahteraan Rakyat
39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga				
a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66,50	66,66	66,73	Dispemdes PPA
b) Indeks Perlindungan Anak	67.44	67,56	67,69	Dispemdes PPA
40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,373	0,334	0,394	Badan Pusat Statistik Prov. Sul Sel
41. Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati				
a) Proporsi realisasi penggunaan pupuk organik terhadap pupuk kimia. Pemanfaatan Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati	3,18	1,43	1,61	Dinas Pertanian
b) Indeks pertanaman (IP) padi	2	3	3	Dinas Pertanian
c) Proporsi sawah irigasi	56,05	72,00	73,00	Dinas Pertanian
d) Jumlah produksi perikanan budidaya	1.497,42	1.290,91	1.316,72	Dinas Perikanan dan Peternakan
e) Angka pengeluaaran konsumsi ikan	18.791	18.000	19.000	Dinas Perikanan dan Peternakan
42. 42. Kualitas Lingkungan Hidup				
a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,16	77,14	74,35	Dinas Lingkungan Hidup
b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5,79	6,72	7,64	Dibiciptapera
c) Pengelolaan Sampah				
- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	61,43	27,52	35,01	Dinas Lingkungan Hidup
- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	56,30	85,00	90,00	Dinas Lingkungan Hidup

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kab. Sidenreng Rappang	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027	Sumber
43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan				
a. Ketahanan Energi				
- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	898,80	279,81	294,11	Badan Pusat Statistik
b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)				
- Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	6,25	4,4	4,31	Dinas Pertanian
- Indeks Ketahanan Pangan	75,68	88,62	88,98	Dinas Pertanian
- Skor Pola Pangan Harapan	86,88	89,50	90,01	Dinas Pertanian
c. Ketahanan Air				
- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	115,00	19.315.80	19,71	Dinas PSDA
- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	22,80	40,84	47,23	Dibiciptapera
44. Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level Kab/kota)	159,50	118,4	117,9	BPBN
45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	*Data Belum Rilis*	13,27	14,33	Dinas Lingkungan Hidup
a. Kumulatif	*Data Belum Rilis*	0,35	0,47	Dinas Lingkungan Hidup
b. Tahunan	*Data Belum Rilis*	1,53	2,01	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Tim Penyusun RKPD Tahun 2027

6.5. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan sebagai instrumen penting dalam menjamin hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat diakses secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tanpa memandang lokasi geografis, status ekonomi, maupun kondisi sosial masyarakat. Urusan SPM terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Tabel 6.6
Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025	Target	
				2026	2027
I	PENDIDIKAN				
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	90.52%	100%	100%
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (SD)	53.62%	63.07%	65.57%
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (SD)	48.35%	58.76%	61.66%
		Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (SMP)	66.62%	68.63	69.73
		Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (SMP)	60.47%	62.46%	63.96%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	28.33 %	100%	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	-	meningkat	meningkat
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	89.48 %	100%	100%
II	KESEHATAN				
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	77.57 %	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	85.75 %	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi BaruLahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	88.94 %	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	93.08 %	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025	Target	
				2026	2027
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	97.22 %	100%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	66.72 %	100%	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	92.44 %	100%	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	42.56 %	100%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100.00 %	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100.00 %	100%	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	90.40 %	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human immunodeficiency Virus*)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100.00 %	100%	100%
III	PEKERJAAN UMUM				
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minumsehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	91.11 %	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	86.50 %	100%	100%
IV	PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/ kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100.00 %	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025	Target	
				2026	2027
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100.00 %	100%	100%
V	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertibanUmum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakanhukum Perda dan perkada	90.00 %	100%	100%
2	Pelayananinformasi rawan bencana	Jumlah Warga Negarayang memperoleh layanan informasi rawan bencana	8.00 %	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5.94 %	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korbanbencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	20.00 %	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	94.18 %	100%	100%
VI	SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	93.33 %	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yangmemperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	96.80 %	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	89.21 %	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasartuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	87.80 %	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tahun 2025	Target	
				2026	2027
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	66.53 %	100%	100%

Sumber: Data Diolah Tim Penyusun RKPD 2027

Apabila indicator penerapan SPM dipetakan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, maka disajikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 6.7
Kebutuhan Barang dan Jasa Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
	[Bidang Urusan] 1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan							
1	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	75	2.000.000.000,00
2	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	11	20.000.000,00
3	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	235	28.071.300.000,00
4	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	55.000.000,00
5	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4	2.000.000,00
6	1.01.02 Program Pengelolaan	1.01.02.2.01 Pengelolaan	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis,	Terlaksananya Bimbingan Teknis,	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau	Orang	22	100.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
	Pendidikan	Pendidikan Sekolah Dasar	Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
7	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	237	35.000.000,00
8	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	10000	15.000.000,00
9	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	35	2.000.000.000,00
10	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4	2.000.000,00
11	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3500	15.000.000,00
12	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	100	50.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
13	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	11	20.000.000,00
14	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	55.000.000,00
15	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	5	50.000.000,00
16	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	51	35.000.000,00
17	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	22	50.000.000,00
18	1.01.02 Program Pengelolaan	1.01.02.2.03 Pengelolaan	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana,	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah	Unit	11	707.958.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Prasarana dan Utilitas PAUD	Terbangun	Dibangun			
19	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1	100.000.000,00
20	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	223	15.000.000,00
21	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	223	25.000.000,00
22	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	50.000.000,00
23	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	11	2.000.000,00
24	1.01.02 Program	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0039	Terlaksananya	Jumlah Peserta Bimbingan	Orang	223	50.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
25	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	11	25.000.000,00
26	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	6	10.000.000,00
27	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1058	1.817.800.000,00
28	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	50.000.000,00
29	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	2.000.000,00
30	1.01.02 Program	1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.0031	Terlayaninya satuan	Jumlah kegiatan	Kegiatan	4	2.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
31	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	6	25.000.000,00
32	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	unit	2	2.000.000,00
33	1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	5	50.000.000,00
34	1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian	Terlaksananya Penataan Pendistribusian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan	Laporan	17	7.205.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
		dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	[Bidang Urusan] 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							
35	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6122	100.000.000,00
36	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6780	50.000.000,00
37	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5673	200.000.000,00
38	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	25150	50.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Balita					
39	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	55200	50.000.000,00
40	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	235059	50.000.000,00
41	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	48245	50.000.000,00
42	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	103689	50.000.000,00
43	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai	Orang	5099	50.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Standar			
44	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	775	50.000.000,00
45	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	7894	400.000.000,00
46	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	7200	50.000.000,00
	[Bidang Urusan] 1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
47	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	7,5	50.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
	Minum	Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Perpipaan	Perpipaan				
48	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	100	50.000.000,00
49	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	6	20.000.000,00
50	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.05.2.01.0021 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	M^3/Hari	40	30.000.000,00
51	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/ Kota	1.03.05.2.01.0037 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	2	50.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
52	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	2	300.000.000,00
53	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.05.2.01.0049 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M^3/Hari	200	50.000.000,00
54	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/ Kota	1.03.05.2.01.0050 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	M^3/Hari	40	32.000.000,00
55	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.03.05.2.01.0051 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	200	3.369.179.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
	[Bidang Urusan] 1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman							
56	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1	50.000.000,00
57	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000,00
58	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	50.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
	[Bidang Urusan] 1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
59	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	4	25.000.000,00
60	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0025 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	45	75.000.000,00
61	1.05.02 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	1	75.000.000,00
62	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi,	Orang	100	10.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
			Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			
63	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	3	30.000.000,00
64	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	150	10.000.000,00
65	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan	Dokumen	1	5.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
		Terhadap Bencana		bencana) yang sah dan legal	sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun			
66	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	1	10.000.000,00
67	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	5.000.000,00
68	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	4	29.000.000,00
69	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	5.000.000,00



No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
		Bencana	Zoonosis Prioritas	Prioritas				
70	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	20.000.000,00
71	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	5	10.000.000,00
72	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Laporan	1	15.000.000,00
73	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	12	2.150.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
		dalam Daerah Kabupaten/Kota						
74	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4	250.000.000,00
	[Bidang Urusan] 1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							
75	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	30.000.000,00
76	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	10.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
77	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	10.000.000,00
78	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	3.000.000,00
79	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	5.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
80	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	21	10.000.000,00
81	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	3.000.000,00
82	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	2.500.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
83	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	2.500.000,00
84	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8	10.000.000,00
85	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0014 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	11	1.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
86	1.06.06 Program Penanganan Bencana	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	450	30.000.000,00
87	1.06.06 Program Penanganan Bencana	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	450	200.000,00
88	1.06.06 Program Penanganan Bencana	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300	200.000,00
89	1.06.06 Program Penanganan Bencana	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	450	10.000.000,00

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator *Output*	Satuan	Target RKPD 2027	Anggaran RKPD 2027 (Rp.)
90	1.06.06 Program Penanganan Bencana	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0007 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	9.600.000,00

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027.



6.6. Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Develompment Goals (TPG/SDGs)

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan.



Tabel 6.8
Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Suistainable Development Goals (TGG/SDGs)*

No	Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target		OPD Penanggungjawab
					2026	2027	
TUJUAN 01 TANPA KEMISKINAN							
	Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DI MANAPUN						
	Target 1.2 : Pada Tahun 2030, Mengurangi Setidaknya Setengah Proporsi Laki-Laki, Perempuan Dan Anak-Anak Dari Semua Usia, Yang Hidup Dalam Kemiskinan Di Semua Dimensi, Sesuai Dengan Definisi Nasional.						
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	4.45 - 3.55	4.31 - 3.54	Dinas Sosial
	Target 1.3 : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
2	1.3.1.[a]	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	84	88	Dinas Kesehatan
3	1.3.1.[b]	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	61.93	65.18	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
4	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	/100rb	0,02	0,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	27.600.000	23.200.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.*	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dok	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 02 TANPA KELAPARAN							
	Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN						

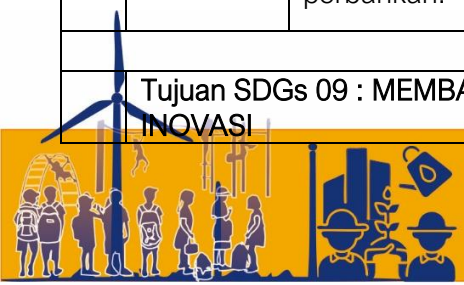
	Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
7	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	%	4,40%	4,31%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
8	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	%	0,00%	0,00%	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
	Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
9	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	%	5,8	5,7	Dinas Kesehatan
10	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	%	3,5	3,4	Dinas Kesehatan
11	2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Dinas Kesehatan	%	10,5	10	Dinas Kesehatan
	TUJUAN 03 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA						
	Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA						
	Target 3.1 : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
12	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINAS KESEHATAN	Kasus	7	7	Dinas Kesehatan
13	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	Dinas Kesehatan
	Target 3.2 : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
14	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angkat Kematian Bagi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per 1000	1	1	Dinas Kesehatan
15	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	per 1000	14	13	Dinas Kesehatan

16	3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.	Dinas Kesehatan	%	95	95	Dinas Kesehatan
17	3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	per 100 ribu	375	321	Dinas Kesehatan
18	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	per 1000	90	93	Dinas Kesehatan
19	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.	Dinas Kesehatan	orang	>1/10000	>1/10000	Dinas Kesehatan
	Target 3.4 : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
20	3.4.1.[b]	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	%	90	90	Dinas Kesehatan
21	3.4.1.[c]	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan	%	21,8	21,8	Dinas Kesehatan
	Target 3.7 : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
22	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	%	1.8	1.9	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
23	3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun, umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	%	26,38	22,46	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
24	3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	%	1,992	1,924	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
	Target 3.8 : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
25	3.8.1.[a]	*Unmet Need* Pelayanan Kesehatan.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	%	8,48	8,86	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB
	Target 3.a : Memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.						
26	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan	%	22,2	20,4	Dinas Kesehatan

TUJUAN 04 PENDIDIKAN BERKUALITAS							
	Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA						
	Target 4.6 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.						
27	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	%	93,34	93,59	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Target 4.c : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerja sama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.						
28	4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	%	62,75	63	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
TUJUAN 05 KESETARAAN GENDER							
	Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN						
	Target 5.2 : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
29	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kasus	2	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
30	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kasus	2	2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Target 5.3 : Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.						
31	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Orang	491	381	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Target 5.5 : Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						

32	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Kursi	4	4	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
33	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Orang	4	5	Dinas Pemdes, Perempuan Dan Perlindungan Anak
TUJUAN 06 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK							
	Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA						
	Target 6.1 : Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
34	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Dinas Biciptapera	%	94,194	94,398	Dinas Biciptapera
	Target 6.2 : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
35	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Dinas Biciptapera	%	91,98	92,74	Dinas Biciptapera
TUJUAN 08 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI							
	Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA						
	Target 8.1 : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.						
36	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Bapperida	%	4,95	5,95	BAPPERIDA /Bagian Ekonomi
37	8.1.1.[a]	PDB per kapita.	Bapperida	Juta Rupiah	64,89	68,75	BAPPERIDA /Bagian Ekonomi
	Target 8.2 : Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.						
38	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	9	10	DinkopUKM Nakertrans

	Target 8.3 : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
39	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin.	BPS	%	37	40	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
40	8.3.1.[a]	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal.	Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	%	10	15	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Target 8.5 : Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.						
41	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Rp	20000	23000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
42	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka.	BPS	%	2,84	2,75	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
43	8.5.2.[a]	Persentase setengah pengangguran.	BPS	%	10	8	
	Target 8.9 : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
44	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	%	0,82	0,82	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
45	8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.		Orang	20	20	
46	8.9.1.[b]	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara.	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Orang	182000	196000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
	Target 8.10 : Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.						
47	8.10.1.(b)	Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit perbankan.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	74	75	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	TUJUAN 09 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR						
	Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI						



	Target 9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						
48	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	%	62,78	63,46	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat
	Target 9.2 : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.						
49	9.2.1*	Rasio PDB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	%	15,17	15,19	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
50	9.2.1.[a]	Pertumbuhan PDB industri pengolahan.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	%	6,04	6,08	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
51	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan.	Dinas Koperasi, Umkm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	%	32	33	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	TUJUAN 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN						
	Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA						
	Target 10.1 : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
52	10.1.1.(a)	Rasio Gini.	Dinas Sosial	Poin	0,306	0,3	DINAS SOSIAL
53	10.1.1.(c)	Jumlah daerah tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Desa	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
54	10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri.		Desa	37	39	
55	10.1.1.(e)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Desa	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
	TUJUAN 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN						
	Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN						

	Target 11.1 : Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.						
56	11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat	%	84,93	87,78	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat
	Target 11.5 : Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang- orang dalam situasi rentan.						
57	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	/100rb	0,02	0,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 12 KOMSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB							
	Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN						
	Target 12.5 : Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.						
58	12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	%	27,52	35,01	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM							
	Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA						
	Target 13.1 : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.						
59	13.01.01	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	/100rb	0,02	0,02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUT							
	Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN						
	Target 14.6 : Pada tahun 2020, melarang bentuk- bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO).						
60	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan.	Dinas Peternakan	%	75	77	Dinas Peternakan



TUJUAN 15 EKOSISTEM DARAT							
	Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI						
	Target 15.9 : Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.						
61	15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis.	Dinas Lingkungan Hidup	Dok	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH							
	Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN						
	Target 16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.						
62	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polres	Kasus	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
63	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Polres	Orang	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
64	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polres	Kasus	42	35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Target 16.2 : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.						
65	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	%	0.004	0.004	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
66	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		%	4	4	
	Target 16.6 : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.						
67	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	%	96,718	97,364	Badan Keuangan dan Aset Daerah
68	16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	%	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah

69	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B.	Inspektorat	Nilai	69,22	71,29	Bagian Organisasi
	Target 16.7 : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.						
70	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	%	8,57	8,57	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
71	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		%	4,87	4,87	
	Target 16.9 : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
72	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	Dinas Kependudukan Dan Capil	%	96	97	Dinas Kependudukan Dan Capil
TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN							
	Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN						
	Target 17.1 : Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.						
73	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pendapatan Daerah	%	4,02%	3,59%	Badan Pendapatan Daerah
74	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda	%	0,27%	0,25%	Badan Pendapatan Daerah
75	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Pendapatan Daerah	%	0,1028	0,1546	Badan Pendapatan Daerah
	Target 17.19 : Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.						
76	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*).	Dinas Kependudukan Dan Capil	Ada/Tidak	Ada	Ada	Dinas Kependudukan Dan Capil

Sumber: Data diolah Tim RKPD 2027

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi yang berlaku. Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD wajib diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 harus memperhatikan prinsip sinkronisasi, harmonisasi, integrasi, dan sinergi antar tingkatan pemerintahan maupun antar sektor pembangunan. Oleh karena itu, seluruh Perangkat Daerah wajib memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan yang jelas dengan prioritas pembangunan daerah, mendukung pencapaian indikator kinerja daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tema pembangunan daerah Tahun 2027, yaitu **"Penguatan Ekonomi, Swasembada Pangan dan SDM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan"**, seluruh Perangkat Daerah berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung penguatan struktur ekonomi daerah, peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengembangan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan daya saing sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan kualitas lingkungan hidup, transformasi tata kelola pemerintahan, serta percepatan digitalisasi pelayanan publik.

Bagi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan daerah penyangga ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan, pelaksanaan RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat peran strategis daerah dalam menjaga stabilitas produksi pangan nasional melalui peningkatan produktivitas pertanian, modernisasi sistem budidaya, penguatan irigasi, pengembangan mekanisasi pertanian, peningkatan nilai tambah hasil pertanian, penguatan cadangan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta pengembangan kawasan sentra produksi berbasis potensi wilayah.

Seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur dengan mengedepankan prinsip *money follows program* dan *spending better*, sehingga setiap alokasi anggaran benar-benar diarahkan untuk menghasilkan keluaran (*output*),

hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*) yang dapat diukur terhadap pencapaian target pembangunan daerah. Dalam kondisi keterbatasan fiskal, prioritas pendanaan diarahkan pada program-program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan pelayanan publik.

Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Pengendalian dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara target, pelaksanaan, realisasi fisik, realisasi keuangan, dan capaian indikator kinerja, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera dilakukan langkah-langkah perbaikan melalui mekanisme pengendalian pembangunan daerah.

Setiap kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dalam RKPD. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas kinerja, manajemen risiko, pengendalian intern pemerintah, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, media massa, serta seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui kemitraan yang konstruktif. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas sumber daya pembangunan, memperkuat inovasi daerah, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, RKPD Tahun 2027 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, perubahan kemampuan keuangan daerah, keadaan darurat, bencana alam, kondisi kahar (*force majeure*), perubahan regulasi, maupun keadaan luar biasa lainnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2027 akan menjadi bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2028. Oleh karena itu, komitmen seluruh Perangkat Daerah beserta seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan Tahun 2027 mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas, inklusif, berdaya saing, berkelanjutan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

7.2. Kesimpulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berfungsi sebagai pedoman

pelaksanaan pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2027. RKPD menjadi penjabaran tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

RKPD Tahun 2027 memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan yang disusun secara terintegrasi dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan demikian, RKPD menjadi instrumen utama untuk menjamin keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Melalui tema pembangunan Tahun 2027, yaitu **"Penguatan Ekonomi, Swasembada Pangan dan SDM untuk Pertumbuhan Berkelanjutan"**, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berkomitmen mengarahkan seluruh sumber daya pembangunan pada upaya peningkatan daya saing ekonomi, penguatan ketahanan dan swasembada pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2027 memerlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, DPRD, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Seluruh Perangkat Daerah diharapkan melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya dengan berorientasi pada hasil, sehingga sasaran pembangunan daerah dapat dicapai secara optimal.

Pada akhirnya, RKPD Tahun 2027 diharapkan menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang terarah, terukur, berkelanjutan, serta mampu memperkuat peran daerah sebagai penyangga ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I: Daftar Usulan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027

DAFTAR LAMPIRAN USULAN POKIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2027

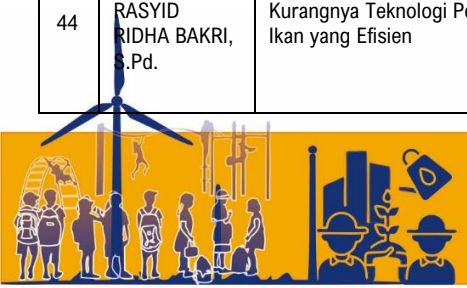
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
1	JUMIATI	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan sudah rusak yang belum pernah di lakukan perbaikan di jalan Desa Kulo	Desa Kulo Kecamatan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	8,200,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
2	JUMIATI	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Karena melihat kondisi petani ketika musim kemarau banyak yang mengalami gagal panen karena kurangnya ketersedian air pompa	Desa Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5	Unit	150,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
3	JUMIATI	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Karena melihat jembatan di Dusun Anrelli yang sudah rusak dan perlu di lakukan perbaikan	Dusun Anrelli Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	50	Meter	3,000,000,000	Pembangunan Jembatan
4	JUMIATI	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan di Desa Maddenra yang sudah rusak dan perlu dilakukan perbaikan	Desa Maddenra Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	Meter	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
5	JUMIATI	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Karena melihat kondisi di di Desa Kulo banyak anak muda yang memiliki bakat keolahragaan oleh itu pemuda mengajukan tournament olahraga	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	Kegiatan	50,000,000	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
6	JUMIATI	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Karena melihat kondisi sungai yang sudah mengalami longsor yang akan berdampak bagi masyarakat ketika sungai longsor lagi dapat mengakibatkan banjir lagi	Dusun Tippulu Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	70	Meter	150,000,000	Pembangunan Tanggul Sungai
7	JUMIATI	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Karena masih banyak kelompok tata boga yang berada di Kec. Kulo yang belum memilki atau belum lengkap alat peralatan tata boga	Kec. Kulo Kab. Sidrap, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
8	JUMIATI	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Karena masih banyak kelompok tata boga di Kec. Panca Rijang yang belum memilki perlengkapan untuk kegiatan UMKM Kelompok Tata boga	Kel. Rappang Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
9	JUMIATI	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Karena melihat kondisi kelompok tersebut belum memilki alat perbengkelan yang memadai	Desa Maddenra Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
10	JUMIATI	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Karena kekurangan alat menjahit untuk menunjang kegiatana UMKM	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
11	JUMIATI	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Karena belum memilki alat yang lengkap untuk menunjang kegiatan kelompok UMKM Kel. Rappang Kec. Panca Rijang	Kel. Rappang Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
12	JUMIATI	Penguatan Pemahaman Peraturan Daerah dan Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat	Karena melihat kondisi Masjid di Kaboe Desa Kulo belum di lanjutkan pembangunan karena kekurangan dana	Kaboe Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	SEKRETARIAT DAERAH	1	Masjid	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
13	JUMIATI	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Karena sering terjadi banjir di Desa Kulo maka perlu di lakukan pembangunan Drainase	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	Meter	835,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
14	JUMIATI	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Karena kelompok menjahit tersebut belum memilki alat yang memadai untuk menujang kegiatan UMKM Kelompok	Desa Sipodeceng Kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	Unit	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
15	JUMIATI	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Karena melihat kondisi jalan yang berada di Desa Kulo belum memilki lampu jalan sehingga menganggu kenyamanan masyarakat kulo akibat gelap di jalan	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	30	Titik	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
16	JUMIATI	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Karena kelompok UMKM yang berada di kulo belum memilki alat masak yang lengkap salah satunya adalah kompor seribuh mata	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	50	Unit	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
17	JUMIATI	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Karena belum memilki bibit ikan dan pakam untuk kegiatan kelompok pembibitan ikan di desa kulo	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	15000	Ekor	22,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
18	JUMIATI	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Karena melihat kondisi rumah yang ada di Kec. Kulo masih banyak yang tidak layak huni maka perlu di lakukan rehabilitasi rumah tersebut	Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	1	Orang	20,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
19	H. KHAERUDDIN AM.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan tersebut sudah rusak	Jl. Merpati Kel. Wt. Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	300	Meter	492,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
20	H. KHAERUDDIN AM.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan tersebut rusak dan perlu dilakukan perbaikan untuk menunjang kegiatan anak sekolah	Jl Masuk SD 2 Wt. Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	400	Meter	656,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
21	H. KHAERUDDIN AM.	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Karena melihat kondisi kelompok tersebut belum memilki alat untuk kegiatan UMKM kelompok tata boga atau kompor seribuh mata	Kec. Wt. Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	80	Unit	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
22	H. KHAERUDDIN AM.	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Karena melihat kondisi jalan tersebut suadh rusak dan perlu di lakukan penimbunang jalan supaya memperlancar kegiatan masyarakat Kel. wala	Kel. wala Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	170	Meter	60,000,000	Pembangunan Jalan
23	H. KHAERUDDIN AM.	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Karena melihat kondisi petani ketika musim kemarau belum memilki pompa air yang memadai untuk menunjang kegiatan pertanian	Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	6	Unit	120,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
24	H. KHAERUDDIN AM.	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Karena melihat kondisi di Kel. Lakessi yang belum memilki IPAL atau penutup sampah sehingga bauh sampah tersebut sampai ke rumah masyarakat	Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Unit	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
25	H. KHAERUDDIN AM.	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Karena melihat kondisi Duicker di kel. Wala yang sudah rusak dan memerlukan perbaikan	Kel. Wala Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	30	Meter	600,000,000	Pembangunan Jembatan
26	H. KHAERUDDIN AM.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan tersebut sudah rusak dan memerlukan perbaikan untuk menunjang kegiatan masyarakat Kel. wala	Belakang MR.Dy Pankajene Kel. Wala, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	450	Meter	738,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
27	H. KHAERUDDIN AM.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan yang sudah rusak	Kel. Wala Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	350	Meter	574,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
28	H. KHAERUDDIN AM.	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Karena melihat kondisi pagar sekolah SD 15 pangkajene yang belum pernah dilakukan pembangunan pagar yang baru	SD 15 Pangakjene Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	150	Meter	150,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
29	H. KHAERUDDIN AM.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan tersebut sudah rusak sekali	Kel. wala Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	245	Meter	401,800,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
30	H. KHAERUDDIN AM.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan tersebut sudah rusak dan perlu di lakukan perbaikan	Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	150	Meter	246,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
31	H. KHAERUDDIN AM.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan tersebut rusak perlu dilakukan paving blok	Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	270	Meter	442,800,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
32	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Karena melihat kondisi jalan tani tersebut sudah tidak bisa dilewati kendaraan akbiat jalan tani tersebut rusak	Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	1	Km	110,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
33	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Karena melihat kondisi lapangan Andi Solilipu Kel. Amparita yang sering di masuki hewan ternak maka perlu dilakukan pembuatan pagar lapangan	Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	KEGIATAN	50,000,000	Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat
34	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Karena melihat kondisi asrama Kec. Tellu Limpoe yang sudah rusak dan perlu diakukan lanjutan pembangunan asrama mahasiswa di Makassar	Makassar, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Asrama	350,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
35	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Karena melihat kondisi jalan di Kec. Tellu Limpoe sudah banyak yang rusak sehingga menggangu aktivitas masyarakat terutama debu jalananan	Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	8	Km	26,275,464,000	Pembangunan Jalan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
36	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Karena masih banyak kelompok UMKM yang belum mendapatkan bantuan untuk kegiatan usaha UMKM	Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
37	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Karena masih banyak jalan di daerah kec. tellu limpoe yang belum memilki lampu jalan	Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	20	Titik	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
38	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Karena banyaknya kelompok tani yang meminta bantuan berupa alat pasca panen terutama Hand Tracktor dan Combine	Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	7	Kelompok	100,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
39	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Karena masih banyak jalan desa yang sudah rusak di Kec. tellu Limpoe	Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	Km	7,168,866,000	Pembangunan Jalan
40	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Karena masih banyak sekolah SD dan SMP di Kec. tellu Limpoe yang membutuhkan beberapa bagunan gedung dan pagar sekolah serta WC dan lainnya	Kec Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	10	Sekolah	150,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
41	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Karena masih banyak masyarakat yang rumahnya rusak dan memerlukan bantuan perbaikan dari pemerintah daerah	Kec. Tellu Limpoe, Panca Lautang , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	15	Unit	375,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
42	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Karena masyarakat kekurangan air ketika musim kemarau maka perlu di lakukan pengeboran pompa atau bisa memasukkan listrik masuk sawah	Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Lokasi	300,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
43	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Karena masih banyak jalan di Kec. Panca Lautang yang belum memilki lampu jalan atau penerangan jalan	Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	50	Titik	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
44	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Kurangnya Teknologi Penangkapan Ikan yang Efisien	Karena melihat kondisi masyarakat kita yang masih terbatas terutama penanangkapan ikan yang menggunakan alat manual, maka perlu di lakukan bantua berupa kapal penagkap ikan	Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	Unit	22,378,000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

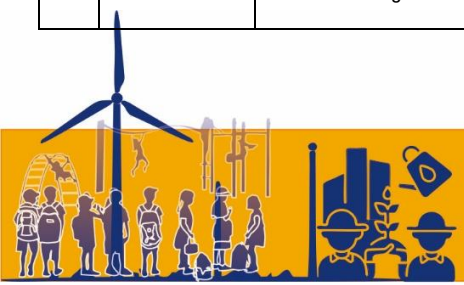


No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
45	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Karena masih banyak masyarakat sidrap yang memerlukan bantuan berupa rumah layak huni karena rumah mereka sudah rusak	Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	16	Unit	400,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
46	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Karena melihat kondisi petani ketika musim kemarau banyak yang memerlukan pompa air untuk mengairih sawah petani supaya tidak gagal panen	Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	13	Unit	390,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
47	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Karena banyak kelompok yang membutuhkan bantuan UMKM untuk kegiatan usaha kelompok	Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	Unit	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
48	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Karena masih banyak kelompok tani yang memerlukan bantuan berupa hand tracktor	Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	4	Unit	140,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
49	MUHAMMAD RASYID RIDHA BAKRI, S.Pd.	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Banyak masyarakat yang meminta bantuan berupa pabrik kelapa dalam menunjang kegiatan usaha tata boga	Kec. Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Unit	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
50	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Karena minimnya peralatan yang di miliki kelompok batu merah di kel. Bangkai maka dari itu mereka meminta bantuan peralatan pembuatan batu merah	Kel. Bangkai Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
51	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan sebelah selatan lap sepak bola ulu ale sudah rusak dan memerlukan perbaikan	Kel. Uluale Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	Meter	820,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
52	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	Banyak masyarakat yang memerlukan batuna berupa bibit ternak sapi dan lainnya	Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10	Ekor	200,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
53	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan yang usdah rusak dan memerlukan perbaikan atau pembangunan vaping blok	Desa Buae Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	150	Meter	246,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
54	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Penguatan Pemahaman Peraturan Daerah dan Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat	Karena masjid iman Buae memerlukan bantuan untuk melanjutkan pembangunan masjid agar lebih nyaman ditempati untuk beribadah	Masjid Nurul Iman Desa Buae Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	SEKRETARIAT DAERAH	1	Masjid	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
55	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Karena masih banyak kelompok tataboga yang masih kekurangan alat tataboga terutama oven	Kel. Bangkai Kec. watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	Unit	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
56	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	Banyak kelompok yang memerlukan bantuan berupa ternak itik untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam berternak itik	Desa Corawali Kec. watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1000	Ekor	65,000,000	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
57	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Karena masih banyak kelompok tani yang belum memliki alat pasca panen untuk pengolahan sawah salah satunya pengadaan bantuan hand tracktor	Desa Lise Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	3	Unit	105,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
58	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Banyak masyarakat yang memerlukan bantuan tata boga berupa oven untuk kegiatan usaha UMKM	Kel. Pajalele Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	Unit	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
59	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Karena masih banyak kelompok tata boga yang memerluka bantuan berupa kompor seribuh mata dala menunjang kegiatan usaha UMKM kelompok tersebut	Kel. Massepe Kec. tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	70	Unit	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
60	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Penguatan Pemahaman Peraturan Daerah dan Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat	Karena melihat kondisi masjid Nuru Hakim yang belum jadi maka perlu dilakukan bantuan oleh pemerintah daerah	Kel. Massepe Kec. tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	SEKRETARIAT DAERAH	1	Masjid	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
61	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	banyak masyarakat atau kelompok tani yang mengajukan adanya bantuan pompa air untuk kegiatan pertanian masyarakat	Desa Buae kec. watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Unit	300,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
62	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan yang sudah rusak perlu dilakukan paving blok di Kel. Pajalele	Kel. Pajalele Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	250	Meter	300,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
63	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Banyak kelompok tani yang memerlukan bantuan berupa hand tracktor untuk kegiatan pertanian	Kel. Bangkai Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	3	Unit	105,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
64	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Karena melihat kondisi sekolah SD 4 Lise yang belum memilki pagar maka perlu di lakukan pembangunan pagar agar siswa aman di lingkungan sekolah	SD 4 Lise Desa Lise Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	500	Meter	25,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
65	KASMAN, S.Hi	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Karena melihat kondisi sekolah yang belum memliki pembatas atau pagar sekolah	SD 4 Bila Desa Bola BulU Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	200	Meter	300,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
66	KASMAN, S.Hi	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Karena pemuda desa sering melakukan kegiatan olahraga sore hari dan pemuda Desa kekurangan bola volley	Desa Bola Bulu Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	20	Buah	750,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
67	KASMAN, S.Hi	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Karena masyarakat kekurangan bibit ikan nila untuk kegiatan budi daya kelompok peternak ikan Desa Botto	Desa Botto Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	15000	Ekor	22,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
68	KASMAN, S.Hi	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Karena masyarakat kekurangan pakam ikan nila untuk kegiatan budidaya ikan nila di Desa Bila Riase	Desa Bila Riase Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	45000	Ekor	67,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
69	KASMAN, S.Hi	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	Karena banyak masyarakat yang ingin berternak itik disekitar rumah namun masih terkendala kekurangan Bibit Itik Ternak	Desa Bila Riase Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1000	Ekor	200,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
70	KASMAN, S.Hi	Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Partisipasi Pemuda melalui Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Ekosistem Kreativitas Pemuda di Tingkat Lokal	Karena masih banyak kelompok anak muda yang kekurangan alat tukang las untuk mengenbangkan potensi mereka di dunia usaha	Desa Bila Riase Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	2	Kelompok	200,000,000	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota
71	KASMAN, S.Hi	Penguatan Pemahaman Peraturan Daerah dan Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat	Karena masjid Nurul Jihad masih kekurangan Kuba Untuk ditempati beribadah	Desa Lombo Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	SEKRETARIAT DAERAH	1	Kuba	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
72	KASMAN, S.Hi	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	karena melihat kondisi jalan yang sudah rusak dan perlu perbaikan	Jl. lombo panreng DEsa lombo kec. pitu riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	Meter	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
73	KASMAN, S.Hi	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Karena melihat kondisi jembatan palimpas salo awotara sudah rusak dan mengalami longsor	Kec. PITU riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	40	Meter	2,400,000,000	Pembangunan Jembatan
74	KASMAN, S.Hi	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Karena melihat kondisi perpustakaan SD Bila sudah rusak	Kec. Pitu riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	Ruangan	250,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
75	KASMAN, S.Hi	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Karena melihat kondisi Sekolah SD 13 Belawae tersebut tidak memilki pagar	SD 13 Belawae Kec. Pitu Sd 13 Belawae Kec. Pitu Ruase , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100	Meter	150,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
76	KASMAN, S.Hi	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Karena masih banyak kelompok tani yang belum memilki hands prayer atau alat semprot	Desa Lombo Kec. Pitu riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	100	Unit	60,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
77	KASMAN, S.Hi	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Untuk menghemat biaya penyemprotan kelompok tani maka gapokta melakukan permintaan mesin potong rumput	Desa Lombo Kec. Pitu riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	20	Unit	12,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
78	KASMAN, S.Hi	Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Partisipasi Pemuda melalui Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Ekosistem Kreativitas Pemuda di Tingkat Lokal	Karena banyak pemuda yang melakukan kegiatan olahraga terutama permainan bola volley maka dari itu kelompok pemuda ingin mengajukan permintaan bola Volley	Desa tana Toro kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	30	Buah	750,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
79	KASMAN, S.Hi	Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Partisipasi Pemuda melalui Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Ekosistem Kreativitas Pemuda di Tingkat Lokal	Karena banyak pemuda yang melakukan kegiatan olahraga terutama permainan bola volley maka dari itu kelompok pemuda ingin mengajukan permintaan bola Volley	Desa Leppangang Kec. Pitu riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	20	Buah	750,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
80	KASMAN, S.Hi	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Karena melihat animo masyarakat di permainan bola volley maka dari itu kelompok masyarakat mengajukan Tuornament Bola Volley Desa Lombo	DEsa Lombo Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	KEGIATAN	50,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
81	KASMAN, S.Hi	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Karena melihat animo masyarakat di permainan bola volley maka dari itu kelompok masyarakat mengajukan Tuornament Bola Volley Desa Tanatoro	Desa tanatoro Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	Event	75,000,000	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
82	KASMAN, S.Hi	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Karena melihat animo masyarakat di permainan bola volley maka dari itu kelompok masyarakat mengajukan Tuornament Bola Volley Desa Leppangang	Desa Leppangang Kec. Pitu riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	KELOMPOK	50,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
83	KASMAN, S.Hi	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Karena melihat animo masyarakat ketika memasuki bulan agutus maka dari itu pihak pemerintah kec pitu riase mengajukan pertandingan olahraga atau evnet olahraga	Kec. Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	Paket	75,000,000	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
84	KASMAN, S.Hi	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Karena melihat kondisi jaringan irigasi yang sudah rusak dan perlu di lakukan perbaikan menyeluruh	Desa Bila Riase Kec. Pitu riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	400	Meter	200,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
85	H. KHAERUDDINAM.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan tersebut sudah rusak	Lingk 1 Kel. Wala Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	100	Meter	164,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
86	H. KHAERUDDINAM.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan pekuburan yang sudah rusak dan perlu perhatian dari pemerintah daerah karena jalan tersebut sering dilewati	Jalan Kuburan Kelurahan Wala Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	170	Meter	278,800,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
87	H. KHAERUDDIN AM.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan yang sangat berdebuh dan rusak	Belakang MR. Dy Kel. Wala Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	120	Meter	196,800,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
88	H. KHAERUDDIN AM.	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Karena melihat kondisi duicker sudah rusak akibat di tambark mobil	Kel. Wala Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	20	Meter	400,000,000	Pembangunan Jembatan
89	H. KHAERUDDIN AM.	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Karena melihat kondisi jalan tersebut belum pernah di lakukan penimbunan dan perbaikan jalan	Kel. Wala Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	350,000,000	Rehabilitasi Jalan
90	H. KHAERUDDIN AM.	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Karena melihat kondisi jalan tani tersebut belum pernah dilakukan penimbunan dan pengerasan jalan	Desa Aka-Akae Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	400	Meter	100,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
91	H. KHAERUDDIN AM.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan rusak dan susah di lewati kendaraan besar	Jl. Merpati Kel. Sidenreng Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	450	Meter	738,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
92	H. KHAERUDDIN AM.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan tersebut khusus di Jl. Hasanuddin Kel Wala sudah rusak	Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Wala Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	350	Meter	574,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
93	H. KHAERUDDIN AM.	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Karena melihat kondisi jalan tersbeut rusak dan sulit dilewati kendaraan roda 4	Kel Majjelling Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	700	Meter	2,299,500,000	Pembangunan Jalan
94	H. KHAERUDDIN AM.	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Karena masyarakat membutuhkan pompanisasi ketika musim kemarau untuk mengairih sawah	Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	4	Unit	150,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
95	H. KHAERUDDIN AM.	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Karena melihat lokasi tersebut yang berada di kel. Lakessi belum pernah di lakukan pembuatan talud	Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	470	Meter	376,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
96	H. KHAERUDDIN AM.	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Karena melihat kondisi petani kita yang masih kekurangan pupuk di kel. Lakessi	Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	3	Ton	50,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
97	H. KHAERUDDIN AM.	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Karena melihat kondisi jalan tersebut sudah rusak dan perlu di lakukan penimbunan jalan supaya bagus dilewati masyarakat Kel. Lakessi	Jl. Gunung Lompobattang Kel. Lakessi Kec. Maritrengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	425	Meter	148,750,000	Pembangunan Jalan
98	H. KHAERUDDIN AM.	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Karena masih banyak kelompok tata boga yang membutuhkan kompor seribuh mata demi menjalankan kelompok UMKM	Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100	Buah	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
99	H. KHAERUDDIN AM.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan tersebut sudah rusak dan butuh perbaikan	Kel. Lakessi Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	175	Meter	287,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
100	H. KHAERUDDIN AM.	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Karena melihat kondisi pagar sekolah SD 15 Pankajene yang sudah rusak	Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	110	Meter	150,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
101	H. KHAERUDDIN AM.	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Karena melihat kondisi pagar sekolah SD 4 pangkajene yang sudah rusak	Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	122	Meter	183,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
102	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan tersebut sudah rusak dan memerlukan perbaikan	Sebelah selatan Lapangan Sebak Bola Kel. Ulu ale, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	300	Meter	492,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
103	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan tersebut sudah rusak dan perlu perbaikan	Desa Buae Kec. Wattang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	150	Meter	246,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
104	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan yang sudah rusak dan memerlukan perbaikan	Kel. Pajalele Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	100	Meter	164,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
105	A.K.B.P (PURN) H. SUDARNO	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Karena masih banyak kelompok tani yang kekurangan alat pasca panen terutama hand tarcktor dan lainnya	Kel. Batu Lappa Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	2	Unit	70,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
106	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Peningkatan Kuliatas Drainase Yang Tersebar Di Daerah Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riawa Dan Pitu Riase	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riawa dan Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

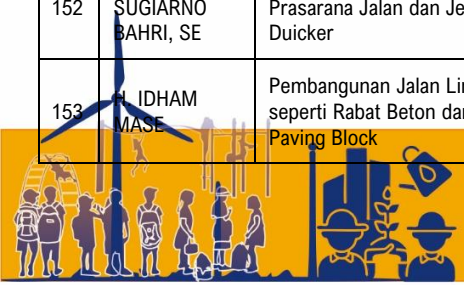
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
107	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Bantuan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pengangkutan Sampah Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Unit	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
108	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Pemadam Api Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	Unit	2,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
109	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana UMKM Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Orang	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
110	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Kurangnya Akses Informasi Terkait Penyuluhan dan Perizinan Kegiatan Peternakan dan Perikanan	Bantuan Pendampingan Penatausahaan Perizinan Bagi Pelaku Kegiatan dan Perikanan	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	20	Orang	50,000,000	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa
111	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Kurangnya Pemahaman Masyarkat Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan dan Proklim	Sosialisasi Efek Gas Rumah Kaca dan Program Kampung Iklim di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamtan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Lokasi	150,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
112	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Bantuan Pembangunan Rehabilitasi/Penguatan Jaringan Irigasi Pertanian Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5000	Meter	2,500,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
113	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Bantuan Pembangunan Jalan Usaha Tani Untuk Mendukung Pertanian yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5000	Meter	880,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
114	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Masih Terdapat Warga Kurang Mampu yang Belum Terdaftar Bantuan Sosial Kesehatan dan Akses Layanan	Bantuan BPJS Gratis Untuk Masyarakat Kurang Mampu yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	20	Usulan	50,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
115	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Masih Tingginya Perkawinan Anak	Sosialisasi Pengtinya Perkawinan Anak yang di Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	450	Orang	50,000,000	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
116	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian	Bantuan Prasarana Kepada Petani Pertanian dan Perkebunan untuk Mengantisipasi Serangan Hama yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Orang	2,500,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
117	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Bantuan Pembangunan Rabat Beton dan Paving Blok di Jalan Lingkungan Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
118	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Bantuan Benih Ikan yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	45000	ekor	67,500,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
119	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Bantuan Bibit ayam Kampung DOC Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	2000	Bibit	24,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
120	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Berkesinambungan dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Peserta Pelatihan BLK	Penyelengaraan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Kebutuhan Pasar Kerja Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	50	Orang	20,000,000	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
121	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Peningkatan Kapasitas Pelaku Kelompok Usaha Masyarakat	Bantuan Peralatan Kemasan untuk Kelompok Usaha Yang Tersebar di Keacamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	10	Kelompok	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
122	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Bantuan Pengadaan Lampu Jalan Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	2000	Meter	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
123	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Peningkatan Layanan Penempatan Tenaga Kerja melalui Penguatan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Penyelenggaraan Job Fair	Penyelenggaraan Job Fair dan Bursa Kerja Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100	Orang	20,000,000	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
124	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Bedah Rumah dan Perbaikan Pasca Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	Orang	250,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
125	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas Kesehatan yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	3	Paket	100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
126	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Perlu Peningkatan dan Penyediaan Sarana Sanitasi	Bantuan Sarana Sanitasi dan Sedot Lumpur Tinja Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	Kecamatan	12,825,000,000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
127	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Perlu Penyediaan Sarana Jaringan Air Minum Perpipaan	Bantuan Pembangunan Jaringan Air Minum Perpipaan Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5000	Meter	1,425,000,000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
128	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Terbatasnya SDM Kelompok Tani Komodias, sehingga dibutuhkan Pelatihan untuk Meningkatkan Kapasitas	Pelatihan SDM Kelompok Tani Padi Untuk Meningkatkan Pertanian Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	200,000,000	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
129	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	PEMASANGAN PAVING BLOK DI KECAMATAN MARITENGNGAE	KECAMATAN MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	M	600,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
130	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	PEMBANGUNAN JALAN TANI	KECAMATAN WATANG SIDENRENG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	1	KM	220,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
131	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	PEMBANGUNAN JALAN TANI	KECAMATAN MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	1	KM	220,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
132	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	PEMBANGUNAN PAGAR SD 4 MOJONG	DESA MOJONG KEC. WATANG SIDENRENG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	20	M	30,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
133	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE KOTA PANGKAJENE	KEL. PANGKAJENE KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	700	M	1,169,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
134	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	PENIMBUNAN HALAMAN SMP NEG.2 PANGKAJENE	KEL.RIJANG PITTU KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	500	M3	50,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
135	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	BANTUAN ALAT PERBENGKELAN DI KELURAHAN PANGKAJENE DAN RIJANG PITTU	KEL.PANGKAJENE DAN RIJANG PITTU KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	KLP	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
136	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	BANTUAN ALAT TATA BOGA DI DESA SEREANG, TAKKALASI DAN KEL. WALA	KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	KLP	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
137	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PELATIHAN KETERAMPILAN TATA BOGA PENGGIAT KULINER UMKM	KEC. MARITENGNGAE DAN WATANG SIDENRENG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	PAKET	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
138	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	BANTUAN HANDTRAKTOR	KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	1	KLP	35,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
139	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Penguatan Pemahaman Peraturan Daerah dan Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat	PEMASANGAN PAVING BLOK HALAMAN MASJID ILHAM TAKKALASI	DESA TAKKALASI KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	SEKRETARIAT DAERAH	300	M2	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
140	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PENGADAAN ALAT LOUNDRY	KEL. MAJJELLING WATTANG KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	PAKET	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
141	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PENGADAAN ALAT LOUNDRY	KEL. PANGKAJENE KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	PAKET	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
142	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PANGADAAN ALAT LOUNDRY	KEL. WALA KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	PAKET	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
143	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	PENGADAAN LAMPU JALAN	KEL. RIJANG PITTU KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	20	UNIT	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
144	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	PENGADAAN POMPANISASI MESIN DIESEL KELOMPOK TANI	KEC. MARITENGNGAE DAN WATANG SIDENRENG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	2	KLP	200,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
145	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	PENGADAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA KELOMPOK REMAJA	KEL. RIJANG PITTU KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	KEGIATAN	100,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
146	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	RABAT BETON DALAM DESA MOJONG	DESA MOJONG KEC. WATANG SIDENRENG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	100	M	164,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
147	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	RABAT BETON DESA SEREANG	DESA SEREANG KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	100	M	164,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
148	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	PENGECORAN LORONG DI KEL RIJANG PITTU	KEL. RIJANG PITTU KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
149	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	PENGECORON LORONG DI KEL. PANGKAJENE	KEL. PANGKAJENE KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
150	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	PENGECORAN LORONG DI DESA TAKKALASI	DESA TAKKALASI KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	150	M	246,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
151	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	PEMBUATAN JEMBATAN HEWAN	KEL. MAJJELLING WATTANG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	PAKET	150,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
152	ANDI SUGIARNO BAHRI, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	PENGASPALAN JALAN	DESA TAKKALASI KEC. MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	3,285,000,000	Pembangunan Jalan
153	H. IDHAM MASE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	RABAT BETON KELURAHAN ARAWA	KEL. ARAWA KEC. WATANG PULU, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
154	H. IDHAM MASE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	PEMBUATAN TALUD KEL. BATU LAPPA	KEL. BATU LAPPA KEC. WATANG PULU, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	160,000,000	Pembangunan Jalan
155	H. IDHAM MASE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	PEMBUATAN DRAINASE KEL. ARAWA	KEL. ARAWA KEC. WATANG PULU, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
156	H. IDHAM MASE	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	PENGADAAN LAMPU JALAN	KEL. ARAWA KEC. WATANG PULU, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	20	UNIT	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
157	H. IDHAM MASE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	PENIMBUNAN JALAN	KEL. ARAWA KEC. WATANG PULU, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	Meter	70,000,000	Rehabilitasi Jalan
158	H. IDHAM MASE	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	PENGADAAN HANDTRAKTOR	KEC. WATANG PULU DAN TELLU LIMPOE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5	UNIT	175,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
159	H. IDHAM MASE	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PENGADAAN ALAT TATA BOGA	KEC. WATANG PULU, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	KLP	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
160	H. IDHAM MASE	Perlu Penyediaan Sarana Jaringan Air Minum Perpipaan	PENGADAAN SUMUR BOR WARGA	KEL. ARAWA, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	PAKET	1,175,000,000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
161	H. IDHAM MASE	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH DASAR	KEC. WATANG PULU, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	25	M	37,500,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
162	H. IDHAM MASE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	PAVING BLOK JALAN LINGKUNGAN	KEL. BATU LAPPA KEC. WATANG PULU, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
163	H. IDHAM MASE	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	PENGADAAN BIBIT ALPUKAT	KEC. WATANG PULU, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	100	POHON	50,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
164	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	PENGASPALAN JALAN	KEL. BARANTI KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	M	1,642,500,000	Pembangunan Jalan
165	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	PEKERJAAN RABAT BETON JALAN	KEL. BARANTI KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
166	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	PEKERJAAN TALUD DAN TIMBUNAN BADAN JALAN	KEL. BARANTI KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	M	575,000,000	Rehabilitasi Jalan
167	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	PEMELIHARAAN LAMPU JALAN	KEL. BARANTI KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	25	UNIT	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
168	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	PEMBANGUNAN DUEKKER	KEL. BARANTI KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	PAKET	60,000,000	Pembangunan Jembatan
169	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PENGADAAN ALAT TATA BOGA	KEL. BARANTI KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	KLP	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
170	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	BANTUAN DOD ANAK ITIK	KEL. BARANTI KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1000	EKOR	10,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
171	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	PENINGKATAN JALAN	KEL. BENTENG KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	3,400,000,000	Pembangunan Jalan
172	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN	KEL. BENTENG KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	PAKET	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
173	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	RABAT BETON JL. PROF.RAHMAN LAIDDING MANISA	KEL. MANISA KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
174	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	BANTUAN ALAT TATA BOGA	KEL. MANISA KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	PAKET	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
175	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PENGADAAN MESIN JAHIT KELOMPOK MASYARAKAT	KEL. MANISA KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	KLP	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
176	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PENGADAAN ALAT PERBENGKELAN	KEL. PANRENG KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	PAKET	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
177	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	PENINGKATAN JALAN TANI	DESA SIPODECENG KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	250	M	70,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
178	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	BANTUAN ALAT PERCETAKAN DIGITAL PRINTING	KEC. PANCA RIJANG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	PAKET	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
179	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	PEMBANGUNAN DRAINASE	KEL. DUAMPANUA KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
180	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	PEMBANGUNAN DUEKKER	KEL. DUAMPANUA KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	PAKET	60,000,000	Pembangunan Jembatan
181	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	PEMASANGAN PAVING BLOK	KEL. DUAMPANUA KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	300	M3	492,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
182	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	BANTUAN ALAT TATA BOGA WARGA	KEL. DUAMPANUA KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	KLP	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
183	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	PENGERUKAN SALO KALAPUA/SALO SIMPO	DESA PASSENO KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	200	M	150,000,000	Normalisasi/Restorasi Sungai
184	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	PEMASANGAN PAVING BLOK JALAN KUBURAN DUSUN KESSI PUTE	DESA PASSENO KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	250	M	410,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
185	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	PEMASANGAN PAVING BLOK HALAMAN PUSTU PASSENO	DESA PASSENO KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	300	M3	60,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
186	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	BANTUAN BIBIT IKAN	DESA TONRONG KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	15000	EKOR	22,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
187	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	PENGADAAN HANDTRAKTOR	DESA PASSENO KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	1	UNIT	35,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
188	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	BANTUAN DOD ANAK ITIK	DESA KULO KEC. KULO, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1000	EKOR	10,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
189	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	PEMBANGUNAN TALUD DAN TIMBUNAN JALAN LINGKUNGAN	KEL. MANISA KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	250	M	287,500,000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
190	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	PEMBANGUNAN TALUD DAN TIMBUNAN JALAN	KEL. BENTENG KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	150	M	120,000,000	Pembangunan Jalan
191	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	BANTUAN BIBIT IKAN KELOMPOK MASYARAKAT	KEL. PANRENG KEC. BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	15000	EKOR	22,500,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

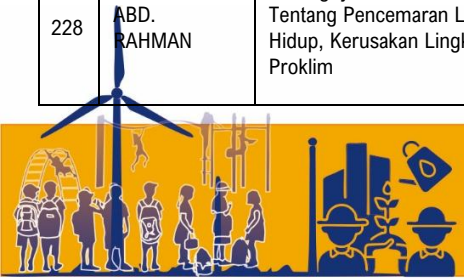
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
192	Dra. Hj. SITTI RAHMAH, M.Si	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	PENGADAAN POMPANISASI MESIN DIESEL KELOMPOK TANI BUNNE RIAWA	DESA KULO KEC. KULO, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	1	UNIT	100,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
193	H. ISMAIL AKSA	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	RABAT BETON JALAN KELURAHAN	KEL. TANRU TEDONG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
194	H. ISMAIL AKSA	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	RABAT BETON JALAN DESA	DESA SALOMALLORI KEC. DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
195	H. ISMAIL AKSA	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	RABAT BETON DESA SALOBUKKANG	DESA SALOBUKKANG KEC. DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
196	H. ISMAIL AKSA	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	PEMBUATAN DRAINASE	KEL. TANRU TEDONG KEC. DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	300	M	501,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
197	H. ISMAIL AKSA	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	PEMBUATAN DRAINASE	DESA SALOBUKKANG KEC. DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
198	H. ISMAIL AKSA	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	BANTUAN ALAT TATA BOGA	KECAMATAN DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	PAKET	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
199	H. ISMAIL AKSA	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	BANTUAN ALAT TATA BOGA	KECAMATAN PITU RIAWA DAN PITU RIASE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	PAKET	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
200	H. ISMAIL AKSA	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PENGADAAN KOMPOR GAS	KEC. DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100	BUAH	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
201	H. ISMAIL AKSA	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	PEMASANGAN PAVING BLOK JALAN LINGKUNGAN	KEL. TANRU TEDONG KEC. DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	300	M	492,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
202	H. ISMAIL AKSA	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	PEMBUATAN JALAN TANI	DESA SALOBUKKANG KEC. DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	500	M	100,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
203	H. ISMAIL AKSA	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	PEMBUATAN JALAN TANI	DESA SALOMALLORI KEC. DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	500	M	100,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
204	H. ISMAIL AKSA	Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Partisipasi Pemuda melalui Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Ekosistem Kreativitas Pemuda di Tingkat Lokal	PENGADAAN KARPET LAPANGAN BULU TANGKIS	KEL. TANRU TEDONG KEC. DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	PAKET	150,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
205	H. ISMAIL AKSA	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	PENGADAAN DOD ANAK AYAM	KEC. DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1000	EKOR	12,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
206	H. ISMAIL AKSA	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	PEMBUATAN JALAN TANI	DESA PADANGLOANG ALAU KEC. DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	500	M	100,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
207	H. ISMAIL AKSA	Kurangnya Akses Informasi Terkait Penyuluhan dan Perizinan Kegiatan Peternakan dan Perikanan	PENGADAAN BIBIT IKAN NILA	KEC. PITU RIASE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	15000	EKOR	22,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
208	H. ISMAIL AKSA	Kurangnya Pemahaman Masyarkat Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan dan Proklim	PENGADAAN MESIN PEMOTONG RUMPUT	KEL. SALOMALLORI KEC. DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	UNIT	3,500,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
209	H. ISMAIL AKSA	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PENGADAAN ALAT PERTUKANGAN LAS	KEC. DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	PAKET	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
210	H. ISMAIL AKSA	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	PENGADAAN BIBIT ALPUKAT	KEC. PITU RIAWA, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	100	POHON	50,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
211	H. ISMAIL AKSA	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	PENGADAAN BIBIT DURIAN MUSANGKING	KEC. DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	100	POHON	50,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
212	H. ISMAIL AKSA	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PENGADAAN ALAT HIDROLIK MESINPRESS 4 TIANG KAPASITAS 50 TON	KEC. DUA PITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	UNIT	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
213	H. ISMAIL AKSA	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PENGADAAN MESIN DAN ALAT PARUT PEMBUAT SANTAN KELAPA	KEC. PITU RAIAWA, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	PAKET	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
214	ANDI ISMAN, SE	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Bantuan ALsintan untuk Peningkatan Produksi Pertanian	Kecamatan Pituriawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
215	ANDI ISMAN, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Banyaknya jalan rusak	KECAMATAN PITURIAWA,PITURIASE,DUAPITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
216	ANDI ISMAN, SE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	JALANAN RUSAK,AKIBAT KURANG TALUD	KECAMATAN PITURIAWA,PITURIASE,DUAPITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
217	ANDI ISMAN, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	JALANAN RUSAK TERGENANG AIR	KECAMATAN PITURIASE,PITURIAWA,DUAPITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
218	ANDI ISMAN, SE	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PERLUNYA PENINGKATAN SARANA DEMI PENINGKATAN PENDAPATAN	KECAMATAN PITURIASE,PITURIAWA,DUAPITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	20	KELOMPOK	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
219	ANDI ISMAN, SE	Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Partisipasi Pemuda melalui Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Ekosistem Kreativitas Pemuda di Tingkat Lokal	PERLUNYA PELATIHAN DAN SOSIALISASI DEMI PENINGKATAN MUTU KEPEMUDAAN	KECAMATAN PITURIAWA,PITURIASE,DUAPITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	10	TITIK	500,000,000	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
220	ANDI ISMAN, SE	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	PERLUNYA BANTUAN BIBIT AYAM,ITIK	KECAMATAN PITURIAWA,PITURIASE,DUAPITUE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	2000	EKOR	130,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
221	ABD. RAHMAN	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Bantuan Peningkatan Kualitas Drainase di Daerah yang sering banjir Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamtan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2000	Meter	3,340,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
222	ABD. RAHMAN	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Unit	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
223	ABD. RAHMAN	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bantuan Sarana dan Prasarana Pemadam Api yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	Unit	2,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
224	ABD. RAHMAN	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Pendampingan Sosialisasi Perizinan dan Legalitas Usaha UMKM Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
225	ABD. RAHMAN	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Pendampingan Peningkatan Mutu dan Standar Produk UMKM Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Orang	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
226	ABD. RAHMAN	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Pelatihan dan Fasilitasi Pemasaran UMKM Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	20	Orang	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
227	ABD. RAHMAN	Kurangnya Akses Informasi Terkait Penyuluhan dan Perizinan Kegiatan Peternakan dan Perikanan	Bantuan Pendampingan Penatausahaan Perizinan Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	20	Orang	50,000,000	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa
228	ABD. RAHMAN	Kurangnya Pemahaman Masyarkat Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan dan Proklim	Bantuan Sosialisasi Efek Gas Rumah Kaca dan Program Kampung Iklim (Proklim), Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20	Orang	30,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
229	ABD. RAHMAN	Kurangnya Teknologi Penangkapan Ikan yang Efisien	Bantuan Pengadaan Jaring, Pancing, dan Kapal Penangkap Ikan, Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	30	Set	15,000,000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
230	ABD. RAHMAN	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi/Penguatan Jaringan Irigasi Pertanian Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	1000	Meter	500,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
231	ABD. RAHMAN	Masih Rendahnya Parsitipatif Perangkat Organisasi BUMDes dalam Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Bantuan Pelatihan dan Pembinaan BUMDes Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	29	BUM Desa	217,500,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
232	ABD. RAHMAN	Masih Terdapat Sarana Distrbusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang Kurang Memadai dan Kurangnya Pemeliharaan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Yang Tersebar di kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	5	Kios	-	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
233	ABD. RAHMAN	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian	Bantuan Pengadaan Pestisida Untuk Penyemprotan/Pengendalian Hama dan Penyakit pada Komoditas Hortikultura Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Orang	2,500,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
234	ABD. RAHMAN	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian	Bantuan Pengadaan Pestisida Penyemprotan/Pengendalian Hama dan Penyakit pada Komoditas Perkebunan Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawaw, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Orang	2,500,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
235	ABD. RAHMAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Gedung Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Bangunan Pemerintah Lainnya yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	Gedung	9,600,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
236	ABD. RAHMAN	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Bantuan Pengadaan Rabat Beton dan Paving Block yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
237	ABD. RAHMAN	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Bantuan Bibit Sayur/Buah, Benih Ikan atau DOC Ayam Kampung, Pakan Awal, dan Sarana Sederhana (Polybag, Kolam Terpal, Kandang Mini) Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	500	Bibit	25,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
238	ABD. RAHMAN	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Penyuluhan Demplot Kebun Pekarangan, Kolam Ikan, dan Kandang Ayam Kampung Skala Rumah Tangga Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	3	Kecamatan	30,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
239	ABD. RAHMAN	Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi melalui Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Masyarakat	Bantuan Pelatihan Bagi Masyarakat Kawasan Transmigrasi Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	Kecamatan	20,000,000	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
240	ABD. RAHMAN	Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui Peningkatan Sarana Prasarana Dasar, Penguatan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, dan Penyediaan Akses Air Bersih serta Sanitasi Layak	Bantuan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani di Kawasan Transmigrasi yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1000	Meter	20,000,000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
241	ABD. RAHMAN	Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui Peningkatan Sarana Prasarana Dasar, Penguatan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, dan Penyediaan Akses Air Bersih serta Sanitasi Layak	Bantuan Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Kawasan Transmigrasi Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	Kecamatan	20,000,000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
242	ABD. RAHMAN	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantuan Sarana Pendukung Bagi Ibu Hamil, Baduta, dan Balita Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	90	Orang	30,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
243	ABD. RAHMAN	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantunan Pendampingan dan Pemberian Edukasi Gizi Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	200	Orang	50,000,000	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
244	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantuan Sarana Pendukung Bagi Ibu Hamil, Baduta, dan Balita Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	90	Orang	30,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
245	Hj. KARTINI BEKKA, SKM., M.KES	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantuan Pendampingan dan Pemberian Edukasi Gizi Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	200	Orang	50,000,000	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
246	ABD. RAHMAN	Penguatan Program Pengendalian Penduduk dan Pencegahan Stunting Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Bantuan Sosialisasi Pendampingan Pengendalian dan KB Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	200	Orang	50,000,000	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
247	ABD. RAHMAN	Penguatan Program Pengendalian Penduduk dan Pencegahan Stunting Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Bantuan Pengadaan Bahan Makanan Untuk Cegah Stunting Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	kecamatan	300,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
248	ABD. RAHMAN	Penguatan Program Pengendalian Penduduk dan Pencegahan Stunting Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Bantuan Pelatihan Memasak Menu Sehat Berbahan Pangan Lokal Untuk Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	Kecamatan	300,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
249	ABD. RAHMAN	Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Berkesinambungan dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Peserta Pelatihan BLK	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Kebutuhan Pasar Kerja Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	Kecamatan	20,000,000	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
250	ABD. RAHMAN	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	45000	Ekor	67,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
251	ABD. RAHMAN	Peningkatan Kapasitas Pelaku Kelompok Usaha Masyarakat	Bantuan Peralatan Kemasan Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	5	Alat	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
252	ABD. RAHMAN	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Bantuan Pengadaan Lampu Jalan Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Lampu	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
253	ABD. RAHMAN	Perlunya Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Komunikasi	Bantuan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	KOMPUTER	75,000,000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
254	ABD. RAHMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Bedah Rumah Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitu, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	Rumah	375,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
255	ABD. RAHMAN	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Bantuan Pengadaan Pupuk (Organik dan Non Organik) Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	500,000,000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
256	ABD. RAHMAN	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Bantuan Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan, dan Duicker Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	Kecamatan	4,927,500,000	Pembangunan Jalan
257	ABD. RAHMAN	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Bantuan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, SD, SMP Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3	Kecamatan	200,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
258	ABD. RAHMAN	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Bantuan Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	3	Kecamatan	13,500,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
259	ABD. RAHMAN	Perlu Penyediaan Sarana Jaringan Air Minum Perpipaan	Bantuan Pembangunan Jaringan Air Minum Perpipaan Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	Kecamatan	1,500,000,000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
260	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	SERING TERJADI BANJIR,SEHINGGA PERLU PERBAIKAN SALURAN AIR	DESA TANETE,ALLAKUANG,TAKKALASI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	KM	5,010,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
261	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PERLUNYA MESIN JAHIT UNTUK PENGEMBANGAN UMKM	DESA TANETE,KEL.LAUTANG BENTENG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	KELOMPOK	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM

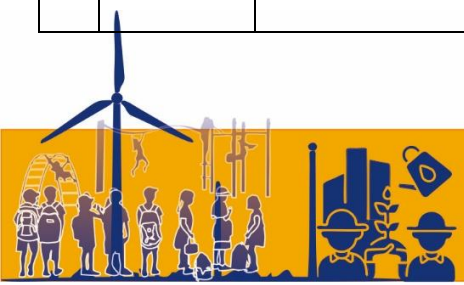
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
262	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	BANTUAN TAT RIAS UNTUK PENGEMBANGAN UMKM	DESA TANETE,TAKKALASI,KEL.LAUTANG BENTENG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	KELOMPOK	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
263	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	PERLUNYA PAVING BLOK UNTUK SMP 5 MARITENGNGAE	SMPN 5 MARITENGNGAE ALLAKUANG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	900	M	250,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
264	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	BANTUAN SUMUR BOR DESA TAKKALASI	DESA TAKKALASI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5	TITIK	228,500,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
265	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	PERLUNYA BANTUAN ALSINTAN UNTUK PRODUKTIVITAS PERTANIAN	KECAMATAN MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	KELOMPOK TANI	4,500,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
266	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	BANTUAN PENINGKATAN PRODUKSI UMKM	KECAMATAN MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	KELOMPOK	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
267	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	PENINGKATAN HASIL PRODUKSI PETERNAK AYAM,ITIK	DESA TANETE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	2000	Ekor	200,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
268	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	PERLUNYA PERBAIKAN JALAN DESA TANETE,ALLAKUANG,TAKKALASI	DESA TANETE,ALLAKUANG,TAKKALASI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
269	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	PERLU JEMBATAN UNTUK PENINGKATAN AKSES JALAN	DESA TANETE,ALLAKUANG,TAKKALASI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	UNIT	3,000,000,000	Pembangunan Jembatan
270	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	PEEBAIKAN JALAN PERLU UNTUK MEMPERLANCAR AKTIVITAS MASYARAKAT	DESA BULO WATTANG,BULO,CIPOTAKARI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	KM	4,920,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
271	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	PERLU PAVING BLOK AGAR JALAN TAK TERGENANG AIR	DESA BULO,BULO WATTANG,CIPOTAKARI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	1,200,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
272	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	BGANYAKNYA SAMPAH MENUMPUK	DESA BULO, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	UNIT	85,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
273	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	PERLU TALUD UNTUK MENGATASI BANJIR	DESA BULO,CIPOTAKARI,BULO WATTANG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	800,000,000	Pembangunan Jalan
274	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	PERLU PENINGKTAN HASIL DAN BUTUH SARANA PRASARANA	KECAMATAN BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	KELOMPOK	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
275	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	BANTUAN BIBIT AYAM PETELUR	DESA BULO,CIPOTAKARI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1000	EKOR	55,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
276	HABIBI SYAMSUDDIN, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Masyarakat membutuhkan pembangunan jalan berupa rabat beton	Tersebar di kelurahan Pangkajene kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	m	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
277	HABIBI SYAMSUDDIN, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	masyarakat mengharapkan pembangunan jalan berupa rabat beton	Jalan anggrek kelurahan majjelling wattang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	m2	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
278	HABIBI SYAMSUDDIN, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Masyarakat membutuh pembangunan jalan berupa penimbunan jalan	Jalan pekuburan umum desa kanie kecamatan maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	km	350,000,000	Rehabilitasi Jalan
279	HABIBI SYAMSUDDIN, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Masyarakat membutuhkan pembangunan jalan berupa pemasangan paving block	Tersebar di kelurahan pangkajene kecamatan maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	km	1,200,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
280	HABIBI SYAMSUDDIN, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	masyarakat mengharapkan pembangunan berupa duicker	Tersebar di kelurahan Pangkajene kecamatan maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	titik	3,000,000,000	Pembangunan Jembatan
281	HABIBI SYAMSUDDIN, SE	Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Berkesinambungan dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Peserta Pelatihan BLK	Masyarakat mengharapakn pelatihan bagi pelakuKelompok UMKM	Tersebar di Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	KELOMPOK	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM



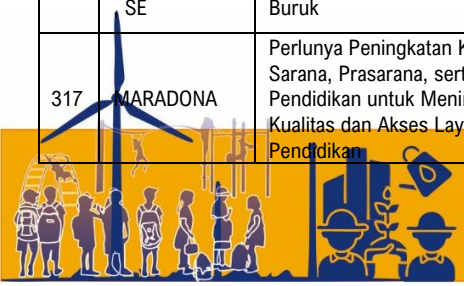
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
282	HABIBI SYAMSUDDIN , SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Masyarakat mengharapkan pembangunan jalan berupa rabat beton dan paving block	Tersebar di Kelurahan Majjelling Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	km	3,280,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
283	HABIBI SYAMSUDDIN , SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Masyarakat mengharapkan pembangunan jalan berupa rabat beton dan paving block	Tersebar Di seluruh kecamatan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	km	8,200,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
284	SUDARMIN, SH	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Masyarakat mengharapkan pembanunan jalan berupa rabat beton	lorong wawan desa teppo kecamatan tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	m	820,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
285	SUDARMIN, SH	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Masyarakat mengharapan pembanguan jalan berupa rabata beton	lorong sangkala kelurahan massepe kecamatan tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	250	m	410,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
286	SUDARMIN, SH	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Masyarakat mengharapan pembanguan jalan berupa rabata beton	lorong belakang mesjid AL-Abrar Desa Teppo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	m	820,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
287	SUDARMIN, SH	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Masyarakat mengharapan pembanguan jalan berupa rabata beton	Tersebar di kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	km	8,200,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
288	SUDARMIN, SH	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Masyarakat mengharapan pembangnan berupa duicker	Tersebar di kecamatan Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	titk	150,000,000	Pembangunan Jembatan
289	SUDARMIN, SH	Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Berkesinambungan dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Peserta Pelatihan BLK	Masyarakat mengharapan pelatihan bagi pelaku kelompok UMKM	Tersebar di kecamatan Tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	KELOMPOK	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
290	MARADONA	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Bantuan Peningkatan Kualitas Drainase Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2000	Meter	3,340,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
291	MARADONA	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Bantuan Pengadaan Fasilitas Angkutan Sampah, Tempat Sampah, TPS3R Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Kecamatan	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
292	MARADONA	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Api Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	Unit	2,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
293	MARADONA	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bantuan Pembangunan Posko Pemadam Kebakaran Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	paket	500,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
294	MARADONA	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Pendampingan Perizinan dan Legalitas Usaha UMKM Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Orang	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
295	MARADONA	Kurangnya Pemahaman Masyarkat Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan dan Proklim	Sosialisasi Efek Gas Rumah Kaca dan Program Kampung Iklim (Proklim) Kepada Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Kecamatan	60,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
296	MARADONA	Kurangnya Teknologi Penangkapan Ikan yang Efisien	Bantuan Pengadaan Jaring, Pancing, dan Kapal Penangkap Ikan Untuk Kelompok Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	30	SET	15,000,000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
297	MARADONA	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Bantuan Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi di Sektor Pertanian, Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	2000	Meter	1,000,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
298	MARADONA	Masih Terdapat Sarana Distrbusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang Kurang Memadai dan Kurangnya Pemeliharaan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	3	Kecamatan	-	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
299	MARADONA	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian	Bantuan Pestisida Untuk Penyemprotan/Pengendalian Hama dan Penyakit pada Komoditas Hortikultura Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue,Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	25,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
300	MARADONA	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Bantuan Pembangunan Gedung Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Bangunan Pemerintah Lainnya Yang di Butuhkan tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	Kecamatan	9,600,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
301	MARADONA	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Bantuan Pembanguna Rabat Beton dan Paving Block Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
302	MARADONA	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Bantuan Bibit Sayur/Buah, Benih Ikan atau DOC Ayam Kampung, Pakan Awal, dan Sarana Sederhana (Polybag, Kolam Terpal, Kandang Mini) Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5000	Bibit	25,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
303	MARADONA	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Demplot Kebun Pekarangan, Kolam Ikan, dan Kandang Ayam Kampung Skala Rumah Tangga Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	400	Meter²	30,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
304	MARADONA	Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi melalui Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Masyarakat	Bantuan Pelatihan Pengolahan dan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Produksi Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	Kecamatan	-	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
305	MARADONA	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantuan Sarana Pendukung Bagi Ibu Hamil, Baduta, dan Balita Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	90	Orang	50,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
306	MARADONA	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Bantuan Pembinaan Atlet Berprestasi Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	10	Orang	3,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
307	MARADONA	Penguatan Program Pengendalian Penduduk dan Pencegahan Stunting Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Bantuan untuk Cegah Stunting Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	Kecamatan	150,000,000	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
308	MARADONA	Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Berkesinambungan dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Peserta Pelatihan BLK	Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Kebutuhan Pasar Kerja Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	50	Orang	20,000,000	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
309	MARADONA	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Bantuan Sarana dan Prasarana Kelompok Budidaya Ikan dan Kelompok Ternak Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	45000	Ekor	67,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
310	MARADONA	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Bantuan Penerangan Lampu Jalan Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	50	Lampu	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
311	MARADONA	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana melalui Edukasi, Penguatan Kapasitas, dan Dukungan Sarana Tanggap Bencana	Bantuan Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Kecamatan	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
312	MARADONA	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Bedah Rumah Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	Rumah	250,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
313	MARADONA	Perlunya Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Komunikasi	Bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	Kecamatan	420,000,000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
314	MARADONA	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Bantuan Pengadaan Alsintan Untuk Kelompok Tani Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riawa dan Pitu Riase	Kecmatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	4,500,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
315	MARADONA	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Bantuan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan, dan Duicker Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	3,285,000,000	Pembangunan Jalan
316	HABIBI SYAMSUDDIN SE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	PENINGKATAN KUALITAS DRAINASE	JL.A.UJENG BELAKANG FOTO SHUDY MARIA FOTO KEL.PANGKAJENE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	50	M	70,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
317	MARADONA	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Bantuan Pembangunan Pagar/Paving Block/Atap/WC/Plafon Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	Sekolah	150,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
318	HABIBI SYAMSUDDIN , SE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	PENINGKATAN KUALITAS DRAINASE	JL.H.SYAMSUDDIN,SEBELAH UTARA PASAR PANGKAJENE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	120	M	200,400,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
319	MARADONA	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Embung yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	3	Kecamatan	150,000,000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
320	MARADONA	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Bantuan Pembangunan Tanggul/Talud Sungai yang Rusak di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	200	Meter	150,000,000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
321	MARADONA	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	3	Kecamatan	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
322	H. RUSMAN, SH	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	MASYARAKAT MEMBUTUHKAN PEMBANGUNAN JALAN BERUPA RABAT BETON	JALAN TEBBA DESA BILA RIAWA, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
323	H. RUSMAN, SH	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	MASYARAKAT MEMBUTUHKAN PEMBANGUNAN JALAN BERUPA RABAT BETON	JALAN DG.MANGATI DESA KALOSI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	m	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
324	MARADONA	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamartan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	5	Orang	100,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
325	MARADONA	Terbatasnya SDM Kelompok Tani Komodias, sehingga dibutuhkan Pelatihan untuk Meningkatkan Kapasitas	Bantuan Pelatihan SDM Kelompok Tani Hortikultura Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	200,000,000	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
326	H. RUSMAN, SH	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	MASYARAKAT MEMBUTUHKAN PEMBANGUNAN JALAN BERUPA PEMASANGAN PAVING BLOCK	DESA KAMPALE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	m	600,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
327	H. RUSMAN, SH	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	MASYARAKAT MEMBUTUHKANBANTUAN PENGADAAN BERUPA BIOFLOK	KELOMPOK MANDIRI DESA BILA, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	5	UNIT	33,235,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

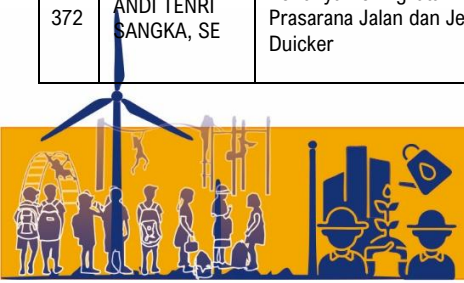
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
328	H. RUSMAN, SH	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	MASYARAKAT MEMBUTUHKAN BANTUAN PENGADAAN BIOFLOK	KELOMPOK SARI DESA KALOSI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	5	UNIT	33,235,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
329	ANDI TENRI SANGKA, SE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Bantuan Pembangunan Peningkatan Kualitas Drainase Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
330	ANDI TENRI SANGKA, SE	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Bantuan Pengadaan Fasilitas Angkutan Sampah, Tempat Sampah, TPS3R,Sosialisasi Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Kecamatan	60,000,000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
331	H. RUSMAN, SH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	MASYARAKAT MENGHARAPAK BANTUAN BEDAH RUMAH	TERSEBARA DI KECAMATAN DUA PITU,PITU RIASE DAN PITU RIAWA, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	30	UNIT	750,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
332	ANDI TENRI SANGKA, SE	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Api Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	Unit	2,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
333	H. RUSMAN, SH	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	MASYARAKAT MEMBUTUHKAN PEMBANGUNAN JALAN BERUPA RABAT BETON DAN PAVING BLOC	TERSEBAR DI KECAMATAN DUA PITUE ,PITU RIASE DAN PITU RIAWA, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	KM	4,920,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
334	ANDI TENRI SANGKA, SE	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Untuk Kelompok UMKM Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
335	NAHARUDDIN SADEKE, ST	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	MASYARAKAT MEMBUTUHKAN PEMBANGUNAN JALAN BERUPA RABAT BETON DAN HOTMIX	JALAN ANDI NOHONG PANRENG KECAMATAN BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
336	NAHARUDDIN SADEKE, ST	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	MASYARAKAT MEMBUTUHKAN BATUAN BEDAH RUMAH	TERSEBAR DI KECAMATAN BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	30	UNIT	750,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
337	NAHARUDDIN SADEKE, ST	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	MASYARAKAT MEMBUTUHKAN BATUAN BEDAH RUMAH	TERSEBAR DI KECAMATAN KULO, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	UNIT	250,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
338	NAHARUDDIN SADEKE, ST	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	MASYARAKAT MEMBUTUHKAN PEMBANGUNAN JALAN BERUPA RABAT BETON	KELURAHAN BENTENG KECAMATAN BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	m	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
339	NAHARUDDIN SADEKE, ST	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	MASYARAKAT MEMBUTUHKAN PEMBANGUNAN JALAN BERUPA RABAT BETON	DESA PASSENO KECAMATAN BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	m	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
340	NAHARUDDIN SADEKE, ST	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	MASYARAKAT MEMBUTUHKAN BANTUAN PENGADAAN HAND TRACTOR	TERSEBAR DI KECAMATAN BARANTI DAN KULO, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	UNIT	350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
341	NAHARUDDIN SADEKE, ST	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	MASYARAKAT MEMBUTUHKAN PEMBANGUNAN BERUPA DUICKER	TERSEBAR DI DESA MARIO KECAMATAN KULO, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	titik	150,000,000	Pembangunan Jembatan
342	MUHAMMAD SYUKUR RABAISENG, ST	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	MASYARAKAT MENGHARAPAKAN LANJUTAN PEKERJAAN BERUPA RABAT BETON	JALAN BONGING LINGK TALUMAE KELURAHAN MANISA KECAMATAN BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
343	ANDI TENRI SANGKA, SE	Kurangnya Akses Informasi Terkait Penyuluhan dan Perizinan Kegiatan Peternakan dan Perikanan	Bantuan Penatausahaan Perizinan Untuk Kelompok UMKM yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	20	Kelompok	50,000,000	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa
344	MUHAMMAD SYUKUR RABAISENG, ST	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	MASYARAKAT MENGHARAPKAN PEMBANGUNAN BERUPA DRAINASE	JALAN HANDAYANI KELURAHAN MANISA KECAMATAN BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
345	ANDI TENRI SANGKA, SE	Kurangnya Pemahaman Masyarkat Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan dan Proklim	Bantuan Sosialisasi Efek Gas Rumah Kaca dan Program Kampung Iklim(Proklim) Kepada Kelompok Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	Kelompok	50,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
346	ANDI TENRI SANGKA, SE	Kurangnya Teknologi Penangkapan Ikan yang Efisien	Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Untuk Kelompok Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	30	Set	15,000,000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
347	MUHAMMAD SYUKUR RABAISENG, ST	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	MASYARAKAT MENGHARAPAKAN PELATIAHAN DAN BANTUAN PENGADAAN SARANA PELAKU KELOMPOK UMKM	TERSEBAR DI KELURAHAN MANISA KECAMATAN BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	KELOMPOK	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
348	ANDI TENRI SANGKA, SE	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi/Penguatan Jaringan Irigasi Pertanian untuk Meningkatkan Produktifitas di Bidang Pertanian yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5000	Meter	2,500,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
349	ANDI TENRI SANGKA, SE	Masih Rendahnya Parsitipatif Perangkat Organisasi BUMDes dalam Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Bantuan Pelatihan dan Pembinaan BUMDes untuk Kelompok UMKM yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	29	BUM Desa	217,500,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
350	MUHAMMAD SYUKUR RABAISENG, ST	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	PEMBANGUNAN JEMBATAN	JEMBATAN PENGHUBUNG KELURAHAN MANISA DAN KELURAHAN BANGKAI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	UNIT	600,000,000	Pembangunan Jembatan
351	MUHAMMAD SYUKUR RABAISENG, ST	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	MASYARAKAT MENGHARAPKAN PEMBANGUNAN BERUPA RABAT BETON	JALAN BALAI DESA KELURAHAN MANISA, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	m	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
352	MUHAMMAD SYUKUR RABAISENG, ST	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	MASYARAKAT MENGHARAPKAN PEMBANGUNAN BERUPA RABAT BETON	JALAN YMPI KELURAHAN MANISA, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
353	MUHAMMAD SYUKUR RABAISENG, ST	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	MASYARAKAT MENGHARAPKAN PEMBANGUNAN BERUPA RABAT BETON	TERSEBAR DI KECAMATAN PANCA RIJANG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	KM	8,200,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
354	MUHAMMAD SYUKUR RABAISENG, ST	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	MASYARAKAT MENGHARAPKAN PEMBANGUNAN BERUPA DUICKER	LINGKUNGAN TALUMAE KELURAHAN MANISA, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	20	M2	60,000,000	Pembangunan Jembatan
355	ANDI TENRI SANGKA, SE	Masih Terdapat Sarana Distrbusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang Kurang Memadai dan Kurangnya Pemeliharaan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan Untuk Kelompok Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	10	Kelompok	-	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
356	ANDI TENRI SANGKA, SE	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian	Bantuan Pengadaan Pestisida Untuk Kelompok Perkebunan Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	25,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

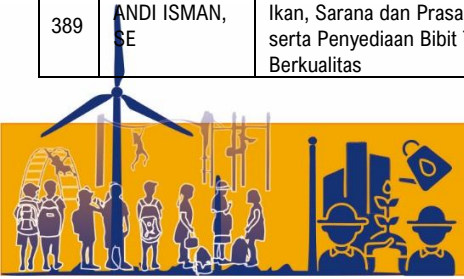
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
357	ANDI TENRI SANGKA, SE	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Bantuan Pembangunan Gedung Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Bangunan Pemerintah Lainnya Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	Kecamatan	9,600,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
358	ANDI TENRI SANGKA, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Bantuan Pengadaan Rabat Beton Atau Paving Blok di Jalan Masyarakat yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
359	ANDI TENRI SANGKA, SE	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Bantuan Bantuan Bibit Sayur/Buah, Benih Ikan atau DOC AyamKampung, Pakan Awal, dan Sarana Sederhana (Polybag,Kolam Terpal, Kandang Mini) Untuk Kelompok Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	50,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
360	ANDI TENRI SANGKA, SE	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	Bantuan Pengadaan Bibit Ternak Berkualitas Untuk Kelompok Ternak Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	5000	Ekor	275,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
361	ANDI TENRI SANGKA, SE	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantuan Pengadaan Sarana Pendukung Bagi Ibu Hamil, Baduta, dan Balita Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	90	Orang	50,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
362	ANDI TENRI SANGKA, SE	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga Untuk Atlit Daerah di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	3	Kecamatan	150,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
363	ANDI TENRI SANGKA, SE	Penguatan Program Pengendalian Penduduk dan Pencegahan Stunting Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Bantuan Gizi Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan BalitaKecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	Kecamatan	300,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
364	ANDI TENRI SANGKA, SE	Peningkatan Daya Serap Tenaga Kerja melalui Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Berkesinambungan dan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Peserta Pelatihan BLK	Bantuan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Kebutuhan Pasar Kerja Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100	Orang	20,000,000	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
365	H. ISMAIL AKSA	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	PENGADAAN MOTOR SAMPAH VIAR	Kel.Tanru Tedong, Desa Salobukkang dan Salomallori Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Unit	85,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
366	ANDI TENRI SANGKA, SE	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Untuk Kelompok Perikanan Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	45000	Ekor	67,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
367	ANDI TENRI SANGKA, SE	Peningkatan Kapasitas Pelaku Kelompok Usaha Masyarakat	Bantuan Pembinaan Kelompok Pelaku Industri Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	10	Kelompok	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
368	ANDI TENRI SANGKA, SE	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Bantuan Lampu Jalan Yang Tersebar Di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riawa dan Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	50	Lampu	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
369	ANDI TENRI SANGKA, SE	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana melalui Edukasi, Penguatan Kapasitas, dan Dukungan Sarana Tanggap Bencana	Bantuan Fasilitas Tangap Bencana yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Kecamatan	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
370	ANDI TENRI SANGKA, SE	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Bedah Rumah dan Perbaikan Pasca Bencana Untuk Kelompok Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	Rumah	250,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
371	ANDI TENRI SANGKA, SE	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Bantuan Pengadaan Alsintan Untuk Kolompok Tani Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
372	ANDI TENRI SANGKA, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Bantuan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan Yang tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2000	Meter	6,570,000,000	Pembangunan Jalan



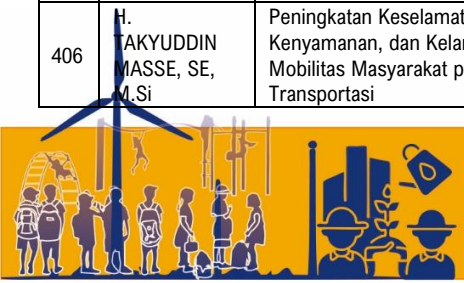
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
373	ANDI TENRI SANGKA, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Bantuan Akses Pendidikan Kesetaraan dan Non-Formal Untuk Masyarakat Kurang Mampu Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50	Orang	50,000,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
374	ANDI TENRI SANGKA, SE	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Bantuan Pembangunan Tanggul/Talud Sungai yang Rusak Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1000	Meter	150,000,000	Pembangunan Tanggul Sungai
375	ANDI TENRI SANGKA, SE	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas Kesehatan Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	3	Kecamatan	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
376	ANDI TENRI SANGKA, SE	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Untuk Masyarakat Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	5	Orang	25,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
377	ANDI TENRI SANGKA, SE	Terbatasnya SDM Kelompok Tani Komodias, sehingga dibutuhkan Pelatihan untuk Meningkatkan Kapasitas	Bantuan Pelatihan SDM Kelompok Tani Hortikultura Yang Tersebar di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa	Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riase dan Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	200,000,000	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
378	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Bantuan Peningkatan Drainase Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
379	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Bantuan Pengadaan Fasilitas Angkutan Sampah, Tempat Sampah, TPS3R, Sosialisasi Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Kecamatan	60,000,000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
380	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bantuan Sarana dan Prasarana Pemadaman Api Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	Unit	2,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
381	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha UMKM untuk Kelompok UMKM yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti, Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
382	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Pembangunan/Rehabilitasi/Penguatan Jaringan Irigasi Pertanian Untuk Peningkatan Produktifitas Di Bidang Pertanian Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti, Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	2000	Meter	1,000,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
383	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Kurangnya Teknologi Penangkapan Ikan yang Efisien	Bantuan Pengadaan Sarana Jaring, Pancing, dan Kapal Penangkap Ikan untuk Mendukung Kelompok di Sektor Perikanan Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti , Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	30	Set	15,000,000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
384	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Masih Rendahnya Parsitipatif Perangkat Organisasi BUMDes dalam Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Bantuan Pelatihan dan Pembinaan BUMDes Untuk Meningkatkan Pendapatan di Desa di Bidang UMKM Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	BUM Desa	52,500,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
385	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Masih Terdapat Sarana Distrbusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang Kurang Memadai dan Kurangnya Pemeliharaan	Bantuan Sarana dan Prasarana Pasar untuk Kelompok Masyarakat Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	10	Kelompok	-	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
386	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Masih Terdapat Warga Kurang Mampu yang Belum Terdaftar Bantuan Sosial Kesehatan dan Akses Layanan	Bantuan Pendampingan Untuk Pendaftaran BPJS Tersebar di Kecamatan Panca Rijang,Baranti, Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	20	Usulan	50,000,000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
387	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	NORMALISASI SUNGAI 3 KM TANETE-ALLAKUANG-LAUTANG BENTENG	DESA ALLAKUANG,TANETE,KEL.LAUTANG BENTENG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	3	KM	150,000,000	Normalisasi/Restorasi Sungai
388	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Penguatan Pemahaman Peraturan Daerah dan Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat	HIBAH BANTUAN MASYARAKAT (HIBAH MESJID)	KEC.MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	SEKRETARIAT DAERAH	10	MESJID	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
389	ANDI ISMAN, SE	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Bantuan pengadaan sapi	Kec. Pitu Riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10	Ekor	200,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
390	ANDI ISMAN, SE	Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Partisipasi Pemuda melalui Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Ekosistem Kreativitas Pemuda di Tingkat Lokal	Pengembangan pusat kreativitas Pemuda	Kecamatan Pitu Riawa dan pitu riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	3	Kegiatan	50,000,000	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota
391	ANDI ISMAN, SE	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Peningkatan Saluran irigasi	Kecamatan Pitu Riawa dan Pitu Riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	1	KM	500,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
392	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	PENERANGAN LAMPU JALAN	KECAMATAN MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	100	TITIK	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
393	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	PENERANGAN LAMPU JALAN	KECAMATAN PANCA RIJANG , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	100	TITIK	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
394	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian	Bantuan Pengadaan Pestisida untuk Kelompok Tani Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	25,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
395	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Partisipasi Pemuda melalui Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Ekosistem Kreativitas Pemuda di Tingkat Lokal	PENGEMBANGAN PUSAT KREATIVITAS PEMUDA	KEC. PANCA RIJANG, DAN BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	5	KELOMPOK	50,000,000	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota
396	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Bangunan Pemerintah Lainnya Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti, Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	Kecamatan	9,600,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
397	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	BANTUAN SARAN DAN PRASARANA OLAHRAGA	KEC. PANCA RIJANG DAN BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	2	KELOMPOK	100,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
398	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Bantuan Pembangunan Rabat Beton dan Paving Blok di Jalan Lingkungan yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
399	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Bantuan Bibit Sayur/Buah, Benih Ikan atau DOC Ayam Kampung, Pakan Awal, dan Sarana Sederhana (Polybag, Kolam Terpal, Kandang Mini) yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5000	Bibit	250,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
400	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Penguatan Pemahaman Peraturan Daerah dan Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat	Hibah bantuan masyarakat (Bantuan Masjid)	Kec. Panca Rijang, Baranti, Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	SEKRETARIAT DAERAH	10	Masjid	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
401	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	Bantuan Pengadaan Vaksin Untuk Kelompok Ternak yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10	Kelompok	30,000,000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
402	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantuan Pengadaan Sarana Pendukung Bagi Ibu Hamil, Baduta, dan Balita Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	KECAMATAN	80,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
403	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Untuk Mengembangkan Keahlian Masyarakat di Bidang Olahraga Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	3	Kecamatan	150,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
404	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Penguatan Program Pengendalian Penduduk dan Pencegahan Stunting Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Bantuan Pengadaan Sarana Pemenuhan Gizi Untuk Cegah Stunting Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	KECAMATAN	50,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
405	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Untuk Kelompok Perikanan Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	4500	Ekor	67,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
406	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Bantuan Pengadaan Lampu Jalan yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	50	Lampu	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota



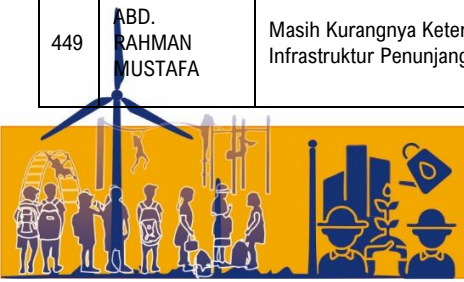
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
407	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana melalui Edukasi, Penguatan Kapasitas, dan Dukungan Sarana Tanggap Bencana	Bantuan Pengadaan Fasilitas Tangap Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Kecamatan	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
408	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Bedah Rumah Untuk Anggota Keluarga Yang Kurang Mampu, Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	Rumah	250,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
409	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Bantuan Pengadaan Alsintan Untuk Kelompok Tani Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
410	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Bantuan Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	3,285,000,000	Pembangunan Jalan
411	H. ISMAIL AKSA	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	PENGADAAN MOTIR SAMPAH VIAR	Desa Kalosi Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Unit	85,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
412	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Embung Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	3	Kecamatan	150,000,000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
413	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas Kesehatan Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca RIjang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	3	Kecamatan	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
414	H. TAKYUDDIN MASSE, SE, M.Si	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Untuk Anggota Keluarga Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca RIjang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	5	Orang	25,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
415	H. BAHRUL APPAS, SP	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Bantuan Pembangunan Peningkatan Kualitas Drainase Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
416	H. BAHRUL APPAS, SP	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengakutan Sampah Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti, Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Kecamatan	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
417	H. BAHRUL APPAS, SP	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Api Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	Unit	2,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
418	H. BAHRUL APPAS, SP	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha UMKM Untuk Kelompok UMKM Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
419	H. BAHRUL APPAS, SP	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Pertanian Untuk Meningkatkan Produktifitas di Sektor Pertanian Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5000	Meter	2,500,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
420	H. BAHRUL APPAS, SP	Masih Rendahnya Parsitipatif Perangkat Organisasi BUMDes dalam Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Bantuan Pelatihan dan Pembinaan BUMDes Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	BUM Desa	52,500,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
421	H. BAHRUL APPAS, SP	Masih Terdapat Sarana Distrbusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang Kurang Memadai dan Kurangnya Pemeliharaan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Agar Distribusi Perdagangan Merata Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	3	Kecamatan	-	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
422	H. BAHRUL APPAS, SP	Masih Terdapat Warga Kurang Mampu yang Belum Terdaftar Bantuan Sosial Kesehatan dan Akses Layanan	Bantuan Pendampingan Bimbingan PPKS Untuk Kelompok Masyarakat Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	2	Orang	6,250,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
423	H. BAHRUL APPAS, SP	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian	Bantuan Pengadaan Pestisida Untuk Penyemprotan/Pengendalian Hama dan Penyakit pada Komoditas Hortikultura Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	25,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
424	H. BAHRUL APPAS, SP	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Bantuan Pembangunan Gedung Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Bangunan Pemerintah Lainnya Untuk Mempermudah Kebutuhan Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	Kecamatan	9,600,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
425	H. BAHRUL APPAS, SP	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Bantuan Pembangunan Rabat Beton dan Paving Blok Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
426	H. BAHRUL APPAS, SP	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Bantuan Pengadaan Bantuan Bibit Sayur/Buah, Benih Ikan atau DOC Ayam Kampung, Pakan Awal, dan Sarana Sederhana (Polybag, Kolam Terpal, Kandang Mini) Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5000	Bibit	250,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
427	H. BAHRUL APPAS, SP	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	Bantuan Pengadaan Vaksin, desinfektan Untuk Kelompok Ternak Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10	Kelompok	30,000,000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
428	H. BAHRUL APPAS, SP	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantuan Pengadaan Sarana Pendukung Bagi Ibu Hamil, Baduta, dan Balita Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	KECAMATAN	80,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
429	H. BAHRUL APPAS, SP	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk Mengembangkan Minat Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	3	Kecamatan	150,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
430	H. BAHRUL APPAS, SP	Penguatan Program Pengendalian Penduduk dan Pencegahan Stunting Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Bantuan Pengadaan Pemenuhan Gizi Untuk Cegah Stunting Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Yang Tersebar di Kecamatan Panca RIjang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	KECAMATAN	50,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
431	H. BAHRUL APPAS, SP	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Bantuan Bibit Ikan Untuk Kelompok Budidaya Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	45000	ekor	67,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
432	H. BAHRUL APPAS, SP	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Bantuan Pengadaan Lampu Jalan Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	150	Lampu	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
433	H. BAHRUL APPAS, SP	Peningkatan Layanan Penempatan Tenaga Kerja melalui Penguatan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Penyelenggaraan Job Fair	Penyelenggaraan Job Fair dan Bursa Kerja Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	Kecamatan	20,000,000	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
434	H. BAHRUL APPAS, SP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Bedah Rumah Untuk Kelompok Masyarakat Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti Dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	Rumah	250,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
435	H. BAHRUL APPAS, SP	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Bantuan Pengadaan Alsintan Untuk Kelompok Tani Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	350,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
436	H. BAHRUL APPAS, SP	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Bantuan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan, dan Duicker Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	3,285,000,000	Pembangunan Jalan
437	H. BAHRUL APPAS, SP	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas Kesehatan Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	3	Kecamatan	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
438	H. BAHRUL APPAS, SP	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Instalasi Listrik Untuk Kelompok Masyarakat Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	10	Orang	50,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
439	H. BAHRUL APPAS, SP	Terbatasnya SDM Kelompok Tani Komodias, sehingga dibutuhkan Pelatihan untuk Meningkatkan Kapasitas	Bantuan Pelatihan SDM Kelompok Tani Hortikultura Yang Tersebar di Kecamatan Panca RIjang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	200,000,000	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
440	SUDARMIN, SH	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	MASYARAKAT MEMBUTUHKAN PENGADAAN srana dan prasarana bagi pelaku umkm berupa kursi dan tenda	TERSEBAR DI KECAMATAN WATANG PULU,PANCA LAUTANG DAN TELLU LIMPOE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6	KELOMPOK	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
441	H. RUSMAN, SH	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	MASYARAKAT MEMBUTUHKAN PEMBANGUNAN BERUPA DUICKER DAN TALUD	DI DUSUN 4 DESA KALOSI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	m	865,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
442	H. RUSMAN, SH	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	MASYARAKAT MENGHARAPKAN PEMBANGUNAN JALAN TANI	DI DUSUN 4 KALOSI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	1	KM	200,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
443	HABIBI SYAMSUDDIN , SE	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	MASYARAKAT MEBUTUHKAN BANTUAN PENGADAAN ALAT TATA BOGA BAGI PELAKU UMKM	TERSEBAR DI KECAMATAN MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	KELOMPOK	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
444	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Bantuan Peningkatan Kualitas Drainase Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
445	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Bantuan Fasilitas Angkutan Sampah, Tempat Sampah, TPS3R, Sosialisasi Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Kecamatan	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
446	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Api Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	Unit	2,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
447	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha UMKM Untuk Kelompok UMKM Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
448	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Kurangnya Akses Informasi Terkait Penyuluhan dan Perizinan Kegiatan Peternakan dan Perikanan	Bantuan Pendampingan Penatausahaan Perizinan Untuk Kelompok Ternak dan Perikanan Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	20	Kelompok	50,000,000	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa
449	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi/Penguatan Jaringan Irigasi Pertanian Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca RIjang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	1000	Meter	500,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
450	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Masih Rendahnya Parsitipatif Perangkat Organisasi BUMDes dalam Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Bantuan Pelatihan dan Pembinaan BUMDes Untuk Kelompok UMKM yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	BUM Desa	52,500,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
451	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Masih Terdapat Sarana Distrbusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang Kurang Memadai dan Kurangnya Pemeliharaan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Yang Tersebar di Kecamatan Panca RIjang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	3	Kecamatan	-	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
452	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Masih Terdapat Warga Kurang Mampu yang Belum Terdaftar Bantuan Sosial Kesehatan dan Akses Layanan	Bantuan Bimbingan PPKS Kurang Mampu Untuk Anggota Keluarga Yang Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	1	Orang	3,125,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
453	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian	Bantuan Pengadaan Pestisida Untuk Kelompok Tani Dalam Mengatasi Hama dan Penyakit pada Komoditas Hortikultura Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	25,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
454	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Bantuan Pembangunan Gedung Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Bangunan Pemerintah Lainnya Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	Kecamatan	9,600,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
455	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Bantuan Rabat Beton dan Paving Block Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
456	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Bantuan Bibit Sayur/Buah, Benih Ikan atau DOC AyamKampung, Pakan Awal, dan Sarana Sederhana (Polybag,Kolam Terpal, Kandang Mini) Untuk Kelompok Ternak Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	100,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
457	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	Bantuan Pengadaan Vaksin Untuk Kelompok Ternak Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10	Kelompok	30,000,000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
458	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantuan Sarana Pendukung Bagi Ibu Hamil, Baduta, dan Balita Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	KECAMATAN	80,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
459	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Untuk Kelompo Perikanan Yang Tersebar di Kecamatan Panca RIjang, Baranti dan Kulo	Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	45000	Ekor	67,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
460	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Bantuan Pengadaan Lampu Jalan Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	50	Kecamatan	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
461	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana melalui Edukasi, Penguatan Kapasitas, dan Dukungan Sarana Tanggap Bencana	Bantuan Fasilitas Tangap Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Kecamatan	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
462	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Bedah Rumah dan Perbaikan Pasca Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	Rumah	125,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
463	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Bantuan Pengadaan Alsintan Untuk Kelompok Tani Yang Tersebar Di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
464	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Bantuan Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan, dan Duicker Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti, dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	3,825,000,000	Pembangunan Jalan
465	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Embung Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	3	Kecamatan	150,000,000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
466	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas Kesehatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	3	Kecamatan	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
467	ABD. RAHMAN MUSTAFA	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Untuk Kelompok Masyarakat Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	5	Orang	100,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
468	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Bantuan Pembangunan untuk Meningkatkan Kualitas Drainase Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
469	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Bantuan Fasilitas Angkutan Sampah, Tempat Sampah, TPS3R, Sosialisasi Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Kecamatan	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
470	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Api Yang Tersebar di Kecamatan Panca RIjang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	Unit	2,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
471	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha UMKM Untuk Kelompok UMKM yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti, dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
472	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi/Penguatan Jaringan Irigasi Pertanian Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	1000	Meter	500,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
473	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Masih Rendahnya Parsitipatif Perangkat Organisasi BUMDes dalam Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Bantuan Pelatihan dan Pembinaan BUMDes Untuk Kelompok UMKM Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14	BUM Desa	52,500,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
474	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Masih Terdapat Warga Kurang Mampu yang Belum Terdaftar Bantuan Sosial Kesehatan dan Akses Layanan	Bantuan Bimbingan PPKS untuk Masyarakat Kurang Mampu yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	2	Orang	6,250,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
475	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian	Bantuan Pengadaan Pestisida Untuk Pengendalian Hama dan Penyakit pada Komoditas Hortikultura pada Kelompok Tani Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	25,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
476	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Bantuan Pembangunan Gedung Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Bangunan Pemerintah Lainnya Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	Kecamatan	9,600,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
477	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Bantuan Pembangunan Rabat Beton dan Paving Block Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
478	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Bantuan Bantuan Bibit Sayur/Buah, Benih Ikan atau DOC Ayam Kampung, Pakan Awal, dan Sarana Sederhana (Polybag, Kolam Terpal, Kandang Mini) Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5000	Menit	250,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
479	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	Bantuan Pengadaan Vaksin Untuk Kelompok Ternak Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10	Kelompok	30,000,000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
480	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantuan Sarana Pendukung Bagi Ibu Hamil, Baduta, dan Balita Untuk Pemenuhan Gizi Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	KECAMATAN	250,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
481	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Untuk Mengembangkan Minat Masyarakat yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	2	Kecamatan	100,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
482	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Penguatan Program Pengendalian Penduduk dan Pencegahan Stunting Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Bantuan Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Untuk Untuk Mendukung Pemenuhan Gizi Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	KECAMATAN	300,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
483	H. BAHRUL APPAS, SP	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	pembangunan talud drainase	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	km	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
484	H. BAHRUL APPAS, SP	Perlu Penyediaan Sarana Jaringan Air Minum Perpipaan	bantuan perpipaan air bersih untuk masyarakat	Kecamatan Kulo Desa mario, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	km	725,000,000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
485	H. BAHRUL APPAS, SP	Masih Terdapat Sarana Distrbusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang Kurang Memadai dan Kurangnya Pemeliharaan	bantuan perbaikan lapak pasar	kecamatan Kulo, Panca Rijang dan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	50	unit	-	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
486	H. BAHRUL APPAS, SP	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	bantuan ternak unggas untuk masyarakat	kecamatan kulo, panca rijang dan baranti, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	5000	ekor	275,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
487	H. BAHRUL APPAS, SP	Kurangnya Akses Informasi Terkait Penyuluhan dan Perizinan Kegiatan Peternakan dan Perikanan	sosialisasi perda peternakan dan kesehatan ayam	kecamatan kulo, panca rijang dan baranti, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	20	orang	50,000,000	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa
488	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Untuk Kelompok Perikanan Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	45000	Ekor	67,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
489	H. BAHRUL APPAS, SP	Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Taman Makam Pahlawan	perbaikan taman makam pahlawan mario	Kecamatan Kulo Desa Mario, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	1	Unit	150,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
490	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Bantuan Pengadaan Lampu Jalan Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca RIjang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	50	Lampu	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
491	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana melalui Edukasi, Penguatan Kapasitas, dan Dukungan Sarana Tanggap Bencana	Bantuan Pengadaan Fasilitas Tangap Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Kecamatan	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
492	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Pengadaan Bedah Rumah dan Perbaikan Pasca Bencana Yang Tersebar di Kecamtan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	Rumah	125,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
493	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Bantuan Pengadaan Alsintan untuk Kelompok Tani Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
494	H. BAHRUL APPAS, SP	Peningkatan Daya Tarik, Kenyamanan, dan Aksesibilitas Destinasi Wisata Potensial	Bantuan Fasilitas Destinasi Wisata	tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	KEGIATAN	50,000,000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
495	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Bantuan Pembangunan Untuk Meningkatkan Kualitas Jalan, Jembatan, dan Duicker Yang Tersebar di Kecamatan Panca RIjang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	3,285,000,000	Pembangunan Jalan
496	H. BAHRUL APPAS, SP	Peningkatan Kapasitas Pelaku Kelompok Usaha Masyarakat	seminar peningkatan kapasitas pelaku usaha	Kecamatan Kulo, Baranti dan Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	set	20,000,000	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM
497	H. BAHRUL APPAS, SP	Perlunya Penguatan Kelembagaan Koperasi Merah Putih melalui Rebranding, Pemenuhan Legalitas dan Akreditasi, serta Penerapan Sistem Administrasi Modern	pelatihan peningkatan kapasitas para pengelolah koperasi Merah Putih	Kecamatan Kulo, Baranti dan Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	23	unit	20,000,000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
498	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Embung Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	3	Kecamatan	150,000,000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
499	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas Kesehatan Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	3	Kecamatan	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
500	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Pemesangan Instalasi Listrik Untuk Masyarakat Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	5	Orang	25,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
501	SAENAL ROSI, S.I.Pust.	Terbatasnya SDM Kelompok Tani Komodias, sehingga dibutuhkan Pelatihan untuk Meningkatkan Kapasitas	Bantuan Pelatihan SDM Kelompok Tani Padi Yang Tersebar di Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo	Kecamatan Panca Rijang, Baranti dan Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	200,000,000	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
502	H. BAHRUL APPAS, SP	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	bantuan alat olah raga kepada kelompok pemuda	Kecamatan Kulo, Panca Rijang dan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	5	UNIT	50,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
503	H. BAHRUL APPAS, SP	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	bantuan boot kontainer/ kios jualan kepada kelompok umkm	Kecamatan Kulo, Panca Rijang dan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	15	unit	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
504	H. BAHRUL APPAS, SP	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	pengadaan bantuan alat tata Boga, menjahit, pertukangan dan perbengkelan kepada kelompok umkm	Kecamatan Kulo, Panca Rijang dan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	50	unit	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
505	H. BAHRUL APPAS, SP	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	bantuan Baesiswa bagi anak sekolah yang kurang mampu	Kecamatan Kulo, Panca Rijang dan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	150	orang	150,000,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
506	H. BAHRUL APPAS, SP	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Pengadaan Bantuan Motor Tiga Roda Untuk Pengankutan Sampah	Kecamatan Panca Rijang, Kulo dan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	15	unit	85,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
507	H. BAHRUL APPAS, SP	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Modal Usaha bagi Kelompok UMKM	Kecamatan Kulo, Panca rijang dan Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	27	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
508	H. FAISAL	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Bantuan Peningkatan Kualitas Drainase, Pembangunan Talud Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Panca Lautang	Kecamatan Maritengngae dan Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
509	H. FAISAL	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Angkutan Sampah Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	Kecamatan	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
510	H. FAISAL	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Api Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	Unit	2,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
511	H. FAISAL	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha UMKM Untuk Kelompok UMKM Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
512	H. FAISAL	Kurangnya Teknologi Penangkapan Ikan yang Efisien	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana jaring, Pancing, dan Kapal Penangkap Ikan Untuk Kelompok Perikanan yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	30	Set	15,000,000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
513	H. FAISAL	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi/Penguatan Jaringan IrigasiPertanian Untuk Meningkatkan Produktifitas di Sektor Pertanian Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	1000	Meter	500,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
514	H. FAISAL	Masih Rendahnya Parsitipatif Perangkat Organisasi BUMDes dalam Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Bantuan Pelatihan Untuk Kelompok UMKM di BUMDes Yang Tersebar di Kecamtan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	BUM Desa	150,000,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
515	H. FAISAL	Masih Terdapat Warga Kurang Mampu yang Belum Terdaftar Bantuan Sosial Kesehatan dan Akses Layanan	Bantuan Bimbingan PPKS Kurang Mampu Untuk Kelompok Masyarakat Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	2	Orang	6,250,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
516	H. FAISAL	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian	Bantuan Pengadaan Pestisida Kepada Kelompok Tani Untuk Mengatasi Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	25,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

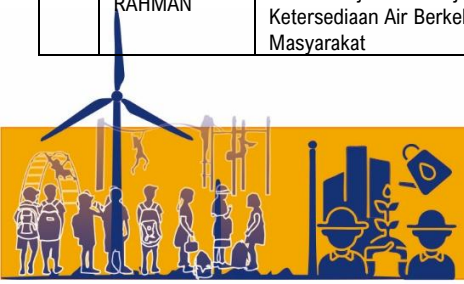
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
517	H. FAISAL	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Bantuan Pembangunan Gedung Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Bangunan Pemerintah Lainnya Untuk Agar Pelyanan Publik Merata Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	Kecamatan	6,400,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
518	H. FAISAL	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Bantuan Rabat Beton dan Paving Block, Pengadaan Timbunan Untuk Jalan Lingkungan Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
519	H. FAISAL	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Bantuan Pengadaan Bibit Sayur/Buah, Benih Ikan atau DOC Ayam Kampung, Pakan Awal, dan Sarana Sederhana (Polybag, Kolam Terpal, Kandang Mini) Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5000	Bibit	250,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
520	H. FAISAL	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	Bantuan Pengadaan Vaksinasi pada Ternak Untuk Kelompok Ternak Yang Tersebar di Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10	Kelompok	10,000,000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
521	H. FAISAL	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantuan Pengadaan Sarana Pendukung Bagi Ibu Hamil, Baduta, dan Balita Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	KECAMATAN	80,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
522	H. FAISAL	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk Mengembangkan Minat Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	2	Kecamatan	50,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
523	H. FAISAL	Penguatan Program Pengendalian Penduduk dan Pencegahan Stunting Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Bantuan Pengadaan Untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2	KECAMATAN	300,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
524	H. FAISAL	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Untuk Kelompok Budidaya Ikan yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	30000	Ekor	45,000,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
525	H. FAISAL	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Bantuan Pengadaan Lampu Jalan Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Kecamatan	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
526	H. FAISAL	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana melalui Edukasi, Penguatan Kapasitas, dan Dukungan Sarana Tanggap Bencana	Bantuan Pengadaan Fasilitas Tangap Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Kecamatan	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
527	H. FAISAL	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Bedah Rumah dan Perbaikan Pasca Bencana Untuk Masyarakat Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	Kecamatan	1,250,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
528	H. FAISAL	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Bantuan Pengadaan Alsintan Untuk Kelompok Tani Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
529	H. FAISAL	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Bantuan Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan, dan Duicker Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2000	Meter	6,570,000,000	Pembangunan Jalan
530	H. FAISAL	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Embung Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	2	Kecamatan	150,000,000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
531	H. FAISAL	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas Kesehatan Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	2	Kecamatan	100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
532	H. FAISAL	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Pengadaan Pemasangan Instalasi Listrik Untuk Masyarakat Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maringtengae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	5	Orang	25,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
533	H. FAISAL	Terbatasnya SDM Kelompok Tani Komodias, sehingga dibutuhkan Pelatihan untuk Meningkatkan Kapasitas	Bantuan Pelatihan SDM Kelompok Tani Hortikultura Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	20,000,000	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
534	H. ABDUL RAHMAN	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Bantuan Peningkatan Kualitas Drainase, Pembangunan Talud Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
535	H. ABDUL RAHMAN	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Bantuan Fasilitas Angkutan Sampah, Tempat Sampah, TPS3R, Sosialisasi Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	Kecamatan	50,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
536	H. ABDUL RAHMAN	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bantuan Sarana dan Prasarana Pemadaman Api Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	Unit	2,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
537	H. ABDUL RAHMAN	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha UMKM Untuk Kelompok UMKM Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
538	H. ABDUL RAHMAN	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi/Penguatan Jaringan Irigasi Pertanian untuk Meningkatkan Produktifitas di Sektor Pertanian Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	2000	Meter	1,000,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
539	H. ABDUL RAHMAN	Kurangnya Teknologi Penangkapan Ikan yang Efisien	Bantuan Sarana Jaring, Pancing, dan Kapal Penangkap Ikan Untuk Kelompok Perikanan yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	30	Set	15,000,000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
540	H. ABDUL RAHMAN	Masih Rendahnya Parsitipatif Perangkat Organisasi BUMDes dalam Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Bantuan Pelatihan dan Pembinaan BUMDes untuk Kelompok UMKM yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	BUM Desa	150,000,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
541	H. ABDUL RAHMAN	Masih Terdapat Warga Kurang Mampu yang Belum Terdaftar Bantuan Sosial Kesehatan dan Akses Layanan	Bantuan Bimbingan PPKS Kurang Mampu Untuk Masyarakat Kurang Mampu yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	2	Orang	6,250,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
542	H. ABDUL RAHMAN	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian	Bantuan Pengadaan Pestisida dalam Menangani Pengendalian Hama dan Penyakit pada Komoditas Perkebunan untuk Kelompok Tani yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	25,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
543	H. ABDUL RAHMAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Bantuan Pembangunan Gedung Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Bangunan Pemerintah Lainnya untuk Meningkatkan Layanan Publik Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	Kecamatan	6,400,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
544	H. ABDUL RAHMAN	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Bantuan Pembangunan Rabat Beton dan Paving Block, Pengadaan Timbunan Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	Kecamatan	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
545	H. ABDUL RAHMAN	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Bantuan Pengadaan Bibit Sayur/Buah, Benih Ikan atau DOC Ayam Kampung, Pakan Awal, dan Sarana Sederhana (Polybag, Kolam Terpal, Kandang Mini) Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5000	Bibit	250,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
546	H. ABDUL RAHMAN	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	Bantuan Pengadaan Vaksin Untuk Kelompok Ternak Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10	Kelompok	20,000,000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
547	H. ABDUL RAHMAN	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantuan Pengadaan Sarana Pendukung Bagi Ibu Hamil, Baduta, dan Balita Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2	KECAMATAN	80,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
548	H. ABDUL RAHMAN	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Untuk Kelompok Budidaya Ikan Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	45000	Ekor	67,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
549	H. ABDUL RAHMAN	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Bantuan Pengadaan Penerangan Lampu Jalan Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	50	Lampu	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
550	H. ABDUL RAHMAN	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Bantuan Pengadaan Alsintan Untuk Kelompok Tani Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
551	H. ABDUL RAHMAN	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana melalui Edukasi, Penguatan Kapasitas, dan Dukungan Sarana Tanggap Bencana	Bantuan Pengadaan Fasilitas Tangap Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Kecamatan	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
552	H. ABDUL RAHMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Bedah Rumah dan Perbaikan Pasca Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	Rumah	125,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
553	H. ABDUL RAHMAN	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Bantuan Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan, dan Duicker Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2000	Meter	6,570,000,000	Pembangunan Jalan
554	H. ABDUL RAHMAN	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Embung Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	2	Kecamatan	150,000,000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
555	H. ABDUL RAHMAN	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas Kesehatan Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	2	Kecamatan	100,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
556	H. ABDUL RAHMAN	Terbatasnya SDM Kelompok Tani Komodias, sehingga dibutuhkan Pelatihan untuk Meningkatkan Kapasitas	Bantuan Pelatihan SDM Kelompok Tani Padi Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	20,000,000	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
557	H. RUSLAN, SH, M.AP	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Bantuan Peningkatan Kualitas Drainase, Pembangunan Talud Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
558	H. RUSLAN, SH, M.AP	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Bantuan Pengadaan Fasilitas Armada Sampah Angkutan Sampah, Tempat Sampah, TPS3R, Sosialisasi Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Armada	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
559	H. RUSLAN, SH, M.AP	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Api Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	Unit	2,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
560	H. RUSLAN, SH, M.AP	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha UMKM Untuk Kelompok UMKM yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
561	H. RUSLAN, SH, M.AP	Kurangnya Teknologi Penangkapan Ikan yang Efisien	Bantuan Pengadaan Sarana untuk Kelompok Perikanan Jaring, Pancing, dan Kapal Penangkap Ikan Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	30	Set	67,500,000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
562	H. RUSLAN, SH, M.AP	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi/Penguatan Jaringan Irigasi Pertanian Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	2000	Meter	1,000,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
563	H. RUSLAN, SH, M.AP	Masih Rendahnya Parsitipatif Perangkat Organisasi BUMDes dalam Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Bantuan Pelatihan dan Pembinaan BUMDes Untuk Kelompok UMKM Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15	BUM Desa	112,500,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
564	H. RUSLAN, SH, M.AP	Masih Terdapat Sarana Distrbusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang Kurang Memadai dan Kurangnya Pemeliharaan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Untuk Kelompok UMKM Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
565	H. RUSLAN, SH, M.AP	Masih Terdapat Warga Kurang Mampu yang Belum Terdaftar Bantuan Sosial Kesehatan dan Akses Layanan	Bantuan Bimbingan PPKS Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	2	Orang	6,250,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
566	H. RUSLAN, SH, M.AP	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian	Bantuan Pengadaan Pestisida Untuk Kelompok Tani dalam Menanggulangi Hama dan Penyakit pada Komoditas Hortikultura Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	25,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
567	H. RUSLAN, SH, M.AP	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Bantuan Pembangunan Gedung Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Bangunan Pemerintah Lainnya Untuk Menigkatkan Pelayanan Publik Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	Kecamatan	9,600,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
568	H. RUSLAN, SH, M.AP	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Bantuan Pembangunan Rabat Beton dan Paving Block yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2000	Meter	3,280,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
569	H. RUSLAN, SH, M.AP	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Bantuan Pengadaan Bibit Sayur/Buah, Benih Ikan atau DOC Ayam Kampung, Pakan Awal, dan Sarana Sederhana (Polybag, Kolam Terpal, Kandang Mini) Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5000	Bibit	250,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
570	H. RUSLAN, SH, M.AP	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	Bantuan Pengadaan Vaksin Untuk Kelompok Ternak yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10	Kelompok	30,000,000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
571	H. RUSLAN, SH, M.AP	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantuan Sarana Pendukung Bagi Ibu Hamil, Baduta, dan Balita Untuk Pemenuhan Gizi Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	KECAMATAN	250,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
572	H. RUSLAN, SH, M.AP	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk Mengembangkan Minat Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	3	Kecamatan	150,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
573	H. RUSLAN, SH, M.AP	Penguatan Program Pengendalian Penduduk dan Pencegahan Stunting Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Bantuan Pengadaan Kebutuhan Gizi Cegah Stunting Yang Tersebar di Kecamatan Watang Sidenreng, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Sidenreng, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	KECAMATAN	300,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
574	H. RUSLAN, SH, M.AP	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan untuk Kelompok Budidaya Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	45000	Ekor	67,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
575	H. RUSLAN, SH, M.AP	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Bantuan Pengadaan Lampu Jalan Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	50	Lampu	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
576	H. RUSLAN, SH, M.AP	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana melalui Edukasi, Penguatan Kapasitas, dan Dukungan Sarana Tanggap Bencana	Bantuan Pengadaan Fasilitas Tangap Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Kecamatan	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
577	H. RUSLAN, SH, M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Bedah Rumah dan Perbaikan Pasca Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu , Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu , Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	Rumah	125,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
578	H. RUSLAN, SH, M.AP	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Bantuan Pengadaan Alsintan Untuk Kelompok Tani Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
579	H. RUSLAN, SH, M.AP	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Bantuan Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan, dan Duicker Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2000	Meter	6,570,000,000	Pembangunan Jalan
580	H. RUSLAN, SH, M.AP	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Embung Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	3	Kecamatan	150,000,000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
581	H. RUSLAN, SH, M.AP	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas Kesehatan Untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	3	Kecamatan	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
582	H. RUSLAN, SH, M.AP	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Pengadaan Instalasi Listrik Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	5	Orang	25,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
583	H. RUSLAN, SH, M.AP	Terbatasnya SDM Kelompok Tani Komodias, sehingga dibutuhkan Pelatihan untuk Meningkatkan Kapasitas	Bantuan Pelatihan SDM Kelompok Tani Perkebunan Yang Tersebar di Kecamatan Watang Sidenreng, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Sidenreng, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	200,000,000	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
584	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	PERLUNYA PEMBANGUNAN TALUD	DESA BULO, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	800,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
585	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	BEDAH RUMAH UNTUK MASYARAKAT	KEC.PANCA RIJANG,BARANTI,KULO, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	20	UNIT	500,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

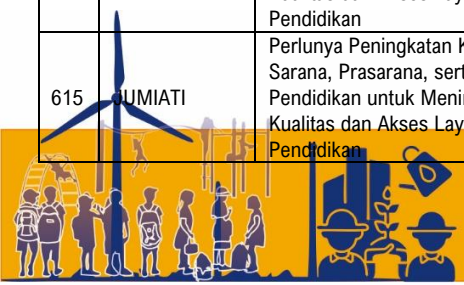
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
586	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Bantuan Pembangunan Peningkatan Kualitas Drainase Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
587	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Bantuan Pengadaan Fasilitas Angkutan Sampah, Tempat Sampah, TPS3R, Sosialisasi yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Kecamatan	60,000,000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
588	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Api yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe , Kab. Sidenreng Rappang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	Unit	2,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
589	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Pengadaan Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha UMKM Untuk Kelompok UMKM yang tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
590	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Kurangnya Teknologi Penangkapan Ikan yang Efisien	Bantuan Sarana Jaring, Pancing, dan Kapal Penangkap Ikan Untuk Kelompok Perikanan Yang Tersebar Di kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	30	Set	30,000,000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
591	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi/Penguatan Jaringan Irigasi Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi di Sektor Pertanian yang tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	2000	Meter	1,000,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
592	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Masih Terdapat Warga Kurang Mampu yang Belum Terdaftar Bantuan Sosial Kesehatan dan Akses Layanan	Bantuan Pendampingan Bimbingan PPKS Kurang Mampu untuk Masyarakat Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	1	Orang	3,125,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
593	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian	Bantuan Pengadaan Pestisida Untuk Kelompok Tani dalam mengendalikan Hama dan Penyakit pada Komoditas Hortikultura Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	25,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
594	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Bantuan Pembangunan Gedung Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Bangunan Pemerintah Lainnya untuk Meningkatkan Pelayanan Publik yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	Kecamatan	9,600,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
595	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Bantuan Pembangunan Rabat Beton dan Paving Block, Pengadaan Timbunan Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2000	Meter	3,280,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
596	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Bantuan Pengadaan Bantuan Bibit Sayur/Buah, Benih Ikan atau DOC Ayam Kampung, Pakan Awal, dan Sarana Sederhana (Polybag, Kolam Terpal, Kandang Mini) Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpo	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5000	Bibit	250,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
597	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	Bantuan Pengadaan Vaksin Untuk Kelompok Ternak Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10	Kelompok	30,000,000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
598	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantuan Pengadaan Pangan Untuk Pemenuhan Gizi Sarana Pendukung Bagi Ibu Hamil, Baduta, dan Balita Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	KECAMATAN	300,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
599	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Untuk Mengembangkan Minat Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpo	Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	3	Kecamatan	150,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
600	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Penguatan Program Pengendalian Penduduk dan Pencegahan Stunting Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Bantuan Pengadaan Pangan Untuk Pemenuhan Gizi dan Cegah Stunting Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	KECAMATAN	300,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
601	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Untuk Kelompok Budidaya Yang Tersebar di Kecamatan watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	45000	Ekor	67,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
602	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Bantuan Pengadaan Lampu Jalan Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	50	Lampu	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
603	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana melalui Edukasi, Penguatan Kapasitas, dan Dukungan Sarana Tanggap Bencana	Bantuan Pengadaan Fasilitas Tangap Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Kecamatan	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
604	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Bedah Rumah dan Perbaikan Pasca Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	Rumah	125,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
605	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Bantuan Pengadaan Alsintan Untuk Kelompok Tani Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
606	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Bantuan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan, dan Duicker Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Sidenreng, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2000	Meter	6,570,000,000	Pembangunan Jalan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
607	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Embung Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	3	Kecamatan	150,000,000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
608	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas Kesehatan Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	3	Kecamatan	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
609	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Pengadaan Instalasi Listrik Untuk Masyarakat Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Watang Sidenreng, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	5	Orang	25,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
610	ALIF ZULKARNAEN HUSAIN	Terbatasnya SDM Kelompok Tani Komodias, sehingga dibutuhkan Pelatihan untuk Meningkatkan Kapasitas	Bantuan Pelatihan SDM Kelompok Tani Hortikultura Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	200,000,000	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
611	JUMIATI	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Karena melihat kondisi TK PGRI yang belum memilki pagar yang memadai	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100	Meter	250,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
612	JUMIATI	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Karena kondisi jembatan yang sudah rusak akibat longsor	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	50	Meter	3,000,000,000	Pembangunan Jembatan
613	JUMIATI	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Karena sekolah PAUD tersebut belum memilki pagar	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80	Meter	160,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
614	JUMIATI	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Karena melihat kondisi Sekolah SD 1 Kulo yang belum di lakukan perbaikan lapangan upacara	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	79	M2	25,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
615	JUMIATI	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Karena kondisi pagar sekolah SD 2 Kulo sudah rusak dan memerlukan perbaikan	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	105	Meter	150,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

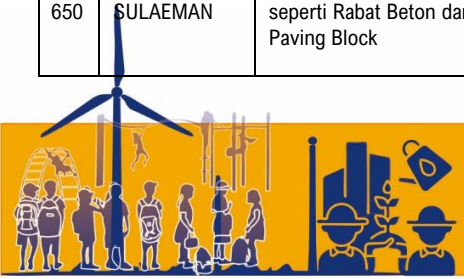


No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
616	JUMIATI	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	karena melihat kondisi grup drum band SD 1 Kulo belum memilki baju seragam drum band	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	Set	50,000,000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
617	JUMIATI	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Karena melihat kondisi pagar sekolah SD 8 Kulo sudah rusak	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	110	Meter	100,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
618	JUMIATI	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Karena masih banyak jalan di Kec Kulo yang belum memilki lampu jalan	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	50	Titik	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
619	MUH. ALBAR	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana usaha UMKM (Pengadaan Alat Tataboga)	Kec. tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
620	MUH. ALBAR	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana usaha UMKM (Pengadaan alat Kecantikan)	kec. tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
621	MUH. ALBAR	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana usaha UMKM (Pengadaan Kompor Seribu mata)	kec. tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
622	MUH. ALBAR	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana usaha UMKM (Bantuan Alat pertukangan Kayu/Batu)	kec.tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
623	MUH. ALBAR	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana usaha UMKM (Pengadaan alat pengrajin Pandai Besi)	kec. tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
624	MUH. ALBAR	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana usaha UMKM (Pengadaan Mesin Jahit)	Kec. tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
625	MUH. ALBAR	Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Partisipasi Pemuda melalui Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Ekosistem Kreativitas Pemuda di Tingkat Lokal	Pengembangan pusat kreativitas pemuda (sosialisasi kepemudaan)	kecamatan tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	4	kegiatan	50,000,000	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota
626	MUH. ALBAR	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Rabat Beton	Kec. Tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	KM	8,200,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
627	MUH. ALBAR	Kurangnya Teknologi Penangkapan Ikan yang Efisien	Pengadaan perahu Nelayan dan peralatan nelayan	kec. tellu limpoe dan panca lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1	Unit	22,378,000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
628	MUH. ALBAR	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Turnamen Sepak Bola Mini / Futsal	kec. tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	3	kegiatan	50,000,000	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
629	MUH. ALBAR	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Bantuan sarana dan prasarana olahraga	kec. tellu limpoe dan panca lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	2	kelompok	100,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
630	MUH. ALBAR	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Pengadaan Lampu Jalan dan tiang	kec. tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	100	titik	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
631	MUH. ALBAR	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Bantuan bibit Ayam Ras	kec. tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1000	ekor	100,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
632	MUH. ALBAR	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Peningkatan kualitas drainase dan pembangunan talud	kec. tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	KM	5,010,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
633	MUH. ALBAR	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Pengadaan Binih Ikan	kec. tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	15000	ekor	22,500,000	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
634	MUH. ALBAR	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Pengadaan alsintan (Kompor Cas / Handsprayer ,Handtraktor) dan alsintan pra panen	kec. tellu limpoe dan panca lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	kelompok	90,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

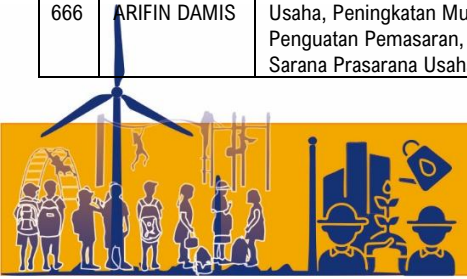
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
635	MUH. ALBAR	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana usaha UMKM (Pengadaan Alat Perbengkelan)	kec. tellu limpoe, watang pulu, dan panca lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
636	MUH. ALBAR	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Rehab Jembatan	kec. tellu limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	4	jembatan	2,400,000,000	Pembangunan Jembatan
637	MUH. ALBAR	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana usaha UMKM (Bantuan Pengadaan Peralatan Laundry)	kec.tellu limpoe, watang pulu, dan panca lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
638	MUH. ALBAR	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana usaha UMKM (Bantuan pengadaan alat tukang las)	kec. tellu limpoe, watang pulu dan panca lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
639	MUH. ALBAR	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Pengadaan pupuk organik dan non organik	kec. tellu limpoe, watang pulu, dan panca lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	kelompok	90,000,000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
640	MUH. ALBAR	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	fasilitas angkutan sampah (Bantuan motor sampah 3 roda “Viar”)	kec. tellu limpoe, watang pulu dan panca lautang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	unit	85,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
641	SULAEMAN	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Bantuan Pembangunan Peningkatan Kualitas Drainase, Pembangunan Talud Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
642	SULAEMAN	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Bantuan Pengadaan Armada Sampah Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Kecamatan	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
643	SULAEMAN	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman Api Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	Unit	2,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
644	SULAEMAN	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Pengadaan Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha UMKM untuk Kelompok UMKM Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
645	SULAEMAN	Kurangnya Teknologi Penangkapan Ikan yang Efisien	Bantuan Pengadaan Sarana Jaring, Pancing, dan Kapal Penangkap Ikan Untuk Kelompok Perikanan Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	30	Set	15,000,000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
646	SULAEMAN	Masih Rendahnya Parsitipatif Perangkat Organisasi BUMDes dalam Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Bantuan Pelatihan dan Pembinaan BUMDes Untuk Kelompok UMKM Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15	BUM Desa	112,500,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
647	SULAEMAN	Masih Terdapat Warga Kurang Mampu yang Belum Terdaftar Bantuan Sosial Kesehatan dan Akses Layanan	Bantuan Bimbingan PPKS Kurang Mampu untuk Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	2	Orang	6,250,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
648	SULAEMAN	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian	Bantuan Pengadaan Pestisida Pengendalian Hama dan Penyakit pada Komoditas Hortikultura Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	25,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
649	SULAEMAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Bantuan Pembangunan Gedung Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Bangunan Pemerintah Lainnya Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	Kecamatan	9,600,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
650	SULAEMAN	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Bantuan Pembangunan Rabat Beton dan Paving Block Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu Panca Lautang, dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
651	SULAEMAN	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Bantuan Bibit Sayur/Buah, Benih Ikan atau DOC Ayam Kampung, Pakan Awal, dan Sarana Sederhana (Polybag, Kolam Terpal, Kandang Mini) Untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5000	Bibit	250,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
652	SULAEMAN	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	Bantuan Pengadaan Vaksin Untuk Kelompok Ternak Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10	Kelompok	30,000,000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
653	SULAEMAN	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantuan Sarana Pendukung Bagi Ibu Hamil, Baduta, dan Balita Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	KECAMATAN	80,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
654	SULAEMAN	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Banbtuan Sarana dan Prasarana Olahraga Untuk Mengembangkan Minat Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	Kecamatan	50,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
655	SULAEMAN	Penguatan Program Pengendalian Penduduk dan Pencegahan Stunting Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Bantuan Pengadaan Sarana Untuk Cegah Stunting Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	KECAMATAN	150,000,000	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan
656	SULAEMAN	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Untuk Kelompok Budidaya Ikan Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	45000	Ekor	67,500,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
657	SULAEMAN	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Bantuan Pengadaan Lampu Jalan Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	50	Lampu	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
658	SULAEMAN	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana melalui Edukasi, Penguatan Kapasitas, dan Dukungan Sarana Tanggap Bencana	Bantuan Pembangunan Fasilitas Tangap Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Kecamatan	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
659	SULAEMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Pembangunan Bedah Rumah dan Perbaikan Pasca Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang, dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	Rumah	125,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
660	SULAEMAN	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Bantuan Pengadaan Alsintan Untuk Kelompok Tani Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
661	SULAEMAN	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Bantuan Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan, dan Duicker Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2000	Meter	6,570,000,000	Pembangunan Jalan
662	SULAEMAN	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Embung Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	3	Kecamatan	150,000,000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
663	SULAEMAN	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas Kesehatan Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	3	Kecamatan	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
664	SULAEMAN	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Untuk masyarakat Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	5	Orang	25,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
665	SULAEMAN	Terbatasnya SDM Kelompok Tani Komodias, sehingga dibutuhkan Pelatihan untuk Meningkatkan Kapasitas	Bantuan Pelatihan SDM Kelompok Tani Hortikultura Yang Tersebar di Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe	Kecamatan Watang Pulu, Panca Lautang dan Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	200,000,000	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
666	ARIFIN DAMIS	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan alat tataboga)	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
667	ARIFIN DAMIS	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Pengadaan alsintan (Handtraktor, kompos cas)	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	kelompok	350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
668	ARIFIN DAMIS	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan alat perbengkelan)	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
669	ARIFIN DAMIS	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Penerangan lampu jalan	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	100	titik	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
670	ARIFIN DAMIS	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Turnamen futsal, sepak bola dan bulutangkis	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	2	kegiatan	100,000,000	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota
671	ARIFIN DAMIS	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	kondiisi jalan rusak sehingga diperlukan Rabat Beton	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	8	KM	13,120,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
672	ARIFIN DAMIS	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan alat kecantikan/tata rias)	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
673	ARIFIN DAMIS	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan rangka bemor)	kec. maritengngae dan watang sidenreng , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
674	ARIFIN DAMIS	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	pengadaan bantuan itik	Kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1000	ekor	65,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
675	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Bantuan Pembangunan Peningkatan Kualitas Drainase, Pembangunan Talud Yang Tersebar di Kecamatan Maritengae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
676	ARIFIN DAMIS	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan mesin laundry karpet)	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
677	ARIFIN DAMIS	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Pembangunan Talud dan Drainase	Kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	KM	8,350,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
678	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Bantuan Fasilitas Angkutan Sampah, Tempat Sampah, TPS3R, Sosialisasi Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3	Kecamatan	60,000,000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
679	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Bantuan Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha UMKM Untuk Kelompok Tani Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	10	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
680	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Belum Adanya Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Bantuan Sarana dan Prasarana Pemadaman Api Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	Unit	2,000,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
681	ARIFIN DAMIS	Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Partisipasi Pemuda melalui Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Ekosistem Kreativitas Pemuda di Tingkat Lokal	sosialisasi kewirausahan kepemudaan	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	2	kegiatan	50,000,000	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota
682	ARIFIN DAMIS	Masih Rendahnya Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	sosialisasi minat baca	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	200	Orang	100,000,000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
683	ARIFIN DAMIS	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Pemasangan paving blok	kec. maritengngae dan watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	1,200,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
684	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Kurangnya Teknologi Penangkapan Ikan yang Efisien	Bantuan Pengadaan Jaring, Pancing, dan Kapal Penangkap Ikan Yang Untuk Kelompok Perikanan Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	30	Set	15,000,000	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

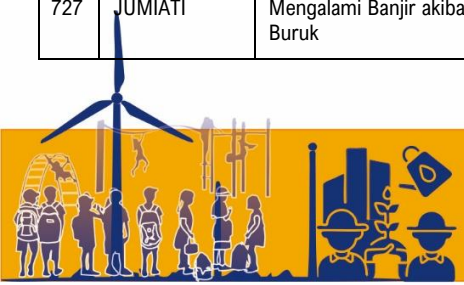
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
685	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi/Penguatan Jaringan Irigasi Pertanian Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	2000	Meter	1,000,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
686	ARIFIN DAMIS	Penguatan Pemahaman Peraturan Daerah dan Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat	Hibah bantuan masyarakat (lanjutan pembangunan taufiq)	kelurahan lautang benteng kec. maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	SEKRETARIAT DAERAH	1	kegiatan	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
687	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Masih Rendahnya Parsitipatif Perangkat Organisasi BUMDes dalam Pembinaan dan Pengembangan BUMDes	Bantuan Pelatihan dan Pembinaan BUMDes Untuk Kelompok UMKM yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	BUM Desa	50,000,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
688	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Masih Terdapat Warga Kurang Mampu yang Belum Terdaftar Bantuan Sosial Kesehatan dan Akses Layanan	Bantuan Bimbingan PPKS Kurang Mampu Untuk Masyarakat Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	2	Orang	6,250,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
689	ARIFIN DAMIS	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Sarana dan prasarana olahraga (Renovasi lapangan bulu tangkis, pembangunan lapangan futsal)	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	kegiatan	50,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
690	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Meningkatnya Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian	Bantuan Pengadaan Pestisida Untuk Kelompok Tani dalam Menanggulangi Intensitas Serangan Hama dan Penyakit Komoditas Pertanian Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	25,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
691	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Bantuan Pembangunan Gedung Desa, Kelurahan, Kecamatan, dan Bangunan Pemerintah Lainnya Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	Kecamatan	9,600,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
692	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	PERLUNYA JALAN TANI UNTUK MEMUDAHKAN DAN MEMBANTU PENINGKATAN PRODUKSI	DESA BULO WATTANG,BULO,CIPOTAKARI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	2	KM	330,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
693	ARIFIN DAMIS	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	sarana dan prasarana olahraga (pengadaan karpet lapangan bulutangkis	kec. maritengngae dan watang sidenreng , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	2	kegiatan	100,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
694	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Bantuan Pembangunan Rabat Beton dan Paving Block, Pengadaan Timbunan Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
695	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Pemberdayaan Rumah Tangga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan secara Produktif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan dan Gizi Keluarga serta Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat	Bantuan Bantuan Bibit Sayur/Buah, Benih Ikan atau DOC Ayam Kampung, Pakan Awal, dan Sarana Sederhana (Polybag, Kolam Terpal, Kandang Mini) Yang Tersebar di Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5000	Bibit	250,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
696	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	BANTUAN BIBIT AYAM	DESA BULO, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1000	EKOR	55,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
697	ARIFIN DAMIS	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Pengadaan alat pasca panen komoditas (pengadaan timbangan beras digital dan timbangan mobil truk)	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	2	kelompok	2,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
698	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	Bantuan Pengadaan Vaksin Untuk Kelompok Ternak yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	10	Kelompok	10,000,000	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
699	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Penguatan Layanan Pendampingan Gizi Keluarga, dan Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga, serta Akses Keluarga Berencana Jangka Panjang	Bantuan Pengadaan Sarana Pendukung Bagi Ibu Hamil, Baduta, dan Balita Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2	KECAMATAN	80,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
700	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	PERLU RABAT BETON DEMI KELANCARAN AKTIVITAS WARGA	DESA BULO,CIPOTAKARI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
701	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	Kecamatan	50,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
702	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	PERLU RABAT BETON KARNA JALAN RUSAK	KEL.PANRENG,KEL.BENTENG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
703	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Penguatan Program Pengendalian Penduduk dan Pencegahan Stunting Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Bantuan Pengadaan Sarana Penunjang Cegah Stunting Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritngngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2	KECAMATAN	150,000,000	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan
704	ARIFIN DAMIS	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Pengadaan alat pasca panen komoditas (Pengadaan bantuan poliser besar)	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	3	kelompok	1,350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
705	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	BANTUAN ALSINTAN UNTUK KELOMPOK TANI	KEC.BARANTI,KEC.PANCA RIJANG,KEC.KULO, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	KELOMPOK TANI	350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
706	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Peningkatan Fasilitas Pengolahan Ikan, Sarana dan Prasarana Budidaya, serta Penyediaan Bibit Ternak yang Berkualitas	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Untuk Kelompok Budidaya Ikan Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	30000	Ekor	45,000,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
707	ARIFIN DAMIS	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	pengadaan alat pasca panen komoditas(alat penggilingan ayakan gabah 16 susun	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	4	kelompok	1,400,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
708	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	BANTUAN ALSINTAN	DESA TANETE,ALLAKUANG,TAKKALASI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	KELOMPOK TANI	350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
709	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Bantuan Lampu Jalan Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	50	Lampu	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
710	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana melalui Edukasi, Penguatan Kapasitas, dan Dukungan Sarana Tanggap Bencana	Bantuan Pengadaan Fasilitas Tangap Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Kecamatan	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
711	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	BANTUAN BIBIT AYAM	DESA TANETE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1000	EKOR	55,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
712	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Bedah Rumah Pasca Bencana Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	Rumah	125,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
713	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Bantuan Pengadaan Alsintan Untuk Kelompok Tani Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	350,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
714	H. RUSDY GANI, S.Pd.	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	RABAT BETON KEC.MARITENGNGAE	KEC.MARITENGNGAE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
715	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Bantuan Pembangunan Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan, dan Duicker Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1000	Meter	3,285,000,000	Pembangunan Jalan
716	ARIFIN DAMIS	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Lanjutan pembangunan jalan tani	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	2	KM	330,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
717	ARIFIN DAMIS	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Pembangunan talud dan pengerasan jalan	kec. watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	1,300,000,000	Pembangunan Jalan
718	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas Kesehatan Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	3	Kecamatan	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
719	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Pemasangan Instalasi Listrik Untuk Masyarakat Kurang Mampu Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	5	Orang	25,000,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
720	MUHAMMAD TAHIR UMAR	Terbatasnya SDM Kelompok Tani Komodias, sehingga dibutuhkan Pelatihan untuk Meningkatkan Kapasitas	Bantuan Pelatihan SDM Kelompok Tani Hortikultura Yang Tersebar di Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng	Kecamatan Maritengngae dan Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Kelompok	200,000,000	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota
721	ARIFIN DAMIS	Perlunya Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Komunikasi	peralatan komunikasi masyarakat (Pengadaan kabel jaringan wifi)	kec. maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	kelompok	30,000,000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
722	ARIFIN DAMIS	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan alat perlengkapan laundry)	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
723	ANDI ISMAN, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	RABAT BETON	KEC.PITU RIAWA,PITURIASE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
724	ANDI ISMAN, SE	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	BANTUAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA	KEC.PITURIAWA,KEC.PITURIASE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	5	TITIK	750,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
725	ANDI ISMAN, SE	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	PEMBANGUNA JALAN TANI UNTUK MEMPERMUDAH AKSES PETANI	KEC.PITURIAWA , KEC.PITURIASE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5	KM	880,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
726	ANDI ISMAN, SE	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI PERTANIAN	KEC.PITURIAWA, KEC.PITURIASE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5	KM	2,500,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
727	JUMIATI	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Karena melihat kondisi jalan drainase Desa Kulo sudah rusak dan mengakibatkan banjir ketika musim hujan	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	250	Meter	417,500,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
728	JUMIATI	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Karena melihat lokasi sekolah TK PGRI Kulo yang belum memadai halaman sekolah tersebut butuh perbaikan atau pemasangan paving blok	Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	200	Meter	100,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
729	JUMIATI	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Karena di lokasi Kec. Kulo belum memilki armada pengangkut sampah yang memadai, sehingga banyak sampah di kec. kulo yang berserakan di pinggir jalan	Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	Unit	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
730	JUMIATI	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Karena melihat kondisi jalan pramuka Dusun Anrelli yang rusak dan sering di lewati masyarakat untuk kegiatan sehari-hari	Dusun Anrelli Desa Kulo Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	300	Meter	492,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
731	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Hotmix	Tersebar masing-masing desa dan kelurahan kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	KM	8,200,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
732	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Rabat Beton	Tersebar masing-masing desa dan kelurahan kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	KM	16,400,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
733	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Paving Blok	Tersebar masing-masing desa dan kelurahan kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	KM	2,400,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
734	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Pembangunan Talud	Tersebar masing-masing desa dan kelurahan kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
735	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Pembangunan Drainase	Tersebar masing-masing desa dan kelurahan kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	KM	3,340,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
736	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Penguatan Kesehatan dan Produktivitas Ternak guna Mencegah Penyakit Menular dan Zoonosis	Bantua Bibit ternak berkualitas	Kec. Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1000	Ekor	55,000,000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
737	AGUS SYAMSUDDIN ST	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Pengadaan Alsintan	kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	20	kelompok	700,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
738	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Pompanisasi	kel. batu lappa kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	5	kegiatan	150,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
739	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan alat bor air)	kel. batulappa kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
740	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Pembangunan jalan beton	kel. arawa kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	KM	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
741	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Penguatan Pemahaman Peraturan Daerah dan Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat	Hibah bantuan masyarakat (Bantuan Masjid)	kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	SEKRETARIAT DAERAH	5	kegiatan	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
742	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan alat pertukangang batu dan kayu)	Kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4	Kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
743	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan alat Laundry)	kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
744	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan galon air)	Kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	300	buah	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
745	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan alat tata boga)	Kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	8	kelompok	2,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
746	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan alat perbengkelan)	kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
747	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan alat mesin bumbu dapur)	kel. arawa kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
748	AGUS SYAMSUDDIN , ST	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan depot air dan galon air)	kel. batu lappa kec. watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
749	MUH. BASRI	Peningkatan Keselamatan, Kenyamanan, dan Kelancaran Mobilitas Masyarakat pada Jaringan Transportasi	Pengadaan Lampu jalan	kec. dua pitue dan pitu riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERHUBUNGAN	200	titik	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
750	MUH. BASRI	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Bantuan alsintan	kec. dua pitue dan pitu riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	6	kelompok	210,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
751	MUH. BASRI	Penguatan Pemahaman Peraturan Daerah dan Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat	Hibah bantuan masyarakat (bantuan Masjid)	kec. dua pitue dan pitu riawa, Kab. Sidenreng Rappang	SEKRETARIAT DAERAH	10	masjid	50,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
752	MUH. BASRI	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan alat perbengkelan)	kec. dua pitue dan pitu riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
753	MUH. BASRI	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Pembangunan jalan tani	kec. dua pitue dan pitu riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	2	KM	330,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
754	MUH. BASRI	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Bantuan listrik masuk sawah	kec. dua pitue dan pitu riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	6	kelompok	720,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
755	MUH. BASRI	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Kondisi jalan yang rusak sehingga diperlukan adanya Rabat Beton	tersebar di kec. dua pitue dan pitu riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	KM	4,920,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
756	MUH. BASRI	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan alat pertukangan)	kec. dua pitue dan pitu riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM

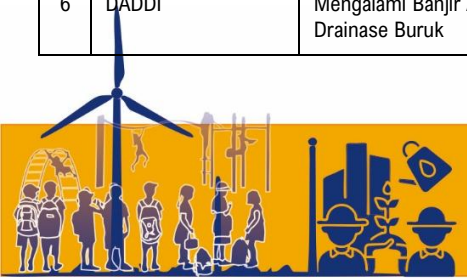
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
757	MUH. BASRI	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Bantuan penadaan mesin pompa air	kec. dua pitue dan pitu riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	2	kelompok	240,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
758	MUH. BASRI	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Pembangunan jembatan/penyebrangan hewan	kec. dua pitue dan pitu riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	2	buah	150,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
759	MUH. BASRI	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	pengadaan mesin pompa air	kec. dua pitue dan pitu riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	2	kelompok	240,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
760	MUH. BASRI	Banyaknya Timbulan Sampah Yang Belum Tertangani Sehingga Membutuhkan Sarana Dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Bantuan Mobil sampah	Kec. dua pitue dan pitu riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2	Unit	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
761	MUH. BASRI	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Pengaspalan jaln	kec. dua pitue dan pitu riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	KM	3,280,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
762	ARIFIN DAMIS	Penguatan Program Pengendalian Penduduk dan Pencegahan Stunting Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Sosialisasi Stunting	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2	KECAMATAN	50,000,000	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
763	ARIFIN DAMIS	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan mesin jahit)	kec. maritengngae dan watang sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
764	ARIFIN DAMIS	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan galon air)	kec. maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	200	buah	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
765	ARIFIN DAMIS	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan alat pembuatan es batu cristal 1 set)	kec. maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
766	MUH. BASRI	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (alat tataboga)	kec. pitu riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
767	MUH. BASRI	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (Pengadaan mesin jahit)	Kec. Dua pitue dan pitu riawa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	20	Buah	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
768	MUH. BASRI	Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Pendampingan Legalitas Usaha, Peningkatan Mutu Produk, Penguatan Pemasaran, dan Bantuan Sarana Prasarana Usaha	Fasilitas bantuan sarana dan prasarana UMKM (pengadaan galon Depot Air)	kec. dua pitue, pitu riawa dan pitu riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3	kelompok	20,000,000	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM
769	ANDI ISMAN, SE	Perlunya Penguatan Sarana Produksi dan Pasca Panen Pertanian guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	BANTUAN ALSINTAN ROTAVATOR	Desa bulucenrana dan desa bolabulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, DAN KETAHANAN PANGAN	10	Buah	3,000,000,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
770	ANDI ISMAN, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	RABAT BETON	DESA BULUCENRANA,DESA BOLA BULU, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	KM	3,280,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
771	H. PATHUDDIN, ST, M.Si.	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir akibat Drainase Buruk	Pembangunan Talud	Desa bulo kec. Panca rijang, kel. Panreng dan kel. Benteng kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	3	KM	5,010,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Lampiran II: Daftar Usulan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2027

DAFTAR LAMPIRAN USULAN ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2027

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
1	DENNENG	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Gedung Kantor Kelurahan Ponrangae yang terletak di Jl. Poros Pare Sengkang Kel. Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa merupakan bangunan lama, sehingga dindingnya sudah mulai bergeser dan banyaknya keretakan pada lantai, plafonnya pun sudah termakan rayap.	Jl, Poros Pare Sengkang, Gedung Kantor Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	500,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
2	DENNENG	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	jalanan yang terletek di lingkungan II Kelurahan Ponrangae, tepatnya di Jl. Sekolah merupakan jalanan berbatu sehingga perlu perbaikan Rabat beton untuk memudahkan pengantaran akses masuk Sekolah SD yang terdapat di Kelurahan Ponrangae	Jl. Sekolah Lingkungan II Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa Kab.Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	Meter	656,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
3	Hakisah	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Perlunya Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (PUSTU) karna bangunannya termasuk bangunan lama yang sebagian bangunannya sudah memerlukan perbaikan	Jalan PorosPare-Tanrutedong Lingkungan I Kelurahan Iancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Unit	450,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4	DENNENG	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	perlunya pembangunan rabat betonpada jalan Adikarya Lingkungan II Kelurahan Ponrangae karena jalanannya berbatu disetiap lorongnya	Jl. Adikarya Lingkungan II Kelurahan Ponrangae Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	Meter	656,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
5	DADDI	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Peningkatan Kualitas Jembatan Gantung karena banyaknya anak sekolah yang lewat	Jl. Pude (Jembatan Gantung) Dusun II, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
6	DADDI	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Peningkatan Kualitas Drainase	Sebelah Selatan SDN 6 Tanrutedong Dusun III, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	Meter	450,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
7	A.MARIANI	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	perlu Penguatan Talut dan Pemasangan Bronjong Sungai pakkateteng Awakaluku	Dusun II Awakaluku , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	90,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
8	A.MARIANI	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	banyak rumah penduduk yang sudah tidak layak huni tp tetap ,menjadi tempat tinggal bagi masyarakat uang tidak manpu maka diperlukan perbaikan rumah (bedah rumah)	Dusun I, dusun II, Dusun III dan Dusun IV , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	Unit Rumah	250,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
9	DIAN MEGAWATI NUR	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Pembangunan drainase jalan masuk BTN Ganggawa	Jl. Ganggawa, Kel. Majjelling, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	Meter	450,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
10	Asrudi. S	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Atap Bocor, Plafon Pada Rusak dan Terjadi Genangan Air di Lantai, Sehingga Mengganggu Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat di Pustu.	Jl. Sose Ngenra, Dusun 2 Kampale, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Unit	450,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
11	Asrudi. S	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Untuk Mencegah Terjadinya Luapan Air Sungai atau Banjir yang Berdampak Terhadap Lahan Pertanian Masyarakat di Desa Kampale.	Jl.Poros Lonra Dusun 2 Kampale, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Normalisasi/Restorasi Sungai
12	ASRUL	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Perlunya peningkatan kualitas jembatan penghubung antara Desa Bulucenrana dan Desa Bola Bulu untuk memudahkan masyarakat desa	Dusun IV Bangae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	M	600,000,000	Pembangunan Jembatan
13	Khairunnisa	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Perlunya Pembangunan Rabat beton ke Jalan masuk area sekolah SMP Neg 5 Maritengngae dan Jalan ke Jerra'e karna banyaknya jalan berlubang yang mengakibatkan genangan air Serta mempermudah Akses masyarakat terutama anak sekolah	Jalan Mahmud adam Dusun II dan jalan AR Makkaratte Dusun III Desa Allakuang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	Meter	656,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
14	Khairunnisa	Masih Terdapat Sarana Distrbusi Perdagangan (Pasar Rakyat) yang Kurang Memadai dan Kurangnya Pemeliharaan	Perlunya Pembangunan / Rehab Pasar Untuk memenuhi dan memudahkan segala kebutuhan Masyarakat	Jalan poros soppeng Dusun V Desa Allakuang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
15	MULIANA NURSALEH	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Jembatan di sungai Batue tidak ada sehingga akses ke kabupaten Pinrang sulit dijangkau	Dusun Dea, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	M	600,000,000	Pembangunan Jembatan
16	GUSRIANA AGUS	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	RUSAKNYA JALAN DI LINGK II TODDA BOJO SEPANJANG 5 KM	LINGK II TODDA BOJO, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	Km	16,425,000,000	Pembangunan Jalan
17	ANDI WAWAN INDRAWAN MU'TI, S. IP., M. IP	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Banyaknya jalan yang rusak berlubang di Jalan Poros Bulo yang menyebabkan terjadinya kecelakaan	Jalan Poros Bulo, Desa Bulo Wattang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	M	1,642,500,000	Pembangunan Jalan
18	ANDI WAWAN INDRAWAN MU'TI, S. IP., M. IP	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Jembatang Penghubung Dusun Bulo Wattang ke Ellegettae perlu diadakan perbaikan, karena jalan tersebut merupakan akses alternatif masyarakat khususnya petani di Ellegettae	Dusun Bulo Wattang tembus Ellegettae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	M	600,000,000	Pembangunan Jembatan
19	ANDI WAWAN INDRAWAN MU'TI, S. IP., M. IP	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Perlunya diadakan perbaikan jembatan di Jalan Lakende, karena jembatan tersebut merupakan akses petani yang bisa berpengaruh terhadap aksebilitas hasil pertanian, dan memudahkan petani dalam pengangkutan gabah apabila mobil truk sudah bisa mengaksesnya	Jalan Lakende Dusun Bulo Tengnga, Desa Bulo Wattang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	M	600,000,000	Pembangunan Jembatan
20	MIRNAH	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Rusaknya Jembatan Macege sehingga menganggu arus lalu lintas dan aktivitas ekonomi. (Rehabilitasi Jembatan Macege)	Jl Poros Kulo Dusun Macege, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	M	600,000,000	Pembangunan Jembatan
21	GUSRIANA AGUS	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	TDK ADANYA DRAINASE DI JLN SEBELAH KIRI SEHINGGA AIR TERGENANG DI Jalan	lingk ii todda bojo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	100	M	167,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
22	A. TENRY WAHYU EFENDI	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Kondisi jalan di lingkungan I Bojoe rusak berat, perlu di lakukan rabat beton sepanjang 1 km	Lingkungan I Bojoe kelurahan arawa kecamatan watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

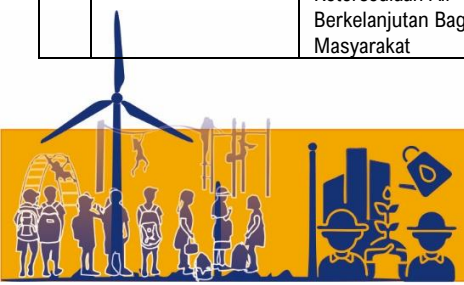
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
23	MIRNAH	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Rusaknya saluran irigasi di Teppo padomae sehingga aliran air ke sawah tidak memadai. (Perbaikan Irigasi Teppo Padomae)	Jl. Pekuburan Dusun Macege, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	90,000,000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
24	A. TENRY WAHYU EFENDI	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk sehingga perlu dilakukan pembangunan drainase di lingkungan II Patommo	lingkungan II Patommo kelurahan arawa kecamatan watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
25	Ritawati	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk sehingga perlu dilakukan pembangunan drainase 200 m2 di LK.I.kampung Baru	LK.I.Kampung Baru, Kel.Batulappa,Kec.Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
26	Ritawati	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk sehingga perlu dilakukan pembangunan drainase 200 m2 di LK.II.Bunga Wellu	LK.II.Bunga Wellu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
27	PATRIAH	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Pembangunan Talud Jl.Pamrud dengan Volume 15.000 M	Dusun Boddi Desa Mario, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	15000	M	12,000,000,000	Pembangunan Jalan
28	MIRNAH	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Adanya Rumah Tidak Layak Huni (Rehab Rumah Tidak Layak Huni)	Jl. Poros Kulo Dusun Macege, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	1	Orang	20,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
29	Ritawati	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Perlu di lakukan Pembangunan Duicker di LK.I.Kampung Baru sejumlah 5 Buah Karna Kondisi jalanan sering mengalami banjir	LK.I.Kampung Baru,Kel.Batulappa,Kec.Watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	Titik	150,000,000	Pembangunan Jembatan
30	ANUGRAH SALEH	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Perbaikan Saluran Irigasi Sekunder	Dusun I dan Dusun II, Depan Rumah Faizal Ranru, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	90,000,000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
31	PATRIAH	Perlu Penyediaan Sarana Jaringan Air Minum Perpipaan	Pengadaan jaringan Air Bersih Se Desa Mario Volume 1 Paket	Desa Mario, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Paket	455,000,000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
32	HASANUDDIN	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Banyaknya jalan dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan di jl. poros Timoreng panua sampai batas desa Bulo Wattang	Jl. Poros Bulo Lanrang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
33	YUSRI SAHARUDDIN - DESA MADDENRA	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Perlunya pengadaan bak sampah di UPT SDN 2 Kulo dan UPT SDN 3 Kulo	Jl. Andi Cammi Desa Maddenra Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	Paket	50,000,000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
34	PATRIAH	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Perlunya saluran Air Guna Mencegah Terjadinya Banjir	Dusun Mario Desa Mario, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
35	HASRIANA	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Peningkatan Kualitas Jalan/Jalan poros Otting - AnabannaE sudah rusak maka perlu adanya Pembangunan Jalan Beton	Jl. Poros Otting-Anabbannae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
36	HASRIANA	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Normalisasi Sungai/Pendangkalan Saluran Sekunder, Pengerukan Saluran Sekunder Jampu	Jl. Mangga , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Normalisasi/Restorasi Sungai
37	A.MARIANI	Kurangnya Pemahaman Masyarkat Tentang Pencemaran Lingkungan Hidup, Kerusakan Lingkungan dan Proklim	masih banyak Rumah Penduduk yang belum memiliki tempat Sampah sehingga banyak sampah berserakan untuk itu diperlukan Pengadaan Tempat Sampah disetiap Rumah Penduduk	Dusun I, Dusun II ,Dusun III dan Dusun IV , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	800	Unit	150,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
38	HASANUDDIN	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Kondisi Duicker Rusak Parah atau putus di Jl. Poros Aka-akae	Jl. Poros Aka-akae Dusun Tanete, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Titik	30,000,000	Pembangunan Jembatan
39	MARIATY	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	penyempitan jembatan mengakibatkan banjir saat musim hujan dan kendaraan roda 4 tidak bisa berpapasan	JL GOTONG ROYONG DESA TONRONGNGE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
40	MARIATY	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Ternak masyarakat berkeliaran di pakarangan PUSTU	Jl. Rajawali Desa Tonrongnge, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Paket	50,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
41	FADILAH	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Kondisi jembatan mengalami kerusakan parah sehingga tidak memadai untuk dilalui petani dalam mengangkut hasil pertanian, terutama kendaraan roda dua dan roda empat bermuatan. (Pembangunan Jembatan yang menghubungkan Desa Abbokongang dengan Desa RijangPanua)	Jl. Ke Rijang Panua Dusun Jampu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
42	YUSRI SAHARUDDIN - DESA MADDENRA	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Perlunya pembangunan jembatan Jl. Sarawa'e - Bina Baru	Jl. Sarawae Desa Maddenra Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
43	suhartina	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terdapat Beberapa Rumah Warga Yang Rusak atau Tidak Layak Huni	Dusun I Pakkasaloe, Dusun II Copposulureng, Dusun III Bukkere Desa Cenrana , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	20	Rumah	300,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
44	YUSRI SAHARUDDIN - DESA MADDENRA	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	jembatan Jl. Cenreangin	Jl. Cenreangin Desa Maddenra Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
45	FADILAH	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Kondisi jembatan penghubung antar wilayah desa maddenra dan Kulo mengalami kerusakan cukup parah, seperti retakan pada struktur, pengaman yang rusak. Kondisi ini membahayakan keselamatan pengguna jalan serta menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan masyarakat (Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Abbokongang, Maddenra dan Kulo)	Jl. Poros Kulo Dusun Jampu Desa Abbokongang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
46	Khairunnisa	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Perlunya Pembangunan jalan penghubung ke SKPD 2 Kecamatan (MaritengngaE dan Wattang pulu) untuk mempermudah akses pertanian , pendidikan dan jalur ke SKPD	Desa Allakuang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	3,285,000,000	Pembangunan Jalan

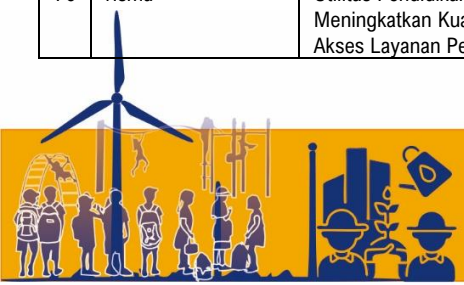
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
47	Ardiana agusra	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	tidak adanya Duekker sehingga menyebabkan banjir	Jl. Petani II (Soangnge) Belakang Honda, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	30,000,000	Pembangunan Jembatan
48	FADILAH	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Kondisi jembatan penghubung antar wilayah Desa mengalami kerusakan cukup parah, seperti retakan pada struktur, lantai jembatan berlubang, Kondisi ini membahayakan keselamatan pengguna jalan serta menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan masyarakat (Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Abbokongang dan Desa Tonrong Rijang)	Dusun Abbokongang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
49	NURFADILLAH	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Masih Adanya rumah warga tidak layak huni dan membutuhkan bedah rumah	Desa Bulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	20	Unit Rumah	500,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
50	ARWANG, SE., M.AP	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Jalan yang rusak sehingga menghabat jalan pengendara motor dan mobil	Jl. Paccekke Lingkungan I Bilae Kelurahan Macorawalie , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
51	SUDIANTO	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Banyak drainase yang rusak dan dangkal sehingga menyebabkan banjir dan juga merusak jalanan.	Jalan Sumur Bor Lingkungan I Kanyuara Kelurahan Kanyuara Kec. Watang Sidenreng Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
52	ROSMAWATI	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	rusaknya jembatan salo indru	jalan Tani KTBD, Dusun salo indru (jembatan Lotang Ledeng), Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
53	NURFADILLAH	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Kurangnya Akses Penyeberangan Hewan dan Kendaraan sehingga menghambat proses pengangkutan hasil panen masyarakat maka dibutuhkan pembangunan Jembatan	Desa Bulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
54	Andi Ayu Hartani	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Rehab Gedung Masyarakat/Olahraga	Lingkungan Callaccu, Kel. Benteng, Kec. Baranti, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	Paket	100,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
55	HASNIAR	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Banyaknya jalan rusak dan banjir di karenakan tidak adanya drainase	Desa Buae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
56	HASNIAR	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Masih ada beberapa rumah tidak layak huni	Desa BuaE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	20	Unit Rumah	500,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
57	herni	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Terjadinya erosi sungai yang sangat parah dibelakang rumah masyarakat sehingga membahayakan rumah masyarakat yang ada di pinggiran sungai, selain itu ketika musim hujan air sungai meluap dan mengakibatkan banjir di pemukiman masyarakat sehingga dibutuhkan Pembangunan Tanggul Sungai sepanjang 200 m	Dusun Labempa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	90,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
58	SUDIRMAN	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	kondisi pagar pustu Uluale dan tingkat keamanan pustu kurang memadai sehingga perlu dilakukan pembangunan pagar sepanjang 200m2 dan pengadaan terali jendela	Pustu Uluale Lingk. I Uluale Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Paket	50,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
59	SUDIRMAN	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Jalan masuk Todda Bojo rusak berat sehingga perlu dilakukan rehabilitasi jalan	Lingk. I Uluale Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	3,285,000,000	Pembangunan Jalan
60	HASNIAR	Penguatan Program Pengendalian Penduduk dan Pencegahan Stunting Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Ada beberapa ank yang stunting dan butuh penanganan	Desa BuaE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Desa	13,500,000	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
61	SITI NURHALISA	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Perlunya Normalisasi sungai untuk mengurangi luapan air yang mengakibatkan Banjir akibat pendangkalan sungai	Sungai Salonase, Dusun I Padangloang, Desa Padangloang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Normalisasi/Restorasi Sungai



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
62	SITI NURHALISA	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	pembangunan Tanggul Pintu Air Sungai Salonase yang sudah mulai rusak, diakibatkan Tekanan Air yang tinggi dan bisa menyebabkan banjir di area persawahan	Sungai Salonase, Dusun I Padangloang, Desa Padangloang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
63	Andi Ayu Hartani	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Drainase Perintisan Jalan Lingkungan Callaccu	Lingkungan Callaccu, Kel. Benteng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	Unit	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
64	A. IRFAH AYUNITA. A	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Pengerukan Sungai	Kelurahan Duampanua, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Normalisasi/Restorasi Sungai
65	SUDIANTO	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Jembatan terbuat dari kayu dan tidak bisa di lalui kendaraan roda 4	Jalan Lily lingkungan I Kanyuara Kel. Kanyuara, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidenreng Rapang , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
66	A. IRFAH AYUNITA. A	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rehab Rumah/Bedah Rumah	Kelurahan Duampanua, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	20	Unit	500,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
67	SAHRUNI	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Jalanan rusak parah dan jln lintas kecamatan,	Dusun II cenrana, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	Km	3,280,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
68	ARWANG, SE., M.AP	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	masih terdapat beberapa rumah warga yang membutuhkan bantuan dan merupakan rumah yang tidak layak uni	Kelurahan Macorawalie, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	20	Unit	300,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
69	PATRIAH	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Pembangunan Talud Jl.Batu-Batu Puncak dengan Volume 2000 M	Jl.Batu-Batu Dusun Puncak Harapan Desa Mario, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	Km	1,600,000,000	Pembangunan Jalan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
70	A. IRFAH AYUNITA. A	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Pembangunan Sarana dan Prasana Olahraga	Kelurahan Duampanua, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	Paket	50,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
71	ANDI HERLINA,S.Sos.M.ap	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Peningkatan Kualitas Jalan, Jembatan, dan Duicker	Lingkungan I dan II Tanrutedong, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	3,285,000,000	Pembangunan Jalan
72	suhartina	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Rehabilitasi Pustu Untuk Memastikan Pelayanan Kesehatan Dasar yang Optimal,Nyaman dan Berkualitas Bagi Masyarakat	Dusun 1 Pakkasaloe , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Unit	450,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
73	risma	Banyaknya Timbulan Sampah yang Belum Tertangani sehingga Membutuhkan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Di Desa Corawali tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah Akhir sehingga menyebabkan banyak masyarakat membuang sampah di pinggir jalan, di pinggir sungai dan di tanah kosong milik warga yang menyebabkan sampah tersebut berserakan membuat lingkungan tidak indah	Desa Corawali, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Unit	65,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
74	Abbas	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Tanggul tepi sungai mengalami longsor dan dapat menyebabkan banjir saat musim hujan	Dusun I Kampung Baru, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
75	Abbas	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Jembatan gantung sering mengalami kerusakan dan mengganggu distribusi hasil pertanian	Dusun II Amessangeng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
76	risma	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Masih ada sisi sekolah yaitu SMP Negeri 1 Panca Lautang yang belum terpagari dengan pagar permanen	SMP NEGERI 1 PANCA LAUTANG, DSN II LAMENGE, DESA CORAWALI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50	M	105,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
77	SAHRUNI	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Rehab bendungan sungai Celli'e , karna adh Rusak di Dusun I Carawali	Dusun I Carawali, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Rehabilitasi Embung
78	ANDI MIRAJE KASIM	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Masih Banyak Warga belum memiliki Rumah layak Huni Sehingga Perlu Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Dusun Bendoro, Dusun Lasilottong, Dusun Baramming, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	50	Unit	1,250,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
79	RAHMAN, S.I.P	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	diperlukannya pemeliharaan Sport Center agar tetap terjaga	Kelurahan Lalebata, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	2	Paket	100,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
80	ANDI MIRAJE KASIM	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	kurangnya Drainase Kiri Kanan Jalan Mojong yang menghubungkan Kab Sidrap dan Kab. Wajo membuat di beberapa titik terjadi longsor dan mengakibatkan jalan Cor beton sudah mulai amblas Panjang Sekitar 13KM	Jalan Mojong Ke Danau Sidenreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	13	Km	21,710,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
81	LASSE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Jalanan sering tergenang air jika musim hujan	Desa Dongi, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
82	SITI NURHALISA	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Banyaknya rumah yg sdh tidak layak Huni yang diakibatkan oleh berbagai faktor terutama ekonomi masyarakat yang kurang, maka perlu perbaikan sebagai bentuk perlindungan dan jaminan sosial	Desa Padangloang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	50	Unit	1,250,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
83	LASSE	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Masih kurangnnya sarana olahraga ataupun SPORT CENTRE	Dongi, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	Paket	250,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
84	ERNIATI MASUDI	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan serta Duicker	Jalan Tani Dusun I Bulukonyi arah Dusun II Cappa Batae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	657,000,000	Pembangunan Jalan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
85	Kasmawati	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Kondisi gedung Pustu Desa Polewali saat ini sangat tidak layak huni akibat kerusakan atap yang menyebabkan kebocoran parah serta dinding yang lembap dan berlumut, sehingga bidan desa tidak dapat menggunakannya sebagai tempat beristirahat. Permasalahan ini diperparah dengan tidak adanya akses air yang memadai, yang merupakan kebutuhan vital dalam prosedur medis dan sanitasi dasar. Akibatnya, pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi terhambat.	Jl. Lamansure Dusun I MamminasE , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Unit	450,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
86	ANDI MIRAJE KASIM	Banyaknya Timbulan Sampah yang Belum Tertangani sehingga Membutuhkan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Fasilitas Angkutan Sampah, Tempat Sampah, TPS3R, Sosialisasi	Dusun Bendoro, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Unit	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
87	GUSRIANA AGUS	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	perlunya jembatan karna jembata tersebut terhubung ke sekolah	JLN KMP DARE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
88	TENRI	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Rusaknya lapangan sepak bola	jalan Pendidikan Lingkungan I Empagae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	Paket	75,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
89	ERNIATI MASUDI	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Gedung/Ruang Kelas /Ruang Guru PAUD, SMP, MA Pagar/Paving Block/Atap/WC/Plafon	Pesantren Nurul Azhar Talawe Dusun I Bulukonyi Desa Talawe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100	M	150,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
90	bahria	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	bngu Bangunan gedung Pustu sudah sangat lama .terus kondisi PUSTU saat ini seperti bagian plapon nya sudah banyak bagian yang rusah atau jebol.sehinggah mengganggu kenyamanan pelayanan terhadap paisien dan kepala Pustu.karena di takutkan tiba2 atap atau pelapon tiba-tibah ambruk	dusun polewali, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Unit	450,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
91	HERIANTO	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Masih kurangnya infrastruktur jalan produksi	Desa Bulucenrana, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	657,000,000	Pembangunan Jalan
92	HERIANTO	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Masih ada rumah yang tidak layak huni	Desa Bulucenrana, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	20	Unit	500,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
93	Kasmawati	Masih Kurangnya Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Pertanian	Masalah kurangnya teppo lebeng (pintu air/pembagi air) ini memang krusial, terutama karena menyentuh aspek keadilan distribusi air di tingkat petani. Saat musim kemarau, debit air menurun drastis. Tanpa struktur pembagi yang permanen dan terukur, distribusi air biasanya hanya mengandalkan sistem "siapa cepat dia dapat" atau bongkar pasang tanggul darurat yang sering kali memicu konflik antarpetani.	Dusun I MamminasaE dan Dusun II Sudedo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Pembangunan Tanggul Sungai
94	RANO, SH	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Permasalahan di Pustu adalah tidak adanya WC di Pustu sehingga terkadang Pasien kalau mau BAB hanya Bisa Numpang dulu dan Banyaknya Juga Atap Yang Bocok Serta tiidak Sdanya Pagar	Jalan Poros Pare Makassar Dusun I Kulua Desa Lainungan, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Unit	50,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
95	HERIANTO	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Gedung Pustu yang sudah rusak dan atap yang bocor dan selalu tergenang banjir	Dusun 6 Bulucenrana, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Unit	450,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
96	Kasmawati	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sejumlah rumah warga kategori miskin di Desa Polewali mengalami kerusakan tingkat sedang yang sangat membutuhkan rehabilitasi. Kondisi bangunan yang mulai rapuh membahayakan keselamatan penghuni dan menurunkan kualitas hidup mereka. Perbaikan mendesak diperlukan guna menyediakan hunian layak hamba cuaca, sehingga kesejahteraan serta kesehatan keluarga kurang mampu tersebut dapat lebih terjamin.	Dusun I MamminasaE dan Dusun II Sudedo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	1	Orang	20,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

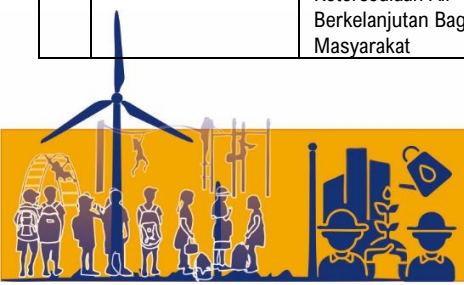
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
97	SAHRUNI	Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Taman Makam Pahlawan	Perlunya penataan dan pengecatan Monumen Andi Cammi Desa Carawali	Dusun I Carawali, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	1	Unit	30,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
98	Sabir, S.Pd	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Pembangunan Jembatan Sungai Tana Toro	DUSUN I TANA TORO, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
99	MASNAH SP	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Karna adanya pagar SMP N 2 Watang Pulu yang kurang bagus maka perlu diadakan pembanguna pagar	Dusun III Kamirie , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80	M	120,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
100	ANDI RISWANDI S.IP	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Pagar sekolah yang tidak memadai menjadi perhatian bagi para guru, di karenakan banyaknya anak sekolah yang berkeliaran di luar sekolah	Jalan Wala Baru, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80	M	120,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
101	ANDI RISWANDI S.IP	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Perlunya perbaikan jalan yang berlubang agar dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam menjalan aktivitas sehari-hari	Jalan lorong garuda (samping klinik fella), Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
102	ANDI RISWANDI S.IP	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Kondisi jembatan saat ini sudah sangat dangkal yang mengakibatkan saluran air tersumbat, dan menjadi ancaman keselamatan bagi para pengguna jembatan	Lingkungan I (Lengko Bale) Kelurahan Wala, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
103	WARDANA, S.M	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Rehabilitasi/perbaikan Pustu dikarenakan ruangan yang terlalu sempit dan terdapat beberapa infrasturktur yang sudah rusak	Dusun I Larumpu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Unit	450,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
104	Hakisah	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Gedung Kantor Kelurahan Lancirang sudah termasuk bangunan lama dan memerlukan perbaikan karna sebagian bangunannya sudah mengalami Kerusakan	Jalan Poros Pare-Tanrutedong Lingkungan I Kelurahan Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	500,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
105	Jumriani	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Seringnya Meluap Air Irigasi saat Hujan yang menyebabkan banjir di lingkungan masyarakat sehingga diperlukan Tanggul untuk Saluran irigasi	Lingkungan I dan Lingkungan II, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
106	WARDANA, S.M	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Lanjutan Rabat Beton Jalan Bola Bulu, kondisi jalan masih rusak sebagian dan dibutuhkan perbaikan sepanjang 30 M	Dusun III Larumpu, Jalan Bola Bulu , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	30	M	49,200,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
107	Jumriani	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Banyaknya Rumah Warga yang tidak Layak Huni	Lingkungan I dan Lingkungan II, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	1	Orang	20,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
108	MUHMMAD YAHYA LADA, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	keadaan jalan rusak berat terutama jika hujan deras dapat mengakibatkan genangan yang semaki dalam	Lingkungan II Salomallori, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	700	Meter	918,400,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
109	MUHMMAD YAHYA LADA, SE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Tidak adanya saluran drenase di lingkungan ini mengakibatkan terjadinya genangan dan banjir apabila hujan	Lingkungan I Salomallori, Kecamatan Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
110	HAEDAR	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Jembatan rusak sehingga cukup berbahaya bagi kendaraan yang lewat dan jembatan juga sempit sehingga kendaraan roda empat tidak bisa berpapasan	Jalan Pelita Dusun Mattonrong Salo, Jalan Poros Tonrong Rijang Abbokongan. Depan Mesjid Taufiq Tonrong Rijang , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	300,000,000	Pembangunan Jembatan
111	HAEDAR	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Pembangunan TK PGRI Belum rampung sehingga mengganggu proses belajar mengajar	Jalan Jeruk Desa Tonrong Rijang , Kab. Sidenreng Rappang , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	56	Meter2	200,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
112	Hakisah	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	sering terjadinya banjir pada saat musim hujan karena saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik (Pembuatan Saluran Irigasi)	Lingkungan II Kelurahan Lancirang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
113	FERY. M, SH	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Atap Gedung SD Neg. No. 2 Amparita merembes dan bocor pada saat musim hujan	Jl. Korban 40.000 Jiwa, Lingk. I Palla'E,, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	90	M2	250,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
114	FERY. M, SH	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Fasilitas Deucker di Kelurahan Arateng masih kurang sekitar 10 unit	Lingk. I Palla'E dan Lingk. II Lasalama, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	Unit	300,000,000	Pembangunan Jembatan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
115	Sabir, S.Pd	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Pengecoran jalan ruas lampiring-Tana Toro,(12 Km)	DUSUN 7 Cilallang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	12	Km	15,744,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
116	Mallong	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Peningkatan Kualitas Drainase	Jl. Mangga , Jl. Cempaka Lingk. I Labbolongeng & Lingk. II Wt. Lowa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
117	HASKAR	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Jalan Poros Desa Teteaji dan Polewali Sudah Mengalami Kerusakan yang Sangat Parah, Mulai dari Jalan Yang Berlubang, Sering Tergenang Air Saat Hujan Turun Sehingga Mengganggu Aktivitas Keseharian Masyarakat apalagi ini merupakan jalan poros yang utama dilalui warga untuk beraktivitas sehari hari dan sudah sering juga terjadi kecelakaan karena jalan berlubang tersebut.	Jl. Wa'Mansure Dusun I dan Dusun II Desa Teteaji, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
118	Suriani	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	kerusakan jalan dari alesalewo ke lajonga sepanjang 4,4 km akibat cuaca becek saat hujan, berdebu saat kemarau, mudah hancur karena lalu lintas berat seperti mobil kombine dan pengankut padi, serta menimbulkan ketidaknyamanan dan masalah kesehatan	Desa Alesalewo dan kelurahan lajonga, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	4.4	Km	7,216,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
119	Suriani	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Perlunya pembangunan jembatan jalan masuk ke dusun I Alesalewo penghubung dusun II dan dusun I Alesalewo serta akses masyarakat dusun II menju ke Amparita	Dusun I Alesalewo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
120	Suriani	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Masih adanya rumah warga yang tidak layak huni jadi perlu bedah rumah	Desa Alesalewo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	1	Orang	20,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
121	HAEDAR	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Diperlukan Pembangunan Talud dan Drainase agar tidak terjadi banjir	Jalan Pelita Desa Tonrong Rijang, Kab. Sidenreng Rappang , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	494,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
122	Mallong	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bedah Rumah untuk rumah yang tidak layak huni	Lk. I Labbolongeng dan Lk. II Wt. Lowa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	20	Unit	500,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
123	Mallong	Banyaknya Timbulan Sampah yang Belum Tertangani sehingga Membutuhkan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Masih banyak sampah yang berserahkan sehingga di butuhkan Fasilitas Angkutan Sampah	Lk. I Labbolongeng dan Lk. II Wt. Lowa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Unit	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
124	SAMI	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	perlunya Drainase di sepanjang jalan poros terutama pada salah satu pendakian di jalan poros leppangeng dusun 1 desa compong agar tidak mengalami kerusakan jalan akibat air yang mengalir saat hujan	Jl Poros Leppangeng Dusun 1 Desa Compong, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
125	HASKAR	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	adanya beberapa saluran irigasi yang mulai rusak dan sudah tidak layak lagi baik didusun I Sudatu maupun Dusun II Sukeppe yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya petani	Dusun I Sudatu dan Dusun II Sukeppe Desa Teteaji, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
126	Rahmatullah	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Pembangunan Duicker	Lingkungan III Pemantingan dan Lingkungan III Lotang Kaluku, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	30,000,000	Pembangunan Jembatan
127	HASKAR	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	masih adanya beberapa masyarakat rentan miskin yang memiliki rumah yang tidak layak huni, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan rehab rumah.	Dusun I Sudatu dan Dusun II Sukeppe Desa Teteaji, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	1	Orang	20,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
128	ANDI RISMA KARTIKA SIDIK	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Pembangunan Tanggul/Talud Sungai yang Rusak	Lompo' Timoreng , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	90,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
129	ANDI RISMA KARTIKA SIDIK	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Masih saluran Tanah)	Lingkungan 1 Dan Lingkungan 2, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	90,000,000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

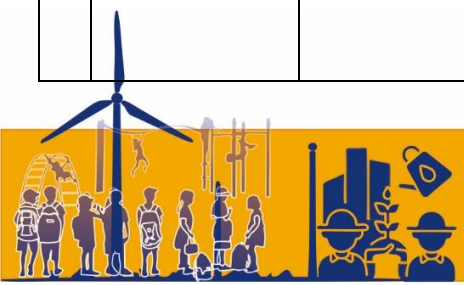


No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
130	ANDI RISMA KARTIKA SIDIK	Banyaknya Timbulan Sampah yang Belum Tertangani sehingga Membutuhkan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Fasilitas Angkutan Sampah, Tempat Sampah, TPS3R, Sosialisas	Lingkungan Amparita, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Unit	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
131	TUSRI HADI	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Jalan yang menghubungkan dengan kabupaten pinrang belum di drainase dan ditimbun bahu jalannya dapat membahayakan pengguna jalan	Jl.Ikan Mas dan Jl.Ayam Ras, Kab. Sidenreng Rappang , Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	Km	3,340,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
132	TUSRI HADI	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Jembatan yang menghubungkan Desa Passeno dengan Kelurahan Duampanua perlu dibangun untuk menghindari kemacetan dijalan Poros Pinrang-Rappang saat hari raya dan libur menyebabkan kemacetan panjang yang terjadi disetiap tahunnya	Jalan Perikanan Dusun Baranti Wattang, Kab. Sidenreng Rappang , Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
133	Nur Alfianti Rushary	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Terjadinya kerusakan parah pada Pagar Pustu Kelurahan Massepe maka itu Perlunya Pembangunan kembali Pagar Pustu Kelurahan Massepe	Jl. Poros Soppeng Kel. Massepe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Unit	50,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
134	Nur Alfianti Rushary	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Pembangunan RKB SD 4 Massepe	Jl. Pendidikan Kel. Massepe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	42	M2	150,000,000	Pembangunan Ruang Kelas Baru
135	ANDI RIFAI M., S. HI	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Ruas Jalan Poros Timoreng Panua sampai Desa Cipotakari mengalami rusak berat	Jl. Poros Timoreng Panua sampai Cipotakari, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
136	hasnaini	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	masih perlunya dibangun pagar sekolah	SDN 1 Lise (Dusun Sukeppe), Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	60	M	100,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
137	Hendri Saputra Iskandar	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Kondisi di Jl. Anggrek Lk. I rusak parah yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat baik pengendara maupun pejalan kaki	Jl. Anggrek Lk. I Kelurahan Majjelling Wattang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

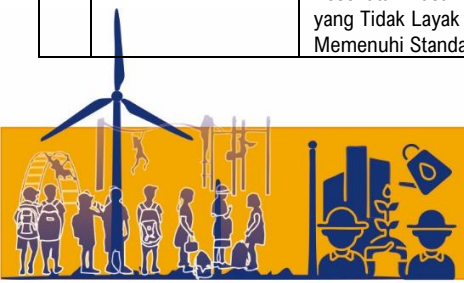
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
138	RAMLI, S.I.P	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Jembatan penghubung Desa Sumpang Mango dan Desa Lasiwala sudah rusak berat, karena terjadi lonsor dibagian depan jembatan, sehingga sudah tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.	Dusun II Samallangi, Desa Sumpang Mango, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
139	hasbi kadir	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	DRAINASE JL MALUKU - KANYUARA	DUSUN II LABEMPA, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
140	RUSMIN MALIK, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Pengaspalan JL.LAKKO Lingkungan Cenrana	JL. LAKKO, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	657,000,000	Pembangunan Jalan
141	ANAS ALIMIE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Kondisi jalan lingkungan masih berupa tanah, rusak, dan tidak layak dilalui terutama saat musim hujan. Jalan ini merupakan akses utama masyarakat menuju permukiman dan lahan pertanian, sehingga perlu segera dilakukan peningkatan jalan melalui rabat beton atau paving block guna meningkatkan aksesibilitas, keselamatan, dan perekonomian masyarakat.	Jl. Pengairan (300 m), Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	300	M	492,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
142	HASNAWATI TOAHA, SE	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Operasi dan Pemeliharaan Saluran Irigazi	Lingkungan Bilokka dan Lingkungan Maroangin, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
143	RAMLI, S.I.P	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Pinggiran sungai Salokarajae, Desa Sumpang Mango saat ini mengalami longsor yang cukup parah akibat tergerus aliran air, terutama pada saat musim hujan. Kondisi tebing sungai menjadi labil, tanah runtuh, dan sebagian badan tanah sudah amblas mendekati pemukiman serta lahan milik warga.	Dusun I Katillang Desa Sumpang Mango, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	90,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
144	rismaldy. S.M	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Jembatan gantung penghubung antara desa salobukkang dan desa bolabulu, memerlukan jembatan permament	Jl. Andi Deddang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
145	ANAS ALIMIE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Kondisi jalan lingkungan masih berupa tanah, rusak, dan tidak layak dilalui terutama saat musim hujan	Jl. Usaha Tani (Belakang SMK 1 Pangsid) 600 m, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	600	M	984,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
146	TUSRI HADI	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Pembangunan leaning saluran pembuang untuk mencegah banjir dipemukiman	Dusun Kessi Pute, Kab. Sidenreng Rappang , Kab. Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
147	hasbullah.s	Perlu Peningkatan dan Penyediaan Sarana Sanitasi	Jamban Keluarga	Dusun Bingkulu, Dusun Bapangi, dan Dusun Padaelo, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lutang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	50	Sr	750,000,000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
148	hasbullah.s	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Dusun Bingkulu, Dusun Bapangi dan Dusun Padaelo, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	20	Unit	500,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
149	Desa Talumae	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Pembangunan Drainase di Dusun 3 Padaelo	Dusun 3 Padaelo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
150	DEWI SRIWAHYUNI	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Betonisasi Jalan Poros Anabannae - Lasiwala	Desa Anabannae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
151	NURHIKMAH	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Banyak ruas jalan mengalami kerusakan akibat sistem drainase yang tidak berfungsi optimal. Genangan dan banjir sering terjadi saat hujan, mempercepat kerusakan perkerasan, mengganggu lalu lintas, dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kondisi ini menurunkan aksesibilitas, meningkatkan biaya perawatan, serta menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik, sehingga diperlukan penanganan terpadu perbaikan jalan dan drainase.	DUSUN II LARUA AREAL PERKEBUNAN CARAMELE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
152	DEWI SRIWAHYUNI	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Betonisasi Jalan Poros Anabannae - Otting	Desa Anabannae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
153	NURHIKMAH	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Kondisi jalan lingkungan masih banyak yang belum memadai, berupa tanah atau perkerasan rusak, sehingga sulit dilalui terutama saat hujan. Akses warga, layanan darurat, dan aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Permukaan jalan tidak rata, berlumpur, dan cepat rusak. Diperlukan pembangunan jalan lingkungan melalui rabat beton dan pemasangan paving block untuk meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, serta kualitas lingkungan permukiman.	DESA TEPPO (JALAN ADAT BUTTUE), Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,312,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
154	DEWI SRIWAHYUNI	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Penggerukan/Normalisasi Sungai	Dusun II Ponrawe Desa Anabannae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Normalisasi/Restorasi Sungai
155	ASRUL	Perlu Penyediaan Sarana Jaringan Air Minum Perpipaan	dibutuhkan pengeboran sumur air bersih untuk kebutuhan air minum di dusun VI Kampung Baru	Dusun VI Kampung Baru, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Paket	455,000,000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
156	NURHIKMAH	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Kualitas sarana dan prasarana pendidikan masih belum merata, ditandai kondisi bangunan rusak, keterbatasan ruang belajar, dan utilitas pendukung yang tidak memadai. Hal ini menghambat proses pembelajaran, menurunkan kenyamanan dan keselamatan, serta membatasi akses peserta didik. Diperlukan peningkatan kualitas fasilitas, utilitas, dan lingkungan pendidikan guna mendukung layanan pendidikan yang inklusif, aman, dan bermutu.	DESA TEPPO, SD NEGERI 3 MASSEPE & SD NEGERI 5 MASSEPE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	43	M2	185,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
157	ASRUL	Perlu Penyediaan Sarana Jaringan Air Minum Perpipaan	Dibutuhkan pengeboran sumur air bersih di dusun II Kannung untuk kebutuhan air minum	Dusun II Kannung, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Paket	455,000,000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
158	ASRUL	Perlu Penyediaan Sarana Jaringan Air Minum Perpipaan	Dibutuhkan pengeboran sumur air bersih di dusun I Bola Bulu untuk kebutuhan air minum	Dusun I Bola Bulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Paket	455,000,000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
159	Desa Damai	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	pembangunan drainase sepanjang jalan Desa sepanjang 4 km	dusun I,Dusun II, Dusun IIi, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	4	Km	6,680,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
160	RUSMIN MALIK, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Rehabilitas Ruang Kelas SMP Neg. 4 Panca Rijang	SMP Neg. 4 Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	43	M2	145,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
161	Ario	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Pembangunan saluran irigasi sekunder dan tersier	Dusun II Makkoring, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
162	MASNAH SP	Perlu Penyediaan Sarana Jaringan Air Minum Perpipaan	Karna Kurangnya ketersedian Air bersih Di Desa Mattirotasi sehingga di perlukan saran jarigan air bersih	Dusun I Kmp baru, Dusun II Pabbaresseng, Dusun III kamirie , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Paket	455,000,000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
163	SYAHIDA NAZAL KIFARI	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Saat Ini SD 13 Batu dan SD 3 Belawae mengalami keterbatasan ruang guru yang tidak sebanding dngan jumlah pendidik, kondisin tersebut menyebabkan aktivitas guru menjadi kurang nyaman	Dusun I Lombo dan Dusun II Awotara Desa Lombo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	47	M	30,000,000	Pembangunan Ruang Kelas Baru
164	SYAHIDA NAZAL KIFARI	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	kondisi pagar puskesmas pembantu (Pustu) saat ini sdh tidak layak, dan beberapa bagian mengalami kerusakan	Dusun II Awotara Desa Lombo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Paket	50,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya



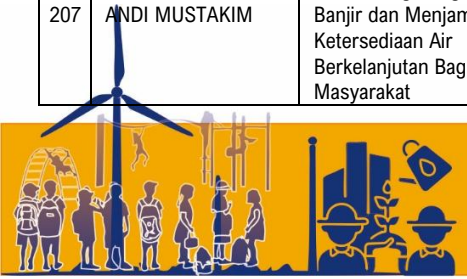
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
165	SYAHIDA NAZAL KIFARI	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	kondisi puskemas pembantu (pustu)saat ini masih belum optimal dalam menunjang pelayanan kesehatan masyrakat . beberapa permasalahn yang dihadapi antara lain, keterbatasan saranan dan prasarana kondisi bangunan mulai rusak.serta kurangnya fasilitas pendukung pelynan.	Dusun II Awotara Desa Lombo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Unit	450,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
166	Ernawati daming,S,Sos	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Tidak adanya saluran air sehingga saat musim hujan air masuk di Pemukimandan perkampungan	Lingk.Cilellang dan Lingk.Orai Salo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	300	M	501,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
167	hasnawati	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	apabila hujan, air tergenang sehingga menyebabkan banjir di depan halaman kelas	Lingk II Rijang Benteng (UPT SD Negeri 1 Wette'e), Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	325	M2	100,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
168	ANUGRAH SALEH	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Pembangunan Rabat Beton	jln. Andi Cammi, Dusun I dan Dusun II, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
169	CITRA HANDAYANI	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Pembangunan Jembatan Kembar Kaboe	Kaboe Dusun Tippulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
170	ANUGRAH SALEH	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Pembangunan Jembatan Permanen	Dusun II, Sebelah Selatan Pintu Air dan Drainase Perbatasan Arawa dengan Ciro-ciroe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
171	Mukhsanah	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	tidak adanya brojong sungai	Jl. Harapan dan Jl. Lasinrang (belakang kuburan), Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Pembangunan Tanggul Sungai
172	Mukhsanah	Banyaknya Timbulan Sampah yang Belum Tertangani sehingga Membutuhkan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Tidak tersedianya sarana TPS 3R berupa motor,bak kontainer dan mobil sampah	TPS 3R Jl. Lasinrang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Unit	650,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
173	DARMAWATI	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Pembangunan jembatan yang menghubungkan kelurahan manisa dengan kelurahan bangkai	Lingk. talumae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
174	DARMAWATI	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	pembangunan dekker perbatasan jl.poros baranti carawali	Lingk. Talumae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Titik	30,000,000	Pembangunan Jembatan
175	DARMAWATI	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	peralatan pemeliharaan lapangan sepak bola manisa	Kelurahan manisa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	Paket	100,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
176	Risno	Peningkatan Daya Tarik, Kenyamanan, dan Aksesibilitas Destinasi Wisata Potensial	masih kurangnya fasilitas ditempat wisata sehingga membutuhkan Pembangunan/penataan tempat wisata	Dusun V Daun Parue, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	Paket	150,000,000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
177	WARDANA, S.M	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Rabat Beton Jalan Losi-losie yang menghubungkan Desa Bila dan Desa Sogi Kab Wajo butuh perbaikan karena kondisi jalan rusak sepanjang 4 Km	Dusun II Pallae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	4	Km	6,560,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
178	PALLAWAGAU	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Peningkatan Kualitas Drainase, Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan poros Otting Lancirang	Dusun I Otting, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
179	SURIANTO, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Perlunya pengerukan dan pembongkaran jembatan sepanjang jalan skunder Talumae	Talumae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
180	ABDUL RAZAK	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Pembangunan jembatan permanen ukuran 6x5 meter penghubung Dusun I, II dan III	Dusun I, II ,III, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
181	KARTONO, S. Pd. I	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Rehabilitasi Bendungan	Dusun I Pakkasaloe Dan Dusun II Copposulureng Desa Cenrana , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Rehabilitasi Embung

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
182	ANDI HARUNA ,S.IP	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Jalan Poros Lainungan ke Mattirotasi yang Berlubang sehingga banyak yang menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas	Dusun II Makkadae Desa Lainungan, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	3,285,000,000	Pembangunan Jalan
183	H. ABDULLAH	Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui Peningkatan Sarana Prasarana Dasar, Penguatan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, dan Penyediaan Akses Air Bersih serta Sanitasi Layak	pembangunan Peningkatan Lanjutan Rabat Baton Jalan Poros Bila Riase-Lagading	Dusun 1,2,3, 4 Desa Lagading, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	M	820,000,000	Pembangunan Jalan
184	H. ABDULLAH	Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui Peningkatan Sarana Prasarana Dasar, Penguatan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, dan Penyediaan Akses Air Bersih serta Sanitasi Layak	pembangunan Penghubung Jembatan Mallanrang - Cabbanreng	Dusun 1, Desa Lagading , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jalan
185	H. ABDULLAH	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	pembangunan drainase jalan poros Lagading- Bila Riase	Dusun 4 Bukkanyuara, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	M	835,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
186	Jamaluddin, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	jalan yang rusak memerlukan pembanguna rabat beton	lingkungan 3 wala, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,312,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
187	Jamaluddin, SE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	jalan yang rusak sehingga perlunya pembuatan]drainase di pinggir jalan	lingkungan 1 barukku, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
188	ARWANG, SE., M.AP	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Rehabilitasi Pagar sekolah yang sudah tidak memadai	UPT SDN 1 Macorawalie , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	60	M2	100,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
189	Jamaluddin, SE	Perlu Penyediaan Sarana Jaringan Air Minum Perpipaan	minimnya persedian air bersih sehingga perlunya pembuatan bak air bersih	kelurahan batu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Paket	455,000,000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
190	KASRI,S.Sos	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Air hujan tidak mengalir, menggenangi badan jalan seperti kolam.	Depan Mesjid Al-Ikhlas Lingkungan II, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
191	KASRI,S.Sos	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Jalan tanah atau kerikil tanpa rabat beton sering kali sulit dilalui, terutama saat musim hujan, menjadi berlumpur dan bahkan tidak dapat diakses oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.	Depan Mesjid Al - Ikhlas, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
192	Ir. SUARDI ROSI	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	pengerasan jalan Paraja - Karebosi dan Pengerasan Jalan Kalempang - Baringin	Dusun III Paraja, Dusun I Kalempang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	3,285,000,000	Pembangunan Jalan
193	Ir. SUARDI ROSI	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Pembangunan Jembatan Salu Pabannea dan Pembangunan Jembatan Salu Lambata	Dusun III Paraja, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
194	Ir. SUARDI ROSI	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Pembangunan Paving Blok SD 3 Betao	Dusun II Kalempang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	200	M2	60,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
195	H. JAMALUDDIN, S. Hi	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Masih terdapat rumah warga yang tidak layak huni, dengan kondisi dinding rapuh, atap bocor, dan lantai tanah, sehingga tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bagi penghuninya.	Desa Sumpang Mango, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	Unit	250,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
196	DAYADI, S. IP., M. AP	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	perlunya pembangunan pagar belakang dan samping sekolah pada UPT SDN 6 Kulo	dusun salo indru, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80	M	120,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
197	LA RANRU AKKAS, S, Sos	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Talud Sungai kondisinya rendah sehingga tanah mudah masuk di saluran air dan menyebabkan saluaran tersumbat dan dangkal.	Lingkungan I Kanyuara Kelurahan Kanyuara, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Normalisasi/Restorasi Sungai
198	DAYADI, S. IP., M. AP	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	sebagian ruas jalan belum dilengkapi dengan drainase sehingga air hujan menggenang dan mengganggu aktivitas masyarakat	jln. andi ngampo dusun salo indru, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	334,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
199	H. BAHARUDDIN, SE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Perlu Dilakukan Cor Beton Karena Jalanan Sudah Sangat Rusak Berat	Jalan H. Mustamin Desa Tanete (Depan Poskesdes), Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
200	JUMARDIN, A. Md	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Jalan Penghubung antara Desa Botto dan Desa Bila Riase rusak parah dan butuh perbaikan secepatnay (Rabat Beton 1 Km)	Dusun VI Bendung, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,640,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
201	H. BAHARUDDIN, SE	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Perlunya dilakukan Penimbunan Lapangan Sepak Bola Karena Kondisi Sudah Rusak Berat	Jl. H. Mustamin Dusun III Desa Tanete, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	Paket	100,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
202	H. ALIMUDDIN	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Pembangunan pagar SLTP 6 Dua pitue	Dusun IV Salo callu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80	M	120,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
203	JUMARDIN, A. Md	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	masih terdapat kerusakan pada jaringan irigasi pada daerah irigasi Bendung (Pengerukan Normalisasi 15 Km)	Dusun V Toddang Asa-Dusun VI Bendung-Dusun II Uloe-Dusun II Uloe-Dusun III Labekkang-Dusun VII Malongkae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Normalisasi/Restorasi Sungai
204	H. RUSTAM BENTENG	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Perlunya peningkatan kualitas prasarana jalan poros Lise - Corawali dikarenakan banyaknya jalan yang berlubang sehingga sering terjadinya kecelakaan.	Jalan Poros Desa Lise - Lamenge (Desa Corawali), Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	3,285,000,000	Pembangunan Jalan
205	H. BAHARUDDIN, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Pembangunan jembatan ini bertujuan untuk memutus rantai distribusi yang mahal dan menghilangkan hambatan logistik bagi petani.	Dusun III Desa Tanete Perbatasan Kelurahan Rijang Pittu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
206	JUMARDIN, A. Md	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Keamanan Sekolah dan siswa yang belum memadai (Pembangunan Pagar Sekolah UPT SD 10 Bila 424 Meter)	Dusun I Botto, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	424	M	250,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
207	ANDI MUSTAKIM	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Pembangunan Talud Jalan Desa di Dusun V sepanjang 1 Km	Dusun V, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Pembangunan Tanggul Sungai



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
208	H. RUSTAM BENTENG	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Belum adanya Bronjong di aliran sungai di pemukiman sehingga sisi samping sungai selalu terkikis dan mengakibatkan banjir	dusun amessangeng dekat rumah H. Nawir, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Pembangunan Tanggul Sungai
209	AMIRUDDIN,S.Pt	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Perlunya perbaikan jalan penghubung antar desa aka-akae dengan desa talumae karena anak sekolah yang mau kesekolah tidak bisa lewat apabila sudah hujan	Dusun II Kampung Baru, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	Km	3,280,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
210	MUHAMMAD THAMRIN, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	pembangunan pagar dan paving blok pada SMP N 2 watang sidenreng	dusun II salobompong, jl poros lasiwala, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80	M2	120,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
211	ABDUL MAJID, SE., M. Si	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	NORMALISASI SALURAN PEMBUANGAN/LENING SEPANJANG SUNGAI JL POROS PANGKAJENE-RAPPANG(JL MALUKU SAMPAI PERBATASAN KADIDI)	DUSUN II LABEMPA, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Normalisasi/Restorasi Sungai
212	Hj. NURHAYATI, S. Sos	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Perlunya peningkatan kualitas prasarana jalan	JL. SUNGAI LAPEGO LK I EMPAGAE , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	3,285,000,000	Pembangunan Jalan
213	IWAN DARMAWAN, SE	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Sarana Prasarana Pendukung Fasilitas Kesehatan.	JL. Ianto Dg Pasewang, Kelurahan Pangkajene., Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	10	Unit	100,000,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
214	MUH.YASIR	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Rabat Beton Jalan poros desa (1200 M) Jalan yang rusak Parah yang dapat menghambat kegiatan ekonomi dan sering terjadi kecelakaan	Jl.Dg.Matekke Dusun I Belawae, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1.2	Km	1,574,400,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
215	SUARDI, S.Pd, M.Si	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Seringnya terjadi longsor Di pinggir sungai pada saat banjir sehingga membutuhkan pembagunan bronjong	Dusun I Betao, Dusun II Cempa Dan Dusun III Padanglampe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Pembangunan Tanggul Sungai

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
216	MUHAMMAD THAMRIN, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	banyaknya kerusakan jalan di jl perjuangan (jl poros akakae)	jl poros akakae desa damai, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	Meter	656,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
217	AMIRUDDIN,S.Pt	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Rusaknya bangunan sekolah sd 7 watsid khusunya ruangan kelas yang sudah mau roboh dan menyebabkan siswa dan guru was-was untuk belajar dan mengajar	Di Dusun II kampung Baru, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	44	M2	120,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
218	SULAEMAN MALLE	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Tanggul sungai tergerus atau rusak	DUSUN IV LASAMPI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Pembangunan Tanggul Sungai
219	ANDHY KUSUMAATMAJA, SE., M. Si	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Diperlukan peningkatan pagar pada UPT SD Negeri 20 Pangsid sepanjang 80 Meter dikarenakan kondisi pagar pada sekolah terbilang kurang baik. Maka dari itu diperlukan peningkatan dengan tujuan untuk kenyamanan dan keamanan baik pendidik, non pendidik ataupun peserta didik	SD Negeri 20 Pangsid Kelurahan Majjelling Wattang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	20	M	50,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
220	ANDI MUH. ALIMUDDIN	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Lapangan sepak bola tidak bisa digunakan karena kondisi lapangan yang kering, keras dan berlubang sehingga dapat menyebabkan cedera.	DSN II LAMENGE, DESA CORAWALI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	Paket	150,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
221	SUARDI, S.Pd, M.Si	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	bayaknya badan jalan yang rusak akibat meluapnya air selokan di jalan melingkar sekolah akibat tidak adanya dranase	Dusun V Daun Parue, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	M	835,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
222	FIRMAN, SE., M. AP	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Penambahan ketinggian pagar SD 3 dan SD 19 Pangkajene di 3 sisi (utara,selatan dan barat)	Jl. Korban 40.000 Jiwa, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	20	M	56,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
223	FIRMAN, SE., M. AP	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Pembangunan Jembatan Hewan	Lingkungan II Majjelling, Perbatasan Kel. Majjelling dan Majjelling Wattang, sebelah utara mini soccer, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
224	ANDI RADENG PABICARA, S. AP	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Pengerukan Jl. Lakaso	Jl. Lakaso Kelurahan Benteng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
225	H. ALIMUDDIN	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Pengerasan jalan salihi	Dusun 1 Mampise, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	300	M	150,000,000	Rehabilitasi Jalan
226	SURIANTO, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Perlunya Pembangunan Pagar di Belakang SD Negeri 7 Pangkajene	Jl. Badak, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80	M	120,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
227	MUH.YASIR	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bedah rumah (5 Unit) beberapa masyarakat desa yang masi memiliki hunian yang tidak layak dan juga beberapa unut rumah yang rusak	Dusun III Pakkadingngereng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	Unit	125,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
228	RAMLI PAKI	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Pembangunan rabat beton jalan Bukit Wisata Angin Punjabu demi kenyamanan dan aksibilitas Destinasi Wisata Potensial	Dusun I Jambu Jambu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
229	ANDHY KUSUMAATMAJA, SE., M. Si	Peningkatan Peran dan Kemandirian Kelembagaan Masyarakat dan Lembaga Adat dalam Pembangunan Lokal	Melihat kondisi Pustu Kelurahan yang kurang memadai tepatnya pada SDM, maka dari itu diperlukan Kader Pustu ILP dan Perawat Pustu ILP dengan tujuan memaksimalkan pemeriksaan kesehatan	Pustu ILP, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	2	Orang	5,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
230	NAMING PALLAJARENG	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Saluran air dangkal dan sering mengakibatkan banjir sehingga membutuhkan pembangunan Duicker di Jl. Mappunna	Jl. Mappunna, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	30,000,000	Pembangunan Jembatan
231	RAMLI PAKI	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rehab Rumah tidak layak huni untuk menigkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Dusun I, II, dan III, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	20	Unit	500,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
232	RAMLI PAKI	Perlu Penyediaan Sarana Jaringan Air Minum Perpipaan	Pembangunan SPAM air untuk sanitasi air bersih demi ketersedianya air bersih bagi masyarakat	Dusun I Jambu Jambu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Paket	455,000,000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
233	NAMING PALLAJARENG	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Pembangunan Talud Saluran Pembuangan perbatasan Sipodeceng Passeno	Dusun Padacenga, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	800,000,000	Pembangunan Jalan
234	H. ALIMUDDIN	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Peningkatan Lapangan Dusun I Mampise	Dusun I Mampise, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	Paket	100,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
235	ABDUL RAZAK	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Peningkatan kualitas jalan permukiman	DSN I LASIWALA, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	3,285,000,000	Pembangunan Jalan
236	BAHAR	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	untuk menghubungkan dua Desa antar desa mattirotasi dan buae	Dusun II Pabbaresseng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
237	ILYAS H., S. IP	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Hewan ternak berkeliaran di Pakarangan Sekolah	SMP N 4 BARANTI, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	50	M	75,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
238	RANO, SH	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Banyaknya Sampah yang Berserakan di dalam area Sekolah karena tidak Adanya Tempat sampah baik dari SDN 1 Lainungan, SDN 3 Lainungan serta TK PGRI Makkadae Desa Lainungan	Dusun I Kulua Desa Lainungan, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5	Paket	50,000,000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
239	SUDARMIN S., S.Pd	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	KONDISI JALAN LAWAWOI KE ALITTA SUDAH RUSAK DAN BERLUBANG	JL ALITTA KELURAHAN LAWAWOI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	2	Km	6,570,000,000	Pembangunan Jalan
240	RUSMIN MALIK, SE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Pembangunan Drainase di Lingkungan Makkawarue dan Lingkungan Cenrana Kel. Kadidi	Kel. Kadidi, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,670,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
241	ABDULLAH PABA, SIP	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Rabat Jalan SAMPING SD, SMP SATAP 9 BATU DUSUN VI LARIU DESA TANA TORO 1.200 METER	Dusun 6 Lariu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1200	M	1,968,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
242	HJ.YUSMIATI. S. Pt	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Sering terjadi banjir dan air menggenang saat curah hujan tinggi, banjir juga menyebabkan jalanan rusak parah di Jl. Pasar Baru sehingga di butuhkan saluran Drainase	Jl. Pasar Baru, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	M	835,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
243	SUDARMIN	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Perlu Pembangunan Jembatan Jalan Larompong	JL. Larompong, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
244	HJ.YUSMIATI. S. Pt	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	dibutuhkannya pembangunan Rabat Beton di Jl. Pasar Baru karena jalanannya sudah rusak parah sehingga kurang aman bagi pengendara umtuk lewat dan juga saat curah hujan tinggi air sering menggenang karena jalanan banyak yang berlubang	Jl. Pasar Baru, Kelurahan lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	328,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
245	SUHARDI	Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana melalui Edukasi, Penguatan Kapasitas, dan Dukungan Sarana Tanggap Bencana	pembangunan tanggul/talud (1500 M) terkikisnya pinggiran sungai didekat area pemukiman masyarakat, yang mengakibatkan luapan airr sungai ketika banjir	Dusun I Belawae, Kab. Sidenreng Rappang, Pitu Raise, Belawae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	90,000,000	Pembangunan Tanggul Sungai
246	ZAINAL	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Kerusakan Infrastruktur jalan Menyebabkan Luban atau pengikisan jalan	Dusun 1 Penanong, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	3,285,000,000	Pembangunan Jalan
247	HJ. RUSNAH TAPPA	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cekdam Jawi-Jawi	Dusun Bapangi, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
248	DONI PRATIWI TIWU, SE., MM	Perlu Peningkatan dan Penyediaan Sarana Sanitasi	Masih Kurangnya Jambang Keluarga yang mengakibatkan Masyarakat sering Buang Air Besar Sembarangan	Lingkungan I dan Lingkungan II, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	50	Sr	750,000,000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
249	SUDARMIN	Banyaknya Timbulan Sampah yang Belum Tertangani sehingga Membutuhkan Sarana dan Prasarana Pengangkutan Sampah	Perlu Pengadaan Angkutan Sampah Roda Tiga	Dusun I, II, dan III, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Unit	85,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
250	SUDARMIN S., S.Pd	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	PERLU ADANYA DUICKER PENGHUBUNG ANTARA KELURAHAN LAWAWOI DAN BANGKAI	JL. JEND SUDIRMAN KELURAHAN LAWAWOI KECAMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	30,000,000	Pembangunan Jembatan
251	EDI, S. IP	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Pengerukan saluran pembuangan Petta Esang	Dusun II Amessangeng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Normalisasi/Restorasi Sungai
252	SUDARMIN	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Perlu Pengadaan Pintu Air Bendungan Teppo'E	Jl. Bendungan Dusun II, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
253	BABAR AKKAS, SE.	Perlu Peningkatan dan Penyediaan Sarana Sanitasi	Masih kurangnya sanitasi sehingga perlu pembangunan sarana jamban yang layak bagi keluarga berisiko stunting	kelurahan arawa kecamatan watang pulu, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	50	Sr	750,000,000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
254	RIJAL MU''MINSYAH, S.Pd	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Talud Sungai Dengeng-Dengeng Mulai terkikis aliran Sungai (Rehabilitasi Talud Sungai Dengeng-Dengeng)	Dusun I Dengeng-Dengeng Desa Dengeng-Dengeng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Pembangunan Tanggul Sungai
255	SAULI, S.Sos	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	perlunya rehabilitasi pagar , penambahan paving Blok dan timbunan di Sd 14 Tanrutedong , karena setiap turun hujan sekolah tersebut selalu tergenang air	Jl.Andi Deddang, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80	M	120,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
256	RIJAL MU''MINSYAH, S.Pd	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Jalan Poros Dengeng-Dengeng Bulu Alau mengalami kerusakan parah (Pembangunan Jalan poros Dengeng-Dengeng Bulu Alau Sepanjang 5 kilometer)	Desa Dengeng-Dengeng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	5	Km	16,425,000,000	Pembangunan Jalan

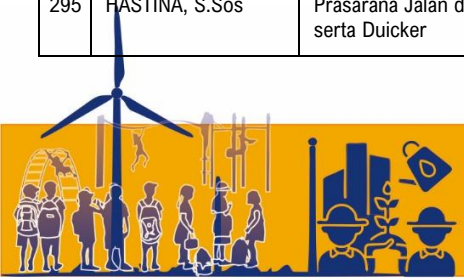
No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
257	RIJAL MU''MINSYAH, S.Pd	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Jembatan penghubung jalan Bulu Alau ke Mattirowali menglami kerusakan (Rehabilitasi Jembatan Salo Cina)	Dusun II Bulu Alau Desa Dengeng-Dengeng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
258	EGY SUNARDI NURDIN, S.Pd	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Pembangunan Bak Induk Air Bersih	Jl poros leppangeng Dusun 1 Desa Compong, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Paket	455,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
259	SAULI, S.Sos	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Rehabilitasi bangunan dan paving blok di halaman puskesmas pembantu (pustu)	Jl. Poros Dongi, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Unit	450,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
260	WAWAN GUNAWAN SAIN	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	tidak adanya pagar di sekolah sehingga rentang terhadap pencurian serta keamanan anak sekolah	SDN 3 TIMORENG PANUA DUSUN LANRANG, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80	M	120,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
261	ZAINAL	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Tidak Adanya Jembatan Mengakibatkan Akses Terputus sehingga Hasil Panen tidak dapat di angkut Dengan Cepat dan efisien	Dusun 2 Cipo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
262	ZAINAL	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Cekdam dipenuhi Rumput liar dan kangkung Mengakibatkan Pendangkalan	Dusun 1 Penanong, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Normalisasi/Restorasi Sungai
263	EGY SUNARDI NURDIN, S.Pd	Rehabilitasi Masyarakat Rentan sebagai Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Dusun 4 Padang Lampe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS SOSIAL	1	Orang	20,000,000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
264	ABDUL MAJID, SE., M. Si	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	DESA KANIE, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	10	Unit	250,000,000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
265	ANDI SURYA PRAJA HADININGRAT, SH., M. Si	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Jembatan Hewan Penghubung Desa Sereang dengna Kel Majelling Wattang	Dusun I Sereang , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
266	ANDI SURYA PRAJA HADININGRAT, SH., M. Si	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Penggalian Gendongan	Dusun III Pakenya , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	50,000,000	Normalisasi/Restorasi Sungai
267	ANDI SURYA PRAJA HADININGRAT, SH., M. Si	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Lening Tersier Samping Sawah Pak Fajar	Dusun II Salopadang , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
268	JUFRI,S.IP	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	KONDISI ASPAL RUSAK BERAT SEHINGGA MENGGANGU AKTIVITAS WARGA SEHINGGA PERLU PERBAIKAN JALAN KARENA JALAN TERSEBUT MERUPAKAN JALAN UTAMA BAGI WARGA UNTUK BEKERJA DAN MENGANGUT HASIL PERTANIAN DENGAN PERKIRAAN VOLUME 4,6 KM	DUSUN I LOKABATUE, DESA AJUBISSUE, Kab. Sidenreng Rappang , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	4.6	Km	16,100,000,000	Rehabilitasi Jalan
269	JUFRI,S.IP	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	TIDAK ADANYA PAGAR PEMBATAS ANTARA PEMUKIMAN WARGA DAN SEKOLAH SEHINGGA MEMBUAT AKTIVITAS BELAJAR MURID TERGANGGU SEHINGGA PERLUNYA PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SD N 7 OTTING DENGAN PERKIRAAN VOLUME 288 METER YANG BERLOKASI DI DUSUN II AJUBISSUE, DESA AJUBISSUE KEC. PITU RIAWA	SD N 7 OTTING DUSUN II AJUBISSUE DESA AJUBISSUE, Kab. Sidenreng Rappang , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	288	M	250,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
270	JUFRI,S.IP	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	RUSAKNYA PAGAR SEKOLAH SD NEGERI 8 OTTING SEHINGGA AKTIVITAS BELAJAR MURID TERGANGGU PERKIRAAN VOLUME 24 X 47 METER/SEGI	SD N 8 OTTING DUSUN I LOKABATUE DESA AJUBISSUE, Kab. Sidenreng Rappang , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	47	M	70,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
271	JUFRI,S.IP	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	RUSAKNYA AKSES JEMBATAN PENGHUBUNG ANTARA DESA AJUBISSUE DAN DESA LASIWALA SEHINGGA PERLUNYA PEMBANGUNAN JEMBATAN DENGAN PERKIRAAN VOLUME 4 X 12 METER LOKASI DI DUSUN I LOKABATUE DESA AJUBISSUE	DUSUN I LOKABATUE DESA AJUBISSUE, Kab. Sidenreng Rappang , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
272	IWAN DARMAWAN, SE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Peningkatan Kualitas Drainase, Duiker, Dan Rabat Beton.	Jl. Andi Makkasau, Ling. III, Kab. Sidenreng Rappang, Maritengngae, Pangkajene , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	365,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
273	ALIAS S. Pt	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Pembangunan Jembatan Permanen Salu Karondang	DSN III WALAWALA , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
274	ALIAS S. Pt	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Pembangunan Jembatan Permanen Salu Laburuk	DSN I BOLAPETTI , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
275	ALIAS S. Pt	Perlu Penyediaan Sarana Jaringan Air Minum Perpipaan	Bak Air Bersih	DSN V LENGKE , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Paket	455,000,000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
276	SYAMSUDDIN, S. IP	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Sarana dan Prasarana Pendukung Fasilitas Kesehatan	Pustu Dusun I Bulukonyi , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Unit	450,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
277	SIRAJUDDIN, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Pembangunan Jembatan Gantung Soddoe ke Labekkang Desa botto	Dusun V Bila Riase , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
278	SIRAJUDDIN, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Rabat Beton Jl. Uloe	Dusun IV Bila Riase , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,312,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
279	ANDI SUNGGU. SE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Peningkatan Kualitas Drainase	Jalan Pramuka , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	500	M	835,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
280	ANDI SUNGGU. SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Air tergenang halaman Kantor Camat diarea parkiran	Jalan Andi Cammi, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	300	Meter	390,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
281	ABDUL MALIK	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Jalanan berlubang dan banjir apabila musin hujan mengakibatkan trasportasi masyarakat dan petani tidak lancar (Pembangunan Rabat Beton Kalosi-Kampale)	Jalan M.Zain dan Jalan Wele, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,312,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
282	ASHAR SOSE, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Jalanan berlubang dan banjir apabila musin hujan mengakibatkan trasportasi masyarakat dan petani tidak lancar (Pembangunan Rabat Beton Kampale - Kalosi)	Jalan Langenra Dusun I Kampale, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,312,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
283	SURIANTO, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	sering terjadi banjir jadi perlunya pembuatan duicker dan drainase	Jalan Harimau, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	200	M	364,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
284	HAIRUDDIN, S. AB	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Halaman sekolah masih berupa tanah sehingga saat musim hujan menjadi becek dan licin, mengganggu aktivitas siswa sehingga dibutuhkan Paving Block SD Neg. 5	Jl. Nene Mallomo 180m2, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	180	M2	55,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
285	AMIRUDDIN,S.Pt	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Tidak adanya pagar di SD5 Watsid Sehingga Hewan seperti sapi Bisa masuk di lingkungan sekolah	Dusun I Aka-Aka Riase, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80	M	120,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
286	Hj. NURHAYATI, S. Sos	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	Kondisi gedung kantor kecamatan saat ini mengalami kerusakan dan penurunan fungsi pada beberapa bagian utama bangunan, sehingga kurang layak dan kurang optimal dalam mendukung pelayanan administrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pembangunan/rehabilitasi total gedung kantor kecamatan agar penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dapat berjalan lebih baik, aman, dan representatif.	Jl. Usman Jafar Nomor 10 (Poros Sengkang), Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	2,800,000,000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
287	Hj. ST. PARIDAH, SE	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	Perlunya Pembangunan bronjong sungai samping utara pesantren Alhasyimiyah Pajalele massepe sekitar panjang 100 meter x tinggi 3 meter untuk menahan tanggul dari pengikisan	samping utara pesantren Alhasyimiyah Pajalele, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Pembangunan Tanggul Sungai
288	Hj. ST. PARIDAH, SE	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Dibutuhkan pengadaan pengerasan jalan di sebelah utara jembatan menuju ke pemantingan supaya memperlancar transportasi warga	Utara jembatan Pajalele menuju Pemantingan, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,312,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
289	Desa Talumae	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Pembangunan Jembatan Dusun 2 Talumae	Dusun 2 talumae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
290	Desa Talumae	Pembangunan Jalan Lingkungan seperti Rabat Beton dan Pemasangan Paving Block	Penimbunan Jalan Perumahan tator	Dusun 2 talumae, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	1,312,000,000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
291	MUHAMMAD RUSLAN S., S. Sos	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	lanjutan pembangunan bronjong di bawah jembantan setinggi 5 meter panjang 20 meter (jembatan penghubung ke smp 2 tellu limpoe)	kelurahan Massepe, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Pembangunan Tanggul Sungai
292	HASNAWATI TOAHA, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	Pembangunan jembatan gantung bilokka menjadi jembatan permanen	Kel.bilokka, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
293	HASNAWATI TOAHA, SE	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	Perbaikan jalan poros bilokka ke wanio itu	Kel.bilokka , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	850,000,000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
294	IWAN DARMAWAN, SE	Perlunya Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana, serta Utilitas Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Peningkatan Kualitas Perbaikan Pagar	JL. EMMY SAELAN, SD 10 PANGSID, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	80	M	120,000,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
295	HASTINA, S.Sos	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	pembangunan jembatan permanen di belakang pasar wette'e yang saat ini jembatan Gantung untuk pengusulan jembatan Permanen	Kelurahan Wette'e , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan



No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
296	HASTINA, S.Sos	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	pembangunan Bronjong sepanjang sungai Kelurahan Bilokka	Kelurahan Wette'E , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
297	SALMIAH	Banyak Jalan yang Rusak dan Mengalami Banjir Akibat Drainase Buruk	perbaikan jalan prosos provinsi jalan poros Wette kelurahan Lajonga	Kelurahan Lajonga , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Km	3,285,000,000	Pembangunan Jalan
298	SALMIAH	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	pembangunan Bronjong sepanjang sungai Kelurahan Lajonga	Kelurahan Lajonga, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Pembangunan Tanggul Sungai
299	SYAMSUDDIN, S.Sos	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	pembanguna jembatan permanen di desa Wanio Timoreng	Desa Wanio Timoreng , Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	600,000,000	Pembangunan Jembatan
300	SYAMSUDDIN, S.Sos	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	pengusulan Bedah Rumah sebanyak 20 unit	desa Wanio Timoreng, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	20	Unit	1,000,000,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
301	HJ. MUSLIHAT, SE., M.AP	Penguatan Pembinaan dan Budaya Olahraga Masyarakat serta Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah secara Berkelanjungan	Perlunya Rehabilitasi atau Penataan Lapangan Andi Cammi (Pagar dan Jogging Track)	Lapangan Andi Cammi, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN	1	Paket	200,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
302	MUHAMMAD AZIQIN	Perlunya Peningkatan Kualitas Prasarana Jalan dan Jembatan serta Duicker	pembangunan jembatan permanen dusun Maniang salo desa Wanio	Desa Wanio, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT	1	Unit	700,000,000	Pembangunan Jembatan
303	MUHAMMAD AZIQIN	Perlunya Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mengurangi Risiko Banjir dan Menjamin Ketersediaan Air Berkelanjutan Bagi Masyarakat	pembangunan bronjong sepanjang sungai desa wanio	desa Wanio, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	1	Paket	70,000,000	Pembangunan Tanggul Sungai

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan Akhir	Volume	Satuan	Anggaran	Sub Kegiatan
304	HARYANTO	Perlunya Rehabilitasi atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Tidak Layak dan Tidak Memenuhi Standar Pelayanan	Perlunya Rehabilitasi Puskesmas (Kulo) karna bangunannya termasuk bangunan lama yang bangunannya lebih rendah dari bangunan baru, saluran air lebih rendah dari saluran air yang di depan puskesmas sehingga air merembes ke lokasi masyarakat.	Jln. Poros Kulo, Kab. Sidenreng Rappang	DINAS KESEHATAN	1	Unit	300,000,000 294,331,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas



Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah
Tahun 2025

BAPPEDA SIDRAP OFFICIAL

BAPPELITBANGDASIDRAP.ID

BAPPELITBANGDA.SIDRAPKAB.GO.ID